

**20
19**

LAPORAN TAHUNAN
Annual report

bankjatim

**“CAPTURING
OPPORTUNITIES TO
PROVIDE ADDED VALUES
TOWARDS SUSTAINABLE
EXCELLENT PERFORMANCE”**

Menjaring Peluang untuk Memberikan
Nilai Tambah Menuju Kinerja Terbaik
yang Berkelanjutan”

JATIM PRIORITAS



Ikhtisar Penyampaian Laporan Tahunan

SUMMARY OF ANNUAL REPORT

Penyusunan Laporan Tahunan 2019 Bank Jatim merujuk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai penyajian keterbukaan informasi yang harus disampaikan dalam Laporan Tahunan dan tidak menutup kemungkinan untuk mengungkapkan informasi penting terkait kinerja Bank Jatim.

The preparation of the 2019 Annual Report of Bank Jatim refers to the applicable provisions regarding the presentation of information disclosure, which must be submitted in an Annual Report book and does not rule out the possibility to disclose key information related to the performance of Bank Jatim.



Peraturan & Ketentuan Laporan Tahunan

REGULATIONS REGARDING ANNUAL REPORT

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 06/POJK.03/2016
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 06/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional
- *Kriteria Annual Report Awards*
- Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company
- Regulation of Financial Services Authority No. 29/POJK.04/2016 regarding Annual Report of Issuers or Public Companies
- Regulation of Financial Services Authority No. 32/POJK.03/2016 regarding Amendment to POJK No. 06/POJK.03/2016
- Regulation of Financial Services Authority No. 06/POJK.03/2015 regarding Transparency and Publication of Bank Reports
- Circular Letter of Financial Services Authority No. 30/POJK.04/2016 regarding Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies
- Circular Letter of Financial Services Authority No. 43/SEOJK.03/2016 regarding Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports
- Annual Report Award Criteria



Isi Laporan Tahunan

CONTENTS OF ANNUAL REPORT



INFORMASI UTAMA

Menyajikan informasi-informasi penting pada tahun buku dan menyajikan ikhtisar keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku

MAIN HIGHLIGHTS

Key information on Bank Jatim's performance in the relevant fiscal year and financial highlights in the form of comparison for the last 5 (five) fiscal years.



LAPORAN MANAJEMEN

Mengungkapkan informasi mengenai pengawasan dan penerapan kebijakan strategis serta pengelolaan bank, pencapaiannya pada tahun buku serta implementasi tata kelola perusahaan dari sudut pandang manajemen.

MANAGEMENT REPORT

Information on supervision and implementation of strategic policies in Bank Jatim, as well as the management of the Bank, achievements made during the relevant fiscal year, and the implementation of corporate governance from the management's perspectives.



PROFIL BANK

Memberikan informasi umum tentang Bank Jatim, jejak langkah, visi dan misi, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan Bank Jatim.

PROFILE OF THE BANK

General information on Bank Jatim's business, including milestones, vision and mission, and other information related to the Bank.



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Menyajikan informasi mengenai kinerja Bank Jatim dan analisisnya sepanjang tahun buku yang meliputi tinjauan makro ekonomi dan perbankan, pencapaian per segmen usaha, analisis atas kinerja keuangan, serta informasi-informasi terkait kinerja keuangan dan operasional lainnya.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Information on Bank Jatim's financial performance and analysis during the relevant fiscal year, covering the overview on macro economy and banking industry, achievements per business segment, analysis on financial performance, and other information related to financial and operational performances.



TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

Memberikan informasi mengenai aspek pendukung kinerja Bank Jatim yang meliputi sumber daya manusia, teknologi informasi dan aspek pendukung lainnya.

OVERVIEW ON BUSINESS SUPPORT

Information on the supporting aspects of Bank Jatim's performance, covering human resources, information technology, and other supporting aspects.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Menyajikan informasi mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang diimplementasikan Bank Jatim secara lengkap dan menyeluruh sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku.

CORPORATE GOVERNANCE

Information on the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at Bank Jatim in a comprehensive manner according to the applicable regulations and criteria.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Mengungkapkan kebijakan program dan kegiatan penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi bidang lingkungan; ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; pengembangan sosial kemasyarakatan; serta tanggung jawab kepada nasabah.

SOCIAL RESPONSIBILITY

Disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) policies, programs, and activities, in the fields of environment, employment, occupational health and safety, social community development, and responsibility to customers.



Sanggahan

DISCLAIMER

Laporan tahunan ini memuat pernyataan operasional, keuangan, proyeksi dan rencana, penerapan strategi dan kebijakan, serta tujuan Bank Jatim, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif tersebut dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi yang akan datang di lingkungan bisnis di mana bank menjalankan kegiatan usaha. Bank Jatim tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

This annual report contains statements of operations and finance, projections and plans, implementation of strategies and policies, as well as the objectives of Bank Jatim which are classified as forward-looking statements in the implementation of the prevailing laws, excluding historical matters. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors which can cause actual results to differ materially from expected results.

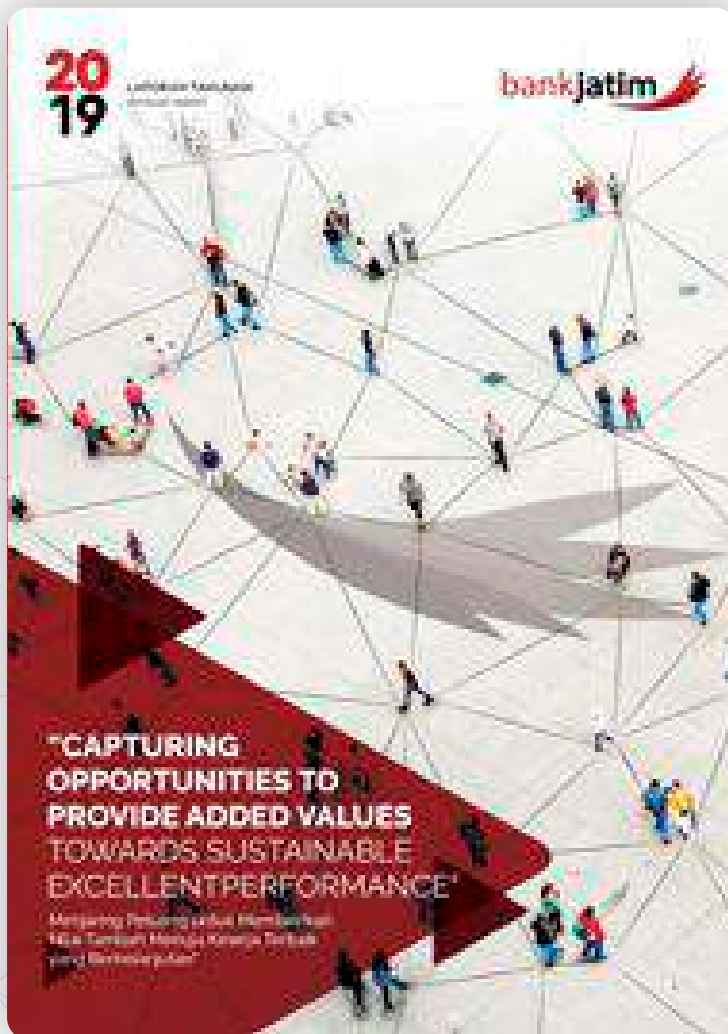
Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Bank, and the business environment where the Bank conducts business. Bank Jatim shall have no obligation to guarantee that all valid documents presented will bring specific results as expected.

Penjelasan Tema

THEME EXPLANATION

**"Capturing Opportunities to Provide Added Values
Towards Sustainable Excellent Performance"**

**"Menjaring Peluang untuk Memberikan Nilai Tambah
Menuju Kinerja Terbaik yang Berkelanjutan"**



Setelah Bank Jatim mampu memaksimalkan Kinerja dan meningkatkan Sinergi Berkelanjutan menuju Transformasi Digital pada 2018, kini Bank Jatim mengangkat tema "Menjaring Peluang untuk Memberikan Nilai Tambah Menuju Kinerja Terbaik yang Berkelanjutan". Tema tersebut dianalogikan dengan garis yang saling terhubung, hal ini menggambarkan proses digitalisasi bank di setiap operasionalisasi perbankan.

Sementara blok merah berbentuk panah merepresentasikan komitmen Bank Jatim mewujudkan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan.

After being able to maximize performance and enhance sustainable synergy towards digital transformation in 2018, Bank Jatim now has the theme "Capturing Opportunities to Provide Added Values towards Sustainable Excellent Performance". This theme is analogous to the interconnected lines which illustrate the digitalization process of the Bank in each of its operations.

Meanwhile, the red arrow-shaped block represents the commitment of Bank Jatim to achieve performance growth in a sustainable manner.

Kesinambungan Tema

THEME CONTINUITY



2015

**MENGAJAR SECARA LOKAL
TERHUBUNG SECARA GLOBAL**

**LOCALLY ROOTED
GLOBALLY CONNECTED**

Sebagai Bank yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa Timur, Bank Jatim terus berusaha menjalankan operasi bisnis dengan selalu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kerjasama yang harmonis dengan pemangku kepentingan serta menjaga kepercayaan nasabah. Seiring dengan berjalannya waktu, Bank Jatim terus berubah dan meningkatkan inovasi yang semakin kompetitif.

As a Bank that deep-entrenched to the East Java community, Bank Jatim continues to commence business operation by always implementing good corporate governance principle, a harmonious partnership with stakeholders as well as preserving customer's trust. As time goes by, Bank Jatim continuously evolves and increases innovation amidst fierce competition.



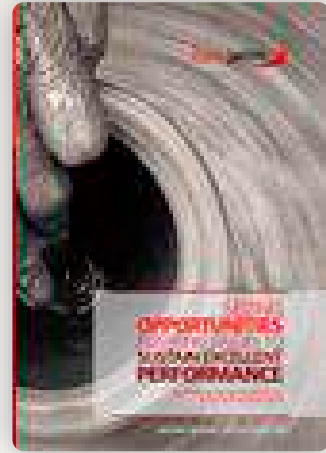
2016

**MENDUKUNG PERTUMBUHAN
DI LINTAS PASAR KAMI &
MEMBERDAYAKAN BISNIS
POTENSIAL BARU**

**SUPPORT THE GROWTH ACROSS
OUR MARKETS & EMPOWERING
NEW POTENTIAL BUSINESS**

Berbagai program strategis telah direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut yakni peningkatan dan optimalisasi layanan baik yang bersinggungan langsung dengan nasabah melalui diversifikasi produk yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan tingkat kebutuhan perbankan yang beragam, maupun peningkatan layanan elektronik untuk meningkatkan *Level of Service (LoS)*. Bank Jatim juga melakukan pengembangan bisnis dan peningkatan pengelolaan SDM menjadi personil yang handal dan profesional.

Various strategic programs have been designed to achieve our goal, including service improvement and optimization either directly engage with the customers by products diversification serving all layer of the society with various banking needs or upgrading electronic channel to increase *Level of Service (LoS)*. Bank Jatim also accomplished business development and Human Capital Management improvement to be reliable and professional personnel.



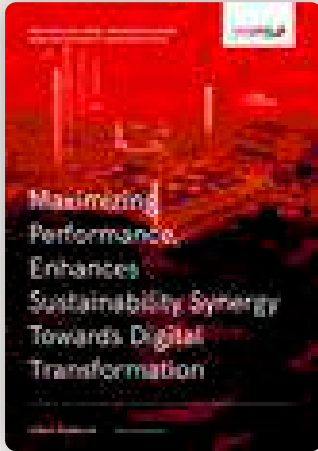
2017

**MERAH PELUANG,
MENINGKATKAN NILAI
MENUJU KINERJA PRIMA
YANG BERKELANJUTAN**

**SEIZING OPPORTUNITIES
ELEVATING VALUES TO SUSTAIN
EXCELLENT PERFORMANCE**

Dilatar belakangi oleh berbagai tantangan baik dari internal maupun eksternal, Bank Jatim sebagai bank kepercayaan masyarakat Jawa Timur telah melakukan strategi yang presisi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat melalui peningkatan keunggulan kompetitif dan operasional. Berbagai pengembangan yang berkelanjutan dan meraih berbagai peluang baru serta nilai tambah, akan terus dilakukan oleh perseroan. Selain itu untuk mendukung setiap usaha menggali peluang, perseroan telah memperkuat daya dukung organisasi melalui efektifitas dan efisiensi kinerja. Diharapkan dengan kemampuan perseroan untuk mengatur strategi dalam meraih berbagai peluang yang mampu meningkatkan nilai perseroan di segala aspek untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dan Perekonomian Jawa Timur.

Due to both internal and external challenges, Bank Jatim as a trusted bank of East Java Community accomplished a precise strategy in dealing with increasingly fierce competition through improving competitive and operational excellence. The implementation of various sustainability developments and new opportunities and added value will continue to take place in the Company. To support undertaken effort in exploring opportunities, the company has strengthened the capacity of the organization through effectiveness and efficiency of performance. It is expected the capability of the Company to set a strategy in reaching various opportunities will lead to an increase the company's value in all aspects to improve stakeholders performance and added value to East Java economy.



2018

MEMAKSIMALKAN KINERJA, MENINGKATKAN SINERGI BERKELANJUTAN MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL

MAXIMIZING PERFORMANCE, ENHANCES SUSTAINABILITY SYNERGY TOWARDS DIGITAL TRANSFORMATION

Bank Jatim sebagai bank terpercaya dan kebanggaan Jawa Timur telah mampu melanjutkan estafet prestasi dan pertumbuhan melalui fokus penguatan strategi, efisiensi, serta penyaluran kredit yang baik. Pertumbuhan tersebut semakin menunjukkan bahwa Bank Jatim merupakan mitra strategis bagi masyarakat serta pelaku usaha dalam meningkatkan pertumbuhan usaha. Untuk itu perseroan akan selalu menguatkan sinergi yang berkelanjutan dengan semua pihak demi meraih pertumbuhan bersama yang berkelanjutan di masa yang akan datang bagi perkembangan Masyarakat Jawa Timur. Selain itu untuk mendukung setiap usaha menggali peluang, perseroan telah memperkuat daya dukung organisasi dengan memaksimalkan kinerja dengan sumber daya yang ada dan mempersiapkan diri menuju Transformasi Digital di segala aspek.

Bank Jatim as a highly trusted and pride of East Java has succeeded to continue in improving the achievement and growth relay through a focus on strengthening strategy, efficiency, and good loans distribution. Those growths are strongly affirmed that Bank Jatim is a strategic partner for the community and companies in driving business growth. Therefore, the company will always strengthen the sustainable synergy that is supported by all parties for future successful growth for the development of the East Java Community. Moreover, to support undertaken effort to dig new opportunities, the company has strengthened the carrying capacity of the organization by maximizing performance with existing resources and preparing itself to Digital Transformation in all aspects.



2019

MENJARING PELUANG UNTUK MEMBERIKAN NILAI TAMBAH MENUJU KINERJA TERBAIK YANG BERKELANJUTAN

CAPTURING OPPORTUNITIES TO PROVIDE ADDED VALUES TOWARDS SUSTAINABLE EXCELLENT PERFORMANCE

Setelah Bank Jatim mampu memaksimalkan Kinerja dan meningkatkan Sinergi Berkelanjutan menuju Transformasi Digital pada 2018, kini Bank Jatim mengangkat tema "Menjaring Peluang, Meningkatkan Nilai menuju Kinerja Terbaik yang Berkelanjutan". Tema tersebut dianalogikan dengan garis yang saling terhubung, hal ini menggambarkan proses digitalisasi bank di setiap operasionalisasi perbankan.

Sementara blok merah berbentuk panah merepresentasikan komitmen Bank Jatim mewujudkan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Canggihnya teknologi memberikan suatu kemajuan dalam menjaring dan meningkatkan suatu layanan kepada nasabah Bank Jatim di seluruh Indonesia.

After being able to maximize performance and enhance sustainable synergy towards digital transformation in 2018, Bank Jatim now has the theme "Capturing Opportunities to Provide Added Values towards Sustainable Excellent Performance". This theme is analogous to the interconnected lines which illustrate the digitalization process of the Bank in each of its operations.

Meanwhile, the red arrow-shaped block represents the commitment of Bank Jatim to achieve performance growth in a sustainable manner.

Daftar Isi

TABLE OF CONTENTS

ii	IKHTISAR PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN SUMMARY OF ANNUAL REPORT
iii	PERATURAN & KETENTUAN LAPORAN TAHUNAN REGULATIONS REGARDING ANNUAL REPORT
iv	ISI LAPORAN TAHUNAN CONTENTS OF ANNUAL REPORT
vi	SANGGAHAN DISCLAIMER
vii	PENJELASAN TEMA THEME EXPLANATION
viii	KESINAMBUNGAN TEMA THEME CONTINUITY
x	DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS



IKHTISAR KINERJA UTAMA 2

KEY PERFORMANCE HIGHLIGHTS

4	IKHTISAR KINERJA UTAMA KEY PERFORMANCE HIGHLIGHTS
5	RINGKASAN KINERJA BISNIS BUSINESS PERFORMANCE HIGHLIGHTS
9	RINGKASAN KINERJA KEUANGAN FINANCIAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS
10	PLATFORM DIGITAL DIGITAL PLATFORM

12	STRATEGI BANK JATIM STRATEGIES OF BANK JATIM
13	KEUNGGULAN BANK JATIM COMPETITIVE ADVANTAGES OF BANK JATIM
14	IKHTISAR DATA KEUANGAN FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS
14	LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
14	LAPORAN LABA RUGI STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
15	LAPORAN ARUS KAS STATEMENTS OF CASH FLOWS
16	RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIOS
18	IKHTISAR SAHAM SHARE HIGHLIGHTS
20	AKSI KORPORASI CORPORATE ACTIONS
23	IKHTISAR OBLIGASI BONDS HIGHLIGHTS
24	PERISTIWA PENTING EVENT HIGHLIGHTS
26	PENGHARGAAN AWARDS



LAPORAN MANAJEMEN 28

MANAGEMENT REPORT

30	LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

31 PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN BANK

ASSESSMENT ON BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE IN MANAGING THE BANK

31 TINJAUAN MAKRO EKONOMI
MACROECONOMIC OVERVIEW

32 PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN

SUPERVISION ON STRATEGY IMPLEMENTATION

33 TINGKAT KESEHATAN BANK
HEALTH LEVEL OF THE BANK

33 PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA
VIEWS ON BUSINESS OUTLOOK

34 PANDANGAN ATAS PENERAPAN GCG
VIEWS OF GCG IMPLEMENTATION

35 MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

35 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
INTERNAL CONTROL SYSTEM

36 PENERAPAN WBS DAN KETERLIBATAN DEWAN KOMISARIS
WBS IMPLEMENTATION AND THE INVOLVEMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS

36 PELAKSANAAN CSR
CSR IMPLEMENTATION

37 PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

37 PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
CHANGES IN BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

38 FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI
FREQUENCY AND METHOD OF ADVISORY TO BOARD OF DIRECTORS

38 APRESIASI
APPRECIATION

39 LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

40 TINJAUAN MAKROEKONOMI
MACROECONOMIC OVERVIEW

40 ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA
ANALYSIS ON PERFORMANCE ACHIEVEMENT

41 KEBIJAKAN STRATEGIS
STRATEGIC POLICIES

42 KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA MENGATASI
CHALLENGES FACED BY THE BANK AND EFFORTS TO ADDRESS THOSE CHALLENGES

43 PROSPEK USAHA
BUSINESS OUTLOOK

44 PENERAPAN GCG
GCG IMPLEMENTATION

44 KETERBUKAAN INFORMASI
INFORMATION DISCLOSURE

45 PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI
PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

45 PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI
CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

46 APRESIASI
APPRECIATION

47 **LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN ATAS ISI LAPORAN TAHUNAN**
RESPONSIBILITY FOR THE CONTENTS OF ANNUAL REPORT



PROFIL BANK JATIM 50

BANK JATIM PROFILE

52 IDENTITAS BANK JATIM
BANK JATIM IDENTITY

54 RIWAYAT SINGKAT BANK JATIM
BRIEF HISTORY OF BANK JATIM

56 JEJAK LANGKAH
MILESTONES

134	STRUKTUR PENGELOLA SDM HUMAN CAPITAL MANAGEMENT STRUCTURE
134	PROFIL SDM HUMAN CAPITAL PROFILE
136	PENILAIAN KINERJA PEGAWAI EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT
137	REKRUTMEN DAN <i>TURNOVER</i> RECRUITMENT AND TURNOVER
138	TALENT MANAGEMENT TALENT MANAGEMENT
139	PENGEMBANGAN SDM HC DEVELOPMENT
141	JUMLAH DAN BIAYA PELATIHAN TRAINING COST
141	RENCANA PENGEMBANGAN SDM 2020 HC DEVELOPMENT PLANS FOR 2020

143 TEKNOLOGI & INFORMASI

INFORMATION & TECHNOLOGY

146	STRUKTUR ORGANISASI ICT ICT ORGANIZATION STRUCTURE
147	"MASTERPLAN PENERAPAN <i>DIGITAL BANKING</i> " "MASTERPLAN OF DIGITAL BANKING IMPLEMENTATION"
148	PENGEMBANGAN <i>DIGITAL BANKING</i> DIGITAL BANKING ENHANCEMENT
149	MODERNISASI <i>CORE BANKING SYSTEM (MODERNIZED CBS)</i> CORE BANKING SYSTEM (CBS) MODERNIZATION
149	PENGUATAN KEAMANAN TI IT SECURITY ENHANCEMENT
150	KEGIATAN TI 2019 IT ACTIVITIES IN 2019



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 152

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

154	TINJAUAN MAKROEKONOMI OVERVIEW ON MACRO ECONOMY
154	TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN OVERVIEW ON BANKING INDUSTRY
157	TINJAUAN OPERASI PERSEGMENT USAHA OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

160	KREDIT MIKRO RITEL & PROGRAM MICRO, RETAIL, AND PROGRAM LOAN
166	DANA PIHAK KETIGA THIRD PARTY FUND
171	KINERJA SEGMENT UNIT USAHA SYARIAH PERFORMANCE OF SHARIA BUSINESS UNIT

183 TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL OVERVIEW

183	LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
188	LAPORAN LABA RUGI STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
190	LAPORAN ARUS KAS STATEMENTS OF CASH FLOWS
191	KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG SOLVENCY AND RECEIVABLES COLLECTABILITY
193	KOMITMEN DAN KONTIJENSI COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
195	DAMPAK PENURUNAN SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA BANK IMPACT OF INTEREST RATE DECREASE ON BANK'S PERFORMANCE
195	STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE
196	KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL POLICY ON CAPITAL STRUCTURE
196	IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT
197	REALISASI BARANG MODAL CAPITAL GOODS REALIZATION
197	TARGET DAN REALISASI 2019 SERTA PROYEKSI 2020 TARGET AND REALIZATION OF 2019 AND PROJECTION FOR 2020
199	INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN MATERIAL INFORMATION AND FACT SUBSEQUENT TO ACCOUNTANT'S REPORT DATE
199	PROSPEK USAHA BUSINESS OUTLOOK
200	RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN LONG-TERM PLAN
201	ASPEK PEMASARAN MARKETING ASPECT
201	KEBIJAKAN DIVIDEN DIVIDEND POLICY
202	PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN MANAJEMEN MANAGEMENT AND EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP PROGRAM

205	REALISASI DANA HASIL PENAWARAN UMUM USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING
206	INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/ CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND CAPITAL/ DEBT RESTRUCTURING
206	PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN SIGNIFICANT AGREEMENTS
209	INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES
212	KEBIJAKAN SUKU BUNGA BANK JATIM INTEREST RATE POLICY OF BANK JATIM
212	PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING YANG TERJADI PADA BANK DALAM TAHUN BUKU SIGNIFICANT CHANGES IN THE BANK DURING THE FISCAL YEAR
212	INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN DAN SIFATNYA LUAR BIASA FINANCIAL INFORMATION ON EXTRAORDINARY EVENTS
212	PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH PADA 2019 CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS WITH SIGNIFICANT IMPACT IN 2019
217	INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN FINANCIAL INFORMATION ON TAX
217	PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES
218	KELANGSUNGAN USAHA BUSINESS CONTINUITY



TATA KELOLA PERUSAHAAN 220

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

222	PELAKSANAAN TATA KELOLA GOVERNANCE MECHANISM
222	MEKANISME TATA KELOLA GOVERNANCE IMPLEMENTATION

223	STRUKTUR TATA KELOLA GOVERNANCE STRUCTURE
223	INFRASTRUKTUR TATA KELOLA GOVERNANCE INFRASTRUCTURE
224	PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA ASSESSMENT OF GOVERNANCE IMPLEMENTATION
224	SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2019 GCG SELF-ASSESSMENT AS OF DECEMBER 2019
228	PELAKSANAAN PENERAPAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD IMPLEMENTATION OF ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD
233	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
234	PEMEGANG SAHAM BANK JATIM
234	TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RULES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS SHAREHOLDERS OF BANK JATIM
235	MEKANISME TANYA JAWAB QUESTION AND ANSWER MECHANISM
236	KEWENANGAN RUPS GMS AUTHORITY
237	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2018 AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019
243	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN 2018 2018 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
245	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
260	DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
275	RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI MEETINGS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS
287	REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI REMUNERATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS
292	PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI MAIN AND CONTROLLING SHAREHOLDERS
298	HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM AFFILIATIONS OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND SHAREHOLDERS

304	KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
	POLICY ON DIVERSITY IN BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS COMPOSITIONS
312	KOMITE AUDIT
	AUDIT COMMITTEE
319	KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
	REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE
330	KOMITE PEMANTAU RISIKO
	RISK MONITORING COMMITTEE
337	KOMITE-KOMITE DI BAWAH KOMISARIS
	COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS
337	KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI
	COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS
338	KOMITE ALCO
	ALCO COMMITTEE
348	KOMITE MANAJEMEN RISIKO
	RISK MANAGEMENT COMMITTEE
352	KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
	EMPLOYMENT COMMITTEE
355	KOMITE <i>IT STEERING</i>
	IT STEERING COMMITTEE
357	KOMITE KREDIT
	CREDIT COMMITTEE
360	KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN
	CREDIT POLICY COMMITTEE
363	KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR
	PRODUCT, NETWORK, AND PROCEDURE COMMITTEE
372	KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI
	INTEGRATED RISK MANAGEMENT COMMITTEE
373	FUNGSI KEPATUHAN
	COMPLIANCE FUNCTION
380	AUDIT INTERN
	INTERNAL AUDIT
385	KOMPOSISI
	COMPOSITION
385	PENDIDIKAN
	EDUCATION
393	SEKRETARIS PERUSAHAAN
	CORPORATE SECRETARY
403	KETERBUKAAN INFORMASI
	INFORMATION DISCLOSURE
407	MANAJEMEN RISIKO
	RISK MANAGEMENT
418	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
	INTERNAL CONTROL SYSTEM

421	EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
	EVALUATION ON THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM
422	PERKARA PENTING
	LEGAL CASES
427	KODE ETIK PERUSAHAAN
	CODE OF CONDUCT
431	BENTURAN KEPENTINGAN
	CONFLICT OF INTEREST
432	PENGUNGKAPAN BUDAYA PERUSAHAAN
	DISCLOSURE OF CORPORATE CULTURE
433	NILAI UTAMA BUDAYA BANK JATIM
	CORE VALUES OF BANK JATIM CULTURE
437	KEBIJAKAN ANTI FRAUD
	ANTI-FRAUD POLICY
439	KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI
	ANTI-GRATIFICATION POLICY
444	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN
	TRANSPARENCY OF FINANCIAL AND NON- FINANCIAL CONDITIONS
446	TATA KELOLA TERINTEGRASI
	INTEGRATED GOVERNANCE
448	PENERAPAN TATA KELOLA BANK JATIMBERDASARKAN SEOJK 32/ SEOJK.04/2015
	GOVERNANCE IMPLEMENTATION AT BANK JATIM BASED ON SEOJK 32/SEOJK.04



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 454

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

456	DASAR PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
	BASIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION
456	IMPLEMENTASI KEUANGAN BERKELANJUTAN
	SUSTAINABLE FINANCE IMPLEMENTATION
457	STRUKTUR TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
	GOVERNANCE STRUCTURE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
458	TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

458	KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITMENT AND POLICY	467	RISIKO PADA BANK DAN RISIKO PADA PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT PELANGGARAN HAM RISKS FOR THE BANK AND STAKEHOLDERS REGARDING HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
459	METODE DAN LINGKUP <i>DUE DILIGENCE</i> DUE DILIGENCE SCOPE AND METHOD	468	MEKANISME DAN PROSEDUR PENERAPAN HAM DI BANK MECHANISM AND PROCEDURE OF HUMAN RIGHTS IMPLEMENTATION AT THE BANK
460	PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERDAMPAK AFFECTED STAKEHOLDERS	468	KEGIATAN DAN CAPAIAN KEGIATAN TERKAIT PROMOSI HAM ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS REGARDING HUMAN RIGHTS PROMOTION
461	ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN SOCIAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL ISSUES	469	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO THE ENVIRONMENT
461	LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN SERTA PROGRAM YANG MELEBIHI TANGGUNG JAWAB MINIMAL SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS OBLIGATIONS AND PROGRAMS EXCEEDING MINIMUM RESPONSIBILITY	469	KOMITMEN DAN KEBIJAKAN COMMITMENT AND POLICY
462	STRATEGI DAN PROGRAM KERJA DALAM ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN STRATEGIES AND WORK PROGRAMS REGARDING SOCIAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL ISSUES	470	ISU-ISU LINGKUNGAN DAN RISIKO LINGKUNGAN TERKAIT KEGIATAN BANK ENVIRONMENTAL ISSUES AND RISKS RELATED TO BANK'S ACTIVITIES
462	ANGGARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BUDGET FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	470	JANGKAUAN LINGKUP PENGARUH BANK PADA PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT ISU LINGKUNGAN SCOPE OF BANK'S IMPACT ON STAKEHOLDERS REGARDING ENVIRONMENTAL ISSUES
464	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONS	470	MEKANISME PENANGANAN KEADAAN DARURAT KESELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KONFLIK LINGKUNGAN MANAGEMENT MECHANISM OF ENVIRONMENTAL EMERGENCY AND CONFLICTS
464	KOMITMEN DAN KEBIJAKAN COMMITMENT AND POLICY	470	RENCANA PROGRAM CSR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2019 PLANS FOR CSR PROGRAMS IN THE FIELD OF ENVIRONMENT IN 2019
464	PROSEDUR DAN MEKANISME PENANGANAN KONFLIK PROCEDURE AND MECHANISM OF CONFLICT MANAGEMENT	471	KEGIATAN DAN CAPAIAN KEGIATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 2019 ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN 2019
464	UPAYA MEMPROMOSIKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL OPERASI YANG ADIL EFFORTS TO PROMOTE SOCIAL RESPONSIBILITY OF FAIR OPERATIONS	474	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO MANPOWER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
464	KEGIATAN DAN CAPAIAN 2019 ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS IN 2019	474	KOMITMEN DAN KEBIJAKAN COMMITMENT AND POLICY
467	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO HUMAN RIGHTS	474	ISU-ISU, RISIKO, DAN JANGKAUAN LINGKUP PENGARUH BANK PADA BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERKAIT KEGIATAN BANK YANG RELEVAN ISSUES, RISKS, AND SCOPE OF THE BANK'S IMPACT ON THE FIELD OF MANPOWER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN RELATION TO RELEVANT BANK'S ACTIVITIES
467	KOMITMEN DAN KEBIJAKAN COMMITMENT AND POLICY		
467	ISU-ISU HAM DAN JANGKAUAN LINGKUP PENGARUH PERUSAHAAN HUMAN RIGHTS ISSUES AND SCOPE OF BANK'S OUTREACH		

475	MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGANAN KEADAAN DARURAT KESELAMATAN KERJA DAN KONFLIK KETENAGAKERJAAN MANAGEMENT MECHANISM AND PROCEDURE OF OCCUPATIONAL SAFETY EMERGENCY AND MANPOWER CONFLICTS
475	RENCANA PROGRAM CSR BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 2020 PLANS FOR CSR PROGRAMS IN THE FIELD OF MANPOWER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY FOR 2020
475	KEGIATAN DAN CAPAIAN KEGIATAN PENGELOLAAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 2019 ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF MANPOWER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT IN 2019
478	DAMPAK KEGIATAN KETENAGAKERJAAN IMPACT OF MANPOWER ACTIVITIES
480	DAMPAK KUANTITATIF PEMBERIAN FASILITAS KESEHATAN BAGI PEGAWAI QUANTITATIVE IMPACT OF THE PROVISION OF HEALTH FACILITIES FOR EMPLOYEES
481	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KONSUMEN/NASABAH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO CUSTOMERS
481	KOMITMEN DAN KEBIJAKAN COMMITMENT AND POLICY
481	ISU-ISU DAN RISIKO TERKAIT KONSUMEN ATAS KEGIATAN BANK YANG RELEVAN ISSUES AND RISKS RELATED TO CUSTOMERS AND RELEVANT BANK'S ACTIVITIES
481	OPTIMALISASI JANGKAUAN LINGKUP PENGARUH BANK PADA BIDANG KONSUMEN OPTIMIZATION OF SCOPE OF BANK'S IMPACT ON ITS CUSTOMERS
481	MEKANISME PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PENGADUAN KELUHAN 2019 MECHANISM OF STAKEHOLDER'S ENGAGEMENTS AND COMPLAINT SUBMISSION IN 2019
482	RENCANA PROGRAM CSR BIDANG KONSUMEN 2019 ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF CUSTOMERS RESPONSIBILITY MANAGEMENT
482	KEGIATAN DAN CAPAIAN KEGIATAN PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB PADA KONSUMEN PLANS FOR CSR PROGRAMS RELATED TO CUSTOMERS IN 2019
484	DAMPAK KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT NASABAH IMPACT OF SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES RELATED TO CUSTOMERS

486	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PEMASOK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO SUPPLIERS
486	KEBIJAKAN POLICY
486	TARGET KEGIATAN ACTIVITY TARGETS
488	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT
488	KOMITMEN DAN KEBIJAKAN COMMITMENT AND POLICY
489	ISU-ISU SERTA RISIKO SOSIAL EKONOMI ATAS KEGIATAN BISNIS BANK YANG RELEVAN ISSUES AND RISKS OF SOCIAL ECONOMY RELATED TO THE RELEVANT BANK'S ACTIVITIES
489	MEKANISME PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PENGADUAN KELUHAN MECHANISM OF STAKEHOLDERS ENGAGEMENT AND COMPLAINT SUBMISSION
489	PROGRAM TANGGUNG JAWAB BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN SOCIAL COMMUNITY RESPONSIBILITY PROGRAMS
490	RENCANA PROGRAM CSR BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN 2019 PLANS FOR CSR PROGRAMS IN SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT IN 2019
490	KEGIATAN DAN CAPAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN 2019 SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS IN 2019
494	BIAYA YANG DIKELUARKAN COST INCURRED



LAPORAN KEUANGAN AUDIT 496

498	LAPORAN KEUANGAN AUDITED PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019 AUDITED FINANCIAL REPORT PER DECEMBER 31TH 2019

bankj

1

IKHTISAR KINERJA UTAMA

KEY PERFORMANCE HIGHLIGHTS





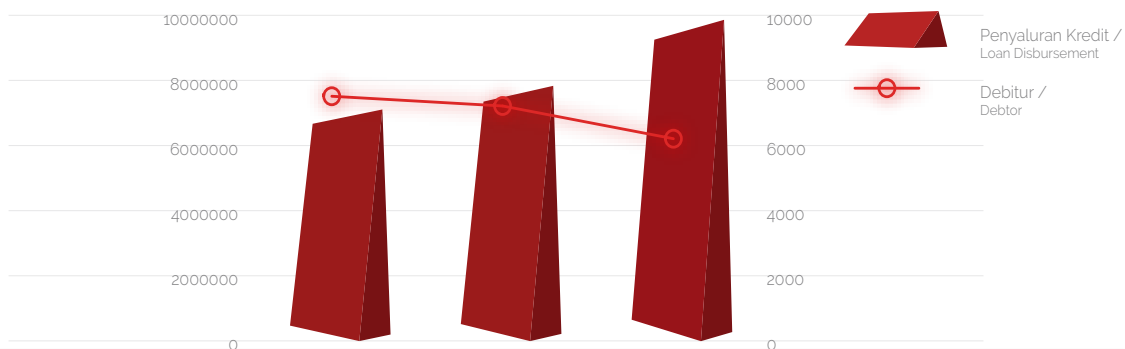
Ikhtisar Kinerja Utama

KEY PERFORMANCE HIGHLIGHTS

TOP 20 FINANCIAL INSTITUTION 2019	Penghargaan ini merupakan apresiasi kepada perusahaan dan para pelaku di industri keuangan	<i>This award is an appreciation to companies and business players engaging in financial industry</i>
THE BEST CFO IN FINANCIAL INSTITUTION 2019		
EXPRESI	Penerapan budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) terbaru untuk meningkatkan kinerjanya. Budaya tersebut antara lain <i>Excellence, Professional, Integrity, Synergy, Innovation</i> .	<i>The implementation of new corporate culture to improve performance, encompassing Excellence, Professional, Integrity, Synergy, and Innovation.</i>
BEST OF THE BEST TOP 50 LISTED COMPANIES DI INDONESIA	Bank Jatim berhasil masuk dalam jajaran <i>Best of the Best Top 50 Listed Companies</i> di Indonesia dalam ajang penghargaan yang diselenggarakan Forbes Indonesia.	<i>Bank Jatim managed to be listed in the Best of Best Top 50 Indonesian Listed Companies in the award event organized by Forbes Indonesia.</i>
JATIM PAY	Bank Jatim ingin mengesampingkan image Bank-nya para PNS dengan membidik kaum milenial sistem pembayaran Jatim Pay.	<i>Bank Jatim strives to replace its image as the bank of State Civil Apparatus by focusing on the millennial generation through the implementation of a new payment system, Jatim Pay.</i>
JATIMCODE	Fasilitas pembayaran berbasis QR Code pertama kali diluncurkan pada Maret 2019.	<i>A payment facility based on QR Code which was launched for the first time in March 2019.</i>
BANK KUSTODIAN / CUSTODIAN BANK	Bank Jatim secara resmi telah menjadi bank kustodian yang terdaftar dalam Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).	<i>Bank Jatim officially becomes a custodian bank registered with the Indonesia Central Securities Depository (KSEI).</i>

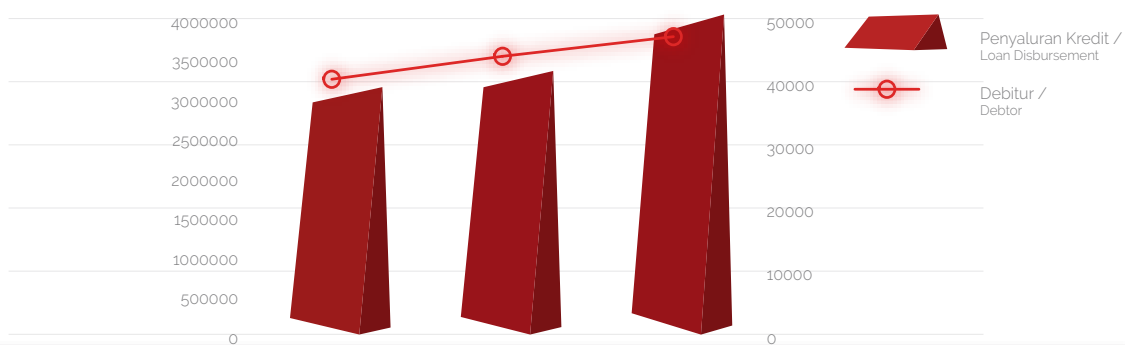
RINGKASAN KINERJA BISNIS

BUSINESS PERFORMANCE HIGHLIGHTS



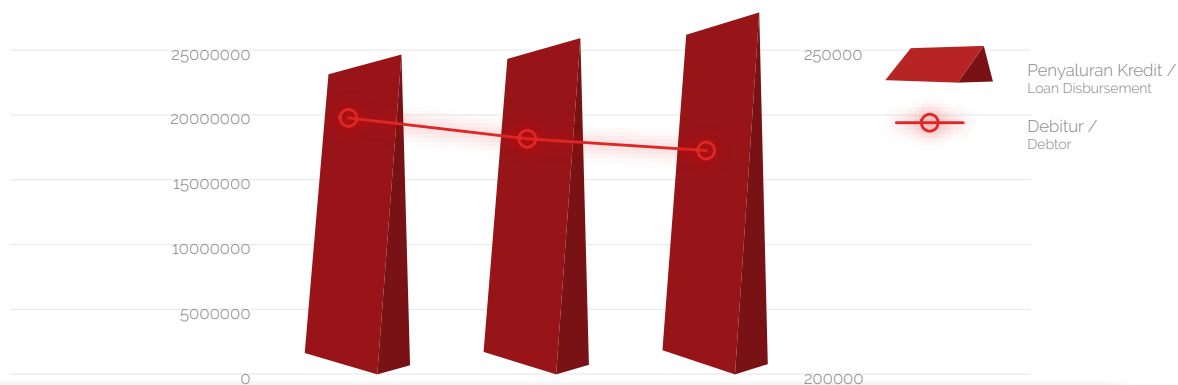
SEGMENT MENENGAH, KORPORASI DAN SINDIKASI / MEDIUM, CORPORATE, AND SYDICATION SEGMENT

	2017	2018	2019	
Penyaluran Kredit (Jutaan Rupiah)	6.279.901	6.920.700	8.711.965	Loan Disbursement (Million Rupiah)
Debitur	7.514	7.215	6.210	Debtor



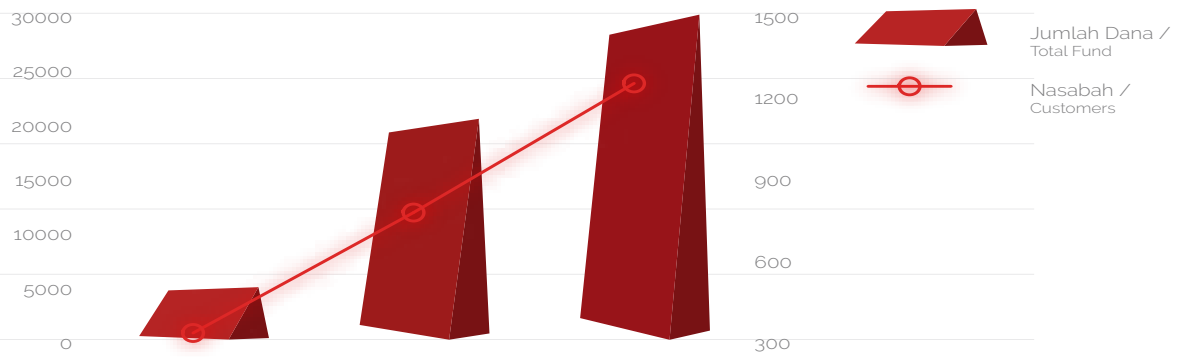
SEGMENT PRODUKTIF / PRODUCTIVE SEGMENT

	2017	2018	2019	
Penyaluran Kredit (Jutaan Rupiah)	2.766.485	2.947.402	3.578.740	Loan Disbursement (Million Rupiah)
Debitur	40.384	44.021	47.128	Debtor

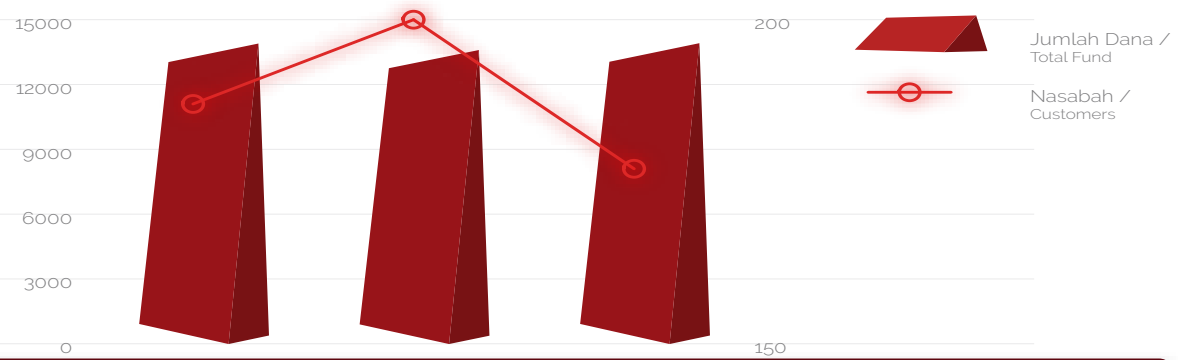


SEGMENT KONSUMER / CONSUMER SEGMENT

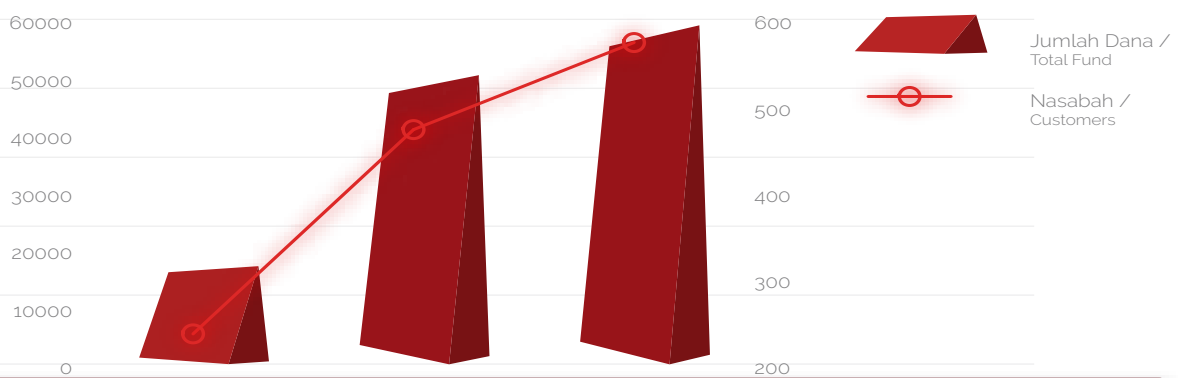
	2017	2018	2019	
Penyaluran Kredit (Jutaan Rupiah)	21.788.891	22.905.473	24.659.762	Loan Disbursement (Million Rupiah)
Debitur	239.548	236.322	234.504	Debtor



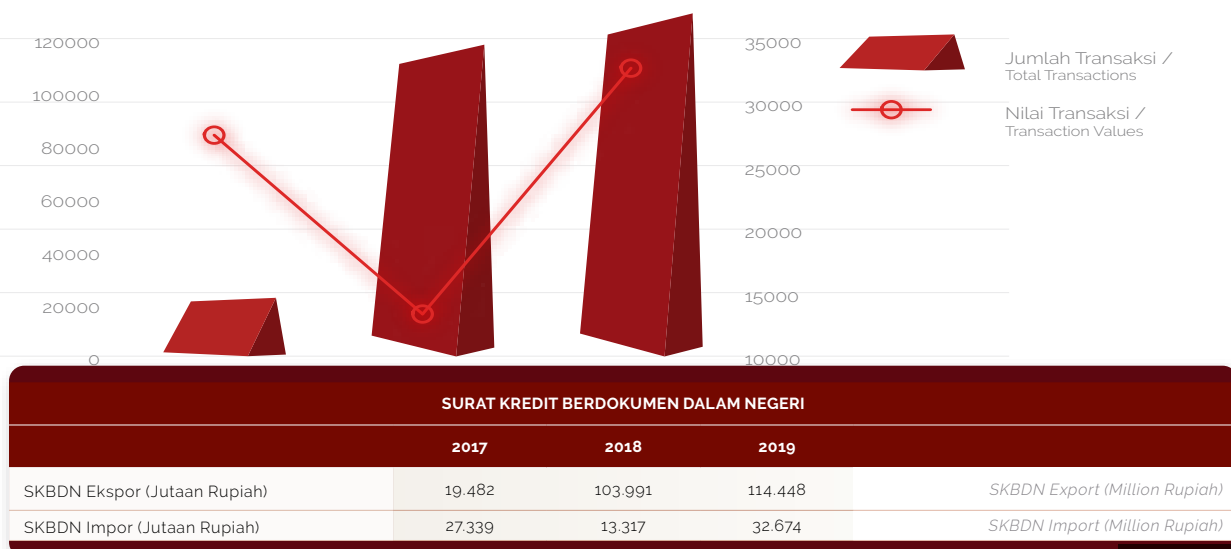
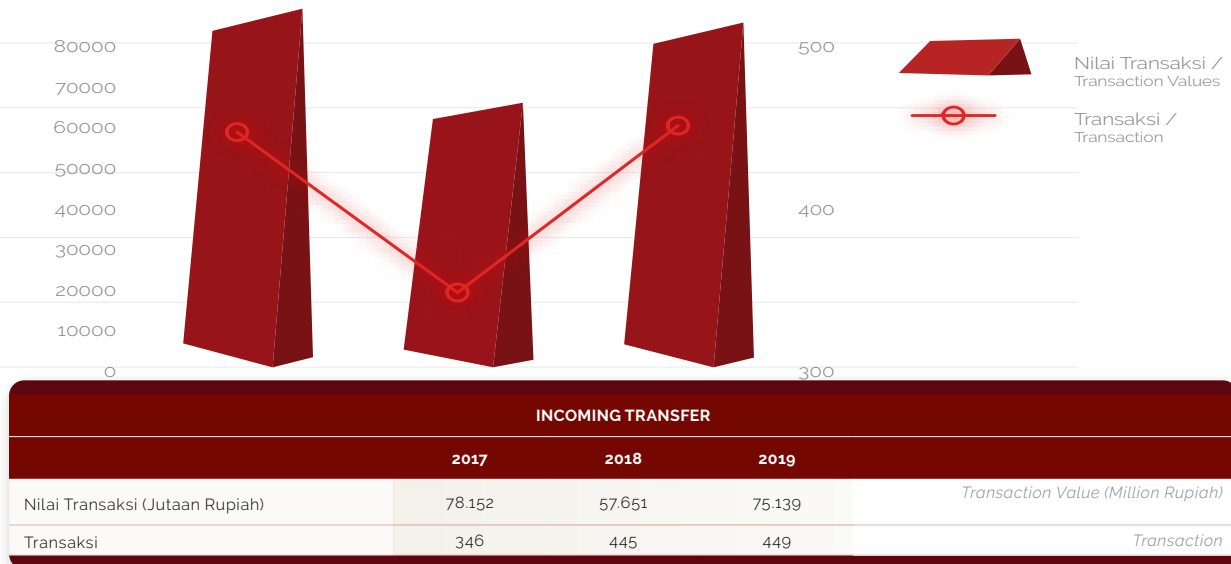
SIMPANAN TABUNGAN SIKLUS VALAS				
	2017	2018	2019	
Jumlah Dana (Jutaan Rupiah)	4.252	17.929	26.392	Total Funds (Million Rupiah)
Nasabah	324	767	1242	Customer

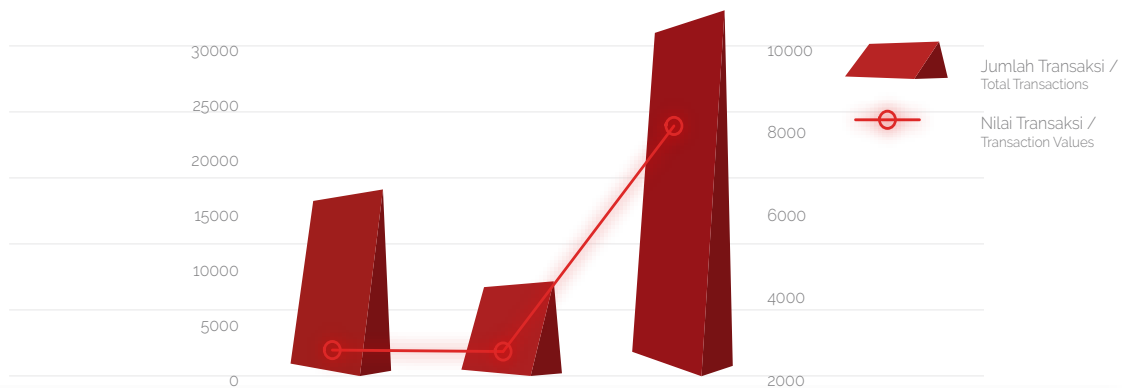


SIMPANAN GIRO VALAS				
	2017	2018	2019	
Jumlah Dana (Jutaan Rupiah)	12.277	12.011	12.292	Total Funds (Million Rupiah)
Nasabah	187	200	177	Customer

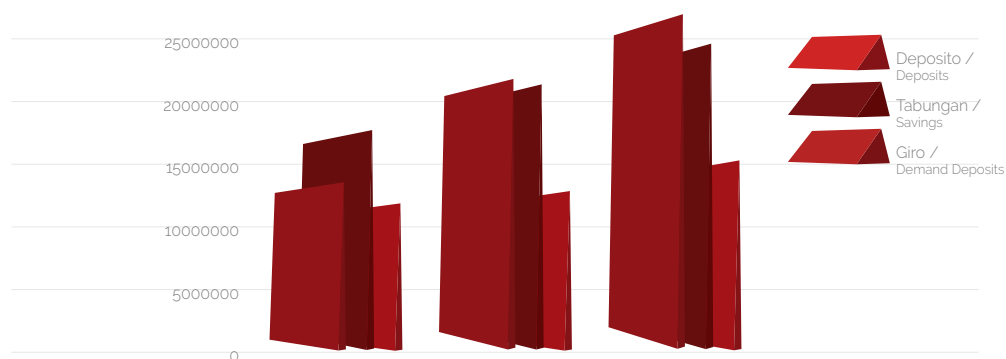


SIMPANAN DEPOSITO VALAS				
	2017	2018	2019	
Jumlah Dana (Jutaan Rupiah)	15.047	44.416	52.078	Total Funds (Million Rupiah)
Nasabah	235	472	573	Customer

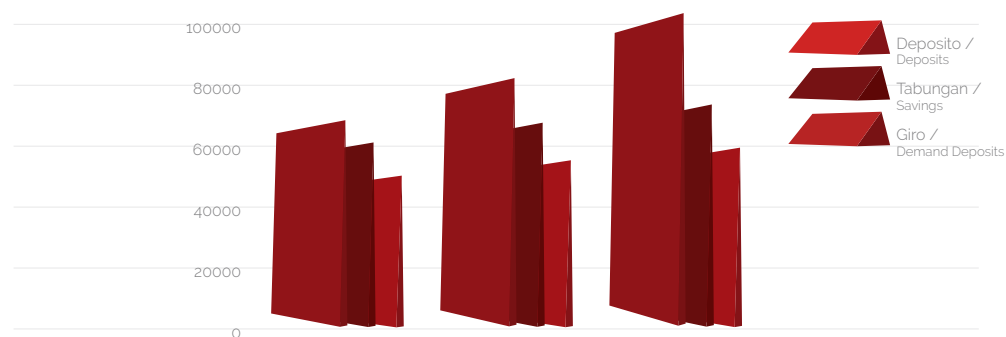




LETTER OF CREDIT				
	2017	2018	2019	
L/C Ekspor (Jutaan Rupiah)	14.978	7.599	29.364	L/C Export (Million Rupiah)
L/C Impor (Jutaan Rupiah)	2.626	2.591	8.060	L/C Import (Million Rupiah)



DANA PIHAK KETIGA / THIRD PARTY FUNDS				
	2017	2018	2019	
Giro (Jutaan Rupiah)	11.922.800	19.168.880	23.721.437	Demand Deposits (Million Rupiah)
Tabungan (Jutaan Rupiah)	15.583.200	18.789.218	21.669.332	Savings (Million Rupiah)
Deposito (Jutaan Rupiah)	10.443.377	11.307.225	13.509.606	Deposits (Million Rupiah)

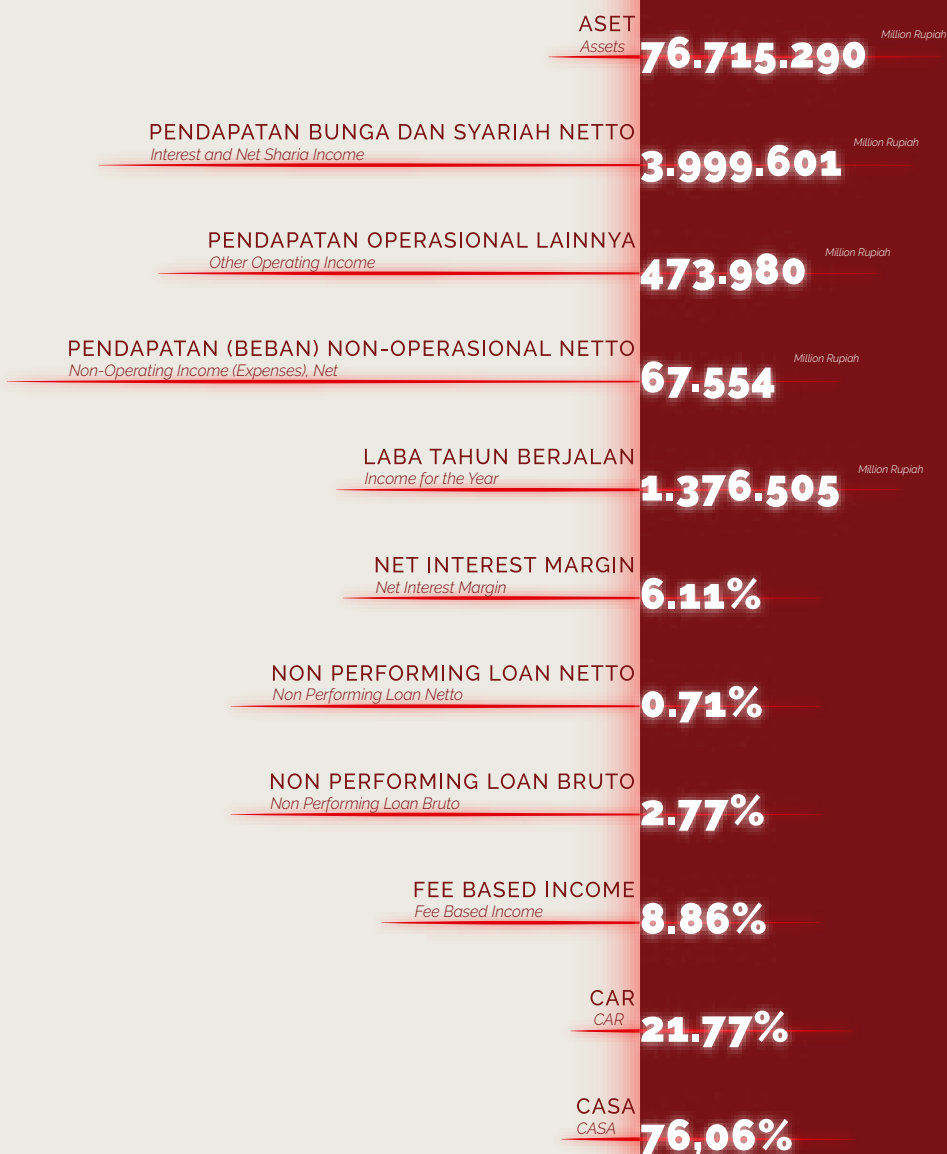


NASABAH DANA PIHAK KETIGA / THIRD PARTY FUND CUSTOMERS				
	2017	2018	2019	
Giro	60.253	72.405	91.173	Demand Deposits
Tabungan	53.835	59.535	64.802	Savings
Deposito	44.257	48.688	52.333	Deposits

KINERJA E-CHANNEL / E-CHANNEL PERFORMANCE									
DESKRIPSI	2017			2018			2019		
	USER	TRANSAKSI	NOMINAL	USER	TRANSAKSI	NOMINAL	USER	TRANSAKSI	NOMINAL
SMS Banking	1.231.590	648.424	606.872.641.296	1.766.593	457.808	481.589.480.206	2.779.759	252.561	258.955.897.710
Mobile Banking	342.982	1.430.953	1.252.587.546.871	935.342	2.571.791	2.398.480.788.647	1.805.208	5.579.148	5.833.432.719.648
Internet Banking	77.089	46.163	465.640.483.645	114.449	729.203	2.099.821.145.326	129.954	1.263.801	3.901.882.088.881

Ringkasan Kinerja Keuangan

FINANCIAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS



Platform Digital

DIGITAL PLATFORM

2013

Sms banking 3388 pertama kali diluncurkan dan dipergunakan untuk mempermudah transaksi para nasabah.

SMS Banking 3388 first launched and used for easy transaction to customers

2014

Melakukan co-branding dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan launching kartu flazz Bank Jatim

Co-branding with PT Bank Central Asia Tbk (BCA) by launching Bank Jatim Flazz Card

2015

Internet banking Bank Jatim resmi beroperasi dengan layanan e-channel yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja

Mesin EDC Bank Jatim (on us) dapat digunakan oleh nasabah Bank Jatim untuk bertransaksi menggunakan kartu ATM Bank Jatim di beberapa instansi pemerintahan maupun swasta.

Launching and operation of Bank Jatim Internet Banking, an electronic channel service that can be accessed anywhere and anytime.

Launching of Bank Jatim EDC Machine (on us) which can be used by the Bank's customers to conduct transaction through Bank Jatim ATM Card at several government and private institutions.

2019

Untuk melengkapi layanan dan produk *Digital Banking*, di tahun 2019 Bank Jatim *launching* beberapa produk *digital* baru, diantaranya:

To complement Digital Banking products and services, the Bank launched several new digital products in 2019, such as:

Mobile Banking QR CODE (Jatim Code)

Penambahan Fitur Pembayaran Menggunakan QR CODE pada aplikasi *Mobile Banking*.

Mobile Banking QR Code (Jatim Code) an addition to the Payment Feature at Mobile Banking application of the Bank through a QR Code.

e-CIF

e-form yang memungkinkan nasabah melakukan pembukaan rekening melalui internet, tanpa harus datang dan antri di kantor cabang bank jatim.

E-CIF, an e-form which enables the customers to open an account without using the Internet, and without having to come to and queue at the Bank's branches

Penambahan biller SMS Banking

Addition of biller SMS Banking

Menambah fitur untuk transaksi perbankan dan transaksi pembayaran/pembelian.

Addition to SMS Banking biller, an additional feature to banking and payment/purchase transactions.

2016



Pengoperasian *Mobile Banking* Bank Jatim yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi dengan mengirimkan perintah melalui *smartphone*. Aplikasi *Mobile Banking* Bank Jatim dapat diaktivasi melalui ATM.

Layanan Laku Pandai Bank Jatim untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari perbankan, agar dapat melakukan transaksi keuangan (perbankan).

Operation of Bank Jatim Mobile Banking which allows the customers to conduct transaction by sending instructions through a smartphone. This Mobile Banking application can be activated through an ATM.

Bank Jatim Laku Pandai service to reach the community living in areas that are not accessible by bank's services so as to provide them access to conduct financial and banking transactions easily.

2018



Virtual Account Bank Jatim (*on us*) dapat dipergunakan oleh instansi – instansi yang bekerjasama dengan Bank Jatim untuk mempermudah transaksi pembayaran.

Bank Jatim Virtual Account (*on us*) to be used by institutions partnering with the Bank to facilitated payment transaction.

Multi rekening Mobile Banking

Multi-account Mobile banking

Penambahan nomor rekening yang dimiliki nasabah yang masih dalam satu CIF (nomor nasabah).

Addition of account number owned by customers who are within one CIF (customer number).

Transaksi Virtual Account Fase 2 (seluruh channel)

Virtual Account Transaction Phase 2 (all channels)

Penambahan fitur sehingga dapat melakukan transaksi melalui bank lain dan semua *channel* yang dimiliki Bank Jatim maupun bank lain.

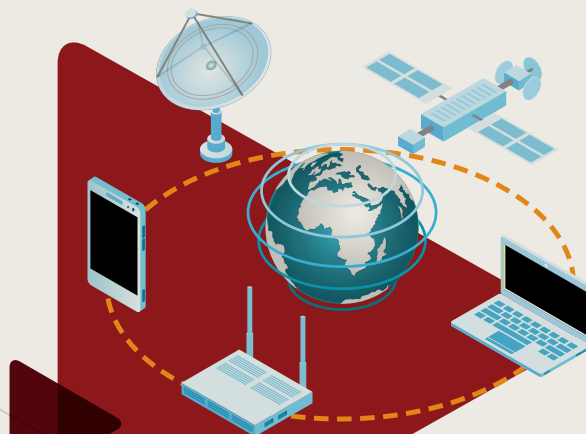
Additional features to make transactions through other banks and all channels owned by Bank Jatim and other banks.

Transaksi Virtual Account Fase 2

Virtual Account Transaction Phase 2

Penambahan fitur sehingga dapat melakukan transaksi melalui bank lain dan semua *channel* yang dimiliki Bank Jatim maupun bank lain.

Added features to make transactions through other banks and all channels owned by Bank Jatim and other banks.



Strategi Bank Jatim

STRATEGIES OF BANK JATIM



Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

IMPROVEMENT OF HUMAN RESOURCES (HR) QUALITY



Perbaikan Kualitas Kredit

IMPROVEMENT OF CREDIT QUALITY



Peningkatan Layanan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm)

IMPROVEMENT OF SERVICES TO MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES)



Digitalisasi Perbankan Dalam Mempersiapkan Persaingan Di Era Revolusi Industri 4.0

BANKING DIGITALIZATION TO ADDRESS THE COMPETITION IN 4.0 INDUSTRIAL REVOLUTION ERA

IKHTISAR KINERJA UTAMA



Keunggulan Bank Jatim

COMPETITIVE ADVANTAGES OF BANK JATIM

- Salah satu Pilot Project Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.
- Bank Umum yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan telah *Go Public* pada 12 Juli 2012.
- Kartu ATM Bank Jatim terkoneksi dengan MEPS yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi di Malaysia, disamping itu ATM Bank Jatim memiliki biaya administrasi bulanan paling murah dan bebas biaya penarikan tunai di seluruh jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.
- Memiliki jaringan kantor yang menyebar di Jakarta, Batam dan utamanya di seluruh Jawa Timur dengan total 1.684 jaringan kantor dan *e-channel*.
- Tren Laba Bersih Bank Jatim yang selalu meningkat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- Memiliki basis nasabah yang loyal dalam jumlah besar yaitu PNS, para pensiunan dan masyarakat setempat serta mengenal dengan lebih baik potensi ekonomi dan bisnis di Provinsi Jawa Timur.
- Memiliki image yang kuat sebagai bank umum yang sedang berkembang dengan pesat dan menuju bank nasional.
- Memiliki pengelolaan *Good Corporate Governance* yang baik, terbukti dengan memperoleh *The Most Improvement Public Listed Companies* dari *Asean Corporate Governance Scorecard 2018*.
- Dukungan *shareholders* Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur;
- Ketahanan dan kecukupan modal (CAR) relatif tinggi;
- Kepemilikan *Captive Market* dan aksesibilitas belanja pemerintah di Jawa Timur;
- *Coverage* jaringan Bank Jatim yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Jawa Timur;
- Sinergitas BPD menjadi "*One BPD*" untuk mencapai visi menjadi grup usaha keuangan terbaik di Indonesia.
- One of the Pilot Projects of Indonesian Regional Development Banks (BPD).
- A Commercial Bank owned by the East Java Provincial Government, which listed its shares (*Go Public*) on July 12, 2012.
- Bank Jatim ATM Card has been connected with MEPS network allowing its customers to conduct transaction in Malaysia. In addition, Bank Jatim ATM has the most affordable monthly administration fees and free withdrawal fees at the entire ATM Bersama and ATM Prima networks.
- Office Network that covers the entire East Java Province and reaches Jakarta and Batam areas with a total of 1,694 offices and *e-channel* networks.
- Increasing trend of Net Profit in the last 3 (three) years.
- Large and loyal customer base, covering the Civil Servants, pensioners, and local communities, with better understanding and knowledge about economic and business potentials in East Java Province.
- Strong image as a rapidly growing commercial bank towards a national bank.
- Proper management of *Good Corporate Governance* as evidenced in the award received in the 2018 ASEAN Corporate Governance Scorecard event as the Most Improved Public Listed Companies.
- Strong support from the shareholders, namely the East Java Provincial Government and the Municipality/Regency Governments of East Java Province.
- High and resilient Capital Adequacy Ratio (CAR).
- *Captive Market* and accessibility for government spending in East Java.
- Higher economic growth in the 2nd quarter of 2018 for East Java Province compared with the national economic growth at 5.6% (yoy).
- Broad coverage of the Bank which encompasses almost all districts in East Java Province.
- BPD Synergy towards "*One BPD*" goal in order to achieve the vision of becoming the best financial business group in Indonesia.

Ikhtisar Data Keuangan

FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

(JUTAAN RUPIAH)	2015	2016	2017	2018	2019	(MILLION RUPIAH)
TOTAL ASET	42.803.631	43.032.950	51.518.681	62.689.118	76.715.290	TOTAL ASSETS
ASET PRODUKTIF (BRUTO)	45.517.791	43.897.053	51.308.745	61.768.546	72.037.394	PRODUCTIVE ASSETS (GROSS)
KREDIT YANG DIBERIKAN (BRUTO)	28.411.999	29.675.422	31.754.413	33.893.237	38.352.300	LOANS (GROSS)
DANA PIHAK KETIGA	34.263.920	32.798.657	39.845.108	50.915.931	60.545.872	THIRD PARTY FUNDS
TOTAL LIABILITAS	36.508.170	35.823.378	43.702.607	54.217.182	67.529.638	TOTAL LIABILITIES
TOTAL EKUITAS	6.295.461	7.209.572	7.816.074	8.471.936	9.185.652	TOTAL EQUITY
MODAL INTI DAN PELENGKAP	5.818.258	6.856.176	7.213.983	7.748.250	8.202.293	CORE AND SUPPLEMENTARY CAPITAL
MODAL INTI (TIER 1)	5.552.634	6.580.009	6.928.285	7.436.484	7.822.122	CORE CAPITAL (TIER 1)
MODAL DISETOR	3.729.421	3.736.264	3.743.648	3.744.534	3.750.593	PAID CAPITAL

LAPORAN LABA RUGI

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS

(JUTAAN RUPIAH)	2015	2016	2017	2018	2019	(MILLION RUPIAH)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH	4.703.655	4.904.378	4.889.674	5.200.739	5.839.016	INTEREST AND SHARIA INCOME
BEBAN BUNGA DAN SYARIAH	(1.579.710)	(1.446.372)	(1.404.762)	(1.512.632)	(1.839.415)	INTEREST AND SHARIA EXPENSE
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH, NETTO	3.123.945	3.458.006	3.484.912	3.688.107	3.999.601	INTEREST AND SHARIA INCOME, NET
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA						OTHER OPERATING INCOME
ADMINISTRASI GIRO, TABUNGAN DAN DEPOSITO	67.923	97.923	123.430	137.745	155.360	CURRENT ACCOUNTS, SAVINGS AND DEPOSITS ADMINISTRATION FEES
ADMINISTRASI PINJAMAN	33.448	29.559	37.051	40.096	45.993	LOAN ADMINISTRATION FEES
PENERIMAAN KEMBALI KREDIT HAPUS BUKU	96.803	73.651	63.381	77.254	77.973	COLLECTION OF LOANS WRITTEN-OFF
PROVISI DAN KOMISI DARI SELAIN KREDIT YANG DIBERIKAN	7.886	6.393	6.175	7.089	14.795	FEES AND COMMISSIONS FROM OTHER THAN LOANS
LAINNYA	133.098	142.225	141.149	151.137	179.859	OTHERS
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	339.158	349.751	371.186	413.321	473.980	TOTAL OTHER OPERATING INCOME

BEBAN OPERASIONAL (JUTAAN RUPIAH / MILLION RUPIAH)						OPERATING EXPENSES
TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN KARYAWAN	(945.755)	(1.060.045)	(1.179.380)	(1.411.911)	(1.459.394)	SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS
UMUM DAN ADMINISTRASI	(586.292)	(652.706)	(673.365)	(706.474)	(683.957)	GENERAL AND ADMINISTRATIVE
PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN	(599.046)	(509.700)	(217.128)	(133.793)	(370.265)	PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL ASSETS
BEBAN LAINNYA	(135.111)	(133.569)	(143.418)	(143.329)	(163.386)	OTHER EXPENSES
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	(2.266.204)	(2.356.175)	(2.213.291)	(2.395.507)	(2.677.002)	TOTAL OPERATING EXPENSES
LABA OPERASIONAL	1.196.899	1.451.582	1.642.807	1.705.921	1.796.579	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL						NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
KEUNTUNGAN SELISIH KURS	24.712	(214)	1.149	3.013	2.440	GAIN ON FOREIGN EXCHANGE
BEBAN NON-OPERASIONAL	(5.114)	(30.100)	(38.582)	(7.960)	(6.565)	NON-OPERATING EXPENSES
FEE JASA PELAYANAN PAJAK	10.684	10.547	10.421	13.089	12.796	TAX SERVICE FEES
KEUNTUNGAN PENJUALAN EFEK-EFEK, NETTO	33	332	284	-	393	GAIN ON SALE OF FIXED ASSETS, NET
LAINNYA	33.965	19.909	20.862	39.635	58.490	OTHERS
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL, NETTO	64.354	546	(5.866)	47.777	67.554	NON-OPERATING INCOME, NET
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.261.253	1.452.128	1.636.941	1.753.698	1.864.133	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK - NETTO	(376.750)	(423.912)	(477.571)	(493.390)	(487.628)	TAX EXPENSE, NET
LABA TAHUN BERJALAN	884.503	1.028.216	1.159.370	1.260.308	1.376.505	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:						ITEMS THAT WILL NOT BE RECLASSIFIED SUBSEQUENTLY TO PROFIT OR LOSS
SURPLUS REVALUASI ASET TETAP	-	537.756	112.985	44.713	74.239	REVALUATION SURPLUS OF FIXED ASSETS
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENGUKURAN KEMBALI PROGRAM IMBALAN PASTI	-	(1.612)	(70.356)	12.535	(84.240)	REMEASUREMENT GAIN (LOSSES) OF DEFINED BENEFIT PENSION PLANS
PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	-	(21.106)	17.589	(3.134)	16.848	RELATED INCOME TAXES
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	884.503	1.543.254	1.219.588	1.314.422	1.383.372	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (RUPIAH PENUH)	59.29	68.88	77.51	84.15	91.80	BASIC EARNINGS PER SHARE (IN FULL RUPIAH)

LAPORAN ARUS KAS

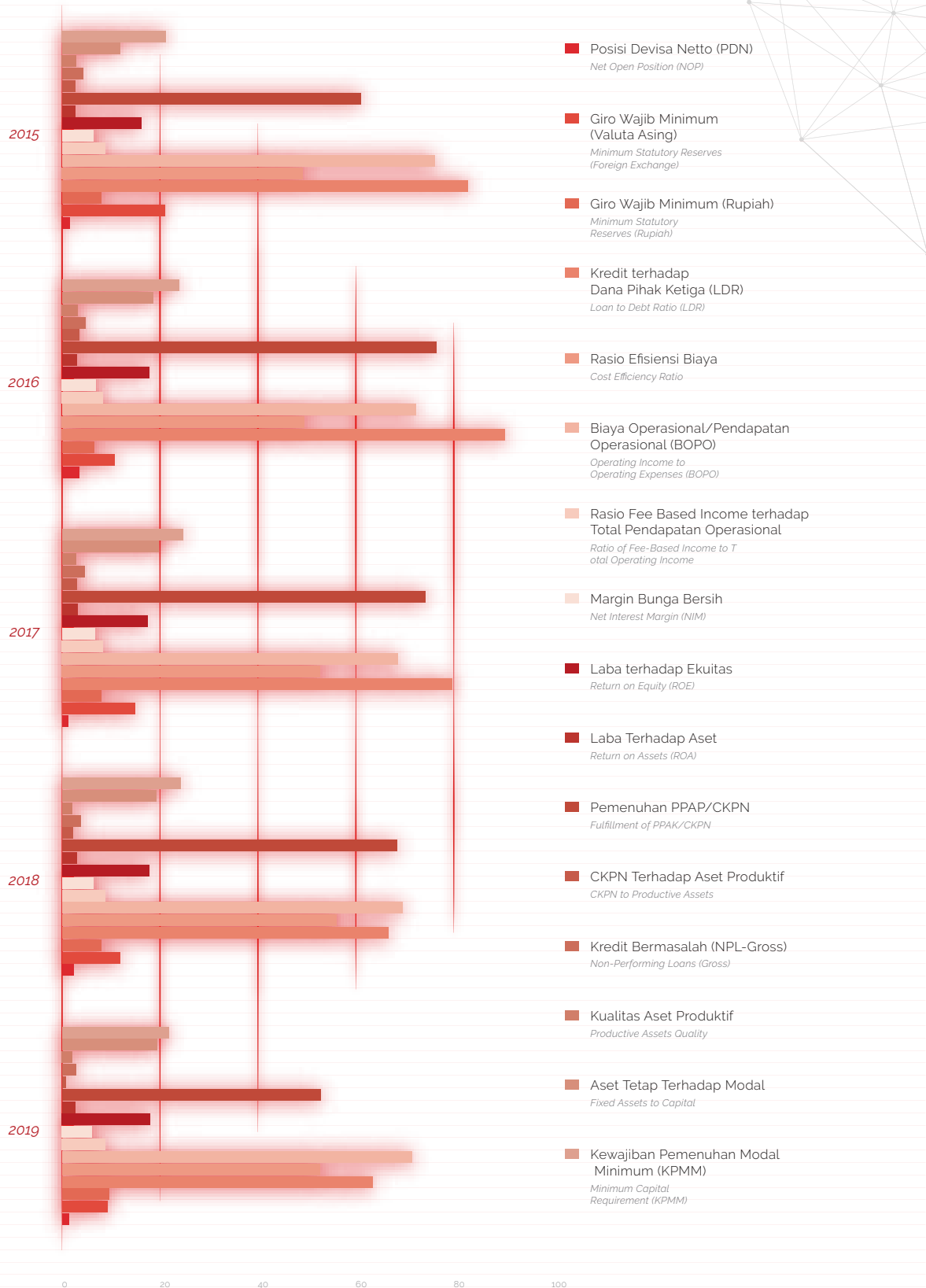
STATEMENTS OF CASH FLOWS

(JUTAAN RUPIAH)	2015	2016	2017	2018	2019	(MILLION RUPIAH)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	3.150.353	(1.132.088)	6.663.420	9.427.320	2.337.757	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(2.232.077)	2.150.089	(1.490.006)	(3.063.485)	(1.795.971)	CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(460.652)	(146.557)	(315.919)	(1.229.874)	475.026	CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
KENAikan NETTO KAS DAN SETARA KAS	457.624	871.444	4.857.495	5.133.961	1.016.812	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	8.117.680	8.575.371	9.446.524	14.304.019	19.437.785	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	8.575.371	9.446.524	14.304.019	19.437.785	20.453.366	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIOS

	2015	2016	2017	2018	2019	
KEWAJIBAN PEMENUHAN MODAL MINIMUM (KPMM)	21,22	23,88	24,65	24,21	21,77%	MINIMUM CAPITAL REQUIREMENT (KPMM)
ASET TETAP TERHADAP MODAL	11,86	18,61	19,68	19,28	19,43%	FIXED ASSETS TO CAPITAL
KUALITAS ASET PRODUKTIF	2,92	3,22	2,85	2,07	2,09%	PRODUCTIVE ASSETS QUALITY
KREDIT BERMASALAH (NPL-GROSS)	4,29	4,77	4,59	3,75	2,77%	NON-PERFORMING LOANS (GROSS)
CKPN TERHADAP ASET PRODUKTIF	2,67	3,46	3,06	2,18	0,71%	CKPN TO PRODUCTIVE ASSETS
PEMENUHAN PPAP/CKPN	60,99	76,46	74,19	68,37	52,84%	FULFILLMENT OF PPAK/CKPN
LABA TERHADAP ASET	2,67	2,98	3,12	2,96	2,73%	RETURN ON ASSETS (ROA)
LABA TERHADAP EKUITAS	16,11	17,82	17,43	17,75	18,00%	RETURN ON EQUITY (ROE)
MARGIN BUNGA BERSIH	6,41	6,94	6,68	6,37	6,11%	NET INTEREST MARGIN (NIM)
RASIO FEE BASED INCOME TERHADAP TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL	8,80	8,39	8,39	8,72	8,86%	RATIO OF FEE-BASED INCOME TO TOTAL OPERATING INCOME
BIAYA OPERASIONAL/PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO)	76,12	72,22	68,63	69,45	71,40%	OPERATING INCOME TO OPERATING EXPENSES (BOPO)
RASIO EFISIENSI BIAYA	49,17	49,49	52,72	56,01	52,65%	COST EFFICIENCY RATIO
KREDIT TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (LDR)	82,92	90,48	79,69	66,57	63,34%	LOAN TO DEBT RATIO (LDR)
GIRO WAJIB MINIMUM (RUPIAH)	7,95	6,51	7,97	7,99	9,63%	MINIMUM STATUTORY RESERVES (RUPIAH)
GIRO WAJIB MINIMUM (VALUTA ASING)	21,06	10,73	14,94	11,84	9,21%	MINIMUM STATUTORY RESERVES (FOREIGN EXCHANGE)
POSISI DEvisa NETTO (PDN)	1,60	3,53	1,19	2,35	1,33%	NET OPEN POSITION (NOP)



Ikhtisar Saham

SHARE HIGHLIGHTS

INFORMASI

INFORMATION

INFORMASI SAHAM / SHARE INFORMATION	
EMITEN / ISSUER	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
KODE SAHAM / TICKER CODE	BJTM
PENCATATAN DI BURSA EFEK / LISTING ON STOCK EXCHANGE	Bursa Efek Indonesia
BIRO ADMINISTRASI EFEK / SHARE REGISTRAR	PT. Datindo Entrycom
TANGGAL PENCATATAN / DATE OF LISTING	12 Juli 2012 / July 12, 2012

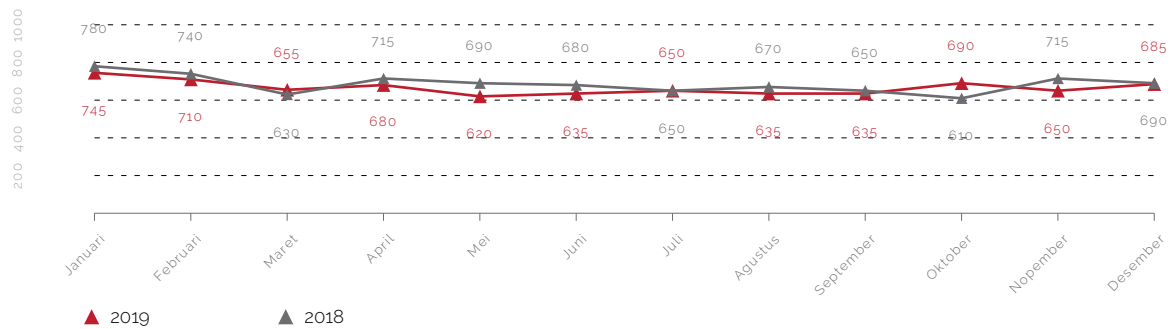
	HARGA PEMBUKAAN / OPENING PRICE	HARGA TERTINGGI / HIGHEST PRICE	HARGA TERENDAH / LOWEST PRICE	HARGA PENUTUPAN / CLOSING PRICE	JUMLAH SAHAM / TOTAL SHARES	VOLUME PERDAGANGAN / TRADING VOLUME	KAPITALISASI PASAR (MILIAR RP) / MARKET CAPITALIZATION (RP BILLION)
2019							
TRIWULAN IV / 4TH QUARTER	Rp 635,00	Rp 690,00	Rp 645,00	Rp 685,00	15.002.370.582,00	6.046.017,00	Rp 10.094,00
TRIWULAN III / 3RD QUARTER	Rp 640,00	Rp 655,00	Rp 630,00	Rp 635,00	15.002.370.582,00	4.495.971,00	Rp 9.558,00
TRIWULAN II / 2ND QUARTER	Rp 650,00	Rp 640,00	Rp 610,00	Rp 635,00	14.993.772.982,00	11.273.269,00	Rp 9.620,00
TRIWULAN I / 1ST QUARTER	Rp 700,00	Rp 715,00	Rp 635,00	Rp 655,00	14.993.772.982,00	14.509.397,00	Rp 10.522,00
2018							
TRIWULAN IV / 4TH QUARTER	Rp 655,00	Rp 715,00	Rp 600,00	Rp 690,00	14.975.852.582,00	47.306,00	Rp 10.335,00
TRIWULAN III / 3RD QUARTER	Rp 685,00	Rp 670,00	Rp 630,00	Rp 650,00	14.975.852.582,00	54.344,00	Rp 9.736,00
TRIWULAN II / 2ND QUARTER	Rp 635,00	Rp 715,00	Rp 645,00	Rp 680,00	14.975.852.582,00	78.543,00	Rp 10.184,00
TRIWULAN I / 1ST QUARTER	Rp 710,00	Rp 790,00	Rp 625,00	Rp 630,00	14.975.852.582,00	169.394,00	Rp 9.435,00

**GRAFIK HARGA PENUTUPAN DAN VOLUME
PERDAGANGAN SAHAM BANK JATIM**

**CHART OF CLOSING PRICE AND TRADING
PRICE OF BANK JATIM SHARES**

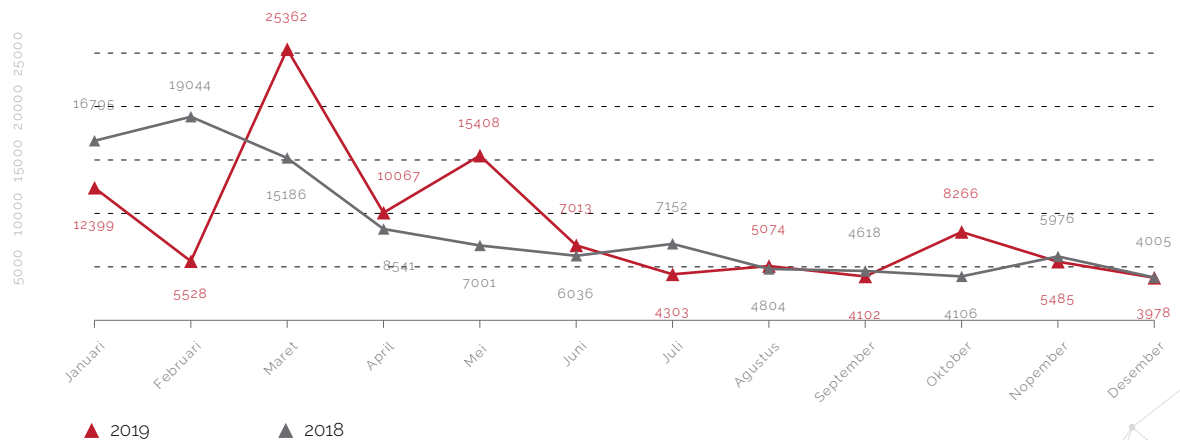
HARGA PENUTUPAN SAHAM BJTM 2018 & 2019

CLOSING PRICE OF BJTM SHARE IN 2018 & 2019



VOLUME PERDAGANGAN SAHAM BJTM 2018 & 2019

TRADING VOLUME OF BJTM SHARE IN 2018 & 2019



Aksi Korporasi

CORPORATE ACTIONS

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

TANGGAL / DATE	DESKRIPSI / DESCRIPTION	SAHAM / SHARE	NILAI NOMINAL / NOMINAL VALUE	HARGA PENAWARAN / OFFERING PRICE	JUMLAH SAHAM / TOTAL SHARES
JULI 2012 / JULY 2012	Initial Public Offering	Seri A / Series A	@Rp6.000.000.000.000	Rp430	24.000.000.000
		Seri B / Series B	@Rp3.000.000.000.000	Rp430	12.000.000.000
TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR / TOTAL ISSUED AND PAID-IN CAPITAL			Rp 3.729.421.245.500		14.917.684.982

RINCIAN HASIL PENAWARAN SAHAM / DETAILS OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING (DALAM JUTAAN RUPIAH / IN MILLIONS OF RUPIAH)

JENIS PENAWARAN UMUM / TYPE OF PUBLIC OFFERING	INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) EFEKTIF 12 JULI 2012 / EFFECTIVE ON JULY 12, 2012	JUMLAH / TOTAL
NILAI REALISASI HASIL PENAWARAN UMUM / REALIZATION OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING	Jumlah Hasil Penawaran Umum / Total Proceeds from Public Offering	1.282.921
	Biaya Penawaran Umum / Public Offering Cost	27.668
	Hasil Bersih / Net Proceeds	1.255.253
REALISASI PENGGUNAAN DANA MENURUT PROSPEKTUS / USE OF PROCEEDS ACCORDING TO PROSPECTUS	Ekspansi Kredit / Credit Expansion	1.004.202
	Ekspansi Jaringan Kantor / Office Network Expansion	125.525
	Ekspansi TI / IT Expansion	125.525
	TOTAL	1.255.253
REALISASI PENGGUNAAN DANA MENURUT PROSPEKTUS / USE OF PROCEEDS ACCORDING TO PROSPECTUS	Ekspansi Kredit / Credit Expansion	1.004.202
	Ekspansi Jaringan Kantor / Office Network Expansion	125.525
	Ekspansi TI / IT Expansion	125.525
	TOTAL	1.255.253
	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum / Remaining Proceeds from Public Offering	0

Keterangan

Dana hasil penawaran umum telah habis terpakai untuk Ekspansi Kredit, Ekspansi Jaringan Kantor dan Ekspansi Teknologi Informasi.

Description

Proceeds from public offering were used (100%) for Credit Expansion, Office Network Expansion, and Information Technology Expansion.

PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

CAPITAL INCREASE WITHOUT PREEMPTIVE RIGHTS

TANGGAL / DATE	DESKRIPSI / DESCRIPTION	SAHAM / SHARE	TAHAP / PHASE	NILAI NOMINAL / NOMINAL VALUE	HARGA PENAWARAN / OFFERING PRICE	JUMLAH SAHAM / TOTAL SHARES
1 Agustus – 13 September 2016 / August 1-September 13, 2016	Program MESOP Win Ex. II Thn 2016	Seri B / Series B	I	Rp6.843.150.000	Rp450	27.372.600
			II	-	Rp409	-
			III	-	Rp599	-
TOTAL TAMBAHAN SETORAN / TOTAL PAID CAPITAL				Rp6.843.150.000		27.372.600

1 Februari – 14 Maret 2017 / February 1-March 14, 2017	Program MESOP Win Ex. I Thn 2017	Seri B / Series B	I	Rp310.400.000	Rp450	1.241.600
			II	-	Rp409	-
			III	-	Rp599	-
TOTAL TAMBAHAN SETORAN / TOTAL PAID CAPITAL				Rp310.400.000	1.241.600	1.241.600
1 Agustus – 13 September 2017 / August 1-September 13, 2017	Program MESOP Win Ex. II Thn 2017	Seri B / Series B	I	Rp450.125.000	Rp450	1.800.500
			II	Rp6.622.925.000	Rp409	26.491.700
			III	-	Rp599	-
TOTAL TAMBAHAN SETORAN / TOTAL PAID CAPITAL				Rp7.073.050.000	28.292.200	28.292.200
1 Februari – 15 Maret 2018 / February 1-March 15, 2018	Program MESOP Win Ex. I Thn 2018	Seri B / Series B	I	Rp74.425.000	Rp450	297.700
			II	Rp240.875.000	Rp409	963.500
			III	-	Rp599	-
TOTAL TAMBAHAN SETORAN / TOTAL PAID CAPITAL				Rp315.300.000	1.261.200	1.261.200
1 Agustus – 14 September 2018 / August 1-September 14, 2018	Program MESOP Win Ex. II Thn 2018	Seri B / Series B	I	-	Rp450	-
			II	Rp91.350.000	Rp409	365.400
			III	Rp479.250.000	Rp599	1.917.000
TOTAL TAMBAHAN SETORAN / TOTAL PAID CAPITAL				Rp570.600.000		2.282.400
TOTAL TAMBAHAN SETORAN MODAL HASIL PROGRAM MESOP TAHUN 2016 – 2018 / TOTAL PAID CAPITAL AS THE RESULT OF MESOP PROGRAM OF 2016-2018				Rp15.112.500.000		60.450.000
TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR SAHAM SERI B SEBELUM MESOP / TOTAL ISSUED AND PAID CAPITAL OF SERIES B SHARES BEFORE MESOP				Rp745.884.250.000		2.983.537.000
TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR SAHAM SERI B / TOTAL ISSUED AND PAID CAPITAL OF SERIES B SHARES				Rp760.996.750.000		3.043.987.000

Sepanjang 2019, Bank Jatim melakukan Aksi Korporasi sebagai berikut:

In 2019, Bank Jatim executed the following Corporate Actions:

1. PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. CAPITAL INCREASE WITHOUT PREEMPTIVE RIGHTS

TANGGAL / DATE	DESKRIPSI / DESCRIPTION	SAHAM / SHARE	TAHAP / PHASE	NILAI NOMINAL / NOMINAL VALUE	HARGA PENAWARAN / OFFERING PRICE	JUMLAH SAHAM / TOTAL SHARES
1 Februari – 18 Maret 2019 / February 1-March 10, 2019	Program MESOP Win Ex. I Thn 2019	Seri B / Series B	I	-	Rp 450	-
			II	Rp12.125.000	Rp 409	48.500
			III	Rp3.897.375.000	Rp 599	15.589.500
TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR / TOTAL ISSUED AND PAID CAPITAL				Rp3.909.500.000		15.638.000
1 Agustus – 11 September 2019 / August 1-September 11, 2019	Program MESOP Win Ex. II Thn 2019	Seri B / Series B	I	Rp265.525.000	Rp 450	1.062.100
			II	Rp185.375.000	Rp 409	741.500
			III	Rp1.698.500.000	Rp 599	6.794.000
TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR / TOTAL ISSUED AND PAID CAPITAL				Rp2.149.400.000		8.597.600
TOTAL TAMBAHAN SETORAN MODAL HASIL PROGRAM MESOP 2019 / TOTAL PAID CAPITAL AS THE RESULT OF MESOP PROGRAM OF 2019				Rp6.058.900.000		24.235.600
TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR SAHAM SERI B SEBELUM MESOP 2019 / TOTAL ISSUED AND PAID CAPITAL OF SERIES B SHARES BEFORE MESOP				Rp760.996.750.000		3.043.987.000
TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR SAHAM SERI B / TOTAL ISSUED AND PAID CAPITAL OF SERIES B SHARES				Rp767.055.650.000		3.068.222.600

Keterangan

Dana hasil Penambahan Modal Tanpa Hak memesan Terlebih Dahulu melalui Program MESOP digunakan sebagai tambahan modal bank jatim.
Description:

Description:

Proceeds from Capital Increase without Preemptive Rights through MESOP Program were used as additional capital for Bank Jatim.

2. PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUYBACK)

2. SHARE BUYBACK

	TANGGAL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM / DATE OF SHARE BUYBACK	JUMLAH DANA / TOTAL FUNDS	HARGA RATA-RATA PEMBELIAN / AVERAGE BUYING PRICE	JUMLAH SAHAM / TOTAL SHARES
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUYBACK) / SHARE BUYBACK	1 Mei 2019 – 31 Juli 2019 / May 1-July 31, 2019	Rp1.194.824.612,50	Rp626,48	19.072

Keterangan:

Pembelian Kembali Saham (Buyback) sesuai dengan Persetujuan Keputusan RUPST tanggal 26 April 2019, Mata Acara Kelima: Persetujuan Rencana Pembelian Kembali Saham (Buyback) Dalam Rangka Pelaksanaan Long Term Incentive (LTI).

Description:

Share Buyback was in accordance with the Resolution of AGMS dated April 26, 2019; Fifth Agenda, i.e. Approval for the Share Buyback Plan in the Framework of Long-Term Incentive (LTI) Implementation.

Ikhtisar Obligasi

BONDS HIGHLIGHTS

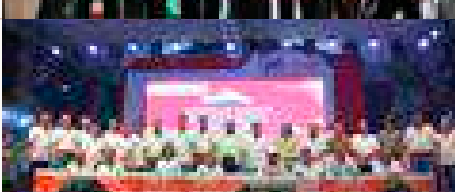
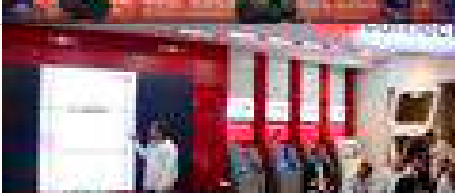
OBLIGASI / BONDS	TANGGAL PENERBITAN / ISSUANCE DATE	TANGGAL JATUH TEMPO / MATURITY DATE	TENOR	KUPON / COUPON	MATA UANG / CURRENCY	NOMINAL (RP)	STATUS	PERINGKAT / RATING
Nihil / None								



Peristiwa Penting

EVENT HIGHLIGHTS

WAKTU / DATE	EVENT	
18 JANUARY	Bank Jatim dan ASABRI Tanda Tangan Perjanjian Kerjasama tentang Pembayaran Pensiun Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.	<i>Bank Jatim and ASABRI Signed Cooperation Agreement on Pension Payment of TNI Soldiers, Police Members, and State Civil Apparatus</i>
16 FEBRUARY	Melesat di Tahun 2018, Bank Jatim Raup Laba Bersih 1.26 T	<i>Dashing in 2018, Bank Jatim Gains 1.26 T Net Profit</i>
30 MARCH	Fasilitasi Nasabah Milenial, Bank Jatim Luncurkan Jatimcode	<i>Facilitating Millennial Customers, Bank Jatim Launched Jatimcode</i>
26 APRIL	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2018	<i>Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk of 2018 Fiscal Year</i>
29 APRIL	Bank Jatim Raih TOP BUMD Tiga Tahun Berturut-Turut	<i>Bank Jatim Won TOP BUMD in Three Consecutive Years</i>
16 MAY	Bank Jatim Raih Penghargaan Digital Brand Award 2019	<i>Bank Jatim Won 2019 Digital Brand Award</i>
17 MAY	Bank Jatim dan Grab Bersinergi Untuk Tingkatkan Layanan Nasabah	<i>Synergy of Bank Jatim and Grab to Improve Customer Service</i>
18 MAY	Bank Jatim Ramaikan Ramadan Dengan Pasar Buah Murah	<i>Bank Jatim Enlivens Ramadhan With Cheap Fruit Market</i>

			
12 JUNE	Brand Value Meningkat Signifikan, Bank Jatim Raih Penghargaan Indonesia Top 100 Most Valuable Brands 2019	Significant Brand Value Improvement, Bank Jatim Won Indonesia Top 100 Most Valuable Brands Award 2019	
3 JULY	Bank Jatim menjalin kerjasama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Bank Jatim collaborates with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	
24 JULY	Berbagai Inovasi Dan Penghargaan Mewarnai Pencapaian Kinerja Semester I Bank Jatim Yang Membanggakan	Various Innovations and Awards color the achievement of the First Half Performance of Bank Jatim to be Proud of	
7 AUGUST	Bank Jatim dan GoPay Bersinergi Permudah Pembayaran Pajak Negara	Synergy of Bank Jatim and GoPay to Simplify State Tax Payments	
12 SEPTEMBER	Nabung Saham Bermodalkan Sampah, Bank Jatim Bersama UINSA Raih Rekor MURI	Share Investment through Trash, Bank Jatim and UINSA Wins MURI Record	
15 SEPTEMBER	Judika Menjadi Pembuka Rangkaian Undian SIMPEDA Bank Jatim 2019	Judika Opens the 2019 SIMPEDA Bank Jatim Lottery Series	
27 OCTOBER	Launching Kantor Kas Di Mall, Bank Jatim Fasilitasi Nasabah Milenial	Launching of Cash Offices in Mall, Bank Jatim Focused on Millennial Customers	
20 NOVEMBER	Bank Jatim Serahkan CSR Kepada Pemkot Surabaya	Bank Jatim Submitted CSR Funds to Surabaya Municipality Government	
11 DECEMBER	Bank Jatim Raih Penghargaan Top 20 Financial Institution 2019 & Best CFO 2019 Kategori Bank Buku 3	Bank Jatim Won Top 20 Financial Institution Award 2019 & Best CFO 2019 for the category of Bank Buku 3	
30 DECEMBER	Pilot Project Implementasi QRIS di Banyuwangi	QRIS Implementation Pilot Project in Banyuwangi	

Penghargaan

AWARDS

PENEYELENGGARA / ORGANIZER	PREDIKAT / PREDICATE	TEMA AWARDING / THEME	BULAN / MONTH
SINDOWEELY	CSR peduli Lingkungan	CSR AWARD	31 January 2019
INFOBANK	Peringkat III Kategori NPS	SLE AWARD	14 March 2019
	Peringkat III Kategori Satisfaction Indeks Satpam BPD		
	Peringkat I Kategori Satisfaction Indeks 2019 Fisik BPD		
	Peringkat II Kategori Satisfaction Indeks 2019 ATM BPD		
PR INDONESIA	Brand Visual Identity	Public Relation Indonesia Awards 2019	28 March 2019
	Website		
OBSESSION MEDIA GROUP	CEO BPD Terbaik	Obsession TOP CEO Award	01 March 2019
WARTA EKONOMI	Indonesia Financial Leader kategori Bank Pembangunan Daerah	Indonesia Financial Leader	29 April 2019
BUSSINESS NEWS	TOP BUMD Of The Year 2019	TOP BUMD	29 April 2019
	TOP BUMD Best All Criteria 2019		
	TOP BUMD BPD 2019		
	TOP CEO BUMD 2019		
	Pembina TOP BUMD 2019		
INFOBANK	Peringkat II kategori Bank Umum Konvensional Modal Inti Rp. 5T s/d di bawah Rp. 30 T (Buku 3) Aset Rp. 50 T s/d dua bawah Rp. 100 T Corporate Brand Bank Jatim	8th Infobank Digital Brand Awards 2019	19 May 2019
	Peringkat II kategori Unit Usaha Syariah-Bank Umum Konvensional Aset 1 T s/d di bawah Rp. 2,5 T Corporate Brand Awards 2019		
	Peringkat II kategori KPR Bank Umum Konvensional Product Brand Kredit Properti Bank Jatim		
SWANETWORK	Peringkat 67	Indonesia's Top 100 Most Valuable Brands 2019	12 June 2019
INFOBANK	Peringkat V Best Overall Performance di atas Bank Sulutgo, Bank Sumut, dan Bank Sumselbabel;	Infobank Banking Service Excellence	27 June 2019
	Peringkat I Performa SMS Banking		
	Peringkat III Performa Internet Banking		

ASOSIASI ANALIS EFEK INDONESIA (AAEI) DAN CSA RESEARCH	Penghargaan sebagai emiten pilihan CSA Awards 2019	CSA Awards 2019	18 July 2019
ASIAN POST / INFOBANK	BPD Terbaik (Peringkat I) kategori BPD Aset 50 T sampai dibawah 100 T	Penghargaan "Kepala Daerah dan BUMD Terbaik 2019"	26 July 2019
INFOBANK	<i>The Best Bank in Structure Finance 2019</i> atas kinerja sangat bagus 2004 - 2018	24 th Infobank Awards 2019	29 August 2019
ANUGERAH HUMAS INDONESIA	Terpopuler di Media Online kategori BUMD	Humas Indonesia	30 August 2019
CORPORATE FORUM FOR COMMUNITY DEVELOPMENT (CFCD)	CSR Based on SNI ISO 26000:2013 kat. Silver atas pencapaian SDGs 6	ISDA 2019	06 September 2019
MUSEUM REKOR DUNIA INDONESIA	Rekor Muri penyelenggara pendukung menabung saham dari penjualan sampah oleh mahasiswa terbanyak	Museum Rekor Dunia Indonesia	12 September 2019
PRIMA INFOBANK	<i>Best Issuer Bank Category Tier 3 - Regional Bank</i> <i>Best E-Channel Transaction Bank Category Tier 3 - Regional Bank</i>	PRIMA Awards	10 October 2019
SWANETWORK	Indonesia Living Legend Companies 2019	Indonesia Living Legend Companies	24 October 2019
FORBES INDONESIA	Best of The Best* 50 high-performing public listed companies in Indonesia (August 2019 Issue)	Majalah Forbes Indonesia	30 October 2019
NATIONAL CENTER FOR SUSTAINABILITY REPORTING (NCSR)	Silver Rank	Asia Sustainability Reporting Rating 2019	01 November 2019
MUSEUM REKOR DUNIA INDONESIA	Rekor Muri Penempelan QR Code Terbanyak di Kotak Amal	Rekor Muri Indonesia	09 November 2019
WALIKOTA SURABAYA / MAYOR OF SURABAYA	Atas Partisipasi dalam Rangka Peningkatan Sarana Sanitasi yang Layak untuk Mewujudkan Kota Surabaya Stop Buang Air Besar Sembarangan	Hari Pahlawan	10 November 2019
WARTA EKONOMI	Bank Berpredikat "SEHAT" kategori BUKU 3 Dengan Aset Antara 50 - 100 Triliun	Indonesia Best Bank Award 2019	15 November 2019
WARTA EKONOMI	Best Banking Award 2019 "Surviving and Thriving The Next Downturn" Bank Berpredikat "SEHAT"	Best Banking Award 2019 "Surviving and Thriving The Next Downturn"	
PT. TEMPO INTI MEDIA HARIAN	pemenang Tempo Finansial Business Award 2019: "The Best in Retail Banking Services: kategori BPD"	Tempo Finansial Business Award 2019	27 November 2019
INFOBANK/THE FINANCE	<i>The Best CFO in Financial Institution 2019</i> <i>The Best Performing Bank 2019 Based on Financial Performance 2017 - 2019</i>	Top 20 Financial Institution & Best CFO.	11 December 2019
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR / PROVINCIAL GOVERNMENT OF EAST JAVA	Grand Inovasi	BUMD Jatim Awards	17 December 2019

A photograph of an office environment. In the foreground, a man wearing a white shirt and a red tie is seated at a desk, working on a computer. Behind him, another person is visible, also working at a computer. The office has a modern feel with large windows in the background. A large, dark red diagonal graphic overlay covers the bottom left portion of the image, containing the page number and title.

2

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Dewan Komisaris mengawasi strategi, kebijakan dan kinerja bank agar mampu mencapai target serta visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk itu, Dewan Komisaris aktif memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Salah satunya melalui laporan tahunan ini, Dewan Komisaris mengungkapkan tugas pengawasannya melalui laporan tahunan. Laporan tahunan menjadi sumber informasi bagi pemegang saham, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan lainnya termasuk regulator. Laporan tahunan ini menyajikan aktivitas bank dalam mencapai hasil serta menyampaikan peran aktif Dewan Komisaris dalam mengawasi proses bisnis, terutama terkait dengan tata kelola perusahaan.

BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Peace be upon you,

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

The Board of Commissioners has supervised the Bank's strategies, policies, and performance in order to meet the determined targets and to realize the vision and mission. In regard to this, the Board of Commissioners has also actively provided advice to the Board of Directors for the implementation of their duties and responsibilities.

Through this annual report, we shall disclose our supervisory and advisory activities since the report serves as a source of information for not only the shareholders but also other stakeholders, including the regulators. This Annual Report contains information on the Bank's activities carried out over the course of 2019 to realize its targets, as well as our account in supervising business process, specifically in relation to corporate governance activities.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN BANK

Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi berdasarkan target yang telah disepakati, sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank yang ditetapkan di awal tahun. Selain itu, Dewan Komisaris juga memperhatikan penerapan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang telah dilakukan oleh Direksi.

Dewan Komisaris juga tidak menutup kemungkinan pada kondisi eksternal, terutama terkait dengan perkembangan ekonomi yang dijadikan pertimbangan dalam melihat hasil dari kinerja manajemen. Dalam pandangan kami, proses bisnis telah dijalankan dengan baik, dan sesuai dengan tata kelola perusahaan.

TINJAUAN MAKRO EKONOMI

Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2019 dinilai masih menunjukkan perkembangan positif, melihat beberapa indikator di antaranya pertumbuhan, inflasi serta perbankan. Sampai dengan Semester I 2019, ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada kisaran 5% meskipun ekonomi dunia tumbuh melambat akibat dampak ketidakpastian global. ekonomi Indonesia pada Semester II-2019 masih ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga juga didorong beberapa faktor musiman di Semester II 2019 di antaranya adalah menguatnya Konsumsi Rumah Tangga dan meningkatnya realisasi Belanja Pemerintah pada akhir kuartal setiap tahunnya. Sementara itu, secara *year-to-date* (ytd) Desember 2019, inflasi tercatat sebesar 2,72%. Capaian tersebut disebabkan oleh terkendalinya inflasi komponen seiring terjaganya produktivitas dan persediaan stok bahan pangan. Pengendalian inflasi juga terkait dengan komitmen pemerintah dalam menjaga inflasi komponen harga diatur pemerintah, seperti bahan bakar dan energi.

Pada 2019, Nilai tukar Rupiah juga positif dengan dukungan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang membaik. Penguatan Rupiah didukung oleh pasokan valas dari para eksportir dan aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut, daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap besar, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda. Ke depan, Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah tetap stabil sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar yang terjaga.

Sementara likuiditas di pasar uang dan perbankan tetap memadai, tercermin pada rerata harian volume Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang tinggi serta rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang besar. Rerata tertimbang suku bunga deposito sebelum BI7DRR mulai diturunkan di bulan Juli 2019. Penurunan suku bunga perbankan juga diikuti oleh penurunan *yield* obligasi korporasi dan *yield* SBN 1 tahun masing-masing 73 bps dan 125 bps sejak Juli 2019. Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Oktober 2019 bergerak sejalan dengan pola pertumbuhan ekonomi yakni masing-masing 6,63% (yoy) dan 6,34% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi di pasar uang, serta memperkuat transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.

ASSESSMENT ON BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE IN MANAGING THE BANK

We assess the Board of Director's performance based on the established targets as stipulated in the Bank's Business Plan set forth at the beginning of the year. We also take into account the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles carried out by the Board of Directors during the year.

Furthermore, we observe the external factors, particularly those related to the economic development in 2019, in assessing the performance of the Bank's management. In our opinion, the Bank's business process was carried out remarkably well in 2019 and was in accordance with the applicable corporate governance principles.

MACROECONOMIC OVERVIEW

Indonesia's economic performance in 2019 was considered to show positive development as reflected in several indicators, such as growth, inflation, and banking industry. Up to Semester I of 2019, Indonesia's economy was able to grow at around 5% despite the slowdown of global economy due to the impact of world-wide uncertainty in various sectors. Domestic economy in Semester II of 2019 was supported by Household Consumption as well as several seasonal factors, including the strengthening of Household Consumption and increased realization of Government Expenditures at the end of every quarter. Meanwhile, inflation was recorded at 2.72% year-to-date (ytd) as of December 2019 due to the controlled inflation components as productivity and food availability were maintained. The controlled inflation rate was also related to the government's commitment to maintain costs, such as those of fuel and energy.

The Rupiah exchange rate in 2019 was positive due to the support of the improving performance of Indonesia's Balance of Payment. The strengthening of the Rupiah was driven by the supply of foreign exchange from exporters and the continued foreign capital inflow, the high attractiveness of the domestic financial market, and the ease of uncertainty in the global financial market. Looking ahead, Bank Indonesia viewed that the Rupiah exchange rate would remain stable in accordance with its fundamentals and maintained market mechanism.

Meanwhile, liquidity on the money market and banking sector remained adequate as evidenced in the high average daily volume of the Interbank Money Market and the high ratio of Liquidation to Third Party Funds. The weighted average deposit rate before BI7DRR began to be lowered in July 2019. The decline in bank interest rates was also followed by a decrease in corporate bond yields and 1-year SBN yields by 73 bps and 125 bps, respectively, since July 2019. Meanwhile, the growth of money supply in the narrow sense (M1) and in the broad sense (M2) in October 2019 moved in line with the economic growth pattern, namely 6.63% (yoy) and 6.34% (yoy), respectively. Thus, Bank Indonesia would continue to ensure adequate liquidity and improve efficiency on the money market, as well as strengthen the issuance of an accommodative policy mix.

Stabilitas sistem keuangan terjaga tercermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/ CAR) perbankan Oktober 2019 yang tinggi yakni 23,44%, dan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang tetap rendah yakni 2,73% (gross) atau 1,25% (net).

Pada akhir tahun 2019 pertumbuhan kredit dan Dana Pihak ketiga mengalami pelambatan dan pada tahun 2020, pertumbuhan kredit dan pertumbuhan DPK diperkirakan membaik masing-masing dalam kisaran 10-12% dan 8-10% sejalan dengan prospek peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia tetap menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait sehingga dapat tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong fungsi intermediasi perbankan.

Beberapa faktor yang menopang kinerja adalah ekspansi Bisnis yang masih cukup baik, kualitas aset yang terjaga, stabilnya pertumbuhan pendapatan operasional, serta perbaikan efisiensi kegiatan operasional perbankan. Kami cukup optimistis profitabilitas perbankan akan membaik pada 2020. Hal ini didorong oleh pertumbuhan Ekonomi yang lebih tinggi, serta terjeganya berbagai indikator ekonomi makro. Stabilitas sistem keuangan terjaga terlihat dari penyaluran kredit perbankan yang tumbuh terbatas pada 2019 dan akan meningkat pada 2020 sejalan turunnya suku bunga dan membaiknya prospek ekonomi. Dalam jangka menengah, prospek ekonomi Indonesia akan semakin baik.

The stability of financial system was maintained as reflected in the high Capital Adequacy Ratio (CAR) of the banking sector, which was 23.44% as of October 2019, and the Non-Performing Loan (NPL) ratio which remained low at 2.73% (gross) or 1.25% (net).

At the end of the year, the growth of bank loan and third party fund slowed down, while by 2020, the growth of bank loan and third party fund were expected to improve to be in the range of 10-12% and 8-10%, respectively, in line with the economic growth prospect. Going forward, Bank Indonesia would continue to adopt accommodative macro-prudential policies and strengthen coordination with relevant authorities in order to maintain financial system stability and encourage the banking intermediary function.

Several factors that supporting the economic performance were the relatively positive business expansion, the maintained quality of assets, the stable growth of operating income, and the improved efficiency of banking operations. "We are optimistic that banking sector profitability will improve in 2020 as it will be driven by higher economic growth and the preservation of various macroeconomic indicators." The stability of the financial system could also be seen from the limited growth of bank loan disbursement in 2019, which is projected to increase in 2020 in line with lower interest rates and improving economic prospects. In the medium term, we believe that Indonesia's economic prospects will improve.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN

Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi implementasi strategi yang dijalankan Direksi sebagai respon atas dinamika kondisi perekonomian selama tahun 2019. Strategi yang diimplementasikan dalam operasional bank masih sejalan dengan Kebijakan Umum Direksi Tahunan yang ditetapkan di awal tahun.

Kinerja Bank Jatim 2019 secara keseluruhan telah tercapai sesuai RBB & menunjukkan pertumbuhan yang baik, namun masih perlu ditingkatkan mengenai pengendalian intern terhadap pengelolaan usaha, karena masih ditemukan terjadi kesalahan prosedur yang berpotensi menimbulkan kerugian Bank.

1. Kinerja Keuangan

- Dalam rencana bisnis bank (RBB) target yang direncanakan adalah target Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit yang diberikan tercapai masing-masing 116,01%, 110,10% dan 102,38%.
- Laba tercapai 100,60% dari target yang ditetapkan, begitu juga ROA dan ROE, di atas ketentuan yang berlaku.
- Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 71,40%, lebih baik dibanding target 70,29% yang direncanakan dan Net Interest Margin (NIM) tercapai 6,11% sedang target 6,47%.

2. Profil Risiko tergolong *Low to Moderate*, dengan komposisi risiko sebagai berikut:

- Risiko Inherent:

SUPERVISION ON STRATEGY IMPLEMENTATION

The Board of Commissioners supervises and assesses the implementation of strategies by the Board of Directors in response to the dynamics of economic conditions during 2019. The strategies implemented in the Bank's operations remained in line with the Annual General Policies of the Board of Directors established at the beginning of the year

In general, Bank Jatim managed to deliver encouraging performance in 2019 in accordance with the RBB and was able to demonstrative positive growth. Nonetheless, we are of the opinion that the Bank's performance can still be improved in regard to the internal control in business management as there were still procedural errors found that had the potential to cause losses.

1. Financial Performance

- The targets for Total Assets, Third Party Funds, and Loans set in the Bank's Business Plan were achieved in 2019, reaching 116.01%, 110.10%, and 102.38%, respectively.
- Profit managed to reach 100.60% of the set target, while ROA and ROE were also exceeded requirements.
- Meanwhile, the Operating Income to Operating Expense (BOPO) Ratio reached 71.40%, better than the targeted 70.29% with Net Interest Margin (NIM) reaching 6.11% of the targeted 6.47%.

2. The Bank's risk profile was in the Low to Moderate category with risk composition as follows:

- Inherent Risk:

(1) Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi tergolong *Low to Moderate*.

(2) Risiko Kredit dan Risiko Operasional tergolong *Moderate*.

- Pengendalian Risiko

Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Bank telah mengukur dan memantau secara rutin dengan mempertimbangkan berbagai komponen risiko dan telah disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu kepada Komite Manajemen Risiko/Direksi.

(1) Market Risk, Liquidity Risk, Legal Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, and Reputation Risk were of the Low to Moderate category.

(2) Credit Risk and Operational Risk were of the Moderate category.

- Risk Control

The Bank's risk control policy stipulated adequate references for the risk identification and measurement processes. The Bank continued to measure and monitor its risks regularly by taking into account numerous risk components. The Bank also compiled the risks accurately and submitted the risk report in a timely manner to the Risk Management Committee/Board of Directors.

TINGKAT KESEHATAN BANK

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dinilai memadai (fair). Berdasarkan parameter risiko tersebut, yang perlu mendapat perhatian oleh Direksi adalah Risiko Kredit dan Risiko Operasional. Disamping itu dalam rangka penilaian tingkat kesehatan Bank (*Internal Risk Bank Rating*), yang meliputi penerapan tata kelola yang baik (GCG), profil risiko, *earning* dan *capital*, posisi Bank Jatim masih pada peringkat 2 (sehat).

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Direksi telah menyusun prospek usaha Perseroan pada satu tahun mendatang, yaitu tahun 2020. Peluang dan target yang disusun tersebut telah melalui pertimbangan yang baik, yaitu dengan melihat faktor eksternal seperti situasi perekonomian secara umum serta kondisi internal, yaitu potensi yang dimiliki Bank Jatim.

Saat ini perekonomian global dihadapkan pada berbagai kendala dan ketidakpastian yang antara lain tercermin dari lambatnya pertumbuhan ekonomi Negara-negara maju, termasuk dampak kebijakan ekonomi pemerintahan baru Amerika Serikat, serta masih berlangsungnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Dinamika perekonomian global tersebut berpengaruh terhadap perekonomian nasional diantaranya terbatasnya belanja investasi pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Namun demikian dengan berbagai paket kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah dan terjaganya stabilitas ekonomi makro antara lain inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang relatif stabil.

Ditengah kondisi perekonomian tersebut, industri perbankan nasional masih dapat mempertahankan kinerjanya dengan baik, tercermin dari indikator rasio permodalan Bank Umum yang berada dikisaran 23% dan dinilai cukup memadai untuk menyerap potensi risiko bisnis, keuntungan yang masih terjaga dan rasio NPL yang terjaga dibawah *threshold* 5%. Sejalan dengan industri perbankan nasional, Bank Jatim juga mampu mempertahankan kinerjanya tercermin dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 21,76%. Dengan membaiknya kondisi pasar pada tahun 2020 menjadi harapan yang baik bagi perseroan untuk meraih pasar yang luas, dengan pembiayaan beberapa proyek infrastruktur, utamanya proyek-proyek di Jawa Timur. Selain itu komitmen perseroan untuk meningkatkan

HEALTH LEVEL OF THE BANK

The quality of Risk Management implementation in the Bank was deemed fair. According to the risk parameter, the Board of Directors needed to observe the Credit Risk and the Operational Risk. In addition, the measurement of the Bank's health level (*Internal Risk Bank Rating*), which covered the implementation of GCG, risk profile, earnings and capital, showed that the Bank managed to maintain its position at level 2 (healthy).

VIEWS ON BUSINESS OUTLOOK

The Board of Directors has prepared the Bank's business outlook for the coming year of 2020. The opportunities and targets for the following year have been prepared through proper considerations, namely by considering several external and internal factors, such as the economic situation in general and the potential of Bank Jatim.

Currently, global economy faces various constraints and uncertainties, such as the sluggish economic growth of developed countries, including the impact of the economic policies issued by the new US administration, as well as the ongoing geopolitical conflict in the Middle East. The dynamics of global economy undoubtedly affect the national economy in the form of, among others, limited government spending for investment to drive the economic growth. Nonetheless, various economic policy packages issued by the Government and the maintained macroeconomic stability, including controlled inflation and a relatively stable exchange rate, will continue to become the mainstay for the country's economic growth.

Amid such economic conditions, the national banking industry is optimistic to be able to maintain its performance as evidenced in the Commercial Bank's capital ratio indicator at around 23%, which is considered sufficient to absorb potential business risks, the maintained profit acquisition, and the NPL ratio that is kept below the 5% threshold. In line with the national banking industry, we are optimistic that Bank Jatim will still be able to maintain its remarkable performance in years to come as reflected in its Capital Adequacy Ratio (CAR) of 21.76% in 2019. The improving market conditions in 2020 will bring positive hope for the Bank to gain a broad market through the financing of several infrastructure projects, mainly those in East Java. In addition, our commitment to enhance the role

peran UMKM dalam mendukung perekonomian daerah Jawa Timur dilakukan dengan bekerja sama pihak terkait.

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global dan domestik serta tantangan persaingan perbankan tahun 2020, Bank Jatim harus tetap melanjutkan inisiatif strategis untuk tumbuh di segmen perbankan UKM, Konsumer dan Komersial, melakukan restrukturisasi bisnis mass market serta kegiatan pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Bank Jatim harus berinovasi secara berkelanjutan dalam mempersiapkan diri dari segi penguasaan dan pengembangan teknologi digital serta memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang handal antara lain melalui penataan dan resosialisasi budaya kerja sehingga Bank Jatim akan lebih fokus dan unggul, serta terdepan dalam penerapan teknologi informasi serta pemanfaatan layanan digital banking yang mampu mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih besar dan berkesinambungan.

Dewan Komisaris menilai, Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2020 dan untuk tiga tahun ke depan cukup realistis. Hal itu dilihat dari peluang yang ada di lingkungan bisnis, sumber daya yang dimiliki Bank Jatim dan konsep kerja Direksi. Dewan Komisaris berpendapat target-target positif dan optimis yang dicantumkan di dalam Rencana Bisnis Bank bisa dicapai. Dengan sumber daya yang sangat besar, jaringan unit kerja yang menyebar dan jangkauan layanan paling luas, Bank Jatim selanjutnya menekankan perhatian khusus pada penguatan sistem pengendalian intern. Ada beberapa target khusus yang ditetapkan untuk disampaikan kepada Direksi, terkait mengungguli ranking Bank Pembangunan Daerah di Jawa untuk tiga tahun ke depan.

Kami berharap Bank Jatim terus tumbuh di segmen perbankan UKM, Konsumer dan Komersial serta melaksanakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga peran Bank Jatim sebagai agen pembangunan dan pemerataan pembangunan khususnya di Jawa Timur dapat terwujud secara nyata.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN GCG

Bank Jatim telah memiliki standar acuan yang sangat baik terkait dengan prinsip-prinsip penerapan GCG bagi perbankan. Lingkup standar implementasi GCG Bank Jatim mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Setiap tahun, kualitas penerapan GCG dinilai, baik oleh OJK maupun penilaian sendiri (self assessment). Seluruh rekomendasi dari hasil penilaian, selanjutnya ditindaklanjuti sebagai bagian dari proses penyempurnaan.

Dewan Komisaris meyakini, penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik secara terintegrasi dan manajemen risiko sudah cukup baik. Hal itu akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, dari para pemegang saham hingga publik, sehingga mampu meningkatkan nilai positif bagi perusahaan. Dalam pandangan Dewan Komisaris, manajemen telah mengimplementasikan penerapan GCG yang baik dan konsisten di lingkungan Perseroan. Dari penerbitan standar acuan pelaksanaan, sosialisasi, implementasi, hingga evaluasi.

of MSMEs in supporting the East Java regional economy will continue to be carried out in collaboration with relevant parties.

Bank Jatim needs to continue its strategic initiatives to grow in the SME, Consumer, and Commercial Banking segments, to restructure mass market businesses, and carry out more targeted marketing activities to be able to address the dynamics of the global and domestic economies as well as the competitive challenges in banking industry in 2020. The Board of Commissioners views that Bank Jatim needs to make continuous innovations in order to prepare and master the development of digital technology. The Bank also needs to strengthen and create reliable Human Resources (HR) through structuring and re-socializing work culture so that its operations can be more focused and superior, and be the foremost in the implementation of information technology and the use of digital banking services, which are able to drive greater and sustainable business growth.

We consider that the Bank's Business Plan (RBB) for 2020 and for the next three years is fairly realistic as observed from the opportunities of the business environment, the resources of the Bank, and the work concept of the Board of Directors. We believe that the positive and optimistic targets set forth in the Bank's Business Plan can be achieved. With enormous resources, an extensive network of work units, and the widest range of services, Bank Jatim needs to put emphasis on strengthening the internal control system. There are a number of specific targets set to be submitted to the Board of Directors related to surpassing the ranking of Regional Development Banks in Java for the next three years.

We hope that Bank Jatim will continue to grow in the SME, Consumer, and Commercial Banking segments and carry out optimum distribution of People's Business Loan (KUR) in accordance with applicable regulations, so that the role of Bank Jatim as an agent of development supporting equal development distribution, especially in East Java, can be manifested.

VIEWS OF GCG IMPLEMENTATION

Bank Jatim has already established an excellent reference standard for the implementation of GCG principles in the banking sector. The scope of GCG implementation standards of Bank Jatim refers to the Regulation of Financial Services Authority (OJK) No. 55/POJK.03/2016 regarding Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, and the Circular Letter of Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 regarding Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. Every year, the Bank's GCG implementation quality is assessed by the OJK and by self-assessment. All recommendations from the assessment results are then followed up as part of the improvement process.

The Board of Commissioners believes that the proper and integrated implementation of Good Corporate Governance practices and risk management in the Bank has been adequate. Thus, we are optimistic that the trusts of stakeholders, shareholders, and the public in general in the Bank will improve in line with the growth of the Bank's values. In our opinion, the management has implemented GCG consistently within the Bank as seen from the issuance of implementation reference standards, dissemination activities, and assessment.

MANAJEMEN RISIKO

Sebagai badan usaha yang memegang teguh prinsip kehati-hatian atas potensi risiko dan wujud kepatuhan kepada publik, penerapan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam proses bisnis bank. Proses manajemen risiko yang mencakup tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian sangat penting dalam menjaga kesinambungan usaha.

Penerapan manajemen risiko di lingkungan Bank Jatim didukung oleh Komite Pemantau Risiko yang berada di bawah Dewan Komisaris serta Komite Manajemen Risiko dari organ Direksi. Organisasi-organisasi tersebut yang melakukan pemantauan dan pengembangan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko di lingkungan Perseroan.

Penerapan manajemen risiko ini, setiap tahunnya dinilai dalam bentuk Profil Risiko. Peringkat profil risiko secara *self assesment* posisi Desember 2019 adalah *Low to Moderate* (2). Hal ini mencerminkan kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko inherent komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang dan terkait kualitas penerapan manajemen risiko bank secara garis besar mengalami peningkatan meskipun terdapat kelemahan tetapi kelemahan tersebut telah menjadi perhatian manajemen Bank.

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan manajemen risiko telah berjalan dengan baik di lingkungan Perseroan. Baik dari proses maupun pelaksanaan dan evaluasi telah dijalankan dengan baik oleh manajemen. Karena itulah, Dewan Komisaris berharap agar pengelolaan manajemen risiko terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan bisnis di industri perbankan yang kian kompleks.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) bagi industri perbankan sangat penting, karena menjadi sandaran bagi kegiatan operasional bisnis yang aman dan sehat. Pelaksanaan SPI di lingkungan bank sangat membantu, antara lain untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Penerapan SPI di Bank Jatim mengacu pada SEOJK35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum. Suatu sistem pengendalian intern yang efektif mengharuskan Bank mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran.

Bank Jatim melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern setiap tahun. Dewan Komisaris senantiasa menerima laporan jika ada hasil identifikasi terkait dengan kelemahan pengendalian yang material.

Semua ini telah diimplementasikan dengan baik oleh manajemen. Dewan Komisaris berharap agar pelaksanaannya terus ditingkatkan, sehingga kegiatan bisnis Perseroan akan berjalan dengan aman dan sehat.

RISK MANAGEMENT

As a business entity that upholds the prudent principle in regard to potential risks while promoting responsibility to the public, the risk management implementation is an essential part of Bank Jatim's business processes. The risk management process, which includes the stages of identification, measurement, monitoring, and control of risks, is crucial in maintaining business continuity.

The risk management implementation within Bank Jatim is supported by the Risk Monitoring Committee, which is under the Board of Commissioners, and the Risk Management Committee of the Board of Directors. Both organs are responsible for monitoring and developing of the principles of risk management implementation at the Bank.

The Bank's risk management, in the form of a Risk Profile, is assessed annually. In December 2019, the self-assessment risk profile ranking was recorded to be in the Low to Moderate (2) category which reflects that the loss potential faced by composite inherent risk is relatively low during a certain period of time in the future. Meanwhile, the quality of Bank's risk management implementation in general has increased despite the apparent weaknesses which have come into the attention of the Bank's management.

We observe that the Bank has carried out risk management accordingly during the year and the management has carried out the process and the assessment properly. Hence, we hope that the Bank's risk management continues to be improved in line with business development in the increasingly complex banking industry.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The proper management of Internal Control System for the banking industry is highly significant as it serves as the supporting pillar for safe and healthy business operations. The implementation of Internal Control System within banks is extremely useful, among others, to improve compliance with the laws and regulations, as well as to reduce the risk of losses, irregularities, and violations of prudential aspects.

Bank Jatim implements Internal Control System by referring to SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 regarding Internal Control Systems Guidelines for Commercial Banks. An effective internal control system requires the Bank to identify and assess risks that can affect the achievement of targets.

Bank Jatim evaluates the implementation of internal control annually and the Board of Commissioners always receives reports if there are identification results related to material control weaknesses.

We consider that the management has implemented Internal Control System properly within the Bank. We hope that this implementation will continue to be improved in years to come, so that Bank Jatim's business operations will run safely and healthily.

PENERAPAN WBS DAN KETERLIBATAN DEWAN KOMISARIS

Whistleblowing System (WBS) berperan penting dalam meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik serta merupakan bagian dari pemeliharaan budaya dan kepedulian atas *anti fraud* di jajaran organisasi Bank Jatim. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan GCG, melalui peran aktif para pelapor (*whistleblower*).

Seluruh perangkat WBS telah dimiliki oleh Bank Jatim. Baik dari sisi landasan pelaksanaan, struktur pengelola, serta evaluasi. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai WBS kepada seluruh tingkatan pegawai, Bank Jatim secara konsisten melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di setiap *workstation*.

Untuk melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi, Bank Jatim telah mempunyai sarana untuk pengaduan atau *whistle blowing system* (WBS) baik melalui surat atau aplikasi online *anti fraud*. Meskipun demikian menurut pandangan Dewan Komisaris, tetap perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme sistem WBS, sehingga kedepannya dapat lebih efektif.

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit untuk melakukan pengawasan guna memastikan terselenggaranya WBS. Dewan Komisaris bersama dengan Komite Audit dan unit-unit lainnya akan terus melakukan evaluasi dan melakukan tindak lanjut atas laporan yang diterima.

Dewan Komisaris menilai penerapan WBS di lingkungan Perseroan telah berjalan dengan baik. Hal ini sangat penting dalam konteks penerapan GCG dan upaya mitigasi risiko, sehingga Dewan Komisaris selalu melakukan pengawasan atas pelaksanaannya. Keterlibatan Dewan Komisaris tidak hanya dalam bentuk pengawasan, tetapi juga bisa bersifat aktif dalam pelaksanaannya, di saat peran Dewan Komisaris diperlukan secara struktural.

PELAKSANAAN CSR

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* – CSR) di lingkungan Bank Jatim telah mengacu pada sejumlah peraturan yang ada, Dewan Komisaris mengapresiasi manajemen yang telah menjadikan regulasi eksternal dan internal Bank Jatim sebagai acuan dalam pelaksanaan CSR. Dengan demikian, kegiatan yang dilaksanakan memiliki standar kepatuhan yang baik.

Terkait dengan penyelenggaraan CSR ini, Bank Jatim telah menyisihkan sebagian laba Perseroan sebagai dana CSR dengan besaran yang ditetapkan oleh RUPS. Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk ditetapkan bahwa laba Perseroan antara lain digunakan untuk dana CSR maksimal sebesar 5% (lima persen).

Begitu juga dengan pelaksanaan programnya, karena telah mencakup seluruh aspek pemangku kepentingan. Dari lingkungan hidup, karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan sosial serta nasabah.

Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya kegiatan CSR yang telah berjalan pada tahun buku 2019 dan berharap agar selalu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Dewan Komisaris berpandangan, pelaksanaan CSR merupakan komitmen Perseroan untuk memberikan manfaat, baik kepada masyarakat di lingkungan operasional Bank Jatim maupun masyarakat umum, juga kepada para pemangku kepentingan lainnya.

WBS IMPLEMENTATION AND THE INVOLVEMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS

Whistleblowing System (WBS) plays a crucial role in improving Good Corporate Governance implementation and is part of the anti-fraud culture and awareness within Bank Jatim's organization. In order to increase the effectiveness of GCG implementation, the active role of whistleblowers is highly required.

Bank Jatim has established all the required WBS infrastructure, including the foundation of implementation, the management structure, and the evaluation. To increase understanding of WBS to all levels of employees, Bank Jatim consistently conducts outreach to all employees at each workstation.

To detect potential violations as early as possible, Bank Jatim has established a means for submitting complaints (*Whistleblowing System* – WBS) either through letters or an online anti-fraud application. Nonetheless, in our opinion, the mechanism of the WBS system needs to be continuously evaluated, so that it can be more effective in the future.

We are assisted by the Audit Committee in conducting supervision to ensure the implementation of WBS. Together with the Audit Committee and other units, we will continue to evaluate and follow up on the reports received through WBS mechanism.

We consider that the Company has properly carried out WBS implementation within its business environment. In the context of GCG implementation and risk mitigation efforts, WBS is essential; thus, we are committed to always monitoring its implementation. Our involvement in WBS implementation is not only realized in the form of supervision, but also in our active participation in its implementation, when the role of the Board of Commissioners is needed structurally.

CSR IMPLEMENTATION

The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) within Bank Jatim's environment refers to several existing regulations. The Board of Commissioners appreciates the management who has made Bank Jatim's external and internal regulations as a reference in implementing CSR. Thus, the activities carried out have proper compliance standards.

In relation to CSR implementation, Bank Jatim allocates a portion of profits as CSR funds with the amount determined by the GMS. In accordance with the Resolutions of Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, it is determined that the Bank's profit, among others, shall be used for CSR funds in a maximum of 5% (five per cent).

We agree that the Bank's CSR programs to be implemented have encompassed all aspects of the stakeholders, in terms of the environment, employees, occupational health and safety, social development, and customers aspects.

The Board of Commissioners fully supports the CSR activities carried out in the 2019 fiscal year and hopes that they will always be improved in the coming years. We regard the implementation of CSR as the Bank's commitment to provide benefits, both to the public living in the vicinity of the Bank's operational area, and the general public, as well as to other stakeholders.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Pada tahun buku 2019, Dewan Komisaris memiliki 4 komite, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja komite-komite tersebut secara berkala. Berikut ini yang telah dilaksanakan komite di bawah Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019:

Komite Audit telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk memastikan pelaksanaan integritas dalam laporan keuangan. Selain itu, komite ini menjamin bahwa pelaksanaan kontrol di lingkungan internal berjalan dengan baik.

Komite Pemantau Risiko memantau kualitas kredit yang dikurkuran oleh Bank Jatim, kredit bermasalah, serta profil risiko dari penyaluran kredit. Komite ini juga melakukan evaluasi perbaikan atas kebijakan, prosedur dan praktik manajemen risiko bank guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan risiko dengan baik, terutama pada pengelolaan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko bank lainnya.

Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak hanya bertanggung jawab terhadap penerapan GCG di lingkungan Bank Jatim. Tugas yang telah dilaksanakan adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas penerapan dan kebijakan GCG. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam konteks penerapan GCG, membuat Perseroan dapat dikelola berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Dengan demikian, pengelolaan bank dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga akhir tahun 2019, seluruh komite-komite tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka bekerja dengan independen serta memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi Dewan Komisaris.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2019 telah terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris, yang diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada 19 Juni 2019. Melalui RUPS LB tersebut, Bank Jatim menambah 2 (dua) orang Komisaris yakni Bapak Heru Tjahjono sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Bapak Muhammad Mas'ud sebagai Komisaris Independen. Kedua anggota Dewan Komisaris tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Komisaris berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP - 186/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019. Rapat menyetujui untuk menambah jumlah Anggota Dewan Komisaris dari 4 (empat) orang menjadi 6 (enam) orang dengan komposisi sebagai berikut:

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In the 2019 fiscal year, the Board of Commissioners had 4 (four) committees, namely the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Integrated Governance Committee, and their performances have been assessed regularly. The following activities have been carried out by the committees under the Board of Commissioners throughout the reporting year:

The Audit Committee has carried out its responsibility to ensure the integrity of the financial statements. In addition, the Audit Committee ensures that the implementation of the Bank's internal control runs well.

The Risk Monitoring Committee monitors the quality of loans disbursed by the Bank, the non-performing loans, and the risk profile of lending. The Risk Monitoring Committee also evaluates improvements to the policies, procedures, and practices of risk management in the Bank to ensure that risk management has been carried out in a proper manner, particularly in managing credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, and other risks of the Bank.

The Integrated Governance Committee is not only responsible for the implementation of GCG within the Bank but also for the provision of recommendations to the Board of Commissioners in order to improve the quality of GCG implementation and policies. Meanwhile, in the context of GCG implementation, The Nomination and Remuneration Committee has contributed to the Bank's management based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. Thus, the Bank's management can be accounted for.

Until the end of 2019, all committees under the Board of Commissioners have carried out their duties properly. They have worked independently and provided useful input for the Board of Commissioners.

CHANGES IN BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

There were several changes in the composition of Board of Commissioners in 2019 as resolved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) convened on June 19, 2019. Through the EGMS, the Bank added 2 (two) new commissioners, namely Mr. Heru Tjahjono as a Commissioner and Mr. Muhammad Mas'ud as an Independent Commissioner. Both new members of Board of Commissioners have been approved by the Financial Services Authority based on the Copy of the Decree of Board of Commissioners of Financial Services Authority No. KEP-186/D.03/2019 dated October 11, 2019. The Meeting approved to increase the number of Board of Commissioners' members from 4 (four) Commissioners to 6 (six) Commissioners with the following composition:

NAMA Name	JABATAN Position	MULAI MASA JABATAN Serving Period Start	AKHIR MASA JABATAN Serving Period End
AKHMAD SUKARDI	Komisaris Utama President Commissioner	2018	2022
BUDI SETIAWAN	Komisaris Commissioner	2018	2022
RUDI PURWONO	Komisaris Independen Independent Commissioner	2018	2022
CANDRA FAJRI ANANDA	Komisaris Independen Independent Commissioner	2018	2022
HERU TJAHJONO*	Komisaris Commissioner	2019	2023
MUHAMMAD MAS'UD*	Komisaris Independen Independent Commissioner	2019	2023

*) dinyatakan efektif tanggal 14 Oktober 2019 setelah mendapat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dewan Komisaris secara rutin melakukan rapat dengan Direksi. Setidaknya satu bulan sekali pertemuan tersebut dilaksanakan. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan rapat dengan Direksi sebanyak 11 kali.

Kesempatan ini, antara lain dimanfaatkan oleh Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat dan menyampaikan hasil pengawasan yang dilakukan. Selain itu, untuk mendukung pengawasan implementasi strategi yang dijalankan oleh Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh empat komite yang langsung berada di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut sangat berperan dalam memberikan masukan kepada Dewan Komisaris, sehingga menunjang fungsi pengawasan. Karena itu, jika Dewan Komisaris memandang perlu ada yang segera disampaikan kepada Direksi, maka Dewan Komisaris akan mengundang untuk melakukan pertemuan. Pada kesempatan itulah hasil pengawasan yang antara lain dari masukan komite-komite disampaikan.

APRESIASI

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada Direksi, manajemen dan seluruh karyawan atas kinerja yang telah dicapai pada Tahun Buku 2019. Kepada regulator, kami juga menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan pengawasan yang telah diberikan, sehingga usaha perusahaan berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dan praktik bisnis terbaik.

Dewan Komisaris juga berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemegang saham untuk menjadi bagian penting dari perjalanan usaha perbankan. Begitu pun dengan arahan dan bimbingan yang telah disampaikan oleh pemegang saham.

Kepada para pemangku kepentingan lain, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah berjalan selama ini. Dengan dukungan para pemangku kepentingan pula, manajemen mampu menyajikan kinerja yang baik untuk Tahun Buku 2019.

Atas nama Dewan Komisaris

Akhmad Sukardi
Komisaris Utama

*) effective since October 14, 2019, after gaining approval from the Financial Services Authority (OJK) based on the Result of Fit-and-Proper Test

FREQUENCY AND METHOD OF ADVISORY TO BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners regularly holds meetings with the Board of Directors, at least once a month. In 2019, the Board of Commissioners held 11 (eleven) meetings with the Board of Directors.

In the meeting, the Board of Commissioners provides advice and conveys the results of supervision conducted. To support the oversight of strategy implementation by the Board of Directors, we are also assisted by four committees which are directly under our control. All of these committees are instrumental in providing input to the Board of Commissioners; thereby, supporting the supervisory function on the Bank's management. In the event that the Board of Commissioners deems an issue as significant, then, the Board of Commissioners will hold a meeting and invite the Board of Directors in order to convey such issue, which, among others, can include the recommendations given by the committees under the Board of Commissioners.

APPRECIATION

We would like to express our appreciation to the Board of Directors, the management, and all employees for the performance achieved by the Bank in the 2019 Fiscal Year. We would also like to thank the regulators for their guidance and supervision, so that the Bank's business can run well in accordance with the regulations in force and the best business practices.

The Board of Commissioners is also grateful for the given, direction, and guidance trust by all of our shareholders who have become the key part in our business journey.

Lastly, we extend our utmost appreciation to other stakeholders for their cooperation thus far. Our positive achievement delivered in the 2019 fiscal year was certainly the manifestation of unwavering support from all stakeholders which we expect to continue in years to come.

On behalf of the Board of Commissioners,

Akhmad Sukardi
President Commissioner

LAPORAN DIREKSI

Pemegang saham yang terhormat,

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya hingga kami mampu melalui tahun 2019 dengan segala pencapaian yang baik. Laporan Tahunan ini kami sajikan lengkap dan informatif. Penyusunan laporan ini juga sejalan dengan peraturan yang ada serta praktik terbaik dalam dunia bisnis, khususnya di industri perbankan.

Laporan ini memuat tentang kinerja usaha Bank Jatim, baik di sektor keuangan, operasional, maupun lainnya seperti penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Informasi singkat ini disajikan dengan lugas agar mudah dipahami. Sementara versi lengkap dari laporan ini disampaikan pada masing-masing bab tersendiri.

BOARD OF DIRECTORS REPORT

Distinguished Shareholders,

Let us extend our gratitude to God Almighty for His blessings so that Bank Jatim was able to overcome the challenging year of 2019 with positive performance. Our achievements of 2019 are summarized in this Annual Report, which has been prepared in a comprehensive and informative manner in line with the applicable regulations as well as the best business practices, specifically in banking industry.

The 2019 Annual Report contains Bank Jatim's business performance on financial and operational fronts, and other substantial information, including the implementation of Good Corporate Governance (GCG). Information found in the report is disclosed straightforwardly using easily understood terms with each section describing the Bank's performance and operations thoroughly.



TINJAUAN MAKROEKONOMI

Tingkat pertumbuhan ekonomi dunia di 2019 masih mengalami perlambatan yang diperkirakan hanya tumbuh sekitar 3,0%, turun dari Tahun 2018 sebesar 3,6%. Untuk itu, sebagai respon dari penurunan pertumbuhan ekonomi Dunia, berbagai bank sentral di Dunia mengubah *stance* kebijakan moneter dari kontraktif menjadi ekspansif dengan menurunkan suku bunga acuannya di Tahun 2019. Misalnya, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), telah menurunkan *Fed Fund Rate* (FFR) sebesar 75 bps menjadi 1,50-1,75% di akhir Tahun 2019 dimana sebelumnya Tahun 2018, The Fed melanjutkan normalisasi suku bunga acuan dengan meningkatkan suku bunga sebanyak empat kali menjadi 2,25-2,50%.

Selain itu, perkembangan positif pada perjanjian tarif dagang AS dan China berdampak pada penurunan risiko pasar keuangan global dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi negara berkembang dengan masuknya aliran dana asing.

Pertumbuhan ekonomi domestik masih dapat terjaga dan diperkirakan tumbuh sekitar 5% meski dibawah tekanan ekonomi dunia pada tahun 2019 dan lebih rendah dibanding tingkat pertumbuhan tahun 2018 sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh inflasi terendah sejak 10 tahun terakhir, yaitu di level 2,72%.

Tekanan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 disebabkan neraca perdagangan (*trade balance*) yang melambat serta kondisi ekonomi Dunia yang menyebabkan volume perdagangan internasional Indonesia menjadi lesu. Pertumbuhan ekspor tercatat -6,9% (yoy) dan pertumbuhan impor menurun lebih dalam yaitu -9,5% (yoy). Akibatnya defisit neraca pembayaran (*balance of payment*) dan neraca berjalan (*current account*) berlanjut di tahun 2019.

Sejumlah Bank Sentral di Dunia melakukan *stance* moneter yang ekspansif dan konsisten untuk pre-emptive serta *ahead of the curve*. Begitupun Bank Indonesia (BI), selama tahun 2019 telah menurunkan suku bunga acuan (BI 7 Day Repo Rate/BI7DRR) sebesar 100 bps menjadi 5% dan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 1% menjadi 5,5%.

Stabilitas sistem keuangan terjaga tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan yang tinggi sekitar 23,3% dan kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) yang tetap rendah di 2,5% (gross) atau 1,2% (net).

Sementara, Pertumbuhan kredit industri perbankan tercatat turun menjadi 6,1% (yoy) di Tahun 2019 dari sebelumnya 11,8% (yoy) di Tahun 2018. Disisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) stagnan di 6,6% (yoy) dimana sebelumnya juga tumbuh sebesar 6,5% (yoy) di Tahun 2018. Akibat pertumbuhan DPK diatas pertumbuhan Kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan (*Loan to Deposit Ratio/LDR*) dapat turun menjadi ke 93,6% dari sebelumnya di tahun 2018 sebesar 94,0%.

ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA

Penerapan kebijakan strategis yang komprehensif di atas sangat membantu pencapaian kinerja usaha Bank Jatim. Pada tahun 2019, kinerja secara umum tumbuh positif. Total laba operasional yang dibukukan mencapai Rp1,80 triliun, lebih tinggi 5,31% dibanding

MACROECONOMIC OVERVIEW

In 2019, global economic growth remained sluggish and was estimated to reach around 3.0%, a decline compared to the rate of 2018 recorded at 3.6%. In response to such decline, various central banks in the world altered their monetary policy stance from contractive to expansive by lowering their benchmark interest rate in 2019. For instance, the Central Bank of the United States (The Fed), reduced its Fund Rate (FFR) by 75 bps to 1.50-1.75% at the end of 2019, while where previously in 2018, the Fed continued normalization of its benchmark interest rate by increasing interest rates four times to 2.25-2.50%.

In addition, positive developments in the US and China trade tariff agreements had an impact on the decreasing risk of global financial markets and on the development of emerging markets' economies due to the inflow of foreign funds.

Meanwhile, domestic economic growth was relatively stable with growth estimation of around 5% despite being under pressure from global economy in 2019. This growth projection was lower than the 5.17% growth rate realized in 2018. Nonetheless, Indonesia's economic growth in 2019 was supported by the lowest inflation rate ever recorded in the last 10 years, which was 2.72%.

Indonesia's economic growth in 2019 was primarily affected by the slowing trade balance and global economic conditions, which slowed down the volume of international trade of Indonesia. Export growth was recorded at -6.9% (yoy) and import growth declined deeper to -9.5% (yoy). As a result, the balance of payment (current account) and current account balance continued to experience deficit in 2019.

Several countries' Central Banks conducted an expansive and consistent monetary stance for pre-emptive action to remain ahead of the curve. Likewise, Bank Indonesia (BI), reduced its benchmark interest rate (BI 7-Day Repo Rate/BI7DRR) by 100 bps to 5% in 2019 and reduced the Statutory Reserves (GWM) by 1% to 5.5%.

Financial system stability was reflected in the high Capital Adequacy Ratio (CAR) of banking industry at around 23.3% with Non-Performing Loans (NPLs) remained at the low level of 2.5% (gross) or 1.2% (net).

Meanwhile, the growth of bank loan was recorded to decrease to 6.1% (yoy) in 2019 from 11.8% (yoy) in 2018. On the other hand, the growth of Third Party Fund was stagnant at 6.6% (yoy) in 2019 compared to the 6.5% growth recorded in the previous year. Due to the fact that the growth of Third Party Fund was above the loan growth, the Loan to Deposit Ratio (LDR) declined to 93.6% from 94.0% recorded in 2018.

ANALYSIS ON PERFORMANCE ACHIEVEMENT

The comprehensive implementation of strategic policies above provided great support to the achievement of Bank Jatim's business performance. In 2019, the Bank's performance grew positively in general. Total operating income reached Rp1.80 trillion

pencapaian tahun 2018. Kinerja laba operasional ini ditopang oleh meningkatnya pendapatan bunga dan syariah neto yang tumbuh 8,45%, dari Rp3,69 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp3,99 triliun pada tahun 2019. Pada periode yang sama, pendapatan operasional lainnya juga meningkat 14,68%. Sementara di lain sisi, manajemen berhasil menekan beban operasional sebesar Rp2,677 miliar, sehingga beban tersebut turun 11,75%.

Kredit yang disalurkan oleh Bank Jatim juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penyaluran kredit konvensional yang diberikan tersebut sebesar Rp36,95 triliun, tumbuh 12,74% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp32,77 triliun. Sementara jumlah penyaluran kredit Syariah sebesar Rp1,40 triliun naik 25,20% dari penyaluran kredit Syariah tahun 2018 sebesar Rp1,12 triliun.

Proporsi kredit konvensional yang disalurkan adalah kredit konsumtif dengan proporsi 66,83% atau sebesar Rp24,66 triliun. Sedangkan porsi kredit produktif sebesar 33,17% atau sebesar Rp12,29 triliun. Sementara proporsi terbesar kredit syariah disalurkan pada skim kredit umum dengan proporsi 35,76% atau sebesar Rp501,26 miliar.

Walaupun ekspansi kredit tetap dilakukan, Bank Jatim berhasil mengatasi kredit bermasalah (*Non-Performing Loan* – NPL). Posisi NPL nett Bank Jatim adalah 0,71%, sedangkan NPL *gross* 2,77%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi menjaga kualitas kredit menunjukkan hasil.

Peningkatan penyaluran kredit tersebut juga didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun. Sepanjang 2019, kinerja produk simpanan atau Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan Rp9,618 miliar atau 19,55% yang dikontribusikan dari pertumbuhan Giro sebesar Rp4,552 miliar atau 23,76%, diikuti oleh pertumbuhan Deposito sebesar Rp2,194 miliar atau 19,49%. Serta pertumbuhan Tabungan sebesar Rp2,871 miliar atau 15,30%.

Sebagian besar DPK yang dihimpun oleh Bank Jatim berasal dari Giro memberikan kontribusi terbesar hingga mencapai 40,32% diikuti dengan dana Tabungan sebesar 36,80% dan dana Deposito sebesar 22,88% dari jumlah penghimpunan dana pihak ketiga tahun 2019.

Keberhasilan peningkatan DPK tersebut, antara lain didukung oleh strategi produk yang mampu menjawab kebutuhan nasabah yang makin beragam, misalnya layanan transaksi elektronik yang mempermudah nasabah.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Di tengah kondisi perekonomian yang dinamis, Bank Jatim telah menetapkan sejumlah inisiatif dan kebijakan strategis untuk menopang kinerja Perseroan. Kebijakan-kebijakan operasional disiapkan dalam rangka mendukung fundamental Bank Jatim, sehingga target-target yang telah disiapkan pada awal tahun dapat tercapai, setidaknya telah mengarah ke posisi yang tepat, yaitu pertumbuhan.

Kebijakan strategis yang diimplementasikan, antara lain mendorong pertumbuhan rasio dana murah atau *Current Account* and *Saving Account* (CASA) dan *transactional banking* demi menjaga kesinambungan likuiditas.

in 2019, 5,31% higher than the achievement of 2018, due to the growth of 8,45% in net interest and sharia income, from Rp3,69 trillion in 2018 to Rp3,99 trillion in 2019. In the same period, other operating income also increased by 14,68%. On the other hand, the Bank managed to decrease operating expenses by 11,75% or Rp2,677 billion in 2019.

Bank Jatim's loan also increased compared to the previous year. Total conventional loans disbursed by the Bank in 2019 reached Rp36.95 trillion, an increase of 12,74% from that of the previous year which was recorded at Rp32.77 trillion. Meanwhile, total Sharia loans amounted to Rp1.40 trillion, up 25,20% from Rp1.12 trillion recorded in 2018.

In terms of conventional loans, in 2019 Bank Jatim disbursed consumer loans with a proportion of 66.83% or amounting to Rp24.66 trillion, while the portion of productive loans was 33,17% or Rp12.29 trillion. As for sharia loans, the largest proportion of loans disbursed was the general loan scheme at 35,76% or Rp501.26 billion.

Although the Bank continued to conduct loan expansion, we were able to overcome Non-Performing Loans (NPLs) by booking net and gross NPL positions at 0,71% and 2,77%, respectively. This showed that the Bank's strategy of maintaining loan quality was relatively successful.

Loan growth was also supported by the rising Third Party Funds. Throughout 2019, the performance of savings products or Third Party Funds increased by Rp9,618 billion or 19,55%, which was contributed from Giro growth of Rp4,552 billion or 23,76%, followed by Deposit growth of Rp2,194 billion or 19,49%, and Savings growth of Rp2,871 billion or 15,30%.

Most of the Third Party Funds raised by the Bank originated from Giro which provided the largest contribution of up to 40,32%. This was followed by Savings funds amounting to 36,80% and Deposit funds amounting to 22,88% of the total Third Party Funds raised in 2019.

The encouraging growth of third party funds, among others, was supported by the Bank's product strategy that was able to meet the increasingly diverse needs of customers, such as electronic transaction services which can provide convenience for the customers.

STRATEGIC POLICIES

Amid the dynamic economic conditions, Bank Jatim set a number of initiatives and strategic policies to support its performance in 2019. Operational policies were prepared to assist the fundamentals of the Bank so that it can deliver positive growth to the shareholders and stakeholders, and the targets established at the beginning of the year can be achieved.

Strategic policies implemented in 2019 were, among others, to encourage the growth of low-cost fund ratio or Current Accounts and Saving Accounts (CASA) and promote transactional banking in order to maintain liquidity.

Hal ini dilakukan melalui peningkatan tabungan nasabah. Sebagai daya tarik, Bank Jatim tak henti mengembangkan fitur produk, penambahan produk yang kompetitif serta layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Pada saat bersamaan, Perseroan juga mendorong layanan *transactional banking* yang bersinergi dengan mitra perusahaan berbasis *financial technology* (Fintech).

Kerja sama dengan perusahaan berbasis fintech ini juga dalam rangka meningkatkan pendapatan, terutama dari *fee based*. Layanan berbasis teknologi informasi (digital banking) ikut menjadi penopang, begitu juga dengan transaksi kartu debit nasional dan internasional.

Dari sisi kredit, Bank Jatim mengambil kebijakan untuk meningkatkan penyaluran kredit yang berkualitas serta menekan tingkat rasio kredit bermasalah. Dalam konteks ini, implementasi strategi yang diambil, antara lain peran credit review di kantor cabang yang ditingkatkan demi menjaga kualitas kredit yang sehat.

Demi menjaga pertumbuhan kredit, Bank Jatim melakukan optimalisasi kredit mengulang, mengingat kualitasnya telah dipahami. Karena itu, program top up untuk mitra Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro yang telah teruji dioptimalkan sambil ekspansi kepada nasabah baru.

Untuk memberikan hasil yang terbaik dari yang telah direncanakan, Bank Jatim juga mendorong penguatan sinergi bidang penunjang dengan kebutuhan bisnis dalam rangka memperluas ekspansi. Hal ini, antara lain dilakukan melalui optimalisasi dan peningkatan kualitas riset demi menunjang bisnis Perseroan.

Kebijakan dalam manajemen inovasi juga terus diperkuat agar ada konsistensi dan komitmen untuk mendorong kinerja yang maksimal. Demi menciptakan kondisi seperti ini, Bank Jatim terus mengembangkan budaya organisasi yang kondusif demi menghasilkan kinerja produksi yang maksimal.

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA MENGATASI

Dalam penyaluran kredit perbankan, Bank Jatim meningkatkan pertumbuhan portofolio kredit yang berkualitas melalui optimalisasi kredit mengulang serta ekspansi kredit baru dengan tetap menjaga unsur kehati-hatian.

Terkait keketentuan *Nett Stable Funding Ratio* (NSFR), Bank Jatim meningkatkan pendanaan yang memenuhi kriteria stabil dan dana yang digunakan untuk operasional dengan meningkatkan dana ritel, simpanan nasabah korporasi yang digunakan untuk transaksional dan dana lainnya yang memiliki jangka waktu di atas 1 tahun. Adapun upaya-upaya tersebut berupa beragam program promosi untuk tabungan, mendorong transaksi nasabah dengan menyempurnakan dan menambah fitur-fitur transaksi pada aplikasi mobile dan internet banking Bank Jatim.

Manajemen memandang bahwa pengembangan SDM sangat penting untuk mendukung pencapaian target usaha yang telah ditetapkan. Untuk itu, Bank Jatim *concern* pada peningkatan kemampuan SDM dan profesionalitas, salah satunya dengan melakukan beberapa survey terkait pada kinerja pegawai.

Tak kalah pentingnya adalah penggunaan teknologi informasi dalam mendukung bisnis. Di antara strategi yang diimplementasikan adalah melakukan adopsi

This is carried out by enhancing customer savings through provision of various features for the Bank's saving products to attract more customers, development of products with high competitive value, and adjustment of services to the customers' needs. At the same time, the Bank also promoted the transactional banking service that was in synergy with financial technology (fintech) companies as the Bank's partners.

The collaboration with fintech companies was carried out in the context of increasing income, especially fee-based income. In addition, the Bank implemented information technology-based services (digital banking) to support its business, as well as the national and international debit card transactions.

In terms of loans, Bank Jatim adopted a policy to improve quality loan disbursement and minimize non-Performing Loans. In this regard, the Bank implemented the strategy of enhancing the role of credit review at branch offices in order to maintain healthy loan quality.

Meanwhile, to maintain loan growth, Bank Jatim conducted repeat credit optimization in line with our understanding of its quality. Therefore, the top-up program for proven partners of Rural Credit Banks and Microfinance Institutions was optimized while expanding to new customers.

To provide the best results, we also encouraged the strengthening of synergy between of business support and business needs in order to expand better. This is carried out, among others, through optimization and improvement of the quality of research to support the Bank's business.

Policies in innovation management were also strengthened in a continuous manner so as to bring consistency and commitment to drive maximum performance. In order to create such conditions, Bank Jatim continued to develop a conducive organizational culture in order to deliver optimum production performance.

CHALLENGES FACED BY THE BANK AND EFFORTS TO ADDRESS THOSE CHALLENGES

In terms of bank loan disbursement, bank Jatim strived to develop quality loan portfolio by optimizing repeat credit and expanding new loan while maintaining prudent principle.

Related to the provisions of Net Stable Funding Ratio (NSFR), Bank Jatim increased funding that met stable criteria and funds used for operations by enhancing retail funds, corporate customer deposits used for transactional activity, and other funds with a term of more than 1 year. These efforts included providing various promotional programs for savings products and encouraging customer transactions by improving and adding transaction features to the Bank Jatim mobile application and internet banking.

The management believes that HR development is essential to support the achievement of business targets that have been established. To that end, Bank Jatim put its concern to the improvement of HR capabilities and professionalism which is done, among others, by conducting several surveys related to employee performance.

The use of information technology in supporting business nowadays is also crucial. Hence, among the strategies implemented by the Bank is the adoption

teknologi melalui proses otomatisasi, digitalisasi dan integrasi menyeluruh. Melalui kebijakan seperti itu, kebutuhan intervensi manual akan berkurang serta mampu mengoptimalkan kecepatan proses bisnis untuk dapat memfasilitasi kerja sama eksternal dan internal.

Untuk itulah, pada tahun 2019 Bank Jatim terus mengupayakan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung bisnis. Pada tahun buku tersebut, sejumlah hal telah dikembangkan, baik dari sisi *core banking*, *switching* maupun *networking*. Pada prinsipnya, pengembangan teknologi informasi diarahkan untuk mendukung kebutuhan bisnis yang memadai. Selain itu, memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan, kelancaran dan efisiensi operasional bank juga menjadi tujuan pengembangan.

PROSPEK USAHA

Prospek usaha Bank Jatim ke depan tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan kondisi eksternal, seperti ekonomi makro baik global maupun nasional. Hasil analisis Perseroan memperkirakan kondisi perekonomian global pada tahun depan masih akan diwarnai ketidakpastian, khususnya di pasar keuangan.

IMF dalam *World Economic Outlook* 2019 memprediksi ekonomi dunia 2020 tumbuh 3,4%, atau lebih baik dibandingkan 2019 yang diproyeksikan 3,0%. Hal tersebut didorong oleh ketegangan perdagangan dunia, penyelesaian Brexit, berlanjutnya kebijakan moneter yang akomodatif, seperti relaksasi kebijakan moneter dan melanjutkan pembelian surat Aset (Surat Berharga dan Obligasi), serta stabilnya kondisi ekonomi negara berkembang. Disisi lain, perlu juga diantisipasi atas proyeksi pelemahan pertumbuhan ekonomi China, Amerika Serikat dan Negara Eropa di tahun 2020.

Bank Jatim percaya bahwa kondisi ekonomi nasional tahun 2020 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,10-5,35% di tahun 2020. Hal ini ditopang oleh pertumbuhan belanja rumah tangga dan investasi sektor swasta yang lebih baik, serta belanja pemerintah yang semakin efektif.

Selain itu, *stance* kebijakan moneter dan makroprudential oleh Bank Indonesia (BI) di Tahun 2020 diperkirakan masih akomodatif. Untuk itu, terdapat ruang Bank Indonesia untuk dapat menurunkan suku bunga 2 - 3 kali menjadi 4,25-4,50%. Ditambah kebijakan fiskal yang *countercyclical* dan upaya Pemerintah memperbaiki Defisit Neraca Berjalan (*Current Account Deficit/CAD*) diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas Rupiah.

Sejalan dengan kondisi ekonomi dalam negeri yang membaik, pertumbuhan kredit perbankan nasional diperkirakan akan lebih tinggi. Bank Jatim optimis dapat lebih meningkatkan pertumbuhan Kredit dan DPK Industri Perbankan tahun 2020.

Membaiknya perekonomian dan perbankan nasional, serta potensi pengembangan bisnis UMKM di Indonesia yang masih besar, maka prospek usaha Bank Jatim kedepannya masih sangat baik. Namun demikian, masih tingginya tantangan di lingkungan perekonomian global mendorong Bank Jatim untuk tetap selektif dalam memilih strategi sehingga peluang-peluang bisnis yang ada bisa ditangkap dengan baik. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi Bank kedepannya, antara lain Rencana Penerapan PSAK 71, 72, dan 73, Implementasi Qanun, dan lainnya.

of technology through the automation, digitization, and overall integration processes in its business. With this policy, the need for manual intervention will be minimized and the Bank will be able to optimize the speed of business processes to facilitate external and internal cooperation better.

For this reason, in 2019 Bank Jatim endeavored to constantly leverage the use of information technology in supporting its business. During the fiscal year, the Bank developed several facilities in terms of core banking, switching and networking, in relation to the use of information technology. In essence, information technology development was directed and aimed to provide adequate support for business needs and to give adequate confidence in the security, flow, and efficiency of the Bank's operations.

BUSINESS OUTLOOK

Our business outlook for the future is inseparable from external condition development, such macro economy, both globally and nationally. The Bank has predicted that global economic condition in the following year will continue to be rife with uncertainties, particularly in financial market.

In its World Economic Outlook 2019, IMF estimated that global economy in 2020 will grow to the level of 3,4%, better than the 3,0% growth of 2019. This is driven by various factors, among others, global trade tension, Brexit completion, continued accommodative monetary policies (including policy relaxation and continued purchase of asset securities, such as Bonds), and the economic stability in emerging markets. On the other hand, the projection of weakening economic growth of several countries, such as China, the US, and European Union countries in 2020 needs to be anticipated.

Nonetheless, we believe that national economic condition in 2020 will improve compared to 2019. Domestic economy is projected to grow to the level of 5,10-5,35% in 2020 due to the recovery in household consumption and investment in private sector as well as the increasingly effective government spending.

Bank Indonesia's stance in terms of monetary and macro prudential policies in 2020 is also projected to remain accommodative. There is an ample room for Bank Indonesia to decrease its interest 2-3 times to the level of 4,25-4,35%. Furthermore, the countercyclical fiscal policy as well as government's efforts to improve the Current Account Deficit (CAD) are expected to bring positive economic growth and maintain Rupiah stability.

In line with the positive projection of domestic economy, the growth of national banking loan is estimated to recover as well. Hence, Bank Jatim is optimistic that it can improve the growth of Loans and Third Party Funds in 2020.

Observing the recovery of domestic economy and national banking condition, coupled with the huge potential for MSME business development in Indonesia, we are of the opinion that the Bank's business prospect in the future will remain bright. However, the high obstacle of global economy spurs the Bank to remain selective in implementing strategies in order to seize business opportunities optimally. The Bank also needs to anticipate several issues in the following year, including the plan for the implementation of PSAK 71, 71, and 73, implementation of *Qanun*, and so on.

Beberapa hal yang akan menjadi fokus Bank Jatim adalah memanfaatkan jaringan mitra kerja Bank Jatim, *data analytics* dan *digital marketing*. Dengan strategi ini, prospek usaha Perseroan memberikan optimisme pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menghasilkan nilai tambah bagi stakeholder-nya.

PENERAPAN GCG

Bank Jatim meyakini penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* – GCG) pada setiap kegiatan usaha akan menciptakan kinerja bisnis yang baik secara kesinambungan. Oleh sebab itu, Bank Jatim berupaya menyempurnakan praktik GCG demi mendukung pencapaian usaha yang telah ditargetkan, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Pentingnya penerapan GCG, Bank Jatim selalu menerapkan praktik tata kelola yang tidak terbatas pada aturan regulator. Lebih dari itu, Bank Jatim juga berupaya mengadopsi standar yang berlaku di dunia internasional serta praktik terbaik yang berlaku di industri keuangan, khususnya perbankan.

Lingkup standar implementasi GCG Bank Jatim mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Pada prinsipnya, pelaksanaan penerapan GCG Bank Jatim berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan pada setiap kegiatan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan bank, *shareholders* dan *stakeholders*. Bank Jatim melakukan evaluasi penerapan GCG secara berkelanjutan, baik secara mandiri maupun oleh pihak independen sehingga penerapannya akan selalu mengalami peningkatan.

Pada 2019 Evaluasi dilakukan melalui metode *self-assessment* dengan mengacu pada Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 55. Hasil pelaksanaan *self-assessment* di tahun 2019 menunjukkan nilai komposit 2 yang mencerminkan bahwa bank telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik. Hasil dari *assessment* serta ditambah dengan masukan dari seluruh *stakeholder's* digunakan sebagai pertimbangan di dalam melakukan peningkatan kualitas implementasi GCG. Selama tahun 2019, Bank Jatim telah melakukan upaya-upaya perbaikan dengan menindaklanjuti beberapa kelemahan yang direkomendasikan berdasarkan hasil *assessment*.

KETERBUKAAN INFORMASI

Bank Jatim telah mengimplementasikan keterbukaan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga memiliki jangkauan terhadap para pemangku kepentingan yang lebih luas. Keterbukaan tersebut, antara lain melalui informasi yang termuat dalam situs www.bankjatim.co.id yang memuat berbagai macam informasi terkait Perseroan baik keuangan maupun non-keuangan.

Keterbukaan informasi juga dilakukan dalam bentuk lain, seperti laporan berkala ke Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Perseroan patuh terhadap

Our focus in 2020 will be to utilize our work partner network and improve data analytics and digital marketing. With our strategies, we are optimistic that our business outlook will bring sustainable business growth and create added values for all stakeholders.

GCG IMPLEMENTATION

We believe that the proper implementation of Good Corporate Governance (GCG) will provide positive business performance in a sustainable manner. Thus, Bank Jatim strives to improve GCG practice to support the realization of the determined targets, both in the short and long run.

Bank Jatim is aware of the significance of GCG implementation and always implements governance practices that are not limited to the regulations in force. We also adopt the internationally applicable standards as well as the best practices in financial industry, specifically in banking sector.

The scope of GCG implementation standards of Bank Jatim refers to the Regulation of Financial Services Authority No. 55/POJK.03/2016 regarding Governance Implementation for Commercial Banks and Circular Letter of Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 regarding Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.

In essence, GCG implementation at Bank Jatim has been properly conducted by all organs of the Bank, covering the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees, within each business activity. GCG implementation aims to protect the interest of the Bank, shareholders, and stakeholders. Bank Jatim assesses its GCG implementation sustainably, both through self-assessment and with the help of an independent party, so as to deliver continuous improvement in the future.

In 2019, the Bank conducted GCG self-assessment by referring to the Regulation of Financial Services Authority No. 55. The result of 2019 self-assessment showed the score of composite 2, meaning that the Bank has properly implemented corporate governance. The result of self-assessment, as well as the input from stakeholders, shall be used to enhance the quality of GCG implementation in the Bank. Over the course of the year, Bank Jatim has conducted improvement efforts by following-up various weaknesses in accordance with the recommendations of the assessment result.

INFORMATION DISCLOSURE

Information disclosure at Bank Jatim is carried out by utilizing information technology so as to have more expansive reach to all stakeholders. The Bank discloses information on its performance through its official website at www.bankjatim.co.id which contains information on financial and non-financial performances.

We also conduct information disclosure by submitting reports to the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority regularly. The Bank always complies with the prevailing laws and regulation in

peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang dibuktikan dengan pengungkapan pemegang saham utama dan pengendali dalam laporan tahunan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi membentuk komite-komite yang bertugas membantu memberikan pertimbangan dan analisis. komite-komite dimaksud adalah Komite Manajemen Kepegawaian, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Aset & Liabilitas, Komite Produk, Jaringan & Prosedur, Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dan *IT Steering Committee*.

Direksi menilai bahwa selama 2019, komite-komite dibawah Direksi telah menjalankan tugas dengan baik dan telah memberikan masukan yang mendorong peningkatan kinerja Bank Jatim.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bank Jatim memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai ekonomi, sosial dan ekologis dalam menjalankan usaha. Hal ini bertujuan agar Bank Jatim berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, antara lain dengan menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Komitmen tersebut dijalankan, antara lain melalui kebijakan di bidang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pada tahun 2019, sejumlah kegiatan CSR telah diimplementasikan untuk mewujudkan komitmen tersebut.

Di bidang kesetaraan gender dan kesempatan kerja, Bank Jatim senantiasa memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh orang/pelamar kerja, baik pria dan wanita, tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, gender, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen pekerja. Pengangkatan calon pekerja didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.

Di bidang sosial, Bank Jatim antara lain membangun dan merehabilitasi prasarana kesehatan. Bentuknya berupa perbaikan dan pembangunan MCK serta toilet. Selain itu, ada renovasi Posyandu dan pembangunan sumber air bersih.

Bank Jatim menyalurkan bantuan dana CSR untuk Program Jatim Peduli yaitu program bantuan pembinaan dari bank untuk melaksanakan pelatihan UMKM dan menjadikan para calon pengusaha memiliki kemampuan wirausaha.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2019 telah terjadi perubahan komposisi Direksi di lingkungan Bank Jatim yang diputuskan melalui RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada 19 Juni 2019. Perubahan komposisi Direksi Bank Jatim telah disetujui melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan komposisi Direksi hingga berakhirnya tahun buku 2019 adalah sebagai berikut:

capital market as evidenced by the transparency of main and controlling shareholders of the Bank as disclosed in its annual report.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out our duties, we are assisted by several committees which contributed to the Bank's management through their recommendations and analyses. These committees are the Employment Committee; Credit Policy Committee; Asset Liability Committee; Product, Network, and Procedure Committee; Risk Management Committee; Credit Committee; Integrated Risk Management Committee; and IT Steering Committee.

We assess that, throughout 2019, all of these committees have carried out their duties admirably and provided beneficial input that contributed to the Bank's performance achievement.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank Jatim is committed to implementing sustainable principles which can create economic, social, and ecological values in business implementation. This aims to contribute to the achievement of sustainable development goals, among others, by ensuring the preservation of the environment as well as safety, capability, and welfare, and the life quality of current and future generation. The Bank's commitment is realized through the implementation of policies regarding Corporate Social Responsibility (CSR) as well as CSR programs and activities carried out during the reporting year.

In terms of gender equality and work opportunity, Bank Jatim always provides equal opportunity for all job applicants, regardless of their ethnicity, religion, race, class, gender and physical disability. All applicants may participate in the recruitment process of the Bank. Recruitment of prospective employees is based on the result of selection, evaluation during probationary period, and employee orientation.

On social front, Bank Jatim conducts renovation and rehabilitation of health facilities and infrastructure, such as the improvement and construction of toilet facilities, renovation of *Posyandu*, and development of clean water source facilities.

Bank Jatim distributes CSR funds for Jatim Peduli Program, a coaching program from the Bank to empower MSMEs and create prospective entrepreneurs with professional capabilities and skills.

CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

There were several changes in the composition of Board of Directors in 2019 as resolved in the Extraordinary GMS (EGMS) convened on June 19, 2019. The changes in the composition of Board of Directors of Bank Jatim have been approved through the Decree of Board of Commissioners of Financial Services Authority. The composition of Board of Directors of the Bank until the end of 2019 fiscal year is as follows:

PGS. DIREKTUR UTAMA/ DIREKTUR KEUANGAN: Act. President Director/Finance Director	Ferdian Timur Satyagraha
DIREKTUR KOMERSIAL DAN KORPORASI: Commerce and Corporation Director	Busrul Iman
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN OPERASI: Information Technology and Operations Director	Tonny Prasetyo
DIREKTUR KEPATUHAN & MANAJEMEN RISIKO: Compliance and Risk Management Director	Erdianto Sigit Cahyono
DIREKTUR RISIKO BISNIS / PGS. DIREKTUR KONSUMER, RITEL & USAHA SYARIAH: Business Risk Director/Act. Consumer, Retail, and Sharia Business Director	Rizyana Mirda

APRESIASI

Direksi menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kegiatan usaha Bank Jatim pada Tahun Buku 2019. Pengawasan dan nasihat yang disampaikan Dewan Komisaris ikut memberikan arah kebijakan yang diambil oleh manajemen. Direksi juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, seluruh pemegang saham, nasabah dan mitra kerja serta jajaran tim manajemen dan seluruh karyawan yang telah bekerja keras di tengah tantangan yang tidak mudah bagi industri perbankan.

Kami berharap kerja sama yang telah terjalin selama ini terjaga dengan baik dan terus memberikan kontribusi yang positif bagi pengelolaan Perseroan. Semoga laporan tahunan 2018 yang menyajikan hasil kerja seluruh tim Bank Jatim ini memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan.

Atas nama Direksi,

Ferdian Timur Satyagraha

Pgs Direktur Utama dan Direktur Keuangan

APPRECIATION

We would like to extend our appreciation to the Board of Commissioners who has become an integral part of Bank Jatim's business journey in 2019 Fiscal Year. Supervision and advice given by the Board of Commissioners also contribute to the policy directions taken by the management during the year. The Board of Directors would also like to extend the highest appreciation for the trust, commitment, and cooperation of all stakeholders, shareholders, customers, and work partners, as well as the management team and the employees of the Bank who have worked relentlessly amid the challenges and headwinds experienced by banking industry in 2019.

We hope that the cooperation thus far can be maintained and improved further so as to provide more positive contributions to the management of the Bank. May this 2019 annual report, which contains the work result of all elements of Bank Jatim, be beneficial for all stakeholders of Bank Jatim.

On behalf of the Board of Directors,

Ferdian Timur Satyagraha

Act. President Director and Finance Director

Lembar Pertanggungjawaban atas Isi Laporan Tahunan

REPPONSIBILITY FOR THE CONTENTS OF ANNUAL REPORT

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun 2019 telah dibuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

STATEMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ON THE RESPONSIBILITY FOR THE 2019 ANNUAL REPORT OF PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK

We, the undersigned, declare that all information disclosed in the 2019 Annual Report of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk is presented in its entirety and we are fully responsible for the truthfulness of the contents of this Annual Report.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners



Akhmad Sukardi
KOMISARIS UTAMA

President Commissioner



Budi Setiawan
KOMISARIS

Commissioner



Heru Tjahjono
KOMISARIS

Commissioner



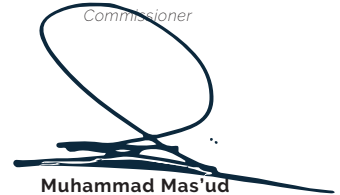
Rudi Purwono
KOMISARIS INDEPENDEN

Independent Commissioner



Candra Fajri Ananda
KOMISARIS INDEPENDEN

Independent Commissioner



Muhammad Mas'ud
KOMISARIS INDEPENDEN

Independent Commissioner

DIREKSI

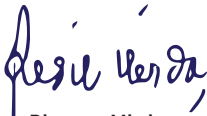
Board of Directors



Ferdian Timur Satyagraha

PGS DIREKTUR UTAMA DAN DIREKTUR KEUANGAN

Act. President Director and Finance Director



Rizyana Mirda

DIREKTUR RISIKO BISNIS DAN PGS DIREKTUR RITEL
KONSUMER RITEL & USAHA SYARIAH

Business Risk Director and Act. Retail Consumer & Sharia Business Director



Tonny Prasetyo

DIREKTUR TI & OPERASI

IT & Operations Director



Busrul Iman

DIREKTUR KOMERSIAL & KORPORASI

Commerce & Corporation Director



Erdianto Sigit Cahyono

DIREKTUR KEPATUHAN & MANAJEMEN RISIKO

Compliance & Risk Management Director





A photograph of the Bank Jatim building at night, illuminated with blue and red lights. The building has a modern, multi-story design with large windows. A red geometric overlay, consisting of a network of lines and dots, is superimposed on the left side of the image. The number '3' is displayed in white on a dark red background within this overlay.

3

PROFIL BANK JATIM

BANK JATIM PROFILE



Identitas Bank Jatim

BANK JATIM IDENTITY

NAMA PERUSAHAAN / COMPANY NAME	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	
PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN / CHANGE OF COMPANY NAME	PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur	
KEGIATAN USAHA/PRODUK / BUSINESS ACTIVITIES/PRODUCTS	Jasa Perbankan	Banking Service
TANGGAL PENDIRIAN / DATE OF ESTABLISHMENT	17 Agustus 1961	August 17, 1961
AKTA PENDIRIAN / DEED OF ESTABLISHMENT	No.91 tanggal 17 Agustus 1961	No. 91 dated August 17, 1961
MODAL DASAR / AUTHORIZED CAPITAL	Rp 9.000.000.000.000	Rp9,000,000,000,000
MODAL DISETOR / PAID-IN CAPITAL	Rp 3.750.592.645.500	Rp3,750,592,645,500
PENCATATAN SAHAM DI BURSA / LISTING ON STOCK EXCHANGE	12 Juli 2012	July 12, 2012
PEMEGANG SAHAM / SHAREHOLDER	Pemda Tingkat I Provinsi Jawa Timur (51,17%)	East Java Provincial Government (51.17%)
	38 Pemda Kabupaten/Kota (28,38%)	38 Regency/Municipality Governments (28.38%)
	Masyarakat (20,45%)	Public (20.45%)
KODE SAHAM / TICKER CODE	BJTM	
ALAMAT KANTOR / OFFICE ADDRESS	Jalan Basuki Rachmad 98 – 104, Surabaya 60271 PO.BOX 917	
	Telp. (62-31) 5310090-5310099 Fax. (62-31) 5310838	
	Email. info@bankjatim.co.id, corsec@bankjatim.co.id	
NPWP	01.110.116.9.631.000	
CALL CENTER	14044	
SMS BANKING	3366	
WEBSITE	www.bankjatim.co.id	
	www.bankjatim.id	



Riwayat Singkat Bank Jatim

BRIEF HISTORY OF BANK JATIM

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim, berdiri pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur berdasarkan Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 serta diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961. Kemudian status Bank Jatim sebagai Bank Pembangunan Daerah berubah dari Perseroan Terbatas menjadi Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan disempurnakan melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976. Kemudian status Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkat dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, peningkatan status Bank Jatim ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Pada tanggal 29 Desember 1994 struktur permodalan Bank Jatim berubah sehubungan dengan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan perubahan struktur modal tersebut maka Kepemilikan Modal Saham dari Pihak Ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan diizinkan maksimal 30% (tiga puluh persen).

Pada tanggal 19 Agustus 2016, bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengacu Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-8227.HT.01.01.Th.99 tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008/1999 maka selanjutnya secara resmi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD *Regional Champion* yang salah satu parameternya

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk or Bank Jatim was established on August 17, 1961 in Surabaya under the name of PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur. The deed of establishment of the Bank was drawn up before Anwar Mahajudin, Notary, under Deed No. 91 dated August 17, 1961, and approved by the Ministry of Finance through Decree No. BUM.9-4-5 dated August 15, 1961. Subsequently, Bank Jatim's status as a Regional Development Bank was changed from Limited Liability Company to Regional-Owned Enterprise pursuant to the Law No. 13 of 1962 regarding Principals of Regional Development Banks and Law No. 14 of 1967 regarding Banking Principals, and revised through the Regional Regulation of East Java Provincial Government No. 2 of 1976 dated July 10, 1976. The status of the Bank was upgraded as well, from Commercial Bank to Commercial Foreign Exchange Bank as stipulated in the Decree of Board of Directors of Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR dated August 2, 1990.

On December 29, 1994, the Bank's capital structure was changed in relation to the enactment of Regional Regulation of East Java Provincial Government No. 26 of 1994 regarding First Amendment to the Regional Regulation of East Java Provincial Government No. 9 of 1992 regarding Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. With this change, the Share Ownership of the Bank allows to include a Third Party as one of its shareholders with maximum shareholding of 30% (thirty per cent).

The Bank then underwent a change in its legal entity on August 19, 2016 as stipulated in the Regional Regulation of East Java Provincial Government No. 7 of 2016 regarding amendment to the Regional Regulation of East Java Provincial Government No. 1 of 1999 regarding Change to the Legal Entity of Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, from Perusahaan Daerah (Regional Enterprise) to Perseroan Terbatas (Limited Liability Company) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. This change was conducted in reference to the Article 2 of the Regulation of Minister of Home Affairs No. 1 of 1998 regarding Legal Entity of Regional Development Banks. Thus, on March 20, 1999, the Regional House of Representatives (DPRD) of East Java Province validated the Regional Regulation of East Java Provincial Government No. 1 of 1999 regarding Change of Legal Entity of Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur from Perusahaan Daerah (PD) or Regional Enterprise to Perseroan Terbatas (PT) or Limited Liability Company.

In accordance with the Notary Deed No. 1 of R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., a Notary, dated May 1, 1999, which was approved through the Decree of Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-8227.HT.01.01.Th.99 dated May 5, 1999, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 42 dated May 25, 1999, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 3008/1999, the Bank officially became PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Then, due to economic development and as an effort to meet the requirements as a BPD Regional Champion, one of which was to strengthen the capital, then, the

adalah memperkuat permodalan, maka dilakukan pendaftaran Penawaran Umum Saham Perdana Bank Jatim yang dinyatakan efektif pada tanggal 12 Juli 2012. Bank Jatim mencatatkan 20% (dua puluh persen) sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

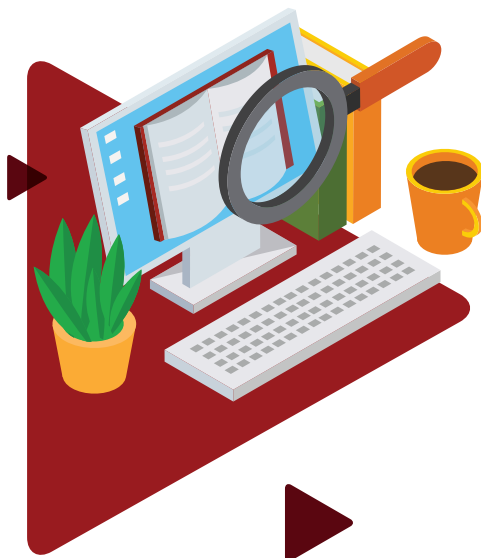
Sesuai dengan bahasan riwayat singkat perusahaan, Bank Jatim pernah melakukan pergantian nama sebanyak 3 (tiga) kali sejak pertama kali berdiri, dari semula bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sejak tahun 1976. Kemudian berubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-8827/HT.01.01. Th.99 tanggal 05 Mei 1999 dan Berita Negara RI tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara RI Nomor 3008/1999. Terakhir berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sesuai Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-31887 tanggal 31 Agustus 2012 dan menjadi Perusahaan Terbuka dengan mencatatkan 20% saham di Bursa Efek Indonesia dengan *Ticker Code* atau Kode Saham BJTM.

Dalam rangka penyesuaian dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, PT Bank Jatim melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 Tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0153694 tanggal 18 Juli 2017, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 92 Tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, SH, Notaris di Surabaya dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0226225 tanggal 26 Juli 2018 dan perubahan terakhir dalam rangka penyesuaian permodalan terkait dengan pelaksanaan *Program Management Employee Stock Option Plan* (MESOP) PT Bank Jatim Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 75 Tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, SH, Notaris di Surabaya dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0355414 tanggal 05 November 2019.

Bank proposed for an Initial Public Offering of shares which took effect on July 12, 2012. Bank Jatim listed 20% (twenty per cent) of its shares on Indonesia stock exchange and its status changed to public company along with its name into PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Bank Jatim underwent 3 (three) name changes since its initial establishment, from PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur to Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur in 1976 and to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur based on the Decree of Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-8227. HT.01.01. Th.99 dated May 5, 1999, and State Gazette of the Republic of Indonesia No. 42 dated May 25, 1999, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 3008/1999. Final change to the Bank's name, which was PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, was carried out in accordance with the Decree of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-31887 dated August 31, 2012, in which the Bank became a Public Company through the listing of 20% of its shares on the Indonesia Stock Exchange under BJTM ticker code.

To adjust its business with the applicable regulations, Bank Jatim amended its Articles of Association based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 22 dated July 13, 2017, drawn up before Siti Nurul Yuliami, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, a Notary in Surabaya, which was approved and obtained Receipt Notification from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Letter No. AHU-AH.01.03-0153694 dated July 18, 2017, as well as the Deed of Statement of Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolutions No. 92 dated July 24, 2018, drawn up before Sitaresmi Puspawati Subianto, SH, a Notary in Surabaya, which obtained Receipt Notification from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Letter No. AHU-AH.01.03-0226225 dated July 26, 2018. The last amendment was made in order to adjust the Bank's capital in relation to the implementation of Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) of Bank Jatim, based on the Deed of Restatement of Meeting Resolution No. 75 dated October 22, 2019, drawn up before Sitaresmi Puspawati Subianto, SH, a Notary in Surabaya, and obtained Receipt Notification from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Letter No. AHU-AH.01.03-0355414 dated November 5, 2019.



Jejak Langkah

MILESTONES

1961	Pendirian PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DJAWA TIMUR	Establishment of PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DJAWA TIMUR.
1976	Perubahan Status Ke Badan Usaha Milik Daerah	Change of status into Regional-Owned Enterprise.
1990	Peningkatan Status Ke Bank Devisa	Status upgrade to Foreign Exchange Bank.
1999	Perubahan Status dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Menjadi Perseroan Terbatas	Change of status from Regional-Owned Enterprise (BUMD) to Perseroan Terbatas (Limited Company).
2007	Pembentukan Unit Usaha Bank Jatim Syariah	Establishment of Sharia Business Unit of Bank Jatim.
2012	Penawaran Umum Perdana Saham Bank Jatim Pada 12 Juli 2012	Initial Public Offering on July 12, 2012.
2014	Pembentukan 44 Unit Usaha Mikro	Establishment of 44 Micro Business Units.
2015	Meluncurkan Produk Jatim Prioritas (Layanan Prima Bagi Nasabah Priority), Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel), Tabungan & Kredit Siumi (Pelaku Usaha Mikro Kecil (Pumk), Tabungan Siklus Nelayan	Launching of Jatim Priority (Premium Service for Priority Customers) product, Simpanan Pelajar (Simpel) Saving Product, SiUMI Saving & Loan product (SiUMI Program is dedicated for Micro and Small Entrepreneurs), and Siklus.
	Bank Jatim dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Se-Indonesia (Perbamida) sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (Mou) terkait Pemberian Fasilitas Kredit Linkage Program Kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).	Nelayan Saving Product. Bank Jatim and Indonesian Regional Government Rural Banks Association (Perbamida) agreed to sign a Memorandum of Understanding (MoU) related to the Linkage Program facility to Rural Banks (BPR)
2016	<i>Launching Program Loan Agreement</i>	Launching of Program Loan Agreement;
	<i>Launching Mobile Bank Jatim</i>	Launching of Mobile Bank Jatim;
	<i>Launching Produk Sipandai</i>	Launching of Sipandai Product.
2017	Pembukaan Bank Jatim Cabang Batam	Opening of Batam Branch;

	Meluncurkan Produk Baru, Diantaranya	Launching of New Products, including:
	Yuan Remittance	Yuan Remittance;
	Giro Plus	Giro Plus;
	Jatim Indag Card	Jatim Indag Card;
	Smile Premium Link	Smile Premium Link;
	Jempol Link (Bancassurance kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life)	Jempol Link (Bancassurance in cooperation with PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life).
2018	Launching Program Smart ID Card bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep;	Launching of Smart ID Card program for Civil State Apparatus together with Sumenep Regency Government;
	Launching Kredit Dana Bergulir (Kredit Hulu Hilir Agromaritim Sektor Kelautan dan Perikanan)	Launching of Revolving Fund Loans (Hulu Hilir Agromaritim Loans for Maritime and Fisheries Sector);
	Launching Transaksi Remittance	Launching of Remittance Transaction;
	Launching Virtual Account	Launching of Virtual Account.
2019	Peresmian dan Launching BJTM Connect	Inauguration and launching of BJTM Connect;
	Launching jatimcode (fitur pembayaran Bank Jatim mobile banking melalui scan QR code)	Launching of jatimcode (payment feature for Bank Jatim Mobile Banking through QR Code scan);
	Launching Portal e-form Kredit	Launching of e-Form Credit Portal;
	Bankjatim dan UINSA Raih Rekor MURI bersama (aktivasi rekening efek 5000 civitas akademika bersama)	Bank Jatim and UINSA jointly broke a MURI record in mass academic community's activation of 5,000 securities accounts;
	Kerjasama dengan GoPay dan Grab	Cooperation with GoPay and Grab;
	Tim Bola Voli Putri mencetak <i>hat-trick</i> Juara Livoli Divisi Utama	Female Volleyball Team achieved <i>hat-trick</i> and emerged Champion of Livoli of Main Division.

Produk dan Jasa

PRODUCT & SERVICES

BIDANG USAHA

Bank Jatim melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan Anggaran Dasar Nomor 22 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H, M.Kn serta Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Nomor 92 tanggal 24 Juli 2018 dan Perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto S.H, dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

KEGIATAN USAHA

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan Kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat Wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lain;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek;
9. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/ atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;

LINE OF BUSINESS

bankjatim carries out business activity in the field of banking in accordance with the Articles of Association No. 22 dated July 13, 2007, drawn up before Siti Nurul Yuliami, S.H, M.Kn, a Notary, as well as Deed of Statement of EGMS Resolution No. 92 dated July 24, 2018. The latest amendment was made through the Deed of Restatement of Meeting Resolution No. 10 dated December 4, 2018, drawn up before Sitaresmi Puspawati Subianto S.H, a Notary. Bankjatim's business activities are as follows:

BUSINESS ACTIVITIES

1. Collect funds from the community in the form of deposits, such as current accounts, time deposits, certificates of deposits, savings, and/or other similar forms;
2. Provide Credit;
3. Issue debt statements;
4. Purchase, sell, or guarantee on behalf of own risk or on the orders or interests of its customers:
 - Money orders, including those that have been accepted by bank of which the validity period is no longer than the conventional period applicable in the trading of relevant documents;
 - Statements of debt and other kinds of trade papers of which the validity period is no longer than the conventional period applicable in the trading of relevant documents;
 - State treasury papers and government guarantee letters;
 - Bank Indonesia Certificates (SBI);
 - Bonds;
 - Timed trade papers in accordance with the prevailing laws and regulations;
 - Other timed securities instruments in accordance with the prevailing laws and regulations;
5. Transfer cash both for the interest of the Bank and of the customers;
6. Invest funds in, borrow funds from, or lend funds to other banks, either with a letter, means of telecommunication, money order, check, or other instruments;
7. Receive payments from receivables for securities and make calculations with or among third parties;
8. Place funds from one customer to other customers in a form of securities that are not listed on the stock exchange;
9. Conduct activities in foreign exchange and/or as a Foreign Exchange Bank by complying with the terms and conditions set by the authorized parties;

10. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik didalam maupun di luar negeri.

10. Provide financing and/or carry out other activities including those based on the sharia principles in accordance with the applicable provisions;
11. Commence other banking business in accordance with the prevailing laws and regulations, both in domestic and overseas.

KEGIATAN USAHA PENUNJANG

Untuk mendukung kegiatan usaha utama bank, Bank Jatim juga melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
3. Membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib segera dicairkan secepatnya;
4. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
5. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan atau mendirikan perusahaan baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
6. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan—berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
7. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku;
8. Memberi bantuan teknis kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota seluruh Jawa Timur baik yang berbentuk Perusahaan Daerah maupun yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam rangka pengelolaan kas dan keuangan;
9. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

To complement primary business activities, bankjatim also carries out the following supporting business activities:

1. Provide a safe place to store goods and securities;
2. Conduct entrustment activities for the benefit of other parties based on a contract;
3. Purchase part of or all the collateral, either through an auction or outside of an auction based on voluntary handover by the collateral owner or based on the authority to sell outside of the auction from the collateral owner in which the debtor does not fulfill their obligations to the company, with a condition that the purchased collateral have to be immediately disbursed;
4. Conduct factoring, credit card business, and trustee activities;
5. Perform capital investment in banks or other companies in the financial sector, including leasing, venture capital, and securities companies, as well as settlement and storage clearing institutions, or establish new companies insofar as they do not contradict the prevailing laws and regulations;
6. Perform temporary capital investment activities to overcome the consequences due to credit failures or financing failures, based on sharia principles, with the provision of withdrawing the investments in compliance with the applicable provisions;
7. Act as the founder of pension funds and manager of pension funds in accordance with the applicable pension fund regulations;
8. Provide technical assistance to Regional-Owned Enterprises (BUMD) within the East Java Provincial Government area as well as throughout East Java Districts/Cities, both in the form of Regional Companies and in the form of Limited Liability Companies (PT) in the context of cash and financial management;
9. Conduct other activities commonly carried out by banks insofar as they do not contradict the prevailing laws and regulations.

PRODUK SIMPANAN

REKENING GIRO RUPIAH

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/ bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim

DEPOSIT PRODUCT

RUPIAH CURRENT ACCOUNT

Giro or current account is a deposit that can be withdrawn at any time by using check/transfer form and other payment order facilities, or by way of transfer. Bank Jatim's current account is online at all of

sudah online di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan dimanapun (*Intercity Kliring*) dengan mata uang Rupiah.

REKENING GIRO VALAS

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/ bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah online di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan dimanapun (*Intercity Kliring*) dengan mata uang Valas (USD).

DEPOSITO RUPIAH

Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.

DEPOSITO VALAS

Deposito valas hanya menerima dana dalam bentuk mata uang asing, seperti USD sesuai dengan ketentuan bank. Suku bunga yang ditawarkan oleh deposito valas umumnya lebih rendah daripada deposito rupiah.

TABUNGAN SIMPEDA

Simpeda adalah Simpanan Pembangunan Daerah yang sudah online di seluruh Cabang Bank Jatim, tabungan yang bunganya dihitung harian memberi banyak kemudahan dan manfaat dengan biaya ringan. Nilai total hadiah 12,5 Miliar Rupiah per tahun yang diundi tiga kali dalam setahun, yaitu dua kali untuk tingkat nasional dan satu kali untuk tingkat regional.

TABUNGAN SIKLUS

Dengan tabungan ini Bank Jatim ingin turut serta menumbuhkan kembangkan tradisi menabung sebagai wujud awal menuju keluarga sejahtera. Tabungan ini disediakan bagi nasabah yang tidak menginginkan hadiah namun mengharapkan bunga yang kompetitif.

TABUNGAN SIKLUS USAHA MIKRO KECIL (SIUMI)

Untuk menggerakkan sektor ekonomi produktif khususnya melalui Usaha Mikro Kecil & Menengah, Bank Jatim meluncurkan Program SiUMI (Siklus Mikro Kecil). Program ini merupakan bundling dari Tabungan SiUMI dan Kredit SiUMI.

TABUNGAN SIKLUS NELAYAN (SINYAL)

Sejalan dengan visi Pemerintah Pusat menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Kementerian Kelautan & Perikanan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (OJK) meluncurkan program JARING (Jangkau, Sinergi & Guideline) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada dunia kemaritiman. Sejalan dengan peran Bank Jatim dalam mendukung program pemerintah, maka diperlukan pengembangan produk yang

its branches so that withdrawals and deposits can be made at all branches while Bank Jatim's check/transfer form in Rupiah can be cleared anywhere (Intercity Clearing);

FOREIGN CURRENCY CURRENT ACCOUNT

Giro or current account is a deposit that can be withdrawn at any time by using check/transfer form and other payment order facilities, or by way of transfer. Bank Jatim's current account is online at all of its branches so that withdrawals and deposits can be made at all branches while Bank Jatim's check/transfer form in foreign currency (USD) can be cleared anywhere (Intercity Clearing);

RUPIAH DEPOSITS

Deposits, or often referred to as time deposits, are a bank's product similar to savings services commonly offered to the public. Funds in deposits are guaranteed by the government through the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) under certain terms and conditions.

FOREIGN CURRENCY DEPOSITS (USD)

Foreign currency deposits only accept funds in foreign currencies, such as USD, in accordance with banking regulations. The interest rates offered in foreign currency deposits are generally lower than the rates of Rupiah deposits.

SIMPEDA SAVINGS

Simpeda is a Regional Development Deposit product that has been online in all Bank Jatim's branches. This product implements a daily-calculated interest rate which provides a lot of convenience and benefits at such a low cost. The total prize of Rp12.5 billion per year is drawn three times a year, twice for the national level and once for the regional level.

SIKLUS SAVINGS

With this savings product, Bank Jatim contributes to the development of saving tradition as a means to manifest a prosperous family. This product is suitable for customers who do not want prizes but expect competitive interest.

MICRO AND SMALL ENTERPRISE SIKLUS SAVINGS (SIUMI)

To foster the productive economic sector, specifically through the Micro, Small & Medium Enterprises, Bank Jatim launches the SiUMI (Micro and Small Enterprise Siklus Savings) Program consisting of SiUMI Savings and SiUMI Loans.

FISHERMEN SIKLUS SAVINGS (SINYAL)

In line with the vision of the Central Government to actuate Indonesia as the World Maritime Axis, the Ministry of Maritime Affairs & Fisheries, in collaboration with the Financial Services Authority (OJK), launched the JARING (Reach, Synergy, and Guideline) program which is expected to give positive contribution to the maritime sector. In accordance with the role of Bank Jatim in supporting the government programs, it is necessary to

ada untuk merealisasikan terwujudnya simpanan (tabungan) bagi para pelaku dunia kemaritiman khususnya nelayan.

TABUNGAN SIKLUS PRIORITAS

Tabungan Siklus Prioritas ditujukan bagi nasabah Jatim Prioritas atau bagi nasabah yang memiliki dana minimal 250 juta rupiah dengan bunga yang relatif tinggi. Berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan eksklusif bagi pemegang kartu debit Jatim Prioritas antara lain layanan kesehatan, diskon di berbagai *merchant*, majalah Jatim Prioritas, undangan event eksklusif dan lain-lain.

SIKLUS VALAS

Salah satu strategi yang ditempuh Bank Jatim adalah menciptakan Tabungan Siklus Valas dengan mata uang asing yang berlaku (USD dan SGD). Melalui program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan jumlah nasabah dana pihak ketiga dan/atau outstanding dana pihak ketiga secara keseluruhan.

SIKLUS BUNGA PLUS

Program Marketing Tabungan Siklus yang memberikan benefit berupa barang (tanpa diundi) dimana Nasabah masih tetap dapat menikmati bunga tabungan diakhir periode *lock up*. Cukup dengan menempatkan dana sebesar nominal tertentu Nasabah bisa langsung memilih barang yang diinginkan tanpa diundi. Untuk jangka waktu penempatan (*lock up/ holding period*) dimulai dari 1 s/d 60 bulan (sesuai pilihan nasabah).

TABUNGAN HAJI

Tabungan Haji Bank Jatim adalah salah satu jenis produk tabungan Bank Jatim yang merupakan simpanan guna membantu meringankan masyarakat yang beragama Islam khususnya bagi mereka yang berkeinginan untuk menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci Mekkah untuk melaksanakan rukun Islam yang ke lima.

TABUNGANKU

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi.

SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL)

Tabungan khusus bagi Pelajar/ Siswa Sekolah dari tingkat PAUD s.d SMA dengan nama Simpanan Pelajar (SIMPEL). Dengan setoran awal yang murah dan setoran selanjutnya yang ringan, SIMPEL dikemas untuk memberikan edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. SIMPEL merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana, dilengkapi dengan fitur yang menarik, guna mendorong budaya menabung sejak dini.

SIMPANAN LAKU PANDAI (SIPANDAI)

Simpanan Laku Pandai merupakan produk tabungan Bank Jatim yang memungkinkan nasabah dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus pergi

develop and improve existing products to manifest a specific savings for those in the maritime sectors, especially fishermen.

SIKLUS PRIORITAS SAVINGS

Siklus Prioritas Savings is aimed at Jatim Prioritas customers or customers who have a minimum fund of Rp250 million with relatively high interest rates. Various convenience and exclusive banking facilities are provided for the holders of Jatim Prioritas debit card, including health services, discounts at various merchants, Jatim Prioritas magazine, exclusive event invitations, and so on.

FOREIGN CURRENCY SIKLUS

One of the strategies pursued by Bank Jatim is to create a Foreign Currency Siklus Savings product with the applicable foreign currencies (USD and SGD). This program is expected to increase the growth of third-party funds' customers and/or outstanding third-party funds in general.

SIKLUS BUNGA PLUS

This SIKLUS Savings Marketing Program provides benefits in the form of direct goods without drawing, in which the customers can still enjoy their savings interest at the end of the lock-up period. Simply by placing funds of a certain nominal, customers can directly select the desired item without the drawing process. The lock-up or holding period is according to the customer's choice, starting from 6 to 60 months.

HAJJ SAVINGS

Bank Jatim's Hajj Savings is a savings product in the form of deposit which aims to specifically help alleviate the Muslim community, especially those wishing to take the Hajj pilgrimage to the Holy Land of Mecca to perform the fifth pillar of Islam.

TABUNGANKU

TabunganKu is a savings product for individuals with easy and simple requirements, which are jointly issued by Indonesian banks to foster the culture of saving and improve public welfare. This product is not subjected to administrative fees.

SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL)

This is a special savings for students from the level of elementary school to senior high school under the name of Student Savings/Simpanan Pelajar (SIMPEL). With a low initial and affordable follow-up deposits, SIMPEL is packaged to provide financial education and inclusion to encourage the saving culture from early age. SIMPEL is a savings product for students jointly issued by Indonesian banks with easy and simple requirements, and equipped with attractive features, to encourage saving culture from early age.

SIMPANAN LAKU PANDAI (SIPANDAI)

Simpanan Laku Pandai is Bank Jatim's savings product that allows the customers to conduct financial transactions without having to go to the Bank, and

ke Bank, cukup melalui agen SiPandai Bank Jatim. Sehingga, memudahkan masyarakat dalam berhubungan dengan Bank untuk memperoleh Layanan Keuangan.

TABUNGAN SIKLUS PENSIUN

Tabungan Siklus Pensiun merupakan tabungan bagi nasabah pensiunan dalam mata uang IDR yang dipergunakan sebagai sarana penerimaan untuk pembayaran pensiunan lembaga penyalur dana pensiun (PT Taspen, PT Asabri, Perusahaan Dana Pensiun dan Lembaga Pensiun lainnya yang sudah bekerjasama dengan Bank Jatim) yang dapat dibuka di seluruh Jaringan Kantor Bank Jatim yaitu Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Layanan/Kantor Kas.

simply through the SiPandai Bank Jatim agent. Therefore, it is easier for people to connect with the Bank to obtain Financial Services.

SIKLUS PENSION SAVINGS

This is a savings product in the Rupiah currency aimed at customers of the pensioner segment and used as a means of receiving pension payment from pension fund disbursement companies (PT Taspen, PT Asabri, Pension Fund Companies, and other Pension Fund institutions partnering with Bank Jatim). This product can be opened at all Bank Jatim's office network, i.e. branch offices, sub-branch offices, service offices, and cash offices.

PRODUK KREDIT KONSUMER

KREDIT MULTIGUNA

Pemberian kredit di sektor konsumtif dan untuk keperluan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, yang dapat diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan penghasilan lainnya antara lain PNS, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai PERUM, Lembaga Pendidikan, Anggota TNI/POLRI, Pegawai Perusahaan Swasta, Warga Negara RI yang menjadi karyawan perusahaan Multinational, pegawai perusahaan swasta, swasta nasional, swasta asing/ Joint Venture yang berstatus PMA/PMDN, Anggota legislatif, Pegawai yayasan, pegawai koperasi, CPNS dan Calon pegawai BUMN/BUMD yang gajinya dibayarkan melalui Bank Jatim maupun tidak melalui Bank Jatim (telah ada MoU dengan Bank Jatim).

KREDIT PROPERTI

Kredit konsumsi yang diberikan Bank untuk Masyarakat Umum dalam pembelian Rumah Tapak, Rumah Susun, Rumah Toko atau Rumah Kantor yang dapat diberikan kepada Masyarakat oleh bank untuk membiayai pemilikan properti dari pengembang maupun dari non pengembang.

KREDIT SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH

Kredit yang diberikan Bank Jatim kepada Pengusaha Mikro dan Kecil secara Kelompok, Koperasi, Badan Usaha atau perorangan dan Yayasan Kas Pembangunan (YKP) kota Surabaya yang penggunaannya untuk meningkatkan hak atas tanah yang bukti kepemilikan tanahnya secara hukum tidak ada masalah/sengketa.

KREDIT PEKAWAI & PERSONAL LOAN CAR ALLOWANCE PROGRAM

Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank kepada Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Tetap, Pegawai Tetap Non Karir, MLE, Calon Pegawai, Anggota Komite, Pensiunan Pegawai dan *Personal Loan Car Allowance Program* (CAP) yang penggunaannya untuk konsumtif dan untuk keperluan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

CONSUMER CREDIT PRODUCTS

MULTIGUNA (MULTIPURPOSE) CREDIT

Multiguna or Multipurpose Credit is the provision of credit or loans in the consumption sector and for other purposes, as long as they do not contradict the prevailing laws. This product is offered to members of the community with regular and other forms of income, including Civil Servants, Employees of the State-Owned Enterprises and Regional-Owned Enterprises, Employees of PERUMs, Educational Institutions, Members of National Army and National Police, private employees, national private companies, foreign private companies/joint ventures with PMA/PMDN status, Legislative members, employees of foundations and cooperatives, Prospective Civil Servants, and Prospective Employees of the State-Owned Enterprises and Regional-Owned Enterprises whose salaries are paid through Bank Jatim or not through Bank Jatim but with an MoU with Bank Jatim.

PROPERTY CREDIT

Property credit is a loan facility for consumption sector given by the Bank and is intended for the purchase of Landed Houses, Flats, Shop Houses, or Office Houses. This loan is offered to the community to finance mortgage from developers and non-developers.

LAND RIGHTS CERTIFICATION CREDIT

Land Rights Certification Credit is given by Bank Jatim to Micro and Small Entrepreneurs in a Group, Cooperative, Business Entity, individual person, and Yayasan Kas Pembangunan (YKP) of Surabaya. This type of credit is useful to intensify the land rights of which the proof of legal ownership of the land itself is clear or without disputes.

EMPLOYEE CREDIT & PERSONAL LOAN CAR ALLOWANCE PROGRAM

Employee credit and Personal Loan Car Allowance Program are loan facilities given to the members of Board of Commissioners and Board of Directors, Permanent Employees, Non-Career Permanent Employees, MLE, Prospective Employees, Committees' Members, and Retired Employees, which can be used for consumption purpose as well as for other purposes as long as it does not contradict the prevailing laws and regulations.

KREDIT MENENGAH & KORPORASI

KREDIT POLA KEPPRES

Kredit Modal Kerja-Pola Keppres adalah fasilitas kredit modal kerja kepada Kontraktor/Penyedia Jasa untuk Tambahan modal kerja kegiatan operasional pelaksanaan proyek pemerintah yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD, Provinsi/kota/kabupaten, BUMN, dan BUMD sehat dan swasta bonafide, dengan plafond tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan.

STANDBY LOAN

Kredit Modal Kerja-Pola Standby Loan adalah fasilitas kredit modal kerja kepada Kontraktor/Penyedia Jasa untuk Tambahan modal kerja kegiatan operasional pelaksanaan proyek pemerintah yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD, Provinsi/kota/kabupaten, BUMN, dan BUMD sehat dan swasta bonafide dengan plafond tertentu yang dapat dicairkan secara revolving per proyek atau kontrak kerja dan pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan.

KREDIT MODAL KERJA REKENING KORAN

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk membiayai modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.

KREDIT INVESTASI

Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang dan modal jasa guna rehabilitasi, pendirian usaha baru, yang pelunasan dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.

KREDIT KONSTRUKSI PROPERTI

Kredit Modal Kerja Konstruksi Properti adalah fasilitas kredit modal kerja yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (Pengembang/Developer) yang sedang atau akan mengerjakan proyek properti.

KREDIT SINDIKASI

Kredit Sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh 2 (dua) atau lebih Bank/ lembaga keuangan Non-Bank kepada debitur, dengan syarat atau ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, diperjanjikan dalam dokumentasi, dan diadministrasikan oleh lembaga yang disebut agen.

PINJAMAN KEPADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Pinjaman yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilindungi lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

MEDIUM AND CORPORATE LOANS

POLA KEPPRES CREDIT

Working Capital Pola Keppres Credit is a working capital loan facility given to Contractors/Service Providers to increase working capital for the operational activity of government project that is carried out at present or in the future, of which the funds are sourced from State Budget (APBN), Regional Budget (APBD), Province/City/Regency, healthy SOEs and Regional-Owned Enterprises, and bona fide private companies, with certain limits. The settlement of loans shall be sourced from payment terms of the relevant project.

STANDBY LOAN

Working Capital Standby Loan Credit is a working capital loan facility given to Contractors/Service Providers to increase working capital for the operational activity of government project that is carried out at present or in the future, of which the funds are sourced from State Budget (APBN), Regional Budget (APBD), Province/City/Regency, healthy SOEs and Regional-Owned Enterprises, and bona fide private companies, with certain limits that can be disbursed in a revolving manner per project or work contract. The settlement of loans shall be sourced from payment terms of the relevant project.

CURRENT ACCOUNT WORKING CAPITAL CREDIT

Current account working capital credit is a working capital financing facility given to the customers to fulfill the lack of their working capital, which expires within a maximum period of 1 year.

INVESTMENT CREDIT

Investment loan is a medium/long-term loan given to customers for purchasing capital goods and service for the purposes of rehabilitation and establishment of new businesses. The settlement of loans shall be sourced from the yields of business using the financed capital goods.

PROPERTY CONSTRUCTION CREDIT

Property Construction loan is a working capital loan facility provided by the Bank to the customers, specifically Developers who are in the process or will undergo a job on property projects.

SYNDICATED LOAN

Syndicated Loan is a credit given to the debtors by 2 (two) or more Banks/Non-Bank financial institutions, with the same terms or conditions for all syndicated participants, which is agreed within a documentation and administrated by an institution called an agent.

LOANS TO REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCIES (BADAN LAYANAN UMUM DAERAH – BLUD)

This is a loan facility given to Regional Work Units or each Work Unit within the Regional Work Units in the Regional Government aimed to provide services to the community in the form of goods and/or services which are sold without prioritizing profit and instead based on the principles of efficiency and productivity.

KREDIT PEMBIAYAAN PIUTANG

Kredit Pembayaran Piutang adalah kredit yang diberikan kepada pemilik piutang/tagihan yang pengembaliannya jelas dan dapat dipastikan. Fasilitas Kredit Pembayaran Piutang diberikan dengan tujuan untuk membantu nasabah/calon nasabah yang membutuhkan modal kerja karena piutang/ tagihannya masih belum waktunya untuk ditagihkan/ dcairkan. Keunggulan: Proses cepat.

CASH COLLATERAL CREDIT

Kredit yang dijamin dengan jaminan tunai berupa Deposito/ Giro/Tabungan Bank.

KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Fasilitas kredit yang diberikan kepada Pemda di Wilayah Jawa Timur maupun diluar Wilayah Jawa Timur yang berupa kredit investasi yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat dan/atau kredit modal kerja yang dipergunakan untuk menutup kekurangan cash flow daerah dalam anggaran tahun yang sama dengan plafond tertentu yang dapat dcairkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerah. Keunggulan dapat mempercepat pembangunan di daerah.

BANK GARANSI (RUPIAH DAN VALAS/USD)

Bank Garansi adalah warkat yang diterbitkan oleh Bank yang berisi kewajiban bank untuk membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin mengalami cidera janji (wanprestasi), dengan jenis sebagai berikut:

- Bank Garansi Penawaran
- Bank Garansi Pelaksanaan
- Bank Garansi Uang Muka
- Bank Garansi Pemeliharaan
- Bank Garansi Pembayaran
- Bank Garansi Sanggah Banding
- Bank Garansi untuk Penyalur/Agen/Dealer/Depot Holder

PRODUK TRESURI

DEVISA UMUM (TELEGRAPHIC TRANSFER)

Telegraphic Transfer merupakan transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk devisa umum (non tunai). Bank Jatim melayani transaksi Telegraphic Transfer untuk mata uang asing USD, GBP, SGD, JPY, HKD, EUR dan CNY.

Jenis transaksi *Telegraphic Transfer* yang menjadi layanan Bank Jatim diantaranya:

FX TODAY (FOREIGN EXCHANGE TODAY)

Transaksi FX Today yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada tanggal transaksi.

RECEIVABLE FINANCING CREDIT

Receivable Financing credit is a type of loan facility given to the holders of receivables/bills whose returns are clear and can be confirmed. The receivable financing loan facility aims to provide assistance for the customers/prospective customers who are in need of working capital as their receivables/bills cannot be billed/disbursed yet at that time. The advantage of this loan is in its quick process.

CASH COLLATERAL CREDIT

This loan is guaranteed with cash collateral in the form of Deposits/Current Accounts/Bank Savings accounts.

REGIONAL GOVERNMENT CREDIT

This credit facility is provided for the Regional Government within and outside the East Java Region in the form of investment loans. The loans can be used to finance the development of facilities and infrastructure as the Regional assets that can generate revenues for the repayment of loans, as well as to provide benefits for community services and/or working capital credit to cover the lack of Regional Cash Flow in the same year budget, with certain limit that can be disbursed in accordance with the regional financing needs. The advantage of this loan is that it can significantly accelerate the development in the region.

BANK GUARANTEES (RUPIAH AND FOREIGN EXCHANGE/USD)

Bank Guarantee is a script issued by the Bank that contains the Bank's obligation to pay the party who receives the guarantee if the guaranteed party performs breach of contract (default). The types of Bank Guarantees are as follows:

- Offer Bank Guarantee
- Implementation Bank Guarantee
- Down Payment Bank Guarantee
- Maintenance Bank Guarantee
- Payment Bank Guarantee
- Refutation and Appeal Bank Guarantee
- Bank Guarantee for Distributors/Agents/Dealers/ Depot Holders

TREASURY PRODUCTS

GENERAL FOREIGN EXCHANGE (TELEGRAPHIC TRANSFER)

Telegraphic transfer is a sale and purchase transaction on foreign currency in the form of general (non-cash) foreign exchange. Bank Jatim offers telegraphic transfer for USD, GBP, SGD, JPY, HKD, EUR, and CNY currencies.

The types of telegraphic transfer transactions provided by the Bank are as follows:

FX TODAY (FOREIGN EXCHANGE TODAY)

FX Today transaction is a sale and purchase transaction on foreign currency with the time of delivery of funds conducted on the day/date of the transaction.

FX TOM (FOREIGN EXCHANGE TOMORROW)

Transaksi FX Tom yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

FX SPOT (FOREIGN EXCHANGE SPOT)

Transaksi FX Spot yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

FX FORWARD (FOREIGN EXCHANGE FORWARD)

Transaksi FX Forward yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada lebih dari 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

FX SWAP (FOREIGN EXCHANGE SWAP)

Transaksi FX Swap yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing, terdiri atas 2 (dua) transaksi berlawanan, yang dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan dana yang berbeda.

Ada 2 jenis transaksi FX Swap, yaitu:

- **FX Swap Buy (Sell & Buy)**
adalah transaksi penjualan mata uang asing terhadap mata uang rupiah dengan penyerahan dana pada 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi, diikuti dengan pembelian kembali mata uang asing tersebut terhadap mata uang rupiah di waktu yang akan datang;
- **FX Swap Sell (Buy & Sell)**
adalah transaksi pembelian mata uang asing terhadap mata uang rupiah dengan penyerahan dana pada 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi, diikuti dengan penjualan kembali mata uang asing tersebut terhadap mata uang rupiah di waktu yang akan datang.

BANK NOTES

Bank Notes adalah layanan transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk uang kertas. Mata uang asing yang dapat ditransaksikan yaitu:

- USD
- GBP
- EUR
- SGD
- JPY
- HKD
- CNY
- SAR
- AUD
- MYR

DEPOSIT ON CALL

Deposit on Call adalah simpanan dana nasabah kepada Bank dengan nominal tertentu sesuai ketentuan yang berlaku dan jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan.

FX TOM (FOREIGN EXCHANGE TOMORROW)

FX Tom transaction is a sale and purchase transaction on foreign currency with the time of delivery of funds conducted in 1 (one) working day following the day/date of the transaction.

FX SPOT (FOREIGN EXCHANGE SPOT)

FX Spot transaction is a sale and purchase transaction on foreign currency with the time of delivery of funds conducted in 2 (two) working days following the day/date of the transaction.

FX FORWARD (FOREIGN EXCHANGE FORWARD)

FX Forward transaction is a sale and purchase transaction on foreign currency with the time of delivery of funds conducted in more than 2 (two) working days following the day/date of the transaction.

FX SWAP (FOREIGN EXCHANGE SWAP)

FX Swap transaction is a sale and purchase transaction on foreign currency, consisting of 2 (two) different transactions which are carried out simultaneously with different time of fund delivery.

The 2 types of FX Swap transaction are:

- **FX Swap Buy (Sell & Buy)**
a foreign currency selling transaction against Rupiah, with time of fund delivery is in 2 (two) working days following the day/date of the transaction. This transaction is followed by repurchasing of the foreign currency against Rupiah in the future;
- **FX Swap Sell (Buy & Sell)**
a foreign currency buying transaction against Rupiah, with time of fund delivery is in 2 (two) working days following the day/date of the transaction. This transaction is followed by reselling of the foreign currency against Rupiah in the future;

BANK NOTES

This is a sale and purchase transaction on foreign currency in the form of paper money or cash. The foreign currencies served by the Bank are:

- USD
- GBP
- EUR
- SGD
- JPY
- HKD
- CNY
- SAR
- AUD
- MYR

ON-CALL DEPOSITS

On-Call Deposits is a deposit of a certain nominal to the Bank carried out in accordance with the applicable provisions, with a period of less than 1 (one) month.

JASA BISNIS

REFERENSI BANK

Merupakan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Jatim yang menerangkan bahwa orang/perusahaan yang mengajukan adalah benar-benar nasabah Bank Jatim. Referensi Bank dapat digunakan oleh nasabah untuk mengikuti pelelangan proyek tertentu.

KLIRING NASIONAL

Transfer dana kredit antar Bank melalui kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (*paperless*) yang dapat digunakan untuk melakukan transfer ke seluruh wilayah Indonesia.

REAL TIME GROSS SETTLEMENT (RTGS)

Sistem transfer dana berbasis RTGS yang memungkinkan bank dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran/ transfer dana secara elektronik dalam waktu seketika/*online* dan penyelesaian transaksi (*settlement*) secara terpadu.

INKASO RUPIAH

Merupakan pengiriman warkat (Cek, Bilyet, Giro, Wesel) ke Bank tertarik untuk mendapatkan pembayaran karena tidak dapat diselesaikan melalui sarana kliring (Bank tertarik diluar wilayah kliring) dengan menggunakan mata uang Rupiah.

INKASO VALAS

Merupakan pengiriman warkat (Cek, Bilyet, Giro, Wesel) ke Bank tertarik untuk mendapatkan pembayaran karena tidak dapat diselesaikan melalui sarana kliring (Bank tertarik diluar wilayah kliring) dengan menggunakan mata uang Valas (USD).

GIRALISASI

Merupakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yang dilakukan secara otomatis oleh Bank dengan melakukan pendebitan rekening giro/tabungan nasabah sesuai dengan surat perintah pendebitan yang telah ditanda tangani oleh nasabah.

BPD NET ONLINE

Fasilitas transfer antar BPD seluruh Indonesia yang tergabung dalam ATM Bersama secara Real Time.

JATIM ELECTRONIC TRANSFER SYSTEM (JETS)

Dengan adanya Jatim Elektronik Transfer Sistem (JETS) maka semuanya akan terhubung secara online, misalnya transfer antar BPR atau ke bank umum.

WESTERN UNION

Jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time online*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara.

BUSINESS SERVICES

BANK REFERENCE

Bank Reference is a statement issued by Bank Jatim which explains that the undersigned person/company is truthfully a customer of Bank Jatim. Bank References can be used by customers to participate in certain project auctions.

NATIONAL CLEARING

National Clearing is the credit funds transfer between Banks through clearing without the obligation to make physical paper (Paperless) exchanges. The transfer can be done within all regions of Indonesia.

REAL TIME GROSS SETTLEMENT (RTGS)

RTGS-based fund transfer system enables the Bank to carry out various electronic transactions of fund payments/transfer instantly/online with an integrated settlement of transaction.

INKASO RUPIAH

INKASO Rupiah is a dispatch of scripts (Check, Transfer Form, Giro, Money Order) using Rupiah to the interested bank to get a payment as it cannot be settled through a clearing facility (due to the location of the interested bank outside the clearing area).

INKASO VALAS

INKASO Valas is a dispatch of scripts (Check, Transfer Form, Giro, Money Order) using foreign currency (USD) to the interested bank to get a payment as it cannot be settled through a clearing facility (due to the location of the interested bank outside the clearing area).

GIRALIZATION

Giralization is a payment made by the customers that is carried out automatically by the Bank by debiting the current account/savings account of the relevant customers based on the debit order signed by the customers.

BPD NET ONLINE

This is a transfer facility between BPDs throughout Indonesia that is incorporated in ATM Bersama in Real Time.

JATIM ELECTRONIC TRANSFER SYSTEM (JETS)

Jatim Electronic Transfer Sistem (JETS) enables all transactions to be connected online; for example, transfers between BPRs or to commercial banks.

WESTERN UNION

This is a quick money transfer delivery or reception service that are conducted in real time and online across countries or within one country.

TRANSAKSI REMITTANCE

Remittance merupakan salah satu jasa pelayanan bank terhadap masyarakat berupa transfer atau pengiriman uang dalam bentuk valuta asing baik itu penerimaan (*incoming*) maupun pengiriman (*outgoing*). Transaksi masuk (*incoming transfer*) yaitu kiriman uang dari bank lain atau dari bank yang sama yang akan diteruskan kepada pihak nasabah penerima (*beneficiary*) sedangkan *outgoing transfer* (transfer keluar) yaitu pengiriman uang oleh bank atas permintaan nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank yang sama atau kepada Bank lain. Transaksi *Remittance* memberikan kemudahan dan kelancaran transaksi usaha anda dalam bentuk layanan transfer valas ke luar negeri. Bank Jatim melayani transfer valas dalam mata uang USD, SGD, JPY, HKD, GBP, EUR dan CNY.

REMITTANCE TRANSACTIONS

Remittance is one of the Bank's services to the public in the form of transfers or remittances of foreign exchange, both as a receipt (*incoming*) and as a delivery (*outgoing*). Incoming transactions or transfers that are remittances from other banks or from the same bank will be forwarded to the recipient customer (*beneficiary party*). On the other hand, the outgoing transfers are bank remittances at the customer's request or certain bank parts for the benefit of others at the same bank or another bank. Remittance Transactions provide convenience and smoothness for the business transactions in the form of foreign exchange transfer services abroad. Regarding this, Bank Jatim serves foreign exchange transfers in USD, SGD, JPY, HKD, GBP, EUR, and CNY currencies.

JASA KELEMBAGAAN

LAYANAN PAJAK

Merupakan salah satu Jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Layanan pajak ini berkaitan dengan status Bank Jatim sebagai Bank Operasional V (BO V) atau sebagai Bank Persepsi. Sistem layanan *online* telah disahkan oleh Dirjen Pajak Pusat dan diakui keabsahannya. Jenis layanan pajak:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Daerah Lain (PDL)
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penghasilan (PPh)
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

TAX SERVICES

Tax is one of the services provided by Bank Jatim to its customers. Tax Service is related to the status of Bank Jatim as an Operational Bank V (BO V) or as a Perception Bank (Tax Payment Bank). The Bank's online service system has been authorized by the Directorate General of Central Taxes and its validity is recognized. The types of tax services offered are as follows:

- Property Tax
- Customs for Land and Building Rights
- Other Regional Taxes
- Vehicle Tax
- Value-Added Tax (VAT)
- Income Tax
- Non-Tax Revenue

PEMBAYARAN TAGIHAN

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Layanan pembayaran ini dapat melalui Teller Bank Jatim maupun melalui seluruh *E-Channel* Bank Jatim dan sudah online diseluruh Cabang Bank Jatim. Berbagai jenis pembayaran antara lain:

- Pembayaran Tagihan Air/PDAM
- Pembayaran Tagihan Listrik/PLN
- Pembayaran Tagihan Telepon
- Pembayaran Biaya Pendidikan
- Pembayaran Tagihan Internet
- Pembayaran Tagihan TV Berlangganan
- Pembayaran Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS)
- Pembayaran Tagihan Multi Finance
- Pembayaran Tagihan Kartu Kredit
- Pembayaran Tiket Pesawat / Tiket Kereta Api
- Pembayaran Transaksi *E-Commerce*

BILL PAYMENT

Bill payment is one of the services provided by Bank Jatim to its customers. This payment service can be performed through the Bank's Teller or through the entire e-Channel, and has been online throughout all Branches of the Bank. Various types of bill payments include:

- Water (PDAM) Bill Payment
- Electricity (PLN) Bill Payment
- Phone Bill Payment
- Payment for Education Fees
- Internet Bill Payment
- Subscription TV Bill Payment
- Payment for Surabaya Container Terminal (TPS)
- Multi Finance Bill Payment
- Credit Card Bill Payment
- Payment for Airline or Train Tickets
- E-Commerce Transactions Payment

PAYROLL GAJI

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Sistem pembayaran gaji ini dengan memindahkan dari rekening penampungan atas nama lembaga atau perusahaan ke rekening tabungan pegawai penerima gaji.

PELAYANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN

SKBDN (SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI)

Instrumen yang diterbitkan oleh Bank Penerbit, atas permintaan pembeli/pemohon yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual/penerima apabila Bank Penerbit menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. SKBDN dipergunakan untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri. Bank Jatim dapat melayani kebutuhan, baik dari sisi pemohon maupun penerima SKBDN.

LETTER OF CREDIT (L/C)

Sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrument tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya bagi kepentingan, berdasarkan kondisi-kondisi/persyaratan-persyaratan yang tercantum pada instrumen tersebut.

TRANSFER VALAS (REMITTANCE)

Bank Jatim menyediakan Jasa transfer Valuta Asing untuk memudahkan transaksi para nasabahnya. Transfer Valuta Asing merupakan perintah bayar tak bersyarat yang dikirim dari Bank pengirim di dalam atau di luar negeri kepada Bank penerima dalam bentuk Valuta Asing atas permintaan dan untuk kepentingan pengamanat dengan menggunakan sarana yang *authenticated* (SWIFT, Tested Telex dan *Tested Facsimile*)

PENERIMAAN PAJAK EKSPOR/IMPOR (EDI SYSTEM)

EDI System akan membantu dalam hal pelayanan jasa dokumen ekspor impor, yaitu jasa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Administrasi pabean dapat memproses pemberitahuan pabean dalam sistem komputer pengguna jasa kepabeanan dan ditransmit secara elektronik, sehingga data yang sama akan segera masuk ke sistem komputer Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanpa melalui proses *re-entry*.

SALARY PAYROLL

Salary payroll is a type of services provided by Bank Jatim to its customers. The mechanism of salary payroll is by transferring certain amount of salary from a holding account on behalf of an institution or a company to a salary recipient's savings account.

TRADE TRANSACTION SERVICES

DOMESTIC LETTER OF CREDIT (SKBDN)

The domestic letter of credit (SKBDN) is an instrument issued by an issuing bank at the request of the buyer/applicant, which consists of the bank's commitment to pay a sum of money to the seller/recipient if the issuing bank receives documents in accordance with the SKBDN requirements. SKBDN is used to support domestic trade transactions. Bank Jatim can serve the needs both from the sides of the applicant and recipient of the SKBDN.

LETTER OF CREDIT (L/C)

Letter of Credit is an instrument issued by a bank on behalf of one of its customers, which authorizes a person or a company as the recipient of said instrument to withdraw a money order from the bank or on one of its correspondent banks for the interest, based on the conditions/requirements stated on the instrument.

FOREIGN EXCHANGE TRANSFER (REMITTANCE)

Bank Jatim provides Foreign Exchange Transfer Services to facilitate and simplify transactions for its customers. Foreign Exchange Transfers are unconditional payment orders sent from sending banks from within or outside the country to recipient banks in the form of Foreign Exchange at the request and for the interests of order givers, by using authenticated means (SWIFT, Tested Telex, and Tested Facsimile).

EXPORT/IMPORT TAX RECEIPT (EDI SYSTEM)

EDI System aims to provide assistance in terms of export and import documents, namely the Goods Import Notification (PIB) and Goods Export Notification (PEB) services. Customs administration is able to process customs notification in the customs service computer system that can further be transmitted electronically; hence, the same data will immediately be available at the computer system of the Directorate General of Customs and Excise without having to undergo the re-entry process.

PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH

PEMBIAYAAN UMUM

Pembiayaan Investasi adalah fasilitas yang penggunaannya ditujukan untuk membiayai investasi atau pengadaan barang-barang modal yang tidak habis dipakai dalam satu siklus usaha.

SHARIA FINANCING PRODUCTS

GENERAL FINANCING

Investment Financing is a facility provided to finance investments or procurement of capital goods that are not consumables up in one business cycle.

Pembiayaan Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha dan biasanya akan habis dalam satu siklus produksi, seperti untuk pengadaan bahan baku atau untuk membiayai kekurangan biaya operasional lainnya.

KPR IB GRIYA BAROKAH

Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah, ruko, rukan dan apartemen, baik baru maupun bekas, serta konsumsi beragam property dengan akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah.

MULTIGUNA SYARIAH

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada karyawan pemerintah atau swasta yang bekerjasama dengan Bank Jatim Syariah yang menggunakan akad murabahah dan ijarah.

EMAS IB BAROKAH

Fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, dimana nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun perhiasan) selanjutnya bank akan memberikan surat gadai sebagai jaminan pengambilan seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank.

KEPEMILIKAN LOGAM EMAS

Pembiayaan yang diberikan untuk membantu nasabah dalam memiliki Emas Lantakan dengan cara mengangsur setiap bulan dengan prinsip Murabahah (jual beli).

LINKAGE

BPRS adalah pembiayaan yang diberikan Bank kepada BPRS dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad mudharabah.

PKPA/PKOP adalah Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad mudharabah.

UMROH IB MAQBULLA

Produk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang akan melakukan perjalanan umroh dengan angsuran tetap sampai jangka waktu pembiayaan berakhir dengan akad ijarah.

PEMBIAYAAN DENGAN AGUNAN INVESTASI TERIKAT IB BAROKAH (ITIB)

Penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh Bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad mudharabah muqayyadah.

PEMBIAYAAN PIUTANG (ANJAK PIUTANG) IB BAROKAH

Jasa pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari korporat/seller (nasabah) kepada Bank yang kemudian menagih piutang tersebut

Working Capital Financing is a facility provided to finance and fulfill the working capital needs in order to perform the business activities and usually are consumables up in one production cycle, such as for the procurement of raw materials or to finance the lack of other operational costs.

KPR IB GRIYA BAROKAH

This is a short, medium, or long-term financing facility to finance the purchase of house, shop house, office house, and apartment, both new and used, as well as the consumption of collateral property by implementing the principles of akad murabahah and musyarakah mutanaqishah.

MULTIGUNA SYARIAH

Multiguna Syariah or Sharia Multipurpose is a financing facility given to the government or private employees in collaboration with Bank Jatim Syariah by implementing the principle of akad murabahah.

EMAS IB BAROKAH

Emas iB Barokah or iB Barokah Gold is a financing facility provided by the bank to the customer according to an agreement, where the customer physically hands over valuables in the form of gold (both bullion and jewelry), in which the bank will further give a mortgage as collateral for all or parts of the customer's debt to the bank.

GOLD OWNERSHIP

This financing facility is provided to make it easier for customers to own gold bullion by paying for the installments every month with the implementation of the Murabahah principle.

LINKAGE

BPRS is a financing facility given by the Bank to the BPRS and/or its members by implementing the akad mudharabah principle.

PKPA/PKOP is a financing facility given by the Bank to a cooperative and/or its members by implementing the akad mudharabah principle.

UMROH IB MAQBULLA

Umroh iB Maqbulla is a financing product aimed at customers who will undergo the umrah trips with fixed installments until the financing period ends with the ijarah contract.

FINANCING WITH BONDED INVESTMENT COLLATERAL IB BAROKAH (ITIB)

The placement of an amount of funds from the owner of the bonded investment funds managed by the Bank as collateral for the financing given to the Customer within a certain period of time based on the akad mudharabah muqayyadah principle.

IB BAROKAH FACTORING

Transfer services for settlement of receivables or short-term bills from the corporate/seller (customer) to the Bank, which then collect the receivables from

kepada pihak yang berutang (Mitra Korporasi/Buyer) yang dapat disertai dengan fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada Korporat/*Seller* (Nasabah) yang diperuntukkan sebagai talangan atas kebutuhan likuiditas korporat/*seller* (nasabah) senilai tagihan piutang dengan berlandaskan prinsip syariah.

PRODUK DANA & JASA SYARIAH

TABUNGAN BAROKAH

Produk simpanan dana berdasarkan prinsip Mudharabah (bagi hasil) antara Bank dengan Nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

TABUNGAN HAJI AMANAH

Simpanan yang menggunakan prinsip bagi hasil (Mudharabah) tabungan kepercayaan umat untuk mewujudkan niat dan langkah menuju Baitullah dan insya Allah menjadi Haji yang mabrur.

TABUNGANKU IB

Simpanan dengan menggunakan prinsip Wadiah Adh Dhamanah dimana simpanan Anda diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

TABUNGAN SIMPEL IB

"Simpanan Pelajar" atau SIMPEL adalah tabungan untuk siswa usia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP yang diterbitkan secara bersama oleh perbankan di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini berdasarkan prinsip Wadi'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela.

TABUNGAN UMROH IB AMANAH

Produk simpanan dana berdasarkan prinsip wadiah yang ditujukan kepada masyarakat umum yang ingin melaksanakan ibadah umroh yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

PROGRAM TABUNGAN BAROKAH SEJAHTERA

Program yang digabungkan dengan Tabungan Barokah dengan benefit barang sebagai bentuk *reward* dan/ atau *souvenir* atas pembukaan rekening Tabungan Barokah Sejahtera dengan tetap mendapatkan bagi hasil tabungan di akhir periode.

TABUNGAN RENCANA IB BAROKAH

Produk simpanan tabungan berjangka dengan prinsip Mudharabah yang ditujukan kepada masyarakat umum yang ingin menyimpan dananya dalam rangka untuk mewujudkan segala rencana masa depan.

the debtors (Corporate Partners/Buyers). It can be accompanied by short-term financing facilities to the Corporate/Seller (Customer) intended as bailout for the liquidity need of corporate/seller (customer) in the amount of receivables based on sharia principles.

SHARIA FUND & SERVICE PRODUCTS

TABUNGAN BAROKAH

Tabungan Barokah or Barokah Savings is a fund deposit that implements the Profit Sharing (Mudharabah) principle according to the ratio that has been agreed upon between the Bank and the Customer, which can be withdrawn at any time.

TABUNGAN HAJI AMANAH

Tabungan Haji Amanah or Haji Amanah Savings is a fund deposit that implements the Profit Sharing (Mudharabah) principle to serve as a credible saving for the Moslem community who wish to perform the Hajj pilgrimage to the Holy Land of Mecca.

TABUNGANKU IB

TabunganKu iB is a fund deposit that implements the Wadiah Adh Dhamanah principle where customers' savings are treated as deposits and can be withdrawn at any time.

TABUNGAN SIMPEL IB

"Simpanan Pelajar" (SIMPEL) or Student Savings is a saving product aimed at students of below 17 years old who do not have an ID card yet. This product is jointly issued by Indonesian banks with easy and simple requirements as well as attractive feature, in order to promote financial education and inclusiveness from early age, based on the Wadi'ah principle. Withdrawal can be made anytime. The Bank is not required to provide returns for the deposits except in the form of voluntary bonus provision.

TABUNGAN UMROH IB AMANAH

Tabungan Umroh iB Amanah or Umroh iB Amanah Savings is aimed at public in general who wish to carry out umrah pilgrimage. Withdrawal can only be made under certain requirements and cannot be done by checks, transfer forms, and/or other instruments equivalent to such mentioned before.

PROGRAM TABUNGAN BAROKAH SEJAHTERA

This is a savings program that is combined with Barokah Savings and provides benefit in the form of goods as a reward and/or souvenir for opening Barokah Sejahtera Savings account. The account holder will still obtain profit savings at the end of the period.

IB BAROKAH SAVINGS PLAN

This is a term deposits product that is based on Mudharabah principle aimed at public in general who want to save their funds in order to realize their future plans.

DEPOSITO BAROKAH

Simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Penyimpan dengan Bank berdasarkan prinsip mudharabah.

GIRO AMANAH

Simpanan dana dengan prinsip wadiah dari pihak ketiga pada Bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan mempergunakan Cek / Bilyet Giro (BG), sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam pelaksanaannya, giro ditatausahakan oleh Bank Jatim Syariah dalam suatu rekening yang lazim disebut rekening koran.

BANCASSURANCE MODEL BISNIS REFERENSI

Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi syariah dimana Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi syariah kepada nasabah. Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi syariah dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi syariah kepada nasabah.

VIRTUAL ACCOUNT

Layanan yang diberikan Bank kepada nasabah berupa fasilitas identifikasi penerimaan pembayaran tagihan yang dimiliki nasabah kepada pihak lawan (*counterparty*) nasabah.

PAYMENT POINT

Aktivitas kerjasama Bank dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan tagihan melalui setoran tunai maupun non tunai, antara lain untuk pembayaran tagihan telepon, listrik, pendidikan.

E-CHANNEL (SMS BANKING, MOBILE BANKING, DAN INTERNET BANKING)

Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler atau jaringan internet.

RTGS

Sistem transfer dana yang berbasis *Real Time Gross Settlement* (RTGS) yang memungkinkan dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran atau transfer dana secara elektronik dalam waktu seketika (online) dan penyelesaian transaksi (*settlement*) secara terpadu.

SKN

Layanan kliring nasional yang memudahkan nasabah dalam melakukan transfer dana baik kliring kredit maupun kliring debit.

BAROKAH DEPOSITS

A deposit product of which the withdrawal can be carried out in certain times according to the agreement between the account holder and the Bank based on the Mudharabah principle.

GIRO AMANAH

A deposit product that is based on wadiah principle from a third party to the Bank, of which the withdrawal can be made anytime using checks, transfer forms, and other payment order facilities, or by way of transfer. In its implementation, giro is administrated by Bank Jatim Syariah in an account commonly known as current account.

REFERENCE BUSINESS MODEL BANCASSURANCE

This is a product of marketing cooperation of sharia insurance in which the Bank only refers or recommends a sharia insurance product to the customers. The Bank's role in marketing this product is limited to the role of an intermediary in delivering information about sharia insurance product from insurance company partner to the customers, or in providing access to the insurance company to offer sharia insurance product to the customers.

VIRTUAL ACCOUNT

Virtual account is a service provided to the Bank's customers in the form of a facility to identify the receipt of payment of customer's bills to a counterparty.

PAYMENT POINT

This is a cooperation between the Bank and a third party in order to receive bills payment through cash and non-cash deposits. The bills covered by this program are, among others, telephone bills, electricity bills, and tuition fees.

E-CHANNEL (SMS BANKING, MOBILE BANKING, AND INTERNET BANKING)

The e-Channel service covers banking transaction activities through mobile phone or the Internet.

RTGS

This is a fund transfer system based on Real Time Gross Settlement (RTGS) which allows the customer to carry out various electronic transactions of fund payments/transfer instantly/online with an integrated settlement of transaction.

SKN

This is a national clearing service which facilitates the customers in conducting fund transfer, both credit clearing and debit clearing.

E-CHANNEL & JASA LAINNYA

SMS BANKING (3366)

Merupakan salah satu inovasi produk dan layanan Bank Jatim berbasis *e-Channel*, yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui *mobile phone* dengan menggunakan *plain-text mode* maupun *mobile application mode*.

USSD SMS BANKING (*141*3366#)

Merupakan salah satu inovasi produk dan layanan Bank Jatim berbasis *e-Channel*, yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui *handphone* nasabah dengan menggunakan layanan USSD SMS Banking.

INTERNET BANKING

Bank Jatim Internet Banking adalah salah satu layanan *electronic channel (e-channel)* yang memungkinkan bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui media internet yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja, dengan nyaman dan aman karena menggunakan teknologi Token PIN yang dinamis (selalu berganti untuk setiap transaksi).

MOBILE BANKING

Merupakan salah satu inovasi produk dan layanan Bank Jatim berbasis *e-channel*, yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui *mobile phone* dengan menggunakan *mobile application* pada platform android dan iOS yang menggunakan paket data internet dalam bertransaksi.

LAYANAN LAKU PANDAI (SIPANDAI BANK JATIM)

Merupakan Program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan (*unbanked people*). Bank Jatim bekerjasama dengan para agen SiPandai untuk melayani nasabah/ masyarakat di daerah yang tidak terjangkau kantor layanan bank untuk melakukan transaksi tarik tunai, transfer, setor tunai, dll. Agen SiPandai menggunakan aplikasi berbasis android dan USSD SMS Banking untuk melayani nasabah / masyarakat tersebut.

INFO BANK JATIM (14044)

Merupakan Call Centernya Bank Jatim dengan nomor/ *shortcode* 14044. Dapat menggunakan sarana telepon rumah atau dengan menggunakan *handphone*, bisa memperoleh informasi tentang produk-produk Bank Jatim maupun layanan informasi lainnya.

KARTU ATM DEBIT BANK JATIM

Kartu ATM Bank Jatim dapat digunakan untuk transaksi penarikan tunai, pembayaran telepon, air, PBB, listrik, pendaftaran SMS Banking dan transfer antar rekening Bank Jatim, antar rekening sesama anggota ATM Bersama dan ATM Prima, serta cek saldo dan dapat digunakan untuk berbelanja di *merchant-merchant* yang berlogo GPN (Gerbang Pembayaran Nasional).

E-CHANNEL AND OTHER SERVICES

SMS BANKING (3366)

SMS Banking is one of the innovations of e-Channel based products and services by Bank Jatim which enables the Bank to provide services to its customers through mobile phones by using both plain-text and mobile application modes.

USSD SMS BANKING (*141*3366#)

USSD SMS Banking is one of the innovations of e-Channel based products and services by Bank Jatim which enables the Bank to provide services to its customers through mobile phones by using the USSD SMS Banking service.

INTERNET BANKING

Internet Banking by Bank Jatim is one of the electronic channel (e-channel) services which enables the Bank to provide services to its customers through the Internet that is accessible anytime and anywhere, comfortably, and safely, as it implements the dynamic PIN Token technology that continuously changes for each transaction.

MOBILE BANKING

Mobile Banking by Bank Jatim is one of the electronic channel (e-channel) services which enables the Bank to provide services to its customers through mobile phones. The interactions are conducted within the mobile application and by using the Internet data package in the android, iOS, and blackberry.

LAKU PANDAI SERVICE (SIPANDAI BANK JATIM)

This particular service is a program from the Financial Services Authority (OJK) to facilitate communities that are not accessible to banks (unbanked people). Bank Jatim collaborates with SiPandai agents to serve customers/communities in areas that are not accessible by banks' service offices to conduct cash withdrawal transactions, transfers, cash deposits, and other transactions. SiPandai agents use Android and USSD SMS Banking based applications to serve these customers/communities.

BANK JATIM INFO (14044)

Bank Jatim Info serves as the Bank's Call Center with a phone number or shortcode of 14044. Customers can contact this number from house phones as well as from mobile phones. It provides a wide range of information related to the Bank Jatim's products, services, and other relevant information.

BANK JATIM ATM CARD AND DEBIT CARD

Bank Jatim ATM Card can be used for cash withdrawal transactions; make payments for telephone bill, water bill, taxes bill, electricity bill; SMS Banking and transfers between Bank Jatim accounts and between accounts of fellow members of ATM Bersama and ATM Prima; check the balance of the account; and to shop at the merchants identified with the PRIMA DEBIT or DEBIT BCA logo.

KARTU FLAZZ BANK JATIM (CO-BRANDING)

Kartu Prabayar multifungsi yang menggunakan teknologi RFID sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan nyaman. Hasil kerjasama Co-Branding dengan BCA.

SAFE DEPOSIT BOX

Jasa Layanan Bank Jatim berupa penyewaan kotak yang dirancang khusus untuk menyimpan Harta / Surat Berharga dengan tipe ukuran kecil, sedang, dan besar.

KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK (KPE)

Bank Jatim mempersembahkan berbagai fasilitas pendukung guna memaksimalkan fungsi KPE untuk aktifitas perbankan. KPE juga berfungsi sebagai kartu ATM Bank Jatim yang memiliki layanan yang sama dengan nasabah Bank Jatim.

VIRTUAL ACCOUNT

Bank Jatim *Virtual Account* merupakan nomor identifikasi khusus yang diperuntukkan mitra bisnis nasabah sebagai alat transaksi pembayaran mitra bisnis kepada nasabah. Dimana setiap setoran terhadap Bank Jatim *Virtual Account*, sistem secara otomatis membuku ke Rekening Utama dengan mencantumkan data Nomor dan Nama Rekening Virtual.

E-SAMSAT JATIM

Adalah layanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) melalui *e-Channel* Bank yaitu: ATM, Teller, PPOB, Mobile Banking dan Internet Banking, serta di *channel modern retail* yaitu Indomaret.

JATIM CODE

Aplikasi Mobile Banking dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan pembelian / pembayaran dengan melakukan scanning QR Code (Jatim Code) yang terpasang di *merchant-merchant* atau toko yang bekerjasama dengan Bank Jatim

BANK JATIM CONNECT

Teknologi terdepan yang memudahkan Nasabah dalam setiap transaksi perbankan dengan lokasi strategis, waktu operasional yang panjang dan lebih fleksibel dengan adanya layanan di hari libur.

BANK JATIM FLAZZ CARD (CO-BRANDING)

This is a multifunctional Prepaid Card that uses RFID technology, so that transactions can be done faster and more conveniently. Bank Jatim Flazz Card is the result of Co-Branding collaboration with BCA.

SAFE DEPOSIT BOX

Safe Deposit Box is Bank Jatim's service in the form of tenancy of boxes specifically designed to store assets/ securities.

CIVIL SERVANTS ELECTRONIC CARD (KPE)

Bank Jatim presents various supporting facilities to optimize the Civil Servants Electronic Card (KPE) function for banking activities. KPE can also function as a Bank Jatim ATM card with the exact same service as that of the other customers of Bank Jatim.

VIRTUAL ACCOUNT

Bank Jatim Virtual Account is a special identification number aimed for customer business partners as a payment tool for business partners to customers. With every deposit made in Bank Jatim Virtual Account, the system will automatically record to the Main Account by including data of the Number and Name of the Virtual Account.

E-SAMSAT JATIM

This is an annual registration service for vehicle registration (STNK) and vehicle tax payments as well as SWDKLLJ (Jasa Raharja) through Bank's e-Channels, namely: ATM, Teller, PPOB, Mobile Banking and Internet Banking, as well as at retail modern channel, namely Indomaret.

JATIM CODE

This is a mobile banking application that can be used by the customers to make a purchase/payment by scanning QR Code (Jatim Code) at merchants or shops cooperating with Bank Jatim.

BANK JATIM CONNECT

Bank Jatim Connect is a brand new technology launched to facilitate every customers' banking transaction activity with strategic location, long operational hours, and flexibility due to services during holidays.



Wilayah Operasional

OPERATIONAL AREA



PROFIL BANK JATIM

1	Kantor Pusat
41	Kantor Cabang Konvensional
7	Kantor Cabang Syariah
162	Kantor Cabang Pembantu Konvensional
10	Kantor Cabang Pembantu Syariah
209	Kantor Kas
191	Kantor Layanan Syariah

249	Payment Point
10	Payment Point Syariah
92	Kas Mobil
6	Kas Mobil Syariah
2	Cash Deposit Machine (CDM)
742	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Syariah dan tergabung dengan 80.959 terminal jaringan ATM BERSAMA, 114.553 terminal ATM PRIMA, 674.256 Electronic Data Capture

Pada tahun 2019 Bank Jatim telah menambah 61 Jaringan Kantor atau 3,62% dari posisi Jaringan Kantor pada tahun 2018 yang terdiri dari Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, *Payment Point*, Kas Mobil/Counter, dan ATM. Termasuk peningkatan Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu dan *Payment Point* menjadi Kantor Kas.



1	Head Office
41	Conventional Branch Offices
7	Sharia Branch Offices
162	Conventional Sub-Branch Offices
10	Sharia Sub-Branch Offices
209	Cash Offices
191	Sharia Service Offices

249	Payment Points
10	Sharia Payment Points
92	Mobile Cash Units
6	Sharia Mobile Cash Units
2	Cash Deposit Machines (CDMs)
742	Automated Teller Machines (ATMs)

Sharia Automated Teller Machines (Sharia ATMs), joined with 80,959 terminals of ATM Bersama network, 114,553 terminals of ATIM PRIMA, and 674,256 Electronic Data

In 2019, Bank Jatim added 61 office networks or 3.62% of the office networks of 2018, consisting of Sub-Branch Offices, Cash Offices, Payment Points, Mobile Cash Units/Counters, and ATMs, including upgrading of Cash Offices to Sub-Branch Offices and Payment Points to Cash Offices.

Struktur Organisasi

ORGANIZATION STRUCTURE

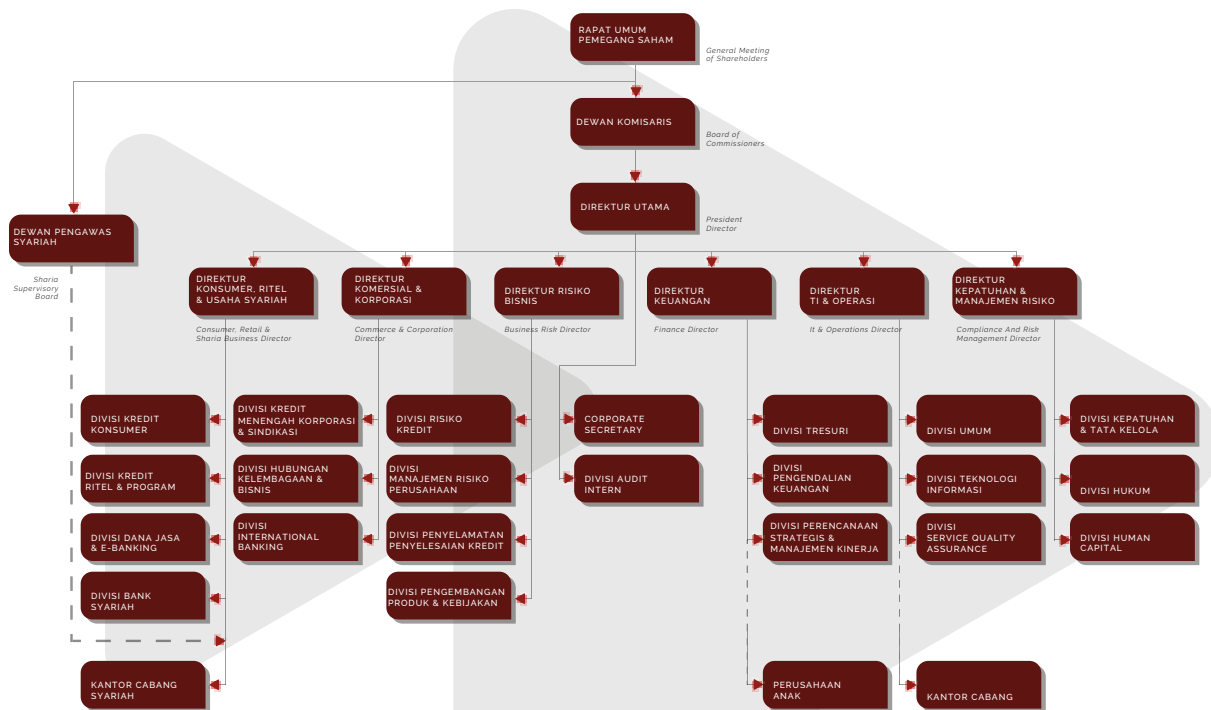
PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI

Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, Struktur Organisasi Bank Jatim telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan struktur organisasi terakhir terjadi pada 17 Juni 2019 berdasarkan Surat KEPDIR No. 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019.

APPROVAL FOR ORGANIZATION STRUCTURE

In line with its business development, the Organization Structure of Bank Jatim has experienced several amendments. The last amendment to the organization structure was conducted on June 17, 2019 based on the Decree of Board of Directors No. 058/158/DIR/PRS/KEP dated June 17, 2019.

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS	
KOMISARIS UTAMA / PRESIDENT COMMISSIONER	Akhmad Sukardi
KOMISARIS / COMMISSIONER	Budi Setiawan
KOMISARIS / COMMISSIONER	Heru Tjahjono
KOMISARIS INDEPENDEN / INDEPENDENT COMMISSIONER	Rudi Purwono
KOMISARIS INDEPENDEN / INDEPENDENT COMMISSIONER	Candra Fajri Ananda
KOMISARIS INDEPENDEN / INDEPENDENT COMMISSIONER	Muhammad Mas'ud Said
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS	
DIREKTUR UTAMA / PRESIDENT DIRECTOR	Ferdian Timur Satyagraha (Pgs)
DIREKTUR KONSUMER, RITEL & USAHA SYARIAH / CONSUMER, RETAIL & SHARIA BUSINESS DIRECTOR	Rizyana Mirda (Pgs)
DIREKTUR KOMERSIAL & KORPORASI / COMMERCE & CORPORATION DIRECTOR	Busrul Iman
DIREKTUR RISIKO BISNIS / BUSINESS RISK DIRECTOR	Rizyana Mirda
DIREKTUR KEUANGAN / FINANCE DIRECTOR	Ferdian Timur Satyagraha
DIREKTUR TI & OPERASI / IT & OPERATIONS DIRECTOR	Tonny Prasetyo
DIREKTUR KEPATUHAN & MANAJEMEN RISIKO / COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT DIRECTOR	Erdianto Sigit Cahyono
DEWAN PENGAWAS SYARIAH / SHARIA SUPERVISORY BOARD	
KETUA DEWAN PENGAWAS SYARIAH / CHAIRMAN OF SHARIA SUPERVISORY BOARD	Drs. KH. Afifuddin Muhajir
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH / MEMBER OF SHARIA SUPERVISORY BOARD	Dr. H. M. Saad Ibrahim



DIVISI AUDIT INTERN / INTERNAL AUDIT DIVISION	Eko Tri Prasetyo
DIVISI TRESURI / TREASURY DIVISION	Wahyu Kusumo Wisnubroto
DIVISI PENGENDALIAN KEUANGAN / FINANCIAL CONTROL DIVISION	Amiruddin
DIVISI UMUM / GENERAL AFFAIRS DIVISION	Wardhana Suryaatmaja
DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI / INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION	Arief Wicaksono
DIVISI SERVICE QUALITY ASSURANCE / SERVICE QUALITY ASSURANCE DIVISION	Agus Sastriono (Pgs)
DIVISI KEPATUHAN & TATA KELOLA / COMPLIANCE & GOVERNANCE DIVISION	Moch. Nadjib
DIVISI HUKUM / LEGAL DIVISION	Affandi
DIVISI HUMAN CAPITAL / HUMAN CAPITAL DIVISION	Budi Sumarsono
DIVISI KREDIT KONSUMER / CONSUMER CREDIT DIVISION	Sismaryadi
DIVISI KREDIT MIKRO, RITEL & PROGRAM / MICRO, RETAIL & PROGRAM CREDIT DIVISION	Taufan Muhammad
DIVISI DANA JASA & E-BANKING / FUND SERVICES & E-BANKING DIVISION	Rachman Subiyantoro
DIVISI KREDIT MENENGAH KORPORASI & SINDIKASI / MEDIUM CORPORATION & SYNDICATION CREDIT DIVISION	Hermanto
DIVISI HUBUNGAN KELEMBAGAAN & BISNIS / INSTITUTIONAL & BUSINESS RELATIONS DIVISION	Umi Rodiyah
DIVISI INTERNASIONAL BANKING / INTERNATIONAL BANKING DIVISION	Diah Irawati (Pgs)
DIVISI RISIKO KREDIT / CREDIT RISK DIVISION	Suci Issumiyati
DIVISI MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN / CORPORATE RISK MANAGEMENT DIVISION	Nur Eko Ardian
DIVISI PENYELAMATAN PENYELESAIAN KREDIT / CREDIT RESTRUCTURING & SETTLEMENT DIVISION	R. Haris Moeljanto
DIVISI PENGEMBANGAN PRODUK & KEBIJAKAN / PRODUCT DEVELOPMENT & POLICY DIVISION	Wahyu Prasetyo (Pgs)
DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS & MANAJEMEN KINERJA / STRATEGIC PLANNING & PERFORMANCE MANAGEMENT DIVISION	Revi Adiana Silawati
PEMIMPIN DIVISI SYARIAH / SHARIA DIVISION HEADS	
DIVISI BISNIS SYARIAH / SHARIA BUSINESS DIVISION	Didik Sudarsono
DIVISI PENDUKUNG BISNIS SYARIAH / SHARIA BUSINESS SUPPORT DIVISION	Purboyo Sinugroho
DIVISI OPERASIONAL JARINGAN & LAYANAN SYARIAH / SHARIA OPERATIONAL NETWORK & SERVICES DIVISION	Avantiono Hadhianto
TIM SPIN OFF SYARIAH / SHARIA SPIN-OFF TEAM	Avantiono Hadhianto

Visi, Misi & Budaya Perusahaan

VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE

PENGESAHAN VISI, MISI & BUDAYA PERUSAHAAN

Visi dan Misi Bank Jatim telah disetujui oleh Direksi dengan sepengetahuan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 057/028/DIR/PRS/KEP tanggal 22 Januari 2018 tentang Visi dan Misi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

APPROVAL FOR VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE

The Vision and Mission of Bank Jatim have been approved by the Board of Directors and acknowledged by the Board of Commissioners through the Decree of Board of Directors No. 057/028/DIR/PRS/KEP dated January 22, 2018, regarding Vision and Mission of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.



VISI

Menjadi "Bank Regional terbaik"

PENJELASAN VISI

Menjadi Bank yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan serta menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat artinya Bank memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sehingga mampu bersaing dan bahkan mengungguli bank-bank lain sedangkan kuat berarti sehat dan tangguh baik dari sisi permodalan rentabilitas maupun kualitas tata kelola dan manajemen risiko.

VISION

Become Regional Bank Champion

VISION EXPLANATION

Being a Bank that contributes significantly to sustainable regional economic growth and becomes a bank that is highly competitive and strong means that the Bank has a competitive advantage so that it can compete and even outperform other banks while strong means healthy and tough both in terms of capital profitability and the quality of corporate governance and risk management.



MISI

- Meningkatkan pangsa pasar
- Meningkatkan profesionalisme, memiliki integritas yang tinggi dan berorientasi pada kebutuhan pasar;
- Memberikan nilai yang optimal bagi Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) dan Pemegang Saham (*shareholder*);
- Memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- Mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

PENJELASAN MISI

Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya berupaya untuk tumbuh diatas rata-rata industri perbankan dengan dukungan Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) yang perlu dikembangkan melalui *talent management* secara profesional dan didukung infrastruktur yang memadai termasuk teknologi dan sistem informasi. Dalam upaya mendukung peningkatan eksistensi bisnis, baik kredit/pembiayaan maupun dana pihak ketiga serta memenuhi kebutuhan pasar, Bank terus melakukan inovasi produk dan jasa perbankan yang lebih beragam dan berbasis teknologi, sehingga produk-produknya mudah diakses dan dapat memenuhi harapan masyarakat khususnya di regional Jawa Timur. Inovasi pengembangan produk dengan tetap fokus menjadi eksistensi serta kapabilitas di bidang UMKM. Meningkatkan perolehan hasil yang optimal sehingga dapat memberikan nilai yang diharapkan bagi Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) dan Pemegang Saham (*shareholder*).

MISSION

- Increase the market share;
- Increase professionalism, having high integrity and market oriented;
- Provide optimized value for stakeholders and shareholders;
- Facilitate Micro Enterprise, Small Enterprise and Middle Enterprise;
- Encourage East Java economic growth.

MISSION EXPLANATION

Bank in carrying out its business activities strives to grow above the banking industry average with the Human Capital support that need to be developed through professional talent management and supported by adequate infrastructure including technology and information system. In an effort to support increased business existence, both credit / financing and third party funds and meet the market needs, Bank continues to innovate banking products and services that are more diverse and technology-based, so that their products are easily accessible and can meet community expectations especially in the East Java Province. Product development innovation continues to be focused on being the existence and capability in the UMKM field. Increase the optimal yield so that it can provide the expected value for stakeholders and shareholders.

BUDAYA PERUSAHAAN

EXCELLENCE

Selalu memberikan segala sesuatu melebihi ekspektasi. Dengan arti lain, senantiasa mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara terus menerus. perilaku utama:

FAST & SIMPLICITY

Senantiasa tanggap dan sigap dalam dinamika perubahan dengan menghadirkan produk dan layanan yang mudah digunakan oleh customer, Panduan Perilaku :

- Senantiasa berinisiatif secara konsisten untuk menawarkan dan memberikan solusi terbaik dengan cepat, tepat dan mudah
- Senantiasa memberikan kepastian produk dan layanan yang akurat, aman, nyaman, bernilai tambah dan memenuhi standar tinggi yang melampaui harapan *customer*
- Senantiasa menyederhanakan masalah yang ada untuk memberikan solusi terbaik, cepat dan tepat bagi customer

AGILE & BUSINESS SAVVY

Bekerja dengan cepat, gesit, cekatan, responsive dan proaktif dalam menangkap peluang bisnis, yang diterapkan oleh seluruh insan perusahaan dengan perbaikan berkelanjutan, Panduan Perilaku:

- Senantiasa melihat dan menangkap peluang untuk memberikan nilai tambah kepada pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan
- Senantiasa bekerja dengan cekatan dalam melaksanakan tugas dan pro aktif dalam mendapatkan peluang yang ada
- Senantiasa fokus dan disiplin mengeksekusi prioritas
- Senantiasa melakukan evaluasi dan pemantauan secara rutin baik terhadap proses kerja maupun hasil kinerja untuk dapat mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan
- Senantiasa patriotis dan memiliki mental juara serta berani melakukan terobosan
- Luwes (tidak kaku) dan memiliki jiwa yang fleksibel sesuai situasi bisnis dan kebutuhan customer

PROFESSIONAL

Melaksanakan serta menguasai tugas dan tanggungjawabnya dengan berkomitmen untuk mencapai hasil yang optimal, perilaku utama:

EXECUTION & RISK TAKER

Melaksanakan keputusan manajemen dengan keberanian mengambil risiko yang diperlukan, Panduan Perilaku :

- Menyelesaikan pekerjaan secara tuntas, akurat dan tepat waktu
- Bekerja secara cerdas, yaitu efisien dan efektif, memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal
- Mengelola pekerjaan secara sistematis melalui proses perencanaan, pengorganisasian serta evaluasi dan pemantauan secara berkesinambungan
- Dalam upaya memberikan hasil yang terbaik, memiliki keberanian untuk mengambil risiko yang diperhitungkan secara cermat sehingga tidak akan merugikan kepentingan perusahaan
- Percaya diri atas hasil usaha dan peluang yang ada

PROACTIVE & ACCOUNTABLE

Mengambil inisiatif tinggi dengan melaksanakan pilihan berdasarkan prinsip dan nilai secara terbuka dan penuh tanggung jawab, Panduan Perilaku :

CORPORATE CULTURE

EXCELLENCE

Always provide and present everything exceeded expectations. In the other words, constantly develop and make improvements in all areas to achieve optimum added value, and the best results continuously. Key behaviors:

FAST & SIMPLICITY

Always be responsive over the dynamics of change by meeting customer needs, and presenting customer friendly products and services, behavior guidelines:

- Always consistently take initiatives to offer and provide the best quick, precise, and easy solution
- Always provide products and services which are accurate, safe, convenient, value added, and meet the standard that exceed customer expectations
- Always simplify the existing problems to provide the best solution, quickly and precisely to the customer

AGILE & BUSINESS SAVVY

Working fast, nimble, agile, responsive and proactive in capturing business opportunities, which is conducted by all employees with continuous improvement, behavior guidelines:

- Always seek and seize opportunities to contribute added value to the company growth continuously
- Always work diligently in performing the tasks and proactive in capturing the opportunities exist
- Always keep focused and be discipline in executing the priority tasks
- Evaluating and monitoring both to the work process and the results of performance on a regular basis, to be able to identify opportunities for improvement
- Always be patriotic, have a winning mentality and the courage to make a breakthrough
- Have a flexible spirit which is appropriate to business environment and customer needs

PROFESSIONAL

Performing and mastering duties and responsibilities, and commit to achieve optimal results, key behaviors:

EXECUTION & RISK TAKER

Carry out management decisions with the courage to take the necessary risks, behaviors guidelines:

- Accomplish the tasks completely, accurately and on time
- Work smart, which is efficient and effective, by optimally utilizing resources to achieve maximum results
- Manage work systematically through the process of planning, organizing, evaluating, and continuously monitoring as well
- In an effort to provide the best results, have the courage to take necessary risks carefully, so as not to put the company interests aside
- Have self-confidence over the opportunities and results

PROACTIVE & ACCOUNTABLE

Taking the initiative to carry out alternatives based on the principles and values, openly and responsibly, behaviors guidelines:

- Menetapkan standar yang tinggi sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja dan dengan penuh tanggung jawab berusaha mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan
- Senantiasa memelihara gairah dan semangat yang tinggi dalam bekerja
- Menumbuhkan rasa ikut memiliki dan berani bertanggung jawab untuk setiap tindakan dan keputusan yang kita buat
- Bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi tercapainya visi dan misi Bank Jatim

INTEGRITY

Sikap konsisten dalam pemikiran dan perilaku serta jujur baik pada diri sendiri maupun orang lain berdasarkan nilai-nilai etika, perilaku utama:

HONESTY

Menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan, keterbukaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, Panduan Perilaku :

- Senantiasa berkata dan bertindak berdasarkan kebenaran, sesuai fakta dan kenyataan yang terjadi
- Bertindak jujur, ikhlas, terbuka, rendah hati, sederhana, beretika, menepati janji dan komitmen yang telah disepakati serta bertindak dengan tepat pada situasi yang tepat
- Memelihara niat yang murni dan penuh kerelaan, bertindak semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi Bank Jatim tanpa pamrih, dan tanpa ada maksud tersembunyi
- Memelihara transparansi dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, dengan memberikan informasi yang relevan secara benar, tepat dan akurat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pribadi dan kerahasiaan
- Berani mengakui keterbatasan dan kesalahan, serta bersedia untuk melakukan perbaikan
- Menjadi teladan dalam segala situasi, melayani, menerima kritik, banyak mendengar
- Mematuhi aturan, kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku secara bijaksana dan dengan penuh tanggung jawab
- Mengambil keputusan secara bijaksana dalam berbagai situasi dengan tetap berpegang pada aturan dan kebijakan yang berlaku
- Memegang teguh prinsip dan pendirian yang diyakini benar dan tidak mudah berubah meskipun berada dalam tekanan atau situasi sulit
- Bekerja dengan penuh dedikasi, melindungi kepentingan dan kehormatan pribadi dan perusahaan serta selalu menjunjung tinggi kode etik profesi
- Menghindari peluang yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan
- Menjadi panutan dan teladan bagi orang lain dengan menjalankan apa yang diucapkan secara konsisten
- Menggunakan asset perusahaan dengan penuh tanggung jawab
- Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari tekanan maupun pengaruh dari pihak manapun
- Berani mengemukakan saran, pendapat dan kritik secara obyektif dan terbuka

TRUST

Sikap saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan, kejujuran dan iktikad baik dalam pelaksanaan pekerjaan, Panduan Perilaku :

- Memperlakukan rekan kerja, pelanggan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan penuh hormat dan santun
- Menjaga komunikasi yang penuh empati diantara sesama rekan kerja sehingga tercipta saling pengertian dalam hubungan interpersonal kerja
- Menciptakan dan memelihara iklim lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman
- Menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab sehingga tumbuh suatu kepercayaan yang langgeng. Menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun golongan
- Menjalin kerja sama antar individu dan antar unit kerja untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tercapainya tujuan organisasi

- Set a high standard as a benchmark of the performance, and to achieve the performance standard with best effort and full responsibility
- Always maintain a high working passion and spirit
- Foster a sense of belonging and be responsible for every action and decision made
- Be responsible to contribute in the achievement of the vision and mission of the Bank Jatim

INTEGRITY

To be consistent in thought and behavior, be honest to themselves and others based on ethical values, key behaviors:

HONESTY

Uphold honesty, sincerity, openness with regard to the principles of prudence, behaviors guidelines:

- Always speak and act on the truth, according to the fact and reality
- Act honest, sincere, open, humble, simple, ethical, keep promises and commitments made, and to act appropriately in the right situation
- Maintain a sincere intention and full compliance, act solely for the best interests of the Bank Jatim unconditionally, and without any ulterior motives
- Maintain transparency in every action and decision-making, by providing relevant information correctly and accurately, while upholding the principles of privacy and confidentiality
- Have the courage to recognize the limitations and mistakes, and be willing to make improvements
- Be a role model in all circumstances, to serve, to accept criticism, and be willing to listen more
- Comply with the rules, policies and procedures, and prevailing regulation wisely and responsibly
- Make wise decisions in various situations by sticking to the applied rules and policies
- Uphold the principles and stance which is believed to be right, and not easy to change, even under pressure or difficult situations
- Work with dedication, protect the honor and interests of personal and the company, and always uphold the professional code of ethics
- Avoid opportunities that enables the conflict of interest
- Be a role model and benchmark for others by consistently doing what the talked
- Use company property in a responsible manner
- Make decisions objectively and free from pressure or influence from any other party
- Have the courage to put forward suggestions, opinions and criticism objectively and openly

TRUST

Mutual respect and open attitude among fellow members of the company based on confidence, honesty and good faith in the execution of the work, behaviors guidelines:

- Treat co-workers, customers and all stakeholders with respect and courtesy
- Keep an empathetic communication between co-workers so as to create mutual understanding in interpersonal relationships
- Create and maintain a conducive and comfortable climate of working environment
- Carry out the mandate given with full commitment and responsibility to build a sustainable trust, and put any corporate interests above personal or group interests
- Establish cooperation between individuals and working units to jointly work toward the achievement of organizational goals

- Saling memberikan bantuan dan dukungan yang positif terhadap sesama rekan kerja dan berkontribusi aktif untuk mencapai tujuan bersama
- Menghormati perbedaan diantara para pegawai dan menjadikan perbedaan itu sebagai titik awal untuk mencapai sinergi

SYNERGY

Kerjasama yang saling menguntungkan yang dilakukan dengan komitmen untuk meningkatkan nilai tambah bagi kedua belah pihak, perilaku utama:

RESPECT

Menerapkan sikap saling menghargai, menghormati dan membimbing dengan tulus ikhlas dengan menjunjung tinggi nilai kesopanan, Panduan Perilaku :

- Berbuat kepada orang lain sebagaimana harapan bagaimana diperlakukan orang lain
- Senantiasa berbaik sangka kepada orang lain
- Menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan orang lain
- Menghindari perilaku yang merusak diri
- Menghargai keunikan diri sendiri, mengembangkan diri dan atasi kelemahan

COLLABORATION

Bersama menciptakan nilai tambah untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, Panduan Perilaku :

- Berorientasi pada hasil yang positif
- Saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dan atau kesepakatan
- Sangat suka berdiskusi dan menjaga efektivitasnya
- Rasa memiliki yang tinggi
- Menghargai dan memberikan pengakuan serta memiliki standar etos kerja yang tinggi

INNOVATION

Kreativitas atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan menjadikan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik secara terus menerus sesuai kebutuhan *customer*, perilaku utama:

EAGER TO LEARN

Perilaku pegawai yang senantiasa meningkatkan pengetahuan diri agar perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan, Panduan Perilaku :

- Rasa ingin tahu yang tinggi, optimis, ikhlas, konsisten dan visioner
- Melakukan perbaikan berkelanjutan
- Selalu peka terhadap kebutuhan pelanggan dan proaktif untuk mengidentifikasi
- Senantiasa mengembangkan tingkat kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan sesuai tuntutan profesi
- Memiliki etos kerja yang baik untuk menjadi pembelajar sejati
- Memiliki semangat terus belajar sebagai bagian dari kehidupan, dan berproses mengubah tingkah laku menjadi lebih baik
- Suka bertemu orang baru, berdiskusi, berefleksi dan melakukan perubahan

CREATIVITY

Senantiasa menciptakan sesuatu yang baru dan mengembangkan ide untuk mencapai hasil yang lebih baik, Panduan Perilaku :

- Inovatif dalam menciptakan peluang untuk mencapai kinerja melampaui ekspektasi
- Kreatif, inovatif, proaktif dan cepat tanggap dalam memberikan solusi terbaik

- Provide assistance and positive support for fellow co-workers, and contributes actively to achieve shared goals
- Respect the differences between employees, and make the differences as a starting point to create synergy

SYNERGY

Mutually beneficial cooperation undertaken with a commitment to increase the added value for both parties, key behaviors:

RESPECT

Implement mutual appreciation, respect and guide sincerely to uphold the values of decency, behaviors guidelines:

- Treat others as expectations of how to be treated by others
- Always be positive think to others
- Respect and uphold honor of others
- Avoid self-destructive Behavior
- Appreciate the uniqueness of themselves, develop and overcome weaknesses

COLLABORATION

Together create added value to create growth and development of the company, behaviors guidelines:

- Be positive result oriented
- Work together to achieve the shared goals and or agreements
- Very like to discuss and maintain effectiveness
- Have a high sense of belonging
- Appreciate, give recognition, and have a high standard of work ethic

INNOVATION

Creativity or the ability to produce something new and make something already become better continuously according to customer needs, key behaviors:

EAGER TO LEARN

The behavior of employees which constantly improve their knowledge that enable the company to grow in a sustainable manner, behavior guidelines:

- Have a high curiosity, optimistic, sincere, consistent and visionary
- Perform continuous improvement
- Always be sensitive to customer needs, and proactively identify
- Constantly develop competency levels in order to meet the development and progress of the profession demands
- Have a good work ethic to become a true learner
- Have enthusiasm to keep learning as a part of life, and carry out the process of changing Behaviour to be better
- Like to meet new people, discuss, reflect, and make changes

CREATIVITY

Always create something new and develop ideas to achieve better results, behaviors guidelines:

- Be Innovative in creating opportunities to achieve beyond expectations performance
- Be creative, innovative, proactive and responsive in providing the best solution

- Selalu fokus untuk memberikan layanan dengan nilai tambah spesifik yang dibutuhkan pelanggan
- Selalu inovatif dan berorientasi untuk memberikan solusi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan
- Bersikap empatik terhadap keluhan dan permasalahan pelanggan dan cepat tanggap untuk dapat memberikan solusi terbaik untuk setiap keluhan nasabah
- Teguh dalam pendirian dan intuitif
- Fleksibel, elaboratif, imajinatif, inisiatif, percaya diri
- Minat yang luas dan tidak pernah bosan

- Always focus on providing services with specific added value as customer needs
- Always be innovative and oriented to provide solutions which meet customer needs
- Be empathetic to customer complaints and problems, and responsive to provide the best solution for each complaint
- Have a strong stance and be intuitive
- Be flexible, elaborative, imaginative, initiative, and self-confident
- Have broad interests and never get bored

Profil Dewan Komisaris

PROFILE OF BOARD OF COMMISSIONERS





AKHMAD SUKARDI

KOMISARIS UTAMA

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Sumenep, 14 Juli 1958 (61 tahun)

PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi dari STIKI Keuangan, Surabaya tahun 1986,
- Magister Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1998, dan
- Doktor Ilmu Administrasi dari Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya tahun 2008.

RIWAYAT JABATAN, DASAR PENUNJUKAN & PERIODE JABATAN

Diangkat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2014 pada tanggal 8 April 2015. Lulus Fit and Proper Test serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-178/D.03/2015 tanggal 16 September 2015. Kemudian diangkat sebagai Komisaris Utama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018. Lulus Fit and Proper Test serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Utama berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-137/D.03/2018 tanggal 9 Agustus 2018, sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021

AFILIASI

Akhmad Sukardi tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali

KARIR

Memiliki jabatan strategis diantaranya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (2014-2018), Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tahun (2009-2013), Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur (2003-2009), Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Timur (2000-2003), Kabag Anggaran Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur (1994-2000), Kasubag Anggaran Pembangunan Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur (1990-1994), Kasubag Pembinaan Anggaran Tk. I Biro Keuangan (1988- 1990), dan Staf Bagian Pembukuan Biro Keuangan Pemda Tk.I (1985-1988).

KEPEMILIKAN SAHAM

Memiliki 0,006% saham Bank Jatim

PRESIDENT COMMISSIONER

Indonesian citizen, 61 years old, born in Sumenep on July 14, 1958 and currently domiciles in Surabaya.

EDUCATION

- Bachelor's degree in Accounting from STIKI Keuangan, Surabaya (1986),
- Master's degree in Management from Universitas Airlangga, Surabaya (1998), and
- Doctorate degree in Administration Science from Universitas 17 Agustus, Surabaya (2008).

CAREER HISTORY, BASIS OF APPOINTMENT, AND TERM OF OFFICE

Appointed as a Commissioner of the Bank for the first time through the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk of 2014 Fiscal Year on April 8, 2015. He passed the fit-and-proper test and was approved to serve as a Commissioner by the Financial Services Authority (OJK) effectively based on the Copy of the Decree of Board of Commissioners of Financial Services Authority (OJK) No. SR-178/D.03/2015 dated September 16, 2015. He was then appointed as the President Commissioner of the Bank through the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk of 2017 Fiscal Year on February 20, 2018. He passed the fit-and-proper test and was approved to serve as the President Commissioner by the Financial Services Authority (OJK) effectively based on the Copy of the Decree of Board of Commissioners of Financial Services Authority (OJK) No. KEP-137/D.03/2018 dated August 9, 2018, until the closing of the 2020 Annual GMS convened in 2021.

AFFILIATION

Mr. Sukardi has no affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and controlling shareholders.

CAREER

Previously, he held several strategic positions, among others, as the Regional Secretary of East Java Province (2014-2018), Administration and General Affairs Assistant for Regional Secretariat of East Java Province (2009-2013), Head of Revenue Office of East Java Province (2003-2009), Head of Finance Bureau of Regional Secretariat of East Java Province (2000-2003), Head of Budgeting Department of Finance Bureau of East Java Province (1994-2000), Head Budgeting for Development Sub-Department of Finance Bureau of East Java Province (1990-1994), Head of Budgeting Development Level I Sub-Department of Finance Bureau (1988-1990), and Staff of Bookkeeping Department at Finance Bureau of Level I Regional Government (1985-1988).

SHARE OWNERSHIP

Mr. Sukardi has 0,006% shares of Bank Jatim.



RUDI PURWONO

KOMISARIS INDEPENDEN

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Surabaya, 3 November 1969 (60 tahun).

PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Universitas Airlangga pada tahun 1994,
- Master Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia dengan Kekhususan Ekonomi Moneter, pada tahun 2004,
- Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia dengan Kekhususan Ekonomi Moneter, pada tahun 2009.

RIWAYAT JABATAN, DASAR PENUNJUKAN & PERIODE JABATAN

Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 24 Juni 2016. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-188/D.03/2016 tanggal 16 September 2016. Kemudian diangkat kembali untuk periode kedua sebagai Komisaris Independen pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021.

AFILIASI

Rudi Purwono tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali.

KARIR

Menjabat sebagai Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, *Economist* pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Periode Tahun 2012 sampai sekarang, Wakil Ketua II Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur 2008-2011 dan 2012-2016, Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Timur 2014-2016, dan Peneliti pada Laboratorium Pengkajian Ekonomi Pembangunan (LPEP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, *Regional Chief Economist* PT Bank BNI Persero Tbk Tahun 2011-2015.

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

INDEPENDENT COMMISSIONER

Indonesian citizen, 50 years old, born in Surabaya on November 3, 1969 and currently domiciles in Surabaya.

EDUCATION

- Bachelor's degree in Economic from Universitas Airlangga (1986),
- Master's degree in Economics Science from the University of Indonesia, with a specialization in Monetary Economics (2004), and
- Doctorate degree in Economics Science from the University of Indonesia, with a specialization in Monetary Economics (2009).

CAREER HISTORY, BASIS OF APPOINTMENT, AND TERM OF OFFICE

Appointed as an Independent Commissioner of the Bank for the first time through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk on June 24, 2016. He passed the fit-and-proper test and was approved to serve as an Independent Commissioner by the Financial Services Authority (OJK) effectively based on the Copy of the Decree of Board of Commissioners of Financial Services Authority (OJK) No. SR-188/D.03/2016 dated September 16, 2016. He was then reappointed for the second term of office as an Independent Commissioner of the Bank through the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk of 2017 Fiscal Year on February 20, 2018, until the closing of the 2020 Annual GMS convened in 2021.

AFFILIATION

Mr. Purwono has no affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and controlling shareholders.

CAREER

Previously, he served as a Vice Dean I (Academic and Student Affairs) at the Faculty of Economics and Business of Airlangga University, Economist at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2012 up to present), Deputy Chairman II of East Java Province Remuneration Board (2008-2011 and 2012-2016), Member of Regional Research Board of East Java Province (2014-2016), and Researcher at Laboratorium Pengkajian Ekonomi Pembangunan (LPEP) of the Business of Airlangga University, Regional Chief Economist at PT Bank BNI (Persero) Tbk (2011-2015)

SHARE OWNERSHIP

Mr. Purwono has no shares of Bank Jatim.



CANDRA FAJRI ANANDA

KOMISARIS INDEPENDEN

WNI, berdomisili di Batu, Malang. Lahir di Lumajang, 29 Oktober 1964 (55 tahun).

PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 1988,
- Master (MSc.) Institute of Rural Development, University of Gottingen, Jerman pada tahun 1994,
- Doctor (Ph.D) Institute of Rural Development University of Göttingen, Jerman pada tahun 1998.

RIWAYAT JABATAN, DASAR PENUNJUKAN & PERIODE JABATAN

Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-153/D.03/2018 tanggal 18 September 2018, sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021

AFILIASI

Candra Fajri Ananda tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali.

KARIR

Konsultan Pengembangan Sektor Publik di Area Pasca Konflik, Bank Dunia (2003-2004). Dewan Penasehat Perencanaan Regional, Provinsi Jawa Timur (2003-2012). Anggota TADF (Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal Kemenkeu), Kementerian Keuangan pada tahun 2008-2014. Ketua ISEI Malang pada tahun 2010-Sekarang. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (2013-2017) dan saat ini juga menjabat Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya.

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

INDEPENDENT COMMISSIONER

Indonesian citizen, 55 years old, born in Lumajang on October 29, 1964 and currently domiciles in Batu, Malang.

EDUCATION

- Bachelor's degree in Economics from Brawijaya University (1988),
- Master's degree in Science from the Institute of Rural Development, University of Gottingen, Germany (1994), and
- Doctor of Philosophy degree from the Institute of Rural Development, University of Gottingen, Germany (1998).

CAREER HISTORY, BASIS OF APPOINTMENT, AND TERM OF OFFICE

Appointed as an Independent Commissioner of the Bank through the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk of 2017 Fiscal Year on February 20, 2018. He passed the fit-and-proper test and was approved to serve as an Independent Commissioner by the Financial Services Authority (OJK) effectively based on the Copy of the Decree of Board of Commissioners of Financial Services Authority (OJK) No. KEP-153/D.03/2018 dated September 18, 2018, until the closing of the 2020 Annual GMS convened in 2021.

AFFILIATION

Mr. Ananda has no affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and controlling shareholders.

CAREER

Previously, he served as a Consultant for Public Sector Development in Post-Conflict Area at the World Bank (2003-2004), a member of Board of Trustees for Regional Planning of East Java Province (2003-2012), a member of TADF (Team of Assistant for Fiscal Decentralization of the Ministry of Finance) at the Ministry of Finance (2008-2014), Chairman of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Malang (2010 up to present). He also served as the Dean of Faculty of Economic and Business of Brawijaya University (2013-2017), and a current Lecturer at the Faculty of Economic and Business of Brawijaya University.

SHARE OWNERSHIP

Mr. Ananda has no shares of Bank Jatim.



BUDI SETIAWAN

KOMISARIS

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Ponorogo 20 Juli 1958 (61 tahun).

PENDIDIKAN

- Sarjana Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 1985.
- Magister Manajemen Teknologi pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya tahun 2002.
- Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang tahun 2012.

RIWAYAT JABATAN, DASAR PENUNJUKAN & PERIODE JABATAN

Diangkat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018. Lulus Fit and Proper Test serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-138/D.03/2018 tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021.

AFILIASI

Budi Setiawan tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali.

KARIR

Memangku jabatan strategis diantaranya sebagai Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (2008-2010). Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (2010-2011). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (2011-2014). Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur (2014-2016). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur (2017-2018).

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

COMMISSIONER

Indonesian citizen, 61 years old, born in Ponorogo on July 20, 1958 and currently domiciles in Surabaya.

EDUCATION

- Bachelor's degree in Engineering from Universitas Pembangunan Nasional Veteran, East Java (1985).
- Master's degree in Technology Management from the Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2002), and
- Doctorate degree in Economic Science from Brawijaya University, Malang (2012).

CAREER HISTORY, BASIS OF APPOINTMENT, AND TERM OF OFFICE

Appointed as a Commissioner of the Bank for the first time through the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk of 2017 Fiscal Year on February 20, 2018. He passed the fit-and-proper test and was approved to serve as a Commissioner by the Financial Services Authority (OJK) effectively based on the Copy of the Decree of Board of Commissioners of Financial Services Authority (OJK) No. KEP-138/D.03/2018 dated August 9, 2018, until the closing of the 2020 Annual GMS convened in 2021.

AFFILIATION

Mr. Setiawan has no affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and controlling shareholders.

CAREER

Previously, he held several strategic positions, among others, as the Head of Economic Department at Regional Development Planning Agency of East Java Province (2008-2010). Head of Economic Administration Bureau at Regional Secretariat of East Java Province (2010-2011). Head of Industry and Trade Office of East Java Province (2011-2014). Head of Finance and Asset Management Agency of East Java Province (2014-2016), and Head of Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of East Java Province (2017-2018).

SHARE OWNERSHIP

Mr. Setiawan has no shares of Bank Jatim.



HERU TJAHJONO

KOMISARIS

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Yogyakarta 06 Maret 1961 (58 tahun).

PENDIDIKAN

- Sarjana Teknik Universitas Sebelas Maret, Surakarta tahun 1988.
- Magister Manajemen Universitas Merdeka, Malang tahun 1999.
- Doktor Lingkungan dan Pembangunan Universitas Brawijaya Malang tahun 2014.

RIWAYAT JABATAN, DASAR PENUNJUKAN & PERIODE JABATAN

Diangkat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-186/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023

AFILIASI

Heru Tjahjono tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali.

KARIR

Memangku jabatan strategis Kabupaten Tulungagung diantaranya sebagai Kepala Seksi Tata Guna Tanah dan Tata Ruang Bappeda Kabupaten Tulungagung (1991-1997). Pj. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tulungagung (1997). Pj. Kepala DPUD Kabupaten Tulungagung (1997-2001). Pj. Kepala Sub Dinas Pekerjaan Umum PPW Kabupaten Tulungagung (2001-2003). Bupati Kabupaten Tulungagung (2003-2013) Staf Gubernur Provinsi Jawa Timur (2013-2014). Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur (2014-2016). Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (2016-2018). Sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur (2018-sekarang)

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

COMMISSIONER

Indonesian citizen, 59 years old, born in Yogyakarta on March 6, 1961 and currently domiciles in Surabaya.

EDUCATION

- Bachelor's degree in Engineering from Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1988).
- Master's degree in Management from Universitas Merdeka Malang (1999). and
- Doctorate degree in Environmental and Development Studies from Brawijaya University, Malang (2014).

CAREER HISTORY, BASIS OF APPOINTMENT, AND TERM OF OFFICE

Appointed as a Commissioner of the Bank for the first time through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk on June 19, 2019. He passed the fit-and-proper test and was approved to serve as a Commissioner by the Financial Services Authority (OJK) effectively based on the Copy of the Decree of Board of Commissioners of Financial Services Authority (OJK) No. KEP-186/D.03/2019 dated October 11, 2019, until the closing of the 2022 Annual GMS convened in 2023.

AFFILIATION

Mr. Tjahjono has no affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and controlling shareholders.

CAREER

Previously, he held several strategic positions in Tulungagung Regency, among others, as the Head of Land Use and Spatial Section of Bappeda of Tulungagung Regency (1991-1997), Act. Head of Physical and Infrastructure Department of Bappeda of Tulungagung Regency (1997), Act. Head of DPUD of Tulungagung Regency (1997-2001), Act. Head of Public Works Sub-Office of PPW of Tulungagung Regency (2001-2003), and Tulungagung Regent (2003-2013). He also served as a Staff of East Java Governor (2013-2014), Head of Fisheries and Maritime Office of East Java Province (2014-2016), Head of Maritime and Fisheries Office of East Java Province (2016-2018), and Regional Secretary of East Java Province (2018 up to present).

SHARE OWNERSHIP

Mr. Tjahjono has no shares of Bank Jatim.



MUHAMMAD MAS'UD

KOMISARIS INDEPENDEN

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Sidoarjo 08 Maret 1964 (55 tahun).

PENDIDIKAN

- Sarjana Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Malang tahun 1989.
- Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah, Malang tahun 1997.
- Doktor Politik Internasional, Flinders University, Adelaide, Australia tahun 2005.

RIWAYAT JABATAN, DASAR PENUNJUKAN & PERIODE JABATAN

Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-187/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023

AFILIASI

Muhammad Mas'ud tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali.

KARIR

Memangku jabatan strategis diantaranya: Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah (2011-2014). Ketua Dewan Riset Daerah Kota Malang (2013-2016). Anggota Tim Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri (2016-sekarang). Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian (2015-2018). Anggota Tim Ahli Walikota Batu (2015-2016) Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (2018-sekarang)

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

INDEPENDENT COMMISSIONER

Indonesian citizen, 55 years old, born in Sidoarjo on March 8, 1964 and currently domiciles in Surabaya.

EDUCATION

- Bachelor's degree in State Administration from Brawijaya University, Malang (1989).
- Master's degree in Management from Universitas Muhammadiyah Malang (1997), and
- Doctorate degree in International Politics from Flinders University, Adelaide, Australia (2005).

CAREER HISTORY, BASIS OF APPOINTMENT, AND TERM OF OFFICE

Appointed as an Independent Commissioner of the Bank for the first time through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk on June 19, 2019. He passed the fit-and-proper test and was approved to serve as an Independent Commissioner by the Financial Services Authority (OJK) effectively based on the Copy of the Decree of Board of Commissioners of Financial Services Authority (OJK) No. KEP-187/D.03/2019 dated October 11, 2019, until the closing of the 2022 Annual GMS convened in 2023.

AFFILIATION

Mr. Mas'ud has no affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and controlling shareholders.

CAREER

Previously, he held several strategic positions, among others, Assistant to the Special Staff for President in Regional Development and Autonomy (2011-2014), Head of Regional Research Board of Malang (2013-2016), member of Development Control and Acceleration Team of Kediri Regency (2016 up to present), Special Staff to the Minister of Social Affairs in HR Development and Ministerial Programs (2015-2018), Member of Expert Staff for the Mayor of Batu (2015-2016), and Director of Postgraduate Program of Unisma Malang (2018 up to present).

SHARE OWNERSHIP

Mr. Mas'ud has no shares of Bank Jatim.

Profil Direksi

BOARD OF DIRECTORS PROFILE

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK





FERDIAN TIMUR SATYAGRAHA

DIREKTUR KEUANGAN DAN PGS DIREKTUR UTAMA

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir 11 Januari 1982 (37 tahun).

PENDIDIKAN

- Foundation Degree, Taylor University, Melbourne, Australia tahun 2001
- Bachelor Degree in Finance, Deakin University, Australia tahun 2003.
- Master of Business/Commerce, Deakin University, Australia tahun 2006.

RIWAYAT JABATAN, DASAR PENUNJUKAN & PERIODE JABATAN

Ditunjuk sebagai Pgs Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sejak diterbitkan Surat Keputusan pada tanggal 28 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris No.058/009/DK/KEP/2019.

Diangkat sebagai Direktur Keuangan Untuk Pertama kalinya Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 15 Juni 2017, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-232/D.03/2017 Tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022

AFILIASI

Ferdian Timur Satyagraha tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali.

KARIR

Memangku jabatan strategis Bank Jatim diantaranya: Pengelola IRU sub divisi IRU dan Komunikasi Eksternal Sekretaris Perusahaan (2012–2013). *Analyst* Sub Divisi Investor Relation (2013–2014). Pjs *Senior Analyst* IRU Sub Divisi Investor Relation (2014–2015). Pemimpin Sub Divisi Investor Relation (2015). Kepala Cabang Kepanjen, Jawa Timur (2015) dan Sekretaris Perusahaan (2015–2017).

KEPEMILIKAN SAHAM

Pemilik 0,032% saham Bank Jatim

FINANCE DIRECTOR AND ACT. PRESIDENT DIRECTOR

Indonesian citizen, 37 years old, born on January 11, 1982 and currently domiciles in Surabaya.

EDUCATION

- Foundation Degree, Taylor University, Melbourne, Australia (2001),
- Bachelor's degree in Finance from Deakin University, Australia (2003), and
- Master's degree in Business/Commerce from Deakin University, Australia (2006).

CAREER HISTORY, BASIS OF APPOINTMENT, AND TERM OF OFFICE

Appointed as the Act. President Director of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk through the issuance of the Decree of Board of Commissioners No. 058/009/DK/KEP/2019 dated October 28, 2019.

Appointed as the Finance Director of the Bank for the first time through the EGMS on June 15, 2017. He passed the fit-and-proper test and was approved to serve as the Finance Director by the Financial Services Authority (OJK) effectively based on the Copy of the Decree of Board of Commissioners of Financial Services Authority (OJK) No. KEP-232/D.03/2017 dated December 22, 2017, until the closing of the 2022 Annual GMS convened in 2023.

AFFILIATION

Mr. Satyagraha has no affiliation with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and controlling shareholders.

CAREER

Previously, he held various strategic positions at Bank Jatim, among others, as IRU Manager at IRU and External Communication Sub-Division of the Corporate Secretary (2012–2013), Analyst at Investor Relation Sub-Division (2013–2014), Act. IRU Senior Analyst at Investor Relation Sub-Division (2014–2015), Head of Investor Relation Sub-Division (2015), Kepanjen Branch Manager (2015), and Corporate Secretary (2015–2017).

SHARE OWNERSHIP

Mr. Satyagraha has 0.032% shares of Bank Jatim.



RIZYANA MIRDA

DIREKTUR RISIKO BISNIS DAN PGS DIREKTUR RITEL, KONSUMER RITEL & USAHA SYARIAH

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Surabaya 28 Agustus 1969 (50 tahun).

PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Keuangan, STESIA, tahun 1996.
- Sarjana Bisnis Administrasi IBMT tahun 1997
- Magister Keuangan STIE ABI tahun 2002.

RIWAYAT JABATAN, DASAR PENUNJUKAN & PERIODE JABATAN

Ditunjuk sebagai Pgs Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sejak diterbitkan Surat Keputusan pada tanggal 28 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris No. 058/009/DK/KEP/2019.

Diangkat sebagai Direktur Risiko Bisnis untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 15 Juni 2017, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Risiko Bisnis berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-188/D.03/2017 Tanggal 29 September 2017 dan Akta No. 23 tanggal 7 November 2019 terkait mengubah nomenklatur jabatan direksi yang semula Direktur Manajemen Risiko Menjadi Direktur Risiko Bisnis, dengan masa jabatan sampai dengan sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022

AFILIASI

Rizyana Mirda tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali.

KARIR

Memiliki pengalaman profesional di Bank Jatim diantaranya; Kepala Bidang Operasi (2004-2006), Kepala Cabang Batu (2006-2009), Kepala Cabang Perak (2009-2010), Kepala Sub Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri Bank Jatim (2010-2013), Kepala Cabang Gresik (2013-2015), Kepala Cabang Madiun (2015), Kepala Divisi Risiko Kredit (2015-2016), Kepala Divisi Kredit Menengah & Korporasi (2016-2017).

KEPEMILIKAN SAHAM

Pemilik 0,007% saham pada Bank Jatim

BUSINESS RISK DIRECTOR AND ACT. RETAIL CONSUMER & SHARIA BUSINESS DIRECTOR

Indonesian citizen, 50 years old, born in Surabaya on August 28, 1969 and currently domiciles in Surabaya.

EDUCATION

- Bachelor's degree in Financial Economics from STESIA (1996).
- Bachelor's degree in Business Administration from IBM (1997), and
- Master's degree in Finance from STIE ABI (2002).

CAREER HISTORY, BASIS OF APPOINTMENT, AND TERM OF OFFICE

Appointed as the Act. Consumer, Retail, and Sharia Business Director of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk through the issuance of the Decree of Board of Commissioners No. 058/009/DK/KEP/2019 dated October 28, 2019.

Appointed as the Business Risk Director of the Bank for the first time through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk on June 15, 2017. She passed the fit-and-proper test and was approved to serve as the Business Risk Director by the Financial Services Authority (OJK) effectively based on the Copy of the Decree of Board of Commissioners of Financial Services Authority (OJK) No. KEP-188/D.03/2017 dated September 29, 2017, and the Deed No. 23 dated November 7, 2019, regarding changes in nomenclature of Board of Directors' positions, from Risk Management Director to Business Risk Director, with term of office until the closing of the 2021 Annual GMS convened in 2022.

AFFILIATION

Ms. Mirda has no affiliation with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and controlling shareholders.

CAREER

She has several professional experiences at Bank Jatim where she held various positions, among others, as the Head of Operations Department (2004-2006), Branch Manager at Batu Branch Office of Bank Jatim (2006-2009), Branch Manager at Perak Branch Office of Bank Jatim (2009-2010), Head of Service & Foreign Funds Sub-Division of Bank Jatim (2010-2013), Branch Manager at Gresik Branch Office of Bank Jatim (2013-2015), Branch Manager at Madiun Branch Office of Bank Jatim (2015), Head of Credit Risk Division of Bank Jatim (2015-2016), and Head of Medium & Corporate Credit Division of Bank Jatim (2016-2017).

SHARE OWNERSHIP

Ms. Mirda has 0.007% shares of Bank Jatim.



TONNY PRASETYO

DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASI

WNI, berdomisili di Mojokerto. Lahir di Malang 12 Desember 1969 (50 tahun).

PENDIDIKAN

- Sarjana Pertanian, Universitas Darul Ulum, tahun 1995.
- Magister Manajemen Universitas dr. Soetomo tahun 2019.

RIWAYAT JABATAN, DASAR PENUNJUKAN & PERIODE JABATAN

Diangkat sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Operasi Untuk Pertama kalinya Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 19 Juni 2019, *Lulus Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Operasi berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-190/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 dengan masa jabatan sampai dengan sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024

AFILIASI

Tonny Prasetyo tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali.

KARIR

Memiliki pengalaman professional di Bank Jatim diantaranya: Kepala Cabang Situbondo (2013-2014). Kepala Cabang Blitar (2014-2015). Kepala Cabang Kediri (2015). Kepala Bidang Kredit Bisnis Syariah (2015-2016). Kepala Divisi Umum (2016-2019).

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

INFORMATION TECHNOLOGY & OPERATIONS DIRECTOR

Indonesian citizen, 50 years old, born in Malang on December 12, 1969 and currently domiciles in Mojokerto.

EDUCATION

- Bachelor's degree in Agriculture from Universitas Darululum (1995), and
- Master's degree in Management from Univesitas Dr. Soetomo (2019).

CAREER HISTORY, BASIS OF APPOINTMENT, AND TERM OF OFFICE

Appointed as the Information Technology and Operations Director of the Bank for the first time through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk on June 19, 2019. He passed the fit-and-proper test and was approved to serve as the Information Technology and Operations Director by the Financial Services Authority (OJK) effectively based on the Copy of the Decree of Board of Commissioners of Financial Services Authority (OJK) No. KEP-190/D.03/2019 dated October 11, 2019, with term of office until the closing of the 2023 Annual GMS convened in 2024.

AFFILIATION

Mr. Prasetyo has no affiliation with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and controlling shareholders.

CAREER

He has professional experiences at Bank Jatim where he held various positions, among others, as a Branch Manager at Situbondo Branch Office of Bank Jatim (2013-2014). Branch Manager at Blitar Branch Office of Bank Jatim (2014-2015). Branch Manager at Kediri Branch Office of Bank Jatim (2015). Head of Credit Department of Sharia Business of Bank Jatim (2015-2016), and Head of General Affairs Division of Bank Jatim (2016-2019).

SHARE OWNERSHIP

Mr. Prasetyo has no shares of Bank Jatim.



BUSRUL IMAN

DIREKTUR KOMERSIAL & KORPORASI

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Surabaya 01 Februari 1964 (55 tahun).

PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Akuntansi, STIE, tahun 1986.
- Magister Manajemen Universitas Diponegoro tahun 2005.

RIWAYAT JABATAN, DASAR PENUNJUKAN & PERIODE JABATAN

Diangkat sebagai Direktur Komersial & Korporasi Untuk Pertama kalinya Pada RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Komersial & Korporasi berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-191/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024.

AFILIASI

Busrul Iman tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali.

KARIR

Memiliki pengalaman profesional di Bank Rakyat Indonesia diantaranya; Kepala Cabang Meulaboh, Kantor Wilayah Banda Aceh (1995-1998). Cabang Rantau Prapat, Kantor Wilayah Medan (1998-2001). Kepala Cabang Tuban Kantor Wilayah Surabaya (2001-2004). Kepala Cabang Banjarnegara, Kantor Wilayah Yogyakarta (2004-2007). Kepala Cabang Solo, Kantor Wilayah Yogyakarta (2007-2009). Kepala Cabang Madiun Kantor Wilayah Malang (2009-2010). Kepala Cabang Malang Kawi, Kantor Wilayah Malang (2010-2012). Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Operasional Kantor Wilayah Palembang (2012-2013). Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Kantor Wilayah Palembang (2013-2014). Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Kantor Wilayah Lampung (2014-2015). Kepala Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit Bidang Pengendalian Risiko Kredit Kantor Pusat Bank BRI (2015-2017). Kepala Kantor Wilayah Malang (2017-2018). Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital Kantor Pusat Bank BRI (2018-2019). Kepala Kantor Wilayah Surabaya (2019).

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

COMMERCE & CORPORATION DIRECTOR

Indonesian citizen, 55 years old, born in Surabaya on February 1, 1964 and currently domiciles in Surabaya.

EDUCATION

- Bachelor's degree in Economics, majoring in Accounting from STIE (1986), and
- Master's degree in Management from Diponegoro University (2005).

CAREER HISTORY, BASIS OF APPOINTMENT, AND TERM OF OFFICE

Appointed as the Commerce and Corporation Director of the Bank for the first time through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk on June 19, 2019. He passed the fit-and-proper test and was approved to serve as the Commerce and Corporation Director by the Financial Services Authority (OJK) effectively based on the Copy of the Decree of Board of Commissioners of Financial Services Authority (OJK) No. KEP-191/D.03/2019 dated October 11, 2019, with term of office until the closing of the 2023 Annual GMS convened in 2024.

AFFILIATION

Mr. Iman has no affiliation with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and controlling shareholders.

CAREER

He has professional experiences at Bank Rakyat Indonesia where he held various positions, among others, as a Branch Manager at Meulaboh Branch Office, Banda Aceh Regional Office of Bank BRI (1995-1998), Rantau Prapat Branch Office, Medan Regional Office of Bank BRI (1998-2001), Tuban Branch Office, Surabaya Regional Office of Bank BRI (2001-2004), Banjarnegara Branch Office, Yogyakarta Regional Office of Bank BRI (2004-2007), Solo Branch Office, Yogyakarta Regional Office of Bank BRI (2007-2009), Madiun Branch Office, Malang Regional Office of Bank BRI (2009-2010), and Kawi Branch Office, Malang Regional Office of Bank BRI (2010-2012). He then served as a Deputy Regional Head of Operations Department of Palembang Regional Office (2012-2013), Deputy Regional Head of Business Department of Bandar Lampung Regional Office (2013-2014), Deputy Regional Head of Business Department of Bandar Lampung Regional Office (2014-2015), Head of Loan Restructuring & Settlement Division, Credit Risk Control Department of Bank BRI Head Office (2015-2017), Head of Malang Regional Office of Bank BRI (2017-2018), Head of Human Capital Policy & Development Division at Bank BRI Head Office (2018-2019), and Head of Surabaya Regional Office of Bank BRI (May 2019).

SHARE OWNERSHIP

Mr. Iman has no shares of Bank Jatim.



ERDIANTO SIGIT CAHYONO

DIREKTUR KEPATUHAN & MANAJEMEN RISIKO

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Pasuruan 30 April 1962 (57 tahun).

PENDIDIKAN

- Sarjana Manajemen, Universitas Brawijaya, tahun 1985.
- Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, tahun 1993.

RIWAYAT JABATAN, DASAR PENUNJUKAN & PERIODE JABATAN

Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Untuk Pertama kalinya Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-189/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 dengan masa jabatan sampai dengan sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024

AFILIASI

Erdianto Sigit tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali.

KARIR

Memiliki pengalaman profesional di Bank Rakyat Indonesia diantaranya: Kepala Cabang Pagaralam Kantor Wilayah Palembang (1995-1998). Kepala Cabang Muara Enim Kantor Wilayah Palembang (1998-2001). Kepala Cabang Probolinggo Kantor Wilayah Surabaya (2001-2003). Kepala Cabang Jakarta Pasar Minggu Kantor Wilayah Jakarta (2003-2006). Kepala Cabang Surabaya Kalimas Kantor Wilayah Surabaya (2006-2009). Wakil Kepala Divisi Layanan Kantor Pusat BRI (2009-2010). Wakil Pemimpin Wilayah Kantor Palembang (2010-2011). Wakil Pemimpin Wilayah Kantor Malang (2011-2013). Inspektur Bank BRI Banjarmasin (2013-2014). Kepala Divisi Pembinaan Bisnis Mikro Kantor Pusat (2014-2015). Pemimpin Wilayah Kantor Palembang (2015-2016). Direktur BRI Syariah (2016-2017). Inspektur Bank BRI Yogyakarta (2017-2018). Kepala Audit Internal Wilayah Jakarta I (2018-2019).

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT DIRECTOR

Indonesian citizen, 57 years old, born in Pasuruan on April 30, 1962 and currently domiciles in Surabaya.

EDUCATION

- Bachelor's degree in Management from Brawijaya University (1985), and
- Master's degree in Management from Gadjah Mada University (1993).

CAREER HISTORY, BASIS OF APPOINTMENT, AND TERM OF OFFICE

Appointed as the Compliance and Risk Management Director of the Bank for the first time through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk on June 19, 2019. He passed the fit-and-proper test and was approved to serve as the Compliance and Risk Management Director by the Financial Services Authority (OJK) effectively based on the Copy of the Decree of Board of Commissioners of Financial Services Authority (OJK) No. KEP-189/D.03/2019 dated October 11, 2019, with term of office until the closing of the 2023 Annual GMS convened in 2024.

AFFILIATION

Mr. Cahyono has no affiliation with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and controlling shareholders.

CAREER

He has professional experiences at Bank Rakyat Indonesia where he held various positions, among others, as a Branch Manager at Pagaralam Branch Office, Palembang Regional Office of Bank BRI (1995-1998), Muara Enim Branch Office, Palembang Regional Office of Bank BRI (1998-2001), Probolinggo Branch Office, Surabaya Regional Office of Bank BRI (2001-2003), Pasar Minggu Branch Office, Jakarta Regional Office of Bank BRI (2003-2006), and Surabaya Kalimas Branch Office, Surabaya Regional Office of Bank BRI (2006-2009). He then served as a Deputy Head of Service Division at Bank BRI Head Office (2009-2010), Deputy Head of Palembang Regional Office of Bank BRI (2010-2011), Deputy Head of Malang Regional Office of Bank BRI (2011-2013), Inspector at Banjarmasin Office of Bank BRI (2013-2014), Head of Micro Business Development Division at Bank BRI Head Office (2014-2015), Head of Palembang Regional Office of Bank BRI (2015-2016), Director at BRI Syariah (2016-2017), Inspector at Yogyakarta Office of Bank BRI (2017-2018), and Head of Internal Audit of Jakarta I Regional Office of Bank BRI (2018-2019).

SHARE OWNERSHIP

Mr. Cahyono has no shares of Bank Jatim.



Profil Dewan Pengawas Syariah

PROFILE OF SHARIA SUPERVISORY BOARD





DRS. KH. AFIFUDDIN MUHAJIR, M.AG

KETUA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

WNI, berdomisili di Situbondo. Lahir di Sampang, 20 Mei 1955 (64 tahun).

PENDIDIKAN

- Sarjana Jurusan Tafsir Hadits Universitas Ibrahimy (UNIB) tahun 1980.
- Magister Ilmu Hukum Islam UNISMA Malang pada tahun 2001.

RIWAYAT JABATAN, DASAR PENUNJUKAN & PERIODE JABATAN

Diganti dengan Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019. (Menunggu *Fit and Proper* Test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK))

AFILIASI

KH. Afifuddin Muhajir tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali.

KARIR

Dosen Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy (UNIB) (1985-sekarang), Dosen Ma'had Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1990-sekarang), Khatib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2010-2015), Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2010-sekarang), Naib Mudir Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2016-2021), Dewan Masyayikh Ma'had Aly (2018-2022), Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2019-2020).

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

CHAIRMAN OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

Indonesian citizen, 64 years old, born in Sampang on May 20, 1955 and currently domiciles in Situbondo.

EDUCATION

- Bachelor's degree in Hadith Interpretation from Universitas Ibrahimy (UNIB) (1980), and
- Master's degree in Islamic Law from Universitas Islam Malang (UNISMA) (2001).

CAREER HISTORY, BASIS OF APPOINTMENT, AND TERM OF OFFICE

Appointed as Chairman of the Sharia Supervisory Board for the first time at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Fiscal Year 2018 on April 26, 2019. (Waiting for *Fit and Proper* Test by the Financial Services Authority (OJK))

AFFILIATION

Mr. Muhajir has no affiliation with the members of Board of Commissioners, Board of Directors, and controlling shareholders.

CAREER

Lecturer at Faculty of Sharia Studies of Universitas Ibrahimy (UNIB) (1985 up to present), Lecturer of Ma'had at Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1990 up to present), Khatib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2010-2015), Chairman of Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2010 up to present), Naib Mudir Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2016-2021), Dewan Masyayikh Ma'had Aly (2018-2022), and Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2019-2020).

SHARE OWNERSHIP

Mr. Muhajir has no shares of Bank Jatim.

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI / TRAINING AND CERTIFICATION

Jenis Pelatihan / Type of Training	Penyelenggara / Organizer	Tempat / Venue	Waktu / Year
Pelatihan Pengawas Syariah LKS	DSN-MUI Institute	Jakarta	25-27 Juli 2019
Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah	LSP DSN-MUI	Jakarta	15 Oktober 2019
Seminar Silang Pendapat Makna Radikalisme	Pusat Kajian Pemikiran Hasyim Asy'ari Tebuireng	Tebuireng	21 Desember 2019



DR. M. SAAD IH, MA (MUHAMMAD SA'AD IBRAHIM)

ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

WNI, berdomisili di Malang. Lahir di Mojokerto, 17 November 1954 (65 tahun).

PENDIDIKAN

- Sarjana Jurusan Qadla' IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1983.
- Magister Pendidikan Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1990.
- Doktor Ulumul Qur'an IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1997.

RIWAYAT JABATAN, DASAR PENUNJUKAN & PERIODE JABATAN

Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya pada RUPSLB tanggal 27 Juni 2019 (Menunggu *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)).

AFILIASI

Muhammad Sa'ad Ibrahim tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali.

KARIR

Ketua Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (LKAF) (1994-1999), Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (1998-sekarang), Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya (1998-1999), Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (1999-sekarang), Dosen UIN Malang (2000-sekarang), Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur (2000-sekarang), Ketua Program Pembelajaran Bahasa Arab UIN Malang (2000-2003), Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2001-2003), Asisten Direktur I Pascasarjana UIN Malang (2003-sekarang), Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya (2004-sekarang), Dosen Pascasarjana Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang (2004-sekarang), Direktur Pasca Sarjana UIN Malang (2005-2007), Wakil Rektor IV UIN Malang (2007-2009), Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (2015-2020).

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

MEMBER OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

Indonesian citizen, 65 years old, born in Mojokerto on November 17, 1954 and currently domiciles in Malang.

EDUCATION

- Bachelor's degree majoring in Qadla' Studies from IAIN Sunan Ampel Surabaya (1983).
- Master's degree in Islamic Studies from IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1990), and
- Doctor of Ulumul Qur'an degree from IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997)

CAREER HISTORY, BASIS OF APPOINTMENT, AND TERM OF OFFICE

Appointed as Chairman of the Sharia Supervisory Board for the first time at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah East Java Tbk. Fiscal Year 2018 on April 26, 2019. (Waiting for Fit and Proper Test by the Financial Services Authority (OJK))

AFFILIATION

Mr. Ibrahim has no affiliation with the members of Board of Commissioners, Board of Directors, and controlling shareholders.

CAREER

Head of Religion and Philosophy Study Institution (LKAF) (1994-1999), Lecturer for Postgraduate Program at IAIN Sunan Ampel Surabaya (1998 up to present), Chairman of Madzhab and Law Comparative Studies Department of the Faculty of Sharia Studies of IAIN Sunan Ampel Surabaya (1998-1999), Lecturer for Postgraduate Program at University of Muhammadiyah Malang (1999 up to present), Lecturer at UIN Malang (2000 up to present), Chairman of Majelis Tarjih and Islamic Mindset Development of Muhammadiyah of East Java Region (2000 up to present), Head of Arabic Language Study Program at UIN Malang (2000-2003), Lecturer for Postgraduate Program at Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2001-2003), Assistant Director I for Postgraduate Program of UIN Malang (2003 up to present), Lecturer for Postgraduate Program at Universitas Muhammadiyah Surabaya (2004 up to present), Lecturer for Postgraduate Program at Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang (2004 up to present), Director of Postgraduate Program of UIN Malang (2005-2007), Vice Rector IV of UIN Malang (2007-2009), and Chairman of Regional Management Board of Muhammadiyah of East Java (2015-2020).

SHARE OWNERSHIP

Mr. Ibrahim has no shares of Bank Jatim.

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI / TRAINING AND CERTIFICATION

Jenis Pelatihan / Type of Training	Penyelenggara / Organizer	Tempat / Venue	Waktu / Year
Pelatihan Pengawas Syariah LKS	DSN-MUI Institute	Jakarta	26-28 September 2019



Profil Pemimpin Divisi

PROFILE OF DIVISION HEADS



**GLEMBOH PRIAMBODO****SEKRETARIS PERUSAHAAN**

CORPORATE SECRETARY

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Malang, 15 Maret 1970 (49 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Surabaya pada tahun 1997, dan
- Magister Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus Surabaya pada tahun 2001
- Magister Manajemen dari STIE ABIE Surabaya pada tahun 2003

**RIWAYAT JABATAN & DASAR
PENUNJUKAN / HISTORY AND
BASIS OF APPOINTMENT**

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Corporate Secretary berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.057/384/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.

Has been serving as the Head of Corporate Secretary Division since 2018 based on the Decree of Board of Directors No. 057/383/DIR/HCT/KEP dated December 27, 2018.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 1997, sebelum menempati posisi saat ini, ia pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Dr. Soetomo (2017-2018), Pjs. Pemimpin Cabang Dr. Soetomo (2016-2017), Senior Analyst Sub Divisi Priority Banking (2015-2016), Senior Analyst Sub Divisi Komunikasi Eksternal (2015).

Joined Bank Jatim in 2015. Prior to serving the current position, he served as Dr. Soetomo Branch Manager (2017-2018), Act. Dr. Soetomo Branch Manager (2016-2017), Senior Analyst at Priority Banking Sub Division (2015-2016), Senior Analyst at Extern Communication Sub Division (2015).

**SISMARIYADI****PEMIMPIN DIVISI
KREDIT KONSUMER**

HEAD OF CONSUMER CREDIT DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Boyolali, 13 Juli 1966 (53 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Ekonomi tahun 2001, dan
- Magister Manajemen tahun 2007 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) ABI, Surabaya.

**RIWAYAT JABATAN & DASAR
PENUNJUKAN / HISTORY AND
BASIS OF APPOINTMENT**

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Konsumer berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.057/383/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.

Has been serving as the Head of Consumer Credit Division since 2018 based on the Decree of Board of Directors No. 057/383/DIR/HCT/KEP dated December 27, 2018.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 1986, sebelum menempati posisi saat ini, ia pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Gresik (2013-2014), Pjs. Pemimpin Cabang Trenggalek (2014-2015), Pemimpin Cabang Trenggalek (2015), Pemimpin Sub Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel (2015-2017), Pjs. Pemimpin Divisi Kredit Konsumer (2017-2018).

Joined Bank Jatim in 1986. Prior to serving the current position, he served as the Head of Operations at Gresik Branch (2013-2014), Trenggalek Act. Branch Manager (2014-2015), Trenggalek Branch Manager (2015), Head of Agribusiness and Retail Credit Sub-Division (2015-2017), and Act. Head of Consumer Credit Division.

**TAUFAN MUHAMMAD****PEMIMPIN DIVISI KREDIT
MIKRO, RITEL & PROGRAM**

HEAD OF MICRO, RETAIL, AND PROGRAM CREDIT DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Ponorogo, 3 Juni 1964 (55 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Widyagama Malang tahun 2000, dan
- Magister Manajemen Universitas Brawijaya Malang tahun 2005.

**RIWAYAT JABATAN & DASAR
PENUNJUKAN / HISTORY AND
BASIS OF APPOINTMENT**

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Mikro, Ritel & Program berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/119/DIR/HCT/KEP tanggal 14 Maret 2018.

Has been serving as the Head of Micro, Retail, and Program Credit Division since 2018 based on the Decree of Board of Directors No. 057/119/DIR/HCT/KEP dated March 14, 2018.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 1986 sebelum menempati posisi saat ini, ia pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Tulungagung (2010), Pjs. Pemimpin Cabang Trenggalek (2010-2011), Pemimpin Cabang Trenggalek (2011-2012), Pemimpin Cabang Sampang (2012-2013), Pemimpin Cabang Pasuruan (2013-2014), Pemimpin Sub Divisi Kebijakan Kredit Agrobisnis & Ritel (2014-2015), Pemimpin Cabang Madiun (2015-2017), Pjs. Pemimpin Divisi Kredit Agrobisnis Dan Ritel (2017), Pjs. Pemimpin Divisi Kredit Mikro, Ritel Dan Program (2017-2018).

Joined Bank Jatim in 1986. Prior to serving the current position, he served as the Head of Operations at Tulungagung Branch (2010), Trenggalek Act. Branch Manager (2010-2011), Trenggalek Branch Manager (2011-2012), Sampang Branch Manager (2012-2013), Pasuruan Branch Manager (2013-2014), Head of Agribusiness and Retail Credit Sub-Division (2014-2015), Madiun Branch Manager (2015-2017), Act. Head of Agribusiness and Retail Credit Division (2017), and Act. Head of Micro, Retail, and Program Credit Division (2017-2018).



HERMANTO

PEMIMPIN DIVISI KREDIT MENENGAH, KORPORASI DAN SINDIKASI

HEAD OF MEDIUM, CORPORATE, AND
SYNDICATED CREDIT DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir
di Lamongan, 7 November 1963 (56
tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Manajemen Perusahaan
tahun 1990, dan
- Magister Manajemen tahun 2002
dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Artha Boedi Iswara.

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2018 Menjabat sebagai
Pemimpin Divisi Kredit Menengah,
Korporasi & Sindikasi berdasarkan
Surat Keputusan Direksi No. 057/384/
DIR/HCT/ KEP tanggal 27 Desember
2018.

*Has been serving as the Head of Medium, Corporate,
and Syndicated Credit Division since 2018 based on
the Decree of Board of Directors No. 057/384/DIR/
HCT/KEP dated December 27, 2018.*

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 1986
sebelum menempati posisi saat ini, ia
pernah menjabat sebagai Pemimpin
Cabang Pembantu Universitas Wijaya
Kusuma (2011), Pjs Pemimpin Cabang
Tulungagung (2011), Pemimpin
Cabang Tulungagung (2011-2013),
Pemimpin Cabang Jakarta (2013-
2015), Pemimpin Cabang Banyuwangi
(2015-2017), Pjs Pemimpin Divisi Kredit
Menengah, Korporasi & Sindikasi
(2017-2018).

*Joined Bank Jatim in 1986. Prior to serving the current
position, he served as the Sub-Branch Manager of
Universitas Wijaya Kusuma (2011), Tulungagung
Act. Branch Manager (2011), Tulungagung Branch
Manager (2011-2013), Jakarta Branch Manager
(2013-2015), Banyuwangi Branch Manager (2015-
2017), and Act. Head of Medium, Corporate, and
Syndicated Credit Division (2017-2018).*



UMI RODIYAH

PEMIMPIN DIVISI HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN BISNIS

HEAD OF INSTITUTIONAL AND
BUSINESS RELATIONS DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di
Probolinggo, 2 Maret 1966 (53 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Administrasi Negara
Universitas Brawijaya pada tahun
1991.

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2018 menjabat sebagai
Pemimpin Divisi Hubungan
Kelembagaan dan Bisnis berdasarkan
Surat Keputusan Direksi No.057/384/
DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember
2018.

*Has been serving as the Head of Institutional and
Business Relations Division since 2018 based on
the Decree of Board of Directors No. 057/384/DIR/
HCT/KEP dated December 27, 2018.*

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun
1991 sebelum menempati posisi
saat ini, ia pernah menjabat sebagai
Pemimpin bidang Operasional
Cabang Probolinggo (2009-2010), Pjs
Pemimpin Cabang Perak, Surabaya
(2010), Pemimpin Cabang Perak,
Surabaya (2010-2015), Pemimpin
Sub Divisi Operasional Luar Negeri
(2015-2016), Pemimpin Bidang Bisnis
Cabang Utama Surabaya (2016-
2017), Pemimpin Bidang Operasional
Cabang Utama Surabaya (2017), Pjs
Pemimpin Divisi Corporate Secretary
(2017-2018), Pjs Pemimpin Divisi
Hubungan Kelembagaan & Bisnis
(2018).

*Joined Bank Jatim in 1986. Prior to serving the
current position, she served as the Head of
Operations at Probolinggo Branch (2009-2010),
Perak Act. Branch Manager, Surabaya (2010-2015),
Head of Foreign Operations Sub-Division (2015-2016),
Head of Business at Surabaya Main Branch (2016-2017),
Head of Operations at Surabaya Main Branch
(2017), Act. Head of Corporate Secretary Division
(2017-2018), and Act. Head of Institutional and
Business Relations Division (2018).*



BUDI SUMARSONO

PEMIMPIN DIVISI HUMAN CAPITAL

HEAD OF HUMAN CAPITAL DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di
Madiun, 2 September 1966 (53 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Ilmu Keuangan Universitas
Muhammadiyah Ponorogo tahun
1992,
- Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Merdeka Ponorogo
tahun 1999,
- Magister Management dari
Universitas Widya Jayakarta
Jakarta tahun 2000

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2019 Menjabat sebagai
Pemimpin Divisi Human Capital
berdasarkan Surat Keputusan Direksi
No. 058/225/DIR/HCP/KEP tanggal
12 Agustus 2019.

*Has been serving as the Head of Human Capital
Division since 2019 based on the Decree of Board of
Directors No. 058/225/DIR/HCP/KEP dated August
12, 2019.*

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun
1993. Sebelum menempati posisi
saat ini, ia pernah menjabat sebagai
Pemimpin Bidang Operasional Cabang
Magetan (2013-2014), Pjs Pemimpin
Cabang Probolinggo (2014-2015),
Pjs Pemimpin Cabang Gresik (2015),
Pemimpin Cabang Gresik (2015-
2017), Pemimpin Bidang Operasional
Cabang Utama (2017-2018), Pjs.
Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata
Kelola (2018), Pjs. Pemimpin Divisi
International Banking Kantor Pusat
(2018), Pemimpin Divisi International
Banking Kantor Pusat (2018-2019).

*Prior to serving the current position, she served as
the Head of Operations at Magetan Branch (2013-
2014), Probolinggo Act. Branch Manager (2014-
2015), Gresik Act. Branch Manager (2015), Gresik
Branch Manager (2015-2017), Head of Operations at
Main Branch (2017-2018), Act. Head of Compliance
and Governance Division (2018), Act. Head of
International Banking Division at Head Office (2018),
Head of International Banking Division at Head
Office (2018-2019).*



SUCI ISSUMIYATI

PEMIMPIN DIVISI RISIKO KREDIT

HEAD OF CREDIT RISK DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Semarang, 24 Desember 1965 (54 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Bahasa Prancis dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Semarang tahun 1989.

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.057/154/DIR/HCT/SK tanggal 6 April 2018.

Has been serving as the Head of Credit Risk Division since 2018 based on the Decree of Board of Directors No. 057/154/DIR/HCT/SK dated April 6, 2018.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 1992 sebelum menempati posisi saat ini, menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Ngawi (2011-2012), Pjs Pemimpin Cabang Kepanjen (2012-2013), Pemimpin Cabang Kepanjen (2013-2014), Pemimpin Cabang Tulungagung (2014-2015), Pemimpin Sub Divisi Corporate Secretary (2015), Pemimpin Cabang Malang (2015-2017), Pjs. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Kantor Pusat (2017), Pjs Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan Dan Bisnis Kantor Pusat (2017-2018), Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan Dan Bisnis Kantor Pusat (2018).

Joined Bank Jatim in 1992. Prior to serving the current position, she served as the Head of Operations at Ngawi Branch (2011-2012), Kepanjen Act. Branch Manager (2012-2013), Kepanjen Branch Manager (2013-2014), Tulungagung Branch Manager (2014-2015), Head of Corporate Secretary Sub-Division (2015), Malang Branch Manager (2015-2017), Act. Head of Strategic Planning Division at Head Office (2017), Act. Head of Institutional and Business Relations Division at Head Office (2017-2018), and Head of Institutional and Business Relations Division at Head Office (2018).



R. HARIS MOELJANTO

PEMIMPIN DIVISI PENYELAMATAN PENYELESAIAN KREDIT

HEAD OF CREDIT RESTRUCTURING AND SETTLEMENT DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Bangkalan, 11 April 1964 (55 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Akuntansi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran tahun 1988, dan
- Magister Manajemen SDM dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mitra Indonesia tahun 2000.

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Penyelamatan Penyelesaian Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.057/360/DIR/HCT/SK tanggal 23 November 2018.

Has been serving as the Head of Credit Restructuring and Settlement Division since 2018 based on the Decree of Board of Directors No. 057/360/DIR/HCT/SK dated November 23, 2018.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 1989 sebelum menempati posisi saat ini, ia pernah menjabat sebagai Pjs. Pemimpin Cabang Pembantu Banyuwangi (2012-2013), RM Divisi Kredit Ritel Kantor Pusat (2013), RM Kredit Agrobisnis, Ritel & Mortgage Kantor Pusat (2013-2015), Pemimpin Sub Divisi Kebijakan Kredit Agrobisnis & Ritel Kantor Pusat (2015), Pemimpin Cabang Bangkalan (2015), Pemimpin Cabang Utama (2015-2017).

Joined Bank Jatim in 1986. Prior to serving the current position, he served as the Banyuwangi Act. Sub-Branch Manager (2012-2013), RM of Retail Credit Division at Head Office (2013), RM of Agribusiness, Retail, and Mortgage Credit at Head Office (2013-2015), Head of Agribusiness and Retail Credit Policies Sub-Division at Head Office (2015), Bangkalan Branch Manager (2015), Manager of Main Branch Office (2015-2017).



WARDHANA SURYAATMAJA

PEMIMPIN DIVISI UMUM

HEAD OF GENERAL AFFAIRS DIVISION

WNI, berdomisili di Sidoarjo. Lahir di Surabaya, 9 desember 1967 (52 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Studi Pembangunan, Universitas Wijaya Putra tahun 1995, dan
- Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara tahun 1998.

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Tentang Pemindahan Tugas Pegawai No. 058/328/DIR/HCP/KEP tanggal 15 November 2019.

Has been serving as the Head of General Affairs Division based on the Decree of Board of Directors regarding Transfer of Employee's Duty No. 058/328/DIR/HCP/KEP dated November 15, 2019.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 1991 sebelum menempati posisi saat ini, ia pernah menjabat sebagai Pjs Pemimpin Cabang Madiun (2015), Pemimpin Sub Divisi Akuntansi Kantor Pusat (2015-2016), Pjs Pemimpin Divisi Teknologi Informasi Kantor Pusat (2016-2017), Pemimpin Divisi Teknologi Informasi Kantor Pusat (2017-2018), Pemimpin Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan Kantor Pusat (2018-2019).

Joined Bank Jatim in 1991. Prior to serving the current position, he served as the Madiun Act. Branch Manager (2015), Head of Accounting Sub-Division at Head Office (2015-2016), Act. Head of Information Technology Division at Head Office (2016-2017), Head of Information Technology Division at Head Office (2017-2018), and Head of Product and Policy Development at Head Office (2018-2019).



WAHYU KUSUMO WISNUBROTO

PEMIMPIN DIVISI TRESURI

HEAD OF TREASURY DIVISION

WNI, berdomisili di Sidoarjo. Lahir di Yogyakarta, 29 Juli 1972 (47 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung tahun 1998, dan
- Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada tahun 2001.

RIWAYAT JABATAN, DASAR PENUNJUKAN & PERIODE JABATAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Tresuri berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.057/384/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.

Has been serving as the Head of Treasury Division since 2018 based on the Decree of Board of Directors No. 057/384/DIR/HCT/KEP dated December 27, 2018.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 2002 sebelum menempati posisi saat ini, menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Ngawi (2013), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Jakarta (2013-2014), Pjs. Pemimpin Cabang HR Muhammad (2014), Pemimpin Cabang HR Muhammad (2014-2015), Pemimpin Sub Divisi Tresuri Kantor Pusat (2015-2017), Pjs. Pemimpin Divisi International Banking Kantor Pusat (2017-2018), Pjs. Pemimpin Divisi Tresuri Kantor Pusat (2018).

Joined Bank Jatim in 2002. Prior to serving the current position, he served as the Head of Operations at Ngawi Branch (2013), Head of Operations at Jakarta Branch (2013-2014), Act. Branch Manager of HR Muhammad (2014), HR Muhammad Branch Manager (2014-2015), Head of Treasury Sub-Division at Head Office (2015-2017), Act. Head of International Banking Division at Head Office (2017-2018), Act. Head of Treasury Division at Head Office (2018).



AMIRUDDIN

PEMIMPIN DIVISI PENGENDALIAN KEUANGAN

HEAD OF FINANCIAL CONTROL DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Sampang, 6 April 1963 (56 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) ABI Surabaya tahun 2003, dan
- Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Narotama Surabaya tahun 2008.

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Anggaran & Pengendalian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.057/383/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.

Has been serving as the Head of Budgeting and Financial Control Division since 2018 based on the Decree of Board of Directors No. 057/383/DIR/HCT/KEP dated December 27, 2018.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 1986 sebelum menempati posisi saat ini, ia pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Anggaran & Pengendalian Keuangan (2018), Pjs. Pemimpin Divisi Akuntansi (2017), Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama (2016), Pemimpin Bidang Bisnis Cabang Utama (2016), Pemimpin Cabang Sidoarjo (2014), Pemimpin Cabang Mojokerto (2013), Pemimpin Cabang Kraksaan (2012), Pjs Pemimpin Cabang Kraksaan (2011), Pemimpin Cabang Pembantu ITATS (2011), Pjs. Pemimpin Cabang Pembantu ITATS (2010), Pengelola Divisi SDM (2010), ARM Divisi Kredit Agro Bisnis dan Ritel (2009), ARM Divisi Kredit (2008).

Joined Bank Jatim in 1986. Prior to serving the current position, he served as the Head of Budgeting and Financial Control Division (2018), Act. Head of Accounting Division (2017), Head of Credit at Main Branch (2016), Head of Business at Main Branch (2016), Sidoarjo Branch Manager (2014), Mojokerto Branch Manager (2013), Kraksaan Branch Manager (2012), Kraksaan Act. Branch Manager (2011), ITATS Sub-Branch Manager (2011), ITATS Act. Sub-Branch Manager (2010), HR Division Manager (2010), ARM of Agribusiness and Retail Credit Division (2009), ARM of Credit Division (2008).



REVI ADIANA SILAWATI

PEMIMPIN DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS & MANAJEMEN KINERJA

HEAD OF STRATEGIC PLANNING AND PERFORMANCE MANAGEMENT DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Solo, 1 Juni 1966 (53 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Manajemen dari Universitas Wijaya Putra tahun 1996, dan
- Magister Manajemen dari Universitas Airlangga tahun 2001, serta
- mengikuti Financial Budgeting Short Course Program di Australia National University tahun 2002.

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.057/154/DIR/HCT/SK tanggal 6 April 2018.

Has been serving as the Head of Strategic Planning and Performance Management Division since 2018 based on the Decree of Board of Directors No. 057/154/DIR/HCT/SK dated April 6, 2018.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 1985 sebelum menempati posisi saat ini, ia pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasi Cabang Dr. Soetomo (2001-2003), Pemimpin Cabang Perak (2003-2006), Pemimpin Cabang Bojonegoro (2006-2009), Pemimpin Cabang Kediri (2009-2011), Pemimpin Cabang Malang (2011-2012), Pemimpin Divisi Corporate Secretary (2012- 2013), Pemimpin Divisi Dana Jasa dan LN (2013-2015), Pemimpin Divisi Tresuri (2015-2018).

Joined Bank Jatim in 1985. Prior to serving the current position, he served as the Head of Operations at dr. Soetomo Branch (2001-2003), Perak Branch Manager (2003-2006), Bojonegoro Branch Manager (2006-2009), Kediri Branch Manager (2009-2011), Malang Branch Manager (2011-2012), Head of Corporate Secretary Division (2012-2013), Head of Service and Foreign Funds (2013-2015), Head of Treasury Division (2015-2018).



R. ARIEF WICAKSONO

PEMIMPIN DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI

HEAD OF INFORMATION TECHNOLOGY
DIVISION

WNI, berdomisili di Sidoarjo. Lahir di Banyuwangi, 20 April 1970 (49 tahun).

PENDIDIKAN

- Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Surabaya pada tahun 1997

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Teknologi Informasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.057/384 /DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.

Has been serving as the Head of Information Technology Division since 2018 based on the Decree of Board of Directors No. 057/384/DIR/HCT/KEP dated December 27, 2018.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 2001 sebelum menempati posisi saat ini, ia pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Tuban (2013-2014), Pjs Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Human Capital (2014-2015), Pjs Pemimpin Cabang Bondowoso (2015), Pemimpin Cabang Bondowoso (2015-2017), Pemimpin Cabang Banyuwangi (2017-2018), Pjs Pemimpin Divisi Treasury (2018), Pjs Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (2018).

Joined Bank Jatim in 2001. Prior to serving the current position, he served as the Head of Operations at Tuban Branch (2013-2014), Act. Head of Human Capital Development Sub-Division (2014-2015), Bondowoso Act. Branch Manager (2015), Bondowoso Branch Manager (2015-2017), Banyuwangi Branch Manager (2017-2018), Act. Head of Treasury Division (2018), Act. Head of Information Technology Division (2018).



AFFANDI

PEMIMPIN DIVISI HUKUM

HEAD OF LEGAL DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Demak, 23 Juni 1963 (56 tahun).

PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum dari Universitas Tuhjuh Belas Agustus Semarang tahun 1990.

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Hukum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 057/383/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.

Has been serving as the Head of Legal Division since 2018 based on the Decree of Board of Directors No. 057/383/DIR/HCT/KEP dated December 27, 2018.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 1991 sebelum menempati posisi saat ini, menjabat sebagai RM Unit Penanganan Kredit Bermasalah (2014-2015), RM Divisi Risiko Kredit (2015), Pemimpin Sub Divisi Risiko Kredit (2015-2017), Pjs Pemimpin Divisi Penyelamatan Penyelesaian Kredit (2017-2018), Pjs Pemimpin Divisi Hukum (2018).

Joined Bank Jatim in 1991. Prior to serving the current position, he served as the RM of Non-Performing Loan Management Unit (2014-2015), RM of Credit Risk Division (2015), Head of Credit Risk Sub-Division (2015-2017), Act. Head of Credit Restructuring and Settlement Division (2017-2018), and Act. Head of Legal Division (2018).



DIDIK SUDARSONO

PEMIMPIN DIVISI BISNIS SYARIAH

HEAD OF SHARIA BUSINESS DIVISION

WNI, berdomisili di Malang. Lahir di Banyuwangi, 31 Mei 1965 (54 tahun).

PENDIDIKAN

- Sarjana Manajemen Pemasaran dari Universitas Brawijaya tahun 1989.

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2018 menjabat sebagai TKIK Pemimpin Divisi Unit Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/247/DIR/HCT/KEP tanggal 31 Juli 2018.

Has been serving as the TKIK Head of Sharia Business Division since 2018 based on the Decree of Board of Directors No. 057/247/DIR/HCT/KEP dated July 31, 2018.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 2017 sebelum menempati posisi saat ini, ia menjabat sebagai Pemimpin Divisi Syariah /Ketua Tim Spin Off (2017-2018).

Joined Bank Jatim in 2017. Prior to serving the current position, he served as the Head of Sharia Division/Spin-Off Team.



PURBOYO SINUGROHO

PEMIMPIN DIVISI PENDUKUNG BISNIS SYARIAH

HEAD OF SHARIA BUSINESS SUPPORT DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Mataram, 5 Februari 1964 (55 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Ekonomi Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran tahun 1989, dan
- Magister Manajemen dari Universitas Airlangga tahun 2003.

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/247/DIR/HCT/KEP tanggal 31 Juli 2018.

Has been serving as the Head of Sharia Business Support Division since 2018 based on the Decree of Board of Directors No. 057/247/DIR/HCT/KEP dated July 31, 2018.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 1991 sebelum menempati posisi saat ini, ia pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Jakarta (2008-2009), Pemimpin Cabang Pembantu Jakarta (2009-2011), Pjs Pemimpin Cabang Sumenep (2011-2011), Pemimpin Cabang Sumenep (2011-2012), Pemimpin Sub Divisi Kredit Agrobisnis Dan Ritel (2012-2015), Pemimpin Divisi Kredit Agrobisnis Dan Ritel (2015-2016), Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah (2016-2018).

Joined Bank Jatim in 1991. Prior to serving the current position, he served as the Head of Operations at Jakarta Branch (2008-2009), Jakarta Main Branch Manager (2009-2011), and Sumenep Act. Branch Manager (2011-2011), Sumenep Branch Manager (2011-2012), Head of Agribusiness and Retail Credit Sub-Division (2012-2015), Head of Agribusiness and Retail Credit Division (2015-2016), and Head of Sharia Business Support Division (2016-2018).



AVANTIONO HADIANTO

PEMIMPIN DIVISI OPERASIONAL & LAYANAN SYARIAH

HEAD OF SHARIA OPERATIONS AND SERVICE DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Bogor, 26 Juli 1965 (54 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

Sarjana Administrasi Publik dari Universitas Brawijaya tahun 1990 dan Magister Manajemen dari PPM Business School tahun 2004.

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2019 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Operasional Jaringan & Layanan Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 058/225/DIR/HCP/KEP tanggal 16 Agustus 2019.

Has been serving as the Head of Sharia Operations and Service Division since 2019 based on the Decree of Board of Directors No. 058/225/DIR/HCT/KEP dated August 16, 2019.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 2009 sebelum menempati posisi saat ini, ia pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah (2009-2018), Tim Spin Off Syariah Divisi Pendukung Bisnis Syariah (2018-2019).

Joined Bank Jatim in 2009. Prior to serving the current position, he served as the Head of Sharia Business Support Division (2009-2018), and Sharia Spin Off Team of Sharia Business Support Division (2018-2019).



MOCH. NADJIB

PEMIMPIN DIVISI KEPATUHAN & TATA KELOLA

HEAD OF COMPLIANCE AND GOVERNANCE DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Surabaya 20 Juli 1963 (56 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Statistik dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tahun 1988, dan
- Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ABI tahun 2004.

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2019 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola berdasarkan Keputusan Direksi No. 058/1322/DIR/HCT/MKR/SCB tanggal 12 Agustus 2019.

Has been serving as the Head of Compliance and Governance Division since 2019 based on the Decree of Board of Directors No. 058/1322/DIR/HCT/MKR/SCB dated August 12, 2019.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 1990 sebelum menempati posisi saat ini, ia pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Manajemen Risiko Kredit dan Pasar (2014-2015), Pemimpin Sub Divisi Layanan Umum (2015), Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah ditugaskan sebagai Ketua Tim Spin Off (2015-2019).

Joined Bank Jatim in 1990. Prior to serving the current position, he served as the Head of Credit and Market Risk Management Sub-Division (2014-2015), Head of General Services Sub-Division (2015), and Head of Sharia Business Support Division tasked to become the Head of Spin-Off Team (2015-2019).



RACHMAN SUBIYANTORO

PEMIMPIN DIVISI DANA JASA & E-BANKING

HEAD OF SERVICE FUND AND E-BANKING DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Jember, 9 Desember 1969 (50 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Widyagama Malang tahun 1988, dan
- Magister Manajemen dari Universitas dr. Soetomo tahun 2001.

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2017 Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Dana Jasa E-Banking berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 056/216/DIR/HCT/SK tanggal 12 Oktober 2017.

Has been serving as the Head of Service Fund and E-Banking Division since 2017 based on the Decree of Board of Directors No. 056/216/DIR/HCT/SK dated October 12, 2017.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 1993 sebelum menempati posisi saat ini, ia pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Tanggul, Jember (2011), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Blitar (2011-2013), Pjs Pemimpin Cabang Sumenep (2013), Pemimpin Cabang Sumenep (2013-2017), Pjs Pemimpin Divisi Risiko Kredit (2017-2018), Direktur Utama Trinisat (2018-2019).

Joined Bank Jatim in 1982. Prior to serving the current position, he served as the Tanggul Sub-Branch Manager in Jember (2011), Head of Operations at Blitar Branch (2011-2013), Sumenep Act. Branch Manager (2013), Sumenep Branch Manager (2013-2017), Act. Head of Credit Risk Division, and President Director of Trinisat (2018-2019).



NUR EKO ARDIAN

PEMIMPIN DIVISI MANAJEMEN RISIKO

HEAD OF RISK MANAGEMENT DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Surabaya, 29 Februari 1980 (39 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Administrasi Negara Universitas Wijaya Putra tahun 2003, dan
- Pasca Sarjana Administrasi Negara Universitas Wijaya Putra tahun 2005.

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2019 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor. 058/225/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Agustus 2019.

Has been serving as the Head of Risk Management Division since 2019 based on the Decree of Board of Directors No. 058/225/DIR/HCP/KEP dated August 12, 2019.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 2004. Pemimpin Cabang Kepanjen (2015-2017), Pjs. Pemimpin Divisi Kepatuhan (2017-2018), Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola (2018), Pemimpin Divisi Human Capital (2018-2019).

Kepanjen Branch Manager (2015-2017), Act. Head of Compliance Division (2017-2018), Head of Compliance and Governance Division (2018), Head of Human Capital Division (2019).



WAHYU PRASETO

PGS. PEMIMPIN DIVISI PENGEMBANGAN PRODUK & KEBIJAKAN

ACT. HEAD OF PRODUCT AND POLICY DEVELOPMENT DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Surabaya 4 Agustus 1963 (56 tahun)

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 1994.

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2019 Menjabat sebagai Pgs. Pengembangan Produk & Kebijakan Berdasarkan Surat Human Capital Penunjukkan Pengganti Sementara Pemimpin Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan No:058/5028/HCP/LHC/Pgs tanggal 25 November 2019.

Has been serving as the Act. Head of Product and Policy Development Division since 2019 based on the Human Capital Letter regarding Appointment of Temporary Replacement to the Head of Product and Policy Development Division No. 058/5028/HCP/LHC/Pgs dated November 25, 2019.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 1991. Sebelum menempati posisi saat ini, ia pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Kredit Agrobisnis Dan Ritel (2015-2017), Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Produk Dan Kebijakan (2017-2019).

Prior to serving the current position, he served as the Head of Agribusiness and Retail Credit Sub-Division (2015-2017), and Head of Product and Policy Development Sub-Division (2017-2019).



AGUS SASTRIONO

PGS. PEMIMPIN DIVISI SERVICE QUALITY ASSURANCE

ACT. HEAD OF SERVICE QUALITY ASSURANCE DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Surabaya 18 September 1971 (48 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Akuntansi IKIP Negeri Surabaya tahun 1994, dan
- Magister Manajemen Pemasaran dari STIE ABI tahun 2002.

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak tanggal 2 Desember 2019 menjabat sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Service Quality Assurance berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 058/476/DIR/HCP/SRT tanggal 27 November 2019.

Has been serving as the Act. Head of Service Quality Assurance Division since December 2, 2019, based on the Decree of Board of Directors No. 058/476/DIR/HCP/SRT dated November 27, 2019.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, ia pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Sumenep (2013), Pjs Pemimpin Cabang Bawean (2013), Pemimpin Cabang Bawean (2013-2014), Pemimpin Cabang Bawean (2014), Pemimpin Cabang Mojokerto (2014-2019), Pemimpin Cabang Jember (2019), Pemimpin Bidang Bisnis Cabang Utama (2019), Pemimpin Cabang Jember (2019).

Prior to serving the current position, he served as the Head of Operations at Sumenep Branch (2013), Bawean Act. Branch Manager (2013), Bawean Branch Manager (2013-2014), Mojokerto Branch Manager (2014-2019), Jember Branch Manager (2019), and Head of Business at Main Branch.



DIAH IRAWATI

PGS. PEMIMPIN DIVISI INTERNATIONAL BANKING

ACT. HEAD OF INTERNATIONAL BANKING DIVISION

WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Surabaya 30 September 1976 (43 tahun).

PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 1999.

RIWAYAT JABATAN & DASAR PENUNJUKAN / HISTORY AND BASIS OF APPOINTMENT

Sejak 2019 menjabat sebagai Pgs. Pemimpin Divisi International Banking berdasarkan No. 058/4827/HCP/LHC/ Pgs tanggal 14 November 2019 terkait Penunjukan Pengganti Sementara Pemimpin Divisi International Banking.

Has been serving as the Act. Head of International Banking Division since 2019, based on the Decision Letter No. 058/4827/HCP/LHC dated November 14, 2019, regarding Appointment of Temporary Replacement of the Head of Internal Banking Division.

KARIR / CAREER

Bergabung di Bank Jatim tahun 2004. Sebelum menempati posisi saat ini, ia pernah menjabat sebagai Pemimpin Kantor Kas Terminal Peti Kemas Cabang Perak (2013), Pemimpin Cabang Pembantu Karah Cabang Utama Surabaya (2015), Senior Analyst Divisi Pembinaan Cabang (2015), Pemimpin Sub Divisi Operasional Luar Negeri (2016), Pemimpin Sub Divisi Marketing & Supporting Divisi International Banking (2017).

Prior to serving this current position, he served as the Head of Cash Office of Perak Container Terminal (2013), Karah Sub-Branch Manager of Surabaya Main Branch (2015), Senior Analyst for Branch Development Division (2015), Head of Foreign Operations Sub-Division (2016), and Head of International Banking Marketing and Supporting Sub-Division (2017).



Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat

JENIS PELATIHAN	PENYELENGGARA	TEMPAT	WAKTU
DEWAN KOMISARIS			
PEMANTAPAN BUDAYA PERUSAHAAN	Quality Leadership & Life Management	Jawa Timur	27-28 Oktober 2019
PENGUATAN MODAL BPD DALAM RANGKA MENJAGA DAYA SAING DAN FUNGSI <i>AGENT OF DEVELOPMENT</i>	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia	Mataram	22-Nov-19
"FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) MANUAL BOOK DEWAN KOMISARIS"	Pengurus Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI)	Bali	09-10 Desember 2019
PENERAPAN PSAK 71	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Jakarta	11 Maret 2019
SEMINAR NASIONAL BPDSI	ASBANDA	Bali	22-24 Agustus 2019
STRUKTUR ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALMA) YANG OPTIMAL	The Consumer Banking School	Jakarta	12-13 September 2019
SEMINAR NASIONAL <i>THE THIRD CONSUMER BANKING FORUM "THE TRUTH OF ECONOMIC TURMOIL & GEOPOLITICAL UNCERTAINTIES IN 2020"</i>	The Consumer Banking School	Jakarta	27-Nov-19
PEMANTAPAN BUDAYA PERUSAHAAN	Quality Leadership & Life Management	Jawa Timur	27-28 Oktober 2019
<i>HOW TO DESIGN PERFORMANCE INDICATORS FOR TOP MANAGEMENT</i>	Risk Management Guard	Jakarta	30 Agustus 2019
<i>FRAUD & FRAUD INVESTIGATION "TATA CARA MEMBANGUN FRAUD INVESTIGATOR (INTERNAL) DAN MENGUJI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI ANTI FRAUD"</i>	Risk Management Guard	Yogyakarta	9-10 Oktober 2019
PROGRAM PEMELIHARAAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO "PANCASILANOMICS DALAM PEMBANGUNAN SEKTOR KEUANGAN YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF NATIONWIDE RISK MANAGEMENT"	Badan Serifikasi Manajemen Risiko	Jakarta	28-Nov-19
UJIAN LEVEL-1 PROGRAM SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO TANGGAL 30 JUNI 2019	BSMR	Jakarta	30 Juni 2019
PELATIHAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL-1	BSMR	Jakarta	2019
PELATIHAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL-2	BSMR	Jakarta	2019
GCG ASSESSMENT & RISK-BASED APPROACH IN THE 4TH.	RMG	JAKARTA	14-15 November 2019
WORKSHOP REVIEW & UPDATING RISK BASED BANK RATING (RBBR)	INFOBANK	JAKARTA	19-20 November 2019
1. UJIAN LEVEL-2 PROGRAM SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO	BSMR	Jakarta	2019
DIREKSI			
1. ASSESMENT CENTER ASSESSOR CERTIFICATION (ACAC)	PPM Managemen	jakarta	2019
2. SHARING SESSION DIREKTORAT HUMAN CAPITAL		Aston Bogor	2019
3. SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 5	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Surabaya	2019
WORKSHOP BANKING STRATEGIC MANAGEMENT OVERVIEW UNTUK DIREKSI DAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR	PT Synergi Daya Utama	Surabaya	2-Sep-19

TRAINING ACTIVITIES OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND SENIOR EXECUTIVES

TYPE OF TRAINING	ORGANIZER	VENUE	DATE
BOARD OF COMMISSIONERS			
STRENGTHENING OF CORPORATE CULTURE	Quality Leadership & Life Management	East Java	Oct. 27-28, 2019
BPD CAPITAL STRENGTHENING TO MAINTAIN COMPETITIVENESS AND FUNCTION OF AGENT OF DEVELOPMENT	Communication Forum for Board of Commissioners of Indonesian Regional Development Banks	Mataram	Nov. 22, 2019
FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) ON MANUAL BOOK OF BOARD OF COMMISSIONERS	Management of Communication Forum for Board of Commissioners of Indonesian Regional Development Banks	Bali	Dec. 9-10, 2019
IMPLEMENTATION OF PSAK 71	Financial Services Authority (OJK)	Jakarta	Mar. 11, 2019
NATIONAL SEMINAR OF BPDSI	ASBANDA	Bali	Aug. 22-24, 2019
OPTIMUM ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALMA) STRUCTURE	The Consumer Banking School	Jakarta	Sept. 12-13, 2019
NATIONAL SEMINAR OF THE THIRD CONSUMER BANKING FORUM "THE TRUTH OF ECONOMIC TURMOIL & GEOPOLITICAL UNCERTAINTIES IN 2020"	The Consumer Banking School	Jakarta	Nov. 27, 2019
STRENGTHENING OF CORPORATE CULTURE	Quality Leadership & Life Management	East Java	Oct. 27-28, 2019
HOW TO DESIGN PERFORMANCE INDICATORS FOR TOP MANAGEMENT	Risk Management Guard	Jakarta	Aug. 30, 2019
FRAUD INVESTIGATION "PROCEDURES TO DEVELOP FRAUD INVESTIGATOR (INTERNAL) AND METHODS TO EXAMINE THE EFFECTIVENESS OF ANTI-FRAUD IMPLEMENTATION"	Risk Management Guard	Yogyakarta	Oct. 9-10, 2019
MAINTENANCE PROGRAM OF RISK MANAGEMENT CERTIFICATION "PANCASILANOMICS IN DEVELOPING FINANCIAL SECTOR THAT IS BASED ON FAIRNESS IN THE PERSPECTIVE OF NATIONWIDE RISK MANAGEMENT"	Badan Serifikasi Manajemen Risiko	Jakarta	Nov. 28, 2019
LEVEL 1 EXAMINATION - RISK MANAGEMENT CERTIFICATION PROGRAM	BSMR	Jakarta	June 30, 2019
TRAINING FOR RISK MANAGEMENT CERTIFICATION LEVEL 1	BSMR	Jakarta	2019
TRAINING FOR RISK MANAGEMENT CERTIFICATION LEVEL 2	BSMR	Jakarta	2019
GCG ASSESSMENT & RISK-BASED APPROACH IN THE 4TH.	RMG	Jakarta	Nov. 14-15, 2019
WORKSHOP REVIEW & UPDATING RISK-BASED BANK RATING (RBBR)	INFOBANK	Jakarta	Nov. 19-20, 2019
LEVEL 2 EXAMINATION - RISK MANAGEMENT CERTIFICATION PROGRAM	BSMR	Jakarta	2019
BOARD OF DIRECTORS			
ASSESSMENT CENTER ASSESSOR CERTIFICATION (ACAC)	PPM Managemen	Jakarta	2019
SHARING SESSION OF HUMAN CAPITAL DIRECTORATE		Aston Bogor	2019
RISK MANAGEMENT CERTIFICATION LEVEL 5	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Surabaya	2019
WORKSHOP ON BANKING STRATEGIC MANAGEMENT OVERVIEW FOR BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK	PT Synergi Daya Utama	Surabaya	Sept. 2, 2019

KONVENSI NASIONAL RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA RSKNI BIDANG MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)-OJK	Jakarta	13 Desember 2019
PROGRAM REFRESHMENT/PENYEGARAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO	BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)	Jakarta	16 Desember 2019
SERIFIKASI "QUALIFIED CHIEF RISK OFFICER (QRCO)"	Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera	Jakarta	22 Maret 2019
INTEGRATED GRC (GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE) & FINANCIAL CRIME CONFERENCE	Asia Anti Fraud	Jakarta	27-28 Juni 2019
EXECUTIVE RISK MANGEMENT REFRESHER PROGRAM DENGAN TEMA "ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ITS CHALLENGES IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0"	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)		13-22 Juli 2019
PELATIHAN "THE TRUTH OF ECONOMIC TURMOIL & GEOPOLITICAL UNCERTAINTIES IN 2020"	The Consumer Banking School		27-Nov-19
BASIC TREASURY MANAGEMENT	Expert Mitra Indonesia		09-11 Desember 2019
PELATIHAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL-5	Strategic Development Group (SDG)	Surabaya	28- Juni 2019
UJIAN LEVEL-5 PROGRAM SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO	BSMR(Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)	Surabaya	30 Juni 2019
WORKSHOP BANKING STRATEGIC MANAGEMENT OVERVIEW UNTUK DIREKSI DAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR	PT Synergi Daya Utama	Jakarta	2-Sep-19
WORKSHOP IT RISK MANAGEMENT STRATEGY IN BANKING	Risk Corner Consulting (RCC)	jakarta	02- 03 November 2019
INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY ITIL 4 FOUNDATION	PT. Duta Kuningan	Jakarta	30-Nov-19
WORKSHOP HUMAN CAPITAL PLAN 2020	PT. Duta Kuningan	Jakarta	19- 20 Desember 2019
COBIT 5 FOUNDATION WITHCASE STUDY EXAM	PT. Duta Kuningan	Jakarta	19-20 Desember 2019
SERTIFIKASI KEPATUHAN LEVEL EKSEKUTIF	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Jakarta	25-Sep-19
REFRESHMENT RISK MANAJEMEN & GENERAL BANKING LEVEL 3	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Jakarta	23 Juli 2019
KOMITE PERUSAHAAN			
PSAK 71 FOR BOARD OF COMMISSIONER	Risk Management Guard (RMG)	Jakarta	29-30 Agustus 2019
KEPALA DIVISI			
ASSESSMENT PEJABAT EKSEKUTIF ANGKATAN 2	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Jakarta	2019
WORKSHOP FRAUD PREVENTION AND DETECTION : FORENSIC DATA ANALYTICS APPROACH	Association Of Certified Fraud Examiners Acfe	Jakarta	2019
WORKSHOP TRANSFORMASI DIGITAL BANK 4.0 STRATEGI, LEADERSHIP DAN IMPLEMENTASINYA & PENGELOLA CYBERSECURITY, RISK DAN CONTROL DIGITAL BANK 4.0	Buce Darmawan	Surabaya	2019
INTEGRATED GRC (GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE) & FINANCIAL CRIME CONFERENCE	Asia Anti Fraud	Bali	2019
WORKSHOP IT INFRASTRUCTURE LIBRARY & EXAM CERTIFICATION	Leinad Agains	Bali	2019
PELATIHAN CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA) "CERTIFICATION PREPARATION PROGRAM	The Institue of Internal Auditors Indonesia	Jakarta	2019
CORPORATE CULTURE "STRATEGIC ENGAGEMENT WORKSHOP FOR CHANGE LEADERS BANK JATIM & CHANGE AGENT BREAKTHROUGH WORKSHOP	IBI (Ikatan Bankir Indonesia)	Surabaya	17 Juni 2019
PELATIHAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PEMBERIAN KREDIT	Media Edutama Indonesia (MEI)	Surabaya	21 Oktober 2019
PELATIHAN OVERVIEW PENERIMAAN LAYANAN PENSUNAN PT. TASPEN (PERSERO)	Taspen	Pusdiklat Bank Jatim Prigen	15 Maret 2019
PROGRAM REFRESHMENT/PENYEGARAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO	BSMR(Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)	Surabaya	16 Desember 2019

NATIONAL CONVENTION ON WORK COMPETENCE STANDARD PLANNING (RSKKN) OF MANAGEMENT FIELD	Indonesia's Banking Development Institute		July 13-22, 2019
REFRESHMENT PROGRAM FOR RISK MANAGEMENT CERTIFICATE	The Consumer Banking School		Nov. 27, 2019
QUALIFIED CHIEF RISK OFFICER (QRCO) CERTIFICATION	Expert Mitra Indonesia		Dec. 9-11, 2019
INTEGRATED GRC (GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE) & FINANCIAL CRIME CONFERENCE	Strategic Development Group (SDG)	Surabaya	June 28, 2019
EXECUTIVE RISK MANAGEMENT REFRESHER PROGRAM DENGAN TEMA "ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ITS CHALLENGES IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0".	BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)	Surabaya	June 30, 2019
TRAINING "THE TRUTH OF ECONOMIC TURMOIL & GEOPOLITICAL UNCERTAINTIES IN 2020"	PT Synergi Daya Utama	Surabaya	Sept. 2, 2019
BASIC TREASURY MANAGEMENT	Risk Corner Consulting (RCC)	Jakarta	Nov. 2-3, 2019
TRAINING OF RISK MANAGEMENT CERTIFICATION LEVEL 5	PT. Duta Kuningan	Jakarta	Nov. 30, 2019
RISK MANAGEMENT CERTIFICATION PROGRAM LEVEL 5 EXAMINATION	PT. Duta Kuningan	Jakarta	Dec. 19-20, 2019
WORKSHOP ON BANKING STRATEGIC MANAGEMENT OVERVIEW FOR BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK	PT. Duta Kuningan	Jakarta	Dec. 19-20, 2019
WORKSHOP IT RISK MANAGEMENT STRATEGY IN BANKING	Banking Professional Certification Agency	Jakarta	Sept. 25, 2019
INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARYITIL 4 FOUNDATION	Banking Professional Certification Agency	Jakarta	July 23, 2019
WORKSHOP HUMAN CAPITAL PLAN 2020	Risk Corner Consulting (RCC)	Jakarta	Nov. 2-3, 2019
COBIT 5 FOUNDATION WITH CASE STUDY EXAM	PT. Duta Kuningan	Jakarta	Nov. 30, 2019
COMPLIANCE CERTIFICATION OF EXECUTIVE LEVEL	PT. Duta Kuningan	Jakarta	Dec. 19-20, 2019
REFRESHMENT RISK MANAGEMENT & GENERAL BANKING LEVEL 3	PT. Duta Kuningan	Jakarta	Dec. 19-20, 2019
COMMITTEES OF THE BANK			
PSAK 71 FOR BOARD OF COMMISSIONERS	Risk Management Guard (RMG)	Jakarta	Aug. 29-30, 2019
KEPALA DIVISI			
ASSESSMENT FOR EXECUTIVE OFFICERS BATCH 2	Indonesia's Banking Development Institute (LPP)	Jakarta	2019
WORKSHOP FRAUD PREVENTION AND DETECTION: FORENSIC DATA ANALYTICS APPROACH	Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)	Jakarta	2019
WORKSHOP DIGITAL BANK 4.0 TRANSFORMATION, LEADERSHIP STRATEGY AND IMPLEMENTATION, AND MANAGEMENT OF CYBERSECURITY, RISK AND CONTROL DIGITAL BANK 4.0	Buce Darnawan	Surabaya	2019
INTEGRATED GRC (GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE) & FINANCIAL CRIME CONFERENCE	Asia Anti Fraud	Bali	2019
WORKSHOP IT INFRASTRUCTURE LIBRARY & EXAM CERTIFICATION	Leinad Agains	Bali	2019
CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA) TRAINING "CERTIFICATION PREPARATION PROGRAM"	The Institute of Internal Auditors Indonesia	Jakarta	2019
CORPORATE CULTURE "STRATEGIC ENGAGEMENT WORKSHOP FOR CHANGE LEADERS BANK JATIM & CHANGE AGENT BREAKTHROUGH WORKSHOP"	IBI (Indonesian Bankers Association)	Surabaya	June 17, 2019
ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS (AMDAL) TRAINING IN CREDIT PROVISION	Media Edutama Indonesia (MEI)	Surabaya	Oct. 21, 2019
TRAINING ON PENSIONER SERVICE RECIPIENT OVERVIEW OF PT TASPEN (PERSERO)	Taspen	Pusdiklat Bank Jatim Prigen	Mar. 15, 2019
SEKOLAH STAF DAN PEMIMPIN BANK (SESPIBANK) BATCH 71	Indonesia's Banking Development Institute (LPPI)	Jakarta	Aug. 5 - Sept. 20, 2019

SEKOLAH STAF DAN PEMIMPIN BANK (SESPIBANK) ANGKATAN 71	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Jakarta	05 Agustus-20 September 2019
BENCHMARKING PESERTA SESPIBANK ANGKATAN 71 KE SEATTLE LOS ANGELES-SAN FRANCISCO	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Los Angeles	06-15 September 2019
SOSIALISASI APU PPT DAN GRATIFIKASI	Direktorat Reserse Kriminal-Unit Tindak Pidana Perbankan Golkar Pangarso Handoko Subiako Dan Adang Oktori	Surabaya	10-Apr-19
KONSIYERING <i>CHANGE MANAGEMENT OFFICE (CMO) BPD SE-INDONESIA</i>	Asbanda	Jakarta	21-22 Maret 2019
PELATIHAN 8 <i>TEST OF ORGANIZATION STRUCTURE EFFECTIVENESS</i>	GML Performance Consulting	Jakarta	08-09 Oktober 2019
POTENSI PERTUMBUHAN USAHA BPD MELALUI PASAR MODAL DAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT BERBASIS <i>CREDIT SCORING</i>	Asbanda	Bali	03 Oktober 2019
PROGRAM REFRESHMENT/PENYEGARAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BMSR)	Surabaya	16 Desember 2019
<i>BALANCE LEADERSHIP TRAINING</i>	QLM	Pusdiklat Bank Jatim Prigen	24-25 September 2019
IMPLEMENTASI PBI DAN POJK APU PPT 12/POJK.01/2017 : IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MELALUI PARAMETER DAN ANALISA TRANSAKSI PENGGUNA JASA PADA PERBANKAN DAN PENYEDIA JASA SISTEM PEMBAYARAN	Infobank	Jakarta	30-31 Oktober 2019
WORKSHOP <i>FINANCIAL SUSTAINABILITY : PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN SEJALAN DENGAN POJK NO. 51/POJK.03/2017</i>	PT Nayottama Dinamika Indonesia	Jakarta	24-25 Oktober 2019
PSAK 71 <i>IMPAIRMENT DEEP DRIVE IN RISK MANAGEMENT PERSPECTIVE</i>	Bara	Jakarta	2019
PELATIHAN UJI KELAYAKAN KEPATUHAN DAN PENILAIAN KEMBALI PIHAK UTAMA	Risk Management Guard (RMG)	Jakarta	2019
<i>FUNDAMENTAL ERM (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT)</i>	Asia Anti Fraud	Bandung	2019
SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 5	Equivalent Training Center	Jakarta	13 Desember 2019
UJIAN LEVEL-5 PROGRAM SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Jakarta	14 Desember 2019
SOSIALISASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/21/PBI/2014 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK	Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)	Jakarta	2019
PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI PSAK 71 & 73 SERTA PENYUSUNAN POJK 51"	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (DKP)	Jakarta	2019
UJIAN IT <i>GOVERNANCE WITH COBIT INTERNATIONAL CERTIFICATION</i>	PT. Inixindo Widya Iswara Nusantara	Yogyakarta	20-Nov-19

BENCHMARKING FOR SESPIBANK PARTICIPANTS BATCH 71 TO SEATTLE AND LOS ANGELES, SAN FRANCISCO	Indonesia's Banking Development Institute (LPPI)	Los Angeles	Sept. 6-15, 2019
SOCIALIZATION OF APU PPT AND GRATIFICATION	Direktorat Reserse Kriminal-Unit Tindak Pidana Perbankan Golkar Pangarso Handoko Subiako dan Adang Oktor	Surabaya	Apr. 10, 2019
CONSIGNEERING OF CHANGE MANAGEMENT OFFICE FOR INDONESIAN BPDS	Asbanda	Jakarta	Mar. 21-22, 2019
TRAINING FOR TEST OF ORGANIZATION STRUCTURE EFFECTIVENESS	GML Performance Consulting	Jakarta	Oct. 8-9, 2019
POTENTIAL OF BPD BUSINESS GROWTH THROUGH CAPITAL MARKET AND CREDIT RISK MANAGEMENT BASED ON CREDIT SCORING	Asbanda	Bali	Oct. 3, 2019
RISK MANAGEMENT CERTIFICATION REFRESHMENT PROGRAM	BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)	Surabaya	Dec. 16, 2019
BALANCE LEADERSHIP TRAINING	QLM	Pusdiklat Bank Jatim Prigen	Sept. 24-25, 2019
IMPLEMENTATION OF PBI AND POJK APU PPT 12/ POJK.01/2017: IDENTIFICATION OF FINANCIAL TRANSACTION THROUGH PARAMETER AND ANALYSIS OF TRANSACTION OF SERVICE USERS IN BANKING SECTOR AND PAYMENT SYSTEM PROVIDER	Infobank	Jakarta	Oct. 30-31, 2019
WORKSHOP ON FINANCIAL SUSTAINABILITY: IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE IN LINE WITH POJK NO. 51/POJK.03/2017	PT Nayottama Dinamika Indonesia	Jakarta	Oct. 24-25, 2019
PSAK 71 IMPAIRMENT DEEP DRIVE IN RISK MANAGEMENT PERSPECTIVE	Bara	Jakarta	2019
TRAINING OF FIT-AND-PROPER TEST FOR MAIN PARTY	Risk Management Guard (RMG)	Jakarta	2019
FUNDAMENTAL OF ERM (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT)	Asia Anti Fraud	Bandung	2019
RISK MANAGEMENT CERTIFICATION LEVEL 5	Equivalent Training Center	Jakarta	Dec. 13, 2019
RISK MANAGEMENT CERTIFICATION PROGRAM LEVEL 5 EXAMINATION	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Jakarta	Dec. 14, 2019
SOCIALIZATION OF BANK INDONESIA REGULATION NO. 16/21/PBI/2014 REGARDING IMPLEMENTATION OF PRUDENT PRINCIPLE IN MANAGING NON-BANK CORPORATE FOREIGN DEBT	Indonesian Institute of Accountants (IAI)	Jakarta	2019
UNDERSTANDING AND IMPLEMENTATION OF PSAK 71 & 73 AND PREPARATION OF POJK 51	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (DKP)	Jakarta	2019
IT GOVERNANCE EXAMINATION WITH COBIT INTERNATIONAL CERTIFICATION	PT. Inixindo Widya Iswara Nusantara	Yogyakarta	Nov. 20, 2019
UJIAN IT GOVERNANCE WITH COBIT INTERNATIONAL CERTIFICATION	PT. Inixindo Widya Iswara Nusantara	Yogyakarta	20-Nov-19

Komposisi Pemegang Saham

SHAREHOLDERS COMPOSITION

TIPE SAHAM / TYPE OF SHARES	JUMLAH LEMBAR SAHAM / TOTAL SHARES	NILAI (RP) / VALUE (RP)
SERI A / SERIES A	24.000.000.000	6.000.000.00.000
SERI B / SERIES B	12.000.000.000	3.000.000.00.000

20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR / TOP-20 SHAREHOLDERS			
PEMEGANG SAHAM / SHAREHOLDERS	JUMLAH LEMBAR SAHAM / TOTAL SHARES	TIPE SAHAM / TYPE OF SHARE	%
PEMDA TINGKAT I PROVINSI JAWA TIMUR / EAST JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT	7.676.913.648	Saham Seri A / Series A Share	51,171
KOTA SURABAYA / SURABAYA CITY	319.243.457	Saham Seri A / Series A Share	2,13
KABUPATEN BANGKALAN / BANGKALAN REGENCY	36.793.459	Saham Seri A / Series A Share	0,25
KABUPATEN BANYUWANGI / BANYUWANGI REGENCY	270.036.117	Saham Seri A / Series A Share	1,80
KABUPATEN BLITAR / BLITAR REGENCY	39.496.395	Saham Seri A / Series A Share	0,26
KABUPATEN BOJONEGORO / BOJONEGORO REGENCY	300.288.632	Saham Seri A / Series A Share	2,00
KABUPATEN BONDOWOSO / BONDOWOSO REGENCY	87.207.357	Saham Seri A / Series A Share	0,58
KABUPATEN GRESIK / GRESIK REGENCY	220.213.170	Saham Seri A / Series A Share	1,47
KABUPATEN JEMBER / JEMBER REGENCY	111.866.875	Saham Seri A / Series A Share	0,75
KABUPATEN JOMBANG / JOMBANG REGENCY	26.792.899	Saham Seri A / Series A Share	0,18
KABUPATEN KEDIRI / KEDIRI REGENCY	144.925.510	Saham Seri A / Series A Share	0,97
KABUPATEN LAMONGAN / LAMONGAN REGENCY	101.318.315	Saham Seri A / Series A Share	0,68
KABUPATEN LUMAJANG / LUMAJANG REGENCY	67.206.045	Saham Seri A / Series A Share	0,45
KABUPATEN MADIUN / MADIUN REGENCY	32.660.478	Saham Seri A / Series A Share	0,22
KABUPATEN MAGETAN / MAGETAN REGENCY	19.594.792	Saham Seri A / Series A Share	0,13
KABUPATEN MALANG / MALANG REGENCY	253.635.445	Saham Seri A / Series A Share	1,69
KABUPATEN MOJOKERTO / MOJOKERTO REGENCY	78.373.801	Saham Seri A / Series A Share	0,52
KABUPATEN NGANJUK / NGANJUK REGENCY	77.217.854	Saham Seri A / Series A Share	0,51
KABUPATEN NGAWI / NGAWI REGENCY	215.763.995	Saham Seri A / Series A Share	1,44
KABUPATEN PACITAN / PACITAN REGENCY	53.520.271	Saham Seri A / Series A Share	0,36
KABUPATEN PAMEKASAN / PAMEKASAN REGENCY	40.592.928	Saham Seri A / Series A Share	0,27
KABUPATEN PASURUAN / PASURUAN REGENCY	44.610.500	Saham Seri A / Series A Share	0,30
KABUPATEN PONOROGO / PONOROGO REGENCY	23.555.596	Saham Seri A / Series A Share	0,16
KABUPATEN PROBOLINGGO / PROBOLINGGO REGENCY	125.931.454	Saham Seri A / Series A Share	0,84
KABUPATEN SAMPANG / SAMPANG REGENCY	101.175.235	Saham Seri A / Series A Share	0,67

KABUPATEN TUBAN / TUBAN REGENCY	217,418,404	Saham Seri A / Series A Share	1.45
KABUPATEN TULUNGAGUNG / TULUNGAGUNG REGENCY	70,697,975	Saham Seri A / Series A Share	0.47
KOTA BATU / BATU CITY	38,236,741	Saham Seri A / Series A Share	0.25
KOTA BLITAR / BLITAR CITY	16,987,084	Saham Seri A / Series A Share	0.11
KOTA KEDIRI / KEDIRI CITY	14,208,273	Saham Seri A / Series A Share	0.09
KOTA MADIUN / MADIUN CITY	134,064,427	Saham Seri A / Series A Share	0.89
KOTA MALANG / MALANG CITY	108,635,999	Saham Seri A / Series A Share	0.72
KOTA MOJOKERTO / MOJOKERTO CITY	72,091,751	Saham Seri A / Series A Share	0.48
KOTA PASURUAN / PASURUAN CITY	100,075,767	Saham Seri A / Series A Share	0.67
KOTA PROBOLINGGO / PROBOLINGGO CITY	17,397,927	Saham Seri A / Series A Share	0.12
KABUPATEN SIDOARJO / SIDOARJO REGENCY	370,155,850	Saham Seri A / Series A Share	2.47
KABUPATEN SITUBONDO / SITUBONDO REGENCY	76,374,593	Saham Seri A / Series A Share	0.51
KABUPATEN SUMENEP / SUMENEP REGENCY	144,228,431	Saham Seri A / Series A Share	0.96
KABUPATEN TRENGGALEK / TRENGGALEK REGENCY	84,640,532	Saham Seri A / Series A Share	0.56
KEPEMILIKAN SAHAM 5% ATAU LEBIH / 5% OR MORE SHARE OWNERSHIP			
PEMEGANG SAHAM / SHAREHOLDERS	Lembar Saham / Shares		%
PEMDA TINGKAT I PROVINSI JAWA TIMUR / EAST JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT	7,676,913,648		51.17
KELOMPOK PEMEGANG SAHAM / SHAREHOLDER GROUP			
KELOMPOK / GROUP	JUMLAH PEMEGANG SAHAM / TOTAL SHAREHOLDERS	JUMLAH SAHAM / TOTAL SHARES	%
KEPEMILIKAN INSTITUSI LOKAL / LOCAL INSTITUTION SHAREHOLDER	122	12,366,978,467	82.43
KEPEMILIKAN INSTITUSI ASING / FOREIGN INSTITUTION SHAREHOLDER	186	1,701,718,771	11.34
KEPEMILIKAN INDIVIDU LOKAL / LOCAL INDIVIDUAL SHAREHOLDER	14,247	932,231,444	6.21
KEPEMILIKAN INDIVIDU ASING / FOREIGN INDIVIDUAL SHAREHOLDER	19	1,441,900	0.01
PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN KLASIFIKASI / SHAREHOLDERS BASED ON CLASSIFICATION			
DOMESTIK / DOMESTIC	JUMLAH PEMEGANG SAHAM / TOTAL SHAREHOLDERS	JUMLAH SAHAM / TOTAL SHARES	%
PERORANGAN / INDIVIDUAL	13,942	927,605,944	6.18
PEMERINTAH DAERAH / REGIONAL GOVERNMENT	39	11,934,147,982	79.55
KARYAWAN / EMPLOYEE	305	4,625,500	0.03
KOPERASI / COOPERATIVE	2	103,600	0.00
YAYASAN / FOUNDATION	1	1,000,000	0.01
DANA PENSIUN / PENSION FUND	17	16,359,000	0.11
ASURANSI / INSURANCE	10	80,625,200	0.54
PERSEROAN TERBATAS / LIMITED LIABILITY COMPANY	36	116,505,612	0.78
REKSADANA / MUTUAL FUND	17	218,237,073	1.45
SUB TOTAL	14,369	13,299,209,911	88,64739
INTERNASIONAL / INTERNATIONAL			
PERORANGAN / INDIVIDUAL	19	1,441,900	0.01
BADAN USAHA ASING / FOREIGN BUSINESS INSTITUTION	186	1,701,718,771	11.34
SUB TOTAL	205	1,703,160,671	11.35261
TOTAL	14,574	15,002,370,582	100

KEPEMILIKAN SAHAM KOMISARIS & DIREKSI / SHARE OWNERSHIP OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

NAMA / NAME	JABATAN / POSITION	KEPEMILIKAN / OWNERSHIP
AKHMAD SUKARDI	Komisaris Utama / President Commissioner	0,006%
HADI SANTOSO	Direktur Perseroan / Director	0,006%
RIZYANA MIRDA	Direktur Risiko Bisnis / Business Risk Director	0,007%
FERDIAN TIMUR SATYAGRAHA	Direktur Keuangan / Finance Director	0,032%
TOTAL		0,05%

Struktur Grup Perusahaan

GROUP STRUCTURE



51,17%

Pemerintah Provinsi Jawa Timur
East Java Provincial Government

bankjatim

Daftar Entitas Anak & Entitas Asosiasi

LIST OF SUBSIDIARY AND ASSOCIATE ENTITIES

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tidak memiliki anak perusahaan hingga akhir tahun 2019. Sementara itu Bank Jatim memiliki 39 entitas asosiasi sebagai pemegang saham, sebagai berikut:

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur does not have any subsidiary as of the end of 2019. Meanwhile, the Bank has 38 associate entities as follows:

ENTITAS ASOSIASI / ASSOCIATE ENTITY	BIDANG USAHA / LINE OF BUSINESS	BERDIRI / ESTABLISHED IN	KEPEMILIKAN (%) / OWNERSHIP (%)
PEMDA TINGKAT I PROVINSI JAWA TIMUR / EAST JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT	Pemerintahan / Government	1945	51.17
KOTA SURABAYA / SURABAYA CITY	Pemerintahan / Government	1293	2.13
KABUPATEN BANGKALAN / BANGKALAN REGENCY	Pemerintahan / Government	1531	0.25
KABUPATEN BANYUWANGI / BANYUWANGI REGENCY	Pemerintahan / Government	1771	1.8
KABUPATEN BLITAR / BLITAR REGENCY	Pemerintahan / Government	1906	0.26
KABUPATEN BOJONEGORO / BOJONEGORO REGENCY	Pemerintahan / Government	1677	2
KABUPATEN BONDOWOSO / BONDOWOSO REGENCY	Pemerintahan / Government	1819	0.58
KABUPATEN GRESIK / GRESIK REGENCY	Pemerintahan / Government	1487	1.47
KABUPATEN JEMBER / JEMBER REGENCY	Pemerintahan / Government	1929	0.75
KABUPATEN JOMBANG / JOMBANG REGENCY	Pemerintahan / Government	1910	0.18
KABUPATEN KEDIRI / KEDIRI REGENCY	Pemerintahan / Government	879	0.97
KABUPATEN LAMONGAN / LAMONGAN REGENCY	Pemerintahan / Government	1569	0.68
KABUPATEN LUMAJANG / LUMAJANG REGENCY	Pemerintahan / Government	1255	0.45
KABUPATEN MADIUN / MADIUN REGENCY	Pemerintahan / Government	1918	0.22
KABUPATEN MAGETAN / MAGETAN REGENCY	Pemerintahan / Government	1675	0.13
KABUPATEN MALANG / MALANG REGENCY	Pemerintahan / Government	1914	1.69
KABUPATEN MOJOKERTO / MOJOKERTO REGENCY	Pemerintahan / Government	1918	0.52
KABUPATEN NGANJUK / NGANJUK REGENCY	Pemerintahan / Government	937	0.51
KABUPATEN NGAWI / NGAWI REGENCY	Pemerintahan / Government	1358	1.44
KABUPATEN PACITAN / PACITAN REGENCY	Pemerintahan / Government	1744	0.36
KABUPATEN PAMEKASAN / PAMEKASAN REGENCY	Pemerintahan / Government	1530	0.27
KABUPATEN PASURUAN / PASURUAN REGENCY	Pemerintahan / Government	1918	0.3
KABUPATEN PONOROGO / PONOROGO REGENCY	Pemerintahan / Government	1496	0.16
KABUPATEN PROBOLINGGO / PROBOLINGGO REGENCY	Pemerintahan / Government	1918	0.84
KABUPATEN SAMPANG / SAMPANG REGENCY	Pemerintahan / Government	1624	0.67
KABUPATEN SIDOARJO / SIDOARJO REGENCY	Pemerintahan / Government	1859	2.47
KABUPATEN SITUBONDO / SITUBONDO REGENCY	Pemerintahan / Government	1818	0.51
KABUPATEN SUMENEP / SUMENEP REGENCY	Pemerintahan / Government	1268	0.96
KABUPATEN TRENGGALEK / TRENGGALEK REGENCY	Pemerintahan / Government	1194	0.56
KABUPATEN TUBAN / TUBAN REGENCY	Pemerintahan / Government	1293	1.45
KABUPATEN TULUNGAGUNG / TULUNGAGUNG REGENCY	Pemerintahan / Government	1205	0.47
KOTA BATU / BATU CITY	Pemerintahan / Government	2001	0.25
KOTA BLITAR / BLITAR CITY	Pemerintahan / Government	1906	0.11
KOTA KEDIRI / KEDIRI CITY	Pemerintahan / Government	879	0.09

KOTA MADIUN / MADIUN CITY	Pemerintahan / Government	1918	0.89
KOTA MALANG / MALANG CITY	Pemerintahan / Government	1914	0.72
KOTA MOJOKERTO / MOJOKERTO CITY	Pemerintahan / Government	1918	0.48
KOTA PASURUAN / PASURUAN CITY	Pemerintahan / Government	1918	0.67
KOTA PROBOLINGGO / PROBOLINGGO CITY	Pemerintahan / Government	1918	0.12

Kronologi Pencatatan Saham

SHARE LISTING CHRONOLOGY

Pada 2012, Bank Jatim menawarkan saham baru sebanyak 2.983.537.000 sebesar 20% saham biasa atas nama Seri B, selain itu Bank Jatim juga mencatatkan 11.784.971.132 saham Seri A sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berjumlah 14.768.508.132 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan juta ribu seratus tiga puluh dua) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum.

Sedangkan sejumlah 149.176.850 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh) saham atau 1% (satu persen) saham milik Pemegang Saham Pendiri tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 ("PP No.29") tentang Pembelian Saham Bank Umum. Saham sebesar 1% (satu persen) dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek adalah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dari jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) akan dijatahkan kepada karyawan dan Manajemen Perseroan melalui Program ESA (*Employee Stock Allocation*) dan Bank Jatim telah melaksanakan program MESOP (Management Employee Stock Option Plans) daritahun 2016-2019 dengan penambahan saham baru (SERI B) sebesar 84.685.600 lembar saham. Sehingga total Modal Disetor menjadi sebesar Rp. 3.750.592.645.500 atau senilai 15.002.370.582 lembar saham

Jumlah saham yang telah diterbitkan hingga 31 Desember 2019 sebagai berikut:

In 2012, Bank Jatim offered new shares amounting to 2,983,537,000 or 20% Series B ordinary shares. In addition, the Bank listed 11,784,971,132 Series A shares making the total shares of the Bank listed on Indonesia Stock Exchange amounted to 14,768,508,132 (fourteen billion seven hundred sixty-eight million five hundred eight thousand one hundred thirty-two) shares or 99% of the entire Issued and Paid-in Capital of the Bank after Public Offering.

Meanwhile, as many as 149,176,850 (one hundred forty-nine million one hundred seventy-six thousand eight hundred fifty) shares or 1% (one per cent) shares of Founding Shareholder are not listed in order to comply with the Government Regulation No. 29 of 1999 (PP No. 29) regarding Share Purchase of Commercial Bank. The 1% shares of the Bank which are not listed on the Stock Exchange are owned by the East Java Provincial Government.

Of the offered shares, as many as 10% (ten per cent) shall be allocated to the employees and management of the Bank through the ESA (Employee Stock Allocation) Program at Offering Price and Bank Jatim has implemented the MESOP (Management Employee Stock Option Plans) program from 2016-2019 with additional shares new (SERI B) of 84,685,600 shares. So that the total Paid Up Capital is Rp. 3,750,592,645,500 or 15,002,370,582 shares.

Total shares issued as of December 31, 2019, are as follows:

TAHUN / YEAR	PENERBITAN SAHAM BARU (SERI B) / ISSUANCE OF NEW SHARES (SERIES B)		TANGGAL PENCATATAN / LISTING DATE	JUMLAH MODAL DISETOR / TOTAL PAID CAPITAL	
	JUMLAH SAHAM / TOTAL SHARES	KETERANGAN / DESCRIPTION		JUMLAH MODAL DISETOR / TOTAL PAID CAPITAL	RP
2012	2.983.537.000	Penawaran Umum Perdana / Initial Public Offering	Juli 2012 / July 2012	14.917.684.982	3.729.421.245.500
2016	27.372.600	MESOP Exercise II 2016	Agustus 2016 / August 2016	14.945.057.582	3.736.264.395.500
2017	1.241.600	MESOP Exercise I 2017	Februari 2017 / February 2017	14.946.299.182	3.736.574.795.500
2017	28.292.200	MESOP Exercise II 2017	Agustus 2017 / August 2017	14.974.591.382	3.743.647.845.500
2018	1.261.200	MESOP Exercise I 2018	Februari 2018 / February 2018	14.975.852.582	3.743.963.145.500
2018	2.282.400	MESOP Exercise II 2018	Agustus 2018 / August 2018	14.978.134.982	3.744.533.745.500
2019	15.638.000	MESOP Exercise I 2019	Februari 2019 / February 2019	14.993.772.982	3.748.443.245.500
2019	8.597.600	MESOP Exercise II 2019	Agustus 2019 / August 2019	15.002.370.582	3.750.592.645.500

JENIS SAHAM / TYPE OF SHARES	JUMLAH SAHAM / TOTAL SHARES	BURSA EFEK / STOCK EXCHANGE
SERI A / SERIES A	11.934.147.982	Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange
SERI B / SERIES B	3.068.222.600	Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange

Kronologi Pencatatan Efek Lain

OTHER SECURITIES LISTING CHRONOLOGY

Pada 2019, Bank Jatim tidak mencatatkan efek lain di pasar modal sehingga informasi mengenai obligasi & Pinjaman tidak dapat diungkapkan.

In 2019, Bank Jatim did not list other securities on the capital market. Hence, there is no information on bonds and other securities of the Bank.



Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS

AKUNTAN PUBLIK / PUBLIC ACCOUNTANT

KANTOR AKUNTAN PUBLIK "PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN"

Jl. Ngagel Jaya no. 90, Surabaya 60283

Telp : (+62-31) 501 2161

Fax : (+62-31) 501 2335

Email : sby-.office@pkfhadiwinata.com

Web : www.pkf.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK / SHARE REGISTRAR

PT DATINDO ENTRYCOM

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120

Telp : (+62-21) 3508077

Fax : (+62-21) 3508078

LEMBAGA PEMERINGKAT / RATING AGENCY

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)

Panin Tower-Senayan City, Lantai 17,
Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 12170

Telp : (62 21) 727 82380

Fax : (62 21) 727 82370

Web : www.pefindo.com

KJPP SUSAN WIDJOJO & REKAN

Menara Batavia, lantai 28 Jalan KH Mas Mansyur Kav.
120, Jakarta 10220

Telp : (+62-21) 5795 0155

KUSTODIAN / CUSTODIAN

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta 12190

Telp : (62 21) 515 2855

Fax : (62 21) 5299 1199

Web : www.ksei.co.id

PENJAMIN PELAKSANA EFEK / UNDERWRITER

PT BAHANA SEKURITAS

Graha Niaga, Lantai 19,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

Telp : (62-21) 250 5678

Fax : (62-21) 250 5087

PT MANDIRI SEKURITAS

Plaza Mandiri, Lantai 28-29,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190
Indonesia

Telp : (62-21) 526 5678

Fax : (62-21) 526 5050

NOTARIS / NOTARY

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.KN

Jl. Raya Dharmahusada Indah 55, Surabaya

Telp : (62-31) 594 2554

Fax : (62-31) 594 5494

SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.

Jl. Kebon rojo No. 2 CC, Surabaya 60175, Indonesia

Telp : (62-31) 351 1282, 352 1285, 353 2822

Fax : (62-31) 352 2311

LEMBAGA PROFESI DAN PENUNJANG PASAR MODAL / CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONAL AND INSTITUTION	NAMA LEMBAGA PROFESI DAN PENUNJANG PASAR MODAL / NAME OF CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONAL AND INSTITUTION	JASA YANG DIBERIKAN / SERVICE RENDERED	KOMISI (FEE) DALAM JUTAAN RP (TERMASUK PAJAK) / FEE (IN RP MILLION, INCL. TAX)	PERIODE PENUGASAN / ASSIGNMENT PERIOD
KANTOR AKUNTAN PUBLIK / PUBLIC ACCOUNTING FIRM	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Audit Laporan Keuangan Audit of Financial Statements	-	Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year
BIRO ADMINISTRASI EFEK / SHARE REGISTRAR	PT Datindo Entrycom	Mencatat kepemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek Recording Securities ownership and distribution of rights related to Securities	-	Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year
LEMBAGA PEMERINGKAT EFEK / RATING AGENCY	1. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) 2. KJPP Susan Widjojo & Rekan	Menerbitkan peringkat bagi penerbitan surat utang Issuing rating for securities issuance	-	Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year
PENJAMIN PELAKSANA EFEK / UNDERWRITER	1. PT Bahana Sekuritas 2. PT Mandiri Sekuritas	Menjamin penjualan efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten Guaranteeing securities trading and payment of all securities issued to the issuer	-	Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year
KUSTODIAN / CUSTODIAN	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Tempat penitipan kolektif aset seperti saham, obligasi, serta melaksanakan tugas administrasi kliennya. As a collective depository for assets, such as shares and bonds, and other administrative tasks from its clients	-	Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year
NOTARIS / NOTARY	1. Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn 2. Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H.	Membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan. Preparing deeds on all actions, agreements, and decisions	-	Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year



Nama dan Alamat Kantor Cabang

NAME AND ADDRESS OF BRANCH OFFICES

NAMA / NAME	ALAMAT / ADDRESS	TELP	FAX
CABANG UTAMA SURABAYA / SURABAYA MAIN BRANCH	Jl. Basuki Rakhmad 98-104, Surabaya	(031) 5310090-99	(031) 5470159
CABANG BANYUWANGI / BANYUWANGI BRANCH	Jl. Basuki Rahmat no. 156 Banyuwangi	(0333) 421755/426755	(0333) 421555
CABANG JEMBER / JEMBER BRANCH	Jl. A. Yani no. 3A RT 01 RW 03 Patrang Jember 68137	(0331) 484605-07	(0331) 428376 / 481502
CABANG MALANG / MALANG BRANCH	Jl. Jaksa Agung Suprpto 26-28 Malang	(0341) 321961	(0341) 325085 / 365212
CABANG MADIUN / MADIUN BRANCH	Jl. Jawa No. 43 Madiun	(0351) 464432 / 459202 / 476328 / 476315	(0351) 463665 / 491499
CABANG KEDIRI / KEDIRI BRANCH	Jl. P. Kusuma Bangsa No. 122 Kediri	(0354) 680270	(0354) 682924
CABANG PAMEKASAN / PAMEKASAN BRANCH	Jl. Panglima Sudirman No. 5 Pamekasan	(0324) 322451 / 322923	(0324) 322932
CABANG BOJONEGORO / BOJONEGORO BRANCH	Jl. Mastrip 70 Bojonegoro	(0353) 882137 / 889753	(0353) 881028 / 891772
CABANG LUMAJANG / LUMAJANG BRANCH	Jl. Alun-alun Barat 4 Lumajang	(0334) 881683 / 882111	(0334) 882830
CABANG NGAWI / NGAWI BRANCH	Jl. Yos Sudarso 32 Kel. Margomulyo Kec. Ngawi Kab. Ngawi	(0351) 749222 / 749214	(0351) 749370 / 743906
CABANG JOMBANG / JOMBANG BRANCH	Jl. K.H. Wakhid Hasyim 36, Jombang	(0321) 862217	(0321) 861952
CABANG KRAKSAAN / KRAKSAAN BRANCH	Jl. Raya PB. Sudirman 144, Kraksaan	(0335) 841382 / 843184	(0335) 841124 / 842451
CABANG PROBOLINGGO / PROBOLINGGO BRANCH	Jl. Soekarno-Hatta 311 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo	(0335) 422552 / 421879	(0335) 422314
CABANG BLITAR / BLITAR BRANCH	Jl. HOS Cokroaminoto 36-38, Blitar	(0342) 801462 / 806089 / 807333	(0342) 802262 / 801353
CABANG TULUNGAGUNG / TULUNGAGUNG BRANCH	Jl. I Gusti Ngurah Rai 1, Tulungagung	(0355) 321105 / 321106 / 327581	(0355) 321104 / 320407
CABANG TUBAN / TUBAN BRANCH	Jl. Basuki Rakhmad 13 Tuban	(0356) 322725	(0356) 321169
CABANG MOJOKERTO / MOJOKERTO BRANCH	Jl. A. Yani No. 20, Mojokerto	(0321) 321261 / 323002	(0321) 396112 / 395950 / 395501
CABANG SUMENEP / SUMENEP BRANCH	Jl. Trunojoyo 49 Sumenep	(0328) 662557 / 662487	(0328) 665780
CABANG SAMPANG / SAMPANG BRANCH	Jl. K.H. Wakhid Hasyim 111, Sampang	(0323) 321226 / 323400 / 325004	(0323) 321493 / 325006
CABANG BANGKALAN / BANGKALAN BRANCH	Jl. K.H. Moh. Kholil 38 Demangan Bangkalan	(031) 3095502 / 3093416 / 3099085	(031) 3095722
CABANG PASURUAN / PASURUAN BRANCH	Jl. Pahlawan No. 18 Pasuruan	(0343) 421061/411609/426086/431957	(0343) 426085/432797

CABANG NGANJUK / NGANJUK BRANCH	Jl. Gatot Subroto 8 Nganjuk	(0358) 325100 / 325101 / 323910	(0358) 324420
CABANG TRENGGALEK / TRENGGALEK BRANCH	Jl. Panglima Sudirman No. 145 Trenggalek	(0355) 791676 / 791675	(0355) 792945
CABANG PONOROGO / PONOROGO BRANCH	Jl. Diponegoro No. 42-44 Ponorogo	(0352) 461157 / 461158 / 484222	(0352) 484260 / 485485
CABANG PACITAN / PACITAN BRANCH	Jl. A. Yani No. 82 Pacitan	(0357) 881320 / 881321	(0357) 882889 / 886456
CABANG GRESIK / GRESIK BRANCH	Jl. Dr. Sutomo 181, Gresik	(031) 3982311 / 3982313 / 3980580	(031) 3973976 / 3990937
CABANG SIDOARJO / SIDOARJO BRANCH	Jl. Jend. A. Yani 29 Sidoarjo	(031) 8956108 / 8956109	(031) 8921631
CABANG LAMONGAN / LAMONGAN BRANCH	Ruko Permata Lamongan Jl. PB Sudirman No 72 Lamongan	(0322) 321810 / 322769 / 311633 / 318508	(0322) 321494
CABANG SITUBONDO / SITUBONDO BRANCH	Jl. Basuki Rahmat 235 Situbondo	(0338) 674982 / 672123 / 674983	(0338) 672017
CABANG BONDOWOSO / BONDOWOSO BRANCH	Jl. Letnan Karsono No.1 Bondowoso	(0332) 427456 / 427447	(0332) 423524
CABANG MAGETAN / MAGETAN BRANCH	Jl. Pahlawan No. 2 Magetan	(0351) 895378 / 891441 / 895333	(0351) 894715 / 895384
CABANG DR. SOETOMO SURABAYA / DR. SOETOMO SURABAYA BRANCH	Jl. Prof. Mustopo 6-8 Surabaya	(031) 5036676 / 5501718 / 5018762	(031) 5020121
CABANG PERAK SURABAYA / PERAK SURABAYA BRANCH	Jl. Perak Timur 262-264 Surabaya	(031) 3282635-37	(031) 3282508 / 3299063
CABANG KANGEAN / KANGEAN BRANCH	Jl. Sriwijaya No. 431 Kec. Arjasa Kep. Kangean Sumenep	(0327) 312200 / 312030 / 312161	(0327) 312040
CABANG JAKARTA / JAKARTA BRANCH	Jl. Thamrin Boulevard CT.LD1 No.1 CT.LD02 Jakarta Pusat	(021) 29625615-17	(021) 29625618
CABANG BATU / BATU BRANCH	Jl. Panglima Sudirman No. 88 Kel. Pesanggrahan Kec. Batu Batu	(0341) 511205 / 511206	(0341) 590522 / 598550
CABANG BAWEAN / BAWEAN BRANCH	Jl. Kawedanan No. 3, Sangkapura Bawean	(0325) 422470 / 422770 / 423801 / 421558	(0325) 422471
CABANG PARE / PARE BRANCH	Jl. Kusuma Bangsa No. 6 Pare	(0354) 397850 / 397851	(0354) 392799
CABANG HR. MUHAMMAD SURABAYA / HR. MUHAMMAD SURABAYA BRANCH	Jl. HR. Muhammad No. 29 Surabaya	(031) 99147557 / 99141887	(031) 99147868 / 99147763
CABANG KEPANJEN / KEPANJEN BRANCH	Jl. Kawi No. 28, Kepanjen	(0341) 398140	(0341) 398141
CABANG BATAM / BATAM BRANCH	Jl. Pembangunan Komplek Ruko Citra Mas Penuin Blok A-05 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam	(0778) 8071030	(0778) 7602059

Informasi Website

INFORMATION ON WEBSITE

Ketersediaan informasi pada website mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, maka Bank Jatim telah melengkapi *website* perusahaan dengan beberapa informasi penting seperti Informasi mengenai pemegang saham, struktur organisasi perusahaan, analisis kinerja keuangan serta profil Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, *website* Bank Jatim juga menyediakan informasi sebagai berikut:

The availability of information on website refers to the Regulation of OJK No. 8/POJK.04/2015 regarding Website of Issuers or Public Companies. Thus, Bank Jatim has provided various key information on its official website, such as information on shareholders, organizational structure, financial performance analysis, as well as profiles of Board of Commissioners and Board of Directors. In addition, the Bank's website displays the following information

KEBUTUHAN ANDA

Berisi tentang segala informasi kebutuhan nasabah dan masyarakat yang meliputi Simpanan, Pembiayaan, Bisnis, Syariah, Layanan, Hubungan Investor, Tata Kelola Perusahaan, Bank Jatim Peduli, Suku Bunga dan Informasi

YOUR NEEDS

Contains information on the needs of customers and the public, encompassing Savings, Loans, Business, Sharia, Services, Investor Relations, Corporate Governance, Bank Jatim Peduli, Interest Rates, and Info.

PROFIL

Berisi tentang Profil Perusahaan, Manajemen, dan Penghargaan yang telah diraih.

PROFILE

Contains information on Bank's Profile, Management, and Awards.

KARIR

Berisi informasi mengenai Manajemen Karir & Info Rekrutmen Bank Jatim.

CAREER

Contains information on Career Management and Information on Recruitment.

MITRA UMKM

Berisi informasi tentang UMKM binaan Bank Jatim yang dapat diakses oleh masyarakat & nasabah Bank Jatim.

MSME PARTNER

Contains information on MSME Partners of Bank Jatim accessible by the public and the Bank's customers.

INTERNET BANKING

Berisi panduan penggunaan internet banking Bank Jatim dan Portal Internet Banking.

INTERNET BANKING

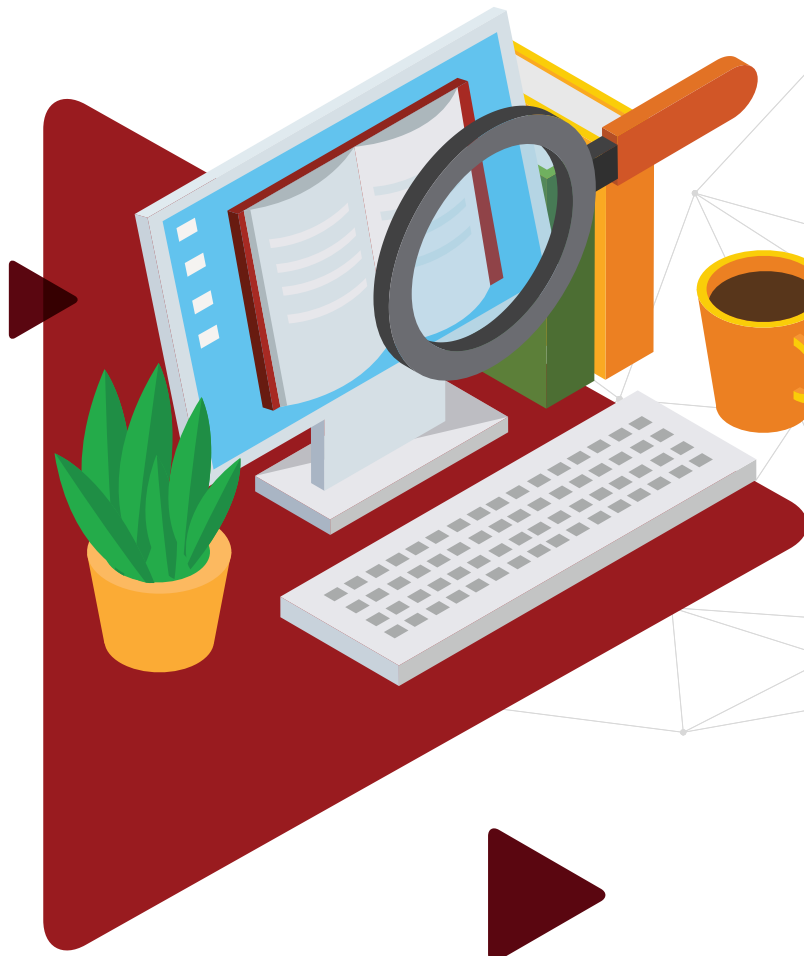
Contains information on Bank Jatim's Internet Banking usage guide and Internet Banking Portal.

DAFTAR ONLINE

Berisi tentang pilihan e-form kredit yang memberikan kemudahan calon nasabah dalam melakukan pengajuan kredit.

ONLINE REGISTRATION

Contains e-form Credit option that can facilitate prospective customers in making credit application.

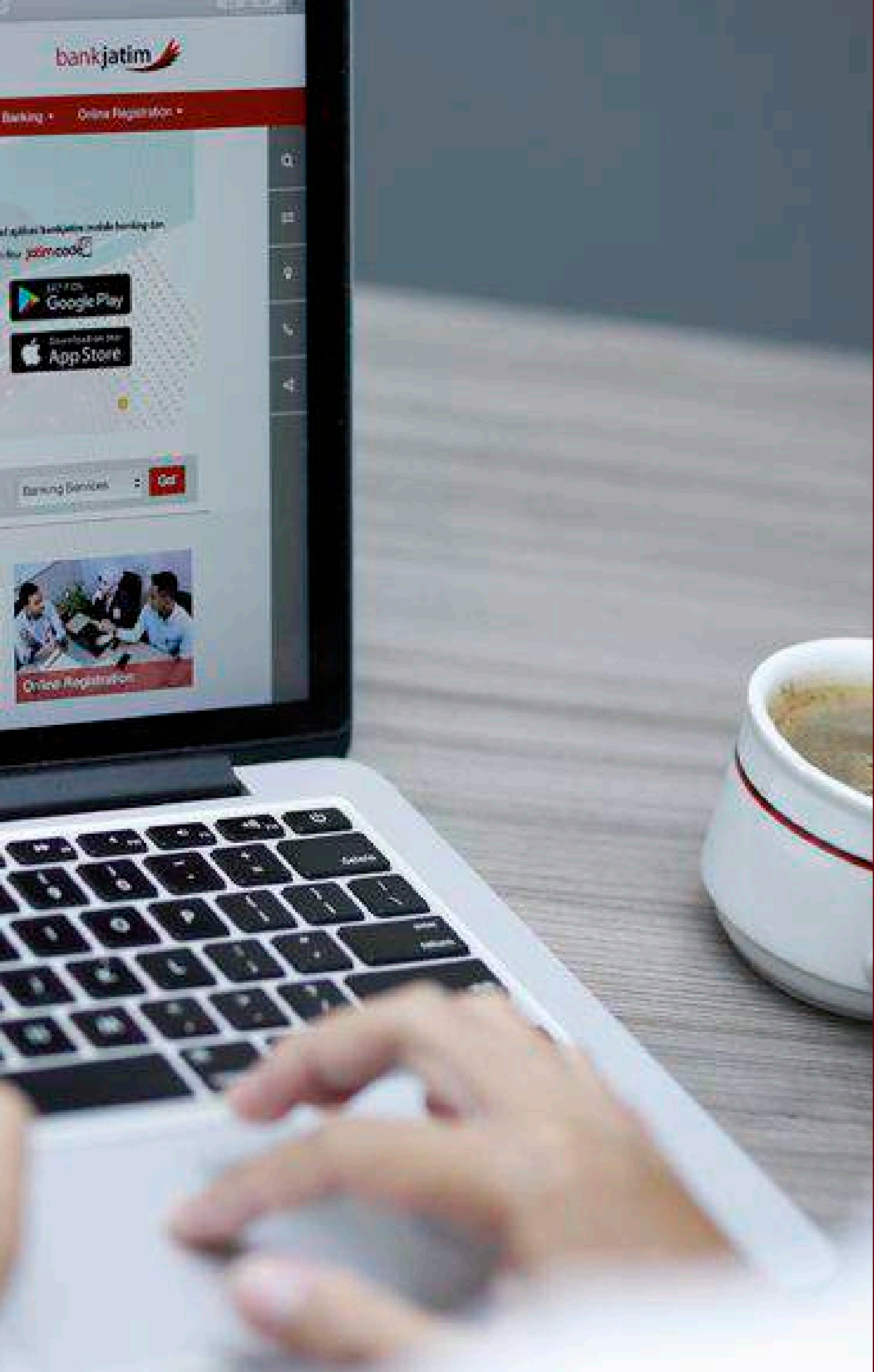


4

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

OVERVIEW ON BUSINESS SUPPORT





Sumber Daya Manusia

HUMAN CAPITAL

Di era industri Digital banking 4.0 baik dalam skala regional, nasional maupun internasional, maka perlu ditopang oleh sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi yang telah ditetapkan bank dalam rangka memenangkan persaingan di era *Digital Banking 4.0*. Manajemen berkomitmen terhadap perkembangan struktur organisasi, *job description* maupun penilaian kinerja secara obyektif serta melakukan evaluasi terkait kebijakan promosi pegawai sehingga mampu meningkatkan kemampuan bersaing bank. Manajemen terus menjaga komitmennya untuk memperlakukan seluruh pegawai sebagai aset berharga dengan melakukan perencanaan yang seksama terhadap kebutuhan pegawai yang selaras dengan pertumbuhan bisnis.

In this 4.0 industry era of Digital Banking, reliable human resources with the proper banking competencies is necessary in order to win the competition. To that end, the management is committed to implementing organizational structure development, clear job description, and objective performance evaluation, and conducting evaluations regarding employee promotion policies so as to increase the Bank's competitiveness. The management continues to maintain the commitment to treating all employees as valuable assets by carefully planning the needs of employees in line with business growth.

FOKUS DAN RENCANA STRATEGIS

Adanya persaingan yang semakin kompetitif dalam kondisi disrupsi yang bersifat digital (*digital disruption*) saat ini Bank dihadapkan pada pilihan untuk menerapkan *digitalized banking* dan meningkatkan kemampuan pegawai dalam bidang teknologi. Terkait hal tersebut dan dihubungkan dengan Sumber daya manusia yang merupakan aset yang penting bagi perusahaan sehingga guna mengatasi kondisi tersebut diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi khusus di bidang digital dan teknologi. Selanjutnya sebagai respon atas tantangan tersebut, Bank Jatim melalui Divisi *Human Capital* telah menyusun fokus dan rencana strategis sepanjang tahun 2019 yang berkesinambungan dari tahun sebelumnya, dengan bertumpu kepada:

PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAJAI

Bank secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi pegawai sehingga pegawai memiliki kemampuan dasar perbankan digital, perkreditan, pendanaan, transaksi devisa ataupun kemampuan lainnya sesuai dengan strategi bisnis perusahaan sehingga diharapkan dapat diperoleh inovasi - inovasi baru dalam pengembangan produk bisnis baru bank yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini.

FOCUS AND STRATEGIC PLAN

The increasingly tight competition in the current digital disruption conditions provided the Bank with the choice to implement digitalized banking and improve employees' ability in the field of technology. With regard to this, Human Capital remains the most significant assets for the Bank; and in order to be able to address the challenges, employees with specific competence in the digital and technology fields are highly required. In response to these challenges, Bank Jatim, through the Human Capital Division, has prepared strategic focus and plans for 2019 which is a continuation of the strategies of the previous year, namely by relying on:

EMPLOYEE COMPETENCY IMPROVEMENT

The Bank is continuously improving employees' competencies so as to provide them with basic capabilities of digital banking, credit, funding, foreign exchange transactions, or other capabilities in accordance with the Bank's business strategy so that new innovations can be obtained in developing new business products of the Bank that are in line with current market needs.

REMUNERASI BERBASIS KINERJA

Bank menyempurnakan sistem remunerasi pegawai yang kompetitif dan menyesuaikan dengan perkembangan bank melalui penyesuaian gaji dan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja.

PERFORMANCE-BASED REMUNERATION

The Bank refines a competitive employee remuneration system and adjusts it to the Bank's development through salary adjustments and the provision of additional performance-based income.

DIGITALIZING HUMAN CAPITAL

Menjalankan strategi otomasi layanan SDM untuk mendukung strategi perbankan digital. Bank Jatim memperbaiki proses kerja secara berkesinambungan dan menyeluruh melalui pengembangan proses otomasi dan digitalisasi sistem sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas layanan kepegawaian.

HUMAN CAPITAL DIGITALIZATION

The Bank implements Human Capital (HC) service automation strategy to support digital banking strategies. Bank Jatim improves the work process in a continuous and comprehensive manner through the development of the automation process and the digitalization of the system so that it can improve the effectiveness, efficiency, and quality of staffing services.

CULTURE BUILDING

Pengembangan *Corporate Culture* yang bertujuan membangun budaya kerja yang mendorong produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan positif serta menciptakan hubungan yang harmonis antar pegawai. Menjalankan Program internalisasi dan penyalarsan Nilai Utama dan Budaya Bank yang berkesinambungan sehingga dapat merespon tantangan dan perubahan yang terjadi dan menjadikan pegawai bankjatim dapat menyesuaikan diri dengan cepat, lebih dinamis dan agile tanpa meninggalkan aspek profesionalisme dan integritas.

CULTURE BUILDING

Development of Corporate Culture aiming at building a work culture that encourages productivity and creates an open and positive work environment as well as harmonious relationships among employees. The Bank implements a program of internalization and alignment of its Main Values and Culture so that it can respond to challenges and changes and make its employees able to adjust quickly, more dynamically, and agile by continuously taking into account the aspects of professionalism and integrity.



STRUKTUR PENGELOLA SDM

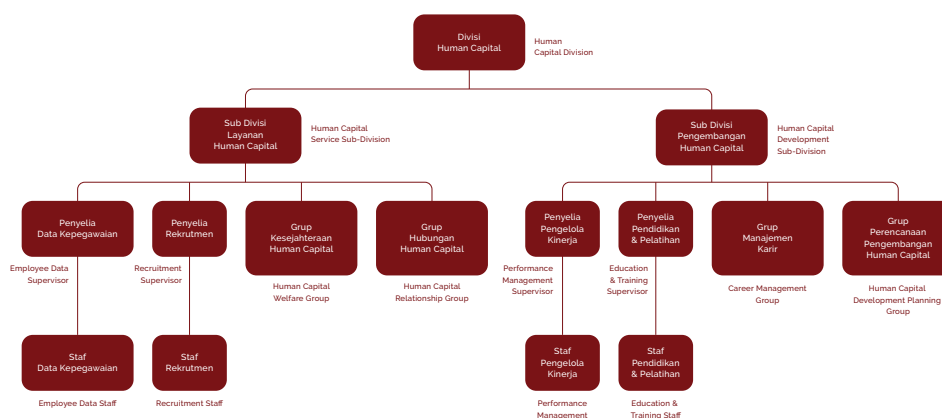
Struktur SDM yang andal, loyal dan berkompeten merupakan modal utama bankjatim guna meraih visi, misi dan kesuksesan usaha. bankjatim senantiasa memprioritaskan pengembangan SDM baik individu maupun tim dan pengembangan *Corporate Culture* untuk membangun budaya perusahaan sebagai strategi bisnis demi menjaga kinerja terbaiknya dalam bisnis jasa perbankan.

Sumber Daya Manusia di Bank Jatim berada di bawah Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Pemimpin Divisi *Human Capital*. Divisi ini terdiri dari Sub Divisi Layanan *Human Capital* dan Sub Divisi Pengembangan *Human Capital* yang berperan dalam Operasional layanan, penyusunan kebijakan dan pengembangan *Human Capital* sehingga diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang memiliki kompetensi dan memiliki nilai budaya perusahaan yang tinggi.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT STRUCTURE

Reliable, loyal, and competent Human Capital (HC) is the main capital for the Bank in realizing its vision, mission, and business success. The Bank always prioritizes HC development, both individually and in team, as well as Corporate Culture development to build corporate culture as a business strategy in order to maintain its best performance in banking service business.

Human Capital at Bank Jatim is under the authority of Compliance and Risk Management Director, and managed by the Human Capital Division. This division consists of Human Capital Services Sub-Division and Human Capital Development Sub-Division which play a role in service operations, preparation of policies, and development of Human Capital. With this structure, it is expected that the Bank can produce employees with high competence and corporate culture.



PROFIL SDM

Per 31 Desember 2019, pegawai Bank Jatim seluruhnya berjumlah 4.238 pegawai yang terdiri dari 4.087 pegawai tetap, dan 151 pegawai tidak tetap. Berikut jumlah dan komposisi pegawai Perseroan berdasarkan jenjang jabatan, jenjang usia dan tingkat pendidikan:

HUMAN CAPITAL PROFILE

As of December 31, 2019, total employees of Bank Jatim reached 4,238 employees consisting of 4,087 permanent employees and 151 contract employees. The following tables describe Bank Jatim's employee profiles based on position level, age, and education.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI / EMPLOYEE COMPOSITION BY ORGANIZATION LEVEL			
URAIAN / DESCRIPTION	2017	2018	2019
NO	318	315	307
S, C, & T	2.906	2.737	2.721
PLL, PNGL, PK, AU, ARM	791	814	794
PBO, PCP, S.AU, & RM	260	296	285
PSD, PC, & PB	106	109	106
PD & PCU	29	31	25
JUMLAH / TOTAL	4.410	4.302	4.238

NO	Non Administrasi	Non Administrative	PCP	Pemimpin Cabang Pembantu	Sub-Branch Manager
S, C, & T	Staf, Calon Pegawai & Tenaga Kontrak Ikatan Kerja	Staff, Prospective Permanent Employees & Contractual Employees	S.Au	Senior Auditor	Senior Auditor Manager
PII	Penyelia	Supervisor	RM	Relationship Manager	Relationship Manager
PK	Pemimpin Kantor Kas	Head of Cash Office	PSD	Pemimpin Sub Divisi	Sub-Division Manager
Au	Auditor	Auditor	PC	Pemimpin Cabang	Branch Manager
ARM	Assistant Relation Manager	Assistand Relation Manager	PB	Pemimpin Bidang	Field Manager
An	Analisis	Analyst	PD	Pemimpin Divisi	Division Manager
PBO	Pemimpin Bidang Operasional	Manager of Operational Division	PCU	Pemimpin Cabang Utama	Main Branch

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN / EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION LEVEL

URAIAN / DESCRIPTION	2017	2018	2019
NON STRATA / NON-DEGREE	817	575	568
S1 / BACHELOR'S DEGREE	3.369	3.513	3.462
S2 / MASTER'S DEGREE	224	214	207
S3 / DOCTORATE DEGREE	0	0	1
JUMLAH / TOTAL	4.410	4.302	4.238

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN / EMPLOYEE COMPOSITION BY EMPLOYMENT STATUS

URAIAN / DESCRIPTION	2017	2018	2019
PEGAWAI TETAP / PERMANENT EMPLOYEES	4.042	4.186	4.087
PEGAWAI TIDAK TETAP / CONTRACT EMPLOYEES	368	116	151
OUTSOURCING	1.981	2.009	2.092
JUMLAH / TOTAL	6.391	6.311	6.330

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT USIA / EMPLOYEE COMPOSITION BY AGE

URAIAN / DESCRIPTION	2017	2018	2019
< 30 TAHUN / < 30 YEARS OLD	1.566	1.138	815
30-54 TAHUN / 30-54 YEARS OLD	2.705	3.028	3.026
54 TAHUN / > 54 YEARS OLD	139	136	397
JUMLAH / TOTAL	4.410	4.302	4.238

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN / EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER

URAIAN / DESCRIPTION	2017	2018	2019
LAKI-LAKI / MALE	2.602	2.538	2.489
PEREMPUAN / FEMALE	1.808	1.764	1.749
JUMLAH / TOTAL	4.410	4.302	4.238

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Dalam upaya memastikan pencapaian kinerja pegawai yang mampu menunjang pencapaian target perusahaan, maka Bank Jatim telah menerapkan sistem manajemen kinerja berupa metode *Balance Scorecard*. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan proses *monitoring* dan *reporting* pencapaian KPI pegawai. Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi atas kinerja pegawai yang ada di Bank Jatim. Aplikasi KPI *Scorecard* digunakan sebagai data pendukung penilaian kinerja yang merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan perhitungan jasa produksi. Selain untuk perhitungan jasa produksi, KPI juga digunakan untuk program jenjang karir pegawai.

Ada 4 perspektif di KPI Scorecard yaitu:

1. *Financial*
2. *Internal Bussines Process*
3. *Customer*
4. *Learning & Growth*

Penilaian sistem kinerja didasarkan pada 2 komponen, yaitu sasaran kinerja utama (KPI) dan *Soft Kompetensi* dengan bobot nilai prosentase untuk masing-masing komponen adalah 100%. Dari bobot nilai prosentase selanjutnya didapatkan hasil akhir penilaian kinerja dengan kategori penilaian sebagai berikut:

EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT

In an effort to ensure the achievement of employee performance capable of supporting the achievement of company targets, Bank Jatim has implemented a performance management system in the form of a *Balance Scorecard* method. This application was created to facilitate the process of monitoring and reporting the achievement of employee KPIs. The aim is to evaluate the performance of employees in Bank Jatim. The KPI *Scorecard* application is used as supporting data for performance appraisal which is one of the important factors in determining the calculation of production services. In addition to calculating production services, KPIs are also used for employee career ladder programs.

There are 4 perspectives on the KPI Scorecard:

1. Financial
2. Internal Business Process
3. Customer
4. Learning & Growth

The performance system assessment is based on 2 components, namely the main performance target (KPI) and *Soft Competence* with the weighting percentage value for each component is 100%. From the weight of the percentage value, the final result is the performance appraisal with the following assessment categories:

KATEGORI PENILAIAN / ASSESSMENT CATEGORY	NILAI / SCORE
SANGAT MEMUASKAN (<i>OUTSTANDING</i>)	4,26 – 5,00
MEMUASKAN (<i>EXCEED EXPECTATION</i>)	3,51 – 4,25
MENCAPAI TARGET KINERJA (<i>MEET EXPECTATION</i>)	3,00 – 3,50
KURANG (<i>BELOW EXPECTATION</i>)	1,50 – 2,99
SANGAT KURANG (<i>POOR</i>)	0,00 – 1,49



REKRUTMEN DAN *TURNOVER*

Pada 2019, bankjatim merekrut pegawai baru secara selektif dengan prinsip *Recruit Right* guna mencari calon pegawai yang memiliki potensi dan prestasi untuk ditempatkan pada divisi yang tepat di Perusahaan. Secara umum, rekrutmen tahun ini tidak banyak dilakukan. Rekrutmen hanya dilakukan pada posisi kritikal yang dapat mendorong peningkatan bisnis dari tenaga ahli yang direkrut. Rekrutmen dilakukan secara selektif dengan berbagai tahapan *multiskill screening* sehingga hasil rekrutmen dapat membuat bisnis Perusahaan semakin tangguh dan dapat meraih kinerja yang lebih cemerlang.

Untuk mendukung hal tersebut di atas maka perlu dilakukan *Work Load Analysis* (WLA), hal tersebut sejalan dengan adanya kebutuhan analisa terhadap pemenuhan jumlah pegawai unitunit kerja pada setiap cabang Bank Jatim. Tujuan pelaksanaan *Work Load Analysis* (WLA) adalah sebagai berikut:

- Bank Jatim mampu melakukan rekrutmen pegawai baru berdasarkan hasil data WLA dan pengembangan kompetensi SDM;
- Divisi *Human Capital* dapat menganalisa beban kerja setiap jabatan pada unit yang ada serta mengoptimalkan kinerja pegawai yang tersedia;
- Divisi *Human Capital* menilai kebutuhan pegawai sesuai kriteria yang diharapkan sesuai dengan struktur organisasi Bank dan rencana bisnis bank.
- Metode yang digunakan adalah *Interview method* yang dilakukan kepada para pemegang jabatan dan apabila jabatan tersebut kosong atau tidak terdapat personil, maka interview dilakukan pada personil yang merangkap tugas tersebut, hal ini dilakukan pada Cabang induk dan Cabang pembantu.

RECRUITMENT AND *TURNOVER*

In 2019, Bank Jatim selectively recruited new employees based on the *Recruit Right* principle to look for prospective employees who have the potential and achievements to be placed in the right divisions in the Company. In general, this year's recruitment is not much done. Recruitment is only done in critical positions that can drive business improvement from the experts recruited. The recruitment is done selectively with various stages of multi-skill screening so that the results of the recruitment can make the Company's business more resilient and can achieve more brilliant performance.

To support the above mentioned, it is necessary to do a *Work Load Analysis* (WLA), this is in line with the need for analysis of the fulfillment of the number of employees of work unit units in each branch of Bank Jatim. The purpose of implementing *Work Load Analysis* (WLA) is as follows:

- Bank Jatim is able to recruit new employees based on WLA data results and development of HR competencies;
- The Human Capital Division can analyze the workload of each position in an existing unit and optimize the performance of available employees;
- The Human Capital Division assesses employee needs according to the expected criteria in accordance with the Bank's organizational structure and bank business plans.
- The method used is the Interview method conducted for the holders of positions and if the position is vacant or there are no personnel, then the interview is conducted on the personnel who are concurrently assigned to this task, this is done at the parent Branch and the supporting Branch.

PROGRAM ALIH JALUR NON-ADMIN DAN SELEKSI PEGAWAI NON KARIR / NON-ADMIN PATH TRANSFER PROGRAM AND NON-CAREER EMPLOYEE SELECTION						
DESKRIPSI / DESCRIPTION	2019		2018		2017	
	LAKI-LAKI / MALE	PEREMPUAN / FEMALE	LAKI-LAKI / MALE	PEREMPUAN / FEMALE	LAKI-LAKI / MALE	PEREMPUAN / FEMALE
TENAGA KERJA BARU / NEW EMPLOYEE						
< 30 TAHUN / < 30 YEARS OLD	1 (TKIK)	0	15 (NK)	29 (NK)	0	0
30-50 TAHUN / 30-50 YEARS OLD	0	0	5 (NK)	5 (NK)	0	0
> 50 TAHUN / >50 YEARS OLD	0	0	0	0	0	0

Sepanjang 2019, Bank Jatim telah merekrut 1(satu) pegawai baru dengan kompetensi dibidang teknologi. Sementara jumlah pegawai mengundurkan diri pada 2019 adalah sebanyak 127 pegawai.

In 2019, the Bank recruited 1 (one) new employee with competence in the field of technology. Meanwhile, total employees resigning from the Bank in 2019 reached 127 employees.

TALENT MANAGEMENT

Pengelolaan *talent management* yang diterapkan Bank Jatim bertujuan untuk mempersiapkan, mengembangkan dan mempertahankan pegawai agar dapat menampilkan kinerja terbaiknya, baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Dasar dalam pengelolaan *talent management* terdiri dari dua aspek yaitu kompetensi yang diukur melalui proses *asesment* dan kinerja pegawai. Pengukuran kompetensi dilakukan secara berkala guna mengupdate kemampuan terbaru dari masing-masing pegawai pada seluruh jenjang jabatan

Selama tahun 2019, Bank Jatim membuka program pengembangan karir pegawai diantaranya sebagai berikut:

1. Program *Assesment* Pejabat Eksekutif

Bank Jatim telah melaksanakan *Assesment* bagi pejabat eksekutif sebanyak 48 orang. *Assesment* ini diperlukan untuk memetakan potensi dari masing-masing pejabat eksekutif dan mengukur gap kompetensinya agar Bank dapat merencanakan pengembangan kedepan pejabat eksekutif tersebut.

2. Program *Management Development Program* (MDP)

Program MDP adalah program pengembangan karir untuk menduduki jabatan sebagai Pemimpin Cabang Pembantu atau setingkat. Selama tahun 2019 terdapat 1 (satu) angkatan program MDP yang berjalan dengan total peserta sebanyak 35 orang. Program karir MDP dimulai dengan pelaksanaan pendidikan klasikal yang dilanjutkan dengan *On Job Training* (OJT) selama ± 6 bulan dan diakhiri dengan evaluasi akhir.

3. Program *Staff Development Program* (SDP)

Program SDP adalah program pengembangan karir untuk menduduki jabatan sebagai Penyelia atau setingkat. Selama tahun 2019 terdapat 1 (satu) angkatan program SDP yang berjalan dengan total peserta sebanyak 35 orang. Program karir SDP dimulai dengan pelaksanaan pendidikan klasikal yang dilanjutkan dengan *On Job Training* (OJT) selama ± 6 bulan dan diakhiri dengan evaluasi akhir.

TALENT MANAGEMENT

Talent management implemented by Bank Jatim aims to prepare, develop, and retain employees in order to show their best performance, both at present and in the future. The basis in managing talent management consists of two aspects, namely competency as measured through the assessment process and employee performance. Competency measurements are carried out regularly to update the latest capabilities of each employee at all levels of position

In 2019, Bank Jatim carried out employee career development programs including the following:

1. Executive Officer Assessment Program

Bank Jatim has carried out the Assessment for executive officials amounting to 48 people. This assessment is needed to map the potential of each executive officer and measure the competency gap so that the Bank can plan the future development of the executive officer.

2. Management Development Program (MDP) Program

MDP Program is a career development program to occupy the position of Assistant Branch Manager or equivalent. During 2019 there was 1 (one) MDP program batch run with a total of 35 participants. The MDP career program begins with the implementation of classical education followed by On-the-Job Training for ± 6 months and ends with a final evaluation.

3. Staff Development Program (SDP) Program

The SDP program is a career development program to occupy a position as a Supervisor or equivalent. During 2019 there was 1 (one) SDP program batch run with a total of 35 participants. The SDP career program begins with the implementation of classical education, followed by On-the-Job Training for ± 6 months and ends with a final evaluation.



PENGEMBANGAN SDM

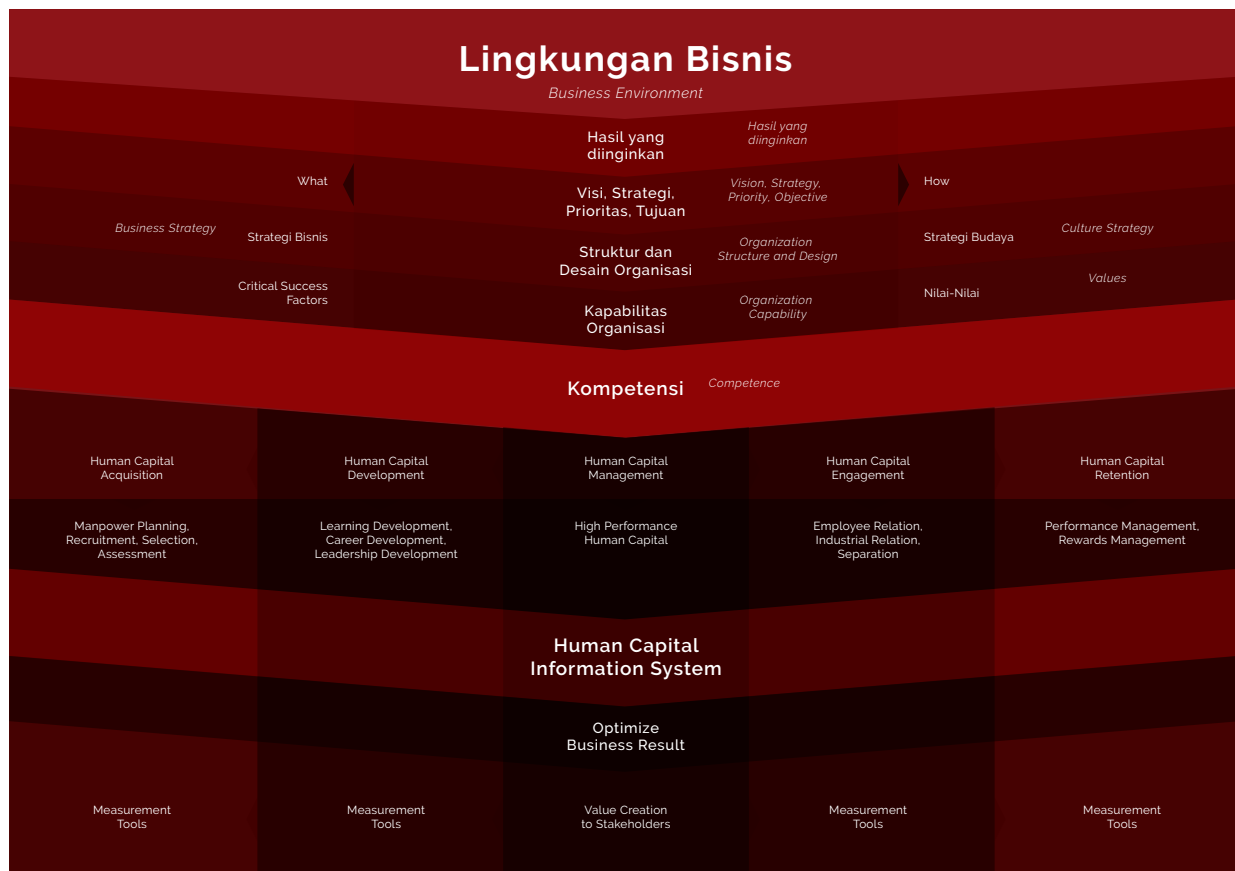
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Jatim dikenal sebagai *Human Capital Management* (HCM) dengan pendekatan lebih komprehensif dibandingkan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Melalui implementasi HCM, Bank Jatim memperlakukan pegawai sebagai aset dan penambah nilai serta pendukung seluruh fungsi atau sebagai mitra strategis bank.

Strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Jatim mengacu pada konsep Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (MSDM-8BK) yang didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian aktivitas tenaga kerja secara optimal mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun di mana proses pengambilan keputusan didasarkan pada informasi kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini diharapkan agar aktivitas dan keputusan yang diambil akan lebih transparan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak diskriminatif. Implementasi HCM di Bank Jatim dilaksanakan melalui konsep/*planning* sebagai berikut:

HC DEVELOPMENT

Development of Human Capital (HC) Bank Jatim is known as Human Capital Management (HCM) with a more comprehensive approach than Human Resource Management (HRM). Through the implementation of HCM, Bank Jatim treats employees as assets and adds value and supports all functions or as a strategic partner of the Bank.

Bank Jatim's Human Capital Development Strategy refers to the concept of Competency-Based HR Management (MSDM-8BK) which is defined as a process of planning, organizing, implementing and controlling workforce activities optimally from recruitment to retirement where the decision making process based on the information needs of job competencies and individual competencies to achieve company goals. It is hoped that the activities and decisions taken will be more transparent and can be scientifically justified and non-discriminatory. The implementation of HCM in Bank Jatim is carried out through the following concepts/*planning*:



1. Kemampuan Individu meliputi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, jaringan, kemampuan untuk mencapai hasil, potensi untuk berkembang dan apa yang mereka bawa ke dalam pekerjaan dari kehidupan mereka;
2. Motivasi Individu meliputi aspirasi, ambisi dan dorongan, motivasi kerja dan produktivitas;

1. Individual abilities include knowledge, skills, experience, networks, the ability to achieve results, the potential to develop and what they bring to work from their lives;
2. Individual motivation includes aspirations, ambitions and encouragement, work motivation and productivity;

3. Kepemimpinan meliputi kejelasan visi tentang manajemen puncak dan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan berperilaku dengan cara yang konsisten;
4. Suasana organisasi meliputi budaya perusahaan, kebebasan berinovasi, keterbukaan, fleksibilitas, dan saling menghormati antar individu;
5. Efektifitas Kelompok Kerja meliputi dukungan, saling menghormati, berbagi dalam tujuan bersama dan nilai-nilai.

Tujuan pengelolaan *Human Capital Management* di Bank Jatim bertujuan untuk menentukan dampak bagi orang-orang yang melakukan bisnis dan berkontribusi terhadap nilai-nilai yang ada serta menunjukkan bahwa aspek Sumber Daya Manusia menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari dana yang diinvestasikan oleh Bank. Selain itu, pengelolaan SDM di Bank Jatim juga bertujuan untuk memberikan panduan tentang SDM dan strategi bisnis di masa yang akan datang serta menyediakan data yang akan menginformasikan strategi dan praktik yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM di Bank.

Pengembangan SDM di Bank Jatim dilaksanakan melalui skema sebagai berikut:

3. Leadership includes clarity of vision about top management and their ability to communicate and behave in a consistent way;
4. Organizational atmosphere includes corporate culture, freedom of innovation, openness, flexibility, and mutual respect between individuals;
5. The effectiveness of the Working Group includes support, mutual respect, sharing in shared goals and values.

The purpose of Human Capital Management in Bank Jatim is to determine the impact on people who do business and contribute to existing values and show that aspect of Human Capital produces higher value than funds invested by the Bank. In addition, HC management at Bank Jatim aims to provide guidance on HC and business strategies in the future and provide data that will inform strategies and practices designed to improve the effectiveness of HC management at the Bank.

HC Development at Bank Jatim is carried out through the following schemes:

Ada dua jenis pelatihan yang diselenggarakan Bank Jatim yakni;

There are two types of training organized by Bank Jatim, namely:

PELATIHAN PUBLIK

Yaitu pelatihan yang diadakan oleh *vendor (trainer)* dari luar). Pada tahun 2019 Jumlah Pelatihan Publik yang telah diikuti oleh pegawai Bank Jatim sebanyak "658" pelatihan dari "24" divisi yang ada.

IN HOUSE TRAINING

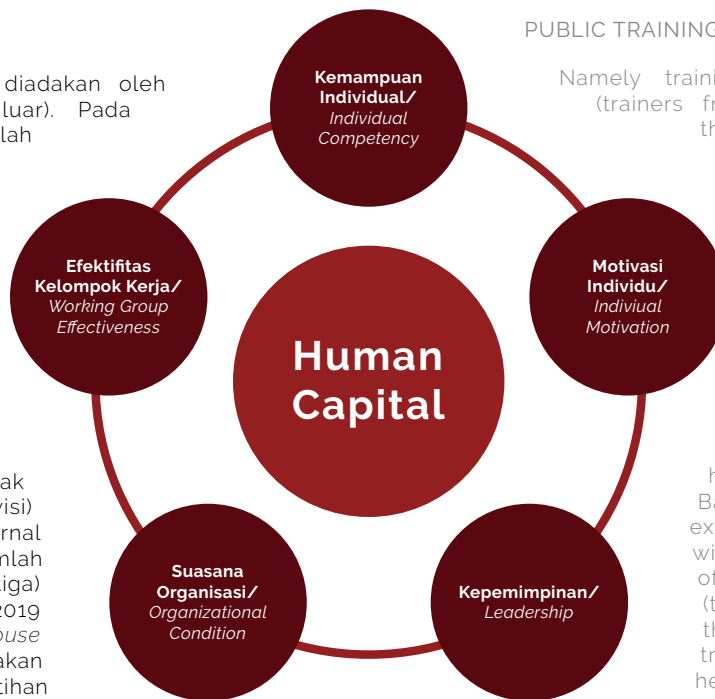
Yaitu pelatihan yang diadakan oleh pihak Internal Bank Jatim (Divisi) atau pihak Eksternal (*vendor*) dengan jumlah peserta minimal 3 (tiga) orang. Pada tahun 2019 jumlah pelatihan *in house training* yang telah diadakan sebanyak "161" pelatihan yang diikuti oleh pegawai cabang maupun kantor pusat.

PUBLIC TRAINING

Namely training held by vendors (trainers from outside). In 2019, the number of Public Training attended by employees of Bank Jatim amounted to 658 training from 24 existing divisions.

IN-HOUSE TRAINING

Namely training held by the internal Bank (Division) or the external party (*vendor*) with a minimum number of participants of 3 (three) people. In 2019, the number of in-house training that had been held was 161 training participated by branch and head office employees.



JUMLAH DAN BIAYA PELATIHAN

Pada 2019, jumlah pelatihan yang diikuti oleh Bank Jatim sebanyak 457 pelatihan dengan 7.013 peserta serta menghabiskan waktu 993 *mandays*. Biaya yang telah dikeluarkan Bank Jatim dalam rangka pengembangan kompetensi adalah sebesar Rp 20.249 juta meningkat dari biaya yang dikeluarkan pada 2018 sebesar Rp18.274 juta.

TRAINING COST

In 2019, the Bank held 457 training activities attended by 7,013 training participants, and spent 993 mandays for training activities. Cost incurred by the Bank in developing employees' competence amounted to Rp20,249 million, grew from the cost incurred in 2018 which was Rp18,274 million.

KETERANGAN / DESCRIPTION	2018	2019
JUMLAH PROGRAM PELATIHAN / TOTAL TRAINING PROGRAMS	303	457
JUMLAH PESERTA PELATIHAN / TOTAL TRAINING PARTICIPANTS	6.437	7.013
TOTAL MANDAYS	976	993
TOTAL BIAYA (RP) / TOTAL COSTS (RP)	Rp 18.274.229.626,40	Rp 20.249.920.869,00

RENCANA PENGEMBANGAN SDM 2020

Strategi pengembangan *Human Capital* dengan melakukan perubahan *Human Capital* menuju *Human Capital* yang unggul, mandiri, berdaya saing dan profesional. Sebagai dasar untuk membangun proses pendukung GRC (*Governance, Risk & Compliance*) serta permodalan yang kuat, disertai sumber daya berkualitas yang berbudaya kerja baik dan memiliki sistem informasi yang handal pada pengelolaan manajemen *Human Capital* berbasis kompetensi, dan merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu dalam pengembangan *Human Capital* yang meliputi:

- Pembentukan Bank Jatim Academy untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga menjadi asset yang kompetitif bagi perusahaan, termasuk perbaikan sarana dan prasarana gedung Pusat Pendidikan & Pelatihan Bank Jatim secara bertahap dan berkelanjutan;
- Pembentukan *Assesment Center* yang berguna untuk mengukur kompetensi dan profil dari pegawai yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait *gap competencies* dari pegawai yang dapat digunakan sebagai pengembangan pegawai secara berkelanjutan;
- Pembuatan career path pegawai dalam rangka menyempurnakan mekanisme *succession plan* untuk mengisi jabatan kunci sehingga proses regenerasi pemimpin dalam organisasi dapat berjalan secara berkelanjutan;
- Program pengembangan kaderisasi (*talent management*) dan promosi pegawai dilakukan berdasarkan penilaian kinerja pegawai, *assessment* kompetensi & skill dengan mempertimbangkan rekam jejak;
- Pemenuhan kebutuhan SDM melalui perekrutan pegawai baru sesuai kompetensi jabatan;
- Pengembangan kompetensi *Human Capital* melalui pendidikan dan pelatihan terprogram;
- Penerapan *Worklife Balance* sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan pegawai agar dapat saling bersinergi demi terciptanya produktifitas yang optimal;

HC DEVELOPMENT PLANS FOR 2020

The Bank conducts Human Capital development strategy by changing Human Capital concept towards a more superior, independent, competitive, and professional Human Capital. As a basis for building GRC (*Governance, Risk, & Compliance*) support processes as well as strong capital, accompanied by quality resources that have good work culture and have reliable information systems on competency-based Human Capital management, and are a comprehensive and integrated plan in development Human Capital which includes:

- Establishment of Bank Jatim Academy to improve the quality of human resources so that it becomes a competitive asset for the company, including the gradual and continuous improvement of facilities and infrastructure of the Bank Jatim Education & Training Center building;
- Establishment of an Assessment Center that is useful for measuring the competencies and profiles of employees that aim to obtain information related to competency gaps from employees that can be used as employee development on an ongoing basis;
- Making employee career paths in order to perfect the succession plan mechanism to fill key positions so that the regeneration process of leaders in the organization can run continuously;
- Generation development (talent management) and employee promotion programs are based on employee performance appraisals, competency & skill assessments taking into account the track record;
- Meeting the needs of human resources through the recruitment of new employees according to job competency;
- Development of Human Capital competencies through programmed education and training;
- Implementation of Worklife Balance as a form of company concern for employee welfare so that they can work together in synergy to create optimal productivity;

- Pembentukan "BAJAMUDA" sebagai wadah Generasi Milenial Bank Jatim dalam menuangkan ide, inovasi, kreativitas dan gagasan guna mendukung visi misi dan program kerja Bank;
- *Employee engagement survey* sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat keterikatan emosional pegawai dengan perusahaan (*Voice of employee*);
- Pengembangan program *Human Capital* berbasis aplikasi *online* yaitu *e-Human Capital* yang berfokus pada penyampaian informasi yang cepat, tepat, efektif dan terkontrol yang disesuaikan dengan perkembangan serta mempermudah Divisi *Human Capital* Bank Jatim dalam melakukan pemantauan terhadap pengembangan dan pelayanan yang dilakukan kepada pegawai Bank Jatim;
- Penetapan *Man Power Planning* berdasarkan struktur organisasi (SO) dengan menyelaraskan sasaran pada rencana bisnis bank;
- Penyempurnaan dan pengembangan sistem penilaian kinerja pegawai dengan konsep *Key Performance Indicator* (KPI) yang berbasis *balanced scorecard* dan tetap berkoordinasi dengan Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja dan unit kerja lainnya;
- BJTM Expressi Award Program Penghargaan Untuk pegawai Terbaik Di Layanan SA, *Teller*, *Security*, Analis Kredit Dan Marketing Dan Pegawai Yang Mempunyai Ide/Karya Dan Inovasi;
- Pemberian penghargaan *The Best Employee Award* untuk pegawai high talent potential Bank Jatim yang memiliki kinerja terbaik.

Pembentukan *Outstanding club* Bank Jatim merupakan wadah untuk *Best Employee*/Para Pemenang disetiap Kategori menjadi *Mentor Coaching Clinic* sesuai bidangnya kepada pegawai lainnya dan memberikan ide, saran konstruktif kepada Manajemen.

- Establishment of "BAJAMUDA" as a forum for Millennial Generation of Bank Jatim in expressing ideas, innovations, creativity and ideas to support the vision and mission and work programs of the Bank;
- Employee engagement survey as a tool to measure the level of employee emotional engagement with the company (*Voice of employee*);
- Development of an online application-based Human Capital program, *e-Human Capital*, which focuses on delivering fast, accurate, effective and controlled information tailored to developments and facilitates the Human Capital Division of Bank Jatim in monitoring the development and services provided to employees of Bank Jatim ;
- Determination of Man Power Planning based on organizational structure (SO) by aligning objectives with the bank's business plan;
- Improvement and development of employee performance appraisal system with the concept of Key Performance Indicator (KPI) based on balanced scorecard and keep coordinating with the Strategic Planning & Performance Management Division and other work units;
- BJTM Expressi Award Program Award for Best Employees in SA, Teller, Security, Credit and Marketing Analyst Services and Employees Who Have Ideas / Works and Innovations;
- Awarding The Best Employee Award for Bank Jatim high talent potential employees who have the best performance.

The establishment of the Bank Jatim Outstanding club is a forum for the Best Employees / Winners in each Category to become Mentor Coaching Clinic according to their fields to other employees and provide ideas, controversial suggestions to Management.

Teknologi & Informasi

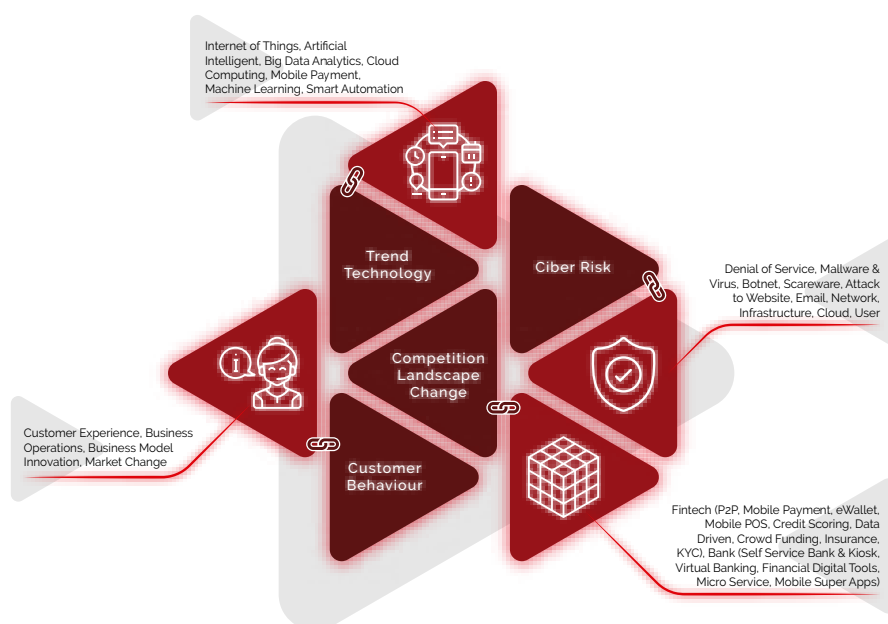
INFORMATION & TECHNOLOGY

Perubahan di *marketplace* dan *society* menuntut perbankan untuk berubah ke arah *digital banking*, atau layanan-layanan yang dijalankan dengan dukungan Teknologi Informasi. Sebagian layanan perbankan, Bank menjadi layanan *self-service* berbasis TI. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini adalah semakin tingginya tuntutan dukungan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis perubahan masa depan. Strategi yang disusun harus selaras dengan strategi bisnis bank, serta memberikan solusi atas kebutuhan bisnis ditengah tingkat persaingan perbankan dan *fintech* yang semakin ketat, keterbatasan *resources*, risiko siber yang semakin meningkat dan pemenuhan kepatuhan atas regulasi perbankan.

Perkembangan dan perubahan pada teknologi industri keuangan menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu keunggulan kompetitif dalam mendukung tercapainya kesuksesan Bank. Untuk itu, strategi dan pengelolaan SDM di Bank Jatim senantiasa disesuaikan dengan strategi Bank dalam jangka panjang serta perkembangan pasar yang terjadi saat ini maupun masa yang akan datang. Hal tersebut merupakan upaya Bank dalam memastikan SDM Bank memiliki kompetensi, keahlian dan komitmen, serta responsif terhadap perubahan (*agile*) dengan tetap berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Utama dan Budaya Bank. Beberapa faktor penting yang perlu menjadi pertimbangan dalam menetapkan area rencana penerapan dan pengembangan teknologi informasi saat ini dan kedepan antara lain:

Changes in the marketplace and society require banking industry to change towards digital banking or provide services supported with Information Technology. Majority of banking services already implemented IT-based self-service. The consequence of this change is the increasingly high demand for Information Technology support in running the business of future change. Therefore, strategy formulated must be in line with the Bank's business strategy, as well as providing solutions to business needs amidst increasingly fierce competition in the banking and fintech sectors, resource limitations, increasing cyber risk and compliance with banking regulations.

Developments and changes in financial industry technology make Human Capital (HCR) one of the competitive advantages in supporting the achievement of the Bank's success. For this reason, HC strategy and management in Bank Jatim are always adjusted to its long-term strategy and current and future market developments. This is an effort of the Bank in ensuring that its human capital have competence, expertise and commitment, and are responsive to changes (*agile*) while behaving in accordance with the Main Values and Culture of the Bank. Some important factors that need to be considered in determining the area of the plan for the implementation and development of current and future information technology include:



Gambar 1. Perkembangan Teknologi Perbankan

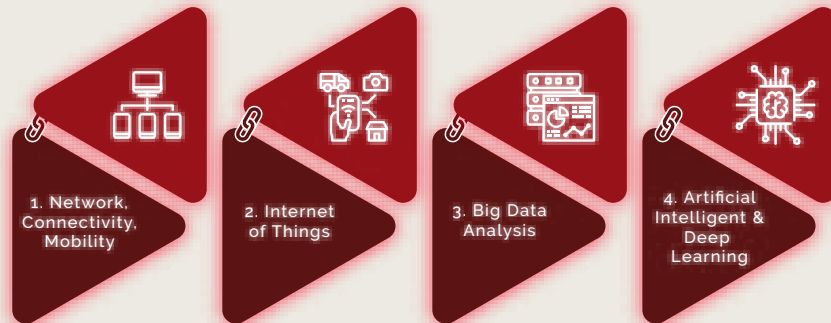
Figure 1. Development of Banking Technology

1. TREND TEKNOLOGI

Trend teknologi khususnya perbankan seiring revolusi industri 4.0 menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Pemanfaatan koneksitas IOT (*Internet Of Things*), *Big Data*, *Artificial Intelligent* (AI), *Cloud Computing*, *Cashless Payment*, *Teknologi Robotic*, *Machine Learning*, dan *Biometric* merambah dunia perbankan.

1. TECHNOLOGY TREND

Technological trends, especially banking as the 4.0 industrial revolution shows a very sharp increase. Utilization of IOT (Internet of Things), Big Data, Artificial Intelligent (AI), Cloud Computing, Cashless Payment, Robotic Technology, Machine Learning, and Biometric connectivity has penetrated the banking world.



Gambar 2. Pilar Perkembangan Teknologi

Figure 2. Technology Development Pillar

Produk perbankan berbasis digital seperti *mobile banking*, *internet banking*, *digital money*, *cardless ATM*, *cashless transaction* didukung oleh QR Code, *Biometric*, *Open Banking* (API) dan teknologi *block chain*.

Digital-based banking products such as mobile banking, internet banking, digital money, cardless ATMs, cashless transactions are supported by QR Code, Biometric, Open Banking (API) and block chain technology.

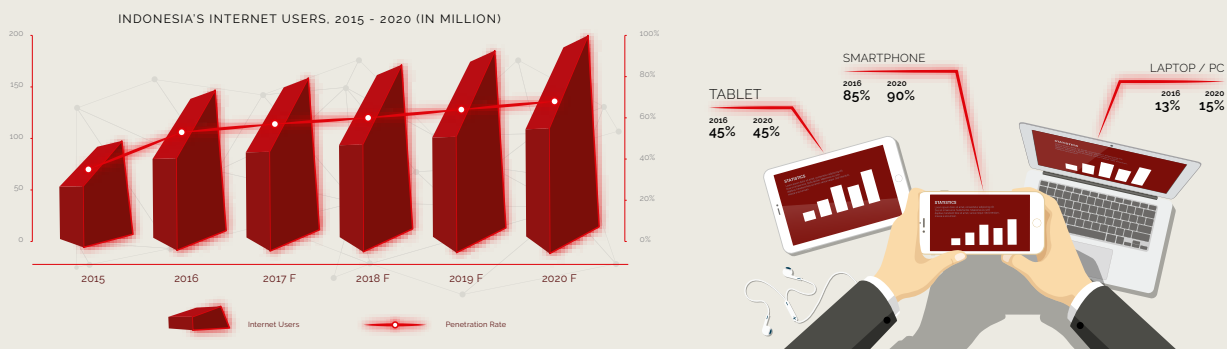
2. KEBUTUHAN NASABAH

2. CUSTOMER NEEDS

TINGKAT PENETRASI INDUSTRI DIGITAL DI INDONESIA

Rate of Digital Industry Penetration in Indonesia

Pengguna Internet di Indonesia terus berkembang, terutama perilaku transaksi online
Internet users in Indonesia continue to grow, especially in terms of online transaction



Gambar 3. Customer Behaviour

Figure 3. Customer Behavior

Saat ini nasabah dalam bertransaksi banyak memanfaatkan *smartphone* daripada melakukan kunjungan ke Bank, sehingga Bank harus mempersiapkan layanan bersifat *customer centric*. Mobilitas nasabah yang tinggi, selera pasar yang didominasi milenial, kebutuhan terhadap layanan dan jasa perbankan yang lebih fleksibel, mudah,

Currently, customers use a smartphone for transactions rather than visiting the Bank, so the Bank must prepare customer centric services. High customer mobility, millennial dominated market tastes, more flexible, easy, cheap, fast, and secure banking services and services.

murah, cepat, dan aman. Bank harus mengakomodasi nasabah BYOD (*Bring Your Own Device*) sehingga dapat melakukan transaksi setiap saat dan dimana saja.

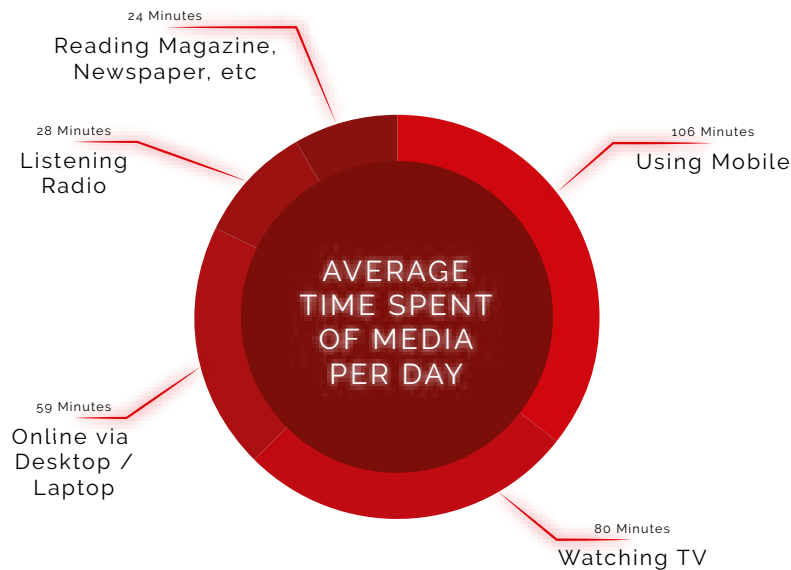
Banks must accommodate BYOD (Bring Your Own Device) customers so they can conduct transactions at anytime and anywhere.

3. TINGKAT PERSAINGAN

3. COMPETITION LEVEL

Going Online Berpotensi Menjadi Menu Utama di Indonesia

Going Online has a Potential to Become the Main Menu in Indonesia



Saat ini layanan jasa keuangan bukan hanya antar bank, tapi bank juga bersaing dengan lembaga non bank seperti *startup fintech*, yang juga menyediakan platform layanan yang sama seperti *peer to peer lending*, *crowdfunding*, *payment system (e-Money dan e-Wallet)* yang terintegrasi dengan *marketplace*. Jika Bank tidak melakukan percepatan pengembangan inovasi teknologi dalam hal pelayanan, maka bank akan tergerus dalam kompetisi dan terdisrupsi oleh adanya *fintech*.

At present financial services are not only interbank, but banks also compete with non-bank institutions such as startup fintech, which also provide the same service platforms as peer to peer lending, crowdfunding, payment systems (e-Money and e-Wallet) integrated with the marketplace. If the Bank does not accelerate the development of technological innovation in terms of service, then the bank will be eroded in competition and disrupted by the presence of fintech.

4. KEAMANAN TI

4. IT SECURITY

Semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi menimbulkan potensi risiko baru, yaitu *cyber risk*. Bank perlu didukung sistem keamanan informasi yang handal untuk memproteksi adanya serangan virus, *malware*, *hacker* yang masuk melalui *network*, *user*, *email*, *database cloud* maupun dari *device* nasabah.

The increasing use of information technology raises new potential risks, namely cyber risk. Banks need to be supported by a reliable information security system to protect against attacks by viruses, malware, hackers that enter through the network, users, email, cloud databases or from customer devices.



STRUKTUR ORGANISASI ICT

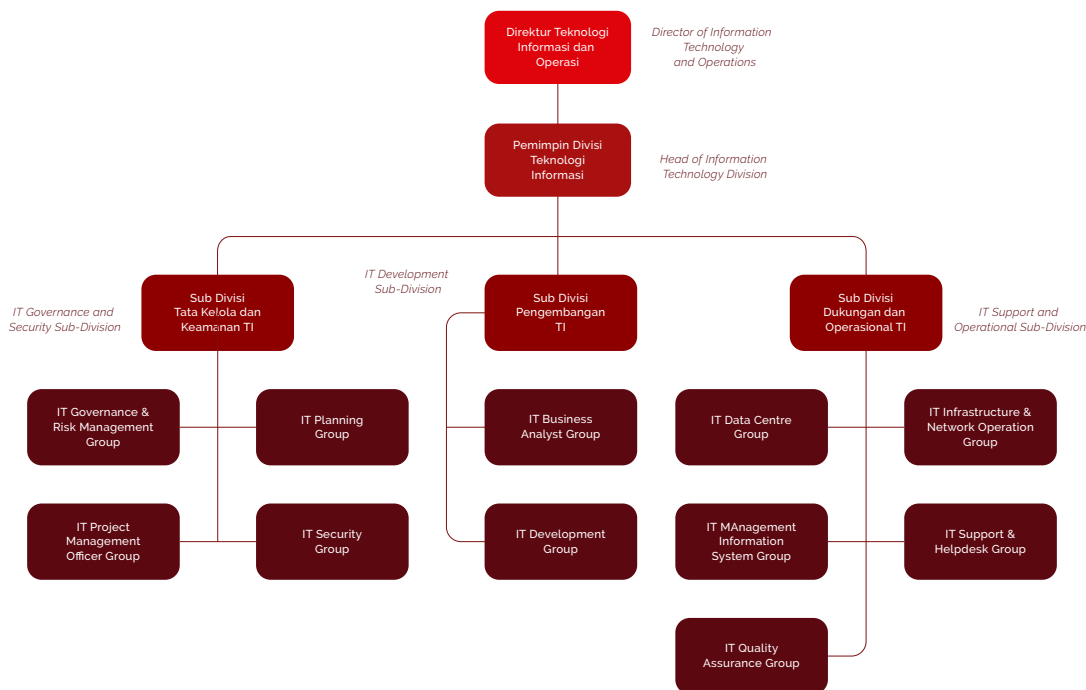
Struktur Organisasi Divisi Teknologi Informasi (TI) Bank dijalankan oleh 3 (tiga) sub divisi yang berada di bawah tanggung jawab Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (TI), sedangkan Pemimpin Divisi TI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Teknologi Informasi (TI) dan Operasi. Adapun ketiga sub divisi tersebut adalah Sub Divisi Tata Kelola dan Keamanan TI, Sub Divisi Pengembangan TI, dan Sub Divisi Dukungan dan Operasional TI.

Struktur organisasi Satuan Kerja Teknologi Informasi, mengacu pada SK Direksi no. 057/233/DIR/PRS/KEP tanggal 18 Juli 2018, adalah sebagai berikut :

ICT ORGANIZATION STRUCTURE

The Organization Structure of the Bank's Information Technology (IT) Division is run by 3 (three) sub-divisions which are under the responsibility of the Head of Information Technology (IT) Division, while the Head of IT Division is responsible directly to the Director of Information Technology (IT) and Operations. The three sub-divisions are the IT Governance and Security Sub-Division, the IT Development Sub-Division, and the IT Operations and Support Sub-Division.

The organizational structure of the Information Technology Work Unit, referring to the Board of Directors Decree No. 057/233/DIR/PRS/KEP dated July 18, 2018, are as follows:



Gambar 4. Struktur Organisasi TI

Figure 4. IT Organization Structure

Adapun ruang lingkup tugas dari masing-masing Sub Divisi di dalam Satuan Kerja Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

The scope of duties of each sub-division within the Information Technology Work Unit is as follows:

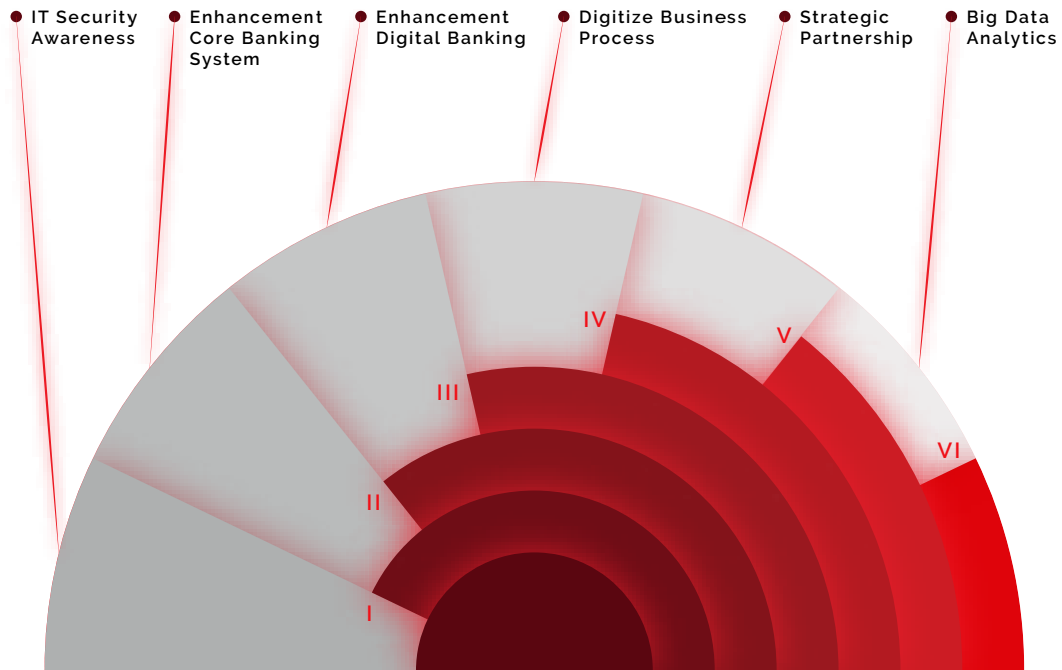
UNIT KERJA WORK UNIT	JOB DESC JOB DESC
SUB DIVISI TATA KELOLA DAN KEAMANAN TI <i>IT GOVERNANCE AND SECURITY SUB-DIVISION</i>	Memantau dan menjamin seluruh proses TI patuh dan tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. <i>Monitor and guarantee that all IT processes are compliant and subject to the prevailing laws and regulations.</i>
SUB DIVISI PENGEMBANGAN TI <i>IT DEVELOPMENT SUB-DIVISION</i>	Memfasilitasi dalam menerjemahkan kebutuhan proses bisnis menjadi solusi teknis teknologi informasi serta mengusulkan proyek dan inisiatif TI yang sesuai. <i>Facilitate the translation of business process needs into information technology technical solutions and propose appropriate IT projects and initiatives.</i>
SUB DIVISI DUKUNGAN DAN OPERASIONAL TI <i>IT OPERATIONS AND SUPPORT SUB-DIVISION</i>	Memonitor layanan dan operasional TI yang diterapkan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Teknologi Informasi yang bebas dari gangguan. <i>Monitor IT services and operations that are implemented and responsible for the implementation of Information Technology that is free from disruptions</i>

Pemisahan satuan kerja TI di Bank Jatim tersebut juga untuk memastikan adanya *segregation of duty* sekaligus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja TI terkait pengembangan TI, penetapan kebijakan dan tata kelola TI, proses implementasi dan *monitoring* layanan operasional TI.

The segregation of IT work units in Bank Jatim is also to ensure segregation of duty as well as to improve the effectiveness and efficiency of IT work related to IT development, the establishment of IT policies and governance, the process of implementing and monitoring IT operational services.

"MASTERPLAN PENERAPAN DIGITAL BANKING"

"MASTERPLAN OF DIGITAL BANKING IMPLEMENTATION"



Gambar 5. Outline Strategic Plan Digital Banking.

Figure 5. Outline Strategic Plan Digital Banking

Penerapan *Digital Banking* Bank Jatim menjelaskan tentang perubahan era role model dari perbankan yang awalnya berfokus kepada kantor cabang menuju kepada aktivitas perbankan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Untuk itu, perlu adanya kesiapan dari bank untuk menerapkan *Digital Banking*.

Di tahun 2020, strategi utama pengembangan teknologi informasi dalam pemenuhan *digital banking* meliputi 3 hal, yaitu:

The implementation of Bank Jatim Digital Banking explains about the changing era of the role model of banking which initially focused on branch offices towards banking activities that can be accessed anytime and anywhere. For this reason, there needs to be readiness from the Bank to implement Digital Banking.

In 2020, the main strategies for developing information technology in fulfilling digital banking include 3 issues, namely:

PENGEMBANGAN *DIGITAL BANKING*

Pengembangan Layanan *Digital Banking* berfokus pada *mobile application*, karena perilaku nasabah dan kebutuhan nasabah akan transaksi *cashless* semakin bergeser kearah penggunaan *smartphone* (*mobile application platform*)

DIGITAL BANKING ENHANCEMENT

Development of Digital Banking Services focuses on mobile applications, as customer behavior and customer needs for cashless transactions are increasingly shifting towards the use of smartphones (mobile application platforms)



Gambar 6. One Platform Mobile Apps

1. *Front end Delivery Channels based Mobile Apps* antara lain:
 - a. *One Platform*
 - b. *Micro credit online*
 - c. *Open Account*
2. *Middleware*, antara lain :
 - a. *Credit Approval System (CAS)*
 - b. *API – interkoneksi dengan fintech*
 - c. *Aggregator Pajak daerah untuk e-Gov.*
3. *Back end Delivery Channels*
 - a. *Server One Platform*
 - b. *Virutalisasi Server*
 - c. *ATM Monitoring*

Figure 6. One Platform Mobile Apps

1. *Front End Delivery Channels based Mobile Apps* include:
 - a. *One Platform*
 - b. *Micro credit online*
 - c. *Open Account*
2. *Middleware*, including:
 - a. *Credit Approval System (CAS)*
 - b. *API – interconnected with fintech*
 - c. *Regional Tax Aggregator for eGov.*
3. *Back end Delivery Channels*
 - a. *Server One Platform*
 - b. *Server Virtualization*
 - c. *ATM Monitoring*



Untuk menunjang kebutuhan aplikasi pendukung *back office*, kemampuan pemrosesan transaksi dalam intensitas tinggi yang cepat dan akurat, dengan performa melampaui *system legacy* dan *support* terhadap pengembangan teknologi digital, maka perlu peningkatan *core banking system* melalui mekanisme penggantian atau *upgrade system*. Melalui *upgrade CBS* diharapkan pemenuhan *Capacity Planning* yang tepat sebagai upaya peningkatan produktivitas, efisiensi, kehandalan, konsistensi CBS, *multi thread processor parallel run*, yang mendukung layanan digital 7x24 jam, ditunjang sistem replikasi dan *core switch* untuk kontinuitas *Disaster Recovery Plan*.

To support the needs of back office support applications, the ability to process transactions in high intensity quickly and accurately, with performance beyond the legacy system and support for the development of digital technology, it is necessary to improve the core banking system through a system replacement or upgrade mechanism. Through CBS upgrading, it is expected that the fulfillment of appropriate Capacity Planning as an effort to increase productivity, efficiency, reliability, consistency of CBS, multi-thread parallel run processors, which support digital services 24/7, supported by replication systems and core switches for continuity in the Disaster Recovery Plan.

PENGUATAN KEAMANAN TI

Sebagai mitigasi risiko terhadap potensi *cyber risk* yang menjadi ancaman terhadap pengembangan teknologi digital, maka perlu penguatan terhadap sistem keamanan TI. Beberapa penguatan keamanan TI dilakukan melalui penyediaan alat monitoring, pencegahan, proteksi, pengujian dan penutupan celah keamanan TI antara lain:

- Log Management System (LMS)
- End Point Management
- Security Information & Event Management (SIEM)
- Application Security Testing.

IT SECURITY ENHANCEMENT

As a risk mitigation of the potential cyber risk which is a threat to the development of digital technology, it is necessary to strengthen the IT security system. Some IT security reinforcement is done through the provision of monitoring, prevention, protection, testing and closing IT security loopholes, including:

- Log Management System (LMS)
- End Point Management
- Security Information & Event Management (SIEM)
- Application Security Testing

KEGIATAN TI 2019

Sepanjang tahun 2019 Bank Jatim telah melaksanakan beberapa gebrakan teknologi guna memajukan pelayanan kepada nasabah. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target nasabah milenial, beberapa inovasi di bidang digital yang diluncurkan adalah JatimPay, E-Form Kredit, JatimCode, dan E-CIF.

1. JATIMPAY

JatimPay merupakan dompet *digital* yang dimiliki oleh Bank Jatim yang mempermudah pengguna untuk bertransaksi di *merchant*. Aplikasi ini memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara *online*. Jatim Pay menawarkan kemudahan transaksi tanpa mengharuskan nasabah membawa cash terlalu banyak. Salah satunya cukup dengan menunjukkan aplikasi.

2. E-FORM KREDIT

Layanan pengajuan kredit yang mudah dan fleksibel tanpa mengharuskan nasabah datang ke kantor cabang, cukup hanya melakukan pengajuan melalui media internet.

3. JATIMCODE

Jatim Code merupakan pengembangan fitur pembayaran Bank Jatim *Mobile Banking* melalui scan *QR code* yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi sehingga lebih fleksibel. Mekanisme pembayaran melalui JatimCode dilakukan oleh nasabah dengan scanning *QR code* pada aplikasi Bank Jatim mobile banking yang telah terdaftar nomor rekening *merchant* (toko atau pedagang) yang bekerja sama dengan Bank Jatim.

4. E-CIF

Aplikasi ini merupakan sistem informasi pendaftaran nasabah baru atau *existing* yang bertujuan melakukan pencatatan secara detail terhadap calon nasabah yang ingin membuka rekening atau ingin melakukan transaksi melalui Bank. Melalui aplikasi E-CIF calon nasabah yang ingin membuka rekening atau melakukan transaksi dan telah mengisi data yang dibutuhkan akan mendapatkan nomor referensi atau kode acak. Kode tersebut selanjutnya diberikan kepada *Customer Service* atau *Teller Bank* Jatim untuk diproses. Proses e-form memiliki waktu yang lebih singkat daripada pembukaan rekening secara manual.

Aplikasi ini memberikan keuntungan antara lain :

- *Paperless*.
- Mengurangi waktu tunggu.
- Dapat dilakukan kapan saja, dimana saja diluar jam operasional perbankan, terkecuali untuk verifikasi tahap akhir.
- Aplikasi E-CIF ini diharapkan memuaskan kebutuhan online banking nasabah yang bisa dilakukankapan saja dan dimana saja.

IT ACTIVITIES IN 2019

Throughout 2019 Bank Jatim has implemented several technological breakthroughs to spoil services for customers. This effort was made to reach the target of millennial customers, some innovations in the digital field that were launched were JatimPay, E-Form Credit, JatimCode, and E-CIF.

1. JATIMPAY

JatimPay is a digital wallet owned by Bank Jatim that makes it easy for users to transact at merchants. This application provides payment services and online transactions. Jatim Pay offers transaction convenience without requiring customers to carry too much cash. One of them is enough to show the application.

2. E-FORM CREDIT

Credit application services that are easy and flexible without requiring customers to come to the branch office, just simply make a submission through the internet media.

3. JATIMCODE

Jatim Code is the development of Bank Jatim Mobile Banking payment features through a QR code scan that makes it easy for customers to make transactions more flexible. Payment mechanism through JatimCode is done by the customer by scanning the QR code on the Bank Jatim mobile banking application that has registered the merchant account number (shop or merchant) in cooperation with Bank Jatim.

4. E-CIF

This application is a new or existing customer registration information system that aims to record in detail the prospective customers who want to open an account or want to make transactions through the Bank. Through the E-CIF application prospective customers who want to open an account or make a transaction and have filled in the required data will get a reference number or a random code. The code is then given to the Bank Jatim Customer Service or Teller for processing. The e-form process has a shorter time than manually opening an account.

This application provides advantages including:

- *Paperless*.
- Reducing waiting times.
- Can be done anytime, anywhere outside banking hours, except for the final verification stage.
- The E-CIF application is expected to satisfy customers' online banking needs that can be done anytime and anywhere.

Di tahun 2020 Bank Jatim juga menyiapkan dua inovasi lainnya, yakni Rekening Bank *Online* dan Kredit *Online* (E-KMG). Inovasi ini diluncurkan untuk mempertahankan capaian pertumbuhan diatas pertumbuhan industri di tahun 2020.

In 2020, Bank Jatim will prepare two other innovations, namely Online Bank Accounts and Online Credit (E-KMG). This innovation shall be launched to maintain the achievement of growth above industrial growth in 2020.



Gambar 7. *Network Security*

Demi memperkuat layanan jaringan dan keamanan TI, Bank Jatim melakukan inovasi sebagai berikut:

1. **VULNERABILITY ASSESSMENT SYSTEM**

Proses mengidentifikasi dan mengukur kerentanan dalam suatu sistem/aplikasi. Proses ini memberikan pemahaman mengenai aset Bank, sistem keamanan dan risiko yang dihadapi, serta mengurangi kemungkinan adanya *cybercrime* yang akan menyerang sistem Bank.

2. **FIREWALL INTERNET**

Sistem keamanan yang melindungi perangkat/aplikasi dari berbagai ancaman di jaringan internet.

3. **CORE SWITCH DC-DRC**

Untuk memperkuat infrastruktur layanan jaringan Bank Jatim, sehingga availability dari *Service Level Agreement* Bank Jatim terpenuhi.

Figure 7. *Network Security*

In order to strengthen network services and IT security, Bank Jatim makes the following innovations:

1. **VULNERABILITY ASSESSMENT SYSTEM**

The process of identifying and measuring vulnerabilities in a system/application. This process provides an understanding of the Bank's assets, security systems and risks faced, and reduces the possibility of *cybercrime* that will attack the Bank's system.

2. **FIREWALL INTERNET**

Security system that protects devices/applications from various threats on the internet network.

3. **CORE SWITCH DC-DRC**

To strengthen the Bank Jatim network service infrastructure, so that the availability of the Bank Jatim *Service Level Agreement* is fulfilled.

5

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS



Tinjauan Makroekonomi

OVERVIEW ON MACRO ECONOMY

Kondisi perekonomian sepanjang tahun 2019 dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan dinamika global. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi global berulang kali direvisi menjadi 3,00% di tahun 2019 (*Economic Outlook 2020* – Suminto 10 Des 2019). Namun, kemajuan perundingan perang dagang antara AS – Tiongkok serta perkembangan Brexit cukup memberikan sinyal positif bagi perekonomian di penghujung 2019. Ke depan, prospek ekonomi global dipengaruhi oleh kemajuan *trade deal* AS – Tiongkok, pemanfaatan *trade diversion* oleh negara-negara berkembang, efektivitas stimulus fiskal dan pelonggaran kebijakan moneter, serta kondisi geopolitik. (Tinjauan Moneter Bank Indonesia – Desember 2019).

Ditengah kondisi perekonomian global yang dinamis sepanjang tahun 2019, perekonomian Indonesia masih tetap terjaga. Kinerja perekonomian nasional tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebagai dampak dari peningkatan keyakinan konsumen bersamaam dengan pola musiman akhir tahun, ekspansi fiskal, perbaikan kinerja ekspor domestik, peningkatan investasi khususnya di kawasan Sulawesi, serta upaya perbaikan kebijakan transformasi ekonomi yang ditempuh pemerintah. Dengan perkembangan dan stimulus tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2019 dapat mencapai 5,1% (Perkiraan Bank Indonesia – Desember 2019).

Dari sisi inflasi, kinerja inflasi Indonesia tahun 2019 adalah sebesar 2,72% yoy, cenderung mendekati batas bawah rentang target Bank Indonesia untuk tahun 2019 yang ditargetkan sebesar 2,5% - 4,5%. Kinerja inflasi nasional sepanjang tahun 2019 didorong oleh ekspektasi inflasi yang terjaga, stabilitas nilai tukar rupiah terhadap USD, stabilitas harga *administered prices*, serta koordinasi yang baik dari regulator baik *ditingkat* pusat maupun daerah (*Market outlook Bank Mandiri*).

Economic conditions throughout 2019 were faced with various challenges and global dynamics. This caused global economic growth to be repeatedly revised to the level of 3.00% in 2019 (*Economic Outlook 2020* – Suminto Dec. 10, 2019). However, the progress of trade war negotiation between the US and China, and the development of Brexit provided a relatively positive signal for the economy at the end of 2019. Going forward, the global economic outlook will be affected by the progress of the US – China trade deal, the use of trade diversion by developing countries, the effectiveness of fiscal stimulus, and the ease of monetary policy and geopolitical conditions. (Monetary Review of Bank Indonesia – December 2019).

Amid the dynamic global economic conditions throughout 2019, domestic economy was still maintained. The performance of national economy was supported by household consumption as a result of increasing consumer confidence along with the year-end seasonal pattern, fiscal expansion, improvement in domestic export performance, increased investment, especially in the Sulawesi region, and efforts to improve economic transformation policies pursued by the government. With these developments and stimuli, national economic growth in 2019 could reach the level of 5.1% (Estimation of Bank Indonesia – December 2019).

In terms of inflation, Indonesia's inflation performance in 2019 was recorded at the level of 2.72% yoy, relatively close to the lower limit of Bank Indonesia's target range for 2019 which was 2.5% - 4.5%. The performance of national inflation rate throughout 2019 was driven by maintained inflation expectations, stability of Rupiah against the USD, stability in administered prices, and good coordination from regulators at both the central and regional levels (Bank Mandiri Market outlook).

TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN

Meningkatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia dan terciptanya stabilitas ekonomi nasional merupakan tujuan penerapan kebijakan moneter yang berakhir pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2018, keadaan perekonomian di Indonesia dinilai cukup baik dengan stabilitas yang tetap terjaga. Hal ini tercermin dari inflasi yang terjaga, defisit transaksi berjalan yang terkendali, dan sistem keuangan yang tetap stabil. Bank Indonesia memandang terdapat tiga pelajaran penting yang dapat dipetik dari perjalanan perekonomian 2018. Pertama, stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus diperkuat. Kedua, daya saing dan produktivitas harus terus ditingkatkan untuk mendorong momentum pertumbuhan keningkat yang lebih tinggi. Ketiga, sinergi kebijakan antar otoritas menjadi kunci dalam upaya untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.

Terjaganya stabilitas sistem keuangan di tengah meningkatnya tekanan global terjadi karena intermediasi perbankan dan risiko kredit yang terkelola dengan baik. Memasuki tahun 2019, sistem keuangan

OVERVIEW ON BANKING INDUSTRY

The increasing growth of domestic economy and the creation of national economic stability is the objective of monetary policy implementation which results in the improvement of public economic welfare. In 2018, Indonesia's economy was considered to be relatively better than the previous year's with maintained stability. This is reflected in stable inflation rate, controlled current account deficit, and stable financial system. Bank Indonesia viewed that there were three key factors to learn from the economic journey of 2018. First, economic stability and resilience needed to be strengthened. Second, competitiveness and productivity must be continuously improved to drive growth momentum to a higher level. Third, policy synergy between authorities was crucial in the efforts to strengthen national economic structure.

The stability of financial system amid the increasing global pressure was due to banking sector intermediation and well-managed credit risk. Entering 2019, the financial system was expected to remain

diperkirakan akan tetap stabil. Pemerintah bersama-sama dengan seluruh stakeholder terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus bersinergi dalam menjaga kestabilan sistem keuangan nasional

Uang beredar adalah kewajiban sistem moneter yaitu Bank Sentral, Bank Umum (Konvensional dan syariah), dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR (Konvensional dan syariah) terhadap sektor swasta domestik. Uang beredar dapat didefinisikan menjadi dua, yaitu uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang beredar dalam arti luas (M2). Dalam arti sempit, uang beredar meliputi uang kartal dan uang giral. Sedangkan dalam arti luas (sering disebut sebagai likuiditas perekonomian), uang beredar meliputi M1, uang kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Dalam 5 tahun terakhir jumlah uang yang beredar di masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, likuiditas perekonomian (M2) juga mengalami pertumbuhan setiap tahun. Pada awal tahun 2019, likuiditas perekonomian tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,51% (yoy) atau meningkat sebesar Rp294,73 triliun. Akan tetapi, dibandingkan dengan bulan sebelumnya, pertumbuhan likuiditas perekonomian pada awal tahun mengalami penurunan sebesar 1,97% dari Rp5.760,05 triliun pada Desember 2018 menjadi Rp5.646,42 triliun pada Januari 2019. Pada akhir November 2019, posisi uang beredar tercatat Rp6.072,7 triliun atau tumbuh sebesar 6,3 persen dibanding bulan sebelumnya.

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH

Memasuki tahun 2019, nilai tukar rupiah dalam tren yang menguat. Penguatan nilai tukar rupiah didorong oleh aliran masuk modal asing yang disebabkan oleh perekonomian domestik yang kondusif serta ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda. Meredanya ketidakpastian pasar keuangan global memberikan pengaruh kepada menurunnya ketidakpastian dan risiko di negara berkembang sehingga memengaruhi aliran modal ke negara berkembang pada awal tahun 2019.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di perdagangan terakhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp13.831/US\$ atau menguat 0,4%. Sepanjang 2019 rupiah pernah mengalami pelemahan terendah pada Mei 2019 dikisaran Rp14.313/US\$ kemudian berhasil turun pada level ke Rp14.070/US\$ pada bulan berikutnya.

stable. The government, together with all relevant stakeholders, such as Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), and the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC), continued to synergize to maintain the stability of national financial system

Money supply was the obligation of the monetary system, namely the Central Bank, Commercial Banks (Conventional and Sharia), and Rural Credit Banks/BPR (Conventional and Sharia), to the domestic private sector. Money supply could be defined into two classes, namely money supply in the narrow sense (M1) and money supply in the broad sense (M2). In a narrow sense, the money supply includes currency and demand deposits, while in a broad sense (often referred to as economic liquidity), money supply includes M1, quasi money, and securities issued by the monetary system owned by the domestic private sector with a remaining period of up to one year.

In the last 5 (five) years, the amount of money circulating in the public had increased every year. In addition, economic liquidity (M2) experienced growth every year. At the beginning of 2019, economic liquidity recorded growth of 5.51% (yoy) or an increase of Rp294.73 trillion. However, compared to the previous month, economic liquidity growth at the beginning of the year decreased by 1.97% from Rp5,760.05 trillion in December 2018 to Rp5,646.42 trillion in January 2019. At the end of November 2019, the money supply position was recorded at Rp6,072.7 trillion or grew by 6.3 percent compared to the previous month.

DEVELOPMENT OF RUPIAH EXCHANGE RATES

Entering 2019, the Rupiah exchange rate was in a strengthening trend. The strengthening of the Rupiah exchange rate was driven by inflows of foreign capital due to conducive domestic economy conditions and the slight ease in the uncertainties of the global financial market. The easing of uncertainties in global financial markets also contributed to the declining volatility and risk in emerging markets, which affected capital inflows to emerging markets in early 2019.

The Rupiah exchange rate against the United States dollar (US) in the last trading of 2019 was recorded at Rp13,831/US\$ or strengthened by 0.4%. During 2019, the Rupiah experienced the lowest weakening in May 2019 in the range of Rp14,313/US\$, before declining to the level of Rp14,070/US\$ in the following month.

KURS JUAL / SELLING RATE	KURS BELI / BUYING RATE	TANGGAL / DATE	
13.970,51	13.831,50	31 Des 2019	Dec. 31, 2019
14.172,51	14.031,49	29 Nop 2019	Nov. 29, 2019
14.078,04	13.937,96	31 Okt 2019	Oct. 31, 2019
14.245,00	14.103,00	30 Sep 2019	Sept. 30, 2019
14.308,00	14.166,00	30 Agust 2019	Aug. 30, 2019
14.096,00	13.956,00	31 Jul 2019	Jul. 31, 2019
14.212,00	14.070,00	28 Jun 2019	Jun. 28, 2019
14.457,00	14.313,00	31 Mei 2019	May 31, 2019
14.286,00	14.144,00	30 Apr 2019	Apr. 30, 2019
14.315,00	14.173,00	29 Mar 2019	Mar. 29, 2019
14.132,00	13.992,00	28 Feb 2019	Feb. 28, 2019
14.142,00	14.002,00	31 Jan 2019	Jan. 31, 2019

PERGERAKAN SUKU BUNGA

Kebijakan moneter tetap akomodatif sesuai dengan prakiraan inflasi yang terkendali, stabilitas eksternal yang terjaga dan upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perekonomian global yang melambat.

Sampai dengan Desember 2019, suku bunga acuan BI tercatat turun 4 kali sebesar 100 basis poin menjadi 5%. Bank sentral tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 5%. BI masih punya ruang untuk memangkas suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate (7DRRR) dua kali sebanyak 50 basis poin (bps) menjadi 4,5% sepanjang tahun 2020.

INTEREST RATE MOVEMENTS

Monetary policy remained accommodative in accordance with controlled inflation forecasts, maintained external stability, and efforts to maintain the momentum of domestic economic growth amid the sluggish global economy.

As of December 2019, BI's benchmark interest rate was cut down 4 times by 100 basis points to the level of 5%. The central bank still maintains the benchmark interest rate at the level of 5% as it still has an ample room to cut the benchmark BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) twice by 50 basis points (bps) to the level of 4,5% throughout 2020.

PERIODE / PERIOD	BI 7-DAY
DESEMBER 2019 / DECEMBER 2019	5,00%
NOPEMBER 2019 / NOVEMBER 2019	5,00%
OKTOBER 2019 / OCTOBER 2019	5,00%
SEPTEMBER 2019 / SEPTEMBER 2019	5,25%
AGUSTUS 2019 / AUGUST 2019	5,50%
JULI 2019 / JULY 2019	5,75%
JUNI 2019 / JUNE 2019	6,00%
MEI 2019 / MAY 2019	6,00%
APRIL 2019 / APRIL 2019	6,00%
MARET 2019 / MARCH 2019	6,00%
FEBRUARI 2019 / FEBRUARY 2019	6,00%
JANUARI 2019 / JANUARY 2019	6,00%

Ada tiga faktor yang menentukan arah pergerakan BI-7DRRR antara lain tingkat inflasi, pergerakan suku bunga acuan the Fed, dan posisi *current account deficit* (CAD). Ke depan BI masih memiliki peluang untuk memangkas suku bunga acuan 25 basis di 2020

There were 3 (three) factors determining the direction of the BI-7DRRR movement, namely the inflation rate, the movement of the Fed's benchmark interest rate, and the current account deficit (CAD) position. Going forward, BI will still have the opportunity to cut its base rate by 25 bps in 2020.



TINJAUAN OPERASI PERSEGMENT USAHA

Dalam menyediakan jasa perbankan, Bank Jatim melayani usaha pada segmen korporasi & sindikasi, mikro ritel & program, konsumen dan produktif dengan melakukan kegiatan simpan-pinjam.

SEGMENT KREDIT MENENGAH KORPORASI & SINDIKASI

Realisasi Kredit Menengah, Korporasi dan Sindikasi pada tahun 2019 sebesar Rp8.711 miliar, naik sebesar Rp1.791 miliar atau 25,89% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp6.921 miliar yang terdiri dari Kredit Sindikasi, Kredit Konstruksi Properti, Kredit Pembiayaan Piutang, BLUD, Investasi Umum, Kredit Pemda, Kredit Modal Kerja Pola Keppres, *Standby Loan*, Kredit Modal Kerja Umum, Kredit Modal Kerja Pola Rekening Koran (PRK), Kredit Restrukturisasi, dan Kredit Deposito (CCC). Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kredit Sindikasi sebesar Rp1.509 miliar atau 118,98% diikuti Kredit Konstruksi Properti sebesar Rp100.396 juta atau 87% diikuti Kredit BLUD sebesar Rp40.395 juta atau 36,39% diikuti Kredit *Standby Loan* sebesar Rp100.112 juta atau 26,06%.

KREDIT MENENGAH, KORPORASI DAN SINDIKASI

(JUTAAN RUPIAH) (MILLION RUPIAH)	2018	2019	PERTUMBUHAN / GROWTH	
			SELISIH / DIFFERENCE	%
KEPPRES / KEPPRES	611.856	710.415	98.559	16,11%
STANDBY LOAN	453.784	553.895	100.112	26,06%
REKENING KORAN (PRK) / OVERDRAFT (PRK)	3.124.789	3.104.226	(20.563)	(0,66%)
MODAL KERJA UMUM / GENERAL WORKING CAPITAL	216.741	245.869	29.127	13,44%
INVESTASI UMUM / GENERAL INVESTMENTS	766.006	804.984	38.979	5,09%
SINDIKASI / SYNDICATION	1.268.728	2.778.224	1.509.496	118,98%
KONSTRUKSI PROPERTI / CONSTRUCTION PROPERTY	115.393	215.789	100.396	87,00%
BLUD / BLUD	111.017	151.411	40.395	36,39%
KREDIT DEPOSITO (CCC) / DEPOSIT LOANS (CCC)	31.106	33.642	2.536	8,15%
PEMBIAYAAN PIUTANG / RECEIVABLES FINANCING	-	-	-	-
KREDIT PEMDA / LOCAL GOVERNMENT LOANS	-	-	-	-
RESTRUKTURISASI / RESTRUCTURING LOANS	221.116	113.509	(107.607)	(48,67%)
TRADE FINANCE	165	0	(165)	(100%)
TOTAL	6.920.700	8.711.965	1.791.430	25,89%

Berdasarkan komposisi, Kredit Modal Kerja Rekening Koran (PRK) memberikan kontribusi terbesar hingga mencapai 35,6% diikuti dengan Kredit Sindikasi sebesar 31,9% dan Kredit Investasi Umum sebesar 9,2% dari jumlah kredit yang diberikan tahun 2019.

Debitur Kredit Menengah, Korporasi & Sindikasi Bank Jatim tercatat sebanyak 6.210 debitur, turun 1.005 debitur atau 13,93% dibanding dengan tahun 2018 sebanyak 7.215 debitur.

OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

In providing banking services, Bank Jatim serves businesses in the medium, corporation, and syndication; micro, retail and program; consumer; and productive segments by conducting saving and lending activities.

MEDIUM, CORPORATION, AND SYNDICATION LOAN SEGMENT

The actualization of Medium, Corporation, and Syndication Loans in 2019 amounted to Rp8,711 billion, up by Rp1,791 billion or 25.89% compared to 2018 amounted to Rp6,921 billion consisting of Syndicated Loans, Property Construction Loans, Receivables Financing Loans, BLUDs, General Investments, Local Government Loans, Keppres Working Capital Loan Scheme, Standby Loans, General Working Capital Loans, R/C General Working Capital Loan (PRK), Restructuring Loans, and Deposit Loans (CCC). Those increases were mainly due to Syndicated Loans amounting to Rp1,509 billion or 118.98% followed by Property Construction Loans amounting to Rp100,936 million or 87%, BLUDs amounting to Rp40,395 million or 36.39%, and Standby Loans amounting to Rp100,112 million or 26.06%.

DISBURSEMENT OF MEDIUM, CORPORATION, AND SYNDICATION LOAN

Based on composition, the R/C General Working Capital Loan (PRK) provided the largest contribution reaching 35.6%, followed by Syndicated Loans and General Investment Loan reaching 31.9% and 9.2% of the total loans disbursed in 2019.

The number of Medium, Corporation, and Syndication Loans debtors amounted to 6,210 debtors, declined by 1,005 debtors or 13.93% compared to 7,215 debtors recorded in 2018.

(JUTAAN RUPIAH) (MILLION RUPIAH)	2018	2019	PERTUMBUHAN/ GROWTH	
			SELISIH / DIFFERENCE	%
KEPPRES / KEPPRES	1.338	1.499	161	12.03%
STANDBY LOAN	850	634	(216)	(25.41%)
REKENING KORAN (PRK) / OVERDRAFT (PRK)	3.308	2.981	(327)	(9.89%)
MODAL KERJA UMUM / GENERAL WORKING CAPITAL	836	430	(406)	(48.56%)
INVESTASI UMUM / GENERAL INVESTMENTS	301	275	(26)	(8.64%)
SINDIKASI / SYNDICATION	22	27	5	22.73%
KONSTRUKSI PROPERTI / CONSTRUCTION PROPERTY	53	126	73	137.74%
BLUD / BLUD	2	3	1	50.00%
KREDIT DEPOSITO (CCC) / DEPOSIT LOANS (CCC)	439	175	(264)	(60.14%)
PEMBIAYAAN PIUTANG / RECEIVABLES FINANCING	-	-	-	-
KREDIT PEMDA / LOCAL GOVERNMENT LOANS	-	-	-	-
RESTRUKTURISASI / RESTRUCTURING LOANS	65	60	(5)	(7.69%)
TRADE FINANCE	1	0	(1)	(100%)
TOTAL	7.215	6.210	(1.005)	(13.93%)

KREDIT MODAL KERJA POLA KEPPRES

Kredit Modal Kerja Pola Keppres naik sebesar Rp98.559 juta atau 16,11% dari sebesar Rp612 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp710 miliar pada tahun 2019. Sementara jumlah debitur mengalami kenaikan sebesar 161 debitur atau 12,03% dari 1.338 debitur pada tahun 2018 menjadi 1.449 debitur pada tahun 2019, kenaikan tersebut dikarenakan banyaknya proyek strategis nasional sehingga peluang pendaan kepada penyedia kerja meningkat.

STANDBY LOAN

Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* naik sebesar Rp100.112 miliar atau 26,06% dari sebesar Rp454 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp554 miliar pada tahun 2019. Sementara jumlah debitur turun sebanyak 216 debitur atau 25,41% dari 850 debitur pada tahun 2018 menjadi 634 debitur pada tahun 2019, kenaikan tersebut dikarenakan banyaknya proyek strategis nasional sehingga peluang pendaan kepada penyedia kerja meningkat dan fasilitas kredit *standby loan* dapat digunakan oleh group usaha.

KREDIT MODAL KERJA REKENING KORAN (PRK)

Kredit Modal Kerja Rekening Koran (PRK) turun sebesar Rp20.563 miliar atau 0,66% dari sebesar Rp3.125 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp3.104 miliar pada tahun 2019. Sementara jumlah debitur turun sebesar 327 debitur atau 9,89% dari sebanyak 3.308 debitur pada tahun 2018 menjadi 2.981 debitur pada tahun 2019, penurunan tersebut dikarenakan kondisi perekonomian yang menurun pada sehingga adanya penurunan dalam pembiayaan kredit/pelunasan kredit.

KEPPRES WORKING CAPITAL LOAN SCHEME

Keppres Working Capital Loan Scheme increased by Rp98.559 million or 16.11%, from Rp612 billion in 2018 to Rp710 billion in 2019. Meanwhile, the number of debtors increased by 161 debtors or 12.03%, from 1,338 debtors in 2018 to 1,449 debtors in 2019. The increase was due to the large number of national strategic projects so that opportunities for funding employment providers increased.

STANDBY LOAN

Standby Working Capital Loan increased by Rp100.112 million or 26.06%, from Rp454 billion in 2018 to Rp554 billion in 2019. Meanwhile, the number of debtors decreased by 216 debtors or 25.41%, from 850 debtors in 2018 to 634 debtors in 2019. The increase was due to the large number of national strategic projects so that opportunities for funding employment providers increased and the fact that standby loan facility could be utilized by business groups.

R/C GENERAL WORKING CAPITAL LOAN (PRK)

R/C General Working Capital Loan (PRK) decreased by Rp20.563 million or 0.66%, from Rp3.125 billion in 2018 to Rp3.104 billion in 2019. Meanwhile, the number of debtors decreased by 327 debtors or 9.89%, from 3,308 debtors in 2018 to 2,981 debtors in 2019. The decrease was due to the declining economic conditions which affected the settlement of loans.

KREDIT MODAL KERJA UMUM

Kredit Modal Kerja Umum naik sebesar Rp29,127 miliar atau 13,44% dari sebesar Rp217 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp246 miliar pada tahun 2019. Sementara jumlah debitur turun sebanyak 406 debitur atau 48,56% dari sebanyak 836 debitur pada tahun 2018 menjadi 430 debitur pada tahun 2019, kenaikan tersebut dikarenakan masih ada potensi pembiayaan untuk segmen tertentu seperti perdagangan sehingga peluang pendaan meningkat.

KREDIT INVESTASI UMUM

Kredit Investasi naik sebesar Rp39 miliar atau 5,09% dari sebesar Rp766 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp805 miliar pada tahun 2019. Sementara jumlah debitur turun sebesar 26 debitur atau 8,64% dari sebanyak 301 debitur pada tahun 2018 menjadi 275 debitur pada tahun 2019, kenaikan tersebut dikarenakan masih ada potensi pembiayaan untuk meningkatkan usaha/pekerjaan usaha atau penambahan kapasitas mesin dan lain-lain sehingga peluang pendaan meningkat.

KREDIT SINDIKASI

Kredit Sindikasi naik sebesar 118,98% atau Rp1,509 miliar dari Rp1,269 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp2,778 miliar pada tahun 2019. Sementara jumlah debitur naik sebesar 22,73% atau 5 debitur dari sebanyak 22 debitur pada tahun 2018 menjadi 27 debitur pada tahun 2019, kenaikan tersebut dikarenakan masih banyaknya proyek strategis nasional yang berpotensi untuk pembiayaan kredit sindikasi.

KREDIT KONSTRUKSI PROPERTI

Kredit Konstruksi Properti naik sebesar Rp100,396 juta atau 87% dari sebesar Rp115 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp216 miliar pada tahun 2019. Sementara jumlah debitur naik sebanyak 73 debitur atau 137,74% dari sebanyak 53 debitur pada tahun 2018 menjadi 126 debitur pada tahun 2019, kenaikan tersebut dikarenakan banyaknya pengembangan usaha di bidang property peluang pendaan meningkat.

PINJAMAN KEPADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Kredit BLUD naik sebesar Rp40,396 miliar atau 36,39% dari sebesar Rp111 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp151 miliar pada tahun 2019. Sementara jumlah debitur yang naik sebanyak 1 debitur atau 50% dari sebanyak 2 debitur pada tahun 2018 menjadi 3 debitur pada tahun 2019 kenaikan tersebut dikarenakan banyaknya permintaan untuk peningkatan pelayanan pada perusahaan daerah seperti RSUD baik pembangunan maupun sarana prasarana sehingga peluang pendanaan meningkat.

KREDIT DEPOSITO/CASH COLLATERAL CREDIT (CCC)

Kredit Deposito / *Cash Collateral Credit* naik sebesar Rp2,536 miliar atau 8,15% dari sebesar Rp31 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp34 miliar pada tahun 2019. Sementara jumlah debitur turun sebanyak 264 debitur atau 60,14% dari sebanyak 439 debitur pada tahun 2018 menjadi 175 debitur pada tahun 2019, kenaikan tersebut dikarenakan masih ada potensi pembiayaan untuk kredit yang bersifat konsumtif sehingga peluang pendanaan meningkat.

GENERAL WORKING CAPITAL LOAN

General Working Capital Loan increased by Rp29,127 million or 13.44%, from Rp217 billion in 2018 to Rp246 billion in 2019. Meanwhile, the number of debtors decreased by 406 debtors or 48.56%, from 836 debtors in 2018 to 430 debtors in 2019. The increase was due to the financing potential for certain segments, such as trading, which contributed to the increase in funding opportunities.

GENERAL INVESTMENT LOAN

General Investment Loan increased by Rp39 billion or 5.09%, from Rp766 billion in 2018 to Rp805 billion in 2019. Meanwhile, the number of debtors decreased by 26 debtors or 8.64%, from 301 debtors in 2018 to 275 debtors in 2019. The increase was due to the financing potential for business expansion or addition to machine capacity and others, which contributed to the increase in funding opportunities.

SYNDICATED LOAN

Syndicated Loan increased by Rp1,509 billion or 118.98%, from Rp1,269 billion in 2018 to Rp2,778 billion in 2019. Meanwhile, the number of debtors increased by 5 debtors or 22.73%, from 22 debtors in 2018 to 27 debtors in 2019. The increase was due to the large number of national strategic projects which had the potential for disbursing syndicated loans.

PROPERTY CONSTRUCTION LOAN

Property Construction Loan increased by Rp100,396 million or 87%, from Rp115 billion in 2018 to Rp216 billion in 2019. Meanwhile, the number of debtors increased by 73 debtors or 37.74%, from 52 debtors in 2018 to 126 debtors in 2019. The increase was due to the large number of property business development, which contributed to the increase in funding opportunities.

LOANS FOR REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCY (BLUD)

BLUD Loan increased by Rp40,396 million or 36.39%, from Rp111 billion in 2018 to Rp151 billion in 2019. Meanwhile, the number of debtors increased by 1 debtor or 50%, from 2 debtors in 2018 to 3 debtors in 2019. The increase was due to the large demands for improvement of services in regional companies, such as RSUD, both in terms of development and facilities and infrastructure, which contributed to the increase in funding opportunities.

DEPOSIT LOAN/CASH COLLATERAL CREDIT (CCC)

Deposit Loan/Cash Collateral Credit (CCC) increased by Rp2,536 million or 8.15%, from Rp31 billion in 2018 to Rp34 billion in 2019. Meanwhile, the number of debtors decreased by 264 debtors or 60.14%, from 439 debtors in 2018 to 175 debtors in 2019. The increase was due to the financing potential for consumptive loans, which contributed to the increase in funding opportunities.

TRADE FINANCE

Kredit modal kerja *Trade Finance* mengalami penurunan Rp165 juta atau 100% menjadi sebesar Rp0 pada tahun 2019 dari sebesar Rp165 juta pada 2018 dengan jumlah debitur sebanyak 1 debitur. Sementara jumlah debitur turun sebanyak 1 debitur atau 100% dari sebanyak 1 debitur pada tahun 2018 menjadi 0 debitur pada tahun 2019 penurunan tersebut dikarenakan kondisi perekonomian yang menurun yang berdampak pada turunnya pembiayaan kredit.

TRADE FINANCE

Trade Finance Working Capital Loan decreased by Rp165 million or 100%, from Rp165 million in 2018 to Rp0 in 2019. Meanwhile, the number of debtors decreased by 1 debtor or 100%, from 1 debtor in 2018 to 0 debtor in 2019. The decrease was due to the declining economic condition which impacted on the decrease of loan financing.

KREDIT MIKRO RITEL & PROGRAM

Kredit Mikro Ritel & Program terdiri dari Kredit Pundi Kencana, Kredit Mikro Laguna, Kredit Linkage Program BPR, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Resi Gudang, Kredit Bankit KKPA, Kredit Bankit KKOP, KUMK SU-005/KIP, Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKPE), DPM Perikanan, Kredit Jatim Mikro dan Kredit Si UMI. Pada 2019, Perseroan berhasil menyalurkan sebesar Rp3.578 miliar, naik Rp631 miliar atau 7,19% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2.947 miliar untuk Kredit Mikro, Ritel & Program.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada skim kredit Pundi Kencana sebesar Rp390,7 miliar atau 26,25%, Kredit Bankit KKPA sebesar Rp151 miliar atau 39,33%, Kredit Bankit KKOP sebesar Rp1,9 miliar atau 6,99%, Kredit Jatim Mikro sebesar Rp129 miliar atau 17,88%, dan Kredit SiUmi sebesar Rp22,6 miliar atau 41,14%.

Berdasarkan komposisi, Pundi Kencana memberikan kontribusi terbesar hingga mencapai 5,09% diikuti dengan kredit Jatim Mikro sebesar 2,31%, Bankit KKPA sebesar 1,45% dan Linkage BPR sebesar 0,43% dari jumlah kredit periode 31 Desember 2019.

Sampai dengan 31 Desember 2019, jumlah debitur kredit produktif Segmen Mikro, Ritel, dan Program Bank Jatim tercatat sebanyak 47.188 debitur, naik sebanyak 3.167 debitur atau 7,19% dari 44.021 debitur pada 2018.

MICRO, RETAIL, AND PROGRAM LOAN

Micro, Retail, and Program Loan consists of Pundi Kencana Loan, Laguna Micro Loan, Linkage Program BPR Loan, Micro Loan (KUR), Warehouse Receipt Loan, KKPA Bankit Loan, KKOP Bankit Loan, KUMK SU-005/ Government Investment Loan (KIP), Cow Breeding Business Loan (KUPS), Food and Energy Resilience Loan (KKPE), DPM Fishery, Jatim Micro Loan, and Si UMI Loan. In 2019, the Bank managed to disburse Micro, Retail, and Program Loans amounting to Rp3,578 billion, an increase of Rp631 billion or 7.19% compared to the realization of 2018 which was booked at Rp2,947 billion.

The increase was due to the growth of Pundi Kencana loan scheme, KKPA Bankit loan, KKOP Bankit loan, Jatim Micro Loan, and SiUMI Loan by Rp390.7 billion or 26.25%, Rp151 billion or 39.33%, Rp1.9 billion or 6.99%, Rp129 billion or 17.88%, and Rp22.6 billion or 41.14%, respectively.

Based on the composition, Pundi Kencana gave the largest contribution of up to 5.09%, followed by Jatim Micro loan of 2.31%, KKPA Bankit of 1.45% and Linkage BPR of 0.43% from the total loans recorded on December 31, 2019.

As of December 31, 2019, total debtors of productive loan of Micro, Retail, and Program segment of Bank Jatim amounted to 47,188 debtors, an increase of 3,167 debtors or 7.19% from 44,021 debtors recorded in 2018.

PENYALURAN KREDIT PRODUKTIF

DISBURSEMENT OF PRODUCTIVE LOAN

KREDIT MIKRO RITEL & PROGRAM / MICRO, RETAIL, AND PROGRAM LOAN	DES 2018 / DEC. 2018	DES 2019 / DEC. 2019	PERTUMBUHAN / GROWTH	
	JUTAAN RUPIAH) / (MILLION RUPIAH)	(JUTAAN RUPIAH) / (MILLION RUPIAH)	SELISIH / DIFFERENCE	(%)
PUNDI KENCANA	1.488.532	1.879.254	390.723	26,25%
LAGUNA	16.428	4.777	(11.651)	(70,92%)
LINKAGE BPR APEX & NONAPEX	133.192	158.168	24.977	18,75%
KUR	48.157	26.689	(21.468)	(44,58%)
RESI GUDANG / WAREHOUSE RECEIPT	-	70	70	-
BANKIT KKPA	384.107	535.186	151.079	39,33%
BANKIT KKOP	28.308	30.287	1.979	6,99%
KUMK SU-005/KIP	18.121	3.923	(14.198)	(78,35%)
KUPS	45.516	8.478	(37.037)	(81,37%)
KKPE	5.849	851	(4.997)	(85,45%)
DANA PENGUATAN MODAL (DPM) PERIKANAN / CAPITAL STRENGTHENING FUND (DPM) FISHERY	-	-	-	-

KREDIT JATIM MIKRO / JATIM MICRO LOAN	723.906	853.365	129.459	17,88%
KREDIT SI UMI / SI UMI LOAN	55.047	77.691	22.645	41,14%
TOTAL	2.947.161	3.578.740	631.579	21,43%

DEBITOR KREDIT PRODUKTIF

PRODUCTIVE LOAN DEBTORS

DIVISI KREDIT MIKRO RITEL & PROGRAM	DES 2018 / DEC. 2018	DES 2019 / DEC. 2019	PERTUMBUHAN / GROWTH	
			SELISIH / DIFFERENCE	(%)
PUNDI KENCANA			1.665	7,35%
LAGUNA	1.269	396	(873)	(68,79%)
LINKAGE BPR APEX & NONAPEX	112	75	(37)	(33,04%)
KUR	291	115	(176)	(60,48%)
RESI GUDANG / WAREHOUSE RECEIPT	6	7	1	16,67%
BANKIT KKPA	11.152	14.557	3.405	30,53%
BANKIT KKOP	64	64	-	0,00%
KUMK SU-005/KIP	447	68	(379)	(84,79%)
KUPS	15	13	(2)	(13,33%)
KKPE	107	80	(27)	(25,23%)
DANA PENGUATAN MODAL (DPM) PERIKANAN / CAPITAL STRENGTHENING FUND (DPM) FISHERY	2	-	(2)	(100,00%)
KREDIT JATIM MIKRO / JATIM MICRO LOAN	7.311	6.691	(620)	(8,48%)
KREDIT SI UMI / SI UMI LOAN	577	789	212	36,74%
TOTAL	44.021	47.188	3.167	7,19%

KREDIT PUNDI KENCANA

Kredit Pundi Kencana per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.879 miliar, tumbuh sebesar Rp390,7 miliar atau 26,25% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1,488 miliar. Jumlah debitur Kredit Pundi Kencana bertambah sebanyak 1.665 debitur atau 7,35% dari 22.668 debitur pada 2018 menjadi 24.333 debitur pada 2019.

PUNDI KENCANA LOAN

As of December 31, 2019, Pundi Kencana Loan was recorded at Rp1,879 billion, grew by Rp390.7 billion or 26.25% from Rp1,488 billion recorded at the end of 2018. Total debtors of Pundi Kencana Loan in 2019 increased by 1,665 debtors or 7.35%, from 22,668 debtors in 2018 to 24,333 debtors.

KREDIT MIKRO LAGUNA

Kredit Mikro Laguna per 31 Desember 2019 sebesar Rp4,77 miliar, turun sebesar Rp11,6 miliar atau 70,92% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp16,4 miliar. Jumlah debitur Kredit Mikro Laguna berkurang sebanyak 873 debitur atau 68,79% dari 1.269 debitur pada 2018 menjadi 396 debitur pada 2019.

LAGUNA MICRO LOAN

As of December 31, 2019, Laguna Micro Loan was recorded at Rp4.77 billion, declined by Rp11.6 billion or 70.92% from Rp16.4 billion recorded at the end of 2018. Total debtors of Laguna Micro Loan in 2019 decreased by 873 debtors or 68.79%, from 1,269 debtors in 2018 to 396 debtors.

KREDIT LINKAGE PROGRAM BPR

Kredit *Linkage Program* BPR per 31 Desember 2019 sebesar Rp158,16 miliar, naik sebesar Rp24,9 miliar atau 18,75% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp133 miliar.

LINKAGE PROGRAM BPR LOAN

As of December 31, 2019, Linkage Program BPR Loan was recorded at Rp158.16 billion, grew by Rp24.9 billion or 18.75% from Rp133 billion recorded at the end of 2018.

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Kredit Usaha Rakyat per 31 Desember 2019 sebesar Rp4,7 miliar, turun sebesar Rp21,4 miliar atau 44,58% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp48 miliar. Jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat

MICRO LOAN (KUR)

As of December 31, 2019, Micro Loan (KUR) was recorded at Rp26.7 billion, declined by Rp21.5 billion or 44.58% from Rp48.1 billion recorded at the end of 2018. Total debtors of Micro Loan (KUR) in

berkurang sebanyak 176 debitur atau 60,48% dari 291 debitur pada 2018 menjadi 115 debitur pada 2019. Penurunan jumlah kredit dan debitur Kredit Usaha Rakyat disebabkan karena Bank sejak tahun 2015 sudah tidak menyalurkan.

KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI (KUPS)

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) per 31 Desember 2019 sebesar Rp8,4 miliar, turun 81,37% atau sebesar Rp37 miliar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp45 miliar. Jumlah debitur Kredit Usaha Pembibitan Sapi berkurang sebanyak 2 debitur dari 15 debitur pada 2018 menjadi 13 debitur pada 2019. Penurunan jumlah kredit dan debitur Kredit Usaha Pembibitan Sapi disebabkan karena Bank sejak tahun 2015 sudah tidak menyalurkan kredit tersebut.

KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKPE)

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) per 31 Desember 2019 sebesar Rp851 Juta, turun 85,45% atau sebesar Rp4,9 miliar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp5,8 miliar. Jumlah debitur Kredit Ketahanan Pangan dan Energi berkurang sebanyak 27 debitur dari 107 debitur pada 2018 menjadi 80 debitur pada 2019. Penurunan jumlah kredit dan debitur Kredit Ketahanan Pangan & Energi disebabkan karena Bank sejak tahun 2016 sudah tidak menyalurkan.

KREDIT RESI GUDANG

Bank Jatim berhenti menyalurkan Kredit Resi Gudang di tahun 2015, akan tetapi terdapat penyaluran sebesar Rp70 Juta di tahun 2019.

KUMK SU-005/KREDIT INVESTASI PEMERINTAH (KIP)

KUMK SU-005/KIP per 31 Desember 2019 sebesar Rp3,9 miliar, turun sebesar Rp14 miliar atau 78,35% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp18 miliar. Jumlah debitur KUMK SU-005/KIP menurun sebanyak 379 debitur atau 84,79% dari 447 debitur pada 2018 menjadi 68 debitur pada 2019.

KREDIT BANKIT KKPA

Kredit Bankit KKPA per 31 Desember 2019 sebesar Rp535 miliar, naik sebesar Rp151 miliar atau 39,33% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp384 miliar. Jumlah debitur Kredit Bankit KKPA bertambah sebanyak 3.405 debitur atau 30,53% dari 11.152 debitur pada 2018 menjadi 14.557 debitur pada 2019.

KREDIT BANKIT KKOP

Kredit Bankit KKOP per 31 Desember 2019 sebesar Rp30,2 miliar, tumbuh sebesar Rp1,9 miliar atau 6,99% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp28 miliar. Jumlah debitur Kredit Bankit KKOP tidak mengalami perubahan dari tahun 2018 ke tahun 2019.

KREDIT JATIM MIKRO

Kredit Jatim Mikro per 31 Desember 2019 sebesar Rp853,3 miliar, tumbuh sebesar Rp129,45 miliar atau 17,88% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp724 miliar. Jumlah debitur Kredit Jatim Mikro menurun sebanyak 620 debitur atau 8,48% dari 7.311 debitur pada 2018 menjadi 6.691 debitur pada 2019.

2019 decreased by 176 debtors or 60.48%, from 291 debtors in 2018 to 115 debtors. Such decline in the realization and debtors was due to the fact that the Bank stopped disbursing KUR in 2015.

COW BREEDING BUSINESS LOAN (KUPS)

As of December 31, 2019, Cow Breeding Business Loan (KUPS) was recorded at Rp8.4 billion, declined by Rp37 billion or 81.37% from Rp45 billion recorded at the end of 2018. Total debtors of KUPS in 2019 decreased by 2 debtors, from 15 debtors in 2018 to 13 debtors. Such decline in the realization and debtors was due to the fact that the Bank stopped disbursing KUPS in 2015.

FOOD AND ENERGY RESILIENCE LOAN (KKPE)

As of December 31, 2019, Food and Energy Resilience Loan (KKPE) was recorded at Rp851 million, declined by Rp4.9 billion or 85.45% from Rp5.8 billion recorded at the end of 2018. Total debtors of KKPE in 2019 decreased by 27 debtors, from 107 debtors in 2018 to 80 debtors. Such decline in the realization and debtors was due to the fact that the Bank stopped disbursing KKPE in 2016.

WAREHOUSE RECEIPT LOAN

Bank Jatim stopped disbursing Warehouse Receipt Loan in 2015; however, there was a disbursement of Rp70 million made in 2019.

KUMK SU-005/GOVERNMENT INVESTMENT LOAN (KIP)

As of December 31, 2019, KUMK SU-005/KIP was recorded at Rp3.9 billion, declined by Rp14 billion or 78.35% from Rp18 billion recorded at the end of 2018. Total debtors of KUMK SU-005/KIP in 2019 decreased by 379 debtors or 84.79%, from 447 debtors in 2018 to 68 debtors.

KKPA BANKIT LOAN

As of December 31, 2019, KKPA Bankit Loan was recorded at Rp535 billion, grew by Rp151 billion or 39.33% from Rp384 billion recorded at the end of 2018. Total debtors of KKPA Bankit Loan in 2019 increased by 3,405 debtors or 30.53%, from 11,152 debtors in 2018 to 14,557 debtors.

KKOP BANKIT LOAN

As of December 31, 2019, KKOP Bankit Loan was recorded at Rp30.2 billion, grew by Rp1.9 billion or 6.99% from Rp28 billion recorded at the end of 2018. There was no change in the total debtors of KKOP Bankit Loan in 2019.

JATIM MICRO LOAN

As of December 31, 2019, Jatim Micro Loan was recorded at Rp853.3 billion, grew by Rp129.45 billion or 17.88% from Rp724 billion recorded at the end of 2018. Total debtors of Jatim Micro Loan in 2019 decreased by 620 debtors or 8.48%, from 7,311 debtors in 2018 to 6,691 debtors.

KREDIT SIUMI

Kredit SiUMI per 31 Desember 2019 sebesar Rp77,6 miliar, tumbuh sebesar Rp22,6 miliar atau 41,14% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp55 miliar. Jumlah debitur Kredit SIUMI bertambah sebanyak 212 debitur atau 36,74% dari 577 debitur pada 2018 menjadi 789 debitur pada 2019.

SIUMI LOAN

As of December 31, 2019, SiUMI Loan was recorded at Rp77.6 billion, grew by Rp22.6 billion or 41.14% from Rp55 billion recorded at the end of 2018. Total debtors of SiUMI Loan in 2019 increased by 212 debtors or 36.74%, from 577 debtors in 2018 to 789 debtors.

PENYALURAN KREDIT KONSUMTIF**DISBURSEMENT OF CONSUMPTIVE LOAN**

(MILLION RUPIAH) / (JUTAAN RUPIAH)	2018	2019	PERTUMBUHAN / GROWTH	
			SELISIH / DIFFERENCE	%
KRD. MULTIGUNA / MULTIGUNA LOAN	19.236.930	20.855.483	1.618.552	8,41%
KRD. PEGAWAI / EMPLOYEE LOAN	2.078.449	1.987.585	(90.864)	(4,37%)
KRD. PROPERTI / PROPERTY LOAN	1.587.941	1.814.070	226.129	14,24%
KRD. KENDARAAN BERMOTOR* / VEHICLE LOAN*	2.153	2.624	472	21,91%
KRD. AL MABRUR / AL MABRUR BAILOUT LOAN	0	0	0	0
KRD. SERTIFIKASITANAH / LAND RIGHTS CERTIFICATION LOAN	0	0	0	0
TOTAL	22.905.473	24.659.762	1.754.290	7,66%

DEBITUR KREDIT KONSUMTIF**CONSUMPTIVE LOAN DEBTORS**

(MILLION RUPIAH) / (JUTAAN RUPIAH)	2018	2019	PERTUMBUHAN / GROWTH	
			SELISIH / DIFFERENCE	%
KRD. MULTIGUNA / MULTIGUNA LOAN	223.602	221.553	(2.049)	(0,92%)
KRD. PEGAWAI / EMPLOYEE LOAN	4.484	4.062	(422)	(9,41%)
KRD. PROPERTI / PROPERTY LOAN	8.114	8.688	574	7,07%
KRD. KENDARAAN BERMOTOR* / VEHICLE LOAN*	122	201	79	64,75%
KRD. AL MABRUR / AL MABRUR BAILOUT LOAN	0	0	0	0
KRD. SERTIFIKASITANAH / LAND RIGHTS CERTIFICATION LOAN	0	0	0	0
TOTAL	236.322	234.504	(1.818)	(0,77%)

KREDIT MULTIGUNA

Kredit Multiguna per 31 Desember 2019 sebesar Rp20,855 miliar, naik sebesar Rp1,618 miliar atau 8,41% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp19,237 miliar. Jumlah debitur Kredit Multiguna berkurang sebanyak 2.049 debitur atau -0,92% dari 223.602 debitur pada 2018 menjadi 221.553 debitur pada 2019. Peningkatan nilai kredit multiguna disebabkan oleh Diversifikasi Produk Multiguna dan bertepatan dengan moment pelantikan Anggota Legislatif Se Jawa Timur Tahun 2019 sehingga banyak yang menggunakan fasilitas kredit Multiguna.

MULTIGUNA LOAN

As of December 31, 2019, Multiguna Loan (Multipurpose Loan) was realized at Rp20,855 billion, grew by Rp1,618 billion or 8.41% from Rp19,237 billion recorded at the end of 2018. Total debtors of Multiguna Loan in 2019 decreased by 2,049 debtors or 0.92%, from 223,602 debtors in 2018 to 221,553 debtors. Such increase was caused by the diversification of Multiguna Product and coincided with the moment of inauguration of East Java Legislative Members in 2019 so that there were many people using the multipurpose loan facility.

KREDIT PEGAWAI

Kredit Pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.988 miliar, turun sebesar Rp90 miliar atau -4,37% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2.078 miliar. Jumlah debitur Kredit Pegawai berkurang sebesar 422 debitur atau -9,41% dari 4.484 debitur pada tahun 2018 menjadi 4.062 debitur pada tahun 2019. Penurunan kredit pegawai disebabkan berkurangnya permintaan kredit kepada karyawan Bank Jatim.

KREDIT PROPERTI

Kredit Properti per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.814 miliar, naik Rp226.129 miliar atau 14,24% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.588 miliar. Jumlah debitur Kredit Properti bertambah 574 debitur atau 7,07% dari 8.114 debitur pada tahun 2018 menjadi 8.688 debitur pada tahun 2019. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya PKS dengan Pengembang/Developer komersil maupun Subsidi.

KREDIT KENDARAAN BERMOTOR

Kredit Kendaraan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2,62 miliar, naik sebesar Rp472 Juta atau 21,91% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2,15 miliar. Jumlah debitur Kredit Kendaraan Bermotor bertambah sebanyak 79 debitur atau 64,75% dari 112 debitur pada tahun 2018 menjadi 201 debitur pada tahun 2019.

Berdasarkan komposisi, Kredit Multiguna memberikan kontribusi terbesar hingga mencapai 84,57% diikuti dengan Kredit Pegawai sebesar 8,06% serta Kredit Properti sebesar 7,36% dan Kredit Kendaraan bermotor sebesar 0,01% dari jumlah Kredit Konsumtif posisi 31 Desember 2019. Per 31 Desember 2019 jumlah debitur Kredit Konsumtif Bank Jatim tercatat sebanyak 234.504 debitur, turun 1.818 debitur atau -0,77% dibanding dengan tahun 2018 sebanyak 236.322 debitur.

Dari kesimpulan di atas *Skim* Kredit Multiguna memberikan kontribusi terbesar karena adanya *moment* yang tepat yaitu pada saat promo Kredit Multiguna ada pelantikan Anggota Legislatif Se Jawa Timur Tahun 2019 sehingga banyak yang menggunakan fasilitas kredit Multiguna.

Pada Tahun 2020 terdapat Skim Kredit Sertifikasi Hak Tanah yang diberikan Bank Jatim kepada Pengusaha Mikro dan Kecil secara Kelompok, Koperasi, Badan Usaha atau perorangan dan Yayasan Kas Pembangunan (YKP) kota Surabaya yang penggunaannya untuk meningkatkan hak atas tanah yang bukti kepemilikan tanahnya secara hukum tidak ada masalah/sengketa.

PRODUK SIMPANAN

TABUNGAN SIKLUS VALAS

Tabungan Siklus Valas di-launching pada Tahun 2017 dengan mata uang USD dan SGD. Pada tahun 2018 terdapat penambahan mata uang asing yang dapat menjadi alternatif bagi nasabah untuk menyimpan dananya, yaitu mata uang JPY, EUR dan HKD. Sampai dengan akhir 2019 Tabungan Valas yang berhasil dihimpun oleh Bank Jatim adalah sebesar Rp26,39 miliar dengan total nasabah sebanyak 1.242 nasabah. Tabungan Valas tumbuh sebesar 47%.

EMPLOYEE LOAN

As of December 31, 2019, Employee Loan was realized at Rp1,988 billion, declined by Rp90 billion or 4.37% from Rp2,078 billion recorded at the end of 2018. Total debtors of Employee Loan in 2019 decreased by 422 debtors or 9.41%, from 4,484 debtors in 2018 to 4,062 debtors. Such decrease was caused by the declining of loan demands from employees of Bank Jatim.

PROPERTY LOAN

As of December 31, 2019, Property Loan was realized at Rp1,814 billion, grew by Rp226 billion or 14.24% from Rp1,588 billion recorded at the end of 2018. Total debtors of Property Loan in 2019 increased by 574 debtors or 7.07%, from 8,114 debtors in 2018 to 8,688 debtors. Such increase was caused by the growing number of Cooperation Agreements with commercial developers and subsidized developers.

VEHICLE LOAN

As of December 31, 2019, Vehicle Loan was realized at Rp2.62 billion, grew by Rp472 million or 21.91% from Rp2.15 billion recorded at the end of 2018. Total debtors of Vehicle Loan in 2019 increased by 79 debtors or 64.75%, from 122 debtors in 2018 to 201 debtors.

Based on the composition, Multiguna Loan was the largest contributor of the total Consumptive Loan as of December 31, 2019, reaching 84.57%, followed by Employee Loan of 8.06%, Property Loan of 7.36%, and Vehicle Loan of 0.01%. Meanwhile, total debtors of Consumptive Loan of Bank Jatim at the end of 2019 amounted to 234,504 debtors, a decrease of 1,818 debtors or 0.77% compared to the total debtors of 2018 recorded at 236,322 debtors.

From the above discussion, the Multiguna Loan became the largest contributor to total Consumptive Loan due to the right moment of promotion of the product, which was during the inauguration of East Java Legislative Members in 2019, causing many people to use the Multiguna Loan product.

In 2020, there will be a Land Rights Certification Loan Scheme disbursed by the Bank to Micro and Small Entrepreneurs in groups, cooperatives, business entities, or individuals, and Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya, of which the use will be to enhance land rights whose legal proof of land ownership was valid/without dispute.

SAVINGS PRODUCTS

FOREIGN EXCHANGE SIKLUS SAVINGS

The Foreign Exchange Siklus Savings product was launched in 2017 with USD and SGD currencies. In 2018, the Bank added new foreign currencies as an alternative for customers to deposit their funds, namely JPY, EUR, and HKD. Up to the end of 2019, Foreign Exchange Savings of Bank Jatim amounted to Rp26.39 billion with total customers reaching 1,242 customers. In 2019, the Foreign Exchange Savings grew by 47%.

GIRO VALAS

Pada tahun 2019, Bank Jatim telah berhasil menghimpun dana dalam bentuk Giro Valas sebesar Rp12,29 miliar. Pada tahun 2018 giro valas yang dihimpun sebesar Rp12,01 miliar. Jumlah NOA giro valas mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah NOA sebesar 200 nasabah, menurun menjadi 177 nasabah giro pada tahun 2019.

DEPOSITO VALAS

Terjadi peningkatan untuk Outstanding Deposito Valas sebesar 17% pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu senilai Rp7,66 miliar dengan total dana yang berhasil dihimpun sejumlah Rp52,08 miliar. Jumlah nasabah yang berhasil diperoleh pada tahun 2019 adalah 573 nasabah, meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan peningkatan jumlah nasabah sebanyak 101 deposan.

Peningkatan NOA dan nominal produk simpanan Valas karena adanya program promosi yang diberikan kepada nasabah serta beberapa kegiatan yang bekerjasama dengan Dinas terkait.

PRODUK REMITTANCE**INCOMING TRANSFER**

Total nilai transaksi *incoming transfer* (IT) yang diterima Bank Jatim pada tahun 2019 adalah Rp75,14 miliar, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp57,65 miliar. Jumlah transaksi (NOA) IT mengalami peningkatan sebesar 0,49% pada tahun 2019 yaitu sejumlah 449 transaksi dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sejumlah 445 transaksi.

OUTGOING TRANSFER

Total nilai transaksi *Outgoing Transfer* (OT) yang diterima Bank Jatim pada tahun 2019 adalah Rp233,49 miliar. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp144,73 miliar. Jumlah transaksi (NOA) OT mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 19,9%, yaitu sejumlah 910 transaksi dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sejumlah 759 transaksi.

Peningkatan NOA dan nominal produk *remittance* karena transaksi sudah dapat dilakukan di seluruh jaringan Bank Jatim sampai dengan tingkat Cabang Pembantu serta adanya program promosi produk yang diberikan kepada nasabah serta beberapa kegiatan yang bekerjasama dengan Dinas terkait.

PRODUK TRADE FINANCE**SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI**

Jumlah transaksi SKBDN Ekspor yang diterima Bank Jatim selama tahun 2019 adalah sejumlah Rp114,45 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 10% dibandingkan posisi Desember 2018, senilai Rp103,99 miliar. Sedangkan transaksi SKBDN Impor pada tahun 2019 senilai Rp32,67 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 145% dibandingkan posisi Desember 2018, yaitu senilai Rp13,32 miliar.

FOREIGN EXCHANGE GIRO

In 2019, Bank Jatim succeeded in raising Foreign Exchange Giro amounting to Rp12.29 billion, an increase compared to the amount recorded in 2018 at Rp12.01 billion. There was also an increase in the number of NOA foreign exchange giro customers in 2019, from 172 customers in 2018 to 177 customers.

FOREIGN EXCHANGE DEPOSITS

There was an increase of 17% of Rp7.66 billion in the Outstanding Foreign Exchange Deposits in 2019, reaching Rp52.08 billion compared to the realization of 2018. The number of Foreign Exchange Deposits customers obtained in 2019 were 573 customers, a decrease of 16% compared to 2018 with a decrease in the number of customers by 108 depositors.

The increase in NOA and total amount of foreign exchange savings products was due to the promotion program provided to customers and several activities in collaboration with the related Institutions.

REMITTANCE PRODUCTS**INCOMING TRANSFER**

The total value of Incoming Transfer (IT) transactions of Bank Jatim in 2019 was Rp75.14 billion whereas in 2018 it was Rp57.65 billion. The number of IT transactions (NOA) increased by 0.49% in 2019, from 447 transaction in 2019 to 449 transactions.

OUTGOING TRANSFER

The total value of Outgoing Transfer (OT) transactions of Bank Jatim in 2019 was Rp233.49 billion whereas in 2018 it was Rp144.73 billion. The number of OT transactions (NOA) increased by 18% in 2019, from 773 transaction in 2019 to 910 transactions.

The increase in NOA and total amount of remittance products was due to the fact that transactions could be carried out throughout the Bank's network up to the level of Sub-Branch Offices and the product promotion programs provided to customers, as well as several activities in collaboration with related Institutions.

TRADE FINANCE PRODUCTS**DOMESTIC LETTER OF CREDIT (L/C) – SKBDN**

Total export transactions of Domestic L/C or SKBDN received by Bank Jatim in 2019 amounted to Rp114.45 billion, grew by 10% from Rp103.99 billion realized in December 2018. Meanwhile, total import transactions of SKBDN in 2019 amounted to Rp32.67 billion, grew by 145% from Rp13.32 billion realized in December 2018.

LETTER OF CREDIT

Jumlah transaksi L/C Ekspor yang diterima Bank Jatim selama tahun 2019 adalah sejumlah Rp29,36 miliar, dan posisi Desember 2018, senilai Rp7,60 miliar. Transaksi L/C Impor mengalami peningkatan yang juga cukup signifikan pada tahun 2019, dengan pencapaian senilai Rp8,06 miliar bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2018, yaitu Rp2,59 miliar.

DOCUMENTARY COLLECTION

Bank Jatim melayani kebutuhan Importir atau *buyer* yang membutuhkan penerbitan L/C atau SKBDN. Penerbitan L/C atau SKBDN dapat menggunakan fasilitas yang disediakan atau menggunakan 100% dana nasabah. Bagi eksportir atau *seller*, Bank Jatim memberikan layanan berupa pembiayaan ekspor.

Peningkatan NOA dan nominal produk *trade finance* karena adanya program promosi yang diberikan kepada nasabah serta sinergi dengan fasilitas kredit.

LETTER OF CREDIT (L/C)

Total export L/C transactions received by Bank Jatim in 2019 amounted to Rp29.36 billion, an increase compared to the realization in December 2018 recorded at Rp7.60 billion. Total import L/C transactions in 2019 also demonstrated a significant increase from Rp2.59 billion realized in 2018 to Rp8.06 billion.

DOCUMENTARY COLLECTION

Bank Jatim serves the needs of importers or Buyers requiring the issuance of L/C or SKBDN. The issuance of L/C or SKBDN can use the facilities provided or all of customer funds (100%). For exporters or sellers, Bank Jatim provides services in the form of export financing.

Increased in NOA and total amount of trade finance products was due to the promotional programs provided to customers and synergy with credit facilities.

DANA PIHAK KETIGA

Sepanjang 2019, kinerja produk simpanan atau Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan Rp9,618 miliar atau 19,55% yang dikontribusikan dari pertumbuhan Giro sebesar Rp4,552 miliar atau 23,76%, diikuti oleh pertumbuhan Deposito sebesar Rp2,194 miliar atau 19,49%. Serta pertumbuhan Tabungan sebesar Rp2,871 miliar atau 15,30% sebagaimana tabel berikut ini:

SIMPANAN DANA PIHAK KETIGA

(JUTAAN RUPIAH) / (MILLION RUPIAH)	2018	2019	PERTUMBUHAN / GROWTH	
			SELISIH / DIFFERENCE	%
GIRO / GIRO	19.156.869	23.709.144	4.552.275	23,76%
TABUNGAN / SAVINGS	18.771.288	21.642.930	2.871.642	15,30%
DEPOSITO / DEPOSITS	11.262.809	13.457.527	2.194.718	19,49%
TOTAL	49.190.966	58.809.601	9.618.635	19,55%

Berdasarkan komposisi, dana Giro memberikan kontribusi terbesar hingga mencapai 40,32% diikuti dengan dana Tabungan sebesar 36,80% dan dana Deposito sebesar 22,88% dari jumlah penghimpunan dana pihak ketiga tahun 2019. Peningkatan jumlah penghimpunan dana pihak ketiga juga diikuti dengan bertambahnya jumlah nasabah, dimana sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah nasabah Bank Jatim tercatat sebanyak 6.623.708 nasabah, meningkat 645.779 nasabah atau 10,8% dibanding dengan tahun 2018 sebanyak 5.977.929 nasabah. Peningkatan jumlah nasabah pada tahun 2019 terutama didorong oleh peningkatan jumlah nasabah Tabungan sebanyak 623.366 nasabah atau 10,64%, diikuti oleh Giro sebanyak 18.768 nasabah atau 25,92%, dan Deposito sebanyak 3.645 nasabah atau 7,49% dibanding tahun sebelumnya.

THIRD PARTY FUND

Over the course of 2019, the Bank's deposits or Third Party Fund products increased by Rp9,618 billion or 19,55%, which was contributed by the rising Giro of Rp4,552 billion or 23,76%, followed by Deposits at Rp2,194 billion or 19,49%, and Savings at Rp2,871 billion or 15,30% as described in the following table:

THIRD PARTY FUND

Based on the composition, Giro funds contributed the largest to the total Third Party Funds in 2019 amounting to 40,32%, followed by Savings and Deposits at 36,80% and 22,88%, respectively. The growth of total third party funds was also in line with the growing number of customers. Up to the end of 2019, total customers of Bank Jatim were recorded at 6,623,708 customers, an increase of 645,779 customers or 10,8% compared to the total customers of 2018 realized at 5,977,929 customers. This increase was composed of Savings customers amounting to 623,366 customers or 10,64%, Giro customers amounting to 18,768 customers or 10,64%, and Deposits customers amounting to 3,645 customers or 7,49%.

(JUTAAN RUPIAH) / (MILLION RUPIAH)	2018	2019	PERTUMBUHAN / GROWTH	
			SELISIH / DIFFERENCE	%
GIRO / GIRO	72.405	91.173	18.768	25,92%
TABUNGAN / SAVINGS	5.856.836	6.480.202	623.366	10,64%
DEPOSITO / DEPOSITS	48.688	52.333	3.645	7,49%
TOTAL	5.977.929	6.623.708	645.779	10,8%

TABUNGAN

Pada tahun 2019, Bank Jatim telah berhasil menghimpun dana dalam bentuk tabungan sebesar Rp21.642.930 juta yang mengalami pertumbuhan Rp2.871.642 juta atau 15,30%. Kontribusi terbesar dalam peningkatan dana tabungan pada tahun 2019 yang mencapai 4,92% adalah Tabungan Simpeda. Sedangkan produk tabungan lainnya yaitu Tabungan Siklus dengan kontribusi 48,17%, TabunganKu memberikan kontribusi 9,31% dan Simpanan Pelajar 21,31%.

SAVINGS

Bank Jatim's savings funds in 2019 were recorded to reach Rp21,642,930 million, grew by Rp2,871,642 million or 15,30% from the amount realized in 2018. The largest contributor to this growth was Simpeda Savings product reaching 4,92%. Meanwhile, other savings products, namely Siklus Savings, TabunganKu, Bank Jatim Hajj Savings, and Simpanan Pelajar contributed by 17,79%, 11,99%, 0,12%, and 0,22%, respectively.

(JUTAAN RUPIAH) / (MILLION RUPIAH)	2018	2019	PERTUMBUHAN / GROWTH	
			SELISIH / DIFFERENCE	%
SIMPEDA	13.590.542	15.124.888	1.534.346	11,29
TABUNGAN HAJI BANK JATIM / BANK JATIM HAJJ SAVINGS	183.011	26.199	(156.812)	(85,68)
TABUNGANKU	2.053.414	2.594.358	540.944	26,34
SIKLUS	2.905.766	3.850.545	944.779	32,51
SIMPANAN PELAJAR	38.407	46.661	8.254	21,49
SIMPANAN NELAYAN	148	279	131	88,51
JUMLAH / TOTAL	18.771.288	21.642.930	2.871.642	15,30

Jumlah nasabah tabungan pada 2019 tercatat sebanyak 6.480.202 nasabah, dan pada tahun 2018 sebanyak 5.856.836 nasabah, Penjelasan produk - produk Tabungan sebagai berikut:

SIMPEDA

Pada tahun 2019, jumlah Tabungan Simpeda Bank Jatim sebesar Rp15.124 miliar, naik Rp1.534 miliar atau 11,29% dibanding tahun 2018 sebesar Rp13.590 miliar. Seiring dengan peningkatan tersebut, jumlah nasabah tabungan simpeda juga mengalami peningkatan menjadi 2.087.123 nasabah.

TABUNGAN HAJI

Jumlah Tabungan Haji pada 2019 tercatat Rp26 miliar turun Rp156 miliar atau -85,68% dibanding tahun 2018 dari sebelumnya Rp183 miliar pada tahun 2018. Selanjutnya, jumlah nasabah Tabungan Haji menjadi sebanyak 34.436 nasabah.

TABUNGANKU

Jumlah penghimpunan dana dari produk TabunganKu pada tahun 2019 sebesar Rp2.594 miliar, meningkat Rp540 miliar atau 26,34% menjadi Rp2.594 miliar pada tahun 2019. Kenaikan tersebut seiring dengan jumlah nasabah produk TabunganKu sebanyak 3.715.004 nasabah.

Total savings customers in 2019 amounted to 6,480,202 customers, an increase compared to the total savings customers in 2018 recorded at 5,856,836 customers. The following discussion describes the Bank's savings product performance in 2019.

SIMPEDA

In 2019, the Bank recorded the realization of Simpeda savings amounting to Rp15,124 billion, an increase of Rp1,534 billion or 11,29% from Rp13,590 billion booked in 2018. In line with such increase, total customers of Simpeda savings also increased to 2,087,123 customers.

HAJJ SAVINGS

In 2019, the Bank recorded the realization of Hajj Savings amounting to Rp26 billion, a decrease of Rp156 billion or 85,68% from Rp183 billion booked in 2018. Meanwhile, total customers of Hajj Savings in 2019 were recorded at 34,436 customers.

TABUNGANKU

In 2019, the Bank recorded the realization of Tabunganku savings amounting to Rp2,594 billion, an increase of Rp540 billion or 26,34% from Rp2,053 billion booked in 2018. In line with such increase, total customers of Tabunganku savings also increased to 3,715,004 customers.

SIKLUS

Jumlah penghimpunan dana dari tabungan siklus pada tahun 2018 sebesar Rp2.905 miliar, meningkat Rp944 miliar atau 32,51% menjadi Rp3.850 miliar pada tahun 2019. Kenaikan tersebut seiring dengan jumlah nasabah tabungan siklus menjadi sebanyak 387.282 nasabah.

SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL)

Pada tahun 2019, jumlah Simpanan Pelajar (SimPel) Bank Jatim sebesar Rp46 miliar, lebih tinggi Rp8 miliar atau 21,49% dibanding tahun 2018 sebesar Rp38 miliar. Seiring dengan peningkatan tersebut, jumlah nasabah tabungan simpeda juga mengalami peningkatan menjadi 251.883 nasabah.

SIMPANAN NELAYAN

Pada tahun 2019, jumlah Simpanan Nelayan Bank Jatim sebesar Rp279 juta, meningkat sebesar Rp131 juta atau 88,51% dibanding tahun 2018 sebesar Rp148 juta. Seiring dengan peningkatan tersebut, jumlah nasabah tabungan simpeda juga mengalami peningkatan menjadi 184 nasabah.

GIRO

Pada tahun 2019, Bank Jatim telah berhasil menghimpun dana dalam bentuk giro sebesar Rp23.721 miliar mengalami peningkatan Rp4.552 miliar atau 23,75% dibanding dengan tahun 2018 sebesar Rp19.168 miliar. Pertumbuhan giro dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah nasabah giro yang tercatat sebanyak 91.173 nasabah mengalami peningkatan 18.768 nasabah atau 25,92% dibandingkan tahun 2018 sebanyak 72.405 nasabah.

(JUTAAN RUPIAH) / (MILLION RUPIAH)	2018	2019	PERTUMBUHAN / GROWTH	
			SELISIH / DIFFERENCE	%
GIRO PEMDA / LOCAL GOVERNMENT GIRO	12.227.052	17.320.587	5.093.535	41.65
GIRO UMUM / GENERAL GIRO	6.929.817	6.388.557	(541.260)	(7.81)
JUMLAH / TOTAL	19.156.869	23.709.144	4.552.275	23.76

GIRO PEMDA

Giro Pemda adalah giro milik pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II. Giro Pemda terealisasi sebesar Rp17.320 miliar pada 31 Desember 2019, meningkat sebesar Rp5.093 miliar atau 41,65% dari Rp12.227 miliar pada 31 Desember 2018.

GIRO UMUM

Giro Umum adalah giro milik perusahaan swasta maupun milik Dinas instansi pemerintah di luar pemda. Giro Umum terealisasi sebesar Rp6.388 miliar pada 31 Desember 2019, mengalami penurunan Rp541 miliar atau -7,81% dari Rp6.929 miliar pada 31 Desember 2018.

DEPOSITO BERJANGKA

Deposito Bank Jatim dapat dijadikan jaminan kredit dengan suku bunga yang diberikan kompetitif dan dapat dilakukan negosiasi. Pada tahun 2019, Bank Jatim telah berhasil menghimpun dana dalam bentuk deposito sebesar Rp13.457 miliar yang mengalami peningkatan Rp2.194 miliar atau 19,48%

SIKLUS

In 2019, the Bank recorded the realization of Siklus savings amounting to Rp3.850 billion, an increase of Rp944 billion or 32.51% from Rp2.905 billion booked in 2018. In line with such increase, total customers of Siklus savings also increased to 387m282 customers.

SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL)

In 2019, the Bank recorded the realization of Simpanan Pelajar (SimPel) savings amounting to Rp46 billion, an increase of Rp8 billion or 21.49% from Rp38 billion booked in 2018. In line with such increase, total customers of Tabunganku savings also increased to 251.883 customers.

SIMPANAN NELAYAN

In 2019, the Bank recorded the realization of Simpanan Nelayan savings amounting to Rp279 million, an increase of Rp131 million or 88.51% from Rp148 million booked in 2018. In line with such increase, total customers of Simpanan Nelayan savings also increased to 184 customers.

GIRO

The Bank managed to realize Giro or Current Accounts in 2019 amounting to Rp23,721 billion, an increase of Rp4,552 billion or 23,75% compared to the amount recorded in 2018 at Rp19,168 billion. This growth was affected by the increase in total giro customers in 2019 amounting to 91,173 customers, up 18,768 customers or 25,92% from 72,405 customers recorded in 2018.

LOCAL GOVERNMENT GIRO

This is a giro product for level I and level II local government. As of December 31, 2019, the amount of local government giro was realized at Rp17,320 billion, an increase of Rp5,093 billion or 41.65% compared to the amount realized on December 31, 2018 at Rp12,227 billion.

GENERAL GIRO

This is a giro product offered to individual and private company customers, as well as government offices other than local government. As of December 31, 2019, the amount of general giro was realized at Rp6,388 billion, a decrease of Rp541 billion or 7.81% compared to the amount realized on December 31, 2018 at Rp6,929 billion.

TIME DEPOSITS

Bank Jatim's Deposit product can be used as collateral for loans with competitive interest rates, and is negotiable. In 2019, the Bank's deposit amounted to Rp13,457 billion, grew by Rp2,194

dibanding dengan tahun 2018 sebesar Rp11.262 miliar. Bank Jatim juga berhasil menarik nasabah sebanyak 52.333 nasabah pada tahun 2019, tumbuh sebanyak 3.645 nasabah atau 7,49% dari sebanyak 48.688 nasabah pada tahun 2018..

billion or 19,48% from Rp11,262 billion realized in 2018. Meanwhile, total deposit customers of the Bank in 2019 amounted to 52,333 customers, grew by 3,645 customers or 7,49% from 48,688 customers recorded in 2018.

TRESURI

Bisnis Tresuri Bank Jatim terdiri dari portofolio penempatan pada Bank Indonesia, interbank call money, deposito, surat berharga dan reverse repo. Pada 2019, bisnis treasury mengalami peningkatan dengan kenaikan portofolio sebesar 143,06% dari Rp20.766 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp29.707 miliar pada tahun 2019. Keseluruhan portofolio tersebut terdiri dari penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp3.399 miliar, Interbank Call Money sebesar Rp6.025 miliar, Deposito sebesar Rp2.322 miliar, kepemilikan Surat Berharga sebesar Rp8.919 miliar serta reverse repo sebesar Rp5.832 miliar. Selanjutnya peningkatan masing-masing portofolio adalah sebagai berikut

TREASURY

The Treasury Business segment of Bank Jatim consists of the placement with Bank Indonesia, interbank call money, deposits, securities, and reverse repo. In 2019, the treasury business recorded an increase of 143.06%, from Rp20.766 billion posted in 2018 to Rp29.707 billion. This was caused by the positive realization in several components of treasury segment, namely placement with Bank Indonesia at Rp3.399 billion, interbank call money at Rp6.025 billion, deposits at Rp2.322 billion, securities ownership at Rp8.919 billion, and reverse repo at Rp5.832 billion. The increase in each component of treasury segment is described below:

PORTOFOLIO TRESURI / TREASURY PORTFOLIO	REALISASI DES 2018 / REALIZATION IN DEC. 2018		TARGET DES 2019 / TARGET FOR DEC. 2019	REALISASI DES 2019 / REALIZATION IN DEC. 2019		PENCAPAIAN (%) / ACHIEVEMENT (%)	
	NOMINAL	(%)		NOMINAL	(%)	DES 2019 / DEC 2019	YOY
(JUTAAN RUPIAH / MILLION RUPIAH)							
PENEMPATAN PADA BI PLACEMENT WITH BI	7.100.000	34,19	1.416.746,00	3.399.584,09	11,44	239,96	47,88
PENEMPATAN PADA BANK LAIN PLACEMENT WITH OTHER BANK	6.163.000	29,68	6.898.664,73	8.347.000,00	28,10	120,99	135,44
SURAT BERHARGA SECURITIES	7.503.066	36,13	7.541.439,06	8.919.967,27	30,03	118,28	118,88
TAGIHAN REVERSE REPO REVERSE REPO RECEIVABLES	-	-	6.461.221,09	5.832.348,98	19,63	90,27	-
TAGIHAN REPO REPO RECEIVABLES	-	-	-	1.038.431,75	3,50	-	-
PINJAMAN PADA BANK LAIN LOANS WITH OTHER BANK	-	-	-	2.171.000,00	7,30	-	-
TOTAL TOTAL	20.766.066,00	100	22.318.070,88	29.707.332,08	100	133,11	143,06

Dari sisi pendapatan bunga atas hasil investasi seluruh portofolio yang dikelola oleh Tresuri juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2019 jika dibandingkan dengan Tahun 2018. Perubahan komposisi portofolio dengan memperbesar komposisi di kepemilikan Surat Berharga dan Interbank Call Money berhasil memberikan hasil investasi yang lebih besar pada tahun 2019. Secara keseluruhan, pendapatan bunga Tresuri yang dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.463 miliar, pendapatan tersebut naik Rp398 miliar dari Rp1.065 miliar pada tahun 2018. Selanjutnya rincian pendapatan bunga adalah sebagai berikut:

In terms of interest income on investment returns, all treasury portfolios also experienced a significant increase in 2019 when compared to 2018. Changes in portfolio composition by increasing the composition in ownership of Securities and Interbank Call Money succeeded in providing greater investment returns on 2019. Overall, treasury interest income in 2019 amounted to Rp1,463 billion, increased by Rp398 billion from Rp1,065 billion recorded in 2018. The breakdown of interest income of treasury is as follows:

PENDAPATAN BUNGA TRESURI (JUTAAN RUPIAH) TREASURY INTEREST INCOME (MILLION RUPIAH)	REALISASI DES 2018 / REALIZATION IN DEC. 2018		TARGET DES 2019 / TARGET FOR DEC. 2019	REALISASI DES 2019 / REALIZATION IN DEC. 2019		PENCAPAIAN (%) / ACHIEVEMENT (%)	
	NOMINAL	(%)		NOMINAL	(%)	DES 2019 / DEC. 2019	YOY
PENEMPATAN PADA BI PLACEMENT WITH BI	71.489,78	6,71	56.939,02	39.345,81	2,69	69,10	55,04
PENEMPATAN PADA BANK LAIN PLACEMENT WITH OTHER BANK	392.525,84	36,84	383.406,88	445.527,71	30,44	116,20	113,50
SURAT BERHARGA SECURITIES	427.884,70	40,16	408.783,75	622.053,14	42,50	152,17	145,38
TAGIHAN REVERSE REPO REVERSE REPO RECEIVABLES	173.649,98	16,30	269.873,66	356.627,72	24,37	132,15	205,37
TOTAL TOTAL	1.065.550,29	100	1.119.003,31	1.463.554,38	100	130,79	137,35

Portofolio Penempatan dana pada Bank Indonesia bertujuan untuk memelihara rasio likuiditas Bank dan terbagi dalam 2 (dua) instrumen yaitu *Deposit Facility* dan *Term Deposit*. Pada tahun 2019, *deposit facility* tercatat sebesar Rp2.549 miliar, menurun sebesar Rp3.350 miliar dari Rp5.900 miliar pada tahun 2018. Sedangkan *Term Deposit* tercatat sebesar Rp849 miliar, turun sebesar sebesar Rp350 miliar dari Rp1.200 miliar Tahun 2018. Penurunan portfolio atas penempatan pada Bank Indonesia tersebut merupakan salah satu strategi Bank dalam mengoptimalkan pendapatan bunga dimana sebagian besar portfolionya dialihkan ke instrumen-instrumen investasi lain yang memberikan hasil investasi lebih besar. Pengelolaan portfolio ini di tahun 2019 menghasilkan pendapatan bunga sebesar Rp39 miliar, pendapatan tersebut turun sebesar Rp32 miliar dari Rp71 miliar pada tahun 2018.

Pada tahun 2019, untuk Penempatan Pada Bank Lain dalam bentuk portfolio Interbank Call Money (*placement*) tercatat Rp6.025 miliar, meningkat sebesar Rp2.437 miliar dibanding pada tahun 2018 sebesar Rp3.588 miliar, sedangkan portfolio *Interbank Call Money (borrowing)* tercatat sebesar Rp2.170 miliar. Peningkatan portfolio *Interbank Call Money* disebabkan karena strategi perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan dikarenakan *rate* yang ditawarkan cukup kompetitif serta terdapat peningkatan dana kelolaan. Sedangkan untuk Penempatan Pada Bank Lain dalam bentuk portfolio Deposito mengalami penurunan sebesar Rp253 miliar dari Rp2.575 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp2.322 miliar pada tahun 2019. Penurunan portfolio Deposito disebabkan karena berkurangnya jumlah *Counterparty* dan juga terdapat perubahan limit terhadap *Counterparty* yang dapat menerima transaksi deposito antar Bank jika dibandingkan dengan tahun 2018. Sehingga secara keseluruhan, pengelolaan portfolio Penempatan pada Bank Lain di tahun 2019 menghasilkan pendapatan bunga sebesar Rp445 miliar, pendapatan tersebut naik sebesar Rp53 miliar dari Rp392 miliar pada tahun 2018.

Portfolio Surat berharga per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.416 miliar atau 118,88% dari Rp7.503 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp8.919 miliar pada tahun 2019. Surat Berharga mengalami peningkatan khususnya pada Surat berharga Pemerintah dan SBI/SDBI dikarenakan Pembelian Surat Berharga Pemerintah dan SBI/SDBI ini dilakukan dalam rangka pemenuhan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Sedangkan untuk Surat Berharga Korporasi (non-Pemerintah) digunakan selain dalam rangka pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) juga digunakan untuk menambah pendapatan Bank. Pengelolaan portfolio ini di tahun 2019 menghasilkan pendapatan bunga sebesar Rp622 miliar, pendapatan tersebut naik sebesar Rp192 miliar dari Rp427 miliar pada tahun 2018.

Untuk portfolio *Reverse Repo* dengan Bank Indonesia yang dikelola Bank pada tahun 2019 sebesar Rp2.171 miliar menghasilkan pendapatan bunga sebesar Rp356 miliar yang naik Rp183 miliar dari Rp173 miliar pada tahun 2018.

Selain mengelola posisi *trading* dan *banking book*, Bisnis Tresuri Bank Jatim juga memberikan layanan tresuri untuk Nasabah dalam rangka menambah *fee-based income* bagi Bank Jatim. Pada Tahun 2019, volume transaksi untuk produk forex Bank Jatim terhadap Nasabah sebesar Rp356 miliar yang mengalami kenaikan sebesar 27,29% dari Tahun 2018 sebesar Rp253 miliar. Sedangkan volume transaksi Bank Notes selama Tahun 2019 tercatat sebesar Rp128 miliar.

The portfolio of placement with Bank Indonesia aimed to maintain the Bank's liquidity ratio and was divided into 2 (two) instruments, namely the *Deposit Facility* and *Term Deposit*. In 2019, *deposit facility* reached Rp2,549 billion, a decrease of Rp3,350 billion from Rp5,900 billion in 2018. Meanwhile, *Term Deposit* reached Rp849 billion, a decrease of Rp350 billion from Rp1,200 billion in 2018. The decrease in this portfolio was one of the Bank's strategies in optimizing interest income, in which most of its portfolios were transferred to other investment instruments that provided greater investment returns. The management of this portfolio in 2019 generated interest income of Rp39 billion, a decrease of Rp32 billion from the interest income realized in 2018 at Rp71 billion.

In 2019, the portfolio of placement with other banks in the form of *Interbank Call Money (placement)* reached Rp6,025 billion, an increase of Rp2,437 billion compared to the realization of 2018 at Rp3,588 billion, while the portfolio of *Interbank Call Money (borrowing)* were recorded at Rp2,170 billion. The increase in *Interbank Call Money* portfolio was due to the Bank's strategy to maximize revenue as the rates offered were quite competitive, coupled with an increase in managed funds. Placement with other banks in the form of *Deposits* decreased by Rp253 billion, from Rp2,575 billion in 2018 to Rp2,322 billion in 2019. This decrease was due to a decline in the number of *Counterparties*, coupled with a change in limits for *Counterparties* that could receive *Interbank deposit* transactions compared to that of 2018. Overall, the management of portfolio of placement with other banks in 2019 resulted in interest income of Rp445 billion, an increase of Rp53 billion from Rp392 billion recorded in 2018.

The portfolio of securities as of December 31, 2019 increased by Rp1,416 billion or 118.88% from Rp7,503 billion in 2018 to Rp8,919 billion. This portfolio experienced an increase specifically in Government Securities and SBI/SDBI due to the fact that the purchase of Government Securities and SBI/SDBI was carried out in order to fulfill the Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) ratio. Meanwhile, Corporate Securities (non-Government) were used to fulfill the Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) as well as to increase the Bank's income. The management of this portfolio in 2019 generated interest income of Rp622 billion, increased by Rp192 billion from Rp427 billion in 2018.

Reverse Repo portfolio with Bank Indonesia managed by the Bank in 2019 amounted to Rp2,171 billion, resulting in interest income of Rp356 billion, an increase of Rp183 billion from Rp173 billion in 2018.

In addition to managing trading and banking book positions, Bank Jatim's Treasury Business also provided treasury services for customers in order to increase fee-based income for Bank Jatim. In 2019, the transaction volume for Bank Jatim's forex products to customers amounted to Rp356 billion, an increase of 27.29% from Rp253 billion recorded in 2018, while the transaction volume of Bank Notes during 2019 was recorded at Rp128 billion.

BANK JATIM KUSTODIAN

Jasa Kustodian Bank Jatim mendapatkan ijin operasi oleh OJK berdasarkan surat OJK nomor: S-4/PM.2/2019 tanggal 29 Januari 2019. Bank Jatim Kustodian merupakan bagian dari Divisi Hubungan Kelembagaan & Bisnis, Sub Divisi Priority Banking & Kustodian, adapun Jasa-jasa yang diberikan diantaranya:

- Penyimpanan (*safekeeping*) dan administrasi atas Efek-efek maupun dokumen berharga lainnya
- Penyelesaian transaksi jual dan beli Efek berbentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scripless*)
- Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan Efek-efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah (*corporate action*)
- Perwakilan (*proxy*) pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi
- *Sub-Registry* untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi Efek
- Penyampaian laporan (*reporting*) dan informasi (information) yang terkait dengan Efek-efek dan/atau dokumen berharga milik nasabah yang disimpan dan diadministrasikan oleh Bank Jatim Kustodian.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank Jatim Kustodian memiliki nasabah Divisi Tresuri Bank Jatim. Nilai portofolio yang disimpan pada 31 Desember 2019 sebesar Rp8.000.000.000, (tidak *audited*).

Bank Jatim melindungi portofolio nasabah yang disimpan di kustodian terhadap kemungkinan kerugian atau kesalahan dalam transaksi yang terjadi pada kegiatan kustodian sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

KINERJA SEGMENT UNIT USAHA SYARIAH

Perluasan jaringan menjadi faktor pendukung berkembangnya UUS Bank Jatim. Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dengan mudah melalui jaringan UUS, meliputi 7 (Tujuh) Kantor Cabang Syariah (KCS), 10 (Sepuluh) Kantor Cabang Pembantu Syariah, 10 (Sepuluh) *Payment Point* Syariah, 191 Kantor Layanan Syariah (KLS), 23 ATM dan 6 Mobil Kas Keliling.

FUNDING

Realisasi *funding* pada tahun 2019 sebesar Rp1.645.507 juta, turun sebesar Rp5.100 juta atau (0,31)% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.650.607 juta, namun penurunan tersebut di komposisi deposito karena ada penarikan dana BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sebesar Rp417.613 juta sepanjang tahun 2019. Sedangkan dana CASA meningkat sebesar Rp218.773 juta atau 49,72% dibandingkan tahun 2018 sebesar 439.984 juta.

Berdasarkan komposisi, Tabungan Umroh iB Amanah mengalami kenaikan terbesar yaitu 25,93% atau sebesar Rp489.493 juta, sedangkan untuk produk *funding* lain yang mengalami peningkatan yaitu Tabungan Barokah yang meningkat sebesar Rp27.830 juta atau 13,01%, Tabungan Haji Amanah sebesar Rp186.312 juta atau 265,87%, Tabungan Simpel iB sebesar Rp1.340 juta atau 32,62%, Tabunganku iB sebesar Rp9.350 juta atau

BANK JATIM CUSTODIAN

Bank Jatim obtained an operating permit for custodian services from the OJK under the letter No. S-4/PM.2/2019 dated January 29, 2019. Bank Jatim Custodian is part of the Institutional & Business Relations Division, Priority Banking & Custodian Sub-Division. Services provided by the Bank include:

- Safekeeping and administration of securities and other valuable documents
- Settlement of sale-purchase transactions of Securities with scrip or without scrip (*scripless*)
- Management of customer's rights over ownership of securities held so that the rights are effective in the customer's account (*corporate action*)
- Proxy at the General Meeting of Shareholders and General Meeting of Bondholders
- Sub-Registry to serve investors conducting Securities transactions and investments
- Submission of reports and information related to securities and/or valuable documents belonging to customers, which are stored and administered by Bank Jatim Custodian.

On December 31, 2019, Bank Jatim Custodian had customers in the Treasury Division of Bank Jatim. The portfolio value recorded on December 31, 2019 was Rp8,000,000,000 (unaudited).

Bank Jatim protects customer portfolios deposited in the custodian against possible losses or errors in transactions occurring in the custodial activities in accordance with the provisions of Financial Services Authority.

PERFORMANCE OF SHARIA BUSINESS UNIT

Network expansion is a supporting factor for the development of Sharia Business Unit (UUS) of Bank Jatim. Customers can conduct banking transactions easily through the Sharia Business Unit network which cover 7 (seven) Sharia Branch Offices (KCS), 10 (ten) Sharia Sub-Branch Offices, 10 (ten) Sharia Payment Points, 191 Sharia Service Offices (KLS), 23 ATMs, and 6 Mobile Cash Units.

FUNDING

Realization of funding in 2019 amounted to Rp1.645.507 million, a decrease of Rp5,100 million or 0.31% compared to the realization of 2018 recorded at Rp1,650,607 million. The decrease was in the composition of deposits due to withdrawal of BPKH funds (Haji Financial Management Agency) amounting to Rp417,613 million during 2019. Meanwhile, CASA fund increased by Rp218,773 million or 49.72% compared to that realization of 2018 recorded at Rp439,984 million.

Based on the composition, iB Amanah Umrah Savings experienced the largest increase of 25.93% or Rp489,493 million, followed by the increase in Barokah Savings by Rp27,830 million or 13.01%, Haji Amanah Savings by Rp186,312 million or 265.87%, SimPel Savings iB by Rp1,340 million or 32.62%, Tabunganku iB by Rp9,350 million or 30.42%, Barokah Sejahtera Savings by Rp4,911 million or 201.84%, and Savings Plans by Rp984 million

30,42%, Tabungan Barokah Sejahtera sebesar Rp4,911 juta atau 201,84% dan Tabungan Rencana sebesar Rp984 juta atau 8906,11%. Sedangkan produk funding yang mengalami penurunan adalah Giro Amanah sebesar Rp(12,444) juta atau (10,65)% dan Deposito Barokah sebesar Rp(223,874) juta atau (18,49)%.

Pertumbuhan jumlah *funding* diikuti dengan bertambahnya jumlah nasabah, dimana sampai dengan 31 Desember 2018 jumlah nasabah funding UUS Bank Jatim tercatat mengalami pertumbuhan dari sebanyak 113.782 nasabah di tahun 2018 menjadi 198.913 nasabah di 2019, naik sebanyak 85.131 nasabah atau 74,82% dibanding dengan tahun 2018. Pertumbuhan jumlah nasabah pada tahun 2019 disebabkan terjadi kenaikan jumlah nasabah Giro Amanah 20,89%, Tabungan Barokah 14,75%, Tabungan Haji Amanah 165,20%, TabunganKu 19,51%, Tabungan Simpel 24,49%, Tabungan Barokah Sejahtera 314,29%, Tabungan Umroh iB Amanah 25,99%, Tabungan Rencana 1275% dan Deposito Barokah 6,47%.

or 8906.11%. Funding products that experienced a decrease were Giro Amanah by Rp12,444 million or 10.65% and Barokah Deposits by Rp223,874 million or 18.49%.

The growth of total funding was followed by an increase in the number of customers. As of December 31, 2019 the number of funding customers of Sharia Business Unit of Bank Jatim amounted to 198,913 customers, an increase of 85,131 customers or 74.82% compared to the total customers of December 31, 2018 recorded at 113,782 customers. This growth was due to an increase in the number of customers of Giro Amanah by 20.89%, Barokah Savings by 14.75%, Haji Amanah Savings by 165.20%, TabunganKu by 19.51%, SimPel Savings 24.49%, Barokah Sejahtera Savings 314.29%, iB Amanah Umrah Savings by 25.99%, Savings Plans by 1275%, and Barokah Deposits by 6.47%.

Nasabah Funding Tahun 2018 - 2019

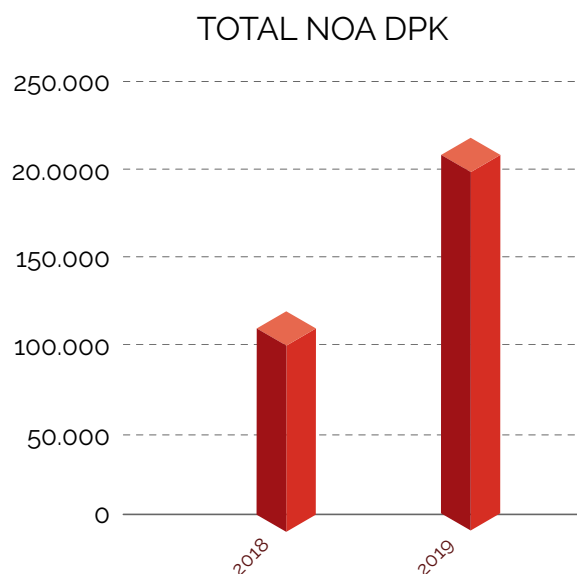
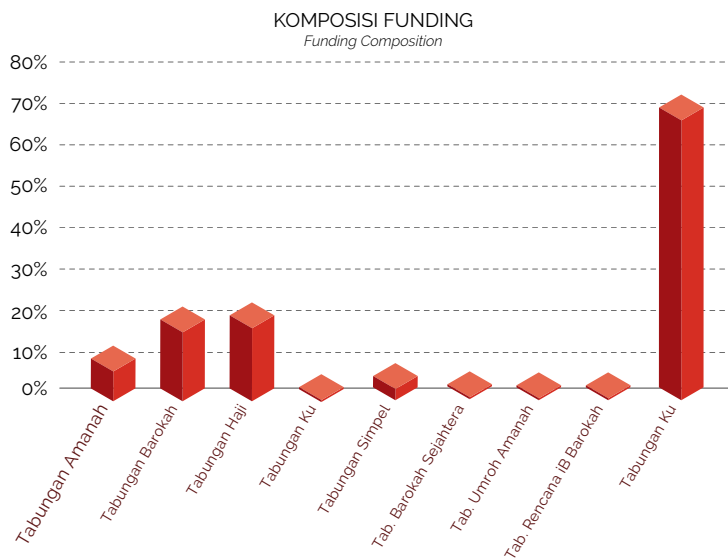
Funding Customers in 2018-2019

KETERANGAN	POSISI / POSITION		KENAIKAN / INCREASE		DESCRIPTION
	DES-19 / DEC. 19	DES-18 / DEC. 18	SELISIH / DIFFERENCE	%	
GIRO AMANAH	924	1.117	193	20,89%	Giro Amanah
TAB. BAROKAH	29.548	33.907	4.359	14,75%	Barokah Savings
TAB. HAJI AMANAH	43.695	115.881	72.186	165,20%	Haji Amanah Savings
TAB. BAROKAH SEJAHTERA	14	58	44	314,29%	Barokah Sejahtera Savings
TAB. RENCANA IB BAROKAH	24	330	306	1275,00%	iB Barokah Savings Plan
TABUNGANKU IB	25.014	29.893	4.879	19,51%	TabunganKu iB
TABUNGAN SIMPEL IB	11.233	13.984	2.751	24,99%	SimPel iB Savings
TABUNGAN UMROH IB AMANAH	1.012	1.275	263	25,99%	Umroh iB Amanah Savings
DEPOSITO BAROKAH	2.318	2.468	159	6,47%	Barokah Deposits
TOTAL	113.782	198.913	86.131	74,82%	TOTAL

Komposisi Funding

Funding Composition

KETERANGAN / DESCRIPTION	2019	KOMPOSISI/COMPOSITION
GIRO AMANAH	104.441.366.517	6,35%
TAB. BAROKAH / BAROKAH SAVINGS	241.672.203.065	14,69%
TAB. HAJI AMANAH / HAJI AMANAH SAVINGS	256.389.391.946	15,58%
TAB. BAROKAH SEJAHTERA / BAROKAH SEJAHTERA SAVINGS	7.344.957.782	0,45%
TAB. RENCANA IB BAROKAH / IB BAROKAH SAVINGS PLAN	955.174.818	0,06%
TABUNGANKU IB	40.088.117.966	2,44%
TABUNGAN SIMPEL IB / SIMPEL IB SAVINGS	5.450.015.276	0,33%
TABUNGAN UMROH IB AMANAH / UMROH IB AMANAH SAVINGS	2.376.967.959	0,14%
DEPOSITO BAROKAH / BAROKAH DEPOSITS	986.749.448.476	59,97%
TOTAL	1.645.507.643.805	100,00%



GIRO AMANAH

Dibanding tahun 2018, Giro Amanah mengalami penurunan sebesar Rp(12.444) juta atau (10,65)% dari sebesar Rp116.885 juta menjadi Rp104.441 juta pada tahun 2019. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 193 nasabah atau 20,89% dari 924 nasabah menjadi 1.117 nasabah pada tahun 2019.

GIRO AMANAH

In 2019, Giro Amanah was recorded at Rp104,441 million, declined by Rp12,444 million or 10.65% from Rp116,885 million recorded in 2018. Meanwhile, total customers of Giro Amanah grew by 193 customers or 20.89%, from 924 customers in 2018 to 1,117 customers.

TABUNGAN BAROKAH

Dibanding tahun 2018, Tabungan Barokah mengalami pertumbuhan sebesar Rp27.830 juta atau 13,01% dari sebesar Rp213.842 juta menjadi Rp241.672 juta pada tahun 2019. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 4.359 nasabah atau 14,75% dari 29.548 nasabah menjadi 33.907 nasabah pada tahun 2019.

BAROKAH SAVINGS

In 2019, Barokah Savings was recorded at Rp241,672 million, grew by Rp27,830 million or 13.01% from Rp213,842 million recorded in 2018. Meanwhile, total customers of Barokah Savings grew by 4,359 customers or 14.75%, from 29,548 customers in 2018 to 33,907 customers.

TABUNGAN HAJI IB AMANAH

Dibanding tahun 2018, Tabungan Haji iB Amanah mengalami pertumbuhan sebesar Rp186,312 juta atau 265,87% dari sebesar Rp70,077 juta menjadi Rp256,389 juta pada tahun 2019. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 72.186 nasabah atau 165,20% dari 43.695 nasabah menjadi 115.881 nasabah pada tahun 2019.

TABUNGAN KU

Dibanding tahun 2018, TabunganKu mengalami pertumbuhan sebesar Rp9,350 juta atau 30,42% dari sebesar Rp30,737 juta menjadi Rp40,088 juta pada tahun 2019. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 4.879 nasabah atau 19,51% dari 25.014 nasabah menjadi 29.893 nasabah pada tahun 2019.

TABUNGAN SIMPEL

Dibanding tahun 2018, Tabungan Simpel mengalami pertumbuhan sebesar Rp1,340 juta atau 32,62% dari sebesar Rp4,109 juta menjadi Rp5,450 juta pada tahun 2019. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 2.741 nasabah atau 24,49% dari 11.233 nasabah menjadi 13.974 nasabah pada tahun 2019.

TABUNGAN BAROKAH SEJAHTERA

Dibanding tahun 2018, Tabungan Barokah Sejahtera mengalami pertumbuhan sebesar Rp4,911 juta atau 201,84% dari sebesar Rp2,433 juta menjadi Rp7,344 juta pada tahun 2019. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 44 nasabah atau 314,29% dari 14 nasabah menjadi 58 nasabah pada tahun 2019.

TABUNGAN UMROH IB AMANAH

Dibanding tahun 2018, Tabungan Umroh iB Amanah mengalami pertumbuhan sebesar Rp489 juta atau 25,93% dari sebesar Rp1,887 juta menjadi Rp2,376 juta pada tahun 2019. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 263 nasabah atau 25,99% dari 1.012 nasabah menjadi 1.275 nasabah pada tahun 2019.

TABUNGAN RENCANA IB BAROKAH

Dibanding tahun 2018, Tabungan Rencana iB Barokah mengalami pertumbuhan sebesar Rp984 juta atau 8906,11% dari sebesar Rp11 juta menjadi Rp995 juta pada tahun 2019. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 306 nasabah atau 1275,00% dari 24 nasabah menjadi 330 nasabah pada tahun 2019.

DEPOSITO BAROKAH

Dibanding tahun 2018, Deposito Barokah mengalami penurunan sebesar Rp(223.874) juta atau (18,49)% dari sebesar Rp1.210.624 juta menjadi Rp986.749 juta pada tahun 2019. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 150 nasabah atau 6,47% dari 2.318 nasabah menjadi 2.468 nasabah pada tahun 2019.

PEMBIAYAAN

Jumlah pembiayaan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1,401,833 juta, naik sebesar Rp282,171 juta atau 25,20% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1,119,662 juta yang terdiri dari Multiguna Syariah, Pembiayaan Umum, KPR, Pembiayaan KEPPRES,

HAJI IB AMANAH SAVINGS

In 2019, Haji IB Amanah Savings was recorded at Rp256,389 million, grew by Rp186,312 million or 265,97% from Rp70,077 million recorded in 2018. Meanwhile, total customers of Haji IB Amanah Savings grew by 72,186 customers or 165,20%, from 43,695 customers in 2018 to 115,881 customers.

TABUNGANKU

In 2019, TabunganKu was recorded at Rp40,088 million, grew by Rp9,350 million or 30,42% from Rp30,737 million recorded in 2018. Meanwhile, total customers of TabunganKu grew by 4,879 customers or 19,51%, from 25,014 customers in 2018 to 29,893 customers.

SIMPEL SAVINGS

In 2019, SimPel Savings was recorded at Rp5,450 million, grew by Rp1,340 million or 32,62% from Rp4,109 million recorded in 2018. Meanwhile, total customers of SimPel Savings grew by 2,741 customers or 24,49%, from 11,233 customers in 2018 to 13,974 customers.

BAROKAH SEJAHTERA SAVINGS

In 2019, Barokah Sejahtera Savings was recorded at Rp7,344 million, grew by Rp4,911 million or 201,84% from Rp2,433 million recorded in 2018. Meanwhile, total customers of Barokah Sejahtera Savings grew by 44 customers or 314,29%, from 14 customers in 2018 to 58 customers.

IB AMANAH UMRAH SAVINGS

In 2019, IB Amanah Umrah Savings was recorded at Rp2,376 million, grew by Rp489 million or 25,93% from Rp1,887 million recorded in 2018. Meanwhile, total customers of IB Amanah Umrah Savings grew by 263 customers or 25,99%, from 1,012 customers in 2018 to 1,275 customers.

IB BAROKAH SAVINGS PLAN

In 2019, IB Barokah Savings Plan was recorded at Rp995 million, grew by Rp984 million or 8,906,11% from Rp11 million recorded in 2018. Meanwhile, total customers of IB Barokah Savings Plan grew by 306 customers or 1,275,00%, from 24 customers in 2018 to 330 customers.

BAROKAH DEPOSITS

In 2019, Barokah Deposits was recorded at Rp986,749 million, declined by Rp223,874 million or 18,49% from Rp1,210,624 million recorded in 2018. Meanwhile, total customers of Barokah Deposits grew by 150 customers or 6,47%, from 2,318 customers in 2018 to 2,468 customers.

FINANCING

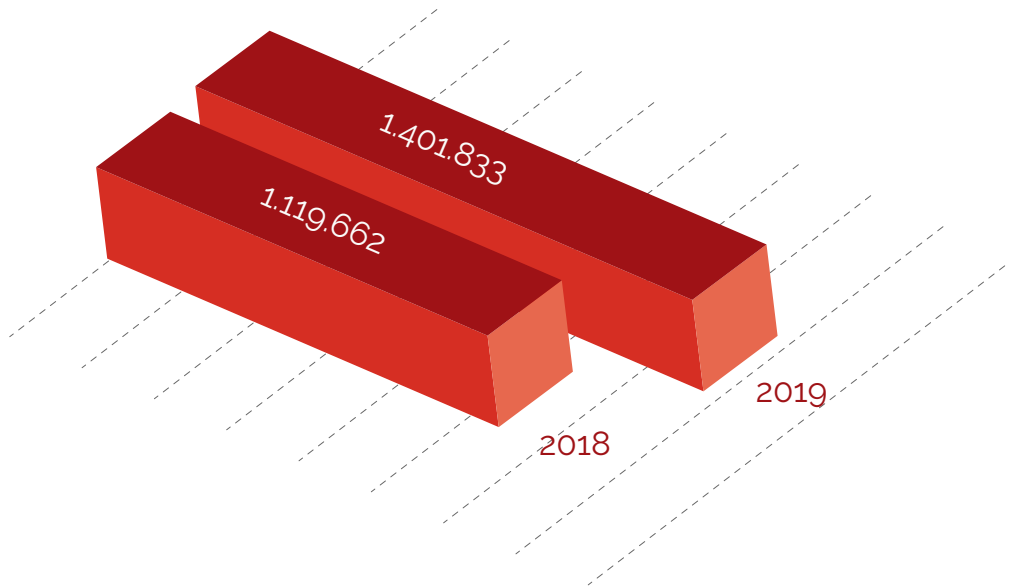
Total financing in 2019 was realized at Rp1,401,833 million, grew by Rp282,171 million or 25,20% from Rp1,119,662 million recorded in 2018. Financing in 2019 consisted of Multipurpose Sharia, General Financing, KPR, KEPPRES Financing, Al Mabrur Bailout Loan, iB

Talangan Haji Al Mabur, Umroh iB Maqbula, Emas iB Barokah, KLE – Kepemilikan Logam Emas, KUR dan Anjak Piutang Syariah. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beberapa skim pembiayaan diantaranya pembiayaan investasi sebesar Rp135,204 juta atau 53.16% dan Pembiayaan KPR iB Griya Barokah sebesar Rp109,929 juta atau 30.78%.

Maqbula Umrah, IB Barokah Gold, KLE – Gold Metal Ownership, KUR, and Factoring Sharia. The increase was due to the growth in several financing schemes, including investment financing amounted to Rp135,204 million or 53.16% and KPR iB Griya Barokah financing amounted to Rp109,929 million or 30.78%.

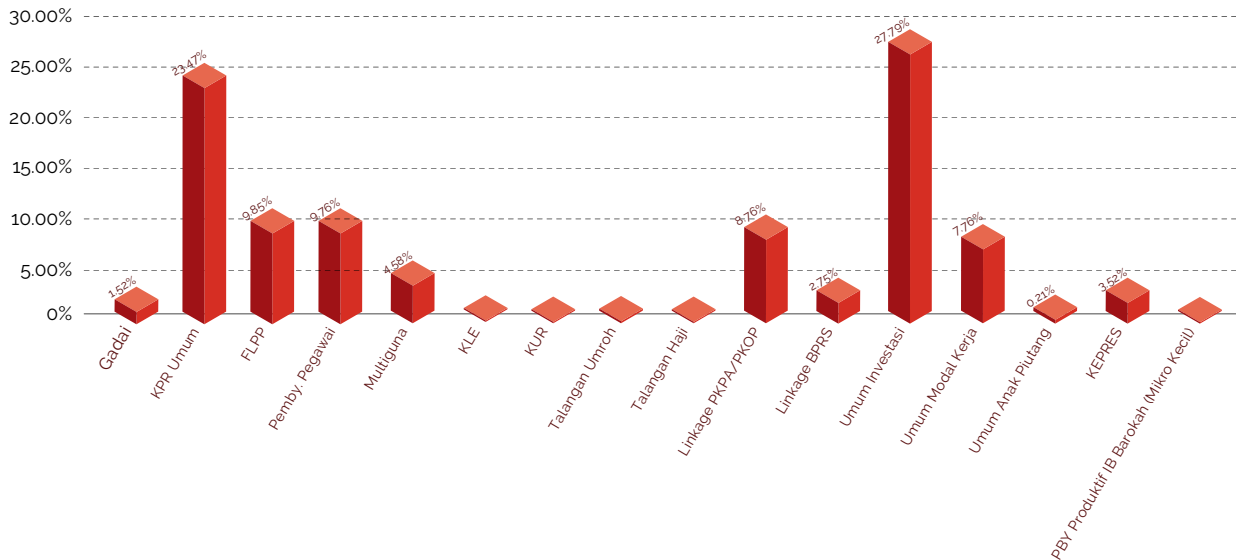
**Pembiayaan Tahun 2018 Dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah)**

Financing in 2018 and 2019 (in million Rupiah)

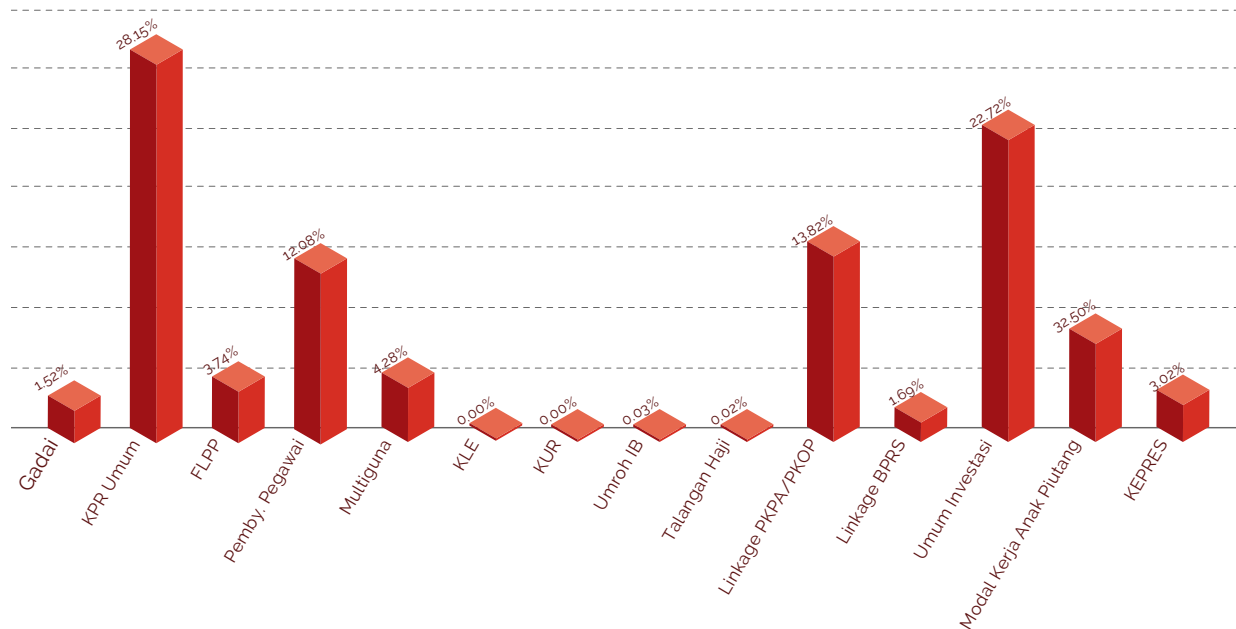


**Pembiayaan Tahun 2018 Dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah)**

Financing Composition (in million rupiah)



KETERANGAN / DESCRIPTION	REALISASI DESEMBER 2018 / REALIZATION IN DECEMBER 2018	REALISASI DESEMBER 2019 / REALIZATION IN DECEMBER 2019	OS NPF DESEMBER 2019 / OS NPF DECEMBER 2019	TARGET DESEMBER 2019 / TARGET IN DECEMBER 2019	PENCAPAIAN / ACHIEVEMENT	YOY	NPF
KONSUMER / CONSUMER							
GADAI / MORTGAGE	27,465	21,329	0	34,964	61.00%	-22.34%	0.00%
KPR	357,144	467,073	9,395	477,401	97.84%	7%	30.78%
KPR UMUM / GENERAL KPR	315,230	328,947	9,395	390,230	84.30%	4.35%	0.67%
FLPP	41,914	138,126	0	87,171	158.45%	229.55%	0.00%
PEMBIAYAAN PEGAWAI / EMPLOYEE FINANCING	141,976	136,871	0	131,976	103.71%	-3.60%	0.00%
MULTIGUNA / MULTIPURPOSE	47,907	64,194	65	69,107	92.89%	34.00%	0.00%
KLE / GOLD OWNERSHIP	1	0	0	1	0.00%	-100.00%	0.00%
KUR	50	32	33	-	0.00%	-35.20%	0.00%
TALANGAN UMROH / UMRAH BAILOUT LOAN	316	239	0	11,836	0.00%	-24.31%	0.00%
TALANGAN HAJI / HAJI BAILOUT LOAN	270	135	45	-	0.00%	-50.00%	0.00%
LINKAGE	173,663	161,342	10,808	170,875	94.42%	-7.10%	0.77%
PKPA / PKOP	154,685	122,856	10,808	130,897	93.86%	-20.58%	0.77%
BPRS	18,978	38,485	0	39,978	96.27%	102.79%	0.00%
SUB TOTAL KONSUMER / SUB-TOTAL FOR CONSUMER	748,792	851,216	20,346	896,160	94.98%	13.68%	1.45%
PRODUKTIF / PRODUCTIVE							
UMUM / GENERAL	337,014	501,262	5,940	652,366	76.84%	48.74%	0.42%
INVESTASI / INVESTMENT	254,346	389,550	2,635	552,529	70.50%	53.16%	0.19%
MODAL KERJA / WORKING CAPITAL	82,668	108,746	3,305	99,837	108.92%	31.54%	0.24%
ANJAK PIUTANG / FACTORING		2,967	0	-	0.00%	0.00%	0.00%
KEPPRES	33,856	49,355	13,853		206.89%	45.78%	0.99%
MIKRO KECIL / SMALL MICRO				23,856			
PBY PRODUKTIF IB BAROKAH (MIKRO KECIL) / PRODUCTIVE FINANCING IB BAROKAH (MICRO SMALL)							
SUB TOTAL MENENGAH / SUB- TOTAL FOR MEDIUM	370,870	550,617	19,793	676,222	81.43%	48.47%	1.41%
TOTAL	1,119,662	1,401,833	40,139	1,572,382	89.15%	25.20%	2.86%



Komposisi Pembiayaan tahun 2019 dikontribusikan terbesar oleh Pembiayaan KPR sebesar 33.32%, dimana pada tahun 2019 terdapat Pembiayaan KPR FLPP yang masih menjadi fokus utama penyaluran pembiayaan kepada para MBR karena UUS Bank Jatim turut serta dalam mendukung program pemerintah dalam penyaluran pembiayaan perumahan subsidi, yang pada tahun 2019 pencapaiannya pun sangat memuaskan. Adapun kenaikan outstanding KPR FLPP yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp96.212 juta dengan prosentase kenaikan sebesar 229.55% dari tahun 2018, sedangkan komposisi KPR FLPP terhadap *total outstanding* KPR adalah sebesar 29.57%. Selain itu komposisi pembiayaan terbesar kedua adalah Pembiayaan Umum Investasi (Pembiayaan Sindikasi) sebesar 27.79% dengan kenaikan *outstanding* pembiayaan investasi sebesar Rp135.2 Milyar dari tahun 2018.

Pertumbuhan jumlah pembiayaan diikuti dengan bertambahnya jumlah nasabah, dimana sampai dengan 31 Desember 2019 jumlah nasabah Bank Jatim tercatat sebanyak 6.567 nasabah, mengalami kenaikan sebanyak 319 nasabah atau 5.11% dibanding dengan tahun 2018 sebanyak 6.248 nasabah. Kenaikan jumlah nasabah pada tahun 2019 dikarenakan oleh adanya produk pembiayaan KPR FLPP sebesar 807 nasabah, sisanya adalah penambahan dari nasabah Pembiayaan Multiguna dan KPR Umum iB Barokah.

The largest contribution to the composition of financing in 2019 was KPR Financing by 33.32%. There was KPR FLPP Financing in 2019 which continued to become the main focus of fund disbursement to the MBR as the Sharia Business Unit of Bank Jatim participated in supporting the government program to disburse subsidized housing financing, which, in 2019, yielded a highly satisfying achievement. The increase in outstanding KPR FLPP obtained in 2019 amounted to Rp96,212 million or grew by 229.55% compared to that of 2018, while the composition of KPR FLPP to total outstanding KPR was 29.57%. The second largest financing composition was General Investment Financing (Syndicated Financing) of 27.79% with an increase in outstanding investment financing amounted to Rp135.2 billion from the realization in 2018.

The growth of total financing was followed by an increase in the number of customers. As of December 31, 2019 the total customers of Bank Jatim reached 6,567 customers, an increase of 319 customers or 5.11% from 6,248 customers recorded at the end of 2018. The increase in total customers in 2019 was due to the total customers of KPR FLPP financing product which reached 807 customers. The remainder was the addition of multipurpose financing and iB Barokah General KPR customers.

SKIM PEMBIAYAAN / FINANCING SCHEME	TOTAL ACCOUNT 2018	TOTAL ACCOUNT 2019	SELISIH / DIFFERENCE	YOY
PEMBIAYAAN KONSUMER / CONSUMER FINANCING				
GADAI / MORTGAGE	1708	1.282	(426)	(24.94%)
KPR	1816	2.703	887	48.84%
KPR UMUM / GENERAL KPR	1455	1.535	80	5.50%
FLPP	361	1.168	807	223.55%
PEMBIAYAAN PEGAWAI / EMPLOYEE FINANCING	278	282	4	1.44%
MULTIGUNA / MULTIPURPOSE	775	937	162	20.90%
KEPEMILIKAN LOGAM EMAS / GOLD OWNERSHIP	1	0	(1)	(100.00%)
KUR	3	2	(1)	(33.33%)
TALANGAN UMROH / UMRAH BAILOUT LOAN	19	11	(8)	(42.11%)
TALANGAN HAJI / HAJI BAILOUT LOAN	14	6	(8)	(57.14%)
LINKAGE	977	703	(274)	(28.05%)
PKPA/PKOP	967	691	(276)	(28.54%)
BPRS	10	12	2	20.00%
TOTAL PEMBIAYAAN KONSUMER / TOTAL CONSUMER FINANCING	5.591	5.926	335	5.99%
PEMBIAYAAN KOMERSIL / COMMERCIAL FINANCING				
UMUM / GENERAL	617	607	(10)	(1.62%)
INVESTASI / INVESTMENT	164	178	14	8.54%
MODAL KERJA / WORKING CAPITAL	453	425	(28)	(6.18%)
ANJAK PIUTANG / FACTORING	0	4	4	0.00%
KEPPRES	40	34	(6)	(15.00%)
MIKRO KECIL / SMALL MICRO	0	0	0	0.00%
PBY PRODUKTIF IB BAROKAH (MIKRO KECIL) / PRODUCTIVE FINANCING IB BAROKAH (MICRO SMALL)	0	0	0	0.00%
TOTAL PEMBIAYAAN KOMERSIAL / TOTAL COMMERCIAL FINANCING	657	641	(16)	(2.44%)
TOTAL	6.248	6.567	319	5.11%

PRODUK PEMBIAYAAN

SEGMENT KONSUMER

1. Emas IB Barokah

Selama tahun 2019, terdapat penurunan penyaluran pembiayaan melalui Emas iB Barokah mencapai Rp(6.136) juta atau (22.34%) dari sebesar Rp27.465 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp21.329 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut diiringi oleh penurunan jumlah nasabah sebanyak 426 nasabah atau 24.94% menjadi 1.282 nasabah pada tahun 2019.

2. KPR IB Griya Barokah

Selama tahun 2019, telah mencatatkan pertumbuhan KPR iB Griya Barokah sebesar Rp109.929 juta atau 30.78% dari sebesar Rp357.144 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp467.073 juta pada tahun 2019. Pertumbuhan tersebut diiringi oleh pertumbuhan nasabah sebanyak 887 nasabah atau 48.84% menjadi sebanyak 2.703 nasabah pada tahun 2019.

3. Multiguna IB Barokah

Selama tahun 2019, UUS Bank Jatim telah mencatatkan peningkatan peyaluran pembiayaan Multiguna Syariah mencapai

FINANCING PRODUCT

CONSUMER SEGMENT

1. GOLD IB BAROKAH

In 2019, Gold iB Barokah was recorded at Rp21,329 million, declined by Rp6,136 million or 22.34% from Rp27,465 million recorded in 2018. Such decline was in line with the decrease of total customers of Gold iB Barokah in 2019 by 426 customers or 24.94% to 1,282 customers.

2. KPR IB GRIYA BAROKAH

In 2019, KPR iB Griya Barokah was recorded at Rp467,073 million, grew by Rp109,929 million or 30.78% from Rp357,144 million recorded in 2018. Such growth was in line with the increase of total customers of KPR iB Griya Barokah in 2019 by 887 customers or 48.84% to 2,703 customers.

3. MULTIPURPOSE IB BAROKAH

In 2019, the Sharia Business Unit of Bank Jatim recorded an increase in Multipurpose Sharia financing disbursement reaching Rp11,182

Rp11.182 juta atau 5,89% dari sebesar Rp189.883 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp201.065 juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut diiringi oleh pertumbuhan nasabah sebanyak 166 nasabah atau 22,34% dari 1.053 nasabah menjadi sebanyak 1.219 nasabah pada tahun 2019.

4. Kepemilikan Logam Emas IB Barokah

Selama tahun 2019, tidak ada penyaluran produk KLE IB Barokah.

5. Umroh IB Maqbullah

Selama tahun 2019, terdapat penurunan Talangan Umroh iB Maqbula mencapai Rp(77) juta atau (24,31%) dari sebesar Rp316 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp239 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut diiringi oleh penurunan jumlah nasabah sebanyak 8 nasabah atau 42,11% menjadi 11 nasabah pada tahun 2019.

million or 5.89%, from Rp189,883 million in 2018 to Rp201,065 million. Such growth was in line with the increase of total customers in 2019 by 166 customers or 22.34%, from 1053 customers in 2018 to 1,219 customers.

4. Gold Ownership IB Barokah

There was no disbursement of Gold Ownership iB Barokah product in 2019.

5. Umrah IB Maqbulla

There was a decline in Umrah iB Maqbula Bailout Loan of Rp77 million or 24.31%, from Rp316 million recorded in 2018 to Rp239 million in 2019. Such decline was in line with the decrease of total customers in 2019 by 8 customers or 42.11% to 11 customers.

SEGMENT KOMERSIAL

1. Pembiayaan Umum

Pembiayaan Umum adalah pembiayaan bagi usaha baik individu maupun badan hukum untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan/ atau investasi. Selama tahun 2019, UUS Bank Jatim telah mencatatkan pertumbuhan pembiayaan umum sebesar Rp164.248 juta atau (48,74%) dari sebesar Rp337.014 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp501.262 juta pada tahun 2019. Namun, pertumbuhan tersebut tidak diiringi oleh pertumbuhan jumlah nasabah, jumlah nasabah pembiayaan umum mengalami penurunan sebanyak 10 nasabah atau (1,62%) menjadi sebanyak 607 nasabah pada tahun 2019.

2. Pembiayaan Modal Kerja KEPPRES

Selama tahun 2019, UUS Bank Jatim telah mencatatkan peningkatan Pembiayaan Modal Kerja Kepres mencapai Rp15.499 juta atau 45,78% dari sebesar Rp33.856 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp49.355 juta pada tahun 2019. Namun, pertumbuhan tersebut tidak diiringi oleh pertumbuhan jumlah nasabah, jumlah nasabah Pembiayaan Modal Kerja Keppres mengalami penurunan sebanyak 6 nasabah atau (15%) menjadi sebanyak 34 nasabah pada tahun 2019.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN:

1. Produk dan fitur pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;
2. Layanan dan kepastian lamanya keputusan atas permohonan pembiayaan dari nasabah;
3. Peran analis sebagai advisor dan mitra bagi nasabah sehingga memperoleh struktur pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah;
4. Bagi hasil sesuai dengan proyeksi nasabah dalam memperoleh keuntungan atas proyek yang dikerjasamakan dengan Bank;

COMMERCIAL SEGMENT

1. General Financing

General Financing is financing for businesses, both individuals and legal entities, to fulfill their working capital and/or investment needs. In 2019, Bank Jatim recorded an increase in general financing amounting to Rp164,248 million or 48.74%, from Rp337,014 million realized in 2018 to Rp501,262 million. However, such growth was not accompanied by the growth of total customers of General Financing, which, in 2019, recorded a decline of 10 customers or 1.62% to 607 customers.

2. KEPPRES Working Capital Financing

The Sharia Business unit of Bank Jatim recorded an increase in KEPPRES Working Capital financing disbursement reaching Rp15,499 million or 45.78%, from Rp33,856 million recorded in 2018 to Rp49,355 million in 2019. However, such growth was not accompanied by the growth of total customers of KEPPRES Working Capital Financing, which, in 2019, recorded a decline of 6 customers or 15% to 34 customers.

FACTORS INFLUENCING THE GROWTH OF FINANCING SEGMENT

1. Financing products and features offered in accordance with the community development needs;
2. Services and certainty of the duration of decision on funding proposal from customers;
3. Role of analysts as advisors and partners for customers so as to obtain a financing structure that is in accordance with customer's needs;
4. Profit sharing in accordance with customer's projections in obtaining profits from projects conducted in cooperation with the Bank;

5. Kenyamanan nasabah bertransaksi perbankan sesuai dengan keyakinan melalui akad pembiayaan syariah;
6. Ekspektasi nasabah terpenuhi atas layanan yang diberikan oleh Bank dalam rangka memenuhi permodalan proyek yang dibiayai;
7. Kualitas dan kuantitas sumber daya insani dalam proses analisa pembiayaan yang optimal;
8. Aktivitas penjualan yang agresif.

5. Convenience of banking transaction for customers in accordance with their beliefs through sharia financing agreements;
6. Fulfillment of customer's expectations on services provided by the Bank in order to meet the project capital being funded;
7. Optimum quality and quantity of human resources in financing analysis process;
8. Proactive sales activities.

Tabel Tresuri Unit Usaha Syariah Tahun 2019 Dan 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

Table Of Treasury Of Sharia Business Unit In 2019 And 2018

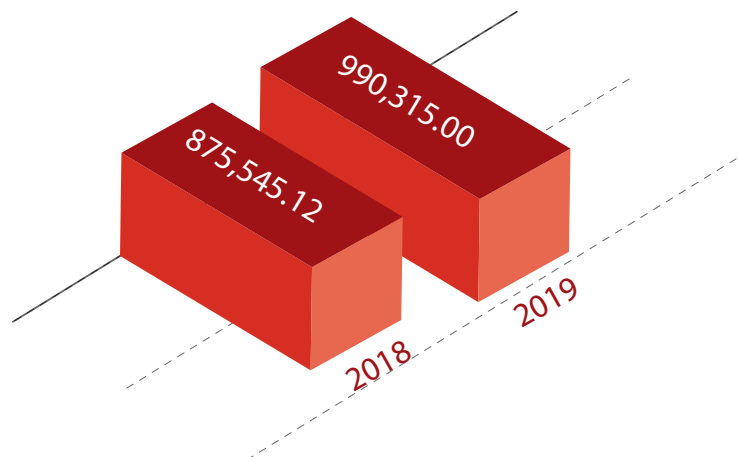
KETERANGAN	POSISI / POSITION		KENAIKAN (PENURUNAN) / INCREASE (DECREASE)		DESCRIPTION
	DES-19 / DEC. 19	KONTRIBUSI (%) / CONTRIBUTION (%)	DES-18 / DEC. 18	SELISIH / DIFFERENCE	
FASBIS	243.000	27,75%	78.100,00	164.900	211,14%
DEPOSITO	-	0,00%	-	-	0,00%
SURAT BERTAGAS PEMERINTAH	120.012,12	13,71%	406.215,00	(286.203)	(70,46%)
SURAT BERTAGAS KORPORASI	-	0,00%	76.000	(76.000)	(100,00%)
SIMA	200.000,00	22,84%	430.000,00	(230.000)	(53,49%)
SERTIFIKAT REKSADANA SYARIAH	239.000,00	27,30%	-	239.000	
SUKUK BANK INDONESIA	73.533,00	8,40%	-	73.533	
JUMLAH	875.545,12	100,00%	990.315,00	(114.770)	(11,59%)

TRESURI SYARIAH

Penempatan Tresuri Unit Usaha Syariah (dalam jutaan Rupiah)

TREASURY OF SHARIA

Treasury Placement of Sharia Business Unit (in million Rupiah)

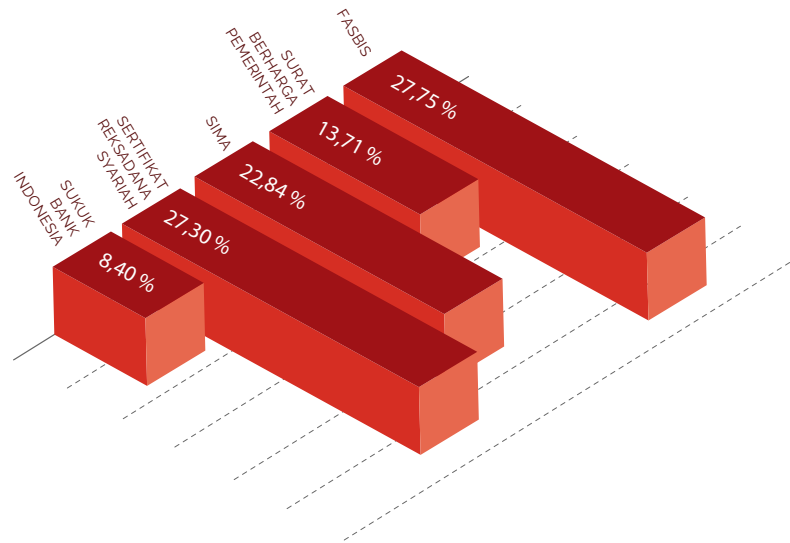


Bisnis *treasury* mengalami penurunan sebesar Rp114,770 juta atau 11,59% dari perolehan Rp990,315 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp875,545 juta pada tahun 2019. Salah satu penyebab terjadinya penurunan pengelolaan aktivitas *treasury* adalah karena dana *idle* yang dikelola pada tahun 2019 lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu salah satunya karena menurunnya dana kelolaan BPKH. Penurunan terjadi pada 3 (tiga) aktivitas penempatan *treasury* yaitu penempatan Surat Bertagag Pemerintah yang menurun

The *treasury* business decreased by Rp114,770 million or 11,59%, from Rp990,315 million in 2018 to Rp875,545 million in 2019. One of the reasons for the decline in *treasury* activity management was the idle funds managed in 2019 which was less than that of 2018, such as the decline in funds managed by BPKH. The decline occurred in 3 (three) *treasury* placement activities, i.e. the placement of Government Securities which decreased by 70,46% and the placement of SIMA which decreased by 53,49%, as well as the zero purchase

70,46% dan penempatan SIMA menurun 53,49%, serta tidak adanya pembelian Surat Berharga Korporasi pada tahun 2019. Sementara itu, instrumen kelolaan tresuri baru yaitu pada Sukuk Bank Indonesia dan Reksadana Syariah masing-masing sebesar Rp73,533 juta dan Rp239,000 juta. Di samping itu, penempatan FASBIS meningkat sebesar 211,14% atau sebesar Rp164,900.00 juta dari tahun 2018.

Komposisi Penempatan Tresuri Unit Usaha Syariah



Berdasarkan tabel di atas, komposisi jumlah portofolio tresuri Bank Jatim UUS posisi akhir Desember 2019 menunjukkan bahwa FASBIS memberikan kontribusi terbesar yaitu 27,75%, diikuti dengan Reksadana Syariah 27,30%, SIMA 22,84%, Surat Berharga Pemerintah 13,71% dan Sukuk Bank Indonesia 8,40%. Di sisi lain, penempatan deposito antar bank menurun secara signifikan (tidak ada penempatan deposito pada Desember 2019) di mana hal tersebut disebabkan karena kecenderungan *bank counterpart* yang lebih memilih melakukan *borrowing* dengan instrumen SIMA yang memiliki *benefit* tersendiri dibandingkan dengan penempatan deposito.

FASBIS adalah instrumen Operasi Moneter Syariah melalui *Standing Facilities* di mana Bank melakukan penempatan dana rupiah di Bank Indonesia yang bertujuan untuk penyerapan likuiditas Bank. Pada tahun 2019, FASBIS Bank Jatim UUS tercatat sebesar Rp243,000 juta, mengalami kenaikan Rp164,900 juta atau 211,14% dari Rp78,100 juta pada tahun 2018.

Surat Berharga adalah surat yang diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Korporasi atas bagian penyertaan terhadap aset dengan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Pada Desember 2019, Surat Berharga yang dimiliki Bank Jatim UUS adalah Surat Berharga Pemerintah jenis Sukuk Ritel dengan akad *Ijarah To Be Leased*, *Project Based Sukuk* dengan akad *Ijarah To Be Leased*. Secara keseluruhan, Surat Berharga Pemerintah Bank Jatim UUS menurun sebesar Rp286,203 juta (-70,46%) dari Rp406,215 juta menjadi Rp120,012.

SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang digunakan

of Corporate Bonds conducted in 2019. Meanwhile, the new treasury instruments, namely Sukuk Bank Indonesia and Sharia Mutual Funds recorded yields of Rp73,533 million and Rp239,00 million, respectively. In addition, the placement of FASBIS increased by 211,14% or Rp164,900 million compared to the realization in 2018.

Composition of Treasury Placement of Sharia Business Unit

Based on the table above, the composition of total treasury portfolio of Sharia Business Unit of Bank Jatim at the end of December 2019 demonstrated that FASBIS provided the largest contribution amounting to 27,75%, followed by Sharia Mutual Funds, SIMA, Government Bonds, and Sukuk Bank Indonesia amounting to 27,30%, 22,84%, 13,71%, and 8,40%, respectively. On the other hand, the placement of interbank deposits declined significantly as there was no deposit placement in December 2019 due to the tendency of counterparty banks to conduct borrowing with SIMA instrument which has its own benefits compared to deposit placements.

FASBIS is a Sharia Monetary Operation instrument through Standing Facilities where the Bank conducted placement of funds (investment) in Rupiah at Bank Indonesia, which aims to absorb Bank liquidity. In 2019, FASBIS of Sharia Business Unit of Bank Jatim was recorded at Rp243,100 million, an increase of Rp164,900 million or 211,14% from Rp78,100 million recorded in 2018.

Securities are money market documents issued by both the Government and Corporations on the investment of assets with sharia principles commonly traded in capital markets and money markets. As of December 2019, the types of Securities offered by Bank Jatim's Sharia Business Unit are Government Securities of Sukuk Retail type with Akad *Ijarah to be Leased* and Project-Based Sukuk with Akad *Ijarah to be Leased*. In general, Government Securities of Sharia Business Unit declined by Rp286,203 million or 70,46%, from Rp406,215 million recorded in 2018 to Rp120,012 million in 2019.

sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah. Posisi SIMA Bank Jatim UUS per Desember 2019 sebesar Rp200,000 juta dimana mengalami penurunan sebesar Rp230,000 juta atau -53.49%. Hal tersebut disebabkan karena tingginya kondisi likuiditas (dana idle) di pasar uang sehingga kebutuhan dana *idle counterpart* Bank Jatim UUS juga kecil (*long position*).

Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) merupakan instrumen surat berharga yang menjadi alternatif pengelolaan dana idle jangka pendek Bank Jatim UUS dengan outstanding posisi Desember 2019 sebesar Rp73,533 juta (8.40% dari total penempatan tresuri) jangka waktu 7 hingga 14 hari. Selain SUKBI, Sertifikat Reksadana Syariah juga menjadi pilihan dalam pengelolaan dana idle Bank Jatim UUS di mana memiliki jangka waktu pendek (Reksadana Syariah Pasar Uang) maupun jangka panjang (Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas). Total keseluruhan Sertifikat Reksadana Syariah Bank Jatim UUS Desember 2019 sebesar Rp239,000 juta (27.30% dari total penempatan tresuri).

SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank or Interbank Mudharabah Investment Certificate) is a certificate issued by a sharia commercial bank or sharia business unit and used as a short-term investment facility in PUAS with Akad mudharabah. As of December 2019, the position of SIMA of Sharia Business Unit amounted to Rp200,000 million, a decline of Rp230,000 million or 53.49%. This was due to the high liquidity condition (idle fund) at money market which decreased the needs of the counterparty of Bank Jatim's Sharia Business Unit for idle funds (long position).

Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) is an alternative securities instrument used to manage short-term idle funds of Bank Jatim's Sharia Business Unit. The outstanding position of this product in December 2019 was Rp73,533 million or 8.40% of the total treasury placement for a period of 7 to 14 days. In addition to SUKBI, Sharia Mutual Funds is also an option in managing the idle funds of Bank Jatim's Sharia Business Unit which has a short term (Money Market Sharia Mutual Funds) and long term (Limited Participation Sharia Mutual Funds). The outstanding position of Sharia Mutual Funds as of December 2019 was Rp239,000 million or 27.30% of the total treasury placements.



Tinjauan Keuangan

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditunjuk Perusahaan. Laporan Keuangan Perusahaan telah memperoleh pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

FINANCIAL OVERVIEW

Analysis and discussion on this financial overview are prepared based on the information contained in the Financial Statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk for the year ended on December 31, 2019, which have been audited by the appointed Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. The Bank's financial statements have been presented fairly in all material respects.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

ASET

ASSETS

URAIAN / DESCRIPTION (JUTAAN RUPIAH) / (MILLION RUPIAH)	2017	2018	2019	RATA-RATA PERTUMBUHAN 2017 - 2019 AVERAGE GROWTH IN 2017-2019	GROWTH%
KAS / CASH	1.673.588	1.913.960	2.729.776	2.105.775	125,82%
GIRO PADA BANK INDONESIA / CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA	3.617.670	4.075.938	5.734.527	4.476.045	123,73%
GIRO PADA BANK LAIN NETO / CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS, NET	66.811	97.272	111.454	91.846	137,47%
PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA NETO / PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS, NET	8.945.755	13.347.240	11.987.227	11.426.741	127,73%
SURAT-SURAT BERHARGA, NETO / MARKETABLE SECURITIES, NET	4.742.414	7.791.445	9.563.071	7.365.643	155,31%
SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI / MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASED AGREEMENT	-	566.891	1.038.432	535.108	-
TAGIHAN LAINNYA / OTHER RECEIVABLES	40.527	34.069	81.265	51.954	128,20%
KREDIT YANG DIBERIKAN NETO / LOANS	30.360.407	32.694.687	37.372.166	33.475.753	110,26%
PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA / INTEREST RECEIVABLES	316.640	373.341	416.420	368.800	116,47%
BIAYA DIBAYAR DI MUKA / PREPAID EXPENSES	330.285	308.418	285.522	308.075	93,28%
BIAYA PEROLEHAN / COST	1.425.101	1.501.050	1.595.455	1.507.202	105,76%
AKUMULASI PENYUSUTAN / ACCUMULATED DEPRECIATION	(481.488)	(528.993)	(572.026)	(527.502)	109,56%
NILAI BUKU NETO / NET BOOK VALUE	943.613	972.057	1.023.429	979.700	103,82%
ASET PAJAK TANGGUHAN NETO / DEFERRED TAX ASSETS, NET	438.805	467.788	481.615	462.736	105,45%
ASET LAIN-LAIN NETO / OTHER ASSETS, NET	42.166	46.012	52.866	47.015	111,50%
JUMLAH ASET / TOTAL ASSETS	51.518.681	62.689.118	76.715.290	55.818.917	108,35%

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, jumlah aset Bank Jatim sebesar Rp76.715.290 miliar, naik dari 108,35% dari rata-rata

In the fiscal year ended on December 31, 2019, the Bank recorded total assets amounting to Rp76,715,290 million, grew by 108,35% compared to the average growth of the last 3 (three) years

pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp55.818.917 miliar. Peningkatan asset ini dipengaruhi oleh meningkatnya penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain dan Aktiva tetap (Revaluasi Asset).

KAS

Pada 2019, kas Perusahaan tercatat sebesar Rp2.729.776 miliar, naik 125,82% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp2.105.775 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh turunya penarikan uang tunai pada Kas Kasanah.

GIRO PADA BANK INDONESIA

Bank Jatim telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum. Penyimpanan giro pada Bank Indonesia tercatat sebesar Rp5.734.527 miliar, meningkat 123,73% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp4.476.045 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh alokasi pada Penempatan BI dan Bank Lain.

GIRO PADA BANK LAIN NETTO

Giro Bank Jatim pada bank lain terdiri dari Giro pada Bank BCA sebagai deposit transaksi ATM melalui jaringan Prima dan Giro pada Bank Mandiri sebagai jaminan transaksi ATM melalui jaringan ATM Bersama. Semakin banyak jumlah nasabah pengguna ATM, maka jumlah deposit atau penempatan Giro Bank Jatim pada bank lain semakin besar. Pada 2019 penyimpanan giro pada bank lain tercatat sebesar Rp11.454 miliar, meningkat 137,47% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp9.184,6 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan pada Giro pada Bank Nasional di luar Indonesia.

PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA NETTO

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia tercatat sebesar Rp11.987.227 miliar, meningkat 127,73% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp11.426.741 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya penempatan baik pada BI maupun Bank Lain.

SURAT-SURAT BERHARGA NETTO

Surat-surat berharga yang dimiliki Perusahaan pada 31 Desember 2019 dan 2018 merupakan efek-efek yang diterbitkan oleh pihak ketiga. Jumlah surat berharga pada 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp7.791.445 miliar dan Rp9.563.071 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh dialokasikan pd penempatan BI dan BL.

ASET TETAP

Sejalan dengan peningkatan kualitas sistem operasi berbasis teknologi serta penambahan jumlah kantor cabang yang dilakukan oleh Bank, jumlah aset tetap mengalami peningkatan sebesar 103,82% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp979.700 miliar menjadi sebesar Rp1.023.429 miliar di akhir tahun 2019. Peningkatan tersebut antara lain dikontribusikan oleh Aset pajak tangguhan dan aset inventaris.

amounting to Rp55,818,917 million. The increase was attributable to the increase in placements with Bank Indonesia and other banks, as well as in fixed assets (Asset Revaluation).

CASH

In 2019, the Bank's cash amounted to Rp2,729,776 million, grew by 125,82% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp2,105,775 million. The increase was attributable to the decrease in cash withdrawals at Kas Kasanah.

CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

Bank Jatim has complied with the provisions of Bank Indonesia regarding Minimum Statutory Reserves. Current accounts of Bank Jatim with Bank Indonesia amounted to Rp5,734,527 million, grew by 123,73% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp4,476,045 million. The increase was attributable to the allocation of placements with BI and Other Banks.

CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS, NET

Current accounts with other banks consist of Current Accounts with Bank BCA as a deposit for ATM transaction through the Prima network and Current Accounts with Bank Mandiri as collateral for ATM transactions through the ATM Bersama network. The more the number of customers using ATMs, the greater the deposit or placement of Bank Jatim's Current Accounts with other banks. In 2019, Current accounts with other banks (net) amounted to Rp11,454 million, grew by 137,47% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp9,184,6 million. The increase was attributable to the addition of current accounts with National Banks outside of Indonesia.

PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS, NET

The post of placements with Bank Indonesia and other banks (net) in 2019 amounted to Rp11,987,227 million, grew by 127,73% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp11,426,741 million. The increase was attributable to growth of placements, both with Bank Indonesia and Other Banks.

MARKETABLE SECURITIES, NET

Marketable securities of Bank Jatim as of December 31, 2019 and 2018 are the securities issued by third parties. Total marketable securities on December 31, 2018 and 2019 amounted to Rp7,791,445 million and Rp9,563,071 million, respectively. The increase was caused by allocations for placements with Bank Indonesia and Other Banks.

FIXED ASSETS

In line with the improvement in the quality of technology-based operating system and the addition of the number of branch offices carried out by the Bank, total fixed assets increased by 103,82%, from an average growth of the last 3 (three) years of Rp979,700 million to Rp1,023,429 million at the end of 2019. The increase was attributable to the deferred tax assets and inventory assets.

ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain naik 111,50% menjadi sebesar Rp52.866 miliar dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp47.015 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya Estimasi taksiran tagihan pajak penghasilan : Pasal 28A (Catatan 18e), Beban yang ditangguhkan dan lain-lain.

OTHER ASSETS

Other assets in 2019 amounted to Rp52,866 million, grew by 111.50% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp47,015 million. The increase was attributable to the growth of estimated income tax claims: Article 28A (Note 18e), deferred expenses, and others.

TOTAL LIABILITAS

TOTAL LIABILITIES

URAIAN (JUTAAN RUPIAH) (IN MILLION RUPIAH)	2017	2018	2019	RATA-RATA PERTUMBUHAN 2017 - 2019 AVERAGE GROWTH IN 2017-2019	GROWTH%
LIABILITAS SEGERA OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY	410.627	514.585	357.565	427.592	104,13%
SIMPANAN DEPOSITS	39.845.108	50.915.931	60.545.872	50.435.637	126,58%
PIHAK BERELASI RELATED PARTIES	8.118.670	14.947.056	14.940.917	12.668.881	156,05%
PIHAK KETIGA THIRD PARTIES	31.726.438	35.968.875	45.604.955	37.766.756	119,04%
SIMPANAN DARI BANK LAIN DEPOSITS FROM OTHER BANKS	1.448.961	735.108	2.888.430	1.690.833	116,69%
PIHAK BERELASI RELATED PARTIES	182.038	100.108	137.819	139.988	76,90%
PIHAK KETIGA THIRD PARTIES	1.266.923	635.000	2.750.611	1.550.845	122,41%
LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENT	-	566.699	1.037.094	534.598	-
PINJAMAN YANG DITERIMA BORROWINGS	1.296.878	725.563	1.870.246	1.297.562	100,05%
UTANG PAJAK TAXES PAYABLE	151.000	149.441	63.766	121.402	80,40%
BEBAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR ACCRUED EXPENSES	363.019	398.536	433.507	398.354	109,73%
LIABILITAS LAIN-LAIN OTHER LIABILITIES	187.014	211.319	333.158	243.830	130,38%
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	43.702.607	54.217.182	67.529.638	55.149.809	126,19%

Liabilitas Bank Jatim yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp67.529.638 miliar. Total liabilitas mengalami peningkatan sebesar 126,19% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp55.149.809 miliar, karena adanya peningkatan pada Simpanan sebesar 126,58% dan kewajiban kepada bank lain naik sebesar 116,69% bila dibanding 3 tahun terakhir. Kenaikan liabilitas ini disebabkan oleh kenaikan jumlah Simpanan dari Nasabah.

Bank Jatim's liabilities for the year ended on December 31, 2019, amounted to Rp67,529,638 million, grew by 126.19% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp55,149,809 million. The increase was attributable to the growth of deposits and obligations with other banks reaching 126.58% and 116.69%, respectively, compared to the last 3 (three) years. In addition, the growth of deposits from customers was one of the factors contributing to the increase in Bank's liabilities in 2019.

LIABILITAS SEGERA

Di akhir tahun 2019, Bank Jatim mencatat liabilitas segera sebesar Rp357.565 miliar, turun 104,13% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp427.592 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan transfer, inkaso, dan kliring. Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas, baik dari masyarakat maupun dari bank

OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

At the end of 2019, Bank Jatim recorded its obligations due immediately amounting to Rp357,565 million, declined by 104.13% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp427,592 million. The decrease was attributable to the drop in transfer, inkaso, and clearing. Obligations due immediately were

lain. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

SIMPANAN DARI NASABAH

Simpanan dari nasabah merupakan dana yang ditempatkan pada Bank dari nasabah. Simpanan tersebut terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka yang disajikan menurut tingkat likuiditas simpanan dimana tergantung dari produk simpanan yang ditawarkan. Simpanan dari nasabah di akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp60.545.872 miliar, naik 126,58% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp50.435.637 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh simpanan dari nasabah pihak berelasi.

SIMPANAN DARI BANK LAIN

Simpanan dari bank lain dan lembaga lainnya terdiri dari giro, deposito berjangka, Interbank Call Money dan sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah. Pos ini digunakan untuk memudahkan pelaksanaan transfer dana atau pengiriman uang atau penyelesaian antara lokal dan/atau bank internasional. Posisi simpanan dari bank lain dan lembaga lainnya di akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp2.888.430 miliar, naik 116,69% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp1.690.833 miliar. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh Interbank call money.

PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima Bank Jatim pada 2019 sebesar Rp1.870.246 miliar, naik 100,05% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp1.297.562 miliar. Peningkatan ini didominasi oleh naiknya pinjaman yang diterima.

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Pada 2019 Bank Jatim memiliki Beban yang masih harus dibayar sebesar Rp433.507 miliar, naik 109,73% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp398.354 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan karena kenaikan cadangan jasa produksi.

Pada 2019 Bank Jatim memiliki Beban yang masih harus dibayar sebesar Rp433,51 miliar, turun Rp34,97 miliar atau 8,77% dari tahun 2018 sebesar Rp398,54 miliar. Penurunan beban ini disebabkan oleh beban jasa produksi dan beban bunga.

recorded at the time of the liability, either from the public or from other banks, and classified as financial liabilities measured at amortized cost.

DEPOSITS FROM CUSTOMERS

Deposits from customers are funds placed at the Bank from customers. Deposits consist of giro (demand deposits), savings, and time deposits, which are presented according to the level of savings liquidity depending on the savings product offered. Deposits from customers at the end of 2019 amounted to Rp60,545,872 million, grew by 126.58% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp50,435,637 million. The increase was attributable to the deposits from related party customers.

DEPOSITS FROM OTHER BANKS

Deposits from other banks and other institutions consist of giro (demand deposits), time deposits, interbank call money, and *mudharabah* investment certificate between sharia banks. This post is used to facilitate the transfer of funds or remittances, or settlements between local and/or international banks. Deposits from other banks and other institutions at the end of 2019 amounted to Rp2,888,430 million, grew by 116.69% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp1,690,833 million. The increase was affected by the amount of Interbank Call Money.

BORROWINGS

Borrowings of Bank Jatim at the end of 2019 amounted to Rp1,870,246 million, grew by 100.05% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp1,297,562 million. The increase was dominated by the rising amount of borrowings.

ACCRUED EXPENSES

In 2019, Bank Jatim recorded its accrued expenses amounting to Rp433,507 million, grew by 109.73% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp398,354 million. The increase was attributable to the growth of production service reserves.

Bank Jatim's accrued expenses at the end of 2019 amounted to Rp433.51 billion, declined by Rp34.97 billion or 8.77% compared to the amount realized in 2018 at Rp398.54 billion. The decline was caused by production service reserves and interest expenses.

EKUITAS

EQUITY

URAIAN (JUTAAN RUPIAH) DESCRIPTION (MILLION RUPIAH)	2017	2018	2019	RATA-RATA PERTUMBUHAN 2017 - 2019 AVERAGE GROWTH IN 2017-2019	GROWTH%
MODAL SAHAM SHARE CAPITAL	3.743.648	3.744.534	3.750.593	3.746.258	100,07%
- SERI A NILAI NOMINAL RP250 (DALAM RUPIAH PENUH) PER SAHAM - SERIES A: RP250 (FULL RUPIAH) PAR VALUE PER SHARE					

– SERI B NILAI NOMINAL RP250 (DALAM RUPIAH PENUH) PER SAHAM – SERIES B: RP250 (FULL RUPIAH) PAR VALUE PER SHARE					
MODAL DASAR AUTHORIZED					
– SERI A : 24.000.000.000 SAHAM – SERIES A : 24,000,000,000 SHARES					
– SERI B : 12.000.000.000 SAHAM – SERIES B : 12,000,000,000 SHARES					
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR ISSUED AND FULLY PAID					
– SERI A : 24.000.000.000 SAHAM – SERIES A : 24,000,000,000 SHARES					
– SERI B : 12.000.000.000 SAHAM – SERIES B : 12,000,000,000 SHARES					
SURPLUS REVALUASI ASET TETAP REVALUATION SURPLUS OF FIXED ASSETS	629.231	673.944	748.183	683.786	108,67%
KERUGIAN PENGUKURAN KEMBALI PROGRAM IMBALAN PASTI - SETELAH PAJAK TANGGUHAN REMEASUREMENT LOSS OF DEFINED BENEFIT PENSION PLANS – NET OF DEFERRED TAX	(53.976)	(44.575)	(111.967)	(70.173)	130,01%
TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH OTHER PAID-IN CAPITAL – NET	519.663	520.603	528.753	523.006	100,64%
SALDO LABA RETAINED EARNINGS					
CADANGAN UMUM GENERAL RESERVE	1.818.138	2.317.122	2.893.565	2.342.942	128,86%
BELUM DITENTUKAN PENGGUNAANNYA UNAPPROPRIATED	1.159.370	1.260.308	1.376.505	1.265.394	109,14%
JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY	7.816.074	8.471.936	9.185.652	5.667.242	72,51%

Jumlah ekuitas Bank Jatim pada tahun 2019 sebesar Rp9.185.652 miliar. Angka ini meningkat 72,51% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp5.667.242 miliar. Kenaikan ekuitas ini disebabkan oleh kenaikan cadangan umum.

Struktur permodalan Bank Jatim berhasil dipertahankan dan berada pada level yang cukup sehat dengan rasio kecukupan modal/kewajiban penyediaan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio*-CAR) sebesar 21,77% pada akhir 2019. Nilai ini melebihi dari persyaratan minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia, yaitu 8%.

Total equity of Bank Jatim in 2019 amounted to Rp9,185,652 million, grew by 72.51% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp5,667,242 million. The increase in equity was caused by an increase in general reserves.

Bank Jatim's capital structure was successfully maintained at a relatively sound level with Capital Adequacy Ratio (CAR) of 21.77% at the end of 2019. This value exceeded the minimum requirements determined by Bank Indonesia, which was 8%.

LAPORAN LABA RUGI

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

KETERANGAN (JUTAAN RUPIAH) DESCRIPTION (MILLION RUPIAH)	2017	2018	2019	RATA-RATA PERTUMBUHAN 2017 - 2019 AVERAGE GROWTH IN 2017-2019	GROWTH%
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH BERSIH INTEREST AND SHARIA INCOME, NET	3.484.912	3.688.107	3.999.601	3.724.207	106,87%
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA OTHER OPERATING INCOME	371.186	413.321	473.980	419.496	113,01%
BEBAN OPERASIONAL OPERATING EXPENSES	2.213.291	2.395.507	2.677.002	2.428.600	109,73%
LABA OPERASIONAL INCOME FROM OPERATIONS	1.642.807	1.705.921	1.796.579	1.715.102	104,40%
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL NON-OPERATING INCOME, NET	5.866	47.777	67.554	36.488	622,03%
LABA SEBELUM PAJAK INCOME BEFORE TAX EXPENSE	1.636.941	1.753.698	1.864.133	1.751.591	107,00%
BEBAN PAJAK BERSIH TAX EXPENSE - NET	477.571	493.390	487.628	486.196	101,81%
LABA TAHUN BERJALAN INCOME FOR THE YEAR	1.159.370	1.260.308	1.376.505	1.265.394	109,14%
LABA KOMPRHENSIF TAHUN BERJALAN TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR	1.219.588	1.314.422	1.383.372	1.305.794	107,07%

PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH BERSIH

Pendapatan Bunga dan Syariah diperoleh dari kredit yang diberikan, margin dan pendapatan bagi hasil, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo, surat berharga nilai wajar melalui laba rugi, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, provisi, dan lainnya. Pada 2019, jumlah pendapatan bunga dan syariah bersih Bank Jatim tercatat sebesar Rp3.999.601 miliar, meningkat 106,87% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp3.724.207 miliar. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh naiknya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan.

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan di luar bunga dan syariah bersih Bank Jatim pada akhir 2019 meningkat sebesar 113,01% menjadi Rp473.980 miliar dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp419.496 Miliar. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan tersebut adalah naiknya penerimaan dari administrasi giro, tabungan dan deposito.

BEBAN OPERASIONAL

Beban operasional yang dimiliki Bank Jatim pada 2019 adalah sebesar Rp2.677.002 miliar, meningkat 109,73% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp2.428.600 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

INTEREST AND SHARIA INCOME, NET

Interest and Sharia income is obtained from loans, margin, and profit sharing, placements with Bank Indonesia and other banks, Bank Indonesia certificates, securities held to maturity, fair value securities through profit or loss, securities purchased under agreements to resell, provisions and others. In 2019, the Bank's total interest and sharia income (net) amounted to Rp3.999.601 million, grew by 106.87% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp3.724.207 million. The increase was mainly due to the increase in interest income from loans.

OTHER OPERATING INCOME

Other operating income of the Bank at the end of 2019 amounted to Rp473.980 million, grew by 113.01% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp419.496 million. The increase was due to several factors, among others, the growth of receipts from administration of giro, savings, and deposits.

OPERATING EXPENSES

Operating expenses of the Bank at the end of 2019 amounted to Rp2.677.002 million, grew by 109.73% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp2.428.600 million. The increase was mainly due to the growth of provision for impairment losses on financial assets.

PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL

Pada 2019, pendapatan operasional Bank Jatim mencapai Rp67.554 miliar, meningkat 622,03% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp36.488 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh beban non operasional.

LABA SEBELUM PAJAK

Labanya sebelum pajak pada 2019 mengalami peningkatan 107,00% atau sebesar Rp1.864.133 miliar dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp1.751.591 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan Kenaikan Pendapatan Bunga Bersih.

BEBAN PAJAK

Beban pajak pada 2019 mengalami penurunan 101,81% atau sebesar Rp487.628 miliar dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp486.196 miliar. Penurunan beban pajak- Netto tersebut dipengaruhi oleh kenaikan laba sebelum beban pajak.

LABA TAHUN BERJALAN

Pada 2019, laba tahun berjalan Bank Jatim sebesar Rp1.376.505 miliar, mengalami peningkatan 109,14% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp1.265.394 miliar. Hal ini disebabkan meningkatnya Laba Operasional.

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Dengan demikian, pada 2019, Perusahaan mencatatkan laba komprehensif sebesar Rp1.383.372 miliar, naik 107,07% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp1.305.794 miliar. Peningkatan ini dipicu oleh pertumbuhan pendapatan operasional lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan beban operasionalnya.

NON-OPERATING INCOME, NET

Non-operating income, net of the Bank at the end of 2019 amounted to Rp67,554 million, grew by 622.03% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp36,488 million. The increase was mainly due to the post of non-operating expenses.

INCOME BEFORE TAX EXPENSE

Income Before Tax Expense of the Bank at the end of 2019 amounted to Rp1,864,133 million, grew by 107.00% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp1,751,591 million. The increase was due to the increase in interest income, net.

TAX EXPENSE – NET

Tax Expense of the Bank (Net) at the end of 2019 amounted to Rp487,628 million, declined by 101.81% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp486,196 million. The decrease was due to the growth of income before tax expense.

INCOME FOR THE YEAR

The post of income for the year of the Bank was recorded at Rp1,376,505 million, grew by 109.14% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp1,265,394 million. This was due to the growth of income from operations.

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Therefore, the Bank recorded total comprehensive income for the year of 2019 amounting to Rp1,383,372 million, grew by 107.07% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp1,305,794 million. This was due to the higher growth of operating income than operating expenses.

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENTS OF CASH FLOWS

ARUS KAS (JUTAAN RUPIAH) CASH FLOWS (MILLION RUPIAH)	2017	2018	2019	RATA-RATA PERTUMBUHAN 2017 - 2019 AVERAGE GROWTH IN 2017-2019	GROWTH%
KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI KEGIATAN OPERASI NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES	6.663.420	9.427.320	2.337.757	3.000.392	45.03%
KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI KEGIATAN INVESTASI NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES	1.490.006	3.063.485	1.795.971	2.116.487	142.05%
KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI KEGIATAN PENDANAAN NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES	315.919	1.229.874	475.026	356.922	112.98%
KENAIKAN NETTO KAS DAN SETARA KAS NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	4.857.495	5.133.961	1.016.812	3.669.423	75.54%
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR	9.446.524	14.304.019	19.437.785	14.396.109	152.40%
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR	14.304.019	19.437.785	20.453.366	18.065.057	126.29%

Pada akhir 2019, Bank Jatim membukukan saldo akhir kas dan setara kas sebesar Rp20.453.366 miliar dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp18.065.057 miliar mengalami peningkatan sebesar 126.29%. Peningkatan saldo kas ini terutama akibat kebutuhan Likuiditas untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan kebutuhan operasional.

Bank Jatim booked cash and cash equivalents at the end of 2019 amounting to Rp20.453.366 million, grew by 126.29% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp18.065.057 million. This was mainly caused by the rising liquidity need to meet customers' needs and operational needs.

A. KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Pada 2019, terjadi peningkatan pada arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp2.337.757 miliar dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp3.000.392 miliar. Arus kas bersih merupakan pengurangan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar. Arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari peningkatan pendapatan bunga, investasi dan syariah, pendapatan premi, pendapatan operasional lainnya, pendapatan non operasional, kenaikan simpanan nasabah, dan kenaikan simpanan dari bank lain. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari penyaluran pinjaman, pembayaran bunga, serta beban operasional lainnya. Hal ini berarti Bank Jatim mampu untuk melakukan proses bisnis yang baik dengan memanfaatkan sumber operasionalnya seperti kredit yang diberikan, simpanan nasabah, dan pembayaran pajak menjadi kas yang sudah diakuidan diperoleh.

A. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

In 2019, net cash flow provided by operating activities reached Rp2.337.757 million, an increase compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp3.000.392 million. Net cash flow was the difference between cash inflows and cash outflows. The highest cash inflows were contributed by an increase in interest income, investment and sharia, premium income, other operating income, non-operating income, increase in customer deposits, and increase in deposits from other banks. Meanwhile, the highest cash outflows came from loan distribution, interest payments, and other operating expenses. This meant that Bank Jatim was able to conduct good business processes by utilizing operational sources, such as loans, customer deposits, and tax payments into cash that have been recognized and obtained.

B. KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 2019 adalah sebesar Rp1.795.971 miliar turun 142.05% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp2.116.487 miliar. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari pembelian obligasi pemerintah, pembelian efek-efek, serta pembelian aset tetap. Hal ini mengindikasikan Bank Jatim masih melakukan tambahan investasi namun belum mendapatkan imbal hasil dalam bentuk kas dari investasi yang dikeluarkan selama tahun 2018.

B. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Net cash used in investing activities in 2019 amounted to Rp1.795.971 million, declined by 142.05% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp2.116.487 million. The highest cash outflows came from purchases of government bonds, purchases of securities, and purchases of fixed asset. This indicated that Bank Jatim continued making additional investments but did not receive cash returns from investments issued in 2018.

C. KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pada 2019, arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan adalah sebesar Rp475.026 miliar turun 112,98% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp356.922 miliar. Arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari kenaikan pinjaman yang diterima. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari pembayaran dividen dan penurunan efek-efek yang diterbitkan. Hal ini memiliki arti bahwa Bank Jatim masih mampu mendapatkan kas dalam bentuk pendanaan dari pinjaman yang diterima yang mampu menutup kas keluar dalam bentuk dividen dan lain-lain.

KEMAMPUAN MEMBAYAR
UTANG DAN TINGKAT
KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan membayar hutang Bank Jatim diukur melalui beberapa rasio antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Rasio-rasio tersebut akan menjadi tolok ukur bagi bank dalam mengukur kemungkinan risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan operasional bank.

C. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

In 2019, net cash flow used in financing activities amounted to Rp475,026 million, declined by 112.98% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp356,922 million. The highest cash inflows came from the increase in borrowing while the highest cash outflows came from dividend payments and decrease in issued securities. This meant that the Bank was still able to obtain cash in the form of financing from borrowings, which could cover cash outflows in the form of dividends and others.

SOLVENCY AND RECEIVABLES
COLLECTABILITY

The solvency of Bank Jatim is measured using several ratios, including liquidity ratio, solvability ratio, and profitability ratio. These ratios serve as a benchmark for the Bank in calculating risks that can potentially arise in its operations.

	2017	2018	2019
CAR-TIER I <i>CAR-TIER I</i>	23.67%	23.23	20.76
CAR-TIER II <i>CAR-TIER II</i>	0.98%	0.97	1.01
CAR (RISIKO KREDIT, PASAR DAN OPERASIONAL) <i>CAR (CREDIT, MARKET, AND OPERATIONAL RISKS)</i>	24.65%	24.21	21.77
NPL NETT <i>NPL NET</i>	0.46%	0.61	0.71
NPL GROSS <i>NPL GROSS</i>	4.59%	3.75	2.77
ROA <i>ROA</i>	3.12	2.96	2.73
ROE <i>ROE</i>	17.43	17.75	18.00
BOPO <i>BOPO</i>	68.63	69.45	71.40
LDR <i>LDR</i>	79.69	66.57	63.34
LFR <i>MINIMUM STATUTORY RESERVES (FOREIGN EXCHANGE)</i>	79.69	66.57	63.34
GWM (RUPIAH) <i>GWM (RUPIAH)</i>	7.97	7.99	9.63
POSISI DEvisa NETTO (PDN) <i>NET OPEN POSITION (NOP)</i>	1.19	2.35	1.33

RASIO SOLVABILITAS

Rasio CAR risiko kredit, pasar dan operasional Bank Jatim per 31 Desember 2019 berada pada level yang aman sebesar 21.77% atau mengalami penurunan sebesar 2.44% dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat pada level sebesar 24.21%.

Rasio tersebut berada di atas standar otoritas yang ditetapkan. Melalui *Capital Management* Perseroan, manajemen senantiasa menjaga agar Rasio CAR Perseroan secara berkesinambungan dapat terus tumbuh. Level rasio CAR Perseroan tersebut menunjukkan struktur permodalan bank memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko

SOLVABILITY RATIO

Bank Jatim's Capital Adequacy Ratio (CAR) in regard to credit, market, and operational risks was at a safe level of 21.77% as of December 31, 2019, a decrease of 2.44% compared to that of 2018 recorded at 24.21%.

This percentage exceeded the established authority standards. Through a proper capital management, the Bank's management continued to ensure that CAR Ratio had an ample room to grow in the future. This percentage also showed that the Bank's capital structure has the capability to offset market risk, credit risk, and operational risk, where the ratio was higher than the BI/OJK minimum adequacy ratio, and that the

kredit dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum BI/OJK dan struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan BI/OJK. Hal ini menunjukkan bahwa Bank telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.

RASIO LIKUIDITAS

- Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan

Rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan pada tahun 2019 turun sebesar 63,34% dari 66,57% pada tahun 2018. Penurunan rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan dipengaruhi oleh kenaikan dana pihak ketiga yang tidak sebanding dengan kredit.

- Rasio Pinjaman terhadap Pendanaan

Sampai dengan tahun 2019, rasio LFR berada pada level 63,34%. Hal ini merupakan salah satu dampak resofiling struktur pendanaan Bank Jatim yang bersifat jangka panjang yang lebih stabil dalam rangka penataan sumber pendanaan agar tidak terkonsentrasi hanya pada jangka pendek.

RASIO RENTABILITAS

Dalam mengukur tingkat rentabilitas Perseroan diukur berdasarkan beberapa rasio antara lain:

- *Return On Assets (ROA)*

Return on Assets Perseroan pada tahun 2019 tercatat sebesar 2,73% atau mengalami penurunan sebesar 0,23% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 2,96%. Penurunan tersebut antara lain dikarenakan penurunan laba sebelum pajak Perseroan di tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total aset.

- *Return On Equity (ROE)*

Return on Equity pada tahun 2019 ini tercatat sebesar 18,00% atau mengalami peningkatan sebesar 0,25% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 17,75%. Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ekuitas selama tahun 2019.

- *Net Interest Margin (NIM)*

Pada tahun 2019 ini, Net Interest Margin (NIM) Perseroan mengalami penurunan sebesar 0,26% dari semula tercatat sebesar 6,37% pada tahun 2018 menjadi sebesar 6,11% pada akhir tahun 2019. Hal tersebut terutama dipengaruhi karena pertumbuhan penyaluran Kredit dan Pembiayaan pada tahun 2019.

RASIO EFISIENSI

- Beban Operasional Terhadap Pendapatan operasional (BOPO)

Rasio BOPO mengalami peningkatan sebesar 1,95% di tahun 2019, dari semula berada pada posisi 69,45% pada akhir tahun 2018 meningkat menjadi 71,40% di tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan beban bunga dana yang terjadi pada tahun 2019.

Bank's capital structure met the BI/OJK Regulations. In addition, with this CAR value, the Bank was regarded to be able to manage its capital properly in 2019 and have sufficient capital to protect against solvability risk.

LIQUIDITY RATIO

- Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit ratio of the Bank in 2019 decreased to 63,34% from 66,57% recorded in 2018. This decline was influenced by an increase in third party funds that were not comparable to loans.

- Loan to Financing Ratio

Loan to Financing Ratio of the Bank in 2019 was recorded at 63,34%. This value was the result of the resofiling long-term financing structure of Bank Jatim which was more stable in the context of structuring funding sources so that it was not concentrated only in the short term.

RENTABILITY RATIO

The Bank's rentability ratio is measured through several ratios, such as:

- Return on Assets (ROA)

The Bank's Return on Assets (ROA) in 2019 reached 2,73%, a decrease of 0,23% from the ROA of 2018 recorded at 2,96%. This decrease was due to, among others, the decrease in income before tax expense in 2019 which was higher than the growth of total assets.

- Return on Equity (ROE)

The Bank's Return on Equity (ROE) in 2019 reached 18,00%, an increase of 0,25% from the ROE of 2018 recorded at 17,75%. This increase was mainly due to the growth of equity in 2019.

- Net Interest Margin (NIM)

The Bank's Net Interest Margin (NIM) in 2019 reached 6,11%, a decrease of 0,26% from the NIM of 2018 recorded at 6,37%. This decrease was mainly due to the growth of loan disbursement and financing conducted in 2019.

EFFICIENCY RATIO

- Operating Income to Operating Expenses (BOPO) Ratio

The Bank's BOPO Ratio increased by 1,95% in 2019, from 69,45% recorded at the end of 2018 to 71,40%. The increase was mainly affected by the increase interest expenses which took place during the year.

RASIO KEPATUHAN

- Giro Wajib Minimum

Pada 31 Desember 2019, GWM Rupiah Bank Jatim tercatat sebesar 9,63% dan GWM Valuta Asing sebesar 9,21%. Posisi likuiditas ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017 tentang perubahan ke-5 atas Peraturan Bank Indonesia No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

- Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat Kolektibilitas Piutang bank dapat dilihat dari nilai rasio Non-Performing Loan (NPL). Rasio NPL menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa besar kredit yang bermasalah atau macet dari seluruh kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Semakin kecil nilai NPL, maka performance Bank dalam kolektibilitas piutang semakin baik dan menunjukkan kualitas kredit yang baik.

Pada tahun 2019, NPL Gross Bank Jatim tercatat sebesar 2,77% atau mengalami Penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar 3,75%. Sedangkan untuk NPL Net tercatat sebesar 0,71% atau meningkat 0,10% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,61%. Peningkatan nilai NPL dikarenakan menurunnya hasil pembinaan dan penyelesaian debitur non performing Perseroan sepanjang tahun 2019.

COMPLIANCE RATIO

- Minimum Statutory Reserves (GWM)

As of December 31, 2019, Bank Jatim's GWM in Rupiah and in Foreign Exchange was recorded at 9.63% and 9.21%, respectively. This liquidity position was in accordance with the Regulation of Bank Indonesia No. 19/6/PBI/2017 dated April 17, 2017 regarding the 5th amendment to the Regulation of Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 regarding Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Exchange for Conventional Commercial Banks.

- Receivables Collectability Rate

Receivables collectability rate of Bank Jatim is reflected in the value of its Non-Performing Loan (NPL) ratio as it serves as a benchmark to understand the extent of non-performing loan from all loans disbursed by the Bank to its customers. The smaller the value of NPL ratio, the better the Bank's performance in collecting receivables and the better the Bank's credit quality is.

In 2019, NPL Gross of Bank Jatim was recorded at 2.77%, a decrease compared to the 2018 NPL Gross recorded at 3.75%. Meanwhile, NPL Net was recorded at 0.71%, an increase of 0.10% compared to the 2018 NPL Net recorded at 0.61%. The increase in NPL was due to the decline in the results of the guidance and settlement of the Bank's non-performing debtors throughout 2019.

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Komitmen dan kontijensi Bank Jatim didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Bank Jatim's commitment and contingency are based on the analysis of potential results. The management does not believe that the results of this will affect business results. It is probable, however, that the results of future operations can be materially affected by changes in estimates or the effectiveness of the strategies associated with it.

(JUTAAN RUPIAH) (IN MILLION RUPIAH)	2017	2018	2019	RATA-RATA PERTUMBUHAN 2017 - 2019 AVERAGE GROWTH IN 2017-2019	GROWTH%
LIABILITAS KOMITMEN COMMITMENT LIABILITY					
FASILITAS KREDIT KEPADA DEBITUR YANG BELUM DIGUNAKAN UNUSED LOAN COMMITMENTS GRANTED TO DEBTORS	2.124.355	283.471	3.850.264	2.936.445	138,23%
TAGIHAN KONTIJENSI CONTINGENT RECEIVABLES					
PENDAPATAN BUNGA DALAM PENYELESAIAN INTEREST INCOME ON PAST DUE ACCOUNTS	268.769	260.185	104.410	211.121	78,55%
LAINNYA OTHERS	13	13	13	13	100,00%
TOTAL TOTAL	268.782	260.198	104.423	211.134	78,55%
BANK GARANSI YANG DIBERIKAN (RUPIAH) BANK GUARANTEES ISSUED (RUPIAH)	3.608.290	3.724.310	2.257.934	3.196.845	88,60%
BANK GARANSI YANG DIBERIKAN DAN REVOCABLE L/C (MATA UANG ASING) BANK GUARANTEES ISSUED AND REVOCABLE L/C (FOREIGN CURRENCIES)	66.706	77.496	80.092	74.765	112,08%
JUMLAH LIABILITAS KOMITMEN DAN KONTIJENSI NETTO TOTAL COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES, NET	5.530.569	6.376.325	6.083.867	5.996.920	108,43%

Jumlah liabilitas komitmen pada tahun 2019 sebesar Rp3.850.264 miliar mengalami peningkatan sebesar 138,23% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp2.936.445. Tagihan kontinjensi pada tahun 2019 sebesar Rp104.410 miliar turun sebesar 78,55% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp211.121 yang didominasi oleh penurunan garansi bank yang diterima. Namun untuk posisi liabilitas kontinjensi mengalami kenaikan dibandingkan dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan garansi bank yang diberikan. Secara garis besar fluktuasi dari pergerakan pos komitmen dan kontingen ini sejalan dengan pertumbuhan kredit, mengingat debitur semakin mengoptimalkan penggunaan produk dan layanan Bank Jatim yang beragam dengan fitur yang bersaing.

SUKU BUNGA DASAR KREDIT

Semua Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dalam mata uang Rupiah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Ketentuan peraturan perundangundangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah kemudian diatur secara lebih rinci pada Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.03/2017 seiring dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaporan dan publikasi SBDK adalah salah satu upaya yang ditempuh Bank untuk memberikan kejelasan kepada nasabah dan memudahkan nasabah dalam menimbang manfaat, biaya dan risiko kredit yang ditawarkan. Selain itu, SBDK juga merupakan upaya peningkatan *good governance* dan pendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan antara lain melalui terciptanya disiplin pasar (*market discipline*) yang lebih baik.

Bank menjadikan SBDK sebagai indikator besaran suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah sehingga senantiasa memperbaharui SBDK sesuai dengan pergerakan BI 7-Day Repo Rate yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perhitungan SBDK mempertimbangkan 3 (tiga) komponen yakni Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana nasabah, beban operasional yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit serta komponen profit margin yang ditetapkan perusahaan dalam kegiatan penyaluran kredit. Sebagai catatan, perhitungan SBDK belum memperhitungkan komponen premi risiko dari debitur, yang besarnya tergantung penilaian atas potensi risiko berdasarkan segmentasi debitur. Dengan demikian besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. Bank Jatim memiliki kewajiban melaporkan perhitungan SBDK kepada OJK secara berkala serta melakukan publikasi dalam media yang lebih luas. Perhitungan SBDK berlaku untuk jenis kredit segmen Korporasi, Ritel, Mikro, KPR dan Non KPR.

Bank Jatim senantiasa menyesuaikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan mempertimbangkan kebijakan regulator dan mengacu kepada tren pergerakan BI 7-Day Repo Rate serta kondisi pendanaan Bank pada saat itu. Adapun perbandingan SBDK tahun 2019 dan rata-rata SBDK tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Total commitment liabilities in 2019 amounted to Rp3,850,264 million, an increase of 138.23% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp2,936,445. Contingent receivables in 2019 amounted to Rp104,410 million, declined by 78.55% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp211,121 million, which was dominated by a decrease in bank guarantees received. However, the position of contingent liabilities showed an increase compared to the average growth of the last 3 (three) years due to the growth of bank guarantees. Broadly speaking, the fluctuation in commitment and contingent posts was in line with credit growth, considering that debtors continued to optimize the use of Bank Jatim's diverse products and services with competitive features.

PRIME LENDING RATE

All commercial banks that carry out conventional banking business activities are obliged to report and publish the Prime Lending Rate (SBDK) in Rupiah as stipulated in the Regulation of OJK No. 32/POJK.03/2016 regarding Transparency and Publication of Bank Reports. The provisions of the laws and regulations regarding transparency of bank's product information and the use of personal data of customers are then regulated in more detail in the Circular Letter of OJK No. 34/SEOJK.03/2017, along with the transfer of functions, duties, and authority of regulation and supervision of financial services from Bank Indonesia to the Authority Financial Services (OJK).

SBDK reporting and publication is one of the efforts taken by Bank Jatim to provide clarity to its customers and facilitate them in considering the benefits, costs, and risks of loan product offered. In addition, SBDK is an effort to improve good governance and encourage healthy competition in the banking industry, among others, through the creation of better market discipline.

The Bank considers SBDK as an indicator of the amount of credit interest rates to be charged to customers. Therefore, the SBDK is always renewed in accordance with BI 7-Day Repo Rate movements set by Bank Indonesia. SBDK calculation takes into account 3 (three) components, namely the Cost of Funds for Credit (HPDK) arising from the collection of customer funds, operating expenses incurred for fund raising and lending activities, as well as the profit margin component determined by the Bank in lending activities. For the record, the SBDK calculation does not take into account the risk premium component of the debtor of which the amount depends on the assessment of potential risks based on each debtor's segmentation. Thus, the amount of credit interest rates charged to debtors is not necessarily the same as the SBDK. Bank Jatim has the obligation to report SBDK calculations to OJK regularly and make publications in the media. The SBDK calculation applies to Corporate, Retail, Micro, KPR, and Non-KPR credit segments.

Bank Jatim always adjusts its SBDK by considering the regulator's policy and the BI 7-Day Repo Rate movement trends, as well as the Bank's funding conditions at the relevant time. The comparison of the 2019 SBDK and the 2018 average SBDK is as follows:

TAHUN YEAR	SUKU BUNGA DASAR KREDIT BERDASARKAN SEGMENTASI KREDIT PRIME LENDING RATE BASED ON CREDIT SEGMENTATION			BI 7 DRR	
	KORPORASI CORPORATION	RITEL RETAIL	MIKRO MICRO	KPR KPR	NON KPR NON-KPR
2019	7.27%	8.21%	11.77%	7.25%	8.62%
2018	8.26%	9.51%	12.08%	7.34%	9.30%
2017	8.55%	9.85%	12.54%	7.58%	9.62%

DAMPAK PENURUNAN SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA BANK

Sepanjang 2019 tidak terjadi penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia.

IMPACT OF INTEREST RATE DECREASE ON BANK'S PERFORMANCE

There was no decrease in interest rate by Bank Indonesia in 2019

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

POSISI KECUKUPAN MODAL BANK JATIM CAPITAL POSITION OF BANK JATIM	2017	2018	2019	RATA-RATA PERTUMBUHAN 2017 - 2019 AVERAGE GROWTH IN 2017-2019	GROWTH%
URAIAN (JUTAAN RUPIAH) DESCRIPTION					
MODAL INTI (JUTAAN RUPIAH) CORE CAPITAL (MILLION RUPIAH)	6.928.285	7.436.484	7.822.122	7.395.630	106,75%
MODAL PELENGKAP (JUTAAN RUPIAH) SUPPLEMENTARY CAPITAL (MILLION RUPIAH)	285.698	311.766	380.171	325.878	114,06%
TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (JUTAAN RUPIAH) TOTAL CORE CAPITAL AND SUPPLEMENTARY CAPITAL (MILLION RUPIAH)	7.213.983	7.748.250	8.202.293	7.721.509	107,04%
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT (JUTAAN RUPIAH) RISK WEIGHTED ASSET FOR CREDIT RISK (MILLION RUPIAH)	22.855.874	24.941.245	30.033.543	25.943.554	113,51%
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL (JUTAAN RUPIAH) RISK WEIGHTED ASSET FOR OPERATIONAL RISK (MILLION RUPIAH)	6.326.067	6.984.173	7.543.287	6.951.176	109,88%
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR (JUTAAN RUPIAH) RISK WEIGHTED ASSET FOR MARKET RISK (MILLION RUPIAH)	85.360	84.418	98.829	89.536	104,89%
RASIO MODAL INTI CORE CAPITAL RATIO	23,67%	23,23%	20,76%	22,55%	95,28%
RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN OPERASIONAL CAPITAL ADEQUACY RATIO WITH CREDIT AND OPERATIONAL RISK	24,65%	24,21%	21,77%	23,71%	95,93%
RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, OPERASIONAL DAN PASAR CAPITAL ADEQUACY RATIO WITH CREDIT, OPERATIONAL, AND MARKET RISK	24,65%	24,21%	21,77%	23,54%	95,51%

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, modal bank terdiri atas:

1. Modal Inti

Modal bank yang terdiri dari modal saham yang disetor, cadangan yang diungkapkan sebagai modal sumbangan, tambahan modal disetor, laba ditahan (termasuk saldo laba yang dicadangkan untuk tujuan tertentu), penurunan nilai atas instrumen keuangan yang tersedia untuk dijual, dan selisih yang terjadi antara laporan keuangan kantor cabang internasional. Modal Inti Bank Jatim di tahun 2019 mencapai Rp7.822.122 miliar, naik 106,75% dari

In line with the Regulation of Bank Indonesia, the Bank's capital consists of:

1. Core Capital

This is the Bank's capital which consists of paid capital, reserves disclosed as donated capital, additional paid-in capital, retained earnings (including retained earnings for certain purposes), impairment of financial instruments available for sale, and differences between the financial statements of international branch office. Bank Jatim's Core Capital in 2019 reached Rp7,822,122 million, up 106.75% from the average 3-year growth

rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp7.395.630 miliar, karena adanya tambahan modal dari komponen laba ditahan.

2. Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)

Modal pelengkap mengacu pada modal bank yang terdiri dari penyisihan penilaian kembali aktiva tetap, penyisihan umum untuk provisi penghapusan aktiva produktif, pinjaman sub-ordinasi, dan kenaikan nilai instrumen keuangan yang tersedia untuk dijual. Total modal pelengkap Bank Jatim di tahun 2019 sebesar Rp380.171 miliar naik 114,06% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp325.878 miliar.

of Rp7,395,630 million, due to additional capital from the retained earnings component.

2. Supplementary Capital (maximum 100% of core capital)

Supplementary capital refers to the Bank's capital which consists of allowance for revaluation of fixed assets, general allowance for provision of uncollectible account on productive assets, subordinated loans, and increase in value of financial instruments available for sale. Total supplementary capital of Bank Jatim in 2019 reached Rp380,171 million, up 114.06% from the average 3-year growth of Rp325,878 million.

KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Bank wajib menghitung Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/*Capital Adequacy Ratio* (CAR) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Bank Jatim memiliki kebijakan untuk menjaga struktur modal yang mampu mengantisipasi seluruh risiko utama yang terjadi di dalam pengelolaan bank, yaitu risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Kebijakan manajemen modal Bank Jatim juga ditujukan untuk mempertahankan struktur modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan.

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan wajib untuk memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan kepada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan terhadap modal yang tersedia. Sepanjang 2019, Bank Jatim telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Bank Jatim is required to calculate the Capital Adequacy Ratio (CAR) based on the Regulation of Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 dated November 28, 2012. To meet this requirement, the Bank has established a policy to maintain capital structure in order to be able to anticipate all the main risks occurring in the Bank's management, namely market risk, credit risk, and operational risk. Bank Jatim's capital management policy is also aimed at maintaining a strong capital structure to support business growth in the future.

The primary objectives of the Bank's capital management are to ensure that the Bank maintains a healthy and strong capital ratio to support its business and to maximize shareholder value. The Bank, then, is required to meet the Minimum Capital Adequacy Ratio (as determined by Bank Indonesia).

The management uses capital ratio regulations to monitor capital adequacy in accordance with the industry standards. Bank Indonesia's approach to measuring capital is mainly based on the monitoring of the capital requirements against the available capital. Throughout 2019, Bank Jatim has fulfilled all the capital requirements.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL (BUKAN IKATAN PENDANAAN) PADA TAHUN BUKU TERAKHIR MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT (EXCLUDING FINANCING COMMITMENT) IN THE LAST FISCAL YEAR

NAMA PIHAK YANG MELAKUKAN IKATAN NAME OF PARTIES ENTERING INTO COMMITMENTS

PT Indovickers Furnitama
Purposes of Commitments
Source of Funds Expected to Meet the Commitments
Currency of the Commitments
Steps Planned to Protect the Bank from the Risk of Related Foreign Currencies
CV Harapan Baru
PT Aria Summit Andalan
PT Megah Pertama Indah
PT Hyder Indonesia
PT Mitra Infosarana
CV Citra Info Pratama
PT Berca Hardayaperkasa

TUJUAN DARI IKATAN TERSEBUT <i>PURPOSES OF COMMITMENTS</i>	Bank Jatim memiliki ikatan material terkait investasi barang modal yang memiliki tujuan komitmen pembelian barang modal sebagaimana yang telah direncanakan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). <i>Bank Jatim has a material commitment related to capital goods investment with the purposes of the commitment to purchase capital goods as planned in the Bank's Business Plan (RBB).</i>
SUMBER DANA YANG DIHARAPKAN UNTUK MEMENUHI IKATAN-IKATAN TERSEBUT <i>SOURCE OF FUNDS EXPECTED TO MEET THE COMMITMENTS</i>	Bank Jatim telah mengalokasikan selama tahun berjalan sebagai sumber dana pengadaan pembelian barang modal. <i>Bank Jatim has allocated budgets for the year as a source of funds for procurement of capital goods.</i>
MATA UANG YANG MENJADI DENOMINASI <i>CURRENCY OF THE COMMITMENTS</i>	Seluruh transaksi yang dilakukan dalam rangka pengikatan material untuk belanja modal adalah dalam mata uang rupiah. <i>All transactions carried out in the context of material commitments for capital expenditure are in Rupiah</i>
LANGKAH-LANGKAH YANG DIRENCANAKAN PERUSAHAAN UNTUK MELINDUNGI RISIKO DARI POSISI MATA UANG ASING YANG TERKAIT <i>STEPS PLANNED TO PROTECT THE BANK FROM THE RISK OF RELATED FOREIGN CURRENCIES</i>	Bank Jatim tidak melakukan perlindungan atas risiko perlindungan atas mata uang asing karena seluruh transaksi pengikat dan belanja modal dilakukan dalam mata uang rupiah. <i>Bank Jatim does not carry out protection against the risk of foreign currencies as all commitments and capital expenditure transactions are carried out in Rupiah</i>

REALISASI BARANG MODAL

Belanja barang modal Perseroan antara lain bertujuan untuk pengembangan jaringan kantor layanan serta pendukung operasional Bank. Seluruh transaksi belanja barang modal dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga Bank tidak memiliki risiko nilai tukar mata uang asing dalam transaksi belanja barang modal.

Pada 2019, Bank Jatim telah merealisasikan investasi barang modal sebagai berikut:

CAPITAL GOODS REALIZATION

The Bank's capital goods expenditure aims to, among others, develop a network of service offices and supporting operations of the Bank. All capital goods expenditure transactions are conducted in Rupiah; hence, the Bank does not have foreign currencies risk in the capital goods expenditure transaction.

In 2019, Bank Jatim realized capital goods investment as follows;

DESKRIPSI <i>DESCRIPTION</i>	2018	2019	PERTUMBUHAN <i>GROWTH</i>	%
TANAH <i>LAND</i>	781.498	855.737	74.239	9.50%
BANGUNAN <i>BUILDING</i>	195.769	202.822	7.053	3.60%
KENDARAAN BERMOTOR <i>VEHICLES</i>	53.730	51.911	(1.819)	(3.39%)
PERALATAN KANTOR <i>OFFICE SUPPLIES</i>	462.846	483.554	20.708	4.47%
TOTAL <i>TOTAL</i>	1.493.843	1.594.024		

TARGET DAN REALISASI 2019 SERTA PROYEKSI 2020

TARGET AND REALIZATION OF 2019 AND PROJECTION FOR 2020

DESKRIPSI (JUTAAN RUPIAH) <i>DESCRIPTION (MILLION RUPIAH)</i>	TARGET 2019 <i>TARGET 2019</i>	REALISASI 2019 <i>REALIZATION IN 2019</i>	PENCAPAIAN (%) <i>ACHIEVEMENT (%)</i>	PROYEKSI 2020 <i>PROJECTION FOR 2020</i>
LAPORAN POSISI KEUANGAN <i>STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION</i>				
ASET <i>ASSETS</i>	66.130.206	76.715.290	116.01%	75.000.000
ASET PRODUKTIF (BRUTO) <i>PRODUCTIVE ASSETS (GROSS)</i>	65.451.164	72.037.394	110.06%	73.747.066
KREDIT YANG DIBERIKAN (NETTO) <i>LOANS (NET)</i>	37.302.108	37.372.166	100.19%	42.680.136
TOTAL LIABILITAS <i>TOTAL LIABILITIES</i>	56.934.357	67.529.638	118.61%	64.984.470
TOTAL EKUITAS <i>TOTAL EQUITY</i>	9.195.849	9.185.652	99.89%	10.015.530
MODAL INTI DAN PELENGKAP <i>CORE AND SUPPLEMENTARY CAPITAL</i>	8.862.862	8.202.293	92.55%	9.385.137
LAPORAN LABA RUGI <i>STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS</i>				

PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH NET <i>INTEREST AND SHARIAH INCOME, NET</i>	5,780,067	3,999,601	69.20%	6,886,499
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA <i>OTHER OPERATING INCOME</i>	580,366	47,398	8.17%	613,361
BEBAN OPERASIONAL <i>OPERATING EXPENSES</i>	(4,470,492)	(2,677,002)	59.88%	(5,433,191)
LABA OPERASIONAL <i>INCOME FROM OPERATIONS</i>	1,889,941	1,796,579	95.06%	2,066,669
LABA TAHUN BERJALAN <i>INCOME FOR THE YEAR</i>	1,895,459	1,376,505	72.62%	1,509,169
DANA PIHAK KETIGA <i>THIRD PARTY FUNDS</i>				
GIRO <i>DEMAND DEPOSITS</i>	20,844,856	23,825,878	114.30%	23,042,673
TABUNGAN <i>SAVINGS</i>	20,242,068	22,223,639	109.79%	22,393,642
DEPOSITO <i>DEPOSITS</i>	13,904,678	14,496,355	104.26%	14,932,708
PROFITABILITAS & EFFISIENSI <i>PROFITABILITY AND EFFICIENCY</i>				
ROA <i>ROA</i>	2.86%	2.73%		2.95%
ROE <i>ROE</i>	17.70%	18.00%		18.31%
NIM <i>NIM</i>	6.47%	6.11%		7.11%
BOPO <i>BOPO</i>	70.29%	71.40%		72.44%
KUALITAS ASET <i>ASSET QUALITY</i>				
NPL GROSS <i>NPL GROSS</i>	3.00%	2.77%		2.68%
NPL NETT <i>NPL NET</i>	0.33%	0.71%		0.03%
SOLVABILITAS <i>SOLVABILITY</i>				
CAR <i>CAR</i>	24.25%	21.77%		23.99%
LIKUIDITAS & PENDANAAN <i>LIQUIDITY & FUNDING</i>				
LDR <i>LDR</i>	68.12%	63.34%		70.70%
CASA <i>CASA</i>	74.71%	76.06%		75.26%

Dalam beberapa tahun terakhir Bank Jatim berhasil mencatat pertumbuhan positif dan pada 2019, Bank Jatim telah mencapai beberapa target sebagai berikut;

- Realisasi Total aset per Desember 2019 sebesar Rp76.715.290 juta dengan pencapaian sebesar 116.01% dari target sebesar Rp66.130.206 juta, total aset mengalami peningkatan sebesar 108.35% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp55.818.917 miliar
- Dari sisi aktiva total kredit yang diberikan terealisasi sebesar Rp37.372.166 juta dengan pencapaian sebesar 100.19% dari target sebesar Rp37.302.108 juta, total kredit mengalami peningkatan sebesar 110.26% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar Rp33.475.753 miliar
- Dari sisi pasiva total penghimpunan dana pihak ketiga per 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp60.545.872 miliar atau mencapai sebesar 110.10% terhadap target sebesar Rp54.991.602 juta. Jika dibandingkan dengan akhir tahun 2018 total dana pihak ketiga sebesar Rp50.915.931 miliar.

In recent years, Bank Jatim has managed to record positive growth, and in 2019, Bank Jatim has achieved the following targets;

- Total assets as of December 2019 were realized at Rp76,715,290 million, reaching 116.01% of the target of Rp66,130,206 million. Total assets increased by 108.35% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp55,818,917 billion
- Total loans were realized at Rp37,372,166 million, reaching 100.19% of the target of Rp37,302,108 million. Total loans increased by 110.26% compared to the average growth of the last 3 (three) years amounting to Rp33,475,753 million
- Total third party funds as of December 31, 2019 were realized at Rp60,545,872 million, reaching 110.10% of the target of Rp54,991,602 million. Compared to the realization at the end of 2018 amounting to Rp50,915,931 billion, total third party funds recorded an increase.

- Laba setelah pajak (EAT-Earning After Taxes) Perseroan per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp1.376.505 miliar dengan pencapaian sebesar 100,08% dari target sebesar Rp1.375.346 juta dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir meningkat sebesar 109,14%
- Realisasi Rasio ROA & ROE pada tahun 2019 tercatat masing-masing sebesar 2,73% dan 18,00% berada lebih baik dari target yang masing-masing sebesar 2,86% dan 17,70%.
- Bank Jatim pada tahun 2019 terus melakukan perbaikan terhadap kualitas aset yang dimiliki. Hal tersebut tercermin pada penurunan rasio NPL *Gross* dan NPL *Net* per Desember 2019 tercatat masing-masing sebesar 2,77% dan 0,71% Rasio tersebut berada lebih baik dari target masing-masing sebesar 3,00% dan 0,33%. NPL *Gross* dibawah target (Baik) namun Rasio NPL *Net* diatas target lebih besar dari target (Tidak Bagus).
- Earning After Taxes (EAT) of the Bank as of December 31, 2019 was recorded at Rp1,376,505 million, reaching 100.08% of the target of Rp1,375,346 million, or an increase of 109.41% compared to the average growth of the last 3 (three) years.
- ROA and ROE in 2019 were realized at 2.73% and 18.00%, respectively, which were better than the targets set at 2.86% and 17.70%, respectively.
- In 2019, Bank Jatim continued to make improvements to the quality of assets owned. This was reflected in the decline in Gross NPL and Net NPL ratio as of December 2019, recorded at 2.77% and 0.71%, respectively. These ratios were better than the targets set at 3.00% and 0.33%, respectively. Gross NPL was below the target (Good) but the Net NPL ratio exceeded the target (Poor).

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Untuk Tahun Buku 2019 tidak ada informasi ataupun fakta material yang terjadi setelah tanggal pelaporan akuntan.

PROSPEK USAHA

International Monetary Fund (IMF) dalam *World Economic Outlook Update* (Januari 2020), memprediksi pertumbuhan ekonomi global tumbuh sebesar 3,3% di tahun 2020, sementara ekonomi AS dan Tiongkok diprediksikan akan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 2,0% dan 6,0%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yaitu 2,3% dan 6,1%

Beberapa negara maju lainnya seperti Jepang juga diprediksi akan mengalami pertumbuhan ekonomi lebih rendah, yaitu sebesar 0,7% dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebesar 1,0%. Sedangkan negara-negara yang tergabung dalam Eurozones dan ASEAN – 5 diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik, masing-masing sebesar 1,3% dan 4,8%, dibandingkan periode sebelumnya yaitu 1,2% dan 4,7%.

Ditengah momentum perbaikan kinerja perekonomian tersebut, kinerja perekonomian nasional diprediksi tetap stabil. Di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi mencapai 5,1% - 5,3%, lebih tinggi dibandingkan estimasi tahun 2019 yang tumbuh mencapai 5,1%. Hal tersebut diantaranya didukung oleh stabilitas konsumsi nasional serta berlanjutnya akselerasi infrastruktur yang berlanjut. Kinerja inflasi nasional juga berada pada 3,1% yang didukung oleh penguatan koordinasi antar institusi serta perbaikan distribusi barang menyusul peningkatan infrastruktur (*Economic Outlook 2020* – Kemenkeu, Desember). Selain itu, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan menyempit di tahun 2020.

Perekonomian Provinsi Jawa Timur diperkirakan juga berada dalam kondisi yang baik. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur diperkirakan masih kuat dan kondusif pada rentang 5,3% sampai 5,8% dengan tingkat inflasi yang terjaga.

MATERIAL INFORMATION AND FACT SUBSEQUENT TO ACCOUNTANT'S REPORT DATE

There was no material information and fact subsequent to the accountant's report date in 2019.

BUSINESS OUTLOOK

In the *World Economic Outlook Update* (January 2020), the *International Monetary Fund* (IMF) predicts that global economy will grow to the level of 3.3% in 2020 while the US and China economies will grow to the level of 2.0% and 6.0%, respectively, lower than the previous period's growth of 2.3% and 6.1%.

Other developed countries, such as Japan, is also predicted to experience lower economic growth at 0.7% compared to the 1.0% growth of the previous period. Meanwhile, countries of Eurozone and ASEAN are predicted to experience better growth to the level of 1.3% and 4.8%, respectively, compared to the growth realization in the previous period at 1.2% and 4.7%.

Amid the momentum of economic performance improvement, the performance of Indonesia's economy is predicted to remain stable. In 2020, national economic growth is predicted to be within the range of 5.1% - 5.3%, higher than the 2019 estimate which is 5.1%. This is partly supported by the stability in national consumption and continued acceleration of infrastructure. The national inflation performance was predicted to be at 3.1% supported by the strengthening coordination between institutions and improvement in the distribution of goods following an improvement in infrastructure (*Economic Outlook 2020* - Ministry of Finance, December). In addition, the current account deficit is expected to decrease in 2020.

The economy of East Java Province is also estimated to be in positive condition. East Java Province's economic growth is estimated to remain strong and conducive in the range of 5.3% - 5.8% with a controlled inflation rate.

Sejalan dengan hal tersebut, kinerja perbankan juga diperkirakan membaik. Kinerja penyaluran kredit diproyeksikan tumbuh disekitar 11 – 13%, sedangkan penghimpunan DPK diperkirakan tumbuh sekitar 8 – 10% (RBB, 2020). Optimisme perekonomian nasional maupun regional di tahun 2020 memperlihatkan bahwa prospek usaha Perseroan kedepan masih baik. Namun demikian, tantangan lingkungan ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian domestik baik secara langsung maupun tidak langsung tetap perlu untuk dicermati. Optimisme kinerja usaha perusahaan didukung oleh kekuatan internal, antara lain:

- Ketahanan dan kecukupan modal (CAR) yang relatif tinggi
- Dukungan *shareholders* yang terdiri dari diantaranya Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Kepemilikan *captive market* dan aksesibilitas belanja pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- *Coverage* jaringan Bank Jatim yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, untuk terus bersaing ditengah perkembangan era digital yang semakin pesat, Perseroan juga menyiapkan sejumlah strategi, khususnya bidang perbankan digital melalui penguatan produk-produk digital, dilanjutkan dengan penguatan dan perluasan *delivery channels* menuju *omni channel delivery system* disamping saluran tradisional yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha Perseroan.

Disamping penguatan infrastruktur teknologi menuju ke arah *customer centric*, Perseroan juga berupaya mengelola pertumbuhan penyaluran kredit secara konservatif dengan fokus utama pada sektor korporasi melalui pemanfaatan peluang pada proyek-proyek strategis nasional serta peningkatan penyaluran kredit kepada sektor UMKM (RBB 2020 pp. 43).

RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN

Corporate Plan merupakan perencanaan jangka panjang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun guna memberi wawasan dan arah yang sama terhadap seluruh unit kerja dalam melaksanakan sasaran, strategi dan program kerja Bank. Penyusunan *Corporate Plan* didasarkan pada analisis faktor eksternal dan faktor internal serta memperhatikan perkembangan ekonomi moneter dan perbankan serta berdasarkan tren data masa lalu dengan memperhatikan proyeksi yang akan datang. Penyusunan *Corporate Plan* Bank menganut prinsip *Rolling Plan*, sehingga penyesuaian dapat dilakukan setiap tahun melalui penyusunan Rencana Bisnis.

Dalam mengembangkan Bank untuk 5 (lima) tahun kedepan (2019-2024), Bank telah merencanakan sasaran-sasaran sebagai berikut:

- Menjaga Kecukupan Permodalan (CAR) minimum 22%.
- Menjaga Kecukupan Likuiditas dengan lebih memperhatikan penghimpunan dana jangka Panjang.
- Memperkuat *Good Corporate Governance* (GCG) dan Kepatuhan.
- Meningkatkan kualitas *Learn and Growth*.

In line with this estimation, banking performance is also expected to improve. Lending performance is projected to grow within the range 11-13% while deposits is expected to grow within the range 8-10% (RBB, 2020). The positive conditions in both national and regional economic in 2020 drive the Bank's optimism that its future business prospects remain bright. However, the challenges of the global economic environment that affect the domestic economy, both directly and indirectly, need to be anticipated. The optimism of the Bank's business performance is also supported by internal factors, including:

- The relatively high capital adequacy (CAR) and resilience
- The support form the shareholders, consisting Regency Government, Municipality Government, and East Java Provincial Government;
- The ownership of captive market and accessibility of government expenditure in East Java Province;
- The network coverage of Bank Jatim which reaches almost all districts in East Java Province.

To continue to compete in the midst of the increasingly rapid development of the digital era, the Bank also prepares a number of strategies, particularly in the field of digital banking, including strengthening digital products, as well as strengthening and expanding delivery channels towards omnichannel delivery system, in addition to traditional channels, which are expected to enhance the Bank's business productivity.

Aside from the efforts to strengthen technology infrastructure towards customer centric concept, the Bank seeks to manage lending growth conservatively by focusing on the corporate sector through the utilization of opportunities in national strategic projects and increasing lending to the MSME sector (RBB 2020 pp. 43).

LONG-TERM PLAN

The Corporate Plan is a long-term planning for the period of 5 (five) years, prepared to provide the same insight and direction to all work units in the framework of implementation of Bank's strategies and work programs to achieve its objectives. The preparation of Corporate Plan is based on an analysis of external and internal factors and takes into account developments in the monetary economic and banking conditions, and based on past data trends with due regard to future projections. The preparation of the Bank's Corporate Plan adheres to the Rolling Plan principle so that adjustments can be made annually through the drafting of Business Plans.

The Bank's development plans for the next 5 (five) years (2019-2024) have been prepared with following objectives:

- To maintain a minimum Capital Adequacy (CAR) of 22%.
- To maintain Liquidity by paying more attention to long-term fund collection.
- To strengthen Good Corporate Governance (GCG) and Compliance aspect.
- To improve the quality of Learn and Growth.

ASPEK PEMASARAN

STRATEGI PEMASARAN

Pada 2019, Bank Jatim berkomitmen atas *product image* melalui peningkatan strategi pemasaran dengan melakukan beberapa program sebagai berikut:

- Inovasi terhadap produk Tabungan yang sudah ada, seperti Program Siklus Bunga Plus yang memberikan barang sesuai keinginan nasabah dan bunga tabungan.
- Menggalakkan berbagai aktivitas promosi baik secara nasional maupun tersegmentasi guna pencitraan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Jatim, misalnya Undian Simpeda bagi nasabah Tabungan Simpeda dan kegiatan SimPel Day di sekolah berkolaborasi dengan Pemda setempat.
- Kerjasama bisnis yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga baik lembaga pemerintah (seperti Taspen, Asabri dan Bank UMKM) maupun perusahaan swasta (seperti Grab, Gopay, Tokopedia, dan Amarta) dalam upaya meningkatkan pertumbuhan akuisisi nasabah, peningkatan dana, maupun potensi fee-based income.
- Melakukan *cross selling* menawarkan produk bancassurance untuk meningkatkan fee-based income.
- Partisipasi *sponsorship* pada beberapa *event* besar di Kota Surabaya maupun di wilayah Jawa Timur untuk peningkatan dana pihak ketiga, misalnya Jazz Traffic Concert, Wilwatikta Specta Konser, Surabaya Marathon dll.
- Beberapa *event* promosi untuk Nasabah Jatim Prioritas, misalnya *Cooking Class* dengan chef nasional, promo nonton Moto GP.
- Peningkatan fasilitas Jatim Prioritas melalui layanan merchant Jatim Prioritas di seluruh Indonesia dan di luar negeri.
- Optimalisasi media promosi Bank Jatim.

Setiap nasabah Bank Jatim diberikan fasilitas kartu ATM Bank Jatim yang dapat digunakan untuk bertransaksi di jaringan ATM, Prima, ATM Bersama dan MEPS (Malaysia) serta fasilitas layanan *e-channel* Bank Jatim misalnya Internet Banking dan Mobile Banking (Jatim Code). Dengan adanya fasilitas tersebut nasabah dapat menikmati keamanan, kemudahan dan kenyamanan transaksi perbankan, kapan saja dan dimana saja.

PANGSA PASAR

Berdasarkan jenisnya, Bank Jatim tergolong Bank Umum Nasional Devisa. Bank Jatim juga termasuk dalam Top 20 lembaga keuangan terbaik di Indonesia dan masuk dalam kategori 50 perusahaan publik terbaik di Indonesia.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang

MARKETING ASPECT

MARKETING STRATEGIES

In 2019, Bank Jatim was committed to product image through marketing strategies improvement that was implemented by carrying out the following programs:

- Innovations on existing Savings products, such as the Siklus Bunga Plus Program that delivered goods according to customer's wishes and savings interest.
- Various promotional activities, both nationally and segmented, in order to improve the Bank's reputation and image and to foster public trust in Bank Jatim, for example Undian Simpeda (Simpeda Lucky Draw) for Simpeda Savings customers and SimPel Day activities in schools in collaboration with local government.
- Mutually beneficial business cooperation with third parties, both government institutions (such as Taspen, Asabri, and MSME Banks) and private companies (such as Grab, Go-Pay, Tokopedia, and Amarta) in an effort to increase customer acquisition growth, funds, and potential fee-based income.
- Cross selling activity to offer bancassurance products to increase fee-based income.
- Participation in sponsorships at several major events in Surabaya and in East Java to increase third party fund, such as Jazz Traffic Concert, Wilwatikta Specta Concert, Surabaya Maratho, and so on.
- Promotional events for Jatim Prioritas Customers, for example Cooking Class with national chef and Moto GP watching promo.
- Improvement of Jatim Prioritas facilities through Jatim Prioritas merchant services throughout Indonesia and abroad.
- Optimization of Bank Jatim's promotional media.

Each customer of Bank Jatim is given a Bank Jatim ATM card facility that can be used to conduct transaction on the ATM Prima, ATM Bersama, and MEPS (Malaysia) networks, as well as Bank Jatim e-channel service facilities, such as Internet Banking and Mobile Banking (Jatim Code). With such facilities, customers can enjoy the security, convenience, and comfort of banking transactions, anytime and anywhere.

MARKET SHARE

Based on its type, Bank Jatim is classified as a National Foreign Exchange Commercial Bank. Bank Jatim is also included in the Top 20 best financial institutions in Indonesia and is included in the category of 50 best public companies in Indonesia.

DIVIDEN POLICY

All shares of the Bank that have been issued, including new shares to be issued in the context of Public Offering, have the same rights in terms of dividends in

sama dalam pembagian hak atas dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen. Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Besarnya pembayaran dividen tunai akan dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan jika *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perseroan setelah memperhitungkan risiko pasar mencapai $\geq 20\%$, dengan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Perbankan.

Dengan memperhatikan laba Perseroan dan CAR setelah memperhitungkan risiko pasar mencapai $\geq 20\%$, kondisi likuiditas tahun berjalan serta dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, manajemen Perseroan merencanakan akan membagikan dividen tunai sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih setelah pajak

accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association as well as the prevailing laws and regulations.

The Bank does not have negative covenants in relation to restrictions of third parties in the context of dividend distribution. The Bank plans to pay cash dividends to all shareholders at least once a year. The amount of cash dividend payment will be related to income the Company acquired in the relevant fiscal year, and if the *Capital Adequacy Ratio* (CAR) reaches $\geq 20\%$ after the calculation of market risk, without prejudice to the rights of the GMS to determine otherwise in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association and the prevailing laws and regulations in banking sector.

By taking into account the Bank's income and CAR after the market risk calculation reaches $\geq 20\%$, the and the current year's liquidity conditions, and by observing the rights of the GMS to determine otherwise in accordance with the provisions of the Articles of Association of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, the Bank's management plans to distribute cash dividends of up to 30% of net income after tax.

TAHUN BUKU FISCAL YEAR	LABA BERSIH NET INCOME	DIVIDEN DIVIDEND	DIVIDEN PER SAHAM DIVIDEND PER SHARE	PAYOUT RATIO PAYOUT RATIO	TANGGAL PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT DATE	TANGGAL PEMBAYARAN
2018	1.260.308.411.500,00	683.865.985.709,02	45,61	54,26%	30 April 2019	29 Mei 2019
2017	1.159.369.505.449,00	660.384.829.276,20	44,10	56,96%	22 Februari 2018	23 maret 2018

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN MANAJEMEN

Bank Jatim mengadakan Program kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Maret 2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta No.89 tanggal 25 April 2012.

TUJUAN ESA DAN MESOP

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan adalah agar manajemen dan karyawan Perseroan mempunyai rasa memiliki (sense of belonging) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan, sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh stakeholder Perseroan.

Bank Jatim mengadakan program (*Employee Stock Allocation*) ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan dan menerbitkan opsi Saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% (nol koma tujuh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat IPO.

MANAGEMENT AND EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP PROGRAM

Bank Jatim has established a share ownership program for employees and the management based on the resolution of General Meeting of Shareholders of the Bank convened on March 19, 2012 which was set forth in Deed No. 89 dated April 25, 2012.

ESA AND MESOP OBJECTIVES

The main objective of the Bank's Management and Employee Share Ownership Program is to create a sense of belonging among the management and employees of the Bank which is expected to increase the work productivity of each employee. In addition, this program aims to improve the Bank's overall performance and increase the creation of added values and benefits for all stakeholders of the Bank.

Bank Jatim conducts Employee Stock Allocation (ESA) program by allocating 10% (ten per cent) shares of the Shares Offered by the Bank and by issuing Stock option for MESOP as many as 0.71% (zero point seven one per cent) of the total issued and fully paid-in capital after the Public Offering. The price of shares for ESA program is the same as the offering price during IPO.

EMPLOYEE STOCK ALLOCATION (ESA)

Program alokasi saham untuk karyawan. Dimana dalam program ini perusahaan memberikan alokasi atau persentase khusus bagi karyawan untuk memiliki saham perusahaan, program ESA bisa dilihat pada beberapa perusahaan saat akan melakukan *Initial Public Offering* (IPO).

Alokasi saham untuk program ESA terdiri dari :

- Saham Penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai Penghargaan.
- Saham Jatah Pasti yaitu pemberian jatah kepemilikan saham kepada pegawai dalam bentuk pembelian jatah pasti saham IPO sesuai limit.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program ESA adalah sebagai berikut :

- Pegawai yang telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada tanggal 30 April 2012.
- Tidak dalam status kena sanksi jabatan/skorsing.

Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.

Ketentuan pelaksanaan program ESA adalah sebagai berikut:

1. Saham Penghargaan

- a. Dibagikan kepada seluruh "Pegawai" dengan biaya dari Perseroan
- b. Pegawai menerima secara cuma-cuma pada saat saham Perseroan dicatitkan di Bursa Efek Indonesia
- c. Saham Penghargaan diberikan 1 kali gaji Pegawai
- d. Pegawai wajib menandatangani pernyataan tunduk pada ketentuan Program ESA Persyaratan untuk menerima Saham Penghargaan:
 - (1) Telah bekerja 1 tahun terhitung pada 30 April 2012
 - (2) Tidak dalam status kena sanksi jabatan/skorsing
 - (3) Alokasi berdasarkan jabatan
 - (4) Saham Penghargaan dikenakan "Lock-up" selama 2 tahun
 - (5) Selama masa lock-up bilamana Pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan karena terkena sanksi administrasi, maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur

2. Saham Jatah Pasti

- a. Ditawarkan kepada seluruh "Pegawai" untuk membeli saham dengan harga IPO, tidak ada kewajiban untuk membeli.
- b. Jatah pasti senilai 7 kali gaji Pegawai.
- c. Bagi Pegawai yang secara sukarela membeli saham jatah pastinya, rekeningnya akan diblokir untuk pembayaran secara tunai pada tanggal pembayaran dengan harga tertinggi

EMPLOYEE STOCK ALLOCATION (ESA)

This is a stock allocation program for employees in which the Bank provides a special allocation or percentage for employees to own the Bank's shares. ESA program is often prepared by several companies when they conduct an Initial Public Offering (IPO).

The share allocation for ESA program of the Bank consists of:

- Award Shares, namely the provision of shares to employees as an Award.
- Certain Allotment Shares, namely the allocation of share ownership to employees in the form of purchasing certain shares of IPO according to the limit.

Participants of the ESA program are as follows:

- Employees who have worked for 1 (one) year starting from April 30, 2012.
- Employees who are not sanctioned or in suspension status.

If the total shares allocated in the ESA program are not fully distributed, the remainder will be offered to the community.

Provisions for the implementation of ESA program are as follows:

1. Award Shares

- a. Distributed to all "Employees" at the cost of the Bank
- b. The employees receive the shares freely at the time the Bank's shares are listed on the Indonesia Stock Exchange
- c. Award Shares are provided amounting to 1 time Employee's salary
- d. Employees are obliged to sign a statement of compliance with the provisions of ESA program. The requirements for receiving Award Shares are:
 - (1) Has worked for 1 (one) year starting from April 30, 2012
 - (2) Not sanctioned or in suspension status
 - (3) Allocation is based on position
 - (4) Award Shares are subject to "Lock-up" for 2 years
 - (5) During the lock-up period, if the Employee resigns or is dismissed due to administrative sanctions, then, their rights to the Award Shares are void.

2. Certain Allotment Shares

- a. Offered to all "Employees" to buy shares at IPO price. There is no obligation to buy.
- b. Allotment must be worth 7 times Employee's salary.
- c. Employees who voluntarily buy their certain allotment shares, their account will be blocked for payment in cash on the date of the highest payment price

d. Persyaratan untuk menerima Jatah Pasti Untuk Membeli Saham:

- (1) Telah bekerja 1 tahun terhitung pada 30 April 2012
- (2) Tidak dalam status terkena sanksi jabatan skorsing
- (3) Jatah Pasti sebanyak 7 kali gaji Pegawai.
- (4) Saham Jatah Pasti dikenakan "Lock-up" selama 3 bulan.

PROSEDUR PELAKSANAAN ESA

Prosedur yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk memperoleh saham dalam program ESA adalah sebagai berikut :

- Untuk Saham Penghargaan, Peserta Program akan memperoleh alokasi Saham Penghargaan secara Cuma-Cuma pada tanggal penjatahan saham untuk Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Peserta Program akan memperoleh Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham
- Untuk Saham Jatah Pasti, Peserta Program yang ingin membeli saham yang ditawarkan dengan jatah pasti tersebut dengan mengajukan pemesanan saham Jatah Pasti sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah yang dialokasikan atas nama Peserta. Pada saat pemesanan saham Jatah Pasti tersebut Peserta wajib menyediakan dana pembayaran harga secara penuh sesuai dengan jumlah yang dipesan. Peserta wajib memberikan kuasa kepada PT Bahana Sekuritas untuk menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atas nama Pesemesan. Pada tanggal penjatahan saham Peserta akan memperoleh Konfirmasi Penjatahan Saham atas saham Jatah Pasti yang dipesan melalui program ESA

MANAGEMENT EMPLOYEE STOCK OPTION PLANS (MESOP)

Program Management & Employee Stock Option Plans (MESOP) adalah pemberian hak opsi kepada peserta program (optionee) untuk membeli saham Bank dengan harga tertentu (exercised price) yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana saham tersebut dapat dibeli (di-exercised) sesuai dengan jadwal pelaksanaan (exercised widows) yang ditentukan.

HARGA PELAKSANAAN PROGRAM MESOP

Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sekurang-kurangnya 90% rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang pembukaan Periode Pelaksanaan (*window exercise*) atas Hak Opsi dalam Program MESOP.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau Program MESOP adalah sebagai berikut :

- Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen

d. Requirements for buying Certain Allotment Shares:

- (1) Has worked for 1 (one) year starting from April 30, 2012
- (2) Not in the suspension status
- (3) Certain Allotment is as much as 7 times Employee's salary.
- (4) Certain Allotment Shares are subject to "Lock-up" for 3 months.

ESA IMPLEMENTATION PROCEDURE

The procedures to obtain shares in the ESA program are as follows:

- For Award Shares, Program Participants will obtain a free allocation of Award Shares on the date of allotment of shares for the Initial Public Offering of the Bank's Shares. Program Participants will obtain a Share Allotment Confirmation Form
- For Certain Allotment Shares, Program Participants who wish to buy shares offered for the certain allotment submit an order for maximum Certain Allotment Shares in accordance with the amount allocated on behalf of the Participant. At the time of ordering the Certain Allotment Shares, Participants must provide full price payment funds in accordance with the amount ordered. Participants must provide power of attorney to PT Bahana Sekuritas to sign the Share Purchase Order Form (FPPS) on behalf of the Ordering Party. On the date of allotment of shares, Participants will receive Confirmation of Shares Allotment on the Certain Allotment Shares ordered through the ESA program.

MANAGEMENT EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MESOP)

The Management & Employee Stock Option Plan (MESOP) is a program established to grant option rights to the participants (optionee) to buy Bank's shares at the exercised price previously specified. The shares can be exercised in accordance with the specified exercised windows.

PRICE OF MESOP PROGRAM IMPLEMENTATION

The exercise price of Option Rights will be determined based on Item V.2.2 of the Regulation of Registration No. I-A, Attachment of the Decree of Board of Directors of Jakarta Stock Exchange No. Kep-305/BEJ/07-2004 dated July 19, 2004, which is at least 90% of the average closing price of the Bank's share trading on the Indonesian Stock Exchange, before the date of the Bank's notification to the Indonesia Stock Exchange concerning the opening of the Exercise Window Period for Option Rights in the MESOP Program.

Participants of the MESOP Program are as follows:

- Board of Commissioners, excluding Independent Commissioners

- Dewan Pengawas Syariah
- Anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi
- Pejabat Struktural meliputi Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Pemimpin Sub Divisi, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Bidang Cabang Utama.
- Peserta yang berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai tetap yang tercatat sebagai peserta MESOP sesuai dengan ketentuan Diktum Kelima ayat (1) Surat Keputusan No: 057/251/DIR/CSE/KEP tentang Prosedur Pelaksanaan Program MESOP. Keputusan ini dengan jabatan yang sama dan / atau setingkat serta di atasnya sampai pada saat implementasi program MESOP.
- Peserta yang tidak berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai yang mengundurkan diri, diberhentikan dengan tidak hormat atau meninggal dunia

- Sharia Supervisory Board
- Members of Board of Directors who served at the time of issuance of Option Rights
- Structural Officers, including Division Heads, Main Branch Managers, Sub-Division Heads, Branch Managers, and Department Heads at Main Branch.
- Participants entitled to participate in the MESOP program are permanent employees registered as MESOP participants in accordance with the provisions of the Fifth Dictum paragraph (1) Decree No: 057/251/DIR/CSE/KEP regarding Procedures for Implementing the MESOP Program. This decision with the same position and/or level as well as above that, until the time of implementation of the MESOP program.
- Participants not entitled to participate in the MESOP program are employees who resign, dishonorably dismissed, or pass away.

Hak Opsi dalam Program MESOP akan diterbitkan dalam 3 Tahapan yaitu :

The Option Rights in the MESOP Program will be issued in 3 Phases, namely:

TAHAP I PHASE I	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP ini akan diterbitkan pada tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia <i>A maximum of 30% of the total Option Rights that can be issued in this MESOP Program will be issued on the date of listing of the Bank's shares on the Indonesia Stock Exchange</i>
TAHAP II PHASE II	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP ini akan diterbitkan pada tanggal ulang tahun pertama pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia <i>A maximum of 30% of the total Option Rights that can be issued in this MESOP Program will be issued on the first anniversary of the listing of the Bank's shares on the Indonesia Stock Exchange</i>
TAHAP III PHASE III	Sisanya dari Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP akan diterbitkan pada tanggal ulang tahun kedua pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia <i>The remainder of the Option Rights that can be issued in the MESOP Program will be issued on the second anniversary of the listing of the Bank's shares on the Indonesia Stock Exchange</i>

Periode Pelaksanaan akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan No. I-A lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 yakni sebanyak banyaknya 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahun dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan akan dibuka selama 30 (tiga puluh) hari Bursa. Program MESOP ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

The Exercise Window Period will be determined in accordance with the provisions of the Regulation of Registration No. I-A attachment of the Decree of Board of Directors of Jakarta Stock Exchange No. Kep-305/BEJ/07-2004 dated July 19, 2004, namely as many as 2 (two) implementation periods each year provided that each Exercise Window Period will be opened for 30 (thirty) Stock Exchange days. This MESOP program will be implemented pursuant to the prevailing laws and regulations.

REALISASI DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada Juli 2012, Bank Jatim melakukan Penawaran Umum Perdana Sebesar 2.983.537.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu) saham baru yang merupakan Saham Atas Nama Seri B atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp430,- (empat ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Keseluruhan dana tersebut digunakan untuk penguatan modal dalam rangka mendukung ekspansi kredit, terutama sektor UMKM, pengembangan jaringan operasional dan teknologi informasi, dengan uraian sebagai berikut:

USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

In July 2012, Bank Jatim executed an Initial Public Offering of 2,983,537,000 (two billion nine hundred eighty-three million five hundred thirty-seven thousand) new shares which constituted Ordinary Shares of Series B, or amounting to 20% (twenty percent) of issued and paid-in capital after the Initial Public Offering of shares, with a nominal value of Rp250 (two hundred fifty Rupiah) per share, offered to the public at an Offering Price of Rp430 (four hundred thirty Rupiah) per share, which must be paid in full at the time of submitting the Share Purchase Order Form ("FPPS"). All proceeds from Public Offering have been used to strengthen capital in order to support the expansion of credit, especially in the MSME sector, and development of operational networks and information technology, with the following description:

PERIODE/ PERIOD	JENIS PENAWARAN/ OFFERING TYPE	PEROLEHAN DANA/ PROCEEDS	PENGUNAAN/ USE
2012	IPO	Rp1.282.920.910.000	Ekspansi kredit Rp1.004.202 juta <i>Credit expansion of Rp1,004,202 million</i>
			Biaya penawaran umum Rp27.668 juta <i>Cost of public offering of Rp27,668 million</i>
			Pengembangan jaringan operasional Rp125,525 juta / Development of operational network of Rp125,525 million <i>Development of operational network of Rp125,525 million</i>
			Pengembangan teknologi informasi Rp125,525 juta / Development of information technology of Rp125,525 million <i>Development of information technology of Rp125,525 million</i>
2013		Nihil / Nil	-
2014		Nihil / Nil	-
2015		Nihil / Nil	-
2016		Nihil / Nil	-
2017		Nihil / Nil	-
2018		Nihil / Nil	-
2019		Nihil / Nil	-

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Pada tahun 2019, Bank tidak melakukan transaksi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan / peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang / modal. Oleh karena itu, Bank tidak menyajikan informasi terkait transaksi tersebut.

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND CAPITAL/DEBT RESTRUCTURING

In 2019, the Bank did not conduct material transaction on investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, Acquisition, and Capital/Debt Restructuring. Hence, there is no information related to such transaction that can be provided by the Bank.

PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Bank Jatim melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan aktivitas usahanya. Berikut perjanjian / perikatan penting dengan pihak ketiga:

SIGNIFICANT AGREEMENTS

Bank Jatim entered into agreements with other parties in carrying out its business activities. The following table describes the significant agreements entered into by the Bank with third parties.

NO.	PIHAK EKSTERNAL EXTERNAL PARTY	TENTANG ABOUT	JANGKA WAKTU PKS PERIOD OF AGREEMENT	JATUH TEMPO MATURITY	URAIAN DESCRIPTION
1	PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA PROPINSI JAWA TIMUR <i>REGIONAL LEADER OF MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA OF EAST JAVA PROVINCE</i>	Kerjasama Layanan Jasa Keuangan (MoU) <i>Cooperation in Financial Service (MoU)</i>	4 tahun <i>4 years</i>	8-Jan-21	
2	PT PERTAMINA (PERSERO)	Penempatan ATM di Area SPBU Pertamina <i>Placement of ATM at Pertamina Gas Stations</i>	3 tahun <i>3 years</i>	30-Jan-21	

3	PT ASABRI (PERSERO)	Pembayaran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia <i>Pension Payments for Soldiers of the Indonesian National Armed Forces, Members of the Republic of Indonesia's National Police, and Civil Servants of the Ministry of Defense and the Indonesian National Police</i>	2 tahun 2 years	18-Jan-21	
4	PT ASABRI (PERSERO)	Pembayaran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (MOU) <i>Pension Payments for Soldiers of the Indonesian National Armed Forces, Members of the Republic of Indonesia's National Police, and Civil Servants of the Ministry of Defense and the Indonesian National Police (MoU)</i>	2 bulan 2 years	20-Feb-19	
5	PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG	Penggunaan Fasilitas Autodebet untuk Pembayaran Tagihan Premi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Addendum Pertama) <i>Use of Autodebet Facility for Payment of Premium Bill of PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (First Addendum)</i>	2 tahun 2 years	28-Apr-19	Cooperation Agreement is extended automatically
6	PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG	Penggunaan Fasilitas Autodebet untuk Pembayaran Tagihan Premi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG <i>Use of Autodebet Facility for Payment of Premium Bill of PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG</i>	2 tahun 2 years	28-Apr-19	Cooperation Agreement is extended automatically
7	PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG	Referensi Produk Asuransi Jiwa Jempol (Jatim Polis) Link <i>Jempol (Jatim Polis) Link Life Insurance Product Reference</i>	3 tahun 3 years	3-Apr-20	
8	PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG	Referensi Produk Asuransi Jiwa Smile Premium Link <i>Smile Premium Link Life Insurance Product Reference</i>	3 tahun 3 years	3-Apr-20	
9	DIRJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI <i>DIRECTORATE GENERAL OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</i>	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Layanan Perbankan Lingkup PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur <i>Utilization of NIK, Population Data and Electronic ID Card in the Banking Services of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</i>	1 tahun 1 year	31-Dec-19	Addendum is valid since December 31, 2018
10	PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB)	Layanan Jasa Keuangan (MoU) <i>Financial Service (MoU)</i>	1 tahun 1 year	25-Apr-20	
11	PT SOLUSI NUSANTARA TERPADU	Penyediaan Jasa Aplikasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Non Tunai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia <i>Provision of Non-Cash School Operational Assistance (BOS) Application of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia</i>	2 tahun 2 years	31-May-19	
12	PT SOLUSI NUSANTARA TERPADU	Penyediaan Jasa Aplikasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Non Tunai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Addendum Pertama) <i>Provision of Non-Cash School Operational Assistance (BOS) Application of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia (First Addendum)</i>	1 tahun 1 year	26-May-20	
13	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR	MoU di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengkajian, Pengabdian Masyarakat, Kerjasama Jasa Layanan dan Fasilitas Perbankan <i>MoU in the fields of Education, Research, Study, Community Service, and Cooperation in Banking Services and Facilities</i>	3 tahun 3 years	26-Jul-21	
14	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	Penyediaan dan/atau Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan (MoU) <i>Provision and/or Utilization of Banking Service (MoU)</i>	3 tahun 3 years	13-Jul-21	
15	PT ASURANSI JIWA TASPEN	Pembayaran Tagihan Premi Asuransi Melalui Layanan Autodebet <i>Payment of Insurance Premium Bill through Autodebet Service</i>	2 tahun 2 years	23-Jul-21	

16	HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA (HIPMI) JAWA TIMUR <i>INDONESIAN YOUNG ENTREPRENEURS ASSOCIATION (HIPMI) OF EAST JAVA</i>	Kerjasama Layanan Jasa Keuangan (MoU) <i>Cooperation in Financial Service (MoU)</i>	3 tahun	3 years	16-Jul-22	
17	PT. JASA RAHARJA (PERSERO)	Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank (Addendum II) <i>Utilization of Bank Service (Addendum II)</i>	3 tahun	3 years	27-Aug-20	
18	PT DOMPET ANAK BANGSA (GOPAY)	Integrasi Bisnis (MoU) <i>Business Integration (MoU)</i>	2 tahun	2 years	7-Aug-21	
19	PT DOMPET ANAK BANGSA (GOPAY)	Pemanfaatan Layanan Gopay melalui Fitur Gobills <i>Utilization of Gopay service through Gobills feature</i>	2 tahun	2 years	7-Aug-21	
20	PT TASPEN (PERSERO)	Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening Bank <i>Payment of Old Age Savings, Pension, Work Accident Insurance, and Life Insurance through Bank Account</i>	2 tahun	2 years	19-Aug-21	
21	PT TASPEN (PERSERO)	Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening Bank <i>Payment of Old Age Savings, Pension, Work Accident Insurance, and Life Insurance through Bank Account</i>	2 tahun	2 years	18-Oct-19	Extended
22	DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG JAWA TIMUR <i>DIRECTORATE OF TRAFFIC OF EAST JAVA REGIONAL POLICE, EAST JAVA REGIONAL REVENUE OFFICE, AND PT. JASA RAHARJA (PERSERO) OF EAST JAVA BRANCH</i>	Penyediaan Petugas Teller untuk Menerima Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan/atau Parkir Berlangganan serta Pengembangan Layanan Kantor Bersama Samsat dan Layanan Unggulan di Provinsi Jawa Timur <i>Provision of Teller Officers to Receive Payment of Motorized Vehicle Tax (PKB), Motorized Vehicle Transfer Fee (BBNKB), Non-Tax State Revenue (PNBP), Mandatory Donations for Road Traffic Accident Funds (SWDKLLJ) and/or Subscription Parking and Development of Samsat Joint Office Services and Featured Services in East Java Province</i>	5 tahun	6 years	18-Sep-23	
23	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR <i>FINANCE AND ASSET MANAGEMENT REGIONAL OFFICE OF EAST JAVA</i>	Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur <i>Management of General Cash Account of East Java Province</i>	3 tahun	3 years	30-Sep-22	
24	KOPERASI SIMPAN PINJAM NUSANTARA	Penyaluran Pinjaman Pensiun dan Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Pinjaman <i>Pension Loan Distribution and Pension Payment Cut for Loan Installment</i>	2 tahun	2 years	23-Sep-21	
25	KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI	Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit <i>Pension Payment Cut for Credit Installment</i>	2 tahun	2 years	30-Nov-19	Remain valid if the Cooperation Agreement has not been signed
26	PT AMARTHA MIKRO FINTEK	KERJASAMA PENYALURAN KREDIT DENGAN SKEMA CHANNELING (MoU) <i>Cooperation in Loan Disbursement under Channeling Scheme (MoU)</i>	3 Bulan	3 months	27-Feb-20	
27	PT TELEKOMUNIKASI SELULAR DAN FINNET INDONESIA	Penjualan Produk Telkomsel <i>Sales of Telkomsel Product</i>	3 tahun	3 years	17-Dec-22	
28	JATIM GRHA UTAMA	Integrasi Bisnis Layanan Jasa Keuangan (MoU) <i>Integration of Financial Service Business (MoU)</i>	1 tahun	1 year	17-Dec-20	
29	PT TOKOPEDIA	Integrasi Bisnis Bank Jatim dengan Tokopedia Jawa Timur (MoU) <i>Integration of Bank Jatim's business with Tokopedia of East Java (MoU)</i>	2 tahun	2 years	17-Oct-21	
30	BPR JATIM	Pemanfaatan Layanan Anjungan Tunai Mandiri Bank Jatim melalui Koneksi BPRLink <i>Utilization of Bank Jatim's Automated Teller Machines through BPRLink Connection</i>	1 tahun	1 year	3-Jan-21	

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2019, Bank Jatim tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

KESESUAIAN TRANSAKSI PIHAK AFILIASI ATAU BERELASI DENGAN KETENTUAN/ PERATURAN

Bank Jatim melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sesuai dengan PSAK No. 7 (revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan Bank Jatim.

KEWAJARAN, MEKANISME REVIEW DAN PEMENUHAN PERATURAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank Jatim telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan.

Dalam kegiatan normal usaha, Bank Jatim melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Berikut pihak-pihak berelasi dengan Bank Jatim beserta sifat dari transaksi yang dilakukan sampai dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019:

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES

MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST

In 2019, Bank Jatim did not conduct any transaction containing conflict of interest.

COMPLIANCE OF AFFILIATED OR RELATED PARTY TRANSACTIONS WITH APPLICABLE REGULATIONS

Bank Jatim conducted transactions with related parties in accordance with the PSAK No. 7 (2015 revision) concerning "Disclosure of Related Parties". Related parties are individuals or entities which have relations with Bank Jatim.

FAIRNESS, REVIEW MECHANISM, AND FULFILLMENT OF REGULATION OF AFFILIATED OR RELATED PARTY TRANSACTIONS

Transactions with related parties are carried out on the same terms and conditions as transactions with third parties. Transactions conducted by Bank Jatim have complied with the Regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. IX.E.1 regarding "Affiliated Transactions and Conflicts of Interest of Certain Transactions", at the time the transactions are made.

In the normal course of business, Bank Jatim conducts transactions with related parties due to ownership and/or management relations. All transactions with related parties have been carried out according to the mutually agreed policies and conditions.

The following table describes the parties related to Bank Jatim and the nature of the transactions carried out until the period ending on December 31, 2019.

NO	PIHAK BERELASI RELATED PARTY	SIFAT HUBUNGAN NATURE OF RELATIONSHIP	SIFAT TRANSAKSI NATURE OF TRANSACTION
1	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR EAST JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
2	PEMERINTAH KOTA SURABAYA SURABAYA MUNICIPALITY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
3	PEMERINTAH KOTA MALANG MALANG MUNICIPALITY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
4	PEMERINTAH KOTA MADIUN MADIUN MUNICIPALITY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
5	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO MOJOKERTO MUNICIPALITY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
6	PEMERINTAH KOTA KEDIRI KEDIRI MUNICIPALITY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
7	PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO PROBOLINGGO MUNICIPALITY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
8	PEMERINTAH KOTA BLITAR BLITAR MUNICIPALITY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
9	PEMERINTAH KOTA PASURUAN PASURUAN MUNICIPALITY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement

10	PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK GRESIK REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
11	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG MALANG REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
12	PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO MOJOKERTO REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
13	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN MADIUN REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
14	PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI KEDIRI REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
15	PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PROBOLINGGO REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
16	PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BLITAR REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
17	PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN PASURUAN REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
18	PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO BOJONEGORO REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
19	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN MAGETAN REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
20	PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TULUNGAGUNG REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
21	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TRENGGALEK REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
22	PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PACITAN REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
23	PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN LAMONGAN REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
24	PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO PONOROGO REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
25	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI BANYUWANGI REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
26	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TUBAN REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
27	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER JEMBER REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
28	PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI NGAWI REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
29	PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG JOMBANG REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
30	PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO BONDOWOSO REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
31	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG LUMAJANG REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
32	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SIDOARJO REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
33	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO SITUBONDO REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
34	PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK NGANJUK REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
35	PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN PAMEKASAN REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
36	PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP SUMENEP REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement
37	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN BANGKALAN REGENCY GOVERNMENT	Pemegang saham Shareholder	Penempatan dana Fund placement

38	PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG <i>SAMPANG REGENCY GOVERNMENT</i>	Pemegang saham <i>Shareholder</i>	Penempatan dana <i>Fund placement</i>
39	PEMERINTAH KOTA BATU <i>BATU MUNICIPALITY GOVERNMENT</i>	Pemegang saham <i>Shareholder</i>	Penempatan dana <i>Fund placement</i>
40	RSUD DR. SOETOMO <i>RSUD DR. SOETOMO</i>	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama <i>Owned by the same final shareholder</i>	Kredit yang diberikan <i>Provision of loans</i>
41	RSUD DR. SOEDONO MADIUN <i>RSUD DR. SOEDONO MADIUN</i>	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama <i>Owned by the same final shareholder</i>	Kredit yang diberikan <i>Provision of loans</i>
42	PT BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR <i>PT BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR</i>	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama <i>Owned by the same final shareholder</i>	Kredit yang diberikan <i>Provision of loans</i>

TUJUAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan terutama untuk kepentingan dan keberlanjutan bisnis Bank Jatim yang berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha.

OBJECTIVES OF RELATED PARTY TRANSACTION

Transactions with related parties are conducted mainly to meet the Bank's business interests and sustainability which are associated with fund lending activity in the normal course of business.

NILAI TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Rincian saldo dengan pihak-pihak yang berelasi yang merupakan perusahaan asosiasi dengan Bank Jatim telah diungkapkan pada Laporan keuangan 31 Desember 2019 yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan ini.

VALUE OF RELATED PARTY TRANSACTION

Details of balances with related parties, which are associated companies with Bank Jatim, have been disclosed in the Financial Statements as of December 31, 2019, which is an integral part of this Annual Report.

KEBIJAKAN SUKU BUNGA BANK JATIM

Untuk meningkatkan daya saing, maka penentuan besarnya suku bunga untuk kepentingan nasabah dan Bank Jatim, baik untuk pendanaan maupun untuk penempatan dana, dilakukan melalui Rapat Komite *Assets and Liabilities* (ALCO). Rapat ALCO yang diadakan secara rutin, digunakan untuk mengkaji kondisi ekonomi makro dan mikro serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebijakan suku bunga.

INTEREST RATE POLICY OF BANK JATIM

To improve competitiveness, the determination of the amount of interest rates for the benefit of customers and the Bank, both for funding and for placement of funds, is carried out through the Asset and Liabilities Committee (ALCO) Meeting. The ALCO meeting, which is held regularly, is used to study macro and micro economic conditions and other factors that influence interest rate policies.

PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING YANG TERJADI PADA BANK DALAM TAHUN BUKU

Pada 2019 Bank Jatim tidak melakukan perubahan-perubahan penting yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

SIGNIFICANT CHANGES IN THE BANK DURING THE FISCAL YEAR

There were no significant changes in the Bank in 2019 which had an impact on its financial performance.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN DAN SIFATNYA LUAR BIASA

Sepanjang 2019 Bank Jatim tidak memiliki transaksi penting atau informasi keuangan yang sifatnya luar biasa dalam jumlah yang signifikan.

FINANCIAL INFORMATION ON EXTRAORDINARY EVENTS

Throughout 2019, Bank Jatim has had no significant transactions or financial information on extraordinary events.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH PADA 2019

Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap Bank beserta dampak serta respon Bank terhadap perubahan tersebut selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS WITH SIGNIFICANT IMPACT IN 2019

Changes in the laws and regulations that affect the Bank, along with the impact and response of the Bank to these changes during 2019 are as follows:

NO	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAWS AND REGULATIONS	POKOK PENGATURAN PADA REGULASI BARU ATAU POKOK PERUBAHAN PENGATURAN YANG SIGNIFIKAN DARI REGULASI SEBELUMNYA PRINCIPALS OF THE NEW REGULATIONS OR OF THE CHANGES SIGNIFICANT IN THE PREVIOUS REGULATIONS	LATAR BELAKANG TERBITNYA REGULASI ATAU PERUBAHAN REGULASI BACKGROUND OF ISSUANCE OF REGULATIONS OR CHANGES IN REGULATIONS	IMPLIKASI TERHADAP PERSEROAN IMPACT ON THE BANK
1	POJK No. 32/POJK.03/2018 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum POJK No. 32/POJK.03/2018 regarding Maximum Limit for Credit Distribution and Provision of Large Fund for Commercial Bank	1). Bank wajib melakukan perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar untuk setiap Penyediaan Dana secara individu dan konsolidasi 2). Portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank 3). Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait atau 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait, ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank 4). Bank dilarang membeli aset berkualitas rendah dari Pihak Terkait 1. Banks are required to calculate LLL and Provision of Large Funds for each Provision of Funds on an individual and consolidated basis; 2. The portfolio of Provision of Funds to Related Parties with the Bank as a whole is set at a maximum of 10% (ten percent) of the Bank's Capital. 3. Provision of Funds to 1 (one) Borrower other than Related Parties or 1 (one) group of Borrowers other than Related Parties, set at a maximum of 25% (twenty-five percent) of Core Capital (tier 1) of the Bank; 4. Banks are prohibited from buying low quality assets from Related Parties.	Untuk mengatur penyediaan dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian, diperlukan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan dan penetapan batas penyediaan dana serta penyediaan dana besar kepada pihak dan/atau kelompok usaha tertentu. To regulate the provision of funds in accordance with the prudent principle, it is necessary to spread or diversify the portfolio of funds provided and determine the limits for the provision of funds and the provision of large funds to certain parties and/or business groups.	1). Bank wajib menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK secara luring 2). Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak masing-masing untuk Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK (paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak); 3). Bank wajib menyampaikan laporan Penyediaan Dana, laporan Penyediaan Dana Besar, laporan pengecualian Penyediaan Dana Besar, dan laporan Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK, secara individu (disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan) dan secara konsolidasi (disampaikan setiap triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember) 4). Bank wajib menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat perubahan, untuk laporan posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember. 1. The Bank is required to submit action plans for settlement of LLL Violations and/or LLL excess offline; 2. The Bank is required to submit reports on the implementation of the respective action plans for LLL Violations and LLL Excess (no later than 7 (seven) working days after the target time for completing the action plans); 3. The Bank is required to submit reports on Provision of Funds, reports on Provision of Large Funds, reports on exclusion of Provision of Large Funds, and reports on Violations of LLL or Excess LLL, individually (submitted monthly for end-of-month positions) and on a consolidated basis (submitted quarterly for the end positions of March, June, September and December); 4. The Bank is required to submit a detailed list of Related Parties offline to the Financial Services Authority if there are changes, for position reports at the end of June and December.

2	POJK No. 12/POJK.03/2019 tanggal 04 April 2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan <i>POJK No. 12/POJK.03/2019 dated April 4, 2019, regarding Reporting of Commercial Bank through the Reporting System of Financial Services Authority</i>	1). Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu 2). Jenis Laporan terdiri dari : - a). Laporan harian; - b). Laporan mingguan; - c). Laporan bulanan; - d). Laporan triwulanan; - e). Laporan semesteran; - f). Laporan tahunan; dan - g). Laporan lain. 3). Bank dinyatakan telah menyampaikan Laporan dalam hal telah lolos dari validasi peladen (server) yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan 1. Banks are required to prepare and submit reports to the Financial Services Authority in a complete, accurate, current, complete and timely manner; 2. Report Types consist of: a. Daily Report; b. Weekly report; c. Monthly report; d. Quarterly report; e. Semi-annual report; f. Annual report; and g. Other report; 3. Banks are deemed to have submitted a Report in the event that it has passed the server validation as evidenced by the receipt of the Financial Services Authority Reporting System.	Sejalan dengan perkembangan teknologi maka diperlukan metode pelaporan yang efisien dan cepat secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian Laporan secara daring dimaksud ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengawasan serta analisis data dan informasi terkait penetapan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan. <i>In line with technological developments, online and efficient reporting methods are needed through the Financial Services Authority Reporting System. Submission of the Report online is intended to increase effectiveness in monitoring and analysis of data and information related to the determination of the Financial Services Authority policy.</i>	Bank melakukan penyesuaian terhadap tata cara pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK dimaksud. <i>The Bank is required to submit reports on the implementation of the respective action plans for LLL Violations and LLL Excess (no later than 7 (seven) working days after the target time for completing the action plans);</i>
3	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana Dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia <i>Regulation of the Members of Board of Governors No. 21/12/PADG/2019 regarding Implementation of Fund Transfer and Timed Clearing by Bank Indonesia</i>	1). Dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal melalui SKNBI, Penyelenggara paling sedikit melakukan hal sebagai berikut : - a). menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan SKNBI; - b). menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan SKNBI; - c). melaksanakan kegiatan operasional SKNBI; - d). melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan SKNBI; dan - e). melakukan pemantauan kepatuhan Peserta dan pihak selain kantor Bank Indonesia yang melaksanakan Pertukaran Warkat Debit terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia. 2). In the implementation of fund transfers and timed clearing through SKNBI, the Operator conducts, at least, the following: a. stipulate the provisions and procedures for the implementation of SKNBI; b. provide facilities and infrastructure for the implementation of SKNBI; c. carry out SKNBI operational activities; d. undertake efforts to ensure the reliability, availability and security of SKNBI implementation; and e. monitor the compliance of Participants and parties other than Bank Indonesia offices that carry out Debit Clearing Exchanges to Bank Indonesia regulations concerning the operation of scheduled funds transfers and clearing by Bank Indonesia.	1). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian transaksi yang semakin cepat, perlu dilakukan percepatan waktu setelah transfer terhadap penyelesaian transaksi dalam layanan transfer dana dan layanan pembayaran reguler pada penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia. 2). Dengan tersedianya layanan jasa system pembayaran yang semakin efektif di masyarakat, mengakibatkan layanan transfer dana pada penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia lebih efisien, sehingga perlu dilakukan penyesuaian biaya. 1. To meet the needs of the public for faster transaction settlement, it is necessary to accelerate settlement time for transaction settlement in the fund transfer and regular payment services in the operation of scheduled fund transfers and clearing by Bank Indonesia; 2. With the availability of payment system services that are becoming more effective in the community, it has resulted in more efficient fund transfer services for scheduled fund transfers and clearing by Bank Indonesia, so it is necessary to adjust costs.	Bank melakukan penyesuaian terhadap kegiatan operasional dengan mengacu pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. <i>The Bank is required to submit reports on Provision of Funds, reports on Provision of Large Funds, reports on exclusion of Provision of Large Funds, and reports on Violations of LLL or Excess LLL, individually (submitted monthly for end-of-month positions) and on a consolidated basis (submitted quarterly for the end positions of March, June, September and December);</i>

4

Peraturan Anggota Dewan Gubernur nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran

Regulation of the Members of Board of Governors No. 21/18/PADG/2019 regarding Implementation of Quick Response Code National Standards for Payment

- 1). Implementasi QRIS sebagai standar nasional, antara lain mengenai prosedur perolehan salinan dokumen QRIS, kewajiban penggunaan QRIS untuk setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran, jenis sumber dana dan/atau instrumen pembayaran, limit transaksi QRIS, dan skema serta biaya pemrosesan transaksi QRIS
- 2). Laporan dan pengawasan, mengatur kewajiban penyampaian laporan oleh PJSP terkait pemrosesan transaksi QRIS dan kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- 3). QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran.

1. *The implementation of QRIS as a national standard includes procedures for obtaining copies of QRIS documents, the obligation to use QRIS for each payment transaction in Indonesia, which is facilitated with QR Code Payments, types of funding sources and/or payment instruments, QRIS transaction limits, and QRIS schemes and transaction processing fees;*
2. *Reports and supervision, regulates the obligation to submit reports by PJSPs related to the processing of QRIS transactions and the supervisory authority conducted by Bank Indonesia;*
3. *QRIS must be used in every payment transaction in Indonesia which is facilitated by QR Code Payments.*

- 1). Sistem pembayaran ritel domestik telah berkembang pesat seiring dengan inovasi teknologi dan model bisnis yang disertai adopsi masyarakat terhadap layanan pembayaran ritel digital melalui pemanfaatan berbagai teknologi termasuk quick response code.

- 2). Agar penggunaan quick response code dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital berjalan optimal, ditetapkan standar nasional quick response code untuk pembayaran yang diberi nama QR Code Indonesia Standard (QRIS). Keberadaan QRIS diharapkan dapat memastikan efisiensi dan meminimalisir fragmentasi dalam praktik penggunaan quick response code untuk pembayaran.

- 3). Penetapan QRIS juga prinsipnya sejalan dengan tatanan kebijakan gerbang pembayaran nasional yang ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal, mengutamakan perluasan akses dan memperhatikan perlindungan konsumen, serta mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas

1. *The domestic retail payment system has developed rapidly along with technological innovations and business models accompanied by public adoption of digital retail payment services through the use of various technologies including quick response codes;*
2. *In order to make optimal use of the quick response code in the digital economic and financial ecosystem, a national quick response code standard for payments is named QR Code Indonesia Standard (QRIS). The existence of QRIS is expected to ensure efficiency and minimize fragmentation in the practice of using quick response codes for payments;*
3. *The establishment of QRIS is also in principle in line with the national payment gateway policy structure aimed at realizing a safe, efficient, smooth and reliable payment system, prioritizing expanding access and paying attention to consumer protection, and being able to process all domestic retail payment transactions by interconnection and interoperability.*

Bank telah menyesuaikan kegiatan operasional yaitu dengan melakukan perubahan ketentuan internal dan pengajuan izin kepada Bank Indonesia.

The Bank has adjusted its operational activities by changing internal regulations and applying for licenses to Bank Indonesia.

5	Penyampaian Peraturan Bank Indonesia nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi <i>Regulation of Bank Indonesia No. 12/9/PBI/2019 regarding Integrated Report of Commercial Banks</i>	Penyusunan dan penyampaian laporan: 1. Penyusunan laporan mengacu pada metadata yang ditetapkan oleh otoritas, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. 2. Laporan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok informasi, yaitu kelompok informasi Keuangan, kelompok informasi Risiko, kelompok informasi Kegiatan Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan, dan kelompok informasi Data Pokok. 3. Laporan disampaikan secara individual per kantor cabang bank, gabungan per bank, dan/atau konsolidasi antara bank dengan perusahaan anak. 4. Penyampaian laporan dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat bank maupun kantor lain yang ditunjuk 5. Kewajiban penyampaian koreksi atas kesalahan informasi yang ditemukan oleh bank, akuntan publik, Bank Indonesia, dan/atau otoritas lainnya. <i>Preparation and submission of report:</i> 1. The preparation of the report refers to the metadata established by the authorities, namely Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the Deposit Insurance Agency; 2. The report is divided into 4 (four) information groups, namely the Financial information group, the Risk information group, the Payment System Activities and Financial Services Activity group, and the Basic Data information group; 3. Reports are submitted individually per bank branch office, joint bank per bank, and/or consolidation between banks and subsidiaries; 4. Submission of reports is carried out centrally by the head office of the bank or other designated office; 5. Obligation to submit corrections for misinformation found by banks, public accountants, Bank Indonesia, and/or other authorities.	Laporan Bank Umum Terintegrasi dikembangkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas data, efektivitas pelaporan, dan mengurangi beban penyampaian laporan kepada Bank Indonesia. Laporan terintegrasi tersebut berbasis metadata dan menjunjung tinggi prinsip kolaboratif antar-otoritas dan industri, efisiensi, dan konsistensi. Dengan pelaporan terintegrasi, informasi yang disampaikan bank diharapkan memenuhi kriteria lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selain itu, informasi tersebut dimanfaatkan pula oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. <i>The Integrated Commercial Bank Report was developed by Bank Indonesia with the aim of improving data quality, reporting effectiveness, and reducing the burden of submitting reports to Bank Indonesia. The integrated report is based on metadata and upholds collaborative principles between authorities and industry, efficiency and consistency. With integrated reporting, the information conveyed by banks is expected to meet the complete, accurate, current, complete, and timely criteria so that they can support the implementation of the tasks of Bank Indonesia in setting and implementing monetary policies, payment systems and rupiah money management, and financial system stability including macroprudentials for achieve and maintain stability of the value of the rupiah. In addition, this information was also utilized by the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Agency in the context of carrying out its duties and authorities.</i>	Bank melakukan penyesuaian terhadap tata cara pelaporan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI dimaksud. <i>The Bank makes adjustments to the reporting procedures to Bank Indonesia as regulated in the said PBI.</i>
6	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan <i>Regulation of Financial Services Authority No. 23/POJK.01/2019 regarding amendment to the Regulation of Financial Services Authority No. 12/POJK.01/2017 regarding Implementation of Anti-Money-Laundering program and Prevention of Terrorism in financial service sector.</i>	1. 1. PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels). 2. Tata cara verifikasi data. 3. Ketentuan mengenai Beneficial Owner. 4. Kegiatan transfer dana baik di dalam maupun luar negeri. 1. The PJK must identify, assess and understand the risk of Money Laundering and/or Terrorism Funding crimes related to customers, countries or geographical areas, products, services, transactions or distribution (delivery channels); 2. Procedure for data verification; 3. Provisions regarding Beneficial Owners; 4. Funds transfer activities both domestically and abroad.	Bahwa pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, dan komitmen untuk mendukung pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan pemblokiran secara serta merta, diwujudkan melalui ketentuan yang mengatur mengenai penilaian risiko yang mengacu pada national risk assessment dan sectoral risk assessment, kegiatan verifikasi dan penatausahaan dokumen, serta dukungan percepatan penyampaian informasi kepada penegak hukum <i>That the prevention of money laundering and the financing of terrorism, and the commitment to support the inclusion of the identity of a person or corporation in the list of funding for the proliferation of weapons of mass destruction, and blocking is automatically realized through the provisions governing risk assessment that refers to national risk assessment and sectoral risk assessment, verification and administration of documents, and support for accelerating the delivery of information to law enforcement.</i>	In order to make optimal use of the quick response code in the digital economic and financial ecosystem, a national quick response code standard for payments is named QR Code Indonesia Standard (QRIS). The existence of QRIS is expected to ensure efficiency and minimize fragmentation in the practice of using quick response codes for payments; <i>The Bank has adjusted internal guidelines related to APU PPT so that it remains in line with the development of existing regulations.</i>

INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Bank Jatim telah berkomitmen untuk mengambil bagian dalam kepatuhan akan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Common Reporting Standard (CRS) adalah standar pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan termasuk penjelasan (*commentaries*) yang disusun oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) bersama dengan negara anggota Kelompok 20 (*Group of Twenty* atau G20). Pemenuhan kepatuhan terhadap CRS telah direalisasikan melalui pelaporan data CRS per tanggal 1 Agustus 2018 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Aplikasi SIPINA.

Langkah Bank Jatim:

1. Mendaftar sebagai *Participating Foreign Financial Institution* (PFFI)
2. Prosedur tambahan untuk mengidentifikasi nasabah atau calon nasabah
3. Prosedur tambahan pengisian formulir deklarasi untuk nasabah atau calon nasabah
4. Pelaporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

KETAATAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

Bank Jatim senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud komitmen Bank Jatim turut serta membangun negara melalui penerimaan Pajak oleh Negara. Pajak yang dibayarkan kepada Negara di tahun 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

PEMBAYARAN PAJAK (JUTAAN RUPIAH)	2019	2018	2017	TAX PAYMENT (RPMILLION)
PAJAK PENGHASILAN BADAN	487.627.993.167	525.507.069.000	601.027.421.500	CORPORATE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN	72.623.898.247	66.052.790.248	43.324.104.613	EMPLOYEE INCOME TAX

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) yang relevan untuk Bank, tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, (penerapan dini diperkenankan), sebagai berikut:

- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Sebuah standar untuk pengakuan penghasilan telah diterbitkan. Standar ini akan menggantikan PSAK 23 yang mengatur kontrak untuk barang dan jasa dan PSAK 34 yang mengatur

FINANCIAL INFORMATION ON TAX

With the issuance of Law No. 9 of 2017 regarding Enforcement of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2017 regarding Access to Financial Information for Tax Purposes, Bank Jatim is committed to taking part in compliance with access to financial information for taxation purposes.

The Common Reporting Standard (CRS) is an automatic standard for exchanging financial information for tax purposes including commentaries prepared by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) together with the G20 member countries. Compliance with CRS has been realized through CRS data reporting as of August 1, 2018 to the Financial Services Authority (OJK) through the SIPINA Application.

Steps taken by Bank Jatim:

1. Register as a Participating Foreign Financial Institution (PFFI)
2. Additional procedures for identifying customers or prospective customers
3. Additional procedures for filling out declaration forms for customers or prospective customers
4. Periodic reporting to the Financial Services Authority (OJK)

COMPLIANCE AS A TAXPAYER

Bank Jatim always complies with the prevailing laws and regulations as a form of Bank Jatim's commitment to participate in developing the country through tax revenue by the State. Taxes paid to the State in 2019, 2018 and 2017 are as follows:

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The following summarizes the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) which were issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK IAI) and are relevant to the Bank, but not yet effective for the financial statements for the year ended on December 31, 2019, and effective on or after January 1, 2020, early adoption is permitted:

- PSAK 72 "Revenue from Contract with Customer". A new standard for the recognition of revenue has been issued. This will replace PSAK 23 which covers contracts for goods and services and PSAK 34 which covers construction contracts. The new

kontrak konstruksi. Standar baru ini didasarkan oleh prinsip bahwa penghasilan diakui ketika kontrol atas barang atau jasa dialihkan ke pelanggan.

- PSAK 73 "Sewa" disahkan di September 2017. Hal ini akan berdampak pada hampir seluruh sewa yang diakui di laporan posisi keuangan, karena perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan dihapuskan. Dalam standar yang baru, sebuah aset (hak guna atas barang yang disewakan) dan liabilitas keuangan untuk membayar sewa diakui. Pengecualian hanya terdapat pada sewa jangka pendek dan yang bernilai rendah.
- Amendemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama" tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. Amendemen atas PSAK 15 ini menjelaskan entitas memperhitungkan kepentingan jangka panjang pada perusahaan asosiasi atau ventura bersama, dimana akuntansi ekuitas tidak digunakan, menggunakan PSAK 71 "Instrumen Keuangan".

Saat ini Bank sedang mengevaluasi dampak dari penerapan standar tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

KELANGSUNGAN USAHA

POTENSI YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN BAGI KELANGSUNGAN USAHA

Bank Jatim tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usahanya di industri perbankan Indonesia. Meski demikian, Bank Jatim mewaspadai tantangan pertumbuhan kredit perbankan di masa datang. Dengan tantangan ini, Bank Jatim berkomitmen untuk tetap tumbuh dengan lebih selektif melakukan penyaluran kredit serta menerapkan prinsip kehati-hatian dengan meningkatkan standar kebijakan persetujuan kredit guna mendapatkan pertumbuhan kredit yang berkualitas dan aktif memantau kredit yang dinilai berpotensi menjadi bermasalah.

ASSESSMENT MANAJEMEN MENGELOLA POTENSI YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Bank Jatim melakukan evaluasi dan penilaian atas kemampuan Bank dalam mencapai target dan terus melanjutkan kelangsungan usaha Bank secara berkala. Bank Jatim mengelola potensi yang berpengaruh signifikan dalam kelangsungan usaha dengan menyusun serta menerbitkan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan terkini dan berkelanjutan. Berdasarkan pencapaian kinerja selama tahun 2019, Manajemen menilai bahwa kelangsungan usaha Bank Jatim sangat baik dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Hal ini didasarkan pada kinerja, rasio-rasio keuangan dan Tingkat Kesehatan Bank yang berada dalam kondisi sehat dan mampu mendukung kelangsungan usaha di masa yang akan datang. Selain itu, dukungan dari pemegang saham dan pengakuan atas kualitas dan kredibilitas Bank Jatim yang diberikan lembaga pemeringkat menjadi hal yang penting bagi Bank untuk mendukung kelangsungan bisnis.

standard is based on the principle that revenue is recognized when control of a good or service transfers to a customer.

- PSAK 73 "Leases" was issued in September 2017. It will result in almost all leases being recognized on the statement of financial position, as the distinction between operating and finance leases is removed. Under the new standard, an asset (the right to use the leased item) and a financial liability to pay rentals are recognized. The only exceptions are short-term and low-value leases.
- Amendments to PSAK 15 "Investments in Associates and Joint Ventures" regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures. The amendment to PSAK 15 clarifies that companies account for long-term interests in an associate or joint venture, to which the equity method is not applied, using PSAK 71 "Financial Instruments".

The Bank is currently evaluating the impact of these standard on the financial statement of the Bank.

BUSINESS CONTINUITY

POTENTIAL FACTORS WITH SIGNIFICANT IMPACT ON BUSINESS CONTINUITY

Bank Jatim does not have issues that have the potential to significantly impact its business continuity in the Indonesian banking industry. Nevertheless, Bank Jatim is aware of the challenges of banking credit growth in the future. With this challenge, Bank Jatim is committed continuously growing in a more selective manner in terms of lending so that asset quality is maintained. Bank Jatim is committed to applying the prudent principle by raising credit approval policy standards in order to obtain quality credit growth and actively monitor loans considered to be potentially problematic.

MANAGEMENT ASSESSMENT IN MANAGING POTENTIAL FACTORS WITH SIGNIFICANT IMPACT ON BUSINESS CONTINUITY

Bank Jatim evaluates its ability to achieve targets and to maintain its business continuity regularly. Bank Jatim manages the potential that has a significant influence on business continuity by preparing and publishing financial statements based on the latest and sustainable Financial Accounting Standards. Based on the achievement of performance during 2019, the Management considers that the business continuity of Bank Jatim remains promising and has increased from the previous year.

This is based on Bank's performance, financial ratios, and Soundness Level, which show that the Bank is healthy and able to support business continuity in the future. In addition, support from shareholders and recognition of the quality and credibility of the Bank provided by rating agencies becomes fundamental for the Bank to maintain business continuity.

ASUMSI MANAJEMEN DALAM ASSESSMENT

Asumsi yang digunakan manajemen dalam melihat aspek kelangsungan usaha Bank Jatim yaitu pencapaian kinerja keuangan Bank untuk tahun buku 2019 sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik global maupun perekonomian nasional. Untuk itu sebagai langkah berkelanjutan dari pencapaian di tahun 2019, Bank Jatim memiliki strategi dalam menghadapi tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang.

Beberapa Faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan *assessment* terhadap kelangsungan usaha adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan
2. Likuiditas
3. Solvabilitas
4. Tingkat Kesehatan Bank

MANAGEMENT ASSUMPTIONS IN ASSESSMENTS

The assumption used by the management in observing the business continuity aspect of the Bank is that the achievement of the Bank's financial performance for the 2019 fiscal year is largely influenced by economic conditions, both globally and nationally. Thus, as a continuation of achievements of 2019, Bank Jatim has established a strategy to face the future challenges.

Several factors taken into account by the management in conducting business continuity assessment are as follows:

1. Financial Performance
2. Liquidity
3. Solvency
4. Bank Health Level

A photograph of two men in dark suits and red ties standing in a hallway. The man on the left is smiling and has his hands in his pockets. The man on the right is looking forward with a neutral expression. They are both wearing identification badges. The background shows a white wall, a dark wood door frame, and a framed picture. A red geometric pattern is overlaid on the bottom left of the image.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE





PELAKSANAAN TATA KELOLA

GOVERNANCE IMPLEMENTATION

MEKANISME TATA KELOLA

Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Proses penerapan *corporate governance* melekat pada struktur *corporate governance* yang terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite di bawah Dewan Komisaris, serta organ tata kelola di bawah Direksi.

RUPS adalah forum bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan dan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Bank secara keseluruhan. Kemudian, Dewan Komisaris dan Direksi, memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

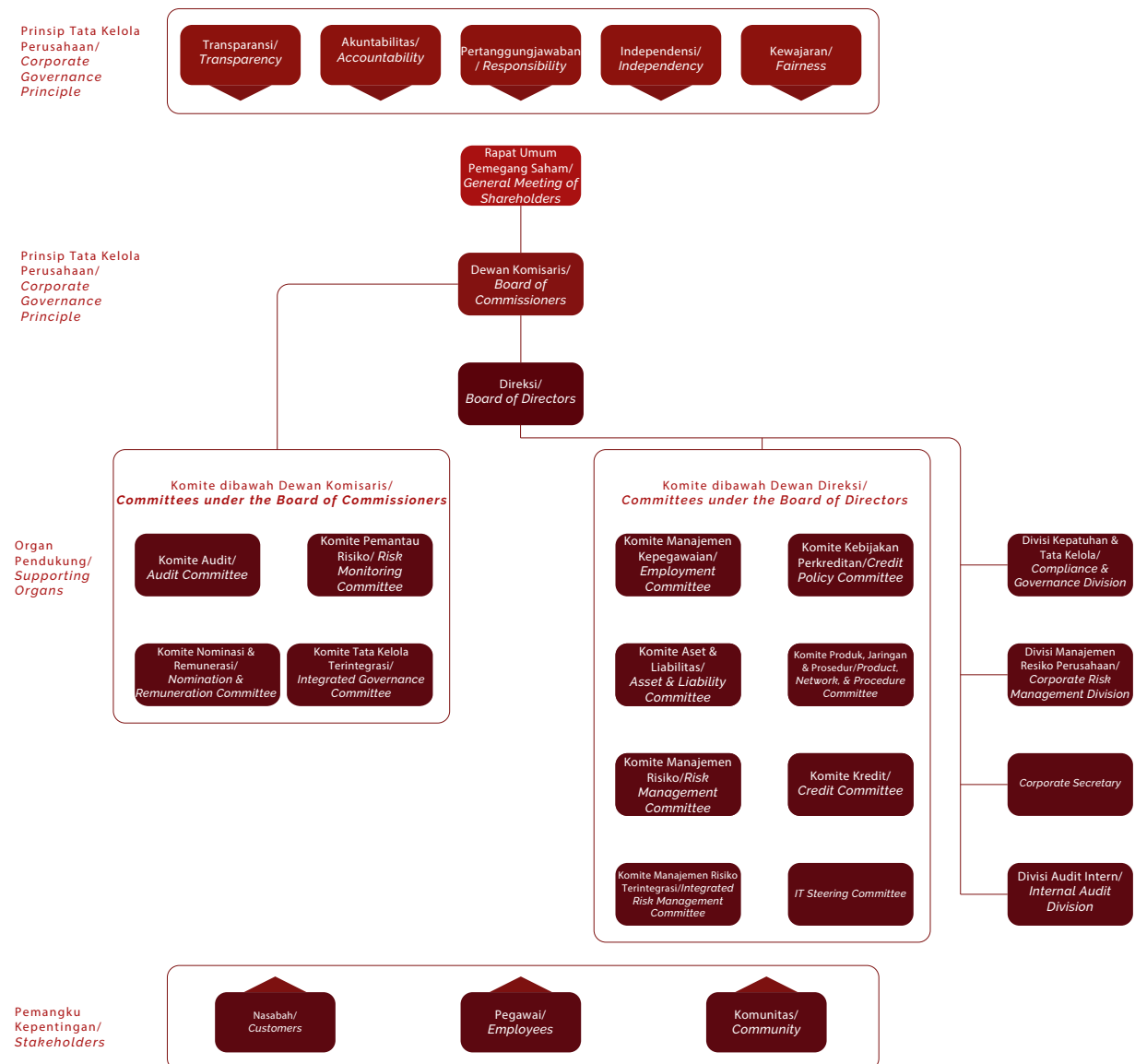
GOVERNANCE MECHANISM

Corporate governance mechanism is the process of implementing corporate governance principles with the support of adequate structure and infrastructure of the Bank's governance, in order to produce *outcomes* that are in line with stakeholders' expectations. The process of implementing corporate governance is inherent in the corporate governance structure, which consists of the GMS, the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees under the Board of Commissioners, and the governance organs under the Board of Directors.

GMS is a forum for shareholders to make decisions and carry out oversight of the Bank's overall performance. Meanwhile, Board of Commissioners and Board of Directors have clear authority and responsibilities in accordance with their respective functions as mandated in the Bank's Articles of Association and the prevailing laws and regulations

STRUKTUR TATA KELOLA

GOVERNANCE STRUCTURE



INFRASTRUKTUR TATA KELOLA

Implementasi struktur dan mekanisme tata kelola, membutuhkan infrastruktur yang meliputi berbagai kebijakan tata kelola perusahaan atau yang disebut sebagai *GCG soft structure*. Bank Jatim memiliki *GCG soft structure* yang disusun dengan merujuk kepada peraturan yang berlaku, visi dan misi, dan juga merujuk pada *best practice* pada industri perbankan di Indonesia.

Kebijakan tata kelola perusahaan Bank Jatim meliputi Piagam Tata Kelola, Pedoman Kerja, Kode Etik, serta *Standard Operating Procedure*. Kebijakan *GCG soft structure* tersebut berlaku untuk seluruh Manajemen dan Karyawan. Bank Jatim juga melakukan sosialisasi dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan usaha Bank.

GOVERNANCE INFRASTRUCTURE

Implementation of governance structure and mechanism requires infrastructure that cover various corporate governance policies or known as *GCG soft structure*. Bank Jatim has a *GCG soft structure* that is compiled by referring to applicable regulations, vision and mission, as well as the best practices in the banking industry in Indonesia.

Bank Jatim's corporate governance policies include Governance Charter, Work Guidelines, Code of Conduct, and Standard Operating Procedure. The *GCG soft structure* policy applies to all Management and Employees. Bank Jatim also conducts regular dissemination and evaluation activities in accordance with the needs and development of the Bank's business activities.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Matriks Peringkat Faktor Tata Kelola

PERINGKAT	DEFINISI
1.	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2.	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3.	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4.	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip Tata Kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang secara umum signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5.	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip Tata Kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang secara umum sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

ASSESSMENT OF GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Matrix of Governance Factor Rating

RANKING	DEFINITION
1.	<i>reflects the Bank's condition that is in general extremely sound and as such is assessed of being extremely capable of facing significant negative influence from changes in business condition and other external factors.</i>
2.	<i>reflects the Bank's condition that is in general sound and as such is assessed of being capable of facing significant negative influence from changes in business condition and other external factors.</i>
3.	<i>reflects the Bank's condition that is in general adequately sound and as such is assessed of being adequately capable of facing significant negative influence from changes in business condition and other external factors.</i>
4.	<i>reflects the Bank's condition that is in general less sound and as such is assessed of being less capable of facing significant negative influence from changes in business condition and other external factors.</i>
5.	<i>reflects the Bank's condition that is in general unsound and as such is assessed of being not capable of facing significant negative influence from changes in business condition and other external factors.</i>

SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2019

Bank Jatim melakukan *self assessment* GCG berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, sebagai pedoman pelaksanaan laporan penilaian sendiri di Bank Jatim. Ketentuan tersebut berasal dari hasil penyesuaian dari kertas kerja yang diatur oleh Bank Indonesia nomor SE BI 15/15/DPNP sebelumnya. Kertas Kerja yang disesuaikan oleh OJK ini telah menyesuaikan perbankan yang sekarang. Meskipun demikian, isi dari kertas kerja ini tidak berubah drastis. Isi kertas kerja tetap sama, namun terdapat pengurangan, penambahan, dan perubahan di beberapa aspek. Seperti, beberapa laporan perbankan saat ini tidak lagi dilaporkan pada Bank Indonesia, melainkan dilaporkan pada OJK. Dan mayoritas peraturan perbankan tidak lagi menggunakan PBI atau SEBI, selain Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar, namun sudah mengacu pada POJK dan SEOJK.

GCG SELF-ASSESSMENT AS OF DECEMBER 2019

Bank Jatim conducts the GCG self-assessment based on the Circular Letter of Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 regarding Governance Implementation for Commercial Banks, which functions a guideline for the implementation of self-assessment reports at Bank Jatim. This provision is derived from the adjustments results from working paper which is regulated by the Circular Letter of Bank Indonesia No. BI 15/15/DPNP before. This adjusted Financial Service Authority Working Paper has adjusted the current banking system, but, the content did not change drastically. Means, the content remains the same, but there were reductions, additions, and changes in several aspects. For example, several banking reports were no longer reporting at Bank Indonesia but, addressed to the OJK. And the majority of banking regulations no longer use PBI or SEBI, other than Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Funds, but refers to POJK and SEOJK.

Kewajiban emiten selanjutnya adalah melaporkan pelaksanaan tata kelola perusahaan selama tahun buku sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Para Pemegang Saham. Laporan ini disusun setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilaporkan bersama dengan laporan keuangan, laporan keberlanjutan, dan laporan Perseroan yang disebut Laporan Tahunan (*Annual Report*). Buku laporan tahunan ini adalah Laporan Pemangku Kepentingan terhadap Para Pemegang Saham. Karenanya, buku laporan tahunan mengevaluasi pelaksanaan GCG melalui GCG *Self-Assessment* tahunan sesuai dengan ketentuan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Metode *Self-Assessment* GCG dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk memastikan tercapainya standar praktik GCG terbaik di Bank. Evaluasi dan penilaian tata kelola dilakukan secara periode semester yang terdiri dari periode Juni dan Desember. Laporan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan sarana untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan lebih baik bagi *Stakeholder*.

Bank wajib menerapkan sebelas prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola dinilai oleh OJK setiap 6 bulan sekali atau semesteran, tepatnya periode Juni dan Desember. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola posisi Desember 2019 ditampilkan sebagai berikut:

LAPORAN SELF ASSESMENT PENERAPAN TATA KELOLA KONVENSONAL				
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.				
POSISI : 31-Desember-2019				
NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	3	10 %	0,30
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	3	20 %	0,60
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2	10 %	0,20
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	10 %	0,20
5	Penerapan fungsi Kepatuhan Bank	3	5 %	0,15
6	Penerapan fungsi audit intern	3	5 %	0,15
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2	5 %	0,10
8	Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern	3	7,5 %	0,23
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar	2	7,5 %	0,15
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	2	15 %	0,30
11	Rencana strategis	3	5 %	0,15
			100%	2,53 3

The next issuer obligation is to report on the implementation progress of corporate governance during the fiscal year as an accountability report to the shareholders. This report took one-year preparation and submitted along with financial statements, sustainability reports, and company reports called the Annual Report. This annual report book functions as a Stakeholder Report on Shareholders. Therefore, this report evaluates the GCG implementation through annual GCG Self-Assessment in accordance with the provisions of evaluating the Healthy Bank Rating of Commercial Banks. The GCG Self-Assessment Method comprehensively and continuously carried out to ensure the actualization of GCG best standard practices in the Bank. As for governance evaluation and assessment, it carried out in June and December periods. A good Corporate Governance Report means to provide comprehensive and excellent information for stakeholders.

Banks are required to apply eleven Good Governance principles in each of the Bank's business activities at all organizational levels or levels. The application of the Governance Principles is assessed by the OJK every 6 months or semester, to be exact the June and December period. The results of the self-assessment of the governance position in December 2019 are displayed as follows:

REPORT OF SELF-ASSESSMENT ON CONVENTIONAL GOVERNANCE IMPLEMENTATION				
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.				
POSITION : December 31th, 2019				
NO	EVALUATED ASPECT	SCORE	VALUE	SCORE OBTAINED
1	Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Commissioners	3	10 %	0,30
2	Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Directors	3	20 %	0,60
3	Completeness and Implementation of Committee's duties	2	10 %	0,20
4	Management of Conflict of Interest	2	10 %	0,20
5	Implementation of Compliance Function at the Bank	3	5 %	0,15
6	Implementation of Internal Audit Function	3	5 %	0,15
7	Implementation of External Audit Function	2	5 %	0,10
8	Implementation of Risk Management Function including Internal Control	3	7,5 %	0,23
9	Provision of Funds to the Related Parties and Provision of Large Funds	2	7,5 %	0,15
10	Transparency of Financial and Non-Financial Conditions	2	15 %	0,30
11	Strategic Plans	3	5 %	0,15
			100%	2,53 3

Peringkat	Definisi
3	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

HASIL PENILAIAN ARA

Keikutsertaan Bank Jatim dalam *Annual Report Award* (ARA) 2018 mendapatkan *feedback* atau laporan yang berisi apa saja yang harus dipenuhi dan dilengkapi agar sesuai ketentuan, yakni Laporan Rekomendasi. Laporan rekomendasi ini menyajikan informasi *area of improvement* terhadap Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang dinilai dalam asesmen ARA sebagai rujukan dalam melakukan perbaikan Laporan Tahunan. Rekomendasi dikelompokkan menurut topik mengacu pada struktur penilaian dalam asesmen ARA.

Namun, karena pada tahun 2018 pemenuhan data ARA dilakukan melalui aplikasi, maka jika terdapat topik-topik tertentu yang tidak terdapat teks rekomendasi, maka hal ini terjadi disebabkan oleh 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

Jawaban peserta sudah lengkap dan memadai

Pertanyaan pada topik tersebut tidak berlaku (*not applicable*) bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk bergantung pada syarat pertanyaan dihubungkan dengan kondisi yang terdapat pada perusahaan.

Laporan rekomendasi ARA terhadap laporan tahunan Bank Jatim ditampilkan pada bagian lain.

Nama Perusahaan		PT BPD Jatim Tbk	
Kategori		BUMD Listed	
Grade kualitas laporan tahunan 2018		B+	
Skor		76.27	
No.	Aspek	Bobot	Skor
1	Penyajian Laporan Tahunan	2%	1.70
2	Ikhtisar Data Keuangan Penting	5%	5.00
3	Laporan Dewan Komisaris dan Direksi	3%	2.67
4	Profil Perusahaan	8%	7.17
5	Analisis Kinerja Perusahaan	22%	15.24
6	<i>Good Corporate Governance</i>	35%	28.81
7	Informasi Keuangan	20%	15.68
8	Wawancara	±5%	-
Praktik <i>Good Governance</i> (+5%)			
Praktik <i>Bad Governance</i> (-5%)			
Total Skor		76.27 dari 100	

Rank	Definisi
3	Reflecting the Bank's management generally has done fair implementation of GCG principles. In the event there were weaknesses in implementing GCG principles in general, these weaknesses are quite significant and require Bank's management considerable attention .

ARA ASSESSMENT RESULTS

Bank Jatim's participation in the 2018 annual report Award (ARA) received feedback or a report containing matters to be fulfilled and completed in accordance with the provisions, namely the Recommendation Report. This report presents information on the area of improvement for the Annual Report of PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk, which was assessed in the ARA assessment as a reference in making improvements to the Annual Report. Recommendations are grouped by topic according to the assessment structure in the ARA assessment.

However, as the fulfillment of ARA data in 2018 was conducted through an application, then, if there are certain topics without recommendation text, those topic were regarded as follows:

Participant's answers are complete and adequate

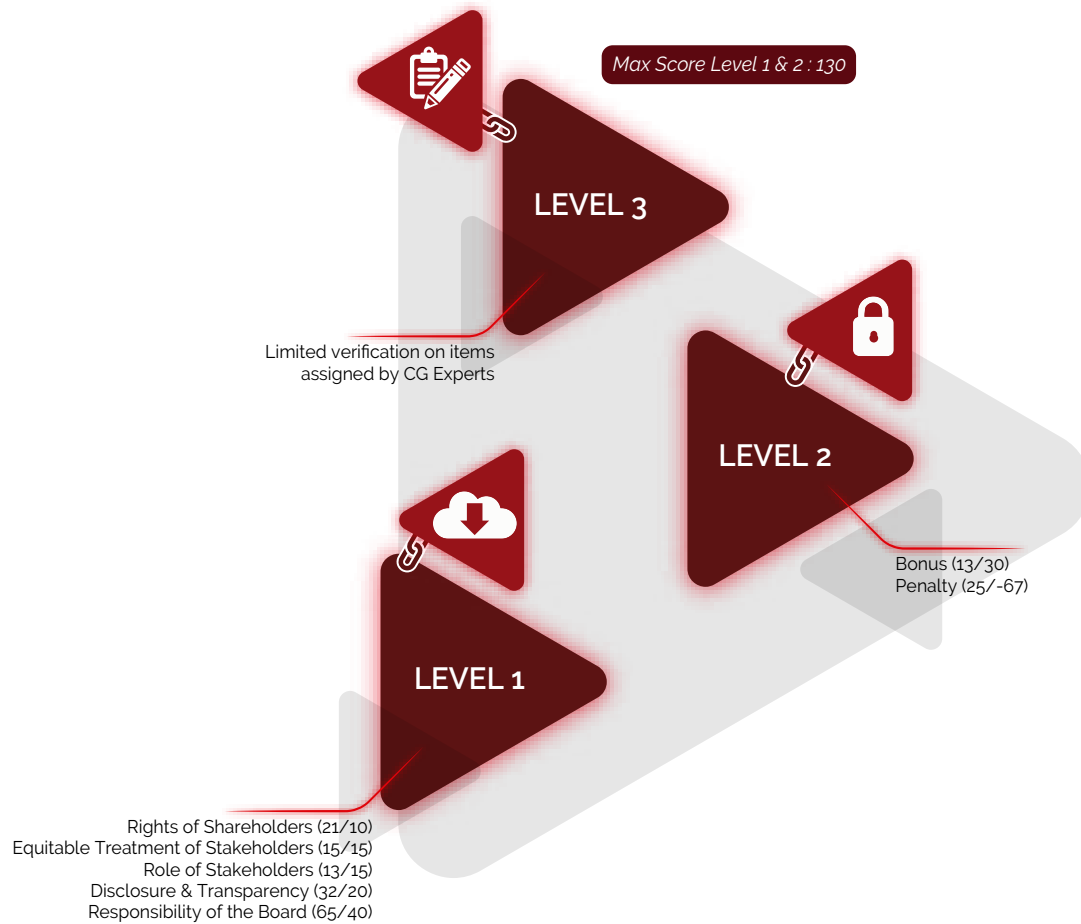
Questions on the topic are not applicable to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, depending on the terms of the questions related to the conditions found in the company.

ARA recommendations on the Annual Report of Bank Jatim are presented in other section.

Company Name		PT BPD Jatim Tbk	
Category		BUMD Listed	
Grade for the quality of 2018 annual report		B+	
Score		76.27	
No.	Aspect	Value	Score
1	Presentation of Annual Report	2%	1.70
2	Highlights of Key Financial Data	5%	5.00
3	oard of Commissioners and Board of Directors Report	3%	2.67
4	Company Profile	8%	7.17
5	Company Performance Analysis	22%	15.24
6	Good Corporate Governance	35%	28.81
7	Financial Information	20%	15.68
8	Interview	+5%	-
Good Corporate Governance Practice (+5%)			
Bad Governance Practice (-5%)			
Total Skor		76.27 dari 100	

Pengungkapan Rekomendasi ARA

Disclosure of ARA Recommendation



Topik	Perbaikan
Penyajian Laporan Tahunan	Pada Laporan Tahunan 2019 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah melakukan perbaikan.
Ikhtisar Data Keuangan	Ikhtisar Data Keuangan telah menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan yang disyaratkan
Laporan Dewan Komisaris dan Direksi	Penyajian Laporan Manajemen telah dilengkapi dengan peran Dewan Komisaris dalam WBS dan Analisa atas kinerja keuangan berdasarkan target
Profil Perusahaan	Pembahasan Profil Perusahaan telah melengkapi kekurangan yang diperlukan diantaranya; Pengungkapan Rangkap Jabatan, Dewan Komisaris dan Direksi, Pelatihan bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Nama dan Alamat Perusahaan pemeringkat efek, dan Informasi Pemegang Saham
Analisis dan Pembahasan Manajemen	Analisis dan Pembahasan Manajemen telah diungkapkan penuh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan
Tata Kelola Perusahaan	Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan telah sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Bank Jatim sepanjang 2019
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah memperhatikan kesetaraan perlakuan pada pegawai Bank Jatim, pemberdayaan masyarakat, hak azasi manusia dan lingkungan.

Topic	Improvement
Presentation of Annual Report	In the 2019 Annual Report, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk has made improvements
Highlights of Financial Data	Highlights of Financial Data have presented the Financial Statements as required
Reports of the Board of Commissioners and Board of Directors	Presentation of Management Reports has been complemented by the role of the Board of Commissioners in WBS and analysis of financial performance based on targets
Company Profile	Discussion on Company Profile has completed the deficiencies needed, including; Disclosure of Concurrent Positions, Board of Commissioners and Board of Directors, Training for Board of Commissioners and Board of Directors, Name and Address of Rating Agency, and Shareholder Information
Management Discussion and Analysis	Management Discussion and Analysis has been fully disclosed based on the predetermined criteria
Good Corporate Governance	Disclosure of Corporate Governance is in accordance with the details that have been implemented by Bank Jatim throughout 2019
Corporate Social Responsibility	Disclosure of corporate social responsibility has taken into account the equality of treatment of Bank Jatim's employees, community empowerment, human rights and the environment.

HASIL PENILAIAN ACGS

Scorecard Level 1	Total Item	Items Not Applicable	Items Adopted (Dipenuhi)	Adopted Rate (Tingkat Pemenuhan)
Hak Shareholders	21	1	18	90
Perlakuan Terhadap Shareholders	15	1	9	71.4
Peran Shareholders	13	-	11	84.6
Keterbukaan dan Transparansi	32	-	29	90.6
Tanggungjawab Pengurus	65	1	59	92.2
FINAL SCORE BANK JATIM				99.72

RESULT OF ACGS ASSESSMENT

Scorecard Level 1	Total Item	Items Not Applicable	Items Adopted	Adopted Rate
Shareholders' Rights	21	1	18	90
Treatment to Shareholders	15	1	9	71.4
Shareholders' Role	13	-	11	84.6
Disclosure and Transparency	32	-	29	90.6
Responsibility of the Management	65	1	59	92.2
Final Score for Bank Jatim				99.72

PELAKSANAAN PENERAPAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

KRITERIA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN

Penilaian atas pengungkapan Pratik Tata kelola Emiten dilakukan dengan *me-review* informasi yang tersedia di publik dan dapat diakses oleh masyarakat umum, mencakup:

- Informasi dalam Bahasa Inggris yang dimuat dalam laporan tahunan, *website*, pengumuman, dan Edaran yang dibuat oleh emiten
- Sebelum *review* dilakukan dan penilaian diselesaikan, CG Expert dan Domestic Ranking Body (DRB) yang mewakili setiap negara melakukan diskusi intens untuk *me-review* setiap item dalam *scorecard* agar diperoleh kesamaan pandangan atas pertanyaan dan panduan penilaian yang digunakan yang berlandaskan asas Keterbukaan.
- Pada tahun 2017, tahapan penilaian diubah menjadi 3 tahapan. Penggunaan 3 tahapan ini dirancang agar penerapan pengungkapan praktik tata kelola dapat dipotret dengan lebih baik.

Bank Jatim telah mencapai *Phase 3* pada ACGS tahun 2017 yang dilakukan oleh CG Expert dan pihak independen yang diinisiasi oleh The Asean Capital Market Forum (ACMF).

Pelaksanaan 3 Tahapan Penilaian

- **Level 1** : Mencakup item yang menggambarkan standar minimum yang diharapkan diterapkan di setiap negara ASEAN dan mencakup peraturan perundangan serta prinsip OECD.
- **Level 2** : Terdiri dari item bonus yang merefleksikan praktik baik melebihi ekspektasi standar minimum, serta item penalti yang merefleksikan praktik tata kelola yang buruk.
- **Level 3** : Mencakup area tertentu yang dipilih oleh ASEAN CG Expert dan dapat berbeda-beda setiap tahun.

IMPLEMENTATION OF ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

CRITERIA USED IN ASSESSMENT

Assessment on the disclosure of Issuer's Corporate Governance is carried out by reviewing information that is available and accessible to the general public, including:

- Information in English contained in annual reports, websites, announcements, and Circular Letters made by issuers
- Before the review is conducted and the assessment is completed, CG Expert and Domestic Ranking Body (DRB) representing each country conduct active discussions to review each item in the *scorecard* in order to obtain the same view of the questions and assessment guidelines used based on the Transparency principle.
- In 2017, the assessment stage was changed to 3 stages. The use of these 3 stages is designed so that the application of disclosure of governance practices can be better portrayed.

Bank Jatim has reached Phase 3 of ACGS in 2017 conducted by CG Expert and an independent party initiated by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF).

Implementation of 3 Stages of Assessment

- **Level 1** : Includes items that describe the minimum standards expected to be applied in each ASEAN country and include the laws and regulations and OECD principles.
- **Level 2** : Consists of bonus items that reflect good practice exceeding minimum standard expectations, as well as penalty items that reflect poor governance practices.
- **Level 3** : Covers certain areas chosen by the ASEAN CG Expert and can vary each year.

SKOR MASING-MASING KRITERIA

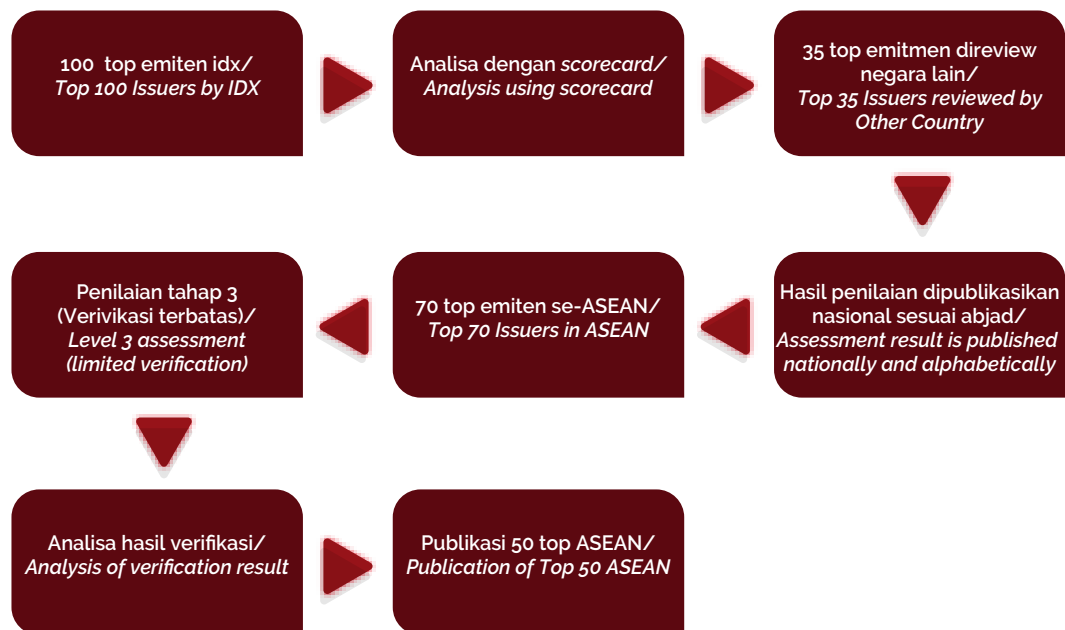
		LEVEL 1		LEVEL 2	
SCORECARD 2017 V.2.0		ITEM	BOBOT	ITEM BONUS	ITEM PENALTI
A	Hak Shareholders	21	10%	1	8
B	Perlakuan terhadap Shareholders	15	15%	1	3
C	Peran Shareholders	13	15%	1	2
D	Keterbukaan dan Transparansi	32	20%	2	4
E	Tanggung Jawab Pengurus	65	40%	8	8
Total		146	100%	13	25

SCORE FOR EACH CRITERIA

		LEVEL 1		LEVEL 2	
SCORECARD 2017 V.2.0		ITEM	VALUE	BONUS ITEM	PENALTY ITEM
A	Shareholders' Rights	21	10%	1	8
B	Treatment to Shareholders	15	15%	1	3
C	Shareholders' Role	13	15%	1	2
D	Disclosure and Transparency	32	20%	2	4
E	Responsibility of the Management	65	40%	8	8
Total		146	100%	13	25

Metode Penilaian ACGS

ACGS Assessment Methods



Rekomendasi Hasil Penilaian

Rekomendasi Memastikan Fungsi Kepatuhan	Rekomendasi Mencapai Ekspektasi Minimum untuk Emiten ASEAN	Rekomendasi Lampau PERSYARATAN Minimum
Shareholders mempunyai peluang untuk menyetujui remunerasi/adanya kenaikan remunerasi Komisaris.	Seluruh pengurus (Direksi dan Komisaris) diharapkan hadir dalam RUPST, dan diungkapkan dalam risalah berbahasa Inggris serta laporan tahunan.	Pengumuman RUPST (berserta Agenda dan penjelasannya), sama halnya untuk BEI, sekurang-kurangnya 28 hari sebelum Hari-H.

Assessment Result Recommendations

Recommendations for Ensuring Compliance Function	Recommendations of Reaching Minimum Expectations for ASEAN Issuers	Recommendations Beyond the Minimum Requirements
Shareholders have the opportunity to approve remuneration/increase in Commissioner remuneration	All management (Directors and Commissioners) are expected to attend the AGMS, and will be disclosed in English minutes and annual reports.	Announcement of the AGMS (along with the Agenda and explanation), as well as for the IDX, at least 28 days before D-Day.

Rekomendasi Memastikan Fungsi Kepatuhan	Rekomendasi Mencapai Ekspektasi Minimum untuk Emiten ASEAN	Rekomendasi Lampaui Persyaratan Minimum
Emiten memiliki ketentuan dan/atau peraturan yang melarang Direksi/Komisaris dan karyawan untuk mengambil keuntungan di luar pasar.	Pengumuman RUPS harus mencantumkan sebagai berikut : (i) Profil Direksi komisaris (minimal usia, kualifikasi akademik, tanggal penunjukan pengalaman dan kepemimpinan di perusahaan lain untuk pemilihan/ pemilihan kembali; (ii) Pengangkatan/ pengangkatan kembali auditor dapat diidentifikasi dengan jelas.	Pengungkapan remunerasi Direktur Utama secara mendetail.
Ketersediaan kebijakan terkait komite Direksi/ Komisaris Independen untuk me-review materi RPTs guna memutuskan yang terbaik untuk perusahaan dan <i>shareholders</i> .	Penunjukan auditor dapat di-identifikasi dengan jelas.	Komite Remunerasi Nominasi melakukan identifikasi kualitas Direksi sejalan dengan arah strategi perusahaan.
Rapat Pengurus diagendakan sebelum tahun buku dimulai.	Surat kuasa tersedia dan dapat diakses dengan mudah.	Memiliki Komisaris wanita independen.
Penunjukkan dan penggantian auditor internal membutuhkan persetujuan dari Komite Audit.	Direksi/Komisaris diharapkan untuk melaporkan transaksi saham perusahaan dalam 3 hari kerja.	Komite Nominasi untuk seluruhnya terdiri dari komisaris/pihak yang Independen.
	Emiten mengungkapkan kepemilikan saham oleh pejabat setingkat di bawah Direksi.	Komisaris Independen berjumlah lebih dari 50% dari total BOC untuk emiten dengan Komisaris Utama Independen.
	Laporan tahunan mengungkapkan total remunerasi yg dibayarkan pada setiap anggota Direksi/Komisaris.	Komisaris Independen tidak menerima opsi saham, saham atau bonus.
	Emiten mengungkapkan perdagangan saham oleh orang dalam.	
	Direksi/Komisaris sekurangnya hadir dalam 75% Rapat Pengurus dalam 1 tahun.	

<i>Recommendations for Ensuring Compliance Function</i>	<i>Recommendations of Reaching Minimum Expectations for ASEAN Issuers</i>	<i>Recommendations Beyond the Minimum Requirements</i>
<i>Issuers have provisions and/or regulations that prohibit Directors/ Commissioners and employees to take advantage outside the market.</i>	<i>Announcement of the GMS must include the following:</i> <i>(i) Board of Commissioners and Board of Directors' profiles (at minimum: age, academic qualifications, appointment dates and leadership experience in other companies for appointment/re appointment;</i> <i>(ii) The appointment/ reappointment of auditors can be clearly identified.</i>	<i>Detailed disclosure of the President Director's remuneration.</i>
<i>The availability of policies related to the committee of Directors/ Independent Commissioners to review the material of the RPTs in order to decide the best for the company and shareholders.</i>	<i>Appointment of auditors can be clearly identified.</i>	<i>The Nomination Remuneration Committee identifies the quality of the Directors in line with the company's strategic direction.</i>
<i>The Management Meeting is scheduled before the fiscal year begins.</i>	<i>Power of attorney is available and can be accessed easily.</i>	<i>Has an independent female Commissioner.</i>
<i>The appointment and replacement of an internal auditor requires the approval of the Audit Committee.</i>	<i>Directors/ Commissioners are expected to report the company's stock transactions within 3 working days.</i>	<i>The Nomination Committee consists entirely of commissioners/ Independent parties.</i>
	<i>Issuers disclose share ownership by officials at the level below the Board of Directors.</i>	<i>Independent Commissioners make up more than 50% of the total BOC for issuers with Independent President Commissioners.</i>
	<i>The annual report reveals the total remuneration paid to each member of the Board of Directors/ Commissioners.</i>	<i>Independent Commissioners do not accept stock options, shares or bonuses.</i>
	<i>Issuers reveal insider trading in shares.</i>	
	<i>Directors/ Commissioners are present at least 75% of the Management Meeting in 1 year.</i>	

Rekomendasi Memastikan Fungsi Kepatuhan	Rekomendasi Mencapai Ekspektasi Minimum untuk Emiten ASEAN	Rekomendasi Lampaui Persyaratan Minimum
	Kuorum minimal untuk rapat yang mengandung putusan adalah 2/3 dari total pengurus	
	Materi Rapat Pengurus diserahkan pada pengurus minimal 5 hari kerja sebelum hari-H.	
	Emiten memiliki dasar penghitungan untuk mengukur remunerasi berdasarkan kinerja dari Direksi dan Pejabat Eksekutif dengan kepentingan jangka panjang perusahaan seperti kebijakan claw back dan bonus yang ditangguhkan.	
	Pengungkapan tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama	
	Emiten melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap seluruh anggota Direksi termasuk Direktur Utama.	

TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI

- Membentuk Team ACGS intern sesuai nota Direktur Utama Nomor 057/62/III/2018/DIR tanggal 07 Maret 2018
- Identifikasi area perbaikan sebagai tindak lanjut pertemuan dengan OJK dan DRB pada 08 Maret 2018 dari hasil penilaian ACGS Tahun 2017
- Mengkomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas beberapa area perbaikan untuk mendapatkan arahan perbaikan yang dapat diimplementasikan
- Optimalisasi pengelolaan *website* serta berbagai alternatif media termasuk *media social* yang mudah dan *user friendly* saat diakses *shareholder*
- Meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam melakukan publikasi Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Tahunan serta keterbukaan informasi lainnya
- Persiapan lebih awal dalam pembuatan Laporan Tahunan, time line yang ketat dan disiplin tinggi dengan KAP dan vendor
- Melakukan *self assessment* ACGS dan berkomunikasi aktif dengan *Domestic Ranking Body* (DRB) pada bulan Desember 2018 s/d Februari 2019

<i>Recommendations for Ensuring Compliance Function</i>	<i>Recommendations of Reaching Minimum Expectations for ASEAN Issuers</i>	<i>Recommendations Beyond the Minimum Requirements</i>
	<i>The minimum quorum for meetings containing decisions is 2/3 of the total board.</i>	
	<i>The materials of the Board Meeting are submitted to the board at least 5 working days before D-day.</i>	
	<i>Issuers have a basis for calculating remuneration based on the performance of the Directors and Executive Officers with the company's long-term interests such as claw back policy and deferred bonuses.</i>	
	<i>Disclosure of duties and responsibilities of the President Commissioner.</i>	
	<i>Issuers conduct annual performance reviews of all members of the Board of Directors including the President Director.</i>	

FOLLOW-UP ON RECOMMENDATIONS RESULTS

- Forming an internal ACGS Team according to the Note of the President Director No. 057/62/III/2018/DIR on March 7, 2018
- Identification of improvement areas as a follow up to the meeting with OJK and DRB on March 8, 2018 from the results of the 2017 ACGS assessment
- Communicating to the Directors and Board of Commissioners on several areas of improvement to get directions for improvements that can be implemented
- Optimizing website management and various alternative media including social media that is easy and user friendly when accessed by shareholders
- Increase accuracy and speed in publishing Quarterly Financial Reports, Annual Reports and other disclosures
- Preparation earlier in making Annual Reports, strict time lines and high discipline with KAP and vendors
- Conduct ACGS self-assessment and actively communicate with the Domestic Ranking Body (DRB) from December 2018 to February 2019



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola perusahaan tertinggi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan. RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. Sebagai organ tata kelola tertinggi, RUPS menjadi wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkenaan dengan bisnis dan operasional Perseroan. Keputusan yang diambil dalam RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

PEMEGANG SAHAM BANK JATIM

Dalam Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham Bank Jatim diklasifikasikan dalam 2 (dua) seri yaitu Saham Seri A (yang hanya khusus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, kota dan kabupaten se-Jawa Timur) dan Saham Seri B (Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan masyarakat).

- Seri A adalah saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 14 Anggaran Dasar untuk:
 - Menghadiri dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris
 - Menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran Efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor
 - Menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
 - Menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan.
- Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut di atas, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama.
- Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham seri A & pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki tata tertib yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah dicantumkan dalam materi rapat yang dibagikan saat registrasi kepada Para Pemegang Saham yang hadir dan diwakilinya. Tata cara tanya jawab dan pengambilan keputusan dijelaskan sebagai berikut :

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest corporate governance organ that holds the highest authority in the Company. The GMS has the authority not given to the Board of Directors and the Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or Articles of Association. As the highest governance organ, the GMS becomes a place for shareholders to make important decisions regarding the Company's business and operations. Decisions taken at the GMS are made fairly and transparently.

SHAREHOLDERS OF BANK JATIM

In the Company's Articles of Association, the shareholders of Bank Jatim are classified in 2 (two) series, namely Series A Shares (which are only specifically owned by the Provincial, Municipal and Regency Governments in East Java) and Series B Shares (Directors, Board of Commissioners, Employees, Government Province, City and Regency Governments in East Java and the community).

- Series A is shares which give special rights to their holders in the attendance and approval quorum as referred to in Article 14 of the Articles of Association for:
 - Attending and approving the appointment, dismissal and approval of the resignation of the Directors and Board of Commissioners
 - Attending and approving changes in the articles of association for issuance of equity securities or changes in issued and paid up capital
 - Attending and approving stock deposits in the form of objects other than money, both tangible and intangible objects.
 - Attending and approving the merger, consolidation, acquisition and separation and submission of an application so that the Company is declared bankrupt and the liquidation of the Company.
- Except for the special rights as mentioned above, shareholders of series B have the same rights.
- As long as there is no other stipulation in the Articles of Association, series A shareholders & series B shareholders have the same rights and every 1 (one) share gives 1 (one) vote.

RULES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) has a code of conduct that has been set in the Company's Articles of Association and has been included in the meeting material distributed during registration to the Shareholders present and represented. The procedures for question and answer and decision making are explained as follows:

MEKANISME TANYA JAWAB

Dalam pembahasan setiap acara rapat, Pimpinan rapat akan memberikan kesempatan untuk para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya sebelum diadakan Perhitungan suara mengenai hak yang bersangkutan.

PROSEDUR YANG DITEMPUH

- Pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau akan diberikan hanya dalam 1 (satu) tahap untuk setiap mata acara rapat maksimal akan dibacakan 3 (tiga) pertanyaan.
- Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
- Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan kepada mereka akan diberikan lembar pertanyaan untuk diisi dengan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
- Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat pimpinan rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang dibicarakan.
- Pimpinan rapat akan membacakan pertanyaan dan pendapatnya satu per satu dan mempersilahkan Direksi atau Dewan Komisaris atau lembaga dan/atau profesi penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
- Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan perhitungan suara, hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

QUESTION AND ANSWER MECHANISM

In discussing each meeting, the Chairperson of the meeting will provide an opportunity for shareholders or their proxies to raise questions and/or opinions before the vote counts are held regarding the rights concerned.

PROCEDURES

- The Chairperson of the meeting will provide the opportunity for shareholders or their proxies to ask questions and/or will be given in only 1 (one) stage for each meeting agenda, a maximum of 3 (three) questions will be read.
- Only shareholders or legal proxies are entitled to raise questions and/or express opinions.
- Shareholders who want to ask questions or express opinions are asked to raise their hands, and they will be given a question sheet to fill in with their questions or opinions. The question sheet must be submitted to the officer and then submitted to the Chair of the Meeting.
- Every question and/or opinion or proposal submitted by shareholders must meet the requirements that in the opinion of the chairperson of the meeting it is directly related to the meeting being discussed.
- The Chairperson of the meeting will read the questions and opinions one by one and invite the Directors or the Board of Commissioners or supporting institutions and/or professions to answer or respond to these questions.
- After questions are answered or responded to, a vote count will be conducted, only shareholders or their authorized attorneys are entitled to vote.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Setiap pemegang saham dapat diberikan hak mengeluarkan 1 (satu) suara. apabila seorang pemegang saham mempunyai suara lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suaranya satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Perhitungan suara akan dilakukan dengan mekanisme "mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara" dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
- Kedua, mereka yang memberikan suara abstain (tidak memberikan suara) diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain (tidak mengeluarkan suara) akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 pasal 30 diatur bahwa pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

LAIN-LAIN

Demi keamanan dan kelancaran pelaksanaan rapat dan agar tidak mengganggu peserta rapat yang lain, terhadap peserta rapat yang menimbulkan adanya indikasi ketidaktertiban dan ketidaknyamanan dalam rapat, pimpinan rapat dapat mempersilahkan peserta rapat tersebut untuk meninggalkan ruangan rapat.

KEWENANGAN RUPS

RUPS memiliki wewenang di antaranya:

- Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Perseroan.
- Menetapkan remunerasi Pengurus Perseroan atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Pengurus Perseroan.
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan.
- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar.
- Menetapkan alokasi penggunaan laba.
- Menetapkan Kantor Akuntan Publik atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan.

DECISION-MAKING MECHANISM

Each shareholder can be given the right to issue 1 (one) vote, if a shareholder has more than one share vote, then he is asked to vote once and that vote represents the entire number of shares he owns. The vote count will be carried out by the mechanism of "raising hands and handing over the ballot cards" with the following conditions:

- First, those who disagree will be asked to raise their hands and submit their voice cards.
- Second, those who vote abstained (not voting) are asked to raise their hands and submit their voice cards. Invalid votes are considered to be non-existent and are not counted in determining the number of votes cast at a meeting. Furthermore, the number of votes that disagree and the vote abstained (not making a vote) will be calculated with a valid vote and the difference is the number of votes that agree. In accordance with Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014 article 30 it is regulated that shareholders of shares with valid voting rights present at the meeting but abstaining are considered to issue the same votes as the majority vote of shareholders issuing votes.

OTHERS

For the sake of security and the smooth running of the meeting and so as not to disturb other meeting participants, the meeting participants who cause an indication of disorder and discomfort in the meeting, the chairperson of the meeting can invite the meeting participants to leave the meeting room.

GMS AUTHORITY

GMS has the following authority:

- Appoint and dismiss Company Management.
- Determine the remuneration of the Company's Management or authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Company's Management.
- Approve and validate the Annual Report submitted by the Directors and the Board of Commissioners' supervisory report and the Company's Financial Report.
- Approve changes to the Articles of Association.
- Determine the allocation of the use of profits.
- Establish a Public Accounting Firm or authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm in auditing the Company's Financial Statements.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2019

TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPS

Tata cara penyelenggaraan RUPS mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta Anggaran Dasar Perseroan.

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2018

Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan	Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 058/091/DIR/CSE/Srt pada tanggal 11 Maret 2019
Pengumuman	Mengiklankan Pengumuman Pemanggilan RUPS pada surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 20 Maret 2019
Pemanggilan	Mengiklankan Pemanggilan para pemegang saham pada surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 04 April 2019
Penyelenggaraan	26 April 2019
Penyampaian Ringkasan Risalah	Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 058/167/DIR/CSE/Srt pada tanggal 30 April 2019 serta tercantum pada surat kabar Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 30 April 2019
Penyampaian Berita Acara	Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 058/234/DIR/CSE/Srt pada tanggal 24 Mei 2019

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2018

Tanggal & Waktu	Jum'at, 26 April 2019 Pukul 08.40 WIB – selesai
Tempat	Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Ruang Bromo Lantai 5 Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya
Kehadiran	dihadiri atau diwakili pemegang saham Seri A dan Seri B sejumlah 13.220.702.068 saham sehingga telah memenuhi Kuorum seluruh mata acara rapat.
Pimpinan Rapat	Doktor Akhmad Sukardi, selaku Komisaris Utama
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2018 AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019

PROCEDURE FOR GMS CONVENTION

The procedure for organizing a GMS refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning the Plans and Organizations of Open Company General Meeting of Shareholders and Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.04/2017 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK. 04/2014 Concerning the Plan and Organization of the GMS of the Public Company and the Company's Articles of Association.

STAGES OF THE CONVENTION OF ANNUAL GMS OF 2018 FISCAL YEAR

<i>Notification of Convention Plan</i>	<i>Notification to the Financial Services Authority with letter No. 058/091/DIR/CSE/Srt on March 11, 2019</i>
<i>Announcement</i>	<i>Advertise Announcement of GMS Summons in Bisnis Indonesia newspaper, Indonesia Stock Exchange website, OJK website, Company website on March 20, 2019</i>
<i>Summons</i>	<i>Advertise the Summons of shareholders in the Bisnis Indonesia newspaper, the Indonesia Stock Exchange website, the OJK website, the Company's website on April 4, 2019</i>
<i>Convention</i>	<i>April 16, 2019</i>
<i>Submission of Summary of Minutes</i>	<i>Submission of Summary of Minutes to the Financial Services Authority with letter No. 058/167/DIR/CSE/Srt on April 30, 2019 and listed in the Bisnis Indonesia newspaper published on April 30, 2019</i>
<i>Submission of Deed of Minutes</i>	<i>Submitting Minutes to the Financial Services Authority with letter No. 058/234/DIR/CSE/Srt on May 24, 2019</i>

CONVENTION OF ANNUAL GMS OF 2018 FISCAL YEAR

<i>Date & Time</i>	<i>Friday, April 26, 2019 at 08.40 – complete</i>
<i>Venue</i>	<i>Head Office of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bromo Room 5th Floor Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya</i>
<i>Attendance</i>	<i>attended or represented by Series A and Series B shareholders totaling 13,220,702,068 shares; thus, it has fulfilled the Quorum of all meeting agenda items</i>
<i>Chairperson of the Meeting</i>	<i>Akhmad Sukardi as the President Commissioner</i>
<i>Attendance of Members of Board of Commissioners and Board of Directors</i>	<i>All Board of Commissioners and Board of Directors attended</i>

Pihak Independen untuk melakukan perhitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan	Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, SH selaku Notaris Publik PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
Jumlah Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat	3 (tiga) orang pada mata acara 1 2 (dua) orang pada mata acara 2 2 (dua) orang pada mata acara 5 2 (dua) orang pada mata acara 6

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA TAHUN 2019

Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan	Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 058/169/DIR/CSE/Srt pada tanggal 06 Mei 2019
Pengumuman	Mengiklankan Pengumuman Pemanggilan RUPS pada surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 13 Mei 2019
Pemanggilan	Mengiklankan Pemanggilan para pemegang saham pada surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 28 Mei 2018
Penyelenggaraan	19 Juli 2019
Penyampaian Ringkasan Risalah	Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 058/256/DIR/CSE/Srt pada tanggal 21 Juni 2019 serta tercantum pada surat kabar Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 21 Juni 2019
Penyampaian Berita Acara	Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 058/282/DIR/CSE/Srt pada tanggal 16 Juli 2019

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA TAHUN 2019

Tanggal & Waktu	Rabu, 19 Juni 2019 Pukul 09.10 WIB – selesai
Tempat	Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Ruang Bromo Lantai 5 Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya
Kehadiran	RUPS dihadiri atau diwakili pemegang saham Seri A dan Seri B sejumlah 13.244.816.131 saham sehingga memenuhi kuorum seluruh mata acara rapat.
Pimpinan Rapat	Doktor Akhmad Sukardi, selaku Komisaris Utama
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir
Pihak Independen untuk melakukan perhitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan	Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, SH selaku Notaris Publik PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
Jumlah Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat	4 (empat) orang pada mata acara 1

Independent Party to do quorum calculation and decision voting	Sitaesmi Puspawati Subianto, SH, Notary, as the Public Notary PT Datindo Entrycom as the Share Registrar
Number of shareholders submitting questions and/or giving opinions	3 (three) people in agenda 1 2 (two) people in agenda 2 2 (two) people in agenda 5 2 (two) people in agenda 6

STAGES OF THE CONVENTION OF EXTRAORDINARY GMS OF 2019

Notification of Convention Plan	Notification to the Financial Services Authority with letter No. 058/169/DIR/CSE/Srt on May 6, 2019
Announcement	Advertise Announcement of GMS Summons in Bisnis Indonesia newspaper, Indonesia Stock Exchange website, OJK website, Company website on May 13, 2019
Summons	Advertise the Summons of shareholders in the Bisnis Indonesia newspaper, the Indonesia Stock Exchange website, the OJK website, the Company's website on May 28, 2019
Convention	July 19, 2019
Submission of Summary of Minutes	Submission of Summary of Minutes to the Financial Services Authority with letter No. 058/256/DIR/CSE/Srt on June 21, 2019 and listed in the Bisnis Indonesia newspaper published on June 21, 2019
Submission of Deed of Minutes	Submitting Minutes to the Financial Services Authority with letter No. 058/282/DIR/CSE/Srt on July 16, 2019

CONVENTION OF EXTRAORDINARY GMS OF 2019

Date & Time	Wednesday, June 19, 2019 at 09.10 WIB – complete
Venue	Head Office of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bromo Room 5th Floor Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya
Attendance	attended or represented by Series A and Series B shareholders totaling 13,244,816,131 shares; thus, it has fulfilled the Quorum of all meeting agenda items
Chairperson of the Meeting	Akhmad Sukardi as the President Commissioner
Attendance of Members of Board of Commissioners and Board of Directors	All Board of Commissioners and Board of Directors attended
Independent Party to do quorum calculation and decision voting	Sitaesmi Puspawati Subianto, SH, Notary, as the Public Notary PT Datindo Entrycom as the Share Registrar
Number of shareholders submitting questions and/or giving opinions	4 (four) people in agenda 1

REALISASI KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2018

Pada tanggal 26 April 2019, Bank Jatim telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dengan agenda, keputusan, dan realisasi sebagai berikut:

Mata Acara 1			Realisasi
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2018 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018			
1. Menyetujui dan Mengesahkan :			
- Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2018; - Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018; - Laporan Keuangan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palillingan & Rekan sesuai dengan laporannya No : 00005/3.0355/AU.1/07/1192—1/1/2019 tanggal 18 Januari 2019, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.			
2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporna Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.			
Perhitungan Suara			
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	
13.180.181.200 saham atau 99.6935045%	59.300 saham atau 0.0004485%	40.461.568 saham atau 0,3060470%	
Mata Acara 2			Telah direalisasikan pada tahun 2019
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris			
1. Menyetujui Penguanaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebagai berikut :			
- Sebesar Rp683.865.985.709,02 atau 54,26% dari laba bersih Tahun Buku 2018 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2018. Kemudian 45,61 per saham ditetapkan sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Mei 2019 dan akan dibayarkan pada tanggal 29 Mei 2019; - Sebesar Rp576.442.445.790,98 ditetapkan sebagai Cadangan Umum;			
2. Menyetujui Penetapan Pembagian Bonus Pegawai dan Tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018 dicadangkan sebesar Rp315.109.669.956,62 dengan pembagian sebagai berikut :			
- Bonus Pegawai sebesar 85% ; - Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi Dan Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 15%, khusus Direksi dan Komisaris terdapat Tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui proses <i>Long Term Incentive</i>.			
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu untuk membantu tugas Dewan Pengawas Syariah tahun 2019.			

REALIZATION OF RESOLUTIONS OF ANNUAL GMS OF 2018 FISCAL YEAR

On April 26, 2019, Bank Jatim convened Annual GMS with agenda, resolutions, and realization as follows:

Agenda 1			Realization
Approval of the Company's Annual Report Concerning the State of the Company during the 2018 Fiscal Year, including the Report on the Implementation of the Supervisory Board of the Board of Commissioners during the 2018 Fiscal Year and Ratification of the Financial Statements of the 2018 Fiscal Year.			
1. Approved and Validated:			
- Annual Report of the Company submitted by the Board of Directors for 2018 Fiscal Year; - Supervision Report carried out by the Board of Commissioners for 2018Fiscal Year; - Financial Statements for the fiscal year ended on December 31th, 2018 audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Patillingan & Rekan in accordance with their report No: 00005/3.0355/AU.1/07/1192-11/1/2019 dated January 18, 2019, with a fair opinion in all material respects in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia.			
2. With the approval and validation of the Annual Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2018, the GMS granted full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of Board of Directors for management actions and to all members of Board Commissioners for the supervisory actions carried out during the fiscal year ended on December 31th, 2018 to the extent that such actions are reflected in the Company's Financial Statements.			
			Voting
Agree	Disagree	Abstain	
13,180,181,200 shares or 99.6935045%	59,300 shares or 0.0004485%	40,461,568 shares or 0.3060470%	

Agenda 2			Realization
Determination of the Use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2018 Including the Provision of Bonuses for Employees as well as Tantiem and Remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners			
1. Approved the Use of the Company's Profit for Fiscal Year 2018 as follows:			
- Rp683,865,985,709.02 or 54.26% of the net income for Fiscal Year 2018 was determined as cash dividends for Fiscal Year 2018. Then 45.61 per share was determined as cash dividends distributed to shareholders registered in the Company's Shareholders Register per May 9, 2019 and will be paid on May 29, 2019; - Rp 576,442,445,790.98 is designated as General Reserves;			
2. Approved the Stipulation of Employee Bonus and Tantiem Distribution for the Management of the Company, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners, including the Sharia Supervisory Board for Fiscal Year 2018, which is reserved Rp315,109,669,956.62 with the following distribution:			
- Employee Bonus of 85%; - The Company's Management Tantiem, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners, including the Sharia Supervisory Board by 15%, specifically the Directors and Commissioners, there is a bonus that will be suspended in the form of cash and shares through the Long Term Incentive process.			
3. Granted authority and power to the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Company's management to assist the Sharia Supervisory Board in 2019.			

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
12.813.161.948 saham atau 96,9174094%	407.540.120 saham atau 3,0825906%	Nihil
Mata Acara 3		Telah direalisasikan pada tahun 2019
Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019		
Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
12.762.548.388 saham atau 96,5345738%	429.572.280 saham atau 3,2492395%	28.581.400 saham atau 0,2161867%
Mata Acara 4		Telah direalisasikan pada tahun 2019
Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan <i>Managenet Employee Stock Options Plan</i> (MESOP)		
Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :		
- Melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan dengan pelaksanaan <i>Management Employee Stock Options Plan</i> (MESOP) untuk jangka waktu 1(satu) tahun sejak tanggal keputusan RUPS ini; - Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberitahuan perubahan anggaran dasar termaksud kepada instansi terkait.		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
12.112.068.492 saham atau 91,6144123%	1.080.050.176 saham atau 8,1693859%	28.583.400 saham atau 0,2162018%
Mata Acara 5		Telah direalisasikan pada tahun 2019
Persetujuan Rencana Pembelian Saham (<i>Buyback</i>) Dalam Rangka Pelaksanaan <i>Long Term Incentive</i>		
1. Menyetujui Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk Pelaksanaan <i>Long Term Incentive</i> dengan alokasi dana sebesar Rp1.200.000.000,00 dan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham untuk jangka waktu sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Juli 2019;		
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku;		
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan serta ketentuan Program <i>Long Term Incentive</i> , selanjutnya melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terhadap pelaksanaan Alokasi saham dalam Program <i>Long Term Incentive</i> .		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
12.589.793.292 saham atau 95,2278724%	630.824.676 saham atau 4,7714915%	84.100 saham atau 0,0006361%

Voting		
Agree	Disagree	Abstain
12,813,161,948 shares or 96.9174094%	407,540,120 shares or 3.0825906%	Nil
Agenda 3		Has been realized in 2019
Granting of Power to the Board of Commissioners to Appoint a Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2019		
Approved to grant power to the Board of Commissioners to appoint a public accounting firm to audit the Company's financial statements for fiscal year 2018		
Voting		
Agree	Disagree	Abstain
12,762,548,388 shares or 96.5345738%	429,572,280 shares or 3.2492395%	28,581,400 shares or 0.2161867%
Agenda 4		Has been realized in 2019
Granting of Power to the Board of Commissioners to Adjust Capital of the Company by Amending Article 4 of the Articles of Association Regarding the Management/Employee Stock Option Plan (MESOP)		
Approved to grant authority to the Board of Commissioners to:		
- Make adjustments to the Company's capital, thereby amending Article 4 of the Articles of Association in connection with the implementation of the Management/Employee Stock Option Plan (MESOP) for a period of 1 (one) year from the date of the resolution of this GMS; - Perform all necessary actions in the context of notification of the amendment to the said articles of association to the relevant institutions.		
Voting		
Agree	Disagree	Abstain
12,112,068,492 shares or 91.6144123%	1,080,050,176 shares or 8.1693859%	28,583,400 shares or 0.2162018%
Agenda 5		Has been realized in 2019
Approval for the Buyback Plan for the Implementation of the Long-Term Incentive		
1. Approved the Implementation of the Buyback of the Company's Shares for the Implementation of the Long-Term Incentive with an allocation of funds amounting to Rp1,200,000,000.00 and the implementation of the Share Buyback for a period from 1 May 2019 to 31 July 2019;		
2. Granted authority and power to the Board of Directors of the Company to carry out share buyback by taking into account the prevailing laws and regulations;		
3. Granted authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to determine the terms and conditions of the Long-Term Incentive Program, then report to the Annual General Meeting of Shareholders on the implementation of the Allocation of Shares in the Long-Term Incentive Program.		
Voting		
Agree	Disagree	Abstain
12,589,793,292 shares or 95.2278724%	630,824,676 shares or 4.7714915%	84,100 shares or 0.0006361%

Mata Acara 6 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan			Mata Acara 6 Changes in the composition of Bank's Management		
1. Memberhentikan dengan Hormat Direksi yang telah berakhir masa jabatannya yang diantaranya : Direksi : - Direktur Utama : R. Soeroso - Direktur Menengah Korporasi : Su'udi - Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah : Tonny Sudjiaryanto - Direktur Operasional : Rudie Hardiono Terhadap Sdr. Hadi Santoso sebagai Direktur Kepatuhan dan Human Capital yang habis masa jabatannya pada penutupan RUPST Tahun Buku 2018 tidak dilakukan pemberhentian terhitung sejak penutupan RUPS dengan pertimbangan Komite Remunerasi dan Nominasi sedang menjalankan penjarangan calon Direksi Bank Jatim. Selanjutnya disetujui pemberhentian Sdr. Hadi Santoso terhitung sejak penutupan RUPS Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada tahun 2019; 2. Untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong, maka dalam jangka waktu 90 hari sejak RUPS ini Perseroan harus menyelenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. RUPS memberikan kuasa pada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang masih lowong kepada Direktur yang ada; 4. Memberhentikan dengan hormat Dewan Pengawas Syariah yang telah berakhir masa jabatannya yang diantaranya : Dewan Pengawas Syariah - Ketua : H. Ali Aziz - Anggota : H. Thohir Luth; H. Nur Syam. 5. Menyetujui dan mengangkat : - Sdr. Saad Ibrahim; - Sdr. Afifuddin Muhajir Tehitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan Dewan Pengurus Syariah sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke 4 dan berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. 6. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian Struktur Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah; 7. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan/Bursa Efek Indonesia/Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.			1. Respectfully dismissed the Directors who have ended their terms of office including: Board of Directors: - President Director : R. Soeroso - Medium & Corporation Director : Su'udi - Retail Consumer & Sharia Business Director : Tonny Sudjiaryanto - Operations Director : Rudie Hardiono Mr. Hadi Santoso, as Compliance and Human Capital Director whose term of office expires at the closing of the AGMS for 2018Fiscal Year, was not dismissed as of the closing of the GMS with the consideration that the Remuneration and Nomination Committee was conducting a selection of candidates for the Directors of Bank Jatim. Then, the dismissal of Mr. Hadi Santoso as of the closing of the Extraordinary GMS to be held in 2019 was approved; 2. To filed vacant Directors' positions, then within 90 days of this GMS the Company shall hold a GMS to fill vacancies with due observance of the prevailing laws and regulations; 3. The GMS authorized the Board of Commissioners to distribute the duties of the Director who is still vacant to the existing Directors; 4. Respectfully dismissed the Sharia Supervisory Board whose term of service has ended including: Sharia Supervisory Board : - Chairman: H. Ali Aziz - Members: H. Thohir Luth; H. Nur Syam. 5. Approved and appointed: - Mr. Saad Ibrahim; - Mr. Afifuddin Muhajir. Effective since the closing of this Meeting with the term of office of the Sharia Management Board until the closing of the 4th AGM and is effective after obtaining a recommendation from the National Shariah Board of the Indonesian Ulema Council and after obtaining the approval of the Financial Services Authority. 6. The GMS authorized the Board of Commissioners to share the structure of the Chairman and Members of the Sharia Supervisory Board; 7. Granted authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to carry out all the processes and actions needed including notification to the regulator (Financial Services Authority/Indonesian Stock Exchange/Ministry of Law and Human Rights) as required in the prevailing laws and regulations.		
Perhitungan Suara			Voting		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Agree	Disagree	Abstain
12.112.157,892 saham atau 91,6150884%	1.079.515,376 saham atau 8,1653408%	29.028.800 saham atau 0,2195708%	12,112,157,892 shares or 91.6150884%	1,079,515,376 shares or 8.1653408%	29,028,800 shares or 0.2195708%

Telah direalisasikan pada tahun 2019

Has been realized in 2019

REALISASI KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA TAHUN 2019

Pada tanggal 19 Juni 2019, Bank Jatim telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan agenda, keputusan, dan realisasi sebagai berikut:

Mata Acara 1	Realisasi
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	
1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Hadi Santoso selaku Direktur Kepatuhan & Human Capital, dan mengangkat kembali Saudara Hadi Santoso sebagai Direktur Perseroan dengan memperhatikan ketentuan POJK nomor 27/POJK.03/2016 dan SEOJK nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, maka akan menjabat sebagai Direktur Utama efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan; 2. Menyetujui dan mengangkat : Dewan Komisaris • Saudara Mas'ud Said sebagai Komisaris Independen; • Saudara Heru Tjahjono sebagai Komisaris; Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan; Direksi • Saudara Hadi Santoso sebagai Direktur Utama*; • Saudra Busrul Iman sebagai Direktur Komersial & Korporasi*; • Saudara Elfaurid Aguswantoro sebagai Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah*; • Saudara Tonny Prasetyo sebagai Direktur TI & Operasi*; • Saudara Erdianto Sigit Cahyono sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko*; Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *) Berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direksi kepada Direktur yang ada 4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan/Bursa Efek Indonesia/ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris 1. Komisaris Utama: Bapak Akhmad Sukardi 2. Komisaris Independen: Bapak Rudi Purwono 3. Komisaris Independen: Bapak Candra Fajri Ananda 4. Komisaris: Bapak Budi Setiawan 5. Komisaris Independen: Bapak Mas'ud Said* 6. Komisaris: Bapak Heru Tjahjono*	Telah direalisasikan pada tahun 2019

REALIZATION OF RESOLUTIONS OF EXTRAORDINARY GMS OF 2019

On June 19, 2019, Bank Jatim convened Extraordinary GMS with agenda, resolutions, and realization as follows:

Agenda 1	Realization
Changes in the composition of Bank's Management	
1. Respectfully dismissed Mr. Hadi Santoso from his position as Compliance & Human Capital Director, and reappointed Mr. Hadi Santoso as the Bank's Director by taking into account the provision of POJK No. 27/POJK.03/2016 and SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 regarding Fit-and-Proper Test for Main Party of Financial Service Institutions, then shall serve as the President Director effective since the passing of Fit-and-Proper Test by the Financial Services Authority; 2. Approved and appointed: Board of Commissioners: • Mr. Mas'ud Said as an Independent Commissioner; • Mr. Heru Tjahjono as a Commissioner; Effective since the closing of this Meeting until the end of term of office on the closing of the 4th Annual General Meeting of Shareholders since their appointment date, or after their replacement passes the Fit-and-Proper Test by the Financial Services Authority; Board of Directors: • Mr. Hadi Santoso as the President Director*; • Mr. Busrul Iman as the Commerce and Corporation Director*; • Mr. Elfaurid Aguswantoro as the Consumer, Retail, and Sharia Business Director*; • Mr. Tonny Prasetyo as the IT & Operations Director*; • Mr. Erdianto Sigit Cahyono as the Compliance and Risk Management Director*; Effective since the closing of this Meeting until the end of term of office on the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders since their appointment date, or after their replacement passes the Fit-and-Proper Test by the Financial Services Authority; *) Effective since the passing of Fit-and-Proper Test by the Financial Services Authority. 3. Granted power to the Board of Commissioners to conduct division of Board of Directors' duties to the available Directors 4. Granted power and authority, with substitution rights, to the Bank's Board of Directors to conduct all processes and actions necessary, including announcing to the regulators (Financial Services Authority/Indonesia Stock Exchange/Ministry of Law and Human Rights) as required in the prevailing laws and regulations. Hence, the composition of Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank shall be as follows: Board of Commissioners: 1. President Commissioner: Bapak Akhmad Sukardi 2. Independent Commissioner: Bapak Rudi Purwono 3. Independent Commissioner: Bapak Candra Fajri Ananda 4. Commissioner: Bapak Budi Setiawan 5. Independent Commissioner: Bapak Mas'ud Said* 6. Commissioner: Bapak Heru Tjahjono*	Has been realized in 2019

Dewan Komisaris		
1.	Direktur Utama: Bapak Hadi Santoso*	
2.	Direktur Komersial & Korporasi: Bapak Busrul Iman*	
3.	Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah: Bapak Elfaurid Aguswantoro*	
4.	Direktur Risiko Bisnis: Ibu Rizyana Mirda	
5.	Direktur TI & Operasi: Bapak Tonny Prasetyo*	
6.	Direktur Keuangan: Bapak Ferdian Timur Satyagraha	
7.	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko: Bapak Erdianto Sigit Cahyono*	
*berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
12.094.540.464 saham atau 91,3152764%	1.121.235.367 saham or 8.4654657%	29.040.300 saham or 0.2192579%

Board of Commissioners:

- Board of Directors: President Director: Bapak Hadi Santoso*
- Commerce & Corporation Director: Bapak Busrul Iman*
- Consumer, Retail, and Sharia Business Director: Bapak Elfaurid Aguswantoro*
- Business Risk Director: Ibu Rizyana Mirda
- IT & Operations Director: Bapak Tonny Prasetyo*
- Finance Director: Bapak Ferdian Timur Satyagraha
- Compliance and Risk Management Director: Bapak Erdianto Sigit Cahyono*

* Effective since the passing of Fit-and-Proper Test by the Financial Services Authority.

Voting		
Agree	Disagree	Abstain
12,094,540,464 shares or 91.3152764%	1,121,235,367 shares or 8.4654657%	29,040,300 shares or 0.2192579%

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN 2018

Pada tahun 2018, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan satu kali RUPS Luar Biasa.

Tahapan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

Pemberitahuan Rencana penyelenggaraan	Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 057/179/DIR/CSE/Srt pada tanggal 15 Mei 2018
Pengumuman	Mengiklankan Pengumuman Pemanggilan RUPS pada surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 21 Mei 2018
Pemanggilan	Mengiklankan Pemanggilan para pemegang saham pada surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 04 Juni 2018
Penyelenggaraan	26 Juni 2018
Penyampaian Ringkasan Risalah	Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 057/222/DIR/CSE/Srt pada tanggal 28 Juni 2018 serta tercantum pada surat kabar Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 28 Juni 2018
Penyampaian Berita Acara	Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 057/249/DIR/CSE/Srt pada tanggal 24 Juli 2018

2018 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In 2018, the Bank convened the Annual GMS of 2017 Fiscal Year and one Extraordinary GMS.

Stages of the Convention of Extraordinary General Meeting of Shareholders are as follows:

Notification of Convention Plan	Notification to the Financial Services Authority with letter No. 057/179/DIR/CSE/Srt on May 15, 2018
Announcement	Advertise Announcement of GMS Summons in Bisnis Indonesia newspaper, Indonesia Stock Exchange website, OJK website, Company website on May 21, 2018
Summons	Advertise the Summons of shareholders in the Bisnis Indonesia newspaper, the Indonesia Stock Exchange website, the OJK website, the Company's website on June 4, 2018
Convention	June 26, 2018
Submission of Summary of Minutes	Submission of Summary of Minutes to the Financial Services Authority with letter No. 057/222/DIR/CSE/Srt on June 28, 2018 and listed in the Bisnis Indonesia newspaper published on June 28, 2018
Submission of Deed of Minutes	Submitting Minutes to the Financial Services Authority with letter No. 057/249/DIR/CSE/Srt on July 24, 2018

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA TAHUN 2018

Tanggal & Waktu	Selasa, 26 Juni 2018 Pukul 08.46 WIB – selesai
Tempat	Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Ruang Bromo Lantai 5 Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya
Kehadiran	RUPS dihadiri atau diwakili pemegang saham Seri A dan Seri B sejumlah 13.226.107.451 saham sehingga memenuhi kuorum seluruh mata acara rapat.
Pimpinan Rapat	Rudi Purwono, selaku Komisaris Independen
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir

CONVENTION OF EXTRAORDINARY GMS OF 2018

Date & Time	Tuesday, June 26, 2018 at 08.46 WIB – complete
Venue	Head Office of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bromo Room 5th Floor Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya
Attendance	attended or represented by Series A and Series B shareholders totaling 13,226,107,451 shares; thus, it has fulfilled the Quorum of all meeting agenda items
Chairperson of the Meeting	Rudi Purwono as an Independent Commissioner
Attendance of Members of Board of Commissioners and Board of Directors	All Board of Commissioners and Board of Directors attended

Pihak Independen untuk melakukan perhitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan	Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, SH selaku Notaris Publik PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat	1 (satu) orang pada mata acara 1

Independent Party to do quorum calculation and decision voting	Sitaesmi Puspawati Subianto, SH, Notary, as the Public Notary PT Datindo Entrycom as the Share Registrar
Number of shareholders submitting questions and/or giving opinions	1 (one) person in agenda 1

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS LUAR BIASA TAHUN 2018

Adapun mata acara, keputusan dan realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2018 sebagai berikut :

Mata Acara 1	Realisasi		
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan			
- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada : - Perubahan pada Anggaran Dasar Pasal 15 ayat (4) tentang Direksi - Perubahan Pada Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat (6) tentang Dewan Komiasaris; - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan mengubah Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (6) sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris; - Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka permohonan persetujuan, pelaporan serta pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dimaksud kepada Instansi Terkait.	Telah direalisasikan pada tahun 2018		
Perhitungan Suara			
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	
11.952.027.168 saham atau 90.3669293%	1.221.853.383 saham atau 9.2381934%	52.226.900 saham atau 0.3948773%	
Mata Acara 2	Telah direalisasikan pada tahun 2018		
Penetapan Perubahan Tugas dan Wewenang Pengurus Perseroan			
Rapat memberi kuasa kepada Dewan Komisaris dalam hal Menyetujui usulan perubahan Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi kecuali Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan, atas Dasar usulan hasil Rapat Direksi, serta melakukan peninjauan calon pengurus Perseroan sekaligus memproses uji kemampuan dan kepatutan ke Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi			
Perhitungan Suara			
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	
13.173.880.551 saham atau 99.6051227%	Nihil	52.226.900 saham atau 0.3948773%	
Mata Acara 3	Telah direalisasikan pada tahun 2018		
Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Perseroan			
- Penyempurnaan Pedoman Sistem dan prosedur pemilihan dan atau penggantian Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; - Pengkinian Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; - Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perubahan apabila diperlukan atas dasar usulan Direksi.			

RESOLUTION AND REALIZATION OF EXTRAORDINARY GMS OF 2018

The agenda, resolutions, and realization of Extraordinary GMS of 2018 are as follows:

Agenda 1			Realization
Amendment to the Bank's Articles of Association			
1.	Approved the amendments to the Bank's Articles of Association to:		Has been realized in 2018
•	Article 15 paragraph (4) concerning the Board of Directors		
•	Article 18 Paragraph (6) concerning the Committees of Board of Commissioners;		
2.	Granted authority and power to the Board of Directors to make adjustments to the Company's Articles of Association by amending Article 15 paragraph (4) and Article 18 paragraph (6) with respect to the Board of Directors and Board of Commissioners;		
3.	Granted authority with substitution rights to the Board of Directors to take all necessary actions in the context of requesting approval, reporting and registration of amendments to the Articles of Association referred to the Related Institution.		
			Voting
	Agree	Disagree	Abstain
	11,952,027,168 shares or 90.3669293%	1,221,853,383 shares or 9.2381934%	52,226,900 shares or 0.3948773%
Agenda 2			Has been realized in 2018
Determination of Changes in Duties and Authority of Bank's Management			
The meeting authorized the Board of Commissioners in terms of approving the proposed changes to the duties, powers and responsibilities of the Board of Directors except the President Director and Compliance Director, on the basis of the proposed results of the Board of Directors meeting, as well as conducting a candidate for the management of the Bank while processing the fit-and-proper test to the Financial Services Authority with heeded input from the Remuneration and Nomination Committee			
			Voting
	Agree	Disagree	Abstain
	13,173,880,551 shares or 99.6051227%	Nil	52,226,900 shares or 0.3948773%
Agenda 3			Has been realized in 2018
Changes to the Bank's Guidelines/Manual			
1.	Improved the System Guidelines and procedures for selecting and/or replacing the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors;		
2.	Updated the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors Work Guidelines;		
3.	Granted authority to the Board of Commissioners to make changes if needed based on the Board of Directors' recommendations.		

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
12.296.952.383 saham atau 92,9748411%	876.928.168 saham atau 6,6302816%	52.226.900 saham atau 0,3948773%

Voting		
Agree	Disagree	Abstain
12,296,952,383 shares or 92,9748411%	876,928,168 shares or 6,6302816%	52,226,900 shares or 0,3948773%

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar serta memastikan Bank menjalankan usahanya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan dan memberikan saran terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta fungsi lain yang ditetapkan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan.

Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di setiap jenjang organisasi sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan, antara lain, melalui pembahasan kinerja dan permasalahan secara berkala dengan Direksi dan/atau pejabat perusahaan, melakukan kunjungan kerja ke unit-unit kerja untuk memperoleh dan mengetahui secara langsung kinerja dan aktivitas usaha, pengawasan dalam hal penyempurnaan infrastruktur GCG dan manajemen risiko, kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh unit-unit kerja di lingkungan Badan Usaha. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Pada 2019, telah terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019, dengan pertimbangan guna memperluas fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan kondisi semakin meningkatnya kompleksitas, volume dan pertumbuhan usaha. Rapat menyetujui untuk menambah jumlah Anggota Dewan Komisaris dari 4 (empat) orang menjadi 6 (enam) orang dengan komposisi sebagai berikut:

Periode 1 Januari 2019 - 19 Juni 2019

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan RUPS	Lulus Fit and Proper Test	Periode Jabatan
Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	RUPS 20 Februari 2018	9 Februari 2018	2018 - 2021
Rudi Purwono	Komisaris Independen	RUPS 24 Juni 2016	16 September 2018	2018 - 2021

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has the duty and responsibility to conduct supervision in accordance with the Articles of Association and ensure the Bank conducts its business in accordance with the stated objectives. The Board of Commissioners must carry out supervision and provide advice regarding the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors as well as other functions stipulated in the Articles of Association as well as the laws and regulations.

In fulfilling their duties and responsibilities, the Board of Commissioners must act independently and ensure that the Bank has implemented the principles of Good Corporate Governance (GCG) at every level of the organization according to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.

Supervision mechanism carried out, among others, through the discussion of performance and issues on a regular basis with the Directors and/or executive officials, conduct work visits to work units to obtain and know directly the performance and business activities, supervision in terms of improving GCG infrastructure and management risks, constraints and problems faced by work units within the Business Entity. In carrying out their duties, the Board of Commissioners is responsible to the GMS. The responsibility of the Board of Commissioners to the GMS is a manifestation of the accountability of supervision over the management of the Business Entity in the context of implementing GCG principles.

TOTAL MEMBERS AND COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS

In 2019, there was a change in the composition of the Bank's Board of Commissioners. Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 19, 2019, with consideration to expand the supervisory function of the Board of Commissioners under conditions of increasing complexity, volume and business growth. The meeting agreed to increase the number of members of the Board of Commissioners from 4 (four) people to 6 (six) people with the following composition:

Period of January 1st, 2019 to June 19th, 2019

Name	Position	Date of GMS Appointment	Date of Passing the Fit-and-Proper Test	Periode Jabatan
Akhmad Sukardi	President Commissioner	GMS on February 20, 2018	February 9, 2018	2018 - 2021
Rudi Purwono	Independent Commissioner	GMS on June 24, 2016	September 16, 2018	2018 - 2021

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan RUPS	Lulus Fit and Proper Test	Periode Jabatan	Name	Position	Date of GMS Appointment	Date of Passing the Fit-and-Proper Test	Periode Jabatan
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	RUPS 20 Februari 2018	21 September 2018	2018 - 2022	Candra Fajri Ananda	Independent Commissioner	GMS on February 20, 2018	September 21, 2018	2018 - 2022
Budi Setiawan	Komisaris	RUPS 20 Februari 2018	9 Agustus 2018	2018 - 2022	Budi Setiawan	Commissioner	GMS on February 20, 2018	August 9, 2018	2018 - 2022
Heru Tjahjono	Komisaris	RUPSLB 19 Juni 2019	14 Oktober 2019	2019-2023	Heru Tjahjono	Komisaris	GMS 19 Juni 2019	14 Oktober 2019	2019-2023
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	RUPSLB 19 Juni 2019	14 Oktober 2019	2019-2023	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	GMS 19 Juni 2019	14 Oktober 2019	2019-2023

Keterangan *)

dinyatakan efektif tanggal 14 Oktober 2019 setelah mendapat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Note *)

declared effective on October 14, 2019 after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) for the result of Fit-and-Proper Test

KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan Dewan Komisaris tersebut telah melalui proses rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank telah memenuhi ketentuan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016) antara lain:

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
- Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia;
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama;
- Anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan sesuai dengan ketentuan Tata Kelola Perseroan yang isinya antara lain menyatakan atau mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - Tidak merangkap jabatan, kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum, yakni hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan:
 - pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
 - menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba
 - Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik secara vertikal maupun horizontal dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
 - Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
 - Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS; dan

BOARD OF COMMISSIONERS CRITERIA

The appointment of the Board of Commissioners has gone through a recommendation process from the Remuneration and Nomination Committee. The number and composition of the Bank's Board of Commissioners have complied with the provisions (Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016) including:

- The number of members of the Board of Commissioners is at least 3 (three) people or at most the same as the number of members of the Board of Directors and 50% of the total members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners;
- All members of the Board of Commissioners of the Bank domiciled in Indonesia;
- The Board of Commissioners is led by the President Commissioner;
- Members of the Board of Commissioners make statements in accordance with the provisions of Corporate Governance, the contents of which include stating or disclosing the following matters:
 - Does not hold concurrent positions, except for matters that have been stipulated in the provisions of the Financial Services Authority regarding Corporate Governance Implementation for Commercial Banks, i.e. can only hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers who carry out supervisory functions:
 - in 1 (one) non-bank subsidiary company which is controlled by the Bank;
 - carry out functional tasks of the Bank's shareholders in the form of legal entity in the Bank's business group; and/or
 - hold positions in non-profit organizations or institutions
 - Does not have financial and family relations up to the second degree both vertically and horizontally with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors;
 - Not using the Bank for personal, family and/or other parties' interests that can harm or reduce the Bank's profits;
 - Not taking and/or receiving personal benefits from the Bank other than remuneration and other facilities determined based on the GMS; and

- Jumlah kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

- Number of shares ownership that reaches 5% (five percent) or more, both at the Bank and at the Bank and other companies, domiciled inside and outside the country.

INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali dan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris senantiasa mengedepankan serta menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugasnya, mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri dan tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Komitmen ini selaras dengan yang telah diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

INDEPENDENCY OF BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS

All currently serving members of the Board of Commissioners do not have family relations up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners, Directors and controlling shareholders. The majority of the members of the Board of Commissioners do not have financial relations with the Controlling Shareholders and all members of the Board of Commissioners do not have financial relations with fellow members of the Board of Commissioners and Directors.

The Board of Commissioners always prioritizes and upholds the principle of independence in carrying out their duties, prioritizing the interests of the Bank over their own interests and maintaining that the implementation of their duties cannot be influenced by any party. This commitment is in line with those stipulated in the Board of Commissioners Charter.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris No. 057/01/DK/KEP tanggal 31 Mei 2018 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Pedoman tata tertib kerja dievaluasi secara berkala dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel.

Dasar penyusunan Pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris adalah Anggaran Dasar Bank, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, dan peraturan lainnya.

Pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris Dewan Komisaris Bank Jatim terakhir diperbaharui pada 31 Mei 2018. Adapun isi dari pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal antara lain :

- *Governance Structure :*
 - Komposisi Dewan Komisaris
 - Kriteria Dewan Komisaris
 - Masa Jabatan
 - Tugas, Kewajiban, Wewenang, Tanggung Jawab, Larangan
 - Organisasi
- *Governance Process*
 - Pembagian Kerja
 - Waktu Kerja
 - Etika Kerja
 - Mekanisme Pengawasan

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

The Board of Commissioners has the Board of Commissioners No. 057/01/DK/KEP dated May 31, 2018 concerning the Board of Commissioners Charter. Work guidelines are evaluated periodically and updated with reference to applicable rules and regulations.

The Board of Commissioners Charter is binding for each member of the Board of Commissioners so that the Board of Commissioners can carry out their supervisory functions efficiently, effectively, transparently, independently, and accountably.

The basis for the preparation of the Board of Commissioners' Charter is the Bank's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Financial Services Authority Regulations and OJK Circular on the application and organs of Corporate Governance, and other regulations.

The Board of Commissioners Charter of Bank Jatim were last updated on May 31, 2018. The contents of Board of Commissioners Charter regulate the following matters:

- *Governance Structure:*
 - Board of Commissioners Composition
 - Board of Commissioners Criteria
 - Term of Office
 - Duties, Obligations, Authority, Responsibilities, Prohibitions
 - Organization
- *Governance Process*
 - Division of work
 - Working time
 - Work Ethics
 - Supervision Mechanism

- Rapat Dewan Komisaris
- Alur & Mekanisme Kerja
- *Governance Outcome*
 - Laporan
 - Sarana Korespondensi
 - Distribusi Surat

- Board of Commissioners Meeting
- Workflow & Mechanism
- Governance Outcome
 - Report
 - Means of Correspondence
 - Letter Distribution

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi;
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS antara lain :
 - Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
 - Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;
 - Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan serta komitmen kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjianMenyusun pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing Anggota Dewan Komisaris ;
4. Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme *peer review* terhadap kinerja Dewan Komisaris;
5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS;
6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif melalui Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, terkait pelaksanaan implementasi GCG;
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF COMMISSIONERS

1. The Board of Commissioners is tasked with supervising the policies and processes of management in general, both regarding the Company and the Company's business, and providing advice to the Directors;
2. Members of the Board of Commissioners must carry out their duties and responsibilities in good faith, with full responsibility and prudent principle;
3. Perform tasks specifically given to them according to the Articles of Association, laws and/or resolutions of the GMS, among others:
 - The Board of Commissioners is obliged to ensure the implementation of Good Governance in every business activity of the Bank at all levels of the organization;
 - Approve and evaluate Risk Management policies;
 - Evaluate the accountability of the Board of Directors for the implementation of Risk Management policies;
 - Evaluate and decide Board of Directors' requests related to transactions that require the approval of the Board of Commissioners;
 - Supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors;
 - Supervise the implementation of the Company's Compliance Function on regulations of Bank Indonesia/Financial Services Authority and statutory regulations and commitments to Bank Indonesia/ Financial Services Authority and other parties in accordance with statutory regulations and/or agreements. Distributing duties among the members of Board of Commissioners in accordance with the expertise and experience of each Member of the Board of Commissioners;
4. Prepare work programs and performance targets for the Board of Commissioners each year as well as a peer review mechanism on the performance of the Board of Commissioners;
5. Be responsible for the implementation of the duties of the Board of Commissioners to the GMS;
6. Conduct active supervision through Board of Commissioners Meetings and/or Joint Meetings with Board of Directors, in relation to the implementation of GCG;
7. Each member of the Board of Commissioners is jointly and collectively liable for the Company's losses caused by errors or negligence of the members of the Board of Commissioners in carrying out their duties, unless the member of the Board of Commissioners concerned can prove:
 - The loss is not due to an error or negligence;
 - Has conducted supervision in good faith, full of responsibility, and prudently for the interests and in accordance with the aims and objectives of the Company;

- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 - Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.
8. Dewan Komisaris secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
 9. Dewan Komisaris berhak Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala hal yang menyangkut pengelolaan Perseroan dan mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 10. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 11. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya;
 12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 13. Dewan Komisaris dapat Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS UTAMA

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum) disebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Fungsi Komisaris Utama dalam *Governance process* tidak lain sebagai koordinator atas organ Dewan Komisaris secara keseluruhan, karena pada dasarnya hubungan antar anggota Dewan Komisaris adalah sejajar dan bersifat majelis, sehingga tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Secara umum tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat.
3. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
4. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF PRESIDENT COMMISSIONER

In accordance with the Regulation of Financial Services Authority (POJK No. 55/POJK.03/2016 regarding Implementation of Governance for Commercial Banks), it is stated that the Board of Commissioners must be led by the President Commissioner.

The function of the President Commissioner in the Governance process is none other than the coordinator of the Board of Commissioners' organs as a whole, as essentially the relationship between the members of the Board of Commissioners is equal and in the nature of an assembly; hence, they cannot act individually but based on the Board of Commissioners' decision. In general, the duties and responsibilities of the President Commissioner are as follows:

1. Coordinate the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
2. Propose to hold a Board of Commissioners Meeting, including the agenda of the Meeting.
3. Summons and chair the Board of Commissioners' meeting.
4. Submit the supervisory report to obtain the approval of the Annual GMS for the implementation of the duties and supervision of the Board of Commissioners.

5. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.
6. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
 - Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris;
 - Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti;
 - Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif;
 - Setiap Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris, dan
 - Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat dalam notulen.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris.
9. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris, dari waktu ke waktu.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan Dewan Komisaris Terhitung sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK atau pada saat penutupan RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke-4 sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantian lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku serta dinilai dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

PEMBIDANGAN TUGAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Sesuai kompetensi dan bidangnya masing-masing, beberapa anggota Dewan Komisaris juga merangkap sebagai Ketua dan/atau anggota Komite-Komite yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Komite	Keanggotaan Komite oleh Anggota Dewan Komisaris
Komite Audit	Rudi Purwono (Ketua) Candra Fajri Ananda (Anggota) Muhammad Mas'ud (Anggota)
Komite Pemantau Risiko	Muhammad Mas'ud (Ketua) Rudi Purwono (Anggota) Candra Fajri Ananda (Anggota)

5. Ensure that the implementation of the responsibilities of the Board of Commissioners has been carried out according to procedures.
6. Ensure that meetings of the Board of Commissioners make decisions effectively based on true and complete information, including ensuring that:
 - All strategic and important issues are taken into consideration by the Board of Commissioners;
 - All existing problems are discussed carefully and thoroughly;
 - All members of the Board of Commissioners are given the opportunity to contribute effectively;
 - Each Commissioner receives relevant information in a timely manner, including a brief explanation of the issues that will be discussed at the Board of Commissioners' meeting, and
 - Meetings of the Board of Commissioners produce clear decisions and are recorded in minutes.
7. Ensure that the Board of Commissioners behaves in accordance with applicable regulations.
8. Lead efforts to meet the development needs of the Board of Commissioners.
9. Perform other responsibilities assigned by the Board of Commissioners, from time to time.

TERM OF OFFICE OF BOARD OF COMMISSIONERS

The term of office of the Board of Commissioners is calculated since their passing of fit-and-proper test by the OJK or since the closing of the appointment GMS until the closing of the 4th Annual GMS since the date of his appointment, or after their successor passes the fit-and-proper test by the Financial Services Authority, and may be reappointed for the second term of office, after taking into account the applicable provisions of the Financial Services Authority and deemed to be able to carry out their functions properly, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.

DISTRIBUTION OF DUTIES OF BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS

In accordance with their respective competencies and fields, several members of the Board of Commissioners also concurrently serves as Heads and/or members of Committees established to assist the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

Committee	Members of Committee from the Board of Commissioners
Audit Committee	Rudi Purwono (Head of Committee) Candra Fajri Ananda (Member of Committee) Muhammad Mas'ud (Member of Committee)
Risk Monitoring Committee	Muhammad Mas'ud (Head of Committee) Rudi Purwono (Member of Committee) Candra Fajri Ananda (Member of Committee)

Komite Remunerasi & Nominasi	Candra Fajri Ananda (Ketua)
	Rudi Purwono (Anggota)
	Akhmad Sukardi (Anggota)
	Muhammad Mas'ud (Anggota)
	Heru Tjahjono (Anggota)
	Budi Setiawan (Anggota)

Remuneration and Nomination Committee	Candra Fajri Ananda (Head of Committee)
	Rudi Purwono (Member of Committee)
	Akhmad Sukardi (Member of Committee)
	Muhammad Mas'ud (Member of Committee)
	Heru Tjahjono (Member of Committee)
	Budi Setiawan (Member of Committee)

PENILAIAN ATAS KINERJA MASING-MASING KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2019 komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif serta bekerja dengan independen dan memberikan masukan/rekomendasi yang bermanfaat bagi Dewan Komisaris.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF EACH COMMITTEE UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BASIS OF ASSESSMENT

In order to enhance the role of the Board of Commissioners in carrying out the supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) committees, namely the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, and the Risk Monitoring Committee. The Board of Commissioners annually assesses the effectiveness of the performance of the committees under the Board of Commissioners. The Board of Commissioners considers that during 2019 the committees have carried out their duties and responsibilities quite effectively and independently by giving suggestion/recommendation for The Board of Commissioners.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Pedoman & Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank Jatim telah mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris yaitu anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

1. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank
2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan

CONCURRENT POSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS

Charter of Board of Commissioners of Bank Jatim has regulated the provisions concerning concurrent positions of the Board of Commissioners, namely members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:

1. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Executive Officers of financial institutions or financial companies, both banks and non-banks;
2. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners or Executive Officers of more than 1 (one) non-financial institution or non-financial company, both domestic and abroad;
3. Other positions that may lead to a conflict of interest and/or other position in accordance with the rules and regulations.

BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2019, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Bank Jatim.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab setiap Dewan Komisaris Bank Jatim harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Seluruh anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam Pedoman & Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

CONFLICT OF INTERESTS OF BOARD OF COMMISSIONERS

In 2019, the Bank ensured that all members of the Board of Commissioners did not have a conflict of interest or a potential conflict of interest against Bank Jatim.

In carrying out their duties, authority, obligations, and responsibilities, each member of Board of Commissioners must always refer to their position's code of conduct and ethics. All members of the Board of Commissioners must avoid potential conflicts of interest or always place themselves not in the potential for conflicts of interest in any situation as stated in the Board of Commissioners' Charter.

In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners are prohibited from taking actions that could harm or reduce the Bank's profit and must disclose the potential conflict of interest referred to in each decision.

MEKANISME PEMILIHAN DAN/ATAU PENGANTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Bank telah memiliki kebijakan terkait pemilihan/pengantian Dewan Komisaris nomor 057/182/DIR/HRC/KEP yaitu Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) tentang Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Pengantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.

Kebijakan ini disusun bertujuan untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko serta sebagai pedoman dalam proses pemilihan/pengantian Anggota Dewan Komisaris/Direksi.

FOKUS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

Dewan Komisaris menyusun fokus pengawasan dan rencana kerja sebagai panduan yang disepakati bersama dan menjadi dasar penyusunan agenda rapat Dewan Komisaris serta rapat gabungan bersama Direksi. Sepanjang tahun 2019, rapat Dewan Komisaris telah menghasilkan rekomendasi dan masukan mengenai berbagai aspek bisnis dan pendukung bisnis Bank. Perhatian utama tetap diberikan pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan atas semua ketentuan yang berlaku.

Fokus pengawasan Dewan Komisaris yang mencakup beberapa aspek penting di tahun 2019, meliputi:

1. Menganalisis, memberi masukan, dan bersama sama Direksi menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) termasuk melakukan pengkajian dan persetujuan revisi RBB untuk disampaikan kepada OJK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan OJK yaitu bulan November untuk penyampaian RBB tahun yang akan datang dan bulan Juni untuk revisi RBB tahun berjalan.
2. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan kajian atas kinerja keuangan Bank, dalam setiap Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Komite-Komite juga mengundang direktorat terkait untuk menyampaikan kinerja masing-masing.
3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal maupun regulator.
4. Dewan Komisaris telah melakukan *review* atas Laporan Pengawasan setiap semester, Laporan *Assessment* GCG, transaksi pihak terkait dan menyetujui beberapa kebijakan internal yang memerlukan persetujuan hingga tingkat Dewan Komisaris
5. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kajian dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dalam pencalonan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi termasuk perubahan-perubahan yang terkait dengan kebijakan remunerasi dan kompensasi untuk pengurus.

MECHANISM OF APPOINTMENT AND/ OR REPLACEMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS

The Bank has a policy related to the appointment/replacement of the Board of Commissioners under regulation No. 057/182/DIR/HRC/KEP, namely the Implementation Manual (BPP) on the System and Procedure for the Appointment and/or Replacement of Members of Board of Commissioners and Board of Directors.

This policy is drafted with the aim of ensuring the implementation of good corporate governance and risk management as well as guidance in the process of appointing/replacing members of the Board of Commissioners/Board of Directors.

FOCUS OF SUPERVISION OF BOARD OF COMMISSIONERS IN 2019

The Board of Commissioners sets the focus of supervision and work plans as guidelines that have been mutually agreed upon and forms the basis for preparing the agenda of the Board of Commissioners' meetings and joint meetings with the Board of Directors. Throughout 2019, the Board of Commissioners' meeting produced recommendations and input on various aspects of the business and business support of the Bank. The main attention is still given to the achievement of business targets by paying attention to risk management with the principle of prudence and compliance with all applicable regulations.

The Board of Commissioners' oversight focus covers several important aspects in 2019, including:

1. Analyze, provide input, and, together with the Board of Directors, approve the Bank's Business Plan (RBB) including reviewing and approval of the revised RBB to be submitted to the OJK in accordance with the time set by the OJK, which is November for the submission of the next year's RBB and June for RBB revision of the current year.
2. Periodically, the Board of Commissioners conducts a review of the Bank's financial performance at each Board of Commissioners and/or Committee Meeting, which also invites the relevant directorates to submit their respective performance.
3. Ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Work Unit, including improvements to the findings of the examination of external auditors and regulators.
4. Review the Supervision Report every semester, GCG Assessment Report, and related party transactions, and approve several internal policies that require approval up to the Board of Commissioners level
5. Approve the review and recommendation of the Nomination and Remuneration Committee in nominating members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and independent parties who will become members of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee and Integrated Governance Committee including changes related to remuneration and compensation policies for management.

6. Terkait Sumber Daya Manusia, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi memantau kebijakan manpower dan fungsi manajemen sumber daya manusia yang mengandung risiko dan berdampak signifikan pada Bank, serta pengawasan dalam penerapan manajemen risiko terkait tenaga alih daya.
7. Melalui Komite Audit melakukan *review* atas laporan keuangan mencakup penyajian laporan keuangan, perlakuan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, *review* atas kecukupan laporan publikasi dan pelaporan kepada otoritas, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank.
8. Memantau serta mengevaluasi perkembangan pengembangan serta pengelolaan sumber daya manusia.
9. Fungsi pengasawan risiko, telah ditindak lanjuti melalui Komite Pemantau Risiko yang memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan Manajemen Risiko.
10. Menelaah dan memantau pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap profil risiko, GCG, rentabilitas dan permodalan
11. Melakukan *Review* dan Evaluasi Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
12. Melakukan pemantauan secara aktif atas upaya perbaikan dan penanganan kredit bermasalah.

6. Regarding Human Resources, the Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, monitors manpower policies and human resource management functions that contain risks and have a significant impact on the Bank, as well as supervision in the application of risk management related to outsourcing.
7. Through the Audit Committee, the Board of Commissioners conducts a review of the financial statements including the presentation of financial statements, accounting treatment and compliance with generally accepted accounting principles, a review of the adequacy of publication and reporting reports to the authorities, and evaluates the implementation of the compliance function at the Bank.
8. Monitor and evaluate the development of human resources.
9. Ensure that the function of risk mitigation has been followed up through the Risk Monitoring Committee which provides recommendations to the Board of Commissioners in order to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners relating to Risk Management.
10. Review and monitor the implementation of Bank's Soundness Level assessment using a Risk-Based Bank Rating with the scope of the assessment of the risk profile, GCG, profitability, and capital adequacy
11. Conduct a Review and Evaluation of the Audit Implementation by the Public Accounting Firm (KAP)
12. Perform active monitoring on the efforts to improve and handle problem loans.

KOMISARIS INDEPENDEN

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Bank Jatim tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai keberadaan Komisaris Independen di Bank. Komisaris Independen Bank ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2019, jumlah Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah sebanyak 3 (tiga) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang atau memiliki komposisi 50 % dari total anggota Dewan Komisaris..

Kriteria penentuan Komisaris Independen Bank Jatim diatur dalam anggaran dasar dan dalam pedoman pelaksanaan Dewan Komisaris Bank Jatim yang disesuaikan sebagaimana aturan yang berlaku diantaranya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, antara lain dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

INDEPENDENT COMMISSIONERS

CRITERIA FOR INDEPENDENT COMMISSIONER DETERMINATION

Bank Jatim is subject to regulations issued by regulators regarding the existence of Independent Commissioners in the Bank. The Bank's Independent Commissioners are appointed at least 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Commissioners. In 2019, there is 3 (three) Independent Commissioners in PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur from 6 (six) person of Board of Commissioners or it has 50% composition from the total of The Board of Commisioners

The criteria for determining the Independent Commissioner of Bank Jatim are regulated in the articles of association and in the guidelines for the implementation of the Board of Commissioners of Bank Jatim that are adjusted according to the applicable rules including Circular Letter of the Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 regarding Governance Implementation for Commercial Banks and Regulation of Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, among others it is explained that Independent Commissioners must meet the following requirements:

1. Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
4. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Memenuhi persyaratan Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif, menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas serta *stakeholders* lainnya.

Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Perseroan, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan.

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEI sejak tanggal 20 Juli 2001 mengenai beberapa kriteria tentang Komisaris Independen yang juga digunakan Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau Pemegang Saham Pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan yang tercatat bersangkutan.
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan Direktur dan/atau Komisaris lainnya Perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Aturan lain yang mengatur adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang mengatur bahwa Komisaris Independen

1. Have no financial relationship, management relationship, share ownership relationship, family relations with other members of the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, which can affect their ability to act independently.
2. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of Issuers or Public Companies within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioners of Issuers or Public Companies in the following period.
3. Have no shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company.
4. Have no affiliation relationship with Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of Issuers or Public Companies.
5. Meet the requirements of the Independent Commissioners as stipulated in the applicable regulations.
6. Do not have business relations, directly or indirectly, that are related to the business activities of the Issuer or Public Company.

The presence of an Independent Commissioner is intended to be able to encourage the creation of an objective climate and work environment, placing fairness and equality among various interests, including the interests of minority shareholders and other stakeholders.

Independent Commissioner must be free from conflicts of interest. In order to support the implementation of the Company's GCG, shareholders in the GMS determine the Independent Commissioners with the number and requirements as stipulated in the laws and regulations to carry out supervisory duties towards the Bank.

The presence of Independent Commissioners has been regulated by the Indonesia Stock Exchange through IDX regulations since July 20, 2001. Several criteria regarding the Independent Commissioners referred to by the Company are as follows:

1. The Independent Commissioner has no affiliation with the majority shareholders or controlling shareholders of the listed company concerned.
2. Independent Commissioners do not have a relationship with the Board of Directors and/or other Commissioners of the listed company concerned.
3. The Independent Commissioner does not have a concurrent position at another company which is related to the listed company concerned.
4. Independent Commissioners must understand the laws and regulations in the capital market.

Another governing regulation is the Regulation of Financial Services Authority No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment of Work Guidelines of Audit Committee which stipulates that Independent

wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

PERNYATAAN TENTANG INDEPENDENSI Masing-masing KOMISARIS INDEPENDEN

Masing-masing Komisaris Independen Bank, yaitu: Bapak Candra Fajri Ananda, Bapak Rudi Purwono, Bapak Muhammad Mas'ud, telah membuat Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada OJK.

Pernyataan Independensi	Anggota Komisaris Independen		
	Candra Fajri Ananda	Rudi Purwono	Muhammad Mas'ud
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√

Commissioners must fulfill the requirements as stipulated in POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company.

INDEPENDENCY STATEMENT OF EACH INDEPENDENT COMMISSIONER

Each Independent Commissioner of the Bank, namely: Mr. Candra Fajri Ananda, Mr. Rudi Purwono, and Mr. Muhammad Mas'ud, have made an Independent Statement and have been submitted to the OJK.

Independency Statement	Members of Independent Commissioner		
	Candra Fajri Ananda	Rudi Purwono	Muhammad Mas'ud
Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period.	√	√	√
Do not have shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company.	√	√	√
Have no affiliation relationship with Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Issuer or Public Company.	√	√	√
Does not have a business relationship, directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company.	√	√	√

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS 2019

Sepanjang Tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dilakukan antara lain melalui rapat Dewan Komisaris, rapat bersama Direksi, Rapat dengan mengundang Direktur Bidang/Unit kerja terkait serta melalui evaluasi dan rapat-rapat Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2019 antara lain meliputi:

1. Melakukan evaluasi dan persetujuan Rencana Korporasi & Rencana Bisnis serta melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian Rencana Bisnis;
2. Melakukan evaluasi terhadap Kinerja Keuangan Konsolidasi Bank Jatim secara berkala;
3. Melakukan *review* dan Evaluasi Pelaksanaan Audit 3 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
4. Pengawasan terhadap Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yakni membahas dan mengkaji kecukupan perencanaan dan pelaksanaan audit oleh Divisi Audit Intern serta terpenuhinya jumlah dan kompetensi Auditor yang memadai;
5. Mendorong dan memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan audit intern maupun ekstern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk keandalan pelaporan keuangan;
6. Menelaah dan memantau pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap profil risiko, GCG, rentabilitas dan permodalan;
7. Melakukan fungsi pengawasan terhadap Manajemen Risiko;
8. Melakukan pengawasan terhadap fungsi kepatuhan serta melakukan *review* atas Laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan;
9. *Review* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)/Tata Kelola;
10. Memantau dan mengevaluasi kebijakan Direksi;
11. Memantau serta mengevaluasi perkembangan pengembangan serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
12. Melakukan *Self Assessment* yaitu melakukan penilaian efektivitas implementasi GCG Dewan Komisaris termasuk Komite-komite di bawah Dewan Komisaris;
13. Melakukan *review* remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta melakukan pemantauan terhadap sistem remunerasi pegawai;

IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES IN 2019

Throughout 2019, the Board of Commissioners has carried out their duties, obligations and responsibilities in order to oversee the management policies and the management of the Company in accordance with the prevailing laws and regulations. The implementation of the Board of Commissioners' tasks is carried out among others through Board of Commissioners meetings, joint meetings with Directors, Meetings by inviting relevant Directors/Work Units as well as through evaluations and meetings of Committees under the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners' duties in 2019 include the following:

1. Evaluating and approving the Corporate Plan & Business Plan and conduct supervision of the process of achieving the Business Plan;
2. Evaluating the Consolidated Financial Performance of Bank Jatim on a regular basis;
3. Reviewing and evaluating Audit Implementation 3 by the Public Accounting Firm (KAP);
4. Supervising Internal Audit Work Unit (SKAI), namely discussing and reviewing the adequacy of the audit planning and implementation by the Internal Audit Division as well as fulfilling the adequate number and competence of the Auditors;
5. Encouraging and monitoring the completion of the follow-up of internal and external audit results in order to assess the adequacy of internal control including the reliability of financial reporting;
6. Reviewing and monitoring the implementation of the Bank's Health Level assessment using a Risk-Based Bank Rating with the scope of the assessment of the risk profile, GCG, profitability and capital;
7. Performing a supervisory function on Risk Management;
8. Supervising the compliance function and reviewing the Compliance function implementation report and the Compliance Director's duties;
9. Reviewing the Implementation of Good Corporate Governance (GCG);
10. Monitoring and evaluating Board of Directors' policies;
11. Monitoring and evaluating the development and management of Human Resources (HR);
12. Conducting a Self-Assessment, namely assessing the effectiveness of GCG implementation of the Board of Commissioners including Committees under the Board of Commissioners;
13. Reviewing the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as monitoring the employee remuneration system;

14. Melakukan pemantauan secara aktif atas upaya perbaikan dan penanganan kredit bermasalah; Evaluasi dan monitoring atas kebijakan dalam penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun yang tergolong besar/*Large Exposure*; serta
15. Program kerja lainnya yang masih menjadi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

14. Conducting active monitoring of efforts to improve and handle problem loans; Evaluating and monitoring policies in implementing the provision of funds to related parties or those classified as *Large Exposure*; and
15. Conducting other work programs that are part of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kebijakan dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris ditentukan dan disepakati oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris. Pada tahun 2019 Dewan Komisaris menyepakati untuk melaksanakan penilaian kinerja secara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan..

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS

The policies and procedures for carrying out the performance assessment of the Board of Commissioners are determined and agreed upon by the Board of Commissioners in the Board of Commissioners' Meeting. In 2019 the Board of Commissioners agreed to carry out a self-assessment of performance assessments determined by considering its duties and obligations in accordance with the Company's Articles of Association and laws and regulations.

KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Adapun kriteria yang akan digunakan dalam penilaian/ evaluasi kinerja Dewan Komisaris antara lain :

1. Pengawasan Pasif Dewan Komisaris, meliputi :
 - Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait hasil *review* laporan/dokumen seperti laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan Audit Internal, Laporan profil risiko, laporan kepatuhan, dan laporan hasil *self assessment*.
2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, meliputi :
 - Jumlah rapat, keikutsertaan dalam evaluasi kinerja cabang, dan kunjungan kerja ke cabang-cabang.

PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA FOR BOARD OF COMMISSIONERS

The criteria to be used in assessing the performance of the Board of Commissioners include:

1. Passive Supervision of the Board of Commissioners, including:
 - Implementation of the Board of Commissioners' duties related to the results of review on reports/documents, such as financial statements, reports on the results of Internal Audit examinations, risk profile reports, compliance reports, and self-assessment report.
2. Active supervision of the Board of Commissioners, including:
 - Number of meetings, participation in evaluating branch performance, and work visits to branches.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Proses *assessment* kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap semester dan dibahas dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dengan melihat realisasi pencapaian dari masing – masing indikator penilaian.

Disamping itu Dewan Komisaris juga mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang undangan yang berlaku. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2019 dalam RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

ASSESSOR

The Board of Commissioners' performance assessment process is carried out every semester and discussed in the Board of Commissioners' Internal Meeting by observing the achievement of each of the assessment indicators.

In addition, the Board of Commissioners is also responsible for its performance to Shareholders in the GMS based on the obligations stated in the prevailing laws and regulations. The Board of Commissioners will be held accountable for their performance in the 2019 period in the Annual GMS to be held in 2020.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan dengan hasil penilaian secara kolegal pada tahun 2019 mencapai nilai 95.75 (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut :

RESULTS OF BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT IN 2019

In 2019, the Board of Commissioners performed their supervisory function well in ensuring the achievement of the Bank's performance that can meet the expectations of shareholders and all stakeholders with the results of a collegial assessment in 2019 reaching a value of 95.75 (Very Good) with the following details:

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan pasif Dewan Komisaris	Pelaksanaan <i>review</i> laporan kinerja Usaha & keuangan Bank	Dilaksanakan pada setiap rapat Dekom & Direksi sesuai target yaitu 2 bln sekali (1 tahun 6 x/3x dalam 1 semester)	<i>Review</i> Laporan kinerja usaha & keuangan dilaksanakan sebanyak 4 kali	0.66	12.5	8.25
		Pelaksanaan <i>Review</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Audit dan tindak lanjut hasil audit (Internal/Eksternal).	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target	<i>Review</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	12.5	12.5
		Pelaksanaan Hasil Penilaian <i>Self Assessment</i> Tata Kolola/GCG	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (setiap semester)	Penilaian <i>Self Assessment</i> GCG dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	12.5	12.5
		Pelaksanaan <i>Review</i> Laporan Profil Risiko,Hasil <i>Review</i> Laporan Fungsi Kepatuhan, Hasil <i>Review</i> Laporan tingkat kesehatan Bank	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target.(setiap semester)	Pelaksanaan <i>Review</i> atas Laporan Profil Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan Bank dilaksanakan setiap Semester sesuai target	1	12.5	12.5
		Sub Total					50.00
2	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Rapat Internal Dekom minimal 12 kali dalam setahun (tiap semester 6 kali rapat)	Pelaksanaan Rapat Dekom terlaksana 8 kali, Dan Rapat Dekom dengan Direksi terlaksana 11 kali	1	12.5	12.5
			Rapat Dekom dengan Direksi minimal terlaksana 6 kali dalam setahun (tiap semester 3 kali rapat)	Pelaksanaan rapat Dekom dan Direksi terlaksana 8 Kali	1	12.5	12.5
		Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang dan unit kerja	Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang-cabang/unit kerja (Setiap triwulan)	Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja cabang/unit kerja terlaksana sesuai target	1	15	15
		Kunjungan ke cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Minimal 3 x dalam setahun	Pelaksanaan Kunjungan ke cabang terlaksana sesuai target	1	10	10
		Sub Total					50.00
TOTAL						100.00	95.75

INDIKATOR PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Total Penilaian	Keterangan
Nilai 80 - 10	Sangat Baik
Nilai 70 - < 80	Baik
Nilai 55 - < 70	Cukup Baik
Nilai < 55	Kurang Baik

Aspect	Indicator	Target	Realization	Score	Value (%)	Final Score
Passive supervision of Board of Commissioners	Implementation of a review of the Bank's business & financial performance report	Held at each Board of Commissioners & Board of Directors meeting on target, which is 2 months (once a year 6x/3x in 1 semester)	Review of business & financial performance reports carried out 4 times	0.66	12.5	8.25
	Implementation of Review Reports on Audit Inspection Results and follow-up on audit results (Internal/External).	Implemented according to the provisions and on time according to the target	Review of Audit Reports Internal and external audits are carried out in accordance with the provisions and on time as targeted	1	12.5	12.5
	Implementation of the Result of the GCG Self-Assessment	Implemented according to the provisions and on time according to the target. (every semester)	GCG Self-Assessment is carried out every Semester in accordance with the provisions and on time on target	1	12.5	12.5
	Implementation of Risk Profile Report Review, Compliance Function Report Review Results, Review Report on Bank soundness level	Implemented according to the provisions and on time according to the target. (Every semester)	The Review of the Risk Profile and Compliance Function Report and the Bank's soundness level are conducted every Semester according to the target	1	12.5	12.5
Sub Total					50.00	45.75
Active supervision of Board of Commissioners	Number of Meetings	Internal Meetings of Board of Commissioners at least 12 times a year (6 meetings in every semester)	The Board of Commissioners Meeting was held 8 times, and the Meeting with the Board of Directors was held 11 times	1	12.5	12.5
		The Board of Commissioners' meeting with the Board of Directors is held at least 6 times a year (3 meetings in every semester)	The Board of Directors and Board of Directors meetings were held 8 times	1	12.5	12.5
Active supervision of Board of Commissioners	Following the performance evaluation of branch and work unit performance	Participate in the performance evaluation of branches/work units (quarterly)	The performance evaluation of branch/work unit performance is carried out according to the target	1	15	15
	Visit to the branch in order to carry out the supervisory function	At least 3 times a year	Visit to branch is carried out according to target	1	10	10
Sub Total					50.00	50.00
TOTAL					100.00	95.75

PERFORMANCE ASSESSMENT INDICATORS OF BOARD OF COMMISSIONERS

Total Assessment	Description
Score of 80 - 10	Excellent
Score of 70 - < 80	Good
Score of 55 - < 70	Average
Score of < 55	Poor

Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil langkah perbaikan dalam peningkatan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, serta merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan untuk menyusun struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris.

Selain melakukan penilaian secara *self assessment*, sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan perundangan yang berlaku Dewan Komisaris juga wajib menyampaikan Laporan Pengawasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk disahkan.

LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris adalah sekurang-kurangnya antara lain :

1. Pelaksanaan tugas dan kegiatan beserta Komite-Komitennya sesuai Peraturan perundangan.
2. Komitmen dalam pencapaian Rencana bisnis dan memajukan Perseroan.
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan.

DIREKSI

Dalam pengelolaan Perseroan, Direksi Bank Jatim mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 057/206/DIR/CSE/KEP tanggal 7 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Nomor 056/006/DIR/CSE/KEP Tanggal 17 Januari 2017 Tentang Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, yang dalam hal ini Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

HAK DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

HAK UMUM DIREKSI

1. Anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang ketentuan tentang besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan wewenang RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank dengan melaporkan kepada komisaris.

The results of the performance assessment of the Board of Commissioners are taken into consideration to take corrective steps in improving the performance of members of the Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners, and are one of the basic considerations for the Nomination and Remuneration Committee in providing recommendations to reappoint members of the Board of Commissioners and to prepare remuneration structure for the Board of Commissioners.

In addition to conducting a self-assessment, in accordance with the Limited Liability Company Law and the prevailing laws and regulations, the Board of Commissioners is also required to submit a Supervision Report to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval.

BOARD OF COMMISSIONERS' SUPERVISORY REPORT

The Board of Commissioners' Supervisory Report at least includes:

1. Implementation of duties and activities along with those of the Committees in accordance with the prevailing laws and regulations.
2. Commitment to achieving business plans and advancing the Company.
3. Compliance with the laws and regulations and Company's policies.

BOARD OF DIRECTORS

In managing the Company, the Board of Directors of Bank Jatim refers to the Decree of Board of Directors No. 057/206/DIR/CSE/KEP dated June 7, 2018 concerning the Third Amendment to the Decree of Board of Directors of PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk and No. 056/006/DIR/CSE/KEP dated January 17, 2017 regarding Work Guidelines of Board of Directors of PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk. In this case, the Board of Directors is the organ of the Company authorized and responsible for carrying out all actions relating to the management and ownership of the Bank for the Banks interests in accordance with the aims and objectives of the Bank.

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF DIRECTORS

GENERAL RIGHTS OF BOARD OF DIRECTORS

1. Members of the Board of Directors are given a salary including the facilities and/or allowances. The amount of salary along with the facilities and/or allowances of members of the Board of Directors is determined based on the resolution of the GMS and the authority of the GMS is delegated to the Board of Commissioners.
2. The Board of Directors appoints and dismisses the Bank's employees based on the Bank's employment regulations and prevailing laws and regulations.
3. The Board of Directors determines the organizational structure and work procedures of the Bank by reporting to the commissioners.

4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, akan tetapi dalam hal mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus mendapat persetujuan tertulis dewan komisaris..
5. Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Bank kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus di tunjuk atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Bank baik sendiri maupun bersama atau kepada orang atau badan lain.
6. Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam keputusan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Direksi dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Mengeluarkan surat-surat obligasi (vide pasal 3 ayat (2))
 - Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Bank
 - Mengikat Bank sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga
 - Menggadaikan barang-barang milik Bank
 - Penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 3 ayat (2))
 - Mendirikan unit usaha baru
8. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
9. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota direksi, maka perseroan akan diwakili oleh anggota direksi lainnya dan dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota direksi, maka dalam hal ini perseroan diwakili oleh komisaris.
10. Melakukan hapus tagih sesuai ketentuan peraturan perundangan dan mendapat persetujuan RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris (vide pp33 tahun 2006)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan emiten, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

4. The Board of Directors has the right to represent the company, both inside and outside the court on all matter, bind the company with other parties and vice versa, conduct out all actions in every event, but as for establishing a new business or participating in another company both at domestic and abroad scale required to get the Board of Commissioner's written approval.
5. The Board of Directors in writing may hand over the power of representing the Bank to a person or several members of the Board of Directors specifically appointed or to one or more Bank employees, either alone or together or to another person or entity.
6. The rules and procedures for carrying out the work of the Board of Directors are regulated in the decisions of the Board of Commissioners in accordance with the applicable laws and regulations.
7. The Board of Directors based on applicable legislation can do the following:
 - Issue bonds (vide article 3 paragraph (2))
 - Buy, sell or otherwise obtain or release rights to inventory items belonging to the Bank
 - Binding the Bank as a guarantor/guarantor of third party obligations
 - Mortgaging Bank goods
 - Equity participation in other companies insofar as they do not conflict with applicable laws and regulations (vide article 3 paragraph (2))
 - Set up new business units
8. Directors can give written authorization to 1 (one) or more employees of the Company or to others for and on behalf of the Company to carry out certain legal actions as described in the power of attorney.
9. In terms of the company has contrary interests to the personal interests of the board of directors member, then another member can represent the company. Assuming that the company has contrary interest with all member of the Board of Directors, the Board of Commissioner will serve as the representative.
10. Erase claim in accordance with statutory provisions and obtain GMS approval and the authority can be delegated to the Board of Commissioners (vide pp33 of 2006)

RESPONSIBILITIES OF BOARD OF DIRECTORS

1. The Board of Directors has the duty to carry out and be responsible for the management of the issuer or public company for the benefit of the issuer or public company in accordance with the aims and objectives of the issuer or public company stipulated in the articles of association
2. In carrying out its duties and responsibilities for the management of issuers, the Board of Directors must hold an annual GMS and other GMS as stipulated in the legislation and articles of association.

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian emiten atau perusahaan publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian emiten atau perusahaan apabila dapat membuktikan :
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik.
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

NOMENKLATUR DAN SUSUNAN DIREKSI

Bank Jatim telah melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan melalui RUPSLB yang dilaksanakan pada 19 Juni 2019 memutuskan perubahan nomenklatur jabatan Direksi Perseroan sebagai berikut :

NO	Semula	Menjadi
1.	Direktur Menengah Korporasi	Direktur Komersial dan Korporasi
2.	Direktur Manajemen Risiko	Direktur Risiko Bisnis
3	Direktur Ritel Konsumer dan Usaha Syariah	Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah
4.	Direktur Operasional	Direktur TI & Operasional
5.	Direktur Kepatuhan & Human Capital	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

3. Each member of the Board of Directors must carry out their duties and responsibilities in good faith, with full responsibility and prudence.
4. Each member of the Board of Directors is jointly and severally responsible for the loss of the issuer or public company caused by errors or negligence of the members of the Board of Directors in carrying out their duties.
5. Members of the Board of Directors cannot be held liable for the loss of the issuer or company if it can prove:
 - The loss is not due to an error or negligence.
 - Has made arrangements in good faith, full responsibility, and prudence for the interests and in accordance with the aims and objectives of the issuer or public company.
 - Do not have a conflict of interest either directly or indirectly for the management actions that result in losses and have taken action to prevent such losses arising or continuing.

NOMENCLATURE AND COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS

Bank Jatim has changed the composition of its management through the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on June 19, 2019, deciding on the nomenclature of the position of the Company's Directors as follows:

No.	From Previously	To
1	Medium Corporate Director	Commerce and Corporation Director
2	Risk Management Director	Business Risk Director
3	Retail Consumer and Sharia Business Director	Consumer, Retail, and Sharia Business Director
4	Operations Director	IT & Operations Directors
5	Compliance and Human Capital Director	Compliance & Risk Management Director

SUSUNAN DIREKSI

Susunan Direksi Bank Jatim sebagaimana Surat Perseroan Nomor 058/441/DIR/CSE/Srt tanggal 28 Oktober 2019 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama	Diangkat RUPS	Nomor & Tanggal F&P	Masa Jabatan
Direktur Utama*				
Direktur Komersial dan Korporasi	Busrul Iman	19 Juni 2019	KEP-191/D.03/2019 11 Oktober 2019	2024
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah*				
Direktur Risiko Bisnis	Rizyana Mirda	15 Juni 2017	KEP-188/D.03/2017 29 September 2017	2022
Direktur TI & Operasi	Tonny Prasetyo	19 Juni 2019	KEP-190/D.03/2019 11 Oktober 2019	2024
Direktur Keuangan	Ferdian Timur Sa-tyagraha	15 Juni 2017	KEP-232/D.03/2017 29 Desember 2017	2022
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Erdianto Sigit Cahyono	19 Juni 2019	KEP-189/D.03/2019 11 Oktober 2019	2024

*saat ini, posisi tersebut belum terisi

Jajaran Direksi yang disebutkan di atas telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 4 (empat) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Setiap Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali
5. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional dan paling rendah sebagai pejabat eksekutif Bank (Pejabat eksekutif adalah pejabat yang berada pada satu tingkat dibawah Direksi).
6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.
7. Direksi telah mengangkat Komite dibawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris.

BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

The composition of Board of Directors of Bank Jatim as stipulated in the Letter No. 058/441/DIR/CSE/Srt dated October 28, 2019, regarding Results of Fit-and-Proper Test is as follows:

Position	Name	GMS Appointment on	Number and Date of Fit-and-Proper Test	Term of Office
President Director*				
Commerce and Corporation Director	Busrul Iman	June 19, 2019	KEP-191/D.03/2019 October 11, 2019	2024
Consumer, Retail, and Sharia Business Director				
Business Risk Director	Rizyana Mirda	June 15, 2017	KEP-188/D.03/2017 September 29, 2017	2022
IT & Operations Directors	Tonny Prasetyo	June 19, 2019	KEP-190/D.03/2019 October 11, 2019	2024
Finance Director	Ferdian Timur Sa-tyagraha	June 15, 2017	KEP-232/D.03/2017 December 29, 2017	2022
Compliance & Risk Management Director	Erdianto Sigit Cahyono	June 19, 2019	KEP-189/D.03/2019 October 11, 2019	2024

*at present, the position remains vacant

The Board of Directors mentioned above has fulfilled the provisions of the Financial Services Authority and the Company's Articles of Association, including:

1. The Company is managed and led by the Board of Directors consisting of at least 4 (four) Directors, one of whom is appointed as the President Director.
2. All members of the Board of Directors reside in Indonesia.
3. Every proposal to replace and/or appoint members of the Board of Directors by the Board of Commissioners to the GMS with due regard to the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
4. Each member of the Board of Directors does not have family relations to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners and comes from an independent party to the Controlling Shareholders
5. The majority of members of the Board of Directors have at least 5 (five) years of experience in the operational field and the lowest is as an executive officer of the Bank (Executive officers are officials who are one level below the Board of Directors).
6. Members of the Board of Directors, individually or jointly, do not own more than 25% of the paid-up capital of other companies.
7. The Board of Directors has appointed Committees under the Board of Commissioners that have been formed by the Board of Commissioners.

8. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Khusus untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

KRITERIA ANGGOTA DIREKSI

Adapun persyaratan calon anggota Direksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. PERSYARATAN

- Syarat Formal

Warga Negara Indonesia yang :

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia;
- Sehat jasmani dan rohani yang didukung dengan surat keterangan dokter;
- Tidak pernah dihukum dan tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan
- tindakan tercela di bidang perbankan.
- Orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan ybs pernah :
 - Dinyatakan pailit;
 - Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara, perusahaan, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

- Syarat Material

- Memiliki kompetensi, integritas moral yang baik. Yang bersangkutan tidak pernah terlibat
 - Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengelolaan Perusahaan/ Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 - Perbuatan pidana janji sesuai komitmen yang telah disepakati dengan perusahaan/ lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
 - Perbuatan yang dikategorikan dapat memberi keuntungan secara melawan hukum di perusahaan/ lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
 - Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik);
- Memiliki keahlian di bidang perbankan atau lembaga keuangan, dibuktikan dengan rekam jejak (track record) minimal 5 (lima) tahun terakhir dan melampirkan fotocopy sertifikat dari pelatihan perbankan atau lembaga keuangan yang pernah diikuti;

8. The Board of Directors does not give general power to other parties which results in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.

Members of the Board of Directors are appointed by the GMS for a period of 5 (five) years and can be reappointed for a second term after observing the provisions of the Financial Services Authority without prejudice to the GMS' right to dismiss them at any time by stating the reasons. Specifically for the Director in charge of the Compliance Function, based on the Regulation of Financial Services Authority No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks.

CRITERIA FOR BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

The requirements for the candidates for Board of Directors are as follows:

1. REQUIREMENTS

- Formal Requirements

An Indonesian citizen who:

- Fear God Almighty;
- Faithful and obedient to the State and Government of the Republic of Indonesia;
- Not directly or indirectly involved in activities of betrayal to the Republic of Indonesia;
- Physically and mentally healthy supported by a doctor's certificate;
- Has never been sentenced and has not been revoked of his right to vote based on a court decision;
- Never carry out activities which are detrimental to the State or actions despicable act in banking.
- Individuals who are capable of taking legal actions, except within 5 (five) years prior to their appointment:
 - Declared bankrupt;
 - Become a member of the Board of Directors or Board of Commissioners found guilty of causing a company to go bankrupt;
 - Convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances, companies, and or related to the financial sector.

- Material Requirements

- Having competence, good moral integrity. He was never involved
 - Actions of engineering and deviant practices in the management of the company/institution where the person works before nominating (acting dishonestly);
 - Act of breach of promise in accordance with the commitments agreed with the company/ institution where the person works before the nomination;
 - Acts that are categorized can provide benefits against the law in the company/institution where the person works before nominating;
 - Acts that can be categorized as a violation of the provisions relating to the principles of managing a healthy company (behaving badly);
- Having expertise in the field of banking or financial institutions, as evidenced by a track record of at least the last 5 (five) years and attaching a photocopy of a certificate from banking training or financial institutions that have been followed;

- Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai pejabat eksekutif Bank
 - Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan Perseroan serta komitmen untuk mematuhi perundang-undangan
 - Tidak memiliki kredit bermasalah/kredit macet
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - Memiliki sertifikat uji kompetensi manajemen risiko level 5 (lima) dengan melampirkan sertifikat BSMR/LSPP. Bagi pejabat level 4 (empat) dapat mendaftar dan setelah disetujui RUPS harus segera menyelesaikan BSMR/LSPP level 5 (lima) untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Psikologis, yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai Direksi;
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - Pernah Tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
 - Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

Pemenuhan persyaratan wajib dimuat dalam surat pernyataan yang wajib diteliti dan didokumentasikan oleh emiten atau perusahaan publik.

- Syarat Lain
 - Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Perbankan;
 - Bukan anggota partai politik dan/atau anggota legislatif, bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
 - Berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi (untuk jabatan pertama kali);
 - Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada lembaga keuangan atau perusahaan lain yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia no.24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut apabila terpilih sebagai anggota Direksi;
 - Tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Direksi selama 2 (dua) periode berturut-turut atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan dan/atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya;
 - Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi) dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter;

- The majority of members of the Board of Directors must have at least 5 (five) years of experience in the operational field and at the lowest level as an executive officer of the Bank
 - Have a high commitment to the progress and development of the Company and a commitment to comply with the laws and regulations
 - Do not have bad credit
 - Has never been declared bankrupt or been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a Company to be declared bankrupt based on a court order within the last 5 (five) years before being nominated.
 - Have a level 5 (five) risk management competency test certificate by attaching the BSMR/LSPP certificate. Level 4 (four) officials can register and after approval by the GMS must immediately complete level 5 (five) BSMR/LSPP to obtain approval from the Financial Services Authority (OJK)
- Psychological, concerned has an adequate level of intellectual, emotional and spiritual intelligence to carry out his duties as a Director;
- Never being a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who during his tenure:
 - Never held an Annual GMS
 - Accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been received by the GMS or has not provided accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS and Never caused a company that obtained a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority to not fulfill its obligations submit annual reports and/or financial reports to the Financial Services Authority;

Compliance with the requirements must be contained in a statement that must be examined and documented by the issuer or public company.

- Other Requirements
 - Willing to comply with the provisions and regulations in force especially in the field of Banking;
 - Not a member of a political party and/or legislative member, not a candidate for head/deputy regional head and/or head/deputy regional head;
 - Aged not exceeding 58 years old when he will serve the Board of Directors (for the first time);
 - Not currently serving as an official at another financial institution or company as regulated in the Republic of Indonesia Law no.24 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning Second Amendment to Law Number 23 In 2014 about the Regional Government except signing a statement of willingness to resign from the position if elected as a member of the Board of Directors;
 - Must not hold concurrent position as a member of the Board of Directors for 2 (two) consecutive periods or another position which may lead to a conflict of interest directly or indirectly with the Company and/or that conflicts with applicable laws and regulations;
 - Having dedication and providing full time to do the work;
 - Physically and mentally healthy (not suffering from an illness that can hamper the implementation of duties as a member of the Board of Directors) by attaching a health certificate from a doctor;

- Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- Lulus penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- Syarat Khusus
 - Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS.
 - Pejabat yang dapat dicalonkan sebagai Direktur Utama minimal berada satu tingkat dibawah Direktur Utama pada Bank Umum Nasional Terbuka atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim;
 - Untuk pejabat yang dapat dicalonkan Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah adalah Pejabat Eksekutif yang berada pada satu tingkat di bawah Direksi. Minimal sudah 2 (dua) kali menduduki jabatan eksekutif yang berbeda pada Bank Umum Nasional Terbuka;
 - Melampirkan sertifikat Sekolah Staff dan Pimpinan (SESPI) Bank (hanya bagi calon Direksi yang telah mengikuti sespi Bank);
 - Pendidikan minimal Strata 1 (S1) dan diutamakan Strata 2 (S2);
 - Bagi calon Direksi dari pihak eksternal adalah pejabat eksekutif yang beroperasi secara nasional dan mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim
- Does not have family relations up to the second degree including in-law with fellow members of the Board of Directors or Board of Commissioners;
- Pass the fit and proper test in accordance with the Financial Services Authority's provisions regarding the fit and proper test.
- Special Requirements
 - For members of the Board of Directors who will be appointed must meet special requirements, the details of these special requirements will be stated in the GMS decision.
 - Officials who can be nominated as President Director must be at least one level below the President Director of a National Open National Bank or have the same minimum assets as the assets of Bank Jatim;
 - For officials who can be nominated the Director of Sharia Retail & Business Consumer is an Executive Officer who is one level below the Board of Directors. At least 2 (two) times have held different executive positions at the National Open National Bank;
 - Attach the School Staff and Leadership Certificate (SESPI) of the Bank (only for candidates for Directors who have attended the Bank's session);
 - Minimum education of Strata 1 (S1) and preferably Strata 2 (S2);
 - For prospective Directors from external parties are executive officers who operate nationally and have the same minimum assets as the assets of Bank Jatim.

INDEPENDENSI DIREKSI

Seluruh anggota Direksi yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali. Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali dan seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Direksi senantiasa mengedepankan serta menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugasnya, mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri dan tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Komitmen ini selaras dengan yang telah diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN WEWENANG MASING-MASING DIREKSI

Direksi bertugas secara kolektif, namun agar lebih efisien dalam melaksanakan tugas dilakukan pembagian tugas di antara Direktur. Oleh karena itu, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas, Direksi sebagai organ Perseroan (seluruh Direktur secara kolektif) mempunyai wewenang pengurusan atas tugas yang secara khusus dipercayakan kepada seorang Direktur dan wajib mengawasi pelaksanaannya.

INDEPENDENCY OF BOARD OF DIRECTORS

All current members of the Board of Directors do not have family relations up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners, Directors and controlling shareholders. The majority of members of the Board of Directors do not have a financial relationship with the Controlling Shareholders and all members of the Board of Directors do not have a financial relationship with fellow members of the Board of Commissioners and Directors.

The Board of Directors always prioritizes and upholds the principle of independence in carrying out its duties, prioritizing the interests of the Bank over its own interests and maintaining that the implementation of its duties cannot be influenced by any party. This commitment is in line with what has been regulated in the Board of Directors' Work Guidelines and Charter.

SCOPE OF WORK AND AUTHORITY OF EACH BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has a collective duty, but to be more efficient in carrying out the tasks, the division of tasks is carried out among the Board of Directors. Therefore, even though the division of tasks has been carried out, the Board of Directors as the organ of the Company (all Directors collectively) has the authority to administer tasks that are specifically entrusted to a Director and must supervise their implementation.

JABATAN	TANGGUNG JAWAB	WEWENANG
Direktur Utama	Mematuhi serta menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan sumber BPP SO Direksi 057/233/DIR/PRS/KEP Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung jawab Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank	Memberikan persetujuan kredit dan rekruturisasi kredit sesuai dengan kewenangannya Memberikan persetujuan atas pengajuan program kerjasama dengan pihak ketiga Memantau serta menetapkan rencana strategi Bank dalam jangka pendek dan panjang
Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah	Mematuhi serta menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung jawab Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank	Menyetujui rencana pemasaran dana/ jasa serta kredit ritel konsumer dan usaha syariah Memutus permohonan Linkage Program konvensional dan syariah, pembiayaan syariah serta Bank Garansi syariah sesuai dengan batas kewenangannya.

POSITION	RESPONSIBILITY	AUTHORITY
President Director	Comply with and implement all rules and regulations source BPP SO Direksi 057/233/DIR/PRS/KEP Carry out all the responsibilities as outlined in the Duties and Responsibilities Carry out other tasks and work that are related to the basic functions of the position description that have not been spelled out in the Duties and Responsibilities Have the initiative to improve individual performance and overall business activities of the Bank to support the achievement of the Bank's business goals Establish effective coordination, especially with related organizational units that have work interaction and also all Bank employees	Give credit approval and credit restructuring in accordance with their authority Give approval for submitting cooperation programs with third parties Monitor and determine the Bank's strategic plan in the short and long term
Consumer, Retail and Sharia Business Director	Comply with and implement all rules and regulations Carry out all the responsibilities as outlined in the Duties and Responsibilities Carry out other tasks and work that are related to the basic functions of the position description that have not been spelled out in the Duties and Responsibilities Have the initiative to improve individual performance and overall business activities of the Bank to support the achievement of the Bank's business goals Establish effective coordination, especially with related organizational units that have work interaction and also all Bank employees	Approve fund marketing/service plans as well as consumer retail loans and Islamic businesses Decide on applications for conventional and sharia Linkage Programs, sharia financing and sharia bank guarantees in accordance with their authority limits.

Direktur TI & Operasi	Mematuhi serta menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung jawab Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank	Memberikan persetujuan pengadaan barang/ jasa berdasarkan tingkat kewenangan Merekomendasikan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan transaksi operasional Bank	IT and Operations Director	Comply with and implement all rules and regulations Carry out all the responsibilities as outlined in the Duties and Responsibilities Carry out other tasks and work that are related to the basic functions of the position description that have not been spelled out in the Duties and Responsibilities Have the initiative to improve individual performance and overall business activities of the Bank to support the achievement of the Bank's business goals Establish effective coordination, especially with related organizational units that have work interaction and also all Bank employees	Give approval for the procurement of goods/ services based on the level of authority Recommend increasing effectiveness in managing bank operational transactions
Direktur Keuangan	Mematuhi serta menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung jawab Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank	Merekomendasikan rencana strategi Bank Menyusun strategi permodalan dan investasi Bank serta memantau pengelolaan efisiensi dan produktivitas Bank	Finance Director	Comply with and implement all rules and regulations Carry out all the responsibilities as outlined in the Duties and Responsibilities Carry out other tasks and work that are related to the basic functions of the position description that have not been spelled out in the Duties and Responsibilities Have the initiative to improve individual performance and overall business activities of the Bank to support the achievement of the Bank's business goals Establish effective coordination, especially with related organizational units that have work interaction and also all Bank employees	Recommend the Bank's strategic plan Prepare the Bank's capital and investment strategies and monitor the efficiency and productivity management of the Bank

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Mematuhi serta menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung jawab Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank	Memberikan rekomendasi terhadap kelonggaran/ penyimpangan dari pedoman pelaksanaan kerja yang berlaku Menetapkan langkah-langkah yang harus diambil terkait pelanggaran kepatuhan Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat pelanggaran kepatuhan Memberikan persetujuan dan distribusi laporan transaksi mencurigakan dan transaksi keuangan tunai serta pemenuhan data keuangan nasabah kepada PPATK dan kepada KPK apabila diperlukan Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian pegawai serta kebijakan SDM lainnya bersama Direktur Terkait	Comply with and implement all rules and regulations Carry out all the responsibilities as outlined in the Duties and Responsibilities Carry out other tasks and work that are related to the basic functions of the position description that have not been spelled out in the Duties and Responsibilities Have the initiative to improve individual performance and overall business activities of the Bank to support the achievement of the Bank's business goals Establish effective coordination, especially with related organizational units that have work interaction and also all Bank employees	Provide recommendations for deviations from the applicable work implementation guidelines Define the steps that must be taken regarding compliance violations Report to the Financial Services Authority if there is a violation of compliance Give approval and distribution of suspicious transaction reports and cash financial transactions and fulfillment of customer financial records to PPATK and to the KPK if necessary Agree on the appointment and termination of employees and other HR policies together with the Related Directors
Direktur Komersial dan Korporasi	Mematuhi serta menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung jawab Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank	Memutus permohonan Kredit dan Bank Garansi sesuai dengan batas kewenangannya Menyetujui suku bunga tabungan di luar limit sesuai dengan kewenangannya Menyetujui rencana pemasaran dana/jasa dan kredit menengah & korporasi	Commerce and Corporation Director Comply with and implement all rules and regulations Carry out all the responsibilities as outlined in the Duties and Responsibilities Carry out other tasks and work that are related to the basic functions of the position description that have not been spelled out in the Duties and Responsibilities Have the initiative to improve individual performance and overall business activities of the Bank to support the achievement of the Bank's business goals Establish effective coordination, especially with related organizational units that have work interaction and also all Bank employees	Decide on the application for Credit and Bank Guarantee in accordance with the limits of its authority Approve savings interest rates outside the limit in accordance with their authority Approved the marketing plan for funds/ services and medium & corporate credit

Direktur Risiko Bisnis	Mematuhi serta menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung jawab Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank	Merekomendasikan strategi pengelolaan risiko Bank

<i>Business Risk Director</i>	<i>Comply with and implement all rules and regulations</i> <i>Carry out all the responsibilities as outlined in the Duties and Responsibilities</i> <i>Carry out other tasks and work that are related to the basic functions of the position description that have not been spelled out in the Duties and Responsibilities</i> <i>Have the initiative to improve individual performance and overall business activities of the Bank to support the achievement of the Bank's business goals</i> <i>Establish effective coordination, especially with related organizational units that have work interaction and also all Bank employees</i>	<i>Recommend risk management strategy of the Bank</i>

KEBIJAKAN MENGENAI PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Direksi mengacu pada peraturan perundang-undangan Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, beberapa hal pokok yang diatur sebagai berikut :

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS
2. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali
3. Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan Direksi
4. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut
5. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Pengangkatan, Penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS
6. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut
7. Dalam hal pemberitahuan kepada Menteri belum dilakukan, Menteri berhak menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan
8. Pemberitahuan kepada Menteri tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

POLICY ON APPOINTMENT, REPLACEMENT, AND DISMISSAL OF BOARD OF DIRECTORS

Appointment, Replacement and Dismissal of the Board of Directors refers to the Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. A number of key issues are regulated as follows:

1. Members of the Board of Directors are appointed by the GMS
2. Members of the Board of Directors are appointed for a certain period and can be reappointed
3. The Articles of Association regulate the procedures for appointment, replacement and dismissal of members of the Board of Directors and may also regulate the procedures for nominating a Board of Directors
4. The GMS decision regarding the appointment, replacement, and dismissal of members of the Board of Directors also stipulates when the appointment, replacement and dismissal take effect
5. In the event that the GMS does not stipulate when the appointment, replacement and dismissal of the members of the Board of Directors begin, the Appointment, Replacement and dismissal of the members of the Board of Directors shall come into force as from the close of the GMS.
6. In the event of appointment, replacement and dismissal of a member of the Board of Directors, the Board of Directors must notify the changes to the members of the Board of Directors to the Minister to be recorded in the register of the Company within 30 (thirty) days from the date of the resolution of the GMS.
7. In the event that a notification to the Minister has not been made, the Minister has the right to reject any application submitted or notification submitted to the Minister by the Board of Directors that has not been registered in the Company register.
8. Notification to the Minister does not include notification given by the new Directors on his own appointment.

**PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI DAN
KOMITE DI BAWAH DIREKSI**

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka membantu pengelolaan dan pengurusan Bank, Direksi dibantu oleh 8 (delapan) komite meliputi;

1. KOMITE ALCO (*Asset Liability Committee*),
2. KOMITE MANAJEMEN RISIKO
3. KOMITE KEPEGAWAIAN
4. KOMITE *IT STEERING*
5. KOMITE KREDIT
6. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN
7. KOMITE PRODUK, JARINGAN dan PROSEDUR
8. KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI.

Pada tahun 2019, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif dilihat dari pelaksanaan rapat yang hasilnya terimplementasi dengan baik.

PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS DIREKSI

Program Peningkatan Kapabilitas menjadi penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang core business Perseroan di bidang perbankan dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan.

Ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Direksi sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas Direksi.
2. Rencana untuk melakukan Program Peningkatan Kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi.
3. Setiap Direktur yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti seminar dan atau pelatihan diwajibkan untuk menyajikan presentasi kepada Direktur lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
4. Direktur yang bersangkutan bertanggungjawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi.

**DUTY IMPLEMENTATION OF BOARD OF
DIRECTORS AND COMMITTEES UNDER
THE BOARD OF DIRECTORS**

Throughout 2019, the Board of Directors has carried out duties, obligations and responsibilities in the context of carrying out the management of the Bank in accordance with the prevailing laws and regulations.

In order to assist the management of the Bank, the Board of Directors is assisted by 8 (eight) committees, namely:

1. ALCO COMMITTEE (*Asset Liability Committee*),
2. RISK MANAGEMENT COMMITTEE
3. EMPLOYMENT COMMITTEE
4. IT STEERING COMMITTEE
5. CREDIT COMMITTEE
6. CREDIT POLICY COMMITTEE
7. PRODUCT, NETWORK and PROCEDURE COMMITTEE
8. INTEGRATED RISK MANAGEMENT COMMITTEE

In 2019, the Board of Directors considered that the committees had carried out their duties and responsibilities quite effectively in terms of the implementation of the meeting whose results were well implemented.

**CAPABILITY IMPROVEMENT PROGRAM
OF BOARD OF DIRECTORS**

The Capability Enhancement Program plays an important role for the Board of Directors to keep abreast of the latest developments in the banking sector aligned with its Company core business, also to always ready in anticipating the Company's sustainability and progress.

Provisions regarding the Capability Enhancement Program for the Board of Directors as follows:

1. The implementation of Capability Enhancement Program aims to improve the work efficiency of the Board of Directors.
2. Comprehend plans of the Capability Enhancement Program implementation in the Directors' Work Plan and Budget is mandatory.
3. Every Director who participate in the Capability Enhancement Program, such as seminars or training required to hold a presentation to another Board of Directors as the information and knowledge sharing platform.
4. The responsible Director is accountable for making reports of the Capability Enhancement Program implementation which later the report submitted to the Directors.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan dengan menggunakan metode *self assessment*.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja Direksi dan individu Anggota Direksi adalah pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola Perseroan. Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

Kebijakan Umum mengenai evaluasi kinerja Direksi Bank Jatim diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Direksi. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk disahkan sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan perundangan.

- Tersedia Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)
- Tersedia Rencana Jangka Pendek Bank (Rencana Bisnis Bank/RBB)
- Tersedia Kebijakan Umum Direksi (KUD)
- Kinerja perusahaan tercapai sesuai dengan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang berlaku mencakup profil risiko, Tata Kelola Perusahaan (GCG), Rentabilitas dan Permodalan.
- Tersedia laporan dan dokumen pengurusan perusahaan.
- Tersedia penjelasan atas pelaksanaan pengurusan Perusahaan.
- Terlaksananya tindak lanjut perbaikan atas temuan audit.
- Tercapainya target kinerja Perusahaan.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi dilakukan pada saat pertanggung jawaban Laporan Tahunan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Jatim, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Pada saat Rapat Umum Pemegang

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS

POLICIES AND PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The performance assessment of the Board of Directors is determined by considering their duties and obligations in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association. The performance assessment of the Board of Directors is also carried out using the self-assessment method.

CRITERIA FOR PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS

The assessment criteria used to assess the performance of the Board of Directors and individual Members of the Board of Directors are the implementation of the Board of Directors' functions in managing the Bank. In general, the performance of the Board of Directors is determined based on the duties stated in the legislation and the Bank's Articles of Association. The results of the performance evaluation are a means of evaluating and increasing the effectiveness of the Board of Directors.

The General Policy on evaluating the performance of the Directors of Bank Jatim is regulated in the Board of Directors' Implementation Manual (BPP). The Board of Commissioners' Supervisory Report is submitted at the General Meeting of Shareholders (GMS) to be ratified in accordance with the Limited Liability Company Law and Regulations.

- Availability of Long-Term Plans (*Corporate Plans*)
- Availability of Short-Term Bank Plans (Bank's Business Plans/RBB)
- Availability of Board of Directors General Policy (KUD)
- The Bank's performance is achieved in accordance with the results of the assessment of the Bank's Soundness Level which includes risk profiles, Good Corporate Governance (GCG), Profitability, and Capital Adequacy.
- Bank's management reports and documents are available.
- Availability of explanation for the implementation of Company's management.
- Implementation of follow-up improvements to the audit findings.
- The achievement of the Bank's performance targets.

ASSESSOR

The performance assessment of the Board of Directors is carried out at the time of the Annual Report accountability at the General Meeting of Shareholders (GMS) as a form of accountability for the implementation of the duties and responsibilities of the Directors of Bank Jatim, in accordance with applicable laws.

While the parties assessing the performance of the Board of Directors are the Board of Commissioners and Shareholders. At the General Meeting of Shareholders

Saham (RUPS), Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Jatim.

HASIL PENILAIAN KPI DIREKSI

PERSPEKTIF	KPI	UKURAN	BOBOT
FINANCIAL	Rasio keuangan (ROA, ROE, BOPO, CAR & LFR)	Sesuai RBB	7.00%
	Penghimpunan DPK (CASA)	Sesuai RBB	7.00%
	Non Performing Loan	Sesuai RBB	7.00%
	Growth Laba Bersih	Sesuai RBB	10.50%
	Growth Total DPK	Sesuai RBB	3.50%
	Growth Kredit	Sesuai RBB	7.00%
	Pencapaian Penagihan Ekstrakomtabel	Sesuai RBB	7.00%
	Kontribusi FBI dari total pendapatan	Sesuai RBB	7.00%
	Growth Asset	Sesuai RBB	3.50%
	Growth harga saham akhir tahun dibandingkan dengan harga saham akhir tahun sebelumnya)	Sesuai RBB	7.00%
	Audit Plan	Sesuai RBB	3.50%
CUSTOMER	Posisi ranking MRI untuk kategori BPD	Ranking	3.00%
	Posisi ranking PEFINDO	Ranking	2.00%
	Program CSR	Sesuai RBB	3.00%
	Laporan Keuangan Triwulan	Sesuai RBB	1.00%
	Laporan Keuangan Tahunan	Sesuai RBB	1.00%
INTERNAL BUSSINESS PROCESS	Project Inisiasi	Sesuai RBB	3.00%
	Tingkat Kesehatan Bank	Score	3.00%
	Good Corporate Governance	Score	3.00%
	Implementasi Teknologi Informasi Komputer	Sesuai RBB	3.00%
	Implementasi Digital banking	Sesuai RBB	3.00%
LEARNING AND GROWTH	Peningkatan kompetensi pegawai	Sesuai RBB	1.25%
	Implementasi Corporate Culture	Sesuai RBB	1.25%
	Implementasi Corporate Plan	Sesuai RBB	1.25%
	Implementasi Green Banking	Sesuai RBB	1.25%
			100.00%

(GMS), the Board of Directors is responsible for carrying out the duties and responsibilities of the Board of Commissioners of Bank Jatim.

RESULTS OF KPI ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS

PERSPECTIVE	KPI	MEASUREMENT	VALUE
FINANCIAL	Financial Ratios (ROA, ROE, BOPO, CAR & LFR)	According to RBB	7.00%
	Third Party Fund (CASA)	According to RBB	7.00%
	Non Performing Loan	According to RBB	7.00%
	Growth of Net Profit	According to RBB	10.50%
	Growth of Total Third Party Fund	According to RBB	3.50%
	Growth of Loan	According to RBB	7.00%
	Achievement of Ekstrakomtabel Billing	According to RBB	7.00%
	FBI Contribution to total income	According to RBB	7.00%
	Growth of Asset	According to RBB	3.50%
	Growth of share price at the end of the year compared with that of the previous year)	According to RBB	7.00%
	Audit Plan	According to RBB	3.50%
CUSTOMER	Position of MRI ranking for BPD Category	Ranking	3.00%
	Position of PEFINDO ranking	Ranking	2.00%
	CSR Program	According to RBB	3.00%
	Quarterly Financial Statements	According to RBB	1.00%
	Annual Financial Statements	According to RBB	1.00%
INTERNAL BUSSINESS PROCESS	Project Initiation	According to RBB	3.00%
	Bank's Soundness Level	Score	3.00%
	Good Corporate Governance	Score	3.00%
	Implementation of Information Technology	According to RBB	3.00%
	Implementation of Digital banking	According to RBB	3.00%
LEARNING AND GROWTH	Improvement of employees' competence	According to RBB	1.25%
	Implementation of Corporate Culture	According to RBB	1.25%
	Implementation of Corporate Plan	According to RBB	1.25%
	Implementation of Green Banking	According to RBB	1.25%
			100.00%



RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

MEETINGS OF BOARD OF
COMMISSIONERS AND
BOARD OF DIRECTORS



REKAPITULASI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 16 rapat pada tanggal dan agenda sebagai berikut:

TANGGAL RAPAT	KOMISARIS YANG HADIR	AGENDA
14 Februari 2019	Akhmad Sukardi	Pembahasan mengenai Hasil Kordinasi dengan OJK KR IV Terkait Proses Nominasi Calon Direksi Bank Jatim dan rekomendasi dari Komite
	Budi Setiawan	
	Rudi Purwono	
	Candra Fajri Ananda	Pembahasan mengenai BPP Komite Dewan Komisaris.
28 Februari 2019	Akhmad Sukardi	Pembahasan mengenai Perkembangan Proses Penjaringan Direksi Bank Jatim
	Budi Setiawan	
	Rudi Purwono	Pembahasan mengenai proses <i>assessment</i> oleh pihak ke 3 yang Independen.
	Candra Fajri Ananda	
13 Maret 2019	Akhmad Sukardi	Pembahasan mengenai Persetujuan Penyesuaian RBB Bank Jatim Tahun 2019
	Budi Setiawan	
	Rudi Purwono	Pembahasan mengenai Persiapan RUPS Tahunan Tahun buku 2018 masalah Laporan kepada Gubernur terkait pelaksanaan RUPS dan laporan Pengawasan Dewan Komisaris di Laporan Tahunan
	Candra Fajri Ananda	Pembahasan KAP dalam rangka evaluasi kinerja fungsi Audit Internal (SKAI) Bank Jatim Pembahasan BPP ketentuan Alih Daya Kegiatan Pemasaran Pembahasan usulan Pemberian Uang cuti oleh Direksi
09 April 2019	Akhmad Sukardi	Pembahasan Singkat Dewan Komisaris kepada Gubernur Jawa Timur menuju RUPS Tahunan Tahun Buku 2018
	Budi Setiawan	
	Rudi Purwono	Pembahasan Penunjukan Pemimpin RUPS Tahunan Bank Jatim Tahun Buku 2018
	Candra Fajri Ananda	Pembahasan Pengesahan BPP Komite Dewan Komisaris
18 April 2019	Akhmad Sukardi	Pembahasan Skenario RUPS Tahunan Bank Jatim Tahun Buku 2019
	Budi Setiawan	
	Rudi Purwono	Pembahasan Dewan Pengawas Syariah Bank Jatim
	Candra Fajri Ananda	Pembahasan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
02 Mei 2019	Akhmad Sukardi	Pembahasan tugas Direksi yang masih lowong
	Budi Setiawan	
	Rudi Purwono	Pembahasan susunan Komite Dewan Komisaris
	Candra Fajri Ananda	Pembahasan proses <i>assessment</i> calon Direksi Bank Jatim Pembahasan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi

RECAPITULATION OF BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

During 2019, the Board of Commissioners has held 16 meetings as detailed below:

Date	Commissioners Attending	Agenda
February 14, 2019	Akhmad Sukardi	Discussion on the Results of the Coordination with OJK KR IV Related to the Nomination Process of Prospective Directors of Bank Jatim and recommendations from the Committee
	Budi Setiawan	
	Rudi Purwono	
	Candra Fajri Ananda	Discussion on the Board of Commissioners' BPP.
February 28, 2019	Akhmad Sukardi	Discussion on the Development of the Bank Jatim Board of Directors Selection Process
	Budi Setiawan	
	Rudi Purwono	Discussion on the assessment process by an independent third party.
	Candra Fajri Ananda	
March 13, 2019	Akhmad Sukardi	Discussion on the Approval of 2019 Bank Jatim RBB Adjustment
	Budi Setiawan	
	Rudi Purwono	Discussion on Annual GMS Preparation for Fiscal Year 2018 issue of Reports to the Governor regarding the implementation of the GMS and the Supervisory Report of the Board of Commissioners in the Annual Report
	Candra Fajri Ananda	Discussion on KAP in the framework of evaluating the performance of the Internal Audit function (SKAI) of East Java Bank Discussion on BPP on Outsourcing of Marketing Activities Discussion on proposals for granting paid leave by the Directors
April 9, 2019	Akhmad Sukardi	A Brief Discussion of the Board of Commissioners to the Governor of East Java towards the 2018 Annual General Meeting of Shareholders
	Budi Setiawan	
	Rudi Purwono	Discussion on Appointment of Bank Jatim Annual GMS Leaders for Fiscal Year 2018
	Candra Fajri Ananda	Discussion on the Approval of the Board of Commissioners' BPP
April 18, 2019	Akhmad Sukardi	Discussion on Bank Jatim Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2019
	Budi Setiawan	
	Rudi Purwono	Discussion of Bank Jatim Syariah Supervisory Board
	Candra Fajri Ananda	Discussion on Remuneration and Nomination Committee Recommendations
May 2, 2019	Akhmad Sukardi	Discussion on the duties of the Board of Directors which is still vacant
	Budi Setiawan	
	Rudi Purwono	Discussion on the composition of the Board of Commissioners' Committees
	Candra Fajri Ananda	Discussion on the assessment process for candidates for the Directors of Bank Jatim Discussion of Remuneration and Nomination Committee Recommendations

27 Mei 2019	Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Candra Fajri Ananda	Pembahasan Penunjukan Pemimpin RUPS Luar Biasa Bank Jatim Tahun 2019 Pembahasan Pengumuman CV calon Direksi Bank Jatim pada website Bank Jatim Pembahasan Tindak lanjut Rekomendasi Koreno terkait penambahan Anggota Dewan Komisaris	May 27, 2019	Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Candra Fajri Ananda	Discussion on Appointment of 2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bank Jatim in 2019 Discussion on the Announcement of CV for the Directors of Bank Jatim on the Bank Jatim website Discussion on Follow-up on Koreno's Recommendations regarding the addition of the Board of Commissioners
13 Juni 2019	Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Candra Fajri Ananda	Pembahasan Hasil Audiensi dengan Gubernur Jawa Timur terkait Calon Pengurus Bank Jatim	June 13, 2019	Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Candra Fajri Ananda	Discussion of Hearing Results with the Governor of East Java related to Candidates for the Management of Bank Jatim
18 Juni 2019	Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Candra Fajri Ananda	Pembahasan Hasil Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terkait calon Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim	June 18, 2019	Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Candra Fajri Ananda	Discussion on Results of Remuneration and Nomination Committee Recommendations regarding candidates for the Board of Commissioners and Directors of Bank Jatim
19 Juni 2019	Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Candra Fajri Ananda	Pembahasan Pembagian Tugas Direksi	June 19, 2019	Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Candra Fajri Ananda	Discussion on the Division of Duties of the Directors
25 Juni 2019	Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Candra Fajri Ananda	Pembahasan Evaluasi Revisi RBB Bank Jatim Tahun 2019 Pembahasan Usulan Komite Remunerasi dan Nominasi terkait Remunerasi Pengurus Bank Jatim	June 25, 2019	Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Candra Fajri Ananda	Discussion on Evaluation of Bank Jatim RBB Revision in 2019 Discussion on the Remuneration and Nomination Committee Proposal related to the Remuneration of Bank Jatim Management
03 September 2019	Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Candra Fajri Ananda	Pembahasan mengenai Laporan Pengawasan RBB Bank Jatim Semester I Tahun 2019 Pembahasan terkait perkembangan proses Fit and proper Calon Pengurus Bank Jatim Pembahasan evaluasi kinerja Dewan Komisaris Semester I tahun 2019	September 3, 2019	Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Candra Fajri Ananda	Discussion on the Bank Jatim RBB Supervision Report Semester I of 2019 Discussion regarding the development of the Fit and proper process of Candidates for the Management of Bank Jatim Discussion on the evaluation of the performance of the Board of Commissioners for the first semester of 2019
22 Oktober 2019	Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Candra Fajri Ananda	Pembahasan Usulan Direksi terkait permohonan Persetujuan Struktur Organisasi Pembahasan SK Dewan Komisaris terkait Remunerasi Bagi Pengurus Pembahasan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) terkait Perjalanan Dinas Pengurus Pembahasan Rekomendasi Koreno terkait Pemberian Tunjangan Seragam	October 22, 2019	Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Candra Fajri Ananda	Discussion on the proposal of the Board of Directors related to the application for Approval of Organizational Structure Discussion on the Board of Commissioners' Decree related to Remuneration for Management Discussion on the Implementation Guidebook (BPP) related to the Official Management Trip Discussion of Koreno's Recommendations relating to Providing Uniform Benefits
28 Oktober 2019	Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Candra Fajri Ananda Muhammad Mas'ud	Pembahasan Pembagian Tugas Direksi Pembahasan Perubahan susunan Anggota Komite Dewan Komisaris	October 28, 2019	Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Candra Fajri Ananda Muhammad Mas'ud	Discussion on the Division of Duties of the Directors Discussion on Changes in the composition of the Board of Commissioners' Committees

12 November 2019	Akhmad Sukardi	Pembahasan Status Sdr Hadi Santoso sebagai Direktur Perseroan Bank Jatim
	Budi Setiawan	
	Rudi Purwono	Pembahasan <i>Time Schedule</i> RUPS Bank Jatim
	Candra Fajri Ananda	
	Muhammad Mas'ud	
29 November 2019	Akhmad Sukardi	Pembahasan RUPSLB dan RUPS Tahunan Bank Jatim
	Budi Setiawan	
	Rudi Purwono	Pembahasan Kekosongan Direktur Utama dan Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah
	Candra Fajri Ananda	
	Muhammad Mas'ud	Pembahasan <i>Human Capital</i>
	Heru Tjahjono	

November 12, 2019	Akhmad Sukardi	Discussion on the status of Mr. Hadi Santoso as Director of the Bank Jatim Company
	Budi Setiawan	
	Rudi Purwono	Discussion of Bank Jatim GMS Time Schedule
	Candra Fajri Ananda	
	Muhammad Mas'ud	
November 29, 2019	Akhmad Sukardi	Discussion of the EGMS and Annual GMS of Bank Jatim
	Budi Setiawan	
	Rudi Purwono	Discussion on the Emptiness of the President Director and Retail Consumer & Sharia Business Director
	Candra Fajri Ananda	
	Muhammad Mas'ud	Discussion of Human Capital
	Heru Tjahjono	

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

NO	NAMA	RAPAT DEWAN KOMISARIS	
		Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1	Akhmad Sukardi	16/16	100%
2	Budi Setiawan	16/16	100%
3	Heru Tjahjono ^{*)}	1/16	6.25%
4	Candra Fajri Ananda	16/16	100%
5	Rudi Purwono	16/16	100%
6	Muhammad Mas'ud ^{*)}	3/16	18.75%

Keterangan :

^{*)} Diangkat pada Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019 Dan dinyatakan efektif tanggal 14 Oktober 2019 setelah mendapat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

REKAPITULASI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan 13 rapat bersama dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

TANGGAL	AGENDA	PESERTA RAPAT
Kamis, 14 Februari 2019	Pembahasan Kinerja Bank Jatim Syariah	1. Akhmad Sukardi 2. Candra Fajri Ananda 3. Rudi Purwono 4. R. Soeroso 5. Rudie Hardiono 6. Su'udi 7. Tony Sudjiaryanto 8. Rizyana Mirda 9. Hadi Santoso 10. Ferdian Timur Satyagraha

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS IN 2019

No.	Name	Board of Commissioners Meetings	
		Attendance Frequency	Attendance Rate
1	Akhmad Sukardi	16/16	100%
2	Budi Setiawan	16/16	100%
3	Heru Tjahjono ^{*)}	1/16	6.25%
4	Candra Fajri Ananda	16/16	100%
5	Rudi Purwono	16/16	100%
6	Muhammad Mas'ud ^{*)}	3/16	18.75%

Note:

^{*)} Appointed through the Extraordinary GMS on June 19, 2019, and approved by the Financial Services Authority effectively on October 14, 2019 after passing the Fit-and-Proper Test

RECAPITULATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETINGS

During 2019, the Board of Commissioners has held 13 joint meetings with the Board of Directors as detailed below:

Date	Agenda	Meeting Participants
Thursday, February 14, 2019	Discussion on the Performance of Bank Jatim Syariah	1. Akhmad Sukardi 2. Candra Fajri Ananda 3. Rudi Purwono 4. R. Soeroso 5. Rudie Hardiono 6. Su'udi 7. Tony Sudjiaryanto 8. Rizyana Mirda 9. Hadi Santoso 10. Ferdian Timur Satyagraha

Jum'at, 22 Maret 2019	Pembahasan Mata Acara RUPS TB 2018 bersama Biro Administrasi Efek	1. Candra Fajri Ananda 2. Rudi Purwono 3. R. Soeroso 4. Rudie Hardiono 5. Su'udi 6. Tony Sudjiaryanto 7. Rizyana Mirda 8. Hadi Santoso 9. Ferdian Timur Satyagraha	Friday, March 22, 2019	Discussion on 2018 GMS TB Meeting with the Securities Administration Bureau	1. Candra Fajri Ananda 2. Rudi Purwono 3. R. Soeroso 4. Rudie Hardiono 5. Su'udi 6. Tony Sudjiaryanto 7. Rizyana Mirda 8. Hadi Santoso 9. Ferdian Timur Satyagraha
Senin, 25 Maret 2019	Pembahasan Struktur Organisasi Bank Jatim	1. Akhmad Sukardi 2. Budi Setiawan 3. R. Soeroso 4. Su'udi 5. Tony Sudjiaryanto 6. Rizyana Mirda 7. Hadi Santoso 8. Ferdian Timur Satyagraha	Monday, March 25, 2019	Discussion on the Bank Jatim Organizational Structure	1. Akhmad Sukardi 2. Budi Setiawan 3. R. Soeroso 4. Su'udi 5. Tony Sudjiaryanto 6. Rizyana Mirda 7. Hadi Santoso 8. Ferdian Timur Satyagraha
Kamis, 04 April 2019	Pembahasan Kinerja Bank Jatim Posisi Maret 2019 & BPR APEX	1. Akhmad Sukardi 2. Candra Fajri Ananda 3. Budi Setiawan 4. R. Soeroso 5. Rudie Hardiono 6. Rizyana Mirda 7. Hadi Santoso 8. Ferdian Timur Satyagraha	Thursday, April 4, 2019	Discussion on the Performance of Bank Jatim in March 2019 & BPR APEX	1. Akhmad Sukardi 2. Candra Fajri Ananda 3. Budi Setiawan 4. R. Soeroso 5. Rudie Hardiono 6. Rizyana Mirda 7. Hadi Santoso 8. Ferdian Timur Satyagraha
Selasa, 24 April 2019	Finalisasi Persiapan RUPS Tahunan Bank Jatim Tahun Buku 2018	1. Akhmad Sukardi 2. Candra Fajri Ananda 3. Rudi Purwono 4. R. Soeroso 5. Rudie Hardiono 6. Su'udi 7. Tony Sudjiaryanto 8. Rizyana Mirda 9. Hadi Santoso 10. Ferdian Timur Satyagraha	Tuesday, April 24, 2019	Finalization of Bank Jatim Annual GMS Preparation for Fiscal Year 2018	1. Akhmad Sukardi 2. Candra Fajri Ananda 3. Rudi Purwono 4. R. Soeroso 5. Rudie Hardiono 6. Su'udi 7. Tony Sudjiaryanto 8. Rizyana Mirda 9. Hadi Santoso 10. Ferdian Timur Satyagraha
Kamis, 02 Mei 2019	Pembahasan Persiapan RUPS LB 2019	1. Akhmad Sukardi 2. Candra Fajri Ananda 3. Budi Setiawan 4. Hadi Santoso	Thursday, May 2, 2019	Discussion on the Preparation of GMS LB 2019	1. Akhmad Sukardi 2. Candra Fajri Ananda 3. Budi Setiawan 4. Hadi Santoso
Senin, 27 Februari 2019	Pembahasan Persiapan dan Mata Acara RUPS LB 2019	1. Akhmad Sukardi 2. Candra Fajri Ananda 3. Budi Setiawan 4. Rizyana Mirda 5. Ferdian Timur Satyagraha	Monday, May 27, 2019	Discussion on Preparation and Agenda of LB 2019 GMS	1. Akhmad Sukardi 2. Candra Fajri Ananda 3. Budi Setiawan 4. Rizyana Mirda 5. Ferdian Timur Satyagraha
Kamis, 13 Juni 2019	1. Pembahasan RUPSLB Bank Jatim Tahun 2019 2. Pembahasan Penyempurnaan Struktur Organisasi	1. Akhmad Sukardi 2. Candra Fajri Ananda 3. Budi Setiawan 4. Rudi Purwono 5. Rizyana Mirda 6. Ferdian Timur Satyagraha	Thursday, June 13, 2019	1. Discussion of Bank Jatim EGMS 2019 2. Discussion on Improving Organizational Structure	1. Akhmad Sukardi 2. Candra Fajri Ananda 3. Budi Setiawan 4. Rudi Purwono 5. Rizyana Mirda 6. Ferdian Timur Satyagraha

Selasa, 09 Juli 2019	1. Evaluasi Remunerasi Pengurus Bank Jatim 2. Rencana Mutasi Pejabat Eksekutif Bank Jatim	1. Akhmad Sukardi 2. Rudi Purwono 3. Candra Fajri Ananda 4. Budi Setiawan 5. Hadi Santoso
Selasa, 03 September 2019	1. Pembahasan Kinerja Bank Jatim Semester I/2019 2. Persetujuan Kredit Kepada Pihak Terkait	1. Akhmad Sukardi 2. Rudi Purwono 3. Candra Fajri Ananda 4. Budi Setiawan 5. Hadi Santoso 6. Rizyana Mirda 7. Ferdian Timur Satyagraha
Jum'at, 25 Oktober 2019	1. Pembahasan Corporate Plan Bank Jatim Tahun 2020-2024 2. Pembahasan Struktur Organisasi	1. Akhmad Sukardi 2. Rudi Purwono 3. Candra Fajri Ananda 4. Budi Setiawan 5. Ferdian Timur Satyagraha 6. Tonny Prasetyo 7. Erdianto Sigit C 8. Busrul Iman
Selasa, 12 November 2019	1. Pembahasan Kinerja Bank Jatim Posisi September 2019 2. Pembahasan BPP Mekanisme Kerja Antara Direksi-Dewan Komisaris	1. Akhmad Sukardi 2. Rudi Purwono 3. Candra Fajri Ananda 4. Budi Setiawan 5. Heru Tjahjono 6. Muhammad Mas'ud 7. Ferdian Timur Satyagraha 8. Busrul Iman 9. Tonny Prasetyo
Kamis, 05 Desember 2019	Pembahasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah	1. Akhmad Sukardi 2. Rudi Purwono 3. Ferdian Timur Satyagraha 4. Tonny Prasetyo 5. Busrul Iman 6. Hadi Santoso

Tuesday, July 9, 2019	1. Evaluation of Bank Jatim Management Remuneration 2. Mutation Planning Executive Officers of Bank Jatim	1. Akhmad Sukardi 2. Rudi Purwono 3. Candra Fajri Ananda 4. Budi Setiawan 5. Hadi Santoso
Tuesday, September 3, 2019	1. Discussion on the Performance of Bank Jatim Semester I/2019 2. Credit Approval To Related Parties	1. Akhmad Sukardi 2. Rudi Purwono 3. Candra Fajri Ananda 4. Budi Setiawan 5. Hadi Santoso 6. Rizyana Mirda 7. Ferdian Timur Satyagraha
Friday, October 25, 2019	1. Discussion on the Bank Jatim Corporate Plan for 2020-2024 2. Discussion of Organizational Structure	1. Akhmad Sukardi 2. Rudi Purwono 3. Candra Fajri Ananda 4. Budi Setiawan 5. Ferdian Timur Satyagraha 6. Tonny Prasetyo 7. Erdianto Sigit C 8. Busrul Iman
Tuesday, November 12, 2019	1. Discussion on the Performance of Bank Jatim Position September 2019 2. BPP Discussion of Work Mechanisms Between Directors and Board of Commissioners	1. Akhmad Sukardi 2. Rudi Purwono 3. Candra Fajri Ananda 4. Budi Setiawan 5. Heru Tjahjono 6. Muhammad Mas'ud 7. Ferdian Timur Satyagraha 8. Busrul Iman 9. Tonny Prasetyo
Thursday, December 5, 2019	Discussion on Regional Regulation of East Java Province Number 8 of 2019 concerning Regionally Owned Enterprises	1. Akhmad Sukardi 2. Rudi Purwono 3. Ferdian Timur Satyagraha 4. Tonny Prasetyo 5. Busrul Iman 6. Hadi Santoso

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2019

NAMA	JUMLAH RAPAT	RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	
		Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Akhmad Sukardi	16	16/16	100%
Budi Setiawan	16	16/16	100%
Heru Tjahjono ^{*)}	16	1/16	6.25%
Candra Fajri Ananda	16	16/16	100%
Rudi Purwono	16	16/16	100%
Muhammad Mas'ud ^{*)}	16	3/16	18.75%
R. Soeroso [*]			
Ferdian Timur Satyagraha			
Erdianto Sigit Cahyono ^{**}			
Busrul Iman ^{**}			
Rizyana Mirda			
Hadi Santoso [*]			
Tonny Prasetyo ^{**}			
Rudie Hardiono [*]			
Su'udi [*]			

Keterangan :

^{*)} Ditunjuk pada tanggal 19 Juni 2019 Dan dinyatakan efektif tanggal 14 Oktober 2019 setelah mendapat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

JOINT MEETING FREQUENCY AND
ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS
AND BOARD OF DIRECTORS IN 2019

Name	Total Meetings	Board of Commissioners and Board of Directors Meetings	
		Attendance Frequency	Attendance Rate
Akhmad Sukardi	16	16/16	100%
Budi Setiawan	16	16/16	100%
Heru Tjahjono ^{*)}	16	1/16	6.25%
Candra Fajri Ananda	16	16/16	100%
Rudi Purwono	16	16/16	100%
Muhammad Mas'ud ^{*)}	16	3/16	18.75%
R. Soeroso [*]			
Ferdian Timur Satyagraha			
Erdianto Sigit Cahyono ^{**}			
Busrul Iman ^{**}			
Rizyana Mirda			
Hadi Santoso [*]			
Tonny Prasetyo ^{**}			
Rudie Hardiono [*]			
Su'udi [*]			

Note:

^{*)} Appointed through the Extraordinary GMS on June 19, 2019, and approved by the Financial Services Authority effectively on October 14, 2019 after passing the Fit-and-Proper Test

REKAPITULASI RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah menyelenggarakan 16 rapat dengan agenda dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

NO	TANGGAL	AGENDA	PESERTA RAPAT
1	Kamis, 03 Januari 2019	Pembahasan Evaluasi Kinerja Divisi Syariah	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Su'udi 4. Tony Sudjiaryanto 5. Rizyana Mirda 6. Hadi Santoso 7. Ferdian Timur Satyagraha
2	Kamis, 03 Januari 2019	Pembahasan Evaluasi Kinerja	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Su'udi 4. Tony Sudjiaryanto 5. Rizyana Mirda 6. Hadi Santoso 7. Ferdian Timur Satyagraha
3	Senin, 14 Januari 2019	Pembahasan Koordinasi Kinerja	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Su'udi 4. Tony Sudjiaryanto 5. Rizyana Mirda 6. Hadi Santoso 7. Ferdian Timur Satyagraha
4	Senin, 21 Januari 2019	Pembahasan Koordinasi Kinerja	1. R. Soeroso 2. Rizyana Mirda 3. Hadi Santoso 4. Ferdian Timur Satyagraha
5	Selasa, 29 Januari 2019	Rotasi Pemimpin Cabang	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Su'udi 4. Tony Sudjiaryanto 5. Rizyana Mirda 6. Hadi Santoso 7. Ferdian Timur Satyagraha
6	Kamis, 27 Februari 2019	Pembahasan Persyaratan Pendaftaran Calon Direksi Bank Jatim	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Su'udi 4. Tony Sudjiaryanto 5. Rizyana Mirda 6. Hadi Santoso 7. Ferdian Timur Satyagraha
7	Senin, 27 Februari 2019	Koordinasi Tindakan lanjut hasil seminar PPATK tanggal 26 Februari 2019	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Tony Sudjiaryanto 4. Rizyana Mirda 5. Hadi Santoso

RECAPITULATION OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

During 2019, the Board of Directors has held 16 meetings as detailed below:

NO.	DATE	AGENDA	MEETING PARTICIPANTS
1	Thursday, January 3, 2019	Discussion on Performance Evaluation of Sharia Division	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Su'udi 4. Tony Sudjiaryanto 5. Rizyana Mirda 6. Hadi Santoso 7. Ferdian Timur Satyagraha
2	Thursday, January 3, 2019	Discussion on Performance Evaluation	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Su'udi 4. Tony Sudjiaryanto 5. Rizyana Mirda 6. Hadi Santoso 7. Ferdian Timur Satyagraha
3	Monday, January 14, 2019	Discussion on Performance Coordination	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Su'udi 4. Tony Sudjiaryanto 5. Rizyana Mirda 6. Hadi Santoso 7. Ferdian Timur Satyagraha
4	Monday, January 21, 2019	Discussion on Performance Coordination	1. R. Soeroso 2. Rizyana Mirda 3. Hadi Santoso 4. Ferdian Timur Satyagraha
5	Tuesday, January 29, 2019	Branch Leader Rotation	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Su'udi 4. Tony Sudjiaryanto 5. Rizyana Mirda 6. Hadi Santoso 7. Ferdian Timur Satyagraha
6	Thursday, February 27, 2019	Discussion on Requirements for Registration of Prospective Directors of Bank Jatim	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Su'udi 4. Tony Sudjiaryanto 5. Rizyana Mirda 6. Hadi Santoso 7. Ferdian Timur Satyagraha
7	Monday, February 27, 2019	Follow up Coordination PPATK seminar results on February 26, 2019	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Tony Sudjiaryanto 4. Rizyana Mirda 5. Hadi Santoso

8	Senin, 27 Februari 2019	Pembahasan Rencana pelepasan (jual) dan penghabusbukuan aktiva tetap kendaraan dinas tahun 2019	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Su'udi 4. Tony Sudjiyarto 5. Rizyana Mirda 6. Hadi Santoso 7. Ferdian Timur Satyagraha
9	Kamis, 08 Maret 2019	Pembahasan Persiapan RUPST TB 2018	1. R. Soeroso 2. Su'udi 3. Tony Sudjiyarto 4. Rizyana Mirda 5. Hadi Santoso 6. Ferdian Timur Satyagraha
10	Kamis, 08 Maret 2019	Pembahasan Penyerahan CSR Kabupaten Bojonegoro	1. R. Soeroso 2. Su'udi 3. Tony Sudjiyarto 4. Rizyana Mirda 5. Hadi Santoso 6. Ferdian Timur Satyagraha
11	Rabu, 13 Maret 2019	Pembahasan Pemberian Uang Cuti Pengurus, Dewan Syariah, Komite dan Pegawai	1. R. Soeroso 2. Su'udi 3. Tony Sudjiyarto 4. Rizyana Mirda 5. Hadi Santoso 6. Ferdian Timur Satyagraha
12	Senin, 18 Maret 2019	1. Pembahasan Evaluasi Kinerja Mingguan 2. Usulan Pembahasan CSR Cabang Bojonegoro 3. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dari Dana Pensiun Pegawai Bank Jatim 4. Laporan LHKPN dan Pajak SPT 2019 5. Surat RUPS ke Gubernur dan Dewan Komisaris 6. Pengajuan Seragam Dinas dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Pialang Asuransi	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Su'udi 4. Tony Sudjiyarto 5. Rizyana Mirda 6. Hadi Santoso 7. Ferdian Timur Satyagraha
13	Selasa, 19 Maret 2019	1. Pembahasan Persetujuan Anggaran RUPS TB 2018 2. Pembahasan Mata Acara RUPS TB 2018 3. Pembahasan Annual Report dan Sustainability Report	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Su'udi 4. Rizyana Mirda 5. Hadi Santoso 6. Ferdian Timur Satyagraha
14	Senin, 22 April 2019	Pembahasan Persiapan RUPS LB 2019	1. Rizyana Mirda 2. Hadi Santoso 3. Ferdian Timur Satyagraha

8	Monday, February 27, 2019	Discussion on the plan for auctioning (selling) and forging fixed assets of official vehicles in 2019	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Su'udi 4. Tony Sudjiyarto 5. Rizyana Mirda 6. Hadi Santoso 7. Ferdian Timur Satyagraha
9	Thursday, March 8, 2019	Discussion on the Preparation of the 2018 RUPST TB	1. R. Soeroso 2. Su'udi 3. Tony Sudjiyarto 4. Rizyana Mirda 5. Hadi Santoso 6. Ferdian Timur Satyagraha
10	Thursday, March 8, 2019	Discussion on Submission of CSR in Bojonegoro Regency	1. R. Soeroso 2. Su'udi 3. Tony Sudjiyarto 4. Rizyana Mirda 5. Hadi Santoso 6. Ferdian Timur Satyagraha
11	Wednesday, March 13, 2019	Discussion on the Granting of Management Leave Money, Sharia Board, Committees and Employees	1. R. Soeroso 2. Su'udi 3. Tony Sudjiyarto 4. Rizyana Mirda 5. Hadi Santoso 6. Ferdian Timur Satyagraha
12	Monday, March 18, 2019	1. Discussion on Weekly Performance Evaluation 2. Proposed Discussion of Bojonegoro Branch CSR 3. Defined Benefit Pension Program (PPMP) from Bank Jatim Employee Pension Fund 4. LHKPN Report and 2019 tax return 5. GMS Letters to the Governor and the Board of Commissioners 6. Submission of Service Uniforms and Evaluation of the Implementation of the Cooperation Agreement with the Insurance Broker	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Su'udi 4. Tony Sudjiyarto 5. Rizyana Mirda 6. Hadi Santoso 7. Ferdian Timur Satyagraha
13	Tuesday, March 19, 2019	1. Discussion on the 2018 TB RUPS Budget Approval 2. Discussion on GMS TB 2018 3. Discussion on Annual Report and Sustainability Report	1. R. Soeroso 2. Rudie Hardiono 3. Su'udi 4. Rizyana Mirda 5. Hadi Santoso 6. Ferdian Timur Satyagraha
14	Monday, April 22, 2019	Discussion on the Preparation of GMS LB 2019	1. Rizyana Mirda 2. Hadi Santoso 3. Ferdian Timur Satyagraha

15	Selasa, 30 Juli 2019	Pembahasan Penjataan Ulang Hak Opsi MESOP	1. Rizyana Mirda 2. Hadi Santoso 3. Ferdian Timur Satyagraha
16	Kamis, 12 September 2019	Pembahasan Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi sesuai Arah Gubernur Jawa Timur	1. Rizyana Mirda 2. Ferdian Timur Satyagraha
17	28 Oktober 2019	Pembahasan Sumber Daya Manusia dan Rencana Bisnis Bank Jatim	1. Rizyana Mirda 2. Ferdian Timur Satyagraha
18	01 November 2019	Tindak lanjut Rapat Komisi C DPRD Provinsi Jatim	Rizyana Mirda Ferdian Timur Satyagraha Tonny Prasetyo
19	06 November 2019	Pembahasan Sumber Daya Manusia	1. Ferdian Timur Satyagraha 2. Erdianto Sigit Cahyono 3. Busrul Iman
20	16 Desember 2019	Program BPJS Ketenagakerjaan tentang GNP pekerja rentan (GN Lingkaran)	1. Ferdian Timur Satyagraha 2. Erdianto Sigit Cahyono 3. Busrul Iman 4. Rizyana Mirda

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI TAHUN 2019

NO	NAMA	Jumlah Rapat	RAPAT DIREKSI	
			Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1	R. Soeroso [*]	13	13	100%
2	Ferdian Timur Satyagraha	20	19	95%
3	Erdianto Sigit Cahyono ^{**}	7	2	28,6%
4	Busrul Iman ^{**}	7	2	28,6%
5	Rizyana Mirda	20	19	95%
6	Hadi Santoso [*]	15	15	100%
7	Tonny Prasetyo ^{**}	7	1	14,28%
8	Rudie Hardiono [*]	13	9	69,2%
9	Su'udi [*]	13	11	84,6%

Keterangan :

^{*}) tidak menjabat per tanggal 19 Juni 2019

^{**}) menjabat per 19 Juni 2019

15	Tuesday, July 30, 2019	Discussion on MESOP Option Rights Allotment	1. Rizyana Mirda 2. Hadi Santoso 3. Ferdian Timur Satyagraha
16	Thursday, September 12, 2019	Discussion on Efforts to Promote Economic Growth in accordance with the Direction of the Governor of East Java	1. Rizyana Mirda 2. Ferdian Timur Satyagraha
17	October 28, 2019	Discussion on Human Resources and the Bank Jatim Business Plan	1. Rizyana Mirda 2. Ferdian Timur Satyagraha
18	November 1, 2019	Follow up of the Commission C Meeting of East Java Provincial DPRD	1. Rizyana Mirda 2. Ferdian Timur Satyagraha 3. Tonny Prasetyo
19	November 6, 2019	Discussion of Human Resources	1. Ferdian Timur Satyagraha 2. Erdianto Sigit Cahyono 3. Busrul Iman
20	December 16, 2019	BPJS Employment Program on GNP of vulnerable workers (GN Circle)	1. Ferdian Timur Satyagraha 2. Erdianto Sigit Cahyono 3. Busrul Iman 4. Rizyana Mirda

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF DIRECTORS IN 2019

No.	Name	Total Meetings	Board of Commissioners and Board of Directors Meetings	
			Attendance Frequency	Attendance Rate
1	R. Soeroso [*]	13	13	100%
2	Ferdian Timur Satyagraha	20	19	95%
3	Erdianto Sigit Cahyono ^{**}	7	2	28,6%
4	Busrul Iman ^{**}	7	2	28,6%
5	Rizyana Mirda	20	19	95%
6	Hadi Santoso [*]	15	15	100%
7	Tonny Prasetyo ^{**}	7	1	14,28%
8	Rudie Hardiono [*]	13	9	69,2%
9	Su'udi [*]	13	11	84,6%

Note:

^{*}) Did not serve as of June 19, 2019

^{**}) Serves as of June 19, 2019

RENCANA RAPAT DIREKSI

Pada tahun 2020, Rapat Direksi dijadwalkan pada minggu kedua tiap bulannya sebagai berikut :

NO	Tanggal	Agenda
1	06 Januari 2020	Evaluasi dan Kaji Ulang Pelaksanaan RBB 2019
2	03 Februari 2020	Pembahasan Evaluasi Kinerja
3	09 Maret 2020	Pembahasan Evaluasi Kinerja
4	06 April 2020	Evaluasi Kebijakan Perkreditan Bank
5	04 Mei 2020	Evaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi 2020
6	08 Juni 2020	Pembahasan Evaluasi Kinerja
7	13 Juli 2020	Pembahasan Evaluasi Kinerja
8	10 Agustus 2020	Pembahasan Evaluasi Kinerja
9	14 September 2020	Evaluasi dan Kaji Ulang Pelaksanaan RBB 2020
10	12 Oktober 2020	Pembahasan Kebijakan Umum Direksi 2021
11	09 November 2020	Evaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi 2020
12	14 Desember 2020	Pembahasan Evaluasi Kinerja

BOARD OF DIRECTORS MEETING PLANS

In 2020, the meetings of Board of Directors are scheduled to be held in the second week of each month as detailed below:

No.	Date	Agenda
1	January 6, 2020	Evaluation and Review of 2019 RBB Implementation
2	February 3, 2020	Discussion on Performance Evaluation
3	March 9, 2020	Discussion on Performance Evaluation
4	April 6, 2020	Evaluation of Bank's Credit Policies
5	May 4, 2020	Evaluation of Information Technology Strategic Plans for 2020
6	June 8, 2020	Discussion on Performance Evaluation
7	July 13, 2020	Discussion on Performance Evaluation
8	August 10, 2020	Discussion on Performance Evaluation
9	September 14, 2020	Evaluation and Review of 2020 RBB Implementation
10	October 12, 2020	Discussion on the General Policies of Board of Directors for 2021
11	November 9, 2020	Evaluation of Information Technology Strategic Plans for 2020
12	December 14, 2020	Discussion on Performance Evaluation



REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

REMUNERATION OF BOARD OF COMMISSIONERS
AND BOARD OF DIRECTORS

KEBIJAKAN REMUNERASI

Bank Jatim telah memiliki dan menerapkan kebijakan remunerasi yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 058/007/DK/KEP tanggal 02 Oktober 2019. Kebijakan remunerasi telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum maupun unit usaha syariah, dimana kebijakannya mengatur:

- Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan risiko
- Pemberlakuan remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan ketentuan regulator terkait penerapan remunerasi bagi Bank Umum maupun Unit Usaha Syariah.

PENETAPAN REMUNERASI

Bank menetapkan remunerasi menjadi 2 (dua) yaitu Remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel. Bank juga menentukan pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT) yaitu Direktur Utama dan Direktur Bidang dibawah Direktur Utama. Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2019 bahwa remunerasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah remunerasi yang bersifat variabel. Remunerasi yang bersifat variabel bagi *Material Risk Takers* diberikan dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham sebesar persentase tertentu.

PROSEDUR PENGUSULAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN REMUNERASI

Prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:



Bank menetapkan remunerasi menjadi 2 (dua) yaitu Remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel. Bank juga menentukan pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT) yaitu Direktur Utama dan Direktur Bidang dibawah Direktur Utama. Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2019 bahwa remunerasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah remunerasi yang bersifat variabel. Remunerasi yang bersifat variabel bagi *Material Risk Takers* diberikan dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham sebesar persentase tertentu.

REMUNERATION POLICY

Bank Jatim has owned and implemented a remuneration policy that was approved in the General Meeting of Shareholders (GMS) and was stated in the Decree of the Board of Commissioners No. 058/007/DK/KEP dated October 2, 2019. The remuneration policy has been adjusted with the Financial Services Authority Regulation No. 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 and the Financial Services Authority Circular Letter No. 40/SEOJK.03/2016 dated September 26, 2016 and the Financial Services Authority Regulation No. 59/POJK.03/2017 dated December 18, 2017 concerning the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks and Sharia Business Units, where the policy regulates:

- Prudent principle in the provision of risk-based remuneration
- The implementation of variable remuneration in accordance with regulatory provisions related to the implementation of remuneration for Commercial Banks and Sharia Business Units.

DETERMINATION OF REMUNERATION

The Bank classifies the remuneration into 2 (two) types, namely permanent and variable. The Bank also determines the parties who become Material Risk Takers (MRT), namely the President Director and Division Directors under the President Director. In the framework of fulfilling the Regulation of the Financial Services Authority No. 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2019, the remuneration used as the basis for calculation is variable remuneration. Variable remuneration for Material Risk Takers is given in the form of shares or share-based instruments at a certain percentage.

REMUNERATION PROPOSAL AND DETERMINATION PROCEDURES

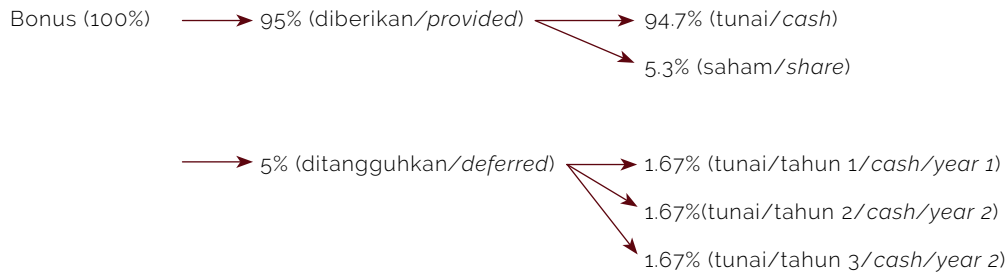
The procedures for proposing and determining the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

The Bank classifies the remuneration into 2 (two) types, namely permanent and variable. The Bank also determines the parties who become Material Risk Takers (MRT), namely the President Director and Division Directors under the President Director. In the framework of fulfilling the Regulation of the Financial Services Authority No. 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2019, the remuneration used as the basis for calculation is variable remuneration. Variable remuneration for Material Risk Takers is given in the form of shares or share-based instruments at a certain percentage.

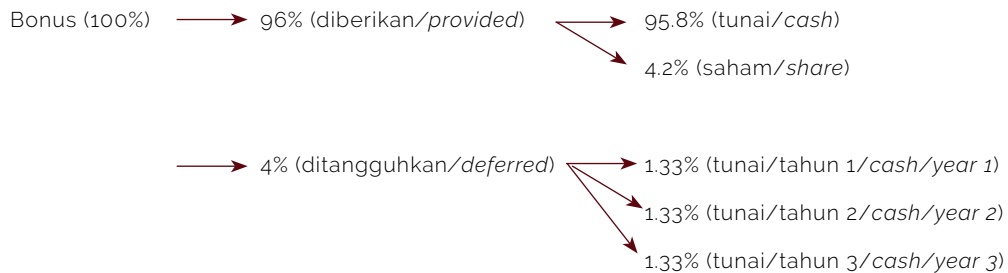
STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur Pemberian Remunerasi bagi *Material Risk Takers* (MRT) Bank Jatim dibagi menjadi dua sebagai berikut:

- Direktur Utama / *President Director*



- Direktur/director



PENGUNGKAPAN INDIKATOR UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 96 ayat (1), ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditentukan berdasarkan ketentuan RUPS dan Pasal 113 yang berbunyi ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Komisaris ditentukan berdasarkan ketentuan RUPS. Sehingga dalam hal ini prosedur untuk melaksanakan remunerasi telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, secara substansial indikator kinerja Direksi diukur berdasarkan pencapaian target sesuai rencana bisnis yang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris antara lain aspek keuangan dan pemasaran, operasional dan SDM serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang telah ditetapkan. Remunerasi juga ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional.

JUMLAH NOMINAL REMUNERASI PER KOMPONEN UNTUK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PAKET REMUNERASI YANG DITERIMA DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2018 Dewan Komisaris Bank Jatim memiliki komposisi sebagai berikut:

- 4 orang menjabat sampai dengan Bulan Februari 2018.
- Seorang menjabat mulai dari Bulan Januari 2018.
- 2 orang menjabat mulai Bulan Agustus 2018

REMUNERATION STRUCTURE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The structure of Remuneration for the Material Risk Takers (MRT) of the Bank is divided into two as follows:

DISCLOSURE OF INDICATORS FOR DETERMINING REMUNERATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 96 paragraph (1), the provisions on the amount of salary and benefits of members of the Board of Directors are determined based on the provisions of the GMS and Article 113 which reads the provisions on the amount of salary and benefits of Commissioners' members determined based on the provisions of the GMS. So that in this case the procedure for implementing the remuneration has been adjusted to the laws and regulations. Furthermore, substantially the performance indicators of the Board of Directors are measured based on the achievement of targets in accordance with the business plans that have been prepared by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners including financial and marketing, operational and HR aspects as well as compliance with established legislation. Remuneration is also determined by considering the condition of the national economy.

TOTAL REMUNERATION PER COMPONENT FOR BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

REMUNERATION PACKAGE RECEIVED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2018, the Board of Commissioners of Bank Jatim has the following composition;

- 4 people served until February 2018.
- 1 person started serving from January 2018.
- 2 people started serving from August 2018.

Pada 2019 Dewan Komisaris Bank Jatim memiliki komposisi sebagai berikut;

- 4 orang menjabat mulai Januari 2019.
- 2 orang menjabat mulai bulan Oktober 2019.

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun oleh Dewan Komisaris			
	2018		2019	
	Orang	Rp(juta)	Orang	Rp(juta)
Remunerasi (gaji, tunjangan, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	7	10.365	6	9.485
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan lain-lain) yang:	-	-	-	-
Dapat dimiliki	-	-	-	-
Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
TOTAL	4	10.365	6	9.485

PAKET REMUNERASI YANG DITERIMA DIREKSI

Pada tahun 2018 Direksi Bank Jatim memiliki komposisi sebagai berikut;

- 7 orang menjabat mulai Januari 2018.

Pada 2019 Direksi Bank Jatim memiliki komposisi sebagai berikut;

- 3 orang menjabat mulai Januari 2019.
- 4 orang menjabat sampai dengan April 2019.
- 3 orang menjabat mulai bulan Oktober 2019.

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun oleh Direksi			
	2018		2019	
	Orang	Rp(juta)	Orang	Rp(juta)
Remunerasi (gaji, tunjangan, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	7	36.974	10	42.397
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan lain-lain) yang:	-	-	-	-
Dapat dimiliki	-	-	-	-
Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
TOTAL	7	36.974	10	42.397

Remunerasi Per Orang	Jumlah Dewan Komisaris	
	2018	2019
Di atas Rp5 milyar	-	-
Di atas Rp2 milyar s/d Rp5 milyar	1	2

In 2019, the Board of Commissioners of Bank Jatim has the following composition;

- 4 people started serving from January 2019.
- 2 people started serving from October 2019.

Type of Remuneration and Other Facilities	Amount Received in 1 (one) year by the Board of Commissioners			
	2018		2019	
	People	Rp (million)	People	Rp (million)
Remuneration (salary, allowance, tantiem and other facilities in non-natura form)	7	36.974	10	42.397
Other facilities in natura form (housing, transportation, health insurance, and so on), which:	-	-	-	-
Can be owned	-	-	-	-
Cannot be owned	-	-	-	-
TOTAL	7	36.974	10	42.397

REMUNERATION PACKAGE RECEIVED BY THE BOARD OF DIRECTORS

In 2018, the Board of Directors of Bank Jatim has the following composition;

- 7 people started serving from January 2018.

In 2019, the Board of Directors of Bank Jatim has the following composition;

- 3 people started serving from January 2019.
- 4 people served until April 2019.
- 3 people started serving October 2019.

Type of Remuneration and Other Facilities	Amount Received in 1 (one) year by the Board of Directors			
	2018		2019	
	People	Rp (million)	People	Rp (million)
Remuneration (salary, allowance, tantiem and other facilities in non-natura form)	7	36.974	10	42.397
Other facilities in natura form (housing, transportation, health insurance, and so on), which:	-	-	-	-
Can be owned	-	-	-	-
Cannot be owned	-	-	-	-
TOTAL	7	36.974	10	42.397

Remuneration per Person	Total Members of Board of Commissioners	
	2018	2019
Above Rp5 billion	-	-
Above Rp2 billion up to Rp5 billion	1	2

Di atas Rp1 milyar s/d Rp2 milyar	4	2
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 milyar	-	-
Rp500 juta ke bawah	2	2

Remunerasi Per Orang	Jumlah Direksi	
	2018	2019
Di atas Rp5 milyar	4	7
Di atas Rp2 milyar s/d Rp5 milyar	3	-
Di atas Rp1 milyar s/d Rp2 milyar	-	-
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 milyar	-	3
Rp500 juta ke bawah	-	-

REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL BAGI DIREKSI

Remunerasi Bersifat Variabel	Jumlah Diterima Direksi Dalam 1 Tahun			
	2017		2018	
	Orang	Rp(juta)	Orang	Rp(juta)
TOTAL	7	22.248	7	28.513

REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABLE OPSI SAHAM BAGI DIREKSI

Remunerasi Bersifat Variabel Opsi Saham	Ops Saham Direksi Dalam 1 Tahun			
	2017		2018	
	Orang	Rp(juta)	Orang	Rp(juta)
TOTAL	7	946	7	1.194

Above Rp1 billion up to Rp2 billion
Above Rp500 million up to Rp1 billion
Below Rp500 million

Remuneration per Person	Total Members of Board of Directors	
	2018	2019
Above Rp5 billion		
Above Rp2 billion up to Rp5 billion		
Above Rp1 billion up to Rp2 billion		
Above Rp500 million up to Rp1 billion		
Below Rp500 million		

VARIABLE REMUNERATION FOR BOARD OF DIRECTORS

Variable Remuneration	Amount Received in 1 (one) year by the Board of Directors			
	2017		2018	
	People	Rp (million)	People	Rp (million)
TOTAL				

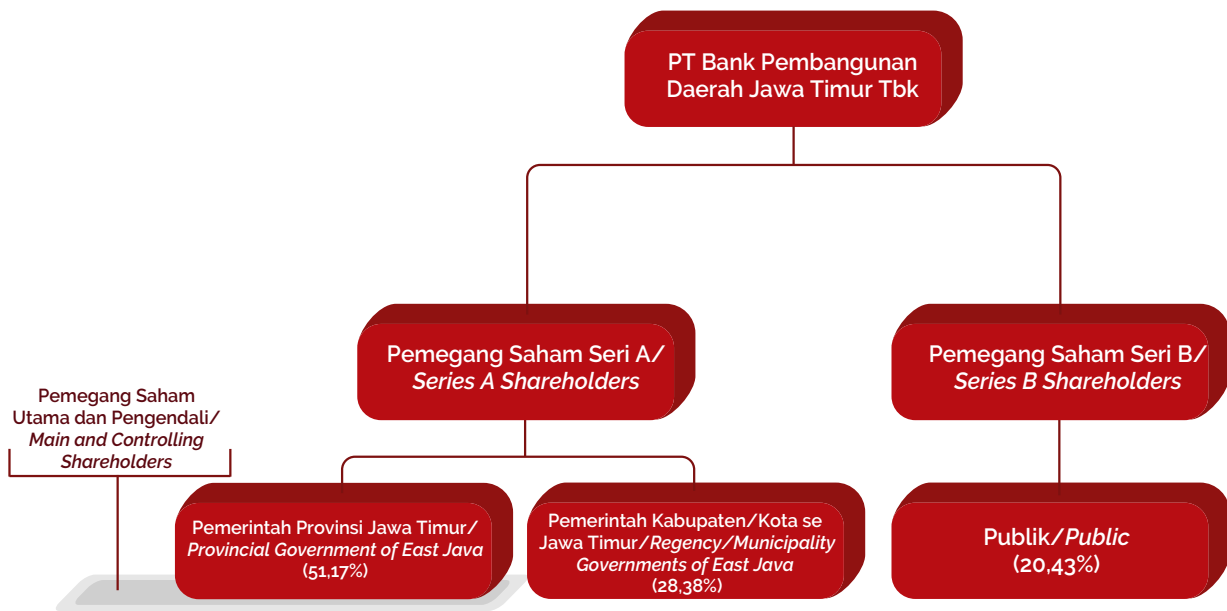
VARIABLE REMUNERATION OF STOCK OPTION FOR BOARD OF DIRECTORS

Variable Remuneration of Stock Option	Stock Option in 1 (one) year for the Board of Directors			
	2017		2018	
	People	Rp (million)	People	Rp (million)
TOTAL	7	946	7	1.194

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

MAIN AND CONTROLLING
SHAREHOLDERS





KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BANK JATIM

Per 31 Desember 2019

STATUS PEMILIK	TOTAL		
	PEMEGANG SAHAM	LEMBAR SAHAM	% KEPEMILIKAN
Perorangan Ind	13.942	927.605.944	6,18306
Pemerintah Daerah	39	11.934.147.982	79,54841
Karyawan	305	4.625.500	0,03083
Koperasi	2	103.600	0,00069
Yayasan	1	1.000.000	0,00667
Dana Pensiun	17	16.359.000	0,10904
Asuransi	10	80.625.200	0,53742
Perseroan Terbatas	36	116.505.612	0,77658
Reksadana	17	218.237.073	1,45468
Perorangan Asing	19	1.441.900	0,00961
Badan Usaha Asing	186	1.701.718.771	11,34300
TOTAL	14.574	15.002.370.582	100

SHARE OWNERSHIP COMPOSITION OF BANK JATIM

AS OF December 31th, 2019

Owner Status	TOTAL		
	Shareholder	Number of Shares	% Ownership
Individual	13.942	927.605.944	6,18306
Regional Government	39	11.934.147.982	79,54841
Employee	305	4.625.500	0,03083
Cooperative	2	103.600	0,00069
Foundation	1	1.000.000	0,00667
Pension Fund	17	16.359.000	0,10904
Insurance	10	80.625.200	0,53742
Limited Liability Company	36	116.505.612	0,77658
Mutual Funds	17	218.237.073	1,45468
Foreign Individuals	19	1.441.900	0,00961
Foreign Company	186	1.701.718.771	11,34300
TOTAL	14.574	15.002.370.582	100

KEPEMILIKAN SAHAM BANK JATIM OLEH
DIREKSI & DEWAN KOMISARIS

Per 31 Desember 2019

NAMA	JABATAN	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE
Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	833.600	0.0055565
Rudi Purwono	Komisaris	0	0
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	0	0
Budi Setiawan	Komisaris Independen	0	0
Mas'ud Said	Komisaris Independen	0	0
Heru Tjahjono	Komisaris	0	0
Hadi Santoso	Direktur Utama	837.734	0.0055840
Busrul Iman	Direktur Komersial & Korporasi	0	0
Elfauaid Aguswantoro	Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah	0	0
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	1.094.133	0.0072931
Tonny Prasetyo	Direktur TI & Operasi	0	0
Ferdian Timur S.	Direktur Keuangan	4.744.933	0.0316279
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	0	0
TOTAL		7.510.400	0.0500615

SHARE OWNERSHIP OF BANK JATIM BY THE BOARD
OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

AS OF December 31th, 2019

NAME	POSITION	NUMBER OF SHARES	PERCENTAGE
Akhmad Sukardi	President Commissioner	833.600	0.0055565
Rudi Purwono	Commissioner	0	0
Candra Fajri Ananda	Independent Commissioner	0	0
Budi Setiawan	Independent Commissioner	0	0
Mas'ud Said	Independent Commissioner	0	0
Heru Tjahjono	Commissioner	0	0
Hadi Santoso	President Director	837.734	0.0055840
Busrul Iman	Commerce & Corporation Director	0	0
Elfauaid Aguswantoro	Consumer, Retail and Sharia Business Director	0	0
Rizyana Mirda	Business Risk Director	1.094.133	0.0072931
Tonny Prasetyo	IT and Operations Director	0	0
Ferdian Timur S.	Finance Director	4.744.933	0.0316279
Erdianto Sigit Cahyono	Compliance and Risk Management Director	0	0
TOTAL		7.510.400	0.0500615

PEMILIKAN SAHAM BANK JATIM YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH

Per 31 Desember 2019

NAMA	ALAMAT	JUMLAH SAHAM	% KEPEMILIKAN
Pemda Tingkat I Jawa Timur	Jl Pahlawan 110 Surabaya	7.676.913.648	51,171

KEPEMILIKAN SAHAM BANK JATIM OLEH PEJABAT SETINGKAT DI BAWAH DIREKSI

Per 31 Desember 2019

PEMIMPIN	JUMLAH SAHAM	%
DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS MANAJEMEN KINERJA	800	0
DIVISI ANGGARAN DAN PENGENDALIAN KEUANGAN	-	-
YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	-	-
DPP	-	-
DIVISI KREDIT MIKRO, RITEL DAN PROGRAM	-	-
DIVISI KREDIT KONSUMER	-	-
DIVISI KREDIT MENENGAH KORPORASI DAN SINDIKASI	-	-
DIVISI PENYELAMATAN PENYELESAIAN KREDIT	-	-
DPP	-	-
DIVISI KEPATUHAN DAN TATA KELOLA	412,400	0
DIVISI UMUM	-	-
DIVISI HUKUM	-	-
DIVISI HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN BISNIS	184,800	0
LEARNING CENTER	-	-
DIVISI RISIKO KREDIT	-	-
DIVISI HUMAN CAPITAL	636,300	0
DIVISI DANA JASA DAN E-BANKING	-	-
CORPORATE SECRETARY	100	0
DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI	-	-
DIVISI TRESURI	-	-
DIVISI MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN	-	-
DIVISI AUDIT INTERN	-	-
DIVISI PENDUKUNG BISNIS SYARIAH	-	-
DIVISI OPERASIONAL JARINGAN SYARIAH	-	-
DIVISI SERVICE QUALITY ASSURANCE	336,300	0

SHARE OWNERSHIP OF BANK JATIM OF 5% AND ABOVE

AS OF December 31th, 2019

NAME	ADDRESS	NUMBER OF SHARES	% OWNERSHIP
East Java Regional Government Level I	Jl Pahlawan 110 Surabaya	7.676.913.648	51,171

SHARE OWNERSHIP OF BANK JATIM BY OFFICERS OF ONE LEVEL BELOW THE BOARD OF DIRECTORS

As of December 31th, 2019

HEAD	NUMBER OF SHARES	%
STRATEGIC PLANNING & PERFORMANCE MANAGEMENT DIVISION:	800	0
BUDGETING AND FINANCIAL CONTROL DIVISION	-	-
YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	-	-
DPP	-	-
MICRO, RETAIL & PROGRAM CREDIT DIVISION	-	-
CONSUMER CREDIT DIVISION	-	-
MEDIUM CORPORATION & SYNDICATION CREDIT DIVISION	-	-
CREDIT RESTRUCTURED SETTLEMENT DIVISION	-	-
DPP	-	-
COMPLIANCE AND GOVERNANCE DIVISION	412,400	0
GENERAL AFFAIRS DIVISION	-	-
LEGAL DIVISION	-	-
DIVISI HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN BISNIS	184,800	0
LEARNING CENTER	-	-
CREDIT RISK DIVISION	-	-
HUMAN CAPITAL DIVISION	636,300	0
FUND SERVICES AND E-BANKING DIVISION	-	-
CORPORATE SECRETARY	100	0
INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION	-	-
TREASURY DIVISION	-	-
CORPORATE RISK MANAGEMENT DIVISION	-	-
INTERNAL AUDIT DIVISION	-	-
SHARIA BUSINESS SUPPORT DIVISION	-	-
SHARIA OPERATIONAL NETWORK & SERVICES DIVISION	-	-
SERVICE QUALITY ASSURANCE DIVISION	336,300	0



HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM

AFFILIATIONS OF BOARD OF COMMISSIONERS,
BOARD OF DIRECTORS, AND SHAREHOLDERS



Hubungan Afiliasi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Menunjuk Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan nomor 053/282/SE/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015, Manajemen Bank Jatim tidak memiliki hubungan afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan maupun keuangan dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim mempunyai integritas dan independensi serta tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan objektif.

Adapun pihak terafiliasi disebutkan sebagai berikut;

1. Anggota Dewan komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank;
2. Anggota Pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Direksi, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus (Undang-undang no.7/1992 tentang Perbankan);
5. Perusahaan anak atau *subsidiary*;
6. Auditor Eksternal yang mengaudit Bank, dan;
7. Pihak terkait karena adanya hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Pihak terafiliasi adalah pihak yang memiliki hubungan sebagai berikut ;

1. Hubungan keluarga karena perkawinan;
2. Hubungan keluarga karena keturunan;
3. Saudara dari orang yang bersangkutan (derajat II horizontal);
4. Hubungan antara Perseroan dengan Pihak terkait karena adanya hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Berikut adalah tabel yang menggambarkan hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.

Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners in accordance with Regulation of Financial Services Authority No. 55/POJK.03/2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks states that members of the Board of Directors and Board of Commissioners must disclose financial and family relationships with other members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Bank in the report on governance implementation.

Referring to the Implementation Guidelines for Conflict of Interest No. 053/282/SE/DIR/KPTH dated December 31st, 2015, the Management of Bank Jatim has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors and controlling shareholders.

The Board of Commissioners and Directors of Bank Jatim have no affiliation either family or financial with fellow Commissioners, Directors and Controlling Shareholders. The Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Jatim have integrity and independence and do not have a conflict of interest that can interfere with their ability to carry out their duties in a professional and objective manner.

The affiliated parties are mentioned as follows;

1. Members of the board of commissioners, supervisors, directors or their proxies, bank officials or employees;
2. Members of the Management, supervisors, managers or proxies, officials or employees of the bank, especially for banks in the form of cooperative law in accordance with applicable laws and regulations;
3. The parties providing services to the Bank include public accountants, appraisers, legal consultants and other consultants;
4. Parties that, according to Bank Indonesia's assessment, have also influenced the management of banks, include shareholders and their families, Board of Directors' families, supervisory families, Board of Directors' families, management families (Law No.7/1992 concerning Banking);
5. Subsidiary or subsidiary company;
6. External Auditor who audits the Bank, and;
7. Related parties due to ownership, management and financial relationships as stipulated in Bank Indonesia regulations concerning the Legal Lending Limit (LLL).

Affiliated parties are parties that have the following relations;

1. Family relationships due to marriage;
2. Family relations due to heredity;
3. Relatives of the person (horizontal degree II);
4. The relationship between the Bank and related parties is due to the ownership, management and financial relationship as stipulated in the Bank Indonesia regulation concerning the Legal Lending Limit (LLL).

The following table illustrates the affiliation of the Board of Commissioners and Board of Directors with other members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and/or the controlling shareholders of the Bank.

DEWAN KOMISARIS

NO	NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
			Dewan Komisaris		DIREKSI		PSP		Dewan Komisaris		DIREKSI		PSP	
			Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
1	AKHMAD SUKARDI	KOMISARIS UTAMA		T		T		T		T		T		T
2	RUDI PURWONO	KOMISARIS INDEPENDEN		T		T		T		T		T		T
3	CANDRA FAJRI ANANDA	KOMISARIS INDEPENDEN		T		T		T		T		T		T
4	BUDI SETIAWAN	KOMISARIS		T		T		T		T		T		T
5	MUHAMMAD MAS'UD	KOMISARIS INDEPENDEN		T		T		T		T		T		T
6	HERU TJAHJONO	KOMISARIS		T		T		T		T		T		T

BOARD OF COMMISSIONERS

NO	NAME	POSITION	Family Relationship with						Financial Relationship with					
			Board of Commissioners		Board of Directors		PSP		Board of Commissioners		Board of Directors		PSP	
			Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1	AKHMAD SUKARDI	President Commissioner		N		N		N		N		N		N
2	RUDI PURWONO	Independent Commissioner		N		N		N		N		N		N
3	CANDRA FAJRI ANANDA	Independent Commissioner		N		N		N		N		N		N
4	BUDI SETIAWAN	Commissioner		N		N		N		N		N		N
5	MUHAMMAD MAS'UD	Independent Commissioner		N		N		N		N		N		N
6	HERU TJAHJONO	Commissioner		N		N		N		N		N		N

DIREKSI

NO	NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
			Dewan Komisaris		DIREKSI		PSP		Dewan Komisaris		DIREKSI		PSP	
			Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
1	FERDIAN TIMUR SATYAGRAHA	DIREKTUR KEUANGAN		T		T		T		T		T		T
2	BUSRUL IMAN	DIREKTUR KOMERSIAL dan KORPORASI		T		T		T		T		T		T
3	RIZYANA MIRDA	DIREKTUR RISIKO BISNIS		T		T		T		T		T		T
4	TONNY PRASETYO	DIREKTUR TI & OPERASI		T		T		T		T		T		T
5	ERDIANTO SIGIT CAHYONO	DIREKTUR KEPATUHAN & MANAJEMEN RISIKO		T		T		T		T		T		T

*saat ini, posisi Direktur Utama dan Direktur Komersial, Ritel dan Usaha Syariah belum terisi.

ETIKA HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hubungan	Dewan Komisaris	Direksi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan	Memahami Prinsip-Prinsip GCG & Melaksanakannya Sebagai Contoh Perilaku Bagi Pegawai. Menghindari Timbulnya Benturan Kepentingan Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Menjaga Keamanan & Kerahasiaan Informasi Perusahaan	Memahami Prinsip-Prinsip GCG Dan Memberikan Contoh Perilaku Bagi Pegawai Menghindari Benturan Kepentingan Menjaga Keamanan & Kerahasiaan Informasi Perusahaan

BOARD OF DIRECTORS

NO	NAME	POSITION	Family Relationship with						Financial Relationship with					
			Board of Commissioners		Board of Directors		PSP		Board of Commissioners		Board of Directors		PSP	
			Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1	FERDIAN TIMUR SATYAGRAHA	Finance Director		N		N		N		N		N		N
2	BUSRUL IMAN	Commerce and Corporation Director		N		N		N		N		N		N
3	RIZYANA MIRDA	Business Risk Director		N		N		N		N		N		N
4	TONNY PRASETYO	IT and Operations Director		N		N		N		N		N		N
5	ERDIANTO SIGIT CAHYONO	Compliance and Risk Management Director		N		N		N		N		N		N

*at present, the positions of President Director and Commercial, Retail and Sharia Business Director remain vacant

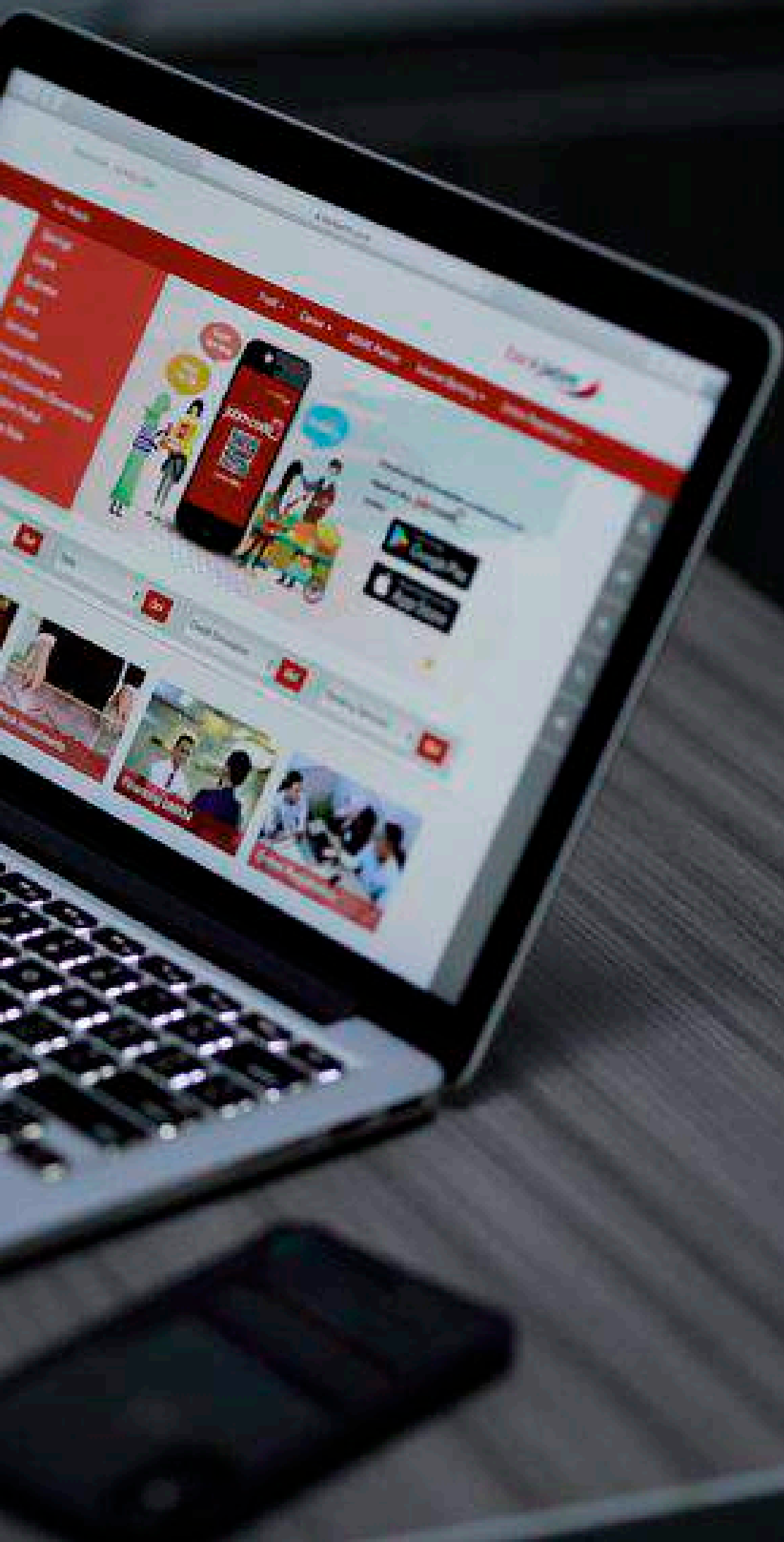
ETHICS OF THE RELATIONSHIP OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Relationship	Board of Commissioners	Board of Directors
Corporate Governance Implementation	Understanding GCG Principles & Implementing them as Examples of Behavior for Employees. Avoiding Conflicts of Interest, Both Direct and Indirect Maintaining Security & Confidentiality of Company Information	Understanding the GCG Principles Showing Examples of Behavior for Employees Avoiding Conflicts of Interest Maintaining Security & Confidentiality of Company Information

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

POLICY ON DIVERSITY IN BOARD
OF COMMISSIONERS AND BOARD
OF DIRECTORS COMPOSITIONS





Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu.

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain terdiri dari:

1. Keahlian/Pengalaman Dewan Komisaris, memiliki paling kurang:
 - 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
 - 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
2. Kewarganegaraan
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Jenis Kelamin
Saat ini seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank Jatim Berjenis Kelamin Laki-Laki. Adapun 4 (empat) orang anggota Direksi berjenis kelamin laki-laki serta 1 (satu) orang anggota Direksi berjenis kelamin perempuan.
4. Usia
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi

DEWAN KOMISARIS

- Minimum 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
- Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

The diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors as stipulated in the Appendix of the Circular Letter of Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Governance Guidelines for Public Company has been accommodated in the Bank's Articles of Association. The appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out by taking into account the experience and understanding of the banking industry, the integrity and dedication of each individual.

The composition of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Jatim that is appropriate and in accordance with the needs of the Bank will support the effectiveness of carrying out the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors and support the achievement of the Bank's vision and mission to continue to grow and develop.

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Diversity factors in the composition of the members of Board of Commissioners and Board of Directors include:

1. The expertise/experience of the Board of Commissioners, has at least:
 - 1 (one) member who has expertise/work experience in the field of economics/business/finance, and/or
 - 1 (one) member who has expertise/work experience in the banking industry, and
 - 1 (one) member who has expertise/work experience in the field of risk management.
2. Nationality
Members of the Board of Commissioners and Board of Directors are Indonesian citizens.
3. Gender
At present, all Members of the Board of Commissioners of Bank Jatim are Male Gender. The 4 (four) members of the Board of Directors are male and 1 (one) member of the Board of Directors is female.
4. Age
Members of the Board of Commissioners and Board of Directors have a variety of ages.
5. Independence

BOARD OF COMMISSIONERS

- Minimum 50% (fifty percent) of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.
- The term of office of an Independent Commissioner is a maximum of 4 (four) years, and can be reappointed with due regard to applicable regulations.

DIREKSI

Sesuai POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank Jatim telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Direktur yang memenuhi persyaratan independensi

BOARD OF DIRECTORS

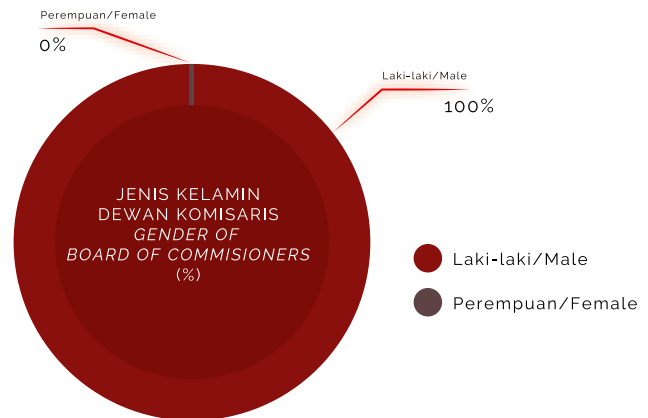
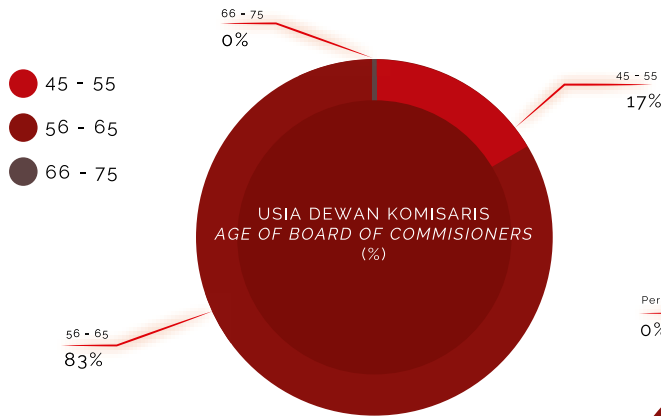
In accordance with POJK No. 46/POJK.03/2017 Concerning the Implementation of Compliance Functions of Commercial Banks, Bank Jatim has a Director who is in charge of the Compliance Function, namely the Compliance Director and Risk Management as a Director who meets the independence requirements

PENCAPAIAN KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini telah memenuhi aspek keberagaman tersebut di atas dan selaras dengan strategi, Visi dan Misi Bank.

ACHIEVEMENT OF DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

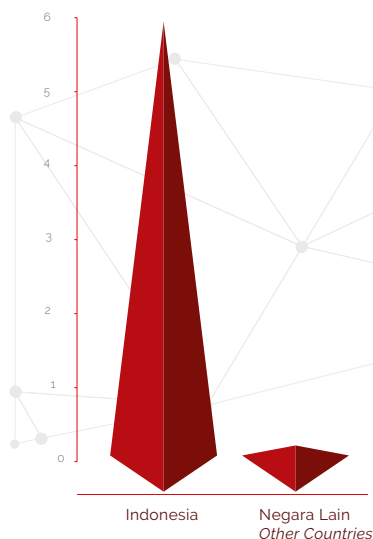
The composition of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors currently fulfills the above aspects of diversity and is in line with the Bank's strategy, vision and mission.



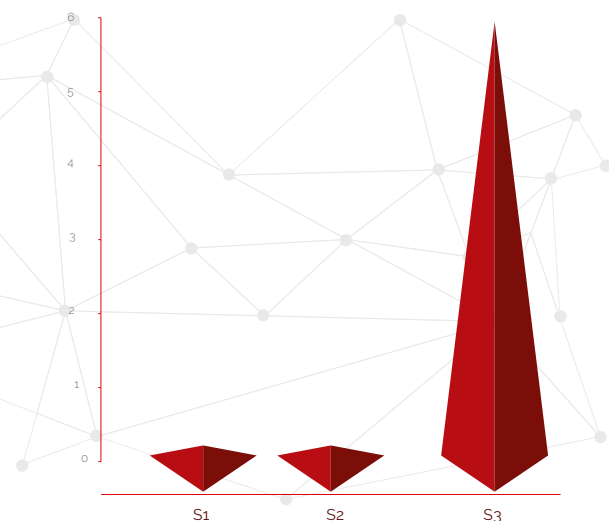
KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA IMPLEMENTASINYA

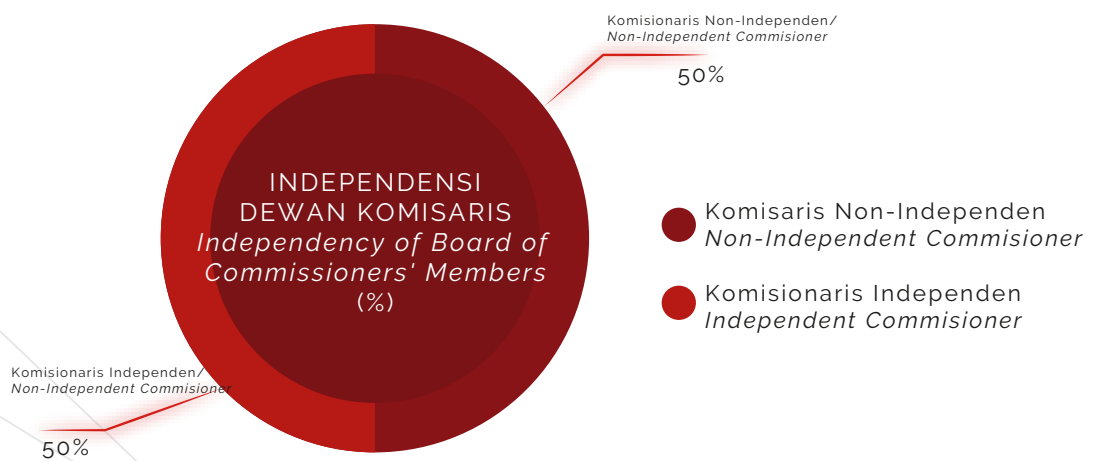
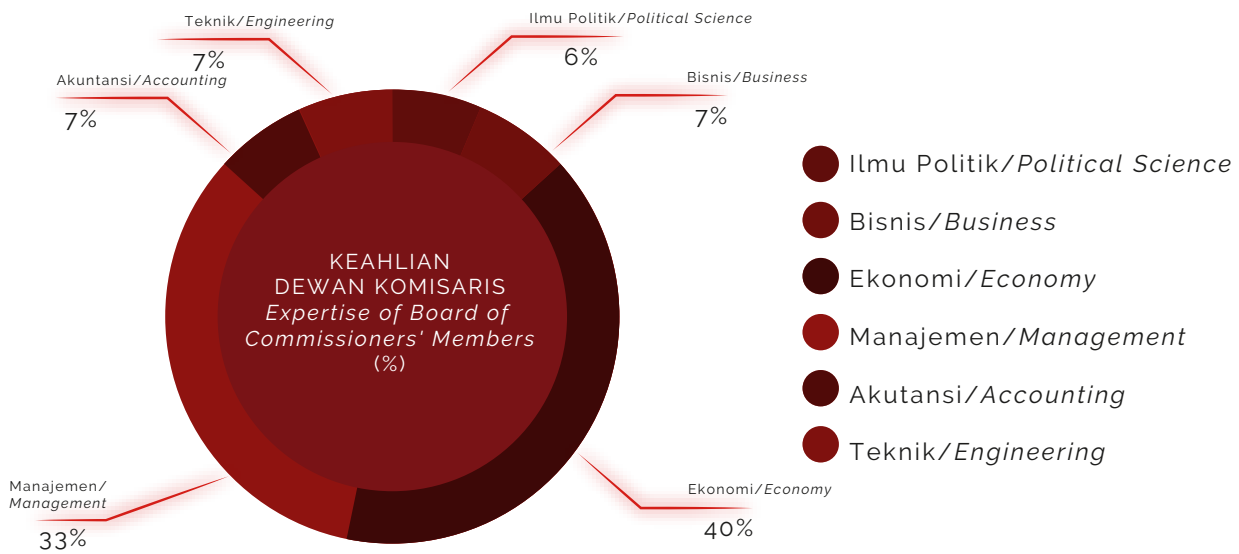
POLICY ON DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS AND THE IMPLEMENTATION

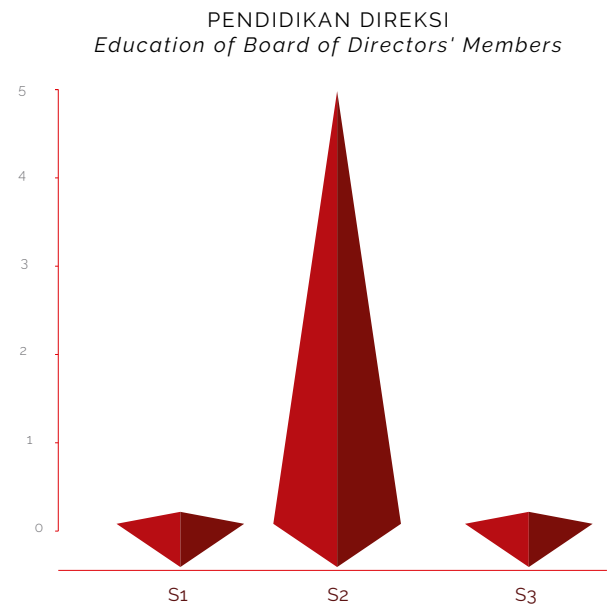
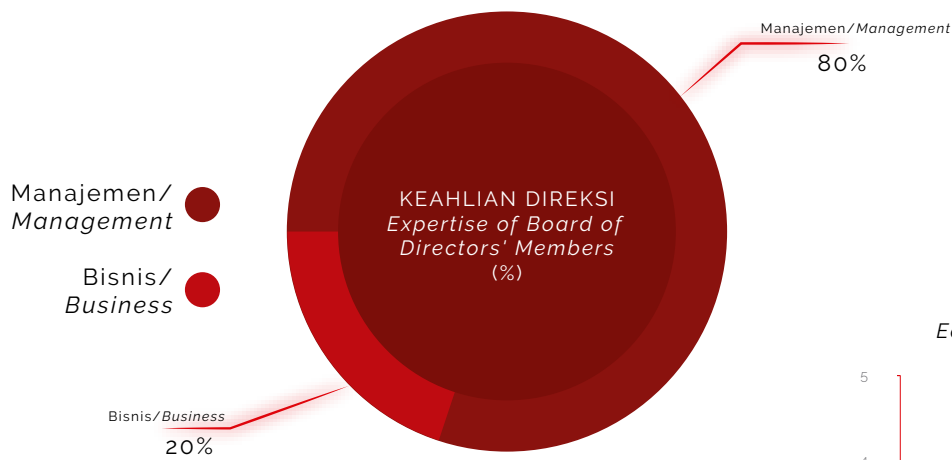
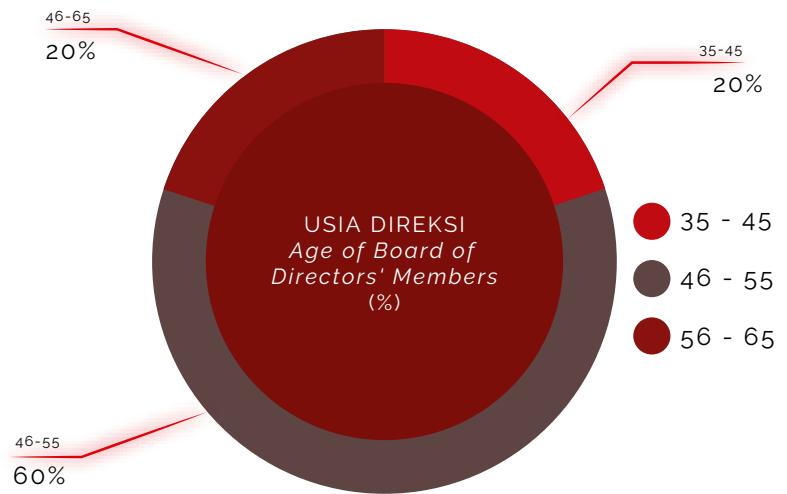
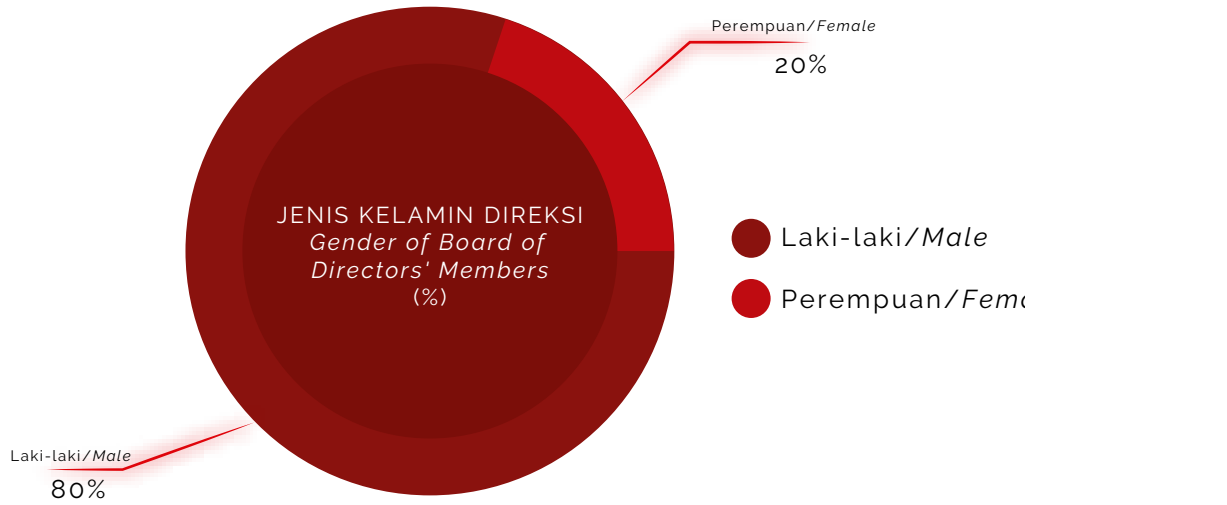
KEWARGANEGARAAN DEWAN KOMISIONARIS
Nationality of Board of Commissioners' Members



PENDIDIKAN DEWAN KOMISIONARIS
Education of Board of Commissioners' Members









KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

COMMITTEES UNDER THE
BOARD OF COMMISSIONERS



KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit memiliki tugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik dalam kegiatan usaha Bank, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

PEDOMAN KERJA KOMITE PEMANTAU AUDIT

Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Komite Audit yang mengatur mengenai :

1. Peran & Fungsi;
2. Tugas, Tanggung Jawab serta Wewenang;
3. Struktur Keanggotaan
4. Interaksi Hubungan Kerja
5. Masa Tugas
6. Tata Cara dan Prosedur Kerja
7. Rapat
8. Pelaporan

Buku Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dikaji dan dikinikan secara berkala agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank. Pengkinian Buku Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dilakukan pada tanggal 23 April 2019.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Audit adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Tidak ada anggota Direksi bank maupun Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Audit.

Struktur dan keanggotaan Komite Audit periode 2019 - 2022 sesuai SK Nomor Nomor 058/339/DIR/HCP/KEP tanggal 29 November 2019 adalah sebagai berikut

No	Nama	Jabatan di Bank	Posisi di Komite	Periode Jabatan
1	Rudi Purwono	Komisaris Independen	Ketua	2019 – ditutupnya RUPS Tahun Buku 2022
2	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Anggota	2019 – ditutupnya RUPS Tahun Buku 2022
3	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Anggota	2019 – ditutupnya RUPS Tahun Buku 2022
4	Akhmad Djauhari	Pihak Independen	Anggota	2019 – ditutupnya RUPS Tahun Buku 2022

AUDIT COMMITTEE

The members of Audit Committee are responsible of assisting the Board of Commissioners in performing their duties and responsibility to ensure the establishment of good governance within all activities of the Bank as well as to oversee the implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities.

WORK GUIDELINES OF AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee has established a Work Guideline in the form of Audit Committee Manual Book (BPP) which determines the following issues:

1. Roles and Functions;
2. Duties, Responsibilities, and Authority;
3. Membership Structure;
4. Work Relationship and Interaction;
5. Term of Office;
6. Work Guidelines and Procedures;
7. Meetings;
8. Reporting.

The Audit Committee Manual Book is reviewed and updated regularly to adjust to the applicable provisions and the Bank's needs. The last update on Audit Committee Manual Book was conducted on April 23, 2019.

STRUCTURE AND MEMBERSHIP OF AUDIT COMMITTEE

The members of Audit Committee are appointed by the Board of Directors based on the decision from the Board of Commissioners' meeting. The general criteria one must fulfill to be appointed as the Audit Committee are to have good integrity, character, and morals. There are no members of Bank Jatim Board of Directors nor any other banks' Board of Directors who are members of the Audit Committee.

The structure and membership of the Audit Committee for the period of 2019-2022 according to the Decree No. 058/339/DIR/HCP/KEP dated November 29, 2019 are as follows:

No.	Name	Position	Position in the Committee	Term of Office
1	Rudi Purwono	Independent Commissioner	Head of Committee	2019 until the closing of GMS of 2022 Fiscal Year
2	Candra Fajri Ananda	Independent Commissioner	Member of Committee	2019 until the closing of GMS of 2022 Fiscal Year
3	Muhammad Mas'ud	Independent Commissioner	Member of Committee	2019 until the closing of GMS of 2022 Fiscal Year
4	Akhmad Djauhari	Independent Party	Member of Committee	2019 until the closing of GMS of 2022 Fiscal Year

KUALIFIKASI & PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

Nama, Jabatan, dan Riwayat hidup singkat anggota komite Audit				
Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat
Rudi Purwono	Ketua/Komisaris Independen	Mulai Tahun 2019 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	Ekonomi	Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga pada tahun 1994, Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Kekhususan Ekonomi Moneter, pada tahun 2004, dan meraih gelar Doktor (Dr.) pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Kekhususan Ekonomi Moneter, pada tahun 2009
Pengalaman Kerja : <i>Regional Chief Economist</i> PT Bank BNI Persero, Tbk (Januari 2011 s/d Februari 2015), Wakil Dekan I Bidang Akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (November 2010 s/d Nov 2015 dan Nov 2015 s/d Nov 2020), Economist Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Januari 2012 s/d sekarang), Wakil Ketua II Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur (Sep 2008 s/d Sep 2011 & Des 2012 s/d Maret 2016).				
Chandra Fajri Ananda	Anggota/Komisaris Independen	Mulai Tahun 2019 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	Ekonomi	<i>Bachelor in Economics (S1) from Department of Economics and Development Study Faculty of Economics, Brawijaya University, 1988, Master Degree (MSc.) from Institute of Rural Development, University of Göttingen, Germany, 1994, Doctor Degree (DR) from Institute of Rural Development University of Göttingen, Germany, June 1998.</i>
Pengalaman Kerja : Dosen KPS S2 KPS S3 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (Maret 1989-sekarang), Anggota BSBI, BSBI (Maret 2017- maret 2020), Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB (Juni 2013- Juni 2017), Ketua ISEI Malang (tahun 2010- Sekarang), Pengurus PP ISEI Pusat (tahun 2014-sekarang), Basic Principle of user Charge GIZ (tahun 2015), Konsultan Payment System (ASN) GIZ (tahun 2015), Anggota Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal Kemenkeu Kemenkeu AUSAID (tahun 2008-2014), konsultan dalam pengembangan sektor <i>public</i> di area pasca konflik Bank Dunia (tahun 2003- Maret 2004), Dewan Penasehat Perencanaan Regional Provinsi Jawa Timur (tahun 2003-2012)				
Muhammad Mas'ud	Anggota/Komisaris Independen	Mulai Tahun 2019 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	Ekonomi & Politik	Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Negara Universitas Brawijaya lulus tahun 1989, Jurusan Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang lulus tahun 1997, School of Political and International Studies Flinders University- Adelaide- Australia lulus tahun 2005
Pengalaman Kerja : Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah (Tahun 2011 - 2014), Ketua Dewan Riset Daerah Kota Malang (Tahun 2013 - 2016), Anggota Tim Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri (Tahun 2013 - sekarang), Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian (Tahun 2015 - 2018), Anggota Tim Ahli Walikota Batu (Tahun 2015 - 2016), Ketua Dewan Riset Daerah Kab. Bojonegoro (Tahun 2019 - sekarang), Direktur Pascasarjana Unisma Malang (Tahun 2019 - sekarang)				
Akhmad Djauhari	Anggota/Pihak Independen	Mulai Tahun 2019 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022		S1 Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan, Universitas Wijaya Putra , Surabaya tahun 1995, S2/MM-STIE Artha Bodhi Iswara, Surabaya tahun 2002
Pengalaman Kerja: Staf Seksi Verifikasi di Cabang Utama, Surabaya tahun 1986, Staf Seksi Pengawasan Intern di Cabang Utama, Surabaya tahun 1988, Analis Kredit Seksi Pemasaran di Cabang Utama Surabaya tahun 1992, Penyelia Pemasaran di Cabang Rumah sakit Dr. Soetomo, Surabaya tahun 2000, Penyelia Pemasaran di Cabang Utama, Surabaya tahun 2002, Penyelia Akuntansi & Teknologi di cabang Utama, Surabaya tahun 2003, Kontrol Intern di Cabang Utama, Surabaya tahun 2004, Auditor di Divisi Pengawasan tahun 2006, Auditor Cabang Syariah Surabaya tahun 2007, Auditor Khusus (Special & Assurance Audit) di Divisi Audit Intern tahun 2013, <i>Senior Auditor</i> , Sub Divisi <i>Special & Assurance Audit</i> di Divisi Audit tahun 2014, Pemimpin Sub Divisi <i>Special & Assurance Audit</i> di Divisi Audit tahun 2015				

QUALIFICATION AND PROFILE OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

Name, Position, and Brief Résumé of Audit Committee Members				
Name	Position	Term of Office	Expertise	Qualification/Résumé
Rudi Purwono	Head of Committee/ Independent Commissioner	From 2019 until the closing of the Annual GMS of 2022 Fiscal Year	Economy	Bachelor of Economics majoring in Economic Science and Development Study from the Faculty of Economics of Universitas Airlangga (1994), Postgraduate Program of Economic Science majoring in Monetary Economics from the Faculty of Economics of the University of Indonesia (2004), and Doctorate degree from the Postgraduate Program of Economic Science majoring in Monetary Economics of the Faculty of Economics of the University of Indonesia (2009)
Career History:				
Regional Chief Economist at PT Bank BNI Persero, Tbk (January 2011 to February 2015), Vice Dean I of Academic and Student Affairs of the Faculty of Economics and Business of Universitas Airlangga (November 2010 to November 2015 and November 2015 to November 2020), Economist at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (January 2012 up to present), Deputy Chairman II of Remuneration Board of East Java Province (September 2008 to September 2011 & December 2012 to March 2016).				
Chandra Fajri Ananda	Member of Committee/ Independent Commissioner	From 2019 until the closing of the Annual GMS of 2022 Fiscal Year	Economy	Bachelor in Economics (S1) from Department of Economics and Development Study Faculty of Economics, Brawijaya University, 1988, Master Degree (MSc.) from Institute of Rural Development, University of Göttingen, Germany, 1994, Doctor Degree (DR) from Institute of Rural Development University of Göttingen, Germany, June 1998
Career History:				
Lecturer and KPS S2 and S3 at the Faculty of Economics of Brawijaya University (March 1989 up to present), Member of BSBI (March 2017-March 2020), Dean of Faculty of Economics and Business of Brawijaya University (June 2013-June 2017), Chairman of ISEI Malang (2020 up to present), Management Board of PP ISEI Pusat (2014 up to present), Basic Principle of User Charge GIZ (2015), Payment System Consultant (ASN) GIZ (2015), Member of Team of Assistant for Fiscal Decentralization of the Ministry of Finance, AUSAID (2008-2014), Consultant for Public Sector Development in Post-Conflict Area at the World Bank (2003-March 2004), member of Board of Trustees for Regional Planning of East Java Province (2003-2012).				
Muhammad Mas'ud	Member of Committee/ Independent Commissioner	From 2019 until the closing of the Annual GMS of 2022 Fiscal Year	Economy and Politics	State Administration major from the Faculty of Administration Science of Brawijaya University (1989) Master's degree in Management from Universitas Muhammadiyah Malang (1997) School of Political and International Studies of Flinders University, Adelaide, Australia (2005)
Career History:				
Assistant to the Special Staff for President in Regional Development and Autonomy (2011-2014), Head of Regional Research Board of Malang (2013-2016), member of Development Control and Acceleration Team of Kediri Regency (2013 up to present), Special Staff to the Minister of Social Affairs in HR Development and Ministerial Programs (2015-2018), Member of Expert Staff for the Mayor of Batu (2015-2016), Chairman of Regional Research Board of Bojonegoro Regency (2019 up to present), and Director of Postgraduate Program of Unisma Malang (2019 up to present).				
Akhmad Djauhari	Member of Committee/ Independent Party	From 2019 until the closing of the Annual GMS of 2022 Fiscal Year	Economy	Bachelor's degree in Economic Science and Development Studies of Universitas Wijaya Putra, Surabaya (1995) and Master's degree in Management from STIE Artha Bodhi Iswara, Surabaya (2002)
Career History:				
Staff of Verification Section at Surabaya Main Branch (1986), Staff of Internal Audit Section at Surabaya Main Branch (1988), Credit Analyst of Marketing Section at Surabaya Main Branch (1992), Marketing Supervisor at Dr. Soetomo Hospital Branch, Surabaya (2000), Marketing Supervisor at Surabaya Main Branch (2002), Accounting & Technology Supervisor at Surabaya Main Branch (2003), Internal Control Staff at Surabaya Main Branch (2004), Auditor at Audit Division (2006), Auditor at Surabaya Sharia Branch (2007), Special Auditor (Special & Assurance Audit) at Internal Audit Division (2013), Senior Auditor at Special & Assurance Audit Sub-Division of Audit Division (2014), Head of Special & Assurance Audit Sub-Division of Audit Division (2015).				

MASA JABATAN KOMITE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen dan 1 (satu) orang anggota non Komisaris dari Pihak Independen.

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank Jatim yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak Independen

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pasal 41 ayat 4 bahwa Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit Bank Jatim seluruhnya merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen, sehingga jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan independensi.

TABEL INDEPENDASI KOMITE AUDIT

Aspek Independensi	Rudi Purwono	Candra Fajri Ananda	Muhammad Mas'ud	Akhmad Djauhari
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham pada Bank	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	Ya	Ya	Ya	Ya

TERM OF OFFICE OF AUDIT COMMITTEE

The term of office for members of the Audit Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and can be re-elected only for the next 1 (one) period.

If a member of the Board of Commissioners who becomes the Head of Audit Committee quits before his term of office as a Commissioner of the Company, the Head of Audit Committee is replaced by another Independent Commissioner.

INDEPENDENCY OF AUDIT COMMITTEE

All members of the Audit Committee have fulfilled all independence criteria and are able to carry out their duties independently, uphold the interests of the Bank and cannot be influenced by any party. This can be seen from the membership consisting of 1 (one) Head of Committee who is an Independent Commissioner, 2 (two) members who are Independent Commissioners and 1 (one) non-Commissioner member from an Independent Party.

All members of the Audit Committee who come from independent parties do not have financial, management, share ownership and/or family relations with the Board of Commissioners, Directors and/or Shareholders or relationships with Bank Jatim that can affect the ability to act independently

In accordance with the provisions of POJK No. 55/POJK.03/2016 concerning Governance Implementation for Banks Article 41 paragraph 4, the Independent Commissioners and Independent Parties who are members of the Audit Committee are at least 51% (fifty one percent) of the total members of the Committee Audit. Members of the Audit Committee of Bank Jatim are all Independent Commissioners and Independent Parties, so that the number has fulfilled the independence requirements.

TABLE OF INDEPENDENCY OF AUDIT COMMITTEE

Independency Aspect	Rudi Purwono	Candra Fajri Ananda	Muhammad Mas'ud	Akhmad Djauhari
Have no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	Yes	Yes	Yes	Yes
Have no share ownership at the Bank	Yes	Yes	Yes	Yes
Have no familial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors and other members of the Committee	Yes	Yes	Yes	Yes
Have no position in the management of a political party, state office, and government institution	Yes	Yes	Yes	Yes

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta melaksanakan tugasnya berdasarkan Pedoman Komite Audit dan *Internal Audit Charter*. Secara lebih rinci, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Bank tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank;
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
10. Membantu Dewan Komisaris untuk :
 - Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
 - Mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketetapan kemandirian dan objektivitas akuntan publik.
 - Menilai kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menilai efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.
11. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai bank, rencana kerja dan anggaran bank, laporan manajemen serta informasi lainnya.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF AUDIT COMMITTEE

Audit Committee is responsible for providing an independent and professional opinion to the Board of Commissioners regarding the reports and other information provided by the Board of Directors and to identify matters that required attention from the Board of Commissioners. In performing these duties and responsibilities, Audit Committee should comply with the Audit Committee Guidelines and Internal Audit Charter. In details, the duties and responsibilities of Audit Committee are as follows:

In carrying out their functions, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

1. Review the financial information that will be issued by the Bank to the public and/or the authorities including financial statements, projections, and other reports related to the Bank's financial information;
2. Review the Bank activities' compliance with laws and regulations;
3. Provide independent opinion in the event of disagreements between management and the Accountant for the services they provide;
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on the independency, scope of assignment, and service fees;
5. Review the implementation of audits by internal auditors and oversee the follow-up actions by the Board of Directors on the findings of internal auditors;
6. Review the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if the Bank does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;
7. Review complaints related to the accounting process and financial reports of the Bank;
8. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interests of the Bank;
9. Maintain the confidentiality of Bank documents, data and information;
10. Assist the Board of Commissioners to:
 - Constantly improve the quality of the implementation of Good Corporate Governance by applying the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness, to contribute to strengthen the national internal banking condition;
 - Encourage the implementation of good corporate governance, the formation of an adequate internal control structure, improve the quality of financial disclosure and financial reporting, as well as examine the scope, determination of independence and objectivity of public accountants;
 - Assess the adequacy of the Bank's internal audit function, to further assess all aspects of activities of the Bank in accordance with applicable laws and regulations;
 - Assess the effectiveness of the Bank's internal audit duties in to manifest a healthy bank that is able to develop naturally;
11. Review information about bank, work plans and banking budgets, management reports and other information.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

PROGRAM KERJA YANG DILAKSANAKAN OLEH KOMITE AUDIT PADA TAHUN 2019

1. Melakukan penelaahan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2019 dan pelaksanaannya serta informasi lainnya;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
3. Membahas usulan manajemen dalam rangka penyempurnaan Struktur Organisasi Bank Jatim;
4. Melakukan penelaahan atas ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan dan yang berhubungan dengan kegiatan bank;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebutuhan dan tujuan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya;
6. Membahas isu-isu signifikan terhadap laporan keuangan dan menelaah efektivitas kinerja auditor eksternal (KAP) sesuai kemandirian dan objektivitasnya;
7. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris untuk melakukan kaji ulang/evaluasi kinerja fungsi Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

TINGKAT KEHADIRAN DAN FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2019 rapat internal Komite Audit dilaksanakan sebanyak 8 kali yang telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat. Secara rinci, tingkat kehadiran dan frekuensi rapat Komite Audit sebagai berikut:

AUTHORITY OF AUDIT COMMITTEE

In carrying out their duties, the Audit Committee has the following authority:

1. Accessing the Bank's documents, data, and information regarding to the employees, fund, assets, and the required company resources;
2. Communicating directly to the employees, including the Board of Directors and parties performing the internal audit function, risk management, and accountant in regard to the Audit Committee duties;
3. Involving independent parties outside the Audit Committee members necessary to help conduct their duties (if required);
4. Performing any other authority given by the Board of Commissioners.

WORK PROGRAMS OF AUDIT COMMITTEE IMPLEMENTED IN 2019

1. Reviewing the 2019 Bank Business Plan (RBB) and its implementation and other information;
2. Monitoring and evaluating the planning and implementation of audit as well as monitoring the follow-up of audit results in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the financial reporting process;
3. Discussing management proposals in the context of improving the Organizational Structure of the Bank;
4. Reviewing Bank's compliance with laws and regulations and relating to bank activities;
5. Carrying out other tasks according to the needs and objectives of the Board of Commissioners in carrying out their functions;
6. Discussing significant issues with the financial statements and examine the effectiveness of the performance of external auditors (KAP) according to their independence and objectivity;
7. Providing recommendations regarding the appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
8. Providing recommendations regarding the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) to the Board of Commissioners to conduct a review/evaluation of the performance of the Internal Audit function of PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk.

ATTENDANCE AND FREQUENCY OF AUDIT COMMITTEE MEETINGS

During 2019, the Audit Committee has held 8 internal meetings which were well documented in the minutes of the meeting. In detail, the level of attendance and frequency of Audit Committee meetings are as follows :

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	%
Rudi Purwono	Ketua	8	8	100
Candra Fajri Ananda	Anggota	8	8	100
Muhammad Mas'ud*	Anggota	8	0	0
Akhmad Djauhari	Anggota	8	5	63

Efektif tanggal 14 Oktober 2019 setelah mendapat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Uji Kemampuan dan Keputusan (Fit and Proper Test)

'Effective

Tanggal	Agenda	Peserta
05 Maret 2019	Pembahasan Laporan Realisasi rencana Bisnis Bank Jatim Triwulan IV 2018 Nomor 058/031/DIR/PRS/Srt tanggal 28 Januari 2019 dan pembahasan POJK No.5/POJK.03/2016 Tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank	1. Rudi Purwono 2. Akhmad Sukardi 3. Candra Fajri A 4. Nurhadi
04 April 2019	Pembahasan Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris tentang BPP Pemasaran Bab IV Ketentuan Alih Daya Kegiatan Pemasaran	1. Rudi Purwono 2. Candra Fajri A 3. Akhmad Sukardi 4. Nurhadi
08 April 2019	Pembahasan Laporan Persetujuan Kredit <i>Large Exposure</i> atas nama PT. Jasamarga Solo-Ngawi (JSN).	1. Rudi Purwono 2. Candra Fajri A 3. Akhmad Sukardi 4. Nurhadi
23 April 2019	Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis Tahunan Tahun Buku 2018.	1. Rudi Purwono 2. Candra Fajri A 3. Akhmad Sukardi 4. Akhmad Jauhari
23 Mei 2019	Pembahasan Penunjukan Kantor Akuntan PUBLIK (KAP) sesuai POJK No.01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 untuk melakukan kaji ulang/evaluasi kinerja fungsi Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berakhir pada bulan Juni 2019.	1. Rudi Purwono 2. Candra Fajri A 3. Akhmad Sukardi 4. Akhmad Jauhari
16 Agustus 2019	Pembahasan Penunjukan KAP Untuk Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Unit Usaha Syariah	1. Rudi Purwono 2. Candra Fajri A 3. Akhmad Sukardi 4. Akhmad Jauhari
20 Agustus 2019	Pembahasan Evaluasi Kinerja Bank Jatim terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) dan evaluasi temuan Audit periode Juni 2019	1. Rudi Purwono 2. Candra Fajri A 3. Akhmad Sukardi 4. Akhmad Jauhari
11-12 Desember 2019	Pembahasan Evaluasi Hasil Audit Khusus dan Evaluasi Audit <i>Plan</i> 2020 Dengan Divisi Audit <i>Plan</i>	1. Rudi Purwono 2. Candra Fajri A 3. Akhmad Sukardi 4. Akhmad Jauhari 5. Pemimpin Divisi Audit intern

Name	Position	Total Meetings	Attendance	%
Rudi Purwono	Head of Committee	8	8	100
Candra Fajri Ananda	Member of Committee	8	8	100
Muhammad Mas'ud*	Member of Committee	8	0	0
Akhmad Djauhari	Member of Committee	8	5	63

Date	Agenda	Meeting Participants
March 5, 2019	Discussion on Realization Report of Bank Jatim Business Plan for Quarter IV 2018 No. 058/031/DIR/PRS/Srt dated January 28, 2019 and discussion on POJK No. 5/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 concerning Bank Business Plans	1. Rudi Purwono 2. Akhmad Sukardi 3. Candra Fajri A 4. Nurhadi
April 4, 2019	Discussion on Request for Board of Commissioners Approval on Marketing BPP Chapter IV Provisions on Outsourcing of Marketing Activities	1. Rudi Purwono 2. Candra Fajri A 3. Akhmad Sukardi 4. Nurhadi
April 8, 2019	Discussion of Large Exposure Credit Approval Report on behalf of PT. Jasamarga Solo-Ngawi (JSN)	1. Rudi Purwono 2. Candra Fajri A 3. Akhmad Sukardi 4. Nurhadi
April 23, 2019	Discussion on Evaluation of the Implementation of Audit Services on Annual Financial Information for Fiscal Year 2018.	1. Rudi Purwono 2. Candra Fajri A 3. Akhmad Sukardi 4. Akhmad Jauhari
May 23, 2019	Discussion on Appointment of Public Accounting Firm (KAP) in accordance with POJK No. 01/POJK.03/2019 dated January 28, 2019 to conduct a review/evaluation of the performance of the Internal Audit function of PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk, which ended in June 2019	1. Rudi Purwono 2. Candra Fajri A 3. Akhmad Sukardi 4. Akhmad Jauhari
August 16, 2019	Discussion on Appointment of KAP for Audit of Financial Statements of PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk, which ended on December 31st, 2019, including Sharia Business Unit	1. Rudi Purwono 2. Candra Fajri A 3. Akhmad Sukardi 4. Akhmad Jauhari
August 20, 2019	Discussion on the Performance Evaluation of Bank Jatim against the Bank's Business Plan (RBB) and evaluation of Audit findings for the period June 2019	1. Rudi Purwono 2. Candra Fajri A 3. Akhmad Sukardi 4. Akhmad Jauhari
De-cember 11-12, 2019	Discussion on Evaluation of Special Audit Results and Evaluation of the 2020 Audit Plan with the Audit Plan Division	1. Rudi Purwono 2. Candra Fajri A 3. Akhmad Sukardi 4. Akhmad Jauhari 5. Head of Internal Audit Division

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate* khususnya dalam penetapan kriteria pemilihan calon anggota Dekom dan Direksi beserta sistem remunasinya.

PEDOMAN KERJA KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Komite Remunerasi & Nominasi memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Komite Remunerasi & Nominasi yang mengatur mengenai :

- Peran & Fungsi;
- Tugas, Tanggung Jawab serta Wewenang;
- Struktur Keanggotaan
- Interaksi Hubungan Kerja
- Masa Tugas
- Tata Cara dan Prosedur Kerja
- Rapat
- Pelaporan

Buku Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi & Nominasi dikaji dan dikinikan secara berkala agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank. Pengkinian Buku Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi & Nominasi dilakukan pada tanggal 23 April 2019.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Tidak ada anggota Direksi bank maupun Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi periode 2019 - 2022 sesuai SK Nomor Nomor 058/339/DIR/HCP/KEP tanggal 29 November 2019 adalah sebagai berikut:

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The Remuneration and Nomination Committee is responsible for assisting the Board of Commissioners to perform their duty and function in the implementation of *Good Corporate Governance* principles, especially in determining the criteria for selecting candidates for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors along with their remuneration systems.

WORK GUIDELINES OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The Remuneration and Nomination Committee has established a Work Guideline in the form of Remuneration and Nomination Committee Manual Book (BPP) which determines the following issues:

1. Roles and Functions;
2. Duties, Responsibilities, and Authority;
3. Membership Structure;
4. Work Relationship and Interaction;
5. Term of Office;
6. Work Guidelines and Procedures;
7. Meetings;
8. Reporting.

The Remuneration and Nomination Committee Manual Book is reviewed and updated regularly to adjust to the applicable provisions and the Bank's needs. The last update on Remuneration and Nomination Committee Manual Book was conducted on April 23, 2019.

STRUCTURE AND MEMBERSHIP OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The members of Remuneration and Nomination Committee are appointed by the Board of Directors based on the decision from the Board of Commissioners' meeting. The general criteria one must fulfill to be appointed as the Remuneration and Nomination Committee are to have good integrity, character, and morals. There are no members of Bank Jatim's Board of Directors nor any other banks' Board of Directors who are members of the Remuneration and Nomination Committee.

The structure and membership of the Remuneration and Nomination Committee for the period of 2019-2022 according to the Decree No. 058/339/DIR/HCP/KEP dated November 29, 2019 are as follows:

No	Nama	Jabatan di Bank	Posisi di Komite	Periode Jabatan
1	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Ketua	2019 – ditutupnya RUPS Tahun Buku 2022
2	Rudi Purwono	Komisaris Independen	Anggota	2019 – ditutupnya RUPS Tahun Buku 2022
3	Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	Anggota	2019 – ditutupnya RUPS Tahun Buku 2022
4	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Anggota	2019 – ditutupnya RUPS Tahun Buku 2022
5	Heru Tjahjono	Komisaris	Anggota	2019 – ditutupnya RUPS Tahun Buku 2022
6	Budi Setiawan	Komisaris	Anggota	2019 – ditutupnya RUPS Tahun Buku 2022
7	Budi Sumarsono	Pemimpin Divisi Human Capital	Anggota Exofficio	2019 – ditutupnya RUPS Tahun Buku 2022

KUALIFIKASI & PROFIL ANGGOTA KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Nama, Jabatan, dan Riwayat hidup singkat anggota komite Remunerasi & Nominasi				
Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat
Candra Fajri Ananda	Ketua/Komisaris Independen	Mulai Tahun 2019 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	Ekonomi	Bachelor in Economics (S1) from Department of Economics and Development Study Faculty of Economics, Brawijaya University, 1988, Master Degree (MSc.) from Institute of Rural Development, University of Göttingen, Germany, 1994, Doctor Degree (DR) from Institute of Rural Development University of Göttingen, Germany, June 1998.

No.	Name	Position	Position in the Committee	Term of Office
1	Candra Fajri Ananda	Independent Commissioner	Head of Committee	2019 until the closing of GMS of 2022 Fiscal Year
2	Rudi Purwono	Independent Commissioner	Member of Committee	2019 until the closing of GMS of 2022 Fiscal Year
3	Akhmad Sukardi	President Commissioner	Member of Committee	2019 until the closing of GMS of 2022 Fiscal Year
4	Muhammad Mas'ud	Independent Commissioner	Member of Committee	2019 until the closing of GMS of 2022 Fiscal Year
5	Heru Tjahjono	Commissioner	Member of Committee	2019 until the closing of GMS of 2022 Fiscal Year
6	Budi Setiawan	Commissioner	Member of Committee	2019 until the closing of GMS of 2022 Fiscal Year
7	Budi Sumarsono	Head of Human Capital Division	Member of Committee ex-officio	2019 until the closing of GMS of 2022 Fiscal Year

QUALIFICATION AND PROFILE OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEMBERS

Name, Position, and Brief Résumé of Remuneration and Nomination Committee Members				
Name	Position	Term of Office	Expertise	Qualification/ Résumé
Chandra Fajri Ananda	Head of Committee/ Independent Commissioner	From 2019 until the closing of the Annual GMS of 2022 Fiscal Year	Economy	Bachelor in Economics (S1) from Department of Economics and Development Study Faculty of Economics, Brawijaya University, 1988, Master Degree (MSc.) from Institute of Rural Development, University of Göttingen, Germany, 1994, Doctor Degree (DR) from Institute of Rural Development University of Göttingen, Germany, June 1998

Pengalaman Kerja :

Member of BSBI (Supervisory board of Indonesia Central Bank), 2017-2020, TADF – MoF member, 2009-2014 and Ekonom Kementerian Keuangan (2015 and 2016), Dean of Faculty of Economics and Business, University of Brawijaya (June 2013 – May 2017), FGD member drafting on central bank Law (RUU BI), 2015 dan 2016, National Committee Board (Dewan Pengurus Nasional) AFEBI (Indonesian Faculty of Economics and Business Association), 2015-2017, Vice President of Abest21 (accreditation institution) in Tokyo (2015-2017), Head of Dean Forum UB, 2013-2017, Member of Focus Group Discussion on Regional Development of Indonesian Economist Association (ISEI Pusat), 2015-2018, Head of Indonesian Economist Association – ISEI Malang (2015-2018), Short-term consultant GIZ (2015) for payment system in Indonesia and user charges basic principle (2014), Short Term Consultant AIPD as Senior Policy Advisor in East Java Province, August - December 2012), Head of Doctoral Program at Post Graduate Program, University Brawijaya (2007- 2013), International Cooperation, European Section of Brawijaya University (2008- 2012), Short Term Consultant of AUSaid as Senior Economic Advisor (November 2011 – May 2012),

Short Term Consultant of DSF - ADB in Supporting Fiscal Decentralization Policy (Januari 2010 – Desember 2010), Member of Expert Board in Economic and Finance Section of East Java province (2007-September 2009), External reviewer for World Development Report 2009, World Bank, East Java Province regional Planning Board supervisor from (2003-now), Provincial Government Consultant as team leader on "Strategic Infrastructure of Development Reform Program" in the Province of East Java (August 2002 -2004), World Bank consultant in Private Sector Development in Post Conflict Area (2003-March 2004)

Rudi Purwo- no	Anggo- ta/Ko- misaris Inde- penden	Mulai Tahun 2019 s.d penu- tupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	Ekonomi	Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga pada tahun 1994, Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Kekhususan Ekonomi Moneter, pada tahun 2004, dan meraih gelar Doktor (Dr.) pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Kekhususan Ekonomi Moneter, pada tahun 2009

Pengalaman Kerja:

Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga 2010 - sekarang, Economist pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia periode Tahun 2012 sampai Sekarang, Wakil Ketua II Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur 2008-2011 dan 2012-2016, Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Timur 2014-2016, dan Peneliti pada Laboratorium Pengkajian Ekonomi Pembangunan (LPEP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Regional Chief Economist PT Bank BNI Persero Tbk Tahun 2011-2015.

Akhmad Sukardi	Anggo- ta/Ko- misaris Utama	Mulai Tahun 2019 s.d penu- tupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	Akun- tansi	Sarjana Strata 1 Jurusan Akuntansi STIKI Keuangan di Surabaya tahun 1986, S2 Jurusan Manajemen Universitas Airlangga di Surabaya tahun 1998 dan Doktor Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya tahun 2008.

Career History:

Member of BSBI (Supervisory board of Indonesia Central Bank), 2017-2020, TADF – MoF member, 2009-2014 and Ekonom Kementerian Keuangan (2015 and 2016), Dean of Faculty of Economics and Business, University of Brawijaya (June 2013 – May 2017), FGD member drafting on central bank Law (RUU BI), 2015 dan 2016, National Committee Board (Dewan Pengurus Nasional) AFEBI (Indonesian Faculty of Economics and Business Association), 2015-2017, Vice President of Abest21 (accreditation institution) in Tokyo (2015-2017), Head of Dean Forum UB, 2013-2017, Member of Focus Group Discussion on Regional Development of Indonesian Economist Association (ISEI Pusat), 2015- 2018, Head of Indonesian Economist Association – ISEI Malang (2015-2018), Short-term consultant GIZ (2015) for payment system in Indonesia and user charges basic principle (2014), Short Term Consultant AIPD as Senior Policy Advisor in East Java Province, August - December 2012), Head of Doctoral Program at Post Graduate Program, University Brawijaya (2007- 2013), International Cooperation, European Section of Brawijaya University (2008- 2012), Short Term Consultant of AUSaid as Senior Economic Advisor (November 2011 – May 2012), Short Term Consultant of DSF - ADB in Supporting Fiscal Decentralization Policy (Januari 2010 – Desember 2010), Member of Expert Board in Economic and Finance Section of East Java province (2007-September 2009), External reviewer for World Development Report 2009, World Bank, East Java Province regional Planning Board supervisor from (2003-now), Provincial Government Consultant as team leader on "Strategic Infrastructure of Development Reform Program" in the Province of East Java (August 2002 -2004), World Bank consultant in Private Sector Development in Post Conflict Area (2003-March 2004)

Rudi Purwo- no	Member of Com- mittee/ Inde- pendent Com- mis- sioner	From 2019 until the closing of the Annual GMS of 2022 Fiscal Year	Economy	Bachelor of Economics majoring in Economic Science and Development Study from the Faculty of Economics of Universitas Airlangga (1994), Postgraduate Program of Economic Science majoring in Monetary Economics from the Faculty of Economics of the University of Indonesia (2004), and Doctorate degree from the Postgraduate Program of Economic Science majoring in Monetary Economics of the Faculty of Economics of the University of Indonesia (2009)

Career History:

Vice Dean I of Academic and Student Affairs of the Faculty of Economics and Business of Universitas Airlangga (2010 up to present), Economist at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2012 up to present), Deputy Chairman II of Remuneration Board of East Java Province (2008-2011 & 2012-March), Member of Regional Research Board of East Java Province (2014-2016), and Researcher at Laboratorium Pengkajian Ekonomi Pembangunan (LPEP) of the Faculty of Economics and Business of Airlangga University, Regional Chief Economist at PT Bank BNI (Persero) Tbk (2011-2015)

Akhmad Sukardi	Mem- ber of Com- mit- tee/ Pres- ident Com- mis- sioner	From 2019 until the closing of the Annual GMS of 2022 Fiscal Year	Account- ing	Bachelor's degree in Accounting from STIKI Keuangan, Surabaya (1986), Master's degree in Management from Universitas Airlangga, Surabaya (1998), and Doctorate degree in Administration Science from Universitas 17 Agustus, Surabaya (2008).

Pengalaman Kerja

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (2014 – sekarang), Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Prop Jatim tahun (2009-2013), Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur (2003 – 2009), Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Timur (2000 – 2003), Kabag Anggaran Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur (1994 – 2000), Kasubag Anggaran Pembangunan Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur (1990 – 1994), Kasubag Pembinaan Anggaran Tk. I Biro Keuangan (1988 – 1990), Staf Bagian Pembukuan Biro Keuangan Pemda Tk. I (1985 – 1988).

Muham- mad Mas'ud	Anggo- ta/Ko- misaris Inde- penden	Mulai Tahun 2019 s.d penu- tupan RUPS Tahunan Buku 2022	Ekonomi & Politik	Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Negara Universitas Brawijaya lulus tahun 1989 Jurusan Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang lulus tahun 1997 School of Political and International Studies Flinders University- Adelaide- Australia lulus tahun 2005

Pengalaman Kerja :

Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah (Tahun 2011 - 2014), Ketua Dewan Riset Daerah Kota Malang (Tahun 2013 - 2016), Anggota Tim Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri (Tahun 2013 - sekarang), Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementrian (Tahun 2015 - 2018), Anggota Tim Ahli Walikota Batu (Tahun 2015 - 2016), Ketua Dewan Riset Daerah Kab. Bojonegoro (Tahun 2019 - sekarang), Direktur Pascasarjana Unisma Malang (Tahun 2019 - sekarang)

Heru Tjahjo- no	Anggo- ta/Ko- misaris	Mulai Tahun 2019 s.d penu- tupan RUPS Tahunan Buku 2022	Ekonomi	Teknik Sipil, Program Kekhususan : Hidroteknik , Insinyur (Ir) UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA Tahun 1988, Magister Manajemen Universitas Merdeka Malang Tahun 1999, Kajian Lingkungan dan Pembangunan (Dr) UNIVERSITAS BRAWIJAYA Tahun 2014

Pengalaman Kerja

Staf Bappeda Kabupaten Tulungagung (Tahun 1989 - 1991), Kepala Seksi Tata Guna Tanah dan tata Ruang Bappeda Kabupaten Tulungagung (Tahun 1991 - 1997), Pj. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tulungagung (Tahun 1997), Pj. Kepala DPUD Kabupaten Dati II Tulungagung (Tahun 1997 - 2001), Pj. Kepala Sub Dinas Pekerjaan Umum PPW Kabupaten Tulungagung (Tahun 2001 – 2003), Bupati Tulungagung (Tahun 2003 – 2013), Staf Gubernur Jawa Timur (2013 – 2014), Kepala Dinas Peikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur (Tahun 2014 – 2016), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (Tahun 2016 – 2018), Sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur (2018 – Sekarang)

Career History:

Regional Secretary of East Java Province (2014 up to present), Administration and General Affairs Assistant for Regional Secretariat of East Java Province (2009-2013), Head of Revenue Office of East Java Province (2003-2009), Head of Finance Bureau of Regional Secretariat of East Java Province (2000-2003), Head of Budgeting Department of Finance Bureau of East Java Province (1994-2000), Head Budgeting for Development Sub-Department of Finance Bureau of East Java Province (1990-1994), Head of Budgeting Development Level I Sub-Department of Finance Bureau (1988-1990), and Staff of Bookkeeping Department at Finance Bureau of Level I Regional Government (1985-1988).

Muham- mad Mas'ud	Mem- ber of Com- mit- tee/ Inde- pen- dent Com- mis- sioner	From 2019 until the closing of the Annual GMS of 2022 Fiscal Year	Econo- my and Politics	State Administration major from the Faculty of Administration Science of Brawijaya University (1989) Master's degree in Management from Universitas Muhammadiyah Malang (1997) School of Political and International Studies of Flinders University, Adelaide, Australia (2005)

Career History:

Assistant to the Special Staff for President in Regional Development and Autonomy (2011-2014), Head of Regional Research Board of Malang (2013-2016), member of Development Control and Acceleration Team of Kediri Regency (2013 up to present), Special Staff to the Minister of Social Affairs in HR Development and Ministerial Programs (2015-2018), Member of Expert Staff for the Mayor of Batu (2015-2016), Chairman of Regional Research Board of Bojonegoro Regency (2019 up to present), and Director of Postgraduate Program of Unisma Malang (2019 up to present).

Heru Tjahjono	Mem- ber of Com- mittee/ Inde- pen- dent Com- mis- sioner	From 2019 until the closing of the Annual GMS of 2022 Fiscal Year	Economy	Bachelor's degree in Civil Engineering with specialization in Hydro Engineering from Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1988), Master's degree in Management from Universitas Merdeka Malang (1999), and Doctorate degree in Environmental and Development Studies from Brawijaya University, Malang (2014).

Pengalaman Kerja

Staff of Bappeda of Tulungagung Regency (1989-1991), Head of Land Use and Spatial Section of Bappeda of Tulungagung Regency (1991-1997), Act. Head of Physical and Infrastructure Department of Bappeda of Tulungagung Regency (1997), Act. Head of DPUD of Tulungagung Regency (1997-2001), Act. Head of Public Works Sub-Office of PPW of Tulungagung Regency (2001-2003), and Tulungagung Regent (2003-2013). He also served as a Staff of East Java Governor (2013-2014), Head of Fisheries and Maritime Office of East Java Province (2014-2016), Head of Maritime and Fisheries Office of East Java Province (2016-2018), and Regional Secretary of East Java Province (2018 up to present).

Budi Setiawan	Anggota/Komisaris	Mulai Tahun 2019 s.d. penutupan RUPS Tahunan Buku 2022	Ekonomi	Insinyur fakultas pertanian jurusan sosial ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur tahun 1985, Magister Manajemen teknologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya tahun 2002, dan meraih gelar Dokt or (Dr) ilmu ekonomi universitas brawijaya malang tahun 2012.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2018, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2014, Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2011, Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2010, Pj. Kepala Bidang Ekonomi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2008, Kepala Seksi Pertanian dan Kelautan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2001 – 2005.				
Budi Sumarsono	Anggota/Ex-Officio	Mulai Tahun 2019 s.d. penutupan RUPS Tahunan Buku 2022		Profil lengkap tercantum dalam profil Pejabat Eksekutif.

Budi Setiawan	Member of Committee/Commissioner	From 2019 until the closing of the Annual GMS of 2022 Fiscal Year	Economy	Bachelor's degree majoring in Social Economy from the Faculty of Agriculture of Universitas Pembangunan Nasional Veteran, East Java (1985), Master's degree in Technology Management from the Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2002), and Doctorate degree in Economic Science from Brawijaya University, Malang (2012).
<i>Head of Regional Finance and Asset Management Office (BPKAD) of East Java Province, Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of East Java Province (2017-2018)</i> <i>Head of Industry and Trade Office of East Java Province (2011-2014),</i> <i>Head of Economic Administration Bureau at Regional Secretariat of East Java Province (2010-2011),</i> <i>Head of Economic Department at Regional Development Planning Agency of East Java Province (2008-2010),</i> <i>Act. Head of Economic Department at Regional Development Planning Agency of East Java Province (2005-2008)</i>				
Budi Sumarsono	Member Ex-Officio	From 2019 until the closing of the Annual GMS of 2022 Fiscal Year		His detailed profile is available in the profile of Executive Officials

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit beranggotakan 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan, 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

MASA JABATAN KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Masa tugas Komite Remunerasi dan Nominasi ditentukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, namun Masa jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan tertentu.

Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

INDEPENDENSI KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Dalam melaksanakan fungsi remunerasi sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, maka Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur :

The composition of members of the Remuneration and Nomination Committee has fulfilled the requirements set by the Financial Services Authority (OJK) in article 44 of the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 concerning Implementation of Governance for Public Banks which confirms that members of the Remuneration and Nomination Committee must have at least 1 (one) Independent Commissioner member, 1 (one) Commissioner member and 1 (one) Executive Officer in charge of human resource functions or 1 (one) employee representative.

TERM OF OFFICE OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The term of office of the Remuneration and Nomination Committee is determined by the Board of Commissioners based on the decision of the Board of Commissioners' meeting, but the term of office of the Remuneration and Nomination Committee is no longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the articles of association and can be reappointed for a certain term of office.

If a member of the Board of Commissioners who becomes the Chairperson of the Remuneration and Nomination Committee quits before his term of office as a Commissioner of the Company, the Chairperson of the Remuneration and Nomination Committee is replaced by another Independent Commissioner.

INDEPENDENCY OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The Remuneration and Nomination Committee carries out its duties, responsibilities and authority professionally and independently, without interference from any party that is not in accordance with the laws and regulations.

Members of the Remuneration and Nomination Committee have fulfilled all the independence criteria and are able to carry out their duties independently, uphold the interests of the Bank and cannot be influenced by any party. This can be seen from the majority of Commissioners who are members of the Remuneration and Nomination Committee who are Independent Commissioners.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The duties and responsibilities of Nomination and Remuneration Committee are as follows:

1. Related to Nomination function
 - provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policies and amount of Remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - assist the Board of Commissioners in evaluating performance in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
 - In carrying out the remuneration function as referred to in point 1 above, the Remuneration and Nomination Committee must perform the procedure:

- Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
 - Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi harus memperhatikan:
- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha sejenis dalam industrinya (*peer group*);
 - tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja bank;
 - target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian/pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi pegawai.
- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya bagi pegawai.
- memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
- melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit dan anggota komite pemantau risiko;
- Develop a Remuneration structure for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners in the form of salaries, honorarium, incentives, permanent and/or variable visits;
 - Formulate policies on Remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - Arrange the amount of Remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
- The preparation of the structure, policy and amount of Remuneration must pay attention to:
- Remuneration applicable to the industry in accordance with business activities and similar business scales in its industry (*peer groups*);
 - the duties, responsibilities and authority of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners are related to the achievement of the objectives and performance of the bank;
 - performance targets or the performance of each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
 - a balance of benefits between those that are permanent and variable.
- Assist the Board of Commissioners in providing recommendations on payroll/wage systems, provision of benefits and facilities for employees.
- Assist the Board of Commissioners in providing recommendations on compensation systems and other benefits for employees.
- ensure that the remuneration policy complies with the provisions; and
- conduct periodic evaluations of the implementation of remuneration policies;
2. Related to Remuneration function:
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the composition of the positions of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the policies and criteria needed in the Nomination process.
 - Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as evaluation material;
 - Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the capacity building program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - Provide proposals for candidates who qualify as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
 - Provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of the audit committee and members of the risk monitoring committee;

- Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan menganalisis kriteria pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
- Membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan dan menganalisis kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat eksekutif bank.
- Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- Assist the Board of Commissioners in compiling and analyzing dismissal criteria for the Board of Commissioners and Directors;
- Assist the Board of Commissioners in monitoring the implementation and analysis of selection criteria and procedures for bank executive candidates.
- In carrying out the Nomination function, the Remuneration and Nomination Committee must carry out the following procedures:
 - compile the composition and process of nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - formulate policies and criteria needed in the process of nominating candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - assist in the evaluation of the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - formulate a capacity building program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
 - review and propose candidates who qualify as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

WEWENANG KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dalam lingkup tanggung jawab untuk :

1. Memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal bank.
2. Mendapatkan saran atau masukan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi baik dari pihak internal maupun eksternal bank.

AUTHORITY OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The Board of Commissioners authorizes the Remuneration and Nomination Committee within the scope of responsibility for:

1. Obtaining various information needed for the implementation of the Nomination and Remuneration function from various parties, both internal and external to the bank.
2. Obtaining the advice or input needed in the context of the implementation of the Nomination and Remuneration function from both internal and external parties of the bank.

RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI SELAMA TAHUN 2019

Selama tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 22 kali yang semuanya telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat. Dengan rincian tingkat kehadiran dan frekuensi rapat sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	%
Candra Fajri A	Ketua	22	22	100
Akhmad Sukardi	Anggota	22	21	95
Budi Setiawan	Anggota	22	21	95
Rudi Purwono	Anggota	22	18	81
Divisi Human Capital	Anggota	22	5	22

MEETINGS OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE IN 2019

During 2019, the Remuneration and Nomination Committee has held 22 meetings which were well documented in the minutes of the meeting. In detail, the level of attendance and frequency of Remuneration and Nomination Committee meetings are as follows:

Name	Position	Total Meetings	Attendance	%
Candra Fajri A	Head of Committee	22	22	100
Akhmad Sukardi	Member of Committee	22	21	95
Budi Setiawan	Member of Committee	22	21	95
Rudi Purwono	Member of Committee	22	18	81
Human Capital Division	Member of Committee	22	5	22

Tanggal	Agenda	Peserta
08 Februari 2019	Pembahasan terkait masalah hasil konsultasi Dewan Komisaris dengan OJK KR IV	Candra Fajri A Nur Eko A Nurhadi Herry Hendarto
15 Februari 2019	Pembahasan mengenai konsep surat pengumuman pendaftaran Calon Direksi Bank Jatim Pembahasan <i>Time Schedule</i> proses penjarangan Direksi Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
28 Februari 2019	Pembahasan Rekapitulasi data pelamar calon Direksi Bank Jatim Pembahasan Parameter/ <i>assessment</i> Calon Direksi Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
13 Maret 2019	Pembahasan Usulan Pemberian Uang Cuti oleh Direksi	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Nur Eko A
18 April 2019	Pembahasan mengenai masa Tugas Dewan Pengawas Syariah Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Nur Eko A
23 April 2019	Pembahasan mengenai Rekomendasi Calon Dewan Pengawas Syariah	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
02 Mei 2019	Pembahasan mengenai <i>assessment</i> calon Direksi Bank Jatim Pembahasan masalah penambahan anggota Dewan Komisaris Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono

Date	Agenda	Meeting Participants
February 8, 2019	Discussion regarding issues resulting from the Board of Commissioners' consultation with OJK KR IV	Candra Fajri A Nur Eko A Nurhadi Herry Hendarto
February 15, 2019	Discussion on the draft announcement letter for registration of Prospective Directors of Bank Jatim Discussion of Time Schedule in the selection process of the Directors of Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
February 28, 2019	Discussion on the Recapitulation of applicant candidate data for the Directors of Bank Jatim Discussion of Parameters/ <i>assessments</i> for Prospective Directors of Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
March 13, 2019	Discussion on Proposal for Giving Leave Money by the Directors	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Nur Eko A
March 18, 2019	Discussion on the term of Duty of the Bank Jatim Sharia Supervisory Board	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Nur Eko A
April 23, 2019	Discussion on Recommendations for Candidates for the Sharia Supervisory Board	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
May 2, 2019	Discussion on the Assessment of candidates for the Directors of Bank Jatim Discussion on the issue of adding members of the Bank Jatim Board of Commissioners	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono

13 Mei 2019	Pembahasan mengenai daftar nama – nama peserta <i>assessment</i> calon Direksi Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
29 Mei 2019	Pembahasan Mengenai hasil <i>assessment</i> Calon Direksi Bank Jatim Pembahasan mengenai penjangkaran Komisaris Independen Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
13 Juni 2019	Pembahasan Hasil Audiensi dengan Gubernur Jawa Timur terkait calon pengurus Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
17 Juni 2019	Pembahasan Evaluasi Akhir Calon Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
25 Juni 2019	Pembahasan Evaluasi Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
09 Juli 2019	Pembahasan Pendapat Divisi Hukum terkait Remunerasi Pengurus Bank Jatim (SK Dewan Komisaris nomor 058/005/DK/KEP Tanggal 27 Juni 2019)	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
03 September 2019	Pembahasan Terkait Perkembangan proses <i>Fit and Proper</i> Calon Pengurus Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
20 September 2019	Pembahasan Terkait Usulan Rencana Mutasi Pegawai	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono

May 3, 2019	Discussion on the list of names of candidates for the Assessment of the Directors of Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
May 29, 2019	Discussion Regarding the results of the Assessment of Prospective Directors of Bank Jatim Discussion on the selection of Independent Commissioners of Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
June 13, 2019	Discussion of Hearing Results with the Governor of East Java related to the candidate for the management of Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
June 17, 2019	Discussion on the Final Evaluation of Candidates for the Board of Commissioners and Directors of Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
June 25, 2019	Discussion on Remuneration Evaluation and Facilities for the Board of Commissioners and Directors	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
July 9, 2019	Discussion of Legal Division Opinions related to the Remuneration of the Managers of East Java Bank (Decree of the Board of Commissioners number 058/005/DK/KEP dated June 27, 2019)	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
September 3, 2019	Discussion Related to the Development of the Fit and Proper Process for Candidates for the Management of Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
September 20, 2019	Discussion Related to Proposed Employee Transfer Plan	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono

04 oktober 2019	Pembahasan Terkait Penyesuaian Ketentuan Perjalanan Dinas Pengurus (Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas) Pembahasan Revisi ketentuan jangka waktu <i>Car Ownership</i> Program (COP)	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
22 Oktober 2019	Pembahasan mengenai Usulan Direksi terkait pemberian Tunjangan Pakaian Dinas Smart Casual Pengurus, Pegawai dan Tenaga Ahli Daya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Budi Sumarsono (Pemimpin Divisi Human Capital)
01 November 2019	Pembahasan Terkait Status Direktur Perseroan	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Budi Sumarsono (Pemimpin Divisi Human Capital)
12 November 2019	Pembahasan Status Sdr.Hadi Santoso sebagai Direktur Perseroan Bank Jatim Pembahasan <i>Time Schedule</i> Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
23 Desember 2019	Pembahasan Perkembangan Proses Penjaringan Direktur Utama dan Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Muhammad Mas:ud Budi Sumarsono
27 Desember 2019	Pembahasan Pengumuman Persyaratan Direktur Utama dan Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah Bank Jatim	Candra Fajri A. Akhmad Sukardi Muhammad Mas:ud Budi Sumarsono
30 Desember 2019	Pembahasan terkait perpanjangan pengumuman pendaftaran Direktur Utama & Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah Pembahasan terkait rencana tambahan penghasilan 1x di akhir tahun (Uang Pendidikan)	Candra Fajri A. Akhmad Sukardi Muhammad Mas:ud Budi Sumarsono

October 4, 2019	Discussion Regarding Adjustments to Travel Regulations of Management Offices (Board of Commissioners, Directors, Board of Trustees) Discussion on the revision of the terms of the <i>Car Ownership</i> Program (COP)	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
October 22, 2019	Discussion on the Board of Directors' Proposal related to the awarding of the Smart Casual Clothing Office of the Management, Staff and Expert Power of PT Bank Pembangunan Daerah East Java Tbk	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono Budi Sumarsono (User of Human Capital Division)
November 1, 2019	Discussion Related to the Status of the Company's Directors	1. Candra Fajri A 2. Akhmad Sukardi 3. Budi Setiawan 4. Rudi Purwono 5. Budi Sumarsono (User of Human Capital Division)
November 12, 2019	1. Discussion on the status of Mr. Hadi Santoso as Director of the Bank Jatim Company 2. Discussion of Bank Jatim Time Schedule	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Budi Setiawan Rudi Purwono
December 23, 2019	Discussion on the Development Process of the Selection of President Director and Director of Consumer, Ritel & Syariah Business Bank Jatim	Candra Fajri A Akhmad Sukardi Muhammad Mas:ud Budi Sumarsono
December 27, 2019	Discussion on Announcement of Requirements for President Director and Director of Consumer, Ritel & Syariah Business Bank Jatim	Candra Fajri A. Akhmad Sukardi Muhammad Mas:ud Budi Sumarsono
December 30, 2019	1. Discussion regarding the extension of the registration announcement of the President Director & Director of Consumer, Retail & Sharia Business 2. Discussion related to the plan for additional income 1x at the end of the year (Education Fund)	Candra Fajri A. Akhmad Sukardi Muhammad Mas:ud Budi Sumarsono

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* khususnya yang berkaitan dengan bidang manajemen risiko.

PEDOMAN KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Komite Pemantau Risiko yang mengatur mengenai :

1. Peran & Fungsi;
2. Tugas, Tanggung Jawab serta Wewenang;
3. Struktur Keanggotaan
4. Interaksi Hubungan Kerja
5. Masa Tugas
6. Tata Cara dan Prosedur Kerja
7. Rapat
8. Pelaporan

Buku Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Pemantau Risiko dikaji dan dikinikan secara berkala agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank. Pengkinian Buku Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Pemantau Risiko dilakukan pada tanggal 23 April 2019.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Pemantau Risiko adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Tidak ada anggota Direksi bank maupun Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode 2019 – 2022 sesuai SK Nomor 058/339/DIR/HCP/KEP tanggal 29 November 2019 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan di Bank	Posisi di Komite	Periode Jabatan
1	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Ketua	2019 – ditutupnya RUPS Tahun Buku 2022
2	Rudi Purwono	Komisaris Independen	Anggota	2019 – ditutupnya RUPS Tahun Buku 2022
3	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Anggota	2019 – ditutupnya RUPS Tahun Buku 2022
4	Syafrudin	Pihak Independen	Anggota	2019 – ditutupnya RUPS Tahun Buku 2022

RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee is responsible for assisting the Board of Commissioners in conducting out the functions and duties of the Board of Commissioners in the implementation of the principles of Good Corporate Governance, especially those related to the field of risk management.

WORK GUIDELINES OF RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee has established a Work Guideline in the form of Risk Monitoring Committee Manual Book (BPP) which determines the following issues:

1. Roles and Functions;
2. Duties, Responsibilities, and Authority;
3. Membership Structure;
4. Work Relationship and Interaction;
5. Term of Office;
6. Work Guidelines and Procedures;
7. Meetings;
8. Reporting.

The Risk Monitoring Committee Manual Book is reviewed and updated regularly to adjust to the applicable provisions and the Bank's needs. The last update on Risk Monitoring Committee Manual Book was conducted on April 23, 2019.

STRUCTURE AND MEMBERSHIP OF RISK MONITORING COMMITTEE

The members of Risk Monitoring Committee are appointed by the Board of Directors based on the decision from the Board of Commissioners' meeting. The general criteria one must fulfill to be appointed as the Risk Monitoring Committee are to have good integrity, character, and morals. There are no members of Bank Jatim's Board of Directors nor any other banks' Board of Directors who are members of the Risk Monitoring Committee.

The structure and membership of the Risk Monitoring Committee for the period of 2019-2022 according to the Decree No. 058/339/DIR/HCP/KEP dated November 29, 2019 are as follows:

No.	Name	Position	Position in the Committee	Term of Office
1	Muhammad Mas'ud	Independent Commissioner	Head of Committee	2019 until the closing of GMS of 2022 Fiscal Year
2	Rudi Purwono	Independent Commissioner	Member of Committee	2019 until the closing of GMS of 2022 Fiscal Year
3	Candra Fajri Ananda	Independent Commissioner	Member of Committee	2019 until the closing of GMS of 2022 Fiscal Year
4	Syafrudin	Independent Party	Member of Committee	2019 until the closing of GMS of 2022 Fiscal Year

KUALIFIKASI & PROFIL ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Nama, Jabatan, dan Riwayat hidup singkat anggota komite Pemantau Risiko				
Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat
Muhammad Mas'ud	Ketua/Komisaris Independen	Mulai Tahun 2019 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	Ekonomi & Politik	Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Negara Universitas Brawijaya lulus tahun 1989 Jurusan Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang lulus tahun 1997 School of Political and International Studies Flinders University- Adelaide- Australia lulus tahun 2005
Pengalaman Kerja :				
Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah (Tahun 2011 - 2014), Ketua Dewan Riset Daerah Kota Malang (Tahun 2013 - 2016), Anggota Tim Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri (Tahun 2013 - sekarang), Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian (Tahun 2015 - 2018), Anggota Tim Ahli Walikota Batu (Tahun 2015 - 2016), Ketua Dewan Riset Daerah Kab. Bojonegoro (Tahun 2019 - sekarang), Direktur Pascasarjana Unisma Malang (Tahun 2019 - sekarang)				
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Mulai Tahun 2019 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	Ekonomi	Bachelor in Economics (S1) from Department of Economics and Development Study Faculty of Economics, Brawijaya University, 1988, Master Degree (MSc.) from Institute of Rural Development, University of Göttingen, Germany, 1994, Doctor Degree (DR) from Institute of Rural Development University of Göttingen, Germany, June 1998.
Pengalaman Kerja :				
Member of BSBI (<i>Supervisory board of Indonesia Central Bank</i>), 2017-2020, TADF - MoF member, 2009-2014 and Ekonom Kementrian Keuangan (2015 and 2016), Dean of Faculty of Economics and <i>Business</i> , University of Brawijaya (june 2013 - may 2017), FGD member drafting on central bank Law (RUU BI), 2015 dan 2016, National Committee Board (Dewan Pengurus Nasional) AFEBI (<i>Indonesian Faculty of Economics and Business Association</i>), 2015-2017, Vice President of Abest21 (accreditation institution) in Tokyo (2015-2017), Head of Dean Forum UB, 2013-2017, Member of Focus Group Discussion on Regional Development of Indonesian Economist Association (ISEI Pusat), 2015- 2018, Head of Indonesian Economist Association - ISEI Malang (2015-2018), Short-term consultant GIZ (2015) for payment system in Indonesia and user charges basic principle (2014), Short Term Consultant AIPD as Senior Policy Advisor in East Java Province, August - December 2012), Head of Doctoral Program at Post Graduate Program, University Brawijaya (2007- 2013), International Cooperation, European Section of Brawijaya University (2008- 2012), Short Term Consultant of AUSAID as Senior Economic Advisor (November 2011 - May 2012),				
Short Term Consultant of DSF - ADB in Supporting Fiscal Decentralization Policy (Januari 2010 - Desember 2010), Member of <i>Expert</i> Board in Economic and Finance Section of East Java province (2007-September 2009), External <i>reviewer</i> for World Development Report 2009, World Bank, East Java Province regional Planning Board supervisor from (2003-now), Provincial Government Consultant as team leader on "Strategic Infrastructure of Development Reform Program" in the Province of East Java (August 2002 -2004), World Bank consultant in Private Sector Development in Post Conflict Area (2003-March 2004) .				
Rudi Purwono	Anggota/Komisaris Independen	Mulai Tahun 2019 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	Ekonomi	Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga pada tahun 1994, Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Kekhususan Ekonomi Moneter, pada tahun 2004, dan meraih gelar Doktor (Dr.) pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Kekhususan Ekonomi Moneter, pada tahun 2009.
Pengalaman Kerja :				
Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga 2010 - sekarang, Economist pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia periode Tahun 2012 sampai Sekarang, Wakil Ketua II Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur 2008-2011 dan 2012-2016, Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Timur 2014-2016, dan Peneliti pada Laboratorium Pengkajian Ekonomi Pembangunan (LPEP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Regional Chief Economist PT Bank BNI Persero Tbk Tahun 2011-2015				
Syafrudin	Anggota/Pihak Independen	Mulai Tahun 2019 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	Ekonomi	S-1 Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Dr Soetomo Surabaya Tahun 1991 S2 Jurusan Ekonomi Manajemen, Universitas Artha Bodhi Iswara Surabaya 2003
Pengalaman Kerja:				
Pembukuan Bagian Operasional Tahun 1983, Staf Akuntansi Cabang Utama Tahun 1988, Karyawan Pemasaran Tahun 1991, Kontrol Internal tahun 1998, Wakil Pemimpin Cabang Tahun 2001, Pimding Operasi Cabang Situbondo Tahun 2001, Pimcapem Besuki Cabang Situbondo Tahun 2001, Senior Auditor Divisi Audit Intern Tahun 2004, Senior Auditor Operasional Audit Divisi Audit Tahun 2009, Pemimpin Sub Divisi operasional Audit Tahun 2009, Pemimpin Sub Divisi Kepatuhan Tahun 2011, Pemimpin Sub Divisi Divisi Audit Tahun 2014, Pemimpin Divisi Akuntansi tahun 2015				

QUALIFICATION AND PROFILE OF RISK MONITORING COMMITTEE MEMBERS

Name, Position, and Brief Résumé of Risk Monitoring Committee Members				
Name	Position	Term of Office	Expertise	Qualification/Résumé
Muhammad Mas'ud	Head of Committee/ Independent Commissioner	From 2019 until the closing of the Annual GMS of 2022 Fiscal Year	Economy and Politics	State Administration major from the Faculty of Administration Science of Brawijaya University (1989) Master's degree in Management from Universitas Muhammadiyah Malang (1997) School of Political and International Studies of Flinders University, Adelaide, Australia (2005)
Career History:				
Assistant to the Special Staff for President in Regional Development and Autonomy (2011-2014), Head of Regional Research Board of Malang (2013-2016), member of Development Control and Acceleration Team of Kediri Regency (2013 up to present), Special Staff to the Minister of Social Affairs in HR Development and Ministerial Programs (2015-2018), Member of Expert Staff for the Mayor of Batu (2015-2016), Chairman of Regional Research Board of Bojonegoro Regency (2019 up to present), and Director of Postgraduate Program of Unisma Malang (2019 up to present).				
Candra Fajri Ananda	Member of Committee/ Independent Commissioner	From 2019 until the closing of the Annual GMS of 2022 Fiscal Year	Economy	Bachelor in Economics (S1) from Department of Economics and Development Study Faculty of Economics, Brawijaya University, 1988, Master Degree (MSc.) from Institute of Rural Development, University of Göttingen, Germany, 1994, Doctor Degree (DR) from Institute of Rural Development University of Göttingen, Germany, June 1998
Career History:				
Member of BSBI (Supervisory board of Indonesia Central Bank), 2017-2020, TADF – MoF member, 2009-2014 and Ekonom Kementerian Keuangan (2015 and 2016), Dean of Faculty of Economics and Business, University of Brawijaya (June 2013 – May 2017), FGD member drafting on central bank Law (RUU BI), 2015 dan 2016, National Committee Board (Dewan Pengurus Nasional) AFEBI (Indonesian Faculty of Economics and Business Association), 2015-2017, Vice President of Abest21 (accreditation institution) in Tokyo (2015-2017), Head of Dean Forum UB, 2013-2017, Member of Focus Group Discussion on Regional Development of Indonesian Economist Association (ISEI Pusat), 2015- 2018, Head of Indonesian Economist Association – ISEI Malang (2015-2018), Short-term consultant GIZ (2015) for payment system in Indonesia and user charges basic principle (2014), Short Term Consultant AIPD as Senior Policy Advisor in East Java Province, August - December 2012), Head of Doctoral Program at Post Graduate Program, University Brawijaya (2007- 2013), International Cooperation, European Section of Brawijaya University (2008- 2012), Short Term Consultant of AUSAID as Senior Economic Advisor (November 2011 – May 2012), Short Term Consultant of DSF - ADB in Supporting Fiscal Decentralization Policy (Januari 2010 – Desember 2010), Member of Expert Board in Economic and Finance Section of East Java province (2007-September 2009), External reviewer for World Development Report 2009, World Bank, East Java Province regional Planning Board supervisor from (2003-now), Provincial Government Consultant as team leader on "Strategic Infrastructure of Development Reform Program" in the Province of East Java (August 2002 -2004), World Bank consultant in Private Sector Development in Post Conflict Area (2003-March 2004)				
Rudi Purwono	Member of Committee/ Independent Commissioner	From 2019 until the closing of the Annual GMS of 2022 Fiscal Year	Economy	Bachelor of Economics majoring in Economic Science and Development Study from the Faculty of Economics of Universitas Airlangga (1994), Postgraduate Program of Economic Science majoring in Monetary Economics from the Faculty of Economics of the University of Indonesia (2004), and Doctorate degree from the Postgraduate Program of Economic Science majoring in Monetary Economics of the Faculty of Economics of the University of Indonesia (2009)
Career History:				
Vice Dean I of Academic and Student Affairs of the Faculty of Economics and Business of Universitas Airlangga (2010 up to present), Economist at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2012 up to present), Deputy Chairman II of Remuneration Board of East Java Province (2008-2011 & 2012-March), Member of Regional Research Board of East Java Province (2014-2016), and Researcher at Laboratorium Pengkajian Ekonomi Pembangunan (LPEP) of the Faculty of Economics and Business of Airlangga University, Regional Chief Economist at PT Bank BNI (Persero) Tbk (2011-2015)				
Syafrudin	Member of Committee/ Independent Party	From 2019 until the closing of the Annual GMS of 2022 Fiscal Year	Economy	Bachelor's degree in Economics majoring in Accounting from Universitas Dr. Soetomo, Surabaya (1991) Master's degree in Economic Management from Universitas Artha Bodhi Iswara, Surabaya (2003)
Career History:				
Staff of Bookkeeping Operational Section (1983), Accounting Staff at Main Branch (1988), Marketing Employee (1991), Internal Control Staff (1998), Deputy Branch Manager (2001), Pimding Operations of Situbondo Branch (2001), Sub-Branch Manager of Besuki Situbondo Branch (2001), Senior Auditor of Internal Audit Division (2004), Senior Audit for Operational Audit of Audit Division (2009), Head of Operational Audit Sub-Division (2009), Head of Compliance Sub-Division (2011), Sub-Division Head at Audit Division (2014), Head of Accounting Division (2015)				

MASA JABATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Pemantau Risiko digantikan oleh Komisaris Independen lainnya

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen dan 1 (satu) orang anggota non Komisaris dari Pihak Independen.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KOMITE PEMANTAU RISIKO**

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
4. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian/risiko.
5. Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya.

TERM OF OFFICE OF RISK MONITORING COMMITTEE

The term of office of members of the Risk Monitoring Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and can be re-elected only for 1 (one) subsequent period.

If a member of the Board of Commissioners who becomes the Head of Risk Monitoring quits before his term of office as a Commissioner of the Company, then the Head of Risk Monitoring Committee is replaced by another Independent Commissioner

INDEPENDENCE OF RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee has fulfilled all independence criteria and is able to carry out its duties independently, uphold the interests of the Bank and cannot be influenced by any party. This can be seen from the membership consisting of 1 (one) Head of Committee who is an Independent Commissioner, 2 (two) members who are Independent Commissioners and 1 (one) non-Commissioner member from an Independent Party.

**DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF
RISK MONITORING COMMITTEE**

Implementation of the supervisory and guidance functions by the Board of Commissioners towards the executive (the Board of Directors and staff) in the area of risk management implementation. By doing so, the task could be carried out effectively, both regarding to the issue of risk management and internal supervision systems as well as anticipatory steps taken by the Board of Directors in risk management.

In carrying out their functions, the Risk Monitoring Committee has the following duties and responsibilities:

1. Always improve the quality of the implementation of good governance (*Good Corporate Governance*) by applying the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness, to strengthen the internal condition of the national banking.
2. Evaluate and provide input to the Board of Commissioners regarding the adequacy, suitability of risk management policies and the implementation of Bank policies;
3. Monitor and evaluate the implementation of the duties of the risk management committee and the risk management work unit, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners and coordinate with related work units in making reports that are the authority and responsibility of the Board of Commissioners;
4. Identifying, measuring, monitoring and controlling risks from every aspect of bank business activities in order to prevent the potential occurrence of events that can cause losses/risks.
5. Assess the effectiveness and adequacy of risk management implementation in accordance with the objectives, size and complexity of the Bank's business and the risks it faces.

6. Memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
7. Melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
8. Melakukan *review* pelaksanaan manajemen risiko ;
9. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan per undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko
10. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite (charter) dan melakukan *review* sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite pemantau risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
12. Membuat *Self Assessment* mengenai efektivitas dari kegiatan komite pemantau risiko.

WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko diberi kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko;
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para Profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko;
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau risiko dapat bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, Grup Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Unit-unit Kerja yang ada relevansinya.

TINGKAT KEHADIRAN DAN FREKUENSI RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 8 kali yang semuanya telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Komite Pemantau Risiko, ketentuan yang mengatur telah tertuang dalam suatu aturan internal Komite Pemantau Risiko. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dalam membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kepada Manajemen, Komite Pemantau Risiko meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan seminar maupun *workshop* yang diadakan oleh pihak intern maupun pihak ekstern.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan sebagaimana tersebut diatas, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran/ pendapat kepada Dewan Komisaris untuk dipergunakan sebagai masukan kepada Direksi.

6. Ensure that the Board of Directors (Management) has actively monitored the implementation of risk management policies and strategies.
7. Carry out the studies and actions needed in the framework of risk management in accordance with the precautionary principle;
8. Reviewing the implementation of risk management;
9. Evaluate the Bank's compliance with the Articles of Association, regulations of the Bank Supervisory Authority and Capital Market, as well as other regulations related to risk management
10. Prepare guidelines and work rules for the committee (charter) and conduct a review according to the needs of at least 2 (two) years.
11. Carry out other duties and responsibilities given by the Board of Commissioners from time to time Make periodic reports on the activities of the risk monitoring committee and the things that are felt necessary to be a concern of the Board of Commissioners.
12. Make a Self-Assessment regarding the effectiveness of the activities of the risk monitoring committee.

AUTHORITY OF RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee is authorized by the Board of Commissioners to:

1. Conduct a full, free and unlimited access to Bank records related to the implementation of the duties of the Risk Monitoring Committee;
2. Obtain input or suggestions from external banking professionals related to the duties of the Risk Monitoring Committee;
3. In conducting its duties, the Risk Monitoring Committee can cooperate with the Risk Management Committee, the Risk Management, and Compliance Group and relevant Work Units

ATTENDANCE RATE AND FREQUENCY OF RISK MONITORING COMMITTEE MEETINGS

During 2019, the Risk Monitoring Committee has held 8 meetings, all of which were well documented in the minutes of the meeting. In carrying out its duties and responsibilities as a Risk Monitoring Committee, the governing provisions have been stated in an internal regulation of the Risk Monitoring Committee. To support the smooth implementation of the duties of the Risk Monitoring Committee in assisting the duties of the Board of Commissioners in supervising the Management, the Risk Monitoring Committee increases its competence through seminars and workshops held by internal and external parties.

Based on the tasks and focus of the activities mentioned above, the Risk Monitoring Committee has conducted discussions and submitted suggestions/opinions to the Board of Commissioners to be used as input to the Directors.

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	%
Muhammad Mas'ud	Ketua	8	0	0
Candra Fajri	Anggota	8	8	100
Rudi Purwono	Anggota	8	7	87,5
Herry Hendarto	Anggota/ Pihak Independen	8	6	75
Budi Setiawan	Anggota	8	7	87,5
Syafrudin	Anggota/ Pihak Independen	8	2	25

efektif tanggal 14 Oktober 2019 setelah mendapat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tanggal	Agenda	Peserta
08 Januari 2019	Pembahasan mengenai Buku Pedoman Komite Direksi Bab VII Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)	1. Candra Fajri A 2. Rudi Purwono 3. Budi Setiawan 4. Herry Hendarto
08 Februari 2019	Pembahasan mengenai hasil konsultasi Dewan Komisaris dengan OJK KR IV	1. Candra Fajri A 2. Herry Hendarto 3. Nurhadi 4. Nur Eko A (Pemimpin Divisi HC)
28 Februari 2019	Pembahasan Laporan Risiko Kredit Pembahasan mengenai Laporan Risiko Operasional	1. Candra Fajri A 2. Rudi Purwono 3. Budi Setiawan 4. Herry Hendarto
22 Maret 2019	Pembahasan Mitigasi terhadap 50 Depositor terbesar/depositor inti Bank Jatim Periode Desember 2018 s/d Februari 2019	1. Candra Fajri A 2. Rudi Purwono 3. Budi Setiawan 4. Herry Hendarto
04 April 2019	Pembahasan Mengenai Permohonan Persetujuan Dekom tentang BPP Pemasaran Bab IV ketentuan Alih Daya Kegiatan Pemasaran	1. Candra Fajri A 2. Rudi Purwono 3. Budi Setiawan 4. Herry Hendarto 5. Nurhadi
08 April 2019	Pembahasan Laporan Persetujuan kredit <i>large exposure</i> atas nama PT. Jasamarga Solo- Ngawi (JSN)	1. Candra Fajri A 2. Rudi Purwono 3. Budi Setiawan 4. Herry Hendarto 5. Nurhadi
17 Mei 2019	Pembahasan Evaluasi Perkembangan Kinerja s.d Cawu I Per 30 April 2019 dan progress terhadap RBB tahun 2019.	1. Candra Fajri A 2. Rudi Purwono 3. Budi Setiawan 4. Syafrudin
25 Juni 2019	Pembahasan mengenai Pemantauan perkembangan Profil Risiko kredit dan Risiko Operasional periode Maret 2019	1. Candra Fajri A 2. Rudi Purwono 3. Budi Setiawan 4. Syafruddin

Name	Position	Total Meetings	Attendance	%
Muhammad Mas'ud	Ketua	8	0	0
Candra Fajri	Anggota	8	8	100
Rudi Purwono	Anggota	8	7	87,5
Herry Hendarto	Anggota/ Pihak Independen	8	6	75
Budi Setiawan	Anggota	8	7	87,5
Syafrudin	Anggota/ Pihak Independen	8	2	25

efektif tanggal 14 Oktober 2019 setelah mendapat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Date	Agenda	Meeting Participants
January 8, 2019	Discussion on the Board of Directors' Handbook Chapter VII Credit Policy Committee (KKP)	1. Candra Fajri A 2. Rudi Purwono 3. Budi Setiawan 4. Herry Hendarto
February 8, 2019	Discussion on the results of the Board of Commissioners' consultation with OJK KR IV	1. Candra Fajri A 2. Herry Hendarto 3. Nurhadi 4. Nur Eko A (Head of HC Division)
February 28, 2019	1. Discussion of the Credit Risk Report 2. Discussion on Operational Risk Reports	1. Candra Fajri A 2. Rudi Purwono 3. Budi Setiawan 4. Herry Hendarto
March 22, 2019	Discussion on Mitigation of the 50 largest depositors/core depositors of Bank Jatim in December 2018 to February 2019	1. Candra Fajri A 2. Rudi Purwono 3. Budi Setiawan 4. Herry Hendarto
April 4, 2019	Discussion Regarding Requests from the Board of Commissioners regarding BPP Marketing Chapter IV provisions on Outsourcing of Marketing Activities	1. Candra Fajri A 2. Rudi Purwono 3. Budi Setiawan 4. Herry Hendarto 5. Nurhadi
April 8, 2019	Discussion on the large exposure credit approval report on behalf of PT. Jasamarga Solo- Ngawi (JSN)	1. Candra Fajri A 2. Rudi Purwono 3. Budi Setiawan 4. Herry Hendarto 5. Nurhadi
June 25, 2019	Discussion on Monitoring the development of credit risk profiles and operational risks for the period March 2019	1. Candra Fajri A 2. Rudi Purwono 3. Budi Setiawan 4. Syafruddin
25 Juni 2019	Pembahasan mengenai Pemantauan perkembangan Profil Risiko kredit dan Risiko Operasional periode Maret 2019	1. Candra Fajri A 2. Rudi Purwono 3. Budi Setiawan 4. Syafruddin



KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

COMMITTEES UNDER THE
BOARD OF DIRECTORS



Bank Jatim telah membentuk komite-komite di bawah Direksi sebagai berikut:

1. KOMITE ALCO (ASSET LIABILITY COMMITTEE)
2. KOMITE MANAJEMEN RISIKO
3. KOMITE KEPEGAWAIAN
4. KOMITE *IT STEERING*
5. KOMITE KREDIT
 - KOMITE KREDIT KONVENSIONAL
 - KOMITE PEMBIAYAAN
6. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN
7. KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR
 - KOMITE PJP BIDANG PRODUK
 - KOMITE PJP BIDANG JARINGAN
 - KOMITE PJP BIDANG PROSEDUR
 - KOMITE PJP BIDANG CSR
8. KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Bank Jatim has established the following committees under the Board of Directors:

1. ALCO Committee (Asset and Liability Committee)
2. Risk Management Committee
3. Employment Committee
4. IT Steering Committee
5. Credit Committee
 - Conventional Credit Committee
 - Financing Committee
6. Credit Policy Committee
7. Product Network and Procedure Committee
 - PJP Committee for Product
 - PJP Committee for Network
 - PJP Committee for Procedure
 - PJP Committee for CSR
8. Integrated Risk Management Committee

KOMITE ALCO

Direksi membentuk *Asset Liability Committee* (ALCO) dalam rangka menyatukan pengambilan keputusan *asset* dan *liabilities* demi tujuan yang telah digariskan. Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities*. Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan.

ALCO COMMITTEE

The Board of Directors has established the Asset Liability Committee (ALCO) to unite the decision making of *assets* and *liabilities* for the purposes stated. To minimize and eliminate the risks that occur in banks, especially Liquidity Risk, Interest Rates and Exchange Rates, cooperation and active participation from the decision makers is necessary, both in terms of *assets* and *liabilities*. The cooperation will succeed if each decision maker understands the role and its impact on overall business profits.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti	Direktur Keuangan
Sekretaris	Pemimpin Divisi Tresuri
Anggota Tetap	Direktur Menengah Korporasi Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah Direktur Operasional Direktur Kepatuhan dan Human Capital Direktur Manajemen Risiko Seluruh Pemimpin Divisi dan setara Pemimpin Divisi selain Undangan

STRUCTURE AND MEMBERSHIP

<i>Head of Committee</i>	<i>President Director</i>
<i>Interim Head of Committee</i>	<i>Finance Director</i>
<i>Secretary</i>	<i>Head of Treasury Division</i>
<i>Permanent Members</i>	<i>Corporate Medium Director</i> <i>Retail Consumer and Sharia Business Director</i> <i>Operations Director</i> <i>Compliance and Human Capital Director</i> <i>Risk Management Director</i> <i>All Division Heads and those of the level of Division Heads other than invitees</i>

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Menetapkan tujuan global, menyusun strategi dan kebijakan, memberikan petunjuk pengelolaan dan pengendalian kekayaan keuangan serta kewajiban Bank berbasis pengendalian Risiko Likuiditas, Resiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar dan Risiko Portofolio;
2. Meninjau dan mengecek ulang pedoman kebijakan Bank yang telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai tujuan Bank dan perkembangan PerBankan;

DUTIES, AUTHORITY, AND RESPONSIBILITIES

1. Determine global goals, formulating strategies and policies, providing guidance on managing and controlling financial assets and obligations of the Bank based on controlling Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Exchange Rate Risk and Portfolio Risk;
2. Review and reviewing Bank policy guidelines that have been prepared on an ongoing basis within the scope of the ALMA in accordance with the Bank's objectives and banking developments;

3. Meninjau dan mengkaji ulang struktur neraca, risiko serta *exposure asset liability management*;
4. Mengamati perkiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar dan valuta asing untuk menetapkan kebijakan;
5. Melakukan kaji ulang pricing aktiva dan pasiva untuk mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA perusahaan;
6. Mengevaluasi, mengembangkan dan menetapkan posisi *Asset & Liabilities Management* guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* telah konsisten dengan tujuan pengelolaan:
 - Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)
 - Risiko Suku Bunga (*Interest Risk*)
 - Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange Risk*)
 - Risiko Portofolio (*Earning and Investment Risk*);
7. Mengamati dan menetapkan suku bunga pinjaman dan bunga dana;
8. Meninjau dan menetapkan strategi posisi:
 - *Primary, Secondary dan Tertiary Reserve* beserta instrumennya
 - *Gap* beserta instrumennya
 - Devisa serta mata uang;
9. Menetapkan harga *transfer* dana internal (*internal funds transfer rate*) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang;
10. Meninjau kembali kinerja dan posisi kekayaan dalam *asset liability management* terhadap tujuan Bank, kepatuhan internal Bank maupun pada kepatuhan regulasi;
11. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam mencapai tujuan *asset liability management* dan tujuan Bank.

3. Review and reviewing the balance sheet structure, risk and asset liability management exposure;
4. Observing estimates and projections of economic conditions, interest rates, exchange rates and foreign exchange to establish policies;
5. Conduct asset and liability pricing reviews to optimize the results of investment funds, minimize the cost of funds, and maintain a balance sheet structure in accordance with the company's ALMA strategy;
6. Evaluate, develop and determine the Asset & Liabilities Management position to ensure that the results of the risk taking position are consistent with management objectives:
 - Liquidity Risk (Liquidity Risk)
 - Interest Risk
 - Foreign Exchange Risk
 - Portfolio Risk (Earning and Investment Risk);
7. Observe and setting loan interest rates and fund interest;
8. Review and set position strategies:
 - Primary, Secondary and Tertiary Reserve and their instruments
 - Gap and its instruments
 - Foreign exchange and currencies;
9. Determine the price of internal funds transfer (internal funds transfer rate) or the price of inter-office accounts in promoting the efficiency of branch management;
10. Review the performance and wealth position in asset liability management with regard to the Bank's objectives, internal compliance with the Bank and on regulatory compliance;
11. Adjust strategies, limits and implementation guidelines and policies in achieving the objectives of asset liability management and the objectives of the Bank.

FREKUENSI RAPAT KOMITE ALCO

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	%
Direkur Utama	Ketua	17	6	35
Direktur Keuangan	Anggota	17	11	64
Direktur Menengah Korporasi	Anggota	17	2	11
Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah	Anggota	17	4	23
Direktur Operasional	Anggota	17	10	58
Direktur Manajemen Risiko	Anggota	17	6	35

ALCO COMMITTEE MEETING FREQUENCY

Name	Position	Total Meetings	Attendance	%
President Director	Head of Committee	17	6	35
Finance Director	Member of Committee	17	11	64
Corporate Medium Director	Member of Committee	17	2	11
Retail Consumer and Sharia Business Director	Member of Committee	17	4	23
Operations Director	Member of Committee	17	10	58
Risk Management Director	Member of Committee	17	6	35

AGENDA RAPAT KOMITE ALCO

Tanggal	Divisi	Agenda	Kinerja Komite	Peserta Rapat
17 Januari 2019 00.00	Kredit Konsumer	Perubahan Suku Bunga & Biaya KPR SSB dan KPR BP2BT	Ketentuan ALCO No. 058/014/KEP/DIR/TRE/ALCO yg berlaku mulai tanggal 24 Januari 2019	R. Soeroso (Direktur Utama), Ferdian Timur S (Direktur Keuangan), SU'UDI (Direktur Menengah Korporasi), Rudie Hardiono (Direktur Operasional), Hadi Santoso (Direktur Kepatuhan & Human Capital) , Risyana Mirda (Direktur Manajemen Risiko)
	Pengembangan Produk	Suku Bunga dan <i>List of Term & Condition</i> Tabungan Siklus Pensiun		
11 Februari 2019 00.00	Internasional <i>Banking</i>	Usulan <i>Transit Time Interest</i> (SKBDN)	Ketentuan ALCO No. 058/030/KEP/DIR/TRE/ALCO yg berlaku mulai tanggal 18 Februari 2019	R. Soeroso (Direktur Utama), Ferdian Timur S (Direktur Keuangan), SU'UDI (Direktur Menengah Korporasi), Rudie Hardiono (Direktur Operasional), Tony Sudjiaryanto (Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah), Risyana Mirda (Direktur Manajemen Risiko)
		Usulan Biaya L/C Ekspor		
		Usulan Biaya L/C Impor		
	Kredit Konsumer	Usulan <i>Special Rate</i> Kredit Multi Guna		
	Kredit Dana Jasa & e- <i>Banking</i>	Usulan terkait Perubahan Bunga Rekening Antar Kantor (RAK) Untuk Cabang di Wilayah Jawa Timur		
	<i>Treasury</i>	Usulan bobot OHC - SBDK		
	Kredit Menengah & Korporasi	Usulan bobot OHC - SBDK		
	18 Februari 2019 00.00	Kredit Konsumer	Usulan penurunan KMG	
4 Maret 2019 00.00	Pengembangan Produk & Kebijakan	Usulan <i>Bulk Transfer</i> SKNBI	Ketentuan ALCO No. 058/054/KEP/DIR/TRE/ALCO yg berlaku mulai tanggal 14 Maret 2019	Ferdian Timur S (Direktur Keuangan), Rudie Hardiono (Direktur Operasional), SU'UDI (Direktur Menengah Korporasi), Risyana Mirda (Direktur Manajemen Risiko), Hadi Santoso (Direktur Kepatuhan & Human Capital)
		Usulan Suku bunga dan <i>List Term & Condition</i> Rekening Giro Escrow		
		Usulan Limit Transaksi <i>Mobile Banking</i> dan <i>SMS Banking</i>		

ALCO COMMITTEE MEETING AGENDA

Date	Division	Agenda	Committee Performance	Meeting Participant
January 17, 2019 00.00	Consumer Credit	Changes in Interest Rates & Fees for KPR SSB and KPR BP2BT	ALCO Provision No. 058/014/KEP/DIR/TRE/ALCO effective since January 24, 2019	R. Soeroso (President Director), Ferdian Timur S (Finance Director), Su'udi (Medium Corporate Director), Rudie Hardiono (Operations Director), Hadi Santoso (Compliance & Human Capital Director), Risyana Mirda (Risk Management Director)
	Product Development	Interest Rate and Pension Cycle List of Term & Condition Savings		
February 11, 2019 00.00	International Banking	Proposed Transit Time Interest (SKBDN)	ALCO Provision No. 058/030/KEP/DIR/TRE/ALCO effective since February 18, 2019	R. Soeroso (President Director), Ferdian Timur S (Finance Director), Su'udi (Medium Corporate Director), Rudie Hardiono (Operations Director), Tony Sudjiaryanto (Retail, Consumer, and Sharia Business Director), Risyana Mirda (Risk Management Director)
		Proposed Export L/C Costs		
		Proposed Import L/C Costs		
	Consumer Credit	Proposed Multi-Use Loans Special Rate		
	Kredit Dana Jasa & e-Banking	Proposal related to Changes in Inter-Office Account Interest (RBD) for Branches in the East Java Region		
	Treasury	Proposed OHC-SBDK weights		
	Medium & Corporation Credit	Proposed OHC-SBDK weights		
February 18, 2019 00.00	Consumer Credit	Proposal for KMG Reduction	ALCO Provision No. 058/031/KEP/DIR/TRE/ALCO effective since February 18, 2019	Ferdian Timur S (Finance Director), Rudie Hardiono (Operations Director), Tony Sudjiaryanto (Retail, Consumer & Sharia Business Director), Risyana Mirda (Risk Management Director), Hadi Santoso (Compliance & Human Capital Director)
March 4, 2019 00.00	Product Development & Policy	SKNBI Bulk Transfer Proposal	ALCO Provision No. 058/054/KEP/DIR/TRE/ALCO effective since March 14, 2019	Ferdian Timur S (Finance Director), Rudie Hardiono (Operations Director), Su'udi (Medium Corporation Director), Risyana Mirda (Risk Management Director), Hadi Santoso (Compliance & Human Capital Director)
		Proposed interest rates and Escrow Giro Account Term & Condition List		
		Proposed Limit on Mobile Banking and SMS Banking Transactions		

8 Maret 2019 00.00	Kredit Konsumer	Usulan <i>Special Rate</i> KMG	Ketentuan ALCO No. 058/054/KEP/DIR/TRE/ALCO yg berlaku mulai tanggal 14 Maret 2019	Ferdian Timur S (Direktur Keuangan), Tony Sudjiyarto (Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah), Risyana Mirda (Direktur Manajemen Risiko), Hadi Santoso (Direktur Kepatuhan & Human Capital)
15 April 2019 00.00	Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	Usulan terkait Perubahan Biaya Provisi Kredit Pembiayaan Piutang (khusus untuk Talangan BPJS)	etentuan ALCO No. 058/095/KEP/DIR/TRE/ALCO yg berlaku mulai tanggal 29 April 2019	
9 Mei 2019 00.00	Unit Usaha Syariah	Usulan terkait Ujroh Pembiayaan Umroh iB Maqbulah Program APKASI	Ketentuan ALCO No. 058/138KEP/DIR/TRE/ALCO yg berlaku mulai tanggal 22 Mei 2019	Ferdian Timur S (PGS, Direktur Utama, Direktur Keuangan, PGS Direktur Operasional), Risyana Mirda (Direktur Manajemen Risiko, PGS, Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah, PGS, Direktur Menengan Korporasi) Hadi Santoso (Direktur Kepatuhan & Human Capital)
		Usulan <i>Fee Marketing</i> Produk Pembiayaan Multiguna Pensiun		
	Kredit Konsumer	Usulan terkait Pembebasan Biaya Provisi dan Administrasi Kredit Multiguna Cabang Pacitan		
	Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	Usulan terkait <i>Commitment Fee</i> atas sisa Fastar Kredit Modal Kerja rekening Koran		
13 Mei 2019 00.00	Kredit Konsumer	Usulan Biaya Restrukturisasi		Ferdian Timur S (PGS, Direktur Utama, Direktur Keuangan, PGS Direktur Operasional) Hadi Santoso (Direktur Kepatuhan & Human Capital)
		Usulan Biaya Pinalti Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo Kredit Multiguna		
22 Juni 2019 00.00	Kredit Mikro Ritel dan Program	Usulan Ketentuan Suku Bunga Kredit Mikro Program <i>Green Banking</i>	Keputusan ALCO No. 058/169/KEP/DIR/TRE/ALCO yang berlaku mulai tanggal 28 Juni 2019	Ferdian Timur S (PGS, Direktur Utama, Direktur Keuangan, PGS Direktur Operasional) Hadi Santoso (Direktur Kepatuhan & Human Capital)
	Kredit Konsumer	Usulan terkait Suku Bunga Promo KMG HUT Bank Jatim		
15 Juli 2019 00.00	Kredit Konsumer	Usulan Pelunasan Jatuh Tempo Tanpa Kompensasi Kredit Multiguna	Keputusan ALCO No. 058/186KEP/DIR/TRE/ALCO yang berlaku mulai tanggal 24 Juli 2019	
		Usulan Biaya Pemotongan Angsuran Kredit Multiguna		
		Usulan Suku Bunga Promo HUT Bank Jatim - Promo Suku Bunga Kredit Properti		
		Usulan Penghapusan Biaya Pinalti Pelunasan Sebagian		
	Kredit Mikro Ritel dan Program	Usulan terkait Suku Bunga Pundi Kencana		

March 8, 2019 00.00	Consumer Credit	Proposal for KMG Special Rate	ALCO Provision No. 058/054/KEP/DIR/TRE/ALCO effective since March 14, 2019	Ferdian Timur S (Finance Director), Tony Sudjiaryanto (Retail, Consumer & Sharia Business Director), Risyana Mirda (Risk Management Directors), Hadi Santoso (Compliance & Human Capital Director)
April 15, 2019 00.00	Medium Corporate Credit & Syndication	Proposal related to Changes in the Cost of Crediting Credit Provision Fees (specifically for BPJS Bailouts)	ALCO Provision No. 058/095/KEP/DIR/TRE/ALCO effective since April 29, 2019	
May 9, 2019 00.00	Sharia Business Unit	Proposal related to the iB Maqbulah Umrah Funding Pilgrimage APKASI Program	ALCO Provision No. 058/138KEP/DIR/TRE/ALCO effective since May 22, 2019	Ferdian Timur S (Act. President Director, Finance Director, Act. Operations Director), Risyana Mirda (Risk Management Director, Act. Retail, Consumer & Sharia Business Director, Act. Medium Corporate Director), Hadi Santoso (Compliance & Human Capital Director)
		Proposed Marketing Fee for Multipurpose Pension Financing Products		
	Consumer Credit	Proposal related to Exemption from Provision and Administration of Pacitan Branch Multipurpose Credit Costs		
	Medium Corporate Credit & Syndication	Proposal related to the Commitment Fee for the remaining Working Capital Credit Fastar Newspaper		
	Credit Restructuring & Settlement	Proposed Restructuring Costs		
May 13, 2019 00.00	Consumer Credit	Proposed Penalty Fee for Repayment Before Maturity of Multi Purpose Loans		Ferdian Timur S (Act. President Director, Finance Director, Act. Operations Director), Hadi Santoso (Compliance & Human Capital Director)
June 22, 2019 00.00	Micro, Retail & Program Credit	Proposed Provisions for Micro Credit Interest Rates in the Green Banking Program	ALCO Decision No. 058/169/KEP/DIR/TRE/ALCO effective since June 28, 2019	Ferdian Timur S (Act. President Director, Finance Director, Act. Operations Director), Hadi Santoso (Compliance & Human Capital Director)
	Consumer Credit	Proposal related to Bank Jatim KMG Anniversary Promo Interest Rates		
July 15, 2019 00.00	Consumer Credit	Proposal for Repaying Maturity Without Multipurpose Credit Compensation	ALCO Decision No. 058/186KEP/DIR/TRE/ALCO effective since July 24, 2019	
		Proposed Reduction of Multipurpose Loan Installment Costs		
		Proposed Interest Rate for Bank Jatim Anniversary Promo - Property Credit Interest Promo		
		Proposed Write-Off Penalty Fee Partial Repayment		
	Micro, Retail & Program Credit	Proposal related to Pundi Kencana Interest Rate		

23 Juli 2019 00.00	Kredit Konsumer	Usulan Bunga kredit Promo Multiguna dalam rangka HUT Bank Jatim ke 58	Keputusan ALCO No. 058/197KEP/DIR/TRE/ALCO yang berlaku mulai tanggal 01 Agustus 2019	
		Usulan Bunga <i>Personal Loan Car Allowance</i> Program		
19 Agustus 2019 00.00	Bisnis Syariah	Usulan Ketentuan <i>List of Term & Condition</i> Tabungan Simpel iB	Keputusan ALCO No. 058/229KEP/DIR/TRE/ALCO yang berlaku mulai tanggal 23 Agustus 2019	Ferdian Timur S. (PGS.Dirut, Direktur Keuangan, PGS, Direktur Operasional), Risyana Mirda (Direktur Risiko Bisnis, PGS, Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah, PGS, Direktur Komersial & Korporasi),
		Usulan Simpanan Pokok, Dana Mismatch dan Dana Bergulir APEX Bank Jatim		
		Usulan Spesial Margin Pembiayaan Linkage BPRS untuk PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep	Risalah Komite Asset & Liability #12 Agustus 2019 No. 058/028/KAL/RR	
		Usulan <i>Margin</i> Pembiayaan Multiguna untuk Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA)		
		Usulan Biaya dan Limit <i>Transfer</i> SKNBI	Keputusan ALCO No. 058/229KEP/DIR/TRE/ALCO yang berlaku mulai tanggal 23 Agustus 2019	
		Pengembangan Produk		
		Usulan Biaya Admin Pembayaran <i>Multipayment Paytren</i>	Keputusan ALCO No. 058/229KEP/DIR/TRE/ALCO yang berlaku mulai tanggal 23 Agustus 2019	
Dana Jasa & e- <i>Banking</i>	Usulan Suku Bunga APEX BPR Bank Jatim			
23 September 2019 00.00	Kredit Konsumer	Usulan Ketentuan <i>List of Term & Condition</i> Kredit KPRS SSB	Keputusan ALCO No. 058/275KEP/DIR/TRE/ALCO tanggal 26 September 2019 yang berlaku mulai tanggal 30 September 2019	Ferdian Timur S. PGS, Direktur Utama, Direktur Keuangan, PGS, Direktur Operasional)
	Dana Jasa & e- <i>Banking</i>	Usulan Perubahan Kewenangan Negosiasi Rate Deposito		
	Manajemen Risiko	Usulan <i>review</i> , Kajian dan Asumsi Perhitungan IRRBB		

July 23, 2019 00.00	Consumer Credit	Proposed Multipurpose Promo credit interest for the 58th anniversary of Bank Jatim	ALCO Decision No. 058/197KEP/DIR/TRE/ALCO effective since August 1 2019	
		Proposed Personal Loan Car Allowance Program Interest		
August 19, 2019 00.00	Sharia Business	Proposed Provisions on the List of Term & Condition Simple Savings iB	ALCO Decision No. 058/229KEP/DIR/TRE/ALCO effective since August 23, 2019	Ferdian Timur S (Act. President Director, Finance Director, Act. Operations Director), Risyana Mirda (Business Risk Director, Act. Consumer, Retail & Sharia Business Director, Act. Commerce & Corporation Director)
		Proposed Principal Deposits, Mismatch Funds and APEX Bank Jatim Revolving Funds		
		BPRS Linkage Financing Margin Special Proposal for PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep	Minutes of Asset & Liability Committee #August 12, 2019 No. 058/028/KAL/RR	
		Proposed Multi Purpose Financing Margin for Sunan Ampel State Islamic University (UINSA)		
		Proposed SKNBI Fee and Limit Transfers	ALCO Decision No. 058/229KEP/DIR/TRE/ALCO effective since August 23, 2019	
	Product Development	Proposed SKNBI Fee and Limit Transfers	ALCO Decision No. 058/229KEP/DIR/TRE/ALCO effective since August 23, 2019	
		Proposed Admin Fee for Multipayment Paytren Payments		
	Service Fund & e-Banking	Proposed BPR APEX BPR Bank Jatim Interest Rate		
September 23, 2019 00.00	Consumer Credit	Proposed Provisions on the List of Term & Condition of KPRS SSB Credit	ALCO Decision No. 058/275KEP/DIR/TRE/ALCO dated September 26, 2019, and effective since September 30, 2019	Ferdian Timur S (Act. President Director, Finance Director, Act. Operations Director)
	Service Fund & e-Banking	Proposed Changes to the Authority for Negotiating the Rate of Deposit		
	Risk Management	Proposed review, IRRBB Calculation and Assumptions Calculation		

4 Oktober 2019 00.00	Dana Jasa & e-Banking	Usulan Perubahan Pemberian <i>Special Rate</i> Khusus Pemerintah Kab. Bojonegoro di Cabang Bojonegoro Ketentuan Kewenangan Negosiasi Rate Deposito	Risalah Rapat ALCO #14 Oktober 2019 No. 058/032/KAL/RR tgl 04 Oktober 2019	Ferdian Timur S. (PGS,Dirut, Direktur Keuangan, PGS Direktur Operasional). Risyana Mirda (Direktur Risiko Bisnis, PGS. Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah, PGS. Direktur Komersial & Korporasi)
8 Oktober 2019 00.00	Divisi Kredit Konsumer	Usulan Perpanjangan Suku Bunga Promo Kredit Properti	Ketentuan ALCO 058/283/KEP/DIR/TRE?ALCO tgl 14 Oktober 2019 berlaku tgl 15 Oktober 2015	Ferdian Timur S (PGS. Direktur Utama, Direktur Keuangan, PGS Direktur Operasional) , Risyana Mirda (Direktur Manajemen Risiko, PGS. Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah, PGS. Direktur Menengan Korporasi) Hadi Santoso (Direktur Kepatuhan & Human Capital)
	Kredit Mikro Ritel & program	Usulan Suku Bunga Pundi Kencana Sumber Dana LPDB		
		Usulan Suku Bunga Jatim Mikro Sumber Dana LPDB		
		Usulan Suku Bunga Promo Jatim Mikro Debitur Baru		
		Usulan Suku Bunga Skim Kredit <i>Green Banking</i>		
	Divisi Tresuri, PKU, DJE dan Hubungan Kelembagaan	Usulan Strategi Peningkatan Aset	Risalah Komite ALCO #15 Oktober II - 2019 No. 058/034/KAL/RR tanggal 08 Oktober 2019	
	Divisi Tresuri	Kajian <i>Stress Test</i> Likuiditas Sept 2019		
4 November 2019 00.00	Dana Jasa & E-Banking	Usulan <i>Special Rate</i> Deposito Akhir Tahun	Risalah Rapat ALCO #16 November 2019 No. 058/037/KAL/RR tgl 04 November 2019	Ferdian Timur S. (Plt.Dirut, Direktur Keuangan). Risyana Mirda (Direktur Risiko Bisnis, Plt. Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah), Busrul Iman (Direktur Komersial & Korporasi). Erdianto Sigit (Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko)
	Hubungan kelembagaan	Usulan Program Siklus Prioritas Hadiah Suka-Suka		
13 Desember 2019 00.00	Dana Bisnis Syariah	Usulan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan PKPA a.n Koperasi Pegawai PELINDO III	Risalah Rapat ALCO #17 Desember 2019 No. 058/041/KAL/RR tgl 13 Desember 2020	Ferdian Timur S. (Plt.Dirut, Direktur Keuangan). Risyana Mirda (Direktur Risiko Bisnis, Plt. Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah), Tony Prasetyo (Direktur TI & Operasional)

October 4, 2019 00.00	Service Fund & e-Banking	Proposed Amendment to the Granting of Special Government Special Rate Kab. Bojonegoro in Bojonegoro Branch Regulations on the Rate Negotiation Authority	Minutes of ALCO Meeting #October 14, 2019 No. 058/032/KAL/RR dated October 4, 2019	Ferdian Timur S (Act. President Director, Finance Director, Act. Operations Director), Risyana Mirda (Business Risk Director, Act. Consumer, Retail & Sharia Business Director, Act. Commerce & Corporation Director)
Oktober 8, 2019 00.00	Consumer Credit Division	Proposed Extension of Property Credit Promotion Interest Rates	ALCO Provision 058/283/KEP/DIR/TRE/ALCO dated October 14, 2019, and effective since October 15, 2015	Ferdian Timur S (Act. President Director, Finance Director, Act. Operations Director), Risyana Mirda (Business Risk Director, Act. Consumer, Retail & Sharia Business Director, Act. Commerce & Corporation Director), Hadi Santoso (Compliance & Human Capital Director)
	Micro, Retail & Program Credit	Proposed Pundi Kencana Interest Rate for LPDB Fund Resources		
		Proposed Micro East Java Interest Rate as a Source of LPDB Funds		
		Proposal of Micro Debtor Promo for New Micro Debtors		
		Proposed Green Banking Credit Skim Interest Rates		
	Treasury, PKU, DJE and Institutional Relations Division	Proposed Asset Improvement Strategies	Minutes of ALCO Meeting #October 15, II - 2019 No. 058/034/KAL/RR dated October 8, 2019	
	Treasury Division	Liquidity Stress Test Study Sept 2019		
November 4, 2019 00.00	Service Fund & E-Banking	Proposed End of Year Special Rate Deposit	Minutes of ALCO Meeting #November 16, 2019 No. 058/037/KAL/RR dated November 4, 2019	Ferdian Timur S. (Act. President Director, Finance Director), Risyana Mirda (Business Risk Director, Act. Consumer, Retail & Sharia Business Director), Busrul Iman (Commerce & Corporation Director), Erdianto Sigit (Compliance & Risk Management Director)
	Institutional Relations	The Proposed Cycle of Priority Prize-Like Gifts Program		
December 13, 2019 00.00	Sharia Business Fund	Proposed Sharing Ratio for PKPA Financing a.n Employee Cooperative of PELINDO III	Minutes of ALCO Meeting #December 17, 2019 No. 058/041/KAL/RR dated December 13, 2019	Ferdian Timur S. (Act. President Director, Finance Director), Risyana Mirda (Business Risk Director, Act. Consumer, Retail & Sharia Business Director), Tony Prasetyo (IT & Operations Director)

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko (Komenko) dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha Bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan
Anggota Tetap	Seluruh Direksi
Anggota Tidak Tetap	Pemimpin Divisi Terkait

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, yaitu:
 - Menetapkan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko beserta perubahannya, termasuk *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal tidak normal;
 - Menetapkan prosedur dan penetapan limit Risiko (*risk limit*), toleransi Risiko (*risk tolerance*) dan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) baik secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko maupun per aktivitas fungsional;
 - Menetapkan prosedur dan penetapan limit Bisnis maupun limit operasional lainnya, berdasarkan permintaan/usulan dari Unit terkait;
 - Menetapkan metodologi penilaian/pengukuran peringkat Risiko sebagai dasar untuk mengkategorikan peringkat Risiko Bank (*Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High, High*);
 - Menetapkan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*) terkait permodalan, likuiditas dan operasional Bank.
- Dalam perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko, yaitu :
 - Meninjau kebijakan, strategi dan prosedur Manajemen Risiko terkait perubahan kondisi internal dan eksternal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko;
 - Melakukan kaji ulang pada penetapan limit Risiko yang berdasarkan pada akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang memadai;
 - Mengevaluasi metodologi penilaian/ukuran peringkat risiko yang telah ditetapkan, dan disesuaikan dengan perkembangan aktivitas fungsional Bank.
- Untuk menetapkan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur perlunya dilakukan penetapan hal sebagai pembenaran dalam pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank serta pengambilan posisi. Eksposur Risiko yang menyimpang dari limit yang ditetapkan.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee (Komenko) is established to maintain risk exposures at tolerable or profitable limits, so the Bank can conduct its business activities and remain under control (*manageable*) based on the principle of prudence.

STRUCTURE AND MEMBERSHIP

<i>Head of Committee</i>	<i>President Director</i>
<i>Interim Head</i>	<i>Risk Management Director</i>
<i>Secretary</i>	<i>Head of Corporate Risk Management Division</i>
<i>Permanent Members</i>	<i>All Members of Board of Directors</i>
<i>Non-Permanent Members</i>	<i>Related Division Heads</i>

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

- To arrange policies and strategies and guidelines of the implementation of Risk Management, namely:
 - Stipulate policies, strategies, and guidelines of the implementation of risk management and its changes including contingency plan if the external conditions are abnormal;
 - Stipulate procedures and determination of risk limits, risk tolerance and the undertaken level of risk in risk appetite both overall (*composite*), per type of risk and functional activity;
 - Stipulate procedures and determination of business limits and other operational limits, based on requests/proposals from related Units;
 - Establish a Risk rating/rating measurement methodology as a basis in categorizing Bank Risk ratings (*Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High, High*);
 - Establish a contingency plan in the worst case scenario in terms of Bank capital, liquidity, and operations.
- To develop and improve the implementation of Risk Management, namely:
 - Review policies, strategies and procedures of Risk Management related to changes in the Bank's internal and external conditions that affect capital adequacy, the Bank's risk profile and the ineffectiveness of the application of Risk Management;
 - Review the determination of Risk limits based on accountability and adequate levels of delegation of authority;
 - Evaluate the methodology for rating/measurement of risk ratings that have been determined, and adjusted to the development of the Bank's functional activities.
- To determine business decisions that deviate from the procedure, it is necessary to determine things as justification for exceeding significant business expansion compared to the Bank's business plan and position taking. Risk Exposures that deviate from the specified limit.

FREKUENSI RAPAT KOMITE MANEJEMEN RISIKO

NO	JABATAN	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
1	Direktur Utama	5	3	60%
2	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	5	5	100%
3	Direktur Komersial dan Korporasi	5	4	80%
4	Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah	5	3	60%
5	Direktur TI & Operasi	5	3	60%
6	Direktur Risiko Bisnis	5	4	80%
7	Direktur Keuangan	5	3	60%
8	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan	5	4	80%
9	Corporate Secretary	5	3	60%
10	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi	5	4	80%
11	Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan	5	5	100%
12	Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola	5	4	80%
13	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja	5	2	40%
14	Pemimpin Divisi Human Capital	5	4	80%
15	Pemimpin Divisi Umum	5	2	40%
16	Pemimpin Divisi Kredit Menengah, Korporasi & Sindikasi	5	5	100%
17	Pemimpin Divisi Kredit Mikro, Ritel & Program	5	4	80%
18	Pemimpin Divisi Dana, Jasa & E-Banking	5	5	100%
19	Pemimpin Divisi Tresuri	5	5	100%
20	Pemimpin Divisi Service Quality Assurance	5	5	100%
21	Pemimpin Divisi Audit Intern	5	4	80%
22	Pemimpin Divisi Risiko Kredit	5	5	100%

RISK MANAGEMENT COMMITTEE
MEETING FREQUENCY

No.	Name	Total Meetings	Attendance	Percentage
1	President Director	5	3	60%
2	Compliance Director	5	5	100%
3	Medium & Corporate Business Director	5	4	80%
4	Agribusiness & Sharia Business Director	5	3	60%
5	Operations Director	5	3	60%
6	Risk Management Division Head	5	4	80%
7	Corporate Secretary	5	3	60%
8	Information Technology Division Head	5	4	80%
9	Accounting Division Head	5	3	60%
10	Compliance Division Head	5	4	80%
11	Strategic Planning Division Head	5	5	100%
12	Human Capital Division Head	5	4	80%
13	General Affairs Division Head	5	2	40%
14	Medium Credit & Corporation Division Head	5	4	80%
15	Agribusiness & Retail Credit Division Head	5	2	40%
16	Service & Foreign Fund Division Head	5	5	100%
17	Treasury Division Head	5	4	80%
18	Branch Development Division Head	5	5	100%
19	Internal Audit Division Head	5	5	100%
20	Credit Risk Division Head	5	5	100%
21	Sharia Business Division Head	5	4	80%
22	Sharia Supporting Business Division Head	5	5	100%

23	Pemimpin Divisi Bisnis Syariah	5	3	60%
24	Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah	5	2	40%
25	Pemimpin Divisi Operasional Jaringan & Layanan Syariah	5	2	40%
26	Pemimpin Divisi Hukum	5	4	80%
27	Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan & Bisnis	5	3	60%
28	Pemimpin Divisi International Banking	5	4	80%
29	Pemimpin Divisi Kredit Konsumer	5	5	100%
30	Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit	5	5	100%
31	Pemimpin Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan	5	5	100%
32	Tim Spin Off	5	1	20%
33	Tim Spin Off	5	1	20%

23	Sharia Operational Network & Service Division Head	5	3	60%
24	Sharia Business Support Division Head	5	2	40%
25	Operational Network & Sharia Service Division	5	2	40%
26	Legal Division Head	5	4	80%
27	Institutional & Business Relations Division Head	5	3	60%
28	International Banking Division Head	5	4	80%
29	Consumer Credit Division Head	5	5	100%
30	Credit Restructuring & Settlement Division Head	5	5	100%
31	Product & Policy Development Division Head	5	5	100%
32	Spin Off Team	5	1	20%
33	Spin Off Team	5	1	20%

AGENDA RAPAT KOMENKO

AGENDA KOMENKO TAHUN 2019					
KOMENKO	NO	AGENDA	DIVISI INISIATOR PEMILIK MATERI	JUMLAH AGENDA	HASIL KOMENKO
Komenko #01 19 Maret 2019	1.	Limit Komite Implementasi Kredit	Divisi Risiko Kredit	1	Disetujui dalam Rapat Komenko
	2.	Limit Komite Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit		Disetujui dalam Rapat Komenko
Komenko #02 26 Juni 2019	1.	Perubahan BPP Kebijakan Manajemen Risiko (Kebijakan IRRBB)	Divisi Manajemen Risiko Perusahaan	2	Disetujui dalam Rapat Komenko
	2.	BPP Manajemen Risiko Pasar			Disetujui dalam Rapat Komenko
	3.	BPP Implementasi <i>Interest Risk In The Banking Book</i> (IRRBB)		1	Disetujui dalam Rapat Komenko
Komenko #03 02 Juli 2019	1.	Perubahan Kewenangan Memutus Permohonan Kredit	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	4	Disetujui dalam Rapat Komenko
Komenko #04 02 September 2019	1.	Pedoman Pelaksanaan Budaya Risiko	Divisi Manajemen Risiko Perusahaan		Disetujui dalam Rapat Komenko
Komenko #05 07 Oktober 2019	1.	Limit Pelaksanaan On The Spot (OTS)	Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan	1	Disetujui dalam Rapat Komenko
	2.	Perubahan Ketentuan Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/ Pembiayaan Tunai dan Kredit/ Pembiayaan Non Tunai		1	Disetujui dalam Rapat Komenko
	3.	Perubahan Ketentuan Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/ Pembiayaan Tunai dan Kredit/ Pembiayaan Non Tunai dengan Komite dan Tanpa Komite			Disetujui dalam Rapat Komenko
	4.	Perubahan Limit Permohonan Kredit untuk Perorangan dan Badan Usaha			Disetujui dalam Rapat Komenko



RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING AGENDA

Risk Management Committee Meeting Agenda in 2019					
KOMENKO	NO	AGENDA	DIVISI INISIATOR PEMILIK MATERI	JUMLAH AGENDA	HASIL KOMENKO
Komenko #01 March 19, 2019	1.	Limit of Credit Implementation Committee	Credit Risk Division	1	Approved in the Risk Management Committee Meeting
	2.	Limit of Credit Restructuring and Settlement Committee	Credit Restructuring and Settlement Division		Approved in the Risk Management Committee Meeting
Komenko #02 June 26, 2019	1.	BPP Change in Risk Management Policy (IRRBB Policy)	Corporate Risk Management Division	2	Approved in the Risk Management Committee Meeting
	2.	BPP of Market Risk Management			Approved in the Risk Management Committee Meeting
	3.	BPP of Implementation of Interest Risk in the Banking Book (IRRBB)		1	Approved in the Risk Management Committee Meeting
Komenko #03 July 02, 2019	1.	Change in the Authority to Determine Credit Proposal	Medium, Corporation, and Syndicated Loan Division	4	Approved in the Risk Management Committee Meeting
Komenko #04 September 02, 2019	1.	Risk Culture Implementation Guideline	Corporate Risk Management Division		Approved in the Risk Management Committee Meeting
Komenko #05 October 07, 2019	1.	Limit of the Implementation of On The Spot (OTS)	Product & Policy Development Division	1	Approved in the Risk Management Committee Meeting
	2.	Change in the Provisions for Limit of Authority to Approve Cash Credit/ Financing and Non-Cash Credit/ Financing		1	Approved in the Risk Management Committee Meeting
	3.	Change in the Provisions for Limit of Authority to Approve Cash Credit/ Financing and Non-Cash Credit/ Financing with or without Committee			Approved in the Risk Management Committee Meeting
	4.	Change in Limit of Credit Proposal for Individual and Corporate Customers			Approved in the Risk Management Committee Meeting

KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritis di bidang Human Capital baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan Human Capital yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Pemimpin Divisi Human Capital
Anggota Tetap	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Anggota Tidak Tetap	Direktur Bidang yang terkait dengan materi pembahasan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

TUGAS

- Memberikan arahan strategis dalam pengelolaan Human Capital;
- Meninjau kebijakan Human Capital konsisten, selaras dengan perencanaan strategis perusahaan;
- Memutuskan persetujuan atas usulan pelaksanaan program mutasi/promosi pejabat setingkat Pemimpin Divisi, Pemimpin Sub Divisi dan Pemimpin Cabang;
- Mengevaluasi kinerja pejabat setingkat Pemimpin Divisi, Pemimpin Sub Divisi dan Pemimpin Cabang;
- Memutuskan persetujuan atas usulan pemberian sanksi administratif;
- Menetapkan dan menyetujui pendelegasian kewenangan pengelolaan Human Capital.

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG

- Menetapkan pengelolaan kebijakan Human Capital selaras dengan perencanaan strategis terkait pada rekrutmen, pengembangan & penilaian kinerja pegawai, manajemen karir, remunerasi, hubungan industrial, budaya kerja serta sanksi administratif;
- Meninjau ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan ditempatkan pada posisi yang tepat;
- Memutuskan persetujuan atas usulan pelaksanaan program mutasi/promosi pejabat setingkat Pemimpin Divisi, Pemimpin Sub Divisi dan Pemimpin Cabang;
- Melakukan evaluasi kinerja pejabat setingkat Pemimpin Divisi, Pemimpin Sub Divisi dan Pemimpin Cabang.

EMPLOYMENT COMMITTEE

The Employment Committee is established to obtain optimal results in determining critical matters in Human Capital field both in the strategy, policy, and management system of Human Capital aligned with the Bank's Business Plan.

STRUCTURE AND MEMBERSHIP

<i>Head of Committee</i>	<i>President Director</i>
<i>Secretary</i>	<i>Head of Human Capital Division</i>
<i>Permanent Members</i>	<i>Risk Management & Compliance Director</i>
<i>Non-Permanent Members</i>	<i>Directors of the related fields</i>

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

DUTIES

- Provide strategic direction regarding the management of Human Capital.
- Ensure that Human Capital policies consistently aligned with the company's strategic planning.
- Stipulate on the approval of the proposed implementation of the mutation/promotion program at the level of the Division Leader, Sub Division Leader, and Branch Leader.
- Evaluate the performance of officials at the level of Division Leaders, Sub Division Leaders and Branch Leaders.
- Stipulate on approval of proposals for administrative sanctions.
- Establish and approve the authority delegation to manage Human Capital.

RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY

- Establish Human Capital policy management in line with strategic planning related to the recruitment, development & assessment of employee performance, career management, remuneration, industrial relations, work culture and administrative sanctions;
- Review the availability of qualified workforce and placed in the right position;
- Determine and provide approval of the proposed implementation of the mutation/promotion program of officials at the level of Division Leader, Sub-Division Leader and Branch Leader;
- Evaluate the performance of officials at the level of Division Leader, Subdivision Leader and Branch Leader.

FREKUENSI RAPAT KOMITE
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	%
Direktur Utama	Ketua	14	14	100
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Anggota	14	10	71

AGENDA RAPAT KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
29 Januari 2019	Rotasi Pejabat Pemimpin Cabang Setingkat Guna Sebagai Penyebaran Serta Memberikan Pengalaman Baru Sehingga Memperkaya Kemampuan Para Pejabat Dalam Mengemban Tugas Sebagai Bankir Pengisian Pejabat Khususnya Kekosongan Pejabat Serta Pengisian Pejabat Di Kantor Pusat	Direktur Utama, Direktur Retail Konsumer & Usaha Syariah, Direktur Operasional, Direktur Menengah Korporasi, Direktur Keuangan, Direktur Manajemen Risiko, Direktur Kepatuhan & Hc
25 Maret 2019	Pengecekan Slik Pada Saat Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Baru, Pengangkatan Pegawai Tetap Dan Alih Jalur Pegawai Menambah Tata Cara Persetujuan Untuk Suami/Istri Pegawai Yang Mendampingi Saat Perjalanan Dinas. Penyampaian Koreksi Nilai Mdp Pada Notulen Rapat Komite Manajemen Kepegawaian Sebelumnya	Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Manajemen Risiko, Direktur Kepatuhan & Hc
16 Mei 2019	Formulasi Perhitungan Jasa Produksi Dan Bonus/Reward Berbasis Kinerja Untuk Penyempurnaan Bpp Reward & Punishment System	Direktur Keuangan, Direktur Manajemen Risiko, Direktur Kepatuhan & Hc
14 Juni 2019	Perubahan Ketentuan Bpp Reward & Punishment Perubahan Pedoman Pelaksanaan Rekrutment & Seleksi Pegawai Golden Shake Hand Pelaksanaan Car Ownership Program (Cop) Penyempurnaan Sk Direksi Tentang Pedoman Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Pegawai Pelaksanaan Car Ownership Program (Cop) Kajian Asuransi Penghargaan Purna Tugas Dan Dwiguna Hari Tua Pengurus Dan Pegawai Asuransi Director And Officer Liability Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Oleh Yayasan Pegawai Bank Jatim	Pgs Direktur Utama, Direktur Manajemen Risiko, Direktur Kepatuhan & Hc

EMPLOYMENT COMMITTEE MEETING FREQUENCY

Name	Position	Total Meetings	Attendance	%
President Director	Head of Committee	14	14	100
Compliance & Risk Management Director	Member of Committee	14	10	71

EMPLOYMENT COMMITTEE MEETING AGENDA

Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
29 Januari 2019	Rotation of branch leaders at the level of use as a refresher and provide new experience so that it enriches the ability of officials to carry out their duties as bankers Fulfillment of official positions especially the vacancy of officials and filling officials at the head office	President Director, Retail, Consumer & Sharia Business Director, Operations Director, Medium Corporation Director, Finance Director, Risk Management Director, Compliance & HC Director
25 Maret 2019	Slik Checking During New Employee Recruitment, Appointment of Permanent Employees And Employee Transfer Adding Approval Procedures For spouse of Employees Accompanying While on a Business Trip. Submission of Mdp Correction in the Minutes of the Personnel Management Committee Meeting	President Director, Operations Director, Finance Director, Risk Management Director, Compliance & HC Director
16 Mei 2019	Formulation of calculation of production services and performance-based bonus / reward for improving the BPP reward & punishment system	Finance Director, Risk Management Director, Compliance & HC Director
14 Juni 2019	Changes to BPP reward & punishment provisions Changes to the guidelines for employee recruitment & selection Golden shake hand Implementation of Car Ownership Program (COP) Completion of the Directors' Decree on overtime work guidelines and employee overtime payments Implementation of Car Ownership Program (COP) Full-service and post-retirement insurance review of management and employees Insurance director and officer liability Improvement of outpatient health services by employees of Bank Jatim Foundation	Act. President Director, Risk Management Director, Compliance & HC Director

Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
10 Juli 2019	Rotasi Pejabat Pemimpin Cabang Setingkat Guna Sebagai Penyegaran Serta Memberikan Pengalaman Baru Sehingga Memperkaya Kemampuan Para Pejabat Dalam Mengemban Tugas Sebagai Bankir Dalam Rangka Pengisian Pejabat Khusus Kekosongan Pejabat Serta Pengisian Pejabat Di Kantor Pusat Dan Kantor Cabang	Pgs Direktur Utama, Direktur Risiko Bisnis, Pgs Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
7 Agustus 2019	Rotasi Pejabat Pemimpin Cabang Setingkat Guna Sebagai Penyegaran Serta Memberikan Pengalaman Baru Sehingga Memperkaya Kemampuan Para Pejabat Dalam Mengemban Tugas Sebagai Bankir Dalam Rangka Pengisian Pejabat Khusus Kekosongan Pejabat Serta Pengisian Pejabat Di Kantor Pusat Dan Kantor Cabang	Pgs Direktur Utama, Direktur Risiko Bisnis, Pgs Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
16 Agustus 2019	Rotasi Pejabat Pemimpin Cabang Setingkat Guna Sebagai Penyegaran Serta Memberikan Pengalaman Baru Sehingga Memperkaya Kemampuan Para Pejabat Dalam Mengemban Tugas Sebagai Bankir Dalam Rangka Pengisian Pejabat Khusus Kekosongan Pejabat Serta Pengisian Pejabat Di Kantor Pusat Dan Kantor Cabang	Pgs Direktur Utama, Direktur Risiko Bisnis, Pgs Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
22 Agustus 2019	Penyempurnaan Bpp <i>Reward & Punishment System</i> Terkait Bantuan Pengobatan Rawat Jalan Penyempurnaan Ketentuan Perjalanan Dinas Pegawai	Pgs Direktur Utama, Direktur Risiko Bisnis, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
12 September 2019	Rotasi Pejabat Pemimpin Cabang Setingkat Guna Sebagai Penyegaran Serta Memberikan Pengalaman Baru Sehingga Memperkaya Kemampuan Para Pejabat Dalam Mengemban Tugas Sebagai Bankir	Pgs Direktur Utama, Direktur Risiko Bisnis, Pgs Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
23 Oktober 2019	Rotasi Pejabat Pemimpin Cabang Setingkat Guna Sebagai Penyegaran Serta Memberikan Pengalaman Baru Sehingga Memperkaya Kemampuan Para Pejabat Dalam Mengemban Tugas Sebagai Bankir	Pgs Direktur Utama, Direktur Risiko Bisnis
11 November 2019	Rotasi Pejabat Pemimpin Cabang Setingkat Guna Sebagai Penyegaran Serta Memberikan Pengalaman Baru Sehingga Memperkaya Kemampuan Para Pejabat Dalam Mengemban Tugas Sebagai Bankir Dalam Rangka Pengisian Pejabat Khusus Kekosongan Pejabat Serta Pengisian Pejabat Di Kantor Pusat Dan Kantor Cabang	Pgs Direktur Utama, Direktur Risiko Bisnis, Direktur Teknologi Informasi & Operasi, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, Direktur Komersial & Korporasi
20 december 2019	Dalam Rangka Pengisian Pejabat Khusus Kekosongan Pejabat Setingkat Pemimpin Cabang Yaitu Cabang Jakarta Dan Cabang Jember	Pgs Direktur Utama, Direktur Risiko Bisnis, Direktur Teknologi Informasi & Operasi, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, Direktur Komersial & Korporasi

Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
10 Juli 2019	<i>Rotation of branch leaders at the level of use as a refresher and provide new experience so that it enriches the ability of officials to carry out their duties as bankers</i> <i>Fulfillment of official positions especially the vacancy of officials and filling officials at the head office</i>	Act. President Director, Business Risk Director, Act. Compliance & Risk Management Director
7 Agustus 2019	<i>Rotation of branch leaders at the level of use as a refresher and provide new experience so that it enriches the ability of officials to carry out their duties as bankers</i> <i>Fulfillment of official positions especially the vacancy of officials and filling officials at the head office</i>	Act. President Director, Business Risk Director, Act. Compliance & Risk Management Director
16 Agustus 2019	<i>Rotation of branch leaders at the level of use as a refresher and provide new experience so that it enriches the ability of officials to carry out their duties as bankers</i> <i>Fulfillment of official positions especially the vacancy of officials and filling officials at the head office</i>	Act. President Director, Business Risk Director, Act. Compliance & Risk Management Director
22 Agustus 2019	<i>Improvement of BPP reward & punishment system related to outpatient treatment assistance</i> <i>Completion of employee official travel provisions</i>	Act. President Director, Business Risk Director, Act. Compliance & Risk Management Director
12 September 2019	<i>Rotation of branch leaders at the level of use as a refresher and provide new experience so that it enriches the ability of officials to carry out their duties as bankers</i>	Act. President Director, Business Risk Director, Act. Compliance & Risk Management Director
23 Oktober 2019	<i>Rotation of branch leaders at the level of use as a refresher and provide new experience so that it enriches the ability of officials to carry out their duties as bankers</i>	Act. President Director, Business Risk Director
11 November 2019	<i>Rotation of branch leaders at the level of use as a refresher and provide new experience so that it enriches the ability of officials to carry out their duties as bankers</i> <i>In the context of fulfilling officials special vacancies officials and filling officers in head office and branch offices</i>	Act. President Director, Business Risk Director, Information Technology & Operations Director, Compliance & Risk Management Director, Commerce & Corporation Director
20 december 2019	<i>In the context of filling officials special vacancies at the level of branch leader namely Jakarta Branch and Jember Branch</i>	Act. President Director, Business Risk Director, Information Technology & Operations Director, Compliance & Risk Management Director, Commerce & Corporation Director

Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
26 Desember 2019	Pemberian Sanksi Bagi Pegawai Yang Bermasalah	Pgs Direktur Utama, Direktur Teknologi Informasi & Operasi, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko,
27 Desember 2019	Pemberian Sanksi Bagi Pegawai Yang Bermasalah	Pgs Direktur Utama, Direktur Teknologi Informasi & Operasi, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, Direktur Komersial & Korporasi

Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
26 Desember 2019	Imposing sanctions for problem employees	Act. President Director, Business Risk Director, Information Technology & Operations Director, Compliance & Risk Management Director
27 Desember 2019	Imposing sanctions for problem employees	Act. President Director, Business Risk Director, Information Technology & Operations Director, Compliance & Risk Management Director, Commerce & Corporation Director

KOMITE IT STEERING

Information Technology Steering Committee adalah bagian dari tata kelola TI dalam rangka meminimalisasi terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabah.

Komite IT Steering dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam bentuk pengawasan aktif terhadap manajemen TI. Sebagaimana telah diatur dalam POJK MRTI, ITSC berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi.

IT STEERING COMMITTEE

The Information Technology (IT) Steering Committee (ITSC) is part of IT governance functions to minimize the occurrence of risks associated with IT utilization and to protect the interests of the Bank and customers.

The IT Steering Committee is established as an embodiment of the commitment of the Board of Directors and Bank Jatim management in the form of active supervision of Information Technology management as stipulated in the POJK MRTI. ITSC holds a role in assisting the duties implementation of the Directors in stipulate Information Technology Strategic Plans and Bank policies related to the IT utilization.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti	Direktur Operasional
Sekretaris	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
Anggota Tetap	Direktur Keuangan Direktur Kepatuhan & Human Capital Direktur Manajemen Risiko Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah Direktur Menengah Korporasi Pemimpin Corporate Secretary Seluruh Pemimpin Divisi selain pemimpin anggota tidak tetap
Anggota Tidak Tetap	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola Pemimpin Divisi Hukum Pemimpin Divisi Audit Intern

STRUCTURE AND MEMBERSHIP

Head of Committee	President Director
Interim Head of Committee	Operations Director
Secretary	Head of Information Technology Division
Permanent Members	Finance Director Compliance & Human Capital Director Risk Management Director Retail Consumer & Sharia Business Director Medium Corporate Director Corporate Secretary Head All Division Heads other than heads of non-permanent members
Non-Permanent Members	Head of Corporate Risk Management Division Head of Compliance and Governance Division Head of Legal Division Head of Internal Audit division

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas, wewenang dan tanggung jawab ITSC adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;

DUTIES, AUTHORITY, AND RESPONSIBILITIES

The duties, authority, and responsibilities of ITSC are to provide recommendations to the Board of Directors on the following matters:

1. Information Technology Strategic Plan that is in line with the strategic plan of the Bank's business activities;

2. Perumusan kebijakan, standar dan prosedur Teknologi Informasi dalam kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank;
3. Menyesuaikan pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem Informasi pada Rencana Strategis Teknologi Informasi sesuai kebutuhan kegiatan usaha Bank;
4. Meminimalisasi risiko pada investasi Bank dengan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank;
5. Pemantauan kinerja seperti pendeteksian keusangan infrastruktur, pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi;
6. Upaya menyelesaikan masalah Teknologi Informasi secara efektif, efisien dan tepat waktu;
7. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

2. Formulation of Information Technology policies, standards and procedures in Information Technology security policies and risk management related to the use of Information Technology at the Bank;
3. Align the implementation of the Information Technology project with the information system requirements in the Information Technology Strategic Plan according to the needs of the Bank's business activities;
4. Minimize risks to the Bank's investment by contributing to the achievement of the Bank's business objectives;
5. Performance monitoring such as detecting obsolescence of infrastructure, measuring the effectiveness and efficiency of implementing Information Technology security policies;
6. Efforts to solve information technology problems effectively, efficiently and on time;
7. Adequacy and allocation of resources owned by the Bank.

FREKUENSI RAPAT KOMITE IT STEERING

JUMLAH RAPAT 2 KALI DALAM PERIODE 2019

Jabatan	Status	Jumlah Rapat	Kehadiran	%
Direktur Utama	Ketua	2	1	50%
Direktur Teknologi Informasi & Operasi	Ketua Pengganti	2	2	100%
Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah	Anggota Tetap	2	1	50%
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	2	1	50%
Direktur Risiko Bisnis	Anggota Tetap	2	1	50%
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Anggota Tetap	2	-	-
Direktur Komersial & Korporasi	Anggota Tetap	2	-	-

AGENDA RAPAT KOMITE IT STEERING

Tanggal	Agenda
19 Februari 2019	IT Steering Committee #1 2019
13 Desember 2019	IT Steering Committee #2 2019

IT STEERING COMMITTEE MEETING FREQUENCY

THE COMMITTEE HELD 2 MEETINGS IN 2019

Position	Status	Total Meetings	Attendance	%
President Director	Head of Committee	2	1	50%
Information Technology and Operations Director	Interim Head of Committee	2	2	100%
Retail Consumer and Sharia Business Director	Permanent Member of Committee	2	1	50%
Finance Director	Permanent Member of Committee	2	1	50%
Business Risk Director	Permanent Member of Committee	2	1	50%
Compliance and Risk Management Director	Permanent Member of Committee	2	-	-
Commerce and Corporation Director	Permanent Member of Committee	2	-	-

IT STEERING COMMITTEE MEETING AGENDA

Date	Agenda
Februari 19, 2019	IT Steering Committee #1 2019
Desember 13, 2019	IT Steering Committee #2 2019

KOMITE KREDIT

Komite Kredit adalah Komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian kredit.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

JABATAN	STATUS
Direktur Utama	Ketua
Direktur Keuangan	Anggota
Direktur Komersial dan Korporasi	Anggota
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	Anggota
Direktur Risiko Bisnis	Anggota
Direktur TI dan Operasi	Anggota
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Anggota

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

KOMITE KREDIT KONVENSIONAL

Tujuan dibentuknya Komite Kredit adalah untuk meminimalisasi munculnya risiko kredit bermasalah pada Bank, mengoptimalkan pendapatan Bank dari kredit yang disalurkan, serta mengendalikan risiko penempatan dana dalam aktiva produktif.

FREKUENSI RAPAT KOMITE KREDIT

JABATAN	STATUS	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN
Direktur Utama	Ketua	41	13
Direktur Keuangan	Anggota	41	-
Direktur Komersial dan Korporasi	Anggota	41	39
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	Anggota	41	8
Direktur Risiko Bisnis	Anggota	41	18
Direktur TI dan Operasi	Anggota	41	-
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Anggota	41	-

CREDIT COMMITTEE

The Credit Committee is an operational committee established by the Board of Directors to evaluate and/or give credit decisions for the amount and type of credit stipulated by the Board of Directors take into account to business development without disregard the precautionary principle including restructuring and settlement of credit.

STRUCTURE AND MEMBERSHIP

POSITION	STATUS
President Director	Head of Committee
Finance Director	Member of Committee
Commerce and Corporation Director	Member of Committee
Consumer, Retail, and Sharia Business Director	Member of Committee
Business Risk Director	Member of Committee
IT and Operations Director	Member of Committee
Compliance & Risk Management Director	Member of Committee

DUTIES, AUTHORITY, AND RESPONSIBILITIES

CONVENTIONAL CREDIT COMMITTEE

The purpose of the establishment of the Credit Committee is to minimize the emergence of non-performing credit risk at the Bank, optimize the Bank's revenue from loans extended, and control the risk of placement of funds in earning assets.

CREDIT COMMITTEE MEETING FREQUENCY

POSITION	STATUS	TOTAL MEETINGS	TOTAL ATTENDANCE
President Director	Head of Committee	41	13
Finance Director	Member of Committee	41	-
Commerce and Corporation Director	Member of Committee	41	39
Consumer, Retail, and Sharia Business Director	Member of Committee	41	8
Business Risk Director	Member of Committee	41	18
IT and Operations Director	Member of Committee	41	-
Compliance and Risk Management Director	Member of Committee	41	-

RAPAT KOMITE KREDIT

TANGGAL	AGENDA
10 Januari 2019	Komite Direksi Perpanjangan KMK <i>Standby Loan</i>
14 Januari 2019	Komite Direksi KMK <i>Standby Loan</i>
15 Januari 2019	Komite Kredit Presentasi Permohonan Kredit BLUD
26 Februari 2019	Komite Kredit Pemaparan <i>Business Plan</i>
18 Maret 2019	Komite Direksi Penawaran Partisipasi Kredit Sindikasi
11 Maret 2019	Komite Direksi Kredit Investasi
18 Maret 2019	Komite Direksi Pembiayaan Fasilitas Kredit Sindikasi
27 Maret 2019	Komite Direksi Perpanjangan Kredit Modal Kerja Rekening Koran
4 April 2019	Komite Direksi Perpanjangan Jangka Waktu & Penambahan Plafond Kredit <i>Standby Loan</i>
5 April 2019	Komite Direksi Perpanjangan Jangka Waktu & Penambahan Plafond Kredit <i>Standby Loan</i>
18 April 2019	Komite Direksi Pembiayaan Fasilitas KMK <i>Standby Loan</i>
23 April 2019	Komite Direksi Presentasi KI
25 April 2019	Komite Direksi Permohonan Fasilitas Kredit <i>Standby Loan</i>
16 Mei 2019	Komite Direksi Pengajuan Kredit
24 Mei 2019	Komite Direksi Presentasi Perubahan Surat Persetujuan Kredit Investasi
17 Juni 2019	Komite Direksi Permohonan KMK <i>Standby Loan</i>
03 Juli 2019	Komite Direksi Permohonan KMK Pola Keppres
03 Juli 2019	Komite Direksi Permohonan Penambahan Plafond dan Agunan Fasilitas Kredit Modal Kerja <i>Standby Loan</i>
08 Juli 2019	Komite Direksi Perpanjangan Jangka Waktu KMK
16 Juli 2019	Komite Direksi Permohonan Kredit
30 Juli 2019	Komite Direksi Perpanjangan Jangka Waktu KMK
01 Agustus 2019	Komite Direksi Pembahasan Permohonan Kredit
06 Agustus 2019	Komite Direksi Permohonan Balik Nama Sertifikat SHM No. 1093 sebagai Agunan Kredit
05 Agustus 2019	Komite Direksi Permohonan Kredit
05 Agustus 2019	Komite Direksi Permohonan KMK Pola Keppres
09 Agustus 2019	Komite Direksi Penawaran Partisipasi Kredit Sindikasi
16 Agustus 2019	Komite Direksi Permohonan KMK Keppres
21 Agustus 2019	Komite Direksi Permohonan KMK Keppres
21 Agustus 2019	Komite Direksi Permohonan Kredit Modal Kerja Pola <i>Standby Loan</i> & <i>Standby Bank Garansi</i>
21 Agustus 2019	Komite Direksi Permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres
27 Agustus 2019	Komite Direksi Permohonan Penambahan Plafond dan Agunan Tambahan Fasilitas KMK Rekening Koran
13 September 2019	Komite Direksi Permohonan Fasilitas KMK <i>Standby Loan</i>
20 September 2019	Komite Direksi Permohonan KMK Pola Keppres
22 Agustus 2019	Komite Direksi Penawaran <i>Secondary Sell Down</i> Debitur Sindikasi
25 Oktober 2019	Komite Direksi Penawaran Perpanjangan KMK Rekening Koran
27 November 2019	Komite Direksi Permohonan Persetujuan Kredit Sindikasi
18 Desember 2019	Komite Direksi Kredit Modal Kerja Rekening Koran
26 Desember 2019	Komite Direksi Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu KMK Rekening Koran
26 Desember 2019	Komite Direksi Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja <i>Standby Loan</i>
26 Desember 2019	Komite Direksi Kredit Sindikasi PT Kresna Kusuma Dyandra Marga untuk Pembangunan Jalan Tol BECAKAYU

CREDIT COMMITTEE MEETING

DATE	AGENDA
January 10, 2019	Board of Directors Committee Extension of KMK Standby Loan
January 14, 2019	Board of Directors Committee KMK Standby Loan
January 15, 2019	Credit Committee Presentation for BLUD Credit Proposal
February 26, 2019	Credit Committee Presentation of Business Plan
March 18, 2019	Board of Directors Committee Offering of Syndication Credit Participation
March 11, 2019	Board of Directors Committee Investment Credit
March 18, 2019	Board of Directors Committee Payment of Syndication Credit Facility
April 4, 2019	Board of Directors Committee Extension of Credit Period & Addition of Standby Loan Credit Limit
April 5, 2019	Board of Directors Committee Extension of Credit Period & Addition of Standby Loan Credit Limit
April 18, 2019	Board of Directors Committee Payment of KMK Standby Loan
April 23, 2019	Board of Directors Committee Presentation KI
April 25, 2019	Board of Directors Committee Proposal for Standby Loan Credit Facility
May 16, 2019	Board of Directors Committee Credit Proposal
May 24, 2019	Board of Directors Committee Presentation of Changes in Proposal for Investment Credit Approval
June 17, 2019	Board of Directors Committee Proposal for KMK Standby Loan
July 3, 2019	Board of Directors Committee Proposal for KMK Pola Keppres
July 3, 2019	Board of Directors Committee Proposal for Credit Limit Addition and Collateral for Standby Loan Working Capital Credit Facility
July 8, 2019	Board of Directors Committee Extension for KMK Period
July 16, 2019	Board of Directors Committee Credit Proposal
July 30, 2019	Board of Directors Committee Extension for KMK Period
August 1, 2019	Board of Directors Committee Discussion on Credit Proposal
August 6, 2019	Board of Directors Committee Request for Name Change on SHM Certificate No. 1093 as Credit Collateral
August 5, 2019	Board of Directors Committee Credit Proposal
August 5, 2019	Board of Directors Committee Proposal for KMK Pola Keppres
August 9, 2019	Board of Directors Committee Offering of Syndication Credit Participation
August 16, 2019	Board of Directors Committee Proposal for KMK Keppres
August 21, 2019	Board of Directors Committee Proposal for KMK Keppres
August 21, 2019	Board of Directors Committee Proposal for Standby Loan & Standby Bank Guarantee Working Capital Credit
August 21, 2019	Board of Directors Committee Proposal for Pola Keppres Working Capital Credit
August 27, 2019	Board of Directors Committee Proposal for Credit Limit Addition and Collateral Addition for Current Account KMK Facility
September 13, 2019	Board of Directors Committee Proposal for KMK Standby Loan Facility
September 20, 2019	Board of Directors Committee Proposal for KMK Pola Keppres
August 22, 2019	Board of Directors Committee Offering of Secondary Sell Down for Syndication Debtors
October 25, 2019	Board of Directors Committee Offering for Extension of KMK Current Account
November 27, 2019	Board of Directors Committee Proposal for Syndication Credit Approval
December 18, 2019	Board of Directors Committee Current Account Working Capital Credit
December 26, 2019	Board of Directors Committee Proposal for Extension of Period of KMK Current Account
26 Desember 2019	Komite Direksi Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu KMK Rekening Koran
26 Desember 2019	Komite Direksi Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan
26 Desember 2019	Komite Direksi Kredit Sindikasi PT Kresna Kusuma Dyandra Marga untuk Pembangunan Jalan Tol BECAKAYU

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan yang selanjutnya disingkat KKP adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Komite ini dibentuk bertujuan mendukung pemberian kredit yang sehat dan memantau dari proses awal pengajuan hingga pelaksanaan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam Kebijakan Perkreditan dibedakan menjadi 2 yakni:

- Komite Kebijakan Perkreditan
- Komite Kebijakan Pembiayaan

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) memiliki fungsi dalam kegiatannya sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB;
- Melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan KPB;
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;
- Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan kredit;
- Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
- Memastikan arah kebijakan perkreditan sejalan *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank (RBB);
- Memberikan rekomendasi atas penawaran kerja sama penyaluran Kredit Program;
- Melakukan evaluasi dan memastikan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- Melakukan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan untuk mewujudkan asas perkreditan yang sehat;
- Memastikan pelaksanaan pemberian persetujuan kredit telah sesuai dengan limit kewenangannya.

CREDIT POLICY COMMITTEE

Credit Policy Committee, hereinafter abbreviated as KKP, is a committee formed by the Board of Directors in the framework of credit policy management that aims to support the provision of sound credit and contains elements of internal control from the initial stage of the credit activity process to the credit monitoring stage by observing the principle of prudence.

This committee was formed with the aim of supporting sound lending and monitoring from the initial submission process to implementation using the precautionary principle. In the Credit Policy can be divided into 2 namely:

- Credit Policy Committee
- Financing Policy Committee

CREDIT POLICY COMMITTEE

The Credit Policy Committee (KKP) has the following functions in its activities:

- Provide input to the Directors in the preparation of the Bank Credit Policy (KPB), especially those relating to the formulation of the principle of prudence in credit;
- Oversee that CDE can be applied and implemented consistently and formulate solutions if there are obstacles or obstacles in the application of CDE;
- Conduct periodic reviews of CDE and provide advice to the Directors if necessary changes or improvements to CDE;
- Monitor and evaluate the development and quality of the overall credit portfolio;
- Monitor and evaluate the correctness of the implementation of the authority to decide on credit;
- Monitor and evaluate the correctness of the process of granting, developing and quality of credit granted to parties related to certain Banks and large debtors;
- Ensure the direction of credit policy in line with the Corporate Plan and Bank Business Plan (RBB);
- Provide recommendations on cooperation offers for Program Credit distribution;
- Evaluate and ensure that loans are given in accordance with the Legal Lending Limit (LLL);
- Evaluate the application of corporate governance to achieve sound credit principles;
- Ensure that the implementation of credit approval is in accordance with the authority limits.

KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Komite Kebijakan Pembiayaan (KKB) memiliki fungsi dalam kegiatannya sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan;
- Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB;
- Melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan KPB;
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan;
- Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan;
- Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
- Memastikan arah kebijakan pembiayaan sejalan *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank (RBB);
- Memberikan rekomendasi atas penawaran kerjasama penyaluran Pembiayaan Program;
- Melakukan evaluasi dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPK);
- Melakukan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan untuk mewujudkan asas pembiayaan yang sehat;
- Memastikan pelaksanaan pemberian persetujuan pembiayaan telah sesuai dengan limit kewenangannya.

FINANCING POLICY COMMITTEE

The Financing Policy Committee (KKB) has the following functions in its activities:

- Provide input to the Board of Directors in the preparation of the Bank Financing Policy (KPB), especially those relating to the formulation of the principle of caution in financing;
- Oversee that CDE can be applied and implemented consistently and formulate solutions if there are obstacles or obstacles in the application of CDE;
- Conduct periodic reviews of CDE and provide advice to the Directors if necessary changes or improvements to CDE;
- Monitor and evaluate the development and quality of the overall financing portfolio;
- Monitor and evaluate the correctness of the implementation of the authority to decide on financing;
- Monitor and evaluate the correctness of the granting process, developments and quality of financing provided to parties related to the Bank and certain large debtors;
- Ensure the direction of financing policies in line with the Corporate Plan and Bank Business Plan (RBB);
- Provide recommendations on offers for cooperation in channeling Program Financing;
- Evaluate and ensure that the financing provided is in accordance with the Legal Lending Limit (LLL);
- Evaluate the implementation of corporate governance to create a sound financing principle;
- Ensure the implementation of the provision of financing approvals in accordance with the limits of authority.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	Pemimpin Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan
Anggota Tetap	Direksi: Direktur Menengah Korporasi; Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah; Direktur Operasional; Direktur Keuangan. Divisi: Pemimpin Divisi Risiko Kredit; Pemimpin Divisi Kredit Konsumer; Pemimpin Divisi Kredit Mikro, Ritel, & Program; Pemimpin Divisi Kredit Menengah, Korporasi, & Sindikasi; Pemimpin Divisi <i>Tresuri</i>; Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>; Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja; Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit; Pemimpin Divisi <i>International Banking</i>; Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan & Bisnis; Pemimpin Divisi Bisnis Syariah.
Anggota Tidak Tetap	Direktur Kepatuhan & Human Capital; Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola; Pemimpin Divisi Audit Intern; Pemimpin Divisi Hukum; Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i>; Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan; Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah.

STRUCTURE AND MEMBERSHIP

<i>Head of Committee</i>	<i>President Director</i>
<i>Interim Head of Committee</i>	<i>Risk Management Director</i>
<i>Secretary</i>	<i>Head of Product Development & Policy Division</i>
<i>Permanent Members</i>	<i>Board of Directors:</i> <i>Medium Corporate Director</i> <i>Retail Consumer & Sharia Business Director</i> <i>Operations Director</i> <i>Finance Director</i> <i>Divisions:</i> <i>Head of Credit Risk Division</i> <i>Head of Consumer Credit Division</i> <i>Head of Micro, Retail, & Program Division</i> <i>Head of Medium, Corporate, & Syndication Credit Division</i> <i>Head of Treasury Division</i> <i>Head of Service Quality Assurance Division</i> <i>Head of Strategic Planning & Performance Management Division</i> <i>Head of Credit Restructuring & Settlement Division</i> <i>Head of International Banking Division</i> <i>Head of Institutional Relations & Business Division</i> <i>Head of Sharia Business Division</i>
<i>Non-Permanent Members</i>	<i>Head of Compliance & Human Capital Division</i> <i>Head of Compliance & Governance Division</i> <i>Head of Internal Audit Division</i> <i>Head of Legal Division</i> <i>Head of Human Capital Division</i> <i>Head of Corporate Risk Management Division</i> <i>Head of Sharia Supporting Business Division</i>

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- Memastikan Kebijakan Perkreditan Bank selaras dengan *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank;
- Mengajukan rumusan Kebijakan Perkreditan Bank kepada Direksi untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris;
- Memantau, evaluasi dan melakukan kajian implementasi kebijakan perkreditan secara berkala serta merekomendasikan adjustment, pemecahan masalah dan solusi kendala serta mengajukan perubahan apabila diperlukan;
- Memantau dan evaluasi pada kredit yang diberikan sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), penerapan Tata Kelola Perusahaan untuk mewujudkan azas kredit sehat, serta pelaksanaan kredit sesuai dengan limit kewenangannya.

DUTIES, AUTHORITY, AND RESPONSIBILITIES

- Ensuring that the Bank's Credit Policy is in line with the Bank's Corporate Plan and Business Plan;
- Submitting the formulation of the Bank Credit Policy to the Directors for further approval to the Board of Commissioners;
- Monitoring, evaluating, and reviewing the implementation of credit policies periodically and recommend adjustments, problem solving and constraint solutions and propose changes if necessary;
- Monitoring and evaluating credit provided in accordance with the Legal Lending Limit (BMPK), the implementation of Corporate Governance to realize the principle of sound credit, and credit implementation in accordance with its authority limits.

**FREKUENSI RAPAT KOMITE
KEBIJAKAN PERKREDITAN**

JABATAN	STATUS	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Direktur Utama	Ketua	1	1
Direktur Keuangan	Anggota	1	1
Direktur Komersial dan Korporasi	Anggota	1	1
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	Anggota	1	1
Direktur Risiko Bisnis	Anggota	1	1
Direktur TI dan Operasi	Anggota	1	1
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Ketua Pengganti	1	1

REKAPITULASI RAPAT KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

TANGGAL	AGENDA
7 Januari 2019	Komite Kebijakan Perkreditan #01 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

CREDIT POLICY MEETING FREQUENCY

POSITION	STATUS	TOTAL MEETINGS	TOTAL ATTENDANCE
President Director	Head of Committee		
Finance Director	Member of Committee		
Commerce and Corporation Director	Member of Committee		
Consumer, Retail, and Sharia Business Director	Member of Committee		
Business Risk Director	Member of Committee		
IT and Operations Director	Member of Committee		
Compliance and Risk Management Director	Interim Head of Committee		

**RECAPITULATION OF CREDIT POLICY
COMMITTEE MEETINGS**

TANGGAL	AGENDA
Januari 7, 2019	Credit Policy Committee #1 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

**KOMITE PRODUK, JARINGAN
DAN PROSEDUR**

Komite Produk, Jaringan dan Prosedur (PJP) dibedakan menjadi 4 (empat) bidang, antara lain:

- Komite PJP Bidang Produk
- Komite PJP Bidang Jaringan
- Komite PJP Bidang Prosedur
- Komite PJP Bidang *Corporate Social Responsibility* (CSR)

KOMITE PJP BIDANG PRODUK

Komite yang dibentuk oleh Direksi untuk melakukan langkah-langkah pengembangan produk/aktivitas baik segmen ritel maupun korporasi dengan tujuan melakukan pengelolaan kebijakan, pemantauan produk untuk memastikan keberhasilan dalam mengembangkan dan mengevaluasi produk secara tepat sasaran sesuai dengan rencana bisnis Bank.

**PRODUCT, NETWORK, AND
PROCEDURE COMMITTEE**

The Product, Network, and Procedure (PJP) Committee is divided into 4 (four) fields, namely:

- PJP Committee for Products
- PJP Committee for Network
- PJP Committee for Procedure
- PJP Committee for *Corporate Social Responsibility* (CSR)

PJP COMMITTEE FOR PRODUCTS

This committee is established by the Board of Directors to develop products/activities in both the retail and corporate segments with the aim of managing policies, monitoring products to ensure success in developing and evaluating products on target according to the Bank's business plan.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	Pemimpin Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan
Anggota	Direktur Menengah Korporasi Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah Direktur Keuangan Direktur Operasional Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
Undangan	Pemimpin Divisi kelompok bisnis terkait materi pembahasan Pemimpin Divisi kelompok pendukung bisnis terkait materi pembahasan Pemimpin Cabang dan pihak eksternal, jika diperlukan

STRUCTURE AND MEMBERSHIP

<i>Head of Committee</i>	<i>Risk Management Director</i>
<i>Secretary</i>	<i>Head of Product Development & Policy Division</i>
<i>Members</i>	<i>Medium Corporate Director</i> <i>Retail Consumer & Sharia Business Director</i> <i>Finance Director</i> <i>Operations Director</i> <i>Head of Corporate Risk Management Division</i> <i>Head of Compliance & Governance Division</i> <i>Head of Information Technology Division</i>
<i>Invitees</i>	<i>Division Heads of the related business groups</i> <i>Division Heads of the related supporting business group</i> <i>Branch Managers and external parties, if required</i>

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- Membahas dan menetapkan serta mengevaluasi strategi bisnis melalui produk/aktivitas baik segmen ritel maupun korporasi;
- Membahas dan menetapkan pengembangan bisnis secara terintegrasi termasuk pengembangan produk, proses bisnis, tarif, infrastruktur sarana dan prasarana serta teknologi pendukung bisnis melalui pengujian komprehensif;
- Melakukan monitoring hasil kinerja strategi bisnis dan membuat keputusan atas keberlangsungan produk/aktivitas atas rekomendasi Inisiator/Pemilik produk;
- Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis;
- Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pengembangan produk/aktivitas secara profesional, optimal, akurat, aman dan berdaya saing;
- Memastikan bahwa pengembangan produk/aktivitas beserta kebijakannya telah sesuai dengan strategi bisnis yang ditetapkan.

DUTIES, AUTHORITY, AND RESPONSIBILITIES

- Discuss, establish and evaluate business strategies through products/activities both retail and corporate segments;
- Discuss and stipulate integrated business development including product development, business processes, tariffs, infrastructure, facilities and infrastructure as well as business supporting technology through comprehensive testing;
- Monitor the results of business strategy performance and make decisions on the sustainability of the product/activity on the recommendation of the product owner/initiator;
- Discuss and resolve strategic business problems;
- Carry out tasks, especially in relation to the development of products/activities in a professional, optimal, accurate, safe and competitive manner;
- Ensure that product/activity development and policies are in accordance with established business strategies.

FREKUENSI RAPAT KOMITE PJP BIDANG PRODUK

JABATAN	STATUS	Jumlah Rapat	JUMLAH KEHADIRAN
Direktur Keuangan	Anggota	3	2
Direktur Komersial dan Korporasi	Anggota	3	-
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	-	3	1
Direktur Risiko Bisnis	Ketua	3	3
Direktur TI dan Operasi	Anggota	3	3
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	-	3	1

PJP COMMITTEE FOR PRODUCT MEETING FREQUENCY

POSITION	STATUS	TOTAL MEETINGS	TOTAL ATTENDANCE
<i>Finance Director</i>	<i>Member of Committee</i>	3	2
<i>Commerce and Corporation Director</i>	<i>Member of Committee</i>	3	-
<i>Consumer, Retail, and Sharia Business Director</i>	-	3	1
<i>Business Risk Director</i>	<i>Head of Committee</i>	3	3
<i>IT and Operations Director</i>	<i>Member of Committee</i>	3	3
<i>Compliance and Risk Management Director</i>	-	3	1

AGENDA RAPAT KOMITE PJP BIDANG JARINGAN

TANGGAL	AGENDA
3 Januari 2019	Tabungan Siklus Pensiun
6 September 2019	Tabungan Siklus Pensiun iB Barokah, Laku Pandai Syariah, dan Layanan e-CIF
27 September 2019	Jatim Pay, Wakaf Uang iB Barokah, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah

KOMITE PJP BIDANG JARINGAN

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Ketua	Direktur Keuangan
Ketua Pengganti	Direktur TI dan Operasi
Anggota	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Direktur Komersial dan Korporasi Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- Menyusun kebijakan strategi pengembangan jaringan yang disesuaikan kebutuhan Bank dan memberikan arahan untuk melakukan optimalisasi dan efektivitas kinerja jaringan;
- Memberikan pendapat atau isu-isu terbaru tentang pengembangan jaringan;
- Mengevaluasi dan mengkaji serta mengusulkan perubahan status dan/atau penutupan jaringan;
- Mengevaluasi dan mengkaji perubahan kelas cabang dan cabang pembantu;
- Menetapkan dan memutuskan kebijakan strategi pengembangan jaringan yang disesuaikan kebutuhan Bank;
- Memutus jenis dan jumlah jaringan kantor yang masuk dalam Rencana Bisnis Bank;
- Memberikan rekomendasi pengisian dan penempatan human capital pada rencana pengembangan jaringan kantor Bank;
- Memberikan rekomendasi untuk penarikan/pemindahan human capital pada rencana penurunan status dan/atau penutupan jaringan kantor Bank;
- Memutuskan perubahan status/penutupan jaringan kantor setelah dilakukan evaluasi oleh unit kerja;
- Menetapkan jumlah investasi dan anggaran biaya pembukaan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan;
- Menentukan batas pembagian area dan struktur organisasi di jaringan;
- Memutuskan kelas cabang dan cabang pembantu.

PJP COMMITTEE FOR PRODUCT MEETING AGENDA

DATE	AGENDA
Januari 3, 2019	Siklus Pensiun Savings
September 6, 2019	Siklus Pensiun iB Barokah Savings, Laku Pandai Sharia, and e-CIF Service
September 27, 2019	Jatim Pay, Wakaf Uang iB Barokah, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah

PJP COMMITTEE FOR NETWORK

STRUCTURE AND MEMBERSHIP

Head of Committee	Finance Director
Interim Head of Committee	IT and Operations Director
Members	Compliance and Risk Management Director Commerce and Corporation Director Consumer, Retail and Sharia Business Director

DUTIES, AUTHORITY, AND RESPONSIBILITIES

- Formulate network development strategy policies that are tailored to the needs of the Bank and provide direction for optimizing and effectiveness of network performance;
- Provide opinions or the latest issues regarding network development;
- Evaluate and reviewing and proposing changes to the status and/or closure of the network;
- Evaluate and assess changes in branch classes and sub-branches;
- Determine and decide on network development strategy policies that are tailored to the needs of the Bank;
- Decide on the type and number of office networks included in the Bank's Business Plan;
- Provide recommendations for filling and placing human capital in plans for developing Bank office networks;
- Provide recommendations for withdrawal/transfer of human capital on the planned reduction in status and/or closure of the Bank office network;
- Decide on changes in status/closure of office networks after evaluation by work units;
- Determine the investment amount and budget for opening costs, changing status and/or closing the network;
- Determine the boundaries of the area division and organizational structure in the network;
- Decide branch classes and sub-branches.

FREKUENSI RAPAT KOMITE PJP BIDANG JARINGAN

JABATAN	STATUS	Jumlah Rapat	JUMLAH KEHADIRAN
Direktur Keuangan	Ketua	8	8
Direktur Komersial dan Korporasi	-	8	
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	-	8	
Direktur TI dan Operasi	Ketua Pengganti	8	6
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Anggota	8	8

PJP COMMITTEE FOR NETWORK MEETING FREQUENCY

POSITION	STATUS	TOTAL MEETINGS	TOTAL ATTENDANCE
Finance Director	Head of Committee	8	8
Commerce and Corporation Director	-	8	
Consumer, Retail, and Sharia Business Director	-	8	
IT and Operations Director	Interim Head of Committee	8	6
Compliance and Risk Management Director	Member of Committee	8	8

KOMITE PJP BIDANG PROSEDUR

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Ketua	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Anggota	Direktur Utama
	Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah
	Direktur Komersial dan Korporasi
	Direktur TI dan Operasi
	Direktur Keuangan

PJP COMMITTEE FOR PROCEDURE

STRUCTURE AND MEMBERSHIP

Head of Committee	Compliance and Risk Management Director
Members	President Director
	Consumer, Retail, and Sharia Business Director
	Commerce and Corporation Director
	IT and Operations Director
	Finance Director

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Memiliki program kerja tertulis dan melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terkait dengan manajemen risiko kepatuhan;
3. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

DUTIES, AUTHORITY, AND RESPONSIBILITIES

1. Prepare strategies in order to support the creation of a culture of compliance in all business activities of the Bank at every level of the organization;
2. Establish a written work program and carry out identification, measurement, monitoring and control related to compliance risk management;
3. Review and/or recommend the updating and improvement of policies, regulations, systems and procedures owned by the Bank by the Bank to comply with Bank Indonesia regulations and laws and regulations;
4. Make efforts to ensure that the policies, regulations, systems and procedures as well as the Bank's business activities are in accordance with Bank Indonesia regulations and applicable laws and regulations;
5. Perform other tasks related to the compliance function.

FREKUENSI RAPAT KOMITE PJP BIDANG PROSEDUR

JABATAN	STATUS	Jumlah Rapat	JUMLAH KEHADIRAN
Direktur Utama	Anggota	11	2
Direktur Keuangan	Anggota	11	1
Direktur Komersial dan Korporasi	Anggota	11	2
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	Anggota	11	3
Direktur Risiko Bisnis	Anggota	11	6
Direktur TI dan Operasi	Anggota	11	4
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Ketua	11	8

PJP COMMITTEE FOR PROCEDURE MEETING FREQUENCY

POSITION	STATUS	TOTAL MEETINGS	TOTAL ATTENDANCE
President Director	Member of Committee	11	2
Finance Director	Member of Committee	11	1
Commerce and Corporation Director	Member of Committee	11	2
Consumer, Retail, and Sharia Business Director	Member of Committee	11	3
Business Risk Director	Member of Committee	11	6
IT and Operations Director	Member of Committee	11	4
Compliance and Risk Management Director	Head of Committee	11	8

AGENDA RAPAT KOMITE PJP BIDANG PROSEDUR

TANGGAL	AGENDA	KEHADIRAN
28 Februari 2019	Perubahan BPP Pemasaran Kredit, Perubahan BPP Kredit Multiguna, Penggunaan <i>Credit Application System</i> (CAS) Online, Perubahan BPP Kredit kepada Koperasi Bankit, Perubahan BPP Kredit SiUmi, Perubahan BPP Flazz, Perubahan BPP Giro, Perubahan BPP SIDHN, Perubahan BPP Koordinator Pertukaran Warkat Debit, Perubahan BPP ATM	Hadi Santoso, Tony Sudjiyarto, Rizyana Mirda
18 Maret 2019	Perubahan BPP Komite Dewan Komisaris, BPP Penyelamatan Penyelesaian Kredit, BPP Kredit Menengah & Korporasi Bab XVIII Kredit Pembiayaan Piutang, BPP Kredit Menengah & Korporasi Bab XVI Kredit Sindikasi, Kredit Menengah & Korporasi Bab II Analisa Kredit, BPP Prime Customer, BPP Kerjasama dengan Pihak Ketiga, BPP Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan	Hadi Santoso, Su'udi, Rizyana Mirda
2 April 2019	Perubahan BPP Kredit Multiguna	Hadi Santoso, Rizyana Mirda, Tony Sudjiyarto
8 April 2019	Prosedur Kerja SOP <i>Transfer</i> Valuta Asing, Perubahan SOP Transaksi <i>Trade Finance</i> , BPP Divisi Pengembangan Produk dan Kebijakan, Perubahan BPP Kredit Mikro dan Kecil Bab 2 Analisa dan Pengusulan Kredit, Perubahan BPP Kredit Produktif Mikro dan Kecil, Perubahan BPP Teknologi Informasi, Perubahan BPP Pengadaan Barang dan Jasa, BPP <i>Vendor Management</i>	Hadi Santoso, Tony Sudjiyarto, Su'udi, Rudie Hardiono, Rizyana Mirda,
30 Juli 2019	BPP Kebijakan Treasuri, Prosedur Kerja <i>Financial Institution</i> , BPP Audit Intern, BPP Prosedur Audit Intern TI, Perubahan BPP (ATM, EDC, CMS (E-KD), Western Union), BPP Kartu Kredit Pemerintah, Perubahan BPP Kredit Produktif Mikro dan Kecil, BPP KPR Bersubsidi & BPP Properti, BPP KMG, BPP Manajemen Kinerja, BPP Jaringan Operasional.	Hadi Santoso
10 September 2019	BPP Teknologi Informasi, Perubahan BPP APU PPT, BPP Rating Pemantauan Kredit, Perubahan BPP Menengah Korporasi (Pembiayaan Sindikasi), Perubahan BPP SMS <i>Banking</i> Syariah, BPP Kredit Properti, BPP KPR Bersubsidi, BPP Kredit Multiguna, BPP Surat Keterangan Dukungan Keuangan, BPP <i>Virtual Account</i> , BPP SKNBI	Hadi Santoso, Rizyana Mirda
30 Oktober 2019	BPP Penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPP <i>Compliance Branch Officer</i> , BPP Litigasi & Non Litigasi, Perubahan BPP Mikro & Kecil (Kredit Pundi Kencana, Kredit Linkage Program BPR)	Erdianto Sigit Cahyono, Rizyana Mirda
27 November 2019	Perubahan BPP ATM, BPP Aplikasi Elektronik Kredit Multiguna (E-KMG), Perubahan BPP Laku Pandai	Ferdian Timur Satyagraha, Erdianto Sigit Cahyono, Tonny Prasetyo
16 Desember 2019	Perubahan BPP Kredit Sertifikasi Hak Atas Tanah, BPP <i>Mobile Banking</i>	Ferdian Timur Satyagraha, Erdianto Sigit Cahyono, Tonny Prasetyo
18 Desember 2019	Perubahan BPP (Kredit Properti, BPP KPR Bersubsidi, BPP KPR BP2BT, <i>Virtual Account</i> Unit Usaha Syariah), BPP Aplikasi Otonasi Data Nasabah Individu	Erdianto Sigit Cahyono, Rizyana Mirda
30 Desember 2019	Perubahan BPP Bank Garansi	Erdianto Sigit Cahyono, Rizyana Mirda, Tonny Prasetyo

PJP COMMITTEE FOR NETWORK MEETING AGENDA

DATE	AGENDA	ATTENDANCE
February 28, 2019	Change in Credit Marketing BPP, Change in multipurpose Credit BPP, Use of Online Credit Application System (CAS), Change in Credit BPP to Bankit Cooperatives, Change in Credit SiPi, Change in BPP Flazz, Change in BPP Giro, Change in BPP SIDHN, Change in BPP Coordinator for Debit Exchange Coordinator, Change in BPP ATM	Hadi Santoso, Tony Sudjiyarto, Rizyana Mirda
March 18, 2019	Changes to the Board of Commissioners' BPP, Credit Rescue Settlement BPP, Medium & Corporate Credit BPP Chapter XVIII Credit Financing, Medium and Corporate Credit BPP Chapter XVI Syndicated Loans, Intermediate & Corporate Loans Chapter II Credit Analysis, BPP Prime Customer, BPP Cooperation with Third Parties , BPP Product Development & Policy Division	Hadi Santoso, Su'udi, Rizyana Mirda
April 2, 2019	Change in Multipurpose Credit BPP	Hadi Santoso, Rizyana Mirda, Tony Sudjiyarto
April 8, 2019	Working Procedures for Foreign Exchange Transfer SOP, Changes in Trade Finance Transactions SOP, BPP Product Development and Policy Division, Changes in BPP Micro and Small Credit Chapter 2 Credit Analysis and Proposal, Changes in BPP Micro and Small Earning Loans, Changes in BPP Information Technology, Changes in BPP Procurement of Goods and Services, BPP Vendor Management	Hadi Santoso, Tony Sudjiyarto, Su'udi, Rudie Hardiono, Rizyana Mirda,
July 30, 2019	Treasury Policy BPP, Financial Institution Work Procedures, BPP Internal Audit, BPP IT Internal Audit Procedure, Changes to BPP (ATM, EDC, CMS (E-KD), Western Union), Government Credit Card BPP, Changes to Micro and Small Earning Credit BPP, Subsidized Mortgages & Property BPP, BPG KMG, BPP Performance Management, BPP Operational Networks.	Hadi Santoso
September 10, 2019	BPP Information Technology, Changes in BPP APU PPT, BPP Credit Monitoring Rating, Changes in BPP Intermediate Corporate (Syndicated Financing), Changes in BPP Sharia SMS Banking, BPP Property Credit, BPP Subsidized KPR, BPP Multipurpose Credit, BPP Certificate of Financial Support, BPP Virtual Account , BPP SKNBI	Hadi Santoso, Rizyana Mirda
October 30, 2019	BPP Implementation of Sustainable Finance, BPP Compliance Branch Officer, BPP Litigation & Non Litigation, Change in Micro & Small BPP (Credit Pundi Kencana, Credit Linkage BPR Program)	Erdianto Sigit Cahyono, Rizyana Mirda
November 27, 2019	Changes to BPP ATMs, BPP Multipurpose Credit Electronic Applications (E-KMG), Changes to BPP Clever Practice	Ferdian Timur Satyagraha, Erdianto Sigit Cahyono, Tonny Prasetyo
December 16, 2019	Changes to the BPP Credit Certification for Land Rights, BPP Mobile Banking	Ferdian Timur Satyagraha, Erdianto Sigit Cahyono, Tonny Prasetyo
December 18, 2019	Changes in BPP (Property Credit, Subsidized KPR BPP, BP2BT KPR BPP, Sharia Business Virtual Account Unit), BPP Individual Customer Data Autonomy Application	Erdianto Sigit Cahyono, Rizyana Mirda
December 30, 2019	Change in BPP Bank Guarantee	Erdianto Sigit Cahyono, Rizyana Mirda, Tonny Prasetyo

KOMITE PJP BIDANG CSR

Komite PJP Bidang CSR adalah komite yang diselenggarakan berdasarkan kebutuhan Bank yang memiliki fungsi sebagai wadah untuk mengelola, memutuskan, dan memantau pemberian dana CSR Bank untuk memastikan keberhasilannya dalam menyalurkan dengan tepat sasaran, tepat guna dan tepat jumlah.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti	Direktur TI dan Operasi
Sekretaris	Sekretaris Perusahaan
Anggota	Pemimpin Divisi Umum
	Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola
	Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- Mengidentifikasi ketepatan program;
- Melakukan penilaian dan pembahasan permohonan program CSR diatas kewenangan limit Sekretaris Perusahaan;
- Menyetujui atau menolak pengajuan CSR dari kantor cabang, masyarakat umum dan kantor pusat;
- Menetapkan pemberian dana CSR dari pengajuan cabang, pengajuan masyarakat umum, maupun atas inisiatif kantor pusat;
- Mengintegrasikan penyediaan dana CSR meliputi penetapan, pembagian plafon, nilai urgensi, serta *outcome* pelaksanaan CSR;
- Memastikan pelaksanaan CSR berjalan sesuai system dan prosedur.

PJP COMMITTEE FOR CSR

The PJP Committee for CSR is a committee that is organized based on the needs of the Bank which has a function as a forum to manage, decide, and monitor the Bank's CSR funding to ensure its success in disbursing to the right target, effectiveness, and in the appropriate amount.

STRUCTURE AND MEMBERSHIP

<i>Head of Committee</i>	<i>President Director</i>
<i>Interim Head of Committee</i>	<i>IT and Operations Director</i>
<i>Secretary</i>	<i>Corporate Secretary</i>
<i>Members</i>	<i>Head of General Affairs Division</i>
	<i>Head of Compliance and Governance Division</i>
	<i>Head of Service Quality Assurance Division</i>

DUTIES, AUTHORITY, AND RESPONSIBILITIES

- Identify the accuracy of the program;
- Conduct an evaluation and discussion of requests for CSR programs above the limit of the Corporate Secretary's authority;
- Approve or reject the submission of CSR from branch offices, general public and head office;
- Determine the provision of CSR funds from the submission of the branch, the submission of the general public, or at the initiative of the head office;
- Integrate the provision of CSR funds including the determination, ceiling distribution, urgency value, and the outcome of CSR implementation;
- Ensure the implementation of CSR runs according to systems and procedures.

RAPAT KOMITE PJP BIDANG CSR

TANGGAL PELAKSANAAN	PESERTA RAPAT	AGENDA
058/053/CSE/KEX/RR TANGGAL 8 MEI 2019	1. Ferdian Timur S. = Pgs. Direktur Utama, 2. Rizyana Mirda = Direktur Risiko Bisnis, 3. Hadi Santoso = Pgs Direktur Kepatuhan & Human Capital, 4. Glemboh Priambodo = Pimdiv <i>Corporate Secretary</i>	Permohonan bantuan Bank Jatim Peduli berupa pembangunan elemen lorong bamboo di daerah RTH Taman Blambangan Banyuwangi
058/071/CSE/KEX/RR TANGGAL 13 AGUSTUS 2019	1. Ferdian Timur S. = Pgs. Direktur Utama, 2. Rizyana Mirda = Direktur Risiko Bisnis, 3. Hadi Santoso = Pgs Direjtur Kepatuhan & Manajemen Risiko, 4. Tonny Prasetyo = Direktur TI dan Operasi, 5. Elfaurid Aguswantoro = Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah, 6. Glemboh Priambodo = Pimdiv <i>Corporate Secretary</i>	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli pengadaan mobil toilet keliling untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto
058/072/CSE/KEX/RR TANGGAL 13 AGUSTUS 2019	1. Ferdian Timur S. = Pgs. Direktur Utama, 2. Rizyana Mirda = Direktur Risiko Bisnis, 3. Hadi Santoso = Pgs Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, 4. Tonny Prasetyo = Direktur TI dan Operasi, 5. Elfaurid Aguswantoro = Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah, 6. Glemboh Priambodo = Pimdiv <i>Corporate Secretary</i>	Persetujuan pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa 1 unit <i>truck</i> sampah dan 1 unit skywalker untuk pemerintah Kota Surabaya
058/070/CSE/KEX/RR TANGGAL 13 AGUSTUS 2019	1. Ferdian Timur S. = Pgs. Direktur Utama, 2. Rizyana Mirda = Direktur Risiko Bisnis, 3. Hadi Santoso = Pgs Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, 4. Tonny Prasetyo = Direktur TI dan Operasi, 5. Elfaurid Aguswantoro = Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah, 6. Glemboh Priambodo = Pimdiv <i>Corporate Secretary</i>	Permohonan bantuan Bank Jatim Peduli <i>Fisheries Café Park</i> , mobil pelayanan pajak dan kendaraan "GERTAK" kabupaten Trenggalek
058/085/CSE/KEX/RR TANGGAL 27 SEPTEMBER 2019	1. Ferdian Timur S. = Pgs. Direktur Utama, 2. Rizyana Mirda = Direktur Risiko Bisnis, 3. Hadi Santoso = Pgs Direktur Kepatuhan & Human Capital, 4. Glemboh Priambodo = Pimdiv <i>Corporate Secretary</i>	Permohonan bantuan Bank Jatim Peduli berupa pembangunan "Command Center Sistem Rujukan" (CCSR) RSUD Dr. Soetomo
058/091/CSE/KEX/RR TANGGAL 22 OKTOBER 2019	1. Ferdian Timur S. = Pgs. Direktur Utama, 2. Rizyana Mirda = Direktur Risiko Bisnis, 3. Hadi Santoso = Pgs Direktur Kepatuhan & Human Capital, 4. Glemboh Priambodo = Pimpinan Divisi <i>Corporate Secretary</i>	Permohonan bantuan Bank Jatim Peduli berupa pembangunan monumen selamat datang dan pengadaan bibit tanaman hias untuk RTH Tanggul Kali Bantaran Kota Madiun

PJP COMMITTEE FOR CSR MEETING AGENDA

DATE OF IMPLEMENTATION	MEETING PARTICIPANT	AGENDA
058/053/CSE/KEX/RR on May 8, 2019	Ferdian Timur S. - Act. President Director, Rizyana Mirda - Business Risk Director, Hadi Santoso - Act. Compliance & Human Capital Director, Glembob Priambodo - Division Head of Corporate Secretary	Proposal for Bank Jatim Peduli donation in the form of the construction of a bamboo hallway in the RTH area of Taman Blambangan Banyuwangi
058/071/CSE/KEX/RR on August 13, 2019	Ferdian Timur S. - Act. President Director, Rizyana Mirda - Business Risk Director, Hadi Santoso - Act. Compliance & Human Capital Director, Tonny Prasetyo - IT & Operations Director, Elfauaid Aguswantoro - Consumer, Retail & Sharia Business Director, Glembob Priambodo - Division Head of Corporate Secretary	Donation of Bank Jatim Peduli for the provision of mobile toilet for the Mojokerto City Environmental Office
058/072/CSE/KEX/RR on August 13, 2019	Ferdian Timur S. - Act. President Director, Rizyana Mirda - Business Risk Director, Hadi Santoso - Act. Compliance & Human Capital Director, Tonny Prasetyo - IT & Operations Director, Elfauaid Aguswantoro - Consumer, Retail & Sharia Business Director, Glembob Priambodo - Division Head of Corporate Secretary	Approval for Bank Jatim Peduli donation in the form of 1 unit of garbage trucks and 1 unit of skywalker for the Municipality Government of Surabaya
058/070/CSE/KEX/RR on August 13, 2019	Ferdian Timur S. - Act. President Director, Rizyana Mirda - Business Risk Director, Hadi Santoso - Act. Compliance & Human Capital Director, Tonny Prasetyo - IT & Operations Director, Elfauaid Aguswantoro - Consumer, Retail & Sharia Business Director, Glembob Priambodo - Division Head of Corporate Secretary	Proposal for Bank Jatim Peduli donation for Fisheries Cafe Park, mobile tax service unit, and "GERTAK" vehicle in Trenggalek Regency
058/085/CSE/KEX/RR on September 27, 2019	Ferdian Timur S. - Act. President Director, Rizyana Mirda - Business Risk Director, Hadi Santoso - Act. Compliance & Human Capital Director, Glembob Priambodo - Division Head of Corporate Secretary	Proposal for Bank Jatim Peduli donation in the form of building a "Command Center Referral System" (CCSR) Dr. Soetomo
058/091/CSE/KEX/RR on October 22, 2019	Ferdian Timur S. - Act. President Director, Rizyana Mirda - Business Risk Director, Hadi Santoso - Act. Compliance & Human Capital Director, Glembob Priambodo - Division Head of Corporate Secretary	Proposal Bank Jatim Peduli donation in the form of the construction of a welcoming monument and the supply of ornamental plant seeds for RTH Kali Bantaran, Bantaran City, Madiun

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Bank menetapkan keputusan tentang pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi bagi konglomerasi Keuangan SK Direksi Nomor 053/306/KEP/DIR/MR tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) tanggal 31 Desember 2015.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Ketua merangkap anggota:

- Direktur Kepatuhan Bank Jatim selaku entitas utama

Wakil Ketua merangkap anggota:

- Direktur Kepatuhan PT BPR Jatim (Bank UMKM Jawa Timur) selaku perusahaan terelasi/LJK anggota

Anggota:

- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank Jatim (merangkap sekretaris)
- Pemimpin Divisi Pengendalian Risiko, Kepatuhan dan APU PPT PT BPR Jatim (Bank UMKM Jawa Timur)

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUUNG JAWAB

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam penyempurnaan strategi dan kerangka risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;
- Melakukan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala (setahun sekali) maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko serta tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

INTEGRATED RISK MANAGEMENT COMMITTEE

To implement a comprehensive and effective Integrated Risk Management, the Bank set a decision regarding the establishment of an Integrated Risk Management Committee for the Financial conglomerate Directors Decree Number 053/306/KEP/DIR/MR concerning Establishment of Integrated Risk Management Committee (KMRT) on December 31th, 2015.

STRUCTURE AND MEMBERSHIP

Head and Member of Committee :

- Compliance Director of Bank Jatim as the Main Entity

Deputy Head and Member of Committee :

- Compliance Director of PT BPR Jatim (MSME Bank of East Java) as a related company/member of Financial Service Institution

Members of Committee :

- Head of Risk Management Division of Bank Jatim (concurrently serves as the Secretary of Committee)
- Head of Risk Control, Compliance, and APU PPT of PT BPR Jatim (MSME Bank of East Java)

DUTIES, AUTHORITY, AND RESPONSIBILITIES

- Provide recommendations to the Directors of the Main Entity in the preparation and improvement of the Integrated Risk Management policy;
- Provide recommendations to the Directors of the Main Entity in refining the strategy and risk framework based on the results of the implementation evaluation;
- Improve the Integrated Risk Management policy on a regular basis (once a year) which is incidental as a result of changes in external and internal conditions that affect the adequacy of capital, risk profiles and ineffective implementation of Integrated Risk Management based on evaluation results.

FUNGSI KEPATUHAN

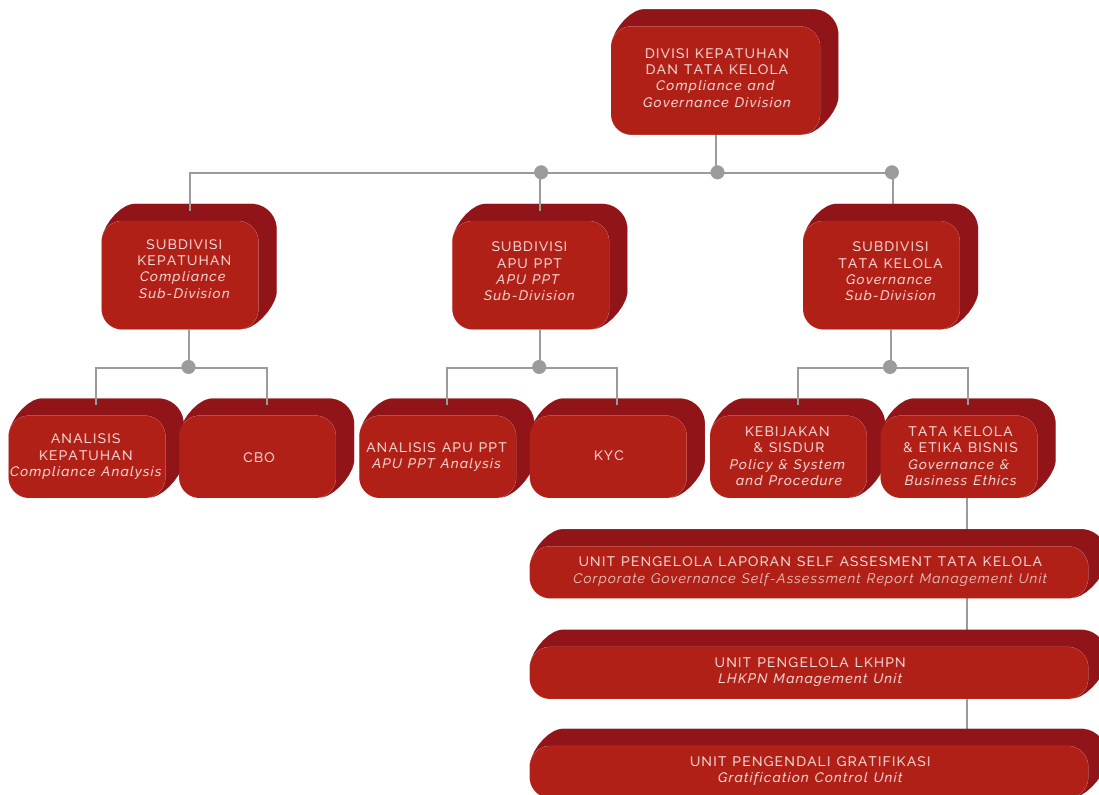
COMPLIANCE FUNCTION

19



STRUKTUR ORGANISASI KEPATUHAN

COMPLIANCE ORGANIZATION STRUCTURE



Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan oleh Direktur yang membawahkan Kepatuhan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersifat independen dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

The establishment of the Compliance Unit by the Director in charge of Compliance is regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks. The Compliance Unit must be independent and only report directly to the Compliance Director.

PROFIL KEPALA SATUAN KERJA KEPATUHAN

Nama	Moch. Nadjib, 57 tahun
Jabatan	Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola
Menjabat sejak	12 Agustus 2019
SK Jabatan	058/225/DIR/HCP/KEP
Pengalaman menjabat	Pemimpin Divisi Bisnis Syariah (2015-2019)
Background pendidikan	Magister Manajemen
Telah lulus sertifikasi	Level-4 Program Sertifikasi Manajemen Risiko

PROFILE OF THE HEAD OF COMPLIANCE WORK UNIT

Name	Moch. Nadjib, 57 years old
Position	Head of Compliance & Governance Division
Served since	August 12, 2019
APosition Decree	058/225/DIR/HCP/KEP
Experience in office	Head of Sharia Business Division (2015-2019)
Educational background	Masters in Management
Certification	Level-4 Risk Management Certification Program

PERSONEL SATUAN KERJA KEPATUHAN

NO	JABATAN	JUMLAH PERSONEL
1	Pemimpin Sub Divisi	3
2	Senior Analis	6
3	Analis	4
4	Junior Analis	9

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
SATUAN KERJA KEPATUHAN

- Mewujudkan terlaksananya budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank
 - Risiko kepatuhan yang dihadapi
 - Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan
 - Frekuensi pelanggaran yang dilakukan/track record kepatuhan Bank
 - Potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi ke depan
 - Tindak lanjut dan mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan
 - Komparasi laporan kepatuhan
 - Laporan khusus Direktur Kepatuhan;
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian
 - Pemantauan Perkembangan Tingkat Kesehatan Bank
 - Penyampaian peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia/peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia/Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
 - Memberikan pendapat dan rekomendasi atas usulan atau permohonan persetujuan dari divisi terkait yang ditujukan kepada Direksi;
- Memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang
 - Pemantauan Pelaksanaan Tugas SKAI;
 - Pemantauan pelaksanaan perjanjian dan komitmen dengan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan dengan pihak ekstern lainnya;
 - Pemantauan Kepatuhan pelaporan ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan pihak ekstern lain;
 - Kewajiban penerapan tata kelola bagi Bank umum.

KEGIATAN KEPATUHAN 2019

- Melakukan pemantauan terhadap tingkat Kepatuhan pada masing – masing Kantor Cabang melalui *Compliance Checklist* oleh *Compliance Branch Officer* (CBO) Cabang, selain itu juga melakukan koordinasi rutin dengan CBO kantor pusat terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi di Cabang;

COMPLIANCE WORK UNIT PERSONNEL

NO	POSITION	TOTAL PERSONNEL
1	Sub-Division Head	3
2	Senior Analyst	6
3	Analyst	4
4	Junior Analyst	9

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF
THE COMPLIANCE WORK UNIT

- Realizing the implementation of Compliance culture at all levels of the Bank's organization and business activities;
- Managing compliance risks faced by the Bank
 - Compliance risks faced
 - The type and significance of violations committed
 - Frequency of violations committed/track record of Bank compliance
 - Potential compliance risks that are expected to be faced in the future
 - Follow up and mitigation of compliance risks that have been implemented
 - Comparison of compliance reports
 - Special report on Compliance Director;
- Ensuring that the policies, provisions, systems, and procedures as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions and regulations in force in order to implement the precautionary principle
 - Monitoring the Development of Bank Soundness
 - Submission of laws and regulations, Bank Indonesia regulations/Financial Services Authority regulations, Bank Indonesia Circular Letter/Financial Services Authority Circular
 - Provide opinions and recommendations on proposals or requests for approval from the relevant divisions addressed to the Directors;
- Ensuring Bank Compliance with commitments made by the Bank to the Financial Services Authority/Bank Indonesia and/or other authorized supervisory authorities
 - Monitoring the Implementation of Duties of SKAI;
 - Monitoring the implementation of agreements and commitments with Bank Indonesia/the Financial Services Authority and with other external parties;
 - Monitoring compliance of reporting to Bank Indonesia/ Financial Services Authority and other external parties;
 - Obligatory to implement governance for commercial banks.

COMPLIANCE ACTIVITY 2019

- Monitor the level of Compliance at each Branch Office through the Compliance Checklist by the Compliance Branch Officer (CBO) of the Branch, while also coordinating regularly with the CBO of the head office regarding the constraints and problems encountered at the Branch;

- Monitoring atas profil Risiko Kepatuhan Kantor Cabang Bank Jatim;
- Menyelenggarakan bimbingan teknis gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Mengevaluasi capaian Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi kabupaten/kota terutama terkait kegiatan optimalisasi pendapatan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur;
- Sharing informasi kepada kantor cabang, Divisi dan Direksi atas peraturan-peraturan baru OJK dan BI melalui media group Whatsapp Jatim *Smart Compliance*;
- Melakukan pemantauan terhadap tingkat Kepatuhan pada masing-masing Kantor Cabang melalui *Compliance Checklist* oleh *Compliance Branch Officer* (CBO) Cabang.
- Melakukan roadshow ke kantor cabang untuk mendorong pemahaman dan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan budaya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam kegiatan operasional dan non operasional Bank;

- Monitoring over the profile of Bank Jatim Branch Office Compliance Risk;
- Organizing technical guidance on gratification with the Corruption Eradication Commission (KPK);
- Evaluating the achievements of the integrated district/city Corruption Eradication Program, especially related to the activities of optimizing regional income at the district/city government in East Java;
- Sharing information to branch offices, divisions and directors on new OJK and BI regulations through the Whatsapp Jatim Smart Compliance media group;
- Monitor the level of compliance at each branch office through the Compliance Checklist by the Branch Compliance Officer (CBO).
- Conduct roadshows to branch offices to encourage understanding and implementation of the compliance function and culture of compliance with applicable regulations in Bank operational and non-operational activities;

INDIKATOR KEPATUHAN

Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, kegiatan operasional Bank tahun 2019 tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Hal tersebut tercermin dari rasio keuangan yang terdiri dari 11 parameter (*benchmark*) yang ditetapkan OJK per Desember 2019 sebagaimana tercantum di bawah ini:

PEMANTAUAN RASIO KEUANGAN BANK JATIM

No	Rasio	Kriteria	Nilai Rasio (%)
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	>8%	21.77
2	Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif.	-	1.91
3	Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif.	<2.5%	2.09
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (ckpn) atas Aset Keuangan terhadap Aset Produktif.	-	1.50
5	NPL gross	< 5%	2.77%
6	NPL net	-	0.71%
7	Return On Asset (ROA)	>1.22%	2.73
8	Return On Equity (ROE)	> 12%	18.00
9	Net Interest Margin (NIM)	>5%	6.11
10	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (Bopo)	<94%	71.40

INDICATOR OF COMPLIANCE

In the framework of implementing the precautionary principle, the Bank's operational activities in 2019 do not deviate from applicable regulations. This is reflected in the financial ratio that consists of 11 parameters (benchmarks) set by the FSA as of December 2019 as listed below:

MONITORING OF BANK JATIM FINANCIAL RATIOS

no	Ratio	criteria	Ratio value (%)
1	Minimum Capital Requirement (KPMM)	>8%	21.77
2	Problematic Earning Assets and Problematic Non-Earning Assets for Total Earning Assets and Non-Earning Assets.	-	1.91
3	Problematic Earning Assets for Total Earning Assets.	<2.5%	2.09
4	Allowance for Impairment Losses (ckpn) of Financial Assets to Earning Assets.	-	1.50
5	Gross NPL	< 5%	2.77%
6	Net NPL	-	0.71%
7	Return On Asset (ROA)	>1.22%	2.73
8	Return On Equity (ROE)	> 12%	18.00
9	Net Interest Margin (NIM)	>5%	6.11
10	Operating Costs to Operating Income (Bopo)	<94%	71.40

No	Rasio	Kriteria	Nilai Rasio (%)
11	Loan to Deposit Ratio (LDR)	>75<105%	63.34
12	Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	>80<92%	67.93
13	Posisi Devisa Netto (PDN)	20%	< 1.33%

Dari 11 parameter (*benchmark*) yang ditetapkan OJK, rata-rata rasio Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2019 menunjukkan rasio Bank yang "SEHAT" dan tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Menunjuk POJK No. 12/POJK.01/2012 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka telah dilakukan aktivitas antara lain:

No	Program Kinerja	Realisasi
1	Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)	Telah melaporkan sebanyak 2410 LTKT pada bulan Desember 2019
2	Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK Laporan Transaksi Keuangan <i>Transfer</i> Dana dari dan keluar negeri (LTKL)	Telah melaporkan sebanyak 182 LTKL pada bulan Desember 2019
3	Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	Telah melaporkan sebanyak 8 LTKM pada bulan Desember 2019
4	Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK pelaporan data nasabah dalam bentuk Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)	Data SIPESAT Triwulan IV dikirimkan pada bulan Januari 2020.
5	Memantau pelaksanaan <i>Single Customer Number</i> dengan melaksanakan penggabungan terhadap nasabah yang memiliki lebih dari 1 (satu) CIF dengan target 10% dari total data yg harus dimerge per bulan.	Terdapat 9.106 data nasabah yang di merge pada bulan Desember 2019
6	Melaksanakan pendataan terhadap nasabah - nasabah yang dikategorikan dalam <i>Politically Exposed Person</i> (PEP)	Terdapat pendataan terhadap 13.794 Nasabah yang tergolong sebagai PEP pada bulan Desember 2019
7	Pencocokan data nasabah terhadap daftar teroris yang diterbitkan oleh otoritas berwenang	Pencocokan data nasabah terhadap daftar teroris yang diterbitkan oleh otoritas berwenang terakhir pada tanggal 23 Desember 2019
8	Melaksanakan pemantauan profil karyawan setiap 3 bulan sekali	Tidak Terdapat Karyawan yang Sedang dalam Pemantauan pada Triwulan IV Tahun 2019

no	Ratio	criteria	Ratio value (%)
11	Loan to Deposit Ratio (LDR)	>75<105%	63.34
12	Macroprudential Intermediation Ratio (RIM)	>80<92%	67.93
13	Net Open Position (NOP)	20%	< 1.33%

Of the 11 parameters (benchmarks) set by the FSA, the average ratio of Bank Soundness in 2019 shows the ratio of "HEALTHY" Banks and there are no significant violations of the FSA provisions or other applicable laws and regulations.

IMPLEMENTATION OF THE ANTI-MONEY LAUNDERING AND PREVENTION OF TERRORISM FUNDING PROGRAM

Pointed POJK No. 12/POJK.01/2012 dated 21 March 2017 concerning the Implementation of the Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Program in the Financial Services Sector, as well as with the issuance of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and Law Number 9 In 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Funding Crimes, activities have been carried out including:

No	Work Program	Realization
1	Carry out reporting obligations to the PPATK Cash Transaction Report (LTKT)	A total of 2410 LTKTs were reported in December 2019
2	Carry out reporting obligations to the PPATK Financial Transaction Report on Fund Transfers from and abroad (LTKL)	Has reported 182 LTKL in December 2019
3	Carry out reporting obligations to the PPATK Suspicious Financial Transaction Report (LTKM)	Have reported as many as 8 LTKM in December 2019
4	Carry out reporting obligations to PPATK reporting customer data in the form of an Integrated Service User Information System (SIPESAT)	SIPESAT Data for Quarter IV is sent in January 2020.
5	Monitor the implementation of the Single Customer Number by conducting a merger of customers who have more than 1 (one) CIF with a target of 10% of the total data that must be appeared per month	There were 9,106 customer data merged in December 2019
6	Carry out data collection on customers who are categorized in Politically Exposed Person (PEP)	There were data collection on 13,794 customers classified as PEP in December 2019
7	Matching customer data against a list of terrorists issued by the competent authority	Matching customer data to the list of terrorists published by the last authority on December 23, 2019
8	Carry out employee profile monitoring every 3 months	There were no employees currently being monitored in the fourth quarter of 2019

No	Program Kinerja	Realisasi
9	Melaksanakan review dan mengkinikan BPP APU PPT diselarskan dengan perkembangan regulasi eksternal	Belum Dilaksanakan Pengkinian BPP APUPPT di Tahun 2019

No	Work Program	Realization
9	Carry out a review and update the BPP APU PPT aligned with the development of external regulations	Not Upgraded APUPPT BPP in 2019

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

PEDOMAN LHKPN

Kewajiban pelaporan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Tata Cara Pelaporan mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 1 angka 2 UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Kebijakan Internal Bank Jatim diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (BPP LHKPN) nomor 057/401/DIR/KPT/KEP tanggal 31 Desember 2018.

PENERAPAN LHKPN

Kebijakan Internal Bank Jatim diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (BPP LHKPN) nomor 057/401/DIR/KPT/KEP tanggal 31 Desember 2018.

Penunjukan Divisi Kepatuhan & Tata Kelola sebagai Admin Instansi dan Divisi Human Capital sebagai Admin Unit Kerja diatur dalam SK Direksi nomor 056/286/DIR/KPT/SK tanggal 11 Desember 2017 tentang Unit Pengelola LHKPN.

PELAKSANAAN LAPORAN LHKPN

Pengelola LHKPN Unit pengelola LHKPN : Divisi Kepatuhan & Tata Kelola Admin Instansi : Pemimpin Divisi Human Capital (ex- officio) Admin Unit Kerja : Pemimpin Sub Capital (ex-officio)
Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapo : Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan LHKPN pada KPK yang dikoordinir oleh Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola.

SUBMISSION OF STATE OFFICIAL'S WEALTH REPORT (LHKPN)

LHKPN GUIDELINES

Reporting obligations refer to Law Number 30 Year 2002 concerning the Corruption Eradication Commission that has the authority to conduct registration and examination of LHKPN.

Reporting Procedures refer to the Corruption Eradication Commission Regulation (KPK) Number 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Officials Assets.

Article 1 number 2 of Law no. 20/2001 concerning Amendments to Law Number 31/1999 concerning Eradication of Corruption Crimes (Corruption Law). Bank Jatim Internal Policy is regulated in the Guidelines for Implementing the Statutory Assets of State Officials (BPP LHKPN) number 057/401/DIR/KPT/KEP dated December 31th, 2018.

APPLICATION OF LHKPN

Bank Jatim Internal Policy is regulated in the Guidelines for Implementing the Statutory Assets of State Officials (BPP LHKPN) number 057/401/DIR/KPT/KEP dated December 31th, 2018.

The appointment of the Compliance & Governance Division as the Agency Admin and the Human Capital Division as the Admin Work Unit is regulated in the Directors' Decree number 056/286/DIR/KPT/SK dated December 11, 2017 concerning the LHKPN Management Unit.

LHKPN REPORT IMPLEMENTATION

<i>LHKPN Manager</i> <i>LHKPN management unit: Compliance & Governance Division</i> <i>Admin Institution: Head of Human Capital (ex-officio) Division</i> <i>Admin Work Unit: Leader of Sub Capital (ex-officio)</i>
<i>State Official (PN) or Mandatory Report: State Official who carries out executive, legislative, or judicial functions and other officials whose main functions and duties are related to the administration of the State or other public officials in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.</i>
<i>The Board of Commissioners and Directors are required to submit LHKPN to the KPK which is coordinated by the Compliance and Governance Division.</i>

MEKANISME PELAKSANAAN LHKPN

Wajib Lapori bersedia untuk:

1. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali berakhimya jabatan sebagai PN.
2. Menyampaikan LHKPN selama PN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

PENGUNGKAPAN LHKPN TAHUN BUKU 2018

Jabatan	Wajib Lapori LHKPN	Telah Melaporkan		Belum Melaporkan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Komisaris	4	4	100%	0	
Direksi	7	7	100%	0	

MECHANISM OF LHKPN IMPLEMENTATION

Reporting Party is willing to:

1. Reporting his assets at the first time in office, transfer, promotion and retirement within a period of no later than 3 (three) months from the time of the first appointment/reappointment of his position as PN.
2. Submitting LHKPN during PN held periodically every 1 (one) year on assets acquired from January 1 to December 31st no later than March 31 of the following year.

DISCLOSURE OF LHKPN IN 2018 FISCAL YEAR

Position	LHKPN Reporting Party	Have Submitted Report		Have Not Submitted Report	
		Total	%	Total	%
Commissioner	4	4	100%	0	
Director	7	7	100%	0	

bankjatim

TA KELOLA PERUSAHAAN

AUDIT INTERN

INTERNAL AUDIT



Pendekatan audit yang diterapkan Divisi Audit Intern pada tahun 2019 menggunakan pendekatan *Risk Based Audit*, yaitu metode pendekatan audit dalam penentuan objek-objek audit, memprioritaskan Kantor Cabang dan Unit Kerja di Kantor Pusat yang memiliki risiko tinggi dan *Risk Control System* yang rendah. Divisi Audit Intern juga memprioritaskan pada aktivitas fungsional Kantor Cabang dan transaksi keuangan yang berpotensi mempunyai risiko tinggi menimbulkan kerugian Bank. Pelaksanaan audit tahun 2019 meliputi Unit Kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang, termasuk Cabang Syariah sesuai dengan *Audit Plan* tahun 2019.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN DIVISI AUDIT INTERN

Struktur dan kedudukan Divisi Audit Intern telah diatur dan ditetapkan sesuai dengan:

1. POJK Nomor 01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).
2. *Internal Audit Charter* yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2019.
3. Surat Keputusan Direksi No. 057/233/DIR/PRS/KEP tanggal 18 Juli 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
4. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 047/210/KEP/DIR/PWS tanggal 22 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Intern dan perubahannya Surat Edaran Direksi No. 052/039/DIR/AI Tanggal 24 November 2014.
5. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 047/211/KEP/DIR/PWS tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Audit Intern dan perubahannya Surat Edaran Direksi No. 052/040/DIR/AI Tanggal 24 November 2014.
6. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
7. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 054/45/KEP/DIR/AI tanggal 07 April 2016 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Audit Internal Teknologi Informasi dan perubahannya Surat Edaran Direksi No. 054/172/XI/2016 tanggal 21 November 2016 perihal Penambahan Buku Pedoman Pelaksanaan Prosedur Audit Internal Teknologi Informasi.

The audit approach applied by the Internal Audit Division in 2019 uses the Risk Based Audit approach, which is the audit approach method in determining audit objects, prioritizing Branch Offices and Work Units at Headquarters that have high risks and low Risk Control Systems. The Internal Audit Division also prioritizes the functional activities of Branch Offices and financial transactions that have the potential to have a high risk of causing Bank losses. The 2019 audit will include the Head Office and Branch Offices, including Sharia Branches in accordance with the 2019 Audit Plan.

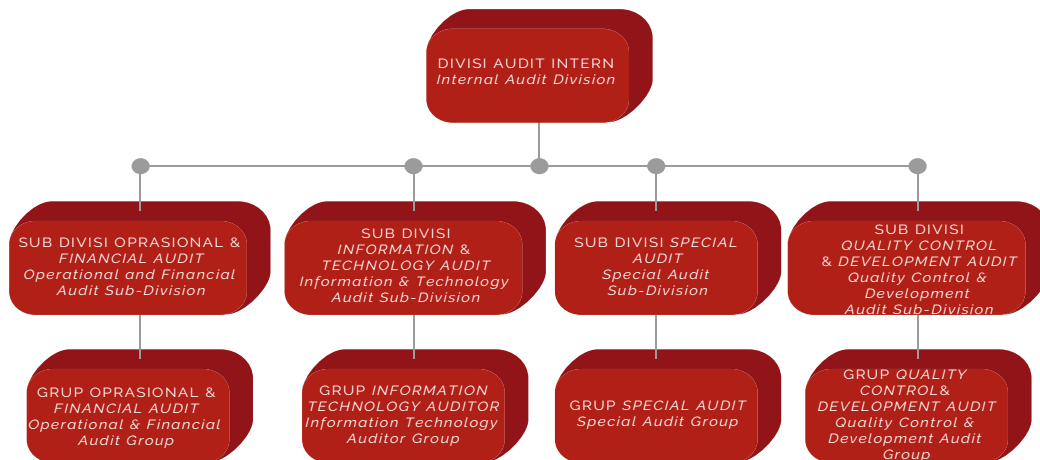
STRUCTURE AND POSITION OF THE INTERNAL AUDIT DIVISION

The structure and position of the Internal Audit Division is regulated and determined according to:

1. POJK Number 01/POJK.03/2019 dated January 28, 2019 concerning the Obligations of Commercial Banks to Implement Standards for the Implementation of the Bank Internal Audit Function (SPFAIB).
2. Internal Audit Charter established on August 1, 2019.
3. Directors Decree No. 057/233/DIR/PRS/KEP dated 18 July 2018 concerning Guidelines for Implementing the Organizational Structure and Work Procedures of PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk.
4. Decree of the Directors of Bank Jatim No. 047/210/KEP/DIR/PWS dated December 22, 2009 concerning Guidelines for the Implementation of Internal Audit and amendments to the Directors Circular No. 052/039/DIR/AI on 24 November 2014.
5. Decree of the Directors of Bank Jatim No. 047/211/KEP/DIR/PWS dated 31 December 2009 concerning Guidelines for the Implementation of Internal Audit Procedures and amendments to the Directors Circular No. 052/040/DIR/AI on November 24, 2014.
6. Decree of the Directors of Bank Jatim No. 050/119/KEP/DIR/AI dated June 29, 2012 concerning the Guidelines for Implementing Anti-Fraud Strategies of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
7. Decree of the Directors of Bank Jatim No. 054/45/KEP/DIR/AI dated April 7, 2016 concerning the Guidelines for the Implementation of the Internal Audit of Information Technology and its changes. 054/172/XI/2016 dated November 21, 2016 concerning the Addition of an Information Technology Internal Audit Implementation Manual.

Berikut Struktur Organisasi Divisi Audit Intern:

The following organizational structure of the Internal Audit Division:



Pemimpin Divisi Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemimpin Divisi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Divisi Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit.

Kedudukan, mekanisme, tugas dan wewenang Divisi Audit Intern termasuk transparansi serta kejelasan merupakan hal yang signifikan dalam pengelolaan Bank Jatim, sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan tanggung jawab, wewenang serta tingkat independensi telah dinyatakan dalam *Internal Audit Charter* yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 1 Agustus 2019 yang disusun berdasarkan POJK Nomor 01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI AUDIT INTERN

KEWENANGAN DIVISI AUDIT INTERN:

1. Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Bank serta pemeriksaan secara *offsite* perusahaan terelasi.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
3. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal termasuk regulator.

The Head of the Internal Audit Division is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and reported to the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) and the Financial Services Authority (OJK). The Head of the Internal Audit Division reports directly to the President Director. To support independence and ensure the smooth operation of the audit and the authority to monitor follow-up, the Internal Audit Division can communicate directly with the Board of Commissioners to inform various matters relating to the audit.

The position, mechanism, duties and authority of the Internal Audit Division including transparency and clarity are significant matters in the management of Bank Jatim, so that the internal audit policy relating to responsibilities, authorities and levels of independence has been stated in the Internal Audit Charter signed by the President Director and approved by the Board of Commissioners on August 1, 2019 compiled based on POJK Number 01/POJK.03/2019 dated January 28, 2019 concerning the Obligations of Commercial Banks to Implement Standards for the Implementation of the Bank Internal Audit Function (SPFAIB), and Regulation of the Financial Services Authority No.56/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Charter.

AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF THE INTERNAL AUDIT DIVISION

AUTHORITY OF THE INTERNAL AUDIT DIVISION:

1. Conducting Internal Audit activities on the activities of all work units in the Bank organization as well as offsite related company audits.
2. Communicating directly with the President Director, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.
3. Communicating with external parties including regulators.

4. Melakukan akses terhadap seluruh informasi, karyawan dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan sumber daya dan dana serta aset Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
5. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.

TANGGUNG JAWAB DIVISI AUDIT INTERN:

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal.
2. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen.
3. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai SKAI Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Memantau pelaksanaan Internal Audit pada perusahaan terelasi dalam konglomerasi keuangan.
2. Menyampaikan laporan Internal Audit terintegrasi kepada Direktur Utama sebagai salah satu bentuk fungsi pengawasan terhadap perusahaan terelasi dalam konglomerasi keuangan.

PEMIMPIN DIVISI AUDIT INTERN

Pemimpin Divisi Audit Intern saat ini dijabat oleh Eko Tri Prasetyo sejak tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 057/384/DIR/HCT/KEP tentang Pengangkatan dalam jabatan dan pemindahan tugas pegawai yang ditandatangani Direktur Utama. Sebelum menjabat sebagai Pemimpin Divisi Audit Intern.

Yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Pjs. Pemimpin Divisi Audit Intern sejak tanggal 7 Agustus 2017 dan Pemimpin Sub Divisi IT Audit Divisi Audit Intern sejak 3 Maret 2012. Selain itu, juga memiliki pengalaman bekerja di bidang *Compliance*, *Business Process* dan Teknologi Informasi pada perusahaan multinasional di Indonesia.

INTERNAL AUDIT CHARTER BANK JATIM

Divisi Audit Intern memiliki *Internal Audit Charter* yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2019. *Internal Audit Charter* dibuat untuk memberikan gambaran/pedoman terkait Visi, Misi, dan fungsi Kedudukan dalam Organisasi, Ruang Lingkup, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Pernyataan Kemandirian, Aktivitas Audit Internal & Investigasi, dan Pelaporan.

4. Accessing all information, employees and including but not limited to accounts/records of employee resources and funds and other Bank assets related to the audit.
5. Conducting investigative activities on cases/problems in every aspect and element of activities indicated by fraud and violation of the code of conduct.

INTERNAL AUDIT DIVISION RESPONSIBILITIES:

1. Plan and carry out Internal Audit activities with an emphasis on areas/activities that have high risk and evaluate existing procedures/control systems to gain confidence that the goals and objectives of the Bank can be achieved optimally.
2. Carry out steps in order to dig up information (investigation), report, and submit recommendations/conclusions on fraud to Management.
3. Provide recommendations on audit results and monitor follow-up on the results of Internal Audit activities and investigative activities.

In the context of carrying out its functions as an Integrated Internal Audit Unit, the duties and responsibilities of the Internal Audit Division refer to the Integrated Governance Guidelines, namely:

1. Monitor the implementation of Internal Audit in related companies in financial conglomerates.
2. Delivering an integrated Internal Audit report to the President Director as one form of oversight function of the company involved in the financial conglomerate.

HEAD OF INTERNAL AUDIT DIVISION

The Head of the Internal Audit Division is currently held by Bpk. Eko Tri Prasetyo since 27 December 2018 as in the Decree of the Board of Directors Number 057/384/DIR/HCT/KEP concerning Appointment in Office and assignment of employees signed by the President Director. Before serving as Head of the Internal Audit Division.

He once served as Acting Head of Internal Audit Division since 7 August 2017 and Head of IT Audit Sub Division of Internal Audit Division since 3 March 2012. In addition, he also has experience working in Compliance, Business Process and Information Technology in multinational companies in Indonesia.

BANK JATIM INTERNAL AUDIT CHARTER

The Internal Audit Division has an Internal Audit Charter which was established on August 1, 2019. The Internal Audit Charter was created to provide an overview/guideline related to the Vision, Mission, and functions of the Position in the Organization, Scope, Authority and Responsibility, Statement of Independence, Internal Audit Activities & Investigation and Reporting.

Disusun berdasarkan :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

Arranged by:

- Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Charter,
- Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.03/2019 Concerning the Implementation of the Internal Audit Function at Commercial Banks.

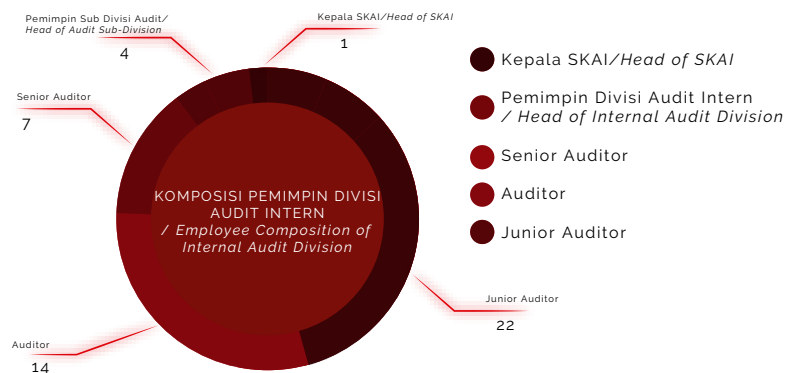
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALIFIKASI DIVISI AUDIT INTERN

Divisi Audit Intern terus berupaya untuk memenuhi dan menyediakan auditor yang memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko. Divisi Audit Intern didukung dengan total sebanyak 48 personil (posisi per 19 Agustus 2018) termasuk Pemimpin Divisi Audit Intern yang terdiri dari :

HUMAN RESOURCES AND QUALIFICATIONS OF THE INTERNAL AUDIT DIVISION

The Internal Audit Division continues to strive to meet and provide auditors who have competence and integrity in accordance with the needs and risk levels. The Internal Audit Division is supported by a total of 48 personnel (positions as of August 19, 2018) including the head of the Internal Audit Unit consisting of:

KOMPOSISI PEGAWAI DIVISI AUDIT INTERN



/ EMPLOYEE COMPOSITION OF INTERNAL AUDIT DIVISION

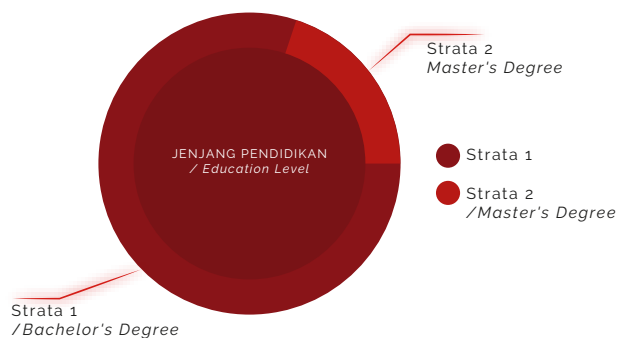
KOMPOSISI

KETERANGAN	JUMLAH
Junior Auditor	22
Auditor	14
Senior Auditor	7
Pemimpin Sub Divisi Audit	4
Kepala SKAI	1

COMPOSITION

DESCRIPTION	TOTAL
Junior Auditor	22
Auditor	14
Senior Auditor	7
Head of Audit Sub-Division	4
Head of SKAI	1

JENJANG PENDIDIKAN



PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	TOTAL
STRATA 1	40
STRATA 2	8

EDUCATION

EDUCATION	TOTAL
BACHELOR'S DEGREE	40
MASTER'S DEGREE	8

Pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten dilakukan dengan menetapkan kualifikasi/kompetensi yang diperlukan dalam proses rekrutmen pegawai Divisi Audit Intern secara berkala. Untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan & program sertifikasi, mengikutsertakan dalam seminar terkait audit dan *fraud* sehingga dapat meningkatkan kompetensi para auditor yang mencakup *knowledge* (pengetahuan), *skills* (keterampilan), dan *attitude* (sikap kerja), dalam sepanjang tahun 2019, telah mengikuti 25 program pelatihan.

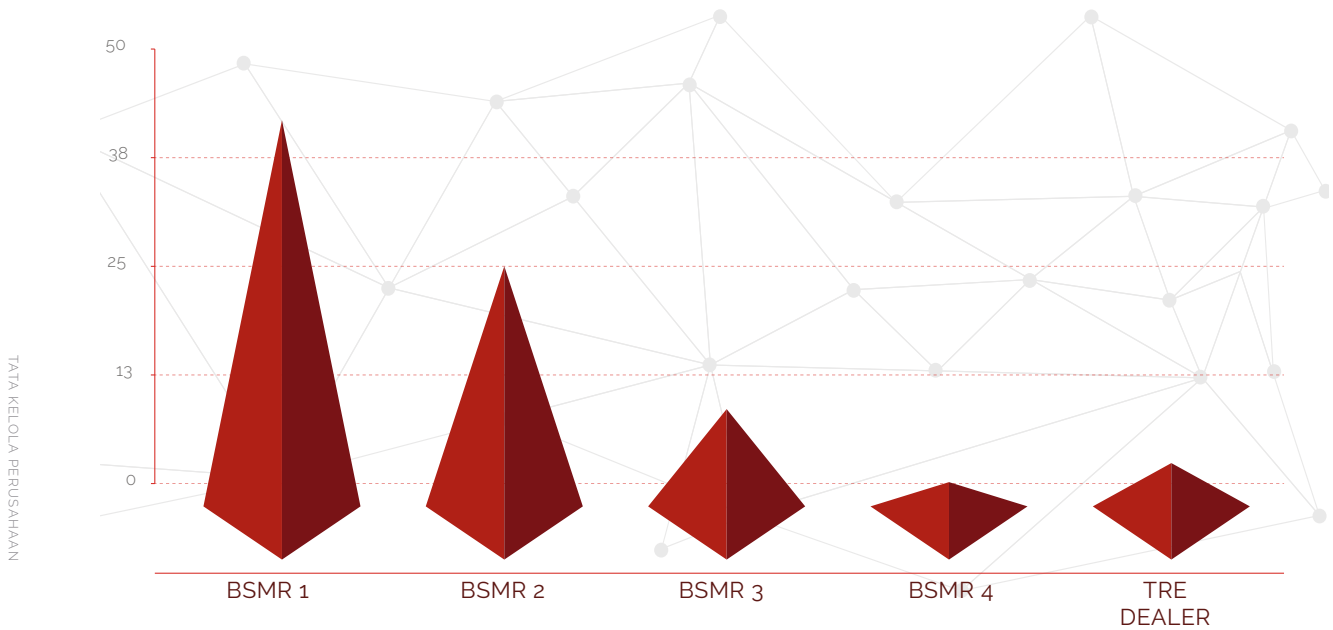
Divisi Audit Intern telah memiliki sertifikasi nasional dan internasional sebagai profesi audit internal yaitu sebagai berikut :

The fulfillment of competent human resources is carried out by determining the qualifications/competencies needed in the Internal Audit Division employee recruitment process periodically. To improve the quality of HR, it is carried out through education, training & certification programs, taking part in seminars related to auditing and fraud so as to increase the competencies of auditors including knowledge, skills and attitudes, in 2019, has attended 25 training programs.

The Internal Audit Division already has national and international certifications as an internal audit profession, as follows:

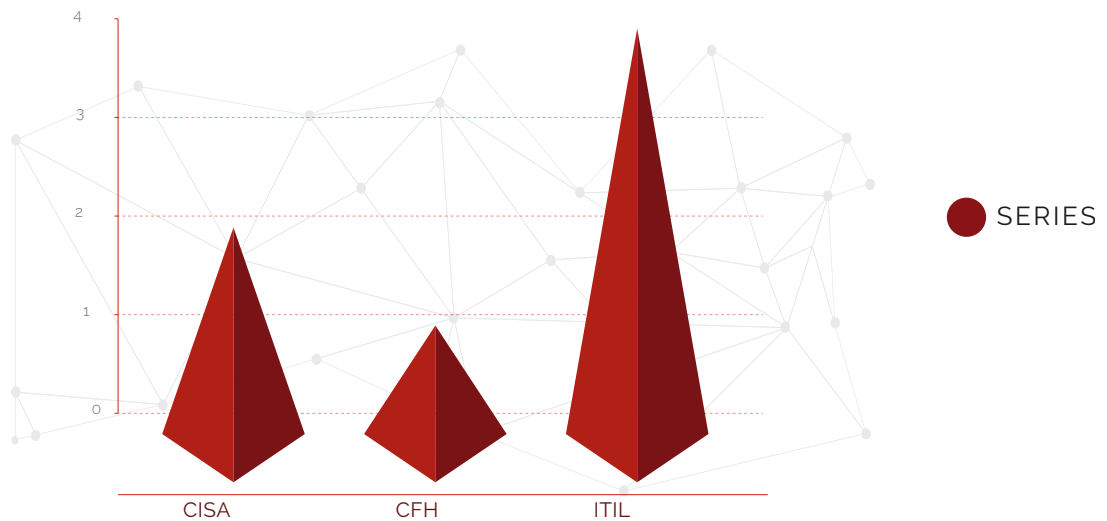
SERTIFIKASI NASIONAL

NATIONAL CERTIFICATION



SERTIFIKASI INTERNASIONAL

INTERNATIONAL CERTIFICATION



Certified Information System Auditor (CISA)

Certified Ethical Hacker (CEH)

Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

RINCIAN SERTIFIKASI

SERTIFIKASI	JUMLAH
BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO 1	42
BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO 2	26
BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO 3	11
BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO 4	1
CERTIFIED INFORMATION SYSTEM AUDITOR (CISA)	2
CERTIFIED ETHICAL HACKER	1
INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY	4
CERTIFIED TREASURY DEALER	2

CERTIFICATION DETAILS

CERTIFICATION	TOTAL
RISK MANAGEMENT CERTIFICATION AGENCY 1	42
RISK MANAGEMENT CERTIFICATION AGENCY 2	26
RISK MANAGEMENT CERTIFICATION AGENCY 3	11
RISK MANAGEMENT CERTIFICATION AGENCY 4	1
CERTIFIED INFORMATION SYSTEM AUDITOR (CISA)	2
CERTIFIED ETHICAL HACKER	1
INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY	4
CERTIFIED TREASURY DEALER	2

STANDAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Divisi Audit Intern berpedoman pada *Internal Audit Charter* yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 1 Agustus 2019, *Audit Plan* tahunan, Struktur Organisasi Bank Jatim dan Buku Prosedur Pelaksanaan yang dikinikan secara berkala sesuai dengan perkembangan bisnis, organisasi dan ketentuan yang berlaku. Sebagai acuan ke arah *global practice*, Divisi Audit Intern juga menggunakan standar dan kode etik IIA dan ISACA.

IMPLEMENTATION STANDARDS

The Internal Audit Division's activities are guided by the Internal Audit Charter, which was signed by the President Director and approved by the Board of Commissioners on 1 August 2019, the annual Audit Plan, Bank Jatim Organizational Structure and the Implementation Procedure Book which is updated regularly in accordance with business development, the organization and applicable provisions. As a reference towards global practice, the Internal Audit Division also uses IIA and ISACA's standards and code of ethics.

PENJELASAN HASIL REVIEW AUDIT 3 TAHUNAN OLEH PIHAK EKSTERNAL

Kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan fungsi Divisi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal telah dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. Hasil *review* terakhir oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono pada tanggal 30 Juni 2019 bahwa praktik kerja yang dilakukan oleh Divisi Audit Intern PT. Bank Jatim secara keseluruhan dalam kategori patuh sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 1/POJK.03/2019, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 1/6/PBI/1999 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38/POJK.03/2016.

Divisi Audit Intern telah melakukan penyempurnaan atas Pedoman Pelaksanaan Audit Intern Teknologi Informasi terkait BI-ETP dan penyedia Jasa Teknologi Informasi oleh Bank sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 058/234/DIR/AUI/KEP tanggal 26 Agustus 2019 perihal Perubahan Pedoman Pelaksanaan Audit Internal Teknologi Informasi.

EXPLANATION OF THE RESULTS OF THE 3-YEAR AUDIT REVIEW BY EXTERNAL PARTIES

Periodic reviews of the effectiveness of the implementation of the functions of the Internal Audit Division and compliance with SPFAIB by external parties have been carried out every 3 (three) years. The results of the latest review by Kanaka Puradiredja Public Accountant Office, Suhartono on 30 June 2019 that the work practices carried out by the Internal Audit Division of PT. Bank Jatim as a whole in the category of compliance with Financial Services Authority Regulation (POJK) number 1/POJK.03/2019, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 1/6/PBI/1999 and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 38/POJK.03/2016.

The Internal Audit Division has made improvements to the Guidelines for the Implementation of Information Technology Internal Audit related to BI-ETP and Information Technology Services providers by the Bank in accordance with the Decree of the Directors No. 058/234/DIR/AUI/KEP dated August 26, 2019 concerning Changes to the Guidelines for the Implementation of the Internal Audit of Technology Information.

RUANG LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit meliputi seluruh aktivitas operasional perbankan, baik di pada unit kerja kantor pusat dan kantor cabang, yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi menimbulkan risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi operasional Bank Jatim yang berdampak terhadap masyarakat, risiko dimaksud meliputi risiko kredit, operasional, strategi, reputasi, hukum, pasar, kepatuhan dan likuiditas.

Pemeriksaan atas Unit Kerja di Kantor Pusat menitikberatkan pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, termasuk efisiensi sumber daya, efektivitas pencapaian target dan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal.

Sedangkan audit kegiatan operasional Bank secara keseluruhan dilakukan di seluruh kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan kantor *payment point*.

Divisi Audit Intern merupakan strategic partner bagi Bank dalam membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas audit internal (*assurance & consulting*) dan aktivitas investigasi.

ASSURANCE

Melakukan pengujian secara objektif terhadap bukti-bukti dalam rangka menyediakan penilaian yang independen atas *internal control*, penerapan *risk management*, dan proses *governance* dalam organisasi.

CONSULTING

Dalam rangka menjalankan fungsi SKAI yang juga sebagai konsultan internal, pemberian layanan konsultasi oleh Divisi Audit Intern kepada pihak internal wajib memperhatikan aspek independensi antara lain:

1. Terdapat pemisahan antara personil Divisi Audit Intern yang memberikan jasa konsultasi atas suatu kebijakan dengan personil Divisi Audit Intern yang melakukan audit terhadap kebijakan dimaksud.
2. Terdapat pengungkapan (*disclosure*) bahwa hasil konsultasi tidak memengaruhi objektivitas Divisi Audit Intern.

INVESTIGASI

Aktivitas pengumpulan bukti-bukti dengan menggunakan teknik investigasi atas hasil analisa awal terhadap indikasi dan/atau *fraud* yang terjadi. Investigasi bertujuan untuk mengungkapkan modus operandi, penyebab, potensi kerugian, pelaku dan pihak lain yang terlibat. Investigasi mencakup perolehan bukti dan pernyataan, penulisan laporan, pemberian kesaksian atas temuan serta monitoring tindak lanjut yang diperlukan.

KODE ETIK

Divisi Audit Intern harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya. Divisi Audit Intern dapat memberikan tanggapan atas proposal kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru untuk menilai aspek-aspek

AUDIT SCOPE

The scope of the audit covers all banking operational activities, both at the head office and at the branch office, which directly or indirectly have the potential to cause risks that are expected to affect the operations of the Bank that have an impact on the community, law, market, compliance and liquidity.

Examination at the head office is carried out at the division and Corporate Secretary. This audit focuses on the resources used to achieve the targets set, including resource efficiency, effectiveness of achieving targets and increasing compliance with applicable regulations both internal and external.

While the audit of the Bank's overall operational activities is carried out in all branch offices, sub-branch offices, cash offices, and payment point offices.

The Internal Audit Division is a strategic partner for the Bank in helping organizations achieve their goals through internal audit (*assurance & consulting*) and investigative activities.

ASSURANCE

Conduct objective testing of the evidence in order to provide an independent assessment of internal control, the application of risk management, and governance processes in the organization.

CONSULTING

In order to carry out the function of the Internal Audit Unit which is also an internal consultant, the provision of consulting services by the Internal Audit Division to internal parties must pay attention to the aspects of independence including:

1. There is a separation between Internal Audit Division personnel who provide consultancy services on a policy and Internal Audit Division personnel who conduct audits of the intended policy.
2. There is a disclosure (*disclosure*) that the results of the consultation do not affect the objectivity of the Internal Audit Division.

INVESTIGATION

The activity of collecting evidence using investigation techniques on the results of the initial analysis of the indications and/or fraud that occurred. Investigation aims to reveal the modus operandi, causes, potential losses, perpetrators and other parties involved. Investigations include obtaining evidence and statements, writing reports, giving testimonies on findings and monitoring the necessary follow-up.

CODE OF ETHICS

The Internal Audit Division must strive to be able to play a role as a consultant for internal parties that need it, especially regarding the scope of their duties. The Internal Audit Division can provide responses to policy proposals or new systems and procedures to assess

pengendalian intern sehingga didalam pelaksanaannya akan dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Dengan adanya keterlibatan Divisi Audit Intern di dalam *review* sistem ini, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai objek audit. Divisi Audit Intern tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari *auditee*.

INDEPENDENSI

Divisi Audit Intern memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Internal Audit, aktivitas investigasi, dan mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

1. Manajemen harus memberikan dukungan penuh terhadap fungsi Divisi Audit Intern agar dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas tanpa campur tangan pihak manapun serta manajemen harus menindaklanjuti temuan Divisi Audit Intern.
2. Auditor mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
3. Divisi Audit Intern memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, ruang lingkup, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
4. Dalam pengelolaan personel Divisi Audit Intern harus dengan persetujuan Direktur Utama dan Pemimpin Divisi Audit Intern.

OBJEKTIVITAS

1. Auditor dan Investigator harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
2. Auditor dan Investigator bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas objek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Auditor dan *Investigator* mempunyai pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap objek atau kegiatan yang dimaksud.

PROFESIONALISME

Profesionalisme menjadi acuan bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu auditor harus memiliki sikap:

1. Integritas, sikap mental yang independen, jujur, objektif, tekun, dapat diandalkan, tegas, terpercaya, menghindari benturan kepentingan dan menjunjung tinggi kode etik serta profesi Internal Auditor termasuk didalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank (*confidentiality code*).
2. Kompetensi sesuai dengan *competency profile* yang dibutuhkan.

aspects of internal control so that in its implementation the objectives will be effectively and efficiently achieved.

With the involvement of the Internal Audit Division in this system review, it does not mean that those things will be excluded as audit objects. The Internal Audit Division does not have the authority or responsibility to carry out operational activities of the Auditee.

INDEPENDENCE

The Internal Audit Division has independence in carrying out Internal Audit and investigative activities, expressing views and thoughts in accordance with its profession and applicable standards.

1. Management must provide full support for the functions of the Internal Audit Division in order to be able to carry out their duties freely without interference from any party and management must follow up on the findings of the Internal Audit Division.
2. Internal Auditors are able to express their views and thoughts without influence or pressure from any other party.
3. The Internal Audit Division has the freedom to determine the audit methods, scope, methods, techniques and approaches to be carried out.
4. In managing Internal Audit Division personnel, with the approval of the President Director and Head of the Internal Audit Division.

OBJECTIVITY

1. Internal Auditors and Investigators must have an independent mental attitude in carrying out internal audit and investigative activities. This mental attitude is reflected in a complete, objective report and based on careful and impartial analysis.
2. Internal Auditors and Investigators are free from conflicts of interest over the object or activity being examined. If the Internal Auditor and Investigator have a conflict of interest in the object or activity being examined, the person concerned must state the connection and not be assigned to carry out an audit of the object or activity in question.

PROFESSIONALISM

Professionalism becomes a reference for the Auditor in carrying out his duties. For this reason the auditor must have the attitude:

1. Integrity, mental attitude that is independent, honest, objective, diligent, reliable, decisive, trustworthy, avoids conflicts of interest and upholds the ethics and profession of the Internal Auditor, including being wise and cautious in using information obtained in carrying out tasks and not use confidential information for personal interests or other things that could cause harm to the Bank (*confidentiality code*).
2. Competencies in accordance with the required competency profile.

3. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
4. Kewajiban mematuhi Kode Etik Internal Auditor dan Standar Profesi Internal Auditor bagi Auditor Internal serta Kode Etik Investigator dan Standar Profesi Investigator bagi Investigator.
5. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Auditor kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

PELAKSANAAN AUDIT

Pelaksanaan Audit dibedakan menjadi *General Audit*, *Special Audit* (Audit Pendalaman), Audit Teknologi Informasi, dan *Surprise Audit*.

General Audit adalah pemeriksaan secara umum atas semua aktivitas operasional Bank yang dilakukan oleh tim auditor.

Special Audit (Audit Pendalaman) adalah audit yang pelaksanaannya didasarkan pada hasil *General Audit*, yang berindikasi adanya potensi risiko yang berdampak pada kerugian Bank dan/atau laporan dari pihak ketiga (*Whistleblower*) yang mengindikasikan adanya penyimpangan dan kecurangan (*fraud*) yang dapat merugikan dan mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, Divisi Audit Intern meningkatkan peran pelaksanaan Audit TI, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam *Audit Plan* Tahunan. Divisi Audit Intern melakukan audit terhadap aktivitas Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Bank. Ruang lingkup Audit TI meliputi:

- Manajemen dan tata kelola teknologi informasi;
- Pengambilalihan, penggabungan dan implementasi sistem informasi;
- Operasional dan pemeliharaan sistem informasi;
- Proteksi keamanan sistem informasi.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas Teknologi Informasi yang dilakukan Bank telah patuh terhadap semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang menyangkut masalah *confidentiality, integrity & availability*.

Surprise Audit adalah kegiatan audit yang dilaksanakan secara tiba-tiba tanpa dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada *auditee*, dalam rangka meningkatkan efektivitas fungsi pengendalian intern di kantor cabang. Audit ini dilakukan secara periodik/momen tertentu, biasanya terkait dengan kas opname (kluis & ATM), agunan kredit, dan operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan.

3. The ability to interact and communicate effectively both verbally and in writing.
4. Obligation to comply with the Internal Auditor's Code of Ethics and the Internal Auditor's Professional Standards for the Internal Auditor and the Investigator's Code of Ethics and Investigator's Professional Standards for Investigators.
5. Obligation to maintain the confidentiality of company information and/or data related to carrying out the duties and responsibilities of the Internal Auditor unless required by statutory regulations or court decisions/decisions.

AUDIT IMPLEMENTATION

Audit implementation is divided into General Audit, Special Audit (IT Audit), IT Audit, and Surprise Audit.

General Audit is a general examination of all operational activities of the Bank carried out by a team of examiners consisting of the Auditor of the Head Office.

Special Audit is an audit whose implementation is based on the results of the General Audit, which indicates the potential risks that affect the Bank's losses and/or reports from third parties (Whistleblowers) that indicate irregularities and fraud (fraud) that can harm and disrupt business continuity of the Bank.

Along with the development of increasingly advanced technology, the Internal Audit Division increased the role of IT Audit implementation. IT Audit is also an integral part of the Annual Audit Plan. The Internal Audit Division conducts IT Audits on the Information Technology Division and the Information System Technology Service Provider, as well as an annual BI-RTGS, SKN-BI, and PKL audit. The scope of IT Audit includes:

- Information technology management and governance;
- Take over, merge and implement information systems;
- Operational and maintenance of information systems;
- Information system security protection.

This is done to ensure that the information system technology service provider has fulfilled and implemented all the provisions stipulated in the applicable laws and regulations and the internal provisions of the Bank, especially those concerning confidentiality, integrity & availability.

In order to increase the effectiveness of the internal control function at branch offices, the Internal Audit Division also conducts surprise audits, which include all branch offices. This audit is conducted periodically/for certain moments, usually related to hospitalization cash (kluis & ATM), credit collateral, and other operations as needed.

Di samping itu, pemantauan dan analisa transaksi beserta kinerja kantor cabang juga dilaksanakan oleh Auditor di kantor pusat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dan laporan tingkat kesehatan serta profil risiko yang dikirim oleh kantor cabang. Apabila terdapat indikasi adanya potensi risiko yang berdampak pada kerugian Bank Jatim, maka segera dilakukan pendalaman dan antisipasi permasalahan.

Divisi Audit Intern juga melakukan jasa konsultasi yang pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan atau permintaan *user* dan ketersediaan sumber daya Divisi Audit Intern, sepanjang tidak mengganggu independensi dan objektivitas Divisi Audit Intern dalam pelaksanaan audit, seperti: *review* terkait produk baru Bank dan *review* kebijakan.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No.050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Divisi Audit Intern diberi kewenangan dalam pelaksanaan Strategi *Anti Fraud* Bank Jatim.

PELAPORAN

Divisi Audit Intern menyampaikan laporan kepada:

1. Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Human Capital berupa Laporan Hasil Audit, hasil monitoring tindak lanjut temuan oleh *auditee* dan progres Program Kerja Divisi Audit Intern.
2. Bank Indonesia tentang pelaksanaan fungsi audit internal yang terdiri dari:
 - Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran Bank Indonesia
 - Laporan Hasil Audit atas aktivitas Teknologi Informasi terkait kegiatan Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
3. Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit internal yang terdiri dari:
 - Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal (semesteran)
 - Laporan Strategi *Anti Fraud* (semesteran)
 - Laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank - Laporan Strategi *Anti Fraud* (insidental)
 - Laporan Hasil Audit atas aktivitas Teknologi Informasi
 - Laporan hasil *review* peluncuran produk baru Bank.
 - Laporan tindak lanjut temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan

PENGEMBANGAN AUDIT

Berdasarkan temuan hasil audit oleh pihak internal maupun eksternal, Divisi Audit Intern melakukan berbagai perbaikan serta evaluasi terhadap prosedur operasional dan SDM yang menjadi kunci dalam pemenuhan terhadap semua ketentuan yang telah ditetapkan baik dalam ketentuan internal Bank Jatim

In addition, transaction monitoring and analysis along with branch office performance is also carried out by the Auditor at the head office by utilizing existing information technology and health level reports and risk profiles sent by the branch office. If there are indications of potential risks that have an impact on the loss of the Bank, then it is immediately carried out the deepening and anticipation of problems.

The Internal Audit Division also carries out consultancy services whose implementation is in accordance with the needs or requests of users and the availability of resources of the Internal Audit Division, as long as it does not interfere with the independence and objectivity of the Internal Audit Division in conducting audits, such as: reviews related to the Bank's new products and policy reviews.

In accordance with Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) No.13/28/DPNP dated 9 December 2011 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks and Bank Jatim Directors Decree No. 050/119/KEP/DIR/AI dated 29 June 2012 concerning Handbook on the Implementation of Anti-Fraud Strategy of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Internal Audit Division was given the authority in implementing the Anti-Fraud Strategy of Bank Jatim.

REPORTING

The Internal Audit Division reports to:

1. President Director and Board of Commissioners with a copy to the Director of Compliance and Human Capital in the form of Audit Report, the results of monitoring the follow-up findings by the auditee and the progress of the Internal Audit Division's Work Program.
2. Bank Indonesia concerning the implementation of the internal audit function which consists of:
 - Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran Bank Indonesia
 - Laporan Hasil Audit atas aktivitas Teknologi Informasi terkait kegiatan Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
3. The Financial Services Authority regarding the implementation of the internal audit function consisting of:
 - Report on Implementation and Principles of Internal Audit Results (semester)
 - Anti Fraud Strategy Report (semester)
 - Special report on any internal audit findings that are expected to disrupt the continuity of the Bank's business - Anti Fraud Strategy Report (incidental)
 - Laporan Hasil Audit atas aktivitas Teknologi Informasi
 - Laporan hasil *review* peluncuran produk baru Bank.
 - Follow-up report on the findings of the Financial Services Authority examination

DEVELOPMENT OF AUDIT

Based on the findings of the audit by internal and external parties, the Internal Audit Division conducted various improvements and evaluations of operational and HR procedures that were key in fulfilling all stipulations that have been set both in the internal

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan audit yang dilakukan di tahun 2019 berfokus pada:

1. Pemenuhan auditor sesuai kebutuhan terkait dengan adanya perkembangan organisasi dan peningkatan jaringan, sehingga dengan jumlah dan kualitas tenaga auditor yang memadai sesuai dengan risiko cabang dan rentang organisasi diharapkan fungsi kontrol akan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien;
2. Peningkatan efektivitas monitoring dengan menempatkan *Resident Auditor* pada 7 (tujuh) kelompok Wilayah Audit.
3. Pengembangan dan penerapan atas sistem *Governance, Risk and Compliance* (GRC) secara berkelanjutan.

SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI (SKAIT)

Sesuai dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi; dengan ditunjuknya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan oleh Pemegang Saham Pengendali melalui Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 570/4308/021/2015 tanggal 5 Pebruari 2015 perihal Penunjukan Entitas Utama; atas dasar tersebut di atas maka dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Direksi Entitas Utama telah dibentuk Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) sesuai dengan SK Direksi No. 053/303/KEP/DIR/AI tanggal 31 Desember 2015.

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI (SKAIT)

1. Bank Jatim sebagai Entitas Utama wajib memiliki SKAIT yang independen.
2. Dalam hal Bank Jatim sebagai Entitas Utama telah memiliki SKAI, maka pelaksanaan tugas Audit Intern Terintegrasi dapat dilakukan oleh SKAI yang telah ada.
3. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama maupun kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pelaksanaan audit intern secara terintegrasi.
4. Memantau pelaksanaan audit intern pada Perusahaan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan.
5. Memberikan informasi kepada Direksi Entitas Utama maupun kepada KTKT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan pelaksanaan audit intern pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.
6. Menyampaikan Laporan Audit Intern Terintegrasi kepada Direktur Entitas Utama atas fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama setiap Semester.

provisions of Bank Jatim and applicable laws and regulations. Audit development carried out in 2018 focuses on:

1. The fulfillment of auditors according to the needs is related to organizational development and network improvement, so that with adequate number and quality of auditor personnel in accordance with branch risks and organizational ranges, it is expected that the control function will be able to run well, effectively and efficiently;
2. Increased effectiveness of monitoring by applying the division into 7 (seven) Audit Area Coordinator groups.
3. Continuously developing and implementing a Governance, Risk and Compliance (GRC) system;

INTEGRATED INTERNAL AUDIT WORK UNIT (SKAIT)

In accordance with the enactment of the Financial Services Authority Regulation 18/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates and the Financial Services Authority Circular Letter Number 14/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 concerning the Implementation of Integrated Risk Management For Conglomerates; with the appointment of PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk as the Main Entity in the Financial Conglomerate by the Controlling Shareholders through the Governor of East Java Letter Number 570/4308/021/2015 dated 5 February 2015 concerning the Appointment of the Main Entity; Based on the foregoing, in order to implement comprehensive and effective Integrated Risk Management, the Main Entity Board of Directors has formed the Integrated Internal Audit Work Unit (SKAIT) in accordance with the Decree of the Directors No. 053/303/KEP/DIR/AI dated December 31th, 2015.

AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF THE INTEGRATED INTERNAL AUDIT WORK UNIT (SKAIT)

1. Bank Jatim as the Main Entity is required to have an independent SKAIT.
2. In the event that Bank Jatim as the Main Entity has an Internal Audit Unit, the implementation of the Integrated Internal Audit task can be carried out by the existing Internal Audit Unit.
3. Provide input to the Directors of the Main Entity as well as to the Integrated Governance Committee (KTKT) in the framework of formulating and refining policies for the implementation of an integrated internal audit.
4. Monitor the implementation of internal audits in Related Companies in the Financial Conglomerate.
5. Provide information to the Directors of the Main Entity and to the KTKT on matters that need to be followed up related to the implementation of internal audits at each Financial Services Institution in the Financial Conglomerate.
6. Submit the Integrated Internal Audit Report to the Main Entity Director on the oversight function of the Correlated Company in the Financial Conglomerate and the Board of Commissioners of the Main Entity every Semester.

Bank Jatim

SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain;

- Mengembangkan misi Bank
- Mediator dengan Pemangku Kepentingan seperti regulator, investor dan masyarakat
- Menjaga citra Bank serta
- Memberikan keterbukaan informasi

Sekretaris Perusahaan Bank Jatim memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perseroan yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi. Sekretaris Perusahaan Bank Jatim membawahi 3 (tiga) Sub Divisi yaitu Sub Divisi Komunikasi Internal, Sub Divisi Komunikasi Eksternal, dan Sub Divisi Investor Relation.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

GLEMBOH PRIAMBODO

Lahir di Malang, 15 Maret 1970. Saat ini berdomisili di Surabaya. Memperoleh gelar Sarjana-S1 (Ilmu Hukum) dari Universitas Surabaya (UBAYA), Sarjana-S2 (Ilmu Hukum) dari Universitas 17 Agustus Surabaya (UNTAG), Sarjana-S2 (Manajemen) dari STIE ABIE Surabaya. Mengawali karir di Bank Jatim sejak 2000 dan menjabat berbagai posisi, di antaranya Pemimpin Cabang DR. Soetomo. Menjabat sebagai *Corporate Secretary* berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 057/384/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.

Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan *workshop* dalam karirnya di dunia perbankan dan hukum di antaranya, Pelatihan KYCP/AML kerja sama dengan Bank Indonesia & PPATK, Pelatihan Peran Bank dalam Mencegah serta memberantas (kejahatan perbankan, tindak pidana perbankan APU/PPT) oleh PT. Cipta Bina Mandiri (CBM), *Workshop* Potensi Tipikor dalam kegiatan Operasional Perbankan bersama bareskrim & OJK oleh Swadharma Learning Centre (SLC), *Workshop* Aspek Hukum Pemberian Kuasa & Pendelegasian wewenang dalam kegiatan usaha Operasional Bank oleh Mitra Energy Training & Consulting, Pelatihan Pengembangan *Consumer Banking Business* & Casa oleh PT WYR solusi inovasi, Pelatihan *Trade Finance* oleh One Point Indonesia, Ujian *Level-4* Program Sertifikasi manajemen Risiko oleh BSMR, Pelatihan Pengelolaan Kinerja Lembaga Keuangan oleh ASBANDA, Seminar Nasional BPDSI & Penarikan undian tabungan Simpeda di Bandar Lampung oleh ASBANDA, *Assessment* Pejabat Eksekutif angkatan 2 oleh LPPI.

The Corporate Secretary has duties and responsibilities, among others;

- Developing the Bank's mission
- Mediators with Stakeholders such as regulators, investors and the public
- Maintaining the Bank's image as well
- Provide information disclosure

The Corporate Secretary of Bank Jatim has access to material and relevant information relating to the Company relating to information disclosure issues. Bank Jatim's Corporate Secretary is in charge of 3 (three) Subdivisions, namely Internal Communication Sub-Division, External Communication Sub-Division, and Investor Relations Sub-Division.

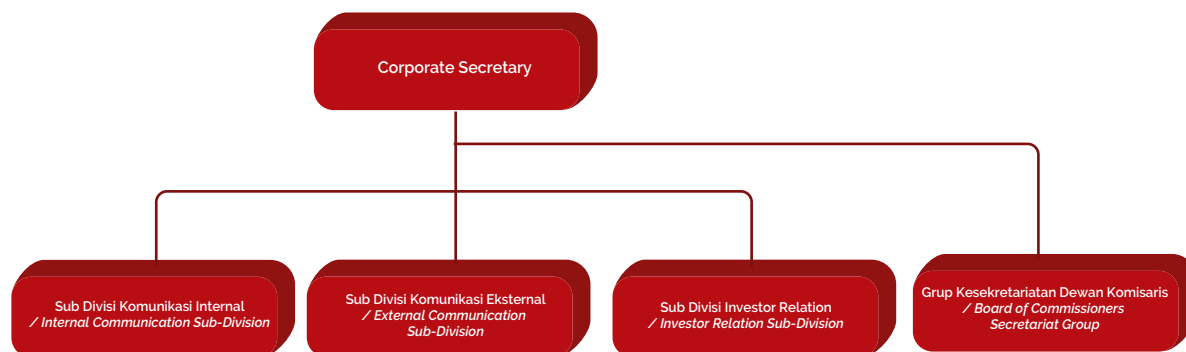
PROFILE OF CORPORATE SECRETARY

GLEMBOH PRIAMBODO

He was Born in Malang, March 15, 1970 and currently domiciles in Surabaya. He earned a Bachelor's degree (Law) from the University of Surabaya (UBAYA), a Bachelor's degree (Law) from the University of August 17 Surabaya (UNTAG), a Master (Management) from STIE ABIE Surabaya. Glemboh has been started his career at Bank Jatim since 2000 and assigned with various positions, including Branch Manager DR. Soetomo, Served as Corporate Secretary based on Directors Decree Number 057/384/DIR/HCT/KEP dated December 27, 2018.

He has participated in various training and workshops in the banking and legal field throughout his career, including, KYCP/AML Training in collaboration with Bank Indonesia & PPATK, Bank Role Training in Preventing and Eradicating (banking crimes, APU/PPT banking crimes) by PT. Cipta Bina Mandiri (CBM), Potential Corruption Workshop in Banking Operations activities with Bareskrim & Financial Service Authority by Swadharma Learning Center (SLC), Legal Aspects Workshop on Provision of Authority & Delegation of authority in Bank Operational business activities by Mitra Energy Training & Consulting, Consumer Banking Development Training Business & Casa by PT WYR innovation solutions, Trade Finance Training by One Point Indonesia, Level-4 Exam Risk Management Certification Program by BSMR, Financial Institution Performance Management Training by ASBANDA, BPDSI National Seminar & Simpeda savings draw in Bandar Lampung by ASBANDA, 2nd LPPI Executive Officer Assessment.





Sekretaris Perusahaan memegang peranan sentral dalam efektivitas jalur komunikasi dengan pihak eksternal khususnya publik, Pemegang Saham dan regulator dengan Bank Jatim. Setiap informasi dan konsep komunikasi yang akan disampaikan kepada pihak eksternal, dievaluasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Perusahaan yang dapat berkoordinasi dengan Divisi terkait untuk menjamin pencitraan dan menjaga reputasi Bank Jatim. Komunikasi intern dan ekstern bertujuan menjaga *image* perusahaan kepada *Stakeholder* serta penyampaian pesan yang terpadu melalui publikasi untuk mendukung visi dan misi perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham beserta penyusunan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Profil Perusahaan menjadi tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Dengan fungsi dan tanggung jawab yang cukup strategis tersebut, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Mengikuti perkembangan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan serta perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs perusahaan
 - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
 - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Corporate secretary plays a central role in creating effective communication channels with external parties, particularly for the public, Shareholders, and regulators with Bank Jatim. Every information and communication concept conveyance to external parties will be evaluated first by Corporate secretary whose able to coordinate with the associate Division to guarantee Bank Jatim excellent image and maintain its reputation. Furthermore, the internal and external communication aims to maintain the corporate image to stakeholders and deliver integrated messages through publications to support the vision and mission of the Company as well as to increase its value. The responsibility of Corporate secretary also includes the General Meeting of Shareholders implementation along with the preparation of the Annual Report, Sustainability Report, and Company Profile. With those strategic functions and responsibilities, Corporate secretary is directly responsible to the President Director.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Follow the development of regulations and legislation in force in the Capital Market field.
2. Provide input to the Directors and Board of Commissioners to comply with the provisions of the regulations and legislation in the Capital Market.
3. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance which includes:
 - disclosure of information to the public, including the availability of information on the company's website
 - submission of reports to the Financial Services Authority on time
 - implementation and documentation of the General Meeting of Shareholders
 - organization and documentation of the Directors and/or Board of Commissioners meetings; and
 - implementation of orientation programs for Directors and/or Board of Commissioners.

4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya
5. Mengevaluasi setiap informasi yang akan disampaikan ke eksternal dan menjamin pencitraan serta reputasi Bank yang terjaga
6. Membangun dan menjaga *image* yang baik bagi Bank untuk mendukung dan menjaga nilai perusahaan agar selalu meningkat;

URAIAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN 2019

Pada tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi yang diemban sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 19 Juni 2019. Sejak IPO, penghitungan pemungutan suara dalam RUPS dilakukan dengan *scan barcode* yang diberikan kepada pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Stiker berbarcode tersebut berisi identitas pemegang saham dan jumlah suaranya, sehingga proses pemungutan suara bisa berjalan dengan cepat dan baik.
2. Menyelenggarakan *Analyst Meeting* dan *Press Conference* di Jakarta sebanyak 4 kali untuk memaparkan kinerja per triwulan. *Analyst Meeting* diselenggarakan dengan mengundang para analis Perusahaan Sekuritas, manager investasi *Asset Management*, manager investasi Dana Pensiun, manager investasi Perusahaan Asuransi, dan *Fund Manager* lainnya. *Press Conference* diselenggarakan setelah *Analyst Meeting*, mengundang wartawan media nasional.
3. Melakukan *Public Expose Live* 2019 bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2019 di Jakarta, kegiatan ini ditayangkan secara *live* melalui aplikasi webinar zoom dan rekamannya dapat ditonton kembali melalui channel youtube Indonesia Stock Exchange yang dapat diakses oleh publik.
4. Menyelenggarakan *Local Non Deal Roadshow* tanggal 16-17 September 2019 dengan *asset management* dan *fund manager* klien dari perusahaan sekuritas ternama di Jakarta.
5. Melakukan pengembangan situs perusahaan terkait informasi perusahaan kepada *stakeholders*. Pengembangan yang dilakukan seperti penambahan rasio-rasio finansial yang lazim digunakan oleh investor, kondisi makro dan mikro, perkembangan regulator, dan perbandingan dengan industri. *Stakeholders* terutama investor lokal dapat mengakses informasi perusahaan dengan mudah untuk pengambilan keputusan dalam memiliki saham perusahaan.
6. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Menyampaikan Keterbukaan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Direksi dan Komisaris membuat risalah rapat dan mengadministrasikannya.

4. Serve as a liaison between the Issuer or Public Company and the shareholders of the Issuer or Public Company, the Financial Services Authority, and other stakeholders
5. Evaluate every information to be submitted externally and ensure the image and reputation of the Bank is maintained
6. Build and maintain a good image for the Bank to support and maintain the value of the company so that it always increases;

DESCRIPTION OF DUTY IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY IN 2019

In 2019, the Corporate Secretary has carried out his duties and responsibilities in accordance with the functions carried as follows:

1. Convened an Annual GMS for Fiscal Year 2018 on April 26, 2019 and Extraordinary GMS on June 19, 2019. Since the IPO, vote counting at the GMS has been carried out by scanning the barcode of stickers given to shareholders present at the GMS. The barcode sticker contains the identity of the shareholders and the number of votes, so that the voting process can run quickly and well.
2. Held Analyst Meetings and Press Conferences in Jakarta 4 times to present quarterly performance. The Analyst Meeting is organized by inviting Securities Company analysts, Asset Management investment managers, Pension Fund investment managers, Insurance Company investment managers, and other Fund Managers. The Press Conference was held after the Analyst Meeting, inviting national media reporters.
3. Held 2019 Public Expose in collaboration with the Indonesia Stock Exchange on August 20, 2019 in Jakarta, this activity is broadcast live through the zoom webinar application and the recordings can be watched again through the Indonesia Stock Exchange youtube channel which can be accessed by the public.
4. Held a Local Non Deal Roadshow on September 16-17, 2019 with asset management and client fund managers from well-known securities companies in Jakarta.
5. Developed company website related to company information to stakeholders. The development carried out such as the addition of financial ratios that are commonly used by investors, macro and micro conditions, the development of regulators, and comparison with industry. Stakeholders, especially local investors, can easily access company information for decision making in owning company shares.
6. Submitted periodic reports and incidental reports to regulators in accordance with applicable regulations.
7. Submitted information disclosure in accordance with applicable regulations.
8. Held Board of Commissioners meetings, Board of Directors meetings, and Board of Directors and Board of Commissioners meetings, making minutes of meetings and administering them.

9. Mengadministrasikan, mendistribusikan serta menindak lanjuti surat masuk dan keluar. Pada tahun 2019 surat masuk sebanyak 6.872 surat dengan rincian 3.786 kepada Direksi, 149 surat kepada Komisaris, 1.977 surat dari instansi lain, dan 960 surat dari cabang. Surat keluar sebanyak 2.932 surat dengan rincian 531 surat dari Direksi, 289 surat dari Komisaris, 1.109 surat kepada instansi lain, dan 1.003 surat kepada cabang.
10. Menyelenggarakan *media gathering* sebanyak 3 kali dengan mengundang media terkemuka yang berkantor di Jawa Timur.
11. Menyelenggarakan Marketainment, suatu rangkaian acara *launching* bjtm connect yang terletak di Tunjungan Plaza 6 lantai 3. Marketainment ini merupakan kolaborasi dari pemberdayaan UKM binaan Bank Jatim yang diramaikan oleh kegiatan *workshop*, seminar, serta hiburan artis nasional.

9. Administered, distributed and followed up on incoming and outgoing mail. In 2019 there were 6,872 letters with 3,786 letters to the Directors, 149 letters to the Commissioners, 1,977 letters from other agencies, and 960 letters from branches. Outgoing letters were 2,932 letters with details of 531 letters from the Directors, 289 letters from Commissioners, 1,109 letters to other agencies, and 1,003 letters to branches.
10. Organized media gatherings 3 times by inviting leading media with offices in East Java.
11. Organized Marketainment, a series of launching bjtm connect events located at Tunjungan Plaza 6th floor 3. This marketainment is a collaboration of empowering SMEs fostered by Bank Jatim which is enlivened by workshops, seminars, and national artist entertainment activities.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal dan Lokasi
1	Assessment Pejabat Eksekutif Angkatan 2	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	27 Januari 2019 di Jakarta
2	Corporate Culture Strategic Engagement Workshop for Change Leader Bank Jatim & Change Agent Breakthrough Workshop	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	17 Juni 2019 di Surabaya
3	The Asia Sustainability Reporting Rating ASRRAT 2019	National Center for Sustainability Reporting (NCSR)	23 November 2019 di Jakarta
4	CG Officer Corporate Communication batch 2	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	4-5 Desember 2019 di Jakarta

COMPETENCY DEVELOPMENT OF CORPORATE SECRETARY

No	Activity	Organizer	Date and Venue
1	Assessment for Executive Officers Batch 2	Indonesia's Banking Development Institute (LPPI)	January 27, 2019 in Jakarta
2	Corporate Culture Strategic Engagement Workshop for Change Leader Bank Jatim & Change Agent Breakthrough Workshop	Indonesian Bankers Association (IBI)	June 17, 2019 in Surabaya
3	The Asia Sustainability Reporting Rating ASRRAT 2019	National Center for Sustainability Reporting (NCSR)	November 23, 2019 in Jakarta
4	CG Officer Corporate Communication batch 2	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	December 4-5, 2019 in Jakarta

KOMUNIKASI INTERNAL

Bank Jatim juga memelihara jaringan komunikasi intern antar manajemen Bank dan pegawai serta memastikan implementasi komunikasi berjalan dengan baik dalam organisasi. Memperhatikan hal tersebut Bank Jatim mengembangkan beberapa jalur komunikasi antara lain melalui Majalah Bank Jatim, portal intranet sumber daya manusia dan media informasi internal Bank Jatim yang memberikan informasi kepada seluruh pegawai Bank Jatim tentang berbagai kegiatan perusahaan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Komunikasi internal mempunyai tujuan yaitu :

- Pertanggungjawaban penyelenggaraan internal;
- Pengajuan rancangan pidato, makalah, bahan seminar Direksi dan materi RUPS;
- Pengajuan penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank dan *Company profile*;
- Pengajuan tata acara dan konsep rapat Direksi, upacara, acara Bank dan pertemuan lainnya;

INTERNAL COMMUNICATION

Bank Jatim also maintains an internal communication network between the Bank's management and employees and ensures the implementation of the communication goes well within the organization. Considering this, Bank Jatim develops several communication channels such as through Bank Jatim Magazine, human resource intranet portal and internal information media of Bank Jatim that provide information to all employees of Bank Jatim about various company activities and information needed in the implementation of daily activities. Internal communication has the purpose of:

- Accountability internal organization;
- Submission of draft speeches, papers, seminars of Board of Directors and materials of GMoS and RUPO;
- Submissions preparation Book Annual Report Bank and Company profile;
- Submission of meeting procedures and concepts Board of Directors, ceremonies, Bank events and other meetings;

KOMUNIKASI EKSTERNAL (UNIT PUBLIC RELATION DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Bank Jatim menggunakan berbagai saluran komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk membangun *image* perusahaan baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media *display* dan lainnya. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perusahaan, Bank Jatim memiliki *corporate website* yang dapat diakses melalui www.bankjatim.co.id yang juga berfungsi sebagai portal layanan. Dalam *website* Bank Jatim, dapat ditemui informasi mendetail tentang Bank Jatim mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi & misi, manajemen, jaringan, prestasi, produk dana, produk kredit dan layanan Bank Jatim baik untuk konvensional maupun syariah. Selain itu, dalam *website* juga memuat informasi penyaluran CSR dan informasi/berita terkini mengenai Bank Jatim.

Sebagai informasi kepada masyarakat luas, secara reguler Bank Jatim juga ikut serta pada *event* yang dilakukan pihak lain dan mendistribusikan siaran *pers* ke media cetak dan elektronik untuk menginformasikan kegiatan dan produk Bank Jatim. Bank Jatim juga menginformasikan beberapa kegiatan penting dan laporan publikasi triwulanan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan media cetak dan elektronik (internet). Bank Jatim juga menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal melalui:

Facebook : bank jatim
Twitter : @bank_jatim
Instagram : bankjatim
Youtube : bank jatim

SUB DIVISI INVESTOR RELATION

Dalam menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pengaku kepentingan, maka tim Investor Relation Bank Jatim berhubungan langsung dengan investor, analis, serta pemegang saham untuk memaparkan kinerja perusahaan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Investor Relation sebagai berikut:

1. Menyusun kinerja Bank Jatim setiap bulan sesuai dengan laporan keuangan bulanan perusahaan seperti; informasi ekonomi makro, dan mikro, informasi posisi keuangan perusahaan berdasarkan neraca, rasio, persentase, rencana dan strategi bisnis serta informasi saham.
2. Mengelola keterbukaan informasi dengan investor dan analis.
3. Mengkoordinir, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - *One on One Meeting*
Kegiatan ini dilaksanakan untuk membina hubungan baik dengan calon investor, investor dan analis.
 - *Analyst Meeting*

EXTERNAL COMMUNICATION

Bank Jatim utilize a variety of communication channels, both to internal and external parties aims to create an excellent corporate image through print media, electronic media, broadcast media, display media, and others. To facilitate the public in obtaining the latest information about the company, Bank Jatim establish a corporate website that can be easily accessed through www.bankjatim.co.id which also functions as a service portal. In the Bank Jatim website, you can find a piece of detailed information about Bank Jatim, such as history, organizational structure, vision & mission, management, networks, achievements, fund products, credit products, and Bank Jatim services for conventional and sharia business. Also, the website contains information on CSR distribution and up-to-date information/news about Bank Jatim.

To convey the information to the public, Bank Jatim regularly participates in events conducted by other parties and also distribute press releases in print and electronic media form to inform the Bank Jatim activities and products. Not to mention, Bank Jatim convey important activities and reports on quarterly publications to the society through a collaboration with print and digital media. Bank Jatim also utilize social media as a platform to communicate better with external parties through:

Facebook : bank jatim
Twitter : @bank_jatim
Instagram : bankjatim
Youtube : bank jatim

INVESTOR RELATION SUB-DIVISION

In maintaining the trust of shareholders and stakeholders, the Bank Jatim Investor Relations team is in direct contact with investors, analysts and shareholders to explain the company's performance. The activities carried out by Investor Relations are as follows:

1. Arrange the performance of Bank Jatim every month in accordance with the company's monthly financial statements such as; macroeconomic and micro information, information on the company's financial position based on balance sheet, ratio, percentage, business plan and strategy as well as stock information.
2. Manage information disclosure with investors and analysts.
3. Coordinating, evaluating, and providing recommendations in the implementation of activities include:
 - *One on One Meeting*
This activity is carried out to foster good relations with potential investors, investors and analysts.
 - *Analyst Meeting*

Kegiatan untuk memaparkan kinerja perusahaan triwulanan dengan para analis yang bertujuan menyampaikan informasi terkini mengenai kinerja, strategi dan pencapaian yang telah dicapai oleh Bank Jatim.

- *Conference Call*

Panggilan telepon yang dilakukan baik atas permintaan investor atau inisiatif Investor Relation.

- *Site Visit*

Kegiatan yang dilakukan atas permintaan para investor untuk melakukan kunjungan ke cabang-cabang guna melihat operasional Bank Jatim.

- *Roadshow*

Kegiatan menambah minat investor asing masuk dalam negeri melalui saham Bank Jatim

4. Menyusun, mengelola, dan melaksanakan penyusunan laporan publikasi mingguan, bulanan, triwulanan, semester dan tahunan.

KINERJA INVESTOR RELATION

Pada tahun 2019 berjalan, adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim *Investor Relation* sebagai berikut:

1. Kegiatan *Analyst Meeting*, tahun 2019 dilangsungkan 4 (empat) kali dalam setahun

Tanggal	Lokasi	Topik
25 Januari 2019	Mandarin Oriental Hotel Jakarta	<i>Analyst Meeting & Press Conference FY 2018 Audited</i>
11 April 2019	Ritz Carlton Pacific Place Jakarta	<i>Analyst Meeting & Press Conference 3M19</i>
24 Juli 2019	Ritz Carlton Pacific Place Jakarta	<i>Analyst Meeting & Press Conference 1H19</i>
16 Oktober 2019	Ritz Carlton Pacific Place Jakarta	<i>Analyst Meeting & Press Conference 9M19</i>

2. Komunikasi dengan para analis yakni *One on One Meeting*, *Conference Call* dan *Non Deal Roadshow*.
3. Mengikuti penyelenggaraan *Public Expose Live* 2019 (PubEx) setahun sekali untuk memaparkan kinerja, kendala, Strategi, dan Proyeksi Keuangan Bank Jatim pada tanggal 20 Agustus 2019 bertempat di PT Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan/*event Capital Market* untuk meningkatkan *supply* dan *demand* serta meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat khususnya di Jawa Timur pada tanggal 26 April 2019 bertempat di Dyandra Convention Center Surabaya.
5. Keterbukaan Informasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Investor Relation pada tahun 2019

Activities to describe the company's quarterly performance with analysts who aim to convey the latest information about the performance, strategies and achievements that have been achieved by Bank Jatim.

- *Conference Call*

Phone calls made either at the request of the investor or the Investor Relations initiative.

- *Site Visit*

The activity carried out at the request of investors to visit branches to see the operations of Bank Jatim.

- *Roadshow*

The activity increased the interest of foreign investors entering the country through Bank Jatim shares

4. Develop, manage, and carry out the preparation of weekly, monthly, quarterly, semester and annual publication reports.

INVESTOR RELATIONS PERFORMANCE

In 2019, the activities carried out by the Investor Relations Team are as follows:

1. Analyst Meeting activities, in 2019, take place 4 (four) times a year

Date	Location	Topic
January 25, 2019	Mandarin Oriental Hotel Jakarta	<i>Analyst Meeting & Press Conference FY 2018 Audited</i>
April 11, 2019	Ritz Carlton Pacific Place Jakarta	<i>Analyst Meeting & Press Conference 3M19</i>
July 24, 2019	Ritz Carlton Pacific Place Jakarta	<i>Analyst Meeting & Press Conference 1H19</i>
October 16, 2019	Ritz Carlton Pacific Place Jakarta	<i>Analyst Meeting & Press Conference 9M19</i>

2. Communication with analysts namely *One on One Meeting*, *Conference Call* and *Non Deal Roadshow*.
3. Following the holding of *Public Expose Live* 2019 (PubEx) once a year to explain the performance, constraints, strategies and financial projections of the Bank of East Java on August 20, 2019 at PT Bursa Efek Indonesia, Indonesia Stock Exchange Building.
4. Participate in *Capital Market* activities/events to increase supply and demand and increase literacy and inclusion of people especially in East Java on April 26, 2019 at the Dyandra Convention Center in Surabaya.
5. Information Disclosure which has been disclosed by the Investor Relations Team in 2019

NO	Keterbukaan Informasi	Tanggal
1	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	25 Januari 2019
2	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2018	20 Maret 2019
3	Pengumuman Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu	20 Maret 2019
4	Rencana Perseroan Untuk Melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback)	20 Maret 2019
5	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2018	04 April 2019
6	Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2018	04 April 2019
7	Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2018	04 April 2019
8	Biodata Calon Pengurus Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2018	26 April 2019
9	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2018	30 April 2019
10	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	13 Mei 2019
11	Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	28 Mei 2019
12	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	28 Mei 2019
13	Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	28 Mei 2019
14	Biodata Calon Pengurus Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	18 Juni 2019
15	Risalah Rapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	20 Juni 2019
16	Ringkasan Risalah Rapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	20 Juni 2019
17	Rencana Pelaksanaan Pengalihan Saham Yang Telah dibeli Kembali melalui Program <i>Long Term Incentive</i> 2018/2019	16 Juli 2019
18	Pengumuman Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	25 Juli 2019
19	Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	13 September 2019
20	Pengumuman Pendaftaran Calon Direktur Utama & Calon Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Sayriah	17 Desember 2019
21	Perubahan Susunan Komite Audit	26 Desember 2019
22	Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Calon Direktur Utama & Calon Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Sayriah	26 Desember 2019

NO	Information Disclosure	Date
1	Capital Addition without Pre-Emptive Rights	January 25, 2019
2	Announcement of Annual General Meeting of Shareholders of 2018 Fiscal Year	March 20, 2019
3	Announcement of Results of Capital Addition Implementation without Pre-emptive Rights	March 20, 2019
4	Corporate Plans for Share Buyback	March 20, 2019
5	Summons of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of 2018 Fiscal Year	April 4, 2019
6	Power of Attorney to Attend the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of 2018 Fiscal Year	April 4, 2019
7	Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of 2018 Fiscal Year	April 4, 2019
8	Résumé of the Prospective Management of the Bank in the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of 2018 Fiscal Year	April 26, 2019
9	Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of 2018 Fiscal Year	April 30, 2019
10	Announcement of 2018 Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	May 13, 2019
11	Agenda for the 2018 Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	May 28, 2019
12	Summons of the 2018 Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	May 28, 2019
13	Power of Attorney to Attend the 2018 Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	May 28, 2019
14	Résumé of the Prospective Management of the Bank in the 2018 Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	June 18, 2019
15	Minutes of the 2018 Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	June 20, 2019
16	Summary of Minutes of the 2018 Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	June 20, 2019
17	Plans for the Implementation of Transfer of Shares from Buyback Action through the Long-Term Incentive Program 2018/2019	July 16, 2019
18	Announcement of Capital Addition without Pre-Emptive Rights	July 25, 2019
19	Results of Capital Addition Implementation without Pre-emptive Rights	September 13, 2019
20	Announcement on the Registration of Prospective President Director and Prospective Consumer, Retail, and Sharia Business Director	December 17, 2019
21	Change in the Audit Committee's Composition	December 26, 2019
22	Announcement of the Extension of Registration of Prospective President Director and Prospective Consumer, Retail, and Sharia Business Director	December 26, 2019



KETERBUKAAN INFORMASI

INFORMATION DISCLOSURE

DAFTAR KETERBUKAAN INFORMASI BANK JATIM

Laporan Berkala

Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
Laporan Registrasi Pemegang Efek	BEI & OJK	Bulanan	12
Laporan Hutang Valuta Asing	OJK	Bulanan	12
Laporan Tahunan	OJK	Tahunan	1

Laporan Insidentil

Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
28 Januari 2019	058/071/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Keterbukaan Informasi Mengenai Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
07 Februari 2019	058/051/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka an. Rudie Hardiono
19 Februari 2019	058/168/CSE/IVR/Srt	BEI	Penjelasan Perubahan Lebih Dari 20% Total Aktiva dan Total Kewajiban
19 Februari 2019	058/068/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka an. Rudie Hardiono
01 Maret 2019	058/083/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka an. Su'udi
11 Maret 2019	058/091/DIR/CSE/Srt	OJK	Pemberitahuan RUPST TB 2018
20 Maret 2019	058/265/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Pengumuman Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)
20 Maret 2019	058/104/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPST TB 2018
01 April 2019	058/121/DIR/CSE/Srt	OJK	Perubahan Mata Acara RUPST TB 2018
04 April 2019	058/125/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPST TB 2018
30 April 2019	058/167/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Ringkasan Risalah dan Bukti Iklan Hasil Pelaksanaan RUPST TB 2018
06 Mei 2019	058/169/DIR/CSE/Srt	OJK	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPS LB 2019
13 Mei 2019	058/183/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPS LB 2019
24 Mei 2019	058/449/CSE/IVR/Srt	KSEI	Nomor Rekening Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

LIST OF INFORMATION DISCLOSURE OF BANK JATIM

Regular Report

Type of Report	Recipient	Reporting Period	Total
Securities Holder Registration Report	IDX	Monthly	12
Foreign Exchange Debt Report	IDX & OJK	Monthly	12
Annual Report	IDX & OJK	Yearly	1

Incidental Report

Date	Letter Number	Recipient	Perihal
January 28, 2019	058/071/CSE/IVR/Srt	OJK	Submission of Information Disclosure on Additional Capital of Public Company without Pre-emptive Rights (HMETD)
February 7, 2019	058/051/DIR/CSE/Srt	OJK	Report of Ownership or Each Change of Ownership of Shares of Public Company on behalf of Rudie Hardiono
February 19, 2019	058/168/CSE/IVR/Srt	IDX	Description on Change of More Than 20% of Total Assets and Total Liabilities
February 19, 2019	058/068/DIR/CSE/Srt	OJK	Report of Ownership or Each Change of Ownership of Shares of Public Company on behalf of Rudie Hardiono
March 1, 2019	058/083/DIR/CSE/Srt	OJK	Report of Ownership or Each Change of Ownership of Shares of Public Company on behalf of Su'udi
March 11, 2019	058/091/DIR/CSE/Srt	OJK	Announcement of AGMS of 2018 Fiscal Year
March 20, 2019	058/265/CSE/IVR/Srt	OJK	Submission of Proof of Advertisement on Additional Capital Implementation without Pre-emptive Rights (PMTHMETD)
March 20, 2019	058/104/DIR/CSE/Srt	OJK	Submission of Proof of Advertisement on Announcement of AGMS of 2018 Fiscal Year
April 1, 2019	058/121/DIR/CSE/Srt	OJK	Change in the Agenda of AGMS of 2018 Fiscal Year
April 4, 2019	058/125/DIR/CSE/Srt	OJK	Submission of Proof of Advertisement for Summons of AGMS of 2018 Fiscal Year
April 30, 2019	058/167/DIR/CSE/Srt	OJK	Submission of Summary of Minutes and Proof of Advertisement of the Resolutions of AGMS of 2018 Fiscal Year
May 6, 2019	058/169/DIR/CSE/Srt	OJK	Announcement of Plans for the Convention of EGMS of 2019 Fiscal Year
May 13, 2019	058/183/DIR/CSE/Srt	OJK	Submission of Proof of Advertisement on Announcement of EGMS of 2019 Fiscal Year
May 24, 2019	058/449/CSE/IVR/Srt	KSEI	Bank Account Number of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

24 Mei 2019	058/450/ CSE/IVR/ Srt	KSEI	Instruksi Pendistribusian Dividen Tunai atas saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
24 Mei 2019	058/234/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Penyampaian Berita Acara RUPST 2018
28 Mei 2019	058/238/ CSE/KIN/ Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan RUPS LB 2019
21 Juni 2019	058/256/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS LB 2019
16 Juli 2019	058/282/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Penyampaian Berita Acara RUPS LB 2019
25 Juli 2019	058/599/ CSE/IVR/ Srt	OJK	Penyampaian Keterbukaan Informasi Mengenai Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
30 Juli 2019	058/306/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Tanggapan Hasil Penelaahan atas Laporan Tahunan 2018
30 Agustus 2019	058/342/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan a.n Ferdian Timur Satyagraha
04 September 2019	058/347/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan a.n Rizyana Mirda
12 September 2019	058/358/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan a.n Hadi Santoso
13 September 2019	058/599/ CSE/IVR/ Srt	OJK	Penyampaian Keterbukaan Informasi Mengenai Hasil Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
28 Oktober 2019	058/441/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
08 November 2019	058/459/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Informasi Terkait Pengendali Perusahaan Terbuka
20 November 2019	058/250/ DK/Srt	OJK	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Pembatalan Pengangkatan Direktur Bank Jatim Yang Tidak Disetujui Otoritas Jasa Keuangan
27 Desember 2019	058/1103/ CSE/IVR/ Srt	OJK	Penyampaian Surat Keputusan Perubahan Komite Audit

May 24, 2019	058/450/ CSE/IVR/ Srt	KSEI	Instruction for Cash Dividend Distribution for the Shares of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
May 24, 2019	058/234/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Submission of Minutes of AGMS 2018
May 28, 2019	058/238/ CSE/KIN/ Srt	OJK	Submission of Proof of Advertisement of EGMS 2019
June 21, 2019	058/256/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Submission of Summary of Minutes of EGMS 2019
July 16, 2019	058/282/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Submission of Minutes of EGMS 2019
July 25, 2019	058/599/ CSE/IVR/ Srt	OJK	Submission of Information Disclosure on Additional Capital of Public Company without Pre-emptive Rights (HMETD)
July 30, 2019	058/306/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Response to the Result of Review of 2018 Annual Report
August 30, 2019	058/342/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Report of Ownership or Each Change of Ownership of Shares of Public Company on behalf of Ferdian Timur Satyagraha
September 4, 2019	058/347/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Report of Ownership or Each Change of Ownership of Shares of Public Company on behalf of Rizyana Mirda
September 12, 2019	058/358/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Report of Ownership or Each Change of Ownership of Shares of Public Company on behalf of Hadi Santoso
September 13, 2019	058/599/ CSE/IVR/ Srt	OJK	Submission of Information Disclosure on the Results of Additional Capital of Public Company without Pre-emptive Rights (HMETD)
October 28, 2019	058/441/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Results of Fit-and-Proper Test
November 8, 2019	058/459/ DIR/CSE/ Srt	OJK	Information on Controlling Shareholders of Public Company
November 20, 2019	058/250/ DK/Srt	OJK	Convention of General Meeting of Shareholders regarding the Revocation of Appointment of Bank Jatim's Director Due to Disproval from the Financial Services Authority
December 27, 2019	058/1103/ CSE/IVR/ Srt	OJK	Submission of Decree on the Change in Audit Committee's Composition

AUDITOR EKSTERNAL INDEPENDEN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim untuk tahun buku 2018 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan objektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

INDEPENDENT EXTERNAL AUDITOR

Based on the Regulation of Financial Services Authority No. 32/POJK.03/2016 concerning the Amendments to Regulation of Financial Services Authority No. 6/POJK.03/2015 concerning the Transparency and Publication of Bank Reports, audits of Bank Jatim Financial Statements for fiscal year 2019 have been conducted by independent, competent, professional, and objective public accountants in accordance with the Professional Standards of the Public Accountant, as well as the work agreement and scope of the audit that has been determined.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Bank Jatim selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan manajemen Bank Jatim untuk dapat meminimalisasi kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan biaya audit telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 serta keputusan RUPS Tahunan. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (partner in charge) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Audit laporan keuangan Bank Jatim yang berakhir 31 Desember 2019 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No.058/382/PKU/AKT/GPL/SRT tanggal 1 Oktober 2019 kepada KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan biaya audit sebesar Rp960 juta sudah termasuk PPN. Jasa Kantor Akuntan Publik kepada Bank meliputi:

1. Schedule pemeriksaan termasuk jadwal pemeriksaan interim;
2. Resume hasil pemeriksaan cabang-cabang, minimal sesuai PBI no.14/14/PBI/2012 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank (termasuk Unit Usaha Syariah);
3. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan angka perbandingan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019;
4. Laporan *Management Letter* (ML) dalam bahasa Indonesia;
5. Laporan Auditor Independen atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern sesuai Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 62 dalam bahasa Indonesia.

KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pembahasan tentang cakupan audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Informasi detail mengenai besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan KAP pada tahun buku terakhir sebagai berikut:

Tahun Buku/ Year Book	KAP/ Public Accounting Firm	Partner/ Partner	Biaya (juta rupiah)/ Fee (Million Rupiah)
2010	Purwanto, Suherman&Surja (Ernst & Young)	Drs. Hari Purwanto	675
2011	Purwanto, Suherman&Surja (Ernst & Young)	Drs. Hari Purwanto	795
2012	Purwanto, Suherman&Surja (Ernst & Young)	Sinarta	675
2013	Purwanto, Suherman&Surja (Ernst & Young)	Sinarta	900
2014	Purwanto, Suherman&Surja (Ernst & Young)	Sinarta	980
2015	Hendrawinata Eddy Siddharta&Tanzil	Rita Susilowati	900
2016	Hendrawinata Eddy Siddharta&Tanzil	Rita Susilowati	840
2017	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Ary Daniel H	570
2018	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Gideon	940
2019	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Gideon	960

In order for the audit process to be in accordance with the Professional standards of Accountants, work agreements, the scope of the audits, and could be completed in a timely manner, we routinely conduct meetings to discuss several significant matters. Bank Jatim always strives to improve the communication between the Public Accountant, Audit Committee and Management of Bank Jatim in order to minimize the obstacles that may occur during the audit process.

The appointment of the Public Accounting Firm and audit costs are in accordance with POJK No. 13/POJK.03/2017 and SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 and the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders. The Public Accounting Firm and Public Accountant (partner in-charge) are registered within the Financial Services Authority.

Audit of Bank Jatim's financial statements for the year ended on December 31st, 2019 is carried out based on Work Order (SPK) No. 058/382/PKU/AKT/GPL/SRT dated October 1, 2019 to KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan with audit fee of Rp960 million (including the value-added tax). Services rendered by the Public Accounting Firm to the Bank cover:

1. Examination schedule including interim examination schedule;
2. Resume of the results of branch checks, at least according to PBI no.14/14/PBI/2012 concerning Transparency of Bank Financial Conditions (including Sharia Business Units);
3. Independent Auditor's Report on the Financial Statements for the period ending December 31st, 2019 with comparative figures for the period ending December 31st, 2019;
4. Management Letter (ML) report in Indonesian;
5. Independent Auditor's Report on compliance with laws and regulations and internal control in accordance with Statement of Audit Standards (PSA) No. 62 in Indonesian.

KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan has communicated with the Financial Services Authority (OJK) for discussion on audit coverage of the Bank Jatim Financial Statements for the year ended on December 31st, 2019.

Detailed information regarding the fee for each type of service provided by the KAP in the last fiscal year is as follows:

**JASA LAIN YANG DILAKUKAN AKUNTAN
DAN KAP SELAIN JASA AUDIT**

Pada tahun 2019, tidak ada jasa lain yang dilakukan Akuntan dan KAP selain jasa audit laporan keuangan 2019.

**OTHER SERVICES GIVEN BY THE ACCOUNTANT
AND KAP ASIDE FROM AUDIT SERVICE**

There were no audit services given by the Accountant KAP in 2019 aside from audit of the 2019 financial statements.

MANAJEMEN RISIKO**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO**

Manajemen Risiko adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan risiko dengan melalui suatu proses untuk identifikasi, pengukuran, evaluasi dan monitoring terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko, kerugian yang mungkin terjadi diharapkan dapat dimitigasi dan diminimalisir dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum, Bank telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Bank Nomor 056/182/DIR/MJR/KEP tanggal 7 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko. Penerapan manajemen risiko di Bank mencakup 4 (empat) pilar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimaksud, yaitu:

**1. PENGAWASAN AKTIF DIREKSI
DAN DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko secara periodik. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Dewan Komisaris digunakan sebagai acuan oleh Direksi untuk menjalankan tujuan perusahaan tersebut dan telah mempertimbangkan toleransi risiko serta dampaknya terhadap permodalan, menjabarkan serta mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko kepada seluruh Satuan Kerja terkait serta melakukan evaluasi implementasinya.

**2. KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN
PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO
SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO**

Dalam tata kelola yang sehat (*good governance*), salah satu prinsipnya adalah tata kelola tanggung jawab (*responsibility*) atas kewenangan petugas maupun pejabat Bank untuk melakukan suatu aktivitas kegiatan usaha perbankan pada suatu unit kerja. Untuk itu dalam rangka mitigasi risiko (*risk mitigation*) suatu kegiatan usaha pada suatu unit kerja dan dalam rangka penerapan pengendalian intern yang baik (*best practice*), perlu adanya penetapan limit dari masing-masing jenis kegiatan usaha, agar risiko yang timbul dapat diminimalisir.

Penetapan limit terdiri dari limit secara keseluruhan (*exposure limit*), limit individual (*individual limit*), limit counterparty (*counterparty limit*), limit per jenis risiko dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

RISK MANAGEMENT**RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION**

Risk Management is a controlling risk activity through the process of identifying, measuring, evaluating and monitoring to a portfolio in estimating potential losses that might occur. Therefore, with the application of risk management, those potential losses that might occur it is expected to bring proper mitigation and minimization.

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016, concerning Application of Risk Management for Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter Number 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016, concerning Application of Risk Management for Commercial Banks, the Bank had a risk management policy as stipulated by the Decree of the Bank's Director Number 056/182/DIR/MJR/KEP dated September 7, 2017, concerning the Implementing Risk Management Policies Guidelines. The application of risk management at the Bank includes four pillars aligned with the relevant laws and regulations, particularly:

**1. ACTIVE SUPERVISION OF THE BOARD OF
DIRECTORS AND COMMISSIONERS**

The Board of Commissioners and Directors grant the approval as well as evaluate the risk policies and strategies actively and periodically. Conducted by the Board of Commissioners, the establishment of policies and strategies functions as a reference for the Board of Directors to conduct out the Company's objective and that has estimated risk tolerance and its impact on capital, informing and communicating the risk policies and strategies and evaluating its implementation to all related work units.

**2. ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT POLICIES AND
PROCEDURES AND RISK LIMIT DETERMINATION**

In implementing good corporate governance, one of the governance principles is responsible for the authority of the Bank officers and officials to conduct out operational banking business in a work unit. Therefore, to mitigate operational business risk in a work unit also to utilize excellent internal control (*best practice*), it is necessary to determine the business limit of each type so that the Company can minimize the arising risk.

The limit determination consists of overall limits (*exposure limit*), individual limits, counterparty limits, limits per type of risk and limits per certain functional activity that holds risk exposure.

3. KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Bank telah mengukur dan memantau secara rutin dengan mempertimbangkan berbagai komponen risiko dan telah disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu kepada Komite Manajemen Risiko/Direksi.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Faktor komposit penilaian Tingkat Kesehatan Bank terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu:

- Profil Risiko (*Risk Profile*);
- Tata Kelola (GCG);
- Rentabilitas (*Earnings*); dan
- Permodalan (*Capital*).

Penentuan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) dengan mempertimbangkan unsur *judgement*. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan di masa yang akan datang, sehingga Bank diharapkan mampu mendeteksi secara dini akar permasalahan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank sehingga dapat mencerminkan kondisi Bank dengan lebih baik. Selain itu, penilaian Tingkat Kesehatan Bank juga telah memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor-faktor penilaian yaitu Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor.

4. SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MENYELURUH

Bank memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja yang menangani manajemen risiko. Di dalam organisasi yang dimiliki, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Unit Kerja Operasional (*business unit*) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian. Hanya pejabat yang ditunjuk saja yang memiliki wewenang untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko. Kerangka pengelolaan risiko dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kemampuannya berfungsi sesuai standar yang ditetapkan dan memantau tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan regulator.

ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Organisasi dalam pengelolaan manajemen risiko di Bank dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko, yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Untuk membantu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Bank telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR),

3. ADEQUACY OF RISK IDENTIFICATION, MEASUREMENT, MONITORING AND CONTROL PROCESS AS WELL AS RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

The risk control policy guideline has provided an adequate reference for identifying and measuring risk process. Bank Jatim has measured and monitored various risk components and has been accurately prepared with a well-scheduled information conveyance to the Risk Management Committee/Directors regularly.

Based on the Financial Services Authority Circular Number 14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017, concerning the Evaluation of Commercial Banks Soundness Level Rating, the composite factor consists of four evaluation components, namely:

- Risk Profile;
- GCG
- Rentability (Earnings); and
- Capital

The composite ranking of Soundness Level Rating uses a risk approach well-known as Risk-Based Bank Rating by considering the element of judgment. Besides, this accomplished by identifying internal and external factors which potentially can increase risk or affect the current or future Bank's financial performance, so Bank Jatim capability is expected to detect the root causes early and take preventive and corrective measures effectively and efficiently.

The used parameters or indicators also take into account the characteristics and complexity of Bank Jatim business in each assessment factor aims a better impression of the Bank condition. Not to mention, the Soundness Level Rating assessment consider the accounting materiality and significance of the assessment factors, particularly; risk profile, corporate governance, rentability and capital in summarizing an assessment results and determining the factor ranking.

4. COMPREHENSIVE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Bank has an organizational structure that clearly illustrates the limits of the authority and responsibilities of the Work Unit that handles risk management. Within the organization owned, there is a clear separation of functions between the Operational Work Unit (*business unit*) with the Work Unit that carries out control. Only appointed officials have the authority to access, modify and change risk measurement models. The risk management framework is evaluated periodically to ensure its ability to function according to established standards and monitor the follow-up of the regulator's audit findings.

RISK MANAGEMENT ORGANIZATION

Risk management organization is led by the Risk Management Director who responsible for risk management. To assist the Risk Management Director, Bank Jatim has established a Risk Management Unit which is the Company's Risk Management Division holds responsible to the Board of Directors conduct out an independent risk management evaluation function.

yaitu Divisi Manajemen Risiko Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Direksi, untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen.

PROSES EVALUASI RISIKO

Divisi Manajemen Risiko Perusahaan menyusun Laporan Evaluasi Risiko secara periodik, yaitu triwulanan, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut ke berbagai jenjang manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko Perusahaan telah melakukan koordinasi dengan Divisi Audit Intern untuk membahas hasil temuan audit sebagai bahan untuk evaluasi risiko dan meminimalisasi risiko yang terjadi. Hasil temuan tersebut diserahkan ke Divisi Manajemen Risiko Perusahaan untuk mitigasi sesuai dengan 8 (delapan) risiko dan diberikan solusi atas temuan tersebut.

PROFIL RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI BANK JATIM

LAPORAN PROFIL RISIKO BANK			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk			
Periode: Desember 2019			
JENIS RISIKO	INHERENT RISK	KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	KOMPOSIT
Risiko Kredit	Moderate	Fair	Peringkat 3
Risiko Pasar	LowMod	Fair	Peringkat 2
Risiko Likuiditas	LowMod	Fair	Peringkat 2
Risiko Operasional	Moderate	Fair	Peringkat 3
Risiko Hukum	LowMod	Fair	Peringkat 2
Risiko Strategik	LowMod	Fair	Peringkat 2
Risiko Kepatuhan	LowMod	Fair	Peringkat 2
Risiko Reputasi	LowMod	Fair	Peringkat 2
Nilai Komposit	LOWMOD	FAIR	Peringkat 2

Risiko-risiko yang melekat pada bisnis Bank Jatim sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah 8 (delapan) risiko yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Penjelasan mengenai masing-masing risiko tersebut sebagai berikut:

RISIKO KREDIT

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Pengelolaan risiko kredit di Bank Jatim sampai bulan desember tahun 2019 telah diupayakan secara optimal yang tercermin dari peringkat penilaian profil risiko kredit pada bulan desember 2019 adalah *moderate*. Adapun kualitas penerapan manajemen risiko kredit terkait pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, telah berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga

RISK EVALUATION PROCESS

The Bank's Risk Management Division prepares Risk Evaluation Reports on a periodic basis, i.e. quarterly, and submits these reports to various levels of management including to the Board of Commissioners, as well as to related external parties such as the Financial Services Authority. In addition, the Bank's Risk Management Division has coordinated with the Internal Audit Division to discuss audit findings as material for evaluating risks and minimizing risks that occur. The findings are submitted to the Company's Risk Management Division for mitigation in accordance with 8 (eight) risks and solutions are given.

PROFILE OF RISKS FACED BY BANK JATIM

REPORT OF BANK RISK PROFILE			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk			
Period: December 2019			
TYPE OF RISK	INHERENT RISK	QUALITY OF RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION	COMPOSITE
Credit Risk	Moderate	Fair	Rank 3
Market Risk	LowMod	Fair	Rank 2
Liquidity Risk	LowMod	Fair	Rank 2
Operational Risk	Moderate	Fair	Rank 3
Legal Risk	LowMod	Fair	Rank 2
Strategic Risk	LowMod	Fair	Rank 2
Compliance Risk	LowMod	Fair	Rank 2
Reputational Risk	LowMod	Fair	Rank 2
Composite Score	LOWMOD	FAIR	Rank 2

The risks inherent in the Bank Jatim Business aligned with the provisions of the Financial Services Authority stipulated eight risks includes Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, and Reputation Risk. A better description of each risk as follows:

CREDIT RISK

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2016, credit risk defined as the arising risk from other parties which failed to fulfill their obligations including credit risk due to debtor failure, credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement risk.

Until December 2019, Bank Jatim Management of credit risk has optimally pursued as reflected in credit risk profile rating in December 2019 results in a moderate ranking. As for the quality of credit risk management implementation related to the active supervision of the Board of Commissioners and Directors has carried out

penilaian umum terhadap kualitas penerapan manajemen risiko kredit adalah *fair*, sehingga peringkat komposit untuk risiko kredit adalah peringkat 3.

Dari sisi kebijakan, Bank Jatim selalu melakukan *review* dan memperbaharui penetapan limit penyediaan dana mengikuti perkembangan bisnis dan organisasi. Dalam proses limit penyediaan dana mengikuti perkembangan bisnis dan organisasi. Divisi Manajemen Risiko Perusahaan memberikan *review* dan penentuan *level* risiko dalam penentuan fasilitas transaksi (*Limit Counterparty*), serta pemantauan atas *Risk Appetite* dan Limit Risiko Kredit secara rutin. Dalam hal penguatan Manajemen Risiko Kredit, Bank juga membentuk unit/ Divisi Risiko Kredit yang secara khusus berkonsentrasi dalam bidang perkreditan.

- Potensi Kerugian

Potensi kerugian atas aktivitas penyaluran kredit Bank dapat muncul akibat Sumber Daya Manusia dibidang perkreditan memiliki pengetahuan kurang memadai, Internal proses bidang perkreditan yang kurang baik, analisa kredit yang kurang akurat dan mendalam, pendanaan pada sektor yang berisiko tinggi, konsentrasi kredit, maupun atas aktivitas placement ataupun pembelian surat berharga pada perusahaan yang dinilai kurang *bonafide* sehingga menyebabkan gagal bayar dan menimbulkan kerugian Bank karena harus membentuk CKPN, pengurangan laba akibat kredit hapus buku, biaya yang timbul karena proses penyelesaian kredit (biaya penagihan, proses hukum, proses lelang), dan juga sumberdaya yang harus dialokasikan dalam rangka penagihan dan restrukturisasi kredit, Selain itu kerugian atas kredit, juga dapat diakibatkan karena kegagalan dalam proses *settlement*.

- Mitigasi

Upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi kerugian atas risiko kredit adalah: meningkatkan pengetahuan analis kredit dibidang perkreditan agar lebih profesional & menguasai bidang tugasnya dengan baik, perbaikan system dan prosedur dalam bidang perkreditan, pembinaan dan monitoring atas kredit yang telah direalisasikan, upaya penagihan yang lebih intensif terhadap nasabah-nasabah yang Dalam Perhatian Khusus (DPK) agar tidak menjadi memburuk kolektibilitasnya, peningkatan fungsi supervisi kredit, menerapkan prinsip *Prudential Banking* dalam ekspansi kredit, melakukan pengawasan sistem dan prosedur yang telah dimiliki, dan juga analisa *Counterparty* secara cermat & baik.

RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset permodalan Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pengelolaan risiko pasar Bank Jatim yang tercermin dalam peringkat penilaian profil risiko pasar pada bulan desember 2019 adalah berpredikat *Low to Moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit yaitu peringkat 2.

its duties aligned with its functions impact on a general the quality of credit risk management assessment of is fair so that the credit risk composite rating is ranked 3.

In terms of policy, Bank Jatim constantly reviews and updates the limits of the provision of funds following the development of businesses and organizations. As for the process of limiting the provision of funds to maintain business and organization developments. The Company's Risk Management Division also reviews and determines the risk level in determining Transaction Facilities, as well as monitoring Risk Appetite and Credit Risk Limit regularly. In terms of strengthening Credit Risk Management, Bank Jatim also formed a Credit Risk Division/Unit specifically focused in the credit sector.

- Potential Losses

Potential losses on the bank lending activities can arise due to insufficient knowledge, inadequate internal credit processes, inaccurate in-depth credit analysis, funding in potentially high-risk sectors, credit concentration, and placement activities or the securities purchases in considered less bona fide company handled by Human Resource responsible in the credit sector, inducing defaults and bank losses which forced to form Impairment on Non-Financial Assets, costs incurred due to the credit settlement process (collection fees, legal process, auction process), as well as resources required to allocated in the context of collecting and restructuring credit. Besides that, credit losses can also evoked in settlement failure process.

- Mitigation

The invented mitigation effort towards credit risk potential losses is: Advancing the knowledge of Credit Analysts in the credit field aims to be more professional and master their duties, improving systems and procedures in the credit field, fostering and monitoring credit realization, more intensive collection efforts for 'The Special Case customers' to prevent collectability deterioration, increase the supervision credit function, implement the principle of Prudential Banking in credit expansion, supervise existing systems and procedures, as well as accurate and excellent Counterparty analyze.

MARKET RISK

Market risk is a risk in the balance sheet and administrative account including derivative transactions, due to overall changes in the market condition, particularly the changes risk in option prices. Market risk management aims to minimize the possibility of negative impacts due to the market changes towards Bank Jatim capital assets. Aligned with Financial Service Authority regulation, Bank Jatim market risk management as reflected in the market risk profile rating in December 2019 results in low ranking for inherent risk and fair ranking for the quality of risk management implementation, so in general the composite rating is ranked 2.

- Potensi Kerugian

Potensi kerugian yang timbul akibat risiko pasar dapat terjadi atas hal-hal sebagai berikut antara lain adanya perubahan suku bunga Bank yang berdampak pada portofolio Bank (selisih terhadap portofolio Rate Sensitif Asset/RSA & Rate Sensitif Liability/RSL), perubahan nilai tukar atas valuta asing dimana Bank mengalami kerugian atas selisih nilai tukar yang timbul, perubahan harga atas portofolio Bank, perubahan rating ataupun performa keuangan obligor yaitu turunnya nilai suatu portofolio Bank (atas surat berharga ataupun obligasi), kondisi pasar yang tidak efisien sehingga mempengaruhi akurasi penilaian dalam bertransaksi sehingga dapat menimbulkan kerugian saat itu (baik pada pasar uang maupun pasar saham), serta kerugian lain yang ditimbulkan oleh situasi politik yang memburuk.

- Mitigasi

Adapun upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi kerugian atas risiko pasar adalah: Penerapan *floating interest rate*, monitoring Posisi Devisa Netto sesuai ketentuan regulator, analisa *Counterparty* dengan baik dan akurat, pertimbangan atas *rating Counterparty*, penetapan dan monitoring atas *Limit Dealer*, *Stop Loss & Cut Loss*, Pemantauan atas transaksi *off Market*, penyediaan yang baik atas data historical dan potensi pasar, Penerapan analisis teknikal & fundamental pada transaksi yang terekspos risiko pasar, dan juga implementasi atas Limit IRRBB atas *Asset* maupun *Liability* yang sensitif terhadap perubahan suku bunga (RSA & RSL).

RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas merupakan Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Pengelolaan risiko likuiditas Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko likuiditas pada bulan desember 2019 adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 2 untuk risiko likuiditas.

- Potensi Kerugian

Potensi kerugian yang timbul akibat risiko likuiditas dapat terjadi atas hal-hal sebagai berikut: adanya penarikan besar-besaran di luar *behavior* perusahaan, adanya *rush* pengaruh faktor eksternal, kegiatan *funding* atas dana pihak ketiga yang mengalami stagnasi, pembayaran angsuran atas debitur kredit yang tidak lancar atau macet, *gap liquidity & maturity profile* yang kurang baik sehingga membawa kecenderungan pada penyediaan dana mahal, terbatas atau berkurangnya potensi untuk ekspansi kredit, ataupun dampak kerugian Bank lainnya yang lebih luas, yang timbul akibat risiko reputasi.

- Mitigasi

Adapun upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi kerugian atas risiko likuiditas adalah melaksanakan antisipasi dan monitoring atas penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai atas semua dana masuk baik melalui *incoming transfer* maupun setoran tunai nasabah (*behavior*

- Potential Losses

Potential losses arising from market risk might occur on the following matters, such as the change of Bank interest rates impact on the Bank portfolio (Gap ratio Rate Sensitive Asset & Rate Sensitive Liability portfolio), fluctuating exchange rates changes arise for foreign currency leads Bank to suffer losses, changes in prices of the Bank's portfolio, changes in rating or obligor's financial performance means the bank's portfolio value decline (for securities or bonds), inefficient market conditions affected the accuracy of valuation in the financial transactions inducing current financial losses (both in the capital and stock market), as well as other losses associated with political deterioration.

- Mitigation

The undertaken mitigation efforts made against potential losses on market risk, among others are: the application of floating interest rates, monitor of Net Open Position aligned with regulatory provisions, an excellent and accurate counterparty analysis, counterparty ratings consideration, determinate and monitor of dealer limits, stop loss & cut loss, monitor over off Market transactions, good provision of historical and data of potential market, application of technical and fundamental analysis on transactions exposed to market risk, also the IRRBB Limit on Assets and Liabilities implementation sensitive to interest rates changes (Risk Sensitive Assets and Risk Sensitive Liabilities).

LIQUIDITY RISK

Liquidity Risk is a due risk to the Bank inability to fulfill overdue obligations from cash flow funding sources and or from high-quality possibly pledged liquid assets, without disrupting business activities and financial condition of the Bank. Bank Jatim liquidity risk management reflected in the liquidity risk profile assessment in December 2019 result in classified low to moderate ranking for inherent risk and fair ranking for the quality of risk management implementation so that a liquidity risk composite rating is ranked 2.

- Potential Losses

Potential losses arising from liquidity risk can occur on the following matters: a large-scale withdrawal in behavior outside work, a rush of external factors, funding for stagnant Third-Party Funds, installment under-performing payments credit debtors, unfavorable liquidity & maturity profile gap, which leads a tendency towards the provision of expensive, limited funds or reduced potential for credit expansion, or more broader impact of bank losses, arising from reputational risk.

- Mitigation

The undertaken mitigation effort of potential losses on liquidity risk is to anticipate and monitor funds withdrawals that have been made by customers in withdrawals form through bank clearance and cash withdrawals through incoming funds both in incoming transfers and customer cash deposits (customer behavior). Bank Jatim has conducted

nasabah), membuat analisa sensitivitas likuiditas Bank terhadap skenario penarikan dana terbesar yang pernah terjadi, meningkatkan akses kepada sumber pendanaan, meningkatkan dan menjaga stabilitas Dana Pihak Ketiga.

Selain menjaga *primary reserves*, Bank Jatim juga menjaga *secondary reserves* dan membuat proyeksi arus kas terinci dalam mata uang rupiah terhadap gejolak tingkat bunga. Melakukan *management gap* sehingga terhindar atau meminimumkan gejolak tingkat bunga sehingga dapat dicapai keuntungan stabil dan berkembang. Bank juga senantiasa meningkatkan jumlah *Counterparty* yang baik dan menjalin hubungan yang baik terutama dalam bidang penyediaan likuiditas serta senantiasa menyusun berbagai bentuk *Contingency Funding Plan* (CFP) pada berbagai situasi baik normal maupun krisis.

liquidity banking sensitivity analyze to the largest ever withdrawal scenario, covers increasing access to funding sources, increasing and maintaining the stability of Third Party Funds.

Bank Jatim has maintained primary and secondary reserves as well as arranged detailed cash flow projections in rupiah against interest rate fluctuations. On top of that, Bank Jatim has conducted a management gap to avoid or minimize interest rates fluctuations to actualize stable and growing profits. Bank Jatim also continue to increase the number of good counterparties and establish long-term positive relations, particularly in the liquidity provision field which develops various forms of Contingency Funding Plans constantly in both normal and crisis situations.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko atas kerugian yang terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Dalam mengukur risiko operasional, Bank Jatim melakukan perhitungan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal perhitungan Asset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar.

Risiko operasional merupakan kategori risiko yang sangat penting, mengingat model bisnis dan produk serta layanan perbankan Bank Jatim yang terus tumbuh dan menjadi lebih kompleks dan beragam. Agar aktivitas fungsional, produk atau layanan Bank dapat berjalan dengan optimal, maka penerapan manajemen risiko operasional dilakukan secara efektif. Selanjutnya unit audit internal melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas operasional Bank.

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan risiko operasional adalah melalui penentuan strategi mitigasi yang paling tepat guna mendapatkan keseimbangan yang optimal antara pemaparan risiko operasional, efektivitas dari mekanisme kontrol serta tingkat risiko yang diterima oleh Bank.

Sampai bulan desember 2019, pengelolaan risiko operasional Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko operasional adalah berpredikat *moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit "3" untuk risiko operasional.

• Potensi Kerugian

Dengan adanya eksposur risiko operasional maka dapat meningkatkan eksposur risiko lainnya diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko strategik dan risiko reputasi, hal ini dapat mengakibatkan potensi kerugian finansial maupun non finansial, dampak lainnya dari risiko operasional Bank adalah turunnya tingkat kesehatan Bank sehingga Bank tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor serta Bank berada dalam status pengawasan insentif dari regulator.

OPERATIONAL RISK

Operational risk is defined as the arising losses risk due to insufficient and or non-functioning internal processes, human errors, system failures, and or the presence of external parties affect in the operation of Bank Jatim. In operational risk measurement, Bank Jatim has calculated capital requirements for operational risk using a basic indicator approach aligned with the Financial Services Authority Circular No. 24/SEOJK.03/2016 dated July 14, 2016, concerning the risk-weighted calculation assets for operational risk based on the basic indicator approach.

Operational risk is a crucial risk category, considering that the growing business model and products, banking services of Bank Jatim, become more complex and diverse in the future. To manage functional banking activities, products or services optimally, the effective operational risk management implementation has been carried out. Furthermore, the internal audit unit evaluates the risk management policies implementation and procedures in each of the operational banking activities.

The approach used in managing operational risk is through the determination of the most appropriate mitigation strategies to obtain an optimal balance between operational risk exposure, the effectiveness of the control mechanism and the level of risk that has been received by the Bank.

Per December 2019, Bank Jatim operational risk management as reflected in the operational risk profiles assessment was predicated moderate ranking for inherent risk and fair ranking for the quality of risk management implementation so that the composite rating is ranked 3.

• Potential Losses

With the presence of operational risk exposures, other risk exposures can also increase including credit risk, market risk, liquidity risk, legal risk, liquidity risk, strategic risk, and reputation risk, which possibly result in potential financial and non-financial losses. Another impact of operational risk is Soundness Level Rating decline leads banks unable to conduct business activities and the expansion of new bank office and under the status of incentive supervision from regulators.

- Mitigasi

Dalam rangka mitigasi risiko operasional Bank telah memiliki aplikasi *Loss Event Database* (LED) yang terkoneksi ke seluruh unit kerja dengan demikian unit kerja dapat menginput *risk event* yang terjadi secara online melalui media web (*web based*). Data yang terkumpul akan dianalisis dan dilakukan mitigasi terhadap *risk event* tersebut.

Bank telah mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas dan proses kontrol internal, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai pelatihan, sertifikasi dan seminar serta peningkatan layanan perbankan melalui perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mitigasi risiko operasional yang memadai wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja operasional dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

Bank juga telah memiliki prosedur Pelaksanaan Manajemen Risiko Operasional, *Business Continuity Management* (BCM) serta melakukan proses *Risk Assessment* (RA), untuk mengukur potensi gangguan/bencana yang mengancam kelangsungan Bank sehingga meminimalisasi potensi kerugian Bank.

RISIKO HUKUM

Bank melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang muncul dari kontrak dan perjanjian yang dibuat apapun yang terkait dengan produk dan layanan. Sampai bulan desember 2019 pengelolaan risiko hukum Bank Jatim tercermin dari penilaian profil risiko hukum adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit "2" untuk risiko hukum.

- Potensi Kerugian

Potensi kerugian dari risiko hukum yaitu dengan adanya tuntutan hukum sebagai akibat dari kelemahan aspek legal atau yuridis, atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, sehingga berdampak pada kerugian finansial maupun non finansial seperti

Contoh Finansial

- Pengeluaran Biaya atas timbulnya ganti rugi dari Nasabah
- Pengenaan Denda/Sanksi atas terjadinya tuntutan Hukum
- Kehilangan Jaminan Kredit
- Klaim Bank Garansi

Contoh Non Finansial

- Tertundanya Jaminan lelang (yang dapat mempengaruhi NPL)

- Mitigasi

Dengan melakukan *review* kajian yuridis terhadap segala kemungkinan masalah hukum yang akan timbul (antara pihak penjamin, terjamin, & dijamin) sehingga meminimalisasi tuntutan antara lain terhadap:

- Kelengkapan pemenuhan dokumen & persyaratan Bank Garansi
- Prosedur realisasi Bank Garansi
- Terkait dengan akad/perjanjian yang terdapat dalam Berkas Bank Garansi

- Mitigation

To mitigate operational risk, Bank Jatim establish Lost Event Database application which connected to all work units, so a work unit can input risk events that occur in no time using online platform through web-based media. As a follow-up step, the collective data will be analyzed and mitigated against the risk event.

The Bank is also committed to improving the quality and process of internal control, the Human Resources qualification through various trainings, certifications and seminars, and banking services through infrastructure improvements required, while ensuring that Bank Jatim has adequate operational risk mitigation policies and procedures obligate to comply with and conduct out by every operational work unit with accomplished transactions and activities accurately, efficiently and on scheduled.

The Bank also has Operational Risk Management Implementation procedures and Risk Assessment procedures, functions to measure potential disruptions or disasters that might be threatening the sustainability of Bank to minimize its potential losses.

LEGAL RISK

Bank carried out identification of legal risks based on risk factors which contained lawsuits and the existence of juridical weaknesses arising from formed contracts and agreements associated with products and services. Per December 2019, Bank Jatim legal risk management as reflected in the legal risk profile assessment was predicated low to moderate ranking for inherent risk and fair ranking for the quality of risk management application to obtain so that the composite rating is ranked 2.

- Potential Losses

The potential loss from legal risk is due to lawsuits as a weakened legal or juridical result, or the absence of supporting laws and regulations results in financial and non-financial losses such as:

Example of Finance:

- Expenditures arising from customer compensation
- Imposing of Fines/Sanctions for the occurrence of Lawsuits
- Loss of Credit Guarantee
- Bank Guarantee Claims

Example of Non-Finance:

- Pending auction guarantee (which possibly affect the Non-Performing Loan).

- Mitigation

By reviewing juridical studies on all possibly arising legal issues (between the guarantor and its parties) to minimize the demands, among others:

- Complete fulfillment of Bank Guarantee documents & requirements,
- Bank Guarantee realization procedures,
- Related to agreement contained in the Bank Guarantee File

RISIKO STRATEGIK

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan.

Pemantauan risiko strategik dilakukan dengan melakukan kaji ulang yang diselenggarakan setiap triwulan untuk setiap Divisi dan caturwulan untuk kaji ulang masing-masing kantor cabang. Sampai bulan Desember 2019 pengelolaan risiko strategik Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko strategik adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit "2" untuk risiko strategik.

• Potensi Kerugian

- Terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan/penetapan strategi bisnis, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pendapatan yang diperoleh terhadap biaya yang dikeluarkan
- Peluncuran produk baru tanpa dilakukan *Feasibility Study* analisis terhadap rencana penerapan produk baru sebagai pencegahan potensi gagalnya produk baru tersebut sehingga target penjualan produk tidak dapat optimal.
- Peluncuran produk baru harus ada Ijin prinsip, jika tidak dilaksanakan produk tersebut tidak akan dapat dijalankan sehingga akan kehilangan kesempatan menghimpun dana pihak ketiga (DPK).

• Mitigasi

Menyusun dan menetapkan strategi bisnis Bank dengan melakukan analisa kajian yang komprehensif, dan melakukan pengendalian risiko serta melakukan *Feasibility Study* yang mencakup analisis *cost and benefit*. Apabila akan mengadakan program atau produk baru Bank Jatim harus:

- Produk baru atau program telah dimasukkan dalam rencana Bisnis Bank.
- Mendapatkan ijin prinsip terhadap Produk yang akan diterbitkan.
- Melakukan berdasarkan SLA yang berlaku dan memberikan penjelasan terkait biaya dan risiko apa yang akan terjadi kepada Debitur atau Nasabah jika akan melakukan realisasi kredit maupun peluncuran produk baru dan memantau pencapaian total kredit dari target yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya jika program tidak berjalan maksimal perlu dikaji kembali kendala-kendala apa saja yang terjadi dan perlu diberikan solusinya, agar rencana bisnis Bank berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

STRATEGIC RISK

Strategic Risk is the risk due to inaccuracy in making and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. Strategic risk identification is based on strategic risk factors in certain functional activities, such as credit, treasury and investment activities as well as operations and services through a business plan prepared by the Strategic Planning & Performance Management Division as a translation of the General Policy of Board of Directors (KUD).

Measurement of strategic risk and its parameters are carried out based on the Bank's performance by comparing expected results with actual results, evaluating the performance of work units and checking the progress that has been achieved with the targets set.

Strategic risk monitoring is carried out by conducting quarterly reviews for each Division and quarterly for each branch office review. Until December 2019, Bank Jatim's strategic risk management reflected in the assessment of the strategic risk profile is low to moderate for inherent risk and fair for the quality of risk management implementation, and obtain a composite rating of "2" for strategic risk.

• Potential Losses

- The result due to the income obtained compared to expense cost is not optimal because it found errors in decision making and business strategy process.
- Launch a new product without Feasibility Study, the planned analysis of acknowledging the prevention of its potential failure of new products, so unable to achieve the optimum result.
- Launch a new product must have a principle permit. Means, the launching within the threshold of failure if it obeys the rule result in possibly lose the opportunity to collect third-party funds.

• Mitigation

Prepare and determine Bank business strategy by conducting a comprehensive analysis of studies, risk control, and Feasibility Study which cover analysis of Cost and benefits. In terms of launching a new program or product, Bank Jatim has obliged:

- A new product or program has been included in the Bank business plan.
- There is a principle permit for the launching of its product.
- Perform the act based on the applicable Service Level Agreement and provide information regarding the costs and potential; awaiting risks to the Debtor or the Customer in case of credit realization, launch new products and monitor the total credit result from the set targets.

Furthermore, if the launching program went downhill, review the obstacle that might occur and provide a solution so that the business plan still working on-scheduled is necessary.

COMPLIANCE RISK

Compliance Risk is a risk due to the Bank of does not comply with and or implement the applicable laws and regulations. In identifying compliance risk,

Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, divisi kepatuhan membuat daftar peraturan yang berlaku pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan ketentuan dari regulator dan pihak eksternal lainnya yang berlaku.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang.

Kegiatan-kegiatan ini termasuk *me-review* hasil temuan audit internal maupun eksternal yang belum terselesaikan serta mengukur frekuensi dan besaran nominal denda/penalti. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dengan dibantu oleh Divisi Kepatuhan & Tata Kelola secara teratur meninjau kembali aspek kepatuhan Bank, dan khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau yang tidak wajar.

Sampai bulan desember 2019, pengelolaan risiko kepatuhan Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko kepatuhan adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit "2" untuk risiko kepatuhan.

- Potensi Kerugian

Ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan regulator maupun peraturan internal lainnya Bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- Teguran tertulis.
- Sanksi kewajiban membayar denda.
- Penurunan peringkat tingkat kesehatan Bank.
- Larangan pembukaan jaringan kantor.
- Pembekuan usaha tertentu.
- Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemberhentian pengurus Bank.

- Mitigasi

Untuk meminimalisasi risiko kepatuhan Bank melakukan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun ketentuan eksternal baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku lainnya. Di samping itu Bank juga melakukan analisa kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dengan cara:

- Memberikan kajian risiko terhadap produk baru dan peraturan baru internal sebelum disahkan oleh Direksi.
- Melakukan *compliance checklist* pada aktivitas operasional tertentu.
- Melakukan kajian terhadap peraturan internal.
- Melakukan sosialisasi peraturan eksternal kepada divisi dan kantor cabang.

RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-

the compliance division arranges a list of regulations applied to all work units has been adjusted to the provisions of the Regulator as well as other applicable external parties.

Compliance risk measurement has carried out to measure potential losses caused by non-compliance and the inability of the Bank to comply with applicable regulations. The compliance risk amount is estimated based on the Bank's ability to fulfill all regulations in the past and future.

Those activities include reviewing internal and external audit findings has not yet been resolved and the frequency measurement as well as the nominal penalties. Compliance Director & Human Capital assisted by the Compliance & Governance Division regularly reviewing aspects of compliance, especially suspicious or unnatural transactions.

As of December 2019, Bank Jatim compliance risk management reflected in the assessment of compliance risk profiles was predicated on low to moderate for inherent and fair risk for the quality of risk management implementation so that a composite rating of "2" is obtained for compliance risk.

- Potential Losses

Bank's non-compliance with regulatory regulations and other internal regulations of banks can be subject to administrative sanctions in the form of:

- Written warning
- Sanctions for the obligation to pay fines
- Decrease rating of the Bank's soundness
- Prohibition of opening office networks
- Freezing of certain businesses
- The inclusion of management members, bank employees, and or shareholders in the list of parties was predicated of not passing the fit and proper test or in the administrative records as stipulated in the provisions of the Financial Services Authority
- Dismissal of Bank management

- Mitigation

To minimize compliance risk, Bank Jatim evaluate compliance with internal and external provisions both from Bank Indonesia, the Financial Services Authority and other applicable regulations. Besides that, the bank also analyzes event which possibly inducing compliance risk by:

- Provide new products and new internal regulations risk assessment before granted approval by the board of directors
- Perform compliance checklists for certain operational activities.
- Review internal regulations
- Disseminate external regulations to the division and branch offices

REPUTATION RISK

Reputation risk is a risk due facing the stakeholder trust gap originating from various activities including events that can bring harm the reputation of the Bank

kejadian yang merugikan reputasi Bank, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah serta hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

Bank Jatim yang telah bertransformasi menjadi Bank publik melakukan identifikasi pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan. Keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan Bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi yang dilakukan Bank.

Pengukuran risiko reputasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 pada Bulan Desember 2019 memiliki peringkat *Low to Moderate* untuk risiko inheren. Sedangkan upaya penerapan manajemen risiko reputasi sendiri berpredikat *fair* dengan melakukan upaya dalam meningkatkan reputasi Bank sehingga didapatkan peringkat komposit 2.

Upaya pengendalian risiko reputasi yang dilakukan Bank Jatim, melalui *Corporate Secretary* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta menjalankan fungsi *public service* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* Bank Jatim dilakukan secara berkesinambungan dan berfokus pada 4 (empat) aspek diantaranya aspek pendidikan dan edukasi perbankan, kebudayaan, kesehatan serta aspek sosial termasuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu, Bank Jatim secara terus menerus melakukan penyempurnaan kebijakan internal Bank terkait dengan keluhan nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisasi potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.

• Potensi Kerugian

Risiko Reputasi dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya:

- Pelanggaran etika bisnis, kualitas pemberitaan suatu Bank dan pengaduan nasabah. Pada parameter pelanggaran etika bisnis dapat dilihat dari berbagai kriteria transparansi informasi keuangan, sumber daya manusia, pemasaran produk dan jasa, kerjasama bisnis dengan *stakeholder* lainnya yang berpotensi mengalami kerugian terhadap risiko reputasi.
- Dalam suatu Bank ujung tombak perusahaan adalah sumber daya manusia yang handal, dimana dalam pelayanan terhadap nasabah harus melibatkan sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia tidak berkualitas maka berpotensi kerugian risiko reputasi terhadap nasabah, terutama terhadap pelayanan nasabah harus sesuai dengan standar layanan yang telah ketentuan yang berlaku.
- Potensi kerugian yang paling krusial adalah pemberitaan negatif di media masa yang sudah diketahui oleh nasabah dan pengaduan dari nasabah yang mengalami permasalahan di Bank Jatim yang tidak dapat ditangani dengan baik.

• Mitigasi

Selalu menjaga kredibilitas Bank dihadapan *shareholder* dan *stakeholder*, tanggap dalam merespon segala keluhan dan pemberitaan negatif tentang Bank, memenuhi semua ketentuan yang berlaku serta senantiasa menjaga kepuasan nasabah dengan cara melakukan penilaian secara berkala terhadap *service level* yang dilakukan oleh *frontliner* di setiap kantor cabang.

(e.g. negative report in the mass media, violations of business ethics and customer complaints) and other matters inducing reputational risks such as weakened corporate governance, corporate culture and business banking practices.

The transformation of Bank Jatim become into a public bank, successfully identifies factors inherent risk in an openness functional activities which include customer complaints about its services, employees behavior in serving customers and conducted communication systems by the Bank.

The reputation risk measurement conducted based on the Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2016 in December 2019 result in a low to moderate rating for inherent risk. While the efforts to implement reputation risk management was predicated fair by undertaken efforts to improve the reputation of the Bank so, in general, the composite rating is ranked 2.

Bank Jatim has carried out reputation risk control through Corporate secretary who holds the responsibility of implementing policies related to handling and resolving negative news or avoid counter-productive information and accomplished public service functions to implement Corporate Social Responsibility.

The Corporate Social Responsibility activities are sustainably carried out and focused on four aspects including banking education, culture, health, and social aspects, including rebuilding the uninhabitable homes. Besides that, Bank Jatim continuously improves internal banking policies related to customer complaints and service to minimize the potential for reputation decline.

• Potential Losses

Reputation risk is perceivable from several indicators including:

- Violations of business ethics, the reporting quality of a Bank and customer complaints. The parameters of violation of business ethics come from various transparency of financial information criteria, human resources, marketing of products and services, business cooperation with other stakeholders that holds potential reputation risk suffer losses.
- Addressing the driving force of Bank success is a competent human resource, means quality service to the customers involves qualified human resources. An unqualified human resource will bring potential reputation risk losses to the customer, therefore, customer service should align with the applicable provisions of Service Standardize.
- The most crucial potential losses are negative reporting in the mass media where the customer already recognized it and poor customer service while handling complaints whose experience the problems at Bank Jatim.

• Mitigation

Always maintain the Bank credibility in front of shareholders and stakeholders, being responsive in responding complaint and negative news, comply with applicable regulations and always maintain customer satisfaction by regularly evaluating levels of service that has been carried out by the frontline in each branch office.

Pada setiap pengaduan nasabah seminimal mungkin dapat diselesaikan sesegera mungkin, dengan cara diinformasikan kepada nasabah agar tidak melakukan complain ke media sosial.

As for complaint report from the customer, it is expected the problems can be resolved in the shortest possible time, by encouraging the Customer to not speak up about its problems on social media.

UPAYA UNTUK MENGELOLA RISIKO

Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis Bank dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain:

- Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru Bank termasuk penambahan jaringan layanan Bank.
- Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha.
- Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Jatim.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, di dalam pasal 23 mengatur kewajiban Bank menyampaikan Laporan Profil Risiko Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulanan.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, peringkat risiko Bank Umum Konvensional dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat yaitu 1 (*low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*) dan 5 (*high*) untuk tingkat risiko inheren. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (*strong*), 2 (*satisfactory*), 3 (*fair*), 4 (*marginal*) dan 5 (*unsatisfactory*).

Dari hasil penilaian profil risiko per Desember 2019, secara komposit risiko inheren Bank berpredikat *Low to Moderate* dengan kualitas penerapan manajemen risiko *Fair* sehingga risiko komposit berada pada Peringkat 2.

TINGKAT KESEHATAN BANK

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, terdapat empat parameter penilaian yaitu Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan.

Untuk periode Desember 2019, hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank berada pada peringkat komposit 2 yang artinya mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

RISK MANAGEMENT EFFORTS

Efforts to minimize these negative impacts are carried out risk management based on the principle of prudence to ensure the growth of a healthy and sustainable performance of the Bank.

Acknowledging that risk management is an inseparable material in business growth and daily business banking activity, Bank Jatim has undertaken various strategic effort, includes:

- Presenting a risk perspective opinion on each new banking activities and products, along with a service banking network expansion.
- Continuously improve operational policies and procedures, while adjusted risk tolerance limits to ensure its optimal balance between asset quality and business profitability
- Maintain the risk management implementation aligned with macroeconomics changes and the development of Bank Jatim business.

Aligned with the Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2016 concerning the Risk Management Implementation for Commercial Banks, Article 23 regulated the obligation of the Bank to submit a Risk Profile Report to the Financial Services Authority every three months (quarterly).

Based on the Financial Services Authority Circular Number 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning the Risk Management Implementation for Commercial Banks, the Rating Risk of Conventional Commercial Banks is categorized into five ratings, defines 1 (*low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*) and 5 (*high*) for the inherent risk level, while the quality of the five ranks risk management application is categorized into, 1 (*strong*), 2 (*satisfactory*), 3 (*fair*), 4 (*marginal*) and 5 (*unsatisfactory*).

From the risk profile assessment results per December 2018, Bank Jatim inherent risk is predominantly Low to Moderate and fair ranking for the quality of risk management implementation so that the composite risk is at rating "2".

BANK SOUNDNESS LEVEL

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 4/POJK.03/2016 concerning Commercial Bank Soundness Level Rating and Financial Services Authority Circular Letter Number 14/SEOJK.03/2017 concerning Commercial Bank Soundness Level Rating, it stated that the four parameters of assessment are Risk Profile, Governance, Rentability, and Capital.

Per December 2019, Bank Jatim obtain the results of the Soundness Level Rating composite rating is ranked 2, which means in general, Bank Jatim financial condition is healthy considered able to deal with significant negative effect changes in business conditions and other external factors as reflected in rating factor, involves a good assessment of risk profile, corporate governance implementation, profitability, and capital. The assessment result finds Bank Jatim weaknesses are less significant.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM



Sistem pengendalian intern merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan yang dilaksanakan oleh seluruh manajemen dan karyawan di setiap jenjang organisasi Bank Jatim. Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Bank Jatim menggunakan pendekatan COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) dimana penerapan ERM (*Enterprise Risk Management*) melibatkan seluruh komponen perusahaan yaitu manajemen dan karyawan.

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya untuk mengidentifikasi suatu kejadian atau potensi kejadian yang dapat menimbulkan kerugian, eksposur risiko, kepatuhan terhadap limit internal, dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dengan tujuan untuk menjamin pencapaian tujuan perusahaan.

Bank terus berupaya menerapkan sekaligus mengembangkan Sistem Pengendalian Internal pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi Bank yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian empat tujuan berikut ini:

- Meningkatkan kepatuhan dan disiplin terhadap ketentuan yang berlaku dalam mewujudkan pelaksanaan sistem perbankan secara sehat, efektif dan efisien.
- Memastikan kewajaran dan keandalan akurasi Laporan Keuangan (Pos-pos Neraca & Rugi Laba, Rekening Administratif) sesuai dengan sistem prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- Memastikan bahwa sistem pengendalian internal berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank terutama penerapan manajemen risiko, pelaksanaan *Good Corporate Governance* utamanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sehingga dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen, telah cukup, efektif dan aman.
- Memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional Bank tidak terjadi *Fraud* dan memastikan berjalannya sistem *whistleblowing*.

TUJUAN PENERAPAN SPI BANK JATIM

- Efektivitas dan efisiensi operasi, yang menjamin semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
- Keandalan pelaporan keuangan, untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
- Mengurangi dampak kerugian, mencakup kerugian akibat dari penyimpangan termasuk kecurangan/fraud dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

The internal control system is a supervisory mechanism established by the Bank's management on an ongoing basis that is carried out by all management and employees at every level of the Bank Jatim organization. The Internal Control System (SPI) at Bank Jatim uses the COSO (*Committees of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) approach where the implementation of ERM (*Enterprise Risk Management*) involves all components of the company, namely management and employees.

Risk monitoring is carried out on the magnitude to identify an event or potential event that can cause harm, risk exposure, compliance with internal limits, and consistency in implementation with policies and procedures established with the aim of ensuring the achievement of company goals.

The Bank continues to implement and at the same time develop the Internal Control System at all functional levels according to the organizational structure of the Bank which is designed to provide adequate confidence regarding the achievement of the following four objectives:

- Improve compliance and discipline of applicable regulations in realizing the implementation of the banking system in a healthy, effective and efficient manner.
- Ensuring the fairness and reliability of the accuracy of Financial Statements (Balance Sheet & Income, Administrative Accounts) in accordance with the prevailing system of procedures and regulations.
- Ensuring that the internal control system is related to the implementation of the Bank's operations, especially the implementation of risk management, the implementation of Good Corporate Governance, especially compliance with applicable laws and regulations so that the achievement of targets set by management is sufficient, effective and safe.
- Ensuring that all Bank operational activities do not occur Fraud and ensuring the whistleblowing system is running.

OBJECTIVES OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION

- The effective and efficient operations, which guarantee that every business banking activities has carried out and aligned with the applicable laws and regulations, both provisions issued by the governance, bank supervisory authorities and internal policies, provisions, and procedures stipulated by the bank.
- Financial reporting reliability, to provide accurate, complete, on scheduled and relevant reports as needed in the context of appropriate and accountable based-decisions making.
- Compliance with applicable laws and regulations, to increase effectiveness and efficiency in assets utilization and other resources to protect the potential risk of banking loss.
- Reduce the impact of losses, including losses due to an act of violation, such as fraud and the principles of prudence violations.

- Efektivitas budaya risiko (*risk culture*), yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KEUANGAN DAN OPERASIONAL SERTA KESESUAIAN DENGAN COSO - INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Bank mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian intern Bank diterapkan atas dua aspek yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Pengendalian intern atas operasional dan pelaporan keuangan Bank dijalankan dengan mengacu pada acuan internasional COSO - *Internal Control Integrated Framework*. Disebutkan dalam COSO bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian.

COSO - *Internal Control Framework*, terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

Lingkungan pengendalian (*control environment*). Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi yang mengutamakan integritas dan nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian manajemen menjadi acuan sebagai standar perilaku perusahaan yang dikenal dengan EXPRESI (*Excellence, Professional, Integrity, Synergy, Innovation*).

Dalam hal ini Dewan Komisaris juga turut melakukan monitoring terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian intern yang dibuat oleh auditor intern dan auditor ekstern dengan tujuan memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian intern. Manajemen juga menetapkan Struktur Organisasi Pengendalian Internal yang efektif dan menempatkan individu yang kompeten dan efektif dalam penyusunan pelaporan keuangan.

Penaksiran risiko (*risk assessment*). Manajemen mengidentifikasi, menganalisis, mengukur risiko-risiko untuk menyakinkan kecukupan bahwa risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang relevan terhadap bisnis dan operasional Bank guna mencapai rencana bisnis yang ditetapkan, dengan menetapkan kriteria identifikasi risiko dan pengelolaan risiko untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan.

Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi risiko yang ada pada Bank Jatim menggunakan metode *Risk Based Audit* yaitu pengambilan sampling atas dasar pertimbangan dan perhitungan yang dapat dipertanggung jawabkan dan mewakili populasi data dengan prioritas yang memiliki risiko tinggi dan pada aktivitas yang *risk control* sistemnya lemah.

- Improve risk culture effectiveness, with the intention to identify weaknesses and deviations as early as possible and re-assessment the policies and procedures fairness of bank sustainability.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM, FINANCE, AND OPERATIONS, AND CONFORMITY TO COSO - INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

The implementation of the Bank's Internal Control System refers to the COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework* in compiling an internal control framework that ensures the adequacy of operational and financial controls, financial reporting, operational effectiveness and efficiency, and compliance with law and applicable regulations.

The Bank's internal control is applied to two aspects, namely operational control and financial control. Internal control over the operations and financial reporting of the Bank is carried out with reference to the international reference COSO - *Internal Control Integrated Framework*. It is stated in COSO that internal control is a system or process carried out by the Board of Commissioners, Directors, Management and employees in a company, to provide adequate guarantees for the achievement of control objectives.

COSO - *Internal Control Framework* consists of 5 (five) control components, namely:

Control Environment. The factors of environment control include ethical values, the people and entities competency, management philosophy and operation approach prioritized integrity and corporate values which implemented in management control functions as a reference and standard of corporate behavior, well-known as EXPRESI (*Excellence, Professional, Integrity, Synergy, Innovation*).

In terms of this, the Board of Commissioners also monitors the implementation evaluation of internal controls which is conducted by internal and external auditors aims to ensure there is an improvement on solving banking problems can potentially reduce the internal controls effectiveness. The establishment of effective Internal Control Organization Structure initiated by the Management assigned competent and effective individuals to take place in the financial reporting preparation.

Risk assessment. The management identifies, analyzes, measures risks to ensure the adequacy risk management aligned with the risk appetite relevant in the business and banking operations to actualize a business plan objectives, by setting criteria for risk identification and management aims to create reliable financial reporting.

The establishment of work mechanism to identify the existing risks at Bank Jatim apply a Risk-Based Audit method, which is sampling based on considerations and accountable calculations represents the data population upon priorities hold a potentially high risk and financial activity in the fragile state of a risk control system.

Aktivitas pengendalian (*control activities*). Tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian intern berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank terutama penerapan manajemen risiko, pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen, telah cukup, efektif dan aman. Utamanya dengan melakukan langkah-langkah antara lain evaluasi ataupun pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur, serta evaluasi terhadap keamanan keseluruhan fungsi bisnis dan aplikasi maupun jaringan yang termasuk dalam *Business Continuity Management*.

Informasi dan komunikasi (*information and communication*). Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, manajemen, divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan.

Pemantauan (*monitoring*). Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, yakni dengan melakukan pemantauan yang terus menerus (*on going monitoring*). Mekanisme pemeriksaan pasif/*offsite* atau evaluasi terpisah (*separate evaluation*) dilakukan terpusat pada Kantor Pusat Divisi Audit Intern dengan melakukan pengamatan, penelitian dan analisa terhadap aktivitas fungsional Bank dan kinerja cabang dengan tujuan untuk memperoleh informasi sedini mungkin dan mengidentifikasi permasalahan di cabang untuk mengambil tindakan korektif kepada pihak yang bertanggung jawab.

EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam optimalisasi penerapan Tata Kelola yang menerapkan prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency and fairness*, Bank melakukan evaluasi efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara berkesinambungan. Evaluasi dititikberatkan pada aktivitas fungsional dan proses bisnis yang memiliki risiko tinggi baik karena adanya perubahan kondisi intern dan ekstern ataupun terkait perkembangan usaha Bank yang terus berjalan.

Pemantauan proses bisnis atas penerapan SPI, dilakukan oleh satuan kerja operasional maupun Divisi Audit Intern Bank. Hasil evaluasi pelaksanaan tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar evaluasi Manajemen Bank terhadap implementasi efektivitas SPI untuk menentukan perbaikan ataupun penyempurnaan sistem pengendalian yang memungkinkan manajemen meningkatkan efektivitas kegiatan operasional sekaligus meminimalkan risiko yang merugikan perusahaan. Evaluasi terkait efektivitas SPI untuk selanjutnya diperbaiki dalam bentuk pedoman maupun Surat Edaran ke unit kerja operasional, sehingga Bank telah memiliki SPI yang memadai atas pencapaian tujuan.

Control Activities. The initial action taken by management in the context of internal control which is also related to the bank operations implementation, particularly the risk management application, the *Good Corporate Governance* implementation to actualize the targeted standard by management has proven sufficient, effective and safe. In general, take steps such as evaluation or policies and procedures update, as well as evaluating the entire business functions, applications, and networks security as included in *Business Continuity Management*.

Information and Communication. Strengthen effective communication channels with systems enabled the information and communication distribution immediately and accurately to reinforce the understanding and implementation of internal control objectives, processes, and responsibilities involving the Board of Commissioners, Management, related Divisions to employees, as designed to provide adequate belief about the actualization of its objective.

Monitoring. To ensure the quality of internal control system sustainable and periodic has carried out and the necessary improvements in the making aligned with existing conditions, particularly by continuous monitoring (*ongoing monitoring*). Passive/*off-site* inspection mechanisms or separate evaluation is centrally conducted by the Internal Audit Division Head Office with the observations, research, and analysis of bank functional activities and branch performance aims to obtain information in the shortest possible time and identifying Branch problems so it can take corrective action to the responsible parties.

EVALUATION ON THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

In optimizing Governance implementation that applies the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, the Bank evaluates the effectiveness of the implementation of the Internal Control System (SPI) on an ongoing basis. Evaluation focuses on functional activities and business processes that have high risks due to changes in internal and external conditions or related to the ongoing development of the Bank's business.

Monitoring of business processes on the implementation of SPI, is carried out by the operational work units and the Bank Internal Audit Division. The results of the evaluation of the implementation serve as one of the bases of the evaluation of the Bank's Management on the effectiveness of the SPI to determine the improvement or improvement of the control system that enables management to increase the effectiveness of operational activities while minimizing risks that harm the company. Evaluations related to the effectiveness of SPI will be further improved in the form of guidelines and Circular Letters to operational work units, so that the Bank has adequate SPI for the achievement of objectives.

PERKARA PENTING

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI BANK SELAMA TAHUN 2019

Permasalahan hukum (perkara perdata) yang dihadapi Bank selama tahun 2019 sebagai berikut:

1. Perkara dalam Proses Penyelesaian

TINGKAT PERKARA	UPAYA/ PROSES HUKUM	JUMLAH PERKARA	PENGARUH TERHADAP BANK
Pengadilan Negeri	Gugatan, Perlawanan/ Bantahan	13	Berpengaruh terhadap risiko ganti-rugi dan risiko reputasi namun tidak mengganggu kinerja Bank
Pengadilan Agama	Gugatan	1	
Pengadilan Hubungan Industrial	Gugatan	1	
Pengadilan Niaga	Pemberesan boedel pailit	1	
Pengadilan Tinggi	Banding	6	
Mahkamah Agung	Kasasi	16	
	Peninjauan Kembali	2	
TOTAL		40	

Penyebab/alasan terjadinya gugatan, perlawanan/ bantahan, permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank selama tahun 2019 sebagai berikut:

- Gugatan yang diajukan oleh debitur untuk permohonan restrukturisasi kredit;
- Gugatan yang diajukan oleh debitur untuk membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan;
- Gugatan yang diajukan oleh debitur untuk membatalkan perjanjian kredit;
- Gugatan kepada Bank karena menyewa objek sewa yang disengketakan kepemilikannya;
- Gugatan kepada Bank karena salah satu harta warisan berada di Bank;
- Perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri;
- Gugatan kepada Bank karena pengumuman lelang yang dianggap debitur tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Gugatan yang diajukan oleh Bank kepada debitur yang wanprestasi terhadap perjanjian kredit;
- Gugatan yang diajukan oleh mantan pegawai kepada Bank;
- Gugatan yang diajukan Bank kepada pihak asuransi atas tagihan klaim terhadap kontra Bank garansi;
- Gugatan yang diajukan kepada Bank untuk memenuhi ganti rugi materiil atas kredit dana bergulir;
- Bank sebagai kreditur separatis dan pemegang jaminan kebendaan atas debitur pailit.

LEGAL CASES

LEGAL CASES FACED BY BANK JATIM IN 2019

Legal issues (civil cases) faced by the Bank during 2019 are as follows:

1. Cases in Settlement Process

CASE LEVEL	LEGAL PROCESS	TOTAL CASES	IMPACT ON THE BANK
District Court	Lawsuit, Resistance/ Rebuttal	13	Affected compensation risk and reputation risk but does not interfere with the Bank's performance
Religious Court	A lawsuit	1	
Industrial Relations Court	A lawsuit	1	
Commercial Court	Order bankruptcy	1	
High Court	Appeal	6	
Supreme Court	Cassation	16	
	Judicial review	2	
TOTAL		40	

The causes/reasons for the lawsuit, resistance/ rebuttal, legal cases faced by the Bank during 2019 are as follows:

- Claims filed by debtors for requests for credit restructuring;
- Lawsuit submitted by the debtor to cancel the auction of execution of mortgage rights;
- Lawsuit submitted by the debtor to cancel the credit agreement;
- A lawsuit against the Bank for renting an object for disputed ownership;
- Lawsuit to the Bank because one of the inheritance assets is in the Bank;
- Resistance to the Establishment of the Chair of the District Court;
- Lawsuit to the Bank because of the announcement of the auction which is considered by the debtor not in accordance with the laws and regulations;
- Lawsuit submitted by the Bank to debtors who default on the credit agreement;
- Claims filed by former employees of the Bank;
- Lawsuit submitted by the Bank to the insurer on claims for contra bank guarantees;
- Lawsuit submitted to the Bank to meet material compensation for revolving fund loans;
- Bank as a separatist creditor and holder of material security over bankrupt debtors.

2. Perkara Selesai di Tahun 2019

KETERANGAN	JUMLAH PERKARA	PENGARUH TERHADAP BANK
Dimenangkan Bank di Tingkat Pengadilan Negeri	8	Menyelamatkan Bank dari Potensi/Risiko Kerugian Atas Adanya Gugatan/Perlawanan serta Risiko Reputasi
Dimenangkan Bank di Tingkat Pengadilan Tinggi	1	
Dimenangkan Bank di Tingkat Mahkamah Agung (Kasasi)	2	
Damai	6	
TOTAL	17	
Gugatan Dicabut oleh Penggugat	2	

PERKARA SIGNIFIKAN DENGAN NILAI PERKARA DI ATAS RP3 MILIAR YANG DIHADAPI OLEH BANK SELAMA TAHUN 2019

NO.	NOMOR PERKARA	ALASAN GUGATAN	STATUS PERKARA
1.	584/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 November 2007	Gugatan untuk memenuhi ganti rugi materiil atas kredit dana bergulir	Putusan pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi) dimenangkan oleh Bank. Bank telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri untuk kepastian inkracht atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut.
2.	2/Pdt.G/2018/PN.Sit tanggal 9 Januari 2018	Gugatan perbuatan melawan hukum terkait peralihan hak atas tanah melalui hibah	Kasasi di Mahkamah Agung
3.	61/Pdt.Bth/2018/PN.Kpn tanggal 28 Maret 2018	Gugatan yang dilakukan oleh Bank kepada pihak ketiga karena Bank tidak dapat melakukan lelang terhadap objek jaminan kredit karena peletakan sita eksekusi oleh pihak ketiga	Kasasi di Mahkamah Agung
4.	13/Pdt.G/2018/PN.Bjn tanggal 18 Mei 2018	Gugatan menuntut ganti kerugian materiil dan menghentikan proses lelang	Banding di Pengadilan Tinggi
5.	1048/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 23 Oktober 2019	Gugatan kepada pihak asuransi karena tidak melakukan pembayaran atas klaim kontra Bank garansi jaminan uang muka	Gugatan di Pengadilan Negeri

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI OLEH DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SELAMA TAHUN 2019

Selama tahun 2019 tidak ada anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang menjabat memiliki perkara perdata dan pidana terkait dengan bisnis Bank.

2. Cases Settled in 2019

DESCRIPTION	TOTAL CASES	IMPACT ON THE BANK
Won by the Bank at the District Court Level	8	Saving the Bank from Potential/Risk of Loss Due to Lawsuit/Resistance and Reputation Risk
Won by the Bank at the High Court Level	1	
Won by the Bank at the Supreme Court (Cassation) Level	2	
Peace	6	
TOTAL	17	
Claims Retracted by the Plaintiff	2	

SIGNIFICANT CASES WITH VALUE OF ABOVE RP3 BILLION FACED BY THE BANK IN 2019

NO.	Case Number	Reason for Lawsuit	STATUS PERKARA
1.	584/Pdt.G/2007/PN.Sby dated November 21, 2007	A lawsuit to meet material compensation for revolving fund loans	Decisions at the appellate level (Court of Appeal) are won by the Bank. The bank has sent a letter to the District Court for the inkracht certainty of the High Court's Decision.
2.	2/Pdt.G/2018/PN.Sit dated January 9, 2018	Lawsuit against the law related to the transfer of land rights through a grant	Cassation in the Supreme Court
3.	61/Pdt.Bth/2018/PN.Kpn dated March 28, 2018	Lawsuit made by the Bank to a third party because the Bank cannot conduct an auction on the object of credit guarantee due to the placement of a seized execution by a third party	Cassation in the Supreme Court
4.	13/Pdt.G/2018/PN.Bjn dated May 18, 2018	The lawsuit demands material compensation and stops the auction process	Appeal in the High Court
5.	1048/Pdt.G/2019/PN.Sby dated October 23, 2019	A lawsuit against the insurer for not making payment of a counter claim against a bank guarantee for an advance payment	Lawsuit in the District Court

LEGAL CASES FACED BY THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS IN 2019

In 2019, there were no members of the Board of Directors or Board of Commissioners who held civil and criminal cases related to the Bank's business.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bank Jatim memberikan kemudahan untuk seluruh *stakeholder* dalam mengakses informasi perusahaan. Dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 08/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, informasi yang disajikan mencakup semua kegiatan dan kondisi Bank yang perlu diketahui. Untuk memaparkan kinerja bank secara berkala, Bank memiliki *Investor Relations* yang senantiasa membangun hubungan baik dengan analis. Pelayanan Informasi yang disajikan dapat diakses pada:

SOSIAL MEDIA	Website : www.bankjatim.co.id
	Twitter : @bank_jatim
	Facebook : Bank Jatim
	Youtube : Bank Jatim
	Instagram : @bankjatim
Call Centre	: 14044 (24 hours)
Email	: info@bankjatim.co.id
Telepon, Fax	: (031) 5310090-99 , (031) 5310838

WEBSITE PERUSAHAAN

Kini, apabila masyarakat di Jawa Timur ingin mengakses informasi mengenai Bank Jatim dengan mudah, dapat mengakses melalui www.bankjatim.co.id. Melalui *website* tersebut, masyarakat dapat mengajukan kredit melalui e-form kredit dengan mudah tanpa datang ke kantor Bank Jatim. Dengan berkembang secara kompetitif di Era 4.0, Bank Jatim melengkapi informasi pada *website* seperti pemegang saham, struktur organisasi perusahaan, analis kinerja keuangan serta *profile* Dewan Komisaris dan Direksi, tak hanya itu *website* Bank Jatim juga menyediakan Informasi sebagai berikut ;

PROFIL	Profil, Manajemen Karir, Info Penting, Rekrutmen
KARIR	Manajemen Karir & Info Rekrutmen Bank Jatim
MITRA UMKM	UMKM binaan Bank Jatim yang dapat diakses oleh masyarakat & nasabah Bank Jatim
INTERNET BANKING	
DAFTAR ONLINE	Pilihan pengajuan kredit online untuk memberikan kemudahan calon nasabah melakukan pengajuan Kredit
KEBUTUHAN ANDA	Informasi yang ditampilkan sebagai berikut:
	Simpanan
	- Tabungan (Tabunganku, Tabungan SIUMI, Tabungan SIKLUS, Tabungan SIKLUS VALAS, Tabungan SIMPEDA, Tabungan SIMPEL, Tabungan SINYAL, Program Bunga Plus, Siklus Ceria) - Deposito (Deposito, Deposito Valas) - Giro (Giro, Giro Valas)
	Pembiayaan
	Individual (Kredit Properti, Kredit Multiguna, KPR Sejahtera FLPP, Kredit Konsumsi Beragun Properti, Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Linkage Program BPR PERBAMIDA & PERBARINDO)

ACCESS TO INFORMATION AND CORPORATE DATA

Bank Jatim facilitates all stakeholders to access corporate information. With reference to OJK Regulation No. 08/POJK.04/2015 concerning Issuer or Public Company Website, the information presented includes all activities and conditions of the Bank that need to be known. To describe the bank's performance on a regular basis, the Bank has Investor Relations that always builds good relations with analysts. The information services presented can be accessed at:

SOSIAL MEDIA	Website : www.bankjatim.co.id
	Twitter : @bank_jatim
	Facebook : Bank Jatim
	Youtube : Bank Jatim
	Instagram : @bankjatim
Call Center	: 14044 (24 hours)
Email	: info@bankjatim.co.id
Telepon, Fax	: (031) 5310090-99 , (031) 5310838

CORPORATE WEBSITE

Now, if people in East Java want to access information about Bank Jatim easily, they can access it through www.bankjatim.co.id. Through this website, people can apply for credit through e-forms of credit easily without coming to the office of Bank Jatim. By developing competitively in the 4.0 Era, Bank Jatim completes information on websites such as shareholders, corporate organizational structure, financial performance analysts and profiles of the Board of Commissioners and Board of Directors. Bank Jatim website also provides information as follows;

PROFILE	Profile, Management, Awards
CAREER	Profile, Career Management, Important Information, Recruitment
MSME PARTNER	Bank Jatim's fostered MSMEs accessible by the public and customers of Bank Jatim
INTERNET BANKING	
ONLINE REGISTRATION	Selection of online loans to facilitate prospective customers in proposing for loan facility to the Bank
YOUR NEEDS	Information displayed is as follows:
	Savings
	- Tabungan (Tabunganku, SIUMI Saving, SIKLUS Saving, SIKLUS VALAS Saving, SIMPEDA Saving, SIMPEL Saving, SINYAL Saving, Bunga Plus Program, Siklus Ceria) - Deposits (Deposits, Exchange Deposits) - Giro (Giro, Giro Forex)
	Financing
	Individual (Property Loan, Multiguna Loan, KPR Sejahtera FLPP, Property Consumption Loan, Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Linkage Program BPR PERBAMIDA & PERBARINDO)

• Produktif (Kredit Mikro, SiUmi, Resi Gudang, Investasi Pemerintah, BANKIT KKOP, BANKIT KKPA, BANKIT KKOP-KKPA, Kredit Sertifikasi Hak Atas Tanah, Kredit Dana Bergulir Pemprov Jatim, Kredit Laguna & Kredit Laguna Industri Primer, Kredit Pundi Kencana & Kredit Pundi Kencana LPDB KUMKM, Kredit Linkage Program BPR Anggota – Apex, Kredit Linkage Program BPR Non Apex, Pembiayaan Investasi Dan Modal Kerja, Pembiayaan Piutang (ANJAK PIUTANG) IB Barokah, Pembiayaan Investasi Terkait IB Barokah	
Bisnis	
• Pinjaman (Kredit Konstruksi Properti, Bank Garansi, Rekening Koran, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Sindikasi, Kredit Pembiayaan Piutang, Cash Collateral Credit, Kredit Pemerintah Daerah, Kredit BLUD (Badan Layanan Umum Daerah))	
• Treasury & Valuta Asing (Devisa Umum, Hedging Kontrak Forward, Hedging Swap, Bank Notes, Deposit On Call, Daftar Underlying Dokumen)	
Syariah	
• Tabungan (Tabungan Barokah, Tabungan Haji Amanah, Tabungan Umroh IB Amanah, TabunganKu IB, Tabungan Simpel IB)	
• Pembiayaan (Multiguna Syariah, Produk Kafalah, Emas IB Barokah, Kepemilikan Logam Emas IB Barokah, Konsumtif & Produktif, Umroh IB Maqbulah, KPR IB Griya Barokah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik)	
• Deposito (Deposito Barokah)	
• Giro (Giro Amanah, Giro Maxi)	
Layanan	
• Jatim Prioritas (Layanan Jatim Prioritas, Merchant Relationship Program)	
• E-Channel (ATM, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Virtual Account, Kartu Bank Jatim Flazz, Kartu PNS Elektronik (KPE), E-Samsat Jatim)	
• Transaksi Devisa (Transaksi Remittance, L/C (Letter Of Credit), Pajak Impor, SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), Bank Garansi Valas)	
• Safe Deposit Box	
• BPD Net Online	
• Kiriman Uang	
• Jasa Perbankan Lainnya	
• Laku Pandai	
Hubungan Investor	
• Panduan Investor	
• Profil BJTM (Hubungan Investor, Saham BJTM, Prospektus, Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal)	
• BJTM Fundamental Statistik (Kondisi Makro & Mikro, Bank Di Indonesia, IR Weekly Review, Statistik Keuangan, Kinerja Perusahaan, Analisa & Riset)	
Tata Kelola Perusahaan	
• Praktik Tata Kelola Perusahaan	
• Akuntan Publik	
• Kode Etik	

• Productive (Micro Credit, SiUMI Loan, Warehouse Bill Capital Of Credit, Kredit Investasi Pemerintah, BANKIT KKOP, BANKIT KKPA, BANKIT KKOP - KKPA (LPDB KUMKM), Certificate Of Lands Right Loan, Revolving Fund East Java Province Loan, Laguna Credit & Kredit Laguna Industri Primer, Kredit Pundi Kencana & Kredit Pundi Kencana LPDB KUMKM, Linkage Program BPR Member Of APEX Credit, Linkage Program BPR NON APEX Credit)	
Business	
• Loans (Property Construction Loan, Bank Guarantee, Checking Account, Investment Loan, Kredit Modal Kerja, Syndicated Loans, Financing Receivables Loan, Cash Collateral Credit, Local Government Loan, BLUD (Bureau Of Public Service Area) Loan)	
• Treasury & Valuta Asing (Common Foreign Exchange, Hedging Forward Contract, Hedging Swap, Bank Notes, Deposit On Call, List Of Underlying Documents)	
Sharia	
• Savings (Barokah Saving, Amanah Haji Saving, Umroh IB Amanah Saving, TabunganKu IB, Simpel IB Saving, IB Barah Plan Saving)	
• Financing (Multiguna Sharia, Kafalah Product, Emas IB Barokah, Kepemilikan Logam Emas IB Barokah, Consumptive And Productive, Umroh IB Maqbulah, KPR IB Barokah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik)	
• Deposits (Barokah Deposit)	
• Giro (Giro Amanah, Giro Maxi)	
Services	
• Jatim Priority (Layanan Jatim Prioritas, Merchant Relationship Program)	
• E-Channel (ATM, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Virtual Account, Bank Jatim Flazz Card, Electronic Government Staff Card, E-Samsat Jatim)	
• Foreign Exchange Transaction (Remittance, L/C (Letter Of Credit), Import Tax, SKBDN (Letter Of Credit Undocumented Affairs), Bank Guarantee Forex)	
• Safe Deposit Box	
• BPD Net Online	
• Money Transfer	
• Other Banking Service	
• Laku Pandai	
Investor Relations	
• Investor Guide	
• BJTM Profile (Investor Relations, BJTM Share, Prospektus, Institutions & Professions Supporting Capital Market)	
• BJTM Fundamental Statistics (Bank At Indonesia, IR Weekly Review, Financial Statistics, Financial Performance, Research Analysis)	
Corporate Governance	
• Good Corporate Governance Implementation	
• Public Accountant	
• Code Of Conduct	

• Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
• Anggaran Dasar
• Audit Intern
• Laporan Tata Kelola Perusahaan
• Unit Usaha Syariah
• Akses Informasi & Data Perusahaan
• Dewan Komisaris & Direksi
• Pedoman dan Tata Tertib Komite
BankJatim Peduli
• Profil
• Komitmen
• Program
• Laporan
Suku Bunga
• Suku Bunga
• Nisbah Bagi Hasil
• Suku Bunga Dasar Kredit
• Kurs
• Suku Bunga LPS & BI Rate
• Simulasi (Simulasi Kredit, Simulasi Deposito, Simulasi Kurs, Investasi Kalkulator)
Info
• Berita
• Lelang Agunan
• Edukasi (Jasa Perbankan, Mediasi Perbankan, Mekanisme Pengaduan Nasabah, Tips Keamanan Perbankan)
• Pengumuman
• Jaringan Kantor
• Lelang Pengadaan
• Majalah
• Call Center
• Hubungi Kami

• Minutes Of General Meeting Shareholders
• Articles Of Association
• Internal Audit
• Good Corporate Governance Reports
• Sharia Business Unit
• Information & Company Data Access
• Board Of Commissioners & Board of Directors
• Committees Charters & Structure
Bank Jatim Peduli
• Profile
• Commitment
• Program
• Report
Exchange Rates
• Rate
• Table of Profit Sharing
• Prime Lending Rate
• Exchange Rate
• LPS & BI Rate
• Simulation (Syariah Simulation Form, Credit Simulation, Deposit Simulation, Exchange Simulation, Investment Calculator)
Info
• News
• Auction
• Education (Banking Services, Banking Mediation, Customer Complaints Mechanism, Banking Security Tips)
• Announcement
• Office Network
• Procurement
• Magazine
• Call Center
• Contact Us

KODE ETIK PERUSAHAAN

CODE OF CONDUCT

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Kode Etik Bank Jatim Diatur dalam buku pedoman No. 058/116/DIR/PRS/KEP tentang pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis (*code of conduct*) tanggal 14 Mei 2019. Implementasi Kode Etik merupakan suatu keharusan yang arahnya adalah menjadikan tata kelola sebagai budaya perusahaan yang terukur melalui pedoman perilaku serta etika kerja & bisnis. Kode Etik merupakan referensi utama tentang sikap atau tindakan yang wajib dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan Insan Bank Jatim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di lingkungan Bank Jatim. Artinya pengurus dan pegawai wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik yang ada di Bank Jatim.

Ruang lingkup Kode Etik meliputi:

- Hubungan Perusahaan dengan *Stakeholders*, misalnya: pedoman untuk organ Bank dan seluruh pegawai.
- Perilaku Lingkungan internal (Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai) dengan lingkungan eksternal misalnya benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan dan kerahasiaan informasi.

POKOK KODE ETIK

Kode Etik atau Budaya Perusahaan merupakan suatu pedoman yang berfungsi sebagai:

1. Kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai yang menetapkan standar perilaku baik Bagi Pengurus maupun Pegawai dalam mewujudkan GCG dan budaya kerja Bank.
2. Acuan bagi setiap insan Bank dalam berperilaku yang baik dan profesional untuk mengatur diri sendiri atas dasar kepentingan bersama dengan semua *stakeholders*.
3. Dasar dalam menetapkan produk/jasa serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bank dipandang telah memenuhi pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis yang ditetapkan.
4. Acuan untuk menjaga hubungan yang baik antara insan Bank dengan pihak-pihak luar yang terkait berlandaskan prinsip-prinsip GCG serta penerapan perilaku, etika kerja dan bisnis. Penerapan *Code of Conduct* merupakan keharusan dan wajib dipatuhi oleh setiap insan Bank secara konsisten yang menunjukkan bahwa Bank menjunjung nilai-nilai budaya serta etika bisnis dan perilaku dalam menjalankannya. Sebagai pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis Bank, *Code of Conduct* sejalan dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Bank dan didukung oleh nilai-nilai yang dijunjung tinggi sesuai budaya kerja Bank (*corporate culture*) yang berlaku.

PENGUNGKAPAN PENERAPAN KODE ETIK

Implementasi *Code of Conduct* merupakan kewajiban bagi pengurus dan pegawai Bank. *Code of conduct* ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktik manajemen. Dalam rangka membangun komitmen penerapan kode etik, maka seluruh pengurus dan pegawai akan menerapkan kode etik dengan komitmen dan konsisten, yang didokumentasikan melalui penandatanganan Pakta Integritas atau Pernyataan

SCOPE OF CODE OF CONDUCT

Bank Jatim's Code of Conduct is regulated in manual book No. 058/116/DIR/PRS/KEP concerning code of conduct, work ethics and business (code of conduct) dated May 14, 2019. Implementation of the Code of Conduct is a must of which lead to making governance as a company culture that can be measured through guidelines for behavior and work & business ethics. The Code of Conduct is the main reference about the attitudes or actions that must be taken and which should not be carried out by Bank Jatim Personnel in carrying out daily activities within the Bank Jatim environment. This means that managers and employees are obliged to obey and comply with the code of conduct in Bank Jatim.

The scope of the Code of Conduct includes:

- Company Relationships with Stakeholders, for example: guidelines for Bank organs and all employees.
- Behavior of internal environment (Board of Commissioners, Directors, and employees) with the external environment such as conflicts of interest, giving and receiving gifts and donations, compliance with regulations and confidentiality of information.

PRINCIPALS OF CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct or Corporate Culture is a guideline that functions as:

1. Codification or compilation of policies, employee regulations that set standards of behavior both for Management and Employees in realizing GCG and the Bank's work culture.
2. Reference for every Bank employee in good and professional behavior to regulate themselves based on mutual interests with all stakeholders.
3. The basis for determining service products and various activities carried out by the Bank are deemed to have fulfilled the specified code of conduct, work ethics and business.
4. Reference to maintain a good relationship between the Bank's personnel and related external parties based on GCG principles and the application of behavior, work ethics and business. The implementation of the Code of Conduct is a must and must be obeyed by every Bank employee consistently showing that the Bank upholds cultural values as well as business ethics and behavior in carrying it out. As a code of conduct, and work and business ethics of the Bank, the Code of Conduct is in line with the vision and mission to be achieved by the Bank and supported by values that are upheld in accordance with the prevailing corporate culture.

DISCLOSURE ON CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION

Implementation of the Code of Conduct is an obligation for the Bank's management and employees. This code of conduct will always be used as a guideline in the formulation of policies, manuals/procedures and management practices. In order to build commitment to the implementation of the code of conduct, all management and employees will apply the code of conduct with commitment and consistency, which is

Sikap Insan Bank Jatim tentang penerapan *Code of Conduct*. Pakta integritas ini berlaku sampai yang bersangkutan tidak aktif bekerja di Bank Jatim.

documented through the signing of the Integrity Pact or Statement of Attitudes of Bank Jatim's Personnel regarding the implementation of the Code of Conduct. This integrity pact is valid until the person concerned is not actively working at Bank Jatim.

PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Sarana penyebarluasan Kode Etik di antaranya:

- Portal Human Capital
- Portal Kepatuhan
- Pakta Integritas
- *Campaign Program*, meliputi:
 - *Printed advertising* (poster, banner, hanging banner, stiker, dan *standing mika*)
 - *Campaign* lainnya berupa agenda, *mouse pad*, *flashdisk*, kipas kertas, payung, *tumbler*, *powerbank*, dan pin baju

Salah satu bentuk kampanye *risk culture* adalah melalui penggunaan pin pada sebelah kiri seragam

One of the forms of risk culture campaign is through the use of a pin attached on the left side of the uniform

- Portal dan Identitas Perusahaan
- Kuis
- Media Sosial
- *Employee Involvement Campaign* di antaranya Lomba cipta lagu *Expressi*
- *Leaders Talks Values*

DISSEMINATION OF CODE OF CONDUCT

Facilities for the dissemination of Code of Conduct are as follows:

- Human Capital portal
- Compliance portal
- Integrity Pact
- Campaign Program, covering:
 - Printed advertising (posters, banners, hanging banners, stickers, and standing mika)
 - Other campaigns in the form of agenda, mouse pads, flashdisks, paper fans, umbrellas, tumblers, power banks, and pins

- Corporate Portal and Identity
- Quizzes
- Social Media
- Employee Involvement Campaign, among others, Song Creation Competition "Expressi"
- Leader Talks Values

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Sanksi pelanggaran Kode Etik diatur dalam buku pedoman No. 058/251/DIR/HCP/KEP tentang pedoman pelaksanaan reward and punishment system tanggal 6 September 2019. Sanksi akan diberikan pada setiap insan Bank Jatim yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan secara sah pelanggaran itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Bobot sanksi baru dapat ditentukan setelah jenis pelanggaran diketahui. Semua jenis sanksi administratif yang berupa hukuman jabatan ringan, sedang, maupun berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, dan yang bersangkutan akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan yang dibiayai oleh Bank selama yang bersangkutan belum selesai menjalani hukuman dan/ mendapatkan rehabilitasi dari Direksi.

SANCTION FOR CODE OF CONDUCT VIOLATIONS

Sanctions for violations of the Code of Conduct are regulated in manual book No. 058/251/DIR/HCP/KEP concerning guidelines for implementing the reward and punishment system on September 6, 2019. Sanctions will be given to each personnel of the Bank who has been proven to have violated and legally violated by the person concerned. New sanctions can be determined after the type of violation is known. All types of administrative sanctions in the form of mild, moderate, or severe sentence are determined by a Decree of the Board of Directors, and the person concerned will lose the opportunity to attend education/training funded by the Bank as long as the person concerned has not finished serving and is receiving rehabilitation from the Board of Directors.

TINGKATAN SANKSI ADMINISTRATIF

- Bukan hukuman jabatan
- Peringatan pembinaan:
 - teguran lisan dengan membuat berita acara
 - teguran tertulis
 - pernyataan tidak puas secara tertulis
- Hukuman jabatan ringan

LEVEL OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS

- punishment unrelated to position
- Coaching warning:
 - verbal reprimands by making minutes
 - written warning
 - statement not satisfied in writing
- Light penalties related to position

- Penundaan kenaikan gaji karena KPI untuk masa paling lama 1 (satu) tahun
- Penurunan personal *grade* 1 (satu) tingkat atau 2 (dua) tingkat
- Hukuman jabatan sedang
 - Demosi 1 (satu) tingkat
 - Demosi 2 (dua) tingkat atau lebih
- Hukuman jabatan berat
 - Pencabutan mandat memegang jabatan
 - Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri
 - Pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri
 - Pemberhentian dengan tidak hormat

- Postponement of salary increase due to KPI for a maximum period of 1 (one) year
- Personal grade decrease of 1 (one) level or 2 (two) levels
- Medium penalties related to position
 - Demotion of 1 (one) level
 - Demotion of 2 (two) levels or more
- Severe penalties related to position
 - Revocation of position mandate
 - Dismissal with respect at own request
 - Dismissal with respect not on own request
 - Dismissal with no respect

PELANGGARAN KODE ETIK BESERTA SANKSI YANG DIBERIKAN PADA TAHUN BUKU 2019

No.	Cabang/ Divisi	Pelanggaran	Piak Terlibat	Sanksi Pelanggaran
1	Cabang	Penyalahgunaan Narkotika	1	Demosi 1 (satu) tingkat
2	Cabang	Kelalaian prosedur yang berakibat penyalahgunaan Uang Setoran SPP Siswa SMAN (Nasabah) oleh Petugas Dash Pick Up	3	Teguran Lisan
3	Cabang	Pelanggaran prosedur perkreditan untuk kepentingan pribadi	3	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, Teguran Tertulis
4	Cabang	Pemalsuan Data Kredit Fiktif Debitur Multiguna	6	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, Teguran Lisan
5	Cabang	Kesalahan Prosedur Pencairan Kredit Standby Loan	3	Teguran Lisan, teguran Tertulis
6	Cabang	Penyalahgunaan transaksi penarikan tunai	4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, Teguran Lisan
7	Cabang	Indikasi Fraud	6	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, Teguran Lisan
8	Cabang	Pelanggaran prosedur permasalahan kredit investasi umum	4	Teguran Lisan
9	Cabang	Penyalahgunaan Dana Angsuran Cash Pick Up Nasabah (Debitur) Kredit Mikro	4	Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, Ekstra 1 Tahun
10	Cabang	Kelalaian prosedur dalam analisa pembiayaan dan penerimaan fee/komisi oleh petugas dari debitur KPR	4	Demosi 1 (satu) tingkat, Teguran Lisan
11	Divisi	Permasalahan Kredit Debitur	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
Total			39	

VIOLATIONS OF CODE OF CONDUCT AND SANCTIONS GIVEN IN 2019 FISCAL YEAR

No.	Branch/ Division	Violation	Number of Involved Parties	Sanction for Violators
1	Branch Office	Use of Drugs	1	Demotion by 1 (one) level
2	Branch Office	Procedure negligence by a Cash Pick-Up Officer which resulted in misuse of Tuition Fee deposited by High School Student customers	3	Reprimand
3	Branch Office	Violation of lending procedure for personal purposes	3	Termination of Work Contract, Written warning
4	Branch Office	Forgery of fictitious credit data of multiguna debtors	6	Termination of Work Contract, Oral warning
5	Branch Office	Mistake in the procedure for Standby Loan disbursement	3	Oral Warning, written warning
6	Branch Office	Misuse of cash withdrawal transaction	4	Termination of Work Contract, Oral warning
7	Branch Office	Fraud indication	6	Termination of Work Contract, Oral warning
8	Branch Office	Violation of procedure for general investment non-performing loan	4	Oral warning
9	Branch Office	Misuse of Installment Funds Cash Pick-Up of a Micro Loan Customer (Debtor)	4	Written Letter of Disappointment, Extra 1 Year
10	Branch Office	Procedure negligence by an officer for KPR debtor in analyzing payment and receipt of fee/ commission	4	Demotion by 1 (one) level, Oral warning
11	Division	Issue in a debtor's credit	1	Termination of Work Contract
Total			39	

KEBIJAKAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA INSIDER DEALING

Kebijakan Bank Jatim dalam mencegah terjadinya insider trading diatur dalam buku pedoman nomor 057/008/DIR/KEP/TRE tanggal 11 Januari 2018 tentang Kode Etik Pasar Atas Aktivitas Tresuri.

Insider Dealing adalah adanya informasi orang-dalam non-publik yang material dan informasi tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi atau pihak terkait dengan melakukan transaksi instrumen keuangan yang terkait dengan informasi tersebut. Para pegawai Bank khususnya yang berada di lingkungan Tresuri dilarang terlibat maupun melakukan insider dealing.

Para dealer tresuri dilarang secara sengaja atau tidak sengaja, mendapat keuntungan atau mencari keuntungan dari informasi rahasia, atau membantu orang lain dengan informasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi Bank atau nasabah mereka. Oleh karena itu, para *dealer* tresuri Bank memiliki kewajiban untuk memahami persyaratan dari peraturan perundangan terkait yang mengatur mengenai *insider dealing* dan penyalahgunaan pasar sendiri dan pasar lainnya.

BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam menjalankan aktivitas bisnis yang berpedoman pada tata kelola, sebuah Bank wajib melakukan pengelolaan benturan kepentingan. Pengelolaan benturan kepentingan ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang memprioritaskan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan meningkatkan hubungan baik dengan pemasok, nasabah, serta pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya.

Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 053/282/SE/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015.

PENGLOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Hubungan yang menimbulkan benturan kepentingan

- Hubungan Kepengurusan, bila Pengurus dan/atau pegawai Bank Jatim menjabat sebagai pengurus dan/atau pejabat eksekutif pada perusahaan lain yang memiliki hubungan bisnis dengan Bank.
- Hubungan Keuangan, bila Pengurus dan/atau pegawai Bank Jatim menerima penghasilan, bantuan Keuangan atau pinjaman dari pemegang saham, nasabah/debitur, pemasok, mitra kerja, dan lainnya dalam rangka bisnis Bank.
- Hubungan kepemilikan, bila pengurus dan/atau pegawai Bank Jatim menjadi Pemegang Saham Pengendali di perusahaan lain yang memiliki hubungan bisnis dengan Bank.
- Hubungan kekeluargaan, sampai dengan derajat kedua secara vertikal dan horizontal.

PRINSIP PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

- Wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan memastikan terhindar dari kerugian/kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank yang mungkin timbul.
- Wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan yang terjadi.

POLICY TO PREVENT INSIDER DEALING

Bank Jatim's policy in preventing insider trading is regulated in manual book No. 057/008/DIR/KEP/TRE dated January 11, 2018 concerning the Market Code of Ethics on Treasury Activities.

Insider Dealing is the existence of material non-public insider information and the information is used for personal or party benefit related to conducting financial instrument transactions related to that information. Bank's employees, especially those within Treasury are prohibited from engaging in or doing insider dealing.

Treasury dealers are prohibited, intentionally or unintentionally, from gaining profit or seeking for profit from confidential information, or helping others with that information to benefit the Bank or their customers. Therefore, the treasury dealers of the Bank have an obligation to understand the requirements of the relevant laws and regulations governing insider dealing and misuse of the own market and other markets.

CONFLICT OF INTEREST

In carrying out business activities that are guided by governance, a bank is required to manage conflicts of interest. The management of this conflict of interest aims to create a work climate that prioritizes the interests of the bank above personal interests and the interests of improving good relations with suppliers, customers and other stakeholders.

Bank Jatim has policies and guidelines for conflict of interest as stipulated in the Circular Letter of Board of Directors No. 053/282/SE/DIR/KPTH dated December 31st, 2015.

MANAGEMENT OF CONFLICT OF INTEREST

Relationships that cause conflicts of interest are as follows:

- Management Relationship, if the Management and/or employees of the Bank serve as management and/or executive officers in other companies that have business relations with the Bank.
- Financial Relationship, if the Management and/or employees of the Bank receive income, financial assistance or loans from shareholders, customers/debtors, suppliers, business partners, and others in the context of the Bank's business.
- Ownership relationship, if the manager and/or employee of the Bank becomes a Controlling Shareholder in another company that has a business relationship with the Bank.
- Family relationship up to the second degree vertically and horizontally.

PRINCIPLES FOR MANAGING CONFLICT OF INTEREST

- Must prioritize the economic interests of the Bank and ensure that it avoids losses/possible losses of Bank profits that may arise.
- Must disclose the condition of the conflict of interest that occurred.

- Pemilik benturan kepentingan tidak diperbolehkan terlibat dalam seluruh tahapan/aktivitas pengambilan keputusan yang dimaksud.

- The owner of the conflict of interest is not allowed to be involved in all stages/activities of the intended decision making.

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

- Pengungkapan (*Disclosure*)
- Melalui sarana pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS)
- Penerapan pengendalian gratifikasi
- Penerapan Kebijakan Pengunduran Diri dari jabatannya dalam kegiatan politik saat yang bersangkutan menjabat sebagai pengurus dan/atau pegawai Bank Jatim.

HANDLING OF CONFLICTS OF INTEREST

- Disclosure
- Through Whistle Blowing System (WBS)
- Implementation of gratification control
- Implementation of Policy of Resignation from their position in political activities when the person concerned serves a management and/or employee of Bank Jatim.

PENGUNGKAPAN BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan adalah Tata Nilai yang dipahami dan diaplikasikan seluruh jajaran pegawai dalam menjalankan tugas dan profesinya serta interaksi keseharian.

Tata Nilai tersebut meliputi:

- Orientasi Pada Pelanggan
- Kerjasama Tim
- Integritas
- Profesionalisme

Budaya Kerja ialah serangkaian anggapan-anggapan, nilai-nilai dan norma-norma yang membimbing bagaimana pegawai harus bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas.

- Kekuatan yang tidak terlihat yang mempengaruhi baik pemikiran, pembicaraan maupun tindakan manusia yang bekerja di dalam suatu organisasi
- Menentukan dan mengarahkan bagaimana perilaku pegawai dalam bekerja.
- Mendorong produktivitas pegawai sehingga meningkatkan hasil usaha Bank

DISCLOSURE OF CORPORATE CULTURE

Corporate culture is a value needs to not only understand but apply to all levels of staff in conducting out its duties and profession including its daily interactions in the Company.

Those values consist of:

- Customer Orientation
- Teamwork
- Integrity
- Professionalism

Work Culture is a series of premises, values, and norms guide how employees must behave in conducting their respective duties.

- Unseen forces affect both thoughts, speech, and actions that work within an organization
- Determine and direct how employees should behave at work
- Encouraging productivity of employee to improve the Bank'S business result

FUNGSI BUDAYA KERJA

1. Pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
2. Sebagai penyampai kesan identitas pegawai suatu perusahaan.
3. Pembangkit komitmen bersama atas hal yang lebih besar daripada sekedar kepentingan pribadi.
4. Menciptakan dan melaksanakan fungsi Pengendalian sehingga menumbuhkembangkan sikap dan perilaku positif pegawai.

FUNCTIONS OF WORK CULTURE

1. Distinguishing between one company with another company.
2. As an expression of the identity of an employee of a company.
3. Generating a joint commitment to something greater than just personal interests.
4. Creating and implementing Control functions so as to foster positive employee attitudes and behaviors.

MANFAAT BUDAYA KERJA

Bagi Pegawai:

- Memberi arahan dalam bertindak dan bersikap dalam bekerja.

BENEFITS OF WORK CULTURE

For Employees:

- Give direction in acting and behaving in the work.

- Memiliki persepsi yang sama dalam pencapaian tujuan perusahaan.
- Meningkatkan produktifitas dan prestasi pegawai

Bagi Perusahaan:

- Meningkatkan citra perusahaan.
- Sebagai acuan/pedoman dalam semua kebijakan.
- Mengurangi tingkat perputaran pegawai.
- Memperoleh dukungan semua pihak.

Sikap Dasar Budaya Kerja

1. Komitmen (Rasa Keterkaitan)
Seluruh jajaran harus merasa terikat erat dan mengenali falsafah perusahaan.
2. Kompetensi (Rasa Memiliki Kemampuan)
Pengembangan kemampuan dalam diri setiap individu dalam perusahaan sesuai dengan kompetensinya.
3. Konsisten

Sikap yang terpadu antara tindakan dengan kompetensi dari setiap individu.

5 (Lima) Pilar Budaya Kerja :

- Bank Jatim adalah Bank Umum Milik Pemerintah Daerah.
- Bank Jatim berorientasi pada pasar dan secara berkesinambungan membina hubungan yang saling menguntungkan dengan nasabah dan mitra usaha lainnya.
- Bank Jatim menerapkan *Good Corporate Governance* dengan mengutamakan prinsip ke hati-hatian guna menjaga kepercayaan masyarakat dan pemilik.
- Bank Jatim mengakui peranan dan menghargai kepentingan setiap pegawai.
- Bank Jatim mengupayakan terciptanya semangat kebersamaan agar pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional.

- Have the same perception in achieving company goals.
- Increase employee productivity and performance

For Companies:

- Improve company image.
- As a reference/guideline in all policies.
- Reducing employee turnover.
- Obtaining the support of all parties.

Basic Attitudes of Work Culture

1. Commitment (Sense of Relation) All levels must feel closely bound and recognize the company's philosophy.
2. Competence (Sense of Having Ability) Development of abilities in every individual in the company in accordance with their competencies.
3. Consistence

An integrated attitude between actions and competencies of each individual.

5 (Five) Pillars of Work Culture:

- Bank Jatim is a Commercial Bank Owned by the Regional Government.
- Bank Jatim is market-oriented and continuously fosters mutually beneficial relationships with customers and other business partners.
- Bank Jatim applies Good Corporate Governance by prioritizing the prudent principle in order to maintain the trust of the community and the owner.
- Bank Jatim recognizes the role and respects the interests of every employee.
- Bank Jatim strives to create a spirit of togetherness so that employees can carry out their duties and obligations professionally.

NILAI UTAMA BUDAYA BANK JATIM

EXCELLENCE

Selalu memberikan segala sesuatu melebihi ekspektasi. Dengan arti lain, senantiasa mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara terus menerus. perilaku utama:

FAST & SIMPLICITY

Senantiasa tanggap dan sigap dalam dinamika perubahan dengan menghadirkan produk dan layanan yang mudah digunakan oleh customer, Panduan Perilaku :

- Senantiasa berinisiatif secara konsisten untuk menawarkan dan memberikan solusi terbaik dengan cepat, tepat dan mudah
- Senantiasa memberikan kepastian produk dan layanan yang akurat, aman, nyaman, bernilai tambah dan memenuhi standar tinggi yang melampaui harapan customer

CORE VALUES OF BANK JATIM CULTURE

EXCELLENCE

Always provide and present everything exceeded expectations. In the other words, constantly develop and make improvements in all areas to achieve optimum added value, and the best results continuously. Key behaviors:

FAST & SIMPLICITY

Always be responsive over the dynamics of change by meeting customer needs, and presenting customer friendly products and services, behavior guidelines:

- Always consistently take initiatives to offer and provide the best quick, precise, and easy solution
- Always provide products and services which are accurate, safe, convenient, value added, and meet the standard that exceed customer expectations

- Senantiasa menyederhanakan masalah yang ada untuk memberikan solusi terbaik, cepat dan tepat bagi customer

AGILE & BUSINESS SAVVY

Bekerja dengan cepat, gesit, cekatan, responsive dan proaktif dalam menangkap peluang bisnis, yang diterapkan oleh seluruh insan perusahaan dengan perbaikan berkelanjutan, Panduan Perilaku :

- Senantiasa melihat dan menangkap peluang untuk memberikan nilai tambah kepada pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan
- Senantiasa bekerja dengan cekatan dalam melaksanakan tugas dan pro aktif dalam mendapatkan peluang yang ada
- Senantiasa fokus dan disiplin mengeksekusi prioritas
- Senantiasa melakukan evaluasi dan pemantauan secara rutin baik terhadap proses kerja maupun hasil kinerja untuk dapat mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan
- Senantiasa patriotis dan memiliki mental juara serta berani melakukan terobosan
- Luwes (tidak kaku) dan memiliki jiwa yang fleksibel sesuai situasi bisnis dan kebutuhan customer

PROFESSIONAL

Melaksanakan serta menguasai tugas dan tanggungjawabnya dengan berkomitmen untuk mencapai hasil yang optimal, perilaku utama:

EXECUTION & RISK TAKER

Melaksanakan keputusan manajemen dengan keberanian mengambil risiko yang diperlukan, Panduan Perilaku :

- Menyelesaikan pekerjaan secara tuntas, *akurat* dan tepat waktu
- Bekerja secara cerdas, yaitu efisien dan efektif, memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal
- Mengelola pekerjaan secara sistematis melalui proses perencanaan, pengorganisasian serta evaluasi dan pemantauan secara berkesinambungan
- Dalam upaya memberikan hasil yang terbaik, memiliki keberanian untuk mengambil risiko yang diperhitungkan secara cermat sehingga tidak akan merugikan kepentingan perusahaan
- Percaya diri atas hasil usaha dan peluang yang ada

PROACTIVE & ACCOUNTABLE

Mengambil inisiatif tinggi dengan melaksanakan pilihan berdasarkan prinsip dan nilai secara terbuka dan penuh tanggung jawab, Panduan Perilaku :

- Menetapkan standard yang tinggi sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja dan dengan penuh tanggung jawab berusaha mencapai standard kinerja yang telah ditetapkan
- Senantiasa memelihara gairah dan semangat yang tinggi dalam bekerja
- Menumbuhkan rasa ikut memiliki dan berani bertanggung jawab untuk setiap tindakan dan keputusan yang kita buat
- Bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi tercapainya visi dan misi Bank Jatim

- Always simplify the existing problems to provide the best solution, quickly and precisely to the customer

Agile & Business Savvy

Working fast, nimble, agile, responsive and proactive in capturing business opportunities, which is conducted by all employees with continuous improvement, behavior guidelines:

- Always seek and seize opportunities to contribute added value to the company growth continuously
- Always work diligently in performing the tasks and pro-active in capturing the opportunities exist
- Always keep focused and be discipline in executing the priority tasks
- Evaluating and monitoring both to the work process and the results of performance on a regular basis, to be able to identify opportunities for improvement
- Always be patriotic, have a winning mentality and the courage to make a breakthrough
- Have a flexible spirit which is appropriate to business environment and customer needs

PROFESSIONAL

Performing and mastering duties and responsibilities, and commit to achieve optimal results, key behaviors:

EXECUTION & RISK TAKER

Carry out management decisions with the courage to take the necessary risks, behaviors guidelines:

- Accomplish the tasks completely, accurately and on time
- Work smart, which is efficient and effective, by optimally utilizing resources to achieve maximum results
- Manage work systematically through the process of planning, organizing, evaluating, and continuously monitoring as well
- In an effort to provide the best results, have the courage to take necessary risks carefully, so as not to put the company interests aside
- Have self-confidence over the opportunities and results

PROACTIVE & ACCOUNTABLE

Taking the initiative to carry out alternatives based on the principles and values, openly and responsibly, behaviors guidelines:

- Set a high standard as a benchmark of the performance, and to achieve the performance standard with best effort and full responsibility
- Always maintain a high working passion and spirit
- Foster a sense of belonging and be responsible for every action and decision made
- Be responsible to contribute in the achievement of the vision and mission of the Bank Jatim

INTEGRITY

Sikap konsisten dalam pemikiran dan perilaku serta jujur baik pada diri sendiri maupun orang lain berdasarkan nilai-nilai etika, perilaku utama:

HONESTY

Menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan, keterbukaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, Panduan Perilaku :

- Senantiasa berkata dan bertindak berdasarkan kebenaran, sesuai fakta dan kenyataan yang terjadi
- Bertindak jujur, ikhlas, terbuka, rendah hati, sederhana, beretika, menepati janji dan komitmen yang telah disepakati serta bertindak dengan tepat pada situasi yang tepat
- Memelihara niat yang murni dan penuh kerelaan, bertindak semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi Bank Jatim tanpa pamrih, dan tanpa ada maksud tersembunyi
- Memelihara transparansi dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, dengan memberikan informasi yang relevan secara benar, tepat dan akurat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pribadi dan kerahasiaan
- Berani mengakui keterbatasan dan kesalahan, serta bersedia untuk melakukan perbaikan
- Menjadi teladan dalam segala situasi, melayani, menerima kritik, banyak mendengar
- Mematuhi aturan, kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku secara bijaksana dan dengan penuh tanggung jawab
- Mengambil keputusan secara bijaksana dalam berbagai situasi dengan tetap berpegang pada aturan dan kebijakan yang berlaku
- Memegang teguh prinsip dan pendirian yang diyakini benar dan tidak mudah berubah meskipun berada dalam tekanan atau situasi sulit
- Bekerja dengan penuh dedikasi, melindungi kepentingan dan kehormatan pribadi dan perusahaan serta selalu menjunjung tinggi kode etik profesi
- Menghindari peluang yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan
- Menjadi panutan dan teladan bagi orang lain dengan menjalankan apa yang diucapkan secara konsisten
- Menggunakan asset perusahaan dengan penuh tanggung jawab
- Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari tekanan maupun pengaruh dari pihak manapun
- Berani mengemukakan saran, pendapat dan kritik secara obyektif dan terbuka

TRUST

Sikap saling menghargai dan terbuka di antara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan, kejujuran dan iktikad baik dalam pelaksanaan pekerjaan, Panduan Perilaku :

- Memperlakukan rekan kerja, pelanggan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan penuh hormat dan santun
- Menjaga komunikasi yang penuh empati di antara sesama rekan kerja sehingga tercipta saling pengertian dalam hubungan interpersonalnya
- Menciptakan dan memelihara iklim lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman

INTEGRITY

To be consistent in thought and behavior, be honest to themselves and others based on ethical values, key behaviors:

HONESTY

Uphold honesty, sincerity, openness with regard to the principles of prudence, behaviors guidelines:

- Always speak and act on the truth, according to the fact and reality
- Act honest, sincere, open, humble, simple, ethical, keep promises and commitments made, and to act appropriately in the right situation
- Maintain a sincere intention and full compliance, act solely for the best interests of the Bank Jatim unconditionally, and without any ulterior motives
- Maintain transparency in every action and decision-making, by providing relevant information correctly and accurately, while upholding the principles of privacy and confidentiality
- Have the courage to recognize the limitations and mistakes, and be willing to make improvements
- Be a role model in all circumstances, to serve, to accept criticism, and be willing to listen more
- Comply with the rules, policies and procedures, and prevailing regulation wisely and responsibly
- Make wise decisions in various situations by sticking to the applied rules and policies
- Uphold the principles and stance which is believed to be right, and not easy to change, even under pressure or difficult situations
- Work with dedication, protect the honor and interests of personal and the company, and always uphold the professional code of ethics
- Avoid opportunities that enables the conflict of interest
- Be a role model and benchmark for others by consistently doing what the talked
- Use company property in a responsible manner
- Make decisions objectively and free from pressure or influence from any other party
- Have the courage to put forward suggestions, opinions and criticism objectively and openly

TRUST

Mutual respect and open attitude among fellow members of the company based on confidence, honesty and good faith in the execution of the work, behaviors guidelines:

- Treat co-workers, customers and all stakeholders with respect and courtesy
- Keep an empathetic communication between co-workers so as to create mutual understanding in interpersonal relationships
- Create and maintain a conducive and comfortable climate of working environment

- Menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab sehingga tumbuh suatu kepercayaan yang langgeng. Menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun golongan
- Menjalani kerja sama antar individu dan antar unit kerja untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tercapainya tujuan organisasi
- Saling memberikan bantuan dan dukungan yang positif terhadap sesama rekan kerja dan berkontribusi aktif untuk mencapai tujuan bersama
- Menghormati perbedaan di antara para pegawai dan menjadikan perbedaan itu sebagai titik awal untuk mencapai sinergi

SYNERGY

Kerjasama yang saling menguntungkan yang dilakukan dengan komitmen untuk meningkatkan nilai tambah bagi kedua belah pihak, perilaku utama:

RESPECT

Menerapkan sikap saling menghargai, menghormati dan membimbing dengan tulus ikhlas dengan menjunjung tinggi nilai kesopanan, Panduan Perilaku :

- Berbuat kepada orang lain sebagaimana harapan bagaimana diperlakukan orang lain
- Senantiasa berbaik sangka kepada orang lain
- Menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan orang lain
- Menghindari perilaku yang merusak diri
- Menghargai keunikan diri sendiri, mengembangkan diri dan atasi kelemahan

COLLABORATION

Bersama menciptakan nilai tambah untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, Panduan Perilaku :

- Berorientasi pada hasil yang positif
- Saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dan atau kesepakatan
- Sangat suka berdiskusi dan menjaga efektivitasnya
- Rasa memiliki yang tinggi
- Menghargai dan memberikan pengakuan serta memiliki standar etos kerja yang tinggi

INNOVATION

Kreativitas atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan menjadikan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik secara terus menerus sesuai kebutuhan customer, perilaku utama:

EAGER TO LEARN

Perilaku pegawai yang senantiasa meningkatkan pengetahuan diri agar perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan, Panduan Perilaku :

- Rasa ingin tahu yang tinggi, optimis, ikhlas, konsisten dan visioner

- Carry out the mandate given with full commitment and responsibility to build a sustainable trust, and put any corporate interests above personal or group interests
- Establish cooperation between individuals and working units to jointly work toward the achievement of organizational goals
- Provide assistance and positive support for fellow co-workers, and contributes actively to achieve shared goals
- Respect the differences between employees, and make the differences as a starting point to create synergy

SYNERGY

Mutually beneficial cooperation undertaken with a commitment to increase the added value for both parties, key behaviors:

RESPECT

Implement mutual appreciation, respect and guide sincerely to uphold the values of decency, behaviors guidelines:

- Treat others as expectations of how to be treated by others
- Always be positive think to others
- Respect and uphold honor of others
- Avoid self-destructive Behavior
- Appreciate the uniqueness of themselves, develop and overcome weaknesses

COLLABORATION

Together create added value to create growth and development of the company, behaviors guidelines:

- Be positive result oriented
- Work together to achieve the shared goals and or agreements
- Very like to discuss and maintain effectiveness
- Have a high sense of belonging
- Appreciate, give recognition, and have a high standard of work ethic

INNOVATION

Creativity or the ability to produce something new and make something already become better continuously according to customer needs, key behaviors:

EAGER TO LEARN

The behavior of employees which constantly improve their knowledge that enable the company to grow in a sustainable manner, behavior guidelines:

- Have a high curiosity, optimistic, sincere, consistent and visionary

- Melakukan perbaikan berkelanjutan
- Selalu peka terhadap kebutuhan pelanggan dan proaktif untuk mengidentifikasi
- Senantiasa mengembangkan tingkat kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan sesuai tuntutan profesi
- Memiliki etos kerja yang baik untuk menjadi pembelajar sejati
- Memiliki semangat terus belajar sebagai bagian dari kehidupan, dan berproses mengubah tingkah laku menjadi lebih baik
- Suka bertemu orang baru, berdiskusi, berefleksi dan melakukan perubahan

- Perform continuous improvement
- Always be sensitive to customer needs, and proactively identify
- Constantly develop competency levels in order to meet the development and progress of the profession demands
- Have a good work ethic to become a true learner
- Have enthusiasm to keep learning as a part of life, and carry out the process of changing Behavior to be better
- Like to meet new people, discuss, reflect, and make changes

CREATIVITY

Senantiasa menciptakan sesuatu yang baru dan mengembangkan ide untuk mencapai hasil yang lebih baik, Panduan Perilaku :

- Inovatif dalam menciptakan peluang untuk mencapai kinerja melampaui ekspektasi
- Kreatif, inovatif, proaktif dan cepat tanggap dalam memberikan solusi terbaik
- Selalu fokus untuk memberikan layanan dengan nilai tambah spesifik yang dibutuhkan pelanggan
- Selalu inovatif dan berorientasi untuk memberikan solusi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan
- Bersikap empatik terhadap keluhan dan permasalahan pelanggan dan capat tanggap untuk dapat memberikan solusi terbaik untuk setiap keluhan nasabah
- Teguh dalam pendirian dan intuitif
- Fleksibel, elaboratif, imajinatif, inisiatif, percaya diri
- Minat yang luas dan tidak pernah bosan

CREATIVITY

Always create something new and develop ideas to achieve better results, behaviors guidelines:

- Be Innovative in creating opportunities to achieve beyond expectations performance
- Be creative, innovative, proactive and responsive in providing the best solution
- Always focus on providing services with specific added value as customer needs
- Always be innovative and oriented to provide solutions which meet customer needs
- Be empathetic to customer complaints and problems, and responsive to provide the best solution for each complaint
- Have a strong stance and be intuitive
- Be flexible, elaborative, imaginative, initiative, and self-confident
- Have broad interests and never get bored

KEBIJAKAN ANTI FRAUD

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada Bank, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau Bank, serta merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum maka diperlukan suatu peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko termasuk menerapkan strategi anti fraud.

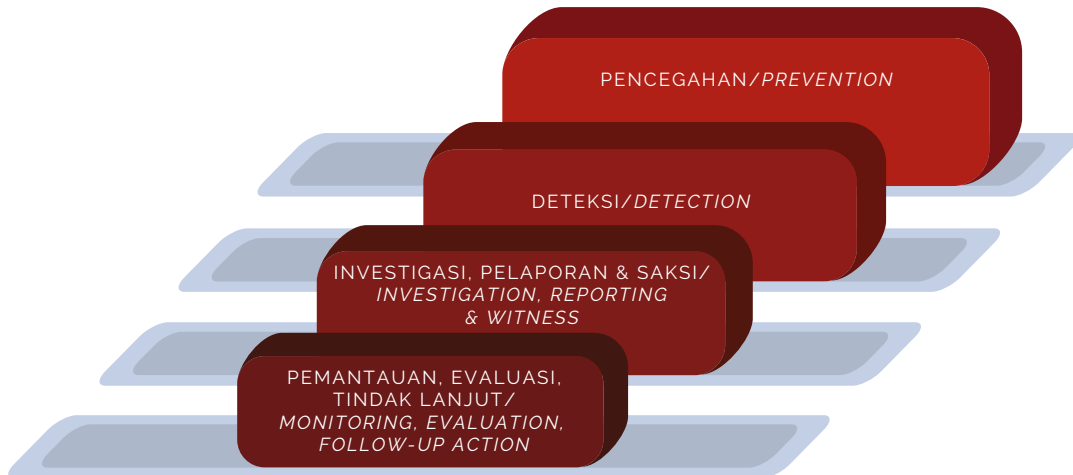
Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai dengan pedoman strategi *anti fraud* sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud*. Setiap kejadian *fraud* menjadi perhatian khusus dalam penyelesaian kasusnya, Pihak Manajemen Bank mengharuskan seluruh jajaran terkait dalam lingkungan internal Bank mempunyai kepedulian terhadap anti fraud. Kepedulian anti fraud diupayakan secara berkesinambungan dalam bentuk *zero tolerance* terhadap fraud.

ANTI-FRAUD POLICY

In order to prevent cases of operational irregularities at the Bank, especially fraud that can harm customers or the Bank, and refer to the Regulation of Financial Services Authority No. 39/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 regarding the Application of Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks, it is necessary an increase in the effectiveness of internal control in an effort to minimize the risk of fraud including implementing an anti-fraud strategy.

The implementation of the fraud control system has been carried out in accordance with the anti-fraud strategy guidelines in accordance with the Board of Directors Decree No. 050/119/KEP/DIR/AI dated June 29, 2012 concerning the Guidelines for Implementing the Anti-Fraud Strategy. Every fraud incident becomes a special concern in the resolution of the case, the Bank Management requires that all related parties within the Bank's internal environment have anti-fraud concerns. Anti-fraud awareness is continuously pursued in the form of zero tolerance towards fraud.

Empat Pilar Sistem Pengendalian Fraud Four Pillars of Fraud Control System



Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi-potensi risiko kerawanan merupakan *early warning* system terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi *fraud*, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu pelanggaran dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan *stakeholder* lain dalam melaporkan suatu pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran di Bank Jatim. Indikasi awal *fraud* berasal dari beberapa sumber yaitu *whistleblower* melalui *hotline* yang telah disediakan Bank, *Surprise Audit*, *Surveillance Audit* dan *General Audit*. Informasi awal tersebut kemudian dilakukan audit pendahuluan berupa penggalan informasi, pengujian bukti awal dan tambahan, pemeriksaan saksi.

Apabila dari audit pendahuluan tidak diperoleh cukup bukti sebagai tindakan *fraud* maka investigasi dihentikan, dan jika diperoleh cukup bukti sebagai tindakan *fraud*, maka dibuat laporan awal *fraud* yang dikirim ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Kemudian dilakukan audit khusus dan dilakukan pemantauan, evaluasi serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme *whistleblower* dilaksanakan langsung oleh Pemimpin Divisi Audit Intern dan 2 Pemimpin Sub Divisi sebagai pengendalian mutu. Pegawai yang terlibat kasus kecurangan dikenakan sanksi sesuai Pedoman *Reward & Punishment* Bank Jatim yang berlaku di antaranya surat peringatan, demosi hingga pemutusan hubungan kerja tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukan dan kerugian yang dialami. Dalam tiga tahun terakhir tidak terjadi kasus yang terbukti *fraud*.

Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower* sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas serta perbaikan penerapan Strategi *Anti Fraud* (SAF). Atas hal tersebut telah dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan program Strategi *Anti Fraud* (SAF), antara lain *surprise audit* (Operasional & Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.

Prevention and detection and identification of potential risks of vulnerability is an early warning system for the operational process. Identification of findings that indicate fraud, is implied in the whistleblowing policy and mechanism. Through this mechanism it is expected to detect early on the occurrence of a violation and can increase the level of participation of employees, customers and other stakeholders in reporting a violation and be used as an early warning of the possibility of a violation in the East Java Bank. Early indications of fraud came from several sources, namely whistleblowers through the hotline provided by the Bank, Surprise Audit, Surveillance Audit and General Audit. The initial information is then conducted a preliminary audit in the form of extracting information, testing initial and additional evidence, examining witnesses.

If from the preliminary audit there is not enough evidence as an act of fraud, the investigation is stopped, and if sufficient evidence is obtained as an act of fraud, an initial report of fraud is sent to the President Director and the Board of Commissioners. Then a special audit is conducted and monitoring, evaluation and reporting are carried out in accordance with applicable regulations. The whistleblower mechanism is implemented directly by the Head of the Internal Audit Division and 2 leaders of the Subdivisions as quality control. Employees involved in fraud cases are subject to sanctions in accordance with the Bank Jatim Reward & Punishment Guidelines in force including warning letters, demotion to termination of employment depending on the type of violation that has been committed and the loss suffered. In the last three years there have been no cases of proven fraud.

Bank Jatim will continue to strive to increase the understanding and concern of employees and other parties to report violations through whistleblower facilities so that they are expected to be able to create a clean and integrity work environment and improve the application of the Anti-Fraud Strategy (SAF). For this, the following steps have been taken:

1. Undertake Anti-Fraud Strategy (SAF) program, including surprise audit (Operasional & Credit).
2. Conducting socialization related to the implementation of anti-fraud strategy and whistleblowing system at the exit meeting results of the audit and employees including new employees.

3. Pemberian materi terkait penerapan strategi anti fraud dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem Strategi *Anti Fraud* (SAF).
5. Penandatanganan deklarasi *Anti fraud* oleh Manajemen yang baru dan penandatanganan Pakta Integritas Kepatuhan oleh seluruh Pegawai Bank Jatim.
6. Divisi Human Capital melakukan strategi dalam upaya melaksanakan program *Know Your Employee*.
7. Melakukan monitoring dan update Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) dalam aplikasi BPP, sehingga BPP beserta *update*-nya dapat diakses langsung oleh seluruh pegawai.
8. Mempercepat proses di Tim Hukuman Jabatan dalam pemberian *punishment* dan tindakan-tindakan sementara pada pegawai bermasalah sehingga menimbulkan efek jera serta melakukan pemantauan proses pemberian *punishment* pada pegawai bermasalah oleh Tim Hukuman Jabatan.
9. Divisi Human Capital tetap meminta rekomendasi Divisi Audit Intern dalam pelaksanaan pengangkatan, promosi dan pemberhentian (*resign*) pegawai.
10. Bank akan melakukan evaluasi dengan pembagian kuesioner terkait pemahaman pegawai terkait *Anti Fraud* dan akibat terjadinya *fraud*.
11. Bank akan membuat brosur/poster yang bertemakan tentang pemberitahuan bahaya *fraud* dan *Hotline Whistleblowing*.

Sebagai upaya untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan GCG, Divisi Audit Intern terus berupaya mewujudkan *no fraud* melalui penyelenggaraan pembelajaran/pelatihan kepada Auditor khususnya terkait investigasi untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan dan kecakapan dalam bertugas.

3. Provision of material related to the implementation of anti-fraud and whistleblowing systems in the employee promotion program education schedule.
4. Development of an Anti-Fraud Strategy system.
5. The signing of the Anti-fraud declaration by the new Management and the signing of the Compliance Integrity Pact by all Bank Jatim Employees.
6. Divisi Human Capital melakukan strategi dalam upaya melaksanakan program *Know Your Employee*.
7. Melakukan monitoring dan update Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) dalam aplikasi BPP, sehingga BPP beserta *update*-nya dapat diakses langsung oleh seluruh pegawai..
8. Speed up the process of the Position Punishment Team in the provision of punishment and temporary actions on troubled employees so as to create a deterrent effect and monitor the process of providing punishment to problem employees by the Position Punishment Team.
9. The Human Capital Division continues to request recommendations from the Internal Audit Division for the appointment, promotion and retention of employees.
10. The Bank will conduct an evaluation by distributing questionnaires related to employee understanding related to Anti-Fraud and the consequences of fraud.
11. The bank will create a brochure/poster with the theme of notification of the dangers of fraud and the Whistleblowing Hotline.

In an effort to further optimize the implementation of GCG, the Internal Audit Division continues to realize no fraud through the implementation of learning/training to the Auditor, especially related to investigations to improve competence, skills and skills in the task.

KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI

PEDOMAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
3. UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ANTI-GRATIFICATION POLICY

GUIDELINES

1. Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism;
2. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission as amended by Law No. 10 of 2015 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law No. 01 of 2015 concerning Amendments to Law No. 30 of 2002 concerning the Eradication Commission Corruption Act becomes Law;
3. Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Acts as amended by Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

PENERAPAN ANTI GRATIFIKASI

1. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang di ketuai oleh Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola (SK nomor 058/052/DIR/KPT/KEP tanggal 11 Maret 2019).

KOMITMEN

1. Sosialisasi & Penandatanganan Komitmen Anti Gratifikasi antara Bank Jatim dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 13 Maret 2019

2. Pencegahan Gratifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) di Jawa Timur pada 23 April 2019 dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemberantasan Korupsi

Koordinasi program pencegahan tindak pidana korupsi bidang optimalisasi pendapatan daerah seluruh provinsi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2019, serta tindak lanjut monitoring terkait optimalisasi pendapatan daerah dilaksanakan di Malang pada tanggal 12 Desember 2019.

3. Surat Himbuan untuk Seluruh Cabang dan Divisi untuk tidak menawarkan dan memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam bentuk apapun pada 01 Maret 2019.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Bank Jatim memiliki dan menerapkan kebijakan serta sistem pelaporan pelanggaran sebagai wujud nyata upaya pengendalian internal, dan telah melakukan peningkatan secara bertahap baik mengenai mekanisme pelaporan hingga sosialisasi media pelaporan. Bank Jatim melaksanakan kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan bisnis.

MEKANISME SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus penyimpangan operasional pada Bank, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau Bank dan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum maka diperlukan suatu peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* termasuk menerapkan strategi *anti fraud*. Sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi *anti fraud* di Bank Jatim yaitu Divisi Audit Intern.

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai dengan pedoman strategi *anti fraud* sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Setiap kejadian *fraud* menjadi perhatian khusus dalam penyelesaian kasusnya, pihak

4. Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption (Corruption Law)

APPLICATION OF ANTI-GRATUITY

1. Formation of the Gratuity Control Unit (UPG) which is chaired by the Compliance and Governance Division (SK No. 058/052/DIR/KPT/KEP dated March 11, 2019).

COMMITMENT

1. Socialization & Signing of Anti-Gratification Commitment between Bank Jatim and the Corruption Eradication Commission on March 13, 2019

2. Prevention of Gratification and Optimization of Regional Revenues (OPD) in East Java on April 23, 2019 by involving the Provincial Government of East Java and the Corruption Eradication Commission

The coordination of the corruption prevention program in the area of optimizing regional income throughout the East Java province in Surabaya on October 24, 2019, as well as the follow up of monitoring related to optimizing regional income was carried out in Malang on December 12, 2019.

3. Appeals for All Branches and Divisions not to offer and provide gratuities in any form to the Civil Servants or State Administrators in any form on March 1, 2019.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Bank Jatim owns and implements violation reporting policies and systems as a concrete manifestation of internal control efforts, and has made gradual improvements in both the reporting mechanism to the reporting media dissemination. Bank Jatim carries out a policy regarding the whistleblowing system as a whole in every aspect of business activities.

WHISTLEBLOWING SYSTEM MECHANISMS

In order to prevent the occurrence of cases of operational irregularities at the Bank, in particular fraud that can harm the customer or the Bank and the issuance of Circular Letter of Bank Indonesia No. 13/28/DPNP dated December 9, 2011 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks, it is necessary to increase the effectiveness of internal control in an effort to minimize the risk of fraud including implementing an anti-fraud strategy. The organizational system responsible for implementing the anti-fraud strategy at Bank Jatim is the Internal Audit Division.

The implementation of the fraud control system has been carried out in accordance with the anti-fraud strategy guidelines according to Board of Directors Decree No. 050/119/KEP/DIR/AI dated June 29, 2012 concerning the Guidelines for Implementing Anti-Fraud Strategies of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Every fraud incident becomes a special

manajemen Bank mengharuskan seluruh jajaran terkait dalam lingkungan internal Bank mempunyai kepedulian terhadap *anti fraud*.

Kepedulian *anti fraud* diupayakan secara berkesinambungan dalam bentuk *zero tolerance* terhadap fraud. Dalam penerapan strategi *anti fraud* berupa sistem pengendalian fraud, mencakup 4 (empat) pilar yang saling berkaitan yaitu pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan dan sanksi; dan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Keberhasilan penerapan strategi anti fraud secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi Anti Fraud yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi Bank.

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi risiko kerawanan merupakan *early warning system* terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi fraud, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu pelanggaran dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan *stakeholder* lain dalam melaporkan suatu pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran di Bank Jatim.

Kebijakan dan ruang lingkup pengaduan diatur sebagai berikut antara lain:

1. Sumber pelaporan *whistleblowing* dengan identitas
2. Pihak manajemen Bank menitikberatkan peningkatan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* pada pengungkapan dari pengaduan.
3. Manajemen Bank memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor *fraud* serta menjamin kerahasiaan identitas dan laporan *fraud* yang disampaikan.
4. Sarana pengaduan yang disediakan Bank berupa:
 - Datang langsung dan Surat ke Divisi Audit Intern Bank Jatim (Jln. Basuki Rahmat No.98 - 104 Surabaya)
 - SMS/Telepon ke 081330003040
5. Kriteria pengaduan fraud mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

concern in solving the case, the Bank's management requires that all related levels within the Bank's internal environment have anti-fraud concerns.

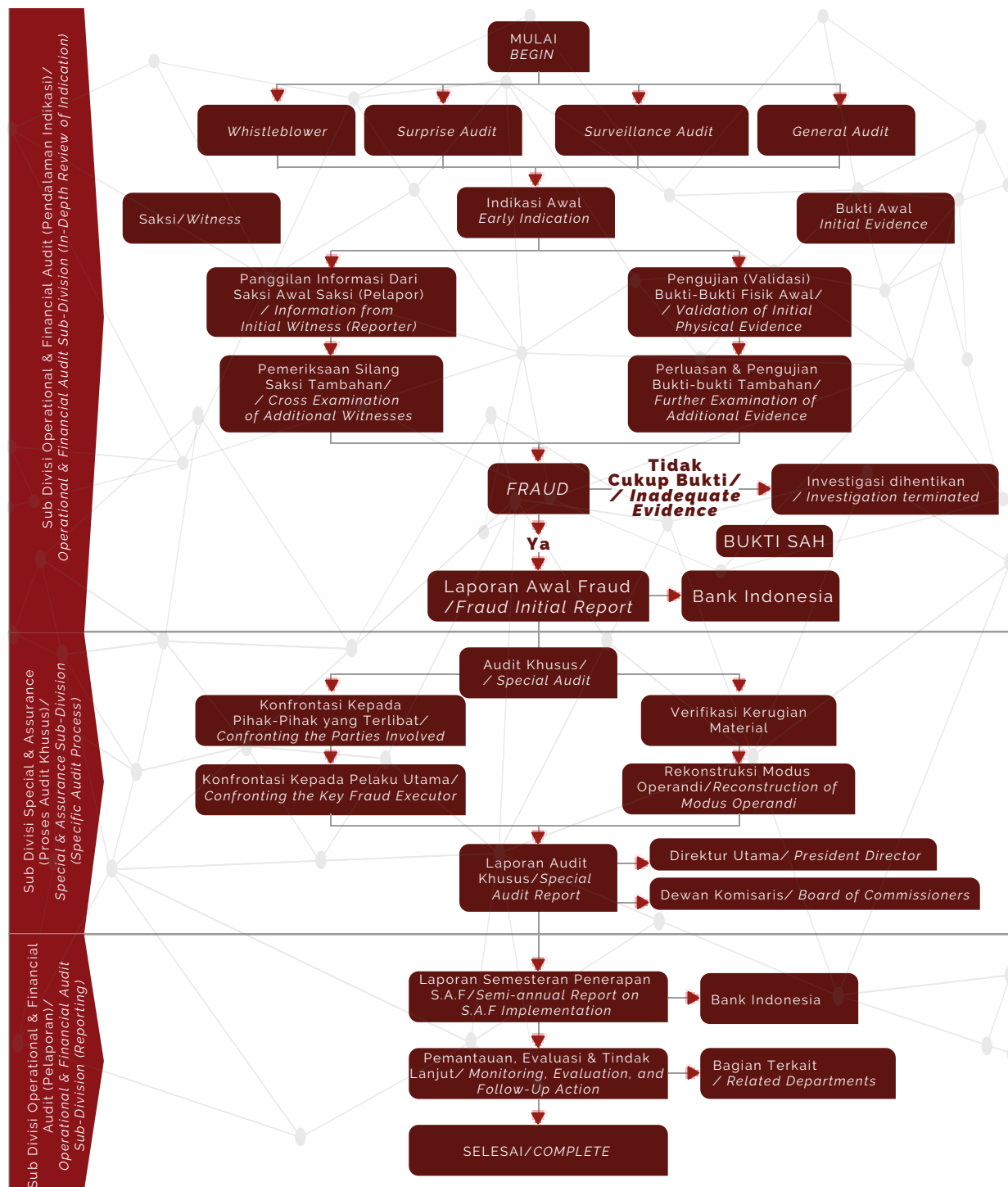
Anti-fraud awareness is continuously pursued in the form of zero tolerance for fraud. In implementing the anti-fraud strategy in the form of a fraud control system, it covers 4 (four) interrelated pillars, namely prevention; detection; investigation, reporting and sanctions; and monitoring, evaluation and follow-up.

The successful implementation of the overall anti-fraud strategy depends very much on the commitment and enthusiasm of the Board of Commissioners and Directors to foster a culture and anti-fraud concern at all levels of the Bank's organization. One of them is by making a written commitment called the Anti-Fraud Declaration signed by the Board of Commissioners, Directors and all employees of the Bank's organization.

Prevention and detection and identification of potential risks of vulnerability is an early warning system for the operational process. Identification of findings that indicate fraud, is implied in the whistleblowing policy and mechanism. Through this mechanism it is expected to detect early on the occurrence of a violation and can increase the level of participation of employees, customers and other stakeholders in reporting a violation and be used as an early warning of the possibility of a violation in the Bank.

The policy and scope of complaints are set as follows:

1. Source of whistleblowing reporting with identity
2. The Bank's management emphasizes the effectiveness of implementing a fraud control system on the disclosure of complaints.
3. Management of the Bank has a strong commitment to provide support and protection to each fraud reporter and to guarantee the confidentiality of the identity and report of fraud submitted.
4. Means of complaints provided by the Bank in the form of:
 - Come in person and write to the Bank Jatim Internal Audit Division (Jln. Basuki Rahmat No.98 - 104 Surabaya)
 - Text/Phone to 081330003040
5. Fraud complaint criteria refer to the provisions and applicable laws.



Indikasi awal *fraud* berasal dari beberapa sumber yaitu *whistleblower* melalui *hotline* yang telah disediakan Bank, *Surprise Audit*, *Surveillance Audit* dan *General Audit*. Informasi awal tersebut kemudian dilakukan audit pendahuluan berupa penggalian informasi, pengujian bukti awal dan tambahan, pemeriksaan saksi. Apabila dari audit pendahuluan tidak diperoleh cukup bukti sebagai tindakan *fraud* maka investigasi dihentikan, dan jika diperoleh cukup bukti sebagai tindakan *fraud*, maka dibuat laporan awal *fraud* yang dikirim ke Direktur Utama, Dewan Komisaris. Kemudian dilakukan audit khusus dan dilakukan pemantauan evaluasi serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Early indications of *fraud* came from several sources, namely *whistleblowers* through the *hotline* provided by the Bank, *Surprise Audit*, *Surveillance Audit* and *General Audit*. The initial information is then conducted a preliminary audit in the form of extracting information, testing initial and additional evidence, examining witnesses. If from the preliminary audit not enough evidence is obtained as an act of *fraud*, the investigation is terminated, and if sufficient evidence is obtained as an act of *fraud*, an initial report of *fraud* is sent to the President Director, the Board of Commissioners. Then a special audit is conducted and monitoring and evaluation are carried out in accordance with applicable regulations.

Terkait pelaporan *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank telah menerapkan mekanisme pelaporan berupa :

1. Pelaporan strategi *anti fraud* (SAF) yang dilaporkan rutin secara semesteran.
2. Laporan signifikan yang dilaporkan maksimal 3 hari setelah kejadian penyimpangan diketahui.

Mekanisme *whistleblower* dilaksanakan langsung oleh Pemimpin Divisi Audit Intern dan 2 Pemimpin Sub Divisi sebagai pengendalian mutu. Kedepannya terkait kerahasiaan data akan dikembangkan melalui *web based*.

PERLINDUNGAN KEPADA WHISTLEBLOWER

Sebagai bentuk komitmen Bank dalam menerapkan strategi anti fraud dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka Bank berkewajiban untuk :

1. Bank berkewajiban melindungi *whistleblower*.
2. Perlindungan yang diberikan Bank terhadap *whistleblower* dimaksudkan untuk mendorong keberanian *whistleblower* melaporkan pengaduan *fraud* secara jelas, terperinci dan transparan.
3. Perlindungan *whistleblower* mencakup perlindungan atas identitas *whistleblower* dan isi laporan.
4. Bank berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan Bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada *whistleblower*.
5. Semua laporan pengaduan *fraud* akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Bank dan *whistleblower* dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.
6. Bank memberikan perlindungan kepada *whistleblower* karyawan internal Bank dari hal sebagai berikut:
 - pemecatan;
 - demosi;
 - diskriminatif;
 - intimidasi; dan
 - perlindungan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Data base pengaduan dari *whistleblower* berada dan menjadi kewenangan dan tanggungjawab Divisi Audit Intern serta untuk informasi pengaduan merupakan tanggung jawab dari Sub Divisi Operational & *Financial Audit*.

Regarding fraud reporting to the Financial Services Authority (OJK) the Bank has implemented reporting mechanisms in the form of:

1. Anti-fraud strategy reporting, which is reported routinely on a semester basis.
2. Significant reports, which are reported a maximum of 3 days after the occurrence of irregularities are known.

The whistleblower mechanism is implemented directly by the Head of Internal Audit Division and 2 Sub-Division Heads as quality control. In the future, data confidentiality will be developed through web-based system.

PROTECTION OF WHISTLEBLOWERS

As a form of the Bank's commitment to implementing anti-fraud strategies and mechanisms for complaints of violations and guaranteeing protection for reporters in good faith, the Bank is obliged to:

1. Banks are required to protect whistleblowers.
2. The protection provided by the Bank against whistleblowers is intended to encourage the courage of whistleblowers to report fraud complaints in a clear, detailed and transparent manner.
3. Whistleblower protection includes protection of whistleblower identity and report content.
4. The Bank is committed to protecting whistleblowers in good faith and the Bank will comply with all relevant laws and regulations as well as best practices that apply in managing whistleblowers.
5. All reports of fraud complaints will be guaranteed confidentiality and security by the Bank and whistleblowers can obtain information about the progress of their complaints.
6. The Bank provides protection to internal Bank employee whistleblowers from the following:
 - dismissal;
 - demotion;
 - discriminatory acts;
 - intimidation; and
 - other protections in accordance with the prevailing laws and regulations.

PARTY MANAGING THE COMPLAINTS

The database of complaints from whistleblowers is the authority and responsibility of the Internal Audit Division and for information on complaints is the responsibility of the Operational & Financial Audit Sub-Division.

PENANGANAN PENGADUAN

Proses penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga tindakan merupakan *fraud* yang terdiri beberapa tahap antara lain:

1. Menelaah informasi yang masuk melalui *whistleblower* maupun dari hasil pemeriksaan tim audit intern Bank dan mengumpulkan bukti baik bukti fisik, Informasi tempat kejadian (informasi yang lainnya) dan pemanggilan para saksi terkait jenis penyimpangan yang terjadi serta orang yang terindikasi melakukan kejahatan (*fraud*).
2. Melakukan pemeriksaan dengan verifikasi bukti dan informasi serta dapat diyakini kebenarannya dan apabila verifikasi serta informasi tidak dapat diyakini maka bukti tersebut dijadikan sebagai dokumen/ arsip dan proses dihentikan.
3. Jika pelaku dan saksi tidak kooperatif (kerjasama) akan dilakukan konfrontasi.
4. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap kelemahan sistem prosedur, kelemahan sistem teknologi atau yang lainnya.
5. Dan menghitung perkiraan terjadinya kerugian (*financial loss*) yang terjadi dari tindakan *fraud* tersebut.

Pegawai yang terlibat kasus *fraud* dikenakan sanksi sesuai Pedoman *Reward & Punishment* Bank Jatim yang berlaku diantaranya surat peringatan, demosi hingga pemutusan hubungan kerja tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukan dan kerugian yang dialami.

Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower* sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan program Strategi Anti Fraud (SAF), antara lain surprise audit (Operasional & Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem SAF.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Bank Jatim telah melaksanakan kewajiban Bank kepada Bank Indonesia untuk melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku, publikasi penyampaian informasi melalui media cetak maupun situs web Bank sebagai berikut:

COMPLAINT MANAGEMENT

The process of investigating and collecting evidence related to events that are reasonably suspected of acts constituting fraud consisting of several stages including:

1. Reviewing information entered through the whistleblower or from the results of the examination of the Bank's internal audit team and collecting evidence of both physical evidence, information on the scene (other information) and summons of witnesses related to the type of irregularities that occurred and people who were indicated to have committed a crime (fraud).
2. Conducting an examination by verifying the evidence and information and the truth can be trusted and if the verification and information cannot be trusted then the evidence is made as a document/archive and the process is terminated.
3. If the perpetrators and witnesses are not cooperative (collaboration) confrontation will take place.
4. Carrying out examination on the weaknesses of the system procedure, the weakness of the technology system or others.
5. Calculating the estimated loss (financial loss) that occurs from the fraud.

Employees involved in fraud cases are subject to sanctions in accordance with the applicable Bank Jatim Reward & Punishment Guidelines including warning letters, demotion, to termination of employment depending on the type of violation that has been committed and the loss suffered.

Bank Jatim will continue to strive to increase the understanding and concern of employees and other parties to report violations through whistleblowing facilities so that they are expected to be able to create a clean and integrity work environment. In this regard, the following steps have been taken:

1. Undertake Anti-Fraud Strategy program, including surprise audit (Operational & Credit).
2. Conducting socialization related to the implementation of anti-fraud strategy and whistleblowing system at the exit meeting results of the audit and employees including new employees.
3. Disseminating materials related to the implementation of anti-fraud and whistleblowing strategies in the education schedule of employee promotion programs.
4. Developing the Anti-Fraud Strategy system.

TRANSPARENCY OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS

Bank Jatim has fulfilled its obligation to Bank Indonesia to conduct transparency of financial and non-financial conditions in accordance with applicable regulations, publication of information submission through print media and the Bank's website as follows:

1. Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan yang telah disampaikan dan di publikasikan kepada Regulator dan situs web Perusahaan;
2. Laporan Tahunan yang telah disampaikan dan dipublikasikan kepada Regulator dan situs web perusahaan;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan seperti :
 - Visi dan Misi Perusahaan
 - Komposisi, Profil Dewan Komisaris dan Direksi
 - Pedoman dan Tata Tertib Komite
 - Praktik Tata Kelola Perusahaan
4. Informasi Produk dan Layanan Bank seperti e-form kredit beserta Jaringan Kantor yang tersebar luas sehingga memudahkan para nasabah, investor untuk mengakses informasi tersebut;
5. Informasi yang bertujuan untuk mengedukasi nasabah seperti jasa perbankan, mediasi perbankan, mekanisme pengaduan nasabah, tips keamanan perbankan serta majalah/buletin Bank Jatim yang dapat di unduh melalui situs web Perusahaan.

1. Monthly and Quarterly Financial Statements that have been submitted and published to the Regulator and on the Bank's website;
2. Annual Reports that have been submitted and published to the Regulator and on the Bank's website;
3. Corporate Governance Information such as:
 - Vision and mission of the Bank
 - Composition and Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors
 - Guidelines and Rules of Committee
 - Corporate Governance Practices
4. Information on Bank's Products and Services such as e-forms of credit along with a wide spread of Office Networks making it easier for customers, investors to access such information;
5. Information that aims to educate customers such as banking services, banking mediation, customer complaints mechanisms, banking security tips and magazines/bulletins for Bank Jatim which can be downloaded via the **Company's** website.

PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Bank Jatim memiliki *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan 4 pilar yakni Kesehatan, Pendidikan, Budaya dan Sosial. Program tersebut berperan membangun masyarakat, diharapkan dapat menciptakan *image* positif bagi Bank Jatim sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Sepanjang tahun 2019 Bank Jatim mengalokasikan dana pada pilar sosial, seperti program bantuan kendaraan angkutan sekolah khusus disabilitas di Cabang Nganjuk.

Pada kegiatan Politik, selama tahun 2019 Bank Jatim tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik. Namun, Bank tidak membatasi kebebasan karyawan/ti untuk menyuarkan aspirasi dalam berpolitik. Telah diatur dalam kebijakan Bank, bahwa Perusahaan tidak berpartisipasi agar menghindari adanya benturan kepentingan.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT

Mengacu pada Peraturan OJK nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, Bank Jatim telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Manual Ketentuan Kredit tersebut dilakukan secara berkala dan wajar dengan kebijakan harga, syarat yang normal. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait harus diputuskan oleh Dewan Komisaris. Pelaporan rutin kepada Bank Indonesia dilakukan secara berkala dan tepat waktu dan sepanjang 2019 tidak terdapat pelanggaran atau pelanggaran atas BMPK.

PROVISION OF FUNDS FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

Bank Jatim has a Corporate Social Responsibility (CSR) with 4 pillars namely Health, Education, Culture and Social. The program plays a role in building the community, is expected to create a positive image for Bank Jatim as a company that has concern for the community. Throughout 2019 the Bank of East Java allocated funds to social pillars, such as the assistance program for special disability school transportation vehicles in the Nganjuk Branch.

In terms of Political activities, during 2019 Bank Jatim did not allocate funds for political activities or political parties. However, the Bank does not limit the freedom of employees to express their political aspirations. It is regulated in the Bank's policy that the Company does not participate in order to avoid conflicts of interest.

PROVISION OF FUNDS TO RELATED PARTIES

Referring to OJK Regulation No. 32/POJK.03/2018 concerning the Legal Lending Limit and Provision of Large Funds for Commercial Banks, Bank Jatim has implemented the principle of prudence in its implementation, as stipulated in the Credit Provisions Manual, it is conducted periodically and fairly with policies price, normal terms. Provision of Funds to Related Parties must be decided by the Board of Commissioners. Routine reporting to Bank Indonesia is done periodically and on time and throughout 2019 there were no violations or excess of the LLL.

TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi yang baik, Konglomerasi Keuangan perlu memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi. Dengan penerapan tata kelola terintegrasi, akan mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki tata kelola yang lebih sesuai dengan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran. Dalam penerapannya, tata kelola terintegrasi selalu mengacu pada:

INTEGRATED GOVERNANCE

In the framework of implementing good integrated governance, the Financial Conglomerate needs to have Integrated Governance Guidelines by referring to conservative regulations to be a guide for LJK in the Financial Conglomerate to implement governance, so as to encourage improved quality in the application of integrated governance. By implementing integrated governance, it will encourage the Financial Conglomerate to have governance that is more in line with the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. In its application, integrated governance always refers to:



- SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 570/4308/021/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 perihal Penunjukan Entitas Utama
- Pedoman Tata kelola terintegrasi nomor 053/305/KEP/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015 Pedoman pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan diharapkan dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

- SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates
- POJK No. 18/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates
- Governor of East Java Letter No. 570/4308/021/2015 dated February 5, 2015 concerning Appointment of Main Entity
- Integrated Governance Guidelines No. 053/305/KEP/DIR/PTH dated December 31th, 2015 Guidelines for implementing Integrated Governance

The implementation of Integrated Governance for the Financial Conglomerate is expected to encourage financial system stability that grows in a sustainable manner, so as to increase national competitiveness.



PENERAPAN TATA KELOLA BANK JATIMBERDASARKAN SEOJK 32/SEOJK.04/2015

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan
Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Pengambilan Keputusan Setiap pemegang saham dapat diberikan hak mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai suara lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suaranya satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
		Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Seluruh anggota Direksi dan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan sesuai Akta tanggal 26 April 2019 Nomor 99 perihal Salinan berita acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 PT BPD Jatim Tbk.
		Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Bank terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Ringkasan risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tersedia dan dapat diakses melalui : https://www.Bankjatim.co.id/id/informasi/pengumuman/ringkasan-risalah-rupst-tahun-buku-2018 Ringkasan RUPS dan RUPSLB tahun 2014 s/d 2019 telah diunggah di <i>website</i> Bank Jatim dan dapat diakses dengan mudah oleh <i>Stakeholder</i> .
	Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Kebijakan komunikasi dengan investor diatur dalam BPP Investor Relation nomor 056/033/DIR/CSE/KEP tanggal 04 Oktober 2017
		Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang saham atau investor dalam Situs Web	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Pengungkapan kebijakan komunikasi dengan investor dapat diakses melalui link https://www.Bankjatim.co.id/id/hubungan-investor/profil/hubungan-investor
	Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka
Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan			Terpenuhi (Comply) Mengacu pada BPP Kerja Dewan Komisaris Nomor 056//DK/KEP tanggal 27 Desember 2017, Setiap anggota Dewan Komisaris Bank Jatim harus dapat memenuhi 3 (tiga) persyaratan antara lain persyaratan umum, khusus, lainnya. Bagi anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat harus memenuhi. Persyaratan Khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS. Mengacu pada Akta Nomor 22 tanggal 20 Februari 2018 tentang Berita acara Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan penjarangan calon internal Bank Jatim, serta dari pihak eksternal dengan menggunakan penilaian kriteria sebagai berikut : Integritas, Kompetensi, Pemahaman perbankan dan ekonomi makro, Pemahaman tentang Ekonomi Jawa Timur, Ketentuan internal dan eksternal perbankan.
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris			Belum Terpenuhi (Explain) Kebijakan <i>self assessment</i> kinerja Dewan Komisaris masih dalam tahap penyelesaian. Sehingga, <i>self assessment</i> kinerja Dewan Komisaris saat ini masih mengacu pada kertas kerja <i>self assessment</i> tata kelola yang diatur dalam SEOJK 13/SEOJK.03/2017
		Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	Belum Terpenuhi (Explain) Kebijakan <i>self assessment</i> kinerja Dewan Komisaris masih dalam tahap penyelesaian. Sehingga, <i>self assessment</i> kinerja Dewan Komisaris saat ini masih mengacu pada kertas kerja <i>self assessment</i> tata kelola yang diatur dalam SEOJK 13/SEOJK.03/2017
		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Belum Terpenuhi (Explain) Kebijakan pengunduran diri bagi Dewan Komisaris hanya jika ybs adalah seorang pejabat negara yang menjadi anggota Dewan Komisaris, maka Ybs diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan.

GOVERNANCE IMPLEMENTATION AT BANK JATIM BASED ON SEOJK 32/SEOJK.04

Aspect	Principle	Recommendation	Implementation
Relationship of Public Company with Shareholders in Ensuring the Rights of Shareholders	Improvement of Value of General Meeting of Shareholders (GMS) Convention	Public Company has a method or procedure of technical voting, both openly and in a closed voting, that prioritizes independence, and the interests of shareholders.	Comply Decision Making Each shareholder can be given the right to issue 1 (one) vote, if a shareholder has more than one vote, then he is asked to vote once and that vote represents the entire number of shares he owns.
		All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS	Comply All members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Deed No. 99 of April 26, 2019 concerning a copy of the minutes of the Annual General Meeting of 2018 Fiscal Year of PT BPD Jatim Tbk.
		A summary of the GMS minutes is available on the Bank's open website for at least 1 (one) year	Comply A summary of the minutes of the Annual General Meeting of the 2018 Fiscal Year is available and can be accessed through: https://www.Bankjatim.co.id/id/informasi/pengumuman/ringkasan-risalah-rupst-tahun-buku-2018 The summary of GMS and EGMS from 2014 to 2019 has been uploaded on the website of Bank Jatim and can be accessed easily by Stakeholders.
	Improvement of Communication Quality of the Public Company with Shareholders or Investors	Public Company has a communication policy with shareholders or investors.	Comply The communication policy with investors is regulated in BPP Investor Relations No. 056/033/DIR/CSE/KEP dated October 4, 2017
		The Public Company discloses the communication policy of the Public Company with Shareholders or investors on the Website	Comply Disclosure of communication policies with investors can be accessed through https://www.Bankjatim.co.id/id/hubungan-investor/profil/hubungan-investor
	Functions and Roles of Board of Commissioners	Determination of the number of members of the Board of Commissioners considers the condition of the Public Company	Comply In accordance with the statement in Deed No. 22 dated February 20, 2018 concerning Minutes of Annual Shareholders' Meeting (GMS) for Fiscal Year 2017, Bankjatim has taken strategic steps which are aligned with macroeconomic conditions and the dynamics of the business environment. The internal consolidation strategy was implemented by developing the organizational structure of the management from 4 directorates to 6 directorates (7 Directors including the president director). Thus, the number of members of the Board of Commissioners is considered to be 6 following the number of Directors.
Improving the Quality of Implementation of Board of Commissioners' Duties and Responsibilities	Strengthening the Membership and Composition of Board of Commissioners	The determination of the composition of the members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience required	Comply Referring to the Board of Commissioners Work BPP Number 056 / /DK/KEP dated December 27, 2017, each member of the Board of Commissioners of Bank Jatim must be able to fulfill 3 (three) requirements, including general, special, and other requirements. For members of the Board of Commissioners who will be appointed must fulfill Special Requirements of which the details will be stated in the resolution of the GMS. Referring to Deed No. 22 dated February 20, 2018 regarding Minutes of Annual Meeting of Shareholders (GMS) for the Fiscal Year 2017, "the Remuneration and Nomination Committee has selected the internal candidates of Bank Jatim, as well as from external parties by using the following evaluation criteria: Integrity, Competence, Understanding of banking and macroeconomics, Understanding of the Economy of East Java, Internal and external provisions of banking.
		The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners	Explain The Board of Commissioners' performance self-assessment policy is still in the completion stage. Therefore, the Board of Commissioners' self-assessment of performance is still referring to the governance self-assessment working paper set out in SEOJK 13/SEOJK.03/2017
		The self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Annual Report of the Public Company	Explain The Board of Commissioners' performance self-assessment policy is still in the completion stage. Therefore, the Board of Commissioners' self-assessment of performance is still referring to the governance self-assessment working paper set out in SEOJK 13/SEOJK.03/2017
	Improving the Quality of Implementation of Board of Commissioners' Duties and Responsibilities	The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners when involved in financial crimes	Explain Resignation policy for the Board of Commissioners only if he is a state official who is a member of the Board of Commissioners; then, he is required to resign from his position in the government.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan
		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Terpenuhi (Comply) kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris nomor 058/002/DK/KEP tanggal 23 April 2019
Fungsi dan Peran Direksi	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan	Terpenuhi (Comply) Sesuai keterangan dalam Akta Nomor 22 tanggal 20 Februari 2018 tentang Berita acara Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2017, Bankjatim telah mengambil langkah strategis yang diselarasakan dengan kondisi makro ekonomi dan dinamika lingkungan bisnis. Strategi konsolidasi intern dilaksanakan dengan melakukan pengembangan struktur organisasi pengurus dari 4 direktorat menjadi 6 direktorat.
		Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi (Comply) Sesuai keterangan dalam Akta Nomor 22 tanggal 20 Februari 2018 tentang Berita acara Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2017, Komite remunerasi dan nominasi telah menjalankan penjurangan calon dari internal Bank jatim, serta dari pihak eksternal dengan menggunakan penilaian kriteria sebagai berikut : Integritas, kompetensi, pemahaman perbankan & ekonomi makro, pemahaman tentang ekonomi jawa timur, serta ketentuan internal dan eksternal perbankan.
		Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	Terpenuhi (Comply) Bapak Ferdian Timur Satyagraha sebagai Direktur Keuangan Bank Jatim memiliki background pendidikan serta keahlian di bidang bisnis dan keuangan. Profil Direktur Keuangan dapat dilihat melalui link berikut: https://www.Bankjatim.co.id/id/tentang-Bankjatim/manajemen/Direksi#
	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi	Belum Terpenuhi (Explain) Kebijakan <i>self assessment</i> kinerja Direksi masih dalam tahap penyelesaian. Sehingga, <i>self assessment</i> kinerja Direksi saat ini masih mengacu pada kertas kerja <i>self assessment</i> tata kelola yang diatur dalam SEOJK 13/SEOJK.03/2017.
		Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka	Belum Terpenuhi (Explain) Kebijakan <i>self assessment</i> kinerja Direksi masih dalam tahap penyelesaian. Sehingga, <i>self assessment</i> kinerja Direksi saat ini masih mengacu pada kertas kerja <i>self assessment</i> tata kelola yang diatur dalam SEOJK 13/SEOJK.03/2017.
		Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Belum Terpenuhi (Explain) Kebijakan pengunduran diri bagi Direksi hanya jika ybs adalah seorang pejabat negara yang menjadi anggota Direksi, maka Ybs diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan.
Partisipasi Pemangku Kepentingan	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading	Terpenuhi (Comply) Sebagaimana diatur dalam buku pedoman nomor 057/008/DIR/KEP/TRE tanggal 11 Januari 2018 tentang kode etik pasar atas aktivitas tresuri, Insider Dealing adalah adanya informasi orang-dalam non-publik yang material dan informasi tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi (atau pihak-pihak terkait) dengan melakukan transaksi instrumen keuangan yang terkait dengan informasi tersebut. Para pegawai Bank khusus-nya yang berada di lingkungan Tresuri dilarang terlibat maupun melakukan insider dealing. Para Dealer Tresuri dilarang secara sengaja atau tidak sengaja, mendapat keuntungan atau mencari keuntungan dari informasi rahasia, atau membantu orang lain dengan informasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi Bank atau Nasabah mereka. Oleh karena itu, para Dealer Tresuri Bank memiliki kewajiban untuk memahami persyaratan dari peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai insider dealing dan penyalahgunaan pasar sendiri dan pasar-pasar lainnya.
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud	Terpenuhi (Comply) Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> diatur dalam BPP nomor 050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kebijakan anti korupsi diatur dalam pedoman pelaksanaan LHKPN nomor 057/401/DIR/KPT/KEP tanggal 31 Desember 2018.
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	Terpenuhi (Comply) Kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor diatur dalam BPP nomor 058/099/DIR/UMM/KEP tanggal 25 April 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Aspect	Principle	Recommendation	Implementation
		The Board of Commissioners or Committees that carry out the Nomination and Remuneration functions formulate a succession policy in the Nomination process for members of the Board of Directors	Comply The succession policy in the process of nominating a member of the Board of Directors is set in the Implementation Guidelines of Board of Commissioners' Committee No. 058/002/DK/KEP dated April 23, 2019
Functions and Roles of Board of Directors	Strengthening the Membership and Composition of Board of Directors	Determination of the number of members of the Board of Directors considers the condition of the Public Company and its effectiveness in decision making	Comply In accordance with the statement in Deed No. 22 dated February 20, 2018 concerning Minutes of Annual Meeting of Shareholders (GMS) for Fiscal Year 2017, Bank Jatim has taken strategic steps which are aligned with macroeconomic conditions and the dynamics of the business environment. The internal consolidation strategy was implemented by developing the organizational structure of the management from 4 directorates to 6 directorates.
		Determination of the composition of members of the Board of Directors pays attention to the diversity of expertise, knowledge and experience required	Comply In accordance with the statement in Deed No. 22 dated February 20, 2018 concerning Minutes of Annual Meeting of Shareholders (GMS) for the Fiscal Year 2017, the Remuneration and Nomination Committee has conducted a selection of candidates from Bank Jatim, as well as from external parties using the following evaluation criteria: Integrity, competence, understanding of banking & macroeconomics, understanding of the economy of East Java, as well as internal and external banking regulations.
		Members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting	Comply Mr. Ferdian Timur Satyagraha as Finance Director of Bank Jatim has an educational background and expertise in business and finance. The profile of the Director of Finance can be seen through the following link: https://www.Bankjatim.co.id/id/tentang-Bankjatim/manajemen/Direksi#
	Improvement of Communication Quality of the Public Company with Shareholders or Investors	The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors	Comply Explain The Board of Directors' self-assessment policy is still in the completion stage. Therefore, the Board of Directors' self-assessment of performance is still referring to the governance self-assessment working paper set out in SEOJK 13/SEOJK.03/2017.
		The self-assessment policy to assess the performance of the Directors is disclosed through the annual report of the Public Company	Explain The Board of Directors' self-assessment policy is still in the completion stage. Therefore, the Board of Directors' self-assessment of performance is still referring to the governance self-assessment working paper set out in SEOJK 13/SEOJK.03/2017.
		The Board of Directors has a policy related to the resignation of members of the Board of Directors when involved in financial crimes	Explain Resignation policy for the Board of Directors only if he is a state official who is a member of the Board of Directors, then, he is required to resign from his position in the government.
	Stakeholders' Participation	Public Company has a policy to prevent insider trading	Comply As stipulated in guidebook No. 057/008/DIR/KEP/TRE dated January 11, 2018 concerning market code of ethics for treasury activities, Insider Dealing is the existence of non-public insider information that is material and the information is used for personal gain (or parties related parties) by conducting financial instrument transactions related to the information. Bank employees specifically within the Treasury are prohibited from engaging or doing insider dealing. Treasury Dealers are prohibited intentionally or unintentionally, making profit or seeking profit from confidential information, or helping others with that information to benefit their Bank or Customer. Therefore, Treasury Dealers have an obligation to understand the requirements of the relevant laws and regulations governing insider dealing and misuse of their own markets and other markets.
		Public Company has anti-corruption and anti-fraud policies	Comply The implementation of Anti-Fraud Strategy is regulated in BPP No. 050/119/KEP/DIR/AI dated June 29, 2012 concerning the Guidelines for Implementing Anti-Fraud Strategy of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. The anti-corruption policy is regulated in the LHKPN implementation guidelines No. 057/401/DIR/KPT/KEP dated December 31, 2018.
		Public Company has a policy regarding the selection and improvement of the ability of suppliers or vendors	Comply The policy on selection and improvement of supplier or vendor capabilities is regulated in BPP No. 058/099/DIR/UMM/KEP dated April 25, 2019 concerning Guidelines for Implementing Goods/Services.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Pemenuhan hak hak kreditur Perseroan segera menyelesaikan penyusunan kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur yang saat ini dalam tahap penyempurnaan. Perseroan selalu berupaya untuk melakukan pemenuhan hak hak kreditur yang tercantum dalam Perjanjian Kredit. Hak-hak kreditur tersebut diantaranya adalah ; 1. Bank memastikan pihak kreditur menerima pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang disepakati; 2. Bank memastikan pihak kreditur menerima laporan penggunaan pinjaman; 3. Bank memastikan pihak kreditur menerima denda atas pembayaran yang melebihi jadwal yang disepakati 4. Bank memastikan pembayaran pokok dan bunga pinjaman tidak dikenakan denda bila jadwal pembayaran jatuh pada hari libur dan dibayarkan pada tanggal hari kerja berikutnya;
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>	Terpenuhi (<i>Comply</i>) kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> diatur dalam 050/119/KEP/DIR/AI tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 29 Juni 2012 Perihal Bab III Deteksi mengenai Kebijakan Whistleblowing.
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan pejabat eksekutif diatur dalam BPP Investor Relation nomor 056/033/DIR/CSE/KEP tanggal 04 Oktober 2017
Keterbukaan Informasi	Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Media keterbukaan informasi yang dimanfaatkan Bank Jatim selain Situs web adalah Instagram @Bank Jatim; Youtube @Bank Jatim; Facebook @Bank Jatim; Twitter @Bank Jatim dan Youtube @Bank Jatim
		Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank Jatim tidak memiliki pemegang saham dengan kepemilikan saham paling sedikit 5% selain dari Pemegang Saham Pengendali (Pemprov Jatim) sebagaimana diungkapkan pada bagian Informasi Saham dan Efek Lainnya dalam Laporan Tahunan ini.

Aspect	Principle	Recommendation	Implementation
	The Public Company has a policy regarding the fulfillment of creditor rights	Fulfillment of creditor rights is conducted by immediately completing the formulation of policies regarding the fulfillment of creditor rights which are currently in the stage of refinement. The Bank always strives to fulfill the creditors' rights stated in the Credit Agreement. The creditor's rights include: 1. The Bank ensures that the creditor receives the loan principal and interest according to the agreed schedule; 2. The Bank ensures that the creditor receives a report on the use of the loan; 3. The Bank ensures that creditors receive fines for payments that exceed the agreed schedule 4. The Bank ensures that the payment of principal and interest of the loan will not be fined if the payment schedule falls on a holiday and is paid on the date of the next working day;	Comply
	Public Company has a whistleblowing system policy	The whistleblowing system policy is regulated through letter No. 050/119/KEP/DIR/Al concerning Guidelines for Implementing Anti-Fraud Strategies of PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk dated June 29, 2012 Regarding Chapter III Detection of Whistleblowing Policy.	Comply
	Public Company has a policy of providing long-term incentives to Directors and employees	The Public Company has a policy of providing long-term incentives to Directors and executive officers regulated in BPP Investor Relations No. 056/033/DIR/CSE/KEP on October 4, 2017	Comply
Information Disclosure	Improving the Implementation of Information Disclosure	Public Company utilizes the use of information technology more broadly than the Website as a medium of information disclosure	Comply
		The Open Company Annual Report discloses the final beneficial owner in the ownership of a Public Company share of at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial owner in the ownership of the public company through the major and controlling shareholders.	Comply
		Information disclosure media that are used by Bank Jatim in addition to the Website are Instagram @Bank East Java; Youtube @Bank Jatim; Facebook @Bank Jatim; and Twitter @Bank Jatim	
		Bank Jatim does not have a shareholder with at least 5% share ownership other than the Controlling Shareholder (East Java Provincial Government) as disclosed in the Share and Other Securities Information section of this Annual Report.	



7

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



DASAR PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Jatim memiliki komitmen untuk tumbuh bersama masyarakat dan lingkungan. Komitmen ini diwujudkan, antara lain, melalui pelaksanaan program dan kegiatan CSR. Program dan kegiatan CSR Bank bertujuan untuk memberikan manfaat luas terhadap masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisasi dampak negatif terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Pelaksanaan program dan kegiatan CSR Bank Jatim merujuk pada landasan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
4. Surat Keputusan Direksi Nomor 046/184/KEP/DIR/CS tanggal 31 Desember 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
5. Surat Keputusan Direksi Nomor 053/250/KEP/DIR/PRN tanggal 30 September 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
6. Surat Edaran Direksi Nomor 054/23/DIR/MK tanggal 17 Maret 2016 tentang Limit Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Serta Biaya Non Produk;
7. Surat Edaran Direksi Nomor 054/138/2016/SE/DIR/CS tanggal 29 Agustus 2016 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

IMPLEMENTASI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Bank Jatim akan terus melakukan integrasi fokus bisnis dan menyelaraskannya dengan kebijakan Pemerintah sebagai upaya dalam menjalankan kegiatan CSR yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. Bank Jatim menjalankan kegiatan usaha perbankan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan yang tertuang dalam kebijakan internal Bank.

Komitmen Bank Jatim dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) disampaikan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). RAKB tersebut berisi rencana kegiatan dalam jangka pendek dan panjang dalam menerapkan Keuangan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST), serta penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dan manajemen risiko.

Pelaksanaan keuangan berkelanjutan Bank Jatim dalam tahun pertama, yaitu 2018 dimulai dari pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, pengembangan kapasitas Bank melalui pelatihan dan

BASIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION

In conducting its business activities, Bank Jatim is committed to growing hand in hand with the community and the environment. This commitment is manifested, among others, through the implementation of CSR programs and activities. The Bank's CSR programs and activities aim to provide greater benefits to the community, contribute to environmental conservation, and minimize negative impacts on all of its stakeholders.

The implementation of CSR programs and activities of Bank Jatim refers to the following laws and regulations:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies;
2. Government Regulation No. 47 of 2012 regarding Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;
3. Regional Regulation of East Java Province no. 4 of 2011 regarding Corporate Social Responsibility;
4. Decree of Board of Directors No. 046/184/KEP/DIR/CS dated December 31, 2008 regarding Guidelines for the Implementation of Social and Environmental Responsibilities;
5. Decree of Board of Directors No. 053/250/KEP/DIR/PRN dated September 30, 2015 regarding Organization Structure and Work Procedure of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
6. Circular Letter of Board of Directors No. 054/23/DIR/MK dated March 17, 2016 regarding Limit of Approval and Payment for Goods/Services Procurement and Non-Product Cost;
7. Circular Letter of Board of Directors No. 054/138/2016/SE/DIR/CS dated August 29, 2016 regarding Amendment to the Manual Book for Implementing Social and Environmental Responsibilities.

SUSTAINABLE FINANCE IMPLEMENTATION

Bank Jatim will continue to integrate business focus and align it with Government policies as an effort to carry out CSR activities that are in line with the implementation of sustainable finance. Bank Jatim runs sustainable banking business activities by applying sustainable financial principles as stipulated in the Bank's internal policies.

Bank Jatim's commitment in supporting the realization of the Sustainable Development Goals (SDGs) is conveyed in the Action Plan of Sustainable Finance (RAKB). The RAKB contains planned activities in the short and long term in implementing sustainable finance, with due regard to the fulfillment of environmental, social and governance (LST) aspects, as well as the application of banking prudential principles and risk management.

Bank Jatim sustainable financial implementation in the first year, namely 2018, starts from the development of sustainable financial products and/or services,

sosialisasi kepada pegawai, serta penyesuaian internal Bank dengan melakukan kegiatan yang mendukung penerapan keuangan berkelanjutan seperti pembentukan organisasi, penyesuaian kebijakan dan lain-lain.

Bank Jatim juga telah menyusun suatu pedoman kerja tertulis yang selanjutnya disebut sebagai Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) Bank Jatim. Pedoman tersebut merupakan wujud dari tanggung jawab sosial Bank Jatim yang lebih rinci dalam mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan (Bank Jatim Peduli) yang mengacu pada praktik unggulan (best practices) dalam dunia bisnis perbankan saat ini.

development of the Bank's capacity through training and outreach to employees, and internal adjustment of the Bank by carrying out activities that support the implementation of sustainable finance such as the formation of organizations, policy adjustments and others.

Bank Jatim has also compiled a written work guideline, hereinafter referred to as the Social and Environmental Responsibility Manual Book (BPP) of Bank Jatim. The guideline is a more detailed form of Bank Jatim's social responsibility in managing social and environmental responsibility programs (Bank Jatim Peduli) which refers to the best practices in the current banking business world.

STRUKTUR TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Program dan kegiatan CSR Bank Jatim dikelola oleh *Corporate Secretary* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dengan susunan kedudukan struktur tata kelola sebagai berikut:

GOVERNANCE STRUCTURE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank Jatim's CSR programs and activities are managed by the Corporate Secretary who reports directly to the President Director, with the governance structure as follows:



TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bank Jatim menyadari bahwa tata kelola organisasi menjadi salah satu faktor kunci yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial atas dampak keputusan dan tindakan sebuah organisasi serta mengintegrasikan tanggung jawab sosial di seluruh kegiatan operasional Bank. Tata kelola organisasi mencerminkan kebijakan, implementasi strategi, target dan hasil yang diharapkan atas penerapan tanggung jawab sosial.

Bank Jatim menerapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya dengan mengacu pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Bank Jatim juga senantiasa mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan dan kegiatan usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan alam melalui perilaku yang transparan dan beretika.

Bank Jatim berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai-nilai ekonomi, sosial dan ekologis dalam proses dan pada tingkat pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dapat mendorong keberhasilan Perusahaan dengan tetap berkontribusi pada pencapaian tujuan pengembangan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk memastikan integritas lingkungan serta keamanan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITMENT AND POLICY

Bank Jatim realizes that organizational governance is one of the key factors needed in the implementation of social responsibility for the impact of decisions and actions of an organization and integrates social responsibility in all Bank operational activities. Organizational governance reflects policies, implementation of strategies, targets and expected outcomes for the application of social responsibility.

Bank Jatim implements its social responsibility activities by referring to the principle of sustainability. Bank Jatim also always considers the impact of every decision and business activity on the community and the natural environment through transparent and ethical behavior.

Bank Jatim is committed to implementing sustainable principles that are able to create economic, social and ecological values in the process and at the level of policy making and decision making that can drive the success of the Company while continuing to contribute to the achievement of sustainable development goals. Sustainable development goals include ensuring the integrity of the environment and the security, capability, welfare and quality of life of present and future generations.



METODE DAN LINGKUP DUE DILIGENCE

Bank Jatim mengkaji dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas bisnis yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Dalam kajian tersebut, dampak sosial terdapat dalam beberapa dimensi. Dampak sosial terhadap pegawai dilakukan dengan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja pegawai. Bank Jatim secara periodik telah melaksanakan survei engagement pegawai untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan. Sedangkan dampak sosial terhadap nasabah, Bank Jatim mengacu pada Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang perlindungan nasabah. Bank Jatim juga telah menyusun dan menerapkan pedoman yang komprehensif terkait pengelolaan pengaduan nasabah dalam bentuk Standar Pedoman Operasional (SPO) tentang pengaduan nasabah. Untuk mendapatkan informasi kepuasan nasabah, Bank Jatim secara periodik melakukan *Customer Satisfaction Survey* di beberapa segmen bisnis Bank.

Terkait dengan dampak ekonomi, Bank Jatim setiap tahun telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang mengarahkan kegiatan-kegiatan usaha Bank melalui target-target yang telah ditetapkan. Bank Jatim juga telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. RAKB menjadi pedoman dalam peningkatan portofolio pembiayaan agar sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan secara bertahap di segmen operasional bisnis sesuai prioritas Bank.

Terkait dengan dampak lingkungan, Bank Jatim telah memiliki berbagai kebijakan kredit yang ramah lingkungan. Dalam setiap analisis kredit telah disyaratkan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk industri tertentu yang kegiatan usahanya bersentuhan dengan lingkungan. Di samping itu, pemberian kredit juga dilakukan pada organisasi yang ramah lingkungan seperti yang bergerak dalam energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, yang melakukan efisiensi energi, dan yang menerapkan konsep keberlanjutan.

DUE DILIGENCE SCOPE AND METHOD

Bank Jatim examines the social, economic and environmental impacts of the business activities that have been carried out, with the aim of providing added value to stakeholders. In the study, social impacts are present in several dimensions. The social impact on employees is carried out by implementing employee employment, health and safety policies. Bank Jatim has periodically carried out employee engagement surveys to evaluate the employment policies that are applied. While the social impact on customers, Bank Jatim refers to OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and Bank Indonesia Regulation No. 7/7/PBI/2005 concerning Settlement of Customer Complaints, which has been amended by Bank Indonesia Regulation No. 10/10/PBI/2008 concerning customer protection.

Bank Jatim has also compiled and implemented comprehensive guidelines related to the management of customer complaints in the form of Standard Operating Guidelines (SPO) regarding customer complaints. To obtain customer satisfaction information, Bank Jatim periodically conducts a Customer Satisfaction Survey in several business segments of the Bank. With regard to the economic impact, Bank Jatim has annually compiled a Bank Business Plan which directs the Bank's business activities through established targets. Bank Jatim has also prepared a Sustainable Financial Action Plan (RAKB) as stipulated in OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. The RAKB serves as a guideline in increasing the financing portfolio to be in line with the gradual implementation of sustainable finance in the business operational segment according to the Bank's priorities.

Related to environmental impact, Bank Jatim has various environmentally friendly credit policies. In each credit analysis an Environmental Impact Assessment (AMDAL) is required for certain industries whose business activities are in contact with the environment. In addition, credit is also given to environmentally friendly organizations such as those engaged in renewable energy, environmentally friendly transportation, which carry out energy efficiency, and who apply the concept of sustainability.

PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERDAMPAK

AFFECTED STAKEHOLDERS

PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDERS	POTENSI DAMPAK IMPACT POTENTIAL	RESPON PERUSAHAAN BANK'S RESPONSES
Investor <i>Investor</i>	- Penerapan tata kelola organisasi. - Kinerja ekonomi. - Kinerja sosial. - Kinerja pengelolaan lingkungan, termasuk energi, emisi dan limbah. - Pelaporan kinerja. <i>Application of organizational governance.</i> <i>Economic performance.</i> <i>Social performance.</i> <i>Environmental management performance, including energy, emissions, and waste.</i> <i>Performance reporting.</i>	- Penyediaan informasi berkala kinerja Bank Jatim. - Komunikasi secara langsung maupun melalui analisis, guna memastikan penyampaian informasi material. - Penyelenggaraan RUPS. <i>Provision of periodic information on Bank Jatim's performance.</i> <i>Direct communication or through analysis, to ensure the delivery of material information.</i> <i>GMS convention.</i>
Nasabah <i>Customer</i>	- Perlindungan nasabah. - Kebutuhan produk dan jasa. - Informasi tentang produk, jasa dan Perusahaan. - Penanganan keluhan. <i>Customer protection.</i> <i>Product and service needs.</i> <i>Information about products, services, and the Bank.</i> <i>Complaint management</i>	- Inovasi produk, jasa serta layanan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi. - Penyediaan serta penyampaian informasi produk, jasa dan layanan. - Penyimpanan dan perlindungan data nasabah sesuai peraturan. - Penyediaan layanan pengaduan nasabah baik manual maupun berbasis digital, dan mekanisme penyelesaiannya. <i>Product innovation and services according to technological needs and development.</i> <i>Provision and delivery of product and service information.</i> <i>Customer data storage and protection in accordance with regulations.</i> <i>Provision of customer complaint services, both manual and digital-based, and the settlement mechanism.</i>
Pekerja <i>Employee</i>	- Kepastian dan perlindungan hubungan ketenagakerjaan. - Kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak normatif. - Pengembangan kompetensi dan karir. <i>Relationship certainty and employment protection.</i> <i>Welfare and fulfillment of normative rights.</i> <i>Competence and career development.</i>	- Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). - Penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kompetensi pekerja, serta pembentukan assessment center. - Lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. - Review dan survei kesejahteraan pekerja secara berkala. <i>Compilation of Collective Labor Agreements (PKB).</i> <i>Organizing training and improving employee competencies, and forming an assessment center.</i> <i>A conducive and productive work environment.</i> <i>Periodic employee welfare review and surveys.</i>
Masyarakat <i>Community</i>	- Informasi akses dan pendidikan keuangan. - Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. - Akses pendidikan dan pengembangan budaya. - Penyediaan infrastruktur. <i>Access information and financial education.</i> <i>Empowerment and welfare improvement.</i> <i>Access to education and cultural development.</i> <i>Provision of infrastructure.</i>	- Kesempatan sebagai Agen Laku Pandai. - Bantuan pembinaan dan pendampingan mitra binaan. - Bantuan pembangunan infrastruktur. - Bantuan sosial kemasyarakatan (Bank Jatim Peduli), mencakup bidang pendidikan, budaya dan agama, kemanusiaan serta lingkungan. <i>Opportunity as a Laku Pandai Agent.</i> <i>Assistance in developing and assisting fostered partners.</i> <i>Infrastructure development assistance.</i> <i>Social assistance (Bank Jatim Peduli), covering the fields of education, culture and religion, humanity and the environment</i>
Regulator <i>Regulator</i>	- Kepatuhan terhadap hukum. - Komitmen pada regulator/otoritas perbankan. - Komunikasi berkesinambungan. - Pelaporan yang jelas, akurat, komprehensif dan tepat waktu <i>Compliance with the law.</i> <i>Commitment to banking regulators/authorities.</i> <i>Continuous communication.</i> <i>Clear, accurate, comprehensive and timely reporting</i>	- Penyesuaian kebijakan dan peraturan internal, sesuai peraturan yang diterbitkan pemerintah. - Penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh unit kerja. - Penyampaian laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan lain: Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, serta laporan lain. <i>Adjustments to internal policies and regulations, according to regulations issued by the government.</i> <i>Application of GCG principles in all work units.</i> <i>Submission of performance reports and implementation of other activities: Annual Reports, Sustainability Reports, and other reports.</i>
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) <i>Non-Government Organization (NGO)</i>	- Kepatuhan terhadap hukum. - Komitmen pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). - Kinerja sosial. - Kinerja pengelolaan lingkungan, termasuk energi, emisi dan limbah. <i>Compliance with the law.</i> <i>Commitment to Social and Environmental Responsibility (TJSL).</i> <i>Social performance.</i> <i>Environmental management performance, including energy, emissions and waste.</i>	- Penyediaan informasi dan penyampaian laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan lain: Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, serta laporan lain. <i>Provision of information and delivery of performance reports and implementation of other activities: Annual Reports, Sustainability Reports, and other reports.</i>

ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Dalam menentukan isu sosial, ekonomi dan lingkungan penting yang terkait dampak dari kegiatan Bank dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai stakeholders internal maupun eksternal. Isu penting tersebut kemudian dijadikan dasar bagi Bank untuk memprioritaskan dengan melakukan pendekatan-pendekatan manajemen dalam mengelolanya.

Bank Jatim telah merumuskan Prinsip Keberlanjutan Perbankan, yaitu semua prinsip pengelolaan kegiatan Bank Jatim dalam aspek: pelanggan, strategi bisnis, operasi perbankan, manajemen risiko, sumber daya manusia, dan pengembangan masyarakat.

Aspek-aspek ini kemudian dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bidang, yaitu:

1. CSR yang terkait dengan Hak Asasi Manusia
2. CSR yang terkait dengan Operasi yang adil
3. CSR yang terkait dengan lingkungan hidup;
4. CSR yang terkait dengan keselamatan kerja;
5. CSR yang terkait dengan pengembangan sosial masyarakat;
6. CSR yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen (nasabah);
7. CSR yang terkait dengan tanggung jawab kepada pemasok.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN SERTA PROGRAM YANG MELEBIHI TANGGUNG JAWAB MINIMAL

Lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan yang merupakan kewajiban serta program yang melebihi tanggung jawab minimal tertuang dalam tujuan utama penerapan keuangan berkelanjutan Bank Jatim, yakni untuk:

- a. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai;
- b. Meningkatkan ketahanan dan daya saing Perusahaan melalui manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik dengan mengembangkan produk dan/atau layanan keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan sehingga memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sistem keuangan;
- c. Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, melindungi keanekaragaman hayati, dan mendorong penggunaan energi dan sumber daya alam secara efisien; dan
- d. Mengembangkan produk dan/atau layanan keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.

SOCIAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL ISSUES

In determining key social, economic and environmental issues related to the impact of the Bank's activities, Bank Jatim conducts Focus Group Discussions (FGD) involving various internal and external stakeholders. This key issue is then used as a basis for the Bank to prioritize management approaches in managing it.

Bank Jatim has formulated the Principle of Banking Sustainability, namely all the principles of managing the activities of the Bank in the aspects of customers, business strategies, banking operations, risk management, human resources, and community development.

These aspects are then grouped into 7 (seven) categories, namely:

1. CSR related to Human Rights;
2. CSR related to fair operations;
3. CSR related to the environment;
4. CSR related to occupational safety;
5. CSR related to social community development;
6. CSR related to responsibility to customers;
7. CSR related to responsibility to suppliers.

SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS OBLIGATIONS AND PROGRAMS EXCEEDING MINIMUM RESPONSIBILITY

The scope of corporate social responsibility which is an obligation as well as a program that exceeds the minimum responsibility are stipulated in the main objectives of the Bank's sustainable finance implementation, namely to:

- a. Provide adequate funding sources needed to achieve sustainable development goals and funding related to climate change;
- b. Enhance the Bank's resilience and competitiveness through better social and environmental risk management by developing financial products and/or services that apply sustainable financial principles so as to make a positive contribution to financial system stability;
- c. Reduce social inequality, reducing and preventing environmental damage, protecting biodiversity, and encouraging the efficient use of energy and natural resources; and
- d. Develop financial products and/or services that apply the principles of sustainable finance.

Dalam menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, Bank Jatim berupaya secara bertahap untuk mengacu pada ISO 26000. Lingkup tanggung jawab sosial Bank adalah meliputi:

1. Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial;
2. Hak Asasi Manusia;
3. Ketenagakerjaan;
4. Lingkungan Hidup;
5. Operasi Yang Adil;
6. Pemenuhan Kepentingan Pelanggan; dan
7. Kemasyarakatan.

Rincian tiap-tiap kategori tanggung jawab sosial akan dibahas secara rinci pada tiap-tiap bagian yang terkait dalam pembahasan bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

STRATEGI DAN PROGRAM KERJA DALAM ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepatutan, yang mengacu berdasarkan kepentingan (urgensi) dan skala prioritas serta prinsip kewajaran, yang mengacu kepada pertimbangan rasional dan obyektif.

Pemberian bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan diutamakan kepada pemohon yang berdomisili di wilayah kerja Bank Jatim. Namun demikian dalam hal-hal tertentu, pemberian bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan kepada pemohon yang berdomisili di luar wilayah kerja Bank Jatim.

Bank Jatim melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan filosofi holistik integratif, yang mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan. Sistem perekonomian nasional mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi. Sistem keuangan memiliki peran untuk mencegah adanya praktik investasi pada kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya secara berlebihan dan membawa dampak pada kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan hidup.

ANGGARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan dianggarkan pada akhir tahun untuk periode pelaksanaan program tahun berikutnya, dan dimasukkan ke dalam *Business Plan* Perusahaan. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan diperhitungkan sebagai beban biaya, yang pembukuannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Penyaluran dana bidang pendidikan sebesar Rp791 juta, naik 56,16% dari penyaluran dana pendidikan 2018 sebesar Rp507 juta. Penyaluran dana kesehatan sebesar Rp2.362 juta, naik 7,54% dari penyaluran dana kesehatan tahun 2018 sebesar Rp2.196 juta. Penyaluran

In implementing corporate social responsibility, Bank Jatim strives to always refer to ISO 26000. The scope of the Bank's social responsibilities includes:

1. Social Responsibility Governance;
2. Human Rights;
3. Employment;
4. Environment;
5. Fair Operations;
6. Fulfillment of Customer Interests; and
7. Society.

The details of each category of social responsibility will be discussed in each of the relevant sections in the discussion of this Corporate Social Responsibility chapter of Annual Report.

STRATEGIES AND WORK PROGRAMS REGARDING SOCIAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL ISSUES

The implementation of social and environmental responsibility programs is carried out with due regard to the principle of propriety, which refers based on the urgency and the scale of priorities, and the principle of fairness which refers to rational and objective considerations.

Providing assistance to social and environmental responsibility programs is prioritized for applicants domiciled in the work area of Bank Jatim. However, in certain cases, the provision of assistance for social and environmental responsibility programs can be given to applicants who live outside the working area of Bank Jatim.

Bank Jatim carries out corporate social responsibility based on an integrative holistic philosophy, which refers to the concept of sustainable development. The national economic system integrates economic, social and environmental aspects in order to realize sustainable development that is able to maintain economic stability. The financial system has a role to prevent investment practices in business activities that use resources excessively and have an impact on social inequality and environmental damage.

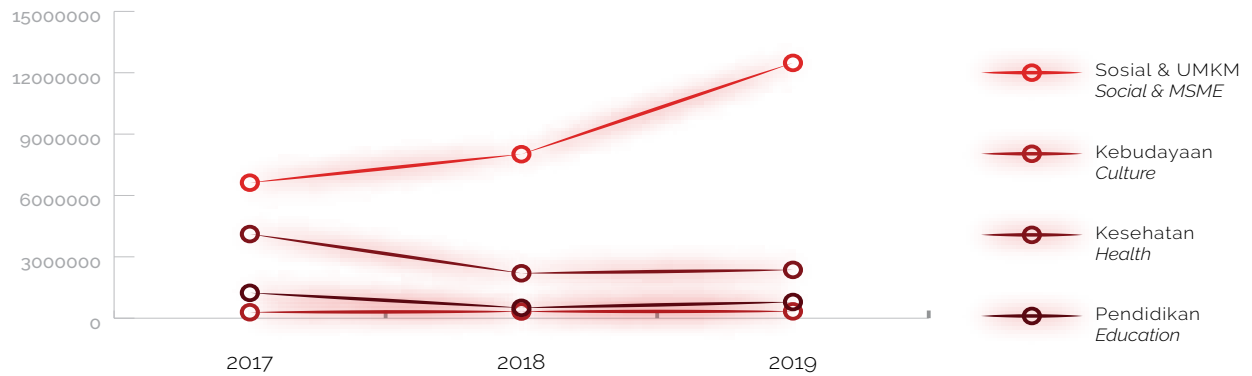
BUDGET FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The social and environmental responsibility program is budgeted at the end of the year for the next year program implementation period, and included in the Bank's Business Plan. The social and environmental responsibility program is calculated as a cost burden, the accounting is adjusted to the applicable rules.

Distribution of education funds amounted to Rp791 million, up 56.16% from the distribution of education funds in 2018 amounting to Rp507 million. Distribution of health funds amounted to Rp2.362 million, up 7.54% from the distribution of health funds in 2018 amounting to Rp2.196 million. The distribution of cultural funds

dana bidang kebudayaan sebesar Rp326 juta, ada perubahan 2,58% dari nilai penyaluran dana kebudayaan 2018 sebesar Rp326 juta. Penyaluran dana pada sektor sosial & UMKM sebesar Rp12.481 juta. naik 55,69% dari penyaluran dana sosial & UMKM 2018 sebesar Rp8.016 juta.

amounted to Rp326 million, there was a change of 2.58% from the value of cultural funds distribution in 2018 of Rp326 million. Distribution of funds to the social sector & MSMEs amounted to Rp12,481 million, up 55.69% from the distribution of social funds & MSMEs in 2018 amounting to Rp8,016 million.



NO	BIDANG FIELD	2017	2018	2019
1.	Pendidikan Education	1.239.694	506.610	791.121
2.	Kesehatan Health	4.113.037	2.196.004	2.361.740
3.	Kebudayaan Culture	289.650	325.800	334.200
4.	Sosial & UMKM Social & MSME	6.624.945	8.016.926	12.481.353
TOTAL TOTAL		12.267.326	11.045.340	15.968.415

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Salah satu subyek inti dalam ISO 26000 adalah pelaksanaan operasi yang adil. Dalam mewujudkan pelaksanaan kegiatan perbankan yang adil, selain mengacu pada pedoman tersebut, Bank Jatim telah memiliki berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memastikan terealisasinya operasi yang adil, seperti Kebijakan Perlindungan Nasabah dan Pemberian Informasi/Data/Dokumen kepada Pihak Luar, Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing policy*), dan Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur.

PROSEDUR DAN MEKANISME PENANGANAN KONFLIK

Bank Jatim memiliki prosedur dan mekanisme penanganan konflik melalui Info Bank Jatim dial 14044. Dari nomor telpon Info Bank Jatim tersebut, akan diteruskan penanganan lebih lanjut ke divisi terkait.

UPAYA MEMPROMOSIKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL OPERASI YANG ADIL

Upaya mempromosikan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil dilaksanakan dengan menekankan pada upaya pencegahan benturan kepentingan, penerapan anti korupsi, kompetisi yang sehat, dan pencegahan perilaku *insiders*. Penerapan anti korupsi diwujudkan melalui pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS), *Code of Conduct* dan Kebijakan Gratifikasi.

KEGIATAN DAN CAPAIAN 2019

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan praktik operasi yang adil yang secara konsisten dilaksanakan oleh Bank Jatim meliputi hal-hal sebagai berikut:

Bank Jatim mengaplikasikan kebijakan perusahaan dalam rangka menjaga kepuasan nasabah melalui;

1. Mengoptimalkan fungsi *Call Center* Info Bank Jatim 14044 dalam peningkatan kualitas layanan terhadap pengaduan nasabah secara online (via telepon).

COMMITMENT AND POLICY

One of the core subjects in ISO 26000 is fair operation. In realizing the implementation of fair banking activities, in addition to referring to these guidelines, Bank Jatim has various policies aimed at ensuring the realization of fair operations, such as Customer Protection Policies and Provision of Information/Data/Documents to Outside Parties, Policy Reporting on Violations (*whistleblowing policy*), and Policy to Fulfill Creditor Rights.

PROCEDURE AND MECHANISM OF CONFLICT MANAGEMENT

Bank Jatim has procedures and mechanisms for handling conflicts through Bank Jatim Info dial 14044. From the telephone number of Bank Jatim Info, further handling will be forwarded to the relevant division.

EFFORTS TO PROMOTE SOCIAL RESPONSIBILITY OF FAIR OPERATIONS

Efforts to promote social responsibility related to fair operations are carried out by emphasizing efforts to prevent conflicts of interest, applying anti-corruption, fair competition, and preventing insiders' behavior. The application of anti-corruption is realized through the implementation of the *Whistleblowing System* (WBS), *Code of Conduct*, and Gratification Policy.

ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS IN 2019

The implementation of social responsibility related to fair operating practices that are consistently carried out by the Bank includes the following matters:

Bank Jatim applies its corporate policies in order to maintain customer satisfaction through;

1. Optimizing the function of *Call Center* Info Bank Jatim 14044 in improving the quality of service to customer complaints online (via telephone).

2. Menindaklanjuti secara cepat pengaduan nasabah melalui email resmi Bank Jatim, media sosial resmi Bank Jatim (Facebook, Twitter dan Instagram) dan media massa.
3. Mengembangkan dan penyempurnaan Sistem Pengaduan dan Perlindungan Nasabah Terintegrasi sebagai sarana pengaduan yang terintegrasi dengan seluruh Cabang, Capem, *agent Call Center* dan unit terkait sehingga penanganan pengaduan menjadi lebih cepat dan optimal.
4. Menyempurnakan dan mensosialisasikan BPP Perlindungan Nasabah kepada seluruh pegawai sebagai acuan dalam penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dan efisien sehingga mengurangi tingkat resiko hukum, reputasi dan finansial.

Sesuai ketentuan BI dan OJK, Bank Jatim telah mencatat pengaduan nasabah, baik yang mempunyai potensi kerugian finansial maupun tidak dan menindaklanjuti setiap pengaduan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bank Jatim dapat memperpanjang jangka waktu tersebut sampai dengan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja. Bank Jatim wajib melaporkan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan.

Adapun satuan kerja yang bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Sub Divisi *Service Quality* terutama dalam pengadministrasian, penyampaian Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan secara triwulanan kepada Bank Indonesia; dan Otoritas Jasa Keuangan
- b. Pemimpin Bidang Operasional Kantor Cabang, terutama dalam hal penyelesaian pengaduan yang meliputi pengaduan yang menyangkut tentang operasional Kantor Cabang dalam menjalankan kebijakan/ketentuan seluruh aktivitas fungsional Bank Jatim yang ditetapkan manajemen.

Agar pengaduan nasabah dapat terselesaikan dengan baik sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, Bank Jatim telah mengedukasi nasabah dengan cara:

1. Mensosialisasikan Tata Cara Mediasi Perbankan dan Mekanisme Pengaduan Nasabah melalui pengumuman dan brosur yang telah ditempatkan pada area yang mudah diakses oleh nasabah.
2. Untuk ketertiban *monitoring* penyelesaian pengaduan nasabah, petugas penerima pengaduan di Cabang, Capem, Kantor Kas dan *Payment Point* disamping wajib membuat *register* dan mengekskalasi serta melaporkan rekap pengaduan setiap bulannya ke Sub Divisi *Service Quality*.

Bank Indonesia dan OJK juga mengatur mengenai sengketa dengan nilai maksimal Rp500 juta, yang timbul akibat tidak terselesaikannya keluhan nasabah terhadap bank yang dapat diselesaikan menggunakan mekanisme mediasi perbankan yang merupakan proses penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Proses ini dilakukan secara fleksibel guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela (*win-win solution*) terhadap sebagian/seluruh permasalahan yang disengketakan dengan semangat sederhana, murah dan cepat (maksimal 60 hari) serta berlandaskan asas kerahasiaan.

2. Quickly following up on customer complaints through the official Bank Jatim email, Bank Jatim official social media (Facebook, Twitter and Instagram) and mass media.
3. Developing and refining the Integrated Customer Complaints and Protection System as a complaint facility that is integrated with all Branches, Sub-Branches, Call Center agents and related units so that complaint handling is faster and optimal.
4. Improving and socializing Customer Protection BPP to all employees as a reference in resolving customer complaints effectively and efficiently so as to reduce the level of legal, reputation and financial risk.

In accordance with BI and OJK regulations, Bank Jatim has recorded customer complaints, both those that have potential financial losses or not, and follows up on every complaint no later than 20 (twenty) working days after the date of receipt of the written complaint. In the event that there are certain conditions, Bank Jatim can extend the period until at the latest 20 (twenty) working days. Bank Jatim must report the handling and settlement of customer complaints to Bank Indonesia and the Financial Services Authority every quarter.

The work units responsible for handling and resolving customer complaints are as follows:

- a. Service Quality Sub-Division, especially in administering, submitting quarterly Complaint Handling and Settlement Reports to Bank Indonesia, and the Financial Services Authority
- b. Head of Operations of Branch Office, especially in the case of resolution of complaints which includes complaints concerning the operations of Branch Offices in carrying out policies/provisions of all functional activities of the Bank determined by management.

For customer complaints to be resolved properly within a predetermined period of time, Bank Jatim has educated customers by:

1. Socializing Banking Mediation Procedures and Customer Complaints Mechanisms through announcements and brochures that have been placed in areas that are easily accessible to customers.
2. In order to monitor the settlement of customer complaints, the recipient of complaints at the Branch, Sub-Branch, Cash Office and Payment Point in addition must make a register and escalate and report the recap of complaints every month to the Service Quality Sub-Division.

Bank Indonesia and OJK also regulate disputes with a maximum value of Rp500 million, arising from unresolved customer complaints against banks that can be resolved using a banking mediation mechanism which is a process of resolving disputes between customers and banks facilitated by Bank Indonesia. This process is carried out flexibly in order to reach a settlement in the form of a voluntary agreement (*win-win solution*) for some/all disputed problems with a spirit of simple, cheap and fast (maximum 60 days) and based on the principle of confidentiality.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada nasabah, Bank Jatim mempunyai unit *Call Center* "Info Bank Jatim 14044" yang beroperasi selama 24 jam sehari dan selama 7 hari dalam seminggu, sepanjang tahun ketika nasabah membutuhkan. *Call Center* "Info Bank Jatim 14044" dapat memberikan layanan sebagai berikut:

- Informasi mengenai produk/jasa perbankan yang diberikan oleh Bank Jatim;
- Solusi atas permasalahan yang dihadapi nasabah dalam menggunakan jasa dan produk Bank Jatim;
- Menampung keluhan nasabah untuk dilanjutkan ke bagian terkait di Bank Jatim sebagai upaya penyelesaian selanjutnya; dan
- Melakukan pengamanan dini atas rekening nasabah segera setelah nasabah melaporkan terjadinya peristiwa yang menyebabkan hilangnya kartu ATM, lupa *password* internet banking / *mobile banking* dan unregistrasi SMS Banking.

Sepanjang 2019, Bank Jatim menerima 16 pengaduan rata-rata perhari dari pihak luar dengan pengaduan terbanyak berasal dari keluhan tentang gagal Tarik tunai.

IMPLEMENTASI WBS

Salah satu capaian Bank dari pelaksanaan kegiatan operasi yang adil pada tahun 2019 adalah tidak adanya pengaduan melalui WBS yang diterima, baik dari pegawai maupun nasabah terkait praktik ketidakadilan yang berdampak material. Dengan demikian, sepanjang tahun 2019, secara tidak langsung Bank Jatim telah melaksanakan ISO 26000 melalui kegiatan operasi perbankan. Bank Jatim tidak menerima pengaduan dari pihak luar terkait pelanggaran operasional maupun keuangan yang dilakukan oleh Bank Jatim.

HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA DAN ORGANISASI LAIN

Bank senantiasa memprioritaskan kepentingan Bank Jatim dalam berhubungan dengan mitra kerja. Di samping itu, Bank juga berupaya untuk terus mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta citra negatif dalam berhubungan dengan mitra kerja. Dalam hubungannya dengan organisasi lain, Bank Jatim sepanjang tahun 2019 telah menghindarkan diri dari segala bentuk kolaborasi/persekutuan yang tidak patut dengan pihak lain.

In order to improve services and provide convenience to customers, Bank Jatim has a *Call Center* unit "Info Bank Jatim 14044" which operates 24 hours a day and 7 days a week, throughout the year when customers need it. *Call Center* "Info Bank Jatim 14044" can provide the following services:

- Information on banking products/services provided by Bank Jatim;
- Solutions to problems faced by customers in using the services and products of Bank Jatim;
- Accommodate customer complaints to proceed to the relevant section at Bank Jatim as a further settlement effort; and
- Undertake early safeguards on the customer's account as soon as the customer reports an event that has caused the loss of an ATM card, forgotten internet banking/mobile banking password and un-registration from SMS Banking.

During 2019, Bank Jatim received 16 complaints on average per day from external parties with the most complaints regarding cash withdrawals.

WBS IMPLEMENTATION

One of the achievements of the Bank from the implementation of fair operating activities in 2019 is that there were no complaints through WBS received, both from employees and customers related to injustice practices that have material impact. Thus, throughout 2019, Bank Jatim has indirectly implemented ISO 26000 through banking operations. Bank Jatim does not accept complaints from outside parties related to operational or financial violations committed by the Bank.

RELATIONSHIP WITH WORK PARTNERS AND OTHER ORGANIZATIONS

The Bank always prioritizes the interests of Bank Jatim in dealing with business partners. In addition, the Bank also strives to continue to prevent corruption, collusion, and nepotism as well as negative images in dealing with business partners. In conjunction with other organizations, Bank Jatim throughout 2019 has avoided any form of inappropriate collaboration/partnership with other parties.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO HUMAN RIGHTS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Bank Jatim berkomitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait HAM yang telah dilaksanakan Bank Jatim meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin karena kondisi darurat, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dengan Serikat Pegawai Bank Jatim. Bank Jatim juga memberikan hak dan kesempatan yang setara untuk bekerja di Bank tanpa diskriminasi, yang memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya, termasuk dalam hal pengangkatan calon pekerja.

ISU-ISU HAM DAN JANGKAUAN LINGKUP PENGARUH PERUSAHAAN

Lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dengan Hak Asasi Manusia, yakni berkaitan dengan ketenagakerjaan meliputi perlakuan/tindakan diskriminasi, pengakuan dan jaminan bagi Serikat Pegawai, hak pemberian waktu kerja, cuti tahunan, izin istirahat jika melahirkan/keguguran atau sakit karena haid, izin menjalankan ibadah maupun izin meninggalkan pekerjaan jika ada sesuatu hal.

RISIKO PADA BANK DAN RISIKO PADA PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT PELANGGARAN HAM

Sektor perbankan mendapatkan keuntungan dari kegiatan mengambil risiko dan mengelola risiko. Manajemen risiko tradisional perbankan umumnya difokuskan pada bisnis utama perbankan yakni menjalankan fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi merujuk pada sebuah proses untuk memberikan pinjaman dan mengumpulkan dana. Karena itu, industri perbankan identik dengan aktivitas bisnis yang penuh dengan risiko.

Sebagai korporasi, bank menyediakan sejumlah produk dan layanan jasa perbankan untuk perseorangan melalui bank ritel dan swasta, jasa bisnis komersial melalui bank investasi dan korporasi, dan untuk investor melalui aktivitas jasa manajemen aset. Di sisi yang lain, meski tidak akan mengurangi kualitas aset yang dimiliki oleh lembaga keuangan, namun lembaga keuangan

COMMITMENT AND POLICY

Bank Jatim is fully committed to the enforcement of Human Rights (HAM). The scope of social responsibility related to human rights that has been implemented by Bank Jatim includes the prevention of acts of discrimination, freedom of association, work time arrangements, permits due to emergencies, and opportunities to practice worship. The policy is stated in the Collective Labor Agreement (PKB) between the Company and the Bank Jatim Employees Union. Bank Jatim also provides equal rights and opportunities to work in the Bank without discrimination, which views differences in religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or other physical conditions, including in terms of the appointment of prospective workers.

HUMAN RIGHTS ISSUES AND SCOPE OF BANK'S OUTREACH

The scope of corporate social responsibility related to human rights, which is related to employment includes discrimination treatment/action, recognition and guarantee for Employee Union, the right of granting work time, annual leave, permission to rest if giving birth/miscarriage or illness due to menstruation, permission to perform worship nor permission to leave work if there is something.

RISKS FOR THE BANK AND STAKEHOLDERS REGARDING HUMAN RIGHTS VIOLATIONS

The banking sector benefits from taking risks and managing risk. Traditional banking risk management is generally focused on the main business of banking, namely carrying out the intermediation function. The intermediation function refers to a process for providing loans and raising funds. Therefore, the banking industry is synonymous with business activities that are full of risk.

As a corporation, the bank provides a number of banking products and services to individuals through retail and private banks, commercial business services through investment and corporate banks, and to investors through asset management service activities. On the other hand, although it will not reduce the quality of assets owned by financial institutions, financial

pun lambat laun dapat terkena dampak dari aktivitas bisnis dan investasi yang tidak bertanggung jawab baik secara sosial maupun lingkungan. Mekanisme transmisinya biasanya melalui pekerja, rantai pasokan (*supply chain*), konsumen, produk, dan jasa.

Dengan demikian, sektor perbankan dapat dianggap sebagai aktivitas bisnis khusus karena bisa memainkan dua peran yang tidak kelihatan secara kasat mata baik sebagai aktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM maupun sebagai aktor dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi.

Terkait dengan HAM, Bank Jatim memberikan perhatian khusus jika melihat potensi dampak bisnis ini terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Bank dapat menjadi penyebab langsung pelanggaran HAM melalui pelanggaran terhadap hak-hak pegawai dan nasabahnya. Selain itu, bank juga dapat berperan secara tidak langsung terjadinya pelanggaran HAM melalui pemberian bantuan keuangan/pinjaman kepada korporasi tertentu yang menjalankan kegiatan bisnis yang melanggar HAM.

MEKANISME DAN PROSEDUR PENERAPAN HAM DI BANK

Atas dasar hal tersebut di atas, Bank Jatim memiliki tanggung jawab moral dan kewajiban untuk menghormati HAM. Menghormati HAM secara sempit dapat dimaknai Bank tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu hak dan kebebasan pegawai serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam arti luas, Bank Jatim akan mengambil langkah-langkah secara aktif dan tegas terkait HAM seperti mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan pelanggaran serta penegakan HAM melalui uji tuntas yang tepat (*due diligence*) dalam setiap kegiatan operasi dan hubungan bisnisnya.

KEGIATAN DAN CAPAIAN KEGIATAN TERKAIT PROMOSI HAM

Bank Jatim senantiasa menyusun perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam program kerja yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) serta Rencana Bisnis Bank (RBB). Program kerja tersebut ditujukan untuk menjamin proses kerja di Bank telah memperhatikan kegiatan terkait promosi HAM antara lain pengalokasian biaya untuk kegiatan-kegiatan pegawai.

Penegakan HAM juga ditunjukan dengan kebebasan bagi pegawai untuk membentuk Serikat Pegawai serta mengadakan pertemuan antara Serikat Pegawai dengan jajaran manajemen Bank untuk membahas hal-hal yang menjadi kebutuhan pegawai sehingga program kerja yang dimuat dalam RKAP dapat terealisasi dengan memperhatikan hasil kesepakatan Serikat Pegawai dengan manajemen Bank.

Bank Jatim yang bergerak dalam industri perbankan, isu HAM lebih berpusat pada isu ketenagakerjaan. Isu HAM terkait dengan kegiatan operasional Bank, bukan menjadi isu yang signifikan, mengingat perbankan merupakan kegiatan usaha dalam bidang jasa yang bersifat pelayanan. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan HAM yang dilakukan Bank Jatim meliputi kesempatan dan kesetaraan kerja, Kebebasan pembentukan serikat pegawai, waktu kerja, cuti kerja, ijin kerja, serta hal lainnya terkait ketenagakerjaan.

institutions can gradually be affected by irresponsible business and investment activities both socially and environmentally. The transmission mechanism is usually through workers, supply chains, consumers, products and services. Thus, the banking sector can be considered as a special business activity because it can play two roles that are invisible visibly both as an actor causing human rights violations and as an actor in resolving human rights violations committed by corporations.

Regarding human rights, Bank Jatim pays special attention when it sees the potential impact of this business on human rights violations. Banks can be a direct cause of human rights violations through violations of the rights of employees and their customers. In addition, banks can also play an indirect role in the occurrence of human rights violations through the provision of financial assistance/loans to certain corporations that conduct business activities that violate human rights.

MECHANISM AND PROCEDURE OF HUMAN RIGHTS IMPLEMENTATION AT THE BANK

Based on the foregoing, Bank Jatim has a moral responsibility and an obligation to respect human rights. Narrowing respect for human rights can be interpreted as the Bank not taking actions that can disrupt the rights and freedoms of employees and other stakeholders. In a broad sense, the Bank will take steps actively and decisively related to human rights such as identifying, preventing, and resolving human rights violations and enforcement through proper due diligence in each of its operations and business relations.

ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS REGARDING HUMAN RIGHTS PROMOTION

Bank Jatim always compiles activity plans as outlined in the work program contained in the Work Plan and Budget (RKAP) and the Bank Business Plan (RBB). The work program is intended to ensure the work process at the Bank has taken into account activities related to the promotion of human rights, including the allocation of costs for employee activities.

Human Rights Enforcement is also demonstrated by the freedom for employees to form Employee Unions and to hold meetings between Employees Unions and Bank management to discuss matters that are needed by employees so that the work programs contained in the RKAP can be realized by taking into account the agreement between the Employee Union and the Bank's management.

As a company engaged in the banking industry, Bank Jatim regards the issue of human rights by focusing more on labor issues. The issue of human rights related to the Bank's operational activities is not a significant issue, considering that banking is a business activity in the service sector. The activities of implementing social responsibility related to human rights undertaken by the Bank include Employment Opportunities and Equality, Freedom of Employee Union Formation, Working Time, Work Leave, Work Permit, and Other Matters relating to Employment.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
RELATED TO THE ENVIRONMENT



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Bank Jatim menyadari kegiatan operasi bisnisnya secara langsung maupun tidak memberikan dampak terhadap lingkungan, sehingga menjaga lingkungan guna kelangsungan hidup saat ini dan masa depan merupakan prioritas utama. Selain itu Bank Jatim senantiasa melaksanakan fungsi kepatuhan terhadap regulasi, hukum, dan norma yang berlaku sehingga terhindar dari risiko kepatuhan.

Berpedoman pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu diantaranya mengatur kebijakan perusahaan terhadap alam dan lingkungan hidup, serta melaksanakan regulasi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Bank Jatim dalam operasional bisnisnya tidak hanya mengejar profit semata namun juga mempertimbangkan planet dan *people*.

COMMITMENT AND POLICY

Bank Jatim realizes its business operations activities directly or indirectly have an impact on the environment, so protecting the environment for survival now and in the future is a top priority. In addition, Bank Jatim always carries out the function of compliance with applicable regulations, laws and norms so as to avoid compliance risks.

Guided by Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, one of which regulates company policy on nature and the environment, as well as implementing POJK regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions of Issuers and Public Companies, Bank Jatim in its business operations not only pursues profit but also considers the planet and people.

ISU-ISU LINGKUNGAN DAN RISIKO LINGKUNGAN TERKAIT KEGIATAN BANK

Isu-isu lingkungan terkait kegiatan Bank antara lain tercermin dalam proses pemberian kredit. Bank Jatim menargetkan bahwa dalam setiap kegiatan pemberian kredit akan selalu berpegang pada ketentuan internal yang berlaku. Bank Jatim selalu berupaya untuk menghindari pemberian kredit kepada proyek atau usaha yang secara nyata membahayakan lingkungan. Bank akan memastikan bahwa 100% debitur telah memenuhi persyaratan AMDAL dan memperoleh predikat *PROPER* BIRU/HIJAU/EMAS.

Bank Jatim juga menargetkan kegiatan penghematan energi dan pengurangan emisi dengan Program *Green Office*. Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitar kantor pusat dalam mendukung pengelolaan kantor yang ramah lingkungan. Dalam pelaksanaannya, manajemen beserta seluruh pekerja berupaya menerapkan berbagai program penghematan seperti hemat kertas, hemat listrik, dan hemat air melalui sosialisasi dan anjuran. Program tersebut dapat memberikan manfaat nyata seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi, dan juga peningkatan citra Bank Jatim. Kegiatan dan aktivitas dalam mendukung terciptanya *Green Office* dilakukan melalui penggunaan material yang ramah lingkungan dan pemakaian energi yang lebih efisien.

JANGKAUAN LINGKUP PENGARUH BANK PADA PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT ISU LINGKUNGAN

Jangkauan lingkup pengaruh dan dukungan Bank Jatim terhadap pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup tercermin dalam setiap kegiatan Bank baik itu operasional di Kantor Pusat maupun kegiatan bisnisnya.

MEKANISME PENANGANAN KEADAAN DARURAT KESELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KONFLIK LINGKUNGAN

Bank Jatim menyediakan mekanisme penanganan keadaan darurat keselamatan lingkungan hidup dan konflik lingkungan melalui divisi manajemen risiko.

RENCANA PROGRAM CSR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2019

Pada tahun 2019, Bank Jatim menargetkan untuk turut serta dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga dalam operasional bisnisnya selain mencari laba juga memberikan kontribusi pada masyarakat dan lingkungan.

ENVIRONMENTAL ISSUES AND RISKS RELATED TO BANK'S ACTIVITIES

Environmental issues related to the Bank's activities, among others, are reflected in the lending process. Bank Jatim targets that in every lending activity it will always adhere to the applicable internal regulations. Bank Jatim always tries to avoid giving credit to projects or businesses that are clearly endangering the environment. The Bank will ensure that 100% of debtors meet the AMDAL requirements and obtain the BLUE/GREEN /GOLD (BRIU/HIJAU/EMAS) *PROPER* rating.

Bank Jatim also targets energy saving and emission reduction activities with the *Green Office* Program. This program is a tangible form of contribution in environmental management around the head office in supporting the management of environmentally friendly offices. In its implementation, management and all workers strive to implement various savings programs such as saving paper, saving electricity, and saving water through socialization and advice. The program can provide tangible benefits such as reducing operational costs, increasing efficiency, and also improving the image of Bank Jatim. Activities and activities in support of the creation of a *Green Office* are carried out through the use of environmentally friendly materials and more efficient use of energy.

SCOPE OF BANK'S IMPACT ON STAKEHOLDERS REGARDING ENVIRONMENTAL ISSUES

The scope of the influence and support of Bank Jatim on environmental preservation is reflected in each of the Bank's activities both operational at the Head Office and its business activities.

MANAGEMENT MECHANISM OF ENVIRONMENTAL EMERGENCY AND CONFLICTS

Bank Jatim provides a mechanism for handling emergencies for environmental safety and environmental conflict through the risk management division.

PLANS FOR CSR PROGRAMS IN THE FIELD OF ENVIRONMENT IN 2019

In 2019, Bank Jatim targeted to participate in sustainable development, so that in its business operations in addition to making a profit, it also contributes to society and the environment.

KEGIATAN DAN CAPAIAN KEGIATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 2019

Beberapa kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan Bank Jatim sepanjang tahun 2019 diantaranya pemberian kredit berwawasan lingkungan, pengelolaan energi dan air, serta *paperless banking* melalui *e-office*.

PEMBERIAN KREDIT BERWAWASAN LINGKUNGAN

Green banking merupakan sebuah konsep kegiatan pada sebuah institusi keuangan yang selalu memberikan prioritas pada keberlanjutan lingkungan dalam menjalankan praktik bisnisnya. Selama ini, penerapan *green banking* oleh Bank Jatim adalah bukti kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, pertumbuhan ekonomi baik dalam skala nasional, industri sampai pada skala menengah dan kecil harus tetap mengedepankan pertumbuhan yang ramah lingkungan sehingga pertumbuhan yang dicapai adalah pertumbuhan yang berkelanjutan. Komitmen ini menunjukkan jika Bank Jatim terus berusaha untuk memberikan peran yang nyata bagi keberlanjutan lingkungan dalam praktik bisnisnya.

Sejak tahun 2019, Bank Jatim telah aktif dalam memberikan pembiayaan pada sektor ramah lingkungan, misalnya melalui kredit BLUD ke rumah sakit Dr Soetomo berupa pembangunan pusat onkologi satu-satunya di Indonesia. Pada tahun 2019, Bank menyalurkan kredit kepada RSUD Dr Soetomo sebesar 1.08% dari total kredit korporasi, turun dari tahun 2018 yang sebesar Rp111,017 miliar atau 1,60% dari total kredit korporasi. (tidak termasuk konsumen).

Melalui program pemberian kredit yang berwawasan lingkungan, Bank Jatim mampu berkontribusi pada praktik bisnis yang ramah lingkungan. Ini dapat dilihat dari konsistensi Bank Jatim memberikan pinjaman kepada debitur yang memiliki bisnis ramah lingkungan.

Tabel Portofolio Kredit Pembiayaan Hijau

PORTOFOLIO KREDIT MAKSIMUM (JUTAAN RP)	2019	2018	MAXIMUM CREDIT PORTFOLIO (MILLION RUPIAH)
GREEN FINANCING KORPORASI	215.789	140.629	GREEN FINANCING CORPORATION
KREDIT KORPORASI	8.711.965	6.920.700	CORPORATION CREDIT
TOTAL KREDIT BANK JATIM (TIDAK TERMASUK KREDIT KONSUMER)	12.290.705	9.867.937	TOTAL CREDIT OF BANK JATIM (EXCLUDING CONSUMER CREDIT)
RASIO PERSENTASE (%)			PERCENTAGE RATIO (%)
GREEN FINANCING KORPORASI	1,76%	1,43%	GREEN FINANCING CORPORATION

PENGELOLAAN ENERGI DAN AIR

Kebutuhan energi terbesar Bank Jatim adalah listrik yang dipenuhi dari pasokan PT PLN (Persero), Tbk, sebagai energi tidak langsung dalam mendukung operasi perbankan. Secara khusus, perusahaan juga mengoperasikan generator berbahan bakar diesel untuk mendukung implementasi (*near*) *zero downtime* dalam memberikan informasi berbasis teknologi, jika terjadi pemadaman listrik. Selain dari listrik, perusahaan menggunakan air untuk mendukung kegiatan perbankan, termasuk untuk kebutuhan air minum, sanitasi dan wudhu. Sesuai dengan lokasi perusahaan yang menempati area kantor, sebagian besar air yang dikonsumsi bersumber dari penggunaan air PDAM.

ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN 2019

Several environmental management activities carried out by Bank Jatim throughout 2019 include the provision of environmentally sound loans, energy and water management, and paperless banking through *e-office*.

PROVISION OF LOANS FOR ENVIRONMENT

Green banking is a concept of activities in a financial institution that always gives priority to environmental sustainability in carrying out its business practices. During this time, the application of green banking by Bank Jatim is proof of the Bank's concern for the environment. In the face of the ASEAN Economic Community, economic growth both on a national scale, industry to the medium and small scale must continue to promote environmentally friendly growth so that the growth achieved is sustainable growth. This commitment shows that Bank Jatim continues to strive to provide a real role for environmental sustainability in its business practices.

Since 2019, Bank Jatim has been active in providing financing to the environmentally friendly sector, for example through BLUD credit to Dr Soetomo's hospital in the form of building the only oncology center in Indonesia. In 2019, the Bank extended loans to Dr. Soetomo District Hospital of 1.08% of total corporate loans, down from 2018 which amounted to Rp111,017 billion or 1.60% of total corporate loans (not including consumers).

Through an environmentally sound credit program, Bank Jatim is able to contribute to environmentally-friendly business practices. This can be seen from the consistency of Bank Jatim providing loans to debtors who have environmentally-friendly businesses.

Table of Green Financing Loan Portfolios

ENERGY AND WATER MANAGEMENT

Bank Jatim's largest energy need is electricity that is met from the supply of PT PLN (Persero) Tbk, as indirect energy in supporting banking operations. In particular, the company also operates diesel-powered generators to support the implementation of (*near*) *zero* downtime in providing technology-based information, in the event of a power outage. Apart from electricity, the company uses water to support banking activities, including for drinking water, sanitation and ablution needs. In accordance with the location of the company that occupies the office area, most of the water consumed comes from the use of PDAM water.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan energi langsung, perusahaan menggunakan Pertamina dan diesel untuk sebagian besar kendaraan operasional. Kebijakan penggunaan Pertamina adalah upaya nyata Bank Jatim dalam memanfaatkan energi ramah lingkungan. Secara berkala, perusahaan juga memelihara dan meningkatkan peralatan transportasi kendaraan operasional untuk mengoptimalkan kinerja mesin sehingga lebih efisien dalam menggunakan energi dan mengeluarkan emisi yang memenuhi standar kualitas. Dalam upaya penghematan air dan energi diseluruh unit kerja yang ada di Indonesia, Bank Jatim menerapkan beberapa hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan *Earth Hour 2019* di seluruh unit kerja;
- Penghematan energi melalui penggantian lampu konvensional dengan lampu jenis LED yang memiliki watt lebih kecil namun memiliki *lifetime* yang lebih panjang dan menghasilkan intensitas cahaya yang lebih tinggi;
- Membatasi perjalanan bisnis dan menggantikannya dengan komunikasi langsung jarak jauh (*teleconference*);
- Memastikan lampu di luar jam kerja;
- Melakukan sosialisasi perilaku hijau atau *Green Attitude*.

Pada tahun 2019, penggunaan air PDAM meningkat seiring dengan pengembangan struktur organisasi Bank Jatim. Penghematan air, belum dihitung secara khusus, tetapi daya tarik untuk menggunakan air selalu beresonansi. Air bekas disalurkan melalui pembuangan air yang tersedia, sesuai dengan sistem manajemen bangunan. Hingga 2019 tidak ada keluhan lingkungan yang diterima oleh Bank Jatim.

Sepanjang tahun 2019, semua kendaraan operasional dicatat telah lulus uji tuntas dan memenuhi persyaratan kelayakan jalan. Selain itu, Bank Jatim juga membatasi waktu untuk menggunakan kendaraan operasional selama 3 (tiga) tahun untuk memastikan penggunaan energi yang efisien dan pemenuhan standar emisi gas.

Tabel Konsumsi Energi dan Air

OPERASIONAL GEDUNG KANTOR PUSAT	2019	2018	HEAD OFFICE BUILDING OPERATIONS
LISTRIK (KWH)	2.225.569	2.283.936	ELECTRICITY (KWH)
AIR PDAM (M ³)	45.360	34.170	PDAM WATER (M ³)
AIR SUMUR (M ³)	-	-	WELL WATER (M ³)
TRANSPORTASI			TRANSPORTATION
SOLAR (LITER)	24.001	177.287	DIESEL (LITER)

PAPERLESS BANKING MELALUI E-OFFICE

Bank Jatim memiliki strategi ramah lingkungan untuk mengurangi kebutuhan penggunaan kertas, yaitu dengan mengadopsi konsep *paperless office*. Konsep ini meminimalisir penggunaan kertas dengan cara mengonversikan penggunaan dokumen cetak dan persuratan ke dalam bentuk digital.

Penerapan konsep *paperless office* diadaptasi melalui penggunaan portal Bank Jatim sebagai *repository* peraturan perusahaan secara digital, portal SDM yang mencakup aplikasi persuratan internal Bank Jatim dan absensi bagi pegawai. Dengan aplikasi persuratan, dokumen seperti nota *intern*, memo, lampiran, serta pesan disposisi bisa disebarkan secara *digital* kepada penerima.

Meanwhile, to meet immediate energy needs, the company uses Pertamina and diesel for most operational vehicles. The policy of using Pertamina is the real effort of Bank Jatim in utilizing environmentally friendly energy. Periodically, the company also maintains and improves operational vehicle transportation equipment to optimize engine performance so that it is more efficient in using energy and issuing emissions that meet quality standards. In an effort to save water and energy in all work units in Indonesia, Bank Jatim applies the following:

- Implementation of *Earth Hour 2019* in all work units;
- Energy savings through the replacement of conventional lamps with LED type lamps which have a smaller wattage but have a longer lifetime and produce a higher light intensity;
- Limit business travel and replace it with direct long-distance communication (*teleconference*);
- Ensure that the lights are outside working hours;
- Socialize green behavior or *Green Attitude*.

In 2019, the use of PDAM water increased along with the development of the Bank's organizational structure. Water savings were specifically calculated, but the attraction to use water always resonates. Used water is channeled through available water disposal, in accordance with the building management system. Until 2019 there were no environmental complaints received by Bank Jatim.

Throughout 2019, all operational vehicles are recorded as having passed due diligence and fulfilling roadworthiness requirements. In addition, Bank Jatim also limits the time to use operational vehicles for 3 (three) years to ensure efficient energy use and compliance with gas emission standards.

Table of Energy and Water Consumption

PAPERLESS BANKING THROUGH E-OFFICE

Bank Jatim has an environmentally-friendly strategy to reduce the need for paper use, namely by adopting the concept of *paperless office*. This concept minimizes the use of paper by converting the use of printed documents and correspondence to digital form.

The application of the *paperless office* concept was adapted through the use of the Bank Jatim portal as a digital repository of company regulations, the HR portal which includes the Bank Jatim internal mail application and attendance for employees. With correspondence applications, documents such as internal notes, memos, attachments, and disposition messages can be digitally distributed to recipients.

Saat ini, aplikasi persuratan telah digunakan oleh segenap Divisi/Satuan/Unit dan Wilayah di Bank Jatim, mulai dari Direksi sampai ke segenap pegawai. Demikian pula dengan pengembangan aplikasi absensi elektronik untuk menggantikan dokumen cetak seperti pengajuan cuti, izin, keterlambatan, laporan kehadiran pegawai, dan sebagainya, juga bisa membantu mengurangi kebutuhan penggunaan kertas di Bank Jatim.

Tabel Jumlah Dokumen Beredar melalui Aplikasi

OPERASIONAL GEDUNG KANTOR PUSAT	2019	2018	HEAD OFFICE BUILDING OPERATIONS
NOTA INTERN	39.308	18.396	INTERNAL NOTE
SURAT	3.262	130	LETTER
TOTAL	3.301.308	18.526	TOTAL

Pada tahun 2019, administrasi absensi dilakukan lebih dari 100 ribu kali. Apabila masing-masing dokumen terdiri dari 2 lembar kertas maka telah dilakukan penghematan sejumlah 37 rim kertas atau setara dengan 37 pohon usia 5 tahun.

Disisi lain, penghematan kertas dalam transaksi nasabah juga ditingkatkan melalui *id-billing* SP2D. Pada tahun 2019, *id-billing* SP2D berhasil menghemat biaya kertas sebanyak 477.947 kertas *billing* atau setara dengan Rp47.794.700. Jumlah tersebut tumbuh 83,91% dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak 259.871 kertas *billing* atau setara dengan Rp25.987.100.

At present, the correspondence application has been used by all Divisions/Units Regions in Bank Jatim, starting from the Directors to all employees. Likewise, the development of electronic attendance applications to replace printed documents such as filing leave, permits, delays, employee attendance reports, and so on, can also help reduce the need for paper use at Bank Jatim.

Table of Total Documents Circulating through Applications

In 2019, attendance administration was carried out more than 100 thousand times. If each document consists of 2 sheets of paper, a saving of 37 reams of paper has been made, equivalent to 37 trees aged 5 years.

On the other hand, paper savings in customer transactions are also increased through SP2D *id-billing*. In 2019, SP2D *id-billing* succeeded in saving 477,947 billing paper costs, or Rp47,794,700. The number grew 83.91% compared to 2018 which was recorded at 259,871 billing paper or equivalent to Rp25,987,100.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO MANPOWER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Bank Jatim memberikan kesempatan, sarana, dan prasarana untuk pegawai dalam mengaktualisasikan potensi diri serta berperan aktif dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Jatim dikenal sebagai *Human Capital Management* (HCM) dengan pendekatan lebih komprehensif dibandingkan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Melalui implementasi HCM, Bank Jatim memperlakukan pegawai sebagai aset dan penambah nilai serta pendukung seluruh fungsi atau sebagai mitra strategis Bank. Hal tersebut berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 057/274/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Agustus 2018 tentang BPP *Reward* dan *Punishment System*. Dan Surat Keputusan Direksi No. 051/161/KEP/DIR/SDM tanggal 24 September 2013 tentang Sistem *Grading* beserta Perubahannya.

COMMITMENT AND POLICY

Bank Jatim provides opportunities, facilities and infrastructure for employees to actualize their potential and play an active role in improving their performance and competence. Development of Human Resources (HR) at Bank Jatim is known as Human Capital Management (HCM) with a more comprehensive approach than Human Resource Management (HRM). Through the implementation of HCM, Bank Jatim treats employees as assets and adds value and supports all functions or as a strategic partner of the Bank. This is guided by the Decree of Board of Directors No. 057/274/DIR/HCT/KEP dated August 27, 2018 concerning BPP *Reward* and *Punishment System*, and Decree of Board of Directors No. 051/161/KEP/DIR/SDM dated September 24, 2013 concerning the Grading System and its Changes.

ISU-ISU, RISIKO, DAN JANGKAUAN LINGKUP PENGARUH BANK PADA BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERKAIT KEGIATAN BANK YANG RELEVAN

Isu-isu, risiko, dan lingkup kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja terdiri dari pada program ketenagakerjaan meliputi kesetaraan gender dalam kesempatan kerja, kesetaraan dalam program pendidikan dan pelatihan, penggunaan tenaga kerja lokal, remunerasi, promosi, kebebasan berserikat dan pelatihan pensiun. Selanjutnya, program pemberian fasilitas kesehatan serta program keselamatan kerja meliputi BPJS Ketenagakerjaan, bantuan kesehatan perawatan, donor darah, *general check up*, biaya kacamata, serta penggantian biaya melahirkan.

ISSUES, RISKS, AND SCOPE OF THE BANK'S IMPACT ON THE FIELD OF MANPOWER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN RELATION TO RELEVANT BANK'S ACTIVITIES

Issues, risks and scope of corporate social responsibility activities related to employment, health and work safety consist of employment programs including gender equality in employment opportunities, equality in education and training programs, use of local labor, remuneration, promotion, freedom of association and retirement training. Furthermore, the program for providing health facilities and occupational safety programs includes BPJS Employment, health care assistance, blood donation, general check-up, eyeglasses fees, and reimbursement of delivery costs.

MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGANAN KEADAAN DARURAT KESELAMATAN KERJA DAN KONFLIK KETENAGAKERJAAN

Bank Jatim menyediakan mekanisme penanganan keadaan darurat keselamatan kerja Melalui Divisi manajemen resiko sedangkan untuk konflik ketenagakerjaan ditangani oleh Serikat Pekerja Bank Jatim.

RENCANA PROGRAM CSR BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 2020

Terkait dengan praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi pegawai, sepanjang tahun 2019 Bank Jatim telah menetapkan beberapa target pencapaian diantaranya pegawai Bank Jatim yang sadar dan tanggap akan kesehatan dan keselamatan kerja.

Untuk itu, pelaksanaan CSR bidang ketenagakerjaan telah bekerja sama dengan IZI "Inisiatif Zakat Indonesia" dalam memberikan bantuan alat usaha kepada kaum disabilitas di wilayah kota Surabaya, sedangkan dalam hal bidang kesehatan Bank Jatim kantor pusat melakukan kerja sama dengan dinas kesehatan kota Surabaya untuk pembuatan sanitasi (jamban) di wilayah ngagel rejo Surabaya, Bank Jatim belum melakukan keselamatan kerja dalam program CSRnya.

KEGIATAN DAN CAPAIAN KEGIATAN PENGELOLAAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 2019

KESEMPATAN BEKERJA YANG ADIL DAN MERATA

Praktik ketenagakerjaan yang baik merupakan salah satu prioritas utama Bank Jatim. Berangkat dari kesadaran bahwa kehadiran di tengah-tengah masyarakat turut membuka lapangan pekerjaan dan dapat menciptakan peluang bagi jutaan orang. Kesempatan bekerja terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung. Bank Jatim memiliki kebijakan yang memastikan bahwa setiap pegawai dan calon pegawai diperlakukan dengan adil dan penuh rasa hormat tanpa melihat perbedaan usia, ras, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan kondisi fisik. Bank Jatim menentang segala bentuk diskriminasi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan serta menghormati hak asasi manusia dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia. Sampai dengan saat ini, Bank Jatim tidak menemukan ataupun menerima pengaduan terkait tindak diskriminasi.

Bank Jatim menentang segala bentuk kerja paksa dan eksploitasi anak. Bank Jatim tidak mentoleransi kerja paksa dan mempekerjakan anak-anak di bawah usia sesuai peraturan ketenagakerjaan nasional yang berlaku. Kebijakan rekrutmen, praktik-praktik kerja dan prosedur, dipastikan bahwa seluruh pegawai memahami hak serta kewajibannya dan berusia di atas 18 tahun.

MANAGEMENT MECHANISM AND PROCEDURE OF OCCUPATIONAL SAFETY EMERGENCY AND MANPOWER CONFLICTS

Bank Jatim provides a mechanism for handling work safety emergencies through the Risk Management Division while for labor conflicts handled by the Bank Jatim Employee Union.

PLANS FOR CSR PROGRAMS IN THE FIELD OF MANPOWER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY FOR 2020

Related to labor, health and safety practices for employees, throughout 2019 Bank Jatim has set several achievement targets including Bank Jatim employees who are aware and responsive to occupational health and safety.

To that end, the implementation of CSR in the field of labor has cooperated with IZI "Indonesian Zakat Initiative" in providing business assistance to people with disabilities in the city of Surabaya, while in the area of health the Bank Jatim Head Office cooperates with the Surabaya city health office for sanitation manufacturing (latrine) in the Ngagel Rejo area of Surabaya, Bank Jatim has not done work safety in its CSR program.

ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF MANPOWER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT IN 2019

FAIR AND EQUAL WORK OPPORTUNITIES

Good manpower practices are one of the main priorities of the Bank. Departing from the awareness that the presence in the midst of the community helped create jobs and can create opportunities for millions of people. Job opportunities are open to anyone who wants to join. Bank Jatim has a policy that ensures that every employee and prospective employee is treated fairly and respectfully regardless of differences in age, race, religion, beliefs, gender, and physical condition. Bank Jatim opposes all forms of discrimination and upholds humanitarian principles and respects human rights in the management of Human Resources. Until now, Bank Jatim has not found or received complaints related to acts of discrimination.

Bank Jatim opposes all forms of forced labor and child exploitation. Bank Jatim does not tolerate forced labor and employ children under the age of compliance with applicable national labor regulations. The recruitment policy, work practices and procedures, ensures that all employees understand their rights and obligations and are above 18 years old.

PENGHARGAAN TERHADAP PEGAWAI

Dalam rangka meningkatkan produktivitas pegawai, Bank Jatim memberikan penghargaan kepada pegawai sebagai wujud perhatian dari kepada pegawai tetap yang telah berprestasi dan mempunyai masa kerja tertentu. Bank Jatim terus berupaya untuk menjaga kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan hubungan dan menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) pegawai terhadap perusahaan.

Bentuk penghargaan yang diberikan Bank Jatim terhadap pegawai disesuaikan dengan masa kerja pegawai antara lain:

- Untuk pegawai yang telah mengabdikan selama 15 tahun;
- Untuk pegawai yang telah mengabdikan selama 25 tahun;
- Untuk pegawai yang telah mengabdikan selama 30 tahun.

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM

Bank Jatim telah menyusun skema pendidikan dan pelatihan SDM untuk mengembangkan SDM dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing profil kompetensi. Skema pendidikan dan pelatihan SDM Bank Jatim dijelaskan sebagai berikut:

APPRECIATION FOR EMPLOYEES

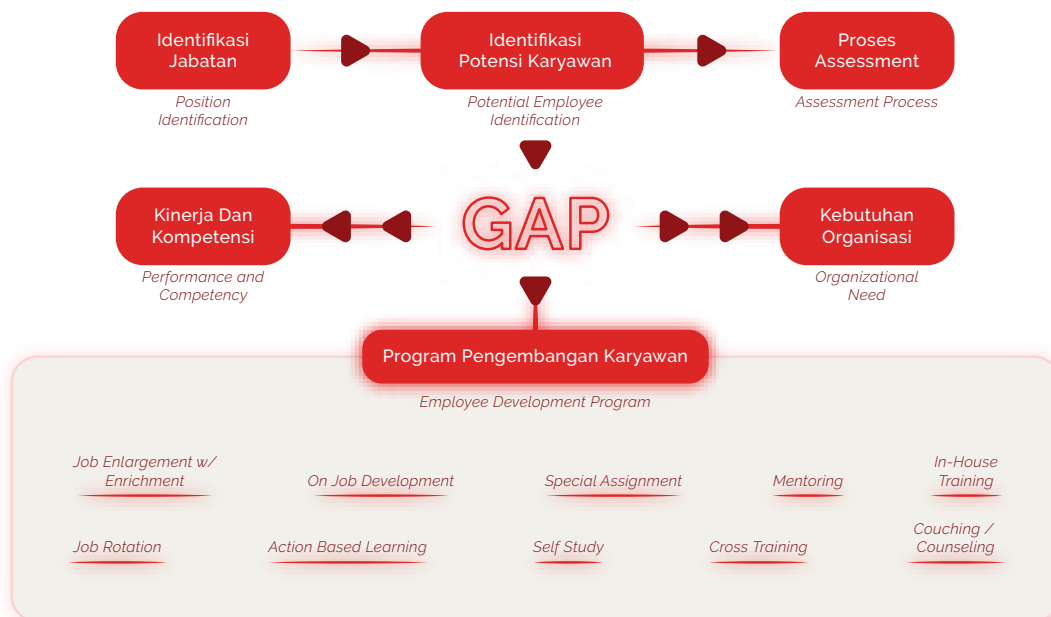
In order to increase employee productivity, Bank Jatim rewards employees as a form of attention to permanent employees who have performed and have a certain working period. Bank Jatim continues to strive to maintain the quality of human resources by increasing relationships and fostering a sense of belonging within the Bank's employees.

The form of appreciation given by Bank Jatim to employees is adjusted to the length of service of employees, including:

- Employees who have served for 15 years;
- Employees who have served for 25 years;
- Employees who have served for 30 years.

EDUCATION AND TRAINING PROGRAMS

Bank Jatim has compiled an HC education and training scheme to develop HC with the competencies needed by each competency profile. The Bank Jatim HC education and training scheme is explained as follows:



Dengan mengikuti perkembangan dan pertumbuhan, yang ditandai dengan makin besarnya diversifikasi tenaga kerja, bentuk organisasi dan persaingan global yang terus meningkat, upaya pelatihan dan pengembangan memungkinkan pegawai untuk memperluas kewajiban serta tanggungjawabnya yang lebih besar. Meskipun kegiatan pelatihan dapat membantu pegawai untuk mengerjakan tugasnya yang ada sekarang, manfaat kegiatan pelatihan dapat terus diperluas melalui pembinaan karier pegawai dan membantu pegawai tersebut untuk mengemban tanggung jawabnya di masa mendatang. Sebagai

By keeping abreast of development and growth, which is marked by the increasingly large workforce diversification, organizational forms and increasing global competition, training and development efforts enable employees to expand their obligations and greater responsibilities. Although training activities can help employees to carry out their current tasks, the benefits of training activities can continue to be expanded through coaching employee careers and assisting employees to carry out their responsibilities in the future. As part of efforts to develop employee competencies, throughout 2019 the Bank has sent

bagian dari upaya untuk mengembangkan kompetensi pegawai, sepanjang tahun 2019 Bank telah mengirimkan pegawai untuk berpartisipasi dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga dan instansi.

PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bank Jatim senantiasa memberikan dukungan penuh kebebasan pegawai untuk berkumpul, berserikat dan berpendapat melalui Serikat Pekerja, BJTM Club. Serikat ini menjadi wadah komunikasi dan aspirasi. Bank Jatim membina hubungan industrial sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, secara rutin mengadakan berbagai pertemuan *sharing session* bersama Serikat Pegawai yang bertujuan untuk menampung aspirasi, usulan, saran serta kritik.

REMUNERASI DAN TUNJANGAN PEGAWAI

Bank mendasarkan kebijakan remunerasi pada kompetensi, pengalaman, dan kinerja pegawai. Semakin baik kinerja, kompetensi, prestasi, serta tanggung jawab yang diemban oleh pegawai, maka semakin tinggi pula kompensasi serta tunjangan yang akan diterima. Bank Jatim tidak mendasarkan besaran remunerasi dan tunjangan pada perbedaan gender. Bank Jatim ingin memastikan remunerasi dan tunjangan yang diberikan sesuai dengan perusahaan sejenis dan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Pada tahun 2019, total realisasi pengeluaran dana untuk remunerasi dan tunjangan pegawai adalah sebesar Rp1.097,19 miliar. Jumlah ini menurun sebesar 2,55% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.125,92 miliar dikarenakan adanya kekosongan pengurus Bank pada Triwulan I tahun 2019 dan baru terisi pada Triwulan IV tahun 2019. Dana ini mencakup pembayaran gaji pegawai, bonus, cuti, uang makan, Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, pengobatan, akomodasi, perumahan, tunjangan kerja bergilir, Jaminan Hari Tua, pensiun, dan jenis tunjangan pegawai lainnya.

KEGIATAN PEMBERIAN FASILITAS KESEHATAN BAGI PEGAWAI

Bank sangat memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan pegawainya. Fasilitas kesehatan yang diberikan kepada pegawai dan anggota keluarganya cukup komprehensif yang antara lain mencakup BPJS. Kebijakan kesehatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk memastikan agar kesehatan pegawai tetap prima sehingga membawa dampak positif bagi pegawai selaku individu dan keluarganya, yang pada akhirnya diharapkan akan berdampak pada perbaikan produktivitas Bank.

KEGIATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Sampai dengan akhir tahun 2019, tidak terjadi insiden yang membahayakan kesehatan dan keselamatan pegawai. Bank Jatim terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan pegawai. Berbagai program kesehatan pegawai termasuk olah raga rutin setiap hari jumat pagi yang dilaksanakan di seluruh cabang dan berbagai kampanye serta penyuluhan terkait penyakit kronis dan tips hidup sehat, optimalisasi waktu istirahat dan antisipasi kelelahan (*fatigue*) dan stres. Selain itu, untuk menjamin keselamatan setiap pegawai, Bank Jatim mengadakan simulasi waspada kebakaran dan evakuasi di setiap cabang terutama cabang yang menempati *high-rise building*. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pegawai juga diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang mencakup penggunaan alat-

employees to participate in various education and training programs organized by a number of institutions and agencies.

INDUSTRIAL RELATIONSHIP DEVELOPMENT

Bank Jatim always provides full support for employees' freedom to gather, associate and hold opinions through the Employee Union, the BJTM Club. This union is a forum for communication and aspirations. Bank Jatim fosters industrial relations in accordance with applicable labor regulations, routinely holds various sharing session meetings with Employee Unions aimed at accommodating aspirations, proposals, suggestions and criticisms.

EMPLOYEE REMUNERATION AND ALLOWANCE

The Bank bases its remuneration policy on employee competency, experience and performance. The better the performance, competencies, achievements, and responsibilities assumed by employees, the higher the compensation and benefits that will be received. Bank Jatim does not base the amount of remuneration and benefits on gender differences. Bank Jatim wants to ensure the remuneration and benefits provided are in accordance with similar companies and the Provincial Minimum Wage (UMP) in force.

In 2019, the total realized expenditure of funds for remuneration and employee benefits amounted to Rp1.097.19 billion. This number decreased by 2.55% compared to 2018 amounting to Rp1.125.92 billion due to the vacancies of the Bank's management in the first quarter of 2019 and was only filled in the fourth quarter of 2019. These funds include payment of employee salaries, bonuses, leave, meals, Religious holiday allowances, medication, accommodation, housing, rotating work benefits, old age savings, pensions, and other types of employee benefits.

PROVISION OF HEALTH FACILITIES FOR EMPLOYEES

The Bank is highly concerned about the welfare and health of its employees. Health facilities provided to employees and their family members are quite comprehensive which include BPJS. The health policy is intended as an effort to ensure that employee health remains excellent so that it has a positive impact on employees as individuals and their families, which in turn is expected to have an impact on improving the productivity of the Bank.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACTIVITIES

Until the end of 2019, there were no incidents that endangered the health and safety of employees. Bank Jatim continues to strive to maintain and improve employee health. Various employee health programs including routine exercise every Friday morning which is carried out in all branches and various campaigns and counseling related to chronic diseases and tips on healthy living, optimizing time for rest and anticipating fatigue and stress. In addition, to ensure the safety of every employee, Bank Jatim conducts a fire alert and evacuation simulation at each branch, especially branches that occupy high-rise buildings. Employee Safety and Health is also regulated in a Collective Labor Agreement which covers the use of work protection

alat perlindungan kerja, fasilitas bagi pekerja di wilayah operasi tertentu (*Remote Area*) dan jaminan perlindungan kecelakaan diri.

equipment, facilities for workers in certain operational areas (*Remote Areas*) and personal accident protection guarantees.

DAMPAK KEGIATAN KETENAGAKERJAAN

Dampak dari pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan sepanjang tahun 2019 dapat dilihat dari tingkat *turnover* serta tingkat *employee engagement* pegawai sebagai berikut:

RASIO *TURNOVER* PEGAWAI

Dalam rangka menjaga stabilitas kondisi kerja, Bank Jatim menyadari rasio *turnover* pegawai harus diminimalisir. Bank Jatim telah menetapkan angka rasio *turnover* pegawai di tahun 2019 harus dibawah 4%. Perhitungan *turnover* pegawai Bank Jatim apabila memperhitungkan pegawai yang mengundurkan diri, diberhentikan dan telah mencapai masa pensiun adalah 3% dari total pegawai atau 4.238 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Turnover Pegawai

	2017	2018	2019	
PENERIMAAN PEKERJA BARU	0	55	1	NEW EMPLOYEE RECRUITMENT
PEKERJA BERHENTI	84	98	127	EMPLOYEE QUITTING
JUMLAH PEKERJA DI AKHIR TAHUN	4.410	4.302	4.238	TOTAL EMPLOYEES AT THE END OF THE YEAR
RASIO PERPUTARAN PEKERJA	1,90%	2,28%	3,00%	EMPLOYEE TURNOVER RATIO

Pegawai yang diberhentikan pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

IMPACT OF MANPOWER ACTIVITIES

The impact of the implementation of employment activities that have been carried out by the Bank throughout 2019 can be seen from the level of turnover and the level of employee engagement as follows:

EMPLOYEE TURNOVER RATIO

In order to maintain the stability of working conditions, Bank Jatim realizes that employee turnover ratios must be minimized. Bank Jatim has set the employee turnover ratio in 2019 to be below 4%. Bank Jatim employee turnover calculation when calculating employees who resigned, was dismissed and has reached retirement is 3% of total employees or 4,238 people with the following details:

Employee Turnover Table

Employees dismissed in 2019 are detailed in the following table:

	2017	2018	2019	
MENGUNDURKAN DIRI	40	56	60	RESIGN
MENINGGAL	7	10	11	PASS AWAY
DIBERHENTIKAN	15	32	22	DISMISSED
PENSIUN	22	0	34	PENSION

SURVEI KETERIKATAN PEGAWAI 2019

Employee Engagement merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat loyalitas pegawai terhadap perusahaan sehingga mengurangi keinginan untuk meninggalkan perusahaan secara sukarela. *Employee engagement* sendiri merupakan keadaan psikologis di mana pegawai merasa berkepentingan dalam keberhasilan perusahaan dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja ke tingkat yang melebihi *job requirement* yang diminta serta secara emosional berkomitmen terhadap pekerjaannya, dan memiliki kemampuan sumber daya untuk melakukan pekerjaannya. *Employee engagement* juga dianggap sebagai sesuatu yang dapat memberikan perubahan pada individu, *team work*, dan perusahaan.

Bank Jatim melaksanakan *employee engagement* dalam rangka memberikan pelayanan produk dan jasa lebih baik lagi, serta meningkatkan kualitas yang ada pada sumber daya manusia tentunya menjadi tolak ukur pada setiap perusahaan tidak terkecuali bagi Bank Jatim agar nantinya dapat memberikan keuntungan

EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY 2019

Employee Engagement is one of the ways to determine the level of employee loyalty to the Bank; thereby reducing the desire to leave the Bank voluntarily. Employee engagement itself is a psychological condition where employees feel an interest in the company's success and are motivated to improve performance to levels that exceed the required job requirements and are emotionally committed to their work, and have the ability of resources to do their jobs. Employee engagement is also considered as something that can give change to individuals, team work, and companies.

Bank Jatim carries out employee engagement in order to provide better products and services, and to improve the quality of existing human resources, of course, as a benchmark for every company, no exception for Bank Jatim in order to later be able to provide great benefits to the company. The quality of human resources can

besar pada perusahaan tersebut. Kualitas Sumber Daya Manusia sendiri dapat dilihat dari seberapa besar kontribusinya dalam menjalankan perusahaan tersebut. Kontribusi akan maksimal jika setiap pegawai memiliki *engagement* (keterikatan) yang tinggi pada perusahaan. Dalam hal ini, jika semua pegawai yang bekerja di suatu perusahaan tidak memiliki *engagement* yang tinggi, maka tujuan dari perusahaan tidak akan tercapai. Hal tersebut terjadi karena hanya dengan *employee engagement* yang tinggi perusahaan akan mampu meningkatkan kinerja pegawai sehingga *productivity* perusahaan pun ikut meningkat. Guna melakukan pengukuran terhadap hal tersebut maka perlu diterapkan survey *employee engagement* kepada pegawai tetap Bank Jatim.

Keuntungan penerapan *Employee Engagement* adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan produktivitas;
- Meningkatkan keuntungan perusahaan;
- Kualitas kerja yang tinggi;
- Meningkatkan efisiensi kerja;
- *Turnover* yang rendah;
- Mengurangi ketidakhadiran;
- Meminimalkan kecurangan dan kesalahan pegawai;
- Meningkatnya kepuasan pegawai;
- Mengurangi waktu yang hilang akibat kecelakaan kerja.

Pengukuran tingkat keterikatan pegawai tersebut menggunakan *Employee Engagement Matrix* digunakan untuk melihat persentase tingkat keterikatan yang dinilai berdasarkan dua sumbu yaitu *Commitment* (komitmen) dan *Satisfaction* (kepuasan) yang didalamnya terdapat empat level *engagement*. Hasil yang terdapat pada matrix tersebut dapat mencerminkan keterikatan setiap individu maupun unit kerja serta perusahaan secara keseluruhan.

Keterikatan pegawai atau *Employee Engagement* dibagi menjadi 4 (empat) level yaitu:

1. *Actively Engaged* (Komitmen dan Keterikatan Tinggi)

Pegawai dalam level ini memiliki kepentingan pribadi yang selaras dengan organisasi. Mereka berkontribusi penuh untuk keberhasilan organisasi dan menemukan kepuasan besar dalam pekerjaan.

2. *Potentially Engaged* (Komitmen Tinggi Tetapi Keterikatan Rendah)

Pegawai dalam level ini termasuk golongan kontributor penting di organisasi, namun mereka tidak dapat menemukan keterikatan dan kesuksesan pribadi dari dalam organisasi. Mereka akan cenderung menurunkan performa apabila tetap tidak mendapatkan kepuasan dari organisasi.

3. *Passively Engaged* (Keterikatan Tinggi Tetapi Komitmen Rendah)

Pegawai pada level ini merupakan orang-orang yang merasa nyaman akan kondisi perusahaan. Mereka bisa merupakan orang baru atau mendapatkan peran baru. Mereka belum berkontribusi secara penuh terhadap kesuksesan perusahaan atau bahkan bersembunyi dibalik kerja keras orang lain.

be seen from how much its contribution in running the company. Contributions will be maximized if every employee has a high engagement in the company. In this case, if all employees who work in a company do not have high engagement, then the goals of the company will not be achieved. This happens because only with a high employee engagement the company will be able to improve employee performance so that company productivity also increases. In order to measure this, employee engagement surveys need to be applied to permanent employees of Bank Jatim.

The benefits of implementing Employee Engagement are as follows:

- Increase productivity;
- Increase company profits;
- High quality work;
- Improve work efficiency;
- Low turnover;
- Reducing absence;
- Minimizing employee fraud and errors;
- Increased employee satisfaction;
- Reducing time lost due to work accidents.

Measurement of the level of employee engagement using the Employee Engagement Matrix is used to see the percentage of engagement levels assessed based on two axes, namely Commitment and Satisfaction, in which there are four engagement levels. The results contained in the matrix can reflect the engagement of each individual or work unit and the company as a whole.

Employee Engagement is divided into 4 (four) levels, namely:

1. *Actively Engaged* (High Commitment and Engagement)

Employees at this level have personal interests in harmony with the organization. They contribute fully to the success of the organization and find great satisfaction at work.

2. *Potentially Engaged* (High Commitment but Low Engagement)

Employees at this level are among the important contributors in the organization, but they cannot find personal attachment and success within the organization. They will tend to reduce performance if they still do not get satisfaction from the organization.

3. *Passively Engaged* (High Engagement but Low Commitment)

Employees at this level are people who feel comfortable with the company's conditions. They can be new people or get new roles. They have not contributed fully to the company's success or even hidden behind the hard work of others.

4. Dissengaged (Komitmen dan Keterikatan Rendah)

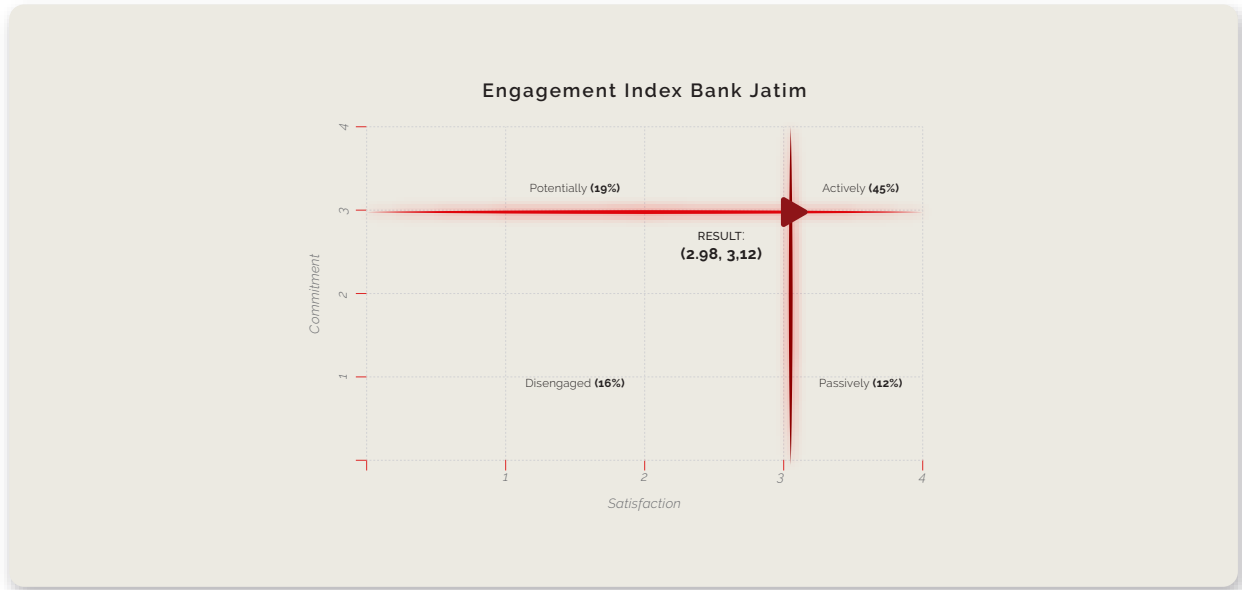
Pegawai dalam level ini merupakan sekelompok orang yang paling terputus dari organisasi, seringkali mereka merasa kurang dimanfaatkan, dan tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari pekerjaan. Mereka dapat menularkan pemikiran-pemikiran negatif kepada pegawai lainnya.

Dari pelaksanaan *Employee Engagement* periode tahun 2019 diperoleh hasil sebagai berikut:

4. Disengaged (Low Commitment and Engagement)

Employees at this level are a group of people who are most disconnected from the organization, often they feel underutilized, and do not get what they need from work. They can transmit negative thoughts to other employees.

From the implementation of *Employee Engagement* in 2019, the following results were obtained:



Dari Grafik diatas dapat diketahui hasil *employee engagement* tahun 2019 secara keseluruhan yaitu (2.98,3.12) dengan arti bahwa Tingkat Kepuasan Pegawai sebesar 2.98 dan Tingkat Komitmen Pegawai sebesar 3.12. Adapun Tingkat Keterikatan Pegawai dibagi dalam 4 (empat) kelompok sebagai berikut :

- *Actively Engaged* (Komitmen & Keterikatan Tinggi) sebesar 45%
- *Potentially Engaged* (Komitmen Tinggi Tetapi Keterikatan Rendah) sebesar 19%
- *Passively Engaged* (Keterikatan Tinggi Tetapi Komitmen Rendah) sebesar 12%
- *Dissengaged* (Komitmen & Keterikatan Rendah) sebesar 16%
- Bank akan terus melakukan peningkatan sehingga tercipta komitmen dan keterikatan tinggi dari seluruh pegawai.

From the graph above, it can be seen the results of employee engagement in 2019 in general was (2.98,3.12), meaning that the Employee Satisfaction Level was 2.98 and the Employee Commitment Level was 3.12. The Level of Employee Engagement is divided into 4 (four) groups as follows:

- *Actively Engaged* (High Commitment & Engagement) by 45%
- *Potentially Engaged* (High Commitment But Low Engagement) by 19%
- *Passively Engaged* (High Engagement but Low Commitment) by 12%
- *Disengaged* (Low Commitment & Engagement) of 16%
- The Bank will continue to make improvements so as to create high commitment and engagement from all employees.

DAMPAK KUANTITATIF PEMBERIAN FASILITAS KESEHATAN BAGI PEGAWAI

Segala bentuk fasilitas kesehatan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada pegawainya telah berdampak pada tingkat produktivitas pegawai atau *Earning per Employee* (EPE). Tingkat produktivitas yang mampu diraih pada tahun 2019 adalah sebesar ± Rp325 juta/pegawai naik dari sebelumnya di tahun 2018 sebesar ± Rp293 juta/pegawai.

QUANTITATIVE IMPACT OF THE PROVISION OF HEALTH FACILITIES FOR EMPLOYEES

All forms of health facilities provided by the Bank to its employees have an impact on the level of employee productivity or *Earning per Employee* (EPE). The level of productivity that can be achieved in 2019 was ± Rp325 million/employee, up from the previous year which was ± Rp293 million/employee.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KONSUMEN/NASABAH

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO CUSTOMERS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Komitmen dan kebijakan Bank Jatim dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bidang konsumen atau nasabah mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah dan mempertimbangkan aspek manajemen risiko, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib melakukan pelatihan. Untuk itu dalam rangka peningkatan kualitas *human capital* yang berkaitan dengan penanganan pengaduan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah serta untuk mengelola eksposur risiko reputasi yang di timbulkan atas penanganan pengaduan nasabah, Bank memberikan pelatihan secara berkelanjutan.

ISU-ISU DAN RISIKO TERKAIT KONSUMEN ATAS KEGIATAN BANK YANG RELEVAN

Isu-isu dan risiko terkait konsumen atas kegiatan operasional Bank diantaranya kegiatan pengaduan nasabah, kerahasiaan data nasabah, serta akses informasi produk dan jasa.

OPTIMALISASI JANGKAUAN LINGKUP PENGARUH BANK PADA BIDANG KONSUMEN

Dalam rangka mengoptimalkan jangkauan lingkup pengaruh Bank di bidang konsumen, Bank menyelenggarakan Bank Jatim Peduli UMKM Awards 2019.

MEKANISME PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PENGADUAN KELUHAN 2019

Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan nasabah, Bank memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan saran atau keluhan melalui:

COMMITMENT AND POLICY

Bank Jatim's commitment and policy in implementing corporate social responsibility in the consumer or customer sector refers to the Circular Letter of Financial Services Authority No. 2/SEOJK.07/ 2014 dated February 14, 2014 concerning Services and Settlement of Consumer Complaints in Financial Services Business Actors. The regulation explained that in the framework of carrying out service functions and resolving customer complaints and considering aspects of risk management, Financial Services Business Actors (PUJK) are required to conduct training. For this reason, in the context of improving the quality of human capital related to handling customer complaints and resolving customer complaints and to managing reputation risk exposure that is caused by handling customer complaints, the Bank provides ongoing training.

ISSUES AND RISKS RELATED TO CUSTOMERS AND RELEVANT BANK'S ACTIVITIES

Issues and risks related to consumers of the Bank's operational activities include customer complaints, confidentiality of customer data, and access to information on products and services.

OPTIMIZATION OF SCOPE OF BANK'S IMPACT ON ITS CUSTOMERS

To optimize the scope of the Bank's impact on the customers, the Bank conducted Bank Jatim Peduli MSME Awards 2019.

MECHANISM OF STAKEHOLDER'S ENGAGEMENTS AND COMPLAINT SUBMISSION IN 2019

As a form of corporate responsibility relating to customers, the Bank makes it easy for the public to submit suggestions or complaints through:

Sub Divisi *Service Quality* terutama dalam pengadministrasian, penyampaian Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan secara triwulanan kepada Bank Indonesia; dan Otoritas Jasa Keuangan

Pemimpin Bidang Operasional Kantor Cabang, terutama dalam hal penyelesaian pengaduan yang meliputi pengaduan yang menyangkut tentang operasional Kantor Cabang dalam menjalankan kebijakan/ ketentuan seluruh aktivitas fungsional Bank Jatim yang ditetapkan manajemen.

RENCANA PROGRAM CSR BIDANG KONSUMEN 2019

Perseroan menargetkan untuk selalu berupaya memenuhi harapan konsumen, salah satunya melalui penanganan keluhan ataupun pengaduan yang ditargetkan dapat terselesaikan sesuai dengan standar level *agreement*. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008 bahwa pengaduan tertulis diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya. Terkait dengan kepuasan pelanggan, Perseroan selalu berupaya untuk memastikan terjaminnya keamanan atas setiap produk dan fitur yang ditawarkan/ diluncurkan kepada konsumen.

KEGIATAN DAN CAPAIAN KEGIATAN PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB PADA KONSUMEN

BANK JATIM PEDULI UMKM AWARDS 2019

Bank Jatim Peduli UMKM Awards 2019 merupakan sebuah seremonial tahunan yang diadakan oleh Bank Jatim sejak Tahun 2016, sebagai bentuk apresiasi terhadap para pelaku UMKM yang telah menyediakan lapangan pekerjaan baru serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bank Jatim Peduli UMKM Awards adalah salah satu program Bank Jatim Peduli dengan hadiah berupa uang pembinaan khusus untuk debitur Bank Jatim.

Bank Jatim Peduli UMKM Awards 2019 merupakan penyelenggaraan keempat dan diikuti oleh debitur UMKM Bank Jatim dari beberapa Kantor Cabang Bank Jatim di Jawa Timur. peserta tersebut dipilih oleh Kantor Cabang dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Memberikan dampak positif dari segi Sosial dan Lingkungan
- Mendapatkan kenaikan omset (pasca menjadi debitur)
- Membuka lapangan kerja bagi warga sekitar
- Memiliki inovasi/keunikan produk
- Mempekerjakan kaum disabilitas (*Point Plus*)
- Banyaknya *event*/penghargaan yang pernah diikuti
- Proses pengolahan limbah (*Point Plus*)

Service Quality Sub-Division especially in administering, submitting quarterly Complaint Handling and Settlement Reports to Bank Indonesia; and the Financial Services Authority.

The Head of Operations of Branch Office, especially in the case of resolution of complaints which includes complaints concerning the operations of Branch Offices in carrying out policies/provisions of all functional activities of Bank Jatim determined by the management.

PLANS FOR CSR PROGRAMS RELATED TO CUSTOMERS IN 2019

The company targets to always strive to meet consumer expectations, one of which is through handling complaints or targeted complaints that can be resolved in accordance with the standard level agreement. In accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 10/10/PBI/2008 dated February 28, 2008 that written complaints are resolved within the next 20 (twenty) working days. Regarding customer satisfaction, the Company always strives to ensure the security of every product and feature offered/launched to consumers.

ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF CUSTOMERS RESPONSIBILITY MANAGEMENT

BANK JATIM PEDULI UMKM AWARDS 2019

Bank Jatim Peduli UMKM Awards 2019 is an annual ceremonial held by Bank Jatim since 2016, as a form of appreciation for the SMEs who have provided new jobs and helped improve the welfare of the community and the surrounding environment. Bank Jatim Cares UMKM Awards is one of the programs of Bank Jatim Cares with prizes in the form of special coaching money for debtors of Bank Jatim.

Bank Jatim Cares UMKM Awards 2019 is the fourth event and is participated by debtors of Bank Jatim UMKM from several Branch Offices of Bank Jatim in East Java. Such participants are selected by the Branch Office with the following considerations:

- Give a positive impact in terms of Social and Environment
- Get a turnover increase (after becoming a debtor)
- Opening jobs for local community
- Having innovation/product uniqueness
- Hiring people with disabilities (*Plus Point*)
- The number of events/awards that have been attended
- Waste treatment process (*Plus Point*)

Data UMKM awards tahun 2019 yang masuk nominasi:

Data of UMKM awards nomination in 2019

NO.	CABANG / BRANCH	JENIS USAHA / TYPE OF BUSINESS
1.	Gresik	Otak-otak Bandeng
2.	Batu	Re-packing makanan / Food re-packaging
3.	Blitar	Sambal pecel
4.	Tulungagung	Kerupuk rambak
5.	Lumajang	Industri dupa / Incense industry
6.	Madiun	Kerajinan ukir / Carving
7.	Perak	Sarung tenun
8.	Nganjuk	Kerupuk bakar
9.	Kediri	Gula merah
10.	Pare	Kerajinan batok kelapa / Coconut shell crafts

KEAMANAN PRODUK

Secara presentase, 100% produk dan fitur yang diluncurkan oleh Bank Jatim sudah dievaluasi keamanannya setelah melewati *post implementation review* (PIR) yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Teknologi. Jika hasil PIR sudah memenuhi sisi operasional, teknologi dan risiko, maka deskripsi produk disampaikan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan sebelum diluncurkan ke masyarakat umum.

PRODUCT SECURITY

All products and features launched by Bank Jatim have been evaluated 100% for their safety after passing the post implementation review (PIR) conducted by the Compliance Division, Risk Management Division, and Technology Division. If the results of the PIR have met the operational, technological and risk sides, then the product description is submitted to Bank Indonesia and the Financial Services Authority for approval before being released to the general public.

PROSEDUR PELAPORAN DAN PENYELESAIAN KELUHAN NASABAH

Bank Jatim *Contact Center* sebagai salah satu garda terdepan Bank Jatim dalam layanan bagi para nasabah Bank Jatim, senantiasa terus berupaya memberikan layanan terbaik termasuk penyelesaian atas setiap pengaduan nasabah baik untuk layanan perbankan. Nasabah Bank Jatim diberikan kemudahan mengakses layanan pengaduan dengan berbagai pilihan media baik melalui lisan maupun tertulis.

CUSTOMER COMPLAINT REPORTING AND SETTLEMENT PROCEDURES

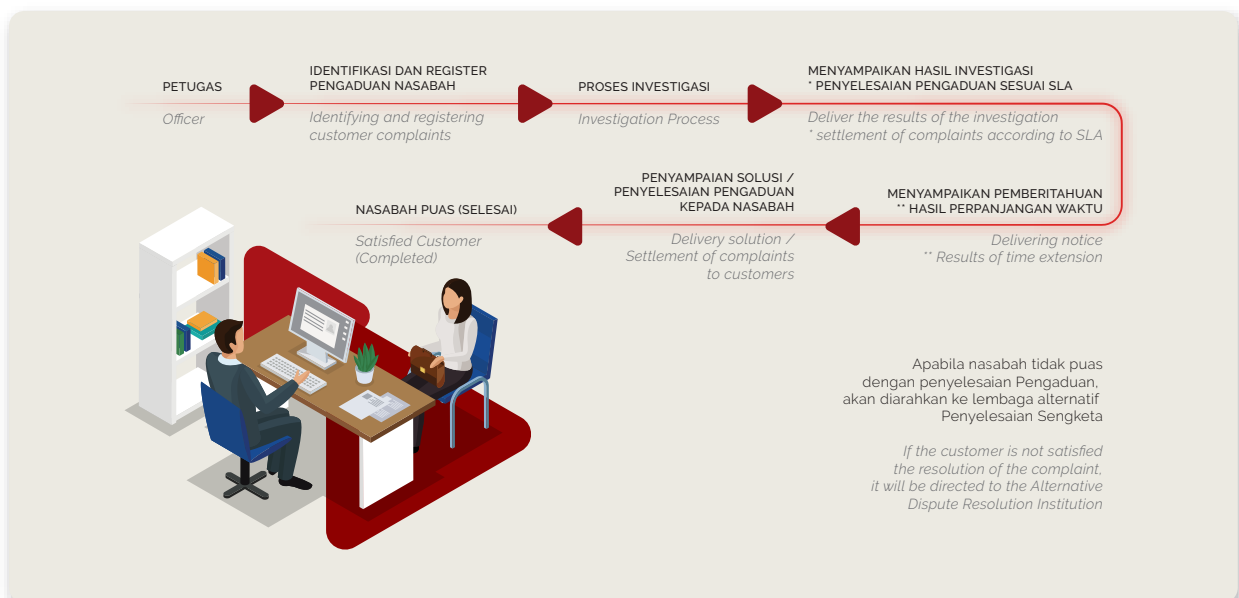
Bank Jatim Contact Center as one of the forefront of Bank Jatim in services for customers of Bank Jatim, continues to strive to provide the best service including the settlement of any customer complaints both for banking services. Bank Jatim customers are provided with easy access to complaints services with a variety of media choices both verbally and in writing.

PENGADUAN NASABAH

Media Penyampaian Pengaduan Nasabah

CUSTOMER COMPLAINTS

Media for Submitting Customer Complaints



Alur Penyampaian dan Penyelesaian Pengaduan

Keterangan:

- 1). Bank Jatim melakukan penyelesaian pengaduan dalam waktu maksimal 20 hari kerja ("
- 2). Pengaduan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja, nasabah akan memperoleh informasi bahwa pengaduan akan diselesaikan dalam waktu maksimal 20 hari kerja berikutnya."

Apabila nasabah merasa solusi penyelesaian yang diberikan oleh Bank Jatim tidak memenuhi harapannya, maka nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduan melalui layanan mediasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan ataupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Laporan Pengaduan Nasabah

MEDIA PENYAMPAIAN	2017	2018	2019	SUBMISSION MEDIA
MEDIA CETAK	3	1	3	PRINT MEDIA
MEDIA SOSIAL DAN SOSIAL ELEKTRONIK	26	19	22	SOCIAL AND SOCIAL ELECTRONIC MEDIA
SURAT TERTULIS	6	25	80	WRITTEN LETTER
TOTAL PENGADUAN	35	45	105	TOTAL COMPLAINTS
MASIH DITINDAK LANJUTI	-		0	IN PROGRESS
TELAH SELESAI	35	45	105	SETTLED

Flow of Submission and Settlement of Complaints

Information:

- 1). Bank Jatim completes complaints within a maximum of 20 working days ("
- 2). Complaints cannot be resolved within 20 working days, customers will receive information that complaints will be resolved within a maximum of the next 20 working days ("

If the customer feels the resolution provided by Bank Jatim does not meet their expectations, then, the customer can continue the complaint resolution process through Bank Indonesia mediation services, the Financial Services Authority or the Alternative Dispute Resolution Agency.

Customer Complaint Report

DAMPAK KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT NASABAH

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Bank kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kepentingan nasabah salah satunya telah dijabarkan dalam ketentuan internal perseroan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan dan atau menyampaikan informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, dimana produk dan atau layanan tersebut harus dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Informasi produk dan atau layanan wajib disampaikan oleh petugas Bank pada saat memberikan penjelasan kepada Nasabah mengenai hak dan kewajibannya, disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Nasabah serta dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan dimedia cetak atau elektronik, sehingga produk dan atau layanan tersebut benar-benar transparan dan dimengerti oleh Nasabah.

Di tahun 2019, Bank Jatim menjalankan kegiatan operasional perbankan dengan baik dan patuh terhadap semua peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tidak terdapat denda atas ketidakpatuhan Bank Jatim terhadap undang-undang atau peraturan terkait penyediaan produk dan layanan jasa. Komitmen ini juga diwujudkan dengan meningkatkan kepercayaan nasabah dengan tetap menjaga kerahasiaan data nasabah. Data nasabah hanya dapat diakses oleh pihak berwenang dan disimpan dalam database berbasis teknologi tinggi. Untuk keamanan bertransaksi dengan menggunakan kartu, Bank Jatim telah mendapatkan sertifikasi dan sesuai dengan standar NSICCS (*National Standard Indonesian Chip Card Specification*). Terkait dengan jaminan atas perlindungan nasabah, Bank Jatim mengacu kepada POJK No.1/POJK.03/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan POJK No.1/POJK.7/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Adapun prinsip perlindungan konsumen di Bank Jatim tertuang dalam

IMPACT OF SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES RELATED TO CUSTOMERS

As one form of Bank's responsibility to customers in the context of fulfilling customer interests, one of which has been set out in the company's internal provisions in the form of obligations to provide and or convey information about products and or services that are accurate, honest, clear, and not misleading, where the product and or the service must be stated in documents or other means that can be used as evidence. Product and/or service information must be submitted by the Bank officer when providing an explanation to the Customer regarding his rights and obligations, delivered at the time of making an agreement with the Customer and published when conveyed through various media, including through advertisements in print or electronic media, so that the products and or services it is truly transparent and understood by the Customer.

In 2019, Bank Jatim conducted banking operations properly and in compliance with all applicable regulations. Therefore, there is no penalty for non-compliance of the Bank against laws or regulations relating to the provision of products and services. This commitment is also realized by increasing customer confidence while maintaining customer data confidentiality. Customer data can only be accessed by the authorities and stored in a high technology based database. For the security of transactions using cards, Bank Jatim has obtained certification and is in accordance with NSICCS (National Standard Indonesian Chip Card Specification) standards. Related to guarantees for customer protection, Bank Jatim refers to POJK No. 1/POJK.03/2013 concerning consumer protection for the financial services sector and POJK No. 1/POJK.7/2013 dated July 13, 2013 concerning transparency of bank product information and data usage personal customer. The principle of consumer protection in Bank Jatim is contained in the

Keputusan Direksi Nomor 056/076/DIR/PBC/KEP tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Nasabah dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Decree of Board of Directors No. 056/076/DIR/PBC/KEP concerning Guidelines for Implementing Customer Protection and Settling Customer Complaints.

LAPORAN KELUHAN PENGADUAN NASABAH (FINANSIAL) 2019 / REPORT ON CUSTOMER COMPLAINTS (FINANCIAL) IN 2019													19
NO	BULAN MONTH	GAGAL TARIK TUNAI ATM CASH WITHDRAWAL FAILURE AT ATM	GAGAL TRANSFER MELALUI ATM TRANSFER FAILURE THROUGH ATM	EDC	GAGAL BELI PULSA FAILURE IN PURCHASING PHONE CREDIT	BAYAR TELPON, PLN DAN PDAM PAYMENT OF TELEPHONE, ELECTRICITY AND WATER BILLS	ATM TERTELAN ATM CARD LEFT IN THE MACHINE	INTERNET BANKING	CCTV	SMS BANKING	MOBILE BANKING	TOTAL PENGADUAN PERBULAN	
1	JANUARI JANUARY	376	142	5	47	15	10	0	1	1	79	676	
2	FEBRUARI FEBRUARY	192	76	3	57	12	9	1	1	1	28	380	
3	MARET MARCH	212	36	6	11	9	22	0	1	0	10	307	
4	APRIL APRIL	257	37	3	14	3	24	0	2	0	4	344	
5	MEI MAY	395	64	11	26	10	18	0	3	4	23	554	
6	JUNI JUNE	358	44	11	28	6	17	0	1	0	13	478	
7	JULI JULY	444	50	8	29	11	19	0	3	0	19	583	
8	AGUSTUS AUGUST	317	76	8	153	19	12	2	5	2	18	612	
9	SEPTEMBER SEPTEMBER	294	45	7	31	16	11	1	3	0	17	425	
10	OKTOBER OCTOBER	321	76	5	51	9	13	0	5	0	13	493	
11	NOVEMBER NOVEMBER	271	39	3	139	15	9	2	3	0	11	492	
12	DESEMBER DECEMBER	365	93	6	53	28	13	15	2	0	29	604	
TOTAL		3802	778	76	639	153	177	21	30	8	264	5948	
RATA-RATA PENGADUAN PERBULAN AVERAGE COMPLAINTS PER MONTH		317	65	6	53	13	15	2	3	1	22		



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PEMASOK

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO SUPPLIERS



KEBIJAKAN

Bank Jatim memiliki kebijakan internal terkait Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu SSK Direksi Nomor 057/335/DIR/UMM/KEP tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pedoman tersebut mengatur prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yakni: efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil dan akuntabel. Pedoman tersebut juga merupakan petunjuk bagi Bank dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang bersifat strategis maupun non-strategis untuk mendukung kegiatan operasional Bank sesuai kualitas, kuantitas dan waktu yang ditetapkan dengan harga terbaik serta menerapkan prinsip manajemen risiko.

POLICY

Bank Jatim has an internal policy related to the Procurement of Goods and Services, namely the Decree of Board of Directors No. 057/335/DIR/UMM/KEP dated October 30, 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Goods/Services Procurement. The guideline regulates the principles of procurement of goods/services namely: efficient, effective, open, competitive, transparent, fair and accountable. The guideline is also a guideline for the Bank in carrying out the procurement of strategic and non-strategic goods and services to support the Bank's operational activities in accordance with the quality, quantity and time set at the best price and to apply risk management principles.

TARGET KEGIATAN

Dalam setiap tahunnya, Perseroan menargetkan agar pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam pedoman pengadaan barang/jasa. Selain itu, perseroan juga selalu berupaya untuk

ACTIVITY TARGETS

Every year, the Bank targets that the procurement of goods and/or services within its organization is in accordance with the principles set out in the guidelines for the procurement of goods/services. In addition, the Bank always strives to regularly update the

memperbaharui pedoman secara berkala agar sesuai dengan kondisi saat ini. Meningkatkan profesionalisme kemandirian dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk mengacu pada SK Direksi No. 057/335/KEP/DIR/UM, tanggal 25 April 2019, perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Pengadaan Barang /Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, pada Bab III Point 3.5 tentang Pengadaan Secara Elektronik, mengenai Katalog Elektronik yang memuat informasi berupa daftar diantaranya produk dalam negeri.
2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dapat mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bab IX Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri dan Pengadaan Berkelanjutan, Bagian Kedua tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri

TRANSPARANSI PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip transparansi, perseroan senantiasa memberikan informasi terkait proses pengadaan secara terbuka kepada para calon peserta pengadaan. Informasi yang dimaksud antara lain seperti syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa. Adapun untuk proses pengadaan barang/jasa yang bernilai tinggi perseroan selalu memberikan akses informasi kepada calon penyedia barang/jasa melalui *website* dan surat kabar.

KETEPATAN PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA

Perseroan senantiasa menjalani kewajibannya kepada penyedia barang/jasa, salah satunya melalui ketepatan dalam pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama.

DAMPAK KEGIATAN

Komitmen Bank Jatim dalam menjalani proses pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pedoman pengadaan barang/jasa telah berdampak terhadap tingginya tingkat komitmen penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang/jasa.

guidelines to meet current conditions and increase the professionalism of independence and responsibility of the parties involved in the planning and procurement process of goods/services.

POLICY OF GOODS/SERVICES PROCUREMENT

1. Procurement of goods/services within PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk refers to Board of Directors Decree No. 057/335/KEP/DIR/UM, dated April 25, 2019, concerning the MAnual Book (BPP) of Good/Services Procurement of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, in Chapter III Point 3.5 on Electronic Procurement, concerning Electronic Catalogs containing information in the form of a list of which are domestic products.
2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk can refer to the Republic of Indonesia's Presidential Regulation No.16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services, in Chapter IX of Small Business, Domestic Products and Sustainable Procurement, Part Two concerning Use of Domestic Products

TRANSPARENCY OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT PROCESS

In the framework of carrying out the procurement of goods/services in accordance with the principle of transparency, the Bank always provides information related to the procurement process openly to prospective procurement participants. The information in question includes such as technical requirements for procurement administration, evaluation procedures, evaluation results, determination of prospective suppliers of goods/services. As for the process of procuring goods/services of high value, the Bank always provides access to information to prospective providers of goods/services through its website and newspaper.

TIMELY PAYMENT TO GOODS/SERVICES SUPPLIERS

The Company always fulfills its obligations to providers of goods/services, one of which is through the accuracy in payment in accordance with the agreement set forth in the Cooperation Agreement.

IMPACT OF ACTIVITIES

Bank Jatim's commitment to undergoing the process of procurement of goods/services in accordance with the principles in the guidelines for procurement of goods/services has an impact on the high level of commitment to the completion of work by the goods/service providers.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL
AND COMMUNITY DEVELOPMENT



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini, Bank Jatim ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Perseroan telah memiliki kebijakan mengenai kegiatan CSR aspek pengembangan sosial kemasyarakatan, diatur dalam BPP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bank Jatim.

COMMITMENT AND POLICY

In realizing this social and environmental responsibility, Bank Jatim participates in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial for the Bank itself, the local community, and society in general. The Company has a policy regarding CSR activities aspects of social development, regulated in BPP Social and Environmental Responsibility of Bank Jatim.

ISU-ISU SERTA RISIKO SOSIAL EKONOMI ATAS KEGIATAN BISNIS BANK YANG RELEVAN

Sebagai korporasi yang bergerak di bidang perbankan, Bank Jatim telah mengidentifikasi risiko yang dihadapi pada kegiatan tanggung sosial perusahaan terkait dengan pengembangan sosial kemasyarakatan meliputi risiko penyalahgunaan bantuan, risiko kesalahan dalam penyaluran bantuan dan risiko pada ketidakabsahan pada proposal bantuan. Oleh karena itu, Bank Jatim melakukan survei dalam menilai kelayakan proposal tersebut, antara lain untuk memantau obyek bantuan dan kelayakan jumlah bantuan yang akan diberikan, serta melakukan *monitoring* baik sebelum, pada saat penyerahan maupun setelah pemberian bantuan pada kegiatan CSR tersebut.

MEKANISME PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PENGADUAN KELUHAN

Bank Jatim terus memperbaiki kinerja serta melaksanakan kegiatan CSR dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Keterlibatan pemangku kepentingan terlihat dalam berbagai forum maupun acara yang diinisiasi oleh Bank.

Informasi terkait pelaksanaan kegiatan CSR diperoleh pada saat melakukan kunjungan ke cabang melalui diskusi dengan pihak terkait serta rencana kegiatan yang diinfokan dari cabang melalui rapat forum CSR di kabupaten/Kota.

Terkait pengaduan keluhan, Bank Jatim memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan saran terkait keluhan atas program CSR bidang kemasyarakatan yang dikoordinasikan oleh cabang kemudian dikaji melalui forum CSR di kabupaten/ kota masing-masing.

PROGRAM TANGGUNG JAWAB BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

Bank Jatim memiliki fokus tanggung jawab sosial kemasyarakatan dalam program Bank Jatim Peduli. Subyek pelaksanaan tanggung jawab sosial Bank adalah kepada komunitas setempat maupun masyarakat, yang ruang lingkupnya meliputi bidang-bidang :

- Pendidikan
- Budaya
- Kesehatan
- Sosial lainnya, terdiri dari:
 1. Keagamaan
 2. Santunan kepada:
 - Kaum lanjut usia (lansia),
 - Kaum cacat fisik, tuna rungu, tuna netra, tuna wicara, dll.
 - Kaum tuna wisma,
 - Yatim piatu
 3. Korban bencana alam dan bencana lainnya,
 4. Pelestarian alam dan lingkungan,

ISSUES AND RISKS OF SOCIAL ECONOMY RELATED TO THE RELEVANT BANK'S ACTIVITIES

As a corporation engaged in banking, Bank Jatim has identified risks faced in corporate social responsibility activities related to social development including the risk of misuse of assistance, the risk of errors in the distribution of aid and the risk of invalidity in aid proposals. Therefore, Bank Jatim conducted a survey in assessing the feasibility of the proposal, among others to monitor the object of assistance and the appropriateness of the amount of assistance to be provided, as well as to monitor before, during delivery, and after providing assistance in the CSR activities.

MECHANISM OF STAKEHOLDERS ENGAGEMENT AND COMPLAINT SUBMISSION

Bank Jatim continues to improve performance and carry out CSR activities by involving relevant stakeholders. Stakeholder engagement is seen in various forums and events initiated by the Bank.

Information related to the implementation of CSR activities is obtained during a visit to the branch through discussions with relevant parties as well as planned activities informed from the branch through CSR forum meetings in the district/city.

Regarding complaints, Bank Jatim provides access for the public to submit suggestions regarding complaints regarding CSR programs in the field of society coordinated by the branches and then reviewed through CSR forums in each district/city.

SOCIAL COMMUNITY RESPONSIBILITY PROGRAMS

Bank Jatim has a focus on social responsibility in the Bank Jatim Peduli program. The subject of the implementation of the Bank's social responsibility is to the local community and society, the scope of which covers the fields of:

- Education
- Culture
- Health
- Other social activities, consisting of:
 1. Religious
 2. Compensation to:
 - The elderly,
 - The physically handicapped, deaf, blind, speech impaired, and so on,
 - The homeless,
 - Orphan,
 3. Victims of natural disasters and other disasters,
 4. Conservation of nature and the environment,

5. Pengembangan prasarana dan atau sarana umum,
6. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Plesterisasi,
7. UMKM, Dan lain-lain.

Terdapat beberapa program unggulan tanggung jawab sosial dan lingkungan di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang *sustainable* (berkelanjutan). Program unggulan tersebut antara lain:

1. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
2. Ambulance
3. UMKM

RENCANA PROGRAM CSR BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN 2019

Target Perseroan dalam mengimplementasikan kegiatan CSR yang terkait dengan pengembangan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan Perseroan pada tahun 2019 meliputi bidang budaya, pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya.

5. Development of public infrastructure and or facilities,
6. Unsuitable Homes (RTLH), Plasterization,
7. MSMEs, and others.

There are several leading programs on social and environmental responsibility where the activity is a sustainable activity. The competitive programs include:

1. Rumah Tidak Layak Huni
2. Ambulance
3. MSME

PLANS FOR CSR PROGRAMS IN SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT IN 2019

Bank Jatim has the Bank Jatim Peduli program for social and community development with various forms of activity programs. Activities and achievements of social community development through Bank Jatim Peduli throughout 2019, including activities in education, culture, health, and social fields.

KEGIATAN DAN CAPAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN 2019

Bank Jatim memiliki program Bank Jatim Peduli untuk pengembangan sosial dan kemasyarakatan dengan berbagai bentuk program kegiatan. Kegiatan dan capaian kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan melalui Bank Jatim Peduli sepanjang tahun 2019, antara lain kegiatan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kesehatan, dan bidang sosial.

SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS IN 2019

Bank Jatim has the Bank Jatim Peduli program for social and community development with various forms of activity programs. Activities and achievements of social community development through Bank Jatim Peduli throughout 2019, included activities in education, culture, health, and social fields.

PENDIDIKAN

EDUCATION



Kegiatan dalam bidang pendidikan antara lain pembangunan infrastruktur pendidikan berupa sekolah, rumah pintar, perpustakaan, pemberian sarana pendidikan antara lain seragam sekolah, buku bacaan, peralatan sekolah, melaksanakan edukasi perbankan, pemberian beasiswa.

Activities in the field of education include the development of educational infrastructure in the form of schools, smart homes, libraries, providing educational facilities including school uniforms, reading books, school equipment, carrying out banking education, scholarships.

CABANG / BRANCH	KEGIATAN / ACTIVITY
UTAMA / MAIN BRANCH	Pemberian bantuan beasiswa untuk 65 mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya <i>Scholarships for 65 students of Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</i>
KRAKSAAN	Pemberian bantuan beasiswa untuk 100 siswa/i SD dan SMP Kabupaten Probolinggo <i>Scholarships for 100 students of Elementary Schools and Junior High Schools in Probolinggo Regency</i>
PERAK	Pemberian bantuan 16 beasiswa untuk siswa dan mahasiswa di Yayasan Barunawati Biru Surabaya <i>Scholarships for 16 school students and college students at Yayasan Barunawati Biru Surabaya</i>
PERAK	Pemberian bantuan beasiswa untuk 22 mahasiswa Universitas Wijaya Putra Surabaya <i>Scholarships for 22 students of Universitas Wijaya Putra Surabaya</i>
SYARIAH SURABAYA	Pemberian bantuan sarana dan prasarana Yayasan Khadijah Surabaya <i>Provision of facilities and infrastructure for Yayasan Khadijah Surabaya</i>
SYARIAH MALANG	Pemberian bantuan sarana dan prasarana penunjang pendidikan SD Integral Hidayatullah Probolinggo <i>Provision of facilities and infrastructure to support the education at SD Integral Hidayatullah Probolinggo</i>
SYARIAH KEDIRI	Pemberian bantuan sarana dan prasarana Yayasan Masjid Hidayatullah dan Yayasan Mabaus Sholihin II <i>Provision of facilities and infrastructure for Yayasan Masjid Hidayatullah and Yayasan Mabaus Sholihin II</i>

KEBUDAYAAN

Program Bank Jatim di bidang kebudayaan meliputi olahraga dan kesenian. Pembinaan di bidang olahraga antara lain pembangunan/perbaikan gedung olahraga, pembinaan olahraga kepada pemuda dan pelajar. Untuk melestarikan kebudayaan, Bank Jatim melaksanakan beberapa kegiatan antara lain ikut serta dalam pembinaan kesenian daerah, pembangunan/perbaikan gedung kesenian, pemberian sarana untuk pelaksanaan kegiatan kesenian.

CULTURE

Bank Jatim's programs in culture include sports and arts. Coaching in the field of sports includes building/repairing sports buildings, coaching sports for youth and students. To preserve culture, the Bank carries out several activities including participating in fostering regional arts, building/repairing art buildings, providing facilities for the implementation of artistic activities.

CABANG / BRANCH	KEGIATAN / ACTIVITY
KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE	Pembinaan untuk para atlet bola voli junior Bank Jatim yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional <i>Coaching for junior volleyball athletes of Bank Jatim with national and international achievements</i>

KESEHATAN

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Jatim antara lain pemberian fasilitas kesehatan antara lain ambulance, alat-alat kesehatan (kursi roda, brankar, timbangan, dll), pelaksanaan khitanan massal, operasi katarak, operasi untuk penderita cacat bawaan, perbaikan gizi buruk melalui pemberian makanan tambahan khususnya bagi para balita penderita gizi buruk.

HEALTH

Some of the activities carried out by Bank Jatim include the provision of health facilities including ambulances, medical equipment (wheelchairs, gurney, scales, etc.), the implementation of mass circumcisions, cataract operations, operations for people with congenital disabilities, improvement of malnutrition through the provision of food especially for toddlers suffering from malnutrition.

CABANG / BRANCH	KEGIATAN / ACTIVITY
KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE	Pemberian bantuan berupa pembangunan 50 unit jamban sehat di Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya <i>Donation in the form of installation of 50 healthy latrine units in Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Surabaya City</i>
MALANG	Pemberian bantuan 1 unit Ambulance Emergency PMI Kota Malang <i>Donation of 1 Ambulance Emergency unit for the Red Cross of Malang City</i>
MADIUN	Pemberian bantuan berupa pembangunan 50 unit jamban sehat di Kab Madiun <i>Donation in the form of installation of 50 healthy latrine units in Madiun Regency</i>
KEDIRI	Pemberian bantuan 1 unit mobil ambulance untuk RS Bhayangkara Kediri <i>Donation of 1 ambulance car unit for Bhayangkara Hospital, Kediri</i>
PASURUAN	Pemberian bantuan 1 unit mobil ambulance PMI Kab. Pasuruan <i>Donation of 1 ambulance car unit for the Red Cross of Pasuruan Regency</i>
SIDOARJO	Pemberian bantuan 1 unit mobil ambulance jenazah ke RSUD Sidoarjo <i>Donation of 1 hearse unit for RSUD Sidoarjo</i>

CABANG / BRANCH	KEGIATAN / ACTIVITY
SIDOARJO	Pemberian bantuan 1 unit mobil donor darah PMI UTD Kab Sidoarjo <i>Donation of 1 unit of blood donor car for the UTD Red Cross of Sidoarjo Regency</i>
BONDOWOSO	Pemberian bantuan pembangunan stimulan jamban di Kab Bondowoso <i>Donation for the construction of latrine stimulant in Bondowoso Regency</i>
BONDOWOSO	Pemberian bantuan 1 unit mobil ambulance untuk RSUD Dr. Koesnadi Bondowoso <i>Donation of 1 ambulance car unit for RSUD Dr. Koesnadi Bondowoso</i>
DR. SUTOMO	Pemberian bantuan berupa alat penunjang pelayanan kesehatan RSUD Haji Surabaya <i>Donation in the form of health service supporting tools for RSUD Haji Surabaya</i>
PARE	Pemberian bantuan pembangunan 158 unit jamban di Kec Kunjang Kab Kediri <i>Donation in the form of installation of 158 latrine units in Kec. Kunjang, Kediri Regency</i>
SYARIAH KEDIRI	Pemberian bantuan alat kesehatan untuk RSI Aminah Blitar <i>Donation of medical equipment for RSI Aminah</i>

SOSIAL

Bentuk kepedulian Bank Jatim pada bidang sosial antara lain pembangunan infrastruktur sosial atau fasilitas umum berupa tempat ibadah, ponton umum, gazebo, kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dan plesterisasi, pemberian tenda bagi para pedagang kaki lima sebagai sarana untuk berjualan, pemberian peralatan usaha bagi UKM, pemberian santunan bagi warga masyarakat yang kurang mampu, pemberian santunan bagi korban bencana alam.

SOCIAL

The form of Bank Jatim's concern in the social sector includes the development of social infrastructure or public facilities in the form of places of worship, public potions, gazebos, activities to repair uninhabitable houses and plasterization, provision of tents for street vendors as a means for selling, provision of business equipment for SMEs, providing compensation for disadvantaged citizens, providing compensation for victims of natural disasters.

CABANG / BRANCH	KEGIATAN / ACTIVITY
KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE	Pemberian bantuan berupa santunan kepada 300 anak yatim dan dhuafa @Rp300.000,- pada acara Orang Tua Asuh Sehari <i>Donation for 300 orphans and dhuafa (Rp300,000 for each children) in the Orang Tua Asuh Sehari event</i>
KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa lapak berkah, alat usaha dan kaki palsu untuk kaum disabilitas di Kota Surabaya <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of lapak berkah, business tools, and prosthetic legs, for disabled community in Surabaya City</i>
KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE	kegiatan Bank Jatim peduli UMKM AWARDS tahun 2019 <i>Bank Jatim Peduli activity "MSME AWARDS 2019"</i>
KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE	bantuan 1 unit mobil ambulance untuk dinsos prov jatin <i>Donation of 1 ambulance car unit for East Java Province Social Service Agency</i>
KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE	230 khitanan massal dan 350 bantuan sembako <i>Mas circumcision for 230 children and donation of 350 staple needs</i>
UTAMA / MAIN BRANCH	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa 1 unit mobil skywalker dan 1 unit truk sampah untuk dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau Pemerintahan Kota Surabaya <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of 1 unit of skywalker car and 1 unit of garbage trucks for the Cleaning Service and Green Space of Municipality Government of Surabaya</i>
MADIUN	Pemberian bantuan pembangunan taman monumen beserta pengadaan bibit tanaman hias RTH Tanggul kali Wilayah bantaran Kota Madiun <i>Donation for the construction of a monument park and procurement of ornamental plant seeds for RTH Tanggul Kali of riverbank of Madiun City</i>
KEDIRI	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa pembangunan 11 unit PKL Pujasera di Kab Kediri <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of construction of 11 PKL Pujasera units in Kediri City</i>
PAMEKASAN	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa 6 unit kendaraan pengangkut sampah roda tiga kepada Pemerintahan Kabupaten Pamekasan <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of 6 units of three-wheeled garbage transport vehicles to the Pamekasan Regency Government</i>
BOJONEGORO	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa pembuatan mck 70 unit di desa turi kecamatan tambakrejo Kab Bojonegoro <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of construction of 70 MCK units in Desa Turi, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro Regency</i>
BOJONEGORO	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa pengembangan kawasan wisata angin Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of developing wind tourism area in Desa Deling, Kecamatan Sekar, Bojonegoro Regency</i>
BOJONEGORO	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa renovasi 5 unit RTLH Ds Tondomulyo Kedungadem Kab Bojonegoro <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of renovation of 5 RTLH units in Desa Tondomulyo Kedungadem, Bojonegoro Regency</i>
NGAWI	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa 1 unit kendaraan evakuasi korban bencana Kab Ngawi Tahun 2019 <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of 1 unit of evacuation vehicle for disaster victims of Ngawi Regency 2019</i>
JOMBANG	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa 1 unit mobil tangki air dan 7 unit tandon air untuk Pemkab Jombang <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of 1 unit of water tank car and 7 units of water reservoirs for Jombang Regency Government</i>

CABANG / BRANCH	KEGIATAN / ACTIVITY
PROBOLINGGO	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli perbaikan 1.000 unit becak di Kota Probolinggo <i>Donation of Bank Jatim Peduli for repairing 1,000 pedicab units in Probolinggo City</i>
TULUNGAGUNG	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa 8 unit gerobak sampah motor roda tiga Kab Tulungagung <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of 8 units of three-wheeled motorized trash wheelbike for Tulungagung Regency</i>
MOJOKERTO	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa 1 unit mobil toilet keliling untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of 1 unit of mobile toilet for Mojokerto City Environmental Agency</i>
TUBAN	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa perbaikan 20 unit RTLH di Kabupaten Tuban <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of repairing 20 RTLH units in Tuban Regency</i>
SUMENEP	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa mobil layanan pajak daerah (PBB-P2) Kab. Sumenep <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of regional tax service cars (PBB-P2) for Sumenep Regency</i>
NGANJUK	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa 50 unit tenda kerucut pk1 alun-alun Kab Nganjuk <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of 50 units of cone tents for the plaza of Nganjuk Regency</i>
NGANJUK	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli bantuan mobil kendaraan angkutan sekolah khusus disabilitas Kab Nganjuk <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of provision of special school transportation vehicle for the disabled community in Nganjuk Regency</i>
PONOROGO	Pemberian bantuan berupa 1 unit mobil trauma healing untuk Dinsos Kab Ponorogo <i>Donation in the form of 1 unit of trauma healing car for Social Service Office of Ponorogo Regency</i>
PONOROGO	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa perbaikan 17 unit RTLH Kab Ponorogo <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of repairs to 17 RTLH units in Ponorogo Regency</i>
PACITAN	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa pembangunan revitalisasi los PKL mereci alun-alun Pacitan <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of revitalization of street vendors at the Pacitan square</i>
TRENGGALEK	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa 3 unit kendaraan roda dua untuk GERTAK gerakan tengok bawah masalah kemiskinan Kab Trenggalek <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of a tax service car around the Trenggalek Regency area</i>
TRENGGALEK	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa mobil pelayanan pajak keliling daerah Kab Trenggalek <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of a tax service car around the Trenggalek Regency area</i>
TRENGGALEK	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa sarana dan prasarana Fisheries Cafe Park Di Kab Trenggalek <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of Fisheries Cafe Park facilities and infrastructure in Trenggalek Regency</i>
SAMPANG	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa pembuatan air mancur flat 2 unit di taman kota Kabupaten Sampang <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of construction of 2 units of flat fountain in the city park of Sampang Regency</i>
BANGKALAN	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa 7 unit kendaraan pengangkut sampah roda tiga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of 7 units of three-wheeled garbage transport vehicles for Bangkalan Regency Environmental Agency</i>
GRESIK	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa 1 unit Booth Layanan <i>Public Icon Mall</i> Gresik, 100 buah pot tabulampot dan 4 unit gazebo di alun-alun Gresik <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of 1 unit of the Public Icon Mall Gresik Service Booth, 100 Tabulampot pots and 4 units of gazebos in the Gresik square</i>
LAMONGAN	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa ruang faca gemas RSUD Dr. Soegiri Kab. Lamongan <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of faca gemas room for RSUD Dr. Soegiri, Lamongan Regency</i>
SITUBONDO	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli tenda kerucut, atap tenda dan kios semi permanen Situbondo <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of cone tent, tent roof, and semi-permanent kiosk in Situbondo</i>
SITUBONDO	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa pengadaan mesin pelet ikan dan mesin pencacah bonggol jagung Kab Situbondo <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of procurement of fish pellet machines and corn cobs machines for Situbondo Regency</i>
MAGETAN	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa perbaikan 16 unit RTLH Kab. Magetan <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of repairing 16 RTLH units in Magetan Regency</i>
DR. SUTOMO	Pemberian bantuan pembangunan ruang buffer dan fasilitas comand center RSUD dr soetomo <i>Donation to build buffer room command center facility at RSUD Dr. Soetomo</i>
KANGEAN	Pemberian bantuan berupa pembangunan pagar lapangan desa kayuaru kecamatan kangayan Pulau Kangean Kabupaten Sumenep <i>Donation in the form of construction of the field fence for Desa Kayuaru, Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean, Sumenep Regency</i>
KEPANJEN	Pemberian bantuan Bank Jatim Peduli berupa 1 unit kendaraan untuk pendampingan pemberdayaan masyarakat Kab Malang <i>Donation of Bank Jatim Peduli in the form of 1 vehicle unit for community empowerment assistance in Malang Regency</i>

BIAYA YANG DIKELUARKAN

Sepanjang tahun 2019, Bank Jatim telah mengeluarkan biaya CSR Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp15,97 miliar untuk menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program sosial dan kemasyarakatan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 69% dari tahun sebelumnya sebesar Rp11.045.340.217. Adapun rincian mengenai dana penyaluran kegiatan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

COST INCURRED

Throughout 2019, Bank Jatim has spent Rp15.97 billion for Social Community Development CSR to carry out various activities related to social and community programs. This amount increased 69% from the previous year which was recorded at Rp11.04 billion. The details regarding the distribution of funds for activities related to social and community development are as follows:

URAIAN	JUMLAH / TOTAL	DESCRIPTION
BUDAYA	Rp334.200.000	CULTURE
PENDIDIKAN	Rp791.121.592	EDUCATION
KESEHATAN	Rp2.361.740.700	HEALTH
SOSIAL	Rp12.481.352.944	SOCIAL
TOTAL RELISASI TAHUN 2019	Rp15.968.415.236	TOTAL REALIZATION IN 2019



8

LAPORAN KEUANGAN AUDIT

AUDITED FINANCIAL STATEMENT

Laporan Keuangan
31 Desember 2019 dan 2018
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Financial Statements
as of December 31, 2019 and 2018
for the years then ended with independent auditor's report*

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi/ Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Board of Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	5 - 6	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	7 - 171	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ferdian Timur Satyagraha
Alamat kantor : Jl. Basuki Rahmad 98-104
Surabaya
Alamat domisili : Jl. Mulyosari Mapan 1/B8-6
Surabaya
Nomor telepon : (031) 5310090 ext 242
Jabatan : Pgs. Direktur Utama
2. Nama : Endangto Sigit Cahyono
Alamat kantor : Jl. Basuki Rahmad 98-104
Surabaya
Alamat domisili : Perum Griya Shasta E-203,
Malang
Nomor telepon : (031) 5310090 ext 224
Jabatan : Direktur Kepatuhan dan
Manajemen Risiko

Menyatakan bahwa

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
2. Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah diaudit secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak meninggalkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya



Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors
Surabaya, 30 Januari 2020 / January 30, 2020

Ferdian Timur Satyagraha

Pgs. Direktur Utama / Temporary Replacement of
President Director

We, the undersigned :

1. Name : Ferdian Timur Satyagraha
Office address : Jl. Basuki Rahmad 98-104
Surabaya
Residential address : Jl. Mulyosari Mapan 1/B8-6
Surabaya
Telephone : (031) 5310090 ext 242
Position : Temporary Replacement of
President Director
2. Name : Endangto Sigit Cahyono
Office address : Jl. Basuki Rahmad 98-104
Surabaya
Residential address : Perum Griya Shasta E-203,
Malang
Telephone : (031) 5310090 ext 224
Position : Compliance and Risk
Management Director

Declare that

1. We are responsible for the preparation and presentation of financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
2. The financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk have been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk do not contain any incorrect information or material facts; nor do they omit any information or material facts;
4. We are responsible for PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk internal control system.

This statement has been made truthfully



Endangto Sigit Cahyono

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko / Compliance
& Risk Management Director

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 578/PM/1/2017



Laporan No 00007/3.0355/AU.107/1192-2/14/2020
Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu analisis kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal entitas.

Report No 00007/3.0355/AU.107/1192-2/14/2020
Independent Auditors' Report

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. These standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.

Tel: +62 31 5012161 • Fax: +62 31 5012335 • Email: obj-office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • Jl. Ngagel Jaya No. 90 • Surabaya 60281 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or omissions of any individual member or corresponding firm or firm.

Laporan No.00007/3.0355/AU.1/07/1192-3/16/2020

(lanjutan)

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Report No.00007/3.0355/AU.1/07/1192-3/16/2020

(continued)

Independent Auditors' Report (continued)

An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as of December 31, 2019, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsene, Retno, Pallinggan & Rekan



Gideon, CPA

Izin Akuntan Publik No. AP.1192 / Public Accountant License No. AP.1192

30 Januari 2020 / January 30, 2020

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	2019	Catatan/ Notes	2018	
ASET				ASSETS
Kas	2.729.776	2b,2d,2f,3	1.913.960	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5.734.527	2b,2d,2g,4	4.075.938	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	111.479	2b,2c,2d,2g,5	97.287	Current accounts with other banks
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(25)	2m, 39e	(15)	Allowance for impairment losses
Giro pada bank lain, neto	111.454		97.272	Current accounts with other banks, net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.989.584	2b,2c,2d, 2h,6	13.349.542	Placements with Bank Indonesia and other banks
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.357)	2m, 39e	(2.302)	Allowance for impairment losses
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, neto	11.987.227		13.347.240	Placements with Bank Indonesia and other banks, net
Surat-surat berharga	9.568.245	2b,2c,2d,2i,7	7.791.958	Marketable securities
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(5.174)	2m, 39e	(513)	Allowance for impairment losses
Surat-surat berharga, neto	9.563.071		7.791.445	Marketable securities, net
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.038.432	2d,2j,8	566.891	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	5.837.520	2d, 9	-	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	81.265	2d,2k,10	34.069	Other receivables
Kredit yang diberikan		2c,2d,2e,2l,11,36		Loans
- Pihak berelasi	320.896		240.632	Related parties -
- Pihak ketiga	38.031.404		33.652.605	Third parties -
Jumlah kredit yang diberikan	38.352.300		33.893.237	Total loans
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(980.134)	2m,11, 39e	(1.198.550)	Allowance for impairment losses
Kredit yang diberikan, neto	37.372.166		32.694.687	Total loans, net
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	416.420	2b, 2d,12	373.341	Interest receivables
Biaya dibayar dimuka	285.522	2n,2p, 13	308.418	Prepaid expenses
Aset tetap		2o,14		Fixed assets
Biaya perolehan	1.595.455		1.501.050	Cost
Akumulasi penyusutan	(572.026)		(528.993)	Accumulated depreciation
Nilai buku neto	1.023.429		972.057	Net book value
Aset pajak tangguhan, neto	481.615	2x,21f	467.788	Deferred tax assets, net
Aset lain-lain, neto	52.866	15	46.012	Other assets, net
JUMLAH ASET	76.715.290		62.689.118	TOTAL ASSETS

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 December 2019 and 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	2019	Catatan/ Notes	2018	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	357.565	2d,16	514.585	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah		2b,2d,2e		Deposits from customers
- Pihak berelasi	14.940.917	2r,17,36	14.947.056	Related parties -
- Pihak ketiga	45.604.955		35.968.875	Third parties -
Jumlah simpanan dari nasabah	60.545.872		50.915.931	Total deposits from customers
Simpanan dari bank lain		2d,2e,2s		Deposits from other banks
- Pihak berelasi	137.819	18,36	100.108	Related parties -
- Pihak ketiga	2.750.611		635.000	Third parties -
Jumlah simpanan dari bank lain	2.888.430		735.108	Total deposits from other banks
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.037.094	2d,2t,19	566.699	Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement
Pinjaman yang diterima	1.870.246	2d,2u,20	725.563	Borrowings
Utang pajak	63.766	2w,21a	149.441	Taxes payable
Beban yang masih harus dibayar	433.507	2d,22	398.536	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	333.158	2b,2d,2z,2ac,23	211.319	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	67.529.638		54.217.182	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham:				Share capital:
- Seri A : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				Series A : Rp250 (full Rupiah) - par value per share
- Seri B : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				Series B : Rp250 (full Rupiah) - par value per share
Modal dasar:				Authorized:
- Seri A : 24.000.000.000 saham				Series A : 24,000,000,000 shares -
- Seri B : 12.000.000.000 saham				Series B : 12,000,000,000 shares -
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				Issued and fully paid:
- Seri A - 11.934.147.982 saham				Series A - 11,934,147,982 shares -
- Seri B - 3.068.222.600 saham (2018 : 3.040.443.400 saham)	3.750.593	24	3.744.534	Series B - 3,068,222,600 shares - (2018 : 3,040,443,400 shares)
Surplus revaluasi aset tetap	748.183		673.944	Revaluation surplus of fixed assets
Kerugian pengukuran kembali program imbangan pasti - setelah pajak tangguhan	(111.967)		(44.575)	Remeasurement loss of defined benefit pension plans - net off deferred tax
Laba yang belum direalisasi atas surat berharga - tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	20		-	Unrealized gain on available for sale of marketable securities - net off deferred tax
Tambahan modal disetor - neto	528.753	2aa,25	520.603	Other paid-in capital - net
Saldo laba		24e		Retained earnings
Cadangan umum	2.893.565		2.317.122	General reserve
Belum ditentukan penggunaannya	1.376.505		1.260.308	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	9.185.652		8.471.936	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	76.715.290		62.689.118	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended
December 31, 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah)**

	2019	Catatan/ Notes	2018	
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH	5.839.016	2e,2v,2w,28,36	5.200.739	INTEREST AND SHARIA INCOME
BEBAN BUNGA DAN SYARIAH	(1.839.415)	2e,2v,29,36	(1.512.632)	INTEREST AND SHARIA EXPENSE
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH, NETO	3.999.601		3.688.107	INTEREST AND SHARIA INCOME, NET
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Administrasi giro, tabungan dan deposito	155.360		137.745	Current accounts, savings and deposits administration fees
Administrasi pinjaman	45.993		40.096	Loan administration fees
Penerimaan kembali kredit hapus buku	77.973		77.254	Collection of loans written-off
Provisi dan komisi dari selain kredit yang diberikan	14.795	2w	7.089	Fees and commissions from other than loans
Lainnya	179.859	30	151.137	Others
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	473.980		413.321	TOTAL OTHER OPERATING INCOME
BEBAN OPERASIONAL				OPERATING EXPENSES
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.459.394)	2z,32,36	(1.411.911)	Salaries and employee benefits
Umum dan administrasi	(683.957)	33	(706.474)	General and administrative
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(370.265)	2m,31	(133.793)	Provision for impairment losses on financial assets
Beban lainnya	(163.386)	34	(143.329)	Other expenses
Jumlah beban operasional	(2.677.002)		(2.395.507)	Total operating expenses
LABA OPERASIONAL	1.796.579		1.705.921	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
Keuntungan selisih kurs	2.440	2b	3.013	Gain on foreign exchange
Beban non-operasional	(6.565)		(7.960)	Non-operating expenses
Fee jasa pelayanan pajak	12.796		13.089	Tax service fees
Keuntungan atas penjualan aset tetap	393		-	Gain on sale of fixed asset - net
Lainnya	58.490		39.635	Others
Pendapatan non-operasional, neto	67.554		47.777	Non-operating income, net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.864.133		1.753.698	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK - NETO	(487.628)	2x,20b,21d	(493.390)	TAX EXPENSE - NET
LABA TAHUN BERJALAN	1.376.505		1.260.308	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Surplus revaluasi aset tetap	74.239		44.713	Revaluation surplus of fixed assets
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti	(84.240)		12.535	Remeasurement gain (losses) of defined benefit pension plans
Pajak penghasilan terkait	16.848		(3.134)	Related income taxes
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Laba yang belum direalisasi atas surat berharga - tersedia untuk dijual	25		-	Unrealized gain on available for sale of marketable securities
Pajak penghasilan terkait	(5)		-	Related income taxes
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.383.372		1.314.422	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (DALAM NILAI PENUH)	91,80	2y,35	84,15	BASIC EARNINGS PER SHARE (IN FULL AMOUNT)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the years ended
December 31, 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
Unless otherwise stated)**

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Tambahkan modal disetor- neto/ Other paid-in capital-net	Surplus revaluasi aset tetap/ Revaluation surplus of fixed asset	Kerugian pengukuran kembali program imbalan pensiun/ Remeasurement loss of defined benefit pension plans	Laba yang belum direalisasi atas surat berharga - tersedia untuk dijual/ Unrealized gain on available for sale of marketable securities	Saldo laba/Retained earnings		
						Cadangan umum/ General reserve	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah ekuitas/ Total equity
31 Desember 2017	3.743.648	519.663	629.231	(53.976)	-	1.818.138	1.159.370	7.816.074
Eksekusi program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)	886	940	-	-	-	-	-	1.826
Pembentukan cadangan umum	24e	-	-	-	-	498.984	(498.984)	-
Pembagian dividen tunai	2ab, 24e	-	-	-	-	-	(660.386)	(660.386)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	44.713	9.401	-	-	1.260.308	1.314.422
31 Desember 2018	3.744.534	520.603	673.944	(44.575)	-	2.317.122	1.260.308	8.471.936
Setoran tambahan modal Eksekusi program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)	6.059	8.150	-	-	-	-	-	14.209
Pembentukan cadangan umum	24e	-	-	-	-	576.443	(576.443)	-
Pembagian dividen tunai	2ab, 24e	-	-	-	-	-	(683.865)	(683.865)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	74.239	(67.392)	20	-	1.376.505	1.383.372
31 Desember 2019	3.750.593	528.753	748.183	(111.967)	20	2.893.565	1.376.505	9.185.652

December 31, 2017

Executed program of
Management and Employee
Stock Option Plan (MESOP)
Appropriation for general reserve
Distribution of cash dividends
Total comprehensive income
for the year

December 31, 2018

Additional deposits capital
Executed program of
Management and Employee
Stock Option Plan (MESOP)
Appropriation for general reserve
Distribution of cash dividends
Total comprehensive income
for the year

December 31, 2019

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements
form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENT OF CASH FLOW**
For the years ended
December 31, 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan bunga, syaria, provisi dan komisi	5.793.913		5.126.743	Receipts of interest, syaria, fees and commissions
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	396.007		336.066	Receipts of other operating income
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku	77.973		77.254	Collection of loans written-off
Penerimaan dari pendapatan non-operasional	74.120		55.739	Receipts from non-operating income
Pembayaran untuk biaya non-operasional	(6.565)		(7.960)	Payments for non-operating expenses
Pembayaran bunga, syaria, provisi dan komisi	(1.832.032)		(1.501.446)	Payments of interest, syaria, fees and commissions
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.427.754)		(1.360.329)	Payments of salaries and employee benefits
Pembayaran beban umum dan administrasi	(777.253)		(785.200)	Payments of general and administrative expenses
Pembayaran pajak	(581.512)		(544.875)	Payment of taxes
Kas netto diterima sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	1.716.897		1.395.992	Net cash received before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(112.000)		-	Placement with Bank Indonesia and other banks
Kredit yang diberikan	(5.038.885)		(2.464.765)	Loans
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(471.540)		(566.891)	Marketable securities sold under repurchase agreement
Tagihan reverse repo	(5.837.520)		9.831	Reverse repo receivables
Aset lain-lain dan tagihan lainnya	(53.071)		93.811	Other assets and other receivables
Liabilitas segera	(146.873)		11.070.824	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	9.629.941		(713.853)	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2.153.322		566.699	Deposits from other banks
Liabilitas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	470.394		35.672	Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement
Liabilitas lain-lain	27.092			Other liabilities
Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi	2.337.757		9.427.320	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Pembelian surat berharga	(1.774.238)	14	(3.032.249)	Purchase of marketable securities
Perolehan aset tetap	(22.126)		(31.236)	Acquisition of fixed assets
Penjualan aset tetap	393		-	Fixed asset sold
Kas netto digunakan untuk aktivitas investasi	(1.795.971)		(3.063.485)	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima	1.144.682		(571.314)	Proceeds (payments of) from borrowings
Penerimaan dari penambahan modal saham	14.209		1.826	Proceeds from additional paid-up capital
Pembayaran dividen kas	(683.865)		(660.386)	Payments of cash dividends
Kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan	475.026		(1.229.874)	Net cash used in financing activities

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENT OF CASH FLOW
For the years ended
December 31, 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah)**

	2 0 1 9	Catatan/ Notes	2 0 1 8	
Kenaikan neto kas dan setara kas	1.016.812		5.133.961	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	19.437.785		14.304.019	Cash and cash equivalents at beginning of year
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(1.231)	2b	(195)	Effects of foreign currencies exchange rate changes
Kas dan setara kas pada akhir tahun	20.453.366		19.437.785	Cash and cash equivalents at end of year
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents consist of:
Kas	2.729.776	3	1.913.960	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5.734.527	4	4.075.938	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	111.479	5	97.287	Current accounts with other bank s
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.877.584	6	13.350.600	Placements with Bank Indonesia and other banks
Jumlah kas dan setara kas	20.453.366		19.437.785	Total cash and cash equivalents

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan informasi umum

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No.91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No.Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No.1/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No.11 tahun 1996 tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No.1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No.1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No.42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.3008/1999.

1. GENERAL

a. Establishment of the Bank and general information

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (the "Bank") was established under the name of PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur based on the notarial deed No.91 dated August 17, 1961 of Anwar Mahajudin. Pursuant to Law No.13 year 1962 regarding the Basic Terms for Regional Development Banks, which require that the establishment of Regional Development Banks be based on Municipal District Regulations, therefore the Municipal District I of East Java issued Municipal District Regulation No.2 year 1976. Based on such Municipal District Regulation, the name of PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur was changed to Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Such Municipal District Regulation was approved by the Minister of Internal Affairs under Decision Letter No.Pem.10/5/26-18 dated January 31, 1977 and published in the Municipal Gazette District I Province of East Java Year 1977 Series C No.1/c dated February 1, 1977. This Regulation has been amended several times, with the latest amendment being Municipal District Regulation No.11 year 1996, dated December 30, 1996, which was approved by the Minister of Domestic Affairs in Decision Letter No.584.35-280 dated April 21, 1997. Pursuant to the approval of Municipal District Regulation No.1 year 1999 by the Regional Legislative Assembly of East Java dated March 20, 1999 and by the Minister of Domestic Affairs in Decision Letter No.584.35-317 dated April 14, 1999, the legal status of the Bank was changed from a Regional Corporation to a Limited Liability Company.

This change in status of legal form was based on the notarial deed No.1 dated May 1, 1999 of R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.C2.8227.HT.01.01.TH.99 dated May 5, 1999 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.42, dated May 25, 1999 in Supplement of the Republic of Indonesia No.3008/1999.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) *Regional Champion* yang salah satu parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta No.89 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan No.AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tanggal 29 November 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Selanjutnya, Anggaran Dasar tersebut telah mengalami perubahan, terakhir melalui akta No.23 tanggal 8 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Bambang Heru Djuwito, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0927645 tanggal 27 April 2015.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Bank memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ("BI") No.23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Bank and general information (continued)

In line with the economic growth and to comply with the requirement to be Regional Champion BPD, with one of the indicators is to strengthen the capital structure, an amendment of Article of Associations was taken based on Extraordinary General Meetings of Shareholders Decision Deeds No.89 dated April 25, 2012 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta and granted approval from Ministry of Law and Human Rights based on decree No.AHU-22728.AH.01.02. Tahun 2012 dated April 30, 2012, registered on the Company list according to Limited Company Law with registration No.AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 dated April 30, 2012, as well as by Decision Letter of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated November 29, 2012 that declared effective registration statement to become a public company and changed its name to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Hereinafter, the Articles of Associations has been amended, with the latest deed No.23 dated April 8, 2015 made by Bambang Heru Djuwito, S.H., Notary in Surabaya and has been registered on the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.03-0927645 dated April 27, 2015.

The Bank started its commercial operations in accordance with the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.BUM 9-4-5 on August 15, 1961. The Sharia Operating Unit started its commercial operations on August 21, 2007 in accordance with the approval letter from Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb dated April 4, 2007 for the establishment of the Bank's Sharia Unit.

The ultimate parent of the Bank is the Government of East Java Province.

The Bank obtained a license to operate as foreign exchange bank based on the decision letter No.23/28/KEP/DIR of the Board of Director of Bank Indonesia ("BI") dated August 2, 1990.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip Syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

b. Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No.S-8143/BL/2012 tanggal 29 November 2012, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat sejumlah 2.983.537.000 saham Seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp250 (Rupiah penuh) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp430 per saham (Rupiah penuh) telah menjadi efektif pada tanggal 29 November 2012. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2012. Selisih lebih antara harga penawaran per saham dengan nilai nominal per saham dicatat sebagai "Tambahan modal disetor, setelah dikurangi dengan biaya emisi saham", yang disajikan pada bagian Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Bank and general information (continued)

In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's scope of activities is to engage in general banking services, including banking activities based on Sharia principles and other banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations.

The main role of the Bank is to participate in developing regional economic growth by providing facilities to small and medium scale businesses to achieve appropriate profit levels. Its main activities involve collecting and lending funds and rendering other banking services.

b. Initial Public Offering (IPO)

Based on letter No. S-8143/BL/2012 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated November 29, 2012, the registration statement submitted by the Bank relating to the Initial Public Offering of 2,983,537,000 Series B shares at Rp250 (full Rupiah) per share with selling price of Rp430 (full Rupiah) per share became effective on November 29, 2012. The shares which were offered to the public, were listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on July 12, 2012. The excess of the share offer price over the par value per share was recognized as "Other paid-in capital - net of share issuance cost", which is presented under the Equity section of the Statement of Financial Position.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Perdana Saham (lanjutan)

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank akan mengimplementasikan program *Employee Stock Allocation (ESA)* dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan dan menerbitkan opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)* sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana.

Program MESOP Tahap I Periode Tahun 2016 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 13 November 2016, tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap II Periode Tahun 2017 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019.

1. GENERAL (continued)

b. Initial Public Offering (IPO) (continued)

In relation to the Initial Public Offering of the shares, the Bank will implement Employee Stock Allocation (ESA) program by allocating maximum of 10% of the newly issued shares and issued Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) program with maximum of 0.71% of the issued and paid-up shares after Initial Public Offering.

The MESOP Program in Period 2016 Phase I has been implemented from August 1, 2016 to November 13, 2016, February 1, 2017 to March 13, 2017, August 1, 2017 to November 13, 2017, February 1, 2018 to March 15, 2018, August 1, 2019 to September 11, 2019. The MESOP Program in Period 2017 Phase II has been implemented from August 1, 2017 to November 13, 2017, February 1, 2018 to March 15, 2018, February 1, 2019 to March 18, 2019, August 1, 2019 to September 11, 2019. The MESOP Program Phase III has been implemented from August 1, 2018 to September 14, 2018, February 1, 2019 to March 18, 2019, August 1, 2019 to September 11, 2019.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)**c. Manajemen eksekutif**

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)**c. Executive boards**

As of December 31, 2019 and 2018, the members of the Bank's Board of Commissioners and Directors are as follows:

2019**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	Akhmad Sukardi
Komisaris	Budi Setiawan
Komisaris	Heru Tjahjono
Komisaris Independen	Rudi Purwono
Komisaris Independen	Candra Fajri Ananda
Komisaris Independen	Mas'ud Said

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Direksi

Direktur Utama	-
Direktur Komersial dan Korporasi	Busrul Iman
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	-
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Tonny Prasetyo
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Erdianto Sigit Cahyono
Direktur Risiko Bisnis	Rizyana Mirda
Direktur Keuangan	Ferdian Timur Satyagraha

Directors

President Director
Commercial and Corporation Director
Consumer Retail and Sharia Business Director
Information Technology and Operation Director
Compliance and Risk Management Director
Business Risk Director
Finance Director

Susunan Pengurus Bank sesuai dengan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Bank No.75 tanggal 22 Oktober 2019.

The Composition of the Bank's Management is in accordance with the Deed of Restatement of the Meeting of Bank No.75 dated October 22, 2019.

2018**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	Akhmad Sukardi
Komisaris	Budi Setiawan
Komisaris Independen	Rudi Purwono
Komisaris Independen	Candra Fajri Ananda

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Direksi

Direktur Utama	R. Soeroso
Direktur Menengah dan Korporasi	Su'udi
Direktur Retail Konsumer dan Usaha Syariah	Tony Sudjiaryanto
Direktur Operasional	Rudie Hardiono
Direktur Kepatuhan dan Human Capital	Hadi Santoso
Direktur Manajemen Risiko	Rizyana Mirda
Direktur Keuangan	Ferdian Timur Satyagraha

Directors

President Director
Business and Corporation Director
Consumer Retail and Sharia Business Director
Operational Director
Compliance and Human Capital Director
Risk Management Director
Finance Director

Susunan Pengurus Bank sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan No.22 tanggal 20 Februari 2018.

The Composition of the Bank's Management is in accordance with the Deed of the Annual General Meeting of Shareholders No.22 dated February 20, 2018.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen eksekutif (lanjutan)

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

2019

Ketua	Rudi Purwono	Head
Anggota	Candra Fajri Ananda	Member
Anggota	Mas'ud Said	Member
Anggota	Akhmad Djauhari	Member

2018

Ketua	Rudi Purwono	Head
Anggota	Candra Fajri Ananda	Member
Anggota	Akhmad Sukardi	Member
Anggota	Nurhadi	Member

Susunan Komite Pemantau Resiko pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

2019

Ketua	Mas'ud Said	Head
Anggota	Rudi Purwono	Member
Anggota	Candra Fajri Ananda	Member
Anggota	Syafrudin	Member

2018

Ketua	Candra Fajri Ananda	Head
Anggota	Rudi Purwono	Member
Anggota	Budi Setiawan	Member
Anggota	Herry Hendarto	Member

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The composition of the Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

2019

Ketua	Candra Fajri Ananda	Head
Anggota	Rudi Purwono	Member
Anggota	Akhmad Sukardi	Member
Anggota	Heru Tjahjono	Member
Anggota	Mas'ud Said	Member
Anggota	Budi Setiawan	Member
Anggota	Budi Sumarsono	Member

(Ex Officio – Pemimpin Divisi Human Capital / Head of Human Capital Division)

2018

Ketua	Candra Fajri Ananda	Head
Anggota	Rudi Purwono	Member
Anggota	Akhmad Sukardi	Member
Anggota	Budi Setiawan	Member
Anggota	Nur Eko Ardian	Member

(Ex Officio – Pemimpin Divisi Human Capital / Head of Human Capital Division)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)**c. Manajemen eksekutif (lanjutan)**

Susunan Internal Audit pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Pemimpin Divisi	Eko Tri Prasetyo
Pemimpin Sub Divisi	Agus Nyoto
Pemimpin Sub Divisi	Muntopiyatun
Pemimpin Sub Divisi	M. Muad
Pemimpin Sub Divisi	Trilaksono

Corporate Secretary pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

2019

Pemimpin Divisi	Glembob Priambodo	Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Sulam Andjar Rochim	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Wardoyo	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Slamet Purwanto	Sub Division Head

2018

Pemimpin Divisi	Glembob Priambodo	Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Sulam Andjar Rochim	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Avan Dhinawan	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Gunawan Budi Prasetyo	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Slamet Purwanto	Sub Division Head

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

2019

Ketua	M. Ridlwan Nasir *)	Head
Anggota	Saad Ibrahim *)	Member
Anggota	Afifuddin Muhajir *)	Member

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

*) Effective after approval from Financia Services Authority

2018

Ketua	H. Moh. Ali Aziz	Head
Anggota	H. Nur Syam	Member
Anggota	H. Thohir Luth	Member

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank memiliki karyawan tetap, masing-masing sebanyak 4.252 dan 4.186 orang.

As at December 31, 2019 and 2018, the Bank has 4,252 and 4,186 permanent employees, respectively.

d. Jaringan kantor

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank memiliki 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang mempunyai 7 cabang Syariah serta 162 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 209 kantor kas, 249 payment point, 10 payment point Syariah, 191 kantor layanan Syariah, 742 ATM (Automated Teller Machine), 23 ATM Syariah (Sharia Automated Teller Machine), 2 ADM (Automated Deposit Machine), 92 kas mobil konvensional dan 6 kas mobil Syariah di Indonesia.

d. Office network

As of December 31, 2019, the Bank has 41 branches including 1 Sharia Operating Unit which has 7 Sharia branches and 162 conventional sub-branches, 10 Sharia sub-branches, 209 cash offices, 249 payment points, 10 Sharia payment point, 191 Sharia service offices, 742 ATMs (Automated Teller Machines), 23 ATMs Sharia (Sharia Automated Teller Machines), 2 ADM (Automated Deposit Machines), 92 Cash ATM vehicles conventional and 6 Cash ATM vehicles Sharia located in Indonesia.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Jaringan kantor (lanjutan)

Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018, Bank memiliki 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang mempunyai 7 cabang Syariah serta 160 kantor cabang pembantu konvensional, 9 kantor cabang pembantu Syariah, 207 kantor kas, 203 *payment point*, 8 *payment point* Syariah, 191 kantor layanan Syariah, 735 ATM (*Automated Teller Machine*), 22 ATM Syariah (*Sharia Automated Teller Machine*), 2 ADM (*Automated Deposit Machine*), 92 kas mobil konvensional dan 6 kas mobil Syariah di Indonesia.

Bank mengklasifikasikan kantor cabang menjadi kantor cabang utama, kantor cabang khusus, kantor cabang kelas I, kantor cabang kelas II dan kantor cabang kelas III. Masing-masing cabang mempunyai kantor cabang pembantu dan/atau kantor kas dan/atau *payment point*.

1. GENERAL (continued)

d. Office network (continued)

While as of December 31, 2018, the Bank has 41 branches including 1 Sharia Operating Unit which has 7 Sharia branches and 160 conventional sub-branches, 9 Sharia sub-branches, 207 cash offices, 203 payment points, 8 Sharia payment point, 191 Sharia service offices, 735 ATMs (*Automated Teller Machines*), 22 ATMs Sharia (*Sharia Automated Teller Machines*), 2 ADM (*Automated Deposit Machines*), 92 Cash ATM vehicles conventional and 6 Cash ATM vehicles Sharia located in Indonesia.

The Bank classifies its branch offices into main branches, special branches, first-class branches, second-class branches and third-class branches. Each branch has sub-branches and/or cash offices and/or payment points.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi utama yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan Bank disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). Laporan keuangan juga disusun sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (mulai tanggal 1 Januari 2013 BAPEPAM-LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No.VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terlampir dalam Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 November 2012, serta Surat Edaran BAPEPAM-LK No.SE-17/BL/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang "Penggunaan Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan Untuk Semua Jenis Industri di Pasar Modal di Indonesia".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below:

a. Basis of preparation of the financial statements

Statement of compliance

The Bank's financial statements were prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI). The financial statements have been also prepared in accordance with Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (starting January 1, 2013 BAPEPAM-LK is called Financial Services Authority (OJK)) Regulation No.VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of Publicly Listed Companies" included in the Appendix of the Decision of the Chairman of BAPEPAM-LK No.KEP-347/BL/2012 dated November 25, 2012, and Circular Letter of BAPEPAM-LK No.SE-17/BL/2012 dated December 21, 2012 regarding the "Use of Financial Statements Disclosure Checklist For All Types of Industries in the Capital Market of Indonesia".

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)

Pernyataan kepatuhan (lanjutan)

Informasi keuangan Unit Usaha Syariah Bank disajikan sesuai dengan PSAK 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102, "Akuntansi Murabahah", PSAK 103, "Akuntansi Salam", PSAK 104, "Akuntansi Istishna", PSAK 105, "Akuntansi Mudharabah", PSAK 106, "Akuntansi Musyarakah", dan PSAK 107, "Akuntansi Ijarah" yang menggantikan PSAK 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan IAI.

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain dan disusun dengan dasar akrual (kecuali bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah).

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial
statements (continued)

Statement of compliance (continued)

The financial information of the Sharia Unit have been prepared in conformity with PSAK 101, "Sharia Financial Statements Presentation", PSAK 102, "Accounting for Murabahah", PSAK 103, "Accounting for Salam", PSAK 104, "Accounting for Istishna", PSAK 105, "Accounting for Mudharabah", PSAK 106, "Accounting for Musyarakah" and PSAK 107, "Accounting for Ijarah" which replaces PSAK 59, "Accounting for Sharia Banking", associated with recognition, measurement, presentation and disclosure for the respective topics and Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banks (PAPSI) issued by Bank Indonesia and IAI.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, unless otherwise stated, and under the accrual basis of accounting (except for profit sharing for mudharabah and musyarakah financing).

The statements of cash flows have been prepared based on the direct method and have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Deposits Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not for restricted in use.

Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Bank. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are rounded off to millions of Rupiah.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing yang terjadi di sepanjang tahun dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat). Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kurs mata uang asing yang digunakan untuk menjabarkan ke mata uang Rupiah adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

	2019
1 Poundsterling Inggris Raya	18.238
1 Euro	15.571
1 Dolar Amerika Serikat	13.883
1 Dolar Singapura	10.315
1 Dolar Australia	9.725
1 Riyal Saudi Arabia	3.701
1 Ringgit Malaysia	3.392
1 Yuan China Renminbi	1.994
1 Dolar Hong Kong	1.783
100 Yen Jepang	12.781

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Transaction and balances in foreign
currency**

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions.

At the dates of statement of financial position, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies were translated into Rupiah using exchange rates as of reporting date (closing) as determined by Bank Indonesia i.e middle rates which are the average of buying rates and selling rates per Reuters at 16:00 WIB (Western Indonesian Time). The resulting gains or losses from translation are recognized in the current year statement of profit or loss.

As of December 31, 2019 and 2018, the foreign currency exchange rates used to translate amounts into Rupiah were as follows (amounts in full Rupiah):

2018	
18.312	<i>Great Britain Poundsterling 1/Rp</i>
16.441	<i>Euro 1/Rp</i>
14.380	<i>United States Dollar 1/Rp</i>
10.555	<i>Singapore Dollar 1/Rp</i>
10.162	<i>Australian Dollar 1/Rp</i>
3.834	<i>Saudi Arabian Riyal 1/Rp</i>
3.477	<i>Malaysian Ringgit 1/Rp</i>
2.091	<i>Chinese Yuan Renminbi 1/Rp</i>
1.836	<i>Hong Kong Dollar 1/Rp</i>
13.062	<i>Japanese Yen 100/Rp</i>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

c. Perubahan pada pernyataan standar
akuntansi keuangan dan interpretasi atas
pernyataan standar akuntansi keuangan

Bank menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi telah dibuat seperti diisyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru dan revisi berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau periode sebelumnya:

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018) "Kombinasi Bisnis", menambahkan syarat bahwa ketika salah satu pihak dalam suatu pengaturan bersama, memperoleh pengendalian atas bisnis yang merupakan suatu operasi bersama (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 66), dan memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas terkait dengan operasi bersama tersebut sesaat sebelum tanggal akuisisi, transaksi tersebut adalah kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap.
- Amendemen PSAK 24 memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada awal periode pelaporan tahunan). Selain itu, Amendemen PSAK 24 juga mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak batas atas aset berubah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Changes to the statements of financial
accounting standard and interpretations of
the statements of financial accounting
standard

The Bank adopted new and revised Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") that are mandatory for application from the date. Changes to the Bank accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The adoption of these new and revised standards and interpretation did not result in substantial changes to Bank's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods:

- PSAK 22 (2018 Adjustment) "Business Combination", adds a condition that when a party in a joint arrangement obtains control of the business which is a joint operation (as defined in PSAK 66), and has rights to assets and liabilities to liabilities related to the joint operation shortly before the acquisition date, the transaction is a business combination that is carried out in stages.
- Amendments to PSAK 24 provide clearer guidance for entities in recognizing past service costs, settlement gains and losses, current service costs and net interest after amendments, curtailments, or completion of programs because they use the latest actuarial assumptions (previously using actuarial assumptions at the beginning of the reporting period annual). In addition, the Amendment to PSAK 24 also clarifies how the accounting requirements for amendments, curtailments, or program completion can affect the asset boundary requirements as seen from the reduction in surplus which causes the impact of the asset limit to change.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**c. Perubahan pada pernyataan standar
akuntansi keuangan dan interpretasi atas
pernyataan standar akuntansi keuangan
(lanjutan)**

- PSAK 26 (Penyesuaian 2018) "Biaya Pinjaman", mengklarifikasi bahwa tarif kapitalisasi biaya pinjaman adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode namun entitas mengecualikan dari perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual telah selesai.
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018) "Pajak Penghasilan", menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dengan menghapus paragraf 52B dan menambah paragraf 57A. Konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan) timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan dari pada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.
- ISAK 33: "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka". ISAK 33 didasarkan pada IFRIC 22 "Transaksi Mata Uang Asing dan Imbalan di Muka". ISAK ini menjelaskan penggunaan tanggal transaksi dalam menentukan kurs yang digunakan dalam pengakuan awal suatu asset, beban, atau pendapatan ketika entitas menerima atau membayar imbalan dimuka dalam mata uang asing.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**c. Changes to the statements of financial
accounting standard and interpretations of
the statements of financial accounting
standard (continued)**

- PSAK 26 (2018 Adjustment) "Loan Costs", clarifying that capitalized borrowing costs are the weighted average borrowing costs for all loan balances during the period but the entity excludes from the calculation the borrowing costs on loans specifically obtained to obtain the qualifying assets substantially all activities needed to prepare assets to be used in accordance with their intentions or sold have been completed.
- PSAK 46 (2018 Adjustment) "Income Tax", confirms the consequences of income tax on dividends by deleting paragraph 52B and adding paragraph 57A. The consequences of income tax on dividends (as defined in PSAK 71: Financial Instruments) arise when an entity recognizes a liability to pay dividends. The consequences of income tax are more directly related to past transactions or events that generate profits that can be distributed rather than distributed to the owner. Therefore, the entity recognizes the income tax consequences in profit or loss, other comprehensive income or equity in accordance with the entity's initial recognition of past transactions or events.
- ISAK 33: "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration". ISAK 33 is an adoption of IFRIC 22 "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration". It clarifies the use of the date of the transaction in determining the exchange rate to be used for initial recognition of asset, expense or income when the entity receives or pays advance consideration in foreign currency.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

c. Perubahan pada pernyataan standar
akuntansi keuangan dan interpretasi atas
pernyataan standar akuntansi keuangan
(lanjutan)

- ISAK 34 "Ketidakpastian atas Pajak Penghasilan". ISAK 34 adalah adopsi IFRIC 23 "Ketidakpastian atas Perlakuan Pajak Penghasilan". ISAK 34 adalah interpretasi dari PSAK 46 yang menjelaskan penerapan PSAK 46 di mana terdapat ketidakpastian atas pajak penghasilan.

Tidak terdapat dampak yang material atas standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada 1 Januari 2019 terhadap laporan keuangan Bank.

d. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Bank terutama terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), tagihan lainnya, kredit yang diberikan dan pendapatan bunga yang masih akan diterima.

Liabilitas keuangan Bank terutama terdiri dari simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dan pinjaman yang diterima.

(i) Klasifikasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Changes to the statements of financial
accounting standard and interpretations of
the statements of financial accounting
standard (continued)

- ISAK 34 "Uncertainty over Income Tax". ISAK 34 is an adoption of IFRIC 23 "Uncertainty over Income Tax Treatments". ISAK 34 is an interpretation of PSAK 46 that clarifies the application of PSAK 46 where uncertainty over income taxes exist.

There is no material impact upon the standards and interpretations which became effective on January 1, 2019 to the financial statements of the Bank.

d. Financial assets and liabilities

The Bank's financial assets mainly consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, marketable securities sold under repurchased agreement, marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo), other receivables, loans and interest receivables.

The Bank's financial liabilities mainly consist of deposits from customers, deposits from other banks, liabilities of marketable securities sold under repurchase agreements and borrowings.

(i) Classification

A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- *The financial asset is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows; and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Suatu instrumen utang diukur pada FVOCI, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau aset keuangan yang diukur pada FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

Aset keuangan tidak direklasifikasi setelah pengakuan awal, kecuali pada periode setelah Bank mengubah model bisnisnya untuk mengelola aset keuangan.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- i. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- ii. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Penilaian model bisnis

Bank melakukan penilaian terhadap tujuan model bisnis dari kepemilikan suatu aset pada tingkatan portofolio, karena hal ini yang paling mencerminkan cara bisnis dikelola dan informasi diberikan kepada manajemen. Informasi yang dipertimbangkan meliputi:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

A debt instrument is measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset; and
- Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition, except in the period after the Bank changes its business model for managing financial assets.

Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:

- i. Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial liabilities designated as such upon initial recognition and financial liabilities classified as held for trading;
- ii. Financial liabilities measured at amortized cost.

Business model assessment

The Bank makes an assessment of the objective of a business model in which an asset is held at a portfolio level because this best reflects the way the business is managed and information is provided to management. The information considered includes:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

- Kebijakan dan tujuan yang dinyatakan untuk portofolio dan pengoperasian kebijakan tersebut dalam praktiknya. Secara khusus, apakah strategi manajemen berfokus pada menghasilkan pendapatan bunga kontraktual, mempertahankan profil suku bunga tertentu, mencocokkan durasi aset keuangan dengan durasi kewajiban yang mendanai aset tersebut atau mewujudkan arus kas melalui penjualan aset;
- Bagaimana kinerja portofolio dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen Bank;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis itu) dan strateginya untuk bagaimana risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis diberi kompensasi (misalnya apakah kompensasi ditentukan berdasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diterima); dan
- Frekuensi, volume dan waktu penjualan pada periode sebelumnya, alasan untuk penjualan tersebut dan ekspektasi tentang aktivitas penjualan di masa depan. Namun, informasi tentang aktivitas penjualan tidak dipertimbangkan secara terpisah, tetapi sebagai bagian dari penilaian keseluruhan tentang bagaimana tujuan Bank dinyatakan untuk mengelola aset keuangan dicapai dan bagaimana arus kas direalisasikan.

Aset keuangan yang dimiliki atau dikelola untuk diperdagangkan dan yang kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar diukur pada FVTPL, karena aset keuangan tersebut tidak dimiliki untuk menerima arus kas kontraktual atau tidak dimiliki untuk menerima arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan.

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

- The stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in practice. In particular, whether management's strategy focuses on earning contractual interest revenue, maintaining a particular interest rate profile, matching the duration of the financial assets to the duration of the liabilities that are funding those assets or realizing cash flows through the sale of the assets;
- How the performance of the portfolio is evaluated and reported to the Bank's management;
- The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and its strategy how those risks are managed;
- How the business managers are compensated (e.g. whether compensation is based on the fair value of the assets managed or the contractual cash flows collected); and
- The frequency, volume and timing of sales in prior periods, the reasons for such sales and its expectations about future sales activity. However, information about sales activity is not considered in isolation, but as part of an overall assessment of how the Bank's stated objective on managing the financial assets is achieved and how cash flows are realized.

Financial assets that are held or managed for trading and whose performance is evaluated on a fair value basis are measured at FVTPL, as they are neither held to collect contractual cash flows nor held both to collect contractual cash flows and to sell financial assets.

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Bank mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Ketentuan percepatan perlunasan dan perpanjangan;
- Ketentuan yang membatasi klaim Bank atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

(ii) Pengakuan dan pengukuran awal

Semua aset atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dimana biaya transaksi diakui langsung dalam laba rugi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (*regular*), diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah liabilitas yang diakui pada awal pengakuan liabilitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Bank considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Bank considers:

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features;
- Prepayment and extension terms;
- Terms that limit the Bank's claim to cash flows from specified assets (e.g. nonrecourse loans); and
- Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).

(ii) Recognition and initial measurement

All financial assets or liabilities are measured initially at their fair value plus transaction costs, except for financial assets and financial liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs are recognized directly in profit or loss.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date at which the Bank commits to purchase or sell those assets.

All other financial assets and liabilities are initially recognized on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the financial instruments had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of liability recognized initially.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

(iii) Penghentian pengakuan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa atau pada saat Bank mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Setiap hak atau kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan Bank yang ditentukan dengan seberapa jauh Bank terekspos terhadap perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait pada saat Bank menentukan bahwa aset Keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aset keuangan tersebut serta mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur yang diberikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

**(ii) Recognition and initial measurement
(continued)**

Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expenses for transaction costs related to financial liabilities.

(iii) Derecognition

The Bank derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or when the Bank transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Bank is recognized as a separate asset or liability.

The Bank derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

In transaction in which the Bank neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Bank derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Bank writes off financial assets and any related allowance for impairment losses when the Bank determines that those financial assets are uncollectible. The decision is reached after Bank had undertaken various efforts to obtain back the financial asset as well as considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset issuer such that the borrower/financial asset issuer can no longer pay the obligation or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Bank memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(v) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan untuk aset keuangan disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian. Nilai tercatat bruto aset keuangan merupakan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat), atas nilai tercatat bruto aset keuangan (ketika aset tidak mengalami penurunan nilai) atau pada biaya perolehan diamortisasi untuk liabilitas keuangan. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (antara lain opsi pelunasan dipercepat), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan menggunakan arus kas di masa datang termasuk ECL.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Offsetting

Financial assets and financial liabilities are set off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank has a legally enforceable right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

(v) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, and adjusted for any expected credit loss allowance. The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any expected credit loss allowance.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period), to the gross carrying amount of the financial asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amortized cost of the financial liability. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument (for example prepayment options), but does not consider any future credit losses. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit-adjusted effective interest rate is calculated using estimated future cash flows including ECL.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh provisi yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

(vi) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Bank menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Amortized cost measurement (continued)

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all fees paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

(vi) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Bank measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Bank uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Bank mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

Portofolio aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Bank berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi net long (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level portofolio tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam portofolio.

(vii) Aset keuangan murabahah

Aset keuangan murabahah dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yang dalam penerapannya disesuaikan dengan prinsip, karakteristik dan istilah transaksi syariah. Atas transaksi aset Keuangan murabahah, Bank mengacu pada PSAK 50 (revisi 2014), Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55 (revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK 60 (revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Fair value measurement (continued)

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Bank measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask prices.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Bank on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure. Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

(vii) Murabahah financial assets

The financial assets murabahah is categorized as loans and receivables, which in practice adapted to the principles, characteristics and the term of Syariah transactions. For financial assets murabahah transactions, Bank, referred to PSAK 50 (revised 2014), Financial Instruments: Presentation", PSAK 55 (revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", and PSAK 60 (revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures".

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank, jika:

- a. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
- b. suatu pihak yang berelasi dengan Bank;
- c. suatu pihak adalah ventura bersama dimana Bank sebagai ventura;
- d. suatu pihak adalah anggota dari personil dari manajemen kunci Bank;
- e. suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan (a) atau (d);
- f. suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e);
- g. suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Transaksi dengan pihak berelasi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya disajikan dalam Catatan 36.

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Transactions with related parties

A party is considered as related party of Bank, if:

- a. the Bank directly or indirectly through one or more intermediaries, a party (i) controlling, or controlled by, or under common control with Bank; (ii) have stake in the Bank that gives significant influence to the Bank; or (iii) have joint control on Bank;
- b. a party which is related to Bank;
- c. a party is a joint venture in which Bank as a venture;
- d. a party is a member of the key management personnel of Bank;
- e. a party is a close family member of an individual who is described (a) or (d);
- f. a party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for whom has significant voting rights in some entity, directly or indirectly, an individual identified in point (d) or (e);
- g. a party is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either Bank or a party related to Bank.

The transaction with related parties is made on terms agreed by both parties, where such requirements may not be the same as other transactions undertaken with unrelated parties.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the detail is presented in Note 36.

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents presented in the statements of cash flows consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Certificates Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not restricted in use.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

g. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), *call money* dan deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

i. Surat-surat berharga

Surat berharga yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), obligasi korporasi, reksadana, Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), tagihan wesel ekspor, surat utang negara dan surat berharga pasar uang dan pasar modal lainnya.

Surat utang negara terdiri dari surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia yang diperoleh melalui pasar perdana dan sekunder.

Surat-surat berharga pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, surat-surat berharga dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, investasi pada biaya perolehan diamortisasi atau berdasar nilai wajar melalui laba atau rugi.

Penilaian surat-surat berharga didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Surat-surat berharga yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.
2. Surat-surat berharga yang dimiliki untuk diperdagangkan dan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

h. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placement with Bank Indonesia and other banks consists of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI), *call money* and time deposits.

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

i. Marketable securities

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Certificate of Deposits of Bank Indonesia (SDBI), corporate bonds, mutual funds, domestic L/C, export bills receivable, government bonds and other money market and capital market securities.

Government Bonds are bonds issued by the Government of Indonesia acquired through the primary and secondary markets.

Marketable securities are initially measured at fair value. After the initial recognition, the marketable securities are recorded according to their category, i.e., fair value through other comprehensive income, amortized cost investments or at fair value through profit or loss.

The value of marketable securities is stated based on the classification as follows:

1. Amortized cost marketable securities are carried at amortized cost using the effective interest rate method.
2. Marketable securities classified as held-for-trading and designated at fair value through profit or loss on initial recognition are stated at fair value. Gains and losses from changes in fair value are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

i. Surat-surat berharga (lanjutan)

3. Surat-surat berharga yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan surat-surat berharga tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

j. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) dan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*) disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak surat berharga tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar harga beli ditambah dengan pendapatan bunga yang sudah diakui tapi belum diterima, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

Pada pengukuran awal, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

i. Marketable securities (continued)

3. Marketable securities classified as fair value through other comprehensive income investments are stated at fair value. Interest income is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains or losses on available-for-sale marketable securities are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Other fair value changes are recognized directly in equity until the marketable securities are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in equity are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

j. Marketable securities sold under repurchased agreement (repo) and marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo)

Marketable securities sold under repurchased agreements (*repo*) are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price less the difference between the selling price and agreed repurchase price. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortised using effective interest method as interest expense over the period commencing from the selling date to the repurchase date

Marketable securities sold under repurchased agreement are classified as amortized cost.

Marketable securities purchased under resale agreements are presented as an asset in the statement of financial position at the purchase price added with interest income recognised but not yet received, less allowance for impairment losses, where appropriate.

Marketable securities purchased under resale agreement (*reverse repo*) are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs.

Marketable securities purchased under resale agreement (*reverse repo*) are classified as amortized cost.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

k. Tagihan lainnya

Tagihan lainnya terdiri dari tagihan transfer dan ATM antar bank. Akun ini diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

l. Kredit yang diberikan dan piutang syariah

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Penerusan kredit yang diberikan dinyatakan sebesar pokok kredit yang diberikan.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam pengakuan kredit yang diberikan meliputi biaya provisi dan komisi.

Kredit yang diberikan termasuk piutang syariah, pendanaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta piutang *qardh*.

Piutang syariah merupakan hasil dari transaksi jual beli berdasarkan perjanjian *murabahah*.

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dengan harga ditentukan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Bank sebagai penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (debitur). Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan "margin yang ditangguhkan" yang belum direalisasikan dan penyisihan kerugian.

Mudharabah adalah kontrak kerjasama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan manajer pendanaan (*mudharib*) berdasarkan rasio pendapatan atau keuntungan dan kerugian yang ditentukan sebelumnya. Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan pendapatan dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Other receivables

Other receivables consist of transfer receivable and inter-banks ATM. This account is classified as amortized cost.

l. Loans and sharia receivables

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are attributable to obtaining the financial asset, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method, net of allowance for impairment losses.

Loans are classified as amortized cost.

Channeling loans are stated at the principal amount.

Attributable costs to the recognition of loans comprises of provision and commissions.

Loans may include sharia receivables, *mudharabah* and *musyarakah* financing and *qardh* receivable.

Sharia receivables result from sale and purchase transactions based on *murabahah* agreements.

Murabahah is an agreement to buy and sell certain products at acquisition cost plus a certain margin to be agreed by both the buyer and seller and the Bank as the seller is required to disclose the acquisition cost to the buyer. *Murabahah* receivables are stated at the amount of receivables less unrealized deferred margin and allowance for losses.

Mudharabah is a business cooperation contract between the owner of the funds (*shahibul maal*) and fund managers (*mudharib*) based on the ratio of income or gains and losses are predetermined. *Murabahah* receivables are initially measured at fair value is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Transaction costs that are directly attributable and an income and additional costs to acquire the financial asset is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**l. Kredit yang diberikan dan piutang syariah
(lanjutan)**

Musarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal.

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan liabilitas pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukkan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukkan dengan mendebebat cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukkan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan, jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), kredit yang diberikan, tagihan lainnya dan komitmen dan kontinjensi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

l. Loans and sharia receivables (continued)

Musarakah is an agreement between the investors (*musarakah partners*) to enter into a joint-venture in the form of a partnership with revenue or profit and loss sharing based on an agreement or capital contribution proportion.

Qardh is a loan/borrowing funds without any agreed consideration wherein the borrower has the obligation to return the principal of the loan at lump sum or on installment over a certain period.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value of the loan at the time of restructuring or net present value of the total future cash receipts after restructuring. Losses arising from any excess of the carrying value of the loan at the time of restructuring over the net present value of the total future cash receipts after restructuring are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Thereafter, all cash receipt under the new terms shall be accounted for as the recovery of principal and interest income. In accordance with the restructuring scheme.

Loans are written-off when there are no realistic prospects of future recovery and all collateral have been realized or have been foreclosed. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries of loans written-off are credited to the allowance for impairment losses in the statements of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position date.

m. Identification and measurement of impairment losses

Earning assets consist of current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, marketable securities sold under purchased agreement, marketable securities purchased under resale agreement (*reverse repo*), loans, other receivable and commitments and contingencies.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran kerugian
penurunan nilai (lanjutan)**

Komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, antara lain terdiri dari tetapi tidak terbatas pada penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit* dan fasilitas kredit yang belum digunakan.

Penurunan nilai aset keuangan

PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*12-month ECL*) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan *ECL 12 bulan* adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Bank mengakui cadangan kerugian untuk *ECL* pada instrumen keuangan berikut yang tidak diukur pada *FVTPL*:

- Aset keuangan yang merupakan instrumen utang;
- Kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan; dan
- Komitmen pinjaman diberikan.

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank akan mengukur cadangan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*) instrumen keuangan, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Bank akan mengakui cadangan kerugian sejumlah *lifetime ECL*, kecuali dalam kondisi berikut, dimana cadangan kerugian sejumlah *ECL 12 bulan* yang akan diakui:

- Instrumen keuangan dengan risiko kredit rendah atau ekuivalen dengan tingkat risiko negara Republik Indonesia; dan
- Risiko kredit instrumen keuangan yang belum meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketentuan-ketentuan penurunan nilai menurut PSAK 71 adalah kompleks dan memerlukan pertimbangan-pertimbangan, estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi manajemen, terutama untuk area-area berikut ini:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Identification and measurement of
impairment losses (continued)**

Commitments and contingencies are off-balance sheet transactions which include but are not limited to issued guarantees, letters of credit, standby letters of credit and unused loan facilities.

Impairment of financial assets

PSAK 71 requires a loss allowance to be recognized at an amount equal to either 12-month ECLs or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

The Bank recognizes loss allowances for ECL on the following financial instruments that are not measured at FVTPL:

- *Financial assets that are debt instruments;*
- *Financial guarantee contracts issued; and*
- *Loan commitments issued.*

At each reporting date, the Bank shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime credit losses, if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition. The Bank will recognize loss allowances at an amount equal to lifetime ECLs, except in the following cases, for which the amount recognized will be 12-month ECLs:

- *The financial instruments with low credit risk when its credit risk rating is equivalent to the sovereign risk rating of Republic of Indonesia; and*
- *Financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

The impairment requirements of PSAK 71 are complex and require management judgments, estimates and assumptions, particularly in the following areas:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

m. Identifikasi dan pengukuran kerugian
penurunan nilai (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

- Evaluasi apakah risiko kredit dari suatu instrumen telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal; dan
- Memasukkan informasi yang bersifat *forward looking* dalam pengukuran ECL.

Bank menganggap sekuritas investasi pemerintah dalam mata uang Rupiah dan dana yang ditempatkan pada Bank Indonesia memiliki risiko kredit yang rendah, karena pokok dan bunga investasi pemerintah tersebut dijamin oleh pemerintah dan tidak ada kerugian yang pernah terjadi. Bank tidak menerapkan pengecualian risiko kredit yang rendah untuk instrumen keuangan lainnya.

ECL 12 bulan adalah bagian dari ECL yang dihasilkan dari kejadian gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Instrumen keuangan yang diakui dari ECL 12 bulan disebut sebagai 'instrumen keuangan tahap 1'.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan. Instrumen keuangan yang diakui dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan tetapi tidak mengalami penurunan nilai kredit disebut sebagai 'instrumen keuangan tahap 2'.

Pengukuran ECL

ECL adalah estimasi kemungkinan kerugian kredit berdasarkan probabilitas tertimbang. ECL diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal pelaporan: sebesar nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit pada tanggal pelaporan: sebagai perbedaan antara nilai tercatat bruto dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik: sebagai nilai kini dari selisih antara arus kas kontraktual terutang kepada Bank jika komitmen direalisasi menjadi pinjaman dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank; dan
- Kontrak jaminan keuangan: pembayaran yang diperkirakan akan dibayarkan kepada pemegang kontrak jaminan keuangan dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan oleh Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

m. Identification and measurement of
impairment losses (continued)

Impairment of financial assets (continued)

- Assessing whether the credit risk of an instrument has increased significantly since initial recognition; and
- Incorporating forward-looking information into the measurement of ECLs.

The Bank considers an IDR denominated government investment securities and funds placed with Bank Indonesia are having low credit risk, since the principal and interest of government bond are guaranteed by the government and there is no historical loss experience. The Bank does not apply the low credit risk exemption to any other financial instruments.

12-month ECL is the portion of ECL resulted from default events on a financial instrument that are possible within the 12 months after the reporting date. Financial instruments for which a 12-month ECL is recognized are referred to as 'Stage 1 financial instruments'.

Life-time ECL is the ECL resulted from all possible default events over the expected life of the financial instrument. Financial instruments for which a lifetime ECL is recognized but which are not credit-impaired are referred to as 'Stage 2 financial instruments'.

Measurement of ECL

ECL is a probability-weighted estimate of credit losses. It is measured as follows:

- Financial assets that are not credit-impaired at the reporting date: as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Bank expects to receive);
- Financial assets that are credit-impaired at the reporting date: as the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;
- Undrawn loan commitments: as the present value of the difference between the contractual cash flows that are due to the Bank if the commitment is drawn-down and the cash flows that the Bank expects to receive; and
- Financial guarantee contracts: the expected payments to reimburse the holder less any amounts that the Bank expects to recover.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran kerugian
penurunan nilai (lanjutan)**

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai
kredit

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan dalam bentuk efek utang yang dicatat pada FVOCI mengalami penurunan nilai kredit (disebut sebagai 'aset keuangan tahap 3'). Aset keuangan mengalami penurunan nilai ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada perkiraan arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Berikut adalah rangkuman data yang dapat diobservasi sebagai bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- Kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur atau penerbit;
- Pelanggaran kontrak seperti gagal bayar atau tunggakan;
- Restrukturisasi pinjaman oleh Bank dengan ketentuan yang Bank tidak akan pertimbangkan sebelumnya;
- Kemungkinan bahwa peminjam akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya dari pasar aktif suatu efek dikarenakan kesulitan keuangan.

Pinjaman yang telah dinegosiasikan ulang karena memburuknya kondisi peminjam biasanya dianggap mengalami penurunan nilai kredit, kecuali ada bukti bahwa risiko tidak menerima arus kas kontraktual berkurang secara signifikan dan tidak ada indikator penurunan nilai lainnya. Selain itu, pinjaman ritel yang jatuh tempo selama 90 hari atau lebih dianggap mengalami penurunan nilai kredit meskipun definisi gagal bayar menurut peraturan berbeda.

Penyajian cadangan ECL dalam laporan posisi
keuangan

Cadangan kerugian untuk ECL disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut ini:

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi: sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan: umumnya, sebagai provisi;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Identification and measurement of
impairment losses (continued)**

Credit impaired financial assets

At each reporting date, the Bank assesses whether financial assets carried at amortized cost and debt financial assets carried at FVOCI are credit-impaired (referred to as 'Stage 3 financial assets'). A financial asset is 'credit-impaired' when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:

- Significant financial difficulty of the borrower or issuer;
- A breach of contract such as a default or past due event;
- The restructuring of loan by the Bank on terms that the Bank would not consider otherwise;
- It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or
- The disappearance of an active market for a securities because of financial difficulties.

A loan that has been renegotiated due to a deterioration in the borrower's condition is usually considered to be credit-impaired, unless there is evidences that the risk of not receiving contractual cash flows has reduced significantly and there are no other indicators of impairment. In addition, a retail loan that is overdue for 90 days or more is considered credit-impaired even when the regulatory definition of default is different.

Presentation of allowance for ECL in the
statement of financial position

Loss allowances for ECL are presented in the statement of financial position as follows:

- Financial assets measured at amortized cost: as a deduction from the gross carrying amount of the assets;
- Loan commitments and financial guarantee contracts: generally, as a provision;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran kerugian
penurunan nilai (lanjutan)**

Penyajian cadangan ECL dalam laporan posisi
keuangan (lanjutan)

- Jika instrumen keuangan mencakup komponen yang telah ditarik dan yang belum ditarik, dan Bank tidak dapat mengidentifikasi ECL pada komponen komitmen pinjaman secara terpisah dari komponen yang telah ditarik: Bank menyajikan cadangan kerugian gabungan untuk kedua komponen. Jumlah gabungan cadangan kerugian disajikan sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto komponen yang telah ditarik. Kelebihan dari cadangan kerugian atas nilai tercatat komponen yang telah ditarik disajikan sebagai provisi; dan
- Instrumen utang diukur pada FVOCI: tidak ada cadangan kerugian diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset keuangan karena nilai tercatat dari aset-aset ini adalah pada nilai wajar. Namun, cadangan kerugian kredit diakui sebagai bagian dari cadangan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

Penghapusan

Pinjaman dan efek utang dihapuskan (baik sebagian atau seluruhnya) ketika tidak ada harapan yang wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau sebagian. Hal ini biasanya terjadi ketika Bank memastikan bahwa debitur tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah pinjaman yang akan dihapusbukukan. Penilaian ini dilakukan pada tingkat aset individu.

Pemulihan atas jumlah pinjaman yang sebelumnya dihapusbukukan termasuk dalam 'pendapatan lain-lain' dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang dihapusbukukan masih diusahakan penagihannya sesuai prosedur Bank untuk pemulihan jumlah yang terutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Identification and measurement of
impairment losses (continued)**

Presentation of allowance for ECL in the
statement of financial position (continued)

- Where a financial instrument includes both a drawn and an undrawn component, and the Bank cannot identify the ECL on the loan commitment component separately from those on the drawn component: the Bank presents a combined loss allowance for both components. The combined amount is presented as a deduction from the gross carrying amount of the drawn component. Any excess of the loss allowance over the gross carrying amount of the drawn component is presented as a provision; and
- Debt instruments measured at FVOCI: no loss allowance is recognized as deduction to the carrying amount of the financial asset due to the carrying amount of these assets is their fair value. However, the credit loss allowance is recognized as part of fair value reserve in other comprehensive income.

Write-off

Loans and debt securities are written off (either partially or in full) when there is no reasonable expectation of recovering a financial asset in its entirety or a portion thereof. This is generally the case when the Bank determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. This assessment is carried out at the individual asset level.

Recoveries of amounts previously written-off are included in 'other income' in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Financial assets that are written-off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Bank's procedures for recovery of amounts due.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran kerugian
penurunan nilai (lanjutan)**

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam PSAK 71, ketika menentukan apakah risiko kredit atas suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank akan mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, termasuk informasi kuantitatif dan kualitatif dan analisa berdasarkan pengalaman masa lalu Bank, penilaian kredit dan informasi yang bersifat *forward-looking*.

Analisa apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal instrumen keuangan memerlukan identifikasi tanggal pengakuan awal dari instrumen tersebut.

Bank telah membentuk kerangka yang memasukkan informasi kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan apakah risiko kredit dari suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerangka ini sejalan dengan internal proses manajemen risiko kredit Bank. Kriteria untuk menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan akan bervariasi berdasarkan portofolio.

Sebagai batas, sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAK 71, Bank menentukan kenaikan risiko kredit secara signifikan pada portofolio ritel terjadi pada saat aset telah tertunggak lebih dari 30 hari.

Input yang digunakan untuk pengukuran ECL

Input utama yang digunakan untuk pengukuran ECL adalah variabel berikut:

- *Probability of Default* (PD);
- *Loss Given Default* (LGD); dan
- *Exposure At Default* (EAD).

Peringkat risiko kredit akan menjadi masukan utama untuk menentukan PD atas eksposur. Bank akan menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dan menghasilkan estimasi PD sepanjang sisa umur dari eksposur dan bagaimana perubahan ekspektasi akan terjadi dalam suatu kurun waktu. Analisa ini akan termasuk identifikasi dan kalibrasi atas hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan faktor utama makro ekonomi, sebagai contohnya: tingkat inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga acuan dan tingkat pengangguran.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Identification and measurement of
impairment losses (continued)**

Significant increase in credit risk

Under PSAK 71, when determining whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Bank will consider reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort, including both quantitative and qualitative information and analysis based on the Bank historical experience, credit assessment and forward-looking information.

Assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition of financial instrument requires identifying the date of initial recognition of the instrument.

The Bank has established a framework that incorporates both quantitative and qualitative information to determine whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. The framework aligns with the Bank's internal credit risk management process. The criteria for determining whether credit risk has increased significantly will vary by portfolio.

As a backstop, and as required by PSAK 71, the Bank consider that a significant increase in credit risk of retail portfolio occurs when an asset is more than 30 days past due.

Input into measurement of ECLs

The key inputs into the measurement of ECLs are the following variables:

- *Probability of Default* (PD);
- *Loss Given Default* (LGD); and
- *Exposure At Default* (EAD).

Credit risk grades will be a primary input into the determination of the term structure of PD for exposures. The Bank will employ statistical models to analyze the data collected and generate estimates of the remaining lifetime PD of exposures and how these are expected to change as a result of the passage of time. This analysis will include the identification and calibration of relationships between changes in default rates and changes in key macro-economic factors, for example: CPI inflation, real Gross Domestic Products (GDP) growth, benchmark interest rates and unemployment rate.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran kerugian
penurunan nilai (lanjutan)**

Konsep dari LGD adalah menggabungkan semua pemulihan dari proses penagihan yang telah selesai menjadi tingkat kerugian yang mencerminkan biaya penagihan dan nilai waktu atas tingkat kerugian. Data pemulihan yang dikumpulkan adalah jumlah pemulihan yang diterima oleh Bank dari akun *non-performing loan* yang telah dihapusbukukan atau telah lunas dibayar/diselesaikan.

EAD merupakan eksposur ekspektasian pada saat terjadi gagal bayar. Bank akan mendapatkan nilai EAD berdasarkan eksposur terhadap pihak lawan saat ini dan kemungkinan perubahan terhadap eksposur saat ini berdasarkan kontrak, termasuk amortisasi dan pelunasan dipercepat. EAD dari aset keuangan adalah nilai tercatat bruto saat gagal bayar. Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, nilai EAD akan mempertimbangkan jumlah yang telah ditarik, dan potensial jumlah yang akan ditarik di masa depan atau dibayarkan sesuai dengan kontrak.

Penurunan nilai atas aset non-produktif

Penyesuaian atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dicatat dalam periode dimana penyesuaian tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Termasuk di dalam penyesuaian ini adalah penambahan penyisihan penghapusan aset non-produktif maupun pemulihan aset non-produktif yang telah dihapusbukukan sebelumnya.

Aset non-produktif dihapusbukukan dengan mengurangi penyisihan penghapusan yang bersangkutan apabila menurut manajemen aset tersebut tidak mungkin dipulihkan lagi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Identification and measurement of
impairment losses (continued)**

The concept of LGD is incorporating all recoveries from a completed collection process into loss rate which would reflect the collection cost and the time value on loss rate. The data of recoveries are collected based on recoveries received by the Bank from the non-performing loan account that has been written-off or fully repaid/settled.

EAD represents the expected exposure in the event of a default. The Bank will derive the EAD from the current exposure to the counterparty and potential changes to the current amount allowed under the contract, including amortization, and prepayments. The EAD of a financial asset will be the gross carrying amount at default. For lending commitments and financial guarantees, the EAD will consider the amount drawn, as well as potential future amounts that may be drawn or repaid under the contract.

Impairment of non-productive assets

Adjustments to the allowance for losses on non-productive assets are reported in the year that such adjustments become known or can be reasonably estimated. These adjustments include additional allowance for losses as well as recoveries of previously written-off non-productive assets.

Non-productive assets are written-off against the respective allowance for losses when management believes that the recoverability of those assets is unlikely.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai
(lanjutan)**

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset
non-produktif - produk perbankan Syariah

Unit Usaha Syariah membentuk penyisihan kerugian atas aset produktif dan aset non-produktif berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas aset produktif dan aset non-produktif tersebut pada tiap akhir tahun, evaluasi manajemen atas prospek usaha, kinerja keuangan dan kemampuan membayar setiap debitur. Serta mempertimbangkan juga hal-hal lain seperti klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aset produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank (*BI checking*) dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai kolektif atas piutang dan pembiayaan yang diberikan sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013, PSAK 102 (revisi 2013) dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-159/PB.13/2014 tertanggal 3 Desember 2014, perihal tanggapan atas usulan ASBISINDO, untuk penerapan pertama kali PSAK 102 (revisi 2013) dan PAPS 2013. Bank menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam evaluasi penurunan nilai terhadap piutang murabahah dilakukan secara periodik pada setiap tanggal laporan keuangan, untuk memastikan metodologi dan asumsi yang digunakan dapat diandalkan, serta meminimalkan perbedaan antara estimasi jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktual.

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Piutang murabahah yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (*discounted value*) dan bukan berdasarkan nilai buku, karena tidak akan dapat diperoleh kembali seluruh jumlah piutang murabahah yang telah diberikan kepada debitur. Jumlah yang didiskonto (*discounted value*) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan margin) yang didiskonto menggunakan margin efektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Identification and measurement of
impairment (continued)**

Allowance for possible losses of earning
assets and non-earning assets - Sharia
banking product

The Sharia Business Unit has provided the allowance for possible losses on earning assets and non-earning assets based on management's review of the quality of these earning assets and non-earning assets at the end of each year, and management evaluation of every debtor's business prospect, financial performance and repayment ability. Moreover, the allowance also considers other things such as classification based on Bank Indonesia audit results, classification determined by either commercial banks on earning assets provided by more than one bank (*BI checking*) and availability of debtor's audited financial statements.

For the purpose of evaluating the collective impairment on receivables and financing, as required by Bank Indonesia based on Circular Letter Bank Indonesia No.15/26/DPbS dated July 10, 2013, PSAK 102 (revised 2013) and Financial Services Authority's letter No.S-159/PB.13/2014 dated December 3, 2014, concerning the respond of ASBISINDO's proposal, in adopting of PSAK 102 (revised 2013) and PAPS 2013. The Bank applies the transition rule for collective impairment with the calculation based on the applicable Bank Indonesia's regulation on the Quality Rating of assets of Commercial Bank which conduct Business Based on Sharia Principles.

The evaluation of impairment of murabahah receivables is done periodically on every financial statement date, to ensure methodology and assumptions are reliable, and to reduce difference between estimated losses amount and actual losses amount.

Allowance for impairment losses is calculated individually by using discounted cash flows method. Murabahah receivables that has been impaired is recognized based on amount that are discounted (*discounted value*) and not based on net book value, because the amount of murabahah receivables that had been given to debtors are unable to be fully recovered. The amount of discounted value is obtained by estimating the future cash flows (includes payment of principles and margin) that is discounted at effective margin.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

m. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai
(lanjutan)

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah (lanjutan)

Sedangkan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian yang lalu (*historical loss experience*). *Historical loss experience* disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini.

Bank menggunakan *roll rate analysis method* untuk menilai penyisihan kerugian penurunan nilai aset. Bank menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun dalam perhitungan *Probability of Default (PD)* dan menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun untuk *Loss Given Default (LGD)*.

Pengelompokan karakteristik risiko pembiayaan digolongkan berdasarkan *Bank Wide* pembiayaan *murabahah* dan dilakukan evaluasi (*loan review*) setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dalam menentukan penyisihan kerugian (selain piutang *murabahah*) dan peringkat kualitas aset, Unit Usaha Syariah menerapkan PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mana dalam pasal-pasal tertentu telah diubah dengan PBI No.9/9/2007 tanggal 18 November 2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 serta PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan OJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 Nopember 2014 dan Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

m. Identification and measurement of
impairment (continued)

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product (continued)

Allowance for impairment losses on financial assets are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the past effects of conditions in the historical period that no longer valid.

The Bank uses roll rate analysis method to assess the allowance for impairment losses. The Bank uses historical data in the 3 (three) years in calculating the Probability of Default (PD) and also using those 3 (three) years of historical data to compute for the Loss Given Default (LGD).

*The classification characteristics of risk loan is classified based on Bank Wide *murabahah* financing and is evaluated every 1 (one) year.*

*In determining the allowance for losses (except *murabahah* receivables) and asset quality rating, the Sharia Business Unit applies PBI No.8/21/PBI/2006 dated October 5, 2006 wherein certain articles have been amended by PBI No.9/9/2007 dated November 18, 2007 and PBI No.10/24/PBI/2008 dated October 16, 2008 and No.13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011 regarding Asset Quality Rating for Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia Principles for determination of impairment losses.*

Financial Services Authority (OJK) published OJK regulation No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 and OJK Circular Letter No.8/SEOJK.03/2015 dated March 10, 2015 concerning Asset Quality Rating for Islamic Banks and Business Unit Sharia.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai
(lanjutan)**

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah (lanjutan)

Penyisihan kerugian minimum atas aset produktif adalah sebagai berikut:

**Persentase minimum penyisihan kerugian/
Minimum percentage of allowance for impairment losses**

Lancar *)	Minimum 1%
Dalam perhatian khusus	Minimum 5%
Kurang lancar	Minimum 15%
Diragukan	Minimum 50%
Macet	100%

*) di luar Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah aset produktif dengan agunan tunai.

Penyisihan khusus terhadap kredit bermasalah dihitung berdasarkan kemampuan debitur dalam membayar utang. Penyisihan khusus dibentuk ketika timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam membayar dan menurut pertimbangan manajemen, estimasi jumlah yang akan diperoleh kembali dari debitur berada di bawah jumlah pokok dan bunga kredit yang belum terbayar.

n. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

o. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Identification and measurement of impairment (continued)

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product (continued)

Minimum allowance for possible losses on earning assets is as follows:

Current *)
Special mention
Sub-standard
Doubtful
Loss

*) excluding Deposit Facilities of Bank Indonesia Sharia, Certificates of Bank Indonesia Sharia and marketable securities sharia and earning assets secured by cash collateral.

Specific provisions for non-performing loans were calculated based on the borrower's debt servicing capacity. Specific provisions were made as soon as the debt servicing of the loan is questionable and management considers that the estimated recovery from the borrower was likely to fall short from the amount of principal and interest outstanding.

n. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the beneficial periods using the straight-line method.

o. Fixed assets

Fixed assets, except land, are recorded at cost less accumulated depreciation. Such cost includes the cost of replacing part of fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap kecuali tanah disusutkan dengan menggunakan metode dan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Jenis/ Classification	Metode/ Method	Taksiran masa manfaat/ Estimated useful lives Tahun/Years	Tarif penyusutan/ Depreciation rate
Bangunan/ Buildings	Bangunan/ <i>Buildings</i>	Garis lurus/ <i>Straight-line</i>	20	5%
Golongan I/ <i>Class I</i>	Peralatan kantor dan kendaraan/ <i>Office equipment and vehicles</i>	Saldo menurun ganda/ <i>Double declining balance</i>	4	50%
Golongan II/ <i>Class II</i>	Peralatan kantor dan kendaraan/ <i>Office equipment and vehicles</i>	Saldo menurun ganda/ <i>Double declining balance</i>	8	25%

Peralatan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Tanah awalnya dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 14).

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

o. Fixed assets (continued)

Fixed assets, except land are depreciated using the methods and over their estimated useful lives of fixed assets as follows:

	Taksiran masa manfaat/ Estimated useful lives Tahun/Years	Tarif penyusutan/ Depreciation rate
Bangunan/ Buildings	20	5%
Golongan I/ <i>Class I</i>	4	50%
Golongan II/ <i>Class II</i>	8	25%

Office equipment consists of furniture and fixtures, installation, computer software and hardware, communication and other office equipment.

Land initially stated at cost and is not depreciated. After initial recognition, land is measured at fair value on the date of the revaluation less any accumulated impairment losses after the date of revaluation. Assessment of the land is done by assessors who have professional qualifications, and are conducted regularly to ensure that the carrying amount of land does not differ materially from the amount determined using fair value at the end of the reporting period (Note 14).

The increase in the carrying amount arising from the revaluation is recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss up to the amount of impairment of the similar assets due to revaluation that was done before in profit or loss. The decrease in the carrying amount arising from the revaluation is recognized in profit or loss.

Carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap dievaluasi kemungkinan penurunan nilainya jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya tidak dapat seluruhnya dipulihkan.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap pada saat pekerjaan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan.

Semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

p. Sewa

Bank mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee* dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya.

Bank lebih banyak bertindak sebagai *lessee*, dengan demikian:

- (i) Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini pembayaran tersebut lebih rendah dari nilai wajarnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Fixed assets (continued)

Fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate. When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalized as part of the replacement cost of the asset's carrying amount, if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in profit or loss upon occurrence.

Construction-in-progress is stated at cost. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

All costs and expenses incurred in connection with the acquisition of land right, recognized as the acquisition cost of land right. The legal cost occurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

p. Lease

The Bank classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee and the substance of the transaction rather than the form of the contract.

The Bank is mostly acting as a lessee, therefore:

- (i) *A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Such leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased assets or, if lower, at the present value of minimum lease payments.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa minimum dialokasikan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung ke operasi tahun berjalan.

Jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewaan yang dikapitalisasi disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewanya.

- (ii) Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

q. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera dinyatakan sebesar liabilitas Bank dan diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi.

r. Simpanan dari nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam akun ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Giro merupakan simpanan dari nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan dari nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui *counter* dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

p. Lease (continued)

Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of liability. Finance charges are charged directly to the profit or loss.

Capitalized leased assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset or the lease term, if there is no reasonable certainty that the Bank will obtain ownership by the end of the lease term.

- (ii) Lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Accordingly, the related lease payments are recognized in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.*

q. Obligations due immediately

Obligations due immediately are recorded at the time the obligations occurred or on receipt of transfer orders from customers or other banks. Obligations due immediately are stated at the amount payable by the Bank measured at their amortized cost.

r. Deposits from customers

Deposits from customers are the funds placed by customers (excluding banks) with the Bank based on fund deposit agreements. Included in this account are current accounts, saving accounts, time deposits and other forms which are similar.

Current accounts represent customers' funds which can be used as payment instruments, and which can be withdrawn by the depositors at any time through check writing, or transfers between accounts using bilyet giro and other orders of payment or transfer.

Savings deposits represent deposits of customers that may only be withdrawn over the counter and via Automatic Teller Machine card (ATM), or funds transfers when certain agreed conditions are met, but which may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Simpanan dari nasabah (lanjutan)

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Deposito *on call* merupakan deposito dengan jangka waktu harian dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Simpanan dari nasabah berdasarkan prinsip syariah terdiri dari:

- a. Simpanan syariah berupa giro *wadiah yad-adhamanah*, yakni titipan dana dalam bentuk giro yang akan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank; dan
- b. Investasi tidak terikat syariah, berupa:
 - i. Tabungan *mudharabah mutlaqah*, yaitu tabungan tidak terikat, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (*nisbah*) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank dan nasabah; dan
 - ii. Deposito *mudharabah mutlaqah*, yaitu deposito tidak terikat sebagai investasi berjangka, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (*nisbah*) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank dan nasabah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Deposits from customers (continued)

Time deposits represent deposits from customers with the Bank that may only be withdrawn at specific maturities in accordance with the agreements between the depositor and the Bank.

Deposits on call represent deposits with daily maturity and could be withdrawn at any time.

Deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for deposits under sharia principles that are stated as the Bank's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

Deposits from customers under sharia principles as follows:

- a. Sharia deposits in the form of *wadiah yad-adhamanah*, a current account whereby the customers may receive bonus income in accordance with the Bank's policy; and
- b. Sharia non-binding investments in the form of:
 - i. *Mudharabah mutlaqah* savings are non-binding saving investments on which the customers are entitled to receive a share of the Bank's Sharia Unit's income (*nisbah*) in return for the usage of the funds in accordance with the defined terms; and
 - ii. *Mudharabah mutlaqah* deposits are non-binding investments in the form of time deposits on which the customers are entitled to receive a share of the Bank's Sharia Unit's income (*nisbah*) for the usage of the funds in accordance with the pre-defined terms.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito berjangka *mudharabah*.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

t. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali yang disepakati diperlakukan sebagai beban bunga dibayar dimuka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak surat berharga tersebut dijual hingga dibeli kembali.

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of current accounts, savings, time deposits, wadiah current accounts, mudharabah savings and time deposits.

Deposits from other banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

t. Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement

Securities sold under repurchase agreement are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price net of the the unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the agreed repurchase price is treated as prepaid interest and recognized as interest expense over the period, commencing from the selling to the purchase date.

Securities sold under repurchase agreement are classified as financial liabilities at amortized.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

v. Pendapatan dan beban bunga

Konvensional

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Borrowings

Borrowings are funds received from Bank Indonesia or other parties with payment obligation based on borrowings agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs are an integral part of the effective interest rate method.

v. Interest income and expenses

Conventional

Interest income and expenses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation reflects all commissions, provisions, and other forms that accepted by the parties in the contract which are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums and discounts.

If financial assets or similar financial asset groups have been impaired as a consequence of a loss on impairment, then the interest income subsequently received is recognized based on the interest rate used for discounting future cash flows in calculating the loss on impairment.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

v. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Konvensional (lanjutan)

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Syariah

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari *murabahah*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan pendapatan lainnya.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (*cash basis*). Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

Margin dan bagi hasil diakui secara akrual, kecuali pendapatan margin dan bagi hasil atas kredit yang diberikan dan aset produktif lainnya yang diklasifikasi sebagai *non-performing*, yang diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pendapatan margin dan bagi hasil yang telah diakui tetapi belum tertagih dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*, dan selanjutnya dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dalam rekening administratif dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima tunai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

v. Interest income and expenses (continued)

Conventional (continued)

Loans where the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to the timely collection, are generally classified as impaired loans.

Sharia

The main operating income consists of income from murabahah transactions, income from profit sharing of mudharabah and musyarakah financing and others.

Income from murabahah receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Profit sharing from mudharabah and musyarakah financing is recognized upon collection (cash basis). Other main operating income consists of income derived from placements with other sharia banks. Other main operating income is recognized upon collection.

Margin and profit sharing are recognized on an accrual basis, except for margin and profit sharing income on loans and other earning assets classified as non-performing, which is recognized only when such interest is received in cash. Margin and profit sharing income recognized or recorded but not yet received, is reversed when the loans are classified as non-performing, and the interest amounts are recorded as contingent receivables in the administrative accounts and such interest is recognized as income on a cash received basis.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

w. Pendapatan - provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga. Untuk pembiayaan syariah, provisi dan komisi diakui selama jangka waktu akad dengan metode garis lurus.

Provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan atau jangka waktu perkreditan, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

x. Pajak penghasilan badan

Perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sesuai dengan PSAK 46 (revisi 2014), "Pajak Penghasilan".

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Bank menerapkan metode liabilitas untuk menentukan pajak penghasilannya. Berdasarkan metode liabilitas, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pelaporan komersial dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini mensyaratkan pengakuan manfaat pajak di masa mendatang, contoh: saldo rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang terdapat kemungkinan besar realisasi manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif atau peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

w. Revenue - commissions and fees

Significant fees and commission income directly related to lending activities, or fees and commission income which relate to a specific period, are amortized over the term of the underlying contract using the effective interest rate. Unamortized fees and commission income relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Other fees and commission income are recognized at the transaction date.

Fees and commission income related to lending activities are recognized as part of interest income. For sharia financing, fees and commissions are recognized over the term of the contract with the straight-line method.

Other commissions and fees not related to lending activities or loan periods, or not material are recognized as revenues and expenses at the time the transactions occur.

x. Corporate income tax

Accounting treatment for income tax is accordance with PSAK 46 (revised 2014), "Income Tax".

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the prevailing tax rates or substantively enacted at the reporting date.

The Bank applies the liability method to determine its income tax expense. Under the liability method, deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as the carryforward of unused tax losses, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

x. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat saat surat ketetapan pajak diterima, atau jika Bank mengajukan keberatan, saat putusan banding telah diterbitkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar laba fiskal tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

y. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

z. Program imbalan kerja

Bank menerapkan PSAK 24 (revisi 2013), "Imbalan Kerja", efektif sejak 1 Januari 2015, menggantikan PSAK 24 (revisi 2010): "Imbalan Kerja". Dengan diterapkan PSAK 24 (revisi 2013), maka Bank menghentikan penggunaan pendekatan koridor dalam perhitungan keuntungan dan kerugian aktuarial di periode pelaporan pada penghasilan komprehensif lain.

Program imbalan pasti

Bank mengakui penyisihan imbalan masa kerja berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UU No. 13/2003"). Penyisihan untuk imbalan masa kerja diukur berdasarkan laporan aktuarial. Bank menggunakan metode penilaian aktuarial *projected unit credit* untuk menentukan nilai kini dari imbalan, biaya jasa kini dan biaya jasa lalu. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui untuk setiap program pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (sebelum dikurangi aset program) pada tanggal tersebut atau 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban berdasarkan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

x. Corporate income tax (continued)

Adjustments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed by the Bank, when the result of the appeal is determined.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

y. Basic earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing income for the year by the weighted average number of shares outstanding during the year.

z. Employee benefit plan

The Bank implement PSAK 24 (revised 2013), "Employee benefit", effective January 1, 2015, change of PSAK 24 (revised 2010): "Employee Benefit". The applied PSAK 24 (revised 2013), Bank which eliminates corridor approach in calculation actuarial gain and loss in reporting period other comprehensive income.

Defined benefits plans

The Bank recognizes a provision for employee service entitlements in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 ("Labor Law No. 13/2003"). The provision for employee service entitlements is estimated on the basis of actuarial reports. The Bank uses the projected unit credit method to determine the present value of benefits, current service cost and past service cost. Actuarial gains and losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses at the end of the previous reporting year exceed the greater of 10% of the higher of the present value of the defined benefits obligation (before deducting plan assets) or the fair value of plan assets at that date. Such actuarial gains or losses are recognized as income or expense on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

z. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti (lanjutan)

Biaya jasa lalu yang terjadi ketika pengenalan program imbalan pasti atau perubahan imbalan terutang pada program yang ada diamortisasi selama periode sampai dengan imbalan tersebut menjadi hak pekerja atau *vested*.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun manfaat pasti

Pada tahun 2017, Bank melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.056/096/KEP/DIR/SK tanggal 22 Mei 2017. Peraturan Dana Pensiun tersebut telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-56/NB.1/2017 tanggal 8 Nopember 2017. Peraturan Dana Pensiun tersebut merubah Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.054/118/KEP/DIR/SDM tanggal 22 Juni 2016, yang telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-70/NB.1/2016 tanggal 11 Nopember 2016. Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk pegawai yang telah terdaftar di Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk serta telah diangkat menjadi pegawai tetap sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012. Kontribusi pegawai sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun merupakan kontribusi Bank.

Program pensiun iuran pasti

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.050/067/KEP/DIR/SDM tanggal 20 April 2012, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 23 April 2012 tentang pengelolaan program pensiun iuran pasti bagi pegawai Bank.

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu dari gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

z. Employee benefit plan (continued)

Defined benefits plans (continued)

Past-service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined benefit pension plan

In 2017, the Bank has modified the Pension Fund Policy in accordance with the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.056/096/KEP/DIR/SK dated on May 22, 2017. The Pension Fund Policy was approved by the decree of Indonesia Financial Services Authority No.KEP-56/NB.1/2017 dated on November 8, 2017. The Policy superseded the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.054/118/KEP/DIR/SDM dated on June 22, 2016, as approved by the decree of Indonesia Financial Services Authority No.KEP-70/NB.1/2016 dated November 11, 2016. The Policy applies to all employees who are registered in Financial Institutions Fund Pension of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and has been appointed as permanent employee of the Bank before and on August 24, 2012. The contribution paid by the employees is 5% of employees' basic pension salaries and the remaining amount is paid by the Bank.

Defined contribution pension plan

In accordance with the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.050/067/KEP/DIR/SDM dated April 20, 2012, the Bank entered into a cooperation agreement with "Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia" dated April 23, 2012 regarding defined contribution pension plan for the Bank's employees.

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

z. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program asuransi tunjangan hari tua

- a. Keputusan Direksi No.KEP.079/BPD/83 tanggal 11 November 1983 dan perubahannya No.KEP.006/BPD/85 tanggal 29 Januari 1985, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 3 November 1993 dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tentang Pengelolaan Program Asuransi Dwiguna Standar US\$. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya bervariasi sesuai dengan jabatan terakhir dari karyawan.

Keputusan Direksi No.046/042.1/KEP/DIR/SDM tanggal 3 Maret 2008, telah diamandemen dengan Keputusan Direksi No.048/068.1/KEP/DIR/SDM tertanggal 3 Mei 2010 yang menyatakan besarnya tunjangan hari tua ditentukan sesuai dengan jabatan dengan besaran dasar uang asuransi antara Rp22,5 sampai dengan Rp200. Premi asuransi masing-masing peserta dibayar dimuka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.

Sesuai dengan Keputusan Direksi No.050/020/ADD/SP/DIR/SDM tanggal 30 Maret 2012 terkait addendum atas perjanjian kerjasama pengelolaan program asuransi tunjangan hari tua dengan Asuransi Jiwasraya bahwa disepakati adanya kenaikan uang asuransi dan premi.

- b. Sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris No.040/090/DK/BPD/02 tanggal 31 Desember 2002, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 31 Desember 2002 dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua.

Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja dan jumlah gaji terakhir. Premi asuransi masing-masing peserta dibayar di muka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

z. Employee benefit plan (continued)

Mutual aid pension insurance plan

- a. Directors' decision No.KEP.079/BPD/83 dated November 11, 1983 and its amendment No.KEP.006/BPD/85 dated January 29, 1985, the Bank provides mutual aid pensions (tunjangan hari tua) in the form of a Mutual Aid Pension Insurance Plan (Program Asuransi Tunjangan Hari Tua) for all employees through a cooperation agreement dated November 3, 1993 with "Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912" for insurance under a program "Asuransi Dwiguna Standar US\$". Based on this program, at the commencement of the pension period, in addition to pension allowances, each employee will also receive a mutual aid pension (tunjangan hari tua) based on the employee's latest position.

Directors' decision No.046/042.1/KEP/DIR/SDM dated March 3, 2008 has been amended with Director's decision No.048/068.1/KEP/DIR/SDM dated May 3, 2010, which stated that the pension allowance was determined based on the employees position with a basic insurance value ranging from Rp22.5 to Rp200. The insurance premiums for employees are paid in advance by the Bank and are amortized over the remaining years of service of employees.

Pursuant with Director's decision No.050/020/ADD/SP/DIR/SDM dated March 30, 2012 about added for agreement for management insurance program pension with Insurance Jiwasraya (Corporate) was acceptable increase premiums insurance.

- b. Pursuant to the Board of Commissioners' decision No.040/090/DK/BPD/02 dated December 30, 2002, the Bank also provides mutual aid pensions (tunjangan hari tua), through management of a Mutual Aid Pension Insurance Plan (Program Asuransi Tunjangan Hari Tua) for all employees under a cooperation agreement, dated December 31, 2002 with PT Asuransi Jiwasraya (Persero) regarding Management of a Mutual Aid Pension Insurance Plan.

Based on this plan, at the commencement of the pension period, in addition to a pension allowance, employees will also receive mutual aid pensions (tunjangan hari tua) equal to the number of years of service multiplied by the employee's latest monthly salary. The insurance premiums for employees are paid in advance by the Bank and are amortized over the remaining years of service of employees.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

z. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasca kerja lainnya dan jangka panjang lainnya

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya, meliputi uang duka bagi pegawai yang meninggal dunia dan penghargaan masa kerja.

Liabilitas dan pendanaan penghargaan masa kerja dan uang duka dihitung aktuaris independen dengan metode *projected unit credit*.

Jasa produksi

Bank juga memberikan jasa produksi tahunan kepada para Komisaris, Direksi dan karyawan dan untuk setiap tahun buku dicadangkan dan diakui sebagai beban pada tahun berjalan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan jumlah jasa produksi yang disetujui dalam RUPS tahun-tahun sebelumnya dan kemudian diusulkan untuk disetujui/disahkan dalam RUPS yang akan datang. Jika terdapat selisih antara jumlah jasa produksi yang dicadangkan dengan jumlah yang disahkan oleh RUPS, maka selisih tersebut dibebankan/dikreditkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai penambah atau pengurang cadangan jasa produksi.

Program penghargaan akhir masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Bank memberikan penghargaan akhir masa jabatan untuk Komisaris dan Direksi melalui program asuransi yang jumlahnya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi No.046/04/SK/DK/BPD/2008, tanggal 30 April 2008 yang mengacu pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.55, tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya, akta RUPS No.28 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya dan RUPS No.26 tanggal 14 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H., di Surabaya.

Premi yang dibayar dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama masa jabatannya secara proporsional.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

z. Employee benefit plan (continued)

Other post employee benefits program and long-term employee benefits program

The Bank also provides post benefits program and long term benefit plan that includes death benefits to employees who has passed away and gratuity.

Liabilities and employees gratuity funding is calculated by an independent actuary in projected unit credit method.

Bonuses

The Bank also provides annual bonuses for Commissioners, Directors and employees. These costs are recognized as current year's expenses and the amount is determined based on the bonuses authorized during Shareholders' General Meetings (RUPS) in the prior year. Such bonuses are subsequently proposed for approval by the Shareholders in the following Shareholders' General Meeting (RUPS). Any difference between the amount accrued and the amount approved by the RUPS is charged/credited to statement of profit or loss and other comprehensive income as an addition to or deduction of the provision for bonuses.

End of service awards program for the Boards of Commissioners and Directors

The Bank provides end of service awards program for Commissioners and Directors through an insurance program, which amount is calculated proportionally during the period of service in accordance with a Decision Letter of the Bank's Boards of Commissioners and Directors No.046/04/SK/DK/BPD/2008, dated April 30, 2008 referred to the Minutes of Shareholders' Meeting No. 55, dated April 17, 2008 prepared by Untung Darnosoewirjo, S.H., public notary in Surabaya, Minutes of Shareholders' Meeting No.28, dated May 19, 2009 prepared by Untung Darnosoewirjo, S.H., public notary in Surabaya, and Minutes of Shareholders' Meeting No.26, dated April 14, 2010 prepared by Wachid Hasyim, S.H., public notary in Surabaya.

Premiums paid are charged proportionally to statement of profit or loss and other comprehensive income over the service period.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

aa. Biaya emisi saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahan Modal Disetor - Neto" sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan.

ab. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Bank diakui sebagai sebuah liabilitas dalam laporan keuangan Bank pada tahun ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Bank.

ac. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

ad. Liabilitas dan aset kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadi kecil. Aset kontinjensi tidak diakui namun diungkapkan dalam laporan keuangan ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

ae. Informasi segmen

Bank menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan oleh bagian akuntansi kepada pengambil keputusan operasional.

Bank mengidentifikasi segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

aa. Shares issuance costs

The cost related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Other Paid-In Capital - Net" account, under Equity section in the statements of financial position.

ab. Dividend

Dividend distribution to the Bank's Shareholders is recognized as a liability in the Bank financial statements in the year in which the dividends are approved by the Bank's shareholders.

ac. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and reliable estimate can be made of the amount of obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

ad. Contingent liabilities and assets

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statement when an inflow of economic benefits are probable.

ae. Segment information

The Bank determines and presents operating segments based on the information that is internally provided by accounting department to the operating decision maker.

The Bank defines an operating segment as a component of an entity:

- a. *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

ae. Informasi segmen (lanjutan)

b. hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis Bank adalah Jawa Timur dan selain Jawa Timur.

af. Peristiwa setelah periode pelaporan

Setiap peristiwa setelah akhir tahun yang menyebabkan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank (*adjusting event*) akan disesuaikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun yang bukan merupakan *adjusting events*, jika ada, akan diungkapkan ketika memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ae. Segment information (continued)

b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and

c. for which discrete financial information is available.

Bank discloses its operating segments based on business segments that consist of banking conventional and sharia.

A geographical segment is engaged in providing services within a particular economic environment that is subject to risks and returns that are different from those of segments operating in other economic environments. The Bank's geographical segments are East Java and other than East Java.

af. Events after the reporting period

Any post-year-end event that provides additional information about the Bank's financial position (*adjusting event*) is reflected in the financial statements. Post-year-end events that are not adjusting events, if any, are disclosed when material to the financial statements.

ag. Use of significant accounting estimates and judgments

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan
akuntansi yang penting (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada Catatan 2d.

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2: *input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3: *input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Klasifikasi investasi pada biaya perolehan diamortisasi

Surat berharga dengan klasifikasi pada biaya perolehan diamortisasi membutuhkan *judgment* yang signifikan. Dalam membuat *judgment* ini, Bank mengevaluasi model bisnis dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

ag. Use of significant accounting estimates
and judgments (continued)

Judgments (continued)

Going concern

The Bank's management has assessed the Bank's ability to continue as a going concern and believes that the Bank has the resources to continue its business in the future. In addition to that, management is not aware of any material uncertainty that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on going concern basis.

Classification of financial assets and liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in Note 2d.

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant on the overall fair value measurement:

- Level 1: quoted price (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities that are accessible at the measurement date.
- Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
- Level 3: unobservable inputs for the asset and liability.

Classification to amortized cost investments

The classification under amortized cost securities requires significant judgment. In making this judgment, the Bank evaluates its business model and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan
akuntansi yang penting (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset tersebut dikuotasi atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi adalah apakah aset keuangan yang dikuotasi di pasar aktif tersebut ditentukan berdasarkan apakah harga kuotasi tersedia secara rutin, dan apakah harga tersebut mencerminkan harga aktual yang secara teratur terjadi transaksi pasar secara wajar.

Kontinjensi

Bank saat ini terlibat dalam beberapa kasus hukum. Estimasi atas biaya yang mungkin terjadi atas penyelesaian tuntutan-tuntutan tersebut sudah dikonsultasikan dengan penasihat dari luar yang menangani pembelaan Bank dalam hal-hal tersebut dan berdasarkan analisa dari hasil yang mungkin terjadi. Bank saat ini tidak yakin kalau kasus-kasus ini akan memiliki efek kerugian yang material pada laporan keuangan. Bagaimanapun, ada kemungkinan dari hasil-hasil operasi di masa akan datang akan terpengaruh secara material oleh perubahan dari perkiraan-perkiraan atau dalam keefektifan dari strategi yang berhubungan dengan kasus-kasus ini.

Penilaian mata uang fungsional

Manajemen telah melakukan pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling mewakili dampak ekonomi dari suatu transaksi, kejadian dan kondisi-kondisi yang relevan terhadap entitas. Dalam membuat pertimbangan tersebut, Bank telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. mata uang yang mempengaruhi harga jual atas instrumen keuangan dan jasa-jasa lainnya (biasanya dari mata uang atas harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa yang telah diselesaikan);
2. mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
3. mata uang atas yang biasa diterima dari aktivitas operasi.

Sewa operasi

Bank, sebagai lessee, telah mengadakan perjanjian sewa untuk bangunan yang digunakannya untuk operasi. Bank telah menentukan bahwa semua risiko dan manfaat signifikan dari kepemilikan properti yang disewa dalam sewa operasi tersebut tidak dapat dialihkan kepada Bank.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**ag. Use of significant accounting estimates
and judgments (continued)**

Judgments (continued)

Financial assets not quoted in an active market

The Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regular occurring market transactions on an arm's length basis.

Contingencies

Bank is currently involved in various legal proceedings. The estimate of the probable costs for the resolution of these claims has been developed in consultation with outside counsel handling the Bank's defense on these matters and is based upon an analysis of the potential results. The Bank currently does not believe that these proceedings will have a material adverse effect on the financial statements. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to the proceedings.

Assessment of functional currency

The management has considered to use its judgment to determine the entity's functional currency such that it most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions that are relevant to the entity. In making this judgment, the Bank has considered the following:

1. the currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);
2. the currency in which funds from financing activities are generated; and
3. the currency in which funds from operating are usually retained.

Operating leases

The Bank, as a lessee, has entered into lease on premises used for its operations. The Bank has determined that all significant risk and rewards of ownership of the properties it leases on operating lease are not transferrable to the Bank.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan
akuntansi yang penting (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menimbulkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasinya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi yang ada dan asumsi perkembangan masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada diluar kendali Bank. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan di dalam asumsi-asumsi terkait pada saat terjadinya.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan (Catatan 21f).

Pensiun

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (Catatan 50).

Penurunan nilai surat berharga pada biaya perolehan diamortisasi

Bank mereviu surat berharga yang diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai.

Dalam menentukan pertimbangan, Bank mengevaluasi diantaranya faktor, pergerakan harga pasar historis dan jangka waktu serta lama perpanjangan di mana nilai wajar dari investasi kurang dari biayanya (Catatan 7 dan 39e).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**ag. Use of significant accounting estimates
and judgments (continued)**

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management's judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategies (Note 21f).

Pension

Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate expected rate of returns on investments, future salary increase, mortality rate, resignation rates and others (Note 50).

Impairment of amortized cost marketable securities

Bank reviews marketable securities classified amortized cost at each financial position date to assess whether there is an impairment in value.

In making this judgment, the Bank evaluates, among others factors, historical market price movements and duration and the extent to which the fair value of the investment is less than the cost (Note 7 and 39e).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan
akuntansi yang penting (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai atas aset tidak produktif

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai pada aset non-finansial kapan saja terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat pada suatu aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Bank yang dapat memicu adanya ulasan atas penurunan nilai termasuk sebagai berikut (Catatan 39e):

- Kinerja dibawah rata-rata yang signifikan yang relatif terhadap hasil historis atau proyeksi hasil operasi yang diharapkan; di masa yang akan datang;
- Perubahan yang signifikan dari cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi untuk bisnis secara keseluruhan; dan
- Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

Pengukuran penyisihan kerugian kredit ekspektasian (ECL)

Pengukuran penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI adalah area yang memerlukan penggunaan model yang kompleks dan asumsi signifikan tentang kondisi ekonomi dan perilaku kredit di masa depan (misalnya kemungkinan pelanggan gagal bayar dan kerugian yang timbul). Penjelasan tentang *input*, asumsi dan teknik estimasi yang digunakan dalam mengukur ECL dirinci lebih lanjut di catatan 2c, yang juga menetapkan sensitivitas kunci ECL terhadap perubahan elemen-elemen ini.

Sejumlah pertimbangan signifikan juga diperlukan dalam menerapkan persyaratan akuntansi untuk mengukur ECL, seperti:

- Menentukan kriteria untuk peningkatan risiko kredit yang signifikan;
- Memilih model dan asumsi yang tepat untuk pengukuran ECL;
- Menetapkan jumlah dan bobot relatif dari skenario *forward-looking* untuk setiap jenis produk/pasar dan ECL terkait; dan
- Membentuk kelompok aset keuangan serupa untuk keperluan pengukuran ECL.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**ag. Use of significant accounting estimates
and judgments (continued)**

Estimates and assumptions (continued)

Impairment of non-productive assets

Bank assesses impairment on non productive assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the followings (Note 39e):

- Significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- Significant negative industry or economic trends.

Measurement of expected credit loss (ECL) allowance

The measurement of the expected credit loss allowance for financial assets measured at amortized cost and FVOCI is an area that requires the use of complex models and significant assumptions about future economic conditions and credit behaviour (e.g. the likelihood of customers defaulting and the resulting losses). Explanation of the inputs, assumptions and estimation techniques used in measuring ECL is further detailed in note 2c, which also sets out key sensitivities of the ECL to changes in these elements.

A number of significant judgements are also required in applying the accounting requirements for measuring ECL, such as:

- Determining criteria for significant increase in credit risk;
- Choosing appropriate models and assumptions for the measurement of ECL;
- Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for each type of product/market and the associated ECL; and
- Establishing Banks of similar financial assets for the purposes of measuring ECL.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan
akuntansi yang penting (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pengukuran penyisihan kerugian kredit
ekspektasian (ECL) (lanjutan)

Estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan ECL tersebut di masa mendatang (Catatan 11).

Penyusutan dan estimasi masa manfaat dari aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun ganda untuk selain bangunan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen Bank mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi (Catatan 14).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**ag. Use of significant accounting estimates and
judgments (continued)**

Estimates and assumptions (continued)

Measurement of expected credit loss (ECL)
allowance (continued)

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in the ECL allowance in the future (Note 11).

Depreciation and estimated useful lives of fixed
assets

The costs of fixed asset are depreciated on a straight-line method for buildings and on a double declining balance method for other than buildings over their estimated useful lives. The Bank's management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years.

Changes in the expected level of the usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of the assets, and therefore future depreciation changes could be revised (Note 14).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. KAS

	2019	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Rupiah		2.690.546
Dolar Amerika Serikat	1.202.076	16.689
Dolar Singapura	861.978	8.891
Riyal Saudi Arabia	2.275.511	8.422
Euro	112.705	1.755
Ringgit Malaysia	390.426	1.324
Yen Jepang	7.515.000	960
Dolar Australia	56.280	547
Dolar Hong Kong	142.720	254
Yuan China Renminbi	106.456	212
Poundsterling Inggris Raya	9.640	176
Jumlah mata uang asing		39.230
Jumlah kas		2.729.776

Kas dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing termasuk uang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Cash Recycle Machine (CRM) sejumlah Rp285.855 dan Rp211.670.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

	2019	
	Jumlah nosional mata uang asing / Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Rupiah		5.726.197
Dolar Amerika Serikat	600.000	8.330
Jumlah giro pada Bank Indonesia		5.734.527

3. CASH

	2018		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	
		1.894.326	Rupiah
	471.505	6.780	United States Dollar
	194.108	2.049	Singapore Dollar
	2.301.895	8.825	Saudi Arabian Riyal
	25.219	415	Euro
	224.203	780	Malaysian Ringgit
	1.093.818	143	Japanese Yen
	17.046	173	Australian Dollar
	73.621	135	Hong Kong Dollar
	57.807	121	Chinese Yuan Renminbi
	11.650	213	Great Britain Poundsterling
		19.634	Total foreign currencies
		1.913.960	Total cash

Cash in Rupiah as of December 31, 2019 and 2018, includes funds at Automatic Teller Machines (ATM) and Cash Recycle Machine (CRM) amounting to Rp285,855 and Rp211,670, respectively.

4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	2018		
	Jumlah nosional mata uang asing / Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	
		4.067.310	Rupiah
	600.000	8.628	United States Dollar
		4.075.938	Total current accounts with Bank Indonesia

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Giro pada Bank Indonesia tersebut di atas ditempatkan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) yang diharuskan Bank Indonesia, masing-masing sebesar GWM Harian 6,00% (Rp3.514.774) dan GWM Penyangga Likuiditas Makropudensial (PLM) 4,00% (Rp2.343.183) pada tanggal 31 Desember 2019 dan GWM Harian 6,50% (Rp3.242.123) dan GWM Penyangga Likuiditas Makropudensial (PLM) 4,00% (Rp1.995.152) pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk mata uang asing 8,00% (USD 521.000) (dalam angka penuh) setara dengan Rp7.235.781 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 8,00% (USD 405.000) (dalam angka penuh) setara dengan Rp5.829.614 pada tanggal 31 Desember 2018 dari simpanan nasabah dalam Rupiah dan mata uang asing.

Bank dipersyaratkan untuk memiliki GWM dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum dan syariah, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia.

Rasio GWM Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019
<u>Konvensional</u>	
Giro Wajib Minimum Rupiah	
Harian	9,63%
Penyangga Likuiditas Makropudensial (PLM)	18,75%
Giro Wajib Minimum mata uang asing	
Harian	9,21%
<u>Syariah</u>	
Giro Wajib Minimum Rupiah	
Harian	4,89%

Rasio pada tanggal 31 Desember 2019 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/15/PBI/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No.21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2018 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang "Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

Current accounts with Bank Indonesia are maintained to meet the Minimum Statutory Reserve (GWM) requirements of Bank Indonesia, each Daily GWM 6.00% (Rp3,514,774) and GWM of Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) 4.00% (Rp2,343,183) as of December 31, 2019 and Daily GWM 6.50% (Rp3,242,123) and GWM of Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) 4.00% (Rp1,995,152) as of December 31, 2018, and foreign currency of 8.00% (USD 521,000) (in full amount) equivalent with Rp7,235,781 as of December 31, 2019 and 8.00% (USD 405,000) (in full amount) equivalent with Rp5,829,614 as of December 31, 2018 relating to deposits in Rupiah and foreign currencies, respectively.

The Bank is required to maintain GWM in Rupiah currency in its activities as a commercial and sharia bank, and foreign statutory reserves in its activities in the conduct of foreign currency transactions. These statutory reserves are deposited in the form of current accounts with Bank Indonesia.

The GWM of the Bank as of December 31, 2019 and 2018 was as follows:

	2018	Conventional
		Minimum Statutory Reserves in Rupiah
		Daily
		Buffer of Macroprudential Liquidity
		Minimum Statutory Reserves in foreign exchange
		Daily
		Sharia
		Minimum Statutory Reserves in Rupiah
		Daily

The statutory reserves ratio as of December 31, 2019 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.15/15/PBI/2013 which have been amended with PBI No.20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018 with PADG No.21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019 regarding Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency, for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

The statutory reserves ratio as of December 31, 2018 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018 regarding "Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency, for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units".

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah giro wajib minimum pada Bank Indonesia tersebut telah memadai dan memenuhi syarat.

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari satu bulan (Catatan 40).

4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

Management believes that the amount of minimum legal reserves at Bank Indonesia is adequate and meet the requirements.

The remaining period of current amount with Bank Indonesia is categorized as less than one months (Note 40).

5. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan bank

	2019
Rupiah:	
PT Bank Central Asia Tbk	39.365
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.599
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	535
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	200
Jumlah Rupiah	41.699
Mata uang asing:	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	48.092
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.670
PT Bank Central Asia Tbk	8.179
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.418
DBS Singapore Ltd	1.124
PT Bank ICBC Indonesia	297
Jumlah mata uang asing	69.780
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(25)
Jumlah giro pada bank lain, neto	111.454

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. By bank

	2018
Rupiah:	
PT Bank Central Asia Tbk	24.575
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.568
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	562
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	185
Total Rupiah	26.890
Foreign currencies:	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	49.485
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11.650
PT Bank Central Asia Tbk	6.153
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.829
DBS Singapore Ltd	976
PT Bank ICBC Indonesia	304
Total foreign currencies	70.397
Allowance for impairment losses	(15)
Total current accounts with other banks, net	97.272

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak ada giro pada bank lain yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah.

As of December 31, 2019 and 2018, there was no current accounts with other banks based on sharia banking principles.

b. Berdasarkan mata uang

	2019
Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	
Rupiah	41.699
Dolar Amerika Serikat	4.776.239
Dolar Singapura	108.966
Poundsterling Inggris Raya	42.027
Euro	44.530
Dolar Hongkong	196.823
Yuan China Renminbi	148.880
Yen Jepang	1.899.306
Jumlah mata uang asing	69.780
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(25)
Jumlah giro pada bank lain, neto	111.454

	2018
Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	
Rupiah	26.890
Dolar Amerika Serikat	4.622.319
Dolar Singapura	173.281
Poundsterling Inggris Raya	37.373
Euro	39.197
Dolar Hongkong	79.133
Yuan China Renminbi	145.458
Yen Jepang	2.458.103
Total foreign currencies	70.397
Allowance for impairment losses	(15)
Total current accounts with other banks, net	97.272

Rupiah	
United States Dollar	
Singapore Dollar	
Great Britain Poundsterling	
Euro	
Hongkong Dollar	
Chinese Yuan Renminbi	
Japanese Yen	
Total foreign currencies	
Allowance for impairment losses	
Total current accounts with other banks, net	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)**c. Tingkat suku bunga per tahun:**

	2019
Rupiah	0,09%
Mata uang asing	0,01%

d. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat giro pada bank lain pada pihak berelasi.

e. Berdasarkan kolektibilitas

Giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, digolongkan sebagai lancar. Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan.

f. Penyisihan kerugian penurunan nilai

Jumlah minimum penyisihan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp1.115 dan Rp973 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya giro pada bank lain adalah memadai.

Penyisihan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019
Saldo awal tahun	15
Penyisihan tahun berjalan	10
Saldo akhir tahun	25

g. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 39e.**5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)****c. Interest rates per annum:**

	2018	
Rupiah	0,09%	Rupiah
Foreign currencies	0,02%	Foreign currencies

d. By relationship

As of December 31, 2019 and 2018, the Bank had no current accounts with other banks which are related parties.

e. By collectability

Current accounts with other banks as of December 31, 2019 and 2018 were classified as current. None were blocked or under liens as collateral.

f. Allowance for impairment losses

Minimum allowance for impairment losses for current accounts with other banks required by Bank Indonesia as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp1,115 and Rp973, respectively.

Management believes that the allowance for impairment losses on current accounts with other banks is adequate.

Allowance for impairment losses for current account with other bank as of December 31, 2019 and 2018 as follows:

	2018	
Balance at beginning of year	-	Balance at beginning of year
Provision during the year	15	Provision during the year
Balance at end of year	15	Balance at end of year

g. Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets are disclosed in Note 39e.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN
BANK LAIN**

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	2019	2018
Rupiah:		
Deposito berjangka:		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	800.000	1.050.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	600.000	925.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	500.000	600.000
PT Bank ICBC Indonesia	410.000	-
Lain-lain (Bank Perkreditan Rakyat)	12.000	9.500
	<u>2.322.000</u>	<u>2.584.500</u>
Interbank call money:		
PT Bank Pembangunan Daerah		
Daerah Istimewa Yogyakarta	1.420.000	150.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	425.000	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	360.000	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	350.000	-
PT Bank UOB Indonesia	327.000	-
Bangkok Bank	315.000	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	270.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	250.000	-
PT Bank Sinarmas Tbk	234.000	-
PT Bank DKI	200.000	300.000
PT Bank HSBC Indonesia	200.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah		
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	196.000	250.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	160.000	125.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Riau Kepri	150.000	300.000
PT Bank Chinatrust Indonesia	130.000	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Nusa Tenggara Timur	112.000	50.000
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	100.000	-
PT Bank Commonwealth Indonesia	100.000	-
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	100.000	-
PT Bank Victoria International Tbk	100.000	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Kalimantan Tengah	99.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah		
Maluku dan Maluku Utara	76.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	74.000	50.000
PT Bank Bukopin Tbk	57.000	518.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Sulawesi Tenggara	55.000	50.000
PT Bank Nationalnobu Tbk	50.000	55.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	50.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	35.000	50.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Sulawesi Utara dan Gorontalo	30.000	150.000
PT Bank DBS Indonesia	-	250.000
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	-	250.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Jawa Tengah	-	250.000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	200.000
PT Bank Mega Tbk	-	100.000
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	-	90.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	-	50.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	-	50.000
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	-	50.000
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	-	40.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Jawa Barat dan Banten Tbk	-	10.000
	<u>6.025.000</u>	<u>3.588.000</u>
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)	2.793.000	5.978.100
Term Deposit	850.000	1.200.000
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi	(416)	(1.058)
	<u>3.642.584</u>	<u>7.177.042</u>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.357)	(2.302)
Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.987.227	13.347.240

**6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND
OTHER BANKS**

a. By type and currency

Rupiah:	
Time deposits:	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.050.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	925.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	600.000
PT Bank ICBC Indonesia	-
Others (Rural Bank)	9.500
Interbank call money:	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Daerah Istimewa Yogyakarta	150.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-
PT Bank UOB Indonesia	-
Bangkok Bank	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	-
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	-
PT Bank Sinarmas Tbk	-
PT Bank DKI	300.000
PT Bank HSBC Indonesia	-
PT Bank Pembangunan Daerah	
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	250.000
PT Bank Pembangunan Daerah	
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	125.000
PT Bank Pembangunan Daerah	
Riau Kepri	300.000
PT Bank Chinatrust Indonesia	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah	
Nusa Tenggara Timur	50.000
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	-
PT Bank Commonwealth Indonesia	-
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	-
PT Bank Victoria International Tbk	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah	
Kalimantan Tengah	-
PT Bank Pembangunan Daerah	
Maluku dan Maluku Utara	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	50.000
PT Bank Bukopin Tbk	518.000
PT Bank Pembangunan Daerah	
Sulawesi Tenggara	50.000
PT Bank Nationalnobu Tbk	55.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	50.000
PT Bank Pembangunan Daerah	
Sulawesi Utara dan Gorontalo	150.000
PT Bank DBS Indonesia	250.000
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	250.000
PT Bank Pembangunan Daerah	
Jawa Tengah	250.000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	200.000
PT Bank Mega Tbk	100.000
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	90.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	50.000
PT Bank Pembangunan Daerah	
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	50.000
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	50.000
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	40.000
PT Bank Pembangunan Daerah	
Jawa Barat dan Banten Tbk	10.000
Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI)	5.978.100
Term Deposit	1.200.000
Less: Unamortized interest	(1.058)
Allowance for impairment losses	(2.302)
Total placements with Bank Indonesia and other banks	13.347.240

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp243.000 dan Rp78.100.

b. Berdasarkan jangka waktu

	2019
Kurang dari 1 bulan	10.767.584
1 - 3 bulan	1.110.000
3 - 6 bulan	112.000
	11.989.584

c. Berdasarkan kolektibilitas

Semua penempatan Bank pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 digolongkan lancar.

d. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat penempatan pada pihak berelasi.

e. Tingkat suku bunga per tahun

	2019
Rupiah	12,02%
Mata uang asing	0,75%

f. Penyisihan kerugian penurunan nilai

Jumlah minimum penyisihan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia masing-masing adalah sebesar Rp83.470 dan Rp61.725 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah memadai.

Penyisihan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019
Saldo awal tahun	2.302
Penyisihan tahun berjalan	55
Saldo akhir tahun	2.357

g. Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

h. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 39e.

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

a. By type and currency (continued)

As of December 31, 2019 and 2018, placements with Bank Indonesia and other banks include placements based on sharia banking principles amounting to Rp243,000 and Rp78,100 respectively.

b. By maturity

	2018	
13.349.542		Less than 1 month
-		1 - 3 months
-		3 - 6 months
13.349.542		

c. By collectability

All placements with Bank Indonesia and other banks as of December 31, 2019 and 2018 were classified as current.

d. By relationship

As of December 31, 2019 and 2018, the Bank had no funds placed with related parties.

e. Interest rates per annum

	2018	
8,05%		Rupiah
0,65%		Foreign currencies

f. Allowance for impairment losses

Minimum allowance for impairment losses for placements with other Banks required by Bank Indonesia as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp83,470 and Rp61,725, respectively.

Management believes that the allowance for impairment losses on placements with Bank Indonesia and other banks is adequate.

Allowance for impairment losses for placement with other banks as of December 31, 2019 and 2018 as follows:

	2018	
-		Balance at beginning of year
2.302		Provision during the year
2.302		Balance at end of year

g. Placements with other banks pledged as collateral

There were no placements with other banks pledged as collateral as of December 31, 2019 and 2018.

h. Information with respect to classifications of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 39e.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. SURAT-SURAT BERHARGA**a. Berdasarkan jenis dan mata uang**

	2019		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
Rupiah:			
Biaya perolehan diamortisasi			
Surat Utang Negara			
PBS016	1.474.533	1.474.366	
PBS014	1.247.171	1.233.723	
SR009	311.425	311.562	
SPNS07022020	184.285	183.174	
PBS006	155.000	156.437	
FR0053	120.000	121.913	
SPN12200106	109.671	109.592	
SR011	50.000	50.865	
ORI014	27.000	26.841	
ORI015	20.000	20.313	
FR0034	15.700	16.861	
SPNS04032020	4.888	4.839	
PBS013	-	-	
FR0069	-	-	
SPN12190104	-	-	
SR008	-	-	
SPNS01082019	-	-	
ORI013	-	-	
SPN12190214	-	-	
SPNS08052019	-	-	
Obligasi			
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap VII Tahun 2019 Seri B	100.000	100.000	
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap III Tahun 2018 Seri B	70.000	68.883	
Obligasi Berkelanjutan III SMF Tahap VII Tahun 2017 Seri B	50.000	50.103	
Obligasi Berkelanjutan V SMF Tahap II Tahun 2019 Seri A	50.000	50.000	
Obligasi Berkelanjutan V SMF Tahap I Tahun 2019 Seri A	20.000	20.026	
Obligasi Berkelanjutan III SMF Tahap VI Tahun 2016	5.000	5.072	
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap III Tahun 2018 Seri A	-	-	
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap IV Tahun 2018 Seri A	-	-	
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap V Tahun 2018 Seri A	-	-	
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap VI Tahun 2018 Seri A	-	-	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)			
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II tahun 2019 Seri A	100.000	100.000	
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap III tahun 2019 Seri B	75.000	75.000	
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II tahun 2017 Seri B	50.000	50.166	
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap III tahun 2019 Seri A	25.000	25.000	
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III tahun 2018 Seri A	-	-	
Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 Seri C	-	-	
PT Federal International Finance Tbk			
Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap V Tahun 2019 Seri A	100.000	100.000	
Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap I Tahun 2017 Seri B	61.800	62.059	
Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap II Tahun 2017 Seri B	25.000	25.066	
Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap IV Tahun 2016 Seri B	-	-	
Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap III Tahun 2018 Seri A	-	-	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri B	100.000	100.127	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri A	50.000	50.000	
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri A	10.000	10.062	

7. MARKETABLE SECURITIES**a. By type and currency**

	2018		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
Rupiah:			
Amortized cost			
Government bonds			
PBS016	1.069.533	1.068.924	
PBS014	-	-	
SR009	-	-	
SPNS07022020	-	-	
PBS006	5.000	5.166	
FR0053	-	-	
SPN12200106	-	-	
SR011	-	-	
ORI014	-	-	
ORI015	-	-	
FR0034	-	-	
SPNS04032020	-	-	
PBS013	1.118.691	1.119.708	
FR0069	480.000	481.298	
SPN12190104	302.718	302.590	
SR008	267.000	267.738	
SPNS01082019	135.000	129.712	
ORI013	106.920	107.555	
SPN12190214	65.311	64.866	
SPNS08052019	20.833	20.374	
Bonds			
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap VII Tahun 2019 Seri B	-	-	
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap III Tahun 2018 Seri B	-	-	
Obligasi Berkelanjutan III SMF Tahap VII Tahun 2017 Seri B	-	-	
Obligasi Berkelanjutan V SMF Tahap II Tahun 2019 Seri A	-	-	
Obligasi Berkelanjutan V SMF Tahap I Tahun 2019 Seri A	-	-	
Obligasi Berkelanjutan III SMF Tahap VI Tahun 2016	-	-	
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap III Tahun 2018 Seri A	80.000	80.000	
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap IV Tahun 2018 Seri A	60.000	60.000	
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap V Tahun 2018 Seri A	40.000	40.000	
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap VI Tahun 2018 Seri A	30.000	29.988	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)			
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II tahun 2019 Seri A	-	-	
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap III tahun 2019 Seri B	-	-	
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II tahun 2017 Seri B	-	-	
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap III tahun 2019 Seri A	-	-	
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III tahun 2018 Seri A	50.000	50.000	
Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 Seri C	27.000	27.214	
PT Federal International Finance Tbk			
Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap V Tahun 2019 Seri A	-	-	
Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap I Tahun 2017 Seri B	61.800	62.838	
Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap II Tahun 2017 Seri B	25.000	25.146	
Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap IV Tahun 2016 Seri B	20.000	20.170	
Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap III Tahun 2018 Seri A	125.000	124.851	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri B	100.000	104.249	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri A	-	-	
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri A	-	-	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)**a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)**

	2019		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
Biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)			
PT BFI Finance Indonesia Tbk			
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahun IV Tahun 2018 Seri B		100.000	100.000
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahun II Tahun 2019 Seri A		50.000	50.000
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahun II Tahun 2017 Seri B		10.000	10.008
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahun I Tahun 2018 Seri A		-	-
PT Astra Sedaya Finance			
Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahun II Tahun 2019 Seri A		100.000	100.000
Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahun I Tahun 2018 Seri B		50.000	50.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahun I Tahun 2018 seri A		-	-
PT Pupuk Indonesia (Persero)			
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahun II Tahun 2017 Seri B		50.000	50.119
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahun I Tahun 2017 Seri A		48.100	48.198
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahun II Tahun 2017 Seri A		25.000	25.124
PT Medco Energi Internasional Tbk			
Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahun II Tahun 2018 Seri A		45.000	45.000
Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahun I Tahun 2018 Seri A		37.500	37.500
PT Indosat Tbk			
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahun III Tahun 2018 Seri B		40.000	40.000
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahun I Tahun 2017 Seri B		20.000	20.000
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahun I Tahun 2014 Seri B		-	-
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahun IV Tahun 2016 Seri C		15.000	15.034
Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 Seri A		-	-
PT Bank BCA Finance			
Obligasi Berkelanjutan III BCA Finance Tahun I Tahun 2019 Seri B		75.000	75.000
PT Bank BRI (Persero) Tbk			
Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahun I Tahun 2019 Seri B		66.000	66.000
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk			
Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahun I Tahun 2018 Seri A		57.000	57.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			
Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahun II Tahun 2018 Seri A		50.000	50.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahun II Tahun 2017 Seri D		51.000	49.408
PT Pegadaian (Persero)			
Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahun II Tahun 2018 Seri B		37.000	37.000
Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahun III Tahun 2015 Seri C		10.000	10.027
PT Maybank Indonesia Tbk			
Obligasi Berkelanjutan II Maybank Indonesia Tahun IV Tahun 2019 Seri A		25.000	25.000
Obligasi Berkelanjutan II Maybank Indonesia Tahun III Tahun 2018 Seri A		-	-
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk			
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahun IV Tahun 2018 Seri B		25.000	25.000
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahun V Tahun 2018 Seri A		-	-
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahun IV Tahun 2018 Seri A		-	-
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk			
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahun V Tahun 2019 Seri A		20.000	20.000
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahun III Tahun 2018 Seri A		-	-
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahun III Tahun 2016 Seri B		-	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahun II Tahun 2018 Seri A		-	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahun II Tahun 2019 Seri A		10.000	10.084

7. MARKETABLE SECURITIES (continued)**a. By type and currency (continued)**

	2018		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
Amortized cost (continued)			
PT BFI Finance Indonesia Tbk			
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahun IV Tahun 2018 Seri B		100.000	100.000
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahun II Tahun 2019 Seri A		-	-
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahun II Tahun 2017 Seri B		-	-
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahun I Tahun 2018 Seri A		30.000	29.760
PT Astra Sedaya Finance			
Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahun II Tahun 2019 Seri A		-	-
Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahun I Tahun 2018 Seri B		50.000	50.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahun I Tahun 2018 seri A		31.000	31.000
PT Pupuk Indonesia (Persero)			
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahun II Tahun 2017 Seri B		-	-
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahun I Tahun 2017 Seri A		11.600	11.411
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahun II Tahun 2017 Seri A		-	-
PT Medco Energi Internasional Tbk			
Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahun II Tahun 2018 Seri A		45.000	45.000
Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahun I Tahun 2018 Seri A		37.500	37.500
PT Indosat Tbk			
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahun III Tahun 2018 Seri B		40.000	40.000
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahun I Tahun 2017 Seri B		20.000	20.000
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahun I Tahun 2014 Seri B		61.300	63.305
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahun IV Tahun 2016 Seri C		15.000	15.055
Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 Seri A		20.000	20.138
PT Bank BCA Finance			
Obligasi Berkelanjutan III BCA Finance Tahun I Tahun 2019 Seri B		-	-
PT Bank BRI (Persero) Tbk			
Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahun I Tahun 2019 Seri B		-	-
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk			
Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahun I Tahun 2018 Seri A		57.000	57.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			
Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahun II Tahun 2018 Seri A		50.000	50.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahun II Tahun 2017 Seri D		51.000	45.891
PT Pegadaian (Persero)			
Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahun II Tahun 2018 Seri B		37.000	37.000
Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahun III Tahun 2015 Seri C		10.000	10.105
PT Maybank Indonesia Tbk			
Obligasi Berkelanjutan II Maybank Indonesia Tahun IV Tahun 2019 Seri A		-	-
Obligasi Berkelanjutan II Maybank Indonesia Tahun III Tahun 2018 Seri A		50.000	50.000
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk			
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahun IV Tahun 2018 Seri B		25.000	25.000
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahun V Tahun 2018 Seri A		10.000	9.959
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahun IV Tahun 2018 Seri A		10.000	9.949
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk			
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahun V Tahun 2019 Seri A		-	-
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahun III Tahun 2018 Seri A		69.000	68.898
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahun III Tahun 2016 Seri B		7.800	7.823
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahun II Tahun 2018 Seri A		45.000	45.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahun II Tahun 2019 Seri A		-	-

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

	2019		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
Biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)			
PT Angkasa Pura I (Persero)			
Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri A	3.000		3.060
Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri A	5.000		5.106
PT Bank OCBC NISP Tbk			
Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018 Seri A	-		-
Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018 Seri A	-		-
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII Tahun 2016 Seri B	-		-
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 Seri C	-		-
PT Indomobil Finance Indonesia			
Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Tahap II Tahun 2018 Seri A	-		-
PT Waskita Karya (Persero) Tbk			
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016	-		-
PT Bank CIMB Niaga Tbk			
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018	-		-
PT Intiland Development Tbk			
Obligasi II Intiland Development Tahun 2016 Seri A	-		-
PT XL Axiata Tbk			
Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri A	-		-
PT Jasa Marga (Persero) Tbk			
Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T	-		-
PT Indofood Sukses Makmur Tbk			
Obligasi Berkelanjutan Indofood Sukses Makmur Tahap IV Tahun 2014	-		-
PT Mandiri Tunas Finance			
Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 Seri A	-		-
Sertifikat Bank Indonesia setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp19.682 dan Rp21.521 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	1.370.829		1.351.147
Sertifikat Deposito Bank Indonesia setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp1.670 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	-		-
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	100.000		100.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	100.000		100.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-		-
PT Bank Syariah Bukopin	-		-

7. MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. By type and currency (continued)

	2018		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
Amortized cost (continued)			
PT Angkasa Pura I (Persero)			
Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri A	-		-
Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri A	-		-
PT Bank OCBC NISP Tbk			
Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018 Seri A	70.000		69.851
Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018 Seri A	50.000		50.000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII Tahun 2016 Seri B	145.000		145.303
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 Seri C	10.000		10.129
PT Indomobil Finance Indonesia			
Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Tahap II Tahun 2018 Seri A	100.000		100.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk			
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016	50.000		50.117
PT Bank CIMB Niaga Tbk			
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018	50.000		50.000
PT Intiland Development Tbk			
Obligasi II Intiland Development Tahun 2016 Seri A	30.000		30.000
PT XL Axiata Tbk			
Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri A	29.000		29.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk			
Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T	25.000		25.274
PT Indofood Sukses Makmur Tbk			
Obligasi Berkelanjutan Indofood Sukses Makmur Tahap IV Tahun 2014	25.000		25.249
PT Mandiri Tunas Finance			
Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 Seri A	20.000		20.000
Certificates of Bank Indonesia net of unamortized discount of Rp19,682 and Rp21,521 as of December 31, 2019 and 2018 respectively	458.627		437.106
Certificates of Deposits of Bank Indonesia net of unamortized discount of RpNil and Rp1,670 as of December 31, 2019 and 2018 respectively	469.433		467.763
Interbank Mudharabah Investment Certificate			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	150.000		150.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	100.000		100.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	150.000		150.000
PT Bank Syariah Bukopin	30.000		30.000

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)**a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)**

	2019		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
Biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)			
Negotiable Certificate of Deposit (NCD)			
PT BPD Jateng			
NCD I BPD Jateng Tahun 2019 Seri A		250.000	248.135
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd			
NCD IV MUFG Bank Tahap V Tahun 2019 Seri A		150.000	149.141
NCD IV MUFG Bank Tahap II Tahun 2019 Seri D		20.000	19.850
PT Mandiri Taspen			
NCD II BMTPT Tahun 2019 Seri B		50.000	49.463
PT BPD Kaltim dan Kaltara			
NCD I BPD Kaltim Kaltara Tahun 2019		50.000	49.282
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
NCD BTN Tahap I Tahun 2018 Seri B		-	-
NCD BTN Tahap II Tahun 2018 Seri B		-	-
PT Bank KEB Hana Indonesia			
NCD IV Bank KEB Hana Tahun 2018		-	-
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk			
NCD III Bank Woori Saudara Tahap I Tahun 2018		-	-
PT Bank Mizuho Indonesia			
NCD V Bank Mizuho 2018 Seri B		-	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			
NCD III Bank BJB Tahun 2018 Seri A		-	-
PT Commonwealth Bank Indonesia			
NCD V Commonwealth Tahap I Tahun 2018 Seri B		-	-
PT Bank DBS Indonesia			
NCD IV DBS Tahap I Tahun 2018		-	-
Surat Utang Jangka Menengah			
PT Kimia Farma (Persero) Tbk			
MTN Kimia Farma Tahap II Tahun 2018		80.000	80.000
PT Bank KEB Hana Indonesia			
MTN I Bank KEB Hana Indonesia Tahun 2018 Seri A		50.000	50.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk			
MTN I Telkom Tahun 2018 Seri B		50.000	50.000
PT Bank Danamon			
MTN I PT Bank Danamon Tahun 2019		39.000	39.000
PT Indonesia Infrastructure Finance			
MTN I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2018		-	-
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia			
MTN I PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 2015		25.000	25.000
Reksadana			
PT PNM Investment Management			
RDSPU PNAS		400.000	400.000
RDSPU PNM Falah		100.000	100.000
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri II 2019		99.000	99.000
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018		90.000	90.000
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III 2019		20.000	20.000
Pembiayaan Mikro BUMN 2017		-	-
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi			
RDSPU GemilangKIRANA		400.000	400.000
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi			
RDPU Pool Advista		300.000	300.000
PT Danareksa Investment Management			
RDPU Danareksa Seruni VI		100.000	100.000
PT Avrist Asset Management			
RDSPU Avrist Ada Kas Syariah		100.000	100.000
Surat kredit berdokumen dalam negeri		11.955	11.955
	9.591.857	9.557.693	
Mata uang asing:			
Dolar Amerika Serikat			
Wesel ekspor	13.500	187	187
		187	187
Jumlah biaya perolehan diamortisasi		9.592.044	9.557.880
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			
Surat Utang Negara			
FR0053		10.000	10.340
Kenaikan harga pasar yang belum direalisasi		-	25
Jumlah nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		10.000	10.365
Jumlah biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		9.602.044	9.568.245
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(5.174)
Jumlah surat berharga		9.602.044	9.563.071

Pada tanggal 31 Desember 2019, penyertaan dalam reksadana sejumlah 42 unit dengan nilai Rp5.000 per unit yang jatuh tempo tanggal 27 September 2020, 24 September 2021 dan tanggal 26 Februari 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2018, penyertaan dalam reksadana merupakan reksadana PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sejumlah 20 unit dengan nilai Rp5.000 per unit yang jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2019 dan 18 unit dengan nilai Rp5.000 per unit yang jatuh tempo tanggal 27 September 2020.

7. MARKETABLE SECURITIES (continued)**a. By type and currency (continued)**

	2018		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
Amortized cost (continued)			
Negotiable Certificate of Deposit (NCD)			
PT BPD Jateng			
NCD I BPD Jateng Tahun 2019 Seri A		-	-
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd			
NCD IV MUFG Bank Tahap V Tahun 2019 Seri A		-	-
NCD IV MUFG Bank Tahap II Tahun 2019 Seri D		-	-
PT Mandiri Taspen			
NCD II BMTPT Tahun 2019 Seri B		-	-
PT BPD Kaltim dan Kaltara			
NCD I BPD Kaltim Kaltara Tahun 2019		-	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
NCD BTN Tahap I Tahun 2018 Seri B	50.000	49.262	
NCD BTN Tahap II Tahun 2018 Seri B	50.000	48.055	
PT Bank KEB Hana Indonesia			
NCD IV Bank KEB Hana Tahun 2018	50.000	47.293	
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk			
NCD III Bank Woori Saudara Tahap I Tahun 2018	50.000	47.216	
PT Bank Mizuho Indonesia			
NCD V Bank Mizuho 2018 Seri B	50.000	46.927	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			
NCD III Bank BJB Tahun 2018 Seri A	45.000	44.305	
PT Commonwealth Bank Indonesia			
NCD V Commonwealth Tahap I Tahun 2018 Seri B	30.000	29.473	
PT Bank DBS Indonesia			
NCD IV DBS Tahap I Tahun 2018	20.000	19.715	
Medium Term Notes			
PT Kimia Farma (Persero) Tbk			
MTN Kimia Farma Tahap II Tahun 2018	80.000	80.000	
PT Bank KEB Hana Indonesia			
MTN I Bank KEB Hana Indonesia Tahun 2018 Seri A	50.000	50.000	
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk			
MTN I Telkom Tahun 2018 Seri B	50.000	50.000	
PT Bank Danamon			
MTN I PT Bank Danamon Tahun 2019	-	-	
PT Indonesia Infrastructure Finance			
MTN I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2018	39.000	39.000	
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia			
MTN I PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 2015	25.000	25.000	
Reksadana			
RDSPU PNAS		-	-
RDSPU PNM Falah		-	-
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri II 2019		-	-
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018	90.000	90.000	
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III 2019	-	-	-
Pembiayaan Mikro BUMN 2017	100.000	100.000	
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi			
RDSPU GemilangKIRANA		-	-
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi			
RDPU Pool Advista		-	-
PT Danareksa Investment Management			
RDPU Danareksa Seruni VI		-	-
PT Avrist Asset Management			
RDSPU Avrist Ada Kas Syariah		-	-
Domestic L/C		13.238	13.238
	7.827.304	7.791.455	
Foreign currencies:			
United States Dollar			
Export bill	34.949	503	503
		503	503
Total amortized cost		7.827.807	7.791.958
Fair value through other comprehensive income			
Government bonds			
FR0053		-	-
Unrealized gain on changes		-	-
Total fair value through other comprehensive income		-	-
Total amortized cost and fair value through other comprehensive income		7.827.807,00	7.791.958
Allowance for impairment losses			(513)
Total marketable securities		7.827.807,00	7.791.445

As of December 31, 2019, mutual fund securities amounting to 42 units with nominal value of Rp5,000 per unit which matured on September 27, 2020, September 24, 2021 and February 26, 2022.

As of December 31, 2018, mutual fund securities represent mutual funds of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) amounting to 20 units with nominal value of Rp5,000 per unit which matured on March 14, 2019 and 18 units with nominal value of Rp5,000 per unit which matured on September 27, 2020.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

b. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat surat berharga pada pihak berelasi.

c. Berdasarkan penerbit

	2019	2018
Pemerintah Republik Indonesia	3.423.246	3.567.931
Bank Indonesia	1.648.753	904.869
Perbankan :		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	348.135	150.000
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	168.991	-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	149.282	100.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	66.000	-
PT Bank KEB Hana Indonesia	50.000	97.293
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	50.000	94.305
PT Bank Mandiri Taspen	49.463	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	49.408	45.891
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	39.000	-
PT Maybank Indonesia Tbk	25.000	50.000
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	25.000	25.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.084	97.317
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	155.432
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	150.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	119.851
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	50.000
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	-	47.216
PT Bank Mizuho Indonesia	-	46.927
PT Bank Syariah Bukopin	-	30.000
PT Commonwealth Bank Indonesia	-	29.473
PT Bank DBS Indonesia	-	19.715
	1.030.363	1.308.420
Korporasi		
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	709.000	190.000
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	400.000	-
PT Pool Advista Aset Manajemen	300.000	-
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	294.085	209.988
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	250.166	77.214
PT Federal International Finance Tbk	187.125	233.004
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	160.189	104.248
PT BFI Finance Indonesia Tbk	160.008	129.760
PT Astra Sedaya Finance	150.000	81.000
PT Pupuk Indonesia (Persero)	123.440	11.411
PT Danareksa Investment Management	100.000	-
PT Avrist Asset Management	100.000	-
PT Medco Energi International Tbk	82.500	82.500
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	80.000	80.000
PT Indosat Tbk	75.034	158.497
PT BCA Finance	75.000	-
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	57.000	57.000
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	50.000	50.000
PT Pegadaian (Persero)	47.027	47.105
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	25.000	44.908
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	20.000	121.721
PT Angkasa Pura I (Persero)	8.167	-
PT Indomobil Finance Indonesia	-	100.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	50.118
PT Indonesia Infrastructure Finance	-	39.000
PT Intiland Development Tbk	-	30.000
PT XL Axiata Tbk	-	29.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	-	25.274
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	-	25.249
PT Mandiri Tunas Finance	-	20.000
Surat kredit berdokumen dalam negeri	11.955	13.238
Lain-lain	187	503
	3.465.883	2.010.738
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(5.174)	(513)
Jumlah surat-surat berharga	9.563.071	7.791.445

7. MARKETABLE SECURITIES continued)

b. By relationship

As of December 31, 2019 and 2018, there were no marketable securities transactions with related parties.

c. By issuers

	2019	2018
Government of the Republic of Indonesia	3.423.246	3.567.931
Bank Indonesia	1.648.753	904.869
Banking:		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	348.135	150.000
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	168.991	-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	149.282	100.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	66.000	-
PT Bank KEB Hana Indonesia	50.000	97.293
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	50.000	94.305
PT Bank Mandiri Taspen	49.463	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	49.408	45.891
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	39.000	-
PT Maybank Indonesia Tbk	25.000	50.000
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	25.000	25.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.084	97.317
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	155.432
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	150.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	119.851
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	50.000
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	-	47.216
PT Bank Mizuho Indonesia	-	46.927
PT Bank Syariah Bukopin	-	30.000
PT Commonwealth Bank Indonesia	-	29.473
PT Bank DBS Indonesia	-	19.715
	1.030.363	1.308.420
Corporate:		
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	709.000	190.000
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	400.000	-
PT Pool Advista Aset Manajemen	300.000	-
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	294.085	209.988
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	250.166	77.214
PT Federal International Finance Tbk	187.125	233.004
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	160.189	104.248
PT BFI Finance Indonesia Tbk	160.008	129.760
PT Astra Sedaya Finance	150.000	81.000
PT Pupuk Indonesia (Persero)	123.440	11.411
PT Danareksa Investment Management	100.000	-
PT Avrist Asset Management	100.000	-
PT Medco Energi International Tbk	82.500	82.500
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	80.000	80.000
PT Indosat Tbk	75.034	158.497
PT BCA Finance	75.000	-
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	57.000	57.000
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	50.000	50.000
PT Pegadaian (Persero)	47.027	47.105
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	25.000	44.908
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	20.000	121.721
PT Angkasa Pura I (Persero)	8.167	-
PT Indomobil Finance Indonesia	-	100.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	50.118
PT Indonesia Infrastructure Finance	-	39.000
PT Intiland Development Tbk	-	30.000
PT XL Axiata Tbk	-	29.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	-	25.274
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	-	25.249
PT Mandiri Tunas Finance	-	20.000
Domestic L/C	11.955	13.238
Others	187	503
	3.465.883	2.010.738
Allowance for impairment losses	(5.174)	(513)
Total marketable securities	9.563.071	7.791.445

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)**d. Berdasarkan peringkat**

Peringkat surat berharga pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019		
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying value
Rupiah:			
Surat Utang Negara	-	-	3.423.246
Bank Indonesia	-	-	1.648.753
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pefindo	idA+	709.000
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	-	-	400.000
PT Pool Advista Aset Manajemen	-	-	300.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	294.085
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pefindo	idAAA	250.166
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Pefindo	idAAA	348.135
PT Federal International Finance Tbk	Fitch Indonesia	AAA(idn)	187.125
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	Fitch Global	A(idn)	168.991
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	160.189
PT BFI Finance Indonesia Tbk	Fitch Indonesia	A+(idn)	160.008
PT Astra Sedaya Finance	Fitch Indonesia	AAA(idn)	150.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pefindo	idA	149.282
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Fitch Indonesia	AAA(idn)	123.440
PT Avrist Asset Management	-	-	100.000
PT Danareksa Investment Management	-	-	100.000
PT Medco Energi International Tbk	Pefindo	idA+	82.500
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	80.000
PT Indosat Tbk	Pefindo	idAAA	75.034
PT BCA Finance	Pefindo	idAAA	75.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	66.000
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Pefindo	idA+	57.000
PT Bank KEB Hana Indonesia	Fitch Indonesia	AAA(idn)	50.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Pefindo	idAAA	50.000
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	50.000
PT Bank Mandiri Taspen	Pefindo	idAAA	49.463
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	49.408
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo	idAAA	47.027
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	39.000
PT Maybank Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	25.000
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Pefindo	idAAA	25.000
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Fitch Indonesia	AA-(idn)	25.000
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Pefindo	idAAA	20.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	10.084
PT Angkasa Pura I (Persero)	Pefindo	idAAA	8.167
Surat kredit berdokumen dalam negeri	-	-	11.955
Jumlah Rupiah			9.568.058

Mata uang asing:

Wesel ekspor

187

Penyisihan kerugian penurunan nilai

(5.174)

Jumlah surat-surat berharga

9.563.071

7. MARKETABLE SECURITIES (continued)**d. By rating**

The ratings of marketable securities as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Rupiah:	
Government Bonds	
Certificates of Bank Indonesia	
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	
PT Pool Advista Aset Manajemen	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
PT Federal International Finance Tbk	
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	
PT BFI Finance Indonesia Tbk	
PT Astra Sedaya Finance	
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	
PT Pupuk Indonesia	
PT Avrist Asset Management	
PT Danareksa Investment Management	
PT Medco Energi International Tbk	
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	
PT Indosat Tbk	
PT BCA Finance	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	
PT Bank KEB Hana Indonesia	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	
PT Bank Mandiri Taspen	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Pegadaian (Persero)	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	
PT Maybank Indonesia Tbk	
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Angkasa Pura I (Persero)	
Surat kredit berdokumen dalam negeri	
Total Rupiah	

Foreign currency:

Export bill

Allowance for impairment losses

Total marketable securities

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

Peringkat surat berharga pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2018		
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying value
Rupiah:			
Surat Utang Negara	-	-	3.567.931
Bank Indonesia	-	-	904.869
PT Federal International Finance Tbk	Fitch	AAA(idn)	233.004
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	209.988
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pefindo	idA	190.000
PT Indosat Tbk	Pefindo	idAAA	158.497
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Pefindo	idAAA	155.432
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Pefindo	idA(sy)	150.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Pefindo	idAA-	150.000
PT BFI Finance Indonesia Tbk	Fitch	AA-(idn)	129.760
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Pefindo	idAAA	121.721
PT Bank OCBC NISP Tbk	Pefindo	idAAA	119.851
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	104.248
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pefindo	idA	100.000
PT Indomobil Finance Indonesia	Pefindo	idA	100.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pefindo	idAA+	97.317
PT Bank KEB Hana Indonesia	Fitch	AAA(idn)	97.293
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Pefindo	idAA-	94.305
PT Medco Energi International Tbk	Pefindo	idA+	82.500
PT Astra Sedaya Finance	Fitch	AAA(idn)	81.000
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Pefindo	idAA-	80.000
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pefindo	idAAA	77.214
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Pefindo	idA+	57.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Pefindo	idA-	50.118
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pefindo	idAAA	50.000
PT Maybank Indonesia Tbk	Fitch	AAA(idn)	50.000
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	50.000
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	Fitch	AAA(idn)	47.216
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo	idAAA	47.105
PT Bank Mizuho Indonesia	Fitch Global	A-(idn)	46.927
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	45.891
PT Wahana Otomotif Multiartha Tbk	Fitch	AA-(idn)	44.908
PT Indonesia Infrastructure Finance Bank Syariah Bukopin	Fitch	AAA(idn)	39.000
PT Intiland Development Tbk	-	-	30.000
PT Commonweath Bank Indonesia	Pefindo	idBBB+	30.000
PT XL Axiata Tbk	Fitch	AAA(idn)	29.473
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pefindo	idAA	29.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Pefindo	idAA	25.274
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Pefindo	idAAA	25.249
PT Mandiri Tunas Finance	Pefindo	idAAA	25.000
PT Bank DBS Indonesia	Pefindo	idAA+	20.000
PT Pupuk Indonesia	Fitch Global	AA-(idn)	19.715
Surat kredit berdokumen dalam negeri	Fitch	AAA(idn)	11.411
Jumlah Rupiah	-	-	7.791.455
Mata uang asing:			
Lain-lain			503
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(513)
Jumlah surat-surat berharga			7.791.445

e. Jangka waktu dan tingkat bunga

	2019	2018
Kurang dari 1 tahun	3.860.083	430.503
1 - 5 tahun	5.708.162	7.361.455
Dikurangi: Penyisihan kerugian kerugian penurunan nilai	(5.174)	(513)
Jumlah surat-surat berharga	9.563.071	7.791.445
Tingkat bunga per tahun:		
Rupiah	7,14%	6,66%

7. MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. By rating (continued)

The ratings of marketable securities as of December 31, 2019 and 2018 are as follows: (continued)

Rupiah:	
Government Bonds	
Certificates of Bank Indonesia	
PT Federal International Finance Tbk	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	
PT Indosat Tbk	
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
PT BFI Finance Indonesia Tbk	
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	
PT Bank OCBC NISP Tbk	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	
PT Indomobil Finance Indonesia	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank KEB Hana Indonesia	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
PT Medco Energi International Tbk	
PT Astra Sedaya Finance	
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
PT Maybank Indonesia Tbk	
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	
PT Pegadaian (Persero)	
PT Bank Mizuho Indonesia	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Wahana Otomotif Multiartha Tbk	
PT Indonesia Infrastructure Finance Bank Syariah Bukopin	
PT Intiland Development Tbk	
PT Commonweath Bank Indonesia	
PT XL Axiata Tbk	
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	
PT Mandiri Tunas Finance	
PT Bank DBS Indonesia	
PT Pupuk Indonesia	
Surat kredit berdokumen dalam negeri	
Total Rupiah	
Foreign currency:	
Others	
Allowance for impairment losses	
Total marketable securities	

e. By maturity and interest rates

Less than 1 year	
1 - 5 years	
Less: Allowance for impairment losses	
Total marketable securities	
Interest rates per annum:	
Rupiah	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)**f. Perubahan laba (rugi) yang belum direalisasi**

Perubahan laba (rugi) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek untuk tujuan investasi yang tersedia untuk dijual selama periode 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019
Saldo awal	-
Penambahan laba yang belum direalisasi selama periode berjalan	25
Jumlah sebelum pajak tangguhan	25
Pajak tangguhan	(5)
Saldo akhir bersih	20

g. Kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kolektibilitas surat-surat berharga adalah dalam kategori lancar.

h. Penyisihan kerugian penurunan nilai

Penyisihan kerugian penurunan nilai atas surat-surat berharga pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019
Saldo awal tahun	513
Penyisihan tahun berjalan	4.661
Saldo akhir tahun	5.174

Jumlah minimum penyisihan kerugian penurunan nilai surat-surat berharga yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia masing-masing adalah sebesar Rp44.862 dan Rp33.192 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya surat berharga adalah memadai.

7. MARKETABLE SECURITIES (continued)**f. The movement of unrealized gains (losses)**

The movement of unrealized gains (losses) from the change in fair value of available for sale investment securities during period 2019 and 2018 was as follows :

	2018	
	-	Beginning balance
	-	Addition of unrealized gains during the period
	-	Total before deferred tax
	-	Deferred tax
	-	Ending balance net

g. Collectibility

As of December 31, 2019 and 2018, the collectibility of securities are classified as current.

h. Allowance for impairment losses

Allowance for impairment losses for marketable securities as of December 31, 2019 and 2018 as follows:

	2018	
	-	Balance at beginning of year
	513	Provision during the year
	513	Balance at end of year

Minimum allowance for impairment losses for marketable securities required by Bank Indonesia as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp44,862 and Rp33,192, respectively.

Management believes that the allowance for impairment losses on marketable securities is adequate.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**8. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN
JANJI DIBELI KEMBALI**

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 Bank memiliki surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali sejumlah Rp1.038.432 dan Rp566.891 dengan rincian sebagai berikut:

**8. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT**

As of December 31, 2019 and 2018 Bank has a number of marketable securities for sale with reverse repurchase agreement Rp1,038,432 and Rp566,891, with details as follows:

2019

Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Diskonto yang belum diamortisasi/ Unamortised discount	Nilai bersih/ Net value
Sertifikat Bank Indonesia					
IDBI170120364S	425.000	10 Desember / December 10, 2019	17 Januari/ January 17, 2020	1.234	423.766
IDBI200320364S	300.000	17 Desember / December 17, 2019	20 Maret/ March 20, 2020	4.142	295.858
IDBI200320364S	204.600	13 Desember / December 13, 2019	20 Maret/ March 20, 2020	2.851	201.749
IDBI170120364S	117.400	11 Desember / December 11, 2019	17 Januari/ January 17, 2020	341	117.059
Jumlah/Total	1.047.000			8.568	1.038.432

2018

Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Diskonto yang belum diamortisasi/ Unamortised discount	Nilai bersih/ Net value
Sertifikat Bank Indonesia					
IDBI251019364S	50.000	19 Desember / December 19, 2018	3 Januari/ January 3, 2019	2.607	47.393
IDBI251019364S	200.000	27 Desember / December 27, 2018	3 Januari/ January 3, 2019	10.426	189.574
IDBI151119364S	350.000	19 Desember / December 19, 2018	3 Januari/ January 3, 2019	20.076	329.924
Jumlah/Total	600.000			33.109	566.891

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**9. SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN
JANJI DIJUAL KEMBALI (REVERSE REPO)**

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 Bank memiliki surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) sejumlah Rp5.837.520 dan Rp Nihil dengan rincian sebagai berikut:

**9. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED
UNDER RESALE AGREEMENT**

As of December 31, 2019 and 2018 Bank has a number of marketable securities purchased under resale agreement Rp5,837,520 and Rp Nil, with details as follows:

2019

Jenis surat berharga/ Securities	Harga beli/ Purchase price	Tanggal mulai/ Start date	Tanggal jual kembali/ Resale date	Harga jual kembali/ Resale price	Pendapatan bunga yang akan diterima/ Accrued interest income	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara						
FR0070	1.329.212	31 Desember/ December 31, 2019	14 Januari/ January 14, 2020	1.331.807	185	1.329.397
FR0078	879.098	26 Desember/ December 26, 2019	23 Januari/ January 23, 2020	882.544	739	879.837
FR0061	831.747	31 Desember/ December 31, 2019	28 Januari/ January 28, 2020	835.007	116	831.863
FR0061	829.290	26 Desember/ December 26, 2019	9 Januari/ January 9, 2020	830.909	694	829.984
FR0059	762.475	30 Desember/ December 30, 2019	13 Januari/ January 13, 2020	763.964	213	762.688
SPN12200213	755.344	30 Desember/ December 30, 2019	6 Januari/ January 6, 2020	756.078	210	755.554
FR0063	233.857	27 Desember/ December 27, 2019	24 Januari/ January 24, 2020	234.774	164	234.021
FR0077	102.393	31 Desember/ December 31, 2019	31 Maret / March 31, 2020	103.702	14	102.407
FR0057	57.137	26 Juli/ July 26, 2019	24 Januari/ January 24, 2020	58.842	1.489	58.626
FR0079	51.796	26 Juli/ July 26, 2019	24 Januari/ January 24, 2020	53.338	1.347	53.143
Jumlah/Total	5.832.349			5.850.965	5.171	5.837.520

10. TAGIHAN LAINNYA

	2019
Tagihan transfer dan ATM	31.920
Lainnya	49.345
Jumlah tagihan lainnya, neto	81.265

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat tagihan pada pihak berelasi.

Kolektibilitas tagihan lainnya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah lancar.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh tagihan lainnya dapat ditagih dan penyisihan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan.

10. OTHER RECEIVABLES

	2018	
Transfer receivables and ATM	20.610	
Others	13.459	
Total other receivables, net	34.069	

As of December 31, 2019 and 2018, there were no other receivables from related parties.

The collectibility of all other receivables as of December 31, 2019 and 2018 was classified as current.

Management believes that other receivables are fully collectible and that allowance for impairment losses is unnecessary.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN

Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank adalah dalam Rupiah.

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas

2019							
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Modal kerja	8.272.825	7.248.866	304.419	16.112	33.297	670.131	Working capital
Investasi	4.716.573	4.431.878	125.903	18.337	4.626	135.829	Investment
Konsumsi	25.362.902	24.944.802	235.693	28.727	38.454	115.226	Consumption
Jumlah	38.352.300	36.625.546	666.015	63.176	76.377	921.186	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(980.134)	(96.757)	(96.698)	(18.322)	(13.951)	(754.406)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah kredit yang diberikan, neto	37.372.166	36.528.789	569.317	44.854	62.426	166.780	Total loans, net

11. LOANS

All loans provided by the Bank are in Rupiah.

a. Type and collectibility of loans

2018							
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Modal kerja	7.378.872	6.257.778	245.827	19.816	25.068	830.383	Working capital
Investasi	3.030.835	2.750.656	29.220	2.459	3.243	245.257	Investment
Konsumsi	23.483.530	23.161.426	176.198	14.637	18.181	113.088	Consumption
Jumlah	33.893.237	32.169.860	451.245	36.912	46.492	1.188.728	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.198.550)	(111.927)	(20.869)	(10.233)	(12.411)	(1.043.110)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah kredit yang diberikan, neto	32.694.687	32.057.933	430.376	26.679	34.081	145.618	Total loans, net

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas**b. Economic sector of loans and collectibility**

2019							
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Rumah tangga	25.334.285	24.916.962	234.959	28.727	38.453	115.184	Household
Perdagangan besar dan eceran	4.361.446	3.734.235	261.762	23.831	26.988	314.630	Wholesale and retail trade
Konstruksi	3.981.653	3.761.892	5.088	215	733	213.725	Construction
Industri pengolahan	1.192.579	1.099.336	32.564	4.945	2.752	52.982	Processing industry
Pertanian perburuan dan kehutanan	881.760	782.840	39.118	1.237	3.912	54.653	Agriculture, hunting and forestry
Perantara keuangan	708.391	681.435	8.930	-	1.988	16.038	Financial intermediaries
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	701.087	649.402	13.376	290	977	37.042	Public and social culture services
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	268.320	263.372	3.601	129	355	863	Health services and social activities
Jasa pendidikan	201.671	178.430	21.017	-	-	2.224	Education services
Listrik gas dan air	134.438	83.450	-	-	-	50.988	Electricity, gas and water
Akomodasi makanan dan minuman	207.517	168.549	35.692	143	-	3.133	Accommodation, food and beverage
Transportasi pergudangan dan komunikasi	148.269	133.519	2.182	2.900	193	9.475	Transportation, warehousing and communications
Real estate usaha persewaan dan jasa perusahaan	115.686	98.872	2.445	114	26	14.229	Real estate, business services and business ownership
Pertambangan dan penggalian	48.092	12.159	3.076	-	-	32.857	Mining and quarrying
Perikanan	33.265	28.152	1.350	645	-	3.118	Fishery
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	3.428	3.307	121	-	-	-	Individual services which serve households
Kegiatan yang masih belum jelas batasannya	1.684	1.684	-	-	-	-	Activity is still undefined
Administrasi pemerintahan	360	360	-	-	-	-	Government administration
Lain-lain	28.369	27.590	734	-	-	45	Others
Jumlah	38.352.300	36.625.546	666.015	63.176	76.377	921.186	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(980.134)	(96.757)	(96.698)	(18.322)	(13.951)	(754.406)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah kredit yang diberikan, neto	37.372.166	36.528.789	569.317	44.854	62.426	166.780	Total loans, net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)**b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas (lanjutan)**

2018					
Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss
Rumah tangga	23.450.370	23.128.404	176.197	18.182	112.951
Perdagangan besar dan eceran	4.086.202	3.522.852	185.056	16.364	340.885
Konstruksi	2.618.792	2.351.952	2.192	-	261.897
Industri pengolahan	934.306	840.306	30.245	4.410	58.543
Pertanian perburuan dan kehutanan	660.862	514.705	24.031	740	120.901
Perantara keuangan	545.251	508.110	12.084	13	23.079
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	421.004	366.588	10.982	295	42.813
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	228.450	223.494	2.029	391	2.536
Jasa pendidikan	217.205	214.614	-	-	2.591
Listrik gas dan air	206.824	52.526	-	-	154.298
Akomodasi makanan dan minuman	176.142	167.460	3.330	63	4.647
Transportasi pergudangan dan komunikasi	141.713	128.445	506	-	12.550
Real estate usaha persewaan dan jasa perusahaan	95.912	79.933	469	-	15.510
Pertambangan dan penggalian	48.771	12.838	2.984	-	32.949
Perikanan	23.446	19.989	940	-	2.435
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	3.603	3.403	200	-	-
Kegiatan yang masih belum jelas batasannya	2.062	2.062	-	-	-
Administrasi pemerintahan	370	370	-	-	-
Lain-lain	31.952	31.809	-	-	143
Jumlah	33.893.237	32.169.860	451.245	36.912	1.188.728
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.198.550)	(111.927)	(20.869)	(10.233)	(1.043.110)
Jumlah kredit yang diberikan, neto	32.694.687	32.057.933	430.376	26.679	145.618

Household
Wholesale and retail trade
Construction
Processing industry
Agriculture, hunting and forestry
Financial intermediaries
Public and social culture services
Health services and social activities
Education services
Electricity, gas and water
Accommodation, food and beverage
Transportation, warehousing and communications
Real estate, business services and business ownership
Mining and quarrying
Fishery
Individual services which serve households
Activity is still undefined
Government administration
Others
Total
Less: Allowance for impairment losses
Total loans, net

c. Kredit yang diberikan menurut sisa umur kredit**c. Maturity of loans**

	2019	2018
Kurang dari 1 tahun	5.274.470	5.223.513
1 - 2 tahun	1.962.833	1.691.191
Lebih dari 2 - 5 tahun	10.619.363	8.023.178
Lebih dari 5 tahun	20.495.634	18.955.355
	38.352.300	33.893.237
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(980.134)	(1.198.550)
Jumlah kredit yang diberikan, neto	37.372.166	32.694.687

Less than 1 year
1 - 2 years
More than 2 - 5 years
Over 5 years
Less: Allowance for impairment losses
Total loans, net

d. Berdasarkan hubungan**d. By relationship**

2019					
Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss
Pihak berelasi (Catatan 36)	320.896	320.896	-	-	-
Pihak ketiga	38.031.404	36.304.650	666.015	63.176	921.186
Jumlah	38.352.300	36.625.546	666.015	63.176	921.186
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-
Pihak berelasi	(980.134)	(96.757)	(96.698)	(18.322)	(754.406)
Pihak ketiga	(980.134)	(96.757)	(96.698)	(18.322)	(754.406)
Jumlah	(1.960.268)	(193.514)	(193.396)	(36.644)	(1.508.812)
Jumlah kredit yang diberikan, neto	37.372.166	36.528.789	569.317	44.854	166.780

Related party (Note 36)
Third parties
Total
Less: Allowance for impairment losses
Related parties
Third parties
Total
Total loans, net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

d. Berdasarkan hubungan

	2018						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Pihak berelasi (Catatan 36)	240.632	240.632	-	-	-	-	Related party (Note 36)
Pihak ketiga	33.652.605	31.929.228	451.245	36.912	46.492	1.188.728	Third parties
Jumlah	33.893.237	32.169.860	451.245	36.912	46.492	1.188.728	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai							Less: Allowance for impairment losses
Pihak berelasi	(2.683)	(2.683)	-	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	(1.195.867)	(109.244)	(20.869)	(10.233)	(12.411)	(1.043.110)	Third parties
Jumlah	(1.198.550)	(111.927)	(20.869)	(10.233)	(12.411)	(1.043.110)	Total
Jumlah kredit yang diberikan, neto	32.694.687	32.057.933	430.376	26.679	34.081	145.618	Total loans, net

Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi, termasuk pinjaman kepada manajemen kunci. Pinjaman kepada manajemen kunci pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar Rp128.489 dan Rp118.098 (Catatan 36) merupakan kredit untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 - 20 tahun dan dikenakan bunga sebesar 4% per tahun.

Loans to related parties include loans to key management. Loans to key management as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp128,489 and Rp118,098, respectively (Note 36), which involved automobiles, housing and other loans, with terms of between 1 - 20 years and interest at rates of between 4% per annum.

e. Tingkat bunga tahunan

Tingkat bunga kredit yang diberikan dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar 11,63% dan 12,62%.

e. Annual interest rates

The annual interest rates of loans in Rupiah as of December 31, 2019 and 2018 are 11.63% and 12.62% respectively.

f. Kredit sindikasi

Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing berkisar antara 2,63% - 66,67% dan 5,16% - 35,71% dari total pinjaman sindikasi.

f. Syndicated loans

The share of the Bank in syndicated loans as of December 31, 2019 and 2018 ranged from 2,63% - 66,67% and 5,16% - 35,71%, respectively, from total of syndication loan.

g. Kredit yang direstrukturasikan

Restrukturisasi kredit pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, adalah masing-masing sebesar Rp126.150 dan Rp231.761 dengan penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp66.990 dan Rp168.413.

g. Restructured loans

The restructured loans as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp126,150 and Rp231,761, respectively, with allowance for impairment losses as of December 31, 2019 and 2018 amounting to Rp66,990 and Rp168,413, respectively.

h. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank telah memenuhi ketentuan BMPK.

h. Legal Lending Limits (LLL)

As of December 31, 2019 and 2018, the Bank was in compliance with Bank Indonesia's legal lending limits.

i. Kredit tidak lancar (Non-Performing Loan/NPL)

	2019	2018
Jumlah NPL	1.060.739	1.272.132
Rasio NPL bruto	2,77%	3,75%
Rasio NPL neto	0,71%	0,61%

i. Non-performing loans (NPL)

Total NPL
Ratio of gross NPL
Ratio of net NPL

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

- j. Jumlah kredit yang diberikan dengan jaminan giro, tabungan dan deposito berjangka, pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing adalah sebesar Rp185.801 dan Rp199.313 (Catatan 17).
- k. Kredit yang dihapusbukukan
Kredit yang dihapusbukukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing adalah sebesar Rp579.822 dan Rp325.941.
- l. Penyisihan kerugian penurunan nilai
Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2019
Saldo awal tahun	1.198.550
Penyisihan tahun berjalan	361.406
Penghapusan tahun berjalan	(579.822)
Saldo akhir tahun	980.134

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat kredit yang diberikan tidak tertagih adalah memadai.

Saldo penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebesar Rp755.326 (individual) dan Rp224.808 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp1.076.159 (individual) dan Rp122.391 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebesar Rp361.406 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp73.838 pada 31 Desember 2018.

Jumlah minimum penyisihan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia masing-masing adalah sebesar Rp1.368.408 dan Rp1.561.772 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

- m. Rasio kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap jumlah kredit yang diberikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing adalah sebesar 27,54% and 26,13%.

11. LOANS (continued)

- j. Total loans secured by current accounts, savings and time deposits as of December 31, 2019 and 2018 were Rp185,801 and Rp199,313, respectively (Note 17).
- k. Loans written-off
Loans written-off for the year ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp579,822 and Rp325,941, respectively.
- l. Allowance for impairment losses
The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	2018	
	1.394.006	Balance at beginning of year
	130.485	Provision during the year
	(325.941)	Written-off during the year
	1.198.550	Balance at end of year

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible loans is adequate.

The balance of allowance for impairment losses amounted to Rp755,326 (individual) and Rp224,808 (collective) as of December 31, 2019 and Rp1,076,159 (individual) and Rp122,391 (collective) as of December 31, 2018.

Provision for impairment losses amounted to Rp361,406 as of December 31, 2019 and Rp73,838 as of December 31, 2018.

Minimum allowance for impairment losses for loans required by Bank Indonesia as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp1,368,408 and Rp1,561,772, respectively.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible loans.

- m. Ratio of micro, small and medium scale enterprises (UMKM) credit to total loans as at December 31, 2019 and 2018 were 27.54% and 26.13% respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

	2019	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Rupiah:		
Kredit yang diberikan		331.565
Lain-lain		84.845
Mata uang asing:		
Lain-lain		
Dolar Amerika Serikat	720	10
Jumlah pendapatan bunga yang masih akan diterima		416.420

12. INTEREST RECEIVABLES

	2018	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Rupiah:		
Loans		304.112
Others		69.223
Foreign currencies:		
Others		
United States Dollar	403	6
Total interest receivables		373.341

13. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	2019
Asuransi tunjangan hari tua	126.252
Sewa dibayar dimuka	84.732
Asuransi lainnya	2.317
Lainnya	72.221
Jumlah biaya dibayar dimuka	285.522

13. PREPAID EXPENSES

	2018	
Mutual aid pension insurance	163.228	
Prepaid rent	86.097	
Other insurance	2.120	
Others	56.973	
Total prepaid expenses	308.418	

Sewa dibayar dimuka merupakan sewa atas gedung kantor cabang dan rumah dinas.

Prepaid rent represents rent of the branch office buildings and official house.

14. ASET TETAP

14. FIXED ASSETS

	2019						
Perubahan di tahun 2019	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo akhir/ Ending balance	2019 Movements
Biaya perolehan							Cost
Tanah	781.498	-	-	-	74.239	855.737	Land
Bangunan	195.769	294	-	6.759	-	202.822	Buildings
Peralatan kantor	462.846	20.437	2	273	-	483.554	Office equipment
Kendaraan bermotor	53.730	139	1.958	-	-	51.911	Motor vehicles
	1.493.843	20.870	1.960	7.032	74.239	1.594.024	
Aset dalam penyelesaian							Construction in progress
Bangunan	7.207	1.256	-	(7.032)	-	1.431	Buildings
	1.501.050	22.126	1.960	-	74.239	1.595.455	
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Bangunan	77.838	10.549	-	-	-	88.387	Buildings
Peralatan kantor	402.557	32.902	2	-	-	435.457	Office equipment
Kendaraan bermotor	48.598	1.542	1.958	-	-	48.182	Motor vehicles
	528.993	44.993	1.960	-	-	572.026	
Nilai buku neto	972.057					1.023.429	Net book value

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (lanjutan)

	2018						
Perubahan di tahun 2018	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo akhir/ Ending balance	2018 Movements
Biaya perolehan							Cost
Tanah	736.785	-	-	-	44.713	781.498	Land
Bangunan	193.939	165	-	1.665	-	195.769	Buildings
Peralatan kantor	436.818	25.224	-	804	-	462.846	Office equipment
Kendaraan bermotor	52.421	1.309	-	-	-	53.730	Motor vehicles
	1.419.963	26.698	-	2.469	44.713	1.493.843	
Aset dalam penyelesaian							Construction in progress
Bangunan	5.138	4.538	-	(2.469)	-	7.207	Buildings
	1.425.101	31.236	-	-	44.713	1.501.050	
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Bangunan	68.947	8.891	-	-	-	77.838	Buildings
Peralatan kantor	365.725	36.832	-	-	-	402.557	Office equipment
Kendaraan bermotor	46.816	1.782	-	-	-	48.598	Motor vehicles
	481.488	47.505	-	-	-	528.993	
Nilai buku neto	943.613					972.057	Net book value

Tanah merupakan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB"), Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun ("SHMASRS") dan Sertifikat Hak Milik ("SHM") seluas 105.172m². SHGB dan SHMASRS diberikan untuk periode maksimum 30 tahun dan dapat diperbarui.

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar Rp44.993 dan Rp47.505 (Catatan 33).

Pada tanggal 31 Mei 2016, Bank melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tanah untuk tujuan akuntansi dan perpajakan. Untuk tujuan akuntansi, Bank telah mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran tanah menjadi model revaluasi dari sebelumnya menggunakan model biaya. Untuk tujuan perpajakan, kenaikan nilai tercatat aset tetap tanah sebesar Rp537.756 telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.777/WPJ.07/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp516.246 (setelah dikurangi pajak final sebesar Rp21.510).

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode pendekatan data pasar. Penilaian atas tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal Kantor Jasa Penilai Publik Susan Widjojo & Rekan yang laporannya bertanggal 15 Juli 2016.

Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan & Rekan masing-masing tanggal 3 Januari 2020 dan Kantor Jasa Penilai Publik Susan Widjojo & Rekan tanggal 3 Januari 2019, tentang penilaian nilai wajar atas aset tetap yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.271.069 dan Rp1.214.767.

14. FIXED ASSETS (continued)

Land represents Building Rights Title ("SHGB"), Strata Title ("SHMASRS") and Freehold Title (SHM) of 105,172m². SHGB and SHMASRS were obtained for a maximum period of 30 years and may be extended.

Depreciation expense for years ended December 31, 2019 and December 31, 2018 amounted to Rp44,993 and Rp47,505 respectively (Note 33).

On May 31, 2016, the Bank revalued its fixed assets of land for the purpose of accounting and taxation. For accounting purposes, the Bank has changed its accounting policy for the measurement of land into revaluated model from previous cost model. For tax purposes, the increase in the carrying value of fixed assets of land amounting to Rp537,756 has been approved by the Directorate General of Taxes in accordance with decision of the Directorate General of Taxation No.777/WPJ.07/2016 dated August 25, 2016.

The increase in the carrying amount arising from the revaluation are recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income of Rp516,246 (net of final tax of Rp21,510).

Assessment is conducted by Indonesian Standards Assessment, is determined based on current market transactions and carried out with the usual provisions. Valuation method used is a market data approach. Assessment of land is carried out by external independent appraiser Kantor Jasa Penilai Publik Susan Widjojo & Partners whose report dated July 15, 2016.

Based on appraisal report of "Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan & Rekan" dated January 3, 2020 and "Kantor Jasa Penilai Publik Susan Widjojo & Rekan" January 3, 2019, related with the valuation of fixed assets owned by the Banks as of December 31, 2019 and 2018 amounted Rp1,271,069 and Rp1,214,767 respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

Bank mencatat revaluasi aset tetap tanah untuk tujuan akuntansi berdasarkan laporan penilai independen tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebesar Rp74.239 dan Rp44.713.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jika tanah diukur dengan metode biaya, nilai tercatatnya sebesar Rp86.044.

Aset tetap, kecuali tanah, pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kerusakan, kecelakaan, dan pencurian dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp1.252.404 dan Rp931.826. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Bank sebagaimana dimaksud dalam PSAK 48 (Revisi 2014) selama tahun berjalan, karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Rincian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	Jenis aset/ Type of asset	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated Cost	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion
31 Desember/ December 31, 2019	Bangunan/ <i>Buildings</i>	88 %	1.431	2020
31 Desember/ December 31, 2018	Bangunan/ <i>Buildings</i>	70%	7.207	2019

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan dalam usaha pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018	
Bangunan	17.371	17.303	<i>Buildings</i>
Peralatan kantor	321.199	255.510	<i>Office equipment</i>
Kendaraan bermotor	27.561	27.137	<i>Motor vehicles</i>

Tidak terdapat aset tetap yang masih belum digunakan sementara dan aset tetap yang telah dihentikan penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Tidak terdapat aset tetap yang dijadikan jaminan.

14. FIXED ASSETS (continued)

Bank revalued its fixed assets of land for the purpose of accounting based on appraisal report above. On December 31, 2019 and 2018, the increase in the carrying amount arising from the revaluation are recorded amounted to Rp74,239 and Rp44,713.

On December 31, 2019 and 2018, if land is measured by cost method, its carrying value is Rp86,044.

All fixed assets, except land were insured against fire, riot, accident, and theft risks as of December 31, 2019 and 2018 for insurance coverage amounting to Rp1,252,404 and Rp931,826, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from the assets for insured risks.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Bank during the year as described in PSAK 48 (Revised 2014), because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

The details of construction in progress as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

The gross carrying amount of fixed assets that have been fully depreciated but still in use in operations as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

There were no fixed assets which are temporarily not being used and no fixed assets that the usage has been discontinued as of December 31, 2019 and 2018.

There were no fixed assets pledged as collateral.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap kendaraan bermotor yang telah dihapusbuku, kemudian dilakukan penjualan melalui lelang dengan rincian sebagai berikut:

	2019
Harga jual	393
Nilai buku	-
Laba penjualan aset tetap	393

Aset tetap peralatan kantor yang telah dihapusbuku dengan rincian sebagai berikut:

	2019
Biaya perolehan	2
Akumulasi penyusutan	-
Rugi penghapusan aset tetap	2

15. ASET LAIN-LAIN

	2019
Beban yang ditangguhkan	22.634
Persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan	22.040
Lainnya	8.192
Jumlah aset lain-lain, neto	52.866

Beban yang ditangguhkan merupakan beban atas biaya pendirian kantor, renovasi gedung dan jaringan telekomunikasi. Beban ditangguhkan diamortisasi selama masa sewa tanah atau gedung dengan menggunakan metode garis lurus.

Lainnya termasuk biaya perpanjangan hak atas tanah yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaat hak atas tanah dengan menggunakan metode garis lurus.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset lain-lain karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset lain-lain tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

16. LIABILITAS SEGERA

	2019	2018
Transfer, inkaso dan kliring	156.229	265.736
Beban sudah efektif harus dibayar	50.671	86.521
Penerimaan dana yang akan diperhitungkan	88.770	71.207
Cadangan iuran dana pensiun	-	44.618
Cadangan jasa tabungan haji	-	14.108
Lain-lain	61.895	32.395
Jumlah liabilitas segera	357.565	514.585

14. FIXED ASSETS (continued)

Fixed assets - motor vehicles that have been write-off, then do the sale through auction as follows:

	2018	
	-	Proceed
	-	Book Value
	-	Gain from sale of fixed assets

Fixed assets - office equipment that have been write-off as follows:

	2018	
	-	Proceed
	-	Book Value
	-	Loss from write-off of fixed assets

15. OTHER ASSETS

	2018	
	21.924	Deferred charges
	20.712	Office stationery and printed forms
	3.376	Others
Total other assets, net	46.012	

Deferred charges represent costs related to the establishment of offices, building renovations and telecommunication network. Deferred charges are amortized over the land or building lease period using the straight-line method.

Others included deferred cost related to the extension of the landright and amortized over the period of the related landright using the straight-line method.

Management believes that there is no impairment in the value of other assets since management believes that the carrying amounts of other assets do not exceed the estimated recoverable amount.

16. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

	2018	
	265.736	Transfers and cheques pending collection and clearing
	86.521	Amounts involving expenses payable
	71.207	Acceptances pending settlement
	44.618	Reserve for pension contributions
	14.108	Reserve interest for hajj savings
	32.395	Others
Total obligations due immediately	514.585	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. LIABILITAS SEGERA (lanjutan)

Penerimaan dana yang akan diperhitungkan merupakan titipan dana untuk pembayaran pajak *on-line*, pembayaran telepon, pembayaran PBB dan lain-lain.

Beban sudah efektif harus dibayar merupakan beban yang masih harus dibayar atas listrik, telepon, BPJS dan lain-lain.

Liabilitas lainnya meliputi rekening kontrol, utang pembelian dan lainnya.

Seluruh liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah dalam mata uang Rupiah.

16. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY (continued)

Acceptance pending settlement represents funds received for the payment of on-line tax, payment of teleph one, payment of land and building tax and others.

Amounts involving expenses payable represent accrued expenses of electricity, telephone, social security ("BPJS") and others.

Other liabilities include control account, purchase payable and others.

All of obligations due immediately as of December 31, 2019 and 2018 are in Rupiah currency.

17. SIMPANAN DARI NASABAH

a. Berdasarkan segmen

	2 0 1 9
Rupiah:	
Konvensional	
Tabungan	
- Simpeda	15.124.888
- Siklus	3.850.545
- Tabunganku	2.594.358
- Simpanan Pelajar	46.661
- Haji	26.199
- Siklus Nelayan	279
	<u>21.642.930</u>
Giro	
- Pemerintah Daerah	17.320.587
- Umum	6.388.557
	<u>23.709.144</u>
Deposito berjangka	
- 1 bulan	10.104.409
- 2 bulan	259.061
- 3 bulan	2.830.994
- 6 bulan	70.042
- 12 bulan	140.244
- 18 bulan	145
- 24 bulan	3.142
- Deposito <i>on call</i>	49.490
	<u>13.457.527</u>
Jumlah simpanan dari nasabah konvensional dalam Rupiah	<u>58.809.601</u>
Syariah	
Tabungan	
- Barokah	250.012
- Haji Amanah	258.766
- Tabunganku	40.087
- Simpanan Pelajar	5.450
- Umroh Amanah	-
- Tabungan Barokah Sejahtera	-
- Tabungan Rencana	-
	<u>554.315</u>
Giro	
- Wadiah Pemerintah	898
- Wadiah swasta	101.896
- Wadiah perorangan	1.649
	<u>104.443</u>
Deposito	
- 1 bulan	844.185
- 3 bulan	117.851
- 6 bulan	3.046
- 12 bulan	21.668
	<u>986.750</u>
Jumlah simpanan dari nasabah syariah dalam Rupiah	<u>1.645.508</u>
Jumlah simpanan dari nasabah dalam Rupiah (dipindahkan)	<u>60.455.109</u>

17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

a. Based on segment

	2 0 1 8	
Rupiah:		
Conventional		
Savings		
Simpeda	13.590.542	
Siklus	2.905.766	
Tabunganku	2.053.414	
Simpanan Pelajar	38.407	
Haji	183.011	
Siklus Nelayan	148	
	<u>18.771.288</u>	
Current accounts		
Municipal District	12.227.052	
Public	6.929.817	
	<u>19.156.869</u>	
Time deposits		
1 month	8.435.747	
2 months	160.589	
3 months	2.417.356	
6 months	105.061	
12 months	130.133	
18 months	390	
24 months	2.933	
Deposits on call	10.600	
	<u>11.262.809</u>	
Total deposits from conventional customers in Rupiah	<u>49.190.966</u>	
Sharia		
Savings		
Barokah	213.844	
Haji Amanah	70.077	
Tabunganku	30.738	
Simpanan Pelajar	4.109	
Umroh Amanah	1.887	
Barokah Sejahtera Saving	2.433	
Rencana Saving	11	
	<u>323.099</u>	
Current accounts		
Government wadiah	596	
Private wadiah	112.540	
Individual wadiah	3.749	
	<u>116.885</u>	
Deposits		
1 month	1.070.093	
3 months	114.293	
6 months	3.482	
12 months	22.756	
	<u>1.210.624</u>	
Total deposits from sharia customer in Rupiah	<u>1.650.608</u>	
Total deposits from customers in Rupiah (carried forward)	<u>50.841.574</u>	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)**a. Berdasarkan segmen (lanjutan)**

	2019
Jumlah simpanan dari nasabah dalam Rupiah (pindahan)	60.455.109
Mata uang asing:	
Konvensional	
Giro	
- Umum	12.292
Tabungan	
- Siklus	26.393
Deposito berjangka	
- 1 bulan	45.105
- 3 bulan	3.983
- 6 bulan	172
- 12 bulan	2.818
	<u>52.078</u>
Jumlah simpanan dari nasabah konvensional dalam mata uang asing	90.763
Jumlah simpanan dari nasabah	60.545.872

b. Berdasarkan hubungan dan mata uang

	2019	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Pihak berelasi:		
Rupiah:		
Giro	13.987.576	
Tabungan	55.905	
Deposito berjangka	895.583	
Mata uang asing:		
Giro	43.400	603
Tabungan	54.946	764
Deposito berjangka dan deposito on call	34.983	486
Jumlah pihak berelasi (Catatan 36)	<u>14.940.917</u>	
Pihak ketiga:		
Rupiah:		
Giro	9.826.011	
Tabungan	22.141.340	
Deposito berjangka dan deposito on call	13.548.694	
Mata uang asing:		
Giro	843.994	11.689
Tabungan	1.975.035	25.629
Deposito berjangka dan deposito on call	3.749.782	51.592
Jumlah pihak ketiga	<u>45.604.955</u>	
Jumlah simpanan dari nasabah	60.545.872	

17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)**a. Based on segment (continued)**

	2018	
Total deposits from customers in Rupiah (brought forward)	50.841.574	
Foreign currencies:		
Konvensional		
Current accounts		
Public -	12.011	
Savings		
Siklus -	17.930	
Time deposits		
1 month -	40.090	
3 months -	3.779	
6 months -	403	
12 months -	144	
	<u>44.416</u>	
Total deposits from conventional customers in foreign currencies	74.357	
Total deposits from customers	50.915.931	

b. Based on relationship and currencies

	2018	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Related parties:		
Rupiah:		
Current accounts	12.361.096	
Savings	81.091	
Time deposits	2.502.054	
Foreign currencies:		
Current accounts	43.464	625
Saving accounts	21.905	315
Time deposits and deposits on call	130.392	1.875
Total related parties (Note 36)	<u>14.947.056</u>	
Third parties:		
Rupiah:		
Current accounts	6.912.658	
Savings	19.013.296	
Time deposits and deposits on call	9.971.379	
Foreign currencies:		
Current accounts	791.815	11.386
Savings	1.224.958	17.615
Time deposits and deposits on call	2.958.395	42.541
Total third parties	<u>35.968.875</u>	
Total deposits from customers	50.915.931	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

- b. Berdasarkan hubungan dan mata uang (lanjutan)

Simpanan dari pihak berelasi tersebut merupakan simpanan dari Pemerintah Daerah dan manajemen kunci.

- i) Giro terdiri dari:

	2019	2018
Pihak berelasi (Catatan 36):		
Rupiah	13.987.576	12.361.096
Mata uang asing	603	625
Pihak ketiga:		
Rupiah	9.826.011	6.912.658
Mata uang asing	11.689	11.386
Jumlah giro dari nasabah	23.825.879	19.285.765

Tingkat bunga rata-rata per tahun:

	2019	2018
Rupiah	1,13%	0,88%
Mata uang asing	0,20%	0,16%

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk giro dari pihak berelasi adalah sama dengan tingkat bunga yang ditawarkan kepada pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat giro yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit (Catatan 11j).

- ii) Tabungan terdiri dari:

	2019	2018
Pihak berelasi (Catatan 36):		
Rupiah	55.905	81.091
Mata uang asing	764	315
Pihak ketiga:		
Rupiah	22.141.340	19.013.296
Mata uang asing	25.629	17.615
Jumlah tabungan dari nasabah	22.223.638	19.112.317

Tingkat bunga rata-rata per tahun:

	2019	2018
Tabungan		
- Simpeda	1,55%	1,58%
- Siklus	1,96%	2,02%
- Haji	0,21%	0,97%
- Tabunganku	0,83%	0,83%

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk tabungan dari pihak berelasi adalah sama dengan tingkat bunga yang ditawarkan kepada pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, tidak terdapat tabungan yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit (Catatan 11j).

17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

- b. Based on relationship and currencies (continued)

These deposits from related parties represent deposits from Regional Governments and key management personnel.

- i) Current accounts consist of:

Related parties (Note 36):	
Rupiah	
Foreign currency	
Third parties:	
Rupiah	
Foreign currency	
Total current accounts from customers	

Average interest rates per annum:

Rupiah	
Foreign currencies	

The average interest rates per annum on current accounts with related parties are similar to those for third parties.

As of December 31, 2019 and 2018, there were no current accounts held under liens and used as security (Note 11j).

- ii) Savings consist of:

Related parties (Note 36):	
Rupiah	
Foreign currencies	
Third parties:	
Rupiah	
Foreign currencies	
Total savings from customers	

Average interest rates per annum:

Savings	
Simpeda -	
Siklus -	
Haji -	
Tabunganku -	

The average interest rates per annum on savings for related parties are similar to those for third parties.

As of December 31, 2019 and December 31, 2018, there were no savings held under liens and used as collateral (Note 11j).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

b. Berdasarkan hubungan dan mata uang (lanjutan)

iii) Jumlah deposito berjangka dan deposito *on call* terdiri dari:

	2019
Pihak berelasi (Catatan 36):	
Rupiah	895.583
Mata uang asing	486
Pihak ketiga:	
Rupiah	13.548.694
Mata uang asing	51.592
Jumlah deposito berjangka	14.496.355

Klasifikasi deposito berjangka dan deposito *on call* berdasarkan jangka waktu sebagai berikut:

	2019
Rupiah:	
- 1 bulan	10.948.524
- 2 bulan	259.061
- 3 bulan	2.948.845
- 6 bulan	73.088
- 12 bulan	161.912
- 18 bulan	145
- 24 bulan	3.142
- Jatuh Tempo	70
- Deposito <i>on call</i>	49.490
	14.444.277
Mata uang asing:	
- 1 bulan	45.105
- 3 bulan	3.983
- 6 bulan	172
- 12 bulan	2.818
	52.078
Jumlah deposito berjangka	14.496.355

Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo:

	2019
Rupiah:	
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	12.256.537
- Lebih dari 1 - 3 bulan	1.967.832
- Lebih dari 3 - 6 bulan	68.864
- Lebih dari 6 - 12 bulan	90.333
- Lebih dari 12 - 18 bulan	747
- Lebih dari 18 - 24 bulan	1.404
- Jatuh Tempo	70
- Deposito <i>on call</i>	49.490
	14.435.277
Mata uang asing:	
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	46.665
- Lebih dari 1 - 3 bulan	2.456
- Lebih dari 3 - 6 bulan	1.527
- Lebih dari 6 - 12 bulan	1.430
	52.078
Jumlah deposito berjangka	14.487.355

Tingkat bunga rata-rata per tahun:

	2019
Rupiah	
- 1 bulan	4,50%
- 2 bulan	4,83%
- 3 bulan	5,49%
- 6 bulan	5,05%
- 12 bulan	5,04%
- 18 bulan	5,00%
- 24 bulan	5,00%
- Deposito <i>on call</i>	3,76%
Mata uang asing:	
- 1 dan 3 bulan	0,48%

17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

b. Based on relationship and currencies (continued)

iii) Time deposits and deposits *on call* consist of:

	2018	Related parties (Note 36):
		Rupiah
	2.502.054	Foreign currencies
	1.875	Third parties:
		Rupiah
	9.971.379	Foreign currencies
	42.541	
Total time deposits	12.517.849	

The details of time deposits and deposits *on call* based on maturities are as follows:

	2018	Rupiah:
		1 month -
	9.505.840	2 months -
	160.589	3 months -
	2.531.649	6 months -
	108.543	12 months -
	152.889	18 months -
	390	24 months -
	2.933	Over Due -
		Deposits on call -
	10.600	
	12.473.433	Foreign currencies:
		1 month -
	40.090	3 months -
	3.779	6 months -
	403	12 months -
	144	
	44.416	Total time deposits
Total time deposits	12.517.849	

Based on remaining period until maturity:

	2018	Rupiah:
		Less than or until 1 month -
	9.505.840	More than 1 - 3 months -
	2.692.238	More than 3 - 6 months -
	108.543	More than 6 - 12 months -
	152.889	More than 12 - 18 months -
	390	More than 18 - 24 months -
	2.933	Over Due -
		Deposits on call -
	10.600	
	12.473.433	Foreign currencies:
		Less than or until 1 month -
	40.090	More than 1 - 3 months -
	3.779	More than 3 - 6 months -
	403	More than 6 - 12 months -
	144	
	44.416	Total time deposits
Total time deposits	12.517.849	

Average interest rates per annum:

	2018	Rupiah
		1 month -
	4,50%	2 months -
	5,00%	3 months -
	5,50%	6 months -
	5,13%	12 months -
	5,13%	18 months -
	5,13%	24 months -
	4,65%	Deposits on call -
		Foreign currencies:
	0,40%	1 and 3 months -

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

- b. Berdasarkan hubungan dan mata uang (lanjutan)

- iii) Jumlah deposito berjangka dan deposito on call terdiri dari (lanjutan):

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka dari pihak berelasi adalah sama dengan tingkat bunga yang diberlakukan terhadap pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit, masing-masing sebesar Rp75.228 dan Rp60.719 (Catatan 11j).

17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

- b. Based on relationship and currencies (continued)

- iii) Time deposits and deposits on call consist of: (continued)

The average interest rates per annum on time deposits from related parties are similar to those for third parties.

As of December 31, 2019 and 2018, time deposits held under liens and used as security were Rp75,228 and Rp60,719, respectively (Note 11j).

18. SIMPANAN DARI BANK LAIN

- a. Berdasarkan segmen

	2019
Konvensional	
Tabungan	
- Siklus	153.641
- Simpeda	226.522
Jumlah tabungan konvensional	380.163
Giro	
- Giro Bank Swasta	50.425
- Giro BPD-SI	3.497
- Giro Bank Pemerintah	53
- Giro BPR Jets	11.355
Jumlah giro konvensional	65.330
Deposito berjangka	
- 1 bulan	161.682
- 2 bulan	-
- 3 bulan	15.310
- 6 bulan	60
- 12 bulan	500
Total deposito konvensional	177.552
Interbank call money	2.170.000
Jumlah simpanan dari bank lain konvensional	2.793.045
Syariah	
- Tabungan mudharabah	28.772
- Giro wadiah	18.733
- Deposito mudharabah	22.880
- SIMA	25.000
Jumlah simpanan dari bank lain syariah	95.385
Jumlah simpanan dari bank lain	2.888.430

- b. Berdasarkan hubungan

	2019
Pihak berelasi:	
- Giro	1.095
- Tabungan	58.564
- Deposito berjangka	78.160
	137.819
Pihak ketiga:	
- Giro	82.968
- Tabungan	350.371
- Deposito berjangka	122.272
- SIMA	25.000
- Interbank call money	2.170.000
	2.750.611
Jumlah simpanan dari bank lain	2.888.430

18. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

- a. Based on segment

	2018	
Conventional		
Savings		
- Siklus	112.502	
- Simpeda	205.091	
Total conventional savings	317.593	
Current accounts		
Private bank current accounts -	25.732	
BPD-SI current accounts -	3.320	
Government bank current accounts -	4	
BPR Jets current accounts -	20.700	
Total conventional current accounts	49.756	
Time deposits		
1 month -	312.681	
2 months -	1.900	
3 months -	11.177	
6 months -	1.060	
12 months -	1.000	
Total conventional deposits	327.818	
Interbank call money	-	
Total deposits from other banks conventional	695.167	
Sharia		
Mudharabah savings -	13.573	
Wadiah current account -	7.735	
Mudharabah time deposit -	18.633	
SIMA -	-	
Total deposits from other banks sharia	39.941	
Total deposits from other banks	735.108	

- b. Based on relationship

	2018	
Related parties:		
Current accounts -	9.275	
Savings -	22.803	
Time deposits -	68.030	
	100.108	
Third parties:		
Current accounts -	48.216	
Savings -	308.363	
Time deposits -	278.421	
SIMA -	-	
Interbank call money -	-	
	635.000	
Total deposits from other banks	735.108	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

Giro merupakan giro Rupiah dengan tingkat bunga rata-rata per tahun masing-masing sebesar 0,72% dan 0,72% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Tabungan merupakan tabungan dalam Rupiah dengan tingkat bunga rata-rata per tahun masing-masing sebesar 1,91% dan 1,93% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Deposito berjangka merupakan deposito dalam Rupiah, dengan tingkat bunga rata-rata per tahun masing-masing sebesar 5,94% dan 5,86% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dengan jangka waktu antara 1 bulan sampai dengan 12 bulan.

Interbank call money merupakan penempatan dalam Rupiah dari bank lain dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 3,03% dan Nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Seluruh simpanan dari bank lain adalah dalam mata uang Rupiah.

19. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank memiliki liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali sejumlah Rp1.037.094 dan Rp566.699 dengan rincian sebagai berikut:

2019						
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Nilai beli kembali/ Buy back value	Beban bunga yang belum diamortisasi/ Unamortised interest expense	Nilai bersih/ Net value
Sertifikat Bank Indonesia						
IDBI 170120364S	425.000	10 Desember / December 10, 2019	7 Januari/ January 7, 2020	423.651	376	423.275
IDBI 170120364S	117.400	11 Desember / December 11, 2019	8 Januari/ January 8, 2020	117.049	121	116.928
IDBI 200320364S	204.600	13 Desember / December 13, 2019	10 Januari/ January 10, 2020	201.721	265	201.456
IDBI 200320364S	300.000	17 Desember / December 17, 2019	14 Januari/ January 14, 2020	295.997	562	295.435
Jumlah/Total	1.047.000			1.038.418	1.324	1.037.094
2018						
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Nilai beli kembali/ Buy back value	Beban bunga yang belum diamortisasi/ Unamortised interest expense	Nilai bersih/ Net value
Sertifikat Bank Indonesia						
IDBI251019364S	50.000	19 Desember / December 19, 2018	3 Januari/ January 3, 2019	47.399	17	47.382
IDBI251019364S	200.000	27 Desember / December 27, 2018	3 Januari/ January 3, 2019	189.611	99	189.512
IDBI151119364S	350.000	19 Desember / December 19, 2018	3 Januari/ January 3, 2019	329.925	120	329.805
Jumlah/Total	600.000			566.935	236	566.699

18. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

Current accounts represent current accounts in Rupiah with average interest rates per annum of 0.72% and 0.72% for the year ended December 31, 2019 and 2018, respectively.

Savings represent Rupiah savings with average interest rates per annum of 1.91% and 1.93% for the year ended December 31, 2019 and 2018, respectively.

Time deposits represent Rupiah time deposits, with average interest rates per annum of 5.94% and 5.86% for the year ended December 31, 2019 and 2018, respectively, with maturities between 1 month until 12 months.

Interbank call money represents Rupiah placements from other banks with average interest rate per annum of 3.03% and Nil for the year ended December 31, 2019 and 2018.

All deposits from other banks are in Rupiah currency.

19. LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENTS

As of December 31, 2019 and 2018, Bank has a number of liability for repo securities Rp1,037,094 and Rp566,699 with details as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PINJAMAN YANG DITERIMA

	2019
Bank DKI	1.300.000
Lembaga Pengelola Dana Bergulir dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	343.247
Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia	226.999
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	-
Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-
Jumlah pinjaman yang diterima	1.870.246

Seluruh pinjaman yang diterima adalah dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

a. PT Bank DKI

Sesuai Perjanjian Kredit Nomor 802/TERMLOAN/GTR/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, Bank memperoleh fasilitas Term Loan dengan plafond maksimum Rp1.300.000 dengan tujuan untuk mendukung pengelolaan likuiditas. Sifat fasilitas kredit dalam perjanjian kredit adalah *Non-Revolving, Committed* dan *Clean Basis*. Bank tidak dapat melakukan penarikan kembali atas jumlah utang pokok yang telah dibayarkan.

Kredit diberikan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal Bank melakukan penarikan kredit. Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan perjanjian kredit wajib membayar bunga sebesar JIBOR average 3 Bulan (5.82% per tanggal 10 Oktober 2019) ditambah margin 1.58% per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit.

b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Merupakan pembiayaan yang diterima dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) berupa fasilitas pembiayaan maksimal Rp425.000, untuk disalurkan kurang lebih 600 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan penyerapan lapangan tenaga kerja kurang lebih 1.200 tenaga kerja.

Pola penyaluran pembiayaan yang diberikan adalah pola *executing* dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun terhitung sejak pencairan.

c. Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Merupakan dana bergulir yang diterima dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk disalurkan dalam rangka program pengadaan perumahan melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan tingkat bunga sebesar 0,3%. Jangka waktu pinjaman adalah mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu pinjaman.

20. BORROWINGS

	2018	
	-	Bank DKI
	226.004	The Ministry of Cooperatives and small and medium scale enterprise
	102.437	Ministry of Housing
	326.322	Republic of Indonesia
	-	Government of East Java Province
	-	Government of the Republic of Indonesia cq the
	70.800	Ministry of Finance
	725.563	Total borrowings

All borrowings are from third parties and in Rupiah currency.

a. PT Bank DKI

According to Credit Agreement Number 802/TERMLOAN/GTR/X/2019 dated October 29, 2019, the Bank obtained a Term Loan facility with a maximum limit of Rp1,300,000 with the purpose to support liquidity management. The nature of credit facilities in a credit agreement is *Non-Revolving, Committed* and *Clean Base*. The bank cannot re-withdraw of paid principal liability.

Credit is given for a 3 (three) month period, starting from the date the Bank makes a credit withdrawal. For each withdrawal, based on credit agreement, obligate to pay an interest rate of 3 months JIBOR average (5.82% per October 10, 2019) plus a margin of 1.58% per year that calculated from the total credit facilities.

b. Revolving Fund Management Institution for Cooperatives and Small and Medium Enterprises

Represents revolving funds from Fund Management Institution for Cooperatives and Small and Medium Enterprise (LPDB-KUMKM) financing facility in the form of a maximum of Rp425,000, to be distributed approximately 600 Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) with the absorption energy field working approximately 1,200 workers.

The distributing patterns of financing provided is executing a pattern with a period of 60 (sixty) months or 5 (five) years from the disbursement.

c. Ministry of Housing of the Republic of Indonesia

Represents revolving funds (dana bergulir) from the Ministry of Housing of the Republic of Indonesia to be distributed in connection with housing procurement through Rumah Sejahtera Housing Loan with interest rate of 0.3%. The loan facilities are for the period from January 1, 2018 to December 31, 2019 and currently in the process for loan period extension.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

d. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan amandemen perjanjian tanggal 4 Mei 2017, Bank mengadakan kerjasama dengan batas pencairan Desember 2016 dan maksimal pengembalian Juli 2019 dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menyalurkan dana bergulir sebagai tambahan modal kerja bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Usaha Kecil Menengah dan Korporasi.

Berdasarkan amandemen perjanjian tanggal 5 Februari 2016, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan batas pencairan Desember 2016 dan maksimal pengembalian Desember 2018 dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menyalurkan dana bergulir sebagai tambahan modal kerja bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.

Berdasarkan amandemen perjanjian tanggal 17 Desember 2009, Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menyalurkan dana bergulir sebagai tambahan modal kerja bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.

20. BORROWINGS (continued)

d. East Java Provincial Government

Based on an amendment agreement dated May 4, 2017, the Bank entered into cooperation agreement with the disbursement deadline on December 2016 and maximum refund on July 2019 with the East Java Provincial Government Program in order to increase the activity of Productive Economic Enterprise of Small and Medium Enterprise and Cooperatives.

Based on amendment agreement dated February 5, 2016, the Bank entered into cooperation agreement with the disbursement deadline on December 2016 and the maximum refund on December 2018 with the East Java Provincial Government to channel the revolving fund as additional working capital for small and medium enterprises and cooperatives with the aim of succeeding East Java Provincial Government Program in order to increase the activity of Productive Economic Enterprises and Cooperatives.

Based on an amendment agreement dated December 17, 2009, the Bank entered into an agreement for a period of 5 (five) years with the East Java Provincial Government to channel the revolving fund as additional working capital for small and medium enterprises and cooperatives with the aim to succeed Program East Java Provincial Government in order to enhance the Productive Economic Business Small and Medium Enterprises and Cooperatives.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

- e. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Merupakan fasilitas pinjaman yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP) No.SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 dan berdasarkan perjanjian pinjaman antara Bank dan Pemerintah Republik Indonesia No. KP-037/DP3/2004 tanggal 16 November 2004 ("Perjanjian Pinjaman"), pinjaman ditujukan untuk pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) sebagai pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau.

Perjanjian pinjaman ini mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir pada tanggal 28 Desember 2011 berdasarkan perjanjian No.AMA-63/KP-037/DSMI/2011 tentang persetujuan penambahan plafond pinjaman sehingga pinjaman maksimum menjadi Rp312.000.

Tingkat suku bunga pinjaman besarnya sama dengan tingkat bunga Surat Utang Pemerintah (SUP) yang dikenakan oleh Bank Indonesia kepada Bank, yaitu sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 3 (tiga) bulan yang ditetapkan tiap 3 (tiga) bulan. Berdasarkan surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No.S-7862/PB/2007 tanggal 16 November 2007, jatuh tempo pinjaman telah diubah menjadi tanggal 10 Desember 2019.

Bank wajib membayar kembali pokok pinjaman yang telah ditarik dalam 5 (lima) kali angsuran tengah tahunan secara prorata setiap tanggal 10 Juni dan tanggal 10 Desember, dengan angsuran pertama pada tanggal 10 Desember 2017 dan terakhir pada tanggal 10 Desember 2019. Bunga pinjaman dihitung sejak tanggal pemindahbukuan dana pertama kali dan bunga dibayar secara triwulanan tiap tanggal 10.

20. BORROWINGS (continued)

- e. The Government of the Republic of Indonesia cq the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia

Represents loan facilities originating from the Government's Debenture Funds (Surat Utang Pemerintah - SUP) No.SU-005/MK/1999 dated December 29, 1999 and based on the loan agreement between the Bank and the Government of the Republic of Indonesia No. KP-037/DP3/2004 dated November 16, 2004, the purpose of this loan is to finance Micro and Small Business Loans (Kredit Usaha Mikro dan Kecil - KUMK) in the form of soft investments and working capital financing.

The loan agreement has been amended several times and the last on December 28, 2011 under the agreement No.AMA-63/KP-037/DSMI/2011 regarding the approval of the addition of the loan so that the maximum loan limit be Rp312,000.

Tertiary loan interest rate equal to the interest rate Government Bonds (SUP) imposed by Bank Indonesia to Banks, ie the interest rate of Bank Indonesia Certificates period of 3 (three) months stipulated every 3 (three) months. Based on a letter from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No.S-7862/PB/2007 dated November 16, 2007, the maturity date of the loan has been changed to December 10, 2019.

Banks are required to pay back the loan principal that has been drawn in 5 (five) times the annual equal semi-annual installments each November 10 and December 10, with the first installment on December 10, 2017 and the last on December 10, 2019. The interest rate is calculated from the date first transferring funds and interest paid on a quarterly basis every 10th.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PERPAJAKAN

a. Utang pajak:

	2019
Pajak penghasilan pasal 21	30.643
Pajak penghasilan pasal 29 (Catatan 21e)	14.461
Pajak penghasilan pasal 23/4 (2)	13.343
Lain-lain	5.319
Jumlah utang pajak	63.766

b. Beban pajak penghasilan badan:

	2019
Pajak kini	488.326
Pajak tangguhan	(698)
Jumlah pajak penghasilan badan	487.628

c. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2019
Laba sebelum beban pajak	1.864.133
Perbedaan tetap:	
Pajak	73.605
Tanggung jawab sosial dan lingkungan, sumbangan, promosi, rapat dan jamuan tamu dan lainnya	12.391
Pakaian dinas	-
Penyisihan kerugian penurunan nilai	8.861
Lain-lain	26.220
Jumlah beda tetap	121.077
Perbedaan temporer:	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	423.201
Cadangan jasa produksi	344.126
Cadangan imbalan kerja	13.748
Pakaian dinas	-
Penerimaan hapusbuku	(9.547)
Pembayaran jasa produksi	(315.110)
Jumlah beda temporer	456.418
Jumlah beda tetap dan temporer	577.495
Taksiran laba kena pajak	2.441.628

Bank akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun 2019 sesuai prinsip *self assessment* berdasarkan perhitungan tersebut diatas.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilaporkan ke kantor pajak.

21. TAXATION

a. Taxes payable:

	2018	
	28.691	Employees' income tax - article 21
	107.647	Corporate income tax - article 29 (Note 21e)
	11.469	Withholding income tax articles 23/4 (2)
	1.634	Others
Total taxes payable	149.441	

b. Corporate income tax expense:

	2018	
	525.507	Current tax
	(32.117)	Deferred tax
Total corporate income tax	493.390	

c. The reconciliation between income before tax expense as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income is as follows:

	2018	
	1.753.698	Income before tax expense
		Permanent differences:
	67.162	Taxes
		Social and environment responsibility, donation, promotion, meetings and entertainment and others
	78.225	Official uniforms
	18.477	Credit provision for impairment losses
	3.307	Others
	52.690	Total permanent differences
	219.861	Temporary differences:
		Provision for impairment losses
	113.121	Provision for employee bonuses
	302.450	Provision for employee benefit
	37.740	Official uniforms
	(35.000)	Write off credit income
	-	Payment for employee bonuses
	(289.842)	Total temporary differences
	128.469	Total permanent and temporary differences
	348.330	Estimated taxable income

The Bank will file its Annual Corporate income Tax Return for 2019 according to the self assessment principle in accordance with the above calculation.

The calculation of corporate income tax for the year ended December 31, 2018 conforms with the Annual Corporate Income Tax Return reported to the tax office.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

- d. Perhitungan beban pajak adalah sebagai berikut:

	2019
Pajak kini	
(Pajak dengan tarif efektif atas taksiran laba kena pajak periode berjalan)	488.326
Beban (manfaat) pajak penghasilan	
tanggungan atas pengaruh beda temporer temporer pada tarif pajak maksimum:	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(84.640)
Cadangan jasa produksi	(68.825)
Cadangan imbalan kerja	(2.750)
Pakaian dinas	-
Penerimaan hapusbuku	1.909
Pembayaran jasa produksi	63.022
Manfaat pajak tanggungan	(91.284)
Dampak perubahan tarif	90.586
Jumlah pajak penghasilan tahun berjalan	487.628
Laba sebelum beban pajak	1.864.133
Taksiran pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	372.827
Pengaruh pajak atas beda tetap	24.215
Jumlah pajak penghasilan tahun berjalan	397.042
Dampak perubahan tarif	90.586
Beban pajak, neto	487.628

- e. Perhitungan utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

	2019
Beban pajak tahun berjalan	488.326
Dikurangi: Pajak penghasilan badan dibayar dimuka - pajak penghasilan - pasal 25	473.865
Kurang bayar pajak penghasilan badan (Catatan 21a)	(14.461)

21. TAXATION (continued)

- d. The computation of tax expense is as follows:

2018	
525.507	Current tax
	(At the effective tax rate on estimated taxable income for the current period)
	Deferred tax expense (benefit)
	of temporary differences
	at the maximum tax rate:
	Provision for impairment losses
	Provision for employee bonuses
	Provision for employee benefit
	Official uniforms
	Write off credit income
	Payment for employee bonuses
	Deferred tax benefit
	The effect of rate changes
	Total corporate income tax current year
	Income before tax expense
	Estimated income tax at applicable tax rate
	Tax effect on permanent differences
	Total corporate income tax current year
	The effect of rate changes
	Tax expense, net

- e. The analysis of corporate income tax payable is as follows:

2018	
525.507	Current year tax expense
	Less: Prepaid corporate income tax - article 25
417.860	Under payment of corporate income tax (Note 21a)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)**f. Aset pajak tangguhan:**

	31 Desember/ December 31, 2018	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to statement of profit or loss	Dampak perubahan tarif/ The effect of rate changes	31 Desember / December 31, 2019	
Cadangan jasa produksi	78.777	-	5.803	(15.755)	68.825	Provision for employee bonuses
Penyisihan kerugian aset produktif	358.043	-	82.731	(71.608)	369.166	Provision for losses on earning assets
Laba yang belum direalisasi atas surat berharga - tersedia untuk dijual	-	(5)	-	-	(5)	Unrealized gain on available for sale of marketable securities
Cadangan imbalan kerja	30.968	16.105	2.750	(6.194)	43.629	Provision for employee benefit
Aset pajak tangguhan	467.788	16.100	91.284	(93.557)	481.615	Deferred tax assets

	31 Desember/ December 31, 2017	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to statement of profit or loss	31 Desember/ December 31, 2018	
Cadangan jasa produksi	72.469	-	6.308	78.777	Provision for employee bonuses
Penyisihan kerugian aset produktif	332.920	-	25.123	358.043	Provision for losses on earning assets
Pakaian dinas	8.750	-	(8.750)	-	Official uniform
Cadangan imbalan kerja	24.666	(3.134)	9.436	30.968	Provision for employee benefits
Aset pajak tangguhan	438.805	(3.134)	32.117	467.788	Deferred tax assets

g. Perubahan tarif pajak

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No.36 tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 25%. Namun demikian berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008, Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka".

Pada akhir tahun 2013, Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.77 Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.56 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka",

21. TAXATION (continued)**f. Deferred tax assets:****g. Changes in tax rate**

Under article 17, paragraph 2 of Law No.7 year 1983 regarding "Income Tax" which has been amended for the fourth time with the Law No.36 year 2008, the corporate income tax rate is 25%. However, based on Law No.36 year 2008 dated September 23, 2008, Government Regulation No.81 year 2007 dated December 28, 2007 regarding "Reduction on Income Tax Rate for Domestic Listed Companies" and the Ministry of Finance Regulation No.238/PMK.03/2008 dated December 30, 2008 regarding "Implementation and Monitoring Procedures for Granting Reduction Rates for Domestic Listed Companies".

At end of 2013, Government Regulation No.81 Year 2007 dated December 28, 2007 was amended by Government Regulation (PP) No.77 Year 2013 dated November 21, 2013 which was amended with Government Regulation (PP) No.56 Year 2015 dated August 3, 2015 regarding "Reduction on Income Tax Rate for Domestic Listed Companies",

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Perubahan tarif pajak (lanjutan)

yang mengatur bahwa wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri bila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, (b) saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, (c) masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham ditempatkan dan disetor penuh, dan (d) ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi sdalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian penurunan tarif pajak penghasilan di atas akan diatur dengan Peraturan pemerintah (PP).

Manajemen berkeyakinan bahwa Bank telah memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan.

Berdasarkan surat keterangan No.DE/I/2020-01511 tanggal 6 Januari 2020 tentang laporan bulanan kepemilikan saham berupa Formulir No.X.H.I-2 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama tahun 2019, semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah terpenuhi.

Sehubungan dengan hal tersebut, pajak penghasilan badan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak 20%.

Dengan adanya keputusan perubahan tarif tersebut, Bank menyampaikan pembetulan SPT ke-1 SPT PPh Badan tahun pajak 2016, 2017 dan 2018 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam pembetulan SPT tersebut, Bank menyatakan lebih bayar sebesar Rp175.989 (2016); Rp211.051 (2017); dan Rp126.299 (2018). Atas lebih bayar tersebut, Bank sedang melakukan permohonan restitusi.

21. TAXATION (continued)

g. Changes in tax rate (continued)

which regulates that domestic listed companies can obtain reduction on income tax rate at 5% (five percent) lower than income tax rate of domestic companies tax payers if the following criterias are met: (a) at least 40% (fourty percent) of the total issued shares are traded in Indonesia Stock Exchange, (b) the shares are owned by at least 300 parties, (c) each party can only own lower than 5% (five percent) of the total issued and fully paid shares, and (d) the above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year. Regulation on application and supervision of the reduction on income tax rate will be provided in the government regulation.

Management believes that the Bank has fulfill all the requirements to obtain the reduction on income tax rate facility.

Based on Letter No. DE/I/2020-01511 dated January 6, 2020 regarding the monthly report of shares ownerships, form No.X.H.I-2 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during 2019, all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year ended December 31, 2019 were fulfilled by Bank.

In relation with the matter above, the Bank's corporate income tax for the year ended December 31, 2019 are calculated using the tax rate of 20%.

Based on the above decision letter regarding incentive income tax rate, Bank submitted first revision of Annual Corporate Income Tax Return for fiscal year 2016, 2017 and 2018 to tax authority. The revision stated that the Bank has overpayment amounting to Rp175,989 (2016); Rp211,051 (2017); dan Rp126,299 (2018). Due to the overpayment, the Bank is currently undertaking the process of filling a restitution request.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2019
Cadangan jasa produksi	344.126
Bunga	89.381
Jumlah beban yang masih harus dibayar	433.507

23. LIABILITAS LAIN-LAIN

	2019	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Rupiah:		
Cadangan imbalan kerja		218.146
Setoran jaminan		90.872
Pokok kredit penerusan yang diterima		10.025
Bunga kredit penerusan yang diterima		3.257
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi		4.611
Provisi dan administrasi kredit		2.698
Lainnya		938
		330.547
Mata uang asing:		
Setoran jaminan		
Dolar Amerika Serikat	125.909	1.748
Lainnya		
Dolar Amerika Serikat	46.820	650
Dolar Singapore	20.650	213
		2.611
Jumlah liabilitas lain-lain		333.158

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019
Saldo awal tahun	478
Penyisihan tahun berjalan	4.133
Saldo akhir tahun	4.611

24. MODAL SAHAM

Pemegang saham Bank, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, dan saldo yang terkait pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

a. Modal dasar

Modal dasar Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	Jumlah saham/ Number of shares
Saham Seri A	24.000.000.000
Saham Seri B	12.000.000.000
Jumlah	36.000.000.000

Saham Seri A dan Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp250 per saham (Rupiah penuh).

22. ACCRUED EXPENSES

	2018	
		Provision for employee bonuses
	315.110	
	83.426	Interest
	398.536	Total accrued expenses

23. OTHER LIABILITIES

	2018	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Rupiah:		
Provision of employee benefit		123.872
Security deposits		68.079
Principal - channeling loans received		10.113
Interest - channeling loans received		3.172
Estimated losses on commitments and contingencies		478
Provision and credit administration		1.745
Others		2.876
		210.335
Foreign currencies:		
Security deposits		
United States Dollar	-	-
Other		
United States Dollar	64.256	924
Singapore Dollar	5.685	60
		984
Total other liabilities		211.319

Estimated losses on commitments and contingencies as of December 31, 2019 and 2018 as follows:

	2018
Saldo awal tahun	-
Provision during the year	478
Saldo akhir tahun	478

24. SHARE CAPITAL

The Bank's shareholders, the number of authorized, issued and paid-up shares and the related balances as of December 31, 2019 and 2018 were as follows:

a. Authorized capital

The Bank's authorized capital as of December 31, 2019 and 2018 were as follows:

	Rupiah/ Rupiah	
Saham Seri A	6.000.000	Series A Shares
Saham Seri B	3.000.000	Series B Shares
Jumlah	9.000.000	Total

Series A and B shares with par value of Rp250 per share (full Rupiah).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. MODAL SAHAM (lanjutan)**a. Modal dasar (lanjutan)**

- Modal dasar Bank semula adalah sebesar Rp2.500.000 yang terbagi atas Rp2.250.000 saham seri A dan Rp250.000 saham seri B dengan nominal per lembar saham Rp1 berdasarkan akta No. 56 tanggal 17 April 2008 dan disahkan oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H. Modal dasar ditingkatkan menjadi Rp9.000.000 yang terbagi atas Rp6.000.000 saham seri A dan Rp3.000.000 saham seri B dengan nilai nominal per lembar saham Rp250 (Rupiah penuh). Terkait dengan peningkatan modal dasar tersebut, Bank telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 pada tanggal 30 April 2012.
- Berdasarkan berita acara rapat pemegang saham luar biasa No. 19 tanggal 19 Maret 2012, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No. 19 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., para pemegang saham menyetujui untuk mengkonversi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.310.000 ke modal ditempatkan dan disetor penuh setelah modal dasar Bank ditingkatkan menjadi Rp9.000.000, secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham dengan nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham, sehingga sisa hasil konversi yang tidak habis dibagi Rp250 (Rupiah penuh) akan dikembalikan kepada masing-masing pemegang saham.
- Pada tanggal 12 Juli 2012 saham Bank secara resmi telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 14.768.508.132 saham atau 99% dari jumlah saham Bank. Saham yang tercatat merupakan saham seri A sebanyak 11.784.971.132 dan saham seri B sebanyak 2.983.537.000 saham. Sementara 149.176.850 saham atau 1% sisanya tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

b. Jumlah saham seri A yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut (dalam angka penuh):

Pemecahan nilai nominal dari Rp1.000.000 per saham (Rupiah penuh) menjadi Rp250 per saham (Rupiah penuh)	6.694.148.000
Konversi cadangan umum	5.239.999.982
Jumlah saham pada akhir tahun	11.934.147.982

c. Jumlah saham seri B yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah 3.068.222.600 dan 3.043.987.000 lembar saham (dalam angka penuh).**24. SHARE CAPITAL (continued)****a. Authorized capital (continued)**

- The previous authorized capital of the Bank was Rp2,500,000 which consisted of Rp2,250,000 series A shares and Rp250,000 series B shares with par value of Rp1 based on deed No. 56 dated April 17, 2008, and was legalized by Notary of Untung Darnosoewirjo, S.H. The authorized capital was increased to be Rp9,000,000 which consisted of Rp6,000,000 series A shares and Rp3,000,000 series B shares with par value of Rp250 (full Rupiah). In relation to the increase in authorised capital, the Bank has obtained approval to amend the Bank's Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 dated April 30, 2012.
- Based on minutes of extraordinary meeting shareholders' No. 19 dated March 19, 2012, as stated in Notarial Deed No. 19 dated March 19, 2012 of Wachid Hasyim, S.H., the shareholders agreed to convert the appropriated retained earnings of Rp1,310,000 to issued and fully paid capital after the authorized capital of the Bank has been increased to be Rp9,000,000, proportionally based on the number of shares held by each shareholders, at par value of Rp250 (full Rupiah) per share, and therefore the residual for which the amount is unable to be fully divided by Rp250 (full Rupiah) are to be returned to each shareholders.
- On July 12, 2012 Bank shares have been officially listed on the Indonesia Stock Exchange. Total shares of the Bank listed on the Indonesia Stock Exchange were 14,768,508,132 shares or 99% of the total shares of the Bank. Listed shares are 11,784,971,132 series A shares and 2,983,537,000 Series B shares. While the 149,176,850 shares or 1% are not listed on the Indonesia Stock Exchange to fulfill the Government Regulation No. 29 of 1999 concerning Purchase of Shares of Commercial Banks.

b. Total issued and fully paid-up capital of series A shares as of December 31, 2019 and 2018, are as follows (in full amount):

Stock split from Rp1,000,000 per share (full Rupiah) to be Rp250 per saham (full Rupiah)
General reserve conversion
Shares at year end

c. Total issued and fully paid-up capital of series B shares as of December 31, 2019 and 2018 are 3,068,222,600 and 3,043,987,000 shares (in full amount).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. MODAL SAHAM (lanjutan)**d. Susunan pemegang saham**

	2019		
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-in capital
Pemegang saham			
Seri A			
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,17%	1.919.228
Pemerintah Kabupaten:			
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	2,47%	92.539
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	2,00%	75.072
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	1,80%	67.509
Kabupaten Malang	253.635.445	1,69%	63.409
Kabupaten Gresik	220.213.170	1,47%	55.053
Kabupaten Tuban	217.418.404	1,45%	54.355
Kabupaten Ngawi	215.763.995	1,44%	53.941
Kabupaten Kediri	144.925.510	0,97%	36.231
Kabupaten Sumenep	144.228.431	0,96%	36.057
Kabupaten Kraksaan	125.931.454	0,84%	31.483
Kabupaten Jember	111.866.875	0,75%	27.967
Kabupaten Lamongan	101.318.315	0,68%	25.330
Kabupaten Sampang	101.175.235	0,67%	25.294
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	0,58%	21.802
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	0,56%	21.160
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	0,52%	19.593
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	0,51%	19.304
Kabupaten Situbondo	76.374.593	0,51%	19.094
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	0,47%	17.674
Kabupaten Lumajang	67.206.045	0,45%	16.802
Kabupaten Pacitan	53.520.271	0,36%	13.380
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	0,30%	11.153
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	0,27%	10.148
Kabupaten Blitar	39.496.395	0,26%	9.874
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	0,25%	9.198
Kabupaten Madiun	32.660.478	0,22%	8.165
Kabupaten Jombang	26.792.899	0,18%	6.698
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	0,16%	5.889
Kabupaten Magetan	19.594.792	0,13%	4.899
Pemerintah Kota:			
Kota Surabaya	319.243.457	2,13%	79.811
Kota Madiun	134.064.427	0,89%	33.516
Kota Malang	108.635.999	0,72%	27.159
Kota Pasuruan	100.075.767	0,67%	25.019
Kota Mojokerto	72.091.751	0,48%	18.023
Kota Batu	38.236.741	0,25%	9.559
Kota Probolinggo	17.397.927	0,12%	4.349
Kota Blitar	16.987.084	0,11%	4.247
Kota Kediri	14.208.273	0,09%	3.552
	11.934.147.982	79,55%	2.983.537
Seri B			
Komisaris:			
- Akhmad Sukardi	833.600	0,01%	208
Direksi:			
- Ferdian Timur Satyagraha	4.744.933	0,03%	1.186
- Rizyana Mirda	1.094.133	0,01%	274
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5%)	3.061.549.934	20,41%	765.387
	3.068.222.600	20,45%	767.056
Jumlah	15.002.370.582	100,00%	3.750.593

24. SHARE CAPITAL (continued)**d. Composition of shareholders**

Shareholders
Series A
Government of East Java Province
Government of Regencies:
Regency of Sidoarjo
Regency of Bojonegoro
Regency of Banyuwangi
Regency of Malang
Regency of Gresik
Regency of Tuban
Regency of Ngawi
Regency of Kediri
Regency of Sumenep
Regency of Kraksaan
Regency of Jember
Regency of Lamongan
Regency of Sampang
Regency of Bondowoso
Regency of Trenggalek
Regency of Mojokerto
Regency of Nganjuk
Regency of Situbondo
Regency of Tulungagung
Regency of Lumajang
Regency of Pacitan
Regency of Pasuruan
Regency of Pamekasan
Regency of Blitar
Regency of Bangkalan
Regency of Madiun
Regency of Jombang
Regency of Ponorogo
Regency of Magetan
Government of Municipalities:
Municipality of Surabaya
Municipality of Madiun
Municipality of Malang
Municipality of Pasuruan
Municipality of Mojokerto
Municipality of Batu
Municipality of Probolinggo
Municipality of Blitar
Municipality of Kediri
Series B
Commissioner:
Akhmad Sukardi -
Directors:
Ferdian Timur Satyagraha -
Rizyana Mirda -
Public (ownership less than 5% each)
Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. MODAL SAHAM (lanjutan)**d. Susunan pemegang saham (lanjutan)**

Pemegang saham	saham/ Number of shares	kepemilikan/ Percentage of ownership	disetor/ Total paid-in capital
Seri A			
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,25%	1.919.228
Pemerintah Kabupaten:			
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	2,47%	92.539
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	2,00%	75.072
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	1,80%	67.509
Kabupaten Malang	253.635.445	1,69%	63.409
Kabupaten Gresik	220.213.170	1,47%	55.053
Kabupaten Tuban	217.418.404	1,45%	54.355
Kabupaten Ngawi	215.763.995	1,44%	53.941
Kabupaten Kediri	144.925.510	0,97%	36.231
Kabupaten Sumenep	144.228.431	0,96%	36.057
Kabupaten Kraksaan	125.931.454	0,84%	31.483
Kabupaten Jember	111.866.875	0,75%	27.967
Kabupaten Lamongan	101.318.315	0,68%	25.330
Kabupaten Sampang	101.175.235	0,68%	25.294
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	0,58%	21.802
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	0,57%	21.160
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	0,52%	19.593
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	0,52%	19.304
Kabupaten Situbondo	76.374.593	0,51%	19.094
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	0,47%	17.674
Kabupaten Lumajang	67.206.045	0,45%	16.802
Kabupaten Pacitan	53.520.271	0,36%	13.380
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	0,30%	11.153
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	0,27%	10.148
Kabupaten Blitar	39.496.395	0,26%	9.874
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	0,25%	9.198
Kabupaten Madiun	32.660.478	0,22%	8.165
Kabupaten Jombang	26.792.899	0,18%	6.698
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	0,16%	5.889
Kabupaten Magetan	19.594.792	0,13%	4.899
Pemerintah Kota:			
Kota Surabaya	319.243.457	2,13%	79.811
Kota Madiun	134.064.427	0,90%	33.516
Kota Malang	108.635.999	0,73%	27.159
Kota Pasuruan	100.075.767	0,67%	25.019
Kota Mojokerto	72.091.751	0,48%	18.023
Kota Batu	38.236.741	0,25%	9.559
Kota Probolinggo	17.397.927	0,12%	4.349
Kota Blitar	16.987.084	0,11%	4.247
Kota Kediri	14.208.273	0,09%	3.552
	11.934.147.982	79,68%	2.983.537
Seri B			
Komisaris:			
- Akhmad Sukardi	833.600	0,01%	208
Direksi:			
- R. Soeroso	6.902.300	0,05%	1.726
- Ferdian Timur Satyagraha	3.646.800	0,02%	912
- Su'udi	1.122.200	0,01%	281
- Tony Sudjiaryanto	892.200	0,01%	223
- Rudie Hardiono	498.200	0,00%	125
- Rizyana Mirda	243.000	0,00%	61
- Hadi Santoso	225.600	0,00%	56
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5%)	3.029.623.100	20,23%	757.406
	3.043.987.000	20,32%	760.997
Jumlah	14.978.134.982	100,00%	3.744.534

24. SHARE CAPITAL (continued)**d. Composition of shareholders (continued)**

Shareholders
Series A
Government of East Java Province
Government of Regencies:
Regency of Sidoarjo
Regency of Bojonegoro
Regency of Banyuwangi
Regency of Malang
Regency of Gresik
Regency of Tuban
Regency of Ngawi
Regency of Kediri
Regency of Sumenep
Regency of Kraksaan
Regency of Jember
Regency of Lamongan
Regency of Sampang
Regency of Bondowoso
Regency of Trenggalek
Regency of Mojokerto
Regency of Nganjuk
Regency of Situbondo
Regency of Tulungagung
Regency of Lumajang
Regency of Pacitan
Regency of Pasuruan
Regency of Pamekasan
Regency of Blitar
Regency of Bangkalan
Regency of Madiun
Regency of Jombang
Regency of Ponorogo
Regency of Magetan
Government of Municipalities:
Municipality of Surabaya
Municipality of Madiun
Municipality of Malang
Municipality of Pasuruan
Municipality of Mojokerto
Municipality of Batu
Municipality of Probolinggo
Municipality of Blitar
Municipality of Kediri
Series B
Commissioner:
Akhmad Sukardi -
Directors:
R. Soeroso -
Ferdian Timur Satyagraha -
Su'udi -
Tony Sudjiaryanto -
Rudie Hardiono -
Rizyana Mirda -
Hadi Santoso -
Public (ownership less than 5% each)
Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. MODAL SAHAM (lanjutan)**e. Pembagian saldo laba**

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana tercantum dalam akta No. 99 tanggal 26 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H. dan akta No. 22 tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn. para Pemegang Saham menyetujui pembagian laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sejumlah dan dengan penggunaan sebagai berikut:

	Laba tahun/ Net income year 2018	Laba tahun/ Net income year 2017
Dividen tunai	683.865	660.386
Cadangan umum	576.443	498.984

Bank membentuk cadangan umum untuk memperkuat modal.

24. SHARE CAPITAL (continued)**e. Distribution of retained earnings**

Based on decisions at Annual General Meetings Report as documented in notarial deeds No.99 dated April 26, 2019 of Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H.. And No.22 dated February 20, 2018 of Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn the shareholders agreed to distribute net income for the year ended December 31, 2018 and 2017 as follows:

Bank established the general reserve to strengthen capital.

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR - NETO

Rincian tambahan modal disetor tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

	2019
Agio saham dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	509.368
Opsi saham untuk program <i>Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)</i>	19.385
Jumlah	528.753

Pada tanggal 12 Juli 2012, Bank telah melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dengan mengeluarkan 2.983.537.000 lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp250 (Rupiah penuh) setiap lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp430 (Rupiah penuh) setiap lembar saham sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Agio saham Rp180 (Rupiah penuh) per saham	537.037
Biaya emisi saham	(27.669)
Agio saham dari IPO	509.368

25. OTHER PAID-IN CAPITAL – NET

Details of other paid in capital as of December 31, 2019 and 2018 as follows:

	2018	
Agio saham dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	509.368	Share premium from Initial Public Offering (IPO)
Opsi saham untuk program <i>Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)</i>	11.235	Stock option for Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) program
Jumlah	520.603	Total

On July 12, 2012, the Bank has made its first Initial Public Offering (IPO) by issuing 2,983,537,000 series B shares amounted to Rp250 (full Rupiah) per share with an offering price at Rp430 (full Rupiah) per share, resulting increase in share premium, as follows:

Share premium Rp180 (full Rupiah) per saham	
Share issuance cost	
Share premium from IPO	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR – NETO (lanjutan)

Program MESOP sebanyak 105.915.000 lembar dilaksanakan mulai tahun 2015 kepada manajemen dan karyawan Bank dan Program MESOP akan berakhir pada tahun 2020. Sampai dengan saat ini telah tereksekusi 60.450.000 lembar saham dari Program MESOP sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Agio saham Program MESOP Tahap I Rp200 (Rupiah penuh) per saham Tereksekusi 30.712.400 lembar	6.355
Agio saham Program MESOP Tahap II Rp159 (Rupiah penuh) per saham Tereksekusi 27.820.600 lembar	4.549
Agio saham Program MESOP Tahap III Rp349 (Rupiah penuh) per saham Tereksekusi 1.917.000 lembar	8.481
Agio saham dari Program MESOP	19.385

Program MESOP Tahap I telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2016 - 13 November 2016, tanggal 1 Februari 2017 - 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 - 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018- 15 Maret 2018, dan tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019 dengan harga Rp450 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 31.774.500 lembar saham atau 100% dari 31.774.500 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap I dengan jumlah nominal sebesar Rp14.298.525.000 (Rupiah penuh).

Program MESOP Tahap II telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2017 - 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018- 15 Maret 2018, 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, dan tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019 dengan harga Rp409 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 28.610.600 lembar saham atau 90,04% dari 31.774.500 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap II dengan jumlah nominal sebesar Rp11.701.735.400 (Rupiah penuh)

Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, dan 1 Agustus 2019 - 11 September 2019 dengan harga Rp599 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 24.300.500 lembar saham atau 57,36% dari 42.366.000 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap III dengan jumlah nominal sebesar Rp14.555.999.500 (Rupiah penuh)

25. OTHER PAID-IN CAPITAL – NET (continued)

MESOP Program as much as 105,915,000 shares, started 2015 to the management and employee of the Bank and will be expire in 2020. Up to now 60.450.000 MESOP shares have been executed, resulting shares agio additional:

Share Agio MESOP Program Phase I Rp200 (Rupiah) per share executed 30,712,400 shares.
Share Agio MESOP Program Phase II Rp159 (Rupiah) per share executed 27,820,600 shares
Share Agio MESOP Program Phase III Rp349 (Rupiah) per share executed 1,917,000 shares
Share Agio MESOP Program

The MESOP Program Phase I has been implemented from August 1, 2016 - November 13, 2016, February 1, 2017 - March 13, 2017, August 1, 2017 - November 13, 2017, February 1, 2018- March 15, 2018, and August 1, 2019 - September 11, 2019 at Rp450 per share with the total number of shares purchased by participants is 31,774,500 shares, or 100% of 31,774,500 shares option rights granted in Phase I with a total nominal amount of Rp14,298,525,000 (full Rupiah).

The MESOP Program Phase II has been implemented from August 1, 2017 - November 13, 2017, February 1, 2018- March 15, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, and August 1, 2019 - September 11, 2019 at Rp409 per share, with the total number of shares purchased by participants is 28,610,600 shares or 90.04% of 31,774,500 shares option rights granted in Phase II with a total nominal amount of Rp11,701,735,400 (full Rupiah).

The MESOP Program Phase III has been implemented from August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, and August 1, 2019 - September 11, 2019 at Rp599 per share, with the total number of shares purchased by participants is 24,300,500 shares or 57.36% of 42,366,000 shares option rights granted in Phase III with a total nominal amount of Rp14,555,999,500 (full Rupiah).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PENERUSAN KREDIT

Bank mengadakan perjanjian dengan berbagai pihak penyedia dana untuk menyalurkan kredit ke sektor usaha tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. Bank tidak menanggung risiko atas kredit yang disalurkan tersebut, tetapi berkewajiban melaksanakan, menatausahakan dan mengelola dana kredit yang dikeluarkan dan sebagai imbalan Bank menerima jasa administrasi atas penerusan kredit sebesar 1% dari kredit yang disalurkan.

a. Bank Indonesia

Pada tanggal 26 November 1998, 21 November 1999 dan 11 Agustus 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bank Indonesia untuk menyalurkan kredit likuiditas Bank Indonesia, masing-masing dalam bentuk "Kredit Likuiditas Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan" (KUAUBP), "Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro" (KPKM) dan "Kredit Usaha Tani" (KUT).

b. Pemerintah Propinsi Jawa Timur

Berdasarkan amandemen perjanjian No.518/6533/021/2016 dan No.054/088/IV/2016/PKS/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 18 April 2016, Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menyalurkan dana bergulir sebagai tambahan modal kerja bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu pinjaman.

c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Bank sebagai penyalur dana bergulir yang bersumber dari dana APBN mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil, melalui:

- Penguatan modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sektor agribisnis untuk mensukseskan program Pemerintah yang meliputi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha agribisnis anggota koperasi dan masyarakat berdasarkan perjanjian tanggal 19 Januari 2004 dengan jangka waktu 25 tahun.
- Program Penyediaan Modal dan Padanan (MAP) Awal bagi usaha kecil, menengah dan koperasi melalui KSP/USP koperasi dengan tujuan megembangkan usaha UKM pada sentra yang belum tersedia pembiayaan secara memadai berdasarkan perjanjian tanggal 8 November 2003 dan perjanjian ini berakhir atas kesepakatan kedua belah pihak.

26. CHANNELING LOANS

The Bank entered into agreements with lenders to distribute credit for certain business sectors as determined by the lenders. The Bank does not have any credit risk pertaining to the channeling loans, but it is responsible to implement, administer and manage the funds distributed and the Bank collects an administration fee for channeling loans of 1% of the loans disbursed.

a. Bank Indonesia

On November 26, 1998, November 21, 1999 and August 11, 1999, the Bank entered into cooperation agreements with Bank Indonesia to distribute liquidity credits on behalf of Bank Indonesia in the form of "Kredit Likuiditas Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan" (KUAUBP), "Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro" (KPKM) and "Kredit Usaha Tani" (KUT).

b. Government of East Java Province

Based on an amendment agreement No.518/6533/021/2016 and No.054/088/IV/2016/PKS/DIR/KRD.AGR.RTL, dated April 18, 2016, the Bank entered into a 5 (five) years cooperation agreement with the Government of East Java Province to distribute revolving funds for additional working capital for Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives in order to assist the Government of East Java Province's program involving the improvement of Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives and currently in processing for loan period extension.

c. Ministry of Cooperatives and Small and Medium Scale Enterprises

Bank as a channeling of revolving funds sourced from APBN funds with Cooperation Agreement with Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises for Small and Micro Entrepreneur Development Program, through:

- *Strengthening the capital of cooperatives in the agribusiness sector in order to successfully implement the improvement programs for the members of cooperatives and society based on agreement dated January 19, 2004 for a period of 25 years.*
- *Initial capital and matching fund program for small and medium enterprise and cooperative through KSP/USP cooperative with the goal of developing UKM in the area that have not been adequately provided financing under the agreement dated November 8, 2003 and its expiration based on agreement of both parties.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)

d. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pada tanggal 4 Agustus 1993, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk meneruskan pinjaman Pemerintah dari *Islamic Development Bank* (IDB) dalam rangka membiayai proyek Rumah Sakit Islam Surabaya.

e. Yayasan Dana Sejahtera Mandiri

Pada tanggal 19 Juli 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan para pihak, yaitu:

- (1) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Pertanian dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha agribisnis dengan Kredit Taskin Agribisnis.
- (2) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) dengan Kredit Taskin UKMK.
- (3) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat dengan kredit Taskin Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Taskin Inkra).

26. CHANNELING LOANS (continued)

d. Finance Ministry of the Republic of Indonesia

On August 4, 1993, the Bank entered into a cooperation agreement with the Finance Department of the Republic of Indonesia. Under this agreement, the Bank will distribute Government loans from the Islamic Development Bank (IDB) to finance the development of the Surabaya Islamic Hospital.

e. Dana Sejahtera Mandiri Foundation

On July 19, 1999, the Bank entered into cooperation agreements with the following parties:

- (1) The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Agriculture Department and Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through agribusiness development involving loans in the form of Kredit Taskin Agribisnis.
- (2) The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Cooperatives Department and Small and Medium Scale Enterprises Division and the Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives (Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi-UKMK) involving loans in the form of Kredit Taskin UKMK.
- (3) The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Industrial and Trading Department and Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through small scale industry and home industry development involving loans in the form of Kredit Taskin Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Taskin Inkra).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)

- f. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur

Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 5 tahun dengan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur untuk menyalurkan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang meliputi penyaluran kredit dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan dan pengawasan, pengembalian serta pemanfaatan dana bergulir oleh koperasi. Berdasarkan amandemen perjanjian tanggal 6 Desember 2013, perjanjian jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2016. Pada tanggal 10 Agustus 2016, telah dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun berdasarkan perjanjian No.518/15709/108.5/2016 dan No.054/210/SP/DIR/KRD.AGR.RTL.

- g. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia

Pada tanggal 23 Juli 1999, Bank mengadakan kerjasama dengan Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia sebagai penyalur Kredit Usaha Hutan Rakyat yang bertujuan untuk pengembangan Usaha Hutan Rakyat.

- h. Yayasan Abadi Karya Bhakti

Pada tanggal 9 Januari 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Yayasan Abadi Karya Bhakti dan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin serta Departemen Pertanian untuk menyelenggarakan Kredit Taskin Agribisnis. Jangka waktu kerjasama terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani sampai dengan seluruh kredit yang disalurkan dilunasi.

26. CHANNELING LOANS (continued)

- f. Cooperatives and Small and Medium Enterprises Department of East Java Province

Bank entered into a cooperation agreement for a period of 5 years with the Cooperatives and Small and Medium Enterprises Department of East Java Province to distribute revolving funds from the Regional Income and Expenditures Budget (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah - APBD) of East Java Province in order to provide assistance to the Government of East Java Province's programs for loan distribution and utilization, directing, monitoring, supervising and repayment and utilization of revolving funds (dana bergulir) by cooperatives (Koperasi). Based on the amendment agreement on December 6, 2013, the agreement was matured on December 16, 2016. On August 10, 2016, the agreement has been extended for a period of 3 (three) years based on agreement No.518/15709/108.5/2016 and No.054/210/SP/DIR/KRD.AGR.RTL.

- g. Forestry and Plantation Department of the Republic of Indonesia

On July 23, 1999, the Bank entered into a cooperation agreement with the Forestry and Plantation Department of the Republic of Indonesia for distribution of loans for the purpose of the People's Forestry Business Development activities.

- h. Abadi Karya Bhakti Foundation

On January 9, 1999, the Bank entered into a cooperation agreement with the Abadi Karya Bhakti Foundation and the Coordinating State Minister of People's Welfare and Poverty Eradication Division and the Agriculture Department to manage loans involving Kredit Taskin Agribisnis for the period from the signing of the agreement until repayment of all loans.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)

i. Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur

Berdasarkan amandemen perjanjian No.188.4/2490/115.01/2014 dan No.052/039.1/SP/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 25 Maret 2014, Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 3 tahun dengan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang meliputi penyaluran pinjaman dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengembalian serta pemanfaatan dana bergulir oleh Koperasi Unit Desa ("KUD") untuk Koperasi Persusuan dalam rangka pengadaan peralatan peternakan guna perbaikan kualitas susu sapi perah rakyat. Dalam perjanjian tersebut, Bank sebagai penyalur dana bergulir modal pengadaan peralatan peternakan untuk perbaikan kualitas susu bagi KUD untuk Koperasi Persusuan yang bersumber dari APBD Propinsi Jawa Timur sub sektor peternakan.

Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan penyedia dana adalah sebagai berikut:

	2019
Bank Indonesia	402.869
Pemerintah Propinsi Jawa Timur	100.276
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	56.294
Departemen Keuangan Republik Indonesia	53.626
Yayasan Dana Sejahtera Mandiri	15.942
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia	15.326
Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	14.096
Yayasan Abadi Karya Bhakti	6.038
Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur	1.876
Jumlah	666.343

26. CHANNELING LOANS (continued)

i. Livestock Division of East Java Province
(Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur)

Based on an agreement amendment No.188.4/2490/115.01/2014 and No.052/039.1/SP/DIR/KRD.AGR.RTL dated March 25, 2014, the Bank entered into a cooperation agreement for a period of 3 years with the Livestock Division of East Java Province in order to provide assistance to the Government of East Java Province in its program for loan distribution and utilization, directing, monitoring, supervising and repayment and utilization of revolving funds (dana bergulir) by Village Union (Koperasi Unit Desa) - KUD for Milk Union (Koperasi Persusuan) in connection with the procurement of equipment to improve the quality of milk produced by farmers. In accordance with this agreement, the Bank acts as agent for revolving funds (dana bergulir) from the Regional Income and Expenditures Budget (APBD) of the East Java Province Livestock Sector Division.

The details of balances of channeling loans based on the sources of funds (lenders) are as follows:

	2018
Bank Indonesia	403.344
Government of East Java Province	113.671
The Ministry of Cooperatives	
Small and Medium Scale Enterprises	58.855
Department of Finance	
of the Republic of Indonesia	
Dana Sejahtera Mandiri Foundation	56.698
Forestry and Plantation Department	15.942
of the Republic of Indonesia	
Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises	15.326
Abadi Karya Bhakti Foundation	12.993
Livestock Division of East Java Province	5.995
Total	684.715

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)

Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	2019
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	476.096
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	53.622
Pertanian, perburuan dan kehutanan	52.954
Perdagangan besar dan eceran	41.373
Perikanan	11.955
Penyedia akomodasi, makanan dan minuman	9.726
Industri pengolahan	7.141
Kegiatan yang belum jelas batasannya	6.253
Perantara keuangan	6.271
Transportasi, perdagangan dan komunikasi	572
Jasa perorangan melayani rumah tangga	255
Konstruksi	66
Real estate, usaha persewaan dan jasa	51
Pertambangan dan penggalian	8
Jumlah	666.343

27. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut:

	2019
KOMITMEN	
Liabilitas komitmen	
Rupiah:	
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	3.850.264
KONTINJENSI	
Tagihan kontinjensi	
Rupiah:	
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	104.410
Lainnya	13
Jumlah tagihan kontinjensi	104.423
Liabilitas kontinjensi	
Rupiah:	
Bank garansi yang diberikan	2.257.934
Mata uang asing:	
Bank garansi yang diberikan dan revocable L/C	80.092
Jumlah liabilitas kontinjensi	2.338.026
Jumlah liabilitas kontinjensi, neto	2.233.603
Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi, neto	6.083.867

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank tidak mempunyai tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi.

Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia masing-masing adalah sebesar Rp371.235 dan Rp66.365 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

26. CHANNELING LOANS (continued)

The details of balances of channeling loans based on economic sector are as follows:

	2018	
	477.063	Social culture and community services
	56.698	Health service and social activities
	55.802	Agriculture, hunting and forestry
	48.067	Wholesale and retail
	15.880	Fishery
	10.023	Accommodation, food and beverages
	9.003	Processing industry
	6.554	Undefined activities
	4.971	Financial intermediary
	143	Transportation, trading and communication
	317	Individual service which serve households
	135	Construction
	51	Real estate, rental and business services
	8	Mining and quarrying
	684.715	Total

27. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The Bank has receivables and liabilities involving commitments and contingencies as follows:

	2018	
		COMMITMENTS
		Commitment liability
		Rupiah:
		Unused loan commitments granted to debtors
		CONTINGENCIES
		Contingent receivables
		Rupiah:
		Interest income on past due accounts
		Others
		Total contingent receivables
		Contingent liabilities
		Rupiah:
		Bank guarantees issued
		Foreign currencies:
		Bank guarantees issued and revocable L/Cs
		Total contingent liabilities
		Total contingent liabilities, net
		Total commitment and contingent liabilities, net

As of December 31, 2019 and 2018, the Bank has no outstanding commitment and contingent receivables and liabilities involving related parties.

Minimum allowance for impairment losses for commitments and contingencies required by Bank Indonesia as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp371,235 and Rp66,365, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

28. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

	2019
Pihak berelasi (Catatan 36)	
Kredit yang diberikan	16.876
Margin dan pendapatan bagi hasil	750
Pihak ketiga	
Kredit yang diberikan	4.098.302
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	741.114
Surat berharga	
Biaya perolehan diamortisasi	741.153
Margin dan pendapatan bagi hasil	135.234
Provisi	71.929
Sertifikat Bank Indonesia	24.288
Lainnya	9.370
Jumlah pendapatan bunga dan syariah	5.839.016

28. INTEREST AND SHARIA INCOME

	2018	
		Related parties (Note 36)
	8.782	Loans
	471	Margin and profit-sharing revenue
		Third parties
		Loans
	3.885.114	Placements with Bank Indonesia and other banks
	621.200	Marketable securities
		Amortised cost
	471.446	Margin and profit-sharing revenue
	111.560	Provision
	63.430	Certificates of Bank Indonesia
	34.352	Others
	4.384	
Jumlah pendapatan bunga dan syariah	5.200.739	Total interest and sharia income

29. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH

	2019
Deposito berjangka	1.135.911
Tabungan	280.130
Giro	248.577
Premi penjaminan Pemerintah	114.186
Pinjaman yang diterima	40.595
Bagi hasil <i>mudharabah</i>	17.354
Premi asuransi lainnya	2.662
Jumlah beban bunga dan syariah	1.839.415

29. INTEREST AND SHARIA EXPENSE

	2018	
	899.263	Time deposits
	247.229	Savings accounts
	215.440	Current accounts
	95.829	Premiums on Government guarantees
	47.413	Borrowings
	5.061	Mudharabah profit-sharing expense
	2.397	Other insurance premiums
Jumlah beban bunga dan syariah	1.512.632	Total interest and sharia expense

Beban bunga kepada pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 36.

Interest expense involving related parties is disclosed in Note 36.

30. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA – LAINNYA

	2019
<i>Fee</i> atas transaksi elektronik	110.711
Administrasi bank garansi	19.111
Referensi bank	7.454
Taksasi kredit	6.416
Penjualan barang cetakan	2.286
Administrasi warkat kliring	167
Administrasi pembiayaan syariah	-
Lainnya	33.714
Jumlah pendapatan lainnya	179.859

30. OTHER OPERATING INCOME – OTHERS

	2018	
	78.234	Electronic transaction fee
	36.404	Bank guarantees administration
	11.369	Bank references
	5.892	Appraisals for loans
	2.087	Proceeds from selling printed materials
	301	Administration for clearing services
	15.315	Sharia financing administration
	1.535	Others
Jumlah pendapatan lainnya	151.137	Total other operating income

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**31. PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI
ATAS ASET KEUANGAN**

Merupakan penyisihan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan.

	2019
Kredit yang diberikan	
Modal kerja	258.782
Konsumsi	84.483
Investasi	18.141
Jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan	361.406
Giro pada bank lain	10
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	55
Surat berharga	4.661
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	4.133
Jumlah	370.265

32. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN KARYAWAN

	2019
Gaji pegawai	429.572
Bonus pegawai	344.126
Tambahan penghasilan pegawai	194.481
Asuransi dan iuran dana pensiun	174.579
Sewa tenaga kerja	107.723
Tunjangan pajak penghasilan pegawai	72.664
Pendidikan dan latihan	71.452
Imbalan kerja	19.406
Pengobatan	16.386
Gaji Direksi	8.586
Rekreasi dan olahraga	5.040
Honorarium Dewan Komisaris	4.590
Tambahan penghasilan Direksi	2.700
Tambahan penghasilan Komisaris	1.841
Perumahan Direksi	1.578
Lainnya	4.670
Jumlah beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan	1.459.394

**31. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES ON
FINANCIAL INSTRUMENTS ASSETS**

Represents provision for impairment losses of loan.

	2018	
		Loans
	72.504	Working capital
	32.925	Consumption
	25.056	Investment
Total provision for impairment losses of loans	130.485	
Current accounts with other banks	15	
Placement with Bank Indonesia and other banks	2.302	
Marketable securities	513	
Estimated losses on commitments and contingencies	478	
Total	133.793	

32. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

	2018	
	426.584	Employee salaries
	315.077	Employee bonuses
	166.700	Additional income for employees
	231.111	Insurance and pension fund contributions
	97.627	Outsourcing
	66.491	Tax allowances - employees' salaries
	51.333	Education and training
	14.417	Employee benefit
	15.266	Medical
	14.080	Directors' salaries
	4.377	Recreation and sport
	2.954	Commissioners' honoraria
	1.546	Additional compensation for Directors
	618	Additional compensation for Commissioners
	2.304	Housing for Directors
	1.426	Others
Total salaries and employee benefit	1.411.911	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2019
Jasa otomasi	123.584
Sewa	114.020
Perjalanan dinas	75.112
Alat tulis dan barang cetak	58.320
Pemeliharaan	54.232
Penyusutan aset tetap (Catatan 14)	44.993
Listrik, air dan telekomunikasi	44.651
Promosi	35.889
Amortisasi beban ditangguhkan	23.224
Sumbangan	20.031
Premi asuransi pertanggungan lainnya	19.104
Tanggung jawab sosial dan lingkungan	15.968
Penagihan	12.080
Keamanan	9.321
Pengawasan, pemeriksaan dan jasa tenaga ahli	9.312
Pajak lainnya	8.465
Lainnya	15.651
Jumlah beban umum dan administrasi	683.957

33. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2018	
	115.612	Automation services
	112.198	Rental
	81.260	Official/business travel
	49.186	Stationery and printed materials
	56.854	Maintenance
	47.505	Depreciation of fixed assets (Note 14)
	38.389	Electrical, water and telecommunications
	31.495	Promotion
	21.911	Amortization of deferred charges
	16.480	Donations
	16.931	Other insurance premiums
	11.045	Social and environment responsibility
	71.630	Collection
	8.978	Security
	9.004	Supervision, audit and professional services
	6.282	Other taxes
	11.714	Others
Total general and administrative expenses	706.474	

34. BEBAN LAINNYA

	2019
Tanda mata, hadiah dan umum	84.084
Kliring dan transfer	41.855
Rapat dan jamuan tamu	14.915
Penelitian dan pengembangan	3.590
Kegiatan keagamaan	2.785
Provisi, komisi dan fee	42
Lainnya	16.115
Jumlah beban lainnya	163.386

34. OTHER EXPENSES

	2018	
	81.821	Souvenirs, gifts and general
	34.662	Clearing and transfers
	12.572	Meetings and entertainment
	7.018	Research and development
	2.073	Religious activities
	16	Provision, commission and fee
	5.167	Others
Total other expenses	143.329	

35. LABA PER SAHAM DASAR

	2019
Laba untuk perhitungan laba per saham dasar	1.376.505
Rata-rata tertimbang jumlah saham	14.994.423.326
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	91,80

35. BASIC EARNINGS PER SHARE

	2018	
	1.260.308	Income for computation of basic earnings per share
	14.976.603.934	Weighted average number of shares
Basic earnings per share (in full Rupiah)	84,15	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Pihak berelasi	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship
Pemerintah Propinsi Jawa Timur	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Surabaya	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Jember	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Pasuruan	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Tuban	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Situbondo	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Kediri	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Lumajang	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Sampang	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Malang	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Gresik	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Mojokerto	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Pacitan	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Batu	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Jombang	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Madiun	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Blitar	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Magetan	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Probolinggo	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Blitar	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Madiun	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Kediri	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Sumenep	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham/Shareholder
RSUD Dr. Soetomo	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ <i>Owned by the ultimate shareholder</i>
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ <i>Owned by the ultimate shareholder</i>
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif	Karyawan kunci/ <i>Key management personnel</i> Pengurus/ <i>Management</i>

36. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

Sifat dari transaksi/ Nature of transactions	Related parties
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of East Java Province
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Surabaya City
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Malang Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Jember Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Pasuruan City
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Banyuwangi Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Probolinggo Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Bondowoso Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Sidoarjo Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Tuban Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Situbondo Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Kediri Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Lumajang Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Lamongan Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Nganjuk Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Mojokerto Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Sampang Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Malang City
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Pasuruan Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Bangkalan Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Gresik Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Mojokerto City
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Pacitan Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Batu City
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Ngawi Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Jombang Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Madiun Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Pamekasan Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Tulungagung Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Blitar Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Ponorogo Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Trenggalek Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Magetan Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Bojonegoro Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Probolinggo City
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Blitar City
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Madiun City
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Kediri City
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Sumenep Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Bojonegoro Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Lamongan Regency
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Malang Regency
Kredit yang diberikan/ <i>Loans</i>	RSUD Dr. Soetomo
Kredit yang diberikan/ <i>Loans</i>	PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur
Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	
Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>	Board of Commissioners.
Beban tenaga kerja/ <i>Personnel expenses</i>	Board of Directors and executive officers

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Saldo aset produktif, simpanan, pinjaman yang diterima dan komitmen dan kontinjensi dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2019
ASET	
Kredit yang diberikan	
RSUD Dr. Soetomo	93.973
PT BPR Jawa Timur	26.730
Pinjaman manajemen kunci	128.489
RSUD Dr. Soedono Madiun	57.439
Lain-lain	14.265
Jumlah kredit diberikan (Catatan 11)	320.896
Persentase terhadap jumlah aset	0,42%

	2019
LIABILITAS	
Simpanan dari nasabah (Catatan 17)	14.940.917
Persentase terhadap jumlah liabilitas	22,12%
Simpanan dari bank lain (Catatan 18)	137.819
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,20%
Cadangan imbalan kerja	22.846
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,03%

	2019
LABA RUGI DAN PENGHASILAN	
KOMPREHENSIF LAIN	
Pendapatan bunga (Catatan 28)	17.626
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga dan syariah	0,30%
Beban bunga dan syariah	728.486
Persentase terhadap jumlah beban bunga dan syariah	39,60%

36. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The outstanding balances of earning assets, deposits, borrowings and commitments and contingencies with related parties were as follows:

	2018
ASSETS	
Loans	
RSUD Dr. Soetomo	111.017
PT BPR Jawa Timur	11.106
Loans to key managements	118.098
RSUD Dr. Soedono Madiun	
Others	411
Total loans (Note 11)	240.632
Percentage to total assets	0,38%

	2018
LIABILITIES	
Deposits from customers (Note 17)	14.947.056
Percentage to total liabilities	27,57%
Deposits from other banks (Note 18)	100.108
Percentage to total liabilities	0,18%
Provision of employee benefits	14.368
Percentage to total liabilities	0,03%

	2018
PROFIT OR LOSS AND	
OTHER COMPREHENSIVE INCOME	
Interest income (Note 28)	9.253
Percentage to total interest and sharia income	0,18%
Interest and sharia expenses	538.904
Percentage to total interest and sharia expenses	35,63%

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Komitmen dan kontinjensi

Tidak terdapat saldo komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Kompensasi manajemen kunci

Kompensasi kepada personil manajemen kunci Bank (diluar Komisaris dan Direksi) adalah sebagai berikut:

	2019
Gaji	20.208
Jasa produksi	9.337
Tunjangan	10.866
Imbalan pasca kerja	2.787
Jumlah	43.198

Jumlah remunerasi yang telah dan akan dibayar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 untuk Dewan Komisaris, masing-masing adalah Rp9.485 dan Rp10.365 dan untuk Direksi, masing-masing adalah Rp42.398 dan Rp36.974.

**36. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Commitments and contingencies

There were no commitments and contingencies involving related parties as of December 31, 2019 and 2018.

Compensation of key management personnel

The compensation of key management personnel of the Bank (excluding Commissioners and Directors) are follows:

	2018	
	22.115	Salary
	13.641	Production bonus
	9.220	Allowance
	2.405	Post employee benefits
	47.381	Total

Total remuneration paid and payable for the years ended December 31, 2019 and 2018 to the Board of Commissioners were Rp9,485 and Rp10,365, respectively, and to the Board of Directors were Rp42,398 and Rp36,974, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. INFORMASI SEGMENT USAHA

Bank mempertimbangkan jenis usaha sebagai segmen operasi dan segmen geografis.

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang operasi dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

Rincian setelah eliminasi

	2 0 1 9		
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Total/ Total
Aset	74.329.157	2.386.133	76.715.290
Liabilitas	65.146.225	2.383.413	67.529.638
Pendapatan operasional	4.258.835	214.746	4.473.581
Laba operasional	1.794.287	2.292	1.796.579
	2 0 1 8		
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Total/ Total
Aset	60.455.157	2.233.961	62.689.118
Liabilitas	51.983.040	2.234.142	54.217.182
Pendapatan operasional	3.916.264	185.164	4.101.428
Laba (rugi) operasional	1.706.089	(168)	1.705.921

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha geografis dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

	2 0 1 9			
	Jawa Timur/ East Java	Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total
Aset	70.886.010	6.328.728	499.448	76.715.290
Liabilitas	61.720.356	6.308.730	499.448	67.529.638
Pendapatan operasional	4.297.644	175.937	-	4.473.581
Laba operasional	1.776.581	19.998	-	1.796.579
	2 0 1 8			
	Jawa Timur/ East Java	Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total
Aset	59.953.320	3.230.508	494.710	62.689.118
Liabilitas	51.486.799	3.225.092	494.709	54.217.182
Pendapatan operasional	3.947.421	154.007	-	4.101.428
Laba (rugi) operasional	1.700.505	5.416	-	1.705.921

37. SEGMENT INFORMATION

The Bank considers the nature of its business as the operating segment and geographical segment.

Information concerning the operating segment information of the Bank is set out in the table below:

The breakdown after elimination

Assets
Liabilities
Operating income
Income from operations

Assets
Liabilities
Operating income
Income (loss) from operations

Information concerning the geographical segment information of the Bank is set out in the table below:

-
Assets
Liabilities
Operating income
Income from operations

Assets
Liabilities
Operating income
Income (loss) from operations

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Rincian eliminasi

	2019		
	Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java		
	Jawa Timur/ East Java	Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java	Total/ Total
Aset	70.386.562	6.328.728	76.715.290
Liabilitas	61.220.908	6.308.730	67.529.638
Pendapatan operasional	4.297.644	175.937	4.473.581
Laba operasional	1.776.581	19.998	1.796.579
	2018		
	Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java		
	Jawa Timur/ East Java	Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java	Total/ Total
Aset	59.458.610	3.230.508	62.689.118
Liabilitas	50.992.090	3.225.092	54.217.182
Pendapatan operasional	3.947.421	154.007	4.101.428
Laba (rugi) operasional	1.700.505	5.416	1.705.921

Assets
Liabilities
Operating income
Income from operations

Assets
Liabilities
Operating income
Income (loss) from operations

38. MANAJEMEN RISIKO

Fungsi manajemen risiko dalam pelaksanaannya melakukan identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, *monitoring*, dan pengendalian risiko terkait pula pengembangan sistem teknologi dan informasi manajemen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola risiko.

Penerapan manajemen risiko di Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pengelolaan risiko tidak hanya terbatas pada pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap risiko-risiko yang terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank sangatlah penting, termasuk membentuk beberapa unit kerja yang bersifat permanen maupun komite untuk menunjang proses pengendalian risiko. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Divisi Pengendalian Risiko serta beberapa komite seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Manajemen Kepegawaian dan Komite Pengarah IT.

Bank selalu menyempurnakan seluruh ketentuan internal terkait pengelolaan risiko, termasuk dari sisi kebijakan, pedoman, prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi.

38. RISK MANAGEMENT

Risk management function includes identification, assessment, measurement, evaluation, monitoring and risk controls, including development of technology and management information systems and improvement of human resources quality in risk management

Implementation of Bank risk management in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 regarding Application of Risk Management for Commercial Banks.

Risk management is not merely related to monitoring, reporting, and evaluating the risks, but also detecting and anticipating the possible risks.

Active monitoring from the Boards of Commissioners and Directors is essential, including establishing several permanent working units or ad hoc committees to support the risks control process. This is implemented by establishing a Risk Management Division and other several committees such as Risk Monitoring Committee, Risk Management Committee, Assets and Liabilities Committee, Personnel Management and IT Steering Committee.

The Bank continuously improves internal policies related to risk management, including policies, standardized operations, procedures, and information technology utilization.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. RISIKO KREDIT

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Setiap triwulan, Bank telah menyusun profil risiko yang secara garis besar dapat mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki oleh Bank.

Kerangka manajemen risiko

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pengawas risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Direktur Utama dan Direksi untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Direksi dan bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang ada di Bank.

Kebijakan manajemen risiko Bank ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Bank, untuk menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Bank, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, berusaha untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Audit Intern. Satuan Kerja Audit Intern secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Bank.

Komite Pemantau Risiko mengawasi perkembangan kebijakan manajemen risiko dan menilai penerapannya. Komite juga memberikan nasihat mengenai strategi manajemen risiko yang harus digunakan oleh Bank. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komite Pemantau Risiko akan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko.

39. CREDIT RISK

In accordance with the complexity of business, the Bank has managed 8 (eight) risks, namely credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, strategic risk and reputation risk.

In quarterly, the Bank has prepared the risks profile globally which reflected the Bank's risk rate.

Risk management framework

The Bank's risk management organization involves oversight from the Board of Commissioner, the Board of Directors, and the Risk Monitoring Committee. The Risk Monitoring Committee is the highest risk authority in the Board of Commissioner level. The Risk Monitoring Committee approves and monitors the implementation of risk management framework and policies of the Bank. Board of Commissioner delegate authority to the President Director and Board of Directors to implement the risk management strategy. The Risk Monitoring Committee is established by the Board of Directors and is responsible for managing risk of the Bank.

The Bank's risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the Bank, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits determined. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Bank, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Bank's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. The Bank's Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit Task Force. Internal Audit Task Force undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to the Bank's Audit Committee.

The Risk Monitoring Committee supervises the development of risk management policies and assesses the implementation. The Committee also provides advice on the risk management strategy to be employed by the Bank. In conducting its oversight role, the Risk Monitoring Committee will also monitor and evaluate the performance of the Risk Management Committee.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Risiko kredit adalah risiko akibat wanprestasi debitur dan/atau pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi liabilitas kepada Bank. Terhadap eksposur risiko kredit spesifik seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Bank melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang dapat saja berbeda, sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Dalam mengelola risiko kredit, Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan, yang disempurnakan secara berkala, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan eksternal lainnya.

Pengendalian risiko kredit terkait penyediaan dana dengan limit minimal tertentu harus melalui Komite Kebijakan Perkreditan. Dalam rangka pengendalian risiko kredit secara komprehensif, Bank terus meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian risiko kredit yang dijalankan oleh unit yang terekspos terhadap risiko diantaranya dengan pembentukan fungsi analisis kredit di cabang.

Pengelolaan risiko kredit yang lebih khusus dilakukan atas portofolio kredit yang bermasalah. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah restrukturisasi fasilitas kredit yang bermasalah, pembentukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku. Kebijakan pengelolaan risiko kredit bermasalah telah dilaksanakan, termasuk pembentukan unit kerja khusus untuk mengelola kredit bermasalah.

Bank telah menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup profil risiko kredit secara terintegrasi dalam suatu proses manajemen risiko yang komprehensif.

a. Risiko kredit maksimum

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk bank garansi yang diterbitkan, L/C dan SKBDN yang masih berjalan yang dapat dibatalkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Bank jika liabilitas atas bank garansi, L/C, dan SKBDN tersebut terjadi. Untuk fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar komitmen tersebut.

Eksposur maksimum Bank terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan rekening administrasi, dinilai tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya.

39. CREDIT RISK (continued)

Credit risk is the risk of debtors and/or counterparties failure to fulfil their obligations to the Bank. In relation to the specific credit risk exposure such as individual credits, inter-bank facilities and others, the Bank separately evaluates credit risk based on factors which may be different, according to the specific characteristics of each exposure. In managing credit risk, the Bank has credit policies and standard operation procedures that are enhanced periodically in accordance with independent risk management principles based on Bank Indonesia regulations, and other external regulations.

Control of the credit risks related to the provision of funds above a certain minimum limit requires approval by the Credit Committee. In the comprehensive credit risk control, the Bank continuously reviews and improves the credit risk control function which is conducted by the risk taking unit, among others, by establishing a credit analyst function in the branch.

Specific credit risk management is performed on the non-performing loans portfolio. Such efforts, among others, are restructuring of non-performing loans, providing allowances to cover potential losses, and write-offs. Specific policy on non-performing loans management process has been implemented, including establishing special working units to handle such loans.

The Bank identifies, measures, monitors, and controls risks which include credit risk profiles integrated in a comprehensive risk management process.

a. Maximum credit risk

For financial assets recognized in the statements of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amounts. For the bank guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank has to pay if the obligations under the bank guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs are called upon. For unused loans commitments granted to customers, the maximum exposure to credit risk is the committed amount.

The Bank's maximum exposure to credit risk of statements of financial position and administrative accounts financial instruments, is valued without taking into account any collateral held or other credit enhancement.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)**b. Risiko konsentrasi kredit**

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pengungkapan risiko kredit maksimum berdasarkan konsentrasi sebelum memperhitungkan agunan yang dimiliki dan perjanjian *master netting* adalah sebagai berikut:

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan geografis

39. CREDIT RISK (continued)**b. Credit concentration risk**

As of December 31, 2019 and 2018, the disclosure of the maximum credit risk by concentration without taking into account any collateral held and master netting agreements is as follows:

Concentration of credit risk by geography

2019							
	Jawa Timur/ East Java	Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java	Sumatera	Kalimantan/ Borneo	Lain-lain/ Others	Total/ Jumlah/	
Posisi keuangan							Financial position
Giro pada Bank Indonesia	-	5.734.527	-	-	-	5.734.527	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	111.454	-	-	-	111.454	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.483	10.763.402	539.744	124.953	549.645	11.987.227	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	13.735	9.438.971	-	100.000	-	9.552.706	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	10.365	-	-	-	10.365	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1.038.432	-	-	-	1.038.432	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	5.837.520	-	-	-	5.837.520	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	81.265	-	-	-	-	81.265	Other receivables
Kredit yang diberikan							Loans
Modal kerja	7.236.359	278.703	30.350	2.153	2.355	7.549.920	Working capital
Investasi	3.318.664	740.448	189.600	291.976	-	4.540.688	Investment
Konsumsi	25.093.107	160.920	26.889	-	642	25.281.558	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	408.070	6.946	600	750	54	416.420	Interest receivables
Jumlah	36.160.683	34.121.688	787.183	519.832	552.696	72.142.082	Total
Rekening administratif							Administrative accounts
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.391.950	1.222.031	29.438	206.845	-	3.850.264	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan dan revocable L/C	2.338.026	-	-	-	-	2.338.026	Bank guarantees issued and revocable L/Cs
Jumlah	4.729.976	1.222.031	29.438	206.845	-	6.188.290	Total
2018							
	Jawa Timur/ East Java	Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java	Sumatera	Kalimantan/ Borneo	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Posisi keuangan							Financial position
Giro pada Bank Indonesia	-	4.075.938	-	-	-	4.075.938	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	97.272	-	-	-	97.272	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.483	12.123.415	539.744	124.953	549.645	13.347.240	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	13.735	7.677.710	-	100.000	-	7.791.445	Amortized cost
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	566.891	-	-	-	566.891	Marketable securities sold under repurchased agreement
Tagihan lainnya	34.069	-	-	-	-	34.069	Other receivables
Kredit yang diberikan							Loans
Modal kerja	6.285.197	195.373	45.612	3.408	3.868	6.533.458	Working capital
Investasi	2.564.765	107.623	-	78.666	-	2.751.054	Investment
Konsumsi	23.256.787	127.780	24.834	-	774	23.410.175	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	368.247	3.254	1.371	235	234	373.341	Interest receivables
Jumlah	32.532.283	24.975.256	611.561	307.262	554.521	58.960.883	Total
Rekening administratif							Administrative accounts
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.011.910	393.371	9.423	419.710	303	2.834.717	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan dan revocable L/C	3.801.806	-	-	-	-	3.801.806	Bank guarantees issued and revocable L/Cs
Jumlah	5.813.716	393.371	9.423	419.710	303	6.636.523	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)**b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)**

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri

39. CREDIT RISK (continued)**b. Credit concentration risk (continued)**

Concentration of credit risk by industry sector

2019							
Pemerintah dan Bank Indonesia/ Government and Bank Indonesia	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Banks	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Total		
Posisi keuangan							Financial position
Giro pada Bank Indonesia	5.734.527	-	-	-	5.734.527		Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	-	111.454	-	111.454		Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.987.227	-	-	-	11.987.227		Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	5.061.634	-	411.796	4.079.276	9.552.706		Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	-	-	-	-	-		Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	10.365	-	-	-	10.365		Fair value through other comprehensive income
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.038.432	-	-	-	1.038.432		Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	5.837.520	-	5.837.520		Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	-	-	-	81.265	81.265		Other receivables
Kredit yang diberikan	-	-	-	-	-		Loans
Modal kerja	157.167	155.831	3.654.386	3.582.536	7.549.920		Working capital
Investasi	95.667	1.087	3.493.898	950.036	4.540.688		Investment
Konsumsi	-	-	-	25.281.558	25.281.558		Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	459	959	503	50.604	363.895	416.420	Interest receivables
Jumlah	23.928.311	159.213	6.517.104	11.278.164	30.259.290	72.142.082	Total
Rekening administratif							Administrative accounts
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	-	76.900	-	3.773.364	3.850.264	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan dan revocable L/C	-	-	-	-	2.338.026	2.338.026	Bank guarantees issued and revocable L/Cs
Jumlah	-	-	76.900	-	6.111.390	6.188.290	Total
2018							
Pemerintah dan Bank Indonesia/ Government and Bank Indonesia	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Banks	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Total		
Posisi keuangan							Financial position
Giro pada Bank Indonesia	4.075.938	-	-	-	4.075.938		Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	-	97.272	-	97.272		Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7.177.042	200.000	5.970.198	-	13.347.240		Placements with Bank Indonesia and other banks
Tagihan spot derivatif	-	-	-	-	-		Spot derivative receivables
Surat berharga	4.471.585	1.216.290	1.309.490	794.080	7.791.445		Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	-	-	-	-	-		Amortized cost
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	566.891	-	-	-	566.891		Marketable securities sold under repurchased agreement
Tagihan lainnya	-	-	-	34.069	34.069		Other receivables
Kredit yang diberikan	-	-	-	-	-		Loans
Modal kerja	124.571	115.522	3.327.304	2.966.061	6.533.458		Working capital
Investasi	3.707	1.032	109.636	755.752	2.751.054		Investment
Konsumsi	-	-	-	23.410.175	23.410.175		Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	27	783	805	39.460	332.266	373.341	Interest receivables
Jumlah	16.295.190	1.542.676	7.602.923	6.041.771	27.498.323	58.980.883	Total
Rekening administratif							Administrative accounts
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	-	63.400	-	2.771.317	2.834.717	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan dan revocable L/C	-	-	-	-	3.801.806	3.801.806	Bank guarantees issued and revocable L/Cs
Jumlah	-	-	63.400	-	6.573.123	6.636.523	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

c. Agunan dan perlindungan kredit lainnya

Bank telah memiliki buku pedoman tentang cara menilai dan jenis jaminan yang bisa diterima sebagai mitigasi risiko kredit. Beberapa agunan utama yang diperoleh adalah tanah, bangunan dan kendaraan. Bank juga memiliki beberapa fasilitas kredit yang mendapat penjaminan dari pihak ketiga.

Umumnya, agunan diperlukan untuk setiap pemberian kredit sebagai sumber sekunder pelunasan kredit ("secondary source of repayment") dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

d. Kualitas aset keuangan

Bank telah memiliki kebijakan yang telah diterapkan secara konsisten untuk pemeringkatan risiko atas portofolio aset keuangan. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisis keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar yang telah diolah guna pengukuran risiko pihak lawan. Semua peringkat risiko disesuaikan dengan berbagai kategori dan ditentukan sesuai dengan panduan peringkat Bank Indonesia.

e. Evaluasi penurunan nilai

Pengukuran risiko kredit

Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko adalah kompleks dan mensyaratkan penggunaan model, karena eksposur yang bervariasi dengan perubahan kondisi pasar, arus kas ekspektasian dan berlalunya waktu. Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, rasio kerugian terkait dan korelasi gagal bayar antara pihak lawan. Bank mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD). Hal ini sama dengan pendekatan yang digunakan untuk tujuan pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) berdasarkan PSAK 71.

39. CREDIT RISK (continued)

c. Collateral and other credit enhancements

The Bank has a guidebook on how to value the type of collateral that can be accepted as credit risk mitigation. Some major collateral obtained includes land, buildings and vehicles. The Bank also has certain credit facilities guaranteed by third parties.

Generally, collateral is required for all credits extended as a secondary source of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations of the borrowers.

d. Quality of financial assets

The Bank has a policy that has been consistently applied for risk assessment of the financial asset portfolio. This rating system is supported by a variety of financial analyses, combined with market information that has been processed for the measurement of counterparty risk. All risk ratings are adjusted to the various categories and ranks as determined in accordance with the Bank Indonesia's rating guidance.

e. Impairment assessment

Credit risk measurement

The estimation of credit exposure for risk management purposes is complex and requires the use of models, as the exposure varies with changes in market conditions, expected cash flows and the passage of time. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails further estimations as to the likelihood of defaults occurring, of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties. The Bank measures credit risk using *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) and *Loss Given Default* (LGD). This is similar to the approach used for the purposes of measuring Expected Credit Loss (ECL) under PSAK 71

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

PSAK 71 mengikhtisarkan model "tiga tahap" untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti diikhtisarkan di bawah ini:

- Instrumen keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal diklasifikasikan ke dalam "Tahap 1" dan risiko kreditnya terus dipantau oleh Bank.
- Jika peningkatan signifikan dalam risiko kredit (SICR) sejak pengakuan awal diidentifikasi, instrumen keuangan dipindahkan ke "Tahap 2" tetapi belum diakui sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.
- Jika instrumen keuangan mengalami penurunan nilai, instrumen keuangan kemudian dipindahkan ke "Tahap 3".
- Instrumen keuangan pada Tahap 1 memiliki ECL yang diukur pada jumlah yang sama dengan bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan. Instrumen dalam Tahap 2 atau 3 ECL diukur berdasarkan pada kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.
- Konsep pervasif dalam mengukur ECL sesuai dengan PSAK 71 adalah bahwa konsep tersebut harus mempertimbangkan informasi perkiraan masa depan.
- Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang memburuk adalah aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada saat pengakuan awal. ECL selalu diukur sepanjang umurnya (Tahap 3).

Peningkatan signifikan pada risiko kredit (SICR)

Bank mempertimbangkan instrumen keuangan telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika peminjam menunggak pembayaran kontraktualnya lebih dari 30 hari.

Definisi gagal bayar dan aset yang mengalami penurunan nilai kredit

Bank mendefinisikan instrumen keuangan sebagai gagal bayar, yang sepenuhnya sesuai dengan definisi kredit yang mengalami penurunan nilai, ketika memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

Kriteria kuantitatif

Peminjam yang tertunggak lebih dari 90 hari atas pembayaran kontraktualnya.

Kriteria kualitatif

Peminjam memenuhi kriteria tidak mampu membayar, yang menunjukkan peminjam dalam kesulitan keuangan yang signifikan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2m.

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Expected credit loss measurement

PSAK 71 outlines a "three-stage" model for impairment based on changes in credit quality since initial recognition as summarised below:

- A financial instrument that is not credit-impaired on initial recognition is classified in 'Stage 1' and has its credit risk continuously monitored by the Bank.
- If a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition is identified, the financial instrument is moved to 'Stage 2' but is not yet deemed to be credit-impaired.
- If the financial instrument is credit-impaired, the financial instrument is then moved to "Stage 3".
- Financial instruments in Stage 1 have their ECL measured at an amount equal to the portion of lifetime expected credit losses that result from default events possible within the next 12 months. Instruments in Stages 2 or 3 have their ECL measured based on expected credit losses on a lifetime basis.
- A pervasive concept in measuring ECL in accordance with PSAK 71 is that it should consider forward-looking information.
- Purchased or originated credit-impaired financial assets are those financial assets that are credit-impaired on initial recognition. Their ECL is always measured on a lifetime basis (Stage 3).

Significant increase in credit risk (SICR)

The Bank consider a financial instrument to have experienced significant increase in credit risk when the borrower is more than 30 days past due on its contractual payments.

Definition of default and credit-impaired assets

The Bank defines a financial instrument as in default, which is fully aligned with the definition of credit-impaired, when it meets one or more of the following criteria:

Quantitative criteria

The borrower is more than 90 days past due on its contractual payments.

Qualitative criteria

The borrower meets unlikeliness to pay criteria, which indicates the borrower is in significant financial difficulty, as described in Note 2m.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Kriteria tersebut telah diterapkan pada semua instrumen keuangan yang dimiliki oleh Bank dan konsisten dengan definisi gagal bayar yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal. Definisi gagal bayar telah diterapkan secara konsisten untuk model *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD) sepanjang perhitungan kerugian ekspektasian Bank.

Pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai kredit yang diberikan khususnya pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal. Bank melakukan evaluasi penurunan nilai dengan dua metode yaitu evaluasi penurunan nilai secara individual dan kolektif.

Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk masing-masing kredit yang diberikan yang signifikan.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai antara lain kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, termasuk klaim terhadap pihak asuransi, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan. Sedangkan evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dilakukan atas kredit yang diberikan yang tidak signifikan secara individual. Namun bila ada bukti obyektif penurunan nilai khususnya pembayaran pokok atau bunga menunggak lebih dari 90 hari, sistem akan menghitung penurunan nilai secara individual.

Mengukur ECL - Penjelasan input, asumsi dan teknik estimasi

Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) diukur pada basis 12 bulan atau sepanjang umumnya tergantung apakah peningkatan signifikan dalam risiko kredit telah terjadi sejak pengakuan awal atau apakah suatu aset dianggap telah mengalami penurunan nilai. Kerugian kredit ekspektasian adalah hasil diskonto dari PD, EAD, dan LGD, didefinisikan sebagai berikut:

- PD mewakili kemungkinan peminjam gagal bayar atas kewajiban keuangannya (sesuai "definisi *default* dan kredit yang mengalami penurunan nilai" di atas), baik selama 12 bulan ke depan, atau selama sisa umurnya (PD sepanjang umurnya) dari kewajiban.

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

The criteria have been applied to all financial instruments held by the Bank and are consistent with the definition of default used for internal credit risk management purposes. The default definition has been applied consistently to model the *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) and *Loss given Default* (LGD) throughout the Bank's expected loss calculations.

The main considerations for the loan impairment assessment include whether any payments of principal or interest are overdue by more than 90 days or there are any known difficulties, or non-compliance of the original terms of the contract. The Bank evaluates impairment assessments using two methods: individual and collective impairment assessment.

The Bank determines the allowances for impairment losses for each significant loan on an individual basis.

Items considered when determining allowance for impairment losses include the sustainability of the debtors' business plan, its ability to improve performance once a financial difficulty has arisen, projected receipts and the expected payout should bankruptcy occurs, the availability of other financial support, including claim for the insurance party, the realizability of collateral, and the timing of expected cash flows.

The allowance for impairment losses is evaluated at each reporting date. The allowance for impairment losses based on collective evaluation is made for the loans which are not individually significant. But if there is objective evidence of impairment or certain principal payment or interest are outstanding for more than 90 days, the system will calculate the individual impairment.

Measuring ECL – Explanation of inputs, assumptions and estimation techniques

The Expected Credit Loss (ECL) is measured on either a 12-month or Lifetime basis depending on whether a significant increase in credit risk has occurred since initial recognition or whether an asset is considered to be credit-impaired. Expected credit losses are the discounted product of the PD, EAD, and LGD, defined as follows:

- The PD represents the likelihood of a borrower defaulting on its financial obligation (as per "definition of default and credit-impaired" above), either over the next 12 months, or over the remaining lifetime (lifetime PD) of the obligation.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

- EAD didasarkan pada jumlah yang diharapkan dari Bank pada saat gagal bayar, selama 12 bulan ke depan atau selama sisa umurnya (*lifetime* EAD). Misalnya, untuk komitmen *revolving*, Bank memasukkan saldo yang ditarik saat ini ditambah jumlah yang diharapkan akan ditarik hingga batas kontrak pada saat gagal bayar, jika hal itu terjadi.
- *Loss Given Default* (LGD) mewakili ekspektasi Bank tentang tingkat kerugian pada eksposur gagal bayar. LGD dinyatakan sebagai persentase kerugian per unit eksposur pada saat gagal bayar (EAD).

ECL ditentukan dengan memproyeksikan PD, LGD dan EAD untuk setiap bulan berikutnya dan untuk setiap eksposur individu atau segmen kolektif. Tiga komponen ini dikalikan bersama. Perhitungan efektif ECL ini dilakukan untuk setiap bulan berikutnya, yang kemudian didiskontokan kembali ke tanggal pelaporan dan dijumlahkan. Tingkat diskonto yang digunakan pada perhitungan ECL adalah suku bunga efektif awal atau perkiraannya.

PD sepanjang umurnya dikembangkan dengan menerapkan profil jatuh tempo ke PD 12 bulan saat ini. Profil jatuh tempo melihat bagaimana gagal bayar muncul pada portofolio dari titik pengakuan awal sepanjang masa umur pinjaman. Profil jatuh tempo didasarkan pada data historis yang diamati dan diasumsikan sama pada semua aset dalam portofolio dan peringkat kredit. Hal ini telah didukung oleh analisis historis.

EAD 12 bulan dan sepanjang umurnya ditentukan berdasarkan profil pembayaran yang diharapkan, yang bervariasi berdasarkan jenis produk.

- Untuk produk yang diamortisasi dan pinjaman dengan pembayaran di akhir, didasarkan pada pembayaran kontraktual yang terutang oleh peminjam selama 12 bulan atau sepanjang umurnya. Hal ini juga akan disesuaikan dengan pembayaran lebih yang diharapkan dari peminjam. Asumsi pembayaran/pembiayaan kembali lebih awal juga dimasukkan ke dalam perhitungan.
- Untuk produk *revolving*, eksposur pada gagal bayar diperkirakan dengan mengambil saldo saat ini yang telah ditarik dan menambahkan "faktor konversi kredit" yang diharapkan untuk ditarik dari batas yang tersisa pada saat gagal bayar. Asumsi-asumsi ini bervariasi berdasarkan jenis produk dan batasan pemanfaatan limit, berdasarkan analisis dari data standar terkini Bank.

39. CREDIT RISK (continued)**e. Impairment assessment (continued)**

- EAD is based on the amounts the Bank expects to be owed at the time of default, over the next 12 months or over the remaining lifetime (*lifetime* EAD). For example, for a revolving commitment, the Bank includes the current drawn balance plus any further amount that is expected to be drawn up to the current contractual limit by the time of default, should it occur.
- *Loss Given Default* (LGD) represents the Bank's expectation of the extent of loss on a defaulted exposure. LGD is expressed as a percentage loss per unit of exposure at the time of default (EAD).

The ECL is determined by projecting the PD, LGD and EAD for each future month and for each individual exposure or collective segment. These three components are multiplied together. This effectively calculates an ECL for each future month, which is then discounted back to the reporting date and summed. The discount rate used in the ECL calculation is the original effective interest rate or an approximation thereof.

The Lifetime PD is developed by applying a maturity profile to the current 12 months PD. The maturity profile looks at how defaults develop on a portfolio from the point of initial recognition throughout the lifetime of the loans. The maturity profile is based on historical observed data and is assumed to be the same across all assets within a portfolio and credit grade band. This is supported by historical analysis.

The 12 month and lifetime EADs are determined based on the expected payment profile, which varies by product type.

- For amortising products and bullet repayment loans, this is based on the contractual repayments owed by the borrower over a 12 month or lifetime basis. This will also be adjusted for any expected overpayments made by a borrower. Early repayment/refinance assumptions are also incorporated into the calculation.
- For revolving products, the exposure at default is predicted by taking current drawn balance and adding a "credit conversion factor" which allows for the expected drawdown of the remaining limit by the time of default. These assumptions vary by product type and current limit utilisation band, based on analysis of the Bank's recent default data.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

LGD ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan yang dibuat pasca gagal bayar. Hal ini bervariasi berdasarkan jenis produk. LGD ini dipengaruhi oleh strategi penagihan, termasuk penjualan dan harga utang kontraktual.

Perkiraan informasi ekonomi masa depan (*forward-looking*) juga termasuk dalam menentukan PD 12 bulan dan sepanjang umurnya, EAD dan LGD. Asumsi-asumsi ini bervariasi berdasarkan jenis produk.

Asumsi yang mendasari perhitungan ECL - seperti bagaimana profil PD dan lain-lain - dipantau dan ditelaah setiap tahun.

Tidak ada perubahan signifikan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan.

Informasi perkiraan masa depan yang tergabung dalam model ECL

Penilaian SICR dan perhitungan ECL keduanya menggabungkan informasi berwawasan ke depan. Bank telah melakukan analisis historis dan mengidentifikasi variabel ekonomi utama yang berdampak pada risiko kredit dan kerugian kredit yang diperkirakan untuk masing-masing portofolio.

Variabel ekonomi ini dan dampaknya yang terkait pada PD, EAD dan LGD bervariasi menurut instrumen keuangan. Perkiraan variabel-variabel ekonomi ini ("skenario ekonomi dasar") disediakan oleh Bank setiap tahun dan memberikan pandangan estimasi ekonomi terbaik selama tiga tahun ke depan. Dampak dari variabel-variabel ekonomi ini pada PD, EAD dan LGD telah ditentukan dengan melakukan analisis regresi statistik untuk memahami dampak perubahan dalam variabel-variabel ini secara historis pada tingkat standar dan pada komponen-komponen LGD dan EAD.

Selain skenario ekonomi, Bank juga menyediakan skenario lain yang memungkinkan beserta bobot skenario. Jumlah skenario lain yang digunakan ditetapkan berdasarkan analisis setiap jenis produk utama untuk memastikan non-linearitas diketahui. Jumlah skenario dan atributnya dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan. Pada 1 Januari 2018 dan 31 Desember 2018, Bank menyimpulkan bahwa tiga skenario dengan tepat menangkap non-linearitas. Bobot skenario ditentukan oleh kombinasi analisis statistik dan analisa kredit, dengan mempertimbangkan kisaran hasil yang mungkin masing-masing skenario yang dipilih mewakili.

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

The LGDs are determined based on the factors which impact the recoveries made post default. These vary by product type. These LGD's are influenced by collection strategies, including contracted debt sales and price.

Forward-looking economic information is also included in determining the 12 month and lifetime PD, EAD and LGD. These assumptions vary by product type.

The assumptions underlying the ECL calculation – such as how the maturity profile of the PDs and others – are monitored and reviewed on a yearly basis.

There have been no significant changes in estimation techniques or significant assumptions made during the reporting period.

Forward-looking information incorporated in the ECL models

The assessment of SICR and the calculation of ECL both incorporate forward-looking information. The Bank has performed historical analysis and identified the key economic variables impacting credit risk and expected credit losses for each portfolio.

These economic variables and their associated impact on the PD, EAD and LGD vary by financial instrument. Forecasts of these economic variables (the "base economic scenario") are provided by the Bank on a quarterly basis and provide the best estimate view of the economy over the next three years. The impact of these economic variables on the PD, EAD and LGD has been determined by performing statistical regression analysis to understand the impact changes in these variables have had historically on default rates and on the components of LGD and EAD.

In addition to the base economic scenario, the Bank's Economics team also provide other possible scenarios along with scenario weightings. The number of other scenarios used is set based on the analysis of each major product type to ensure non-linearities are captured. The number of scenarios and their attributes are reassessed at each reporting date. At 1 January 2018 and 31 December 2018, for all portfolios the Bank concluded that three scenarios appropriately captured non-linearities. The scenario weightings are determined by a combination of statistical analysis and expert credit judgement, taking account of the range of possible outcomes each chosen scenario is representative of.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

Penilaian SICR dilakukan dengan menggunakan PD sepanjang umurnya di masing-masing basis, dan skenario lainnya, dikalikan dengan pembobotan skenario terkait. Hal ini menentukan apakah seluruh instrumen keuangan berada dalam Tahap 1, Tahap 2, atau Tahap 3 dan karenanya apakah ECL 12 bulan atau sepanjang umurnya harus dicatat. Setelah penilaian ini, Bank mengukur ECL sebagai probabilitas tertimbang ECL 12 bulan (Tahap 1), atau probabilitas tertimbang ECL sepanjang umurnya (Tahap 2 dan 3). Probabilitas ECL terbobot ini ditentukan dengan menjalankan setiap skenario melalui model ECL yang relevan dan mengalikannya dengan pembobotan skenario yang sesuai.

Seperti halnya perkiraan ekonomi, proyeksi dan kemungkinan terjadinya tunduk pada tingkat ketidakpastian bawaan yang tinggi dan oleh karena itu hasil aktual mungkin berbeda secara signifikan dengan yang diproyeksikan. Bank menganggap ramalan ini untuk mewakili perkiraan terbaik dari hasil yang mungkin dan telah menganalisis non-linearitas dan asimetri dalam portofolio Bank yang berbeda untuk menetapkan bahwa skenario yang dipilih tepat mewakili berbagai skenario yang mungkin.

Asumsi variabel ekonomi

Asumsi akhir periode yang paling signifikan digunakan untuk estimasi ECL pada tanggal 31 Desember 2019 diuraikan di bawah ini. Skenario "base", "upside" dan "downside" digunakan untuk semua portofolio.

Variabel Ekonomi/ Economic Variable	Skenario/ Scenarios	2019	2020	2021
Inflasi/ Inflation (%)	Base	2,62	2,31	2,20
	Upside	4,02	3,75	3,66
	Downside	0,49	0,13	0,03
Nilai tukar/ Exchange rate (Rp/US\$)	Base	14.539,75	14.632,90	14.789,21
	Upside	13.085,83	13.168,26	13.322,61
	Downside	16.753,67	16.863,15	17.022,43
Tingkat suku bunga/ Interest rate (%)	Base	4,74	4,23	4,23
	Upside	3,77	3,23	3,20
	Downside	6,21	5,76	5,80
Minyak mentah/ Oil Brent (US\$/Barel)	Base	40,44	46,87	48,45
	Upside	17,51	23,88	25,97
	Downside	75,34	81,87	82,68
Emas/ Gold (US\$/oz)	Base	1.213,84	1.238,09	1.230,44
	Upside	1.080,58	1.111,01	1.109,02
	Downside	1.416,77	1.431,59	1.415,31
Tingkat pengangguran/ Unemployment rate (%)	Base	5,24	5,11	5,04
	Upside	4,91	4,76	4,68
	Downside	5,76	5,64	5,60
Tingkat harga properti/ Index house (%)	Base	208,71	211,21	213,15
	Upside	223,38	226,37	228,66
	Downside	186,37	188,12	189,53
Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product (%)	Base	4,91	4,98	4,97
	Upside	5,24	5,29	5,27
	Downside	4,42	4,51	4,51

39. CREDIT RISK (continued)**e. Impairment assessment (continued)**

The assessment of SICR is performed using the Lifetime PD under each of the base, and the other scenarios, multiplied by the associated scenario weighting. This determines whether the whole financial instrument is in Stage 1, Stage 2, or Stage 3 and hence whether 12-month or lifetime ECL should be recorded. Following this assessment, the Bank measures ECL as either a probability weighted 12 month ECL (Stage 1), or a probability weighted lifetime ECL (Stages 2 and 3). These probability-weighted ECLs are determined by running each scenario through the relevant ECL model and multiplying it by the appropriate scenario weighting.

As with any economic forecasts, the projections and likelihoods of occurrence are subject to a high degree of inherent uncertainty and therefore the actual outcomes may be significantly different to those projected. The Bank considers these forecasts to represent its best estimate of the possible outcomes and has analysed the non-linearities and asymmetries within the Bank's different portfolios to establish that the chosen scenarios are appropriately representative of the range of possible scenarios.

Economic variable assumptions

The most significant period-end assumptions used for the ECL estimate as at December 31, 2019 are set out below. The scenarios "base", "upside" and "downside" were used for all portfolios.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Bobot yang ditetapkan untuk setiap skenario ekonomi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Kelompok kredit/ Peer group	Skenario/ Scenarios	Base	Upside	Downside
Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - Badan Internasional dan lainnya/ Administration, government, defence and social security sector - International institution and others	Tahap/Stage 1	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%
	Tahap/Stage 2	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%
	Tahap/Stage 3	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%
Sektor rumah tangga - Sektor bukan lapangan usaha lainnya/ Households sectors - Other business sectors	Tahap/Stage 1	1,24% - 0,93%	1,24% - 0,93%	1,24% - 0,93%
	Tahap/Stage 2	4,80% - 7,71%	4,80% - 7,66%	4,80% - 7,73%
	Tahap/Stage 3	7,73%	7,73%	7,73%
Sektor industri pengolahan/ Processing industry sectors	Tahap/Stage 1	0,16% - 3,40%	0,03% - 1,40%	0,40% - 5,24%
	Tahap/Stage 2	7,07% - 11,22%	4,07% - 5,53%	9,00% - 12,81%
	Tahap/Stage 3	12,94%	12,94%	12,94%
Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial - Sektor jasa pendidikan - Sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya/ Health service and social activities sector - Education service sector - Public, social culture, entertainment and other individual service sector	Tahap/Stage 1	0,13% - 1,71%	0,08% - 1,32%	0,26% - 2,39%
	Tahap/Stage 2	3,36% - 4,69%	2,87% - 4,11%	4,08% - 5,37%
	Tahap/Stage 3	6,06%	6,06%	6,06%
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ Individual service which serve households	Tahap/Stage 1	0,02% - 0,26%	0,01% - 0,20%	0,04% - 0,36%
	Tahap/Stage 2	0,50% - 0,70%	0,43% - 0,62%	0,61% - 0,80%
	Tahap/Stage 3	0,91%	0,91%	0,91%
Kegiatan yang belum jelas batasannya/ Limit activities that are not yet clear	Tahap/Stage 1	0,01% - 0,10%	0,005% - 0,08%	0,02% - 0,15%
	Tahap/Stage 2	0,21% - 0,29%	0,18% - 0,25%	0,25% - 0,33%
	Tahap/Stage 3	0,37%	0,37%	0,37%
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum/ Accommodation, food and beverages	Tahap/Stage 1	0,13% - 3,09%	0,03% - 1,53%	0,29% - 4,47%
	Tahap/Stage 2	5,94% - 11,51%	3,63% - 11,45%	7,58% - 11,72%
	Tahap/Stage 3	13,38%	13,38%	13,38%
Perantara keuangan/ Financial intermediaries	Tahap/Stage 1	0,10% - 2,07%	0,08% - 1,88%	0,13% - 2,38%
	Tahap/Stage 2	6,92% - 6,98%	6,86% - 6,95%	7,00% - 7,03%
	Tahap/Stage 3	7,27%	7,27%	7,27%
Perdagangan besar dan eceran/ Wholesale and retail	Tahap/Stage 1	0,11% - 3,14%	0,03% - 1,59%	0,56% - 6,70%
	Tahap/Stage 2	7,33% - 12,11%	4,76% - 11,23%	11,20% - 13,60%
	Tahap/Stage 3	15,40%	15,40%	15,40%
Sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi - listrik gas dan air - konstruksi - pertambangan/ Transportation, warehousing and communication - electricity, gas and water - construction, mining sectors	Tahap/Stage 1	0,04% - 0,73%	0,02% - 0,47%	0,09% - 1,31%
	Tahap/Stage 2	3,14% - 8,48%	2,30% - 8,52%	4,79% - 9,44%
	Tahap/Stage 3	26,55%	26,55%	26,55%
Sektor perikanan - Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan/ Fishery sectors - Agriculture, hunting and forestry sectors	Tahap/Stage 1	0,31% - 4,78%	0,27% - 4,48%	0,38% - 5,26%
	Tahap/Stage 2	8,85% - 9,86%	8,51% - 9,09%	9,35% - 11,45%
	Tahap/Stage 3	14,98%	14,98%	14,98%
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan/ Real estate, business rental and company services	Tahap/Stage 1	0,26% - 7,46%	0,06% - 3,24%	1,73% - 18,09%
	Tahap/Stage 2	18,55% - 23,36%	11,00% - 13,04%	30,09% - 37,17%
	Tahap/Stage 3	40,04%	40,04%	40,04%
Skim Multiguna/ Multiguna scheme	Tahap/Stage 1	0,04% - 3,37%	0,03% - 3,06%	0,06% - 3,88%
	Tahap/Stage 2	6,28% - 8,58%	5,86% - 7,94%	6,92% - 9,58%
	Tahap/Stage 3	14,98%	14,98%	14,98%
Skim kredit pegawai/ Employee loan scheme	Tahap/Stage 1	0,189% - 13,37%	0,185% - 13,28%	0,19% - 13,50%
	Tahap/Stage 2	31,60% - 32,23%	31,56% - 33,81%	31,66% - 31,71%
	Tahap/Stage 3	34,91%	34,91%	34,91%
Skim kredit Almambrur/ Almambrur loan scheme	Tahap/Stage 1	0,03% - 0,22%	0,46% - 0,93%	0,00% - 0,00%
	Tahap/Stage 2	0,37% - 0,55%	1,04% - 1,15%	0,00% - 0,00%
	Tahap/Stage 3	1,15%	1,15%	1,15%
Skim kredit kepemilikan rumah/ Housing loan scheme	Tahap/Stage 1	0,06% - 1,21%	0,05% - 1,07%	0,08% - 1,42%
	Tahap/Stage 2	2,34% - 3,71%	2,17% - 3,49%	2,59% - 3,99%
	Tahap/Stage 3	4,63%	4,63%	4,63%
Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi/ Energy and Food Stability Loan Scheme	Tahap/Stage 1	0,017% - 0,31%	0,004% - 0,11%	0,042% - 0,57%
	Tahap/Stage 2	1,50% - 2,34%	0,72% - 0,72%	2,23% - 8,44%
	Tahap/Stage 3	8,44%	8,44%	8,44%
Skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi/ Cattle Breeding Business Loan Scheme	Tahap/Stage 1	0,48% - 3,90%	0,00% - 0,01%	7,27% - 18,56%
	Tahap/Stage 2	11,66% - 25,29%	0,20% - 2,02%	25,84% - 29,17%
	Tahap/Stage 3	29,19%	29,19%	29,19%
Skim Kredit BPR Linkage/ BPR Linkage Loan Scheme	Tahap/Stage 1	1,32% - 9,78%	1,18% - 9,31%	1,41% - 10,09%
	Tahap/Stage 2	16,49% - 21,79%	16,11% - 21,82%	16,73% - 21,70%
	Tahap/Stage 3	21,82%	21,82%	21,82%
Skim Kredit Usaha Rakyat/ People's Business Loan Scheme	Tahap/Stage 1	0,28% - 2,07%	0,25% - 1,97%	0,30% - 2,14%
	Tahap/Stage 2	3,50% - 4,62%	3,41% - 4,63%	3,55% - 4,60%
	Tahap/Stage 3	4,63%	4,63%	4,63%
Skim Kredit PRK/ PRK loan scheme	Tahap/Stage 1	1,12% - 10,56%	1,02% - 10,08%	1,29% - 11,33%
	Tahap/Stage 2	18,54% - 31,01%	18,00% - 30,50%	19,37% - 31,66%
	Tahap/Stage 3	33,48%	33,48%	33,48%

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)****Penyisihan kerugian**

Penyisihan kerugian yang diakui pada periode tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dijelaskan di bawah ini:

- Transfer antara Tahap 1 dan Tahap 2 atau 3 karena instrumen keuangan mengalami peningkatan (atau penurunan) risiko kredit yang signifikan atau menjadi kredit yang mengalami penurunan nilai dalam periode tersebut, dan akibatnya "peningkatan" (atau "penurunan") antara 12 bulan dan ECL sepanjang umurnya;
- Penyisihan tambahan untuk instrumen keuangan baru yang diakui selama periode berjalan, serta penghentian pengakuan instrumen keuangan pada periode tersebut;
- Dampak pada pengukuran ECL karena perubahan PD, EAD dan LGD pada periode tersebut, yang timbul dari perubahan *input* secara rutin ke model;
- Dampak pada pengukuran ECL karena perubahan yang dilakukan pada model dan asumsi; dan
- Aset keuangan dihentikan pengakuannya selama periode berjalan dan penghapusan cadangan terkait dengan aset yang dihapusbukukan selama periode berjalan.

39. CREDIT RISK (continued)**e. Impairment assessment (continued)****Loss allowance**

The loss allowance recognized in the period is impacted by a variety of factors, as described below:

- Transfers between Stage 1 and Stages 2 or 3 due to financial instruments experiencing significant increases (or decreases) of credit risk or becoming credit-impaired in the period, and the consequent "step up" (or "step down") between 12-month and Lifetime ECL;
- Additional allowances for new financial instruments recognized during the period, as well as releases for financial instruments de-recognized in the period;
- Impact on the measurement of ECL due to changes in PDs, EADs and LGDs in the period, arising from regular refreshing of inputs to models;
- Impacts on the measurement of ECL due to changes made to models and assumptions; and
- Financial assets derecognized during the period and write-offs of allowances related to assets that were written off during the period.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Tabel berikut menjelaskan mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan pada awal dan akhir tahun karena faktor-faktor ini:

Penyisihan kerugian penurunan nilai - kredit yang diberikan/ <i>Allowance for impairment losses - loans</i>	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun/ <i>Beginning balance of year</i>	94.399	15.086	1.063.686	25.379	1.198.550
Perubahan aset keuangan yang diakui pada laporan laba rugi/ <i>Change due to financial assets recognize in the statement of profit or loss that have:</i>					
Transfer ke tahap 1/ <i>Transfer to stage 1</i>	37.482	(4.584)	(32.898)	-	-
Transfer ke tahap 2/ <i>Transfer to stage 2</i>	(1.975)	2.521	(546)	-	-
Transfer ke tahap 3/ <i>Transfer to stage 3</i>	(1.664)	(7.573)	9.237	-	-
Penghapusbukuan/ <i>Write-off</i>	(36.237)	(44.957)	(482.751)	(15.877)	(579.822)
Dibebankan ke laporan laba rugi/ <i>Charge to statement of profit or loss</i>	9.667	106.053	210.552	35.134	361.406
Saldo 31 Desember 2019/ <i>Balance at Desember 31, 2019</i>	101.672	66.546	767.280	44.636	980.134

Tabel berikut menjelaskan mutasi nilai tercatat bruto kredit yang diberikan pada awal dan akhir tahun karena faktor-faktor ini:

Saldo awal tahun/ <i>Beginning balance of year</i>	31.185.982	266.396	1.321.197	1.119.662	33.893.237
Perubahan aset keuangan/ <i>Change due to financial assets</i>					
Transfer ke tahap 1/ <i>Transfer to stage 1</i>	100.474	(77.040)	(23.434)	-	-
Transfer ke tahap 2/ <i>Transfer to stage 2</i>	(238.987)	242.122	(3.135)	-	-
Transfer ke tahap 3/ <i>Transfer to stage 3</i>	(269.281)	(136.874)	406.155	-	-
Aset keuangan yang baru atau dibeli/ <i>New financial assets originated or purchased</i>	4.760.089	119.794	-	310.689	5.190.572
Modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan/ <i>Modification of contractual cashflow of financial assets</i>	-	-	(113.509)	(12.641)	(126.150)
Perubahan akrual bunga/ <i>Change in interest accrual</i>	-	-	(25.537)	-	(25.537)
Penghapusbukuan/ <i>Write-off</i>	(38.757)	(48.071)	(477.117)	(15.877)	(579.822)
Saldo 31 Desember 2019/ <i>Balance at Desember 31, 2019</i>	35.499.520	366.327	1.084.620	1.401.833	38.352.300

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

The following tables explain the changes in the allowance of impairment losses of loans between the beginning and the end of the annual period due to these factors:

The following tables explain the changes in the gross carrying amount of loans between the beginning and the end of the annual period due to these factors:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Kebijakan penghapusbukuan

Bank menghapus aset keuangan, seluruhnya atau sebagian, ketika telah melakukan semua upaya pemulihan dan telah menyimpulkan bahwa tidak ada ekspektasi yang wajar atas pemulihan. Indikator bahwa tidak ada ekspektasi pemulihan yang masuk akal termasuk (i) menghentikan aktivitas proses hukum dan (ii) ketika metode pemulihan Bank adalah pengambilalihan agunan dan nilai agunan sedemikian rupa sehingga tidak ada ekspektasi yang wajar untuk pemulihan sepenuhnya.

Bank dapat menghapusbukuan aset keuangan yang masih mengacu pada *enforcement activity*. Jumlah saldo kontraktual dari aset yang dihapusbukukan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp579.822 Bank masih berupaya untuk memulihkan jumlah yang secara legal terutang sepenuhnya.

Modifikasi aset keuangan

Bank dapat melakukan modifikasi persyaratan pinjaman yang diberikan kepada pelanggan karena negosiasi ulang, atau untuk pinjaman yang bermasalah, dengan maksud untuk memaksimalkan pemulihan.

Kegiatan restrukturisasi tersebut termasuk pengaturan perpanjangan jangka waktu pembayaran, fleksibilitas pembayaran dan keringanan pembayaran. Kebijakan dan praktik restrukturisasi didasarkan pada indikator atau kriteria yang, menurut penilaian manajemen, mengindikasikan bahwa pembayaran kemungkinan besar akan berlanjut. Kebijakan ini terus ditinjau terus menerus. Restrukturisasi paling sering diterapkan pada pinjaman berjangka.

Risiko gagal bayar aset tersebut setelah modifikasi dinilai pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan risiko berdasarkan ketentuan awal pada saat pengakuan awal, ketika modifikasi tersebut tidak substansial sehingga tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset awal. Bank memantau kinerja selanjutnya dari aset yang dimodifikasi. Bank dapat menentukan bahwa risiko kredit telah meningkat secara signifikan setelah restrukturisasi, sehingga aset dipindahkan dari Tahap 3 atau Tahap 2 (ECL sepanjang umurnya) ke Tahap 1 (ECL 12 bulan). Nilai tercatat bruto aset yang dimiliki pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp126.150.

Bank terus memantau jika terdapat peningkatan risiko kredit berikutnya yang signifikan sehubungan dengan aset tersebut melalui penggunaan model spesifik untuk aset yang dimodifikasi.

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Write-off policy

The Bank writes off financial assets, in whole or in part, when it has exhausted all practical recovery efforts and has concluded there is no reasonable expectation of recovery. Indicators that there is no reasonable expectation of recovery include (i) ceasing enforcement activity and (ii) where the Bank's recovery method is foreclosing on collateral and the value of the collateral is such that there is no reasonable expectation of recovering in full.

The Bank may write-off financial assets that are still subject to enforcement activity. The outstanding contractual amounts of such assets written off during the year ended December 31, 2019 was Rp579,822 The Bank still seeks to recover amounts it is legally owed in full.

Modification of financial assets

The Bank sometimes modifies the terms of loans provided to customers due to commercial renegotiations, or for distressed loans, with a view to maximising recovery.

Such restructuring activities include extended payment term arrangements, payment holidays and payment forgiveness. Restructuring policies and practices are based on indicators or criteria which, in the judgement of management, indicate that payment will most likely continue. These policies are kept under continuous review. Restructuring is most commonly applied to term loans.

The risk of default of such assets after modification is assessed at the reporting date and compared with the risk under the original terms at initial recognition, when the modification is not substantial and so does not result in derecognition of the original asset. The Bank monitors the subsequent performance of modified assets. The Bank may determine that the credit risk has significantly improved after restructuring, so that the assets are moved from Stage 3 or Stage 2 (Lifetime ECL) to Stage 1 (12-month ECL). The gross carrying amount of such assets held as at December 31, 2019, was Rp126,150.

The Bank continues to monitor if there is a subsequent significant increase in credit risk in relation to such assets through the use of specific models for modified assets.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Pemetaan risiko kredit – Treasury

Untuk instrumen utang dalam portofolio Treasury, peringkat kredit lembaga pemeringkat eksternal digunakan. Peringkat yang digunakan ini diamati dan diperbarui secara berkelanjutan. Tingkat PD terkait didasarkan pada tingkat gagal bayar yang terealisasi seperti yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat.

Metode pemeringkatan Bank terdiri dari 25 tingkat peringkat. Skala master memberikan masing-masing kategori peringkat kisaran probabilitas gagal bayar yang ditentukan, yang stabil dari waktu ke waktu. Metode penilaian tunduk pada validasi dan kalibrasi ulang tahunan sehingga mencerminkan proyeksi terbaru mengingat semua standar yang sebenarnya diamati.

Skala peringkat internal Bank dan pemetaan peringkat eksternal ditetapkan di bawah ini:

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Credit risk grading – Treasury

For debt securities in the Treasury portfolio, external rating agency credit grade are used. These published grades are continuously monitored and updated. The PD's associated with each grade are determined based on realised default rates as published by the rating agency.

The Bank's rating method comprises 25 rating levels. The master scale assigns each rating category a specified range of probabilities of default, which is stable over time. The rating methods are subject to an annual validation and recalibration so that they reflect the latest projections in the light of all actually observed default.

The Bank's internal rating scale and mapping of external ratings are set out below:

Group Rating	Kisaran PD dalam persentase/ PD range as percentage	S & P	Penjelasan grade / Description of the grade
1	0,03% - 0,07%	AAA	Investment grade
2	0,03% - 0,07%	AA+	
3	0,03% - 0,07%	AA	
4	0,03% - 0,13%	AA-	
5	0,03% - 0,26%	A+	
6	0,03% - 0,33%	A	
7	0,04% - 0,45%	A-	
8	0,09% - 0,81%	BBB+	Standard monitoring
9	0,17% - 1,32%	BBB	
10	0,18% - 1,43%	BBB-	
11	0,45% - 2,71%	BB+	
12	0,69% - 3,66%	BB	
13	1,29% - 5,50%	BB-	
14	2,40% - 8,15%	B+	Special monitoring
15	7,29% - 17,05%	B	
16	10,84% - 22,85%	B-	
17	29,41% - 47,87%	CCC+	
18	29,41% - 47,87%	CCC	
19	29,41% - 47,87%	CCC-	
20	29,41% - 47,87%	CC	Default
21	100,00%	C	
22	100,00%	D	
23	100,00%	D	
24	100,00%	D	Not rated
25	0,17% - 1,32%		

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

Berikut ini adalah risiko aset keuangan berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

Giro pada bank lain

2019				
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Rupiah	41.699	-	41.699	Rupiah
Mata uang asing	69.780	-	69.780	Foreign currencies
Jumlah	111.479	-	111.479	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(25)	-	(25)	Allowance for impairment losses
Neto	111.454	-	111.454	Net
2018				
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Rupiah	26.890	-	26.890	Rupiah
Mata uang asing	70.397	-	70.397	Foreign currencies
Jumlah	97.287	-	97.287	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(15)	-	(15)	Allowance for impairment losses
Neto	97.272	-	97.272	Net

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lainPlacements with Bank Indonesia and other banks

2019				
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Rupiah:				Rupiah:
Penempatan pada Bank Indonesia	3.642.584	-	3.642.584	Placements with Bank Indonesia
Interbank call money	6.025.000	-	6.025.000	Interbank call money
Deposito berjangka	2.322.000	-	2.322.000	Time deposits
Jumlah	11.989.584	-	11.989.584	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.357)	-	(2.357)	Allowance for impairment losses
Neto	11.987.227	-	11.987.227	Net
2018				
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Rupiah:				Rupiah:
Penempatan pada Bank Indonesia	7.177.042	-	7.177.042	Placements with Bank Indonesia
Interbank call money	3.588.000	-	3.588.000	Interbank call money
Deposito berjangka	2.584.500	-	2.584.500	Time deposits
Jumlah	13.349.542	-	13.349.542	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.302)	-	(2.302)	Allowance for impairment losses
Neto	13.347.240	-	13.347.240	Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**Surat berharga

2019				
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Rupiah:				Amortised cost
Surat Utang Negara	3.423.246	-	3.423.246	Rupiah:
Obligasi	1.915.233	-	1.915.233	Government bonds
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	297.606	-	297.606	Bonds
				SPN
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	-	-	Deposit Certificates of
Sertifikat Bank Indonesia	1.351.147	-	1.351.147	Bank Indonesia
Sertifikat Investasi Mudharabah				Bank Indonesia Certificates
Antar Bank (SIMA)	200.000	-	200.000	Interbank Mudharabah
Negotiable Certificate of Deposit	515.871	-	515.871	Investment Certificate
Surat Berharga Jangka Menengah	244.000	-	244.000	Negotiable Certificate of Deposit
Reksadana	1.609.000	-	1.609.000	Medium Term Notes
Surat Kredit Berdokumen				Mutual funds
Dalam Negeri	11.955	-	11.955	Domestic L/C
Surat berharga yang dijual dengan				Marketable securities sold
janji dibeli kembali	1.038.432	-	1.038.432	under repurchased agreement
Mata uang asing:				Foreign currencies
Wesel ekspor	187	-	187	Export Bill
Jumlah surat berharga	10.606.677	-	10.606.677	Total marketable securities
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(5.174)	-	(5.174)	Allowance for impairment losses
Neto	10.601.503	-	10.601.503	Net

2018				
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Rupiah:				Amortised cost
Surat Utang Negara	3.050.388	-	3.050.388	Rupiah:
Obligasi	2.109.172	-	2.109.172	Government bonds
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	517.543	-	517.543	Bonds
				SPN
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	467.763	-	467.763	Deposit Certificates of
Sertifikat Bank Indonesia	437.106	-	437.106	Bank Indonesia
Sertifikat Investasi Mudharabah				Bank Indonesia Certificates
Antar Bank (SIMA)	430.000	-	430.000	Interbank Mudharabah
Negotiable Certificate of Deposit	332.246	-	332.246	Investment Certificate
Surat Berharga Jangka Menengah	244.000	-	244.000	Negotiable Certificate of Deposit
Reksadana	190.000	-	190.000	Medium Term Notes
Surat Kredit Berdokumen				Mutual funds
Dalam Negeri	13.237	-	13.237	Domestic L/C
Surat berharga yang dijual dengan				Marketable securities sold
janji dibeli kembali	566.891	-	566.891	under repurchased agreement
Mata uang asing:				Foreign currencies
Wesel ekspor	503	-	503	Export Bill
Jumlah surat berharga	8.358.849	-	8.358.849	Total marketable securities
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(513)	-	(513)	Allowance for impairment losses
Neto	8.358.336	-	8.358.336	Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**Kredit yang diberikan

Berikut ini adalah risiko kredit berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

39. CREDIT RISK (continued)**e. Impairment assessment (continued)**Loans

Below are credit risks based on the allowance for impairment losses assessment classification as of December 31, 2019 and 2018:

2019					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Kredit multiguna	20.877.342	15.253	64.278	20.956.873	Multiguna loan
Kredit modal kerja	2.718.342	84.207	301.678	3.104.226	Working capital loan
Industri pengolahan	4.147.763	19.168	336.837	4.503.767	Processing industry
Kredit pegawai	1.980.624	733	6.228	1.987.585	Employee loans
Perdagangan besar dan eceran	1.854.309	72.173	129.056	2.055.538	Wholesale and retail
Kredit kepemilikan rumah	1.495.407	114.877	102.396	1.712.680	Housing loan
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	897.523	25.507	26.253	949.283	Public, social culture, entertainment and other individual services
Pertanian, perburuan dan kehutanan	758.034	27.341	22.796	808.171	Agriculture, hunting and forestry
Perantara keuangan	397.707	894	1.351	399.953	Financial intermediaries
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	159.289	4.408	2.671	166.368	Accommodation, food and beverages
Linkage program	157.901	-	267	158.168	Linkage program
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	27.597	402	10.680	38.680	Real estate, business rental and services
Pertambangan, konstruksi, listrik dan transportasi	15.751	1.336	44.111	61.197	Mining, quarrying, electricity and transportation
Kredit usaha rakyat	-	-	26.689	26.689	People's business credit
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	3.400	28	-	3.427	Individual service which serve households
Bukan usaha lainnya dan rumah tangga	7.894	-	-	7.894	Other business and households
Kegiatan yang belum jelas batasannya	638	-	-	638	Limit activities that are not yet clear
Kredit Usaha Pembibitan Sapi	-	-	8.478	8.478	Cattle Breeding Business Loan
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	-	-	851	851	Energy and Food Stability Loan
Lain-lain	-	-	-	-	Others
	35.499.521	366.327	1.084.620	36.950.467	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(101.672)	(66.546)	(767.280)	(935.498)	Allowance for impairment losses
Konvensional - Neto	35.601.193	432.873	317.340	36.014.969	Conventional - Net
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not-impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired		Jumlah/ Total	
		Individu/ Individual	Kolektif/ Collective		
Syariah	1.361.694	40.139	-	1.401.833	Sharia
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(18.785)	(25.851)	-	(44.636)	Allowance for impairment losses
Syariah - Neto	1.342.909	14.288	-	1.357.197	Sharia - Net
Jumlah bersih	36.944.102	447.161	317.340	37.372.166	Total net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**Kredit yang diberikan (lanjutan)

Berikut ini adalah risiko kredit berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (lanjutan):

39. CREDIT RISK (continued)**e. Impairment assessment (continued)**Loans (continued)

Below are credit risks based on the allowance for impairment losses assessment classification as of December 31, 2019 and 2018 (continued):

2018					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Kredit multiguna	19.172.810	15.248	45.031	19.233.089	Multiguna loan
Kredit modal kerja	2.674.926	98.962	41.757	2.815.645	Working capital loan
Industri pengolahan	2.633.315	6.603	8.949	2.648.867	Processing industry
Kredit pegawai	2.069.632	2.232	6.585	2.078.449	Employee loans
Perdagangan besar dan eceran	1.570.532	41.274	46.364	1.658.170	Wholesale and retail
Kredit kepemilikan rumah	1.420.339	83.932	80.229	1.584.500	Housing loan
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	615.972	6.157	3.966	626.095	Public, social culture, entertainment and other individual services
Pertanian, perburuan dan kehutanan	486.560	9.816	10.670	507.046	Agriculture, hunting and forestry
Perantara keuangan	236.657	236	1.417	238.310	Financial intermediaries
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	132.994	1.848	1.982	136.824	Accommodation, food and beverages
Linkage program	120.070	-	267	120.337	Linkage program
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	33.805	232	2.785	36.822	Real estate, business rental and services
Pertambangan, konstruksi, listrik dan transportasi	14.050	172	1.935	16.157	Mining, quarrying, electricity and transportation
Kredit usaha rakyat	2.100	115	1.546	3.761	People's business credit
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	2.991	29	-	3.020	Individual service which serve households
Bukan usaha lainnya dan rumah tangga	2.153	-	-	2.153	Other business and households
Kegiatan yang belum jelas batasannya	1.412	-	-	1.412	Limit activities that are not yet clear
Kredit Usaha Pembibitan Sapi	651	-	166	817	Cattle Breeding Business Loan
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	-	-	258	258	Energy and Food Stability Loan
Lain-lain	-	-	1.061.843	1.061.843	Others
31.190.969	266.856	1.315.750	32.773.575		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(94.399)	(15.087)	(1.063.685)	(1.173.171)	Allowance for impairment losses
Konvensional - Neto	31.285.368	281.943	252.065	31.600.404	Conventional - Net
	Mengalami penurunan nilai/ Impaired			Jumlah/ Total	
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not-impaired	Individu/ Individual	Kolektif/ Collective		
Syariah	1.095.249	24.413	-	1.119.662	Sharia
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(12.905)	(12.474)	-	(25.379)	Allowance for impairment losses
Syariah - Neto	1.082.344	11.939	-	1.094.283	Sharia - Net
Jumlah bersih	32.367.712	293.882	252.065	32.694.687	Total net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**Kredit yang diberikan (lanjutan)

Mutasi penyisihan (CKPN) berdasarkan jenis kredit yang diberikan:

39. CREDIT RISK (continued)**e. Impairment assessment (continued)**Loans (continued)

Movement of allowance (CKPN) by type of loans:

2019					
	Modal kerja/ Working capital	Investasi/ Investment	Konsumsi/ Consumption	Jumlah/ Total	
Saldo awal tahun	851.944	277.159	69.447	1.198.550	Balance at beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	258.782	18.142	84.482	361.406	Provision during the year
Penghapusan tahun berjalan	(387.820)	(119.417)	(72.585)	(579.822)	Written-off during the year
Saldo 31 Desember 2019	722.906	175.884	81.344	980.134	Balance at December 31, 2019
Penyisihan kerugian atas kredit yang mengalami penurunan nilai secara individual	614.067	129.156	12.103	755.326	Individual impairment
Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kredit yang tidak mengalami penurunan nilai	108.839	46.728	69.241	224.808	Collective impairment for non impaired loans
Saldo 31 Desember 2019	722.906	175.884	81.344	980.134	Balance at December 31, 2019
2018					
	Modal kerja/ Working capital	Investasi/ Investment	Konsumsi/ Consumption	Jumlah/ Total	
Saldo awal tahun	1.048.334	282.494	63.178	1.394.006	Balance at beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	72.440	25.035	33.010	130.485	Provision during the year
Penghapusan tahun berjalan	(268.830)	(30.370)	(26.741)	(325.941)	Written-off during the year
Saldo 31 Desember 2018	851.944	277.159	69.447	1.198.550	Balance at December 31, 2018
Penyisihan kerugian atas kredit yang mengalami penurunan nilai secara individual	800.801	242.560	32.798	1.076.159	Individual impairment
Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kredit yang tidak mengalami penurunan nilai	51.143	34.599	36.649	122.391	Collective impairment for non impaired loans
Saldo 31 Desember 2018	851.944	277.159	69.447	1.198.550	Balance at December 31, 2018

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**Kredit yang diberikan (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

	2019				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither st due nor impaired</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>	Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Biaya perolehan diamortisasi					
Surat Utang Negara	3.412.881	-	-	-	3.412.881
Obligasi	1.915.233	-	-	-	1.915.233
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	297.606	-	-	-	297.606
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	-	-	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	1.351.147	-	-	-	1.351.147
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	200.000	-	-	-	200.000
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	515.871	-	-	-	515.871
Surat Utang Jangka Menengah Reksadana	244.000	-	-	-	244.000
1.609.000	-	-	-	-	1.609.000
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	11.955	-	-	-	11.955
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.038.432	-	-	-	1.038.432
Wesel	187	-	-	-	187
	10.596.312	-	-	-	10.596.312
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain					
Surat Utang Negara	10.365	-	-	-	10.365
Biaya perolehan diamortisasi					
Giro pada Bank Indonesia	5.734.527	-	-	-	5.734.527
Giro pada Bank lain	111.479	-	-	-	111.479
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.989.584	-	-	-	11.989.584
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	5.837.520	-	-	-	5.837.520
Tagihan lainnya	81.265	-	-	-	81.265
Kredit yang diberikan					
Modal kerja	7.248.866	304.419	-	719.541	8.272.826
Investasi	4.431.879	125.903	-	158.792	4.716.574
Konsumsi	24.944.800	235.693	-	182.407	25.362.900
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	416.420	-	-	416.420
Jumlah	70.986.597	1.082.435	-	1.060.740	73.129.772
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(90.047)	(142.316)	-	(755.327)	(987.690)
Neto	70.896.550	940.119	-	305.413	72.142.082

39. CREDIT RISK (continued)**e. Impairment assessment (continued)**Loans (continued)

The table below shows credit quality per class of financial assets (gross of allowance for impairment losses):

Amortized cost
Government's bonds
Bonds
SPN
Deposit Certificates of Bank Indonesia
Certificates of Bank Indonesia
Interbank Mudharabah Investment Certificate
Negotiable Certificate of Deposit
Medium Term Notes
Mutual Funds
Domestic L/C
Marketable securities sold under repurchased agreement
Bill
Fair value through other comprehensive income
Government's bonds
Amortized cost
Currents account with Bank Indonesia
Currents account with other bank
Placement with bank Indonesia and other bank
Marketable securities purchased under resale agreement
Other receivables
Loans
Working capital
Investment
Consumption
Interest receivables
Total
Allowances for impairment losses
Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**Kredit yang diberikan (lanjutan)

	2018				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither st due nor impaired</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>	Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>				
Biaya perolehan diamortisasi					
Surat Utang Negara	3.050.388	-	-	-	3.050.388
Obligasi	2.109.172	-	-	-	2.109.172
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	517.543	-	-	-	517.543
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	467.763	-	-	-	467.763
Sertifikat Bank Indonesia	437.106	-	-	-	437.106
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	430.000	-	-	-	430.000
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	332.246	-	-	-	332.246
Surat Utang Jangka Menengah Reksadana	244.000	-	-	-	244.000
190.000	-	-	-	-	190.000
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	13.237	-	-	-	13.237
Wesel	503	-	-	-	503
	7.791.958	-	-	-	7.791.958
Biaya perolehan diamortisasi					
Giro pada Bank Indonesia	4.075.938	-	-	-	4.075.938
Giro pada Bank lain	97.287	-	-	-	97.287
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	13.349.542	-	-	-	13.349.542
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	566.891	-	-	-	566.891
Tagihan lainnya	34.069	-	-	-	34.069
Kredit yang diberikan	-	6.503.605	-	875.267	7.378.872
Modal kerja	-	2.779.876	-	250.959	3.030.835
Investasi	-	23.337.624	-	145.906	23.483.530
Konsumsi	-	-	-	-	-
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	373.341	-	-	373.341
Jumlah	25.915.685	32.994.446	-	1.272.132	60.182.263
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.830)	(122.391)	-	(1.076.159)	(1.201.380)
Neto	25.912.855	32.872.055	-	195.973	58.980.883

39. CREDIT RISK (continued)**e. Impairment assessment (continued)**Loans (continued)

Amortized cost
<i>Government's bonds</i>
<i>Bonds</i>
<i>SPN</i>
<i>Deposit Certificates of Bank Indonesia</i>
<i>Certificates of Bank Indonesia</i>
<i>Interbank Mudharabah Investment Certificate</i>
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>
<i>Medium Term Notes</i>
<i>Mutual Funds</i>
<i>Domestic L/C bill</i>
Amortized cost
<i>Currents account with Bank Indonesia</i>
<i>Currents account with other bank</i>
<i>Placement with bank Indonesia and other bank</i>
<i>Marketable securities sold under purchased agreement</i>
<i>Other receivables</i>
<i>Loans</i>
<i>Working capital</i>
<i>Investment</i>
<i>Consumption</i>
<i>Interest receivables</i>
Total
<i>Allowances for impairment losses</i>
Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

- i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- ii) Kredit yang diberikan, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu kredit, debitur dengan stabilitas dan keragaman yang tinggi; memiliki akses setiap saat untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka; memiliki kemampuan membayar yang kuat dan rasio-rasio posisi keuangan yang konservatif.
- iii) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan rating minimal BBB- (Pefindo) atau Baaa3 (Moody's).

Tingkat standar

- i) Giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank local yang tidak terdaftar di bursa.
- ii) Kredit yang diberikan, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih; akses terbatas ke pasar modal atau ke pasar keuangan lainnya; tingkat pendapatan dan kinerja keseluruhan tidak stabil; memiliki kemampuan membayar yang cukup.
- iii) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau Ba1 sampai dengan B2 (Moody's).

40. RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi pada posisi laporan posisi keuangan dan rekening administratif, karena adanya perubahan variabel pasar. Variabel pasar seperti tingkat bunga dan nilai tukar. Risiko pasar hampir melekat pada seluruh kegiatan operasional Bank, baik pada *banking book* maupun *trading book*.

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

The credit quality are defined as follows:

High grade

- i) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the governmental institutions, transacted with reputable banks with low probability of insolvency.
- ii) Loans, interest receivables and third party receivables are borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due during the term of the loan; borrowers with high degree of stability and diversity; has access to raise substantial amounts of funds through public market at any time; very strong debt service capacity and has conservative financial position ratios.
- iii) Securities and Government bonds are Sovereign securities; investment grade securities and bonds with a rating of at least BBB- (Pefindo) or Baaa3 (Moody's).

Standard grade

- i) Current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the stock exchange.
- ii) Loans, interest receivable and third party receivables who are borrowers with an average track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due for 90 days and over, small corporations with limited access to public capital markets or to alternative financial market; volatility of earnings and overall performance; debt service capacity is adequate.
- iii) Securities and Government bonds are securities and bonds with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or Ba1 to B2 (Moody's).

40. MARKET RISK

Market risk is the risks on the statement of financial position and administrative accounts due to changes in market variables. Market variables consist of interest rates and exchange rates. Market risk is an inherent risk in most of the Bank's operational activities involving the banking books and the trading books.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. RISIKO PASAR (lanjutan)

Pengelolaan risiko pasar dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank yang berkaitan dengan produk dan jasa serta aktivitas *treasury* dan risiko yang melekat pada bisnis.

Risiko suku bunga timbul akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis posisi *banking book*, karena perubahan suku bunga.

Dalam mengelola risiko suku bunga dilakukan pada eksposur *banking book*, dengan memperhatikan posisi *gap* aset dan liabilitas Bank yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Bank.

Tabel di bawah ini merupakan rata-rata tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

2019		
	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %
Aset		
Giro pada Bank Indonesia	2,00%	-
Giro pada bank lain	0,09%	0,00%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4,25% - 7,5%	0,00%
Surat-surat berharga	5,30% - 10,0%	0,00%
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	6,81%	0,00%
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	5,13%	0,00%
Kredit yang diberikan	3,00% - 28,88%	0,00%
Liabilitas		
Simpanan dari nasabah	0,00% - 8,75%	0,00% - 0,50%
Simpanan dari bank lain	0,00% - 6,75%	-

2018		
	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %
Aset		
Giro pada Bank Indonesia	0,00%	-
Giro pada bank lain	0,07%	0,00%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5,25% - 7,50%	0,00%
Surat-surat berharga	5,20% - 10,75%	0,00%
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	6,82%	-
Kredit yang diberikan	3,00% - 31,45%	-
Liabilitas		
Simpanan dari nasabah	0,00% - 10,00%	0,00% - 0,60%
Simpanan dari bank lain	0,00% - 6,49%	-

40. MARKET RISK (continued)

Management of market risk is performed in accordance with the Bank's policies and procedures related with the products and services and also treasury activities and the inherent risk of the business.

Interest rate risk is risk as the effect of changes in the financial instrument prices from the trading book position or the effect of changes of the economic value position of the banking book because of the change in the interest rate.

Management of interest rate risk is performed on the banking book exposure by considering the gap position of the Bank's assets and liabilities, which are sensitive to interest rate movements, which influence the stability of the Bank's profitability level.

The tables below summarize the average of contractual interest rates per annum for significant financial assets and liabilities as of December 31, 2019 and 2018:

Assets
Current accounts with Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with Bank Indonesia and other banks
Marketable securities
Marketable securities sold under repurchased agreement
Marketable securities purchased under resale agreement
Loans
Liabilities
Deposits from customers
Deposits from other banks

Assets
Current accounts with Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with Bank Indonesia and other banks
Marketable securities
Marketable securities sold under repurchased agreement
Loans
Liabilities
Deposits from customers
Deposits from other banks

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. RISIKO PASAR (lanjutan)

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) yang mungkin berdampak kepada arus kas di masa depan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

40. MARKET RISK (continued)

The table below summarizes the Bank's exposure to interest rate risk (gross) which may affect the future cash flows as of December 31, 2019 and 2018:

2019						
Suku bunga mengambang/ Floating interest rate						
Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ 3 months but less than 1 year	1 tahun dan lebih/ 1 year and up	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Aset keuangan						Financial assets
Kas	2.729.776	-	-	-	2.729.776	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5.734.527	-	-	-	5.734.527	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	111.454	-	-	-	111.454	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.987.227	-	-	-	11.987.227	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga						Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	5.518.010	1.523.242	2.511.454	-	9.552.706	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	10.365	-	-	-	10.365	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	1.038.432	-	-	-	1.038.432	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	5.837.520	-	-	-	5.837.520	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	81.265	-	-	-	81.265	Other receivable
Kredit yang diberikan						Loans
Modal kerja	-	-	-	8.272.825	8.272.825	Working capital
Investasi	-	-	-	4.716.573	4.716.573	Investment
Konsumsi	-	-	-	25.362.902	25.362.902	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	11.712	26.464	378.244	-	416.420	Interest receivable
Total aset keuangan	33.060.288	1.549.706	2.889.698	38.352.300	75.851.992	Total financial assets
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Liabilitas segera	357.565	-	-	-	357.565	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah						Deposits from customers
Giro	23.825.878	-	-	-	23.825.878	Current accounts
Tabungan	22.223.639	-	-	-	22.223.639	Savings accounts
Deposito berjangka	-	-	-	14.496.355	14.496.355	Time deposits
Simpanan dari bank lain	2.887.870	560	-	-	2.888.430	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	1.847.139	-	-	1.870.246	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	433.507	-	-	-	433.507	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	333.158	-	-	-	333.158	Other liabilities
Total liabilitas keuangan	50.061.617	1.847.699	-	14.496.355	66.428.778	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga, neto	(17.001.329)	(297.993)	2.889.698	23.855.945	(23.107)	9.423.214
						Net interest repricing gap

2018						
Suku bunga mengambang/ Floating interest rate						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ 3 months but less than 1 year	1 tahun dan lebih/ 1 year and up	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total
Aset keuangan						Financial assets
Kas	1.913.960	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	4.075.938	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	97.287	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	13.349.542	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga						Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	1.991.099	3.695.575	2.105.284	-	-	Amortized cost
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	566.891	-	-	-	-	Marketable securities sold under repurchased agreement
Tagihan lainnya	34.069	-	-	-	-	Other receivable
Kredit yang diberikan						Loans
Modal kerja	-	-	-	7.378.872	-	Working capital
Investasi	-	-	-	3.030.835	-	Investment
Konsumsi	-	-	-	23.483.530	-	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	11.712	26.464	335.165	-	-	Interest receivable
Total aset keuangan	22.040.498	3.722.039	2.440.449	33.893.237	-	62.096.223 Total financial assets
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Liabilitas segera	504.438	-	-	-	-	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah						Deposits from customers
Giro	19.285.765	-	-	-	-	Current accounts
Tabungan	19.112.317	-	-	-	-	Savings accounts
Deposito berjangka	-	-	-	12.517.849	-	Time deposits
Simpanan dari bank lain	733.348	1.760	-	-	-	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	399.240	-	-	326.323	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	398.536	-	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	221.466	-	-	-	-	Other liabilities
Total liabilitas keuangan	40.255.870	401.000	-	12.517.849	326.323	53.501.042 Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga, neto	(18.215.372)	3.321.039	2.440.449	21.375.388	(326.323)	8.595.181 Net interest repricing gap

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. RISIKO PASAR (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan satu poin prosentase suku bunga yang wajar, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Bank. Sensitivitas laporan laba rugi komprehensif adalah dampak dari perubahan asumsi suku bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode tersebut. Sensitivitas total laba atau rugi didasarkan pada asumsi bahwa ada pergeseran paralel pada kurva hasil.

	31 Desember/ December 31, 2019		
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	50.369	(50.369)	Impact to statement of profit or loss And other comprehensive income

Bank memiliki eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dalam mata uang Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat, Euro dan lainnya.

Risiko nilai tukar adalah risiko nilai instrumen keuangan yang akan berfluktuasi karena adanya perubahan dalam nilai tukar valuta asing.

Risiko mata uang adalah kemungkinan kerugian pendapatan yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola *exposure* terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan mempertahankan risiko mata uang asing dalam pedoman peraturan yang ada (yakni menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pengaruh nilai tukar mata uang asing tidak signifikan terhadap Bank.

40. MARKET RISK (continued)

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonable possible change one percentage point in interest rates, with all other variables held constant, of the Bank's statements of profit or loss and other comprehensive income. The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the effect of the assumed changes in interest rates on the statement of comprehensive income for the period. The total sensitivity of profit or loss is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

The Bank has other exposure to interest rate risks in Singapore Dollar, United States Dollar, Euro and others.

Foreign exchange risk is the risk on the financial instruments value, which will fluctuate due to exchange rate volatility.

Foreign currency risk is the probability of loss of earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in foreign currency exposure within the existing regulatory guidelines (i.e. maintaining the Net Open Position based on Bank Indonesia regulations).

As of December 31, 2019 and 2018, the effect of foreign exchange rates fluctuations is insignificant to the Bank.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Bank melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan *Liquidity Risk Model* dengan metodologi *maturity profile gap*. Pengelolaan kondisi likuiditas harian dilakukan oleh Unit *Treasury* dan perubahan eksternal serta makro ekonomi yang terjadi dengan segera diinformasikan dan diambil strategi serta kebijakan internal antara lain melalui mekanisme *Asset and Liabilities Committee* (ALCO).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rasio dari aset likuid neto terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

	2019
Kas dan setara kas	20.453.366
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.038.432
Tagihan reverse repo	5.837.520
Simpanan dari bank lain	(2.888.430)
Jumlah	<u>24.440.888</u>
Simpanan dari nasabah	60.545.872
Rasio aset likuid neto terhadap simpanan dari nasabah	40,37%

41. LIQUIDITY RISK

Liquidity risk is the risk which is caused by the Bank's inability to fulfil its obligations when they become due from cash flow financing sources and/or high quality liquid assets that can be pledged without affecting the Bank's activities and financial condition.

The Bank measures liquidity risk using the Liquidity Risk Model based on maturity profile gap methodology. Daily liquidity condition management is performed by the Treasury Unit and external and macro economic changes are immediately informed, and strategy and internal policies are undertaken, among others, through the Asset and Liabilities Committee (ALCO) mechanism.

As of December 31, 2019 and 2018, the ratio of net liquid assets to deposits from customers are as follows:

	2018	
	19.437.785	Cash and cash equivalent
	566.891	Marketable securities sold under purchased agreement
	-	Reverse repo receivables
	(735.108)	Deposits from other banks
	<u>19.269.568</u>	Total
	50.915.931	Deposits from customers
	37,85%	Ratio of net liquid assets to deposit from customers

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (pokok saja) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

41. LIQUIDITY RISK (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities (principal only) as of December 31, 2019 and 2018:

2019							
	Nilai tercatat/ Carrying value	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1- 3 bulan/ months	3 - 6 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	
Aset keuangan							Financial assets
Kas	2.729.776	2.729.776	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5.734.527	354.347	-	-	-	5.380.180	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	111.454	111.454	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.987.227	10.940.567	1.046.660	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga	9.557.880	2.572.907	2.948.092	306.494	1.217.573	2.512.814	Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	10.365	10.365	-	-	-	-	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	1.038.432	1.038.432	-	-	-	-	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	5.837.520	5.837.520	-	-	-	-	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	81.265	81.265	-	-	-	-	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	8.272.825	764.378	706.268	1.236.377	1.536.362	4.029.440	Other receivable
Kredit yang diberikan	4.716.573	63.336	5.623	13.542	27.585	4.606.487	Loans
Modal kerja	25.362.902	5.320	8.058	47.130	244.604	25.057.790	Working capital
Investasi	416.420	82	11.630	15.110	11.354	378.244	Investment
Konsumsi	75.857.166	24.509.749	4.726.331	1.618.653	3.037.478	41.964.955	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima							Interest receivable
Jumlah							Total
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Liabilitas segera	357.565	357.565	-	-	-	-	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	60.545.872	14.045.814	3.735.547	2.391.032	3.851.073	36.522.406	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2.888.430	2.575.500	312.370	60	500	-	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	1.870.246	1.328.313	3.144	2.729	118.205	417.855	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	433.507	433.507	-	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	333.158	333.158	-	-	-	-	Other liabilities
Jumlah	66.428.778	19.073.857	4.051.061	2.393.821	3.969.778	36.940.261	Total
Perbedaan jatuh tempo	9.428.388	5.435.892	675.270	(775.168)	(932.300)	5.024.694	Maturity gap

2018							
	Nilai tercatat/ Carrying value	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1- 3 bulan/ months	3 - 6 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	
Aset keuangan							Financial assets
Kas	1.913.960	1.913.960	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	4.075.938	827.991	-	-	-	3.247.947	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	97.287	97.287	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	13.349.542	13.340.042	9.500	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	7.791.958	1.156.213	834.886	2.256.336	1.439.239	2.105.284	Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	566.891	566.891	-	-	-	-	Amortized cost
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	34.069	34.069	-	-	-	-	Marketable securities sold under repurchased agreement
Tagihan lainnya	7.378.873	764.378	706.268	1.236.377	1.536.362	3.135.488	Other receivable
Kredit yang diberikan	3.030.835	63.336	5.623	13.542	27.585	2.920.749	Loans
Modal kerja	23.483.529	5.320	8.058	47.130	244.604	23.178.417	Working capital
Investasi	373.341	82	11.630	15.110	11.354	335.165	Investment
Konsumsi	62.096.223	18.769.569	1.575.965	3.568.495	3.259.144	34.923.050	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima							Interest receivable
Jumlah							Total
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Liabilitas segera	504.438	504.438	-	-	-	-	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	50.915.931	11.732.385	3.246.451	2.072.772	3.273.287	30.591.036	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	735.108	721.411	11.937	1.260	500	-	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	725.563	725.563	-	-	-	-	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	398.536	398.536	-	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	221.466	221.466	-	-	-	-	Other liabilities
Jumlah	53.501.042	14.303.799	3.258.388	2.074.032	3.273.787	30.591.036	Total
Perbedaan jatuh tempo	8.595.181	4.465.770	(1.682.423)	1.494.463	(14.643)	4.332.014	Maturity gap

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

42. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Dalam mengelola risiko operasional, *risk owner* bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada unitnya masing-masing. Tata cara pengendalian risiko tersebut diatur dalam kebijakan Bank secara menyeluruh dan prosedur operasional pada setiap unit.

Metode dan kebijakan dalam pengendalian risiko operasional dilaksanakan diantaranya melalui:

- Pengkajian terhadap kebijakan, pedoman, dan prosedur pengendalian internal sesuai dengan kondisi perkembangan dunia perbankan, kebijakan pemerintah dan limitasi operasional yang telah ditetapkan;
- Pengkajian dan penerapan *Disaster Recovery Plan* sebagai langkah antisipasi atas kejadian internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian;
- Tindakan koreksi terhadap hasil temuan audit;
- Pengkajian dari penerapan Rencana Kontinjensi Usaha dalam pengelolaan dan pengendalian aktivitas Bank.

43. RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas fungsional yang melekat pada perkreditan, *treasury*, operasional, sistem informasi teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia.

44. RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Identifikasi risiko reputasi dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Penilaian risiko reputasi dilakukan secara kualitatif antara lain bersumber dari pemberitaan negatif yang muncul dari masyarakat/nasabah dan keluhan nasabah.

42. OPERATIONAL RISK

Operational risk is the risk resulting from inadequate and/or failure of internal processes, people, systems, and/or from external events which affect the Bank's operations.

In managing operational risk, the risk owner is responsible for the risk that occurs in the respective units. Risk management is regulated in the Bank's overall policies and operational procedures in each unit.

The methods and policies involving operational risk management are performed, among others, through the following:

- Evaluation of internal control policies, guidance, and procedures in accordance with the banking industry development, government policies, and pre-determined operational limits;*
- Evaluation and implementation of a Disaster Recovery Plan as the anticipated procedures to be applied during internal and external potential loss events;*
- Implementing corrective actions based on audit results;*
- Reviewing the implementation of the Business Contingency Plan in the management and control of the Bank's activities.*

43. LEGAL RISK

Legal risk is the risk due to legal aspects, legal claims and/or weaknesses in agreements which among others are caused by the absence of supporting regulations, weaknesses in agreements such as the criteria for valid contracts is not fulfilled, and collateral arrangements are inappropriate.

Legal risk identification is performed for all functional activities that are inherent to loan, treasury, operational and information technology systems and human resources management.

44. REPUTATION RISK

Reputation risk is the risk due to a decrease in the stakeholders' trust that results from a negative perception of the Bank.

Reputation risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to reputation risk. Reputation risk valuation is performed qualitatively among others from negative publications and commentaries from the public/customers and customer's complaints.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan. Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan, ketentuan kehati-hatian dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:

- (i) Risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aset, Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- (ii) Risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN);
- (iii) Risiko lain yang terkait dengan ketentuan eksternal dan internal.

Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko kepatuhan dan pengukuran risiko kepatuhan juga dilakukan melalui perhitungan risiko berdasarkan data kerugian akuntansi dengan menggunakan pendekatan distribusi kerugian untuk perhitungan *capital charges*.

46. RISIKO STRATEGIK

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian dimasa lalu yang disebabkan oleh risiko strategik. Pengendalian risiko strategik dilakukan melalui monitoring pencapaian/realisasi atas anggaran yang sudah ditetapkan secara berkala dan dilanjutkan dengan mitigasi dari faktor-faktor penyebab kegagalan.

47. MANAJEMEN MODAL

Tujuan utama dari kebijakan Bank atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Bank memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Bank saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang serta untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank telah efisien.

Bank menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Bank senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko yang dapat ditoleransi melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang disesuaikan dengan tingkat permodalan dan persyaratan likuiditas Bank.

Kebutuhan permodalan Bank juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data-data analisis.

45. COMPLIANCE RISK

Compliance risk is the risk incurred because the Bank has not complied with and/or has not implemented appropriate internal policies and regulations. In practice, compliance risk is inherent to the Bank's risk related to regulations, prudential provisions and other provisions, such as:

- (i) Credit risk related to Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset Quality, Allowance for Impairment Losses, and Legal Lending Limit (LLL) regulations;*
- (ii) Market risk related to Net Open Position (NOP) regulations;*
- (iii) Other risks related to external and internal regulations.*

Compliance risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to compliance risk and is measured through risk calculations based on accounting loss data using a loss distribution approach for calculating capital charges.

46. STRATEGIC RISK

Strategic risk is the risk due to inaccurate decision making and/or implementation of strategic decisions and failure in anticipating business environment changes. Strategic risk identification is performed periodically based on knowledge of historical losses due to strategic risk. Strategic risk control is performed through periodical monitoring the realization of the budget determined periodically, followed by the investigation of the factors that cause failures.

47. CAPITAL MANAGEMENT

The primary objectives of the Bank's capital management policy are to ensure that the Bank has a strong capital to support the Bank's business expansion strategy currently, to sustain future development of the business, to meet regulator capital adequacy requirements and also to ensure the efficiency of Bank's capital structure.

Bank undertakes Capital Planning based on assessment and review of the capital situation in terms of the legal capital adequacy requirement, combined with assessment of economic outlooks. Bank will continue to link financial and capital adequacy goals to risk which can be tolerated appetite through the capital planning process method as well as assess the businesses based on Bank's capital and liquidity requirements.

The capital needs of the Bank are also discussed and planned on a routine basis supported by data analysis.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

47. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Rencana Permodalan disusun oleh Dewan Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang kuat guna mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Bank. Bank diwajibkan untuk mentaati peraturan yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 November 2016 tentang "Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" dan Surat Edaran OJK No.43/SEOJK.03/2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional", dimana modal yang diwajibkan regulator dianalisa dalam dua *tier* sebagai berikut:

Modal inti (*tier 1*), yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti utama antara lain meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu dan periode/tahun berjalan (100%), penghasilan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan/kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang dari penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia dan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif yang diperbolehkan. Aset pajak tangguhan, aset takberwujud (termasuk *goodwill*) dan penyertaan (100%) merupakan faktor pengurang modal inti utama. Modal inti tambahan antara lain terdiri dari saham preferen, surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi dimana ketiganya bersifat non kumulatif setelah dikurangi pembelian kembali.

Modal pelengkap (*tier 2*) antara lain meliputi surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi serta penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia.

47. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Capital Planning is prepared by the Board of Directors as part of Bank's business plan and is approved by the Board of Commissioners. Capital Planning ensures that adequate levels of capital and strong mix of the different components of capital are maintained to support business growth in the future.

Financial Services Authority (OJK) sets and monitors capital requirements for the Bank. The Bank is required to comply with prevailing regulation in respect of regulatory capital. The Bank's approach to capital management is driven by bank's strategic and organisational requirements, taking into account regulatory, economic and commercial environment.

Bank has complied with all regulator imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

Bank calculates its capital requirements in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No.34/POJK.03/2016 dated November 22, 2016 about "Changes of Financial Service Authority Regulation No.11/POJK.03/2016 about Minimum Capital Reserve for Commercial Bank" and OJK Circular Letter No.43/SEOJK.03/2016 about "Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report", where the regulatory capital is analysed into two tiers as follows:

Tier 1 capital, which consists of core and additional core capital. Core capital includes issued and fully paid-up capital, additional paid-in capital, general reserve, specific reserve, retained earnings and profit for the period/year (100%), other comprehensive income deriving from potential gain/loss from the changes in fair value of financial assets classified as available-for-sale, shortfall between allowable amount of allowance for uncollectible account on productive assets according to Bank Indonesia guideline and allowance for impairment losses on productive assets. Deferred tax assets, intangible assets (including goodwill) and share investments (100%) are deducted from core capital. Additional core capital includes non-cumulative preference shares, subordinated securities and subordinated debts net of buyback portion.

Supplementary capital (tier 2), which includes subordinated securities and subordinated debts and allowance for uncollectible account on productive assets according to Bank Indonesia guideline.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

47. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Beberapa batasan berlaku untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator, antara lain Bank wajib menyediakan modal inti (*tier 1*) paling rendah sebesar 6,00% dari ATMR dan modal inti utama (*Common Equity tier 1*) paling rendah sebesar 4,50% dari ATMR, baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan entitas anak.

- Modal *tier 1*, meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, cadangan umum, saldo laba dan laba periode berjalan.
- Modal *tier 2*, meliputi penyisihan kerugian penurunan nilai yang diperbolehkan.

Bank tidak mempunyai modal tambahan lain yang memenuhi kriteria modal tier 3 sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

Berbagai batasan telah diterapkan untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator. Pengaruh dari pajak tangguhan telah dikeluarkan dalam menentukan jumlah saldo laba untuk modal *tier 1*; hanya 50 persen laba periode berjalan sebelum pajak tangguhan yang dapat diperhitungkan dalam modal *tier 1*; dan modal *tier 2* tidak boleh melebihi modal *tier 1*. Juga terdapat batasan jumlah penyisihan kolektif penurunan nilai yang boleh dimasukkan sebagai bagian dari modal *tier 2*.

Aset Tertimbang Menurut Risiko ("ATMR") Bank ditentukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko yang terkait dengan aset dan eksposur, yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan peraturan BI, Bank diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR Bank.

Kebijakan Bank adalah menjaga modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan pemodal, kreditor dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan. Pengaruh tingkat modal terhadap tingkat pengembalian ke pemegang saham juga diperhitungkan dan Bank juga memahami perlunya menjaga keseimbangan antara tingkat pengembalian yang tinggi, yang dimungkinkan dengan gearing yang lebih besar serta keuntungan-keuntungan dan tingkat keamanan yang didapat dari posisi modal yang kuat.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank dan rasio-rasio modal ini tetap menjadi standar industri untuk mengukur kecukupan modal. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Bank dengan ketersediaan modal. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

47. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Various limits have been set to elements of the regulatory capital, such as Banks are required to provide core capital (*tier 1*) at a minimum of 6.00% from Risk Weighted Assets and Common Equity *tier 1* at a minimum of 4.50% from Risk Weighted Assets, both individually and consolidated level with subsidiary.

- *Tier 1 capital*, which includes issued and fully paid share capital, general reserve, retained earnings and profit for the period.
- *Tier 2 capital*, which includes the eligible amount of allowance for impairment losses.

The Bank does not have any other supplementary capital which meets the criteria of tier 3 capital under prevailing BI regulation.

Various limits are applied to elements of the regulatory capital. The effect of deferred taxation has been excluded in determining the amount of retained earnings for tier 1 capital; only 50 percent of the profit for the period before deferred taxation being included in tier 1 capital; and qualifying tier 2 capital cannot exceed tier 1 capital. There is also a restriction on the amount of collective impairment allowances that may be included as part of tier 2 capital.

The Bank's risk weighted assets ("ATMR") are determined according to specified requirements that seek to reflect the varying levels of risk attached to assets and exposures not recognized in the statement of financial position. Based on BI regulations, the Bank needs to take into consideration its credit risk, market risk and operational risk in measuring the ATMR.

The Bank's policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of business. The impact of the level of capital on shareholders' return is also recognized and the Banks also recognise the need to maintain a balance between the higher return that might be possible with greater gearing and the advantages and security level afforded by a strong capital position.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. OJK's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the Bank's risk profile with the available capital. The Bank is required to provide minimum capital based on the risk profile.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

47. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk profil risiko peringkat 1 (satu), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 2 (dua), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 3 (tiga), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 10% sampai dengan kurang dari 11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 11% sampai dengan kurang dari 14% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko.

Posisi modal yang diwajibkan regulator Bank sesuai peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019
Modal inti (Tier 1)	
Modal inti utama (CET 1)	7.822.122
Modal inti tambahan (AT 1)	-
	7.822.122
Modal pelengkap (Tier 2)	380.171
Jumlah modal	8.202.293
Aset Tertimbang Menurut Risiko	
Risiko kredit	30.033.543
Risiko operasional	7.543.287
Risiko pasar	98.829
Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko	37.675.659
Rasio kecukupan modal	
Rasio CET 1	20,76%
Rasio tier 1	20,76%
Rasio tier 2	1,01%
Rasio modal terhadap ATMR	21,77%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional	22,15%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	21,77%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	9% - <10%

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum dalam hal OJK menilai suatu bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Berdasarkan *self-assessment* Bank, pada tanggal 31 Desember 2019 profil risiko Bank dinilai berada pada peringkat *Low to Moderat* (PK-2). Oleh karena itu, Bank berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank berada pada level di atas modal minimum yang diwajibkan tersebut, yaitu sebesar 21,77%.

47. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Minimum capital requirements are as follows:

- For banks with risk profile rating 1 (one), the minimum capital requirement is 8% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 2 (two), the minimum capital requirement is 9% to less than 10% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 3 (three), the minimum capital requirement is 10% to less than 11% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 4 (four) or 5 (five), the minimum capital requirement is 11% to less than 14% of Risk Weighted Asset.

The Bank's regulatory capital position under prevailing Bank Indonesia regulation as of December 31, 2019 and 2018 was as follows:

	2019	2018
Core capital (Tier 1)		
Common equity tier (CET 1)	7.436.484	7.436.484
Additional equity tier (AT 1)	-	-
	7.436.484	7.436.484
Supplementary capital (Tier 2)	311.766	311.766
Total capital	7.748.250	7.748.250
Risk Weighted Asset		
Credit risk	24.941.245	24.941.245
Operational risk	6.984.173	6.984.173
Market risk	84.418	84.418
Total Risk Weighted Asset	32.009.836	32.009.836
Capital Adequacy Ratio		
CET 1 ratio	23,23%	23,23%
Tier 1 ratio	23,23%	23,23%
Tier 2 ratio	0,97%	0,97%
Ratio of capital to ATMR	24,21%	24,21%
Capital adequacy ratio with credit and operational risk	24,27%	24,27%
Capital adequacy ratio with credit, market and operational risk	24,21%	24,21%
Minimum capital adequacy ratio required	9% - <10%	9% - <10%

Financial Services Authority (OJK) is authorised to stipulate minimum capital greater than minimum capital in terms of OJK assesses a bank as facing potential losses which requires a larger capital.

Based on its self-assessment, as of December 31, 2019 the Bank risk profile is assessed to be in rating *Low to Moderat* (PK-2). Therefore, the Bank is required to provide a minimum capital of 9% to less than 10%. The Bank Capital Adequate Ratio was 21.77%, which was higher than the required minimum provision of capital.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. POSISI DEvisa NETO

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No.12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang.

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

48. NET OPEN POSITION

The Net Open Position (NOP) was calculated based on Bank Indonesia Regulation No.5/13/PBI/2003 dated July 17, 2003 which was last amended by Bank Indonesia Regulation No.12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010. Based on this regulation, the Bank is required to maintain overall and statement of financial position Net Open Position at a maximum of 20% of the total capital. The ratio is the sum of the absolute values, which are stated in rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each currency.

The Bank's NOP as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

2019						
Mata uang	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai neto/ Net value	Nilai absolut neto/ Net absolute value	Currencies	
POSISI KEUANGAN					FINANCIAL POSITION	
Dolar Amerika Serikat	91.521	84.846	6.675	6.675	United States Dollar	
Euro	2.720	717	2.003	2.003	Euro	
Yen Jepang	1.272	7	1.264	1.264	Japanese Yen	
Riyal Saudi Arabia	8.422	1	8.421	8.421	Saudi Arabian Riyal	
Dolar Singapura	10.015	4.688	5.328	5.328	Singapore Dollar	
Poundsterling Inggris Raya	1.181	-	1.181	1.181	Great Britain Poundsterling	
Dolar Australia	547	-	547	547	Australian Dollar	
Dolar Hong Kong	607	1	607	607	Hong Kong Dollar	
Ringgit Malaysia	1.324	-	1.324	1.324	Malaysian Ringgit	
Yuan China Renminbi	525	-	525	525	Chinese Yuan Renminbi	
	118.134	90.260	27.875	27.875		
REKENING ADMINISTRATIF					ADMINISTRATIVE ACCOUNTS	
Dolar Amerika Serikat	-	-	81.341	81.341	United States Dollar	
Euro	-	-	-	-	Euro	
Jumlah	118.134	90.260	109.216	109.216	Total	
Jumlah modal (Catatan 47)				8.202.293	Total capital (Note 47)	
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)				0,34%	Net Open Position as a percentage of capital (Financial position)	
Rasio Posisi Devisa Neto				1,33%	Net Open Position as a percentage of capital	
2018						
Mata uang	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai neto/ Net value	Nilai absolut neto/ Net absolute value	Currencies	
POSISI KEUANGAN					FINANCIAL POSITION	
Dolar Amerika Serikat	82.115	70.739	88.455	88.455	United States Dollar	
Euro	2.803	764	2.777	2.777	Euro	
Yen Jepang	499	7	492	492	Japanese Yen	
Riyal Saudi Arabia	7.420	4	7.416	7.416	Saudi Arabian Riyal	
Dolar Singapura	4.214	1.226	2.987	2.987	Singapore Dollar	
Poundsterling Inggris Raya	996	-	996	996	Great Britain Poundsterling	
Dolar Australia	230	-	230	230	Australian Dollar	
Dolar Hong Kong	279	1	279	279	Hong Kong Dollar	
Ringgit Malaysia	737	-	737	737	Malaysian Ringgit	
Yuan China Renminbi	435	-	435	435	Chinese Yuan Renminbi	
	99.729	72.741	104.805	104.805		
REKENING ADMINISTRATIF					ADMINISTRATIVE ACCOUNTS	
Dolar Amerika Serikat	-	77.078	(77.078)	77.078	United States Dollar	
Euro	-	739	(739)	739	Euro	
Jumlah	99.729	150.558	27.727	181.883	Total	
Jumlah modal (Catatan 47)				7.748.250	Total capital (Note 47)	
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)				1,35%	Net Open Position as a percentage of capital (Financial position)	
Rasio Posisi Devisa Neto				2,35%	Net Open Position as a percentage of capital	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

49. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar yang diungkapkan di bawah ini adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	2019	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Aset Keuangan		
Kas	2.729.776	2.729.776
Surat Berharga		
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain		
Surat Utang Negara	10.365	10.365
Biaya perolehan diamortisasi		
Surat Utang Negara	3.710.487	3.744.158
Obligasi:		
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	294.085	298.458
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	250.166	251.118
PT Federal International Finance Tbk	187.125	188.131
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	160.189	161.462
PT BFI Finance Tbk	160.008	160.347
PT Astra Sedaya Finance	150.000	150.992
PT Pupuk Indonesia (Persero)	123.440	124.168
PT Medco Energi Internasional Tbk	82.500	84.311
PT Indosat Tbk	75.034	75.872
PT BCA Finance	75.000	75.309
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	66.000	66.239
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	57.000	57.038
PT Bank Pembangunan Daerah		
Jawa Barat dan Banten Tbk	50.000	51.157
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	49.408	52.646
PT Pegadaian (Persero)	47.027	47.286
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	25.000	25.145
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	25.000	25.079
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	20.000	20.133
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.084	10.088
PT Angkasa Pura I (Persero)	8.167	8.140
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	-
PT Indomobil Finance Indonesia	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	-
PT Intiland Development Tbk	-	-
PT XL Axiata Tbk	-	-
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	-	-
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	-	-
PT Mandiri Tunas Finance	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	1.351.147	1.370.829
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	-
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA):		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	100.000	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	100.000	100.000
PT Bank Muamalat Indonesia	-	-
PT Bank Bukopin Syariah	-	-
Negotiable Certificate of Deposit (NCD):		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	248.135	250.000
PT Bank Of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	168.991	170.000
PT Mandiri Taspen	49.463	50.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	49.282	50.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	-
PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk	-	-
PT Bank KEB Hana	-	-
PT Bank Mizuho Indonesia	-	-
PT Bank Pembangunan Daerah	-	-
Jawa Barat dan Banten Tbk	-	-
PT Commonwealth Bank Indonesia	-	-
PT Bank DBS Indonesia	-	-
Surat Berharga Jangka Menengah :		
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	80.000	80.000
PT Bank KEB Hana Indonesia	50.000	50.000
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	50.000	50.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	39.000	39.000
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	25.000	25.000
PT Indonesia Infrastructure Finance	-	-
Reksadana:		
PT Permodalan Nasional Madani	709.000	709.000
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	400.000	400.000
PT Pool Advista Aset Manajemen	300.000	300.000
PT Danareksa Investment Management	100.000	100.000
PT Avrist Asset Management	100.000	100.000
Surat kredit berdokumen dalam negeri	11.955	11.955
Wesel ekspor	187	187
	9.568.245	9.643.614
	12.298.021	12.373.390

49. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The fair values disclosed below are based on available relevant information at the statement of financial position date and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after the dates of the statements of financial position.

The table below presents the carrying amount and fair values of the Bank's financial assets and liabilities as of December 31, 2019 and 2018:

	2018	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Financial Assets		
Cash	1.913.960	1.913.960
Securities		
Fair value through other comprehensive income		
Government bonds	-	-
Amortized cost		
Government bonds	3.567.931	3.550.215
Bonds:		
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	209.988	209.347
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	77.214	77.335
PT Federal International Finance Tbk	233.004	230.625
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	104.249	104.249
PT BFI Finance Tbk	129.760	127.968
PT Astra Sedaya Finance	81.000	79.443
PT Pupuk Indonesia (Persero)	11.411	11.493
PT Medco Energi Internasional Tbk	82.500	81.652
PT Indosat Tbk	158.497	155.863
PT BCA Finance	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	57.000	54.330
PT Bank Pembangunan Daerah		
Jawa Barat dan Banten Tbk	50.000	50.393
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	45.891	45.081
PT Pegadaian (Persero)	47.105	45.880
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	50.000	50.077
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	44.907	44.504
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	121.721	121.423
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	-
PT Angkasa Pura I (Persero)	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	155.431	155.509
PT Bank OCBC NISP Tbk	119.851	119.349
PT Indomobil Finance Indonesia	100.000	99.717
PT Bank CIMB Niaga Tbk	50.000	50.142
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	50.118	49.984
PT Intiland Development Tbk	30.000	30.065
PT XL Axiata Tbk	29.000	29.027
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	25.274	25.267
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	25.249	25.265
PT Mandiri Tunas Finance	20.000	20.103
Certificates of Bank Indonesia	437.107	436.876
Deposits Certificates of Bank Indonesia	467.763	467.631
Interbank Mudharabah Investment Certificates:		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	150.000	150.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	100.000	100.000
PT Bank Muamalat Indonesia	150.000	150.000
PT Bank Bukopin Syariah	30.000	30.000
Negotiable Certificate of Deposit:		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	-
PT Bank Of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	-	-
PT Mandiri Taspen	-	-
PT Bank Pembangunan Daerah	-	-
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	-	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	97.317	100.000
PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk	47.216	50.000
PT Bank KEB Hana	47.293	50.000
PT Bank Mizuho Indonesia	46.927	50.000
PT Bank Pembangunan Daerah	-	-
Jawa Barat dan Banten Tbk	44.305	45.000
PT Commonwealth Bank Indonesia	29.473	30.000
PT Bank DBS Indonesia	19.715	20.000
Medium Term Notes:		
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	80.000	80.000
PT Bank KEB Hana Indonesia	50.000	50.000
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	50.000	50.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	25.000	25.000
PT Indonesia Infrastructure Finance	39.000	39.000
Reksadana:		
PT Permodalan Nasional Madani	190.000	190.000
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	-	-
PT Pool Advista Aset Manajemen	-	-
PT Danareksa Investment Management	-	-
PT Avrist Asset Management	-	-
Domestic L/C	13.238	13.238
Export bills	503	503
	7.791.958	7.771.553
	9.705.918	9.685.513

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

49. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

	2019	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Biaya perolehan diamortisasi		
Giro pada Bank Indonesia	5.734.527	5.734.527
Giro pada Bank lain	111.479	111.479
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.989.584	11.989.584
Tagihan reverse repo	5.837.520	5.837.520
Tagihan lainnya	81.265	81.265
Pinjaman diberikan:		
Modal kerja	8.272.825	8.272.826
Investasi	4.716.573	4.716.573
Konsumsi	25.362.902	25.362.902
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	416.420	416.420
	62.523.095	62.523.096
Jumlah	72.091.340	72.166.710
Liabilitas keuangan		
Liabilitas lain-lain		
Liabilitas segera	357.565	357.565
Simpanan nasabah	60.545.872	60.545.872
Simpanan dari bank lain	2.888.430	2.888.430
Pinjaman yang diterima	1.870.246	1.870.246
Beban yang masih harus dibayar	433.507	433.507
Liabilitas lain-lain	333.158	333.158
Jumlah	66.428.778	66.428.778

- (i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat-surat berharga dan tagihan lainnya.

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, giro serta penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun, sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

- (ii) Kredit yang diberikan

Portofolio kredit Bank terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskonto dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

49. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

	2018		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
			Amortised cost
	4.075.938	4.075.938	Current accounts with Bank Indonesia
	97.287	97.287	Current accounts with other banks
			Placement with Bank Indonesia
	13.349.542	13.349.542	and other banks
	566.891	566.891	Reverse repo receivables
	34.069	34.069	Other receivables
			Loans:
	7.378.873	7.378.873	Working capital
	3.030.835	3.030.835	Investment
	23.483.529	23.483.529	Consumption
			Interest receivables
	373.341	373.341	
	52.390.305	52.390.305	Total
	60.162.263	60.161.858	
			Financial liabilities
			Other liabilities
	504.438	504.438	Obligations due immediately
	50.915.931	50.915.931	Deposits from customers
	735.108	735.108	Deposits from other banks
	725.563	725.563	Borrowings
	398.536	398.536	Accrued expenses
	221.466	221.466	Other liabilities
	53.501.042	53.501.042	Total

- (i) Current accounts with Bank Indonesia, other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities and other receivables.

Carrying value of cash and cash equivalents, current accounts and placements at floating interest rates are the reasonable estimates of fair value.

The estimated fair value of placements with fixed interest rates, marketable securities and other receivables are determined based on discounted cash flows using the prevailing money market interest rates for debt with the same credit risks and remaining maturity. Because the residual maturity dates are below one year, the carrying amount of fixed rate placements, marketable securities and other receivables are reasonable estimates of fair value.

- (ii) Loans

The Bank credit portfolio consists of loans with fixed interest rates. The loans are stated at carrying amounts. The fair value of the loans shows the estimated value of discounted future cash flows expected to be received by the Bank. Estimated cash flows are discounted using market interest rates to determine fair values.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

49. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

- (iii) Liabilitas segera, simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Adalah tidak praktis untuk memperkirakan nilai wajar dari setoran jaminan dikarenakan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tetap meskipun tidak diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

- (iv) Surat-surat berharga

Nilai wajar untuk surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa. Surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual adalah surat berharga yang ditetapkan untuk dimiliki pada periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- (v) Pinjaman yang diterima

Dihitung berdasarkan diskonto arus kas sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

49. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

- (iii) Liabilities immediately payable, deposits from customers and deposits from other banks and other liabilities

The estimated fair value of liabilities immediately payable, deposits with no specified maturity, including non-interest-bearing deposits represent payable amounts when the debt is paid.

The estimated fair value of deposits with fixed interest rates and other liabilities that do not have a quotation price in an active market is determined based on discounted cash flows using the interest rates of new debt with similar maturities. There is no practice to estimate the fair value of security deposits due to they have no certain settlement schedule, although is not expected to be settled within 12 months after the reporting date, the carrying amount of fixed rate deposits and other liabilities are reasonable estimates of fair value.

- (iv) Marketable securities

The fair value for marketable securities held to maturity is determined based on market prices or quotation prices of intermediaries (*brokers*)/securities dealers. If this information is not available, fair value is estimated using quotation market prices of securities with similar credit characteristics, maturities and yields. The Available for sale for marketable securities are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held to maturity or financial assets at fair value through profit or loss.

- (v) Borrowings

The calculation is based on the discounted cash flow corresponding to the remaining period to maturity.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Program pensiun manfaat pasti

Bank menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi seluruh karyawan Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Dalam program ini, hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Bank dengan memperhatikan faktor penghargaan per tahun masa kerja, jasa lalu dan Penghasilan Dana Pensiun. Program dana pensiun Bank dikelola oleh PT Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank, karyawan Bank memberikan kontribusi pada dana pensiun sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan sisanya merupakan kontribusi Bank.

- (i) Penilaian aktuarial atas beban pensiun per 31 Desember 2019 dan 2018 dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 15 Januari 2020 dan 4 Januari 2019 telah sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	2019	2018	
Asumsi ekonomi			Economic assumptions
Tingkat diskonto	8,00%	8,60%	Discount rate
Kenaikan penghasilan dasar pensiun	0,00%	0,00%	Pension basic income growth
Tingkat hasil investasi yang Diharapkan	8,00%	8,60%	Expected rate of return on investments
Asumsi lainnya			Other assumptions
Tingkat mortalita	AMT 1949 (Modified)	AMT 1949 (Modified)	Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years	58 tahun/years	Normal retirement age
Kenaikan manfaat pensiun	10,00% per 2 tahun/years	10,00% per 2 tahun/years	Benefit pension growth

50. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

Defined benefit pension plan

The Bank provides a Defined Benefit Pension Plan for all qualified employees in accordance with the Regulation of Pension Funds of "PT Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk". Based on this program, the right of pension benefits is provided based on the requirements as set out in the regulation considering the annual service factors, past service and the Pension Fund's income. The Bank's pension funds program is managed by "PT Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk". Pursuant to the terms provided the Bank Directors' Decision Letter, the employees' pension fund contribution is 5% of the pensionable basic income of employees and the remaining pension fund contributions are paid by the Bank.

- (i) The actuarial valuation of pension expense as of December 31, 2019 and 2018 were made by PT Sienko Aktuarindo Utama, an independent actuarial firm, based on their report dated January 15, 2020 and January 4, 2019 conform with the PSAK 24 (revised 2013) with use calculated method *Projected Unit Credit* also considers assumptions are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

(ii) Komposisi aset dana pensiun, terdiri dari:

	2019
Deposito berjangka	13,70%
Obligasi korporasi	72,60%
Properti	7,00%
Lainnya	6,70%

(iii) Perhitungan kewajiban program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Nilai kini kewajiban	738.556	335.681	461.161
Nilai wajar aset program	(533.439)	(429.961)	(510.349)
Status pendanaan	205.117	(94.280)	(49.188)
Perubahan dampak batas atas aset	-	(45.092)	7.806
Aset imbalan pasti neto	205.117	(139.372)	(41.382)

(iv) Mutasi atas kewajiban program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	2019
Aset imbalan pasti neto awal tahun	(94.280)
Biaya imbalan pasti:	
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	22.637
Pengukuran kembali liabilitas (aset) periode berjalan	292.921
Pembayaran iuran dari pendiri	(12.309)
Pembayaran manfaat	(3.851)
Aset imbalan pasti neto	205.118

(v) Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2019
Biaya jasa kini	22.637
Biaya jasa lalu - vested	
Keuntungan/kerugian atas penyelesaian	
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan:	
Biaya bunga	(28.869)
Pendapatan bunga dari aset	36.977
Bunga atas dampak batasan aset	(8.108)
Biaya imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi	22.637

50. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Defined benefit pension plan (continued)

(ii) Pension plan assets primarily consists of :

2018	
13,70%	Time deposits
72,60%	Corporate Bonds
7,00%	Property
6,70%	Others

(iii) The calculation of defined benefit pension plan obligations recognized in the statement of financial position are as follows:

2016	2015	
390.741	342.361	Present value of liabilities
(447.735)	(418.418)	Fair value of assets program
(56.994)	(76.057)	Funded status
19.063	(19.591)	Impact changes on assets upper threshold
(37.931)	(95.648)	Asset defined benefit - net

(iv) The calculation movement of defined benefit pension plan obligations are as follows:

2018	
	<i>Asset defined benefit</i>
(49.188)	<i>net at beginning of year</i>
	<i>Expenses for the year:</i>
6.755	<i>Amount recognized in the profit and losses</i>
	<i>Remeasurement of liabilities (assets) in the</i>
(35.609)	<i>current year</i>
(14.559)	<i>Paid of contribution from employee</i>
(1.679)	<i>Payment of benefits</i>
(94.280)	<i>Assets defined benefit - net</i>

(v) The calculation of defined benefit pension plan expenses recognized in the statement of profit or loss are as follows:

2018	
6.755	<i>Current service cost</i>
	<i>Past service cost - vested</i>
	<i>Gain/losses on settlement</i>
	<i>Net interest on liabilities (asset) defined:</i>
(34.126)	<i>Interest cost</i>
37.766	<i>Interest income from assets</i>
(3.640)	<i>Interest of the asset ceiling</i>
6.755	<i>Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss</i>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)**

- (vi) Mutasi atas nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

	2019
Saldo awal	429.961
Hasil pengembangan riil	36.977
Imbalan hasil atas aset program	73.579
Pembayaran iuran-iuran – pemberi kerja	12.309
Pembayaran iuran-iuran – peserta program	3.851
Pembayaran imbalan kerja	(23.238)
Saldo akhir	533.439

- (vii) Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut :

	2019
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	374.608
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada aset	(73.579)
Perubahan pada dampak batasan aset tidak termasuk bunga	-
Biaya yang diakui di penghasilan komprehensif lain	301.029

- (viii) Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	2019
Saldo awal	20.885
(Keuntungan) kerugian aktuarial pada kewajiban	374.608
(Keuntungan) kerugian aktuarial pada aset	(73.579)
Perubahan atas dampak atas aset di luar bunga neto aset/liabilitas	-
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto	321.914

50. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)**Defined benefit pension plan (continued)**

- (vi) The movement in the fair value of plan asset are as follows:

	2018	
Saldo awal	510.349	Beginning balance
Hasil pengembangan riil	37.765	Actual investment result
Imbalan hasil atas aset program	(115.720)	Return on plan assets
Pembayaran iuran-iuran – pemberi kerja	14.559	Contribution paid – employer's
Pembayaran iuran-iuran – peserta program	1.679	Contribution paid – employee plan
Pembayaran imbalan kerja	(18.671)	Actual benefit paid
Saldo akhir	429.961	Ending balance

- (vii) The calculation of defined benefit pension plan expenses recognized in the other comprehensive income are as follows:

	2018	
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	(147.689)	Actuarial gain (losses) on obligation
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada aset	115.720	Actuarial gain (losses) on asset
Perubahan pada dampak batasan aset tidak termasuk bunga	41.452	Amendment of impact on assets exclude interest
Biaya yang diakui di penghasilan komprehensif lain	9.483	Recognized cost in other comprehensive income

- (viii) The remeasurement of the defined benefit plan liability (assets) is as follows:

	2018	
Saldo awal	11.402	Beginning balance
(Keuntungan) kerugian aktuarial pada kewajiban	(147.689)	Actuarial (gain) losses on liabilities
(Keuntungan) kerugian aktuarial pada aset	115.720	Actuarial (gain) losses on assets
Perubahan atas dampak atas aset di luar bunga neto aset/liabilitas	41.452	Amendment of the impact on assets outside interest in net assets/liability
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto	20.885	The remeasurement of pension net of defined benefit liability

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Imbalan pasca kerja program manfaat lain pada dana pensiun

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.05/2017 tentang iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun, selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK, dan DPLK, Bank dapat menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta. Manfaat lain adalah pembayaran manfaat selain manfaat pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun. Imbalan pegawai dihitung berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No. 053/070/Kep/DIR/SDM tanggal 1 April 2017 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-529/NB.1/2017 tanggal 3 Juli 2017. Bank menentukan manfaat lain bagi Peserta dalam tiga bentuk, antara lain dana manfaat tambahan, dana santunan kesehatan, dan dana santunan kematian. Manfaat ini mulai diberikan oleh Bank terhitung sejak 1 Januari 2018.

- (i) Penilaian aktuaria atas beban pensiun dihitung oleh PT Dian Artha Tama untuk tanggal valuasi per 31 Desember 2018. Penilaian aktuaria telah sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2016) dengan menggunakan metode *projected unit credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	2019
Asumsi ekonomi	
Tingkat diskonto	8,00%
Kenaikan penghasilan dasar pensiun	0,00%
Tingkat hasil investasi yg diharapkan	8,00%
Asumsi lainnya	
Tingkat mortalita	GAM - 1971
Usia pensiun normal	58 tahun/years
Tingkat cacat	0,01% per tahun/year

- (ii) Komposisi aset dana pensiun, terdiri dari:

	2019
Deposito berjangka	13,70%
Obligasi korporasi	72,60%
Properti	7,00%
Lainnya	6,70%

- (iii) Perhitungan kewajiban program pensiun manfaat lain yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2019
Nilai kini kewajiban	146.753
Nilai wajar aset program	(59.030)
Defisit liabilitas	87.723
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	-
Biaya jasa lalu yang belum diakui	-
Labu (rugi) aktuaria yang belum diakui	-
Cadangan	87.723

50. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Defined contribution pension plan (continued)

Post-employment benefits from other programs on pension funds

Based on the Financial Services Authority Regulation No.5/POJK.05/2017 concerning contributions, pension benefits, and other benefits held by pension funds, in addition to organizing pension programs, DPPK, and DPLK, the Bank can organize or provide other benefits to participants. Another benefit is the payment of benefits other than pension benefits that can be made by the Pension Fund and regulated in the Pension Fund regulations. Employee benefits are calculated based on Pension Fund Regulations of the Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No.053/070/Kep/DIR/SDM dated April 1, 2017 which was ratified based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No.Kep-529/NB.1/2017 dated July 3, 2017. The Bank determines other benefits for Participants in three forms, including additional benefit funds, health compensation funds, and death compensation funds. This benefit will be provided by the Bank starting January 1, 2018.

- (i) Actuarial valuation on pension expense is calculated by PT Dian Artha Tama for the valuation date as of December 31, 2018. Actuarial valuation is in accordance with PSAK 24 (revised 2016) using the projected unit credit method and considering the following assumptions:

	2018	
Economic assumptions		
Discount rate	8,60%	
Pension basic income growth	0,00%	
Expected rate of return on investment	8,60%	
Other assumptions		
Mortality table	AMT 1949 (Modified)	
Normal retirement age	58 tahun/years	
Disability rate	0,01% per tahun/year	

- (ii) Composition of pension fund assets, consisting of:

	2018	
Time deposits	13,70%	
Corporate Bonds	72,60%	
Property	7,00%	
Others	6,70%	

- (iii) Calculation of other benefit pension plan obligations recognized in the financial position report are as follows:

	2018	
Present value of liabilities	116.748	
Fair value of assets program	(87.376)	
Loss of liabilities	29.372	
Present value of liabilities that are not funded	-	
Unrecognised past service costs	-	
Unrecognised actuarial profit (loss)	-	
Allowance	29.372	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)**Imbalan pasca kerja program manfaat lain pada dana pensiun (lanjutan)

- (iv) Mutasi atas kewajiban program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	2019
Liabilitas (aset) imbalan pasti	
neto awal tahun	(29.372)
Biaya imbalan pasti:	
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	(4.856)
Pengukuran kembali liabilitas (aset)	
periode berjalan	(56.589)
Pembayaran iuran dari pendiri	3.094
Liabilitas imbalan pasti neto	(87.723)

- (v) Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam Laporan Laba Rugi adalah sebagai berikut:

	2019
Biaya jasa kini	2.330
Biaya jasa lalu - vested	-
Biaya jasa lalu - amandemen program	-
Keuntungan/kerugian atas penyelesaian	27.985
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan:	
Biaya bunga	10.040
Pendapatan bunga dari aset	(7.514)
Bunga atas dampak batasan aset	-
Biaya imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi	4.856

- (vi) Mutasi atas nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

	2019
Saldo awal	87.376
Hasil yang diharapkan dari aset	7.514
Pembayaran iuran-iuran – pemberi kerja	3.094
Pembayaran iuran-iuran – peserta program	-
Pembayaran imbalan kerja	(862)
Laba (rugi) aktuarial pada aset	(38.092)
Saldo akhir	59.030

- (vii) Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2019
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	18.497
Keuntungan aktuarial pada aset	38.092
Diakui di penghasilan komprehensif lain	56.589

- (viii) Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	2019
Saldo awal	-
(Keuntungan) kerugian aktuarial pada kewajiban	18.497
(Keuntungan) kerugian aktuarial pada aset	38.092
Jumlah pengukuran kembali atas aset imbalan pasti neto	56.589

50. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)**Defined contribution pension plan (continued)**Post-employment benefits from other programs on pension funds (continued)

- (iv) The mutations of the defined benefit pension plan obligations are as follows:

	2018	
Liabilities (asset) defined benefit		
net at beginning of year	-	
Expenses for the year:		
Amount recognized in the profit and losses	(30.418)	
Remeasurement of liabilities (assets)		
in the current year	-	
Paid of contribution from employee	1.046	
Liabilities defined benefit - net	(29.372)	

- (v) The calculation of the cost of a defined benefit pension plan recognized in the Income Statement is as follows:

	2018	
Current service cost	2.433	
Past service cost - vested	-	
Past service cost - program amendment	27.985	
Gain/losses on settlement	-	
Net interest on liabilities (asset) defined:		
Interest cost	-	
Interest income from assets	-	
Interest of the asset ceiling	-	
Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss	30.418	

- (vi) The movement in the fair value of plan asset are as follows:

	2018	
Beginning balance	88.892	
Results expected from assets	-	
Payment of contributions - employers	1.046	
Payment of contributions - program participants	-	
Payment of employee benefits	(2.562)	
Actuarial gain (loss) on assets	-	
Ending balance	87.376	

- (vii) The calculation of the cost of a defined benefit pension plan recognized in other comprehensive income is as follows:

	2018	
Actuarial gains (losses) on liabilities	-	
Actuarial gains on assets	-	
Recognised in other comprehensive income	-	

- (viii) Measurement of return on liabilities (assets) defined benefit pension plans is as follows:

	2018	
Beginning balance	-	
Actuarial (gains) losses on liabilities	-	
Actuarial (gains) losses on assets	-	
Amount of re-measurement of net defined benefit assets	-	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti

Bank juga memiliki program pensiun imbalan pasti, untuk karyawannya. Bank mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pegawai tetap yang bergabung dengan Bank setelah bulan April 2012, memiliki hak atas program pensiun iuran pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, mana yang lebih tinggi.

Pegawai tetap yang bergabung dengan Bank sebelum bulan April 2012, memiliki hak atas program pensiun manfaat pasti ditambah dengan program pensiun iuran pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, mana yang lebih tinggi.

Beban pensiun iuran pasti yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebesar Rp29.673 dan sebesar Rp24.223 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Pada tahun 2016, Bank melakukan evaluasi perhitungan program pensiun iuran pasti dimana imbalan pegawai dihitung sebesar selisih Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan imbalan pensiun sesuai iuran Bank ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), diluar uang penggantian imbalan yang berkaitan dengan cuti tahunan, ongkos pulang ketempat dimana pegawai diterima bekerja.

- (i) Penilaian aktuarial atas program selisih Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan imbalan pensiun sesuai iuran Bank ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, dilakukan oleh PT Dian Artha Tama dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* sebagaimana yang dijelaskan dalam laporan aktuaris pada tanggal 15 Januari 2020 dan 4 Januari 2019 yaitu sebagai berikut:

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

	2019
Asumsi ekonomi	
Tingkat diskonto	8,00%
Tingkat kenaikan gaji	5,00%
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%
Asumsi lainnya	
Tingkat mortalita	AMT 1949 (Modified)
Usia pensiun normal	58 tahun/years
Tingkat cacat	10% Mortalita
Tingkat pengunduran diri untuk usia:	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/
Usia 18-45 tahun	3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year

50. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Defined contribution pension plan

Bank also has a defined contribution pension plan for its employees. The Bank has a participate permanent employee in defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

The permanent employees who joined the Bank after April 2012, are entitled to benefits under defined contribution plan or the benefits provided for under the Labour Law No.13/2003, whichever is higher.

The permanent employees who joined the Bank prior to April 2012, are entitled to benefits pension plan plus defined contribution pension plan, or the benefits provided for under the Labour Law No.13/2003, whichever is higher.

Defined contribution pension expense that is recorded to profit and loss amounted to Rp29,673 and Rp24,223 for the year ended December 31, 2018 and 2017, respectively.

In year 2016, the Bank evaluates the calculation of defined contribution pension plan where the employees benefit is calculated as the difference between the Labour Law No.13/2003 and defined contribution pension based on contribution Bank to Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), except replacement of annual leave rights, the cost of return to a place where an employee was hired.

- (i) The actuarial calculations of difference program Labour Law No.13/2003 and defined contribution pension based on contribution Bank to Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) for the year ended 31 Desember 2019 and 2018 were prepared by a registered actuarial consulting firm, PT Dian Artha Tama, using the "Projected Unit Credit" method as discussed an independent actuary report dated January 15, 2020 and January 4, 2019, are as follows:

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

2018	Economic assumptions
8,60%	Discount rate
5,00%	Annual salary growth rate
0,00%	Investment yield of plan aset
	Other assumptions
	Mortality table
	Normal retirement age
	Disability rate
	Retirement rate per year for ages:
	18-45 years old
	46-55 years old

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**Program pensiun iuran pasti (lanjutan)**

- (ii) Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2019
Biaya jasa kini	5.268
Biaya bunga neto	6.171
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	11.439

- (iii) Rekonsiliasi atas perubahan (aset) liabilitas imbalan pasca kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2019
Saldo awal	71.755
Beban tahun berjalan	11.439
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	24.448
Pembayaran imbalan	(2.150)
Saldo akhir	105.492

- (iv) Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	2019
Saldo awal	71.755
Biaya jasa kini	5.268
Biaya bunga	6.171
Pembayaran imbalan	(2.150)
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	24.448
Saldo akhir	105.492

- (v) Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto:

	2019
Saldo pada awal tahun	58.448
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	24.448
Saldo akhir	82.896

50. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)**Defined contribution pension plan (continued)**

- (ii) The employee benefit expenses recognized in profit or loss, are as follows:

	2018	
	3.710	Current service cost
	5.524	Interest cost net
	9.234	Expense recognized in statement of profit or loss

- (iii) Following are the reconciliation of the movements of employee benefit (assets) liabilities during the years:

	2018	
	74.651	Beginning balance
	9.234	Current service cost
	(12.021)	Interest cost
	(109)	Actual benefit paid
	71.755	Ending balance

- (iv) The movements in the present value of employee benefit are as follows:

	2018	
	74.651	Beginning balance
	3.710	Current service cost
	5.524	Interest cost
	(109)	Actual benefit paid
	(12.021)	Actuarial gain (losses) on obligation
	71.755	Ending balance

- (v) Remeasurement of net employee benefit (asset) liabilities:

	2018	
	70.469	Balance at beginning of year
	(12.021)	Actuarial gain (losses) on obligation
	58.448	Ending balance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)

Liabilitas atas imbalan pasca kerja lainnya adalah program asuransi tunjangan hari tua yang telah dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan program uang duka sebagai jasa pengabdian.

Imbalan jangka panjang lainnya adalah program penghargaan masa kerja. Imbalan tersebut diberikan kepada pegawai tetap yang jumlahnya sebesar 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali penghasilan terakhir dengan masa kerja 15 tahun, 25 tahun dan 30 tahun.

Bank memberikan uang duka sebagai jasa pengabdian bagi pegawai yang meninggal dunia sebesar nominal yang ditetapkan ditambah dengan 1 (satu) kali penghasilan terakhir serta ditambah 1 (satu) kali penghasilan bulan berikutnya. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

Penilaian aktuarial atas uang duka jasa pengabdian dan penghargaan masa kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dihitung oleh PT Dian Artha Tama dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" sebagaimana tercantum dalam laporan pada tanggal 15 Januari 2020 dan 4 Januari 2019.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

	2019	2018	
Asumsi ekonomi			Economic assumptions
Tingkat diskonto	8,00%	8,60%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%	Annual salary growth rate
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	Investment yield of plan asset
Asumsi lainnya			Other assumptions
Tingkat mortalita	AMT 1949 (Modified)	AMT 1949 (Modified)	Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years	58 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat cacat	10% Mortalita	10% Mortalita	Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			Retirement rate per year for ages:
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linearly until age years old		18-45 years old
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year		46-55 years old

(i) Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2019	
Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion		Program penghargaan masa kerja/ Gratuity for service program
Biaya jasa kini	170	3.415
Biaya bunga neto	148	1.808
Rugi aktuarial	-	2.426
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	318	7.649

50. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Defined contribution pension plan (continued)

The liability for post employee benefits consisted of mutual aid pension insurance plan is managed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero), and employee death benefits program as service devotion.

Other long-term employee benefits is gratuity for service program. The benefits is granted to employees at amount of 2 (two) until 4 (four) last of salary with working service periods of 15 years, 25 years and 30 years.

Bank provides employee death benefit to employees who have passed away at fixed amount plus 1 (one) month salary of his/her last month plus 1 (one) month salary of the following month from his/her death as his/her service devotion. This program is self – managed by the Bank.

The actuarial valuation of employee death benefit program and gratuity for service program for the year ended December 31, 2019 and 2018, were performed by PT Dian Artha Tama, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its report dated January 15, 2020 and January 4, 2019.

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

(i) The employee benefit expenses recognized in profit or loss, are as follows:

	2018	
Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion		Program penghargaan masa kerja/ Gratuity for service program
	217	2.879
	146	1.631
	-	309
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	363	4.819

Current service cost
Oterest cost net
Actuarial loss
Expenses recognized in statement of profit or loss

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan jangka panjang lainnya (lainnya)**

- (ii) Rekonsiliasi atas perubahan liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2019	
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Gratuity for service program
Saldo awal	(1.717)	(21.026)
Beban tahun berjalan	(318)	(7.649)
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	511	-
Pembayaran imbalan kerja	122	5.148
Liabilitas imbalan pasti neto	(1.402)	(23.527)

- (iii) Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	2019	
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Gratuity for service program
Saldo awal	(1.717)	(21.026)
Biaya jasa kini	(170)	(3.415)
Biaya bunga	(148)	(1.808)
Pembayaran imbalan	122	5.148
Kerugian aktuarial pada kewajiban	511	(2.426)
Liabilitas imbalan pasti neto	(1.402)	(23.527)

- (iv) Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja neto:

	2019	
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Gratuity for service program
Saldo pada awal tahun	986	-
Kerugian aktuarial pada kewajiban	(511)	-
Pendapatan komprehensif lain	475	-

50. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)**Post employment benefits and other long-term employee benefits (continued)**

- (ii) Following are the reconciliation of the movements of employee benefit liabilities during the years:

	2018		
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Gratuity for service program	
Saldo awal	(1.979)	(22.036)	Beginning balance
Beban tahun berjalan	(363)	(4.819)	Current year expenses
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	514	-	Remeasurement of employee benefits - net
Pembayaran imbalan kerja	111	5.829	Actual benefit paid
Liabilitas imbalan pasti neto	(1.717)	(21.026)	Liabilities defined benefit - net

- (iii) The movements in the present value of employee benefit are as follows:

	2018		
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Gratuity for service program	
Saldo awal	(1.979)	(22.036)	Beginning balance
Biaya jasa kini	(217)	(2.879)	Current service cost
Biaya bunga	(146)	(1.631)	Interest cost net
Pembayaran imbalan	111	5.829	Actual benefit paid
Kerugian aktuarial pada kewajiban	514	(309)	Actuarial losses on obligation
Liabilitas imbalan pasti neto	(1.717)	(21.026)	Liabilities defined benefit - net

- (iv) Remeasurement of net employee benefit liabilities:

	2018		
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Gratuity for service program	
Saldo pada awal tahun	1.499	-	Balance at beginning of year
Kerugian aktuarial pada kewajiban	(513)	-	Actuarial losses on obligation
Pendapatan komprehensif lain	986	-	Other comprehensive income

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**51. JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN
PEMBAYARAN BANK UMUM**

Berdasarkan Undang-undang No.24 tanggal 22 November 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 November 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.3 (Perppu No. 3/2008) tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Pada tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000 untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 6,25% dan 1,75% dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2019 dan sama dengan atau dibawah 6,75% dan 2,00% dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perppu No.3/2008 menjadi Undang-undang.

Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar oleh Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar Rp114.186 dan Rp95.829.

**51. GOVERNMENT GUARANTEE OF
OBLIGATIONS OF PRIVATE BANKS**

Based on Law No.24 dated November 22, 2004, which was effective on November 22, 2005 and subsequently amended by the Government Regulation-in-Lieu-of Law No.3 (Perppu No. 3/2008) dated October 13, 2008, the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, where the amount of such guarantee can be changed if certain valid criteria are fulfilled.

As of December 31, 2008, based on Government Regulation No. 66 year 2008 dated October 13, 2008 regarding the Amount of Deposits Guaranteed by the Indonesian Deposit Insurance Corporation, the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000 per depositor per bank. Customer deposits are covered only if the rate of interest is equal to or below 6.25% and 1.75% in Rupiah and foreign currency as of December 31, 2019 and equal to or below 6.75% and 2.00% in Rupiah and foreign currency as of December 31, 2018.

On January 13, 2009, the Government of the Republic of Indonesia has stipulated Perppu No.3/2008 to become a law.

The Government guarantee premiums paid by the Bank for years ended December 31, 2019 and 2018, amounted to Rp114,186 and Rp95,829, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

52. PELAPORAN JATUH TEMPO

- a. Pelaporan jatuh tempo aset dan liabilitas menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa (sebelum penyisihan kerugian), adalah sebagai berikut:

2019						
Tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan/ More than 3 months up to 6 months	Lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan/ More than 6 months up to 12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	Jumlah/ Total
ASET						
Kas	-	2.729.776	-	-	-	2.729.776
Giro pada Bank Indonesia	-	354.347	-	-	5.380.180	5.734.527
Giro pada bank lain	-	111.454	-	-	-	111.454
Penempatan pada Bank Indonesia						
dan bank lain	-	10.940.567	1.046.660	-	-	11.987.227
Surat berharga	-					
Biaya perolehan diamortisasi	-	2.676.692	2.847.639	328.826	2.482.456	9.563.071
Surat berharga Repo	-	540.825	497.607	-	-	1.038.432
Tagihan reverse repo	-	5.735.113	102.407	-	-	5.837.520
Tagihan lainnya	-	81.265	-	-	-	81.265
Kredit yang diberikan	-	951.697	1.365.436	1.030.188	1.973.986	33.030.993
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	82	11.630	15.110	11.354	378.244
Beban dibayar dimuka	285.522	-	-	-	-	285.522
Aset tetap - neto	1.023.429	-	-	-	-	1.023.429
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	-	-	481.615	481.615
Aset lain-lain	52.866	-	-	-	-	52.866
Jumlah	1.361.817	24.121.818	5.871.379	1.374.124	41.753.488	77.695.424
LIABILITAS						
Liabilitas segera	-	357.565	-	-	-	357.565
Simpanan dari nasabah	-	14.045.814	3.735.547	2.391.032	3.851.073	60.545.872
Simpanan dari bank lain	-	2.575.500	312.370	60	500	2.888.430
Pinjaman yang diterima	-	1.328.313	3.144	2.729	118.205	1.870.246
Utang pajak	63.766	-	-	-	-	63.766
Beban yang masih harus dibayar	-	433.507	-	-	-	433.507
Liabilitas lain-lain	-	333.158	-	-	-	333.158
Jumlah	63.766	19.073.857	4.051.061	2.393.821	3.969.778	66.482.544
Perbedaan jatuh tempo	1.298.051	5.047.961	1.820.318	(1.019.697)	4.813.227	11.202.880
2018						
Tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan/ More than 3 months up to 6 months	Lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan/ More than 6 months up to 12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	Jumlah/ Total
ASET						
Kas	-	1.913.960	-	-	-	1.913.960
Giro pada Bank Indonesia	-	827.991	-	-	3.247.947	4.075.938
Giro pada bank lain	-	97.287	-	-	-	97.287
Penempatan pada Bank Indonesia						
dan bank lain	-	13.340.042	9.500	-	-	13.349.542
Surat berharga	-					
Biaya perolehan diamortisasi	-	1.156.213	834.886	2.256.336	1.439.239	7.791.958
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	566.891	-	-	-	566.891
Tagihan lainnya	-	34.069	-	-	-	34.069
Kredit yang diberikan	-	1.197.365	1.084.713	997.832	1.981.899	28.631.428
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	82	11.630	15.110	11.354	335.165
Beban dibayar dimuka	308.418	-	-	-	-	308.418
Aset tetap - neto	972.057	-	-	-	-	972.057
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	-	-	467.788	467.788
Aset lain-lain	46.012	-	-	-	-	46.012
Jumlah	1.326.487	19.133.900	1.940.729	3.269.278	3.432.492	63.890.498
LIABILITAS						
Liabilitas segera	-	504.438	-	-	-	504.438
Simpanan dari nasabah	-	11.732.385	3.246.451	2.072.772	3.273.287	50.915.931
Simpanan dari bank lain	-	721.411	11.937	1.260	500	735.108
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	566.699	-	-	-	566.699
Pinjaman yang diterima	-	725.563	-	-	-	725.563
Utang pajak	149.441	-	-	-	-	149.441
Beban yang masih harus dibayar	-	398.536	-	-	-	398.536
Liabilitas lain-lain	-	221.466	-	-	-	221.466
Jumlah	149.441	14.870.498	3.258.388	2.074.032	3.273.787	54.217.182
Perbedaan jatuh tempo	1.177.046	4.263.402	(1.317.659)	1.195.246	4.196.576	9.673.316

- b. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aset produktif pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing adalah sebesar 2,82% dan 3,18%.

52. MATURITY PROFILE

- a. The maturity of the Bank's assets and liabilities based on the remaining period (before allowance for impairment losses), is as follows:

2019						
Tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan/ More than 3 months up to 6 months	Lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan/ More than 6 months up to 12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	Jumlah/ Total
ASSETS						
Cash	-	2,729,776	-	-	-	2,729,776
Current accounts with Bank Indonesia	-	354,347	-	-	5,380,180	5,734,527
Current accounts with other banks	-	111,454	-	-	-	111,454
Placement with Bank Indonesia						
and other banks	-	10,940,567	1,046,660	-	-	11,987,227
Marketable securities	-					
Amortized cost	-	2,676,692	2,847,639	328,826	2,482,456	9,563,071
Repo marketable securities	-	540,825	497,607	-	-	1,038,432
Reverse repo receivables	-	5,735,113	102,407	-	-	5,837,520
Other receivables	-	81,265	-	-	-	81,265
Loans	-	951,697	1,365,436	1,030,188	1,973,986	33,030,993
Interest receivables	-	82	11,630	15,110	11,354	378,244
Prepaid expense	285,522	-	-	-	-	285,522
Fixed assets - net	1,023,429	-	-	-	-	1,023,429
Deferred tax assets - net	-	-	-	-	481,615	481,615
Other assets	52,866	-	-	-	-	52,866
Total	1,361,817	24,121,818	5,871,379	1,374,124	41,753,488	77,695,424
LIABILITIES						
Obligations due immediately	-	357,565	-	-	-	357,565
Deposits from customer	-	14,045,814	3,735,547	2,391,032	3,851,073	60,545,872
Deposits from other banks	-	2,575,500	312,370	60	500	2,888,430
Borrowings	-	1,328,313	3,144	2,729	118,205	1,870,246
Taxes payables	63,766	-	-	-	-	63,766
Accrued expense	-	433,507	-	-	-	433,507
Other liabilities	-	333,158	-	-	-	333,158
Total	63,766	19,073,857	4,051,061	2,393,821	3,969,778	66,482,544
Maturity Gap	1,298,051	5,047,961	1,820,318	(1,019,697)	4,813,227	11,202,880
2018						
Tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan/ More than 3 months up to 6 months	Lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan/ More than 6 months up to 12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	Jumlah/ Total
ASSETS						
Cash	-	1,913,960	-	-	-	1,913,960
Current accounts with Bank Indonesia	-	827,991	-	-	3,247,947	4,075,938
Current accounts with other banks	-	97,287	-	-	-	97,287
Placement with Bank Indonesia						
and other banks	-	13,340,042	9,500	-	-	13,349,542
Marketable securities	-					
Amortized cost	-	1,156,213	834,886	2,256,336	1,439,239	7,791,958
Marketable securities sold under repurchased agreement	-	566,891	-	-	-	566,891
Other receivables	-	34,069	-	-	-	34,069
Loans	-	1,197,365	1,084,713	997,832	1,981,899	28,631,428
Interest receivables	-	82	11,630	15,110	11,354	335,165
Prepaid expense	308,418	-	-	-	-	308,418
Fixed assets - net	972,057	-	-	-	-	972,057
Deferred tax assets - net	-	-	-	-	467,788	467,788
Other assets	46,012	-	-	-	-	46,012
Total	1,326,487	19,133,900	1,940,729	3,269,278	3,432,492	63,890,498
LIABILITIES						
Obligations due immediately	-	504,438	-	-	-	504,438
Deposits from customer	-	11,732,385	3,246,451	2,072,772	3,273,287	50,915,931
Deposits from other banks	-	721,411	11,937	1,260	500	735,108
Liabilities of marketable securities sold under repurchased agreement	-	566,699	-	-	-	566,699
Borrowings	-	725,563	-	-	-	725,563
Taxes payables	149,441	-	-	-	-	149,441
Accrued expense	-	398,536	-	-	-	398,536
Other liabilities	-	221,466	-	-	-	221,466
Total	149,441	14,870,498	3,258,388	2,074,032	3,273,787	54,217,182
Maturity Gap	1,177,046	4,263,402	(1,317,659)	1,195,246	4,196,576	9,673,316

- b. The ratio of classified earning assets to total productive assets as of December 31, 2019 and 2018 is 2.82% and 3.18% respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

53. INFORMASI KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH

	2019
ASET	
Kas	26.574
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	328.298
Surat berharga	632.545
Piutang:	
- Murabahah	678.335
- Qardh	24.431
Dikurangi: Penyisihan kerugian kerugian penurunan nilai	(14.442)
Piutang, neto	688.324
Pembiayaan:	
- Musyarakah	543.839
- Mudharabah	154.989
Dikurangi: Penyisihan kerugian kerugian penurunan nilai	(30.195)
Pembiayaan, neto	668.633
Aset ijarah	239
Aset tetap	42.693
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(18.856)
Nilai buku neto	23.837
Aset lain-lain	17.683
JUMLAH ASET	2.386.133
LIABILITAS, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
Giro wadiah	171.092
Tabungan wadiah	-
Liabilitas segera	11.116
Liabilitas lainnya	656.403
JUMLAH LIABILITAS	838.611
INVESTASI TIDAK TERIKAT	
Tabungan mudharabah	535.173
Deposito berjangka mudharabah	1.009.629
JUMLAH INVESTASI TIDAK TERIKAT	1.544.802
Laba neto	2.720
JUMLAH LIABILITAS, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS	2.386.133

53. SHARIA UNIT FINANCIAL INFORMATION

	2018
ASSETS	
Cash	20.790
Placements with Bank Indonesia and other banks	158.102
Marketable securities	912.215
Receivables:	
Murabahah -	573.966
Qardh -	30.485
Less: Allowance for impairment losses	(12.192)
Receivables, net	592.259
Financing:	
Musyarakah -	343.985
Mudharabah -	170.911
Less: Allowance for impairment losses	(13.187)
Financing, net	501.709
Ijarah assets	316
Fixed assets	43.789
Less: Accumulated depreciation	(16.187)
Net book value	27.602
Other assets	20.968
TOTAL ASSETS	2.233.961
LIABILITIES, UNCOMMITTED INVESTMENT AND EQUITY	
LIABILITIES	
Wadiah current accounts	124.621
Wadiah savings	36.735
Obligations due immediately	9.581
Other liabilities	534.013
TOTAL LIABILITIES	704.950
UNCOMMITTED INVESTMENT	
Mudharabah savings	299.936
Mudharabah time deposits	1.229.256
TOTAL UNCOMMITTED INVESTMENT	1.529.192
Net income	(181)
TOTAL LIABILITIES, UNCOMMITTED INVESTMENT AND EQUITY	2.233.961

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**53. INFORMASI KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH
(lanjutan)**

	2019
LAPORAN LABA RUGI	
Pendapatan operasional	
- Margin	65.185
- Bagi hasil	77.764
- Sewa	386
- Operasional Lainnya	71.411
Jumlah pendapatan operasional	214.746
Beban bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat	
- Bank	(672)
- Bukan bank	(76.240)
Jumlah bagi hasil	(76.912)
Beban operasional lainnya	
- Bonus	(850)
- Penyisihan kerugian penurunan nilai	(37.434)
- Beban administrasi dan umum	(40.169)
- Beban personalia	(48.410)
- Beban lainnya	(8.679)
Jumlah beban operasional	(135.542)
Pendapatan (beban) operasional bersih	2.292
Beban non operasional bersih	428
Lab a (rugi) tahun berjalan	2.720

54. ASET/LIABILITAS KONTINJENSI

Bank saat ini mempunyai aset/liabilitas kontinjensi yang signifikan terkait dengan beberapa perkara perdata sebagai berikut:

- 1) Perkara perdata No.584/Pdt.G/2007/Pn.Sby tanggal 21 November 2007 tentang gugatan PT Hikmah Surya Jaya kepada Bank untuk memenuhi ganti rugi materiil atas kredit dana bergulir sebesar Rp3.000. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) memutuskan pihak Bank menang. Bank telah mengirimkan surat No.057/0865/HKM/LIT/LEGAL/SRT tanggal 3 Juli 2018 dan diterima PN tanggal 6 Juli 2018. Masih menunggu jawaban surat dari PN untuk kepastian *inkracht* putusan PT tersebut.
- 2) Perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Sit tanggal 9 Januari 2018 tentang gugatan Ermi Indarti (Penggugat I), Totok Sunarto (Penggugat II), kepada Bank dengan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp10.000, gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait peralihan hak atas tanah melalui hibah. Saat ini dalam proses persidangan Kasasi di Mahkamah Agung.
- 3) Perkara perdata Nomor 61/Pdt.Bth/2018/PN.Kpn tanggal 28 Maret 2018 Bank menggugat KH Achmad Mujjayid (Tergugat I), Sayyidatul Khotijah Gini (Tergugat II) dan BPN Kabupaten Malang (Turut Tergugat) dengan nilai materiil gugatan sebesar Rp4.720, alasan gugatan karena hutang debitur macet dan Bank tidak dapat melakukan lelang barang jaminan kredit karena diletakan sita eksekusi oleh pihak ketiga. Saat ini dalam proses persidangan Kasasi di Mahkamah Agung.

**53. SHARIA UNIT FINANCIAL INFORMATION
(continued)**

	2018
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS	
Operating income	
- Margin	62.079
- Profit sharing	67.589
- Rents	411
- Other operating	55.085
Total operational income	185.164
Profit sharing expenses to non-restricted investors fund	
- Bank	(807)
- Non bank	(81.354)
Total profit sharing	(82.161)
Other operating expenses	
- Bonuses	(636)
- Allowance for impairment losses	(11.814)
- General and administrative expenses	(37.396)
- Personnel expenses	(44.899)
- Others	(8.426)
Total other operating expenses	(103.171)
Net operating income	(168)
Non-operating expenses - net	(13)
Profit (loss) during the year	(181)

54. CONTINGENT ASSETS/LIABILITIES

The Bank currently has significant contingent assets/liabilities in connection with several civil cases as follows:

- 1) Case No.584/Pdt.G/2007/Pn.Sby dated November 21st, 2007 about the lawsuit of PT Hikmah Surya Jaya towards Bank, demanding compensation to the amount of Rp3,000 regarding revolving credit. The District Court's and the Appellate Court's decide that Bank won. Bank Jatim has sent a letter number 057/0865/HKM/LIT/LEGAL/SRT on July 3rd, 2018 and received by the District Court on July 6th, 2018. Still waiting for a response from the District Court's for the *inkracht* certainty of the Appellate Court's decision.
- 2) Case No.2/Pdt.G/2018/PN.Sit on 9th January 2018 on the lawsuit of Ermi Indarti and Totok Sunarto towards Bank in the amount of Rp10,000 material losses. The lawsuit of act against the law which is about the transfer of land rights through grants currently in the Cassation trial process in the Supreme Court.
- 3) Case No.61/Pdt.Bth/2018/PN.Kpn on 26th March 2018, Bank sue KH Achmad Mujjayid, Sayyidatul Khotijah Gini and Malang District Land Office with the materiil amount of the sue approximately around Rp4,720. the reason of the sue is because the debtor's debt has stalled and Bank can't doing auction of credit guarantee goods because it has been placed seized execution by third party. currently in the Cassation trial process in the Supreme Court.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

54. ASET/LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

- 4) Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.BJN tanggal 18 Mei 2018 tentang gugatan Hj. Ani Rufa`ida, Drs. H Mahruhin Irfan MSi, kepada Bank dengan tuntutan kerugian material sebesar Rp.4.032, Penggugat mengajukan gugatan untuk memberhentikan proses lelang. Saat ini dalam proses persidangan Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya.
- 5) Perkara Kepailitan Nomor 40/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Sby dengan pemohon PT Fatma Lestari Abadi Mix dan CV. Azka Pelangi Bersaudara terhadap PT Citra Gading Asritama. Bank sebagai kreditur mengajukan tagihan kepada Kurator atas kredit PT Citra Gading Asritama (dalam pailit) sebesar Rp31.503 saat ini dalam proses verifikasi berkas kreditur di Pengadilan Niaga Surabaya.
- 6) Perkara Perdata No. 1048/Pdt.G/2019/PN.SBY tanggal 23 Oktober 2019 gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Bank melawan PT Pan Pacific Insurance dengan tuntutan kerugian sebesar Rp108.255 atas klaim kontra bank garansi jaminan uang muka Bank. Saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.
- 7) Perkara perdata lainnya dengan nilai gugatan masing-masing dibawah Rp3.000 sejumlah Rp23.190.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa penyelesaian kasus-kasus tersebut tidak mengganggu kinerja Bank dan karenanya manajemen berpendapat tidak perlu dibentuk penyisihan.

54. CONTINGENT ASSETS/LIABILITIES (continued)

- 4) Case No.13 / Pdat.G / 2018 / PN.BJN dated May 18, 2018 regarding the lawsuit Hj. Ani Rufa`ida, Drs. H Mahruhin Irfan MSi, to Bank with the demands of material loss amounting to Rp.4.032, Plaintiff filed a lawsuit to dismiss the auction process. Currently on trial process of Appeals in the Surabaya High Courts
- 5) Bankruptcy Case Number 40/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Sby with the pleader PT Fatma Lestari Abadi Mix and CV. Azka Pelangi Bersaudara towards PT Citra Gading Asritama. Bank as a creditor submits a bill to the Curator for the credit of PT Citra Gading Asritama (in bankruptcy) of Rp31,503 currently in the process of creditor file verification at the Surabaya Commercial Court.
- 6) Civil Case No. 1048/Pdt.G/2019/PN.SBY dated October 23, 2019 a breach of contract filed by Bank against PT. Pan Pacific Insurance with a loss claim Rp108,255 for claims of Bank advance payment counter guarantee bank currently in the trial process at the Surabaya District Court.
- 7) Other civil cases with a value of each lawsuit demands under Rp3,000 amount to Rp23,190.

The Bank's management believes that the above cases doesn't interfere to the Bank performances, and accordingly the management has the opinion that no provision for possible losses is required.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

55. BANK KUSTODIAN

Jasa Kustodian Bank mendapatkan ijin operasi oleh OJK berdasarkan surat OJK nomor: S-4/PM.2/2019 tanggal 29 Januari 2019. Bank Kustodian merupakan bagian dari Divisi Hubungan Kelembagaan & Bisnis, Sub Divisi Priority Banking & Kustodian, adapun Jasa-jasa yang diberikan diantaranya:

- 1) Penyimpanan (*safekeeping*) dan administrasi atas Efek-efek maupun dokumen berharga lainnya;
- 2) Penyelesaian transaksi jual dan beli Efek berbentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scriptless*);
- 3) Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan Efek-efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah (*corporate action*);
- 4) Perwakilan (*proxy*) pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi;
- 5) *Sub-Registry* untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi Efek;
- 6) Penyampaian laporan (*reporting*) dan informasi (*information*) yang terkait dengan Efek-efek dan/atau dokumen berharga milik nasabah yang disimpan dan diadministrasikan oleh Bank Jatim Kustodian.

56. STANDAR AKUNTANSI BARU

Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) yang relevan untuk Bank, tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019:

Berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, penerapan dini diperkenankan:

- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Sebuah standar untuk pengakuan penghasilan telah diterbitkan. Standar ini akan menggantikan PSAK 23 yang mengatur kontrak untuk barang dan jasa dan PSAK 34 yang mengatur kontrak konstruksi. Standar baru ini didasarkan oleh prinsip bahwa penghasilan diakui ketika kontrol atas barang atau jasa dialihkan ke pelanggan.
- PSAK 73 "Sewa" disahkan di September 2017. Hal ini akan berdampak pada hampir seluruh sewa yang diakui di laporan posisi keuangan, karena perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan dihapuskan. Dalam standar yang baru, sebuah aset (hak guna atas barang yang disewakan) dan liabilitas keuangan untuk membayar sewa diakui. Pengecualian hanya terdapat pada sewa jangka pendek dan yang bernilai rendah.

55. BANK CUSTODY

Bank Custodian Services has obtained an operating license based on the letter of OJK number: S-4/PM.2/2019 date 29 Januari 2019. Bank's Custodian, which is part of the Institutional & Business Relations, Priority Banking & Custodian Sub-Divisions, provides a full range of custodian services such as:

- 1) *Safekeeping and administration of marketable securities and other valuable assets;*
- 2) *Settlement and handling services for script and scriptless trading transactions;*
- 3) *Corporate action services related to the rights of the marketable securities;*
- 4) *Proxy services for its customers' shareholder meetings and bond holder meetings;*
- 5) *Sub-Registry service provider for securities settlement and investment;*
- 6) *Generate reports and information regarding customers' marketable securities which are kept and administered by Bank Jatim's Custodian Unit.*

56. NEW ACCOUNTING STANDARDS

The following summarizes the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) which were issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK IAI) and are relevant to the Bank, but not yet effective for the financial statement for the year ended December 31, 2019:

Effective on or after January 1, 2020, early adoption is permitted:

- PSAK 72 "Revenue from Contract with Customer". A new standard for the recognition of revenue has been issued. This will replace PSAK 23 which covers contracts for goods and services and PSAK 34 which covers construction contracts. The new standard is based on the principle that revenue is recognized when control of a good or service transfers to a customer.
- PSAK 73 "Leases" was issued in September 2017. It will result in almost all leases being recognized on the statement of financial position, as the distinction between operating and finance leases is removed. Under the new standard, an asset (the right to use the leased item) and a financial liability to pay rentals are recognized. The only exceptions are shortterm and low-value leases.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

56. STANDAR AKUNTANSI BARU

- Amendemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama" tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. Amendemen atas PSAK 15 ini menjelaskan entitas memperhitungkan kepentingan jangka panjang pada perusahaan asosiasi atau ventura bersama, dimana akuntansi ekuitas tidak digunakan, menggunakan PSAK 71 "Instrumen Keuangan".

Saat ini Bank sedang mengevaluasi dampak dari penerapan standar tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

57. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 30 Januari 2020.

56. NEW ACCOUNTING STANDARDS

- *Amendments to PSAK 15 "Investments in Associates and Joint Ventures" regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures. The amendment to PSAK 15 clarifies that companies account for long-term interests in an associate or joint venture, to which the equity method is not applied, using PSAK 71 "Financial Instruments".*

The Bank is currently evaluating the impact of these standard on the financial statement of the Bank.

57. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements were completed and authorized for issuance by the Bank's Directors on January 30, 2020.

20
19

LAPORAN TAHUNAN
Annual report

▶ **"CAPTURING
OPPORTUNITIES TO
PROVIDE ADDED VALUES
TOWARDS SUSTAINABLE
EXCELLENT PERFORMANCE"**

Menjaring Peluang untuk Memberikan
Nilai Tambah Menuju Kinerja Terbaik
yang Berkelanjutan"

bankjatim 

KANTOR PUSAT

Jl. Basuki Rachmat No. 98-104 Surabaya 60271

Telp. (031) 5310090 - 99

Fax. (031) 5310838

Email : info@bankjatim.co.id

